BUKU I

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

NOMOR : 3 TAHUN 2024

TANGGAL : 27 AGUSTUS 2024

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR ISI

BUKU I

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2023

RINGKASAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2023 ..... 1 – 15

LAMPIRAN I: LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAMPIRAN I.1: RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI ..... 16 – 23

LAMPIRAN I.2: RINCIAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN ..... 24 – 26

LAMPIRAN I.3: RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN ..... 27 – 308

LAMPIRAN I.4: REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN ..... 309 – 432

LAMPIRAN II: LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 433

LAMPIRAN III : LAPORAN OPERASIONAL ..... 434 – 435

LAMPIRAN IV : LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 436

LAMPIRAN V : NERACA ..... 437 – 438

LAMPIRAN VI : LAPORAN ARUS KAS ..... 439 – 440

DAFTAR ISI

BUKU II

LAMPIRAN VII : CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ..... 441 – 820

LAMPIRAN VIII : DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH ..... 821 – 823

LAMPIRAN IX : DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH 824

LAMPIRAN X : DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR 825

LAMPIRAN XI : DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH 826

LAMPIRAN XII : DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH 827

LAMPIRAN XIII : DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP 828

LAMPIRAN XIV : DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN ..... 829 – 830

LAMPIRAN XV : DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA ..... 831 – 832

LAMPIRAN XVI : DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH 833

LAMPIRAN XVII : DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 834

LAMPIRAN XVIII : DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 835

LAMPIRAN XIX : DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA 836

LAMPIRAN XX : IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH

LAMPIRAN XX.I : IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH 837

LAMPIRAN XX.2 : IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH 838



WALI KOTA PEKANBARU

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
dan
WALI KOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah atau disebut Kota adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

8. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
9. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
10. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut kebijakan akuntansi, terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan-PPKD yang selanjutnya disingkat PPK-PPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan atas transaksi keuangan PPKD.
16. Entitas pelaporan merupakan Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
17. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.
18. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
   a. laporan realisasi anggaran;
   b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
   c. neraca;
   d. laporan operasional;
   e. laporan arus kas;
   f. laporan perubahan ekuitas; dan
   g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

BAB III

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp	2.753.144.818.421,38
b.	Belanja	Rp	2.748.798.260.184,38
	Surplus/defisit	Rp	4.346.558.237,00
c.	Pembiayaan		
	- Penerimaan Pembiayaan	Rp	14.688.259.191,91
	- Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp	4.688.259.191,91
d.	SiLPA	Rp	9.034.817.428,91

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp164.827.514.225,62 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan	Rp	2.917.972.332.647,00
b. Realisasi	Rp	2.753.144.818.421,38
c. Selisih	Rp	164.827.514.225,62

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp163.862.331.653,62 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja	Rp	2.912.660.591.838,00
b. Realisasi	Rp	2.748.798.260.184,38
c. Selisih	Rp	163.862.331.653,62

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp965.182.572,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisit	Rp	5.311.740.809,00
b. Realisasi	Rp	4.346.558.237,00
c. Selisih	Rp	965.182.572,00

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(0,91)dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan	Rp	14.688.259.191,00
b. Realisasi	Rp	14.688.259.191,91
c. Selisih	(Rp	0,91)

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp20.000.000.000,00dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp	20.000.000.000,00
b. Realisasi	Rp	10.000.000.000,00
c. Selisih	Rp	10.000.000.000,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp10.000.000.000,91) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto	(Rp	5.311.740.809,00)
b. Realisasi	Rp	4.688.259.191,91
c. Selisih	(Rp	10.000.000.000,91)

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	14.688.259.191,91
b. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran - (SiLPA/SiKPA)	Rp	9.034.817.428,91
c. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	9.034.817.428,91

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

Jumlah aset	Rp	8.305.159.239.962,61
Jumlah kewajiban	Rp	163.791.180.472,93
Jumlah ekuitas	Rp	8.141.368.059.489,68

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Jumlah pendapatan	Rp	3.029.957.898.901,93
Jumlah beban	Rp	2.809.977.046.774,09
Jumlah surplus/defisit dari operasi	Rp	219.980.852.127,84
Jumlah surplus non operasional	Rp	1.227.662.280,22
Jumlah defisit non operasional	Rp	19.561.956.148,12
Jumlah pendapatan luar biasa	Rp	0,00
Jumlah beban luar biasa	Rp	0,00
Surplus/defisit-LO	Rp	201.646.558.259,94

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

BOS per 1 Januari 2023	Rp	15.305.859.685,91
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	317.959.888.460,88
Arus kas dari aktivitas investasi	(Rp	323.613.330.223,88)
Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	00,00
Arus kas dari aktivitas transitoris	(Rp	294.867.385,70)
Saldo akhir kas di BUD, BLUD dan Bendahara saldo akhir kas per 31 Desember 2023	Rp	9.357.550.537,21

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

Jumlah Ekuitas Awal	Rp	7.961.906.980.791,96
Jumlah Surplus/Defisit LO	Rp	201.646.558.259,94
Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(Rp	22.185.479.562,22)
Jumlah Ekuitas Akhir	Rp	8.141.368.059.489,68

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Terdiri Atas :
   - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;
   - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;

	Lampiran I.3	:	Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Dan Jenis Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
	Lampiran I.4	:	Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
b.	Lampiran II	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.	Lampiran III	:	Laporan Operasional;
d.	Lampiran IV	:	Laporan Perubahan Ekuitas;
e.	Lampiran V	:	Neraca;
f.	Lampiran VI	:	Laporan Arus Kas;
g.	Lampiran VII	:	Catatan atas Laporan Keuangan;
h.	Lampiran VIII	:	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.	Lampiran IX	:	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
j.	Lampiran X	:	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k.	Lampiran XI	:	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
l.	Lampiran XII	:	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m.	Lampiran XIII	:	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n.	Lampiran XIV	:	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
o.	Lampiran XV	:	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p.	Lampiran XVI	:	Daftar Dana Cadangan Daerah;
q.	Lampiran XVII	:	Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.	Lampiran XVIII	:	Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s.	Lampiran XIX	:	Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2023 Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
t.	Lampiran XX	:	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
	Lampiran XX.1	:	Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 12

(1) Wali Kota membuat penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapetan dan Belanja Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,

RISNANDAR MAHIWA

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

INDRA POMI NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 NOMOR
NO. REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU NOMOR
URUT PERDA (1.38.A/2024)

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Sesuai dengan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, Ayat (2) menyatakan Laporan Keuangan dimaksud paling sedikit meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan untuk menyajikan informasi mengenai posisi Laporan Keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Pengguna laporan terdiri dari Masyarakat, Legislatif, Lembaga Pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi dan pinjaman serta Pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi).

Laporan Realisasi Anggaran adalah Laporan yang menggambarkan penerimaan pendapatan melalui Rekening Kas umum Daerah, merupakan penambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota

Pekanbaru dan tidak perlu dibayarkan kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 3

LAMPIRAN I

LAMPIRAN I.1

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
				Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
			PENDAPATAN	2.917.972.332.647,00	2.753.144.818.421,38	164.827.514.225,62	0,06
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	53.995.491.818,00	46.113.247.747,71	7.882.244.070,29	0,15
	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	36.881.691.818,00	32.507.331.207,71	4.374.360.610,29	0,12
		1.02.0.00.0.00.01	Dinas Kesehatan	36.881.691.818,00	32.507.331.207,71	4.374.360.610,29	0,12
	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15.800.000.000,00	12.344.457.200,00	3.455.542.800,00	0,22
		1.03.0.00.0.00.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.800.000.000,00	12.344.457.200,00	3.455.542.800,00	0,22
	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	313.800.000,00	346.600.000,00	32.800.000,00	-0,10
		1.04.0.00.0.00.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	313.800.000,00	346.600.000,00	32.800.000,00	-0,10
	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.000.000.000,00	914.859.340,00	85.140.660,00	0,09
		1.05.0.00.0.00.06	Dinas Penadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.000.000.000,00	914.859.340,00	85.140.660,00	0,09
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	67.642.075.022,00	30.597.084.322,00	37.044.990.700,00	0,55
	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	32.746.985.792,00	4.386.567.790,00	28.360.418.002,00	0,87
		2.11.0.00.0.00.12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	32.746.985.792,00	4.386.567.790,00	28.360.418.002,00	0,87
	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.000.000.000,00	41.200.000,00	1.958.800.000,00	0,98
		2.12.0.00.0.00.03	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.000.000.000,00	41.200.000,00	1.958.800.000,00	0,98
	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	30.778.175.053,00	24.537.818.840,00	6.232.356.213,00	0,20
			Dinas Perhubungan	30.778.175.053,00	24.537.818.840,00	6.232.356.213,00	0,20
	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.124.914.177,00	1.631.497.692,00	493.416.485,00	0,23
		2.16.2.20.2.21.04	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.124.914.177,00	1.631.497.692,00	493.416.485,00	0,23
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.114.910.000,00	1.708.449.500,00	406.460.500,00	0,19
	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	650.000.000,00	574.546.300,00	75.453.700,00	0,12
		3.27.3.25.0.00.01	Dinas Pertanian dan Perikanan	650.000.000,00	574.546.300,00	75.453.700,00	0,12
	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.464.910.000,00	1.133.903.200,00	331.006.800,00	0,23
		3.30.3.31.0.00.12	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.464.910.000,00	1.133.903.200,00	331.006.800,00	0,23
A			URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.794.219.855.807,00	2.674.726.036.951,67	119.493.818.955,33	0,04
	01		KEUANGAN	2.794.219.855.807,00	2.674.726.036.951,67	119.493.818.955,33	0,04
		5.02.0.00.0.00.02	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	1.947.498.115.156,00	1.884.317.132.016,67	63.180.983.139,33	0,03
		5.02.0.00.0.00.03	Badan Pendapatan Daerah	846.721.740.651,00	790.408.904.835,00	56.312.835.816,00	0,07
			BELANJA	2.912.660.591.338,00	2.748.798.260.184,38	163.862.331.653,62	0,06
	01		Pendidikan	703.183.862.648,80	686.902.654.970,76	16.281.207.677,24	0,02
		1.01.0.00.0.00.01	Dinas Pendidikan	703.183.862.648,80	686.902.654.970,76	16.281.207.677,24	0,02
			BELANJA OPERASI	618.066.940.820,00	603.158.306.744,42	14.908.634.075,58	0,02
			Belanja Pegawai	405.027.763.048,00	395.286.269.340,00	9.741.493.708,00	0,02
			Belanja Barang dan Jasa	146.546.842.184,00	141.056.309.924,42	5.490.532.559,58	0,04
			Belanja Bunga	-	-	-	-
			Belanja Subsidi	-	-	-	-
			Belanja Hibah	66.492.335.187,00	66.816.327.580,00	323.992.193,00	-0,00
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
			BELANJA MODAL	85.116.921.328,00	83.744.348.226,34	1.372.573.681,66	0,02
			BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
			BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
	02		Kesehatan	327.118.662.321,00	304.641.528.482,71	22.476.933.838,29	0,07
		1.02.0.00.0.00.01	Dinas Kesehatan	327.118.662.321,00	304.641.528.482,71	22.476.933.838,29	0,07
			BELANJA OPERASI	309.452.959.454,00	278.687.520.310,62	21.765.439.143,38	0,07
			Belanja Pegawai	151.590.072.954,00	144.925.959.909,00	6.665.112.945,00	0,04
			Belanja Barang dan Jasa	148.003.886.600,00	133.253.570.401,62	14.750.316.198,38	0,10
			Belanja Bunga	-	-	-	-
			Belanja Subsidi	-	-	-	-
			Belanja Hibah	850.000.000,00	500.000.000,00	350.000.000,00	0,41
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
			BELANJA MODAL	26.665.702.867,00	25.954.208.172,09	711.494.694,91	0,02
			BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
			BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
	03		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	333.938.492.804,00	318.178.804.048,48	15.759.678.755,52	0,04

		[illegible]	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	332.539.664.804,00	313.175.896.048,45	19.363.670.755,55	0,06
			BELANJA OPERASI	281.112.083.350,00	263.977.095.188,00	17.134.988.162,00	0,06
			Belanja Pegawai	9.997.920.948,00	9.073.106.560,00	924.814.388,00	0,09
			Belanja Barang dan Jasa	271.114.162.402,00	254.903.988.628,00	16.210.173.774,00	0,06
			Belanja Bunga	-	-	-	-
			Belanja Subsidi	-	-	-	-
			Belanja Hibah	-	-	-	-
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
			BELANJA MODAL	51.427.481.454,00	49.198.799.860,45	2.228.681.593,55	0,04
			BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
			BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
	04		Perumahan dan Kawasan Permukiman	168.724.899.198,00	160.309.274.816,00	8.415.624.382,00	0,05
		1.04.0.00.1.00.01.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	168.724.899.198,00	160.309.274.816,00	8.415.624.382,00	0,05
			BELANJA OPERASI	47.938.551.498,00	44.637.236.816,00	3.301.314.682,00	0,07
			Belanja Pegawai	5.593.745.426,00	5.330.425.885,00	263.319.541,00	0,05
			Belanja Barang dan Jasa	42.324.806.072,00	39.286.810.131,00	3.037.996.941,00	0,07
			Belanja Bunga	-	-	-	-
			Belanja Subsidi	-	-	-	-
			Belanja Hibah	-	-	-	-
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
			BELANJA MODAL	120.806.348.700,00	115.691.038.000,00	5.114.539.900,00	0,04
			BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
			BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
	05		Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	66.273.918.087,00	62.818.699.946,00	3.455.218.141,00	0,05
		1.05.0.00.0.00.01.	Satuan Polisi Pamong Praja	24.889.533.329,00	23.562.488.603,00	1.326.344.726,00	0,05
			BELANJA OPERASI	24.889.533.329,00	23.562.488.603,00	1.326.144.726,00	0,05
			Belanja Pegawai	9.756.928.880,00	9.328.467.304,00	428.461.576,00	0,04
			Belanja Barang dan Jasa	15.131.604.449,00	14.244.021.299,00	887.583.150,00	0,06
			Belanja Bunga	-	-	-	-
			Belanja Subsidi	-	-	-	-
			Belanja Hibah	-	-	-	-
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
			BELANJA MODAL	-	-	-	-
			BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
			BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
		1.05.0.00.0.00.04.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.727.618.889,00	13.989.061.252,00	738.557.637,00	0,05
			BELANJA OPERASI	14.109.224.289,00	13.389.478.052,00	719.746.237,00	0,05
			Belanja Pegawai	4.472.411.446,00	4.264.689.434,00	207.722.012,00	0,05
			Belanja Barang dan Jasa	9.636.812.843,00	9.124.788.618,00	512.024.225,00	0,05
			Belanja Bunga	-	-	-	-
			Belanja Subsidi	-	-	-	-
			Belanja Hibah	-	-	-	-
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
			BELANJA MODAL	618.394.100,00	599.583.200,00	18.811.400,00	0,03
			BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
			BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
		1.05.0.00.0.00.06.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	26.657.765.869,00	25.267.150.891,00	1.390.615.778,00	0,05
			BELANJA OPERASI	22.691.441.369,00	21.494.510.091,00	1.196.931.278,,00	0,05
			Belanja Pegawai	6.831.282.932,00	6.494.938.670,00	336.344.262,00	0,05
			Belanja Barang dan Jasa	15.860.158.937,00	14.999.571.421,00	860.587.516,00	0,05
			Belanja Bunga	-	-	-	-
			Belanja Subsidi	-	-	-	-
			Belanja Hibah	-	-	-	-
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
			BELANJA MODAL	3.966.324.500,00	3.772.640.800,00	193.684.000,00	0,05
			BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
			BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
	06		Sosial	16.276.331.397,00	13.983.286.926,00	2.293.044.271,00	0,14
		1.06.0.00.0.01.01.	Dinas Sosial	16.276.331.397,00	13.983.286.926,00	2.293.044.271,00	0,14
			BELANJA OPERASI	16.264.731.397,00	13.983.286.926,00	2.281.444.271,00	0,14
			Belanja Pegawai	4.502.877.434,00	4.302.544.233,00	200.333.201,00	0,04
			Belanja Barang dan Jasa	11.655.773.765,00	9.338.542.693,00	2.017.231.070,00	0,18
			Belanja Bunga	-	-	-	-
			Belanja Subsidi	-	-	-	-
			Belanja Hibah	126.100.000,00	122.200.000,00	3.900.000,00	0,03
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
			BELANJA MODAL	11.500.000,00	-	11.500.000,00	1,00
			BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
			BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
	17		Tenaga Kerja	8.431.390.418,00	6.288.193.709,00	2.143.196.709,00	0,25
		1.07.0.01.0.00.01.	Dinas Tenaga Kerja	8.431.390.418,00	6.288.193.709,00	2.143.196.709,00	0,25
			BELANJA OPERASI	8.431.390.418,00	6.288.193.709,00	2.143.196.709,00	0,25
			Belanja Pegawai	4.469.536.138,00	4.265.286.504,00	204.249.634,00	0,05
			Belanja Barang dan Jasa	3.961.854.280,00	2.022.907.205,00	1.938.947.075,00	0,49
			Belanja Bunga	-	-	-	-
			Belanja Subsidi	-	-	-	-
			Belanja Hibah	-	-	-	-
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
			BELANJA MODAL	-	-	-	-
			BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
			BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
	18		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.722.273.287,00	12.229.362.452,00	2.493.010.835,00	0,17

			Anak				
			BELANJA OPERASI	14.505.990.587,00	12.102.473.552,00	2.403.117.035,00	0,17
			Belanja Pegawai	4.439.204.781,00	4.237.966.825,00	201.237.963,00	0,05
			Belanja Barang dan Jasa	10.155.385.795,00	7.864.306.727,00	2.291.179.072,00	0,23
			Belanja Bunga	-	-	-	-
			Belanja Subsidi	-	-	-	-
			Belanja Hibah	-	-	-	-
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
			BELANJA MODAL	126.682.700,00	125.888.900,00	793.700,00	0,01
			BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
			BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
	09						
		2.09.0.01.0.00.01.	Pangan	7.843.715.245,00	7.518.847.751,00	324.871.498,00	0,04
			Dinas Ketahanan Pangan	7.843.715.245,00	7.518.847.751,00	324.871.498,00	0,04
			BELANJA OPERASI	7.296.579.245,00	6.973.347.751,00	323.231.498,00	0,04
			Belanja Pegawai	3.201.824.360,00	3.040.683.644,00	161.140.716,00	0,05
			Belanja Barang dan Jasa	4.094.754.885,00	3.931.664.107,00	163.090.782,00	0,04
			Belanja Bunga	-	-	-	-
			Belanja Subsidi	-	-	-	-
			Belanja Hibah	-	-	-	-
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
			BELANJA MODAL	547.140.000,00	545.500.000,00	1.640.000,00	0,00
			BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
			BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
	10						
		2.10.0.00.0.00.01.	Pertanahan	9.693.377.864,00	6.965.974.465,00	2.727.403.399,00	0,28
			Dinas Pertanahan	9.693.377.864,00	6.965.974.465,00	2.727.403.399,00	0,28
			BELANJA OPERASI	7.179.671.040,00	6.067.486.190,00	1.112.184.850,00	0,15
			Belanja Pegawai	3.306.261.232,00	3.161.699.071,00	144.562.161,00	0,04
			Belanja Barang dan Jasa	3.873.409.808,00	2.905.787.119,00	967.622.689,00	0,25
			Belanja Bunga	-	-	-	-
			Belanja Subsidi	-	-	-	-
			Belanja Hibah	-	-	-	-
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
			BELANJA MODAL	2.513.706.824,00	898.488.275,00	1.615.218.549,00	0,64
			BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
			BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
	11						
		2.11.0.00.0.00.12.	Lingkungan Hidup	124.265.156.815,90	117.708.523.014,55	6.556.633.000,45	0,05
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.265.156.815,90	117.708.523.014,55	6.556.633.000,45	0,05
			BELANJA OPERASI	121.666.881.445,00	115.278.793.014,55	6.388.088.430,45	0,05
			Belanja Pegawai	7.388.193.288,00	7.046.067.647,00	342.125.641,00	0,05
			Belanja Barang dan Jasa	114.278.688.157,00	108.232.725.367,55	6.045.962.789,45	0,05
			Belanja Bunga	-	-	-	-
			Belanja Subsidi	-	-	-	-
			Belanja Hibah	-	-	-	-
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
			BELANJA MODAL	2.598.274.570,00	2.429.729.000,00	168.544.570,00	0,06
			BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
			BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
	12						
			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19.277.806.539,00	18.092.902.437,00	1.185.904.102,00	0,06
		2.12.0.00.0.00.03.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19.277.806.539,00	18.092.902.437,00	1.185.904.102,00	0,06
			BELANJA OPERASI	18.331.723.539,00	17.194.816.637,00	1.137.796.902,00	0,06
			Belanja Pegawai	9.514.787.760,00	9.043.876.492,00	470.911.268,00	0,05
			Belanja Barang dan Jasa	7.798.735.779,00	7.131.940.145,00	666.795.634,00	0,09
			Belanja Bunga	-	-	-	-
			Belanja Subsidi	-	-	-	-
			Belanja Hibah	1.018.200.000,00	1.019.100.000,00	-	0,00
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
			BELANJA MODAL	946.083.000,00	897.985.800,00	48.097.200,00	0,05
			BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
			BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
	13						
			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17.098.485.329,00	15.532.223.996,00	1.566.261.333,00	0,09
		2.14.0.00.0.00.01.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17.098.485.329,00	15.532.223.996,00	1.566.261.333,00	0,09
			BELANJA OPERASI	16.735.605.329,00	15.170.188.051,00	1.565.417.278,00	0,09
			Belanja Pegawai	3.586.347.250,00	3.398.802.618,00	187.544.632,00	0,05
			Belanja Barang dan Jasa	13.149.258.079,00	11.771.385.433,00	1.377.872.646,00	0,10
			Belanja Bunga	-	-	-	-
			Belanja Subsidi	-	-	-	-
			Belanja Hibah	-	-	-	-
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
			BELANJA MODAL	362.880.000,00	362.035.945,00	844.055,00	0,00
			BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
			BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
	14						
		2.15.0.00.0.00.01.	Perhubungan	144.397.565.567,00	136.279.028.579,00	8.118.536.988,00	0,06
			Dinas Perhubungan	144.397.565.567,00	136.279.028.579,00	8.118.536.988,00	0,06
			BELANJA OPERASI	140.499.843.867,00	132.538.716.789,00	7.961.127.078,00	0,06
			Belanja Pegawai	14.205.563.994,00	13.569.193.303,00	636.370.691,00	0,04
			Belanja Barang dan Jasa	125.327.965.726,00	118.003.299.319,00	7.324.666.407,00	0,06
			Belanja Bunga	-	-	-	-
			Belanja Subsidi	966.314.147,00	966.314.147,00	-	0,00
			Belanja Hibah	-	-	-	-
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
			BELANJA MODAL	3.897.721.700,00	3.740.311.810,00	157.409.890,00	0,04

	17		Komunikasi dan Informatika	20.997.831.609,00	19.459.426.268,00	1.538.405.341,00	0,07
		2.16.2.20.2.21.04.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	20.997.831.609,00	19.459.426.268,00	1.538.405.341,00	0,07
			BELANJA OPERASI	20.793.101.409,00	19.295.771.268,00	1.497.330.141,00	0,07
			Belanja Pegawai	4.115.305.964,00	3.853.354.710,00	262.151.254,00	0,06
			Belanja Barang dan Jasa	16.587.795.445,00	15.352.616.558,00	1.235.178.907,00	0,07
			Belanja Bunga	-	-	-	-
			Belanja Subsidi	-	-	-	-
			Belanja Hibah	-	-	-	-
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
			BELANJA MODAL	204.730.200,00	163.655.000,00	41.075.200,00	0,14
			BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
			BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
	16		Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	12.037.577.559,00	10.678.366.926,00	1.359.213.633,00	0,11
		2.17.0.00.0.00.01.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12.037.577.559,00	10.678.366.926,00	1.359.213.633,00	0,11
			BELANJA OPERASI	11.926.264.559,00	10.574.957.926,00	1.351.306.633,00	0,11
			Belanja Pegawai	4.128.484.118,00	3.930.855.066,00	197.629.052,00	0,05
			Belanja Barang dan Jasa	6.797.780.441,00	6.494.012.860,00	303.767.581,00	0,04
			Belanja Bunga	-	-	-	-
			Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	149.490.000,00	850.510.000,00	0,85
			Belanja Hibah	-	-	-	-
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
			BELANJA MODAL	111.313.000,00	104.007.000,00	7.306.000,00	0,07
			BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
			BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
	17		Penanaman Modal	29.102.589.995,00	26.484.137.774,00	2.618.452.221,00	0,09
		2.18.0.00.0.00.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu	29.102.589.995,00	26.484.137.774,00	2.618.452.221,00	0,09
			BELANJA OPERASI	23.649.191.915,00	21.709.762.664,00	1.939.429.281,00	0,08
			Belanja Pegawai	11.314.642.546,00	10.761.941.228,00	552.701.318,00	0,05
			Belanja Barang dan Jasa	12.334.549.369,00	10.947.821.436,00	1.386.727.963,00	0,11
			Belanja Bunga	-	-	-	-
			Belanja Subsidi	-	-	-	-
			Belanja Hibah	-	-	-	-
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
			BELANJA MODAL	5.453.398.080,00	4.774.375.110,00	679.022.970,00	0,12
			BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
			BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
	18		Kepemudaan dan Olah Raga	24.534.377.746,00	23.999.437.585,00	534.940.161,00	0,02
		2.19.0.00.0.00.01.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	24.534.377.746,00	23.999.437.585,00	534.940.161,00	0,02
			BELANJA OPERASI	22.775.009.910,00	22.261.773.585,00	513.236.325,00	0,02
			Belanja Pegawai	4.321.205.592,00	4.124.537.915,00	196.667.677,00	0,05
			Belanja Barang dan Jasa	18.453.804.318,00	18.137.235.670,00	316.568.648,00	0,02
			Belanja Bunga	-	-	-	-
			Belanja Subsidi	-	-	-	-
			Belanja Hibah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	0,00
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
			BELANJA MODAL	1.759.367.836,00	1.737.664.000,00	21.703.836,00	0,01
			BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
			BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
	19		Perpustakaan	13.011.373.478,00	12.438.599.814,00	572.773.664,00	0,04
		2.22.2.24.0.00.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.011.373.478,00	12.438.599.814,00	572.773.664,00	0,04
			BELANJA OPERASI	12.159.508.479,00	11.595.802.989,00	563.705.489,00	0,05
			Belanja Pegawai	7.218.520.858,00	6.891.537.322,00	326.983.536,00	0,05
			Belanja Barang dan Jasa	4.941.087.620,00	4.704.265.667,00	236.821.953,00	0,05
			Belanja Bunga	-	-	-	-
			Belanja Subsidi	-	-	-	-
			Belanja Hibah	-	-	-	-
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
			BELANJA MODAL	851.865.000,00	842.796.825,00	8.968.175,00	0,01
			BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
			BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
	20		Pariwisata	8.765.395.671,00	8.160.142.609,00	605.253.062,00	0,07
		2.26.2.51.0.00.01.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	8.765.395.671,00	8.160.142.609,00	605.253.062,00	0,07
			BELANJA OPERASI	8.677.428.671,00	8.072.362.609,00	605.066.262,00	0,07
			Belanja Pegawai	4.866.431.576,00	4.649.600.348,00	216.831.228,00	0,04
			Belanja Barang dan Jasa	3.810.997.295,00	3.422.762.261,00	388.235.034,00	0,10
			Belanja Bunga	-	-	-	-
			Belanja Subsidi	-	-	-	-
			Belanja Hibah	-	-	-	-
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
			BELANJA MODAL	87.966.000,00	87.780.000,00	186.000,00	0,00
			BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
			BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
	21		Pertanian	17.209.493.926,00	15.225.790.833,00	1.983.703.093,00	0,12
		2.27.2.25.0.00.01.	Dinas Pertanian dan Perikanan	17.209.493.926,00	15.225.790.833,00	1.983.703.093,00	0,12
			BELANJA OPERASI	17.209.493.926,00	15.225.790.833,00	1.983.703.093,00	0,12
			Belanja Pegawai	10.399.225.512,00	9.867.444.771,00	531.780.741,00	0,05
			Belanja Barang dan Jasa	6.810.268.414,00	5.358.346.062,00	1.451.922.352,00	0,21
			Belanja Bunga	-	-	-	-
			Belanja Subsidi	-	-	-	-
			Belanja Hibah	-	-	-	-

			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
			BELANJA MODAL	-	-	-	-
			BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
			BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
	22		Perindustrian				
		1.36.5.31.0.00.12.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	17.717.335.774,00	16.115.668.057,00	1.611.667.717,00	0,09
			BELANJA OPERASI	17.717.335.774,00	16.115.668.057,00	1.611.667.717,00	0,09
			Belanja Pegawai	17.635.835.774,00	16.115.668.057,00	1.520.167.717,00	0,09
			Belanja Barang dan Jasa	6.915.838.804,00	6.533.146.486,00	382.692.318,00	0,06
			Belanja Bunga	10.718.996.970,00	9.582.521.571,00	1.136.475.399,00	0,11
			Belanja Subsidi	-	-	-	-
			Belanja Hibah	-	-	-	-
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
			BELANJA MODAL	-	-	-	-
			BELANJA TIDAK TERDUGA	91.500.000,00	-	91.500.000,00	1,60
			BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
				-	-	-	-
	23		Sekretariat Daerah				
		4.01.3.00.0.00.01.	Sekretariat Daerah	186.792.978.741,00	177.371.520.485,91	9.420.458.255,09	0,05
			BELANJA OPERASI	186.792.978.741,00	177.371.520.485,91	9.420.458.255,09	0,05
			Belanja Pegawai	176.185.158.441,00	167.000.886.865,95	9.185.271.575,05	0,05
			Belanja Barang dan Jasa	23.165.709.157,00	21.711.274.614,00	1.455.434.523,00	0,06
			Belanja Bunga	147.255.469.624,00	139.553.528.151,91	7.701.941.472,09	0,05
			Belanja Subsidi	-	-	-	-
			Belanja Hibah	-	-	-	-
			Belanja Bantuan Sosial	5.760.979.680,00	5.736.084.100,00	27.895.580,00	0,00
			BELANJA MODAL	-	-	-	-
			BELANJA TIDAK TERDUGA	10.606.821.300,00	10.371.633.620,00	235.186.680,00	0,02
			BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
				-	-	-	-
	24		Sekretariat DPRD				
		4.12.0.00.0.00.01.	Sekretariat DPRD	200.395.869.835,00	190.614.071.944,00	9.781.797.891,00	0,05
			BELANJA OPERASI	200.395.869.835,00	190.614.071.944,00	9.781.797.891,00	0,05
			Belanja Pegawai	198.838.578.135,00	189.068.390.244,00	9.770.188.891,00	0,05
			Belanja Barang dan Jasa	42.862.707.460,00	42.193.368.152,00	669.339.308,00	0,02
			Belanja Bunga	155.975.871.675,00	146.875.122.092,00	9.100.749.583,00	0,06
			Belanja Subsidi	-	-	-	-
			Belanja Hibah	-	-	-	-
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
			BELANJA MODAL	-	-	-	-
			BELANJA TIDAK TERDUGA	1.457.290.700,00	1.545.781.700,00	11.509.000,00	0,01
			BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
				-	-	-	-
	25		Perencanaan				
		5.01.3.00.0.00.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13.212.169.950,00	10.566.739.175,00	2.645.430.775,00	0,20
			BELANJA OPERASI	13.212.169.950,00	10.566.739.175,00	2.645.430.775,00	0,20
			Belanja Pegawai	6.393.901.782,00	6.068.669.461,00	325.232.321,00	0,05
			Belanja Barang dan Jasa	6.818.268.168,00	4.498.069.714,00	2.720.198.454,00	0,34
			Belanja Bunga	-	-	-	-
			Belanja Subsidi	-	-	-	-
			Belanja Hibah	-	-	-	-
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
			BELANJA MODAL	-	-	-	-
			BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
			BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
				-	-	-	-
	26		Keuangan				
		5.01.0.00.0.01.02.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	126.031.069.198,00	109.570.619.481,00	16.460.449.717,00	0,13
			BELANJA OPERASI	39.823.693.387,00	28.906.773.540,00	10.916.336.847,00	0,27
			Belanja Pegawai	29.493.672.631,00	26.375.964.283,00	3.117.708.348,00	0,11
			Belanja Barang dan Jasa	10.413.125.550,00	9.978.073.930,00	435.051.620,00	0,04
			Belanja Bunga	19.080.547.081,00	16.396.990.353,00	2.683.556.728,00	0,14
			Belanja Subsidi	-	-	-	-
			Belanja Hibah	-	-	-	-
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
			BELANJA MODAL	-	-	-	-
			BELANJA TIDAK TERDUGA	1.946.682.974,00	1.770.883.000,00	175.999.974,00	0,09
			BELANJA TRANSFER	8.383.324.782,00	761.126.257,00	7.622.198.525,00	1,91
				-	-	-	-
	26	5.02.0.00.0.00.03.	Badan Pendapatan Daerah	86.207.988.811,00	80.664.345.941,00	5.543.642.870,00	0,06
			BELANJA OPERASI	83.680.094.611,00	78.265.881.541,00	5.414.213.070,00	0,06
			Belanja Pegawai	44.431.416.847,00	43.923.020.871,00	508.395.976,00	0,01
			Belanja Barang dan Jasa	39.248.677.764,00	34.342.860.670,00	4.905.817.094,00	0,12
			Belanja Bunga	-	-	-	-
			Belanja Subsidi	-	-	-	-
			Belanja Hibah	-	-	-	-
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
			BELANJA MODAL	2.527.894.200,00	2.398.464.400,00	129.429.800,00	0,05
			BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
			BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
	27		Kepegawaian	16.329.481.664,00	14.414.124.495,00	1.915.277.169,00	0,12
		5.03.5.04.0.00.02.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16.329.481.664,00	14.414.124.495,00	1.915.277.169,00	0,12
			BELANJA OPERASI	15.969.823.864,00	14.067.299.495,00	1.902.524.369,00	0,12
			Belanja Pegawai	7.916.767.861,00	7.496.951.344,00	419.816.517,00	0,05
			Belanja Barang dan Jasa	8.053.056.003,00	6.570.348.151,00	1.482.707.852,00	0,18
			Belanja Bunga	-	-	-	-
			Belanja Subsidi	-	-	-	-
			Belanja Hibah	-	-	-	-

		BELANJA TIDAK TERDUGA	-	246.825.000,00	12.953.000,00	0,04
		BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
				-	-	-
28		Penelitian dan Pengembangan				
	5.05.0.00.0.00.02.	Badan Penelitian dan Pengembangan	7.463.826.728,00	7.087.525.263,00	376.301.457,00	0,05
		BELANJA OPERASI	7.463.826.728,00	7.087.525.263,00	376.301.457,00	0,05
		Belanja Pegawai	7.456.326.728,00	7.083.025.263,00	376.301.457,00	0,05
		Belanja Barang dan Jasa	4.680.224.022,00	1.453.919.031,00	226.304.991,00	0,05
		Belanja Bunga	2.776.102.695,00	2.629.106.232,00	149.996.466,00	0,05
		Belanja Subsidi	-	-	-	-
		Belanja Hibah	-	-	-	-
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
		BELANJA MODAL	-	-	-	-
		BELANJA TIDAK TERDUGA	7.500.000,00	7.500.000,00	-	0,00
		BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
			-	-	-	-
29		Inspektorat Daerah				
	6.01.0.00.0.00.01.	Inspektorat	17.976.389.068,00	15.177.468.661,00	2.798.919.399,00	0,16
		BELANJA OPERASI	17.976.389.068,00	15.177.468.661,00	2.798.919.399,00	0,16
		Belanja Pegawai	17.819.822.668,00	15.100.098.661,00	2.719.723.999,00	0,15
		Belanja Barang dan Jasa	13.035.346.400,00	12.568.904.931,00	686.441.469,00	0,05
		Belanja Bunga	4.784.476.268,00	2.734.193.730,00	2.050.282.530,00	0,43
		Belanja Subsidi	-	-	-	-
		Belanja Hibah	-	-	-	-
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
		BELANJA MODAL	-	-	-	-
		BELANJA TIDAK TERDUGA	156.566.400,00	74.370.000,00	82.196.400,00	0,52
		BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
			-	-	-	-
30		Kecamatan				
	7.01.0.00.0.00.01.	Kecamatan Bukitraya	191.610.655.644,00	180.981.323.102,00	10.629.332.542,00	0,06
		BELANJA OPERASI	14.822.798.969,00	14.178.393.633,00	644.405.336,00	0,04
		Belanja Pegawai	14.108.183.144,00	13.668.116.653,00	439.986.491,00	0,03
		Belanja Barang dan Jasa	5.855.237.476,00	6.546.229.988,00	109.007.488,00	0,05
		Belanja Bunga	7.252.865.668,00	7.121.886.665,00	130.979.003,00	0,02
		Belanja Subsidi	-	-	-	-
		Belanja Hibah	-	-	-	-
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
		BELANJA MODAL	-	-	-	-
		BELANJA TIDAK TERDUGA	515.695.825,00	510.276.980,00	5.418.845,00	0,01
		BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
			-	-	-	-
	7.01.0.00.0.00.02.	Kecamatan Tenayan Raya	16.233.405.906,00	15.678.749.765,00	554.655.741,00	0,03
		BELANJA OPERASI	16.233.405.906,00	15.678.749.765,00	554.655.741,00	0,03
		Belanja Pegawai	8.156.407.098,00	7.774.921.694,00	381.485.404,00	0,05
		Belanja Barang dan Jasa	8.076.998.408,00	7.903.828.071,00	173.170.337,00	0,02
		Belanja Bunga	-	-	-	-
		Belanja Subsidi	-	-	-	-
		Belanja Hibah	-	-	-	-
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
		BELANJA MODAL	-	-	-	-
		BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
		BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
			-	-	-	-
	7.01.0.00.0.00.03.	Kecamatan Sail	8.096.923.986,00	7.625.120.753,00	471.703.233,00	0,06
		BELANJA OPERASI	8.028.504.586,00	7.557.455.253,00	471.049.733,00	0,06
		Belanja Pegawai	4.650.994.288,00	4.433.267.269,00	216.827.019,00	0,05
		Belanja Barang dan Jasa	3.378.510.698,00	3.124.187.984,00	254.322.714,00	0,08
		Belanja Bunga	-	-	-	-
		Belanja Subsidi	-	-	-	-
		Belanja Hibah	-	-	-	-
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
		BELANJA MODAL	68.419.000,00	67.765.500,00	653.500,00	0,00
		BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
		BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
			-	-	-	-
	7.01.0.00.0.00.04.	Kecamatan Lima Puluh	9.740.337.615,00	9.083.462.128,00	662.775.487,00	0,07
		BELANJA OPERASI	9.506.912.215,00	8.862.008.128,00	644.904.087,00	0,07
		Belanja Pegawai	4.712.749.558,00	4.501.571.471,00	211.178.087,00	0,04
		Belanja Barang dan Jasa	4.794.062.657,00	4.360.436.657,00	433.626.000,00	0,09
		Belanja Bunga	-	-	-	-
		Belanja Subsidi	-	-	-	-
		Belanja Hibah	-	-	-	-
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
		BELANJA MODAL	239.425.400,00	221.454.000,00	17.971.400,00	0,08
		BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
		BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
	7.01.0.00.0.00.05.	Kecamatan Pekanbaru Kota	11.064.472.892,00	10.553.920.161,00	510.552.731,00	0,05
		BELANJA OPERASI	11.049.472.292,00	10.538.890.161,00	510.582.131,00	0,05
		Belanja Pegawai	5.298.488.694,00	5.031.607.344,00	266.881.350,00	0,05
		Belanja Barang dan Jasa	5.750.943.598,00	5.507.282.817,00	243.660.781,00	0,04
		Belanja Bunga	-	-	-	-
		Belanja Subsidi	-	-	-	-
		Belanja Hibah	-	-	-	-
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
		BELANJA MODAL	15.000.600,00	15.030.000,00	18.600,00	0,00
		BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
		BELANJA TRANSFER	-	-	-	-

		BELANJA OPERASI	13.438.638.013,00	12.846.728.967,00	591.579.045,00	0,04
		Belanja Pegawai	7.239.857.768,00	6.906.851.404,00	333.006.364,00	0,05
		Belanja Barang dan Jasa	6.198.780.244,00	5.939.877.563,00	258.902.681,00	0,04
		Belanja Bunga	-	-	-	-
		Belanja Subsidi	-	-	-	-
		Belanja Hibah	-	-	-	-
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
		BELANJA MODAL	117.434.800,00	109.480.000,00	11.954.800,00	0,10
		BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
		BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
	7.01.0.00.0.00.07.	Kecamatan Parang Sekaki	13.326.196.993,00	11.805.052.938,00	1.521.144.055,00	0,11
		BELANJA OPERASI	13.049.737.393,00	11.705.652.938,00	1.344.084.455,00	0,10
		Belanja Pegawai	6.359.927.874,00	6.057.100.785,00	302.827.089,00	0,05
		Belanja Barang dan Jasa	6.689.809.519,00	5.648.552.152,00	1.041.257.366,00	0,16
		Belanja Bunga	-	-	-	-
		Belanja Subsidi	-	-	-	-
		Belanja Hibah	-	-	-	-
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
		BELANJA MODAL	276.459.600,00	99.400.000,00	177.059.600,00	0,64
		BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
		BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
	7.01.0.00.0.00.09.	Kecamatan Senapelan	10.527.191.841,00	10.064.117.000,00	463.074.841,00	0,04
		BELANJA OPERASI	10.527.191.841,00	10.064.117.000,00	463.074.841,00	0,04
		Belanja Pegawai	5.485.861.696,00	5.234.681.035,00	251.180.445,00	0,05
		Belanja Barang dan Jasa	5.041.330.161,00	4.829.435.965,00	211.894.196,00	0,04
		Belanja Bunga	-	-	-	-
		Belanja Subsidi	-	-	-	-
		Belanja Hibah	-	-	-	-
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
		BELANJA MODAL	-	-	-	-
		BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
		BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
	7.01.0.00.0.00.12.	Kecamatan Marpoyan Damai	15.314.912.047,00	15.497.068.553,00	617.843.494,00	0,04
		BELANJA OPERASI	16.052.891.793,00	15.439.720.253,00	613.171.544,00	0,04
		Belanja Pegawai	8.097.209.310,00	7.751.468.891,00	345.930.419,00	0,04
		Belanja Barang dan Jasa	7.955.622.487,00	7.688.251.362,00	267.771.125,00	0,03
		Belanja Bunga	-	-	-	-
		Belanja Subsidi	-	-	-	-
		Belanja Hibah	-	-	-	-
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
		BELANJA MODAL	262.020.250,00	257.348.300,00	4.671.950,00	0,01
		BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
		BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
	7.01.0.00.0.00.13.	Kecamatan Binawidya	16.095.583.677,00	15.287.396.103,00	808.187.574,00	0,05
		BELANJA OPERASI	14.722.741.277,00	13.925.175.103,00	797.566.174,00	0,05
		Belanja Pegawai	7.231.745.984,00	6.916.767.469,00	314.978.515,00	0,04
		Belanja Barang dan Jasa	7.490.995.293,00	7.008.407.634,00	482.587.659,00	0,06
		Belanja Bunga	-	-	-	-
		Belanja Subsidi	-	-	-	-
		Belanja Hibah	-	-	-	-
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
		BELANJA MODAL	1.372.842.400,00	1.362.221.000,00	10.621.400,00	0,01
		BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
		BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
	7.01.0.00.0.00.14.	Kecamatan Tuah Madani	14.954.324.378,00	13.907.944.639,00	1.046.379.739,00	0,07
		BELANJA OPERASI	14.954.324.378,00	13.907.944.639,00	1.046.379.739,00	0,07
		Belanja Pegawai	6.674.220.050,00	6.377.911.570,00	296.308.480,00	0,05
		Belanja Barang dan Jasa	8.480.104.328,00	7.730.033.069,00	750.071.259,00	0,09
		Belanja Bunga	-	-	-	-
		Belanja Subsidi	-	-	-	-
		Belanja Hibah	-	-	-	-
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
		BELANJA MODAL	-	-	-	-
		BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
		BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
	7.01.0.00.0.00.15.	Kecamatan Rumbai	14.079.926.076,00	13.198.541.431,00	880.484.645,00	0,06
		BELANJA OPERASI	13.644.724.276,00	12.796.858.131,00	847.866.145,00	0,06
		Belanja Pegawai	5.757.122.130,00	5.483.643.701,00	274.278.429,00	0,05
		Belanja Barang dan Jasa	7.887.602.146,00	7.313.214.430,00	573.387.716,00	0,07
		Belanja Bunga	-	-	-	-
		Belanja Subsidi	-	-	-	-
		Belanja Hibah	-	-	-	-
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
		BELANJA MODAL	434.201.800,00	401.683.300,00	32.518.500,00	0,08
		BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
		BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
	7.01.0.00.0.00.16.	Kecamatan Rumbai Timur	10.539.703.101,00	9.353.641.315,00	1.186.061.786,00	0,11
		BELANJA OPERASI	10.316.321.401,00	9.130.458.315,00	1.185.863.086,00	0,11
		Belanja Pegawai	4.491.684.842,00	4.273.872.408,00	217.812.434,00	0,05
		Belanja Barang dan Jasa	5.824.636.559,00	4.856.585.907,00	968.050.652,00	0,17
		Belanja Bunga	-	-	-	-

		Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
		BELANJA MODAL	-	-	-	-
		BELANJA TIDAK TERDUGA	333.381.590,00	333.163.000,00	198.590,00	0,00
		BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
			-	-	-	-
	7.01.0.00.0.00.17.	Kecamatan Rumbai Barat				
		BELANJA OPERASI	11.636.735.589,00	10.448.592.581,00	798.043.103,00	0,04
		Belanja Pegawai	11.027.244.886,00	10.637.103.503,00	389.931.303,00	0,04
		Belanja Barang dan Jasa	5.201.336.643,00	4.948.920.292,00	252.280.151,00	0,05
		Belanja Bunga	5.825.908.443,00	5.688.183.211,00	137.515.151,00	0,02
		Belanja Subsidi	-	-	-	-
		Belanja Hibah	-	-	-	-
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
		BELANJA MODAL	-	-	-	-
		BELANJA TIDAK TERDUGA	9.490.800,00	9.379.000,00	111.800,00	0,01
		BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
			-	-	-	-
	7.01.0.00.0.00.18.	Kecamatan Kulim				
		BELANJA OPERASI	11.416.870.067,00	10.948.813.135,00	467.256.932,00	0,04
		Belanja Pegawai	11.416.870.067,00	10.948.813.135,00	467.256.932,00	0,04
		Belanja Barang dan Jasa	5.959.675.290,00	5.663.059.536,00	296.615.754,00	0,05
		Belanja Bunga	5.456.394.807,00	5.285.753.629,00	170.641.178,00	0,03
		Belanja Subsidi	-	-	-	-
		Belanja Hibah	-	-	-	-
		Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
		BELANJA MODAL	-	-	-	-
		BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
		BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
			-	-	-	-
	20	Kewenangan Hangka dan Polisis				
	8.01.0.00.0.00.01.	Badan Kewenangan Hangka dan Polisis	49.615.283.345,00	48.007.934.119,00	1.607.289.227,00	0,03
		BELANJA OPERASI	49.615.283.345,00	48.007.934.119,00	1.607.289.227,00	0,03
		Belanja Pegawai	49.353.748.645,00	47.788.914.118,00	1.682.834.527,00	0,03
		Belanja Barang dan Jasa	4.679.017.214,00	4.480.721.394,00	198.295.820,00	0,04
		Belanja Bunga	9.526.754.231,00	8.122.215.624,00	1.404.538.607,00	0,15
		Belanja Subsidi	-	-	-	-
		Belanja Hibah	-	-	-	-
		Belanja Bantuan Sosial	35.147.977.100,00	35.147.977.100,00	-	0,00
		BELANJA MODAL	-	-	-	-
		BELANJA TIDAK TERDUGA	261.534.700,00	256.800.000,00	4.934.700,00	0,02
		BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
			-	-	-	-
		SURPLUS/(DEFISIT)	5.303.746.800,00	4.360.558.237,00	945.182.573,00	0,18

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,

ttd

RISNANDAR MAHIWA

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

INDRA POMI NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 NOMOR 3

No.REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU, NOMOR URUT PERDA (1.38.A/2024)

LAMPIRAN I.2

Lampiran I.2 : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor : 3 Tahun 2024
Tanggal : 27 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	838.721.740.651,00	784.909.347.016,00	93,58	719.418.610.925,80
Pendapatan Retribusi Daerah	62.161.000.082,00	26.824.967.951,00	43,15	16.500.827.908,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.943.817.264,00	5.943.817.264,00	100,00	3.443.846.490,00
Lain -lain PAD yang Sah	111.296.484.430,00	72.608.698.459,38	65,24	59.658.199.101,85
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**1.018.123.042.427,00**	**890.286.830.690,38**	**87,44**	**799.021.484.425,65**
PENDAPATAN TRANSFER				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak	149.525.074.000,00	164.283.708.302,00	109,87	122.234.078.989,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	121.071.662.000,00	127.755.812.834,00	105,52	124.251.455.872,00
Dana Alokasi Umum	867.954.823.000,00	867.953.880.162,00	100,00	790.284.259.030,00
Dana Alokasi Khusus	352.599.058.000,00	340.219.549.445,00	96,49	338.376.329.792,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	**1.491.150.617.000,00**	**1.500.212.950.743,00**	**100,61**	**1.375.146.123.683,00**
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
Dana Insentif Daerah	19.178.601.000,00	19.178.601.000,00	100,00	-
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	**19.178.601.000,00**	**19.178.601.000,00**	**100,00**	-
TRANSFER ANTAR DAERAH				
Pendapatan Bagi Hasil	366.620.587.420,00	320.607.751.188,00	87,45	290.850.417.394,00
Bantuan Keuangan	22.899.484.800,00	22.858.684.800,00	99,82	14.229.314.543,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	**389.520.072.220,00**	**343.466.435.988,00**	**88,18**	**305.079.731.937,00**
Total Pendapatan Transfer	**1.899.849.290.220,00**	**1.862.857.987.731,00**	**98,05**	**1.680.225.855.620,00**
LAIN -LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	-	-	-	-
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-	-	-

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Jumlah Pendapatan Lain - lain yang Sah	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	**2.917.972.332.647,00**	**2.753.144.818.421,38**	**94,35**	**2.479.247.340.045,65**
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	950.745.441.134,00	917.756.173.837,00	96,53	908.095.040.997,56
Belanja Barang	1.509.953.297.830,00	1.401.017.172.439,50	92,79	1.174.095.944.026,80
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	1.966.314.147,00	1.115.804.147,00	56,75	7.283.227.572,00
Belanja Hibah	112.398.592.167,00	112.340.488.780,00	99,95	73.892.422.056,00
Bantuan Sosial	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi	**2.575.063.645.278,00**	**2.432.229.639.283,50**	**94,45**	**2.163.366.634.652,36**
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	2.383.706.824,00	769.811.525,00	32,29	8.509.166.113,00
Belanja Peralatan dan Mesin	79.397.383.653,00	75.888.516.195,00	95,58	108.335.049.831,00
Belanja Gedung dan Bangunan	95.922.266.444,00	94.006.938.248,86	98,00	77.949.693.104,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	134.454.097.534,00	128.207.813.682,02	95,35	121.218.807.527,99
Belanja Aset Tetap Lainnya	16.907.852.323,00	16.786.410.073,00	99,28	12.215.030.401,00
Belanja Aset Lainnya	148.315.000,00	148.005.000,00	99,79	108.239.000,00
Jumlah Belanja Modal	**329.213.621.778,00**	**315.807.494.723,88**	**95,93**	**328.335.985.976,99**
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga	8.383.324.782,00	761.126.257,00	9,08	964.331.717,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	**8.383.324.782,00**	**761.126.257,00**	**9,08**	**964.331.717,00**
JUMLAH BELANJA	**2.912.660.591.838,00**	**2.748.798.260.184,38**	**94,37**	**2.492.666.952.346,35**
SURPLUS/DEFISIT	**5.311.740.809,00**	**4.346.558.237,00**	**81,83**	**- 13.419.612.300,70**
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SILPA	9.965.908.690,00	9.965.908.690,40	100,00	30.957.871.492,61
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.722.350.501,00	4.722.350.501,51	100,00	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-	-	-	-

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Jumlah Penerimaan	**14.688.259.191,00**	**14.688.259.191,91**	**100,00**	**30.957.871.492,61**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00	50,00	2.850.000.000,00
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	-	-	-	-
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran	**20.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	50,00	**2.850.000.000,00**
PEMBIAYAAN NETTO	**- 5.311.740.809,00**	**4.688.259.191,91**	**- 88,26**	**28.107.871.492,61**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	**9.034.817.428,91**	-	**14.688.259.191,91**

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,

ttd.

RISNANDAR MAHIWA

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

INDRA POMI NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 NOMOR 3
No.REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU,
NOMOR URUT PERDA (1.38.A/2024)

LAMPIRAN I.3

Lampiran 1.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : **1.01.0.00.0.00.01. - Dinas Pendidikan**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.0.01.01.0.00.0.00.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	793.183.842.648,00	686.902.634.870,76	16.281.207.677,24	97,68	
1.01.0.01.01.0.00.0.00.01.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	618.066.940.820,00	603.138.306.744,42	14.928.634.075,58	97,58	
1.01.0.01.01.0.00.0.00.01.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	85.116.921.828,00	83.744.348.226,34	1.372.573.601,66	98,38	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	418.859.015.687,00	408.316.725.580,00	10.542.290.107,00	97,48	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	405.046.483.360,00	395.304.989.660,00	9.741.493.700,00	97,59	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	405.027.783.049,00	395.286.289.340,00	9.741.493.709,00	97,59	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	405.027.783.049,00	395.286.289.340,00	9.741.493.709,00	97,59	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	18.700.320,00	18.700.320,00	-	100,00	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.700.320,00	18.700.320,00	-	100,00	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	12.090.000,00	10.134.649,00	1.955.351,00	83,82	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12.090.000,00	10.134.649,00	1.955.351,00	83,82	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.090.000,00	10.134.649,00	1.955.351,00	83,82	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	645.969.128,00	569.567.735,00	98.401.385,00	85,52	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	59.793.998,00	59.759.400,00	34.600,00	99,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.783.890,00	19.759.490,00	24.400,00	99,87	
3.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	80.053.290,00	79.254.890,00	798.200,00	99,00	
3.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.06.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.053.290,00	79.254.890,00	798.200,00	99,00	
3.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	284.749.690,00	231.809.790,00	52.739.900,00	81,12	
3.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	284.749.690,00	231.809.790,00	52.739.900,00	81,12	
3.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	89.669.760,00	51.834.000,00	37.835.760,00	57,80	
3.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	89.669.760,00	51.834.000,00	37.835.760,00	57,80	
3.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	14.000.000,00	10.500.000,00	3.500.000,00	75,00	
3.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	10.500.000,00	3.500.000,00	75,00	
3.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	177.713.760,00	177.210.635,00	503.125,00	99,71	
3.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	177.713.760,00	177.210.635,00	503.125,00	99,71	
3.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	258.453.950,00	256.605.000,00	1.848.950,00	99,28	
3.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	223.453.950,00	222.011.000,00	1.442.950,00	99,35	
3.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.07.05.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	223.453.950,00	222.011.000,00	1.442.950,00	99,35	
3.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.07.08.	PENGADAAN ASET TAK BERWUJUD	35.000.000,00	34.594.000,00	406.000,00	98,84	
3.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.07.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.594.000,00	406.000,00	98,84	
3.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	11.359.543.822,00	10.850.244.200,00	509.299.622,00	95,51	
3.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	7.590.000,00	7.590.000,00	-	100,00	
3.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.08.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.590.000,00	7.590.000,00	-	100,00	
3.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.499.998.760,00	1.108.192.284,00	391.806.476,00	73,87	
3.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.499.998.760,00	1.108.192.284,00	391.806.476,00	73,87	
3.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	84.795.000,00	77.152.000,00	7.643.000,00	90,98	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.09.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	84.795.008,00	77.152.000,00	7.643.800,00	90,98	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.09.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	9.767.258.162,00	9.657.400.016,00	109.858.146,00	98,87	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.09.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.767.258.162,00	9.657.400.016,00	109.858.146,00	98,87	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.516.475.326,00	1.325.184.236,00	191.291.090,00	87,38	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	218.939.836,00	166.649.236,00	52.290.600,00	76,11	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	218.939.836,00	166.649.236,00	52.290.600,00	76,11	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	574.783.496,00	439.086.000,00	135.697.496,00	76,39	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	574.783.496,00	439.086.000,00	135.697.496,00	76,39	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	722.752.006,00	719.449.000,00	3.303.000,00	99,54	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.2.09.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	722.752.006,00	719.449.000,00	3.303.000,00	99,54	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	259.845.120.561,00	256.203.689.590,76	3.641.430.970,24	98,59	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	136.413.481.479,00	136.373.886.321,18	39.595.156,82	99,97	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.02.	PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU	2.155.721.600,00	2.068.064.645,04	87.656.954,96	95,93	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.02.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.155.721.600,00	2.068.064.645,04	87.656.954,96	95,93	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.03.	PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	301.031.850,00	300.090.000,00	941.850,00	99,69	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.03.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	301.031.850,00	300.090.000,00	941.850,00	99,69	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.04.	PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH	634.377.608,00	631.443.000,00	2.934.608,00	99,54	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.04.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	634.377.608,00	631.443.000,00	2.934.608,00	99,54	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.05.	PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH	1.409.499.500,00	1.386.181.000,00	23.318.500,00	98,34	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.05.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.409.499.500,00	1.386.181.000,00	23.318.500,00	98,34	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.06.	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	9.018.166.000,00	8.972.364.893,50	45.801.106,50	99,49	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.05.5.2.01.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.018.166.000,00	8.972.364.893,50	45.801.106,50	99,49	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.07.	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH/GURU/PENJAGA SEKOLAH	448.120.000,00	445.464.000,00	2.656.000,00	99,40	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.07.5.2.01.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	448.120.000,00	445.464.000,00	2.656.000,00	99,40	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.08.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS	5.541.825.040,00	5.499.791.922,64	42.033.117,36	99,24	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.541.825.040,00	5.499.791.922,64	42.033.117,36	99,24	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.09.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	164.945.550,00	161.230.000,00	3.715.550,00	98,35	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	164.945.550,00	161.230.000,00	3.715.550,00	98,35	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.12.	REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	1.712.743.857,00	1.683.089.470,00	29.654.387,00	98,26	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.12.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.712.743.857,00	1.683.089.470,00	29.654.387,00	98,26	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.14.	PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	265.425.000,00	258.575.000,00	6.850.000,00	97,41	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.14.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	265.425.000,00	258.575.000,00	6.850.000,00	97,41	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.17.	PENGADAAN PERLENGKAPAN SISWA	790.535.300,00	785.697.825,00	4.837.475,00	99,38	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.17.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	790.535.300,00	785.697.825,00	4.837.475,00	99,38	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.22.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	4.607.000.000,00	4.605.000.000,00	2.000.000,00	99,95	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.22.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.607.000.000,00	4.605.000.000,00	2.000.000,00	99,95	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.23.	PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR DAN UJIAN BAGI PESERTA DIDIK	224.195.000,00	220.919.000,00	3.276.000,00	98,53	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.23.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	224.195.000,00	220.919.000,00	3.276.000,00	98,53	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.25.	PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	734.209.105,00	533.069.785,00	201.139.320,00	72,60	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.25.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	734.209.105,00	533.069.785,00	201.139.320,00	72,60	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.27.	PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	1.453.624.650,00	1.318.168.141,00	135.456.509,00	90,68	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.27.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.453.624.650,00	1.318.168.141,00	135.456.509,00	90,68	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.29.	PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	302.592.210.444,00	103.196.715.645,00	(604.505.281,00)	100,58	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.29.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	53.135.651.579,00	52.613.932.786,00	221.718.759,00	99,58	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.29.5.1.05.	Belanja Hibah	35.606.513.887,00	36.233.175.167,00	(613.662.309,00)	101,72	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.29.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.514.342.615,00	4.533.618.135,00	(19.275.500,00)	100,43	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.29.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.332.793.321,00	9.525.989.523,00	(193.286.200,00)	102,07	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.30.	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	215.096.000,00	211.386.000,00	3.630.000,00	98,31	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.30.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	215.096.000,00	211.386.000,00	3.630.000,00	98,31	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.31.	PEMBANGUNAN LABORATORIUM SEKOLAH DASAR	4.263.856.975,00	4.214.645.995,00	49.210.980,00	98,84	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.31.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.263.856.975,00	4.214.645.995,00	49.210.980,00	98,84	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	106.300.407.037,00	103.211.719.850,58	3.088.767.186,42	97,09	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.01.	PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)	13.629.696.000,00	13.284.520.590,16	345.175.409,84	97,46	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	67.200.000,00	67.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.01.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.562.496.000,00	13.217.320.590,16	345.175.409,84	97,46	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.02.	PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU	11.426.460.800,00	11.040.266.675,72	386.194.124,28	96,62	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	33.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.02.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.392.860.800,00	11.006.666.675,72	386.194.124,28	96,61	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.03.	PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	539.788.800,00	526.882.000,00	12.906.800,00	97,60	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.03.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	539.788.800,00	526.882.000,00	12.906.800,00	97,60	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.04.	PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH	895.000.000,00	891.309.000,00	3.691.000,00	99,59	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.04.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	895.000.000,00	891.309.000,00	3.691.000,00	99,59	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.06.	PEMBANGUNAN LABORATORIUM	4.402.802.920,00	4.293.244.635,00	109.558.284,00	97,51	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.06.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.402.802.920,00	4.293.244.635,00	109.558.284,00	97,51	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.12.	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	6.239.129.100,00	6.095.795.306,93	143.333.713,08	97,70	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.12.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.239.129.100,00	6.095.795.306,93	143.333.713,08	97,70	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.14.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	5.172.139.726,00	5.121.934.836,78	50.211.883,22	99,02	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.14.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.172.139.726,00	5.121.934.836,78	50.211.883,22	99,02	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.24.	REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	171.022.506,00	170.160.000,00	862.506,00	99,49	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.24.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	171.022.506,00	170.160.000,00	862.506,00	99,49	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.25.	PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	1.676.485.686,00	1.653.736.000,00	22.748.686,00	98,64	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.25.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.676.485.686,00	1.653.736.000,00	22.748.686,00	98,64	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.28.	PENGADAAN PERLENGKAPAN SISWA	798.102.306,00	793.405.355,00	4.696.945,00	99,41	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.28.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	798.102.306,00	793.405.355,00	4.696.945,00	99,41	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.35.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	125.000.006,00	124.980.000,00	20.006,00	99,98	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.35.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.000.006,00	124.980.000,00	20.006,00	99,98	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.36.	PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR DAN UJIAN BAGI PESERTA DIDIK	7.517.321.547,00	6.383.418.587,00	1.133.902.960,00	84,91	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.36.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.495.447.047,00	6.365.318.587,00	1.130.128.460,00	84,92	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.36.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.874.500,00	18.100.000,00	3.774.500,00	82,74	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.38.	PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	388.494.514,00	385.928.450,00	2.566.064,00	99,33	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.38.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	388.494.514,00	385.928.450,00	2.566.064,00	99,33	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.40.	PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	330.810.796,00	324.982.900,00	5.827.896,00	98,47	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.40.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	330.810.796,00	324.982.900,00	5.827.896,00	98,47	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.42.	PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	52.894.980.556,00	52.030.224.683,00	864.764.873,00	98,36	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.42.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.794.776.689,00	27.420.346.794,00	374.429.895,00	98,65	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.1.00.0.00.01.02.2.02.42.5.1.05.	Belanja Hibah	16.534.922.580,00	16.375.140.393,00	159.782.187,00	99,03	
1.01.1.01.1.00.0.00.01.02.2.02.42.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.252.746.567,00	3.617.375.296,00	335.470.871,00	89,99	
1.01.1.01.1.00.0.00.01.02.2.02.42.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.212.550.200,00	5.217.468.200,00	(4.918.000,00)	100,09	
1.01.1.01.1.00.0.00.01.02.2.02.43.	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	92.044.894,00	88.938.750,00	3.106.054,00	96,62	
1.01.1.01.1.00.0.00.01.02.2.02.43.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	92.044.894,00	88.938.750,00	3.106.054,00	96,62	
1.01.1.01.1.00.0.00.01.02.2.03.	PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	10.040.582.875,00	16.007.742.680,00	(5.967.159.805,00)	159,43	
1.01.1.01.1.00.0.00.01.02.2.03.02.	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD	559.446.090,00	555.877.230,00	3.568.770,00	99,36	
1.01.1.01.1.00.0.00.01.02.2.03.02.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	559.446.090,00	555.877.230,00	3.568.770,00	99,36	
1.01.1.01.1.00.0.00.01.02.2.03.03.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG/RUANG KELAS/RUANG GURU PAUD	227.584.090,00	226.514.090,00	1.070.000,00	99,52	
1.01.1.01.1.00.0.00.01.02.2.03.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	227.584.090,00	226.514.090,00	1.070.000,00	99,52	
1.01.1.01.1.00.0.00.01.02.2.03.12.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA PAUD	699.947.590,00	691.083.390,00	8.864.200,00	98,73	
1.01.1.01.1.00.0.00.01.02.2.03.12.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	699.947.590,00	691.083.390,00	8.864.200,00	98,73	
1.01.1.01.1.00.0.00.01.02.2.03.13.	PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR PAUD	105.433.490,00	98.663.490,00	6.760.000,00	93,58	
1.01.1.01.1.00.0.00.01.02.2.03.13.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	105.433.490,00	98.663.490,00	6.760.000,00	93,58	
1.01.1.01.1.00.0.00.01.02.2.03.17.	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD	119.369.225,00	-	119.369.225,00	-	
1.01.1.01.1.00.0.00.01.02.2.03.17.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	119.369.225,00	-	119.369.225,00	-	
1.01.1.01.1.00.0.00.01.02.2.03.18.	PENGELOLAAN DANA BOP PAUD	8.107.800.000,00	14.217.712.090,00	(6.109.912.090,00)	175,35	
1.01.1.01.1.00.0.00.01.02.2.03.18.5.1.05.	Belanja Hibah	8.107.800.000,00	14.217.712.090,00	(6.109.912.090,00)	175,35	
1.01.1.01.1.00.0.00.01.02.2.03.19.	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOP PAUD	221.012.750,00	217.892.750,00	3.120.000,00	98,58	
1.01.1.01.1.00.0.00.01.02.2.03.19.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	221.012.750,00	217.892.750,00	3.120.000,00	98,58	
1.01.1.01.1.00.0.00.01.02.2.04.	PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	7.090.567.170,00	610.339.738,00	6.480.227.432,00	8,60	
1.01.1.01.1.00.0.00.01.02.2.04.11.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA NONFORMAL / KESETARAAN	449.692.800,00	432.074.550,00	17.618.250,00	96,08	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.04.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	449.692.888,00	432.674.650,00	17.018.250,00	96,08	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.04.15.	PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	118.368.838,00	116.928.838,00	1.440.000,00	98,78	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.04.15.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	118.368.838,00	116.928.838,00	1.440.000,00	98,78	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.04.16.	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	70.413.350,00	-	70.413.350,00	-	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.04.16.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	70.413.350,00	-	70.413.350,00	-	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.04.17.	PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	6.240.100.800,00	-	6.240.100.800,00	-	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.04.17.5.1.05.	Belanja Hibah	6.240.100.800,00	-	6.240.100.800,00	-	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.04.18.	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	61.991.350,00	61.336.350,00	655.000,00	98,94	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.04.18.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	61.991.350,00	61.336.350,00	655.000,00	98,94	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.04.22.	PENYELENGGARAAN UJIAN BAGI PESERTA DIDIK NONFORMAL/KESETARAAN	149.999.832,00	-	149.999.832,00	-	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.04.22.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	149.999.832,00	-	149.999.832,00	-	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.04.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	24.479.725.400,00	22.382.240.800,00	2.097.485.600,00	91,43	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.04.2.01.	PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	24.479.725.400,00	22.382.240.800,00	2.097.485.600,00	91,43	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.04.2.01.01.	PERHITUNGAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.04.2.01.02.	PENATAAN PENDISTRIBUSIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	24.458.725.400,00	22.361.240.800,00	2.097.485.600,00	91,42	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.04.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.458.725.400,00	22.361.240.800,00	2.097.485.600,00	91,42	
	JUMLAH BELANJA	703.183.862.648,00	686.902.654.970,76	16.281.207.677,24	97,68	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(703.183.862.648,00)	(686.902.654.970,76)	(16.281.207.677,24)	97,68	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00.00.6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	105.835.536,00	105.835.536,00	-	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00.00.6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	105.835.536,00	105.835.536,00	-	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	-	105.835.536,00	105.835.536,00	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	105.835.536,00	105.835.536,00	-	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(703.183.862.648,00)	(686.736.819.434,76)	(16.175.372.141,24)	97,66	

Lampiran 1.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.01. - Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	36.881.691.818,00	32.507.331.207,71	(4.374.360.610,29)	88,13	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36.881.691.818,00	32.507.331.207,71	(4.374.360.610,29)	88,13	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	358.198.000,00	246.276.000,00	(111.922.000,00)	68,75	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	36.523.493.818,00	32.261.055.207,71	(4.262.438.610,29)	88,32	
	JUMLAH PENDAPATAN	36.881.691.818,00	32.507.331.207,71	(4.374.360.610,29)	88,13	
1.02.0.01.02.0.00.0.00.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	327.118.662.321,00	304.641.828.482,71	22.476.833.838,29	93,12	
1.02.0.01.02.0.00.0.00.01.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	300.452.959.454,00	278.687.530.310,62	21.765.429.143,38	92,75	
1.02.0.01.02.0.00.0.00.01.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	31.049.030.867,00	30.237.168.172,09	811.862.694,91	97,38	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	198.273.177.032,00	184.572.915.126,71	13.700.261.905,29	93,09	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	21.600.000,00	16.650.000,00	4.950.000,00	77,11	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.280.000,00	2.280.000,00	-	100,00	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.280.000,00	2.280.000,00	-	100,00	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	19.350.000,00	14.400.000,00	4.950.000,00	74,41	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.350.000,00	14.400.000,00	4.950.000,00	74,41	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	151.428.383.654,00	144.736.162.709,00	6.692.020.945,00	95,58	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	151.369.395.654,00	144.716.462.709,00	6.652.932.945,00	95,60	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	151.369.395.654,00	144.716.462.709,00	6.652.932.945,00	95,60	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	21.180.000,00	19.700.000,00	1.480.000,00	93,01	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.180.000,00	19.700.000,00	1.480.000,00	93,01	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	37.608.000,00	-	37.608.000,00	-	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	37.608.000,00	-	37.608.000,00	-	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	9.000.000,00	6.745.000,00	2.255.000,00	74,94	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9.000.000,00	6.745.000,00	2.255.000,00	74,94	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	6.745.000,00	2.255.000,00	74,94	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	3.431.832.936,00	3.384.490.562,00	47.342.374,00	98,62	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	192.609.690,00	188.760.690,00	3.849.000,00	97,99	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	192.609.690,00	188.760.690,00	3.849.000,00	97,99	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	1.992.251.790,00	1.960.530.453,00	31.721.347,00	98,40	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.992.251.790,00	1.960.530.453,00	31.721.347,00	98,40	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.039.043.636,00	1.032.468.280,00	6.575.356,00	99,36	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.039.043.636,00	1.032.468.280,00	6.575.356,00	99,36	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	208.528.000,00	203.331.829,00	5.196.171,00	97,50	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	208.528.000,00	203.331.829,00	5.196.171,00	97,50	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.332.192.936,00	4.342.220.770,00	1.075.972.166,00	79,70	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.719.893.940,00	1.287.381.910,00	432.512.030,00	74,85	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.719.893.960,00	1.187.381.910,00	432.513.050,00	74,55	
3.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.09.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	192.464.000,00	43.365.036,00	149.099.000,00	22,53	
3.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.09.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	192.464.000,00	43.365.036,00	149.099.000,00	22,53	
3.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.09.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	3.409.834.976,00	2.911.473.860,00	498.361.116,00	85,38	
3.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.09.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.409.834.976,00	2.911.473.860,00	498.361.116,00	85,38	
3.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	840.514.390,00	339.735.768,00	500.778.512,00	40,41	
3.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	590.074.700,00	334.296.188,00	255.778.512,00	56,65	
3.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	590.074.700,00	334.296.188,00	255.778.512,00	56,65	
3.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.09.11.	PEMELIHARAAN REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	250.439.690,00	5.439.690,00	245.000.000,00	2,17	
3.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.09.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	250.439.690,00	5.439.690,00	245.000.000,00	2,17	
3.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.10.	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	37.219.823.265,00	31.846.890.297,71	5.372.932.968,29	85,56	
3.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.10.01.	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	37.219.823.265,00	31.846.890.297,71	5.372.932.968,29	85,56	
3.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.10.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	33.695.323.845,00	28.699.240.232,62	4.996.082.813,38	85,14	
3.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.10.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.038.047.560,00	2.834.606.197,00	203.441.363,00	93,30	
3.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.10.01.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	546.452.860,00	373.043.868,09	173.408.731,91	68,26	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	122.288.504.777,00	114.119.539.556,00	8.168.965.221,00	93,31	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.727.173.253,00	36.541.576.770,00	1.185.596.483,00	96,85	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.05.	PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT	3.377.750.000,00	3.339.753.000,00	37.998.000,00	98,87	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	288.000.000,00	285.954.000,00	2.046.000,00	99,29	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.05.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.889.750.000,00	2.855.645.000,00	34.105.000,00	98,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.05.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.003.000,00	198.153.000,00	1.847.000,00	99,07	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.08.	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH SAKIT	4.410.250.000,00	4.369.191.000,00	41.059.000,00	99,06	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	716.500.000,00	711.306.000,00	5.194.000,00	99,27	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.08.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.693.750.000,00	3.657.885.000,00	35.864.000,00	99,03	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.09.	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS	7.181.245.262,00	7.032.699.825,00	148.545.437,00	97,93	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.181.245.262,00	7.032.699.825,00	148.545.437,00	97,93	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.14.	PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	15.757.822.207,00	15.526.719.937,00	231.102.270,00	98,53	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.14.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.757.822.207,00	15.526.719.937,00	231.102.270,00	98,53	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.16.	PENGADAAN OBAT, VAKSIN	3.018.215.944,00	2.792.606.204,00	225.609.740,00	88,82	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.16.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.018.215.944,00	2.792.606.204,00	225.609.740,00	88,82	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.17.	PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI	4.791.889.840,00	4.295.481.804,00	496.408.036,00	89,64	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.17.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.791.889.840,00	4.295.481.804,00	496.408.036,00	89,64	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.20.	PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	190.000.000,00	185.125.000,00	4.875.000,00	97,43	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.20.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000,00	185.125.000,00	4.875.000,00	97,43	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	83.957.313.790,00	77.079.755.142,00	6.877.558.558,00	91,80	
1.02.1.02.0.00.3.00.01.02.2.02.01.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	231.950.000,00	199.775.000,00	32.175.000,00	86,13	
1.02.1.02.0.00.3.00.01.02.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	231.950.000,00	199.775.000,00	32.175.000,00	86,12	
1.02.1.02.0.00.3.00.01.02.2.02.02.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	210.164.000,00	122.050.000,00	88.114.000,00	58,07	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	210.164.000,00	122.050.000,00	88.114.000,00	58,07	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.03.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	187.114.000,00	150.232.200,00	36.881.800,00	80,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	187.114.000,00	150.232.200,00	36.881.800,00	80,28	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.04.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA	30.864.000,00	-	30.864.000,00	-	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.864.000,00	-	30.864.000,00	-	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.05.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	18.740.096,00	-	18.740.096,00	-	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.740.096,00	-	18.740.096,00	-	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.07.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	49.754.000,00	35.200.000,00	14.554.000,00	70,74	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	49.754.000,00	35.200.000,00	14.554.000,00	70,74	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.08.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	15.196.005,00	-	15.196.005,00	-	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.196.005,00	-	15.196.005,00	-	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.09.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	1.091.185.245,00	1.005.360.000,00	85.745.245,00	92,14	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.091.185.245,00	1.005.360.000,00	85.745.245,00	92,14	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.10.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	76.087.682,00	-	76.087.682,00	-	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	76.087.682,00	-	76.087.682,00	-	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.11.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	2.575.000.000,00	-	2.575.000.000,00	-	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.575.000.000,00	-	2.575.000.000,00	-	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.12.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	529.999.792,00	466.857.600,00	63.142.192,00	88,08	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.12.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	279.999.792,00	216.857.600,00	63.142.192,00	77,44	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.12.5.1.05.	Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.13.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)	18.054.000,00	4.845.000,00	13.209.000,00	26,83	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.13.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.054.000,00	4.845.000,00	13.209.000,00	26,83	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.15.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	541.092.154,00	350.333.350,00	190.758.804,00	64,74	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.15.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	541.092.154,00	350.333.350,00	190.758.804,00	64,74	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.16.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	5.850.000,00	-	5.850.000,00	-	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.16.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	-	5.850.000,00	-	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.17.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	350.892.688,00	350.892.688,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.17.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	350.892.688,00	350.892.688,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.18.	PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	746.568.588,00	254.772.180,00	491.796.408,00	34,12	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.18.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	746.568.588,00	254.772.180,00	491.796.408,00	34,12	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.20.	PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	99.794.576,00	78.635.480,00	21.159.096,00	78,79	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.20.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	99.794.576,00	78.635.480,00	21.159.096,00	78,79	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.21.	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	251.371.223,00	115.445.000,00	135.929.223,00	45,92	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.21.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	251.371.223,00	115.445.000,00	135.929.223,00	45,92	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.23.	PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN KHUSUS	1.619.047.748,00	1.137.925.000,00	481.122.748,00	70,28	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.23.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	995.047.748,00	887.925.000,00	107.122.748,00	89,23	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.23.5.1.05.	Belanja Hibah	600.000.000,00	250.000.000,00	350.000.000,00	41,66	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.23.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.000.000,00	-	24.000.000,00	-	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.25.	PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	685.778.266,00	258.680.000,00	427.098.166,00	37,72	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.25.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	685.778.266,00	258.680.000,00	427.098.166,00	37,72	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.26.	PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	42.265.882.796,00	41.939.410.100,00	326.472.680,00	99,22	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.26.5.1.01.	Belanja Pegawai	329.677.200,00	217.497.200,00	32.180.000,00	94,89	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.26.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	41.936.205.596,00	41.721.912.900,00	314.292.680,00	99,25	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.27.	DETEKSI DINI PENYALAHGUNAAN NAPZA DI FASYANKES DAN SEKOLAH	54.772.452,00	-	54.772.452,00	-	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.00.0.00.0.00.01.02.2.02.27.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	54.772.452,00	-	54.772.452,00	-	
1.02.1.02.0.00.0.00.0.00.01.02.2.02.28.	PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN NASIONAL	10.424.000,00	4.405.000,00	6.019.000,00	42,25	
1.02.1.02.0.00.0.00.0.00.01.02.2.02.28.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.424.000,00	4.405.000,00	6.019.000,00	42,25	
1.02.1.02.0.00.0.00.0.00.01.02.2.02.29.	PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT	285.435.106,00	258.005.000,00	27.430.106,00	90,39	
1.02.1.02.0.00.0.00.0.00.01.02.2.02.29.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	285.435.106,00	258.005.000,00	27.430.106,00	90,39	
1.02.1.02.0.00.0.00.0.00.01.02.2.02.32.	OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT	20.606.543.000,00	20.461.493.311,00	145.049.689,00	99,29	
1.02.1.02.0.00.0.00.0.00.01.02.2.02.32.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.393.193.000,00	20.248.143.311,00	145.049.689,00	99,28	
1.02.1.02.0.00.0.00.0.00.01.02.2.02.32.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	213.350.000,00	213.350.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.0.00.01.02.2.02.33.	OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	10.704.430.105,00	9.277.432.973,00	1.426.997.132,00	86,66	
1.02.1.02.0.00.0.00.0.00.01.02.2.02.33.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.704.430.105,00	9.277.432.973,00	1.426.997.132,00	86,66	
1.02.1.02.0.00.0.00.0.00.01.02.2.02.34.	OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	608.109.206,00	568.465.340,00	39.643.866,00	93,48	
1.02.1.02.0.00.0.00.0.00.01.02.2.02.34.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	315.578.706,00	283.571.170,00	32.007.536,00	89,85	
1.02.1.02.0.00.0.00.0.00.01.02.2.02.34.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	243.380.500,00	236.044.170,00	7.336.330,00	96,98	
1.02.1.02.0.00.0.00.0.00.01.02.2.02.34.5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	49.150.000,00	48.850.000,00	310.000,00	99,36	
1.02.1.02.0.00.0.00.0.00.01.02.2.02.35.	PELAKSANAAN AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA	28.680.000,00	-	28.680.000,00	-	
1.02.1.02.0.00.0.00.0.00.01.02.2.02.35.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	28.680.000,00	-	28.680.000,00	-	
1.02.1.02.0.00.0.00.0.00.01.02.2.02.36.	INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	20.552.800,00	12.710.800,00	7.842.000,00	61,84	
1.02.1.02.0.00.0.00.0.00.01.02.2.02.36.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.552.800,00	12.710.800,00	7.842.000,00	61,84	
1.02.1.02.0.00.0.00.0.00.01.02.2.02.37.	PELAKSANAAN KEWASPADAAN DINI DAN RESPON WABAH	38.088.800,00	26.850.800,00	11.238.000,00	70,49	
1.02.1.02.0.00.0.00.0.00.01.02.2.02.37.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	38.088.800,00	26.850.800,00	11.238.000,00	70,49	
1.02.1.02.0.00.0.00.0.00.01.02.2.03.	PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	295.895.924,00	236.865.244,00	59.030.680,00	80,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.00.0.00.01.32.2.03.01.	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KESEHATAN	63.880.000,00	54.980.000,00	8.900.000,00	86,06	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.32.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	63.880.000,00	54.980.000,00	8.900.000,00	86,06	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.32.2.03.02.	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	26.162.324,00	20.769.354,00	5.392.970,00	79,38	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.32.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	26.162.324,00	20.769.354,00	5.392.970,00	79,38	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.32.2.03.03.	PENGADAAN ALAT/PERANGKAT SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAN JARINGAN INTERNET	205.853.609,00	161.115.890,00	44.737.710,00	78,26	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.32.2.03.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	195.853.609,00	151.115.890,00	44.737.710,00	77,15	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.32.2.03.03.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.32.2.04.	PEMBERIAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	308.121.900,00	261.342.400,00	46.779.500,00	84,81	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.32.2.04.03.	PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN	145.933.900,00	135.942.400,00	9.991.500,00	93,15	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.32.2.04.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	145.933.900,00	135.942.400,00	9.991.500,00	93,15	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.32.2.04.04.	PENYIAPAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	162.188.000,00	125.400.000,00	36.788.000,00	77,31	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.32.2.04.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	162.188.000,00	125.400.000,00	36.788.000,00	77,31	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.481.318.808,00	1.127.537.500,00	353.781.308,00	76,11	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.01.	PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	27.212.000,00	-	27.212.000,00	-	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.01.01.	PENGENDALIAN PERIZINAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN	27.212.000,00	-	27.212.000,00	-	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.212.000,00	-	27.212.000,00	-	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.02.	PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	150.861.400,00	50.182.500,00	100.678.900,00	33,26	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.02.01.	PERENCANAAN DAN DISTRIBUSI SERTA PEMERATAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	17.920.400,00	-	17.920.400,00	-	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.920.400,00	-	17.920.400,00	-	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.02.02.	PEMOMBINAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR	75.679.008,00	29.912.500,00	45.766.500,00	39,52	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.32.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	75.679.000,00	29.912.500,00	45.766.500,00	39,52	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.32.03.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	57.262.000,00	20.270.000,00	36.992.000,00	35,39	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.32.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	57.262.000,00	20.270.000,00	36.992.000,00	35,39	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.33.	PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.303.245.408,00	1.077.355.000,00	225.890.408,00	82,66	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.33.01.	PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.303.245.408,00	1.077.355.000,00	225.890.408,00	82,66	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.33.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.303.245.408,00	1.077.355.000,00	225.890.408,00	82,66	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	692.333.784,00	538.956.380,00	153.377.404,00	77,84	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.01.	PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	86.147.952,00	48.547.500,00	37.600.452,00	56,35	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.01.01.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	86.147.952,00	48.547.500,00	37.600.452,00	56,35	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	86.147.952,00	48.547.500,00	37.600.452,00	56,35	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.06.	PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	606.185.752,00	490.408.880,00	115.776.952,00	80,90	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.06.01.	PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN-MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN	606.185.752,00	490.408.880,00	115.776.952,00	80,90	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	606.185.752,00	490.408.880,00	115.776.952,00	80,90	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.303.328.096,00	4.203.870.000,00	100.458.096,00	97,70	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.01.	ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.114.080.096,00	4.093.170.000,00	20.910.096,00	99,49	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.01.01.	PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	4.114.080.096,00	4.093.170.000,00	20.910.096,00	99,49	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.114.080.096,00	4.093.170.000,00	20.910.096,00	99,49	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.02.	PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	79.544.000,00	25.550.000,00	53.994.000,00	32,12	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.02.01.	PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT	79.544.000,00	25.550.000,00	53.994.000,00	32,12	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	79.544.000,00	25.550.000,00	53.994.000,00	32,12	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.03.	PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.704.000,00	164.150.000,00	25.554.000,00	86,52	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.03.01.	BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	189.704.000,00	164.150.000,00	25.554.000,00	86,52	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	189.704.000,00	164.150.000,00	25.554.000,00	86,52	
	JUMLAH BELANJA	327.118.662.321,00	304.641.828.482,71	22.476.833.838,29	93,12	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(290.236.970.583,00)	(272.134.457.275,00)	(26.851.194.448,58)	93,76	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.00.6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	2.145.654.137,07	2.145.654.137,07	-	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.00.6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	2.145.654.137,07	2.145.654.137,07	-	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	-	2.145.654.137,07	2.145.654.137,07	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	2.145.654.137,07	2.145.654.137,07	-	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(290.236.970.583,00)	(269.988.643.137,93)	(24.705.540.311,51)	93,02	

Lampiran 1.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : 1.03.0.00.0.00.01. - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	15.800.000.000,00	12.344.457.200,00	(3.455.542.800,00)	78,12	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.800.000.000,00	12.344.457.200,00	(3.455.542.800,00)	78,12	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	15.800.000.000,00	12.344.457.200,00	(3.455.542.800,00)	78,12	
	JUMLAH PENDAPATAN	15.800.000.000,00	12.344.457.200,00	(3.455.542.800,00)	78,12	
1.03.0.01.03.3.00.0.00.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	332.539.564.804,00	313.173.774.048,45	19.365.790.755,55	94,17	
1.03.0.01.03.3.00.0.00.01.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	281.112.083.359,00	263.974.975.188,00	17.137.108.162,00	93,90	
1.03.0.01.03.3.00.0.00.01.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	53.110.348.628,00	50.473.799.739,45	2.636.548.888,55	95,03	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.628.610.931,00	13.884.975.881,00	3.753.635.850,00	83,16	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	150.435.375,00	96.213.000,00	54.222.375,00	63,95	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	44.378.700,00	22.409.000,00	21.969.700,00	50,49	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	44.378.700,00	22.409.000,00	21.969.700,00	50,49	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	21.682.100,00	21.586.000,00	96.100,00	99,55	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.682.100,00	21.586.000,00	96.100,00	99,55	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	15.594.400,00	-	15.594.400,00	-	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.594.400,00	-	15.594.400,00	-	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	34.931.200,00	34.797.000,00	134.200,00	99,61	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	34.931.200,00	34.797.000,00	134.200,00	99,61	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	16.349.075,00	-	16.349.075,00	-	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.349.075,00	-	16.349.075,00	-	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	17.499.900,00	17.421.000,00	78.900,00	99,54	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.499.900,00	17.421.000,00	78.900,00	99,54	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	10.042.616.698,00	9.115.435.460,00	927.080.238,00	90,76	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	9.807.920.948,00	9.873.106.560,00	934.814.388,00	90,74	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	9.807.920.948,00	9.873.106.560,00	934.814.388,00	90,74	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	14.980.350,00	14.853.500,00	126.850,00	99,15	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.980.350,00	14.853.500,00	126.850,00	99,15	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SULAMAN TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	9.276.400,00	7.200.400,00	2.076.000,00	77,62	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.276.400,00	7.200.400,00	2.076.000,00	77,62	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.02.08.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	20.338.000,00	20.275.000,00	63.000,00	99,69	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.02.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.338.000,00	20.275.000,00	63.000,00	99,69	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	15.258.100,00	15.258.100,00	-	100,00	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.03.01.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	15.258.100,00	15.258.100,00	-	100,00	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.258.100,00	15.258.100,00	-	100,00	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	531.055.800,00	460.061.299,00	70.994.501,00	86,63	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.05.01.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI	16.569.700,00	16.383.000,00	186.700,00	98,87	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.05.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.569.700,00	16.383.600,00	186.700,00	98,87	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.05.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	94.495.000,00	94.463.000,00	32.000,00	99,96	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.05.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	88.745.000,00	88.713.000,00	32.000,00	99,96	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.05.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.750.000,00	5.750.000,00	-	100,00	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	419.991.180,00	349.215.289,00	70.775.891,00	83,14	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	419.991.180,00	349.215.289,00	70.775.891,00	83,14	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	3.160.949.335,00	1.811.436.361,00	348.198.854,00	83,84	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	26.423.175,00	26.300.000,00	123.175,00	99,53	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	26.423.175,00	26.300.000,00	123.175,00	99,53	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	266.400.000,00	264.450.000,00	1.950.000,00	99,26	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	266.400.000,00	264.450.000,00	1.950.000,00	99,26	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	689.763.900,00	666.139.500,00	23.624.400,00	96,57	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	689.763.900,00	666.139.500,00	23.624.400,00	96,57	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	87.683.640,00	87.683.600,00	40,00	99,99	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	87.683.640,00	87.683.600,00	40,00	99,99	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	24.768.000,00	7.920.000,00	16.848.000,00	31,97	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.768.000,00	7.920.000,00	16.848.000,00	31,97	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.06.99.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.065.506.520,00	758.943.281,00	306.563.239,00	71,22	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.06.99.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.065.506.520,00	758.943.281,00	306.563.239,00	71,22	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	7.992.940.710,00	7.983.075.000,00	9.865.710,00	99,87	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.07.03.	PENGADAAN ALAT BESAR	6.778.700.000,00	6.778.350.000,00	350.000,00	99,99	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.07.03.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.778.700.000,00	6.778.350.000,00	350.000,00	99,99	

3.1.2.5.0

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.214.240.710,00	1.204.725.000,00	9.515.710,00	99,21	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.07.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.525.000,00	9.525.000,00	-	100,00	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.07.06.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.204.715.710,00	1.195.200.000,00	9.515.710,00	99,21	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.571.444.203,00	3.392.248.444,00	179.195.759,00	94,98	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	15.250.451,00	15.115.000,00	135.451,00	99,11	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.08.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.250.451,00	15.115.000,00	135.451,00	99,11	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	2.551.047.448,00	2.447.475.203,00	103.572.245,00	95,94	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.551.047.448,00	2.447.475.203,00	103.572.245,00	95,94	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	179.494.800,00	177.142.800,00	2.352.000,00	98,69	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.08.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	179.494.800,00	177.142.800,00	2.352.000,00	98,69	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	825.661.584,00	752.526.241,00	73.135.263,00	91,14	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	825.661.584,00	752.526.241,00	73.135.263,00	91,14	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.174.415.738,00	1.011.248.287,00	163.167.523,00	86,10	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	372.112.848,00	315.654.850,00	56.457.998,00	84,82	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	372.112.848,00	315.654.850,00	56.457.998,00	84,82	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	266.065.442,00	173.846.357,00	92.219.085,00	65,33	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	266.065.442,00	173.846.357,00	92.219.085,00	65,33	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.09.11.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	536.237.448,00	521.747.000,00	14.490.448,00	97,29	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.09.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.764.160,00	28.990.000,00	1.774.160,00	94,23	
0.00.1.03.0.00.0.00.01.01.2.09.11.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	505.473.288,00	492.757.000,00	12.716.288,00	97,48	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.00.0.00.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	22.191.499.385,00	17.246.795.320,00	4.944.703.985,00	77,71	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.02.2.01.	PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.191.499.385,00	17.246.795.320,00	4.944.703.985,00	77,71	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.02.2.01.01.	PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI BENDUNGAN, EMBUNG, DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA	416.058.106,00	297.271.406,00	118.786.700,00	71,44	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.02.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	416.058.106,00	297.271.406,00	118.786.700,00	71,44	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.02.2.01.05.	PEMBANGUNAN EMBUNG DAN PENAMPUNG AIR LAINNYA	105.923.150,00	-	105.923.150,00	-	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.02.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	105.917.200,00	-	105.917.200,00	-	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.02.2.01.05.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.950,00	-	5.950,00	-	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.02.2.01.09.	PEMBANGUNAN TANGGUL SUNGAI	877.435.906,00	866.523.100,00	10.912.806,00	98,75	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.02.2.01.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	125.931.406,00	115.803.700,00	10.127.706,00	91,95	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.02.2.01.09.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	751.504.500,00	750.719.400,00	785.100,00	99,89	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.02.2.01.24.	REHABILITASI TANGGUL SUNGAI	78.390.906,00	-	78.390.906,00	-	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.02.2.01.24.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	78.387.306,00	-	78.387.306,00	-	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.02.2.01.24.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.600,00	-	3.600,00	-	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.02.2.01.46.	NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI	13.567.584.995,00	10.079.088.800,00	3.488.496.195,00	74,28	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.02.2.01.46.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.481.936.595,00	9.995.089.800,00	3.486.847.795,00	74,13	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.02.2.01.46.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.648.400,00	84.000.000,00	1.648.400,00	98,07	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.02.2.01.65.	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUNGAI	7.146.106.260,00	5.003.911.920,00	2.142.194.340,00	84,01	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.02.2.01.65.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.146.106.260,00	5.003.911.920,00	2.142.194.340,00	84,01	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	17.188.805.900,00	17.134.099.900,00	54.706.000,00	99,68	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.03.3.01.	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.188.805.900,00	17.134.099.900,00	54.706.000,00	99,68	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.00.0.00.01.03.2.01.01.	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SPAM	1.157.131.700,00	1.140.353.700,00	16.768.000,00	98,55	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.03.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.157.131.700,00	1.140.353.700,00	16.768.000,00	98,55	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.03.2.01.07.	PERLUASAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DI KAWASAN PERKOTAAN	16.011.684.200,00	15.973.746.200,00	37.938.000,00	99,76	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.03.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.011.684.200,00	15.973.746.200,00	37.938.000,00	99,76	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.95.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.698.281.574,00	4.481.198.298,00	2.217.083.276,00	66,90	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.95.2.01.	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.698.281.574,00	4.481.198.298,00	2.217.083.276,00	66,90	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.95.2.01.01.	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	502.125.500,00	497.225.500,00	4.900.000,00	99,02	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.95.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	502.125.500,00	497.225.500,00	4.900.000,00	99,02	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.95.2.01.02.	SUPERVISI PEMBANGUNAN REHABILITASI/ PENINGKATAN/PERLUASAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT SKALA KOTA	249.368.400,00	166.338.900,00	83.029.500,00	66,70	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.95.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	249.368.400,00	166.338.900,00	83.029.500,00	66,70	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.95.2.01.03.	PEMBANGUNAN/PENYEDIAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH TERPUSAT SKALA KOTA	4.471.807.200,00	2.696.653.119,00	1.775.154.081,00	60,30	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.95.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	271.807.200,00	189.845.700,00	101.961.500,00	62,48	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.95.2.01.03.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.200.000.000,00	2.526.807.419,00	1.673.192.581,00	60,16	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.95.2.01.10.	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	849.959.474,00	495.960.779,00	353.999.695,00	58,35	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.95.2.01.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	659.566.074,00	441.590.779,00	217.975.295,00	66,95	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.95.2.01.10.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	190.414.400,00	54.390.000,00	136.024.400,00	28,56	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.95.2.01.11.	PENYEDIAAN SARANA PENGANGKUTAN LUMPUR TINJA	625.000.000,00	625.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.95.2.01.11.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	625.000.000,00	625.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.96.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4.879.692.700,00	4.870.147.950,00	9.544.750,00	99,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.00.0.00.01.06.2.01.	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.879.692.700,00	4.870.147.950,00	9.544.750,00	99,80	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.06.2.01.01.	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	643.456.300,00	638.914.550,00	5.541.750,00	99,13	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.06.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	643.456.300,00	638.914.550,00	5.541.750,00	99,13	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.06.2.01.05.	PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	4.237.236.400,00	4.233.233.400,00	4.003.000,00	99,90	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.06.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	313.736.400,00	313.430.300,00	306.100,00	99,90	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.06.2.01.05.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.923.500.000,00	3.919.803.100,00	3.696.900,00	99,90	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	174.295.389.057,00	167.175.128.936,43	7.120.260.120,57	95,91	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.08.2.01.	PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	174.295.389.057,00	167.175.128.936,43	7.120.260.120,57	95,91	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.08.2.01.01.	PENYELENGGARAAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), PERAN TENAGA AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG), PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG, SERTA IMPLEMENTASI SIMBG	1.088.994.890,00	1.012.594.890,00	76.400.000,00	92,98	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.08.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.088.994.890,00	1.012.594.890,00	76.400.000,00	92,98	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.08.2.01.02.	PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENGAWASAN, DAN PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.993.677.298,00	14.652.172.354,43	341.504.943,57	97,72	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.08.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.961.841.200,00	3.813.225.926,00	148.615.274,00	96,24	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.08.2.01.02.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.031.836.098,00	10.838.946.328,43	192.889.671,57	98,25	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.08.2.01.12.	REHABILITASI, RENOVASI DAN UDAHSSJAI BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	150.548.366.410,00	145.722.621.047,00	4.825.745.363,00	96,79	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.08.2.01.12.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	135.524.975.460,00	130.897.084.097,00	4.627.891.363,00	96,58	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.08.2.01.12.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.023.390.950,00	14.825.536.950,00	197.854.000,00	98,68	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.08.2.01.13.	PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.664.350.647,00	5.787.740.835,00	1.876.609.812,00	75,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.00.0.00.01.10.2.01.13.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.664.350.647,00	5.787.740.835,00	1.876.609.812,00	75,51	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	79.689.441.412,00	77.081.942.008,02	2.607.499.403,98	96,72	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.10.2.01.	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	79.689.441.412,00	77.081.942.008,02	2.607.499.403,98	96,72	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.10.2.01.01.	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	1.499.858.106,00	1.280.447.700,00	219.410.406,00	85,37	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.10.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.499.858.106,00	1.280.447.700,00	219.410.406,00	85,37	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.10.2.01.04.	SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN	1.155.358.106,00	1.063.768.500,00	91.589.606,00	92,07	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.10.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.155.358.106,00	1.063.768.500,00	91.589.606,00	92,07	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.10.2.01.07.	PELEBARAN JALAN MENAMBAH LAJUR	25.349.664.910,00	18.912.315.770,00	437.349.140,00	97,73	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.10.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.349.664.910,00	18.912.315.770,00	437.349.140,00	97,73	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.10.2.01.10.	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN	25.602.395.500,00	25.345.356.215,00	257.039.285,00	98,99	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.10.2.01.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.602.395.500,00	25.345.356.215,00	257.039.285,00	98,99	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.10.2.01.11.	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	22.831.602.138,00	21.326.031.160,00	1.505.570.978,00	93,40	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.10.2.01.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.831.602.138,00	21.326.031.160,00	1.505.570.978,00	93,40	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.10.2.01.13.	PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN	9.250.563.664,00	9.154.022.663,02	96.540.000,98	98,95	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.10.2.01.13.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.149.031.000,00	2.052.484.000,00	96.540.000,00	95,50	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.10.2.01.13.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.101.538.664,00	7.101.538.663,02	0,98	99,99	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.068.952.085,00	538.631.455,00	530.320.350,00	50,38	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.11.2.01.	PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI	341.967.686,00	198.939.830,00	143.028.856,00	58,17	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.11.2.01.03.	PENYIAPAN SOP PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI	84.944.856,00	81.585.200,00	3.359.656,00	96,04	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.11.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	84.944.856,00	81.585.200,00	3.359.656,00	96,04	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.11.2.01.04.	PELAKSANAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI	157.026.706,00	56.355.706,00	100.632.000,00	35,91	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.00.0.00.01.11.2.01.04.5.1.01.	Belanja Barang dan Jasa	157.020.700,00	56.388.700,00	100.632.000,00	35,91	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.11.2.01.06.	FASILITASI SERTIFIKASI TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI	99.997.130,00	60.949.930,00	39.047.200,00	60,95	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.11.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	99.997.130,00	60.949.930,00	39.047.200,00	60,95	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.11.2.02.	PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	289.886.375,00	54.469.575,00	235.416.800,00	18,78	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.11.2.02.01.	PENGELOLAAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI	99.960.225,00	25.960.225,00	74.000.000,00	25,97	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.11.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	99.960.225,00	25.960.225,00	74.000.000,00	25,97	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.11.2.02.02.	PENYEDIAAN PERANGKAT PENDUKUNG LAYANAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI	189.926.150,00	28.509.350,00	161.416.800,00	15,01	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.11.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	189.926.150,00	28.509.350,00	161.416.800,00	15,01	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.11.2.04.	PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI	437.102.950,00	285.238.650,00	151.864.300,00	65,25	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.11.2.04.01.	PENYUSUNAN SOP/PEDOMAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN, DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI	74.824.900,00	50.761.900,00	24.063.000,00	67,84	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.11.2.04.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	74.824.900,00	50.761.900,00	24.063.000,00	67,84	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.11.2.04.02.	BIMBINGAN TEKNIS TENTANG TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN, DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI	282.280.150,00	226.355.150,00	55.925.000,00	80,18	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.11.2.04.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	282.280.150,00	226.355.150,00	55.925.000,00	80,18	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.11.2.04.03.	PENGAWASAN DAN EVALUASI TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN, DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI	79.997.900,00	8.121.000,00	71.876.900,00	10,15	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.11.2.04.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	79.997.900,00	8.121.000,00	71.876.900,00	10,15	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	908.991.930,00	780.854.300,00	128.137.630,00	85,90	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.12.2.01.	PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA	748.995.220,00	677.254.300,00	71.740.820,00	90,42	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.12.2.01.01.	PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI, EVALUASI, KONSULTASI EVALUASI DAN PENETAPAN RTRW KABUPATEN/KOTA	330.091.930,00	322.730.030,00	7.161.900,00	97,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.00.0.00.01.12.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	330.691.800,00	323.730.800,00	7.161.800,00	97,83	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.12.2.01.02.	PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI, EVALUASI, KONSULTASI EVALUASI DAN PENETAPAN RRTR KABUPATEN/KOTA	418.103.320,00	353.524.300,00	64.579.020,00	84,55	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.12.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	418.103.320,00	353.524.300,00	64.579.020,00	84,55	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.12.2.03.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	159.996.800,00	103.600.000,00	56.396.800,00	64,75	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.12.2.03.01.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG UNTUK INVESTASI DAN PEMBANGUNAN DAERAH	159.996.800,00	103.600.000,00	56.396.800,00	64,75	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.12.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	159.996.800,00	103.600.000,00	56.396.800,00	64,75	
	JUMLAH BELANJA	332.539.564.804,00	313.173.774.048,45	19.365.790.755,55	94,17	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(316.739.564.804,00)	(300.829.316.848,45)	(22.821.333.555,55)	94,97	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(316.739.564.804,00)	(300.829.316.848,45)	(22.821.333.555,55)	94,97	

Lampiran 1.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : **1.04.0.00.0.00.01. - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.A.	PENDAPATAN DAERAH	313.000.000,00	346.696.000,00	33.896.000,00	110,45	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.A.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	313.000.000,00	346.696.000,00	33.896.000,00	110,45	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.A.1.02.	Retribusi Daerah	313.000.000,00	346.696.000,00	33.896.000,00	110,45	
	JUMLAH PENDAPATAN	313.000.000,00	346.696.000,00	33.896.000,00	110,45	
1.04.0.01.04.0.00.0.00.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	168.724.099.198,00	160.309.274.916,00	8.413.824.282,00	95,01	
1.04.0.01.04.0.00.0.00.01.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	47.918.550.498,00	44.617.236.016,00	3.301.314.482,00	93,11	
1.04.0.01.04.0.00.0.00.01.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	151.927.005.452,00	144.585.834.475,00	7.341.188.987,00	95,16	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.788.055.035,00	8.716.803.339,00	992.051.696,00	89,78	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	36.192.813,00	25.893.750,00	298.763,00	98,85	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	11.367.300,00	11.236.100,00	131.200,00	98,84	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.367.300,00	11.236.100,00	131.200,00	98,84	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.01.08.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	7.610.800,00	7.489.850,00	120.950,00	98,41	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.01.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.610.800,00	7.489.850,00	120.950,00	98,41	

SIPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.214.413,00	7.167.800,00	46.613,00	99,35	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.214.413,00	7.167.800,00	46.613,00	99,35	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.605.669.326,00	5.342.103.385,00	263.565.941,00	95,29	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.593.745.426,00	5.330.425.885,00	263.319.541,00	95,29	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	5.593.745.426,00	5.330.425.885,00	263.319.541,00	95,29	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	5.619.700,00	5.570.500,00	49.200,00	99,12	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.619.700,00	5.570.500,00	49.200,00	99,12	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	6.304.200,00	6.107.000,00	197.200,00	96,87	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.304.200,00	6.107.000,00	197.200,00	96,87	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	38.692.000,00	13.038.795,00	25.653.205,00	33,69	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	38.692.000,00	13.038.795,00	25.653.205,00	33,69	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	38.692.000,00	13.038.795,00	25.653.205,00	33,69	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.882.173.762,00	1.651.280.633,00	230.893.129,00	87,73	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	360.306.800,00	304.318.800,00	1.885.200,00	99,66	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	566.306.800,00	304.318.800,00	1.885.200,00	99,66	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	96.202.198,00	94.568.450,00	1.633.748,00	98,30	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	96.202.198,00	94.568.450,00	1.633.748,00	98,30	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	14.500.000,00	14.500.000,00	-	100,00	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	14.500.000,00	-	100,00	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	556.134.000,00	330.946.023,00	225.187.977,00	59,50	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	556.134.000,00	330.946.023,00	225.187.977,00	59,50	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.06.10.	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	9.251.800,00	9.222.000,00	29.800,00	99,67	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.06.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.251.800,00	9.222.000,00	29.800,00	99,67	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.06.11.	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	639.378.564,00	637.225.150,00	2.153.414,00	99,66	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.06.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	639.378.564,00	637.225.150,00	2.153.414,00	99,66	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	439.917.400,00	239.765.000,00	200.152.400,00	54,50	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.07.10.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	439.917.400,00	239.765.000,00	200.152.400,00	54,50	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.07.10.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.917.400,00	89.782.000,00	135.400,00	99,84	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.07.10.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	350.000.000,00	149.983.000,00	200.017.000,00	42,85	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.187.660.435,00	1.022.139.124,00	164.916.311,00	86,10	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	246.903.231,00	182.774.012,00	64.129.219,00	74,02	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	246.903.231,00	182.774.012,00	64.129.219,00	74,02	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	23.391.000,00	22.975.000,00	416.000,00	98,22	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.08.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.391.000,00	22.975.000,00	416.000,00	98,22	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	916.746.204,00	816.381.112,00	100.365.092,00	89,05	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	916.746.204,00	816.381.112,00	100.365.092,00	89,05	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	529.369.600,00	422.591.662,00	106.577.938,00	79,85	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	529.369.600,00	422.591.662,00	106.577.938,00	79,85	
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	529.369.600,00	422.591.662,00	106.577.938,00	79,85	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.589.502.113,00	1.454.561.338,00	134.940.775,00	91,51	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.2.01.	PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	321.343.488,00	318.103.700,00	3.240.788,00	99,00	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.2.01.01.	IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA ATAU TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	110.191.744,00	109.186.350,00	1.005.394,00	99,08	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	110.191.744,00	109.186.350,00	1.005.394,00	99,08	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.2.01.02.	IDENTIFIKASI LAHAN-LAHAN POTENSIAL SEBAGAI LOKASI RELOKASI PERUMAHAN	110.767.744,00	109.702.350,00	1.065.394,00	99,03	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	110.767.744,00	109.702.350,00	1.065.394,00	99,03	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.2.01.06.	PENDATAAN RUMAH SEWA MILIK MASYARAKAT, RUMAH SUSUN DAN RUMAH KHUSUS	180.384.000,00	180.214.000,00	170.000,00	99,83	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	180.384.000,00	180.214.000,00	170.000,00	99,83	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.2.02.	SOSIALISASI DAN PERSIAPAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	48.568.972,00	47.082.050,00	1.486.922,00	96,93	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.2.02.02.	SOSIALISASI TENTANG MEKANISME PENGGANTIAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	34.759.696,00	33.637.900,00	1.121.796,00	96,77	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	34.759.696,00	33.637.900,00	1.121.796,00	96,77	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.2.02.03.	SOSIALISASI PENGEMBANGAN PERUMAHAN BARU DAN MEKANISME AKSES PERUMAHAN KPR-FLPP	13.809.276,00	13.444.150,00	365.126,00	97,35	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.809.276,00	13.444.150,00	365.126,00	97,35	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.2.03.	PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	8.393.000,00	8.289.750,00	103.250,00	98,76	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.2.03.01.	REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA	8.393.000,00	8.289.750,00	103.250,00	98,76	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.393.000,00	8.289.750,00	103.250,00	98,76	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.2.05.	PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS	922.048.421,00	794.218.738,00	127.829.683,00	86,13	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.2.05.02.	PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS	922.048.421,00	794.218.738,00	127.829.683,00	86,13	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.2.05.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	922.048.421,00	794.218.738,00	127.829.683,00	86,13	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.2.06.	PEMBERITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	288.156.224,00	285.876.100,00	2.280.124,00	99,05	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.2.06.03.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	288.156.224,00	285.876.100,00	2.280.124,00	99,05	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.2.06.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	289.156.224,00	285.876.100,00	3.280.124,00	98,86	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	7.167.375.812,00	7.049.343.488,00	118.032.324,00	98,35	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.02.	PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	1.267.438.196,00	1.205.449.872,00	61.988.324,00	95,10	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.02.01.	SURVEI DAN PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH	122.823.796,00	119.084.972,00	3.738.824,00	97,16	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	114.623.796,00	110.893.972,00	3.729.824,00	96,74	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.02.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.200.000,00	17.191.000,00	9.000,00	99,94	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.02.02.	PENYUSUNAN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH	116.461.200,00	112.659.200,00	3.802.000,00	96,73	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	116.461.200,00	112.659.200,00	3.802.000,00	96,73	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.02.03.	PEMBENTUKAN/PEMBINAAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT DI PERMUKIMAN KUMUH	77.584.400,00	71.849.400,00	5.735.000,00	92,60	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	77.584.400,00	71.849.400,00	5.735.000,00	92,60	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.02.04.	PENYADARAN PUBLIK PENCEGAHAN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH	22.700.406,00	22.700.406,00	-	100,00	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.02.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.700.406,00	22.700.406,00	-	100,00	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.02.05.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PENATAAN PEMUGARAN/PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH	44.850.506,00	38.905.506,00	5.945.000,00	86,74	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.078.506,00	10.378.506,00	700.000,00	93,68	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.02.05.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	33.772.000,00	28.527.000,00	5.245.000,00	84,46	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.02.08.	PENYUSUNAN/REVIEW/LEGALISASI KEBIJAKAN BIDANG PKP	874.017.900,00	831.250.400,00	42.767.500,00	95,10	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.02.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	874.017.900,00	831.250.400,00	42.767.500,00	95,10	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.03.	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	5.899.937.616,00	5.843.893.616,00	56.044.000,00	99,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.03.01.	PENYUSUNAN RENCANA TAPAK (SITE PLAN) DAN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) PEREMAJAAN/PEMUGARAN PERMUKIMAN KUMUH	624.598.500,00	613.630.100,00	10.968.000,00	98,24	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	624.598.500,00	613.630.500,00	10.968.000,00	98,24	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.03.04.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMUGARAN/PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH	123.769.904,00	123.769.904,00	-	100,00	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.03.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	123.769.904,00	123.769.904,00	-	100,00	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.03.06.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMUGARAN/ PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH	5.151.569.212,00	5.106.693.212,00	45.876.000,00	99,12	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.03.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	121.839.212,00	119.329.212,00	2.700.000,00	98,59	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.03.06.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.030.540.000,00	4.987.164.000,00	43.376.000,00	99,13	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	3.852.600.176,00	3.775.389.176,00	77.211.000,00	97,99	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.2.01.	PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.852.600.176,00	3.775.389.176,00	77.211.000,00	97,99	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.2.01.01.	PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DI LUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	3.852.600.176,00	3.775.389.176,00	77.211.000,00	97,99	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.852.600.176,00	3.775.389.176,00	77.211.000,00	97,99	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	146.403.576.062,00	139.311.177.475,00	7.092.398.587,00	95,15	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.2.01.	URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	146.403.576.062,00	139.311.177.475,00	7.092.398.587,00	95,15	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.2.01.01.	PERENCANAAN PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN	1.550.000.000,00	1.531.438.000,00	18.562.000,00	98,80	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000.000,00	1.531.438.000,00	18.562.000,00	98,80	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.2.01.02.	PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN	145.739.422.212,00	138.998.348.975,00	6.741.073.237,00	95,37	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	28.554.666.212,00	26.688.994.175,00	1.865.672.037,00	93,46	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.2.01.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.834.000.000,00	1.433.943.000,00	400.057.000,00	78,18	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.2.01.02.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.215.410.000,00	1.205.883.000,00	9.527.000,00	99,21	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.2.01.02.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	112.125.346.800,00	107.669.529.800,00	4.455.817.200,00	96,02	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.2.01.03.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM RANGKA PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN	148.360.550,00	70.226.500,00	78.134.050,00	47,33	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	148.360.550,00	70.226.500,00	78.134.050,00	47,33	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.2.01.04.	VERIFIKASI DAN PENYERAHAN PSU PERMUKIMAN DARI PENGEMBANG	927.863.300,00	713.164.000,00	214.799.300,00	76,85	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	817.800.000,00	603.127.000,00	214.673.000,00	73,74	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.2.01.04.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.163.300,00	110.037.000,00	126.300,00	99,88	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.2.01.05.	KERJA SAMA PENYEDIAAN/PENGELOLAAN PSU PERMUKIMAN	49.830.000,00	-	49.830.000,00	-	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	49.830.000,00	-	49.830.000,00	-	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	990.000,00	-	990.000,00	-	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.2.01.	SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MELAKSANAKAN PERANCANGAN DAN PERENCANAAN RUMAH SERTA PERENCANAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU TINGKAT KEMAMPUAN KECIL	990.000,00	-	990.000,00	-	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.2.01.01.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERBITAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI PENGEMBANG PERUMAHAN DENGAN KUALIFIKASI KECIL	990.000,00	-	990.000,00	-	
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	990.000,00	-	990.000,00	-	
	JUMLAH BELANJA	168.724.859.193,00	160.309.274.815,00	8.415.624.382,00	95,01	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(168.411.099.193,00)	(159.962.674.815,00)	(8.382.824.382,00)	94,98	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(168.411.099.193,00)	(159.962.674.815,00)	(8.382.824.382,00)	94,98	

SIPKD

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.01. - Satuan Polisi Pamong Praja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.05.0.01.05.0.00.0.00.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	34.888.533.329,00	33.562.488.603,00	1.326.044.726,00	96,67	
1.05.0.01.05.0.00.0.00.01.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	34.888.533.329,00	33.562.488.603,00	1.326.044.726,00	96,67	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.741.331.720,00	10.641.918.283,00	1.099.412.686,00	90,63	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.083.104,00	3.510.000,00	1.573.104,00	69,05	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.083.200,00	2.010.000,00	73.200,00	96,48	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.083.200,00	2.010.000,00	73.200,00	96,48	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2.999.904,00	1.500.000,00	1.499.904,00	50,00	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.999.904,00	1.500.000,00	1.499.904,00	50,00	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	9.754.143.560,00	9.334.548.304,00	419.594.256,00	95,48	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	9.756.928.880,00	9.318.467.304,00	438.461.576,00	95,50	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	9.756.928.880,00	9.318.467.304,00	438.461.576,00	95,50	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	4.699.872,00	3.587.400,00	1.112.472,00	76,33	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.699.872,00	3.587.400,00	1.112.472,00	76,33	

SIPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	2.513.808,00	2.493.600,00	20.208,00	99,19	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.513.808,00	2.493.600,00	20.208,00	99,19	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	84.073.300,00	83.720.700,00	352.600,00	99,58	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.2.05.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	84.073.300,00	83.720.700,00	352.600,00	99,58	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.2.05.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	84.073.300,00	83.720.700,00	352.600,00	99,58	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	542.227.465,00	401.014.529,00	141.212.616,00	73,95	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	79.997.500,00	71.789.800,00	8.207.700,00	89,74	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	79.997.500,00	71.789.800,00	8.207.700,00	89,74	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	34.008.425,00	32.447.500,00	1.560.925,00	95,41	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	34.008.425,00	32.447.500,00	1.560.925,00	95,41	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.2.06.08.	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	27.600.000,00	24.900.000,00	2.700.000,00	90,22	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.2.06.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	24.900.000,00	2.700.000,00	90,22	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	400.021.520,00	273.277.529,00	126.743.991,00	67,32	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	400.021.520,00	273.277.529,00	126.743.991,00	67,32	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	22.590.600,00	22.590.600,00	-	100,00	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	22.590.600,00	22.590.600,00	-	100,00	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.2.08.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.590.600,00	22.590.600,00	-	100,00	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.313.214.726,00	896.534.850,00	516.679.876,00	68,25	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	179.599.836,00	126.572.500,00	53.027.336,00	70,47	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	179.599.836,00	126.572.500,00	53.027.336,00	70,47	

SKPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.143.614.884,00	679.962.350,00	463.652.534,00	59,45	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.143.614.884,00	679.962.350,00	463.652.534,00	59,45	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.147.201.600,00	12.920.569.320,00	226.632.280,00	98,27	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.2.01.	PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	717.348.000,00	579.267.000,00	138.081.000,00	80,75	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.2.01.05.	PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERMASUK DALAM PELAKSANAAN TUGAS YANG BERKAITAN HAK ASASI MANUSIA	21.198.000,00	9.621.000,00	11.577.000,00	45,38	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.198.000,00	9.621.000,00	11.577.000,00	45,38	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.2.01.06.	KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	696.150.000,00	569.646.000,00	126.504.000,00	81,82	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	696.150.000,00	569.646.000,00	126.504.000,00	81,82	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.2.02.	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	12.430.853.600,00	12.341.302.320,00	89.551.280,00	99,28	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.2.02.02.	PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	12.350.587.600,00	12.291.028.320,00	59.559.280,00	99,51	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.350.587.600,00	12.291.028.320,00	59.559.280,00	99,51	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.2.02.03.	PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	79.266.000,00	50.274.000,00	28.992.000,00	63,42	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	79.266.000,00	50.274.000,00	28.992.000,00	63,42	
	JUMLAH BELANJA	24.888.533.329,00	23.562.488.603,00	1.326.644.726,00	94,67	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(24.888.533.329,00)	(23.562.488.603,00)	(1.326.644.726,00)	94,67	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(24.888.533.329,00)	(23.562.488.603,00)	(1.326.644.726,00)	94,67	

SIPKD

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : **1.05.0.00.0.00.04. - Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.05.0.01.05.3.00.3.00.04.00.00.5.	BELANJA DAERAH	14.727.038.889,00	13.989.081.252,00	738.557.637,00	94,98	
1.05.0.01.05.3.00.3.00.04.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	14.109.234.288,00	13.389.478.052,00	719.746.237,00	94,89	
1.05.0.01.05.3.00.3.00.04.00.00.5.2	BELANJA MODAL	618.394.600,00	599.603.200,00	18.811.400,00	96,95	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.045.949.881,00	7.561.705.424,00	484.240.377,00	93,98	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.91.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.134.000,00	1.100.000,00	34.000,00	97,00	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.91.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1.134.000,00	1.100.000,00	34.000,00	97,00	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.91.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.134.000,00	1.100.000,00	34.000,00	97,00	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.92.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.472.871.446,00	4.265.064.434,00	207.807.012,00	95,35	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.92.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.470.411.446,00	4.262.689.434,00	207.722.012,00	95,35	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.92.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.470.411.446,00	4.262.689.434,00	207.722.012,00	95,35	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.92.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.326.000,00	1.275.000,00	51.000,00	96,15	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.92.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.326.000,00	1.275.000,00	51.000,00	96,15	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.92.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	1.134.000,00	1.100.000,00	34.000,00	97,00	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.03.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.134.000,00	1.100.000,00	34.000,00	97,00	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	7.700.000,00	7.500.000,00	200.000,00	97,40	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.03.02.	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	7.700.000,00	7.500.000,00	200.000,00	97,40	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	7.500.000,00	200.000,00	97,40	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	19.656.000,00	11.387.600,00	8.268.400,00	57,93	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	19.656.000,00	11.387.600,00	8.268.400,00	57,93	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.656.000,00	11.387.600,00	8.268.400,00	57,93	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.273.778.230,00	1.187.053.797,00	86.724.433,00	93,19	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	35.879.600,00	32.815.300,00	3.064.300,00	91,45	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	35.879.600,00	32.815.300,00	3.064.300,00	91,45	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	498.037.700,00	475.888.900,00	22.148.800,00	95,55	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.06.04.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	496.037.700,00	473.888.900,00	22.148.800,00	95,53	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	380.747.650,00	368.124.000,00	12.623.650,00	96,68	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	380.747.650,00	368.124.000,00	12.623.650,00	96,68	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12.000.000,00	8.560.000,00	3.440.000,00	71,33	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	8.560.000,00	3.440.000,00	71,33	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.06.01.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	347.113.280,00	301.665.597,00	45.447.683,00	86,90	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	347.113.280,00	301.665.597,00	45.447.683,00	86,90	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	230.973.600,00	194.555.700,00	16.417.900,00	92,21	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.07.01.	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	35.000.000,00	29.580.000,00	5.420.000,00	84,51	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.07.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	29.580.000,00	5.420.000,00	84,51	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	13.973.600,00	4.000.000,00	9.973.600,00	28,62	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.07.06.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.973.600,00	4.000.000,00	9.973.600,00	28,62	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.07.10.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	162.000.000,00	160.975.700,00	1.024.300,00	99,36	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.07.10.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	162.000.000,00	160.975.700,00	1.024.300,00	99,36	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	454.426.744,00	429.261.393,00	25.165.351,00	94,46	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	212.172.000,00	195.844.357,00	16.327.643,00	92,30	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	212.172.000,00	195.844.357,00	16.327.643,00	92,30	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	242.254.744,00	233.417.036,00	8.837.708,00	96,35	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	242.254.744,00	233.417.036,00	8.837.708,00	96,35	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.606.409.781,00	1.466.786.500,00	139.623.281,00	91,30	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	232.169.056,00	171.891.000,00	60.278.056,00	74,03	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	232.169.056,00	171.891.000,00	60.278.056,00	74,03	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	330.322.125,00	264.429.000,00	65.893.125,00	80,05	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	330.322.125,00	264.429.000,00	65.893.125,00	80,05	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	60.187.800,00	53.323.800,00	6.864.000,00	88,59	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.09.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	60.187.800,00	53.323.800,00	6.864.000,00	88,59	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	688.736.800,00	684.633.900,00	4.095.900,00	99,40	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.09.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	431.309.800,00	428.936.000,00	2.373.800,00	99,44	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.09.09.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	127.421.000,00	126.648.000,00	680.100,00	99,33	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.09.09.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	130.006.000,00	129.257.000,00	743.000,00	99,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		SEETAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.09.11.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	295.000.000,00	292.508.800,00	2.491.200,00	99,15	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.09.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	145.000.000,00	143.179.200,00	1.820.800,00	98,74	
0.00.1.05.0.00.0.00.04.01.2.09.11.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	149.329.600,00	670.400,00	99,55	
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	6.680.669.000,00	6.416.351.828,00	254.317.260,00	96,09	
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.2.01.	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	301.532.500,00	298.890.000,00	2.642.500,00	99,12	
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.2.01.02.	SOSIALISASI, KOMUNIKASI,INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS BENCANA)	301.532.500,00	298.890.000,00	2.642.500,00	99,12	
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	301.532.500,00	298.890.000,00	2.642.500,00	99,12	
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.2.02.	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	2.877.279.228,00	2.731.879.181,00	145.400.047,00	94,94	
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.2.02.02.	PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA	339.715.000,00	338.875.000,00	840.000,00	99,75	
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	339.715.000,00	338.875.000,00	840.000,00	99,75	
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.2.02.03.	PENGEMDALIAN OPERASI DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA	2.320.140.728,00	2.179.240.681,00	140.900.047,00	93,93	
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.320.140.728,00	2.179.240.681,00	140.900.047,00	93,93	
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.2.02.04.	PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	1.905.000,00	-	1.905.000,00	-	
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.2.02.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.905.000,00	-	1.905.000,00	-	
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.2.02.08.	PENGEMBANGAN KAPASITAS TIM REAKSI CEPAT (TRC) BENCANA KABUPATEN/KOTA	41.498.500,00	40.128.500,00	1.370.000,00	96,69	
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.2.02.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	41.498.500,00	40.128.500,00	1.370.000,00	96,69	
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.2.02.12.	PELATIHAN KELUARGA TANGGAP BENCANA ALAM	174.036.000,00	173.635.000,00	385.000,00	99,77	
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.2.02.12.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	174.036.000,00	173.635.000,00	385.000,00	99,77	
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.2.03.	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	3.442.891.320,00	3.337.911.447,00	104.979.873,00	96,95	
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.2.03.02.	RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KAB/PATEN/KOTA	3.339.141.320,00	3.234.871.447,00	104.270.873,00	96,87	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.2.63.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.339.142.326,00	3.234.871.447,00	104.270.873,00	96,87	
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.2.63.04.	PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	93.140.000,00	93.040.000,00	100.000,00	99,89	
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.2.63.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	93.140.000,00	93.040.000,00	100.000,00	99,89	
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.2.63.06.	RESPON CEPAT BENCANA NON ALAM EPIDEMI/WABAH PENYAKIT	10.520.000,00	10.000.000,00	520.000,00	95,05	
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.2.63.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.520.000,00	10.000.000,00	520.000,00	95,05	
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.2.64.	PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	59.055.049,00	57.671.200,00	1.383.849,00	97,65	
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.2.64.06.	PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA	59.055.049,00	57.671.200,00	1.383.849,00	97,65	
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.2.64.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	59.055.049,00	57.671.200,00	1.383.849,00	97,65	
	JUMLAH BELANJA	14.727.618.889,00	13.989.061.252,00	738.557.637,00	94,98	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(14.727.618.889,00)	(13.989.061.252,00)	(738.557.637,00)	94,98	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(14.727.618.889,00)	(13.989.061.252,00)	(738.557.637,00)	94,98	

Lampiran 1.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.06. - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.0.00.0.00.06.00.0.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	1.000.000.000,00	914.859.348,00	(85.140.660,00)	91,48	
1.05.1.05.0.00.0.00.06.00.0.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.000.000.000,00	914.859.348,00	(85.140.660,00)	91,48	
1.05.1.05.0.00.0.00.06.00.0.00.00.4.1.32.	Retribusi Daerah	1.000.000.000,00	914.859.348,00	(85.140.660,00)	91,48	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.000.000.000,00	914.859.348,00	(85.140.660,00)	91,48	
1.05.0.01.05.0.00.0.00.06.00.00.5.	BELANJA DAERAH	36.657.765.869,00	35.267.150.091,00	1.390.615.778,00	96,20	
1.05.0.01.05.0.00.0.00.06.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	30.657.765.869,00	35.267.150.091,00	1.390.615.778,00	96,20	
1.05.0.01.05.0.00.0.00.06.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	3.966.324.000,00	3.772.648.000,00	193.676.000,00	95,11	
0.00.1.05.0.00.0.00.06.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.327.856.373,00	9.383.009.787,00	1.014.846.586,00	90,85	
0.00.1.05.0.00.0.00.06.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.831.282.932,00	6.494.938.670,00	336.344.262,00	95,07	
0.00.1.05.0.00.0.00.06.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.831.282.932,00	6.494.938.670,00	336.344.262,00	95,07	
0.00.1.05.0.00.0.00.06.01.2.02.01.5.1.31.	Belanja Pegawai	6.831.282.932,00	6.494.938.670,00	336.344.262,00	95,07	
0.00.1.05.0.00.0.00.06.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	7.066.000,00	3.216.700,00	3.849.300,00	45,52	
0.00.1.05.0.00.0.00.06.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.066.000,00	3.216.700,00	3.849.300,00	45,52	
0.00.1.05.0.00.0.00.06.01.2.05.11.5.1.32.	Belanja Barang dan Jasa	7.066.000,00	3.216.700,00	3.849.300,00	45,52	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.1.05.0.00.0.00.06.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	890.638.671,00	793.846.010,00	96.792.661,00	88,90	
0.00.1.05.0.00.0.00.06.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	36.267.100,00	30.692.000,00	5.575.100,00	78,77	
0.00.1.05.0.00.0.00.06.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	36.267.100,00	30.692.000,00	5.575.100,00	78,77	
0.00.1.05.0.00.0.00.06.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	178.183.000,00	166.843.700,00	11.259.300,00	93,67	
0.00.1.05.0.00.0.00.06.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	178.183.000,00	166.843.700,00	11.259.300,00	93,67	
0.00.1.05.0.00.0.00.06.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	513.890.811,00	440.588.400,00	73.302.411,00	85,73	
0.00.1.05.0.00.0.00.06.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	513.890.811,00	440.588.400,00	73.302.411,00	85,73	
0.00.1.05.0.00.0.00.06.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	19.650.000,00	13.200.000,00	6.450.000,00	67,17	
0.00.1.05.0.00.0.00.06.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.650.000,00	13.200.000,00	6.450.000,00	67,17	
0.00.1.05.0.00.0.00.06.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	152.717.760,00	150.521.910,00	2.195.850,00	98,56	
0.00.1.05.0.00.0.00.06.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	152.717.760,00	150.521.910,00	2.195.850,00	98,56	
0.00.1.05.0.00.0.00.06.01.2.06.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	750.181.346,00	631.063.982,00	119.037.364,00	84,13	
0.00.1.05.0.00.0.00.06.01.2.06.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	435.155.618,00	319.513.802,00	116.641.816,00	73,35	
0.00.1.05.0.00.0.00.06.01.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	435.155.618,00	319.513.802,00	116.641.816,00	73,35	
0.00.1.05.0.00.0.00.06.01.2.06.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	313.945.728,00	311.550.180,00	2.395.548,00	99,23	
0.00.1.05.0.00.0.00.06.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	313.945.728,00	311.550.180,00	2.395.548,00	99,23	
0.00.1.05.0.00.0.00.06.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.848.777.424,00	1.382.744.425,00	466.032.999,00	74,79	
0.00.1.05.0.00.0.00.06.01.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	100.681.824,00	95.115.129,00	5.566.695,00	94,47	
0.00.1.05.0.00.0.00.06.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.681.824,00	95.115.129,00	5.566.695,00	94,47	
0.00.1.05.0.00.0.00.06.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.676.838.200,00	1.259.679.296,00	416.358.904,00	75,15	
0.00.1.05.0.00.0.00.06.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.676.838.200,00	1.259.679.296,00	416.358.904,00	75,15	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.1.05.0.00.0.00.06.01.2.06.11.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	72.657.400,00	27.950.600,00	44.107.400,00	38,78	
0.00.1.05.0.00.0.00.06.01.2.06.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	72.657.400,00	27.950.600,00	44.107.400,00	38,78	
1.05.1.05.0.00.0.00.06.04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	16.329.809.496,00	15.963.240.304,00	366.569.192,00	97,75	
1.05.1.05.0.00.0.00.06.04.2.01.	PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.307.712.896,00	15.943.261.304,00	364.451.592,00	97,76	
1.05.1.05.0.00.0.00.06.04.2.01.02.	PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.961.843.076,00	9.843.256.909,00	118.586.167,00	98,80	
1.05.1.05.0.00.0.00.06.04.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.961.843.076,00	9.843.256.909,00	118.586.167,00	98,80	
1.05.1.05.0.00.0.00.06.04.2.01.03.	PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN	1.750.345.920,00	1.729.854.395,00	20.491.525,00	98,82	
1.05.1.05.0.00.0.00.06.04.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.345.920,00	1.729.854.395,00	20.491.525,00	98,82	
1.05.1.05.0.00.0.00.06.04.2.01.06.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG DIRI	4.595.524.000,00	4.370.150.000,00	225.374.000,00	95,09	
1.05.1.05.0.00.0.00.06.04.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	428.300.000,00	397.310.000,00	31.000.000,00	94,96	
1.05.1.05.0.00.0.00.06.04.2.01.06.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.562.439.000,00	3.372.040.000,00	190.399.000,00	94,65	
1.05.1.05.0.00.0.00.06.04.2.01.06.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	152.100.000,00	148.300.000,00	3.800.000,00	98,15	
1.05.1.05.0.00.0.00.06.04.2.01.06.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	251.785.000,00	251.300.000,00	485.000,00	99,80	
1.05.1.05.0.00.0.00.06.04.2.04.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN	22.196.500,00	20.079.000,00	2.117.500,00	90,46	
1.05.1.05.0.00.0.00.06.04.2.04.01.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN MELALUI SOSIALISASI DAN EDUKASI MASYARAKAT	22.196.500,00	20.079.000,00	2.117.500,00	90,46	
1.05.1.05.0.00.0.00.06.04.2.04.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.196.500,00	20.079.000,00	2.117.500,00	90,46	
	JUMLAH BELANJA	26.657.765.869,00	25.267.150.091,00	1.390.615.778,00	94,78	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(25.657.765.869,00)	(24.352.200.751,00)	(1.475.756.438,00)	94,91	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(25.657.765.869,00)	(24.352.200.751,00)	(1.475.756.438,00)	94,91	

Lampiran 1.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : **1.06.0.00.0.00.01. - Dinas Sosial**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.06.0.01.06.0.00.0.00.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	16.276.331.197,00	13.983.186.926,00	2.293.044.271,00	85,91	
1.06.0.01.06.0.00.0.00.01.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	16.264.751.197,00	13.983.186.926,00	2.281.464.271,00	85,97	
1.06.0.01.06.0.00.0.00.01.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	5.162.521.321,00	4.241.214.242,00	921.307.079,00	82,15	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.021.811.831,00	6.042.807.512,00	979.004.319,00	86,05	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	31.069.956,00	15.427.840,00	15.642.116,00	49,65	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	15.499.737,00	15.427.840,00	71.897,00	99,53	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.499.737,00	15.427.840,00	71.897,00	99,53	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	8.570.372,00	-	8.570.372,00	-	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.570.372,00	-	8.570.372,00	-	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.999.849,00	-	6.999.849,00	-	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.999.849,00	-	6.999.849,00	-	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.516.267.294,00	4.386.190.853,00	210.076.541,00	95,34	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.590.577.434,00	4.380.544.133,00	200.333.201,00	95,54	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.508.877.434,00	4.308.544.233,00	200.333.201,00	95,54	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	9.735.684,00	-	9.735.684,00	-	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.735.684,00	-	9.735.684,00	-	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	5.664.356,00	5.646.620,00	17.736,00	99,68	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.664.356,00	5.646.620,00	17.736,00	99,68	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	28.198.000,00	16.891.107,00	11.306.893,00	59,90	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	28.198.000,00	16.891.107,00	11.306.893,00	59,90	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	28.198.000,00	16.891.107,00	11.306.893,00	59,90	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	973.213.300,00	747.314.120,00	224.898.679,00	76,88	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	34.732.700,00	34.732.700,00	-	100,00	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	34.732.700,00	34.732.700,00	-	100,00	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	402.460.000,00	370.926.500,00	31.533.500,00	92,16	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	402.460.000,00	370.926.500,00	31.533.500,00	92,16	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	253.797.819,00	224.581.940,00	29.215.879,00	88,48	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	253.797.819,00	224.581.940,00	29.215.879,00	88,48	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	10.800.000,00	9.900.000,00	900.000,00	91,66	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	9.900.000,00	900.000,00	91,66	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	230.550.880,00	107.173.580,00	123.377.300,00	46,48	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	230.550.880,00	107.173.580,00	123.377.300,00	46,48	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.10.	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	39.872.000,00	-	39.872.000,00	-	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	39.872.000,00	-	39.872.000,00	-	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.1.06.0.00.0.00.0.00.01.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	596.343.688,00	469.065.442,00	125.278.238,00	78,92	
0.00.1.06.0.00.0.00.0.00.01.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	347.759.886,00	269.026.092,00	78.733.786,00	77,35	
0.00.1.06.0.00.0.00.0.00.01.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	347.759.886,00	269.026.092,00	78.733.786,00	77,39	
0.00.1.06.0.00.0.00.0.00.01.01.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	32.265.206,00	11.523.000,00	20.742.206,00	35,71	
0.00.1.06.0.00.0.00.0.00.01.01.2.08.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.685.206,00	11.523.000,00	9.162.206,00	55,70	
0.00.1.06.0.00.0.00.0.00.01.01.2.08.03.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.580.000,00	-	11.580.000,00	-	
0.00.1.06.0.00.0.00.0.00.01.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	214.317.606,00	188.516.350,00	25.801.256,00	87,96	
0.00.1.06.0.00.0.00.0.00.01.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	214.317.606,00	188.516.350,00	25.801.256,00	87,96	
0.00.1.06.0.00.0.00.0.00.01.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	679.719.406,00	487.917.550,00	191.801.856,00	85,45	
0.00.1.06.0.00.0.00.0.00.01.01.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	832.919.406,00	487.917.550,00	345.001.856,00	58,57	
0.00.1.06.0.00.0.00.0.00.01.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	832.919.406,00	487.917.550,00	345.001.856,00	58,57	
0.00.1.06.0.00.0.00.0.00.01.01.2.09.10.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	46.800.000,00	-	46.800.000,00	-	
0.00.1.06.0.00.0.00.0.00.01.01.2.09.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	46.800.000,00	-	46.800.000,00	-	
1.06.1.06.0.00.0.00.0.00.01.02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	753.939.545,00	618.400.322,00	135.539.327,00	82,02	
1.06.1.06.0.00.0.00.0.00.01.02.2.02.	PENGUMPULAN SUMBANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.591.567,00	5.885.340,00	29.706.227,00	16,53	
1.06.1.06.0.00.0.00.0.00.01.02.2.02.01.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERBITAN IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG	35.591.567,00	5.885.340,00	29.706.227,00	16,53	
1.06.1.06.0.00.0.00.0.00.01.02.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	35.591.567,00	5.885.340,00	29.706.227,00	16,53	
1.06.1.06.0.00.0.00.0.00.01.02.2.03.	PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	718.347.981,00	612.514.982,00	105.833.100,00	85,26	
1.06.1.06.0.00.0.00.0.00.01.02.2.03.01.	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	91.125.132,00	84.270.732,00	6.854.400,00	92,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	91.125.132,00	84.270.732,00	6.854.400,00	92,47	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.2.03.02.	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	186.617.206,00	177.139.506,00	9.477.700,00	94,92	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	186.617.206,00	177.139.506,00	9.477.700,00	94,92	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.2.03.03.	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	390.685.658,00	301.184.658,00	89.501.800,00	77,08	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.2.03.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	390.685.658,00	301.184.658,00	89.501.800,00	77,08	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.2.03.04.	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.2.03.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.893.393.835,00	1.787.676.514,00	105.716.321,00	94,41	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.01.	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	1.578.030.345,00	1.477.246.614,00	100.783.331,00	93,61	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.01.01.	PENYEDIAAN PERMAKANAN	89.477.600,00	47.334.600,00	42.143.000,00	52,90	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	89.477.600,00	47.334.600,00	42.143.000,00	52,90	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.01.02.	PENYEDIAAN SANDANG	177.380.000,00	177.273.800,00	106.200,00	99,94	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	177.380.000,00	177.273.800,00	106.200,00	99,94	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.01.03.	PENYEDIAAN ALAT BANTU	135.774.784,00	127.650.000,00	8.124.784,00	94,01	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	135.774.784,00	127.650.000,00	8.124.784,00	94,01	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.01.04.	PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA	12.552.000,00	10.238.272,00	2.313.728,00	81,56	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.552.000,00	10.238.272,00	2.313.728,00	81,56	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.01.05.	PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL	131.836.805,00	116.314.788,00	15.524.029,00	88,22	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	131.836.805,00	116.314.788,00	15.524.029,00	88,22	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.0.00.0.00.01.84.2.91.06.	PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT	157.975.630,00	154.525.630,00	3.450.000,00	97,81	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.84.2.91.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	157.975.630,00	154.525.630,00	3.450.000,00	97,81	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.84.2.91.09.	PEMBERIAN LAYANAN DATA DAN PENGADUAN	864.934.722,00	835.812.932,00	29.121.790,00	96,63	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.84.2.91.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	864.934.722,00	835.812.932,00	29.121.790,00	96,63	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.84.2.91.11.	PEMBERIAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.84.2.91.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.84.2.91.12.	PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN	6.257.200,00	6.257.200,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.84.2.91.12.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.257.200,00	6.257.200,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.84.2.92.	REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL	314.762.690,00	309.829.900,00	4.932.790,00	98,43	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.84.2.92.14.	KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL KABUPATEN/KOTA	314.762.690,00	309.829.900,00	4.932.790,00	98,43	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.84.2.92.14.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	314.762.690,00	309.829.900,00	4.932.790,00	98,43	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.85.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5.150.941.321,00	4.241.214.242,00	909.727.079,00	82,33	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.85.2.91.	PEMELIHARAAN ANAK-ANAK TERLANTAR	12.552.000,00	10.213.200,00	2.338.800,00	81,36	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.85.2.91.02.	RUJUKAN ANAK-ANAK TERLANTAR	12.552.000,00	10.213.200,00	2.338.800,00	81,36	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.85.2.91.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.552.000,00	10.213.200,00	2.338.800,00	81,36	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.85.2.91.03.	PEMANTAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMELIHARAAN ANAK TERLANTAR	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.85.2.91.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.85.2.92.	PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.118.389.321,00	4.211.001.042,00	907.388.279,00	82,27	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.85.2.92.01.	PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	45.020.700,00	45.020.700,00	-	100,00	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.020.700,00	45.020.700,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.2.02.02.	PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	310.966.597,00	310.216.592,00	750.005,00	99,75	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	310.966.597,00	310.216.592,00	750.005,00	99,75	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.2.02.03.	FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA	4.235.710.575,00	3.358.401.000,00	877.309.575,00	79,28	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.235.710.575,00	3.358.401.000,00	877.309.575,00	79,28	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.2.02.04.	FASILITASI BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT	526.691.449,00	497.362.750,00	29.328.699,00	94,43	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.2.02.04.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.2.02.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	524.691.449,00	495.362.750,00	29.328.699,00	94,41	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.212.144.869,00	1.052.987.644,00	159.157.225,00	86,86	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.2.01.	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA	623.804.784,00	527.661.784,00	96.143.000,00	84,58	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.2.01.01.	PENYEDIAAN MAKANAN	309.979.320,00	273.312.320,00	36.667.000,00	88,17	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	309.979.320,00	273.312.320,00	36.667.000,00	88,17	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.2.01.02.	PENYEDIAAN SANDANG	288.225.000,00	253.679.000,00	34.546.000,00	88,01	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	288.225.000,00	253.679.000,00	34.546.000,00	88,01	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.2.01.03.	PENYEDIAAN TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI	25.600.464,00	670.464,00	24.930.000,00	2,61	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.600.464,00	670.464,00	24.930.000,00	2,61	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.2.02.	PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	588.340.005,00	525.325.860,00	63.014.225,00	89,28	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.2.02.01.	KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN KAMPUNG SIAGA BENCANA	78.940.887,00	37.500.000,00	41.440.887,00	47,50	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	78.940.887,00	37.500.000,00	41.440.887,00	47,50	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.2.02.02.	KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA	509.399.198,00	487.825.860,00	21.573.338,00	95,76	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	509.399.198,00	487.825.860,00	21.573.338,00	95,76	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	244.190.792,00	240.290.792,00	3.900.000,00	98,40	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.2.01.	PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	244.190.792,00	240.290.792,00	3.900.000,00	98,40	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.2.01.01.	REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA TAMAN/MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	244.190.792,00	240.290.792,00	3.900.000,00	98,40	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	118.090.792,00	118.090.792,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.2.01.01.5.1.05.	Belanja Hibah	126.100.000,00	122.200.000,00	3.900.000,00	96,90	
	JUMLAH BELANJA	16.276.331.197,00	13.983.286.926,00	2.293.044.271,00	85,91	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(16.276.331.197,00)	(13.983.286.926,00)	(2.293.044.271,00)	85,91	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(16.276.331.197,00)	(13.983.286.926,00)	(2.293.044.271,00)	85,91	

Lampiran 1.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 Tahun 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : 2.07.0.00.0.00.01. - Dinas Tenaga Kerja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.07.0.02.07.0.00.0.00.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	8.431.390.418,00	6.288.193.709,00	2.143.196.709,00	74,58	
2.07.0.02.07.0.00.0.00.01.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	8.431.390.418,00	6.288.193.709,00	2.143.196.709,00	74,58	
2.07.0.02.07.0.00.0.00.01.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	932.363.448,00	80.612.800,00	852.750.648,00	8,53	
0.00.2.07.0.00.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.139.836.977,00	5.512.206.545,00	627.630.427,00	89,77	
0.00.2.07.0.00.0.00.01.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	19.991.712,00	-	19.991.712,00	-	
0.00.2.07.0.00.0.00.01.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	9.996.800,00	-	9.996.800,00	-	
0.00.2.07.0.00.0.00.01.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.996.800,00	-	9.996.800,00	-	
0.00.2.07.0.00.0.00.01.01.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	4.995.200,00	-	4.995.200,00	-	
0.00.2.07.0.00.0.00.01.01.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.995.200,00	-	4.995.200,00	-	
0.00.2.07.0.00.0.00.01.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.999.712,00	-	4.999.712,00	-	
0.00.2.07.0.00.0.00.01.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.999.712,00	-	4.999.712,00	-	
0.00.2.07.0.00.0.00.01.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.474.531.338,00	4.285.286.504,00	209.148.834,00	95,32	
0.00.2.07.0.00.0.00.01.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.469.536.138,00	4.265.286.504,00	204.249.634,00	95,43	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.2.07.0.00.0.00.01.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.469.536.138,00	4.265.286.504,00	204.249.634,00	95,43	
0.00.2.07.0.00.0.00.01.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	4.999.200,00	-	4.999.200,00	-	
0.00.2.07.0.00.0.00.01.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.999.200,00	-	4.999.200,00	-	
0.00.2.07.0.00.0.00.01.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	6.000.000,00	3.117.238,00	2.882.762,00	51,95	
0.00.2.07.0.00.0.00.01.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.000.000,00	3.117.238,00	2.882.762,00	51,95	
0.00.2.07.0.00.0.00.01.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	3.117.238,00	2.882.762,00	51,95	
0.00.2.07.0.00.0.00.01.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	556.539.944,00	433.833.696,00	122.706.948,00	77,95	
0.00.2.07.0.00.0.00.01.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	28.151.106,00	18.019.000,00	10.132.106,00	63,99	
0.00.2.07.0.00.0.00.01.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	28.151.106,00	18.019.000,00	10.132.106,00	63,99	
0.00.2.07.0.00.0.00.01.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	258.108.296,00	203.604.000,00	54.504.296,00	78,88	
0.00.2.07.0.00.0.00.01.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	258.108.296,00	203.604.000,00	54.504.296,00	78,88	
0.00.2.07.0.00.0.00.01.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	22.499.764,00	22.474.600,00	25.164,00	99,88	
0.00.2.07.0.00.0.00.01.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.499.764,00	22.474.600,00	25.164,00	99,88	
0.00.2.07.0.00.0.00.01.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	83,33	
0.00.2.07.0.00.0.00.01.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	83,33	
0.00.2.07.0.00.0.00.01.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	234.780.880,00	178.735.396,00	56.045.484,00	76,13	
0.00.2.07.0.00.0.00.01.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	234.780.880,00	178.735.396,00	56.045.484,00	76,13	
0.00.2.07.0.00.0.00.01.01.2.06.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	681.660.506,00	620.210.716,00	61.449.790,00	90,98	
0.00.2.07.0.00.0.00.01.01.2.06.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	183.553.500,00	161.605.910,00	21.947.590,00	88,04	
0.00.2.07.0.00.0.00.01.01.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	183.553.500,00	161.605.910,00	21.947.590,00	88,04	
0.00.2.07.0.00.0.00.01.01.2.06.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	41.664.000,00	29.600.000,00	12.064.000,00	87,79	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.2.07.0.00.0.00.01.01.2.00.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	43.664.000,00	29.600.000,00	14.064.000,00	67,79	
0.00.2.07.0.00.0.00.01.01.2.00.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	457.643.000,00	429.864.800,00	28.438.200,00	93,79	
0.00.2.07.0.00.0.00.01.01.2.00.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	457.643.000,00	429.864.800,00	28.438.200,00	93,79	
0.00.2.07.0.00.0.00.01.01.2.00.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	388.109.479,00	187.759.097,00	200.350.381,00	47,66	
0.00.2.07.0.00.0.00.01.01.2.00.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	277.065.018,00	158.359.000,00	118.706.018,00	57,15	
0.00.2.07.0.00.0.00.01.01.2.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	277.065.018,00	158.359.000,00	118.706.018,00	57,15	
0.00.2.07.0.00.0.00.01.01.2.00.11.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	121.044.460,00	31.400.097,00	89.644.363,00	25,94	
0.00.2.07.0.00.0.00.01.01.2.00.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	121.044.460,00	31.400.097,00	89.644.363,00	25,94	
2.07.2.07.0.00.0.00.01.03.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	309.071.458,00	107.739.364,00	201.332.094,00	34,85	
2.07.2.07.0.00.0.00.01.03.2.01.	PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	150.003.008,00	-	150.003.008,00	-	
2.07.2.07.0.00.0.00.01.03.2.01.81.	PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI	150.003.008,00	-	150.003.008,00	-	
2.07.2.07.0.00.0.00.01.03.2.01.81.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	150.003.008,00	-	150.003.008,00	-	
2.07.2.07.0.00.0.00.01.03.2.05.	PENGUKURAN PRODUKTIVITAS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	159.071.450,00	107.739.364,00	51.334.086,00	67,72	
2.07.2.07.0.00.0.00.01.03.2.05.81.	PENGUKURAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	159.071.450,00	107.739.364,00	51.334.086,00	67,72	
2.07.2.07.0.00.0.00.01.03.2.05.81.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	159.071.450,00	107.739.364,00	51.334.086,00	67,72	
2.07.2.07.0.00.0.00.01.04.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.070.113.540,00	608.635.000,00	461.478.540,00	56,87	
2.07.2.07.0.00.0.00.01.04.2.01.	PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	471.191.040,00	193.050.000,00	278.141.040,00	40,98	
2.07.2.07.0.00.0.00.01.04.2.01.82.	PELAYANAN ANTAR KERJA	277.967.940,00	-	277.967.940,00	-	
2.07.2.07.0.00.0.00.01.04.2.01.82.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	277.967.940,00	-	277.967.940,00	-	
2.07.2.07.0.00.0.00.01.04.2.01.83.	PENYULUHAN DAN BIMBINGAN JABATAN BAGI PENCARI KERJA	99.999.000,00	54.950.000,00	1.045.000,00	88,91	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.0.00.0.00.01.04.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	95.995.000,00	94.850.000,00	1.045.000,00	98,91	
2.07.2.07.0.00.0.00.01.04.2.01.05.	PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	98.220.100,00	98.100.000,00	120.100,00	99,94	
2.07.2.07.0.00.0.00.01.04.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	98.220.100,00	98.100.000,00	120.100,00	99,95	
2.07.2.07.0.00.0.00.01.04.2.03.	PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	597.922.500,00	415.585.000,00	182.337.500,00	69,50	
2.07.2.07.0.00.0.00.01.04.2.03.02.	PELAYANAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PASAR KERJA ONLINE	379.000.000,00	227.600.000,00	151.400.000,00	60,05	
2.07.2.07.0.00.0.00.01.04.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	379.000.000,00	227.600.000,00	151.400.000,00	60,05	
2.07.2.07.0.00.0.00.01.04.2.03.03.	JOB FAIR/BURSA KERJA	218.922.500,00	187.985.000,00	30.937.500,00	85,86	
2.07.2.07.0.00.0.00.01.04.2.03.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	218.922.500,00	187.985.000,00	30.937.500,00	85,86	
2.07.2.07.0.00.0.00.01.05.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	912.363.448,00	59.613.800,00	852.750.648,00	6,53	
2.07.2.07.0.00.0.00.01.05.2.02.	PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	912.363.448,00	59.613.800,00	852.750.648,00	6,53	
2.07.2.07.0.00.0.00.01.05.2.02.03.	PENYELENGGARAAN VERIFIKASI DAN REKAPITULASI KEANGGOTAAN PADA ORGANISASI PENGUSAHA, FEDERASI DAN KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH SERTA NON AFILIASI	91.297.048,00	7.600.000,00	83.697.048,00	8,32	
2.07.2.07.0.00.0.00.01.05.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	91.297.048,00	7.600.000,00	83.697.048,00	8,32	
2.07.2.07.0.00.0.00.01.05.2.02.05.	PENGEMBANGAN PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA	821.066.400,00	52.013.800,00	769.053.600,00	6,33	
2.07.2.07.0.00.0.00.01.05.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	821.066.400,00	52.013.800,00	769.053.600,00	6,33	
	JUMLAH BELANJA	8.431.390.418,00	6.288.193.709,00	2.143.196.709,00	74,58	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(8.431.390.418,00)	(6.288.193.709,00)	(2.143.196.709,00)	74,58	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.431.390.418,00)	(6.288.193.709,00)	(2.143.196.709,00)	74,58	

S.I.P.K.D

Lampiran 1.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

NOMOR : 3 Tahun 2024

TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : **2.08.2.13.0.00.02. - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.12.08.2.13.0.00.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	14.722.273.397,00	12.228.363.452,00	2.493.910.835,00	83,06	
2.08.2.12.08.2.13.0.00.02.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	14.595.590.587,00	12.102.475.552,00	2.493.117.035,00	82,91	
2.08.2.12.08.2.13.0.00.02.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	5.242.835.046,00	4.519.641.321,00	723.193.725,00	86,20	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.536.419.744,00	5.851.478.252,00	684.941.492,00	89,52	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	34.032.504,00	33.659.304,00	373.200,00	98,90	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	13.195.920,00	13.195.920,00	-	100,00	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.195.920,00	13.195.920,00	-	100,00	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	9.626.584,00	9.253.384,00	373.200,00	96,12	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.626.584,00	9.253.384,00	373.200,00	96,12	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	12.210.000,00	12.210.000,00	-	100,00	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.210.000,00	12.210.000,00	-	100,00	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.479.204.332,00	4.275.613.233,00	203.591.099,00	95,45	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.438.204.788,00	4.237.966.825,00	201.237.963,00	95,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.438.284.788,00	4.237.046.825,00	201.237.963,00	95,46	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	19.991.888,00	17.661.488,00	2.330.400,00	88,30	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.991.888,00	17.661.488,00	2.330.400,00	88,30	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN, TRIWULANAN, SEMESTERAN SKPD	19.999.736,00	19.985.000,00	14.736,00	99,92	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.999.736,00	19.985.000,00	14.736,00	99,92	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	7.066.090,00	2.816.834,00	4.249.966,00	39,85	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.066.090,00	2.816.834,00	4.249.966,00	39,85	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.066.090,00	2.816.834,00	4.249.966,00	39,85	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	876.073.592,00	663.031.977,00	213.041.615,00	75,68	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	19.989.706,00	19.989.706,00	-	100,00	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.989.706,00	19.989.706,00	-	100,00	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	12.052.500,00	12.052.500,00	-	100,00	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.06.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.052.500,00	12.052.500,00	-	100,00	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	447.709.600,00	437.198.500,00	10.511.100,00	97,65	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	447.709.600,00	437.198.500,00	10.511.100,00	97,65	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	91.418.752,00	76.968.752,00	14.450.000,00	84,19	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	91.418.752,00	76.968.752,00	14.450.000,00	84,19	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	297.403.280,00	109.322.765,00	188.080.515,00	36,75	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	297.403.280,00	109.322.765,00	188.080.515,00	36,75	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.06.10.	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	7.499.760,00	7.499.760,00	-	100,00	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.06.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.499.760,00	7.499.760,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	114.630.200,00	113.836.400,00	793.800,00	99,30	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	114.630.200,00	113.836.400,00	793.800,00	99,30	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.07.06.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.630.200,00	113.836.400,00	793.800,00	99,30	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	556.393.674,00	435.204.949,00	121.188.725,00	78,23	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	118.756.640,00	64.706.312,00	54.050.328,00	54,48	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	118.756.640,00	64.706.312,00	54.050.328,00	54,48	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	431.637.034,00	374.498.637,00	57.138.397,00	86,76	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	431.637.034,00	374.498.637,00	57.138.397,00	86,76	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	475.010.442,00	323.306.555,00	151.703.887,00	68,06	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	441.505.442,00	306.276.555,00	141.228.887,00	68,01	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	441.505.442,00	306.276.555,00	141.228.887,00	68,01	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	33.514.000,00	23.039.800,00	10.474.200,00	68,74	
0.00.2.08.2.13.0.00.02.01.2.09.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	33.514.000,00	23.039.800,00	10.474.200,00	68,74	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.01.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	867.149.324,00	641.415.626,00	225.733.698,00	73,96	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.01.2.01.	PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	233.878.024,00	136.595.000,00	97.282.024,00	58,40	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.01.2.01.01.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERUMUSAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUG	53.878.970,00	38.312.593,00	15.566.384,00	71,10	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	53.878.970,00	38.312.593,00	15.566.384,00	71,10	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.01.2.01.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PUG KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	116.999.640,00	51.150.000,00	65.849.640,00	43,72	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.01.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	116.999.640,00	51.150.000,00	65.849.640,00	43,72	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.01.2.01.03.	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PUG TERMASUK PPRG	59.999.408,00	47.133.408,00	12.866.000,00	78,55	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.01.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	59.999.408,00	47.133.408,00	12.866.000,00	78,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.08.2.13.0.00.02.02.2.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	32.501.248,00	19.421.248,00	3.080.000,00	86,31	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.02.2.02.02.	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DAN POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI	32.501.248,00	19.421.248,00	3.080.000,00	86,31	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.02.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.501.248,00	19.421.248,00	3.080.000,00	86,31	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.02.2.03.	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	610.770.052,00	485.398.378,00	125.371.674,00	79,47	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.02.2.03.01.	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN KEPADA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	151.340.000,00	97.560.000,00	53.780.000,00	64,46	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.02.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	151.340.000,00	97.560.000,00	53.780.000,00	64,46	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.02.2.03.02.	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	459.430.052,00	387.838.378,00	71.591.674,00	84,41	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.02.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	459.430.052,00	387.838.378,00	71.591.674,00	84,41	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	333.226.243,00	61.583.630,00	270.642.613,00	18,76	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.03.2.01.	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	78.227.446,00	-	78.227.446,00	-	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.03.2.01.01.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	78.227.446,00	-	78.227.446,00	-	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.03.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	78.227.446,00	-	78.227.446,00	-	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.03.2.02.	PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	254.998.796,00	61.583.630,00	192.415.166,00	24,54	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.03.2.02.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	254.998.796,00	61.583.630,00	192.415.166,00	24,54	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.03.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	254.998.796,00	61.583.630,00	192.415.166,00	24,54	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.04.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	153.109.213,00	144.132.690,00	8.976.523,00	94,13	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.08.2.13.0.00.02.04.2.01.	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.586.080,00	33.586.080,00	-	100,00	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.04.2.01.01.	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN UNTUK MEWUJUDKAN KG DAN PERLINDUNGAN ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	33.586.080,00	33.586.080,00	-	100,00	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	33.586.080,00	33.586.080,00	-	100,00	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.04.2.03.	PENYEDIAAN LAYANAN BAGI KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	119.523.132,00	118.546.610,00	976.522,00	99,18	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.04.2.03.01.	PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN KOMPREHENSIF BAGI KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN PERLINDUNGAN ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	119.523.132,00	118.546.610,00	976.522,00	99,18	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.04.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	119.523.132,00	118.546.610,00	976.522,00	99,18	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.05.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	15.200.000,00	15.200.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.05.2.01.	PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.200.000,00	15.200.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.05.2.01.02.	PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	15.200.000,00	15.200.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.05.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.200.000,00	15.200.000,00	-	100,00	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.06.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	957.766.312,00	684.566.938,00	273.199.364,00	68,14	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.06.2.01.	PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	290.514.240,00	153.748.840,00	136.765.400,00	52,92	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.06.2.01.01.	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	158.314.408,00	50.724.648,00	107.589.760,00	32,04	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.06.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	158.314.408,00	50.724.648,00	107.589.760,00	32,04	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.06.2.01.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	132.199.832,00	103.024.200,00	29.175.632,00	77,93	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.06.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	132.199.832,00	103.024.200,00	29.175.632,00	77,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.08.2.13.0.00.02.06.2.02.	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	567.252.963,00	430.818.698,00	136.433.964,00	75,94	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.06.2.02.01.	PENYEDIAAN LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	53.752.876,00	11.159.900,00	42.592.976,00	20,76	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.06.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	53.752.876,00	11.159.900,00	42.592.976,00	20,76	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.06.2.02.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.399.794,00	501.090,00	23.898.704,00	2,05	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.06.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.399.794,00	501.090,00	23.898.704,00	2,05	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.06.2.02.03.	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI PEMENUHAN HAK ANAK BAGI LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.499.769,00	18.484.265,00	24.015.504,00	43,49	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.06.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	42.499.769,00	18.484.265,00	24.015.504,00	43,49	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.06.2.02.04.	PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	446.599.713,00	400.672.933,00	45.926.780,00	89,71	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.06.2.02.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	446.599.713,00	400.672.933,00	45.926.780,00	89,71	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.07.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	676.234.381,00	375.478.715,00	300.755.586,00	55,52	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.07.2.01.	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	199.717.377,00	107.689.857,00	92.027.520,00	53,92	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.07.2.01.01.	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	87.847.520,00	-	87.847.520,00	-	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.07.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	87.847.520,00	-	87.847.520,00	-	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.07.2.01.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	111.869.857,00	107.689.857,00	4.180.000,00	96,26	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.07.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	111.869.857,00	107.689.857,00	4.180.000,00	96,26	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.07.2.02.	PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	370.987.220,00	267.788.858,00	103.198.362,00	72,18	

SKPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.08.2.13.0.00.02.07.2.02.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENDAMPINGAN ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	370.887.220,00	267.708.858,00	103.198.362,00	72,18	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.07.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	370.887.220,00	267.708.858,00	103.198.362,00	72,18	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.07.2.03.	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	105.529.704,00	-	105.529.704,00	-	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.07.2.03.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	105.529.704,00	-	105.529.704,00	-	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.07.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	105.529.704,00	-	105.529.704,00	-	
2.13.2.08.2.13.0.00.02.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	182.215.816,00	174.954.200,00	7.261.616,00	96,01	
2.13.2.08.2.13.0.00.02.04.2.01.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	182.215.816,00	174.954.200,00	7.261.616,00	96,01	
2.13.2.08.2.13.0.00.02.04.2.01.05.	PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	57.216.109,00	54.077.060,00	3.139.049,00	94,51	
2.13.2.08.2.13.0.00.02.04.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	57.216.109,00	54.077.060,00	3.139.049,00	94,51	
2.13.2.08.2.13.0.00.02.04.2.01.11.	FASILITASI PENYUSUNAN PROFIL DESA	134.999.707,00	130.877.140,00	4.122.567,00	96,95	
2.13.2.08.2.13.0.00.02.04.2.01.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	134.999.707,00	130.877.140,00	4.122.567,00	96,95	
2.13.2.08.2.13.0.00.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	5.100.952.346,00	4.378.552.421,00	722.399.925,00	85,83	
2.13.2.08.2.13.0.00.02.05.2.01.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.100.952.346,00	4.378.552.421,00	722.399.925,00	85,83	
2.13.2.08.2.13.0.00.02.05.2.01.02.	FASILITASI PENATAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.571.880.018,00	3.240.825.899,00	331.054.119,00	90,73	
2.13.2.08.2.13.0.00.02.05.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.571.880.018,00	3.240.825.899,00	331.054.119,00	90,73	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.13.2.08.2.13.3.00.02.05.2.01.04.	FASILITASI PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	74.999.672,00	-	74.999.672,00	-	
2.13.2.08.2.13.3.00.02.05.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	74.999.672,00	-	74.999.672,00	-	
2.13.2.08.2.13.4.00.02.05.2.01.05.	FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA	1.454.072.656,00	1.137.726.522,00	316.346.134,00	78,24	
2.13.2.08.2.13.4.00.02.05.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.454.072.656,00	1.137.726.522,00	316.346.134,00	78,24	
	JUMLAH BELANJA	14.722.273.287,00	12.228.362.452,00	2.493.910.835,00	83,06	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(14.722.273.287,00)	(12.228.362.452,00)	(2.493.910.835,00)	83,06	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(14.722.273.287,00)	(12.228.362.452,00)	(2.493.910.835,00)	83,06	

SIPKD

Lampiran 1.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : **2.09.0.00.0.00.01. - Dinas Ketahanan Pangan**

1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.09.0.02.09.0.00.0.00.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	7.863.719.249,00	7.538.847.751,00	324.871.498,00	95,85	
2.09.0.02.09.0.00.0.00.01.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	7.295.579.249,00	6.972.347.751,00	323.231.498,00	95,56	
2.09.0.02.09.0.00.0.00.01.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	624.903.700,00	617.455.000,00	7.437.700,00	98,80	
3.00.2.09.0.00.3.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.546.009.456,00	5.333.027.811,00	212.981.445,00	96,15	
3.00.2.09.0.00.3.00.01.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	29.158.490,00	29.158.490,00	-	100,00	
3.00.2.09.0.00.3.00.01.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	7.499.890,00	7.499.890,00	-	100,00	
3.00.2.09.0.00.3.00.01.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.499.890,00	7.499.890,00	-	100,00	
3.00.2.09.0.00.3.00.01.01.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	5.671.000,00	5.671.000,00	-	100,00	
3.00.2.09.0.00.3.00.01.01.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.671.000,00	5.671.000,00	-	100,00	
3.00.2.09.0.00.3.00.01.01.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	5.671.000,00	5.671.000,00	-	100,00	
3.00.2.09.0.00.3.00.01.01.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.671.000,00	5.671.000,00	-	100,00	
3.00.2.09.0.00.3.00.01.01.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	5.757.300,00	5.757.300,00	-	100,00	
3.00.2.09.0.00.3.00.01.01.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.757.300,00	5.757.300,00	-	100,00	

SIPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.2.09.0.00.0.00.01.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.559.300,00	4.559.300,00	-	100,00	
0.00.2.09.0.00.0.00.01.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.559.300,00	4.559.300,00	-	100,00	
0.00.2.09.0.00.0.00.01.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.206.829.160,00	3.045.688.444,00	161.140.716,00	94,97	
0.00.2.09.0.00.0.00.01.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.201.834.360,00	3.040.683.644,00	161.140.716,00	94,96	
0.00.2.09.0.00.0.00.01.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.201.834.360,00	3.040.683.644,00	161.140.716,00	94,96	
0.00.2.09.0.00.0.00.01.01.2.02.08.	PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	5.004.800,00	5.004.800,00	-	100,00	
0.00.2.09.0.00.0.00.01.01.2.02.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.004.800,00	5.004.800,00	-	100,00	
0.00.2.09.0.00.0.00.01.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.536.493.272,00	1.531.272.565,00	5.220.707,00	99,66	
0.00.2.09.0.00.0.00.01.01.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	193.986.400,00	192.939.400,00	1.047.000,00	99,46	
0.00.2.09.0.00.0.00.01.01.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.986.400,00	3.986.400,00	-	100,00	
0.00.2.09.0.00.0.00.01.01.2.06.02.5.2.12.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	190.000.000,00	188.953.000,00	1.047.000,00	99,44	
0.00.2.09.0.00.0.00.01.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	202.217.500,00	201.687.100,00	530.400,00	99,73	
0.00.2.09.0.00.0.00.01.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	202.217.500,00	201.687.100,00	530.400,00	99,73	
0.00.2.09.0.00.0.00.01.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	838.477.612,00	836.840.712,00	1.636.900,00	99,80	
0.00.2.09.0.00.0.00.01.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	838.477.612,00	836.840.712,00	1.636.900,00	99,80	
0.00.2.09.0.00.0.00.01.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	21.000.000,00	19.250.000,00	1.750.000,00	91,66	
0.00.2.09.0.00.0.00.01.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	19.250.000,00	1.750.000,00	91,66	
0.00.2.09.0.00.0.00.01.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	280.811.760,00	280.555.353,00	256.407,00	99,90	
0.00.2.09.0.00.0.00.01.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	280.811.760,00	280.555.353,00	256.407,00	99,90	
0.00.2.09.0.00.0.00.01.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
0.00.2.09.0.00.0.00.01.01.2.07.08.	PENGADAAN ASET TAK BERWUJUD	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
0.00.2.09.0.00.0.00.01.01.2.07.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.2.09.0.00.0.00.01.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	269.288.634,00	246.436.739,00	22.851.895,00	91,51	
0.00.2.09.0.00.0.00.01.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	101.510.352,00	89.796.363,00	11.713.989,00	88,46	
0.00.2.09.0.00.0.00.01.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	101.510.352,00	89.796.363,00	11.713.989,00	88,46	
0.00.2.09.0.00.0.00.01.01.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	29.690.200,00	29.690.200,00	-	100,00	
0.00.2.09.0.00.0.00.01.01.2.08.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.690.200,00	29.690.200,00	-	100,00	
0.00.2.09.0.00.0.00.01.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	138.088.073,00	126.950.176,00	11.137.896,00	91,93	
0.00.2.09.0.00.0.00.01.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	138.088.072,00	126.950.176,00	11.137.896,00	91,93	
0.00.2.09.0.00.0.00.01.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	474.240.000,00	450.470.863,00	23.769.137,00	94,98	
0.00.2.09.0.00.0.00.01.01.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	199.916.800,00	188.332.700,00	11.584.100,00	93,59	
0.00.2.09.0.00.0.00.01.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	199.916.800,00	188.332.700,00	11.584.100,00	93,59	
0.00.2.09.0.00.0.00.01.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	93.323.200,00	81.244.463,00	12.078.737,00	87,05	
0.00.2.09.0.00.0.00.01.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	93.323.200,00	81.244.463,00	12.078.737,00	87,05	
0.00.2.09.0.00.0.00.01.01.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	250.000.000,00	199.893.700,00	106.300,00	99,94	
0.00.2.09.0.00.0.00.01.01.2.09.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	199.893.700,00	106.300,00	99,94	
2.09.2.09.0.00.0.00.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	467.886.699,00	466.300.744,00	1.585.955,00	99,66	
2.09.2.09.0.00.0.00.01.02.2.01.	PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	467.886.699,00	466.300.744,00	1.585.955,00	99,66	
2.09.2.09.0.00.0.00.01.02.2.01.03.	PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN LAINNYA	456.671.944,00	455.917.744,00	754.200,00	99,83	
2.09.2.09.0.00.0.00.01.02.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	98.531.944,00	98.330.744,00	201.200,00	99,80	
2.09.2.09.0.00.0.00.01.02.2.01.03.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	181.440.000,00	181.149.000,00	291.000,00	99,83	
2.09.2.09.0.00.0.00.01.02.2.01.03.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	176.700.000,00	176.398.000,00	302.800,00	99,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.09.2.09.0.00.0.00.01.02.2.01.04.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR LOGISTIK	11.214.755,00	10.383.000,00	831.755,00	92,58	
2.09.2.09.0.00.0.00.01.02.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.214.755,00	10.383.000,00	831.755,00	92,58	
2.09.2.09.0.00.0.00.91.03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.008.305.440,00	905.170.389,00	103.135.051,00	90,34	
2.09.2.09.0.00.0.00.91.03.2.01.	PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	582.710.474,00	549.504.691,00	33.205.783,00	94,30	
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.2.01.01.	PENYEDIAAN INFORMASI HARGA PANGAN DAN NERACA BAHAN MAKANAN	49.999.952,00	45.919.534,00	4.080.418,00	91,83	
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	49.999.952,00	45.919.534,00	4.080.418,00	91,83	
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.2.01.02.	PENYEDIAAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	197.418.094,00	183.858.694,00	13.559.400,00	93,13	
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	197.418.094,00	183.858.694,00	13.559.400,00	93,13	
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.2.01.04.	PEMANTAUAN STOK, PASOKAN DAN HARGA PANGAN	142.426.878,00	130.233.994,00	12.192.884,00	91,43	
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	142.426.878,00	130.233.994,00	12.192.884,00	91,43	
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.2.01.05.	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN JARINGAN DISTRIBUSI PANGAN	91.952.215,00	89.234.260,00	2.717.955,00	97,04	
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	91.952.215,00	89.234.260,00	2.717.955,00	97,04	
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.2.01.06.	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN USAHA PANGAN MASYARAKAT DAN TOKO TANI INDONESIA	916.000,00	916.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	916.000,00	916.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.2.01.07.	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA	99.997.425,00	99.342.300,00	655.125,00	99,34	
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	99.997.425,00	99.342.300,00	655.125,00	99,34	
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.2.02.	PENGELOLAAN DAN KESEMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA	71.730.300,00	12.364.400,00	59.365.900,00	17,23	
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.2.02.03.	PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	69.787.300,00	10.421.400,00	59.365.900,00	14,93	
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	69.787.300,00	10.421.400,00	59.365.900,00	14,93	
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.2.02.04.	PEMELIHARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	1.943.000,00	1.943.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.09.2.09.0.00.0.00.0.00.01.03.2.02.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.943.000,00	1.943.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.0.00.0.00.0.00.01.03.2.03.	PENENTUAN HARGA MINIMUM DAERAH UNTUK PANGAN LOKAL YANG TIDAK DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI	39.997.348,00	36.212.348,00	3.785.000,00	87,38	
2.09.2.09.0.00.0.00.0.00.01.03.2.03.01.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENENTUAN HARGA MINIMUM PANGAN POKOK LOKAL	39.997.348,00	36.212.348,00	3.785.000,00	87,38	
2.09.2.09.0.00.0.00.0.00.01.03.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	39.997.348,00	36.212.348,00	3.785.000,00	87,38	
2.09.2.09.0.00.0.00.0.00.01.03.2.04.	PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI	383.847.318,00	377.068.949,00	6.778.369,00	98,23	
2.09.2.09.0.00.0.00.0.00.01.03.2.04.01.	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN TARGET KONSUMSI PANGAN PER KAPITA PER TAHUN	77.083.600,00	76.910.500,00	173.100,00	99,77	
2.09.2.09.0.00.0.00.0.00.01.03.2.04.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	77.083.600,00	76.910.500,00	173.100,00	99,77	
2.09.2.09.0.00.0.00.0.00.01.03.2.04.02.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	277.397.518,00	271.903.449,00	5.494.069,00	98,01	
2.09.2.09.0.00.0.00.0.00.01.03.2.04.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	277.397.518,00	271.903.449,00	5.494.069,00	98,01	
2.09.2.09.0.00.0.00.0.00.01.03.2.04.03.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI KONSUMSI PER KAPITA PER TAHUN	29.376.200,00	28.265.000,00	1.111.200,00	96,21	
2.09.2.09.0.00.0.00.0.00.01.03.2.04.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.376.200,00	28.265.000,00	1.111.200,00	96,21	
2.09.2.09.0.00.0.00.0.00.01.04.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	684.753.954,00	683.383.607,00	1.370.347,00	99,79	
2.09.2.09.0.00.0.00.0.00.01.04.2.01.	PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN	242.940.544,00	242.687.207,00	253.337,00	99,89	
2.09.2.09.0.00.0.00.0.00.01.04.2.01.01.	PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN	242.940.544,00	242.687.207,00	253.337,00	99,89	
2.09.2.09.0.00.0.00.0.00.01.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	242.940.544,00	242.687.207,00	253.337,00	99,89	
2.09.2.09.0.00.0.00.0.00.01.04.2.02.	PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	441.813.410,00	440.696.400,00	1.117.010,00	99,74	
2.09.2.09.0.00.0.00.0.00.01.04.2.02.01.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KABUPATEN/KOTA	18.692.500,00	18.681.500,00	11.000,00	99,93	
2.09.2.09.0.00.0.00.0.00.01.04.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.692.500,00	18.681.500,00	11.000,00	99,93	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Bagi Hasil
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.2.02.02.	PELAKSANAAN PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PADA KERAWANAN PANGAN YANG MENCAKUP DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	423.120.610,00	422.014.900,00	1.105.710,00	99,73	
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	423.120.610,00	422.014.900,00	1.105.710,00	99,73	
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	75.763.700,00	73.966.000,00	5.797.700,00	92,44	
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.2.01.	PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.763.700,00	73.966.000,00	5.797.700,00	92,44	
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.2.01.01.	PENGUATAN KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.794.400,00	14.135.500,00	5.658.900,00	71,41	
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.794.400,00	14.135.500,00	5.658.900,00	71,41	
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.2.01.02.	SERTIFIKASI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.933.600,00	6.922.500,00	11.100,00	99,83	
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.933.600,00	6.922.500,00	11.100,00	99,83	
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.2.01.05.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.035.700,00	49.906.000,00	127.700,00	99,74	
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.035.700,00	49.906.000,00	127.700,00	99,74	
	JUMLAH BELANJA	7.843.719.240,00	7.518.847.751,80	324.871.488,00	95,85	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(7.843.719.240,00)	(7.518.847.751,00)	(324.871.488,00)	95,85	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.843.719.240,00)	(7.518.847.751,00)	(324.871.488,00)	95,85	

SEPEDA

Lampiran 1.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : 2.10.0.00.0.00.01. - Dinas Pertanahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.10.0.02.10.0.00.0.00.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	9.693.377.864,00	8.965.974.465,00	2.727.403.399,00	71,84	
2.10.0.02.10.0.00.0.00.01.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	7.179.671.040,00	6.067.486.190,00	1.113.184.850,00	84,50	
2.10.0.02.10.0.00.0.00.01.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	2.513.706.824,00	898.488.275,00	1.615.218.549,00	35,74	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.855.646.716,00	4.321.818.926,00	533.827.781,00	89,00	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.824.000,00	4.662.500,00	161.500,00	96,65	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	3.172.000,00	3.112.500,00	59.500,00	97,24	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.172.000,00	3.112.500,00	59.500,00	97,24	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	942.000,00	925.000,00	17.000,00	98,19	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	942.000,00	925.000,00	17.000,00	98,19	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.710.000,00	1.625.000,00	85.000,00	95,03	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.710.000,00	1.625.000,00	85.000,00	95,03	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.310.980.984,00	3.166.206.571,00	144.774.413,00	95,63	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.306.261.232,00	3.161.699.071,00	144.562.161,00	95,63	

SIPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.308.261.232,00	3.163.699.071,00	144.562.161,00	95,62	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2.383.300,00	2.315.000,00	68.300,00	97,13	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.383.300,00	2.315.000,00	68.300,00	97,13	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	2.336.452,00	2.192.300,00	144.152,00	93,83	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.336.452,00	2.192.300,00	144.152,00	93,83	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.3.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	2.095.200,00	-	2.095.200,00	-	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.03.01.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	1.838.000,00	-	1.838.000,00	-	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.838.000,00	-	1.838.000,00	-	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.03.05.	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	1.857.200,00	-	1.857.200,00	-	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.03.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.857.200,00	-	1.857.200,00	-	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	714.418.218,00	475.990.018,00	238.418.198,00	66,62	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PEMERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.560.000,00	4.560.000,00	-	100,00	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.560.000,00	4.560.000,00	-	100,00	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	24.535.400,00	24.432.500,00	102.900,00	99,58	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.06.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.535.400,00	24.432.500,00	102.900,00	99,58	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	235.875.100,00	225.833.000,00	10.042.100,00	95,74	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	235.875.100,00	225.833.000,00	10.042.100,00	95,74	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	62.361.796,00	62.175.000,00	186.796,00	99,70	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	62.361.796,00	62.175.000,00	186.796,00	99,70	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	18.300.000,00	10.800.000,00	7.500.000,00	59,01	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.300.000,00	10.800.000,00	7.500.000,00	59,01	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	368.783.910,00	148.197.518,00	220.586.402,00	40,18	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	368.783.910,00	148.197.518,00	220.586.402,00	40,18	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.06.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	412.862.190,00	391.226.140,00	21.636.050,00	94,75	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.06.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	412.862.190,00	391.226.140,00	21.636.050,00	94,75	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	412.862.190,00	391.226.140,00	21.636.050,00	94,75	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	410.468.130,00	283.725.990,00	126.742.230,00	69,12	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	295.474.890,00	203.792.890,00	91.682.000,00	68,97	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	295.474.890,00	203.792.890,00	91.682.000,00	68,97	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	81.127.400,00	60.313.190,00	20.814.300,00	74,34	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	81.127.400,00	60.313.190,00	20.814.300,00	74,34	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	33.865.920,00	19.620.000,00	14.245.920,00	57,93	
0.00.2.10.0.00.0.00.01.01.2.09.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	33.865.920,00	19.620.000,00	14.245.920,00	57,93	
2.10.2.10.0.00.0.00.01.04.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1.111.064.900,00	1.104.618.681,00	6.446.219,00	99,41	
2.10.2.10.0.00.0.00.01.04.2.01.	PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.111.064.900,00	1.104.618.681,00	6.446.219,00	99,41	
2.10.2.10.0.00.0.00.01.04.2.01.01.	INVENTARISASI SENGKETA, KONFLIK, DAN PERKARA PERTANAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.111.064.900,00	1.104.618.681,00	6.446.219,00	99,41	
2.10.2.10.0.00.0.00.01.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.111.064.900,00	1.104.618.681,00	6.446.219,00	99,41	
2.10.2.10.0.00.0.00.01.10.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	3.726.646.204,00	1.539.536.855,00	2.187.109.399,00	41,31	
2.10.2.10.0.00.0.00.01.10.2.01.	PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.726.646.204,00	1.539.536.855,00	2.187.109.399,00	41,31	
2.10.2.10.0.00.0.00.01.10.2.01.01.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH	182.134.930,00	180.743.830,00	1.391.100,00	99,23	
2.10.2.10.0.00.0.00.01.10.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	52.134.930,00	52.067.080,00	67.850,00	99,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.10.2.10.0.00.0.00.01.10.2.01.01.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	130.000.000,00	126.676.750,00	3.323.250,00	98,98	
2.10.2.10.0.00.0.00.01.10.2.01.03.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH KABUPATEN/KOTA	3.544.531.324,00	1.358.793.035,00	2.185.738.290,00	38,33	
2.10.2.10.0.00.0.00.01.10.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.160.824.500,00	588.981.500,00	571.843.000,00	50,73	
2.10.2.10.0.00.0.00.01.10.2.01.03.5.2.01.	Belanja Modal Tanah	2.383.706.824,00	769.811.535,00	1.613.895.289,00	32,19	
	JUMLAH BELANJA	9.693.377.864,00	6.965.974.465,00	2.727.403.399,00	71,86	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(9.693.377.864,00)	(6.965.974.465,00)	(2.727.403.399,00)	71,86	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(9.693.377.864,00)	(6.965.974.465,00)	(2.727.403.399,00)	71,86	

SIPKD

Lampiran 1.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : **2.11.0.00.0.00.01. - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.0.00.0.00.01.00.0.00.00.A	PENDAPATAN DAERAH	32.746.985.792,00	4.386.567.790,00	(28.360.418.002,00)	13,39	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.00.0.00.00.A1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	32.746.985.792,00	4.386.567.790,00	(28.360.418.002,00)	13,39	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.00.0.00.00.A1.02.	Retribusi Daerah	32.746.985.792,00	4.386.567.790,00	(28.360.418.002,00)	13,39	
	JUMLAH PENDAPATAN	32.746.985.792,00	4.386.567.790,00	(28.360.418.002,00)	13,39	
2.11.0.02.11.0.00.0.00.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	134.169.156.015,00	117.708.323.614,55	6.556.633.060,45	94,72	
2.11.0.02.11.0.00.0.00.01.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	122.666.881.445,00	115.278.793.614,55	6.388.086.430,45	94,74	
2.11.0.02.11.0.00.0.00.01.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	3.598.374.570,00	2.429.730.000,00	168.544.570,00	93,51	
0.00.2.11.0.00.3.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.545.754.640,00	10.282.935.072,00	662.849.568,00	93,94	
0.00.2.11.0.00.3.00.01.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	33.911.206,00	28.149.179,00	5.761.027,00	83,00	
0.00.2.11.0.00.3.00.01.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	15.238.790,00	15.149.379,00	89.411,00	99,41	
0.00.2.11.0.00.3.00.01.01.2.01.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
0.00.2.11.0.00.3.00.01.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.238.790,00	13.149.379,00	89.411,00	99,32	
0.00.2.11.0.00.3.00.01.01.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	5.981.850,00	4.654.800,00	1.247.850,00	78,15	
0.00.2.11.0.00.3.00.01.01.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.981.850,00	4.654.800,00	1.247.850,00	78,15	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.851.896,00	6.767.896,00	84.056,00	98,77	
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.851.896,00	6.767.896,00	84.056,00	98,77	
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.918.750,00	1.578.000,00	4.340.750,00	26,66	
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.918.750,00	1.578.000,00	4.340.750,00	26,66	
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.397.958.688,00	7.055.624.647,00	342.333.941,00	95,37	
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.386.193.288,00	7.044.057.647,00	342.135.641,00	95,36	
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	7.386.193.288,00	7.044.057.647,00	342.135.641,00	95,36	
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	6.007.450,00	5.947.000,00	60.450,00	98,99	
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.007.450,00	5.947.000,00	60.450,00	98,99	
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	5.757.850,00	5.610.000,00	147.850,00	97,43	
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.757.850,00	5.610.000,00	147.850,00	97,43	
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	817.983.347,00	671.628.737,00	146.354.610,00	82,10	
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	16.528.200,00	16.483.700,00	45.500,00	99,72	
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.528.200,00	16.483.700,00	45.500,00	99,72	
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	433.203.725,00	366.215.590,00	66.988.135,00	84,54	
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	233.964.600,00	187.248.500,00	46.716.100,00	80,03	
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06.04.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.239.125,00	198.967.000,00	253.125,00	99,87	
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	249.434.422,00	213.181.984,00	36.242.438,00	85,46	
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	249.434.422,00	213.181.984,00	36.242.438,00	85,46	
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	18.000.000,00	7.740.000,00	10.260.000,00	43,00	
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	7.740.000,00	10.260.000,00	43,00	

SKPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	80.636.000,00	27.807.553,00	52.828.447,00	34,48	
3.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	80.636.000,00	27.807.553,00	52.828.447,00	34,48	
3.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06.10.	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	20.200.000,00	20.200.000,00	-	100,00	
3.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.200.000,00	20.200.000,00	-	100,00	
3.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.182.614.031,00	2.087.698.749,00	94.915.282,00	95,65	
3.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	
3.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.08.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	
3.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.270.551.807,00	1.210.019.485,00	60.532.322,00	95,23	
3.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.270.551.807,00	1.210.019.485,00	60.532.322,00	95,23	
3.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	49.625.000,00	44.215.000,00	5.410.000,00	89,10	
3.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.08.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	49.625.000,00	44.215.000,00	5.410.000,00	89,10	
3.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	859.927.224,00	833.454.264,00	26.472.960,00	96,92	
3.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	859.927.224,00	833.454.264,00	26.472.960,00	96,92	
3.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	513.277.458,00	439.803.798,00	73.473.658,00	85,68	
3.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	162.781.218,00	115.828.000,00	46.953.218,00	71,15	
3.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	162.781.218,00	115.828.000,00	46.953.218,00	71,15	
3.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	350.496.200,00	313.975.760,00	36.520.440,00	92,42	
3.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	350.496.200,00	313.975.760,00	36.520.440,00	92,42	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.02.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	460.440.000,00	331.060.000,00	129.380.000,00	71,90	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.02.1.01.	RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA	99.000.000,00	99.000.000,00	-	100,00	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.0.00.0.00.01.03.2.01.01.	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPPLH KABUPATEN/KOTA	99.000.000,00	99.000.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.03.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	99.000.000,00	99.000.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.03.2.02.	PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA	361.440.000,00	232.060.000,00	129.380.000,00	64,20	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.03.2.02.01.	PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS RENCANA TATA RUANG	361.440.000,00	232.060.000,00	129.380.000,00	64,20	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.03.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	361.440.000,00	232.060.000,00	129.380.000,00	64,20	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.03.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DANIATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	282.339.313,00	244.938.813,00	37.390.500,00	86,75	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.03.2.01.	PENCEGAHAN PENCEMARAN DANIATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	282.339.313,00	244.938.813,00	37.390.500,00	86,75	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.03.2.01.01.	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT	212.889.313,00	207.438.813,00	5.450.500,00	97,43	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.03.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	212.889.313,00	207.438.813,00	5.450.500,00	97,43	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.03.2.01.02.	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM	69.440.000,00	37.500.000,00	31.940.000,00	54,00	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.03.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	69.440.000,00	37.500.000,00	31.940.000,00	54,00	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.04.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	16.514.091.992,00	15.864.486.934,00	649.595.058,00	96,06	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.04.2.01.	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	16.514.091.992,00	15.864.486.934,00	649.595.058,00	96,06	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.04.2.01.04.	PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	16.514.091.992,00	15.864.486.934,00	649.595.058,00	96,06	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.04.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.639.091.992,00	15.078.656.934,00	560.345.058,00	96,41	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.04.2.01.04.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	875.000.000,00	785.750.000,00	89.250.000,00	90,00	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	173.734.040,00	126.038.240,00	47.695.800,00	72,54	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.06.2.01.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DANIATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	173.734.040,00	126.038.240,00	47.695.800,00	72,54	

SIPAD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.0.00.0.00.01.06.2.01.01.	FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN DAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU IZIN PPLH	171.884.160,00	126.038.240,00	45.845.920,00	73,32	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.06.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	171.884.160,00	126.038.240,00	45.845.920,00	73,32	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.06.2.01.03.	PENGAWASAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN HIDUP, IZIN PPLH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.849.900,00	-	1.849.900,00	-	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.06.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.849.900,00	-	1.849.900,00	-	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	313.987.800,00	288.527.800,00	25.460.000,00	91,89	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.08.2.01.	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	313.987.800,00	288.527.800,00	25.460.000,00	91,89	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.08.2.01.02.	PENDAMPINGAN GERAKAN PEDULI LINGKUNGAN HIDUP	313.987.800,00	288.527.800,00	25.460.000,00	91,89	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.08.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	313.987.800,00	288.527.800,00	25.460.000,00	91,89	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.09.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	206.896.000,00	206.756.000,00	140.000,00	99,93	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.09.2.01.	PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	206.896.000,00	206.756.000,00	140.000,00	99,93	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.09.2.01.01.	PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN/FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	206.896.000,00	206.756.000,00	140.000,00	99,93	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.09.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	206.896.000,00	206.756.000,00	140.000,00	99,93	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	99.368.018.210,00	98.361.896.155,55	5.006.122.054,45	94,75	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.11.2.01.	PENGELOLAAN SAMPAH	99.368.018.210,00	98.361.896.155,55	5.006.122.054,45	94,75	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.11.2.01.01.	PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN/KOTA	118.600.000,00	118.600.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.11.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	118.600.000,00	118.600.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.11.2.01.02.	PENGURANGAN SAMPAH DENGAN MELAKUKAN PEMBATASAN, PENDAURAN ULANG DAN PEMANFAATAN KEMBALI	1.339.451.540,00	1.209.036.240,00	130.415.300,00	90,26	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.11.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.339.451.540,00	1.209.036.240,00	130.415.300,00	90,26	

SEKIAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.0.00.0.00.01.11.2.01.03.	PENANGANAN SAMPAH DENGAN MELAKUKAN PEMILAHAN, PENGUMPULAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN, DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA	92.786.748.910,00	88.029.311.035,55	4.757.437.874,45	94,87	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.11.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	91.262.693.465,00	86.584.298.035,55	4.678.395.429,45	94,87	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.11.2.01.03.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	755.881.625,00	745.717.000,00	10.164.625,00	98,65	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.11.2.01.03.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	196.966.000,00	3.034.000,00	98,48	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.11.2.01.03.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	568.173.820,00	502.330.000,00	65.843.820,00	88,41	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.11.2.01.04.	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.123.217.760,00	1.006.948.886,00	116.268.880,00	89,64	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.11.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.123.217.760,00	1.006.948.886,00	116.268.880,00	89,64	
	JUMLAH BELANJA	124.265.156.015,00	117.708.523.014,55	6.556.633.000,45	94,72	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(91.518.176.223,00)	(113.321.955.224,55)	(34.917.051.002,45)	123,82	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(91.518.176.223,00)	(113.321.955.224,55)	(34.917.051.002,45)	123,82	

SIPAD

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : 2.12.0.00.0.00.03. - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.12.2.12.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	2.000.000.000,00	41.200.000,00	(1.958.800.000,00)	2,06	
2.12.2.12.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.000.000.000,00	41.200.000,00	(1.958.800.000,00)	2,06	
2.12.2.12.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	2.000.000.000,00	41.200.000,00	(1.958.800.000,00)	2,06	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.000.000.000,00	41.200.000,00	(1.958.800.000,00)	2,06	
2.12.0.02.12.0.00.0.00.03.00.00.5.	BELANJA DAERAH	19.277.886.539,00	18.092.682.437,00	1.185.804.102,00	93,85	
2.12.0.02.12.0.00.0.00.03.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	16.331.721.539,00	17.194.014.637,00	1.137.706.902,00	93,79	
2.12.0.02.12.0.00.0.00.03.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	1.000.332.954,00	941.347.400,00	55.985.554,00	94,40	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.596.361.025,00	17.488.316.937,00	1.068.058.088,00	94,24	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	20.465.800,00	18.552.800,00	1.913.000,00	90,65	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5.635.000,00	5.243.400,00	391.600,00	93,05	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.635.000,00	5.243.400,00	391.600,00	93,05	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	5.415.400,00	5.031.400,00	384.000,00	92,90	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.415.400,00	5.031.400,00	384.000,00	92,90	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.415.400,00	4.279.000,00	1.136.400,00	79,01	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.415.400,00	4.279.000,00	1.136.400,00	79,01	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	9.838.360.160,00	9.054.331.892,00	470.917.268,00	95,05	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	9.514.787.760,00	9.043.876.492,00	470.911.268,00	95,05	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	9.514.787.760,00	9.043.876.492,00	470.911.268,00	95,05	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	4.969.900,00	4.965.900,00	4.000,00	99,91	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.969.900,00	4.965.900,00	4.000,00	99,91	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	5.491.500,00	5.488.500,00	3.000,00	99,95	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.491.500,00	5.488.500,00	3.000,00	99,95	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	6.955.800,00	4.463.800,00	2.492.000,00	64,17	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.03.05.	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	6.955.800,00	4.463.800,00	2.492.000,00	64,17	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.03.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.955.800,00	4.463.800,00	2.492.000,00	64,17	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	24.132.800,00	3.316.900,00	20.805.100,00	13,78	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	24.132.800,00	3.316.900,00	20.805.100,00	13,78	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.132.800,00	3.316.900,00	20.805.100,00	13,78	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	4.096.316.018,00	4.057.480.270,00	38.835.748,00	99,05	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	8.435.000,00	8.435.000,00	-	100,00	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.435.000,00	8.435.000,00	-	100,00	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	2.590.797.000,00	2.572.572.125,00	18.224.875,00	99,29	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.590.797.000,00	2.572.572.125,00	18.224.875,00	99,29	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.203.197.536,00	1.199.358.810,00	3.838.726,00	99,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	184.997.538,00	181.158.810,00	3.838.728,00	97,92	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.06.05.5.1.05.	Belanja Hibah	1.818.200.000,00	1.818.200.000,00	-	100,00	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	198.888.000,00	193.399.985,00	5.488.015,00	97,24	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	198.888.000,00	193.399.985,00	5.488.015,00	97,24	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.06.10.	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	94.998.480,00	83.714.350,00	11.284.130,00	88,12	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.06.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	94.998.480,00	83.714.350,00	11.284.130,00	88,12	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	946.083.000,00	897.985.800,00	48.097.200,00	94,91	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	10.000.000,00	9.600.000,00	400.000,00	96,00	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.07.05.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	9.600.000,00	400.000,00	96,00	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	936.083.000,00	888.385.800,00	47.697.200,00	94,90	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.07.06.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	936.083.000,00	888.385.800,00	47.697.200,00	94,90	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.381.387.947,00	3.166.467.971,00	214.919.976,00	93,64	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	12.000.000,00	9.781.000,00	2.219.000,00	81,50	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.08.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	9.781.000,00	2.219.000,00	81,50	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	399.999.947,00	307.848.185,00	92.151.762,00	76,96	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	399.999.947,00	307.848.185,00	92.151.762,00	76,96	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.969.388.000,00	2.848.818.786,00	120.569.214,00	95,94	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.969.388.000,00	2.848.818.786,00	120.569.214,00	95,94	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	555.801.300,00	285.720.504,00	270.080.796,00	51,40	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	379.828.100,00	185.906.000,00	193.922.100,00	48,94	
0.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	379.828.100,00	185.906.000,00	193.922.100,00	48,94	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	175.973.200,00	99.814.504,00	76.158.696,00	56,72	
3.00.2.12.0.00.0.00.03.01.2.09.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	175.973.200,00	99.814.504,00	76.158.696,00	56,72	
2.12.2.12.0.00.0.00.03.02.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	306.583.950,00	289.645.200,00	16.858.750,00	94,51	
2.12.2.12.0.00.0.00.03.02.2.01.	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	169.996.800,00	164.893.200,00	5.103.600,00	96,99	
2.12.2.12.0.00.0.00.03.02.2.01.01.	PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN DAN RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	35.000.000,00	32.080.400,00	2.919.600,00	91,65	
2.12.2.12.0.00.0.00.03.02.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	32.080.400,00	2.919.600,00	91,65	
2.12.2.12.0.00.0.00.03.02.2.01.04.	PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	118.123.600,00	118.123.600,00	-	100,00	
2.12.2.12.0.00.0.00.03.02.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	118.123.600,00	118.123.600,00	-	100,00	
2.12.2.12.0.00.0.00.03.02.2.01.07.	PENERBITAN DOKUMEN ATAS HASIL PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN	16.873.200,00	14.689.200,00	2.184.000,00	87,05	
2.12.2.12.0.00.0.00.03.02.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.873.200,00	14.689.200,00	2.184.000,00	87,05	
2.12.2.12.0.00.0.00.03.02.2.03.	PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK	136.587.150,00	134.752.000,00	21.755.150,00	85,15	
2.12.2.12.0.00.0.00.03.02.2.03.01.	KOORDINASI ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH DAN LEMBAGA NON-PEMERINTAH DI KABUPATEN/KOTA DALAM PENERTIBAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	19.359.000,00	17.347.000,00	1.012.000,00	94,48	
2.12.2.12.0.00.0.00.03.02.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.359.000,00	17.347.000,00	1.012.000,00	94,48	
2.12.2.12.0.00.0.00.03.02.2.03.03.	FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK	14.510.000,00	14.510.000,00	-	100,00	
2.12.2.12.0.00.0.00.03.02.2.03.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.510.000,00	14.510.000,00	-	100,00	
2.12.2.12.0.00.0.00.03.02.2.03.06.	KERJA SAMA DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PERGURUAN TINGGI TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK	29.419.650,00	15.700.000,00	13.719.650,00	53,36	
2.12.2.12.0.00.0.00.03.02.2.03.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.419.650,00	15.700.000,00	13.719.650,00	53,36	
2.12.2.12.0.00.0.00.03.02.2.03.07.	KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN DAN MASYARAKAT TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK	84.218.500,00	77.195.000,00	7.023.500,00	91,66	
2.12.2.12.0.00.0.00.03.02.2.03.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	84.218.500,00	77.195.000,00	7.023.500,00	91,66	
2.12.2.12.0.00.0.00.03.03.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	269.013.850,00	248.206.800,00	20.806.850,00	92,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.12.2.12.0.00.0.00.03.03.2.01.	PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	144.561.000,00	144.561.000,00	-	100,00	
2.12.2.12.0.00.0.00.03.03.2.01.02.	PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	144.561.000,00	144.561.000,00	-	100,00	
2.12.2.12.0.00.0.00.03.03.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	144.561.000,00	144.561.000,00	-	100,00	
2.12.2.12.0.00.0.00.03.03.2.02.	PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL	124.451.850,00	103.645.800,00	20.806.050,00	83,28	
2.12.2.12.0.00.0.00.03.03.2.02.06.	FASILITASI TERKAIT PENCATATAN SIPIL	11.645.800,00	11.645.800,00	-	100,00	
2.12.2.12.0.00.0.00.03.03.2.02.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.645.800,00	11.645.800,00	-	100,00	
2.12.2.12.0.00.0.00.03.03.2.02.09.	KERJA SAMA DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PERGURUAN TINGGI TERKAIT PENCATATAN SIPIL	34.982.450,00	15.700.000,00	19.282.450,00	44,87	
2.12.2.12.0.00.0.00.03.03.2.02.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	34.982.450,00	15.700.000,00	19.282.450,00	44,87	
2.12.2.12.0.00.0.00.03.03.2.02.10.	KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN DAN MASYARAKAT TERKAIT PENCATATAN SIPIL	77.823.600,00	76.300.000,00	1.523.600,00	98,04	
2.12.2.12.0.00.0.00.03.03.2.02.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	77.823.600,00	76.300.000,00	1.523.600,00	98,04	
2.12.2.12.0.00.0.00.03.04.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	81.678.750,00	19.477.900,00	62.200.850,00	23,84	
2.12.2.12.0.00.0.00.03.04.2.01.	PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN	35.716.850,00	-	35.716.850,00	-	
2.12.2.12.0.00.0.00.03.04.2.01.02.	KERJA SAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	35.716.850,00	-	35.716.850,00	-	
2.12.2.12.0.00.0.00.03.04.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	35.716.850,00	-	35.716.850,00	-	
2.12.2.12.0.00.0.00.03.04.2.04.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	45.961.900,00	19.477.900,00	26.484.000,00	42,37	
2.12.2.12.0.00.0.00.03.04.2.04.01.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	45.961.900,00	19.477.900,00	26.484.000,00	42,37	
2.12.2.12.0.00.0.00.03.04.2.04.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.961.900,00	19.477.900,00	26.484.000,00	42,37	
2.12.2.12.0.00.0.00.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	54.249.964,00	46.361.600,00	7.888.364,00	85,45	
2.12.2.12.0.00.0.00.03.05.2.01.	PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	54.249.964,00	46.361.600,00	7.888.364,00	85,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.12.2.12.6.00.0.00.03.85.2.91.01.	PENYEDIAAN DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN/KOTA	54.249.964,00	46.361.600,00	7.888.364,00	85,45	
2.12.2.12.6.00.0.00.03.85.2.91.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	54.249.964,00	46.361.600,00	7.888.364,00	85,45	
	JUMLAH BELANJA	19.277.806.539,00	18.092.902.437,00	1.185.904.102,00	93,84	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(17.277.806.539,00)	(18.050.802.437,00)	(3.144.604.102,00)	104,47	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(17.277.806.539,00)	(18.050.802.437,00)	(3.144.604.102,00)	104,47	

Lampiran 1.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : **2.14.0.00.0.00.01. - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.14.0.02.14.0.00.0.00.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	17.098.485.329,00	15.532.223.996,00	1.566.261.333,00	90,83	
2.14.0.02.14.0.00.0.00.01.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	16.735.605.329,00	15.170.188.051,00	1.565.417.278,00	90,64	
2.14.0.02.14.0.00.0.00.01.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	362.880.000,00	362.035.945,00	844.055,00	99,76	
0.00.2.14.0.00.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.436.268.063,00	4.770.884.191,00	665.463.871,00	87,76	
0.00.2.14.0.00.0.00.01.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	9.350.000,00	9.330.000,00	20.000,00	99,79	
0.00.2.14.0.00.0.00.01.01.2.01.31.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	9.350.000,00	9.330.000,00	20.000,00	99,79	
0.00.2.14.0.00.0.00.01.01.2.01.31.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.350.000,00	9.330.000,00	20.000,00	99,79	
0.00.2.14.0.00.0.00.01.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.683.347.250,00	3.489.552.618,00	193.694.632,00	94,65	
0.00.2.14.0.00.0.00.01.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.584.347.250,00	3.396.802.618,00	187.544.632,00	94,76	
0.00.2.14.0.00.0.00.01.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.584.347.250,00	3.396.802.618,00	187.544.632,00	94,76	
0.00.2.14.0.00.0.00.01.01.2.02.67.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	17.900.000,00	12.750.000,00	5.150.000,00	71,22	
0.00.2.14.0.00.0.00.01.01.2.02.67.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.900.000,00	12.750.000,00	5.150.000,00	71,22	
0.00.2.14.0.00.0.00.01.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	421.670.532,00	339.230.806,00	82.439.726,00	80,44	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.2.14.0.00.0.00.01.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.409.400,00	1.399.500,00	9.900,00	99,29	
0.00.2.14.0.00.0.00.01.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.409.400,00	1.399.500,00	9.900,00	99,29	
0.00.2.14.0.00.0.00.01.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	242.726.400,00	219.748.800,00	22.977.600,00	90,53	
0.00.2.14.0.00.0.00.01.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	242.726.400,00	219.748.800,00	22.977.600,00	90,53	
0.00.2.14.0.00.0.00.01.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	59.936.732,00	51.967.255,00	7.969.477,00	86,70	
0.00.2.14.0.00.0.00.01.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	59.936.732,00	51.967.255,00	7.969.477,00	86,70	
0.00.2.14.0.00.0.00.01.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	117.598.000,00	66.115.251,00	51.482.749,00	56,22	
0.00.2.14.0.00.0.00.01.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	117.598.000,00	66.115.251,00	51.482.749,00	56,22	
0.00.2.14.0.00.0.00.01.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	383.880.000,00	382.685.055,00	1.194.945,00	99,69	
0.00.2.14.0.00.0.00.01.01.2.07.05.	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	383.880.000,00	382.685.055,00	1.194.945,00	99,68	
0.00.2.14.0.00.0.00.01.01.2.07.05.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
0.00.2.14.0.00.0.00.01.01.2.07.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	18.649.110,00	350.890,00	98,15	
0.00.2.14.0.00.0.00.01.01.2.07.05.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	362.880.000,00	362.035.945,00	844.055,00	99,76	
0.00.2.14.0.00.0.00.01.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	401.380.090,00	261.224.342,00	140.155.738,00	65,08	
0.00.2.14.0.00.0.00.01.01.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
0.00.2.14.0.00.0.00.01.01.2.08.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
0.00.2.14.0.00.0.00.01.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	29.373.600,00	18.322.225,00	11.051.375,00	62,37	
0.00.2.14.0.00.0.00.01.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.373.600,00	18.322.225,00	11.051.375,00	62,37	
0.00.2.14.0.00.0.00.01.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	357.006.490,00	227.902.117,00	129.104.363,00	63,83	
0.00.2.14.0.00.0.00.01.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	357.006.490,00	227.902.117,00	129.104.363,00	63,83	
0.00.2.14.0.00.0.00.01.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	617.740.288,00	368.781.370,00	248.958.830,00	59,69	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.2.14.0.00.0.00.01.01.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	603.946.200,00	355.401.076,00	248.537.350,00	58,84	
0.00.2.14.0.00.0.00.01.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	603.946.200,00	355.401.076,00	248.537.350,00	58,84	
0.00.2.14.0.00.0.00.01.01.2.09.05.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	13.800.000,00	13.378.506,00	421.500,00	96,94	
0.00.2.14.0.00.0.00.01.01.2.09.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	13.378.506,00	421.500,00	96,94	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.02.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	434.836.107,00	241.386.596,00	193.449.511,00	55,74	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.02.2.01.	PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK	15.862.000,00	14.620.000,00	1.242.000,00	92,16	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.02.2.01.10.	IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN JALUR PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL	15.862.000,00	14.620.000,00	1.242.000,00	92,16	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.02.2.01.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.862.000,00	14.620.000,00	1.242.000,00	92,16	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.02.2.02.	PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	418.974.107,00	227.766.596,00	191.207.511,00	54,36	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.02.2.02.02.	PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN DATA KEPENDUDUKAN	76.401.296,00	68.663.296,00	7.738.000,00	89,87	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.02.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	76.401.296,00	68.663.296,00	7.738.000,00	89,87	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.02.2.02.09.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KELUARGA	64.200.000,00	24.480.000,00	39.720.000,00	38,13	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.02.2.02.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	64.200.000,00	24.480.000,00	39.720.000,00	38,13	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.02.2.02.12.	PENCATATAN DAN PENGUMPULAN DATA KELUARGA	153.971.515,00	104.200.000,00	49.771.515,00	67,66	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.02.2.02.12.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	153.971.515,00	104.200.000,00	49.771.515,00	67,66	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.02.2.02.13.	PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB	125.401.296,00	31.423.300,00	93.977.996,00	25,05	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.02.2.02.13.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	125.401.296,00	31.423.300,00	93.977.996,00	25,05	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	8.313.627.347,00	7.669.584.479,00	644.042.868,00	92,25	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.01.	PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	829.089.216,00	649.954.000,00	179.135.216,00	78,39	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.01.01.	ADVOKASI PROGRAM KKBPK KEPADA STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA	138.333.480,00	-	138.333.480,00	-	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	138.333.480,00	-	138.333.480,00	-	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.01.04.	PROMOSI DAN KIE PROGRAM KKBPK MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG	149.991.048,00	141.500.000,00	8.491.048,00	94,33	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	149.991.048,00	141.500.000,00	8.491.048,00	94,33	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.01.06.	PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM KKBPK MELALUI RAPAT KOORDINASI KECAMATAN (RAKORCAM), RAPAT KOORDINASI DESA (RAKORDES), DAN MINILOKAKARYA (MINILOK)	221.826.000,00	221.826.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	221.826.000,00	221.826.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.01.07.	PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK	238.949.688,00	206.629.000,00	32.320.688,00	86,47	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	238.949.688,00	206.629.000,00	32.320.688,00	86,47	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.01.08.	PENGENDALIAN PROGRAM KKBPK	79.999.000,00	79.999.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.01.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	79.999.000,00	79.999.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.02.	PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)	5.333.450.594,00	5.010.476.102,00	313.973.492,00	94,12	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.02.01.	PEMBINAAN IMP DAN PROGRAM KKBPK DI LINI LAPANGAN OLEH PKB/PLKB	4.493.466.892,00	4.421.809.684,00	71.657.208,00	98,40	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.493.466.892,00	4.421.809.684,00	71.657.208,00	98,40	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.02.03.	PENGUATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN, PENGGERAKAN, PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM KKBPK UNTUK PETUGAS KELUARGA BERENCANA/PENYULUH LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PKB/PLKB)	410.557.452,00	269.754.508,00	140.802.944,00	65,70	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	410.557.452,00	269.754.508,00	140.802.944,00	65,70	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.02.04.	PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP)	429.426.250,00	318.914.000,00	100.512.250,00	74,03	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.02.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	429.426.250,00	318.914.000,00	100.512.250,00	74,03	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.03.	PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.966.987.537,00	1.815.052.287,00	151.035.250,00	92,31	

BPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.03.01.	PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA	122.190.324,00	100.665.324,00	21.525.000,00	82,38	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	122.190.324,00	100.665.324,00	21.525.000,00	82,38	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.03.03.	PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)	1.766.660.624,00	1.637.250.374,00	129.410.250,00	92,67	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.03.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.766.660.624,00	1.637.250.374,00	129.410.250,00	92,67	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.03.08.	PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA	43.500.000,00	43.500.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.03.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	43.500.000,00	43.500.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.03.10.	PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	22.565.000,00	22.465.000,00	100.000,00	99,55	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.03.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.565.000,00	22.465.000,00	100.000,00	99,55	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.03.13.	PENINGKATAN KESERTAAN KB PRIA	11.171.589,00	11.171.589,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.03.13.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.171.589,00	11.171.589,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.04.	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB	195.000.000,00	194.150.000,00	850.000,00	99,53	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.04.02.	INTEGRASI PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR DI KAMPUNG KB	9.000.000,00	8.820.000,00	180.000,00	98,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.04.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	8.820.000,00	180.000,00	98,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.04.03.	PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM KKBPK DI KAMPUNG KB	186.000.000,00	185.280.000,00	720.000,00	99,61	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.04.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	186.000.000,00	185.280.000,00	720.000,00	99,61	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.911.753.813,00	2.849.448.738,00	64.305.083,00	97,79	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.04.2.01.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	2.823.753.813,00	2.759.448.738,00	64.305.083,00	97,72	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.14.2.14.0.00.0.00.01.04.2.01.02.	PENGADAAN SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA/UPPKS)	352.500.000,00	352.480.000,00	20.000,00	99,99	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.04.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	352.500.000,00	352.480.000,00	20.000,00	99,99	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.04.2.01.03.	ORIENTASI DAN PELATIHAN TEKNIS PENGELOLA KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA/UPPKS)	119.999.814,00	119.999.814,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.04.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	119.999.814,00	119.999.814,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.04.2.01.05.	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL BAGI PENGELOLA DAN PELAKSANA (KADER) KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA/UPPKS)	2.170.444.938,00	2.152.942.800,00	17.502.138,00	99,19	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.04.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.170.444.938,00	2.152.942.800,00	17.502.138,00	99,19	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.04.2.01.06.	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL BAGI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA/UPPKS)	73.687.444,00	60.352.444,00	13.335.000,00	81,99	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.04.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	73.687.444,00	60.352.444,00	13.335.000,00	81,99	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.04.2.01.07.	PROMOSI DAN SOSIALISASI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA/UPPKS)	77.980.472,00	72.955.472,00	5.025.000,00	93,55	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.04.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	77.980.472,00	72.955.472,00	5.025.000,00	93,55	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.04.2.01.08.	PROMOSI DAN SOSIALISASI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (MENJADI ORANG TUA HEBAT, GENERASI BERENCANA, KELANJUTUSIAAN SERTA PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA)	29.341.155,00	816.200,00	28.522.955,00	2,78	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.04.2.01.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.341.155,00	816.200,00	28.522.955,00	2,78	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.04.2.02.	PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.14.2.14.0.00.0.00.01.04.2.02.04.	PROMOSI DAN SOSIALISASI PROGRAM KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA BAGI MITRA KERJA	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00	
2.14.2.14.0.00.0.00.01.04.2.02.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	17.098.485.329,00	15.532.223.996,00	1.566.261.333,00	90,83	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(17.098.485.329,00)	(15.532.223.996,00)	(1.566.261.333,00)	90,83	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(17.098.485.329,00)	(15.532.223.996,00)	(1.566.261.333,00)	90,83	

Lampiran 1.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : 2.15.0.00.0.00.01. - Dinas Perhubungan

1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.0.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	30.770.175.053,00	24.537.818.840,00	(6.232.356.213,00)	79,74	
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.0.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30.770.175.053,00	24.537.818.840,00	(6.232.356.213,00)	79,74	
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.0.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	5.468.530.000,00	3.542.550.506,00	(1.925.961.494,00)	64,78	
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.0.00.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	25.301.655.053,00	20.995.260.334,00	(4.306.394.719,00)	82,97	
	JUMLAH PENDAPATAN	30.770.175.053,00	24.537.818.840,00	(6.232.356.213,00)	79,74	
2.15.3.02.15.0.00.0.00.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	144.397.545.567,00	136.279.028.579,00	8.118.516.988,00	94,37	
2.15.3.02.15.0.00.0.00.01.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	140.499.843.867,00	132.938.716.769,00	7.561.127.098,00	94,62	
2.15.3.02.15.0.00.0.00.01.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	60.782.097.980,00	53.546.192.295,00	7.235.905.685,00	88,09	
3.00.2.15.0.00.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	84.311.149.367,00	83.409.011.284,00	902.138.103,00	98,92	
3.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	10.167.916.226,00	9.560.573.153,00	607.344.073,00	94,02	
3.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	10.167.916.226,00	9.560.573.153,00	607.344.073,00	94,02	
3.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	10.167.916.226,00	9.560.572.153,00	607.344.073,00	94,02	
3.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	520.000.000,00	508.185.000,00	11.815.000,00	97,72	
3.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.07.02.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	520.000.000,00	508.185.000,00	11.815.000,00	97,72	

SIPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.07.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	520.000.000,00	508.185.000,00	11.815.000,00	97,72	
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	68.413.893.593,00	68.211.775.769,00	202.117.824,00	99,70	
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	67.872.336.869,00	67.673.339.045,00	198.767.824,00	99,70	
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	67.872.336.869,00	67.673.339.045,00	198.767.824,00	99,70	
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	541.786.724,00	538.436.724,00	3.350.000,00	99,38	
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	541.786.724,00	538.436.724,00	3.350.000,00	99,38	
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	121.350.000,00	98.625.854,00	22.724.146,00	81,27	
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	121.350.000,00	98.625.854,00	22.724.146,00	81,27	
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	121.350.000,00	98.625.854,00	22.724.146,00	81,27	
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.10.	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	5.887.399.568,00	5.829.852.508,00	58.137.060,00	99,05	
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.10.01.	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	5.887.989.568,00	5.829.852.508,00	58.137.060,00	98,85	
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.10.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.837.647.766,00	4.808.621.150,00	29.026.616,00	99,28	
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.10.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	874.640.000,00	853.241.358,00	21.398.642,00	97,55	
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.10.01.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	175.701.800,00	167.990.000,00	7.711.800,00	95,61	
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	59.528.513.285,00	52.312.134.320,00	7.216.378.885,00	87,87	
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.02.	PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	14.776.435.143,00	14.306.169.031,00	470.266.112,00	96,81	
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.02.01.	PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	3.053.099.336,00	3.028.919.036,00	24.180.190,00	99,20	
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	281.099.226,00	278.540.026,00	2.559.200,00	99,08	
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.02.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.772.000.000,00	2.750.379.010,00	21.620.990,00	99,22	
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.02.02.	PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	1.252.079.941,00	1.188.467.341,00	63.612.600,00	94,91	
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.237.079.941,00	1.173.632.341,00	63.447.600,00	94,87	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.02.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	14.835.000,00	165.000,00	98,90	
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.02.03.	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN	9.698.169.486,00	9.321.887.823,00	376.278.663,00	96,12	
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.536.721.886,00	9.179.290.823,00	361.430.363,00	96,26	
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.02.03.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.300.400,00	52.452.000,00	14.848.400,00	77,93	
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.02.03.5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	98.165.000,00	98.165.000,00	-	100,00	
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.02.04.	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN	773.089.490,00	766.894.831,00	6.194.659,00	99,19	
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.02.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	773.089.490,00	766.894.831,00	6.194.659,00	99,19	
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.05.	PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C	1.597.393.204,00	1.452.907.741,00	144.485.463,00	90,95	
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.05.05.	PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLA TERMINAL TIPE C	1.597.393.204,00	1.452.907.741,00	144.485.463,00	90,95	
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.05.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.591.958.704,00	1.447.473.241,00	144.485.463,00	90,92	
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.05.05.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.434.500,00	5.434.500,00	-	100,00	
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.05.	PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	1.204.469.363,00	1.137.357.662,00	67.111.701,00	94,43	
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.05.02.	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	1.046.238.363,00	986.721.662,00	59.516.701,00	94,31	
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.05.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.046.238.363,00	986.721.662,00	59.516.701,00	94,31	
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.05.07.	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	158.231.000,00	150.636.000,00	7.595.000,00	95,20	
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.05.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	158.231.000,00	150.636.000,00	7.595.000,00	95,20	
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.06.	PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	7.787.466.941,00	7.220.224.104,00	567.242.837,00	92,71	
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.06.04.	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA	7.787.466.941,00	7.220.224.104,00	567.242.837,00	92,71	
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.744.346.941,00	7.177.122.804,00	567.224.137,00	92,67	
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.06.04.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.120.000,00	43.101.300,00	18.700,00	99,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.15.2.15.0.00.3.00.01.02.2.09.	PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.163.748.554,00	28.195.475.782,00	5.967.272.772,00	82,53	
2.15.2.15.0.00.3.00.01.02.2.09.01.	PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.163.748.554,00	28.195.475.782,00	5.967.272.772,00	82,53	
2.15.2.15.0.00.3.00.01.02.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	33.996.434.407,00	27.130.371.635,00	5.866.062.772,00	82,22	
2.15.2.15.0.00.3.00.01.02.2.09.01.5.1.04.	Belanja Subsidi	966.314.147,00	966.314.147,00	-	100,00	
2.15.2.15.0.00.3.00.01.02.2.09.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	98.790.000,00	101.210.000,00	49,39	
2.15.2.15.0.00.3.00.01.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	557.882.975,00	557.882.975,00	-	100,00	
2.15.2.15.0.00.3.00.01.03.2.13.	PEMBANGUNAN DAN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU	557.882.975,00	557.882.975,00	-	100,00	
2.15.2.15.0.00.3.00.01.03.2.13.04.	PENGAWASAN PENGOPERASIAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU	557.882.975,00	557.882.975,00	-	100,00	
2.15.2.15.0.00.3.00.01.03.2.13.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	557.882.975,00	557.882.975,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	144.397.545.567,00	136.279.028.579,00	8.118.516.988,00	94,37	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(113.627.370.514,00)	(111.741.269.739,00)	(14.350.873.201,00)	98,34	
2.15.2.15.0.00.3.00.01.06.06.6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	2.470.860.828,44	2.470.860.828,44	-	
2.15.2.15.0.00.3.00.01.06.06.6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	2.470.860.828,44	2.470.860.828,44	-	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	-	2.470.860.828,44	2.470.860.828,44	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	2.470.860.828,44	2.470.860.828,44	-	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(113.627.370.514,00)	(109.270.348.910,56)	(11.880.012.372,56)	96,16	

SIPKD

Lampiran 1.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : 2.16.2.20.2.21.04. - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	3	3	4	5	6	7
2.16.2.16.2.20.2.21.04.00.0.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	2.124.914.177,00	1.631.497.692,00	(493.416.485,00)	76,77	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.00.0.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.124.914.177,00	1.631.497.692,00	(493.416.485,00)	76,77	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.00.0.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	2.100.000.000,00	1.562.900.625,00	(537.099.375,00)	74,43	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.00.0.00.00.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	36.914.177,00	68.597.067,00	43.682.890,00	185,33	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.124.914.177,00	1.631.497.692,00	(493.416.485,00)	76,77	
2.16.2.22.16.2.20.2.21.04.00.00.5.	BELANJA DAERAH	20.997.831.609,00	19.459.426.268,00	1.536.405.341,00	92,67	
2.16.2.22.16.2.20.2.21.04.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	20.703.101.409,00	19.205.771.268,00	1.497.330.141,00	92,76	
2.16.2.22.16.2.20.2.21.04.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	294.730.200,00	253.655.000,00	41.075.200,00	86,06	
0.00.2.16.2.20.2.21.04.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.546.464.314,00	4.859.922.630,00	686.541.584,00	87,62	
0.00.2.16.2.20.2.21.04.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	33.750.786,00	31.783.936,00	1.966.850,00	91,71	
0.00.2.16.2.20.2.21.04.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	8.213.608,00	7.906.400,00	307.208,00	96,25	
0.00.2.16.2.20.2.21.04.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.213.608,00	7.906.400,00	307.208,00	96,25	
0.00.2.16.2.20.2.21.04.01.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	7.922.660,00	6.976.880,00	945.780,00	88,06	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.2.16.2.20.2.21.04.01.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.922.668,00	6.976.880,00	945.788,00	88,06	
0.00.2.16.2.20.2.21.04.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.614.504,00	6.900.650,00	713.854,00	90,62	
0.00.2.16.2.20.2.21.04.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.614.504,00	6.900.650,00	713.854,00	90,62	
0.00.2.16.2.20.2.21.04.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.131.123.806,00	3.868.970.830,00	262.152.970,00	93,65	
0.00.2.16.2.20.2.21.04.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.113.305.944,00	3.851.154.710,00	262.151.234,00	93,62	
0.00.2.16.2.20.2.21.04.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.113.305.944,00	3.851.154.710,00	262.151.234,00	93,62	
0.00.2.16.2.20.2.21.04.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	8.908.752,00	8.907.400,00	1.352,00	99,98	
0.00.2.16.2.20.2.21.04.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.908.752,00	8.907.400,00	1.352,00	99,98	
0.00.2.16.2.20.2.21.04.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	8.908.104,00	8.903.720,00	384,00	99,99	
0.00.2.16.2.20.2.21.04.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.908.104,00	8.903.720,00	384,00	99,99	
0.00.2.16.2.20.2.21.04.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	55.336.000,00	32.605.024,00	22.723.976,00	58,93	
0.00.2.16.2.20.2.21.04.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	55.336.000,00	32.605.024,00	22.723.976,00	58,93	
0.00.2.16.2.20.2.21.04.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	55.336.000,00	32.605.024,00	22.723.976,00	58,93	
0.00.2.16.2.20.2.21.04.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	832.579.608,00	567.648.309,00	264.931.299,00	68,17	
0.00.2.16.2.20.2.21.04.01.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	91.833.716,00	82.981.450,00	8.852.260,00	90,36	
0.00.2.16.2.20.2.21.04.01.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	69.113.516,00	65.281.450,00	3.832.060,00	94,45	
0.00.2.16.2.20.2.21.04.01.2.06.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.720.200,00	17.700.000,00	5.020.200,00	77,90	
0.00.2.16.2.20.2.21.04.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	200.899.106,00	150.050.500,00	14.749.600,00	92,79	
0.00.2.16.2.20.2.21.04.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	200.899.106,00	150.050.500,00	14.749.600,00	92,79	
0.00.2.16.2.20.2.21.04.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	22.258.916,00	19.765.770,00	2.493.146,00	88,79	
0.00.2.16.2.20.2.21.04.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.258.916,00	19.765.770,00	2.493.146,00	88,79	

SKPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.2.16.2.20.2.21.04.01.2.66.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	513.685.880,00	274.850.589,00	238.836.291,00	53,50	
0.00.2.16.2.20.2.21.04.01.2.66.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	513.686.880,00	274.850.588,00	238.836.291,00	53,50	
0.00.2.16.2.20.2.21.04.01.2.68.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	272.175.000,00	222.563.280,00	49.611.720,00	81,77	
0.00.2.16.2.20.2.21.04.01.2.68.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	272.175.000,00	222.563.280,00	49.611.720,00	81,77	
0.00.2.16.2.20.2.21.04.01.2.68.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	272.175.000,00	222.563.280,00	49.611.720,00	81,77	
0.00.2.16.2.20.2.21.04.01.2.69.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	231.505.026,00	146.350.257,00	85.154.769,00	63,21	
0.00.2.16.2.20.2.21.04.01.2.69.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	231.505.026,00	146.350.257,00	85.154.769,00	63,21	
0.00.2.16.2.20.2.21.04.01.2.69.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	231.505.026,00	146.350.257,00	85.154.769,00	63,21	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.02.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	8.064.529.275,00	7.743.912.276,00	320.616.999,00	96,02	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.064.529.275,00	7.743.912.276,00	320.616.999,00	96,02	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.02.	MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK	55.845.440,00	47.747.040,00	8.098.400,00	85,49	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	55.845.440,00	47.747.040,00	8.098.400,00	85,49	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.04.	PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	1.530.692.360,00	1.502.608.246,00	28.084.114,00	98,16	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.530.692.360,00	1.502.608.246,00	28.084.114,00	98,16	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.05.	PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	6.243.057.856,00	6.096.701.910,00	146.355.940,00	97,65	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.243.057.856,00	6.096.701.910,00	146.355.940,00	97,65	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.06.	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	93.471.265,00	57.238.040,00	36.233.225,00	61,23	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	93.471.265,00	57.238.040,00	36.233.225,00	61,23	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.07.	LAYANAN HUBUNGAN MEDIA	34.369.600,00	-	34.369.600,00	-	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	34.369.600,00	-	34.369.600,00	-	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.08.	KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN	117.092.760,00	39.617.040,00	77.475.720,00	33,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.16.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	117.691.760,00	39.617.040,00	77.475.720,00	33,83	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.03.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	6.809.407.172,00	6.340.006.722,00	469.400.450,00	93,11	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.03.2.01.	PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	209.893.140,00	189.539.001,00	20.354.139,00	90,30	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.03.2.01.03.	PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH	209.893.140,00	189.539.001,00	20.354.139,00	90,30	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.03.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	96.393.140,00	83.790.001,00	12.603.139,00	86,92	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.03.2.01.03.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113.500.000,00	105.749.000,00	7.751.000,00	93,17	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.03.2.02.	PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.599.514.032,00	6.150.467.721,00	449.046.311,00	93,19	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.03.2.02.01.	PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN E-GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	56.749.600,00	54.994.528,00	1.755.072,00	96,90	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.03.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	56.749.600,00	54.994.528,00	1.755.072,00	96,90	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.03.2.02.02.	SINKRONISASI PENGELOLAAN RENCANA INDUK DAN ANGGARAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	141.538.926,00	127.364.766,00	14.174.160,00	89,98	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.03.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	141.538.926,00	127.364.766,00	14.174.160,00	89,98	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.03.2.02.03.	PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAHAN DAERAH	373.688.406,00	337.625.256,00	36.063.150,00	90,35	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.03.2.02.03.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.03.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	213.178.400,00	205.419.250,00	7.759.150,00	96,36	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.03.2.02.03.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	158.510.006,00	130.206.006,00	28.304.000,00	82,14	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.03.2.02.04.	PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH DAERAH	4.582.206.344,00	4.255.586.328,00	326.620.016,00	92,87	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.03.2.02.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.582.206.344,00	4.255.586.328,00	326.620.016,00	92,87	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.03.2.02.06.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI DATA DAN INFORMASI ELEKTRONIK	7.947.700,00	7.451.500,00	496.200,00	93,75	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.03.2.02.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.947.700,00	7.451.500,00	496.200,00	93,75	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.03.2.02.07.	PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	436.269.526,00	432.790.120,00	3.479.400,00	99,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.16.2.16.2.20.2.21.04.03.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	436.269.520,00	432.790.120,00	3.479.400,00	99,20	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.03.2.02.68.	PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH	14.438.500,00	7.553.500,00	6.885.000,00	52,31	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.03.2.02.68.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.438.500,00	7.553.500,00	6.885.000,00	52,31	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.03.2.02.69.	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA CERDAS DAN KOTA CERDAS	740.677.248,00	731.088.587,00	9.588.661,00	98,70	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.03.2.02.69.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	740.677.248,00	731.088.587,00	9.588.661,00	98,70	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.03.2.02.16.	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH	345.997.800,00	296.013.148,00	49.984.652,00	79,68	
2.16.2.16.2.20.2.21.04.03.2.02.16.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	345.997.800,00	296.013.148,00	49.984.652,00	79,68	
2.20.2.16.2.20.2.21.04.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	420.632.233,00	388.531.390,00	32.100.843,00	92,36	
2.20.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	420.632.233,00	388.531.390,00	32.100.843,00	92,36	
2.20.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.01.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL	331.982.556,00	322.577.270,00	9.405.286,00	95,94	
2.20.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	331.982.556,00	322.577.270,00	9.405.286,00	95,94	
2.20.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.02.	PENINGKATAN KAPASITAS SDM PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN MUTU STATISTIK DAERAH YANG TERINTEGRASI	76.233.348,00	64.345.760,00	11.877.588,00	84,41	
2.20.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	76.233.348,00	64.345.760,00	11.877.588,00	84,41	
2.20.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.04.	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN STATISTIK SEKTORAL	60.417.400,00	52.933.500,00	7.483.900,00	87,61	
2.20.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	60.417.400,00	52.933.500,00	7.483.900,00	87,61	
2.20.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.06.	PENYELENGGARAAN OTORISASI STATISTIK SEKTORAL DI DAERAH	52.008.937,00	48.674.860,00	3.334.077,00	93,59	
2.20.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	52.008.937,00	48.674.860,00	3.334.077,00	93,59	
2.21.2.16.2.20.2.21.04.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	198.798.715,00	127.053.250,00	38.745.465,00	81,02	
2.21.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	71.587.509,00	63.933.850,00	7.653.659,00	89,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.21.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.02.	PELAKSANAAN ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.507.900,00	18.027.800,00	2.480.100,00	87,90	
2.21.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.507.900,00	18.027.800,00	2.480.100,00	87,90	
2.21.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.03.	PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK	51.079.600,00	45.909.050,00	5.170.550,00	89,87	
2.21.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	51.079.600,00	45.909.050,00	5.170.550,00	89,87	
2.21.2.16.2.20.2.21.04.02.3.02.	PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	85.211.215,00	63.116.400,00	22.094.815,00	74,07	
2.21.2.16.2.20.2.21.04.02.3.02.01.	OPERASIONALISASI JARING KOMUNIKASI SANDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	85.211.215,00	63.116.400,00	22.094.815,00	74,07	
2.21.2.16.2.20.2.21.04.02.3.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	85.211.215,00	63.116.400,00	22.094.815,00	74,07	
	JUMLAH BELANJA	20.967.831.689,00	19.453.426.261,00	1.538.405.341,00	92,67	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(18.872.917.432,00)	(17.827.928.576,00)	(2.031.821.826,00)	94,46	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(18.872.917.432,00)	(17.827.928.576,00)	(2.031.821.826,00)	94,46	

Lampiran 1.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : **2.17.0.00.0.00.01. - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.17.0.02.17.0.00.0.00.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	12.037.577.959,00	10.678.364.926,00	1.359.213.033,00	88,70	
2.17.0.02.17.0.00.0.00.01.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	11.926.264.559,00	10.574.357.926,00	1.351.906.633,00	88,66	
2.17.0.02.17.0.00.0.00.01.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	1.532.058.079,00	1.504.978.033,00	27.072.038,00	98,23	
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.646.595.052,00	5.406.892.354,00	239.702.248,00	95,75	
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	10.999.734,00	10.999.734,00	-	100,00	
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	9.999.748,00	9.999.748,00	-	100,00	
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.999.748,00	9.999.748,00	-	100,00	
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.2.01.96.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	9.999.986,00	9.999.986,00	-	100,00	
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.2.01.96.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.999.986,00	9.999.986,00	-	100,00	
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.136.483.914,00	3.940.854.562,00	197.629.052,00	95,22	
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.126.484.118,00	3.930.855.066,00	197.629.052,00	95,21	
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.126.484.118,00	3.930.855.066,00	197.629.052,00	95,21	
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.2.02.97.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	9.999.796,00	9.999.796,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.999.796,00	9.999.796,00	-	100,00	
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	7.066.000,00	2.897.937,00	4.168.063,00	41,01	
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.066.000,00	2.897.937,00	4.168.063,00	41,01	
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.066.000,00	2.897.937,00	4.168.063,00	41,01	
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	794.563.268,00	781.457.985,00	13.105.283,00	98,35	
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	8.222.900,00	8.222.900,00	-	100,00	
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.222.900,00	8.222.900,00	-	100,00	
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	225.954.400,00	225.114.105,00	840.295,00	99,62	
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	225.954.400,00	225.114.105,00	840.295,00	99,62	
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	76.572.688,00	75.622.394,00	950.294,00	98,75	
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	76.572.688,00	75.622.394,00	950.294,00	98,75	
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	22.800.000,00	15.200.000,00	7.600.000,00	66,66	
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	15.200.000,00	7.600.000,00	66,66	
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	461.013.280,00	457.298.586,00	3.714.694,00	99,19	
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	461.013.280,00	457.298.586,00	3.714.694,00	99,19	
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	111.313.400,00	104.007.000,00	7.306.400,00	93,43	
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	111.313.400,00	104.007.000,00	7.306.400,00	93,43	
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.2.07.06.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	111.313.400,00	104.007.000,00	7.306.400,00	93,43	
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	311.861.636,00	296.671.636,00	15.190.000,00	95,12	
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	4.000.000,00	3.885.000,00	115.000,00	97,12	
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.885.000,00	115.000,00	97,12	
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	307.861.636,00	292.786.636,00	15.075.000,00	95,10	

SKPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	307.861.636,00	292.786.636,00	15.075.000,00	95,10	
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	263.307.706,00	261.003.206,00	2.304.500,00	99,12	
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	175.807.906,00	174.312.906,00	785.000,00	99,55	
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	175.807.906,00	174.312.906,00	785.000,00	99,55	
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	74.809.600,00	72.490.100,00	1.519.500,00	97,94	
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	74.809.600,00	72.490.100,00	1.519.500,00	97,94	
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	14.200.300,00	14.200.300,00	-	100,00	
0.00.2.17.0.00.0.00.01.01.2.09.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.200.300,00	14.200.300,00	-	100,00	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.02.	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	147.237.552,00	117.876.752,00	29.360.800,00	80,05	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.02.2.01.	PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.242.080,00	37.242.080,00	-	100,00	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.02.2.01.01.	FASILITASI PEMENUHAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.242.080,00	37.242.080,00	-	100,00	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.02.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	37.242.080,00	37.242.080,00	-	100,00	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.02.2.02.	PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	109.995.472,00	80.634.672,00	29.360.800,00	73,30	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.02.2.02.01.	FASILITASI PEMENUHAN IZIN USAHA PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	109.995.472,00	80.634.672,00	29.360.800,00	73,30	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.02.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	109.995.472,00	80.634.672,00	29.360.800,00	73,30	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	724.303.702,00	686.758.556,00	37.545.146,00	94,81	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.2.01.	PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	724.303.702,00	686.758.556,00	37.545.146,00	94,81	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.2.01.01.	PENGAWASAN KEKUATAN, KESEHATAN, KEMANDIRIAN, KETANGGUHAN, SERTA AKUNTABILITAS KOPERASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	636.786.518,00	620.036.518,00	16.750.062,00	97,36	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	636.786.518,00	620.036.518,00	16.750.062,00	97,36	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.2.01.02.	PEMERIKSAAN KEPATUHAN KOPERASI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	87.517.184,00	66.722.040,00	20.795.144,00	76,23	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	87.517.184,00	66.722.040,00	20.795.144,00	76,23	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	156.432.779,00	133.944.881,00	22.488.698,00	85,62	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.2.01.	PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	156.432.779,00	133.944.881,00	22.488.698,00	85,62	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.2.01.01.	PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	38.562.426,00	38.562.426,00	-	100,00	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	38.562.426,00	38.562.426,00	-	100,00	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.2.01.02.	PENGHARGAAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	117.870.353,00	95.381.455,00	22.488.698,00	80,92	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	117.870.353,00	95.381.455,00	22.488.698,00	80,92	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.420.736.670,00	1.406.971.032,00	19.765.638,00	98,60	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.2.01.	PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	318.370.216,00	311.284.578,00	7.085.638,00	97,77	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.2.01.01.	PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI	318.370.216,00	311.284.578,00	7.085.638,00	97,77	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	318.370.216,00	311.284.578,00	7.085.638,00	97,77	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.2.02.	PENDIDIKAN DAN LATIHAN UKM BAGI UKM DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	148.112.220,00	146.312.220,00	1.800.000,00	98,78	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.2.02.01.	PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN UKM SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM UKM	148.112.220,00	146.312.220,00	1.800.000,00	98,78	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	148.112.220,00	146.312.220,00	1.800.000,00	98,78	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.2.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM USAHA MIKRO DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	954.254.234,00	943.374.234,00	10.880.000,00	98,86	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.2.01.01.	PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN USAHA MIKRO SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM USAHA MIKRO	954.254.234,00	943.374.234,00	10.880.000,00	98,86	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	954.254.234,00	943.374.234,00	10.880.000,00	98,86	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.005.370.961,00	1.023.477.251,00	981.893.711,00	51,03	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.2.01.	PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	2.005.370.961,00	1.023.477.251,00	981.893.711,00	51,03	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.2.01.01.	PENDATAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	131.598.520,00	118.348.520,00	21.250.000,00	83,85	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	131.598.520,00	118.348.520,00	21.250.000,00	83,85	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.2.01.02.	PEMBERDAYAAN MELALUI KEMITRAAN USAHA MIKRO	1.064.999.816,00	149.490.000,00	915.509.816,00	14,03	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	64.999.816,00	-	64.999.816,00	-	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.2.01.02.5.1.04.	Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	149.490.000,00	850.510.000,00	14,94	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.2.01.04.	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	156.214.800,00	117.223.905,00	38.990.895,00	75,04	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	156.214.800,00	117.223.905,00	38.990.895,00	75,04	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.2.01.05.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO	152.605.576,00	150.455.576,00	2.150.000,00	98,59	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	152.605.576,00	150.455.576,00	2.150.000,00	98,59	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.2.01.06.	PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN USAHA MIKRO SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM USAHA MIKRO DAN KEWIRAUSAHAAN	499.952.250,00	495.959.250,00	3.993.000,00	99,20	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	499.952.250,00	495.959.250,00	3.993.000,00	99,20	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.936.900.642,00	1.908.444.900,00	28.455.742,00	98,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.2.01.	PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL	1.936.900.642,00	1.908.444.900,00	28.455.742,00	98,53	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.2.01.01.	FASILITASI USAHA MIKRO MENJADI USAHA KECIL DALAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SDM, SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI	1.936.900.642,00	1.908.444.900,00	28.455.742,00	98,53	
2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.936.900.642,00	1.908.444.900,00	28.455.742,00	98,53	
	JUMLAH BELANJA	12.037.577.959,00	10.678.364.926,00	1.359.213.033,00	88,70	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(12.037.577.959,00)	(10.678.364.926,00)	(1.359.213.033,00)	88,70	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(12.037.577.959,00)	(10.678.364.926,00)	(1.359.213.033,00)	88,70	

Lampiran I.1 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : **2.18.0.00.0.00.01. - Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu**

1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.18.0.02.18.0.00.0.00.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	29.102.589.995,00	26.484.137.774,00	2.618.452.221,00	91,00	
2.18.0.02.18.0.00.0.00.01.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	23.645.191.045,00	21.705.762.664,00	1.939.428.381,00	91,79	
2.18.0.02.18.0.00.0.00.01.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	5.136.434.411,00	5.166.276.610,00	970.147.881,00	84,19	
0.00.2.18.0.00.3.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.335.739.524,00	25.054.826.724,00	2.280.912.800,00	91,65	
0.00.2.18.0.00.3.00.01.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	38.686.300,00	38.646.450,00	1.339.750,00	95,53	
0.00.2.18.0.00.3.00.01.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	9.995.400,00	9.567.850,00	428.550,00	95,71	
0.00.2.18.0.00.3.00.01.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.995.400,00	9.567.850,00	428.550,00	95,71	
0.00.2.18.0.00.3.00.01.01.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	9.995.200,00	9.563.750,00	432.450,00	95,67	
3.00.2.18.0.00.3.00.01.01.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.995.200,00	9.563.750,00	432.450,00	95,67	
3.00.2.18.0.00.3.00.01.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	9.994.600,00	9.515.850,00	478.750,00	95,20	
0.00.2.18.0.00.3.00.01.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.994.600,00	9.515.850,00	478.750,00	95,20	
0.00.2.18.0.00.3.00.01.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	11.326.810.846,00	10.769.582.328,00	557.228.318,00	95,08	
0.00.2.18.0.00.3.00.01.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	11.314.642.546,00	10.761.941.228,00	552.701.318,00	95,11	

SIPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	11.314.642.546,00	10.761.941.228,00	552.701.318,00	95,11	
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	4.170.000,00	-	4.170.000,00	-	
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.170.000,00	-	4.170.000,00	-	
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	7.998.100,00	7.641.100,00	357.000,00	95,53	
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.998.100,00	7.641.100,00	357.000,00	95,53	
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.712.393.746,00	1.549.086.310,00	163.217.438,00	90,46	
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	77.471.906,00	64.705.406,00	12.766.506,00	83,52	
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	77.471.906,00	64.705.406,00	12.766.506,00	83,52	
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	793.840.806,00	774.211.106,00	19.629.700,00	97,53	
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	793.840.806,00	774.211.106,00	19.629.700,00	97,53	
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	290.924.048,00	287.178.100,00	3.745.948,00	98,71	
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	290.924.048,00	287.178.100,00	3.745.948,00	98,71	
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	23.400.000,00	13.650.000,00	9.750.000,00	58,33	
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	13.650.000,00	9.750.000,00	58,33	
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	526.667.000,00	409.341.710,00	117.325.290,00	77,72	
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	526.667.000,00	409.341.710,00	117.325.290,00	77,72	
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5.453.398.050,00	4.774.375.110,00	679.022.940,00	87,54	
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	400.961.400,00	398.803.000,00	2.158.400,00	99,46	
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.07.05.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400.961.400,00	398.803.000,00	2.158.400,00	99,46	
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	4.030.028.900,00	3.420.565.220,00	609.463.680,00	84,87	
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.07.06.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.030.028.900,00	3.420.565.220,00	609.463.680,00	84,87	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.07.10.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1.022.407.750,00	955.006.890,00	67.400.860,00	93,40	
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.07.10.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	328.357.750,00	183.451.890,00	65.963.960,00	71,20	
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.07.10.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	793.650.000,00	791.513.000,00	1.937.000,00	99,80	
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.155.231.960,00	6.387.223.476,00	768.008.484,00	89,26	
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.902.686.243,00	1.726.270.448,00	176.415.794,00	90,72	
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.902.686.243,00	1.726.270.448,00	176.415.794,00	90,72	
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	5.252.545.717,00	4.660.953.027,00	591.593.690,00	88,73	
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.252.545.717,00	4.660.953.027,00	591.593.690,00	88,73	
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.658.007.920,00	1.545.913.058,00	112.094.870,00	93,23	
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.09.01.	PEMELIHARAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	111.720.400,00	97.593.400,00	14.127.000,00	87,35	
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	111.720.400,00	97.593.400,00	14.127.000,00	87,35	
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.09.02.	PEMELIHARAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	267.454.000,00	200.698.000,00	66.756.000,00	75,04	
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	267.454.000,00	200.698.000,00	66.756.000,00	75,04	
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	225.111.680,00	206.450.800,00	18.661.000,00	91,71	
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.09.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	225.111.680,00	206.450.800,00	18.661.000,00	91,71	
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	699.901.120,00	689.253.650,00	10.648.470,00	98,47	
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.09.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	699.901.120,00	689.253.650,00	10.648.470,00	98,47	
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.09.10.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	353.820.800,00	351.919.000,00	1.901.800,00	99,46	
0.00.2.18.0.00.0.00.01.01.2.09.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	353.820.800,00	351.919.000,00	1.901.800,00	99,46	
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	281.622.275,00	277.423.675,00	4.198.600,00	98,50	

SEKIAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.2.01.	PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	281.622.275,00	277.423.675,00	4.198.600,00	98,50	
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.2.01.01.	PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH MENGENAI PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	281.622.275,00	277.423.675,00	4.198.600,00	98,50	
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	281.622.275,00	277.423.675,00	4.198.600,00	98,50	
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	497.881.775,00	481.565.875,00	16.315.900,00	96,72	
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.2.01.	PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	497.881.775,00	481.565.875,00	16.315.900,00	96,72	
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.2.01.01.	PENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.2.01.02.	PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	482.881.775,00	466.565.875,00	16.315.900,00	96,62	
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	482.881.775,00	466.565.875,00	16.315.900,00	96,62	
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	304.320.060,00	278.420.000,00	25.900.060,00	91,48	
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.2.01.	PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	304.320.060,00	278.420.000,00	25.900.060,00	91,48	
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.2.01.01.	PENYEDIAAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NONPERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	3.144.100,00	3.129.100,00	15.000,00	99,53	
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.144.100,00	3.129.100,00	15.000,00	99,53	
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.2.01.02.	PEMANTAUAN PEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL	301.175.960,00	275.290.900,00	25.885.060,00	91,40	
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	301.175.960,00	275.290.900,00	25.885.060,00	91,40	
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	683.026.361,00	391.901.500,00	291.124.861,00	57,37	
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.2.01.	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	683.026.361,00	391.901.500,00	291.124.861,00	57,37	
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.2.01.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	560.394.675,00	337.675.500,00	222.719.175,00	60,25	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	560.394.675,00	337.675.500,00	222.719.175,80	60,25	
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.2.01.03.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	122.631.686,00	54.226.000,00	68.405.686,80	44,21	
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	122.631.686,00	54.226.000,00	68.405.686,80	44,21	
	JUMLAH BELANJA	29.102.589.995,00	26.484.137.774,00	2.618.452.221,00	91,00	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(29.102.589.995,00)	(26.484.137.774,00)	(2.618.452.221,00)	91,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(29.102.589.995,00)	(26.484.137.774,00)	(2.618.452.221,00)	91,00	

Lampiran 1.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 Tahun 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : **2.19.0.00.0.00.01. - Dinas Kepemudaan dan Olahraga**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.19.0.02.19.0.00.0.00.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	24.534.377.746,00	23.999.437.565,00	534.940.181,00	97,81	
2.19.0.02.19.0.00.0.00.01.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	22.775.005.910,00	22.261.772.585,00	513.236.325,00	97,74	
2.19.0.02.19.0.00.0.00.01.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	1.759.367.836,00	1.737.664.800,00	21.703.036,00	98,76	
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.912.975.209,00	9.613.934.969,00	299.040.240,00	96,98	
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	61.329.000,00	61.040.400,00	288.600,00	99,53	
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	28.837.500,00	28.627.200,00	210.300,00	99,27	
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	28.837.500,00	28.627.200,00	210.300,00	99,27	
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	15.558.000,00	15.479.700,00	78.300,00	99,49	
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.558.000,00	15.479.700,00	78.300,00	99,49	
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	16.933.500,00	16.933.500,00	-	100,00	
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.933.500,00	16.933.500,00	-	100,00	
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.341.182.292,00	4.144.475.815,00	196.706.577,00	95,46	
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.321.205.592,00	4.124.537.915,00	196.667.677,00	95,44	

SIPAS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.321.265.592,00	4.124.537.915,00	196.667.677,00	95,44	
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	19.976.800,00	19.937.900,00	38.900,00	99,80	
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.976.800,00	19.937.900,00	38.900,00	99,80	
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.02.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	48.788.000,00	41.800.457,00	6.987.543,00	85,67	
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.02.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	48.788.000,00	41.800.457,00	6.987.543,00	85,67	
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.02.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	48.788.000,00	41.800.457,00	6.987.543,00	85,67	
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	5.603.166.517,00	3.576.171.900,00	26.994.617,00	99,25	
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	34.994.000,00	34.887.250,00	106.750,00	99,69	
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	34.994.000,00	34.887.250,00	106.750,00	99,69	
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	708.607.500,00	704.209.700,00	4.397.800,00	99,37	
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	663.909.500,00	659.511.700,00	4.397.800,00	99,33	
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.06.04.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.698.000,00	44.698.000,00	-	100,00	
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.369.631.497,00	2.361.774.620,00	17.846.877,00	99,23	
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.369.631.497,00	2.361.774.620,00	17.846.877,00	99,23	
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	20.000.000,00	15.750.000,00	4.250.000,00	78,75	
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	15.750.000,00	4.250.000,00	78,75	
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	519.943.520,00	519.550.330,00	393.190,00	99,92	
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	519.943.520,00	519.550.330,00	393.190,00	99,92	
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.449.771.000,00	1.401.472.830,00	48.299.170,00	96,66	
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	257.578.000,00	245.860.830,00	11.717.170,00	95,45	
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	257.578.000,00	245.860.830,00	11.717.170,00	95,45	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.00.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.192.194.000,00	1.155.611.036,00	36.582.000,00	96,93	
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.00.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.192.194.000,00	1.155.611.036,00	36.582.000,00	96,93	
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	408.737.300,00	388.973.767,00	19.763.533,00	95,16	
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	375.617.300,00	357.208.767,00	18.408.533,00	94,84	
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	375.617.300,00	357.208.767,00	18.408.533,00	94,84	
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	32.120.000,00	31.765.000,00	355.000,00	98,89	
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.09.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.120.000,00	31.765.000,00	355.000,00	98,89	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.672.781.736,00	1.640.064.536,00	32.717.200,00	98,04	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.02.2.01.	PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA	751.437.936,00	737.093.636,00	14.344.300,00	98,09	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.02.2.01.02.	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING WIRA USAHA PEMULA	644.851.536,00	634.325.236,00	10.526.300,00	98,36	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.02.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	644.851.536,00	634.325.236,00	10.526.300,00	98,36	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.02.2.01.06.	PERENCANAAN, PENGADAAN, PEMANFAATAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGAWASAN PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN KABUPATEN/KOTA	106.586.400,00	102.768.400,00	3.818.000,00	96,41	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.02.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	106.586.400,00	102.768.400,00	3.818.000,00	96,41	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.02.2.02.	PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	921.343.836,00	902.970.936,00	18.372.900,00	98,00	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.02.2.02.02.	PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN KABUPATEN/KOTA	921.343.836,00	902.970.936,00	18.372.900,00	98,00	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.02.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	921.343.836,00	902.970.936,00	18.372.900,00	98,00	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	12.348.621.834,00	12.146.735.113,00	201.886.721,00	98,36	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.01.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.359.756.948,00	2.311.733.066,00	47.977.881,00	97,96	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.01.02.	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN OLAHRAGA DAN PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR	223.977.808,00	220.057.808,00	3.920.000,00	98,69	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	223.977.808,00	220.057.808,00	3.920.000,00	98,69	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.01.03.	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA	2.135.733.141,00	2.090.675.260,00	45.057.881,00	97,89	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	421.063.305,00	397.709.260,00	23.354.045,00	94,45	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.01.03.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.750.000,00	69.341.000,00	409.000,00	99,41	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.01.03.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.644.919.836,00	1.623.625.000,00	21.294.836,00	98,70	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.02.	PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.044.278.657,00	1.928.816.595,00	115.462.062,00	94,35	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.02.01.	PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA MULTI EVENT DAN SINGLE EVENT TINGKAT KABUPATEN/KOTA	1.384.225.180,00	1.281.731.600,00	101.493.580,00	92,21	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.384.225.180,00	1.281.731.600,00	101.493.580,00	92,21	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.02.02.	PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DAN PEKAN OLAHRAGA TINGKAT KABUPATEN/KOTA	620.199.832,00	606.698.750,00	13.501.082,00	97,82	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	620.199.832,00	606.698.750,00	13.501.082,00	97,82	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.02.03.	PARTISIPASI DAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENYELENGGARAAN KEJUARAAN	118.853.645,00	118.386.345,00	467.400,00	99,61	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	118.853.645,00	118.386.345,00	467.400,00	99,61	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.03.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI	3.413.404.828,00	3.385.568.550,00	27.836.278,00	99,18	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.03.03.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ATLET BERPRESTASI KABUPATEN/KOTA	503.412.328,00	501.591.050,00	1.821.278,00	99,63	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.03.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	503.412.328,00	501.591.050,00	1.821.278,00	99,63	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.03.04.	PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA	2.909.992.500,00	2.883.977.500,00	26.015.000,00	99,10	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.03.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.909.992.500,00	2.883.977.500,00	26.015.000,00	99,10	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.04.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA	2.626.541.500,00	2.626.481.500,00	60.000,00	99,99	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.04.02.	PENGEMBANGAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN	2.615.543.000,00	2.615.543.000,00	-	100,00	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.04.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.543.000,00	15.543.000,00	-	100,00	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.04.02.5.1.05.	Belanja Hibah	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	-	100,00	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.04.03.	PENINGKATAN KERJA SAMA ORGANISASI KECLAHRAGAAN KABUPATEN/KOTA DENGAN LEMBAGA TERKAIT	10.998.500,00	10.938.500,00	60.000,00	99,45	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.04.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.998.500,00	10.938.500,00	60.000,00	99,45	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.05.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI	1.905.685.906,00	1.895.135.406,00	10.550.500,00	99,44	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.05.02.	PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN OLAHRAGA REKREASI	1.607.457.306,00	1.597.946.806,00	9.510.500,00	99,40	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.05.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.607.457.306,00	1.597.946.806,00	9.510.500,00	99,40	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.05.03.	PENYEDIAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA REKREASI	6.590.600,00	6.590.600,00	-	100,00	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.05.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.590.600,00	6.590.600,00	-	100,00	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.05.05.	PEMANFAATAN OLAHRAGA TRADISIONAL DALAM MASYARAKAT	291.638.000,00	290.598.000,00	1.040.000,00	99,64	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.05.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	291.638.000,00	290.598.000,00	1.040.000,00	99,64	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	599.998.965,00	598.702.965,00	1.296.000,00	99,78	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.04.2.01.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN	599.998.965,00	598.702.965,00	1.296.000,00	99,78	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.04.2.01.03.	PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH	599.998.965,00	598.702.965,00	1.296.000,00	99,78	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.04.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	199.998.965,00	198.702.965,00	1.296.000,00	99,35	
2.19.2.19.0.00.0.00.01.04.2.01.03.5.1.05.	Belanja Hibah	400.000.000,00	400.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	24.534.377.746,00	23.999.437.585,00	534.940.161,00	97,81	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(24.534.377.746,00)	(23.999.437.585,00)	(534.940.161,00)	97,81	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(24.534.377.746,00)	(23.999.437.585,00)	(534.940.161,00)	97,81	

SIPAD

Lampiran 1.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : 2.23.2.24.0.00.02. - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.23.2.22.23.2.24.0.00.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	13.011.373.470,00	12.438.099.814,00	573.273.664,00	95,59	
2.23.2.22.23.2.24.0.00.02.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	12.159.608.470,00	11.596.802.989,00	562.805.489,00	95,38	
2.23.2.22.23.2.24.0.00.02.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	851.765.000,00	842.796.825,00	8.968.175,00	98,94	
3.00.2.23.2.24.0.00.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.266.336.807,00	9.836.701.984,00	429.634.823,00	95,81	
3.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	8.938.960,00	8.938.960,00	-	100,00	
3.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4.439.460,00	4.439.460,00	-	100,00	
3.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.439.460,00	4.439.460,00	-	100,00	
3.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	4.499.548,00	4.499.548,00	-	100,00	
3.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.499.548,00	4.499.548,00	-	100,00	
3.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.234.966.626,00	6.897.983.090,00	336.983.536,00	95,47	
3.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.02.01.	PENYELIMAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.216.530.858,00	6.889.537.322,00	326.983.536,00	95,46	
3.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	7.216.530.858,00	6.889.537.322,00	326.983.536,00	95,46	
3.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	4.496.168,00	4.496.168,00	-	100,00	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.496.168,00	4.496.168,00	-	100,00	
0.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.01.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN TRIWULANAN SEMESTERAN SKPD	3.949.600,00	3.949.600,00	-	100,00	
0.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.949.600,00	3.949.600,00	-	100,00	
0.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	19.656.000,00	15.583.314,00	4.072.686,00	79,28	
0.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	19.656.000,00	15.583.314,00	4.072.686,00	79,28	
0.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.656.000,00	15.583.314,00	4.072.686,00	79,28	
0.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	862.350.866,00	845.279.105,00	16.971.761,00	98,03	
0.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	98.096.400,00	96.282.500,00	1.713.900,00	98,28	
0.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	98.096.400,00	96.282.500,00	1.713.900,00	98,28	
0.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	354.557.600,00	351.478.200,00	3.079.400,00	99,13	
0.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	354.557.600,00	351.478.200,00	3.079.400,00	99,13	
0.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	99.999.986,00	97.672.000,00	2.327.986,00	97,67	
0.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	99.999.986,00	97.672.000,00	2.327.986,00	97,67	
0.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	25.950.000,00	21.375.000,00	4.575.000,00	82,36	
0.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.950.000,00	21.375.000,00	4.575.000,00	82,36	
0.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	281.746.880,00	276.471.405,00	5.275.475,00	98,13	
0.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	281.746.880,00	276.471.405,00	5.275.475,00	98,13	
0.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	332.640.000,00	331.613.225,00	1.026.775,00	99,69	
0.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.07.10.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	332.640.000,00	331.613.225,00	1.026.775,00	99,69	
0.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.07.10.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	332.640.000,00	331.613.225,00	1.026.775,00	99,69	
0.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.230.492.177,00	1.171.190.702,00	59.301.475,00	95,18	

SKPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.05.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	551.141.057,00	508.788.706,00	42.352.351,00	92,31	
0.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.05.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	551.141.057,00	508.788.706,00	42.352.351,00	92,31	
0.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.00.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	179.556.000,00	176.656.006,00	2.900.000,00	98,38	
0.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.00.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	179.556.000,00	176.656.006,00	2.900.000,00	98,38	
0.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.00.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	499.801.120,00	485.751.996,00	14.049.124,00	97,18	
0.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.00.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	499.801.120,00	485.751.996,00	14.049.124,00	97,18	
0.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	587.394.466,00	566.111.606,00	21.100.860,00	96,37	
0.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	297.894.466,00	277.085.306,00	20.809.160,00	93,01	
0.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	297.894.466,00	277.085.306,00	20.809.160,00	93,01	
0.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	289.500.000,00	289.028.306,00	471.700,00	99,83	
0.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.09.09.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
0.00.2.23.2.24.0.00.02.01.2.09.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	287.500.000,00	287.028.306,00	471.700,00	99,83	
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.684.655.153,00	1.609.771.768,00	75.881.385,00	95,49	
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.2.01.	PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.341.394.241,00	1.307.338.768,00	34.023.473,00	96,53	
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.2.01.01.	PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK	209.081.628,00	201.824.008,00	7.157.620,00	96,52	
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	209.081.628,00	201.824.008,00	7.157.620,00	96,52	
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.2.01.02.	PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	520.326.006,00	509.274.006,00	11.052.000,00	97,87	
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.326.000,00	41.898.000,00	3.428.000,00	92,43	
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.2.01.02.5.2.03.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	475.000.000,00	467.376.006,00	7.624.000,00	98,39	
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.2.01.04.	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	191.660.944,00	186.613.444,00	5.047.500,00	97,36	
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	191.660.944,00	186.613.444,00	5.047.500,00	97,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.21.2.21.2.24.0.00.02.02.2.01.06.	PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	57.081.000,00	55.401.000,00	1.681.000,00	97,05	
2.21.2.21.2.24.0.00.02.02.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	57.081.000,00	55.401.000,00	1.681.000,00	97,05	
2.21.2.21.2.24.0.00.02.02.2.01.07.	PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN RUJUKAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA	424.815.066,00	400.656.931,00	24.158.135,00	94,32	
2.21.2.21.2.24.0.00.02.02.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	424.815.066,00	400.656.931,00	24.158.135,00	94,32	
2.21.2.21.2.24.0.00.02.02.2.01.09.	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA	155.588.611,00	151.661.393,00	4.727.218,00	97,01	
2.21.2.21.2.24.0.00.02.02.2.01.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	128.013.611,00	123.601.393,00	4.412.218,00	96,55	
2.21.2.21.2.24.0.00.02.02.2.01.09.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	30.375.000,00	30.060.000,00	315.000,00	98,96	
2.21.2.21.2.24.0.00.02.02.2.02.	PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	133.300.912,00	101.443.000,00	31.857.912,00	83,37	
2.21.2.21.2.24.0.00.02.02.2.02.01.	SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS SERTA MASYARAKAT	66.873.600,00	58.696.000,00	3.177.600,00	96,42	
2.21.2.21.2.24.0.00.02.02.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	66.873.600,00	58.696.000,00	3.177.600,00	96,42	
2.21.2.21.2.24.0.00.02.02.2.02.03.	PEMBERIAN PENGHARGAAN GERAKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA	31.426.000,00	30.290.000,00	2.136.000,00	93,41	
2.21.2.21.2.24.0.00.02.02.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.426.000,00	30.290.000,00	2.136.000,00	93,41	
2.21.2.21.2.24.0.00.02.02.2.02.04.	PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL	29.999.312,00	12.455.000,00	17.544.312,00	41,51	
2.21.2.21.2.24.0.00.02.02.2.02.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.999.312,00	12.455.000,00	17.544.312,00	41,51	
2.21.2.21.2.24.0.00.02.03.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	528.191.458,00	488.917.071,00	39.274.386,00	92,56	
2.21.2.21.2.24.0.00.02.03.2.01.	PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIK DAERAH KABUPATEN/KOTA	184.140.042,00	182.354.472,00	1.785.570,00	99,03	
2.21.2.21.2.24.0.00.02.03.2.01.01.	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYIMPANAN, PERAWATAN, PELESTARIAN, DAN PENDAFTARAN NASKAH KUNO	89.146.750,00	88.545.000,00	601.750,00	99,32	
2.21.2.21.2.24.0.00.02.03.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	89.146.750,00	88.545.000,00	601.750,00	99,32	
2.21.2.21.2.24.0.00.02.03.2.01.02.	PENGEMBANGAN, PENGOLAHAN DAN PENGALIHMEDIAAN NASKAH KUNO YANG DIMILIKI OLEH MASYARAKAT UNTUK DILESTARIKAN DAN DIDAYAGUNAKAN	94.993.292,00	93.809.472,00	1.183.810,00	98,75	
2.21.2.21.2.24.0.00.02.03.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	94.993.292,00	93.809.472,00	1.183.810,00	98,75	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.23.2.23.2.24.6.00.02.03.2.02.	PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA YANG DITEMUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	344.051.416,00	306.562.600,00	37.488.816,00	89,10	
2.23.2.23.2.24.6.00.02.03.2.02.01.	SELEKSI DAN PENGADAAN KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA	344.051.416,00	306.562.600,00	37.488.816,00	89,10	
2.23.2.23.2.24.6.00.02.03.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	330.301.416,00	292.815.000,00	37.486.416,00	88,65	
2.23.2.23.2.24.6.00.02.03.2.02.01.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.750.000,00	13.747.600,00	2.400,00	99,98	
2.24.2.23.2.24.6.00.02.02.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	629.837.750,00	591.956.910,00	37.980.840,00	94,71	
2.24.2.23.2.24.6.00.02.02.2.01.	PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	177.982.500,00	171.103.100,00	6.879.400,00	96,13	
2.24.2.23.2.24.6.00.02.02.2.01.03.	PENGAWASAN ARSIP DINAMIS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	177.982.500,00	171.103.100,00	6.879.400,00	96,13	
2.24.2.23.2.24.6.00.02.02.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	177.982.500,00	171.103.100,00	6.879.400,00	96,13	
2.24.2.23.2.24.6.00.02.02.2.02.	PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	135.223.170,00	119.449.570,00	15.773.600,00	88,33	
2.24.2.23.2.24.6.00.02.02.2.02.02.	AKUISISI, PENGOLAHAN, PRESERVASI, DAN AKSES ARSIP STATIS	135.223.170,00	119.449.570,00	15.773.600,00	88,33	
2.24.2.23.2.24.6.00.02.02.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	135.223.170,00	119.449.570,00	15.773.600,00	88,33	
2.24.2.23.2.24.6.00.02.02.2.03.	PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA	216.732.130,00	211.404.320,00	5.327.800,00	97,54	
2.24.2.23.2.24.6.00.02.02.2.03.01.	PENYEDIAAN INFORMASI, AKSES DAN LAYANAN KEARSIPAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA MELALUI JIKN	216.732.130,00	211.404.320,00	5.327.800,00	97,54	
2.24.2.23.2.24.6.00.02.02.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	216.732.130,00	211.404.320,00	5.327.800,00	97,54	
2.24.2.23.2.24.6.00.02.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
2.24.2.23.2.24.6.00.02.03.2.01.	PEMUSNAHAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
2.24.2.23.2.24.6.00.02.03.2.01.01.	PENILAIAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PEMUSNAHAN ARSIP YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
2.24.2.23.2.24.6.00.02.03.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	13.811.373.478,00	12.438.599.814,00	572.773.864,00	95,58	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(13.011.373.478,00)	(12.438.599.814,00)	(572.773.664,00)	95,59	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(13.011.373.478,00)	(12.438.599.814,00)	(572.773.664,00)	95,59	

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 TAHUN 2025
TANGGAL : 27 Agustus 2025

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : **3.26.2.22.0.00.01. - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3.26.2.22.0.00.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	6.765.395.671,00	6.100.342.609,00	665.253.062,00	93,05	
3.26.2.22.0.00.01.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	5.877.428.671,00	5.871.362.609,00	605.066.062,00	93,02	
3.26.2.22.0.00.01.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	597.153.089,00	561.868.848,00	35.083.440,00	94,13	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.905.667.484,00	5.547.131.552,00	358.535.932,00	93,93	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	33.533.136,00	33.533.136,00	-	100,00	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	11.420.584,00	11.420.584,00	-	100,00	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.420.584,00	11.420.584,00	-	100,00	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	11.112.652,00	11.112.652,00	-	100,00	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.112.652,00	11.112.652,00	-	100,00	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.877.846.181,00	4.661.814.953,00	216.031.228,00	95,57	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.866.431.576,00	4.645.600.348,00	216.831.228,00	95,54	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.866.431.576,00	4.645.600.348,00	216.831.228,00	95,54	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	11.414.605,00	11.414.605,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.414.605,00	11.414.605,00	-	100,00	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	7.590.000,00	3.289.574,00	4.300.426,00	43,34	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.590.000,00	3.289.574,00	4.300.426,00	43,34	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.590.000,00	3.289.574,00	4.300.426,00	43,34	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	391.438.120,00	334.107.979,00	57.330.141,00	85,35	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.999.500,00	1.365.900,00	3.633.600,00	27,32	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.999.500,00	1.365.900,00	3.633.600,00	27,32	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	119.623.600,00	118.081.500,00	1.542.100,00	98,71	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	119.623.600,00	118.081.500,00	1.542.100,00	98,71	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	71.371.020,00	71.370.456,00	564,00	99,99	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	71.371.020,00	71.370.456,00	564,00	99,99	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.950.000,00	-	4.950.000,00	-	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	-	4.950.000,00	-	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.06.08.	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	14.840.000,00	1.036.000,00	13.804.000,00	13,94	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.06.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.840.000,00	1.036.000,00	13.804.000,00	13,94	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	166.122.000,00	132.732.123,00	33.389.877,00	79,90	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	166.122.000,00	132.732.123,00	33.389.877,00	79,90	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.06.10.	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	7.322.000,00	7.322.000,00	-	100,00	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.06.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.322.000,00	7.322.000,00	-	100,00	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	87.966.800,00	87.780.000,00	186.800,00	99,78	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	87.966.800,00	87.780.000,00	186.800,00	99,78	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.07.06.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.966.800,00	87.780.000,00	186.800,00	99,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	334.521.947,00	302.299.947,00	32.222.000,00	90,36	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.08.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	3.000.000,00	2.730.000,00	270.000,00	91,00	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.730.000,00	270.000,00	91,00	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	7.650.360,00	7.650.360,00	-	100,00	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.08.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.650.360,00	7.650.360,00	-	100,00	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	323.871.587,00	291.919.587,00	31.952.000,00	90,13	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	323.871.587,00	291.919.587,00	31.952.000,00	90,13	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	182.781.200,00	135.095.863,00	47.685.337,00	73,91	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	182.781.200,00	135.095.863,00	47.685.337,00	73,91	
0.00.3.26.2.22.0.00.01.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	182.781.200,00	135.095.863,00	47.685.337,00	73,91	
2.22.3.26.2.22.0.00.01.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	667.004.248,00	601.422.048,00	64.582.200,00	90,33	
2.22.3.26.2.22.0.00.01.02.2.01.	PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	334.399.588,00	331.964.888,00	1.434.700,00	99,57	
2.22.3.26.2.22.0.00.01.02.2.01.01.	PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN	334.399.588,00	331.964.888,00	1.434.700,00	99,57	
2.22.3.26.2.22.0.00.01.02.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	334.399.588,00	331.964.888,00	1.434.700,00	99,57	
2.22.3.26.2.22.0.00.01.02.2.02.	PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	333.604.660,00	366.457.160,00	63.147.500,00	81,01	
2.22.3.26.2.22.0.00.01.02.2.02.01.	PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN TRADISI BUDAYA	291.604.660,00	228.457.160,00	63.147.500,00	78,34	
2.22.3.26.2.22.0.00.01.02.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	291.604.660,00	228.457.160,00	63.147.500,00	78,34	
2.22.3.26.2.22.0.00.01.02.2.02.02.	PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA TRADISIONAL	41.000.000,00	41.000.000,00	-	100,00	
2.22.3.26.2.22.0.00.01.02.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	41.000.000,00	-	100,00	
2.22.3.26.2.22.0.00.01.05.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	147.303.120,00	147.303.120,00	-	100,00	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.22.3.26.2.22.0.00.01.05.2.02.	PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	147.303.130,00	147.303.130,00	-	100,00	
2.22.3.26.2.22.0.00.01.05.2.02.01.	PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA	147.303.130,00	147.303.130,00	-	100,00	
2.22.3.26.2.22.0.00.01.05.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	147.303.130,00	147.303.130,00	-	100,00	
3.26.3.26.2.22.0.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	474.017.125,00	459.971.640,00	14.045.485,00	97,03	
3.26.3.26.2.22.0.00.01.02.2.01.	PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN/KOTA	307.815.540,00	304.614.840,00	3.200.700,00	98,96	
3.26.3.26.2.22.0.00.01.02.2.01.03.	PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN/KOTA	307.815.540,00	304.614.840,00	3.200.700,00	98,96	
3.26.3.26.2.22.0.00.01.02.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	307.815.540,00	304.614.840,00	3.200.700,00	98,96	
3.26.3.26.2.22.0.00.01.02.2.02.	PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	2.832.200,00	2.832.200,00	-	100,00	
3.26.3.26.2.22.0.00.01.02.2.02.03.	PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	2.832.200,00	2.832.200,00	-	100,00	
3.26.3.26.2.22.0.00.01.02.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.832.200,00	2.832.200,00	-	100,00	
3.26.3.26.2.22.0.00.01.02.2.03.	PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	23.585.900,00	23.585.900,00	-	100,00	
3.26.3.26.2.22.0.00.01.02.2.03.04.	PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	23.585.900,00	23.585.900,00	-	100,00	
3.26.3.26.2.22.0.00.01.02.2.03.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.585.900,00	23.585.900,00	-	100,00	
3.26.3.26.2.22.0.00.01.02.2.04.	PENETAPAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DAERAH KABUPATEN/KOTA	139.783.485,00	128.938.700,00	10.844.785,00	92,24	
3.26.3.26.2.22.0.00.01.02.2.04.04.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA PARIWISATA	139.783.485,00	128.938.700,00	10.844.785,00	92,24	
3.26.3.26.2.22.0.00.01.02.2.04.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	139.783.485,00	128.938.700,00	10.844.785,00	92,24	
3.26.3.26.2.22.0.00.01.03.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.209.521.535,00	1.076.338.720,00	133.182.895,00	88,98	
3.26.3.26.2.22.0.00.01.03.2.01.	PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	1.209.521.535,00	1.076.338.720,00	133.182.895,00	88,98	
3.26.3.26.2.22.0.00.01.03.2.01.02.	FASILITASI KEGIATAN PEMASARAN PARIWISATA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	538.476.435,00	458.780.430,00	79.696.005,00	84,97	
3.26.3.26.2.22.0.00.01.03.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	538.476.435,00	458.780.430,00	79.696.005,00	84,97	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3.26.3.26.2.22.0.00.01.83.2.01.83.	PENYEDIAAN DATA DAN PENYEBARAN INFORMASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA, BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI	679.045.100,00	625.558.300,00	53.486.800,00	92,12	
3.26.3.26.2.22.0.00.01.83.2.01.83.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	679.045.100,00	625.558.300,00	53.486.800,00	92,12	
3.26.3.26.2.22.0.00.01.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	361.882.169,00	326.985.529,00	34.896.640,00	90,35	
3.26.3.26.2.22.0.00.01.05.2.01.	PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR	361.882.169,00	326.985.529,00	34.896.640,00	90,35	
3.26.3.26.2.22.0.00.01.05.2.01.04.	SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI TENAGA KERJA BIDANG PARIWISATA	130.397.794,00	99.326.654,00	31.071.140,00	62,48	
3.26.3.26.2.22.0.00.01.05.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	130.397.794,00	99.326.654,00	31.071.140,00	62,48	
3.26.3.26.2.22.0.00.01.05.2.01.05.	FASILITASI PROSES KREASI, PRODUKSI, DISTRIBUSI KONSUMSI DAN KONSERVASI EKONOMI KREATIF	154.958.520,00	147.131.420,00	7.867.100,00	94,92	
3.26.3.26.2.22.0.00.01.05.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	154.958.520,00	147.131.420,00	7.867.100,00	94,92	
3.26.3.26.2.22.0.00.01.05.2.01.06.	FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF	86.585.855,00	80.627.455,00	5.958.400,00	93,11	
3.26.3.26.2.22.0.00.01.05.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	86.585.855,00	80.627.455,00	5.958.400,00	93,11	
	JUMLAH BELANJA	8.765.395.671,00	8.160.142.609,00	605.253.062,00	93,09	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(8.765.395.671,00)	(8.160.142.609,00)	(605.253.062,00)	93,09	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.765.395.671,00)	(8.160.142.609,00)	(605.253.062,00)	93,09	

SIPKD

Lampiran 1.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : **3.27.3.25.0.00.01. - Dinas Pertanian dan Perikanan**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASE			
1	2	3	4	5	6	7
3.27.3.27.3.25.0.00.01.00.0.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	650.000.000,00	574.546.308,00	(75.453.700,00)	88,39	
3.27.3.27.3.25.0.00.01.00.0.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	650.000.000,00	574.546.308,00	(75.453.700,00)	88,39	
3.27.3.27.3.25.0.00.01.00.0.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	650.000.000,00	574.546.308,00	(75.453.700,00)	88,39	
	JUMLAH PENDAPATAN	650.000.000,00	574.546.308,00	(75.453.700,00)	88,39	
3.27.3.27.27.3.25.0.00.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	17.109.493.926,00	15.225.798.833,00	1.883.703.093,00	88,97	
3.27.3.27.27.3.25.0.00.01.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	17.109.493.926,00	15.225.798.833,00	1.883.703.093,00	88,97	
3.27.3.27.27.3.25.0.00.01.00.00.5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.234.890.201,00	1.234.890.201,00	-	100,00	
0.00.3.27.3.25.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.085.680.873,00	12.020.641.600,00	985.839.173,00	92,56	
0.00.3.27.3.25.0.00.01.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	13.101.536,00	13.101.536,00	-	100,00	
0.00.3.27.3.25.0.00.01.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	9.156.136,00	9.156.136,00	-	100,00	
0.00.3.27.3.25.0.00.01.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.156.136,00	9.156.136,00	-	100,00	
0.00.3.27.3.25.0.00.01.01.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.945.400,00	3.945.400,00	-	100,00	
0.00.3.27.3.25.0.00.01.01.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.945.400,00	3.945.400,00	-	100,00	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.3.27.3.25.0.00.01.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	10.410.291.858,00	9.879.511.347,00	531.780.541,00	94,89	
0.00.3.27.3.25.0.00.01.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	10.399.225.312,00	9.867.444.771,00	531.780.541,00	94,88	
0.00.3.27.3.25.0.00.01.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	10.399.225.312,00	9.867.444.771,00	531.780.541,00	94,88	
0.00.3.27.3.25.0.00.01.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	5.535.912,00	5.535.912,00	-	100,00	
0.00.3.27.3.25.0.00.01.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.535.912,00	5.535.912,00	-	100,00	
0.00.3.27.3.25.0.00.01.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	5.536.664,00	5.536.664,00	-	100,00	
0.00.3.27.3.25.0.00.01.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.536.664,00	5.536.664,00	-	100,00	
0.00.3.27.3.25.0.00.01.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	795.851.808,00	601.983.238,00	194.868.570,00	75,51	
0.00.3.27.3.25.0.00.01.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
0.00.3.27.3.25.0.00.01.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
0.00.3.27.3.25.0.00.01.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	204.383.206,00	201.717.206,00	2.666.000,00	98,69	
0.00.3.27.3.25.0.00.01.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	204.383.206,00	201.717.206,00	2.666.000,00	98,69	
0.00.3.27.3.25.0.00.01.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	16.859.760,00	16.808.571,00	51.189,00	99,69	
0.00.3.27.3.25.0.00.01.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.859.760,00	16.808.571,00	51.189,00	99,69	
0.00.3.27.3.25.0.00.01.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12.300.000,00	-	12.300.000,00	-	
0.00.3.27.3.25.0.00.01.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	-	12.300.000,00	-	
0.00.3.27.3.25.0.00.01.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	521.303.040,00	342.451.659,00	179.851.381,00	65,66	
0.00.3.27.3.25.0.00.01.01.2.06.09.5.1.01.	Belanja Barang dan Jasa	521.303.040,00	342.451.659,00	179.851.381,00	65,66	
0.00.3.27.3.25.0.00.01.01.2.06.10.	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	10.005.800,00	10.005.800,00	-	100,00	
0.00.3.27.3.25.0.00.01.01.2.06.10.5.1.01.	Belanja Barang dan Jasa	10.005.800,00	10.005.800,00	-	100,00	
0.00.3.27.3.25.0.00.01.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	150.000.000,00	147.435.660,00	2.564.340,00	98,29	

SKPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.3.27.3.25.0.00.01.01.2.07.09.	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	150.000.000,00	147.435.660,00	2.564.340,00	98,29	
0.00.3.27.3.25.0.00.01.01.2.07.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	147.435.660,00	2.564.340,00	98,29	
0.00.3.27.3.25.0.00.01.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.189.825.849,00	1.049.683.748,00	140.142.101,00	88,21	
0.00.3.27.3.25.0.00.01.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	313.526.468,00	259.610.171,00	53.916.297,00	82,80	
0.00.3.27.3.25.0.00.01.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	313.526.468,00	259.610.171,00	53.916.297,00	82,80	
0.00.3.27.3.25.0.00.01.01.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	17.363.406,00	13.363.406,00	4.000.000,00	76,96	
0.00.3.27.3.25.0.00.01.01.2.08.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.363.406,00	13.363.406,00	4.000.000,00	76,96	
0.00.3.27.3.25.0.00.01.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	858.935.960,00	776.810.176,00	82.125.804,00	90,43	
0.00.3.27.3.25.0.00.01.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	858.935.960,00	776.810.176,00	82.125.804,00	90,43	
0.00.3.27.3.25.0.00.01.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	426.609.800,00	331.026.079,00	95.583.721,00	77,59	
0.00.3.27.3.25.0.00.01.01.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	426.609.800,00	331.026.079,00	95.583.721,00	77,59	
0.00.3.27.3.25.0.00.01.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	426.609.800,00	331.026.079,00	95.583.721,00	77,59	
3.25.3.27.3.25.0.00.01.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	55.158.754,00	51.901.130,00	3.257.624,00	94,09	
3.25.3.27.3.25.0.00.01.03.2.02.	PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	55.158.754,00	51.901.130,00	3.257.624,00	94,09	
3.25.3.27.3.25.0.00.01.03.2.02.02.	PELAKSANAAN FASILITASI PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN NELAYAN KECIL	55.158.754,00	51.901.130,00	3.257.624,00	94,09	
3.25.3.27.3.25.0.00.01.03.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	55.158.754,00	51.901.130,00	3.257.624,00	94,09	
3.25.3.27.3.25.0.00.01.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.099.731.447,00	908.297.324,00	191.434.123,00	82,59	
3.25.3.27.3.25.0.00.01.04.2.02.	PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL	1.099.731.447,00	908.297.324,00	191.434.123,00	82,59	
3.25.3.27.3.25.0.00.01.04.2.02.01.	PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMBUDI DAYA IKAN KECIL	1.099.731.447,00	908.297.324,00	191.434.123,00	82,59	
3.25.3.27.3.25.0.00.01.04.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.099.731.447,00	908.297.324,00	191.434.123,00	82,59	
3.25.3.27.3.25.0.00.01.06.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	80.000.000,00	71.950.106,00	8.049.894,00	89,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3.25.3.27.3.25.0.00.01.06.2.03.	PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA	80.000.000,00	71.950.200,00	8.049.800,00	89,93	
3.25.3.27.3.25.0.00.01.06.2.03.01.	PENINGKATAN KETERSEDIAAN IKAN UNTUK KONSUMSI DAN USAHA PENGOLAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	80.000.000,00	71.950.200,00	8.049.800,00	89,93	
3.25.3.27.3.25.0.00.01.06.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	71.950.200,00	8.049.800,00	89,93	
3.27.3.27.3.25.0.00.01.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	77.889.600,00	76.516.360,00	1.373.240,00	98,23	
3.27.3.27.3.25.0.00.01.02.2.02.	PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	77.889.600,00	76.516.360,00	1.373.240,00	98,23	
3.27.3.27.3.25.0.00.01.02.2.02.02.	PENINGKATAN KUALITAS SDG HEWAN/TANAMAN	77.889.600,00	76.516.360,00	1.373.240,00	98,23	
3.27.3.27.3.25.0.00.01.02.2.02.02.5.1.01.	Belanja Barang dan Jasa	77.889.600,00	76.516.360,00	1.373.240,00	98,23	
3.27.3.27.3.25.0.00.01.04.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.143.678.973,00	789.808.628,00	354.870.345,00	69,14	
3.27.3.27.3.25.0.00.01.04.2.03.	PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	851.371.091,00	511.283.428,00	340.088.663,00	60,05	
3.27.3.27.3.25.0.00.01.04.2.03.02.	PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER	851.371.091,00	511.283.428,00	340.088.663,00	60,05	
3.27.3.27.3.25.0.00.01.04.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	851.371.091,00	511.283.428,00	340.088.663,00	60,05	
3.27.3.27.3.25.0.00.01.04.2.04.	PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	396.306.882,00	382.325.206,00	13.981.682,00	96,48	
3.27.3.27.3.25.0.00.01.04.2.04.03.	PENETAPAN PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS	396.306.882,00	382.325.206,00	13.981.682,00	96,48	
3.27.3.27.3.25.0.00.01.04.2.04.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	396.306.882,00	382.325.206,00	13.981.682,00	96,48	
3.27.3.27.3.25.0.00.01.01.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.763.354.279,00	1.303.875.591,00	460.478.688,00	73,88	
3.27.3.27.3.25.0.00.01.01.2.01.	PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	1.763.354.279,00	1.303.875.591,00	460.478.688,00	73,88	
3.27.3.27.3.25.0.00.01.01.2.01.01.	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA	1.763.354.279,00	1.303.875.591,00	460.478.688,00	73,88	
3.27.3.27.3.25.0.00.01.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.763.354.279,00	1.303.875.591,00	460.478.688,00	73,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	17.209.493.926,00	15.225.790.833,00	1.983.703.093,00	88,47	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(16.559.493.926,00)	(14.651.244.533,00)	(2.859.156.793,00)	88,47	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(16.559.493.926,00)	(14.651.244.533,00)	(2.859.156.793,00)	88,47	

SIPKD

Lampiran 1.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : 3.30.3.31.0.00.12. - Dinas Perdagangan dan Perindustrian

1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3.30.3.30.3.31.0.00.12.01.0.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	1.464.910.000,00	1.133.903.200,00	(331.006.800,00)	77,40	
3.30.3.30.3.31.0.00.12.01.0.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.464.910.000,00	1.133.903.200,00	(331.006.800,00)	77,40	
3.30.3.30.3.31.0.00.12.01.0.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	1.464.910.000,00	1.133.903.200,00	(331.006.800,00)	77,40	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.464.910.000,00	1.133.903.200,00	(331.006.800,00)	77,40	
3.30.3.30.30.3.31.0.00.12.00.00.5.	BELANJA DAERAH	17.727.335.774,00	16.115.668.057,00	1.611.667.717,00	90,91	
3.30.3.30.30.3.31.0.00.12.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	17.636.835.774,00	16.115.668.057,00	1.520.167.717,00	91,38	
3.30.3.30.30.3.31.0.00.12.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	91.500.000,00	-	91.500.000,00	-	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.800.469.233,00	9.034.976.446,00	765.492.787,00	92,19	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	69.077.880,00	44.727.886,00	24.350.000,00	64,74	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	19.543.165,00	19.543.165,00	-	100,00	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.543.165,00	19.543.165,00	-	100,00	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	15.013.810,00	15.013.810,00	-	100,00	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.013.810,00	15.013.810,00	-	100,00	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	15.013.810,00	2.513.810,00	12.500.000,00	16,40	

SIPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.013.810,00	3.513.810,00	11.500.000,00	23,40	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	9.750.532,00	4.250.532,00	5.500.000,00	43,59	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.750.532,00	4.250.532,00	5.500.000,00	43,59	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	9.756.563,00	2.406.563,00	7.350.000,00	24,66	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.756.563,00	2.406.563,00	7.350.000,00	24,66	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.945.634.020,00	6.561.941.702,00	383.692.318,00	94,47	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.916.838.804,00	6.533.146.486,00	383.692.318,00	94,45	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	6.916.838.804,00	6.533.146.486,00	383.692.318,00	94,45	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.02.04.	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	9.677.866,00	9.677.866,00	-	100,00	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.02.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.677.866,00	9.677.866,00	-	100,00	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	9.677.866,00	9.677.866,00	-	100,00	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.677.866,00	9.677.866,00	-	100,00	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	9.439.480,00	9.439.480,00	-	100,00	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.439.480,00	9.439.480,00	-	100,00	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	28.316.488,00	14.516.488,00	13.800.000,00	51,26	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.03.01.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	9.439.515,00	3.939.515,00	5.500.000,00	41,73	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.439.515,00	3.939.515,00	5.500.000,00	41,73	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.03.05.	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	9.439.606,00	5.489.606,00	3.950.000,00	58,15	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.03.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.439.606,00	5.489.606,00	3.950.000,00	58,15	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	9.439.367,00	5.089.367,00	4.350.000,00	53,91	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.03.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.439.367,00	5.089.367,00	4.350.000,00	53,91	

SKPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Bacar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	716.581.626,00	684.845.508,00	31.736.118,00	95,57	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.160.000,00	4.160.000,00	-	100,00	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.160.000,00	4.160.000,00	-	100,00	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	211.391.400,00	201.017.202,00	10.374.198,00	95,11	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	211.391.400,00	201.017.202,00	10.374.198,00	95,11	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	38.384.466,00	38.383.122,00	1.344,00	99,99	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	38.384.466,00	38.383.122,00	1.344,00	99,99	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	22.000.000,00	16.500.000,00	5.500.000,00	75,00	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	16.500.000,00	5.500.000,00	75,00	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	449.625.760,00	433.785.184,00	15.840.576,00	96,47	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.06.09.5.1.01.	Belanja Barang dan Jasa	449.625.760,00	433.785.184,00	15.840.576,00	96,47	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.621.466.410,00	1.396.593.397,00	224.873.021,00	86,13	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.08.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	479.038.418,00	384.436.897,00	94.601.521,00	80,25	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	479.038.418,00	384.436.897,00	94.601.521,00	80,25	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.134.430.000,00	1.002.156.506,00	132.273.500,00	88,34	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.134.430.000,00	1.002.156.506,00	132.273.500,00	88,34	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	417.408.801,00	332.349.471,00	85.059.330,00	79,62	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	200.383.984,00	163.456.854,00	36.847.130,00	81,60	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	200.383.984,00	163.456.854,00	36.847.130,00	81,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	195.506.217,00	147.294.017,00	48.112.200,00	75,33	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	195.506.217,00	147.294.017,00	48.112.200,00	75,33	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.2.09.05.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	21.598.600,00	21.598.600,00	-	100,00	
0.00.3.30.3.31.0.00.12.01.3.09.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.598.600,00	21.598.600,00	-	100,00	
3.30.3.30.3.31.0.00.12.02.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	44.184.312,00	44.184.311,00	-	100,00	
3.30.3.30.3.31.0.00.12.02.2.06.	PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	44.184.312,00	44.184.311,00	-	100,00	
3.30.3.30.3.31.0.00.12.02.2.06.03.	PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA TERHADAP PENGGUNA AKHIR BAHAN BERBAHAYA (PA-B2) MAUPUN PRODUSEN B2 (P-B2)	44.184.312,00	44.184.311,00	-	100,00	
3.30.3.30.3.31.0.00.12.02.2.06.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	44.184.312,00	44.184.311,00	-	100,00	
3.30.3.30.3.31.0.00.12.03.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.306.624.568,00	3.122.164.438,00	184.459.930,00	94,42	
3.30.3.30.3.31.0.00.12.03.2.01.	PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.306.624.568,00	3.122.164.438,00	184.459.930,00	94,42	
3.30.3.30.3.31.0.00.12.03.2.01.01.	PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.306.624.568,00	3.122.164.438,00	184.459.930,00	94,42	
3.30.3.30.3.31.0.00.12.03.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.215.124.568,00	3.122.164.438,00	92.959.930,00	97,10	
3.30.3.30.3.31.0.00.12.03.2.01.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.500.000,00	-	91.500.000,00	-	
3.30.3.30.3.31.0.00.12.06.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	511.776.957,00	469.675.000,00	42.101.957,00	91,77	
3.30.3.30.3.31.0.00.12.06.2.01.	PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN	511.776.957,00	469.675.000,00	42.101.957,00	91,77	
3.30.3.30.3.31.0.00.12.06.2.01.01.	PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG	511.776.957,00	469.675.000,00	42.101.957,00	91,77	
3.30.3.30.3.31.0.00.12.06.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	511.776.957,00	469.675.000,00	42.101.957,00	91,77	
3.30.3.30.3.31.0.00.12.07.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1.415.438.941,00	1.200.633.150,00	215.797.791,00	84,75	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3.30.3.30.3.31.0.00.12.07.2.01.	PELAKSANAAN PROMOSI, PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	1.416.430.941,00	1.200.633.150,00	215.797.791,00	84,76	
3.30.3.30.3.31.0.00.12.07.2.01.01.	PELAKSANAAN PROMOSI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	436.625.346,00	324.810.150,00	111.815.196,00	74,39	
3.30.3.30.3.31.0.00.12.07.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	436.625.346,00	324.810.150,00	111.815.196,00	74,39	
3.30.3.30.3.31.0.00.12.07.2.01.02.	PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	979.805.595,00	875.810.000,00	103.982.595,00	89,38	
3.30.3.30.3.31.0.00.12.07.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	979.805.595,00	875.810.000,00	103.982.595,00	89,38	
3.31.3.30.3.31.0.00.12.02.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.647.849.963,00	3.244.034.711,00	403.815.252,00	88,94	
3.31.3.30.3.31.0.00.12.02.2.01.	PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	3.647.849.963,00	3.244.034.711,00	403.815.252,00	88,94	
3.31.3.30.3.31.0.00.12.02.2.01.02.	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN, PENYEBARAN DAN PERWILAYAHAN INDUSTRI	300.000.000,00	278.549.100,00	21.450.900,00	92,84	
3.31.3.30.3.31.0.00.12.02.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	278.549.100,00	21.450.900,00	92,84	
3.31.3.30.3.31.0.00.12.02.2.01.03.	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI	1.819.353.963,00	1.438.095.611,00	381.258.352,00	81,11	
3.31.3.30.3.31.0.00.12.02.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.819.353.963,00	1.438.095.611,00	381.258.352,00	81,11	
3.31.3.30.3.31.0.00.12.02.2.01.04.	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI	328.496.000,00	327.390.000,00	1.106.000,00	99,66	
3.31.3.30.3.31.0.00.12.02.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	328.496.000,00	327.390.000,00	1.106.000,00	99,66	
	JUMLAH BELANJA	17.727.335.774,00	16.115.668.057,00	1.611.667.717,00	90,90	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(16.262.425.774,00)	(14.981.764.857,00)	(1.942.674.517,00)	92,12	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(16.262.425.774,00)	(14.981.764.857,00)	(1.942.674.517,00)	92,12	

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : **4.01.0.00.0.00.01. - Sekretariat Daerah**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.01.0.04.01.0.00.0.00.01.00.90.5.	BELANJA DAERAH	186.792.978.741,00	177.372.528.485,91	9.420.450.255,09	94,95	
4.01.0.04.01.0.00.0.00.01.00.90.5.1	BELANJA OPERASI	176.186.158.441,00	167.000.886.865,91	9.185.271.575,09	94,78	
4.01.0.04.01.0.00.0.00.01.00.90.5.2.	BELANJA MODAL	10.606.820.300,00	10.371.641.620,00	235.186.680,00	97,78	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	156.260.427.138,00	148.918.400.982,65	7.380.026.155,35	95,27	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	226.958.277,00	209.476.670,00	17.481.607,00	92,29	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	88.965.848,00	81.414.248,00	7.551.600,00	91,51	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	88.965.848,00	81.414.248,00	7.551.600,00	91,51	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	18.982.432,00	15.592.432,00	3.390.000,00	82,14	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.982.432,00	15.592.432,00	3.390.000,00	82,14	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	13.905.748,00	13.905.748,00	-	100,00	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.905.748,00	13.905.748,00	-	100,00	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	9.229.770,00	9.229.770,00	-	100,00	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.229.770,00	9.229.770,00	-	100,00	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	9.053.604,00	9.053.604,00	-	100,00	

SEKDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.053.604,00	9.053.604,00	-	100,00	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	87.929.875,00	81.329.868,00	6.600.007,00	92,48	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	87.929.875,00	81.329.868,00	6.600.007,00	92,48	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	22.197.028.080,00	20.856.625.961,00	1.340.402.127,00	93,96	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	21.864.278.176,00	20.671.274.614,00	1.193.003.562,00	94,08	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	21.864.278.176,00	20.671.274.614,00	1.193.003.562,00	94,08	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.03.	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	207.526.111,00	166.565.351,00	40.960.760,00	80,26	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	207.526.111,00	166.565.351,00	40.960.760,00	80,26	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	60.049.188,00	57.084.340,00	2.964.948,00	95,06	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	60.049.188,00	57.084.340,00	2.964.948,00	95,06	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	65.174.613,00	61.701.748,00	3.472.865,00	94,67	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	65.174.613,00	61.701.748,00	3.472.865,00	94,67	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	176.456.322,00	161.227.313,00	15.229.009,00	91,36	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	176.456.322,00	161.227.313,00	15.229.009,00	91,36	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.03.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	176.456.322,00	161.227.313,00	15.229.009,00	91,36	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	906.822.080,00	463.815.550,00	36.906.530,00	92,62	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.05.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	341.449.500,00	339.675.000,00	1.774.500,00	99,48	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.05.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	341.449.500,00	339.675.000,00	1.774.500,00	99,48	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.05.03.	PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	96.672.580,00	74.100.550,00	22.572.030,00	76,65	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.05.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	96.672.580,00	74.100.550,00	22.572.030,00	76,65	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	62.400.000,00	48.840.000,00	13.560.000,00	78,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	61.400.000,00	48.840.000,00	12.560.000,00	79,87	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	37.471.774.118,00	36.950.185.322,00	521.588.796,00	98,60	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.119.579.680,00	4.965.931.280,00	153.648.400,00	96,99	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.119.579.680,00	4.965.931.280,00	153.648.400,00	96,99	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.847.327.680,00	2.809.195.770,00	38.131.930,00	98,66	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.03.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.847.327.680,00	2.809.195.770,00	38.131.930,00	98,66	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	23.185.636.100,00	23.145.327.588,00	40.310.512,00	99,82	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.185.636.100,00	23.145.327.588,00	40.310.512,00	99,82	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.678.771.048,00	3.637.904.238,00	40.866.810,00	98,89	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.678.771.048,00	3.637.904.238,00	40.866.810,00	98,89	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	406.477.800,00	204.196.000,00	202.281.800,00	50,23	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	406.477.800,00	204.196.000,00	202.281.800,00	50,23	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	2.059.559.040,00	2.059.015.526,00	543.514,00	99,97	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.059.559.040,00	2.059.015.526,00	543.514,00	99,97	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.10.	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	174.430.930,00	128.625.000,00	45.805.930,00	73,73	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	174.430.930,00	128.625.000,00	45.805.930,00	73,73	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	10.634.332.380,00	10.410.210.650,00	224.021.730,00	97,89	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	7.452.492.700,00	7.256.366.550,00	196.126.150,00	97,36	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.07.05.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.452.492.700,00	7.256.366.550,00	196.126.150,00	97,36	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.07.10.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	3.181.739.680,00	3.153.844.100,00	27.895.580,00	99,13	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.07.10.5.1.05.	Belanja Hibah	2.999.739.680,00	2.971.844.100,00	27.895.580,00	99,07	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.07.10.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	181.000.000,00	181.000.000,00	-	100,00	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	31.229.184.457,00	28.991.220.650,00	2.237.963.757,00	92,83	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	100.000.000,00	95.000.000,00	5.000.000,00	95,00	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	95.000.000,00	5.000.000,00	95,00	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	12.564.574.664,00	12.041.942.105,00	522.632.559,00	95,84	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.564.574.664,00	12.041.942.105,00	522.632.559,00	95,84	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	9.407.853.500,00	9.404.836.045,00	3.017.455,00	99,96	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.407.853.500,00	9.404.836.045,00	3.017.455,00	99,96	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	9.156.756.243,00	7.449.442.500,00	1.707.313.743,00	81,35	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.156.756.243,00	7.449.442.500,00	1.707.313.743,00	81,35	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	37.833.351.809,00	35.280.194.178,65	2.553.150.830,35	93,25	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	2.853.856.500,00	2.775.897.174,00	77.959.326,00	97,26	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.853.856.500,00	2.775.897.174,00	77.959.326,00	97,26	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	12.544.576.500,00	12.580.546.507,00	(35.970.007,00)	100,28	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.544.576.500,00	12.580.546.507,00	(35.970.007,00)	100,28	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.05.	PEMELIHARAAN MEBEL	233.050.000,00	228.800.000,00	4.250.000,00	98,17	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	233.050.000,00	228.800.000,00	4.250.000,00	98,17	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.014.669.600,00	1.009.936.200,00	4.733.400,00	99,53	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.014.669.600,00	1.009.936.200,00	4.733.400,00	99,53	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	20.317.148.409,00	17.892.822.397,65	2.425.126.011,35	88,06	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.192.148.409,00	17.767.951.897,65	2.424.197.211,35	87,99	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.09.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	125.000.000,00	124.871.300,00	128.700,00	99,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.11.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	870.050.000,00	792.991.900,00	77.058.100,00	91,14	
5.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	870.050.000,00	792.991.900,00	77.058.100,00	91,14	
5.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.11.	ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	1.334.841.361,00	1.166.400.000,00	168.441.361,00	87,38	
5.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.11.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	159.070.961,00	-	159.070.961,00	-	
5.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.11.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	159.070.961,00	-	159.070.961,00	-	
5.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.11.02.	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	161.210.300,00	160.400.000,00	810.300,00	99,49	
5.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.11.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	161.210.300,00	160.400.000,00	810.300,00	99,49	
5.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.11.03.	PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	5.200.000,00	-	5.200.000,00	-	
5.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.11.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	-	5.200.000,00	-	
5.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.11.04.	PENYEDIAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	999.360.000,00	996.000.000,00	3.360.000,00	99,66	
5.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.11.04.5.1.01.	Belanja Pegawai	999.360.000,00	996.000.000,00	3.360.000,00	99,66	
5.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.	PENATAAN ORGANISASI	1.141.022.084,00	942.680.528,00	198.341.556,00	82,61	
5.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.01.	PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	413.314.256,00	304.515.248,00	108.799.008,00	73,67	
5.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	413.314.256,00	304.515.248,00	108.799.008,00	73,67	
5.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.02.	FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	131.960.300,00	93.332.014,00	38.628.286,00	70,72	
5.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	131.960.300,00	93.332.014,00	38.628.286,00	70,72	
5.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.03.	PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	122.761.510,00	78.818.690,00	43.933.820,00	64,21	
5.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	122.761.510,00	78.818.690,00	43.933.820,00	64,21	
5.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.04.	MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	95.867.208,00	95.676.208,00	191.000,00	99,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	95.867.208,00	95.676.208,00	191.000,00	99,80	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	377.118.810,00	370.318.368,00	6.800.442,00	98,19	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	377.118.810,00	370.318.368,00	6.800.442,00	98,19	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.14.	PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	13.563.057.112,00	13.496.564.160,00	66.492.952,00	99,50	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.14.01.	FASILITASI KEPROTOKOLAN	4.602.089.724,00	4.575.842.636,00	26.247.088,00	99,42	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.14.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.602.089.724,00	4.575.842.636,00	26.247.088,00	99,42	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.14.02.	FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN	6.472.568.370,00	6.446.094.780,00	26.473.590,00	99,59	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.14.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.472.568.370,00	6.446.094.780,00	26.473.590,00	99,59	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.14.03.	PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN	2.488.399.018,00	2.474.626.744,00	13.772.274,00	99,44	
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.14.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.488.399.018,00	2.474.626.744,00	13.772.274,00	99,44	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	28.794.285.281,00	27.106.173.478,26	1.688.111.802,74	94,13	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.01.	ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	3.334.741.282,00	3.047.744.774,00	286.996.508,00	91,39	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.01.01.	PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	1.076.445.934,00	803.275.583,00	273.170.351,00	74,62	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.076.445.934,00	803.275.583,00	273.170.351,00	74,62	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.01.02.	PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	1.037.146.020,00	1.026.297.030,00	10.848.990,00	98,95	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.037.146.020,00	1.026.297.030,00	10.848.990,00	98,95	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.01.03.	FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH	1.221.149.328,00	1.218.172.161,00	2.977.167,00	99,75	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.221.149.328,00	1.218.172.161,00	2.977.167,00	99,75	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.02.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	22.000.442.211,00	20.988.413.475,26	1.012.028.735,74	95,39	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.02.01.	FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL	3.324.820.171,00	3.113.162.990,00	211.657.861,00	93,63	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.324.820.171,00	3.113.162.990,00	211.657.861,00	93,63	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.02.02.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL	8.990.097.318,00	8.311.564.502,00	678.532.816,00	92,45	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.990.097.318,00	8.311.564.502,00	678.532.816,00	92,45	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.02.03.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	9.685.534.772,00	9.563.695.713,26	121.839.058,74	98,74	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.921.284.772,00	6.799.445.713,26	121.839.058,74	98,23	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.02.03.5.1.05.	Belanja Hibah	2.764.240.000,00	2.764.240.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.03.	FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.587.019.938,00	2.291.679.654,00	295.340.284,00	88,58	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.03.01.	FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH	154.159.732,00	131.573.544,00	22.586.188,00	85,34	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	154.159.732,00	131.573.544,00	22.586.188,00	85,34	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.03.02.	FASILITASI BANTUAN HUKUM	1.464.071.148,00	1.313.734.526,00	150.336.622,00	89,73	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.464.071.148,00	1.313.734.526,00	150.336.622,00	89,73	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.03.03.	PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM	968.789.058,00	846.371.584,00	122.417.474,00	87,36	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.03.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	968.789.058,00	846.371.584,00	122.417.474,00	87,36	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.04.	FASILITASI KERJA SAMA DAERAH	872.081.850,00	778.336.575,00	93.745.275,00	89,25	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.04.01.	FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI	458.677.215,00	442.469.449,00	16.207.766,00	96,46	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.04.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	458.677.215,00	442.469.449,00	16.207.766,00	96,46	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.04.02.	FASILITASI KERJA SAMA LUAR NEGERI	239.766.335,00	176.901.716,00	62.864.619,00	73,78	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.04.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	239.766.335,00	176.901.716,00	62.864.619,00	73,78	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.04.03.	EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA	173.638.300,00	158.965.410,00	14.672.890,00	91,54	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.04.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	173.638.300,00	158.965.410,00	14.672.890,00	91,54	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.708.268.332,00	1.347.946.025,00	352.330.307,00	78,37	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.01.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	402.892.306,00	306.738.093,00	96.154.211,00	76,13	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.01.01.	KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD	195.679.599,00	140.213.219,00	55.466.380,00	71,65	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.01.01.5.1.01.	Belanja Barang dan Jasa	195.679.599,00	140.213.219,00	55.466.380,00	71,65	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.01.02.	PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN	117.763.092,00	92.293.738,00	25.469.354,00	78,37	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.01.02.5.1.01.	Belanja Barang dan Jasa	117.763.092,00	92.293.738,00	25.469.354,00	78,37	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.01.03.	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL	89.449.615,00	74.231.138,00	15.218.477,00	82,98	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.01.03.5.1.01.	Belanja Barang dan Jasa	89.449.615,00	74.231.138,00	15.218.477,00	82,98	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.02.	PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	406.736.162,00	287.093.890,00	119.642.272,00	70,58	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.02.01.	FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN	114.204.124,00	48.288.300,00	65.915.824,00	42,28	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.02.01.5.1.01.	Belanja Barang dan Jasa	114.204.124,00	48.288.300,00	65.915.824,00	42,28	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.02.02.	PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN	133.505.563,00	136.814.115,00	3.691.448,00	97,98	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.02.02.5.1.01.	Belanja Barang dan Jasa	133.505.563,00	136.814.115,00	3.691.448,00	97,98	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.02.03.	PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	159.026.475,00	107.991.475,00	51.035.000,00	67,90	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.02.03.5.1.01.	Belanja Barang dan Jasa	159.026.475,00	107.991.475,00	51.035.000,00	67,90	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.03.	PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	636.170.414,00	614.615.082,00	21.555.332,00	96,61	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.03.01.	PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	119.484.896,00	104.906.620,00	14.578.276,00	87,79	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.03.01.5.1.01.	Belanja Barang dan Jasa	119.484.896,00	104.906.620,00	14.578.276,00	87,79	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.03.02.	PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	339.949.870,00	334.682.542,00	5.267.328,00	98,45	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.03.02.5.1.01.	Belanja Barang dan Jasa	339.949.870,00	334.682.542,00	5.267.328,00	98,45	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.03.03.	PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	176.735.648,00	175.025.928,00	1.709.720,00	99,03	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.03.03.5.1.01.	Belanja Pegawai	144.000.000,00	144.000.000,00	-	100,00	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.03.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.735.648,00	31.025.928,00	1.709.720,00	94,77	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.04.	PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	154.467.446,00	139.498.958,00	114.968.483,00	90,31	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.04.01.	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN	70.887.215,00	45.873.273,00	25.013.942,00	64,31	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.04.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	70.887.215,00	45.873.273,00	25.013.942,00	64,31	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.04.02.	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	80.743.815,00	31.854.980,00	48.888.835,00	39,45	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.04.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	80.743.815,00	31.854.980,00	48.888.835,00	39,45	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.04.03.	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN ENERGI DAN AIR	103.837.210,00	62.570.705,00	41.266.505,00	60,27	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.04.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	103.837.210,00	62.570.705,00	41.266.505,00	60,27	
	JUMLAH BELANJA	186.792.978.741,00	177.372.520.485,91	9.420.458.255,09	94,95	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(186.792.978.741,00)	(177.372.520.485,91)	(9.420.458.255,09)	94,95	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(186.792.978.741,00)	(177.372.520.485,91)	(9.420.458.255,09)	94,95	

Lampiran 1.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : 4.02.0.00.0.00.01. - Sekretariat DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.0.00.0.00.0.00.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	200.395.869.835,00	190.614.071.944,00	9.781.797.891,00	95,11	
4.02.0.00.0.00.0.00.01.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	198.838.573.135,00	189.068.293.244,00	9.770.288.891,00	95,08	
4.02.0.00.0.00.0.00.01.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	1.557.296.700,00	1.545.781.700,00	11.509.000,00	99,26	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	81.857.719.221,00	78.658.785.244,00	3.198.934.977,00	96,09	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	89.993.175,00	89.993.175,00	-	100,00	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	59.999.300,00	59.999.300,00	-	100,00	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	59.999.300,00	59.999.300,00	-	100,00	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	17.999.760,00	17.999.760,00	-	100,00	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.999.760,00	17.999.760,00	-	100,00	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	11.999.116,00	11.999.116,00	-	100,00	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.999.116,00	11.999.116,00	-	100,00	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.928.229.394,00	7.578.258.656,00	349.970.738,00	95,58	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.872.229.882,00	7.522.258.144,00	349.970.738,00	95,55	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	7.872.229.882,00	7.522.259.144,00	349.970.738,00	95,55	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	29.999.700,00	29.999.700,00	-	100,00	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.999.700,00	29.999.700,00	-	100,00	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	25.999.812,00	25.999.812,00	-	100,00	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.999.812,00	25.999.812,00	-	100,00	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	30.169.272,00	30.169.272,00	-	100,00	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.03.01.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	14.999.972,00	14.999.972,00	-	100,00	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.999.972,00	14.999.972,00	-	100,00	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.03.05.	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	15.169.300,00	15.169.300,00	-	100,00	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.03.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.169.300,00	15.169.300,00	-	100,00	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	963.235.200,00	801.697.950,00	161.537.250,00	83,22	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.05.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	411.257.200,00	407.482.450,00	3.774.750,00	99,08	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.05.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	411.257.200,00	407.482.450,00	3.774.750,00	99,08	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	551.978.000,00	394.215.500,00	157.762.500,00	71,41	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	551.978.000,00	394.215.500,00	157.762.500,00	71,41	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	13.928.721.527,00	13.541.494.039,00	387.229.488,00	97,21	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	623.959.275,00	623.760.400,00	198.875,00	99,96	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	623.959.275,00	623.760.400,00	198.875,00	99,96	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	150.000.000,00	149.400.400,00	599.600,00	99,60	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	149.400.400,00	599.600,00	99,60	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	5.553.342.900,00	5.238.323.900,00	314.019.000,00	94,34	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.553.342.900,00	5.239.323.900,00	314.019.000,00	94,34	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.492.943.096,00	1.476.459.781,00	16.483.315,00	98,89	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.492.943.096,00	1.476.459.781,00	16.483.315,00	98,89	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	303.840.000,00	303.570.000,00	270.000,00	99,91	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	303.840.000,00	303.570.000,00	270.000,00	99,91	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	5.804.638.256,00	5.748.979.558,00	55.658.698,00	99,04	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.804.638.256,00	5.748.979.558,00	55.658.698,00	99,04	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.015.035.573,00	2.973.584.700,00	41.450.873,00	98,62	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	166.427.000,00	165.827.700,00	599.300,00	99,63	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.07.05.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	166.427.000,00	165.827.700,00	599.300,00	99,63	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.07.08.	PENGADAAN ASET TAK BERWUJUD	650.000.000,00	648.461.000,00	1.539.000,00	99,76	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.07.08.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	650.000.000,00	648.461.000,00	1.539.000,00	99,76	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.07.10.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	2.198.608.573,00	2.159.216.000,00	39.392.573,00	98,20	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.07.10.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.07.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.455.744.878,00	1.425.723.000,00	30.021.878,00	97,93	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.07.10.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	740.863.695,00	731.493.000,00	9.370.700,00	98,73	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.587.630.938,00	5.230.473.449,00	357.157.489,00	93,61	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	8.680.000,00	-	8.680.000,00	-	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.08.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.680.000,00	-	8.680.000,00	-	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	2.284.628.194,00	2.260.862.109,00	23.766.085,00	98,96	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.284.628.194,00	2.260.862.109,00	23.766.085,00	98,95	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	602.715.200,00	586.450.100,00	16.260.000,00	97,30	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	602.710.200,00	586.450.200,00	16.260.000,00	97,30	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.00.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.691.612.544,00	2.383.161.140,00	308.451.404,00	88,54	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.00.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.691.612.544,00	2.383.161.140,00	308.451.404,00	88,54	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9.549.882.819,00	8.430.486.360,00	1.119.396.459,00	88,27	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	1.748.950.000,00	1.401.889.200,00	347.060.800,00	80,15	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.748.950.000,00	1.401.889.200,00	347.060.800,00	80,15	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.449.929.128,00	814.450.450,00	635.478.670,00	56,17	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.449.929.128,00	814.450.450,00	635.478.670,00	56,17	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.09.05.	PEMELIHARAAN MEBEL	269.100.000,00	269.100.000,00	-	100,00	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.09.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	269.100.000,00	269.100.000,00	-	100,00	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	753.986.600,00	745.775.600,00	8.211.000,00	98,91	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.09.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	753.986.600,00	745.775.600,00	8.211.000,00	98,91	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.09.11.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	5.327.917.099,00	5.199.271.110,00	128.645.989,00	97,58	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.09.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.327.917.099,00	5.199.271.110,00	128.645.989,00	97,58	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.15.	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	35.127.829.273,00	35.680.920.833,00	446.908.440,00	98,75	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.15.01.	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	34.988.477.576,00	34.668.909.006,00	319.568.570,00	99,08	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.15.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	34.988.477.576,00	34.668.909.006,00	319.568.570,00	99,08	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.15.02.	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	867.624.995,00	866.285.125,00	1.339.870,00	99,84	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.15.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	867.624.995,00	866.285.125,00	1.339.870,00	99,84	
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.15.03.	PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD	271.726.700,00	145.726.700,00	126.000.000,00	53,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.15.03.5.1.01.	Belanja Barang dan Jasa	271.726.700,00	145.726.700,00	126.000.000,00	53,63	
5.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.15.	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	4.636.976.644,00	4.381.781.806,00	255.194.238,00	94,77	
5.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.15.01.	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN DPRD	709.611.160,00	613.740.140,00	91.870.920,00	86,57	
5.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.15.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	705.611.160,00	613.740.140,00	91.870.920,00	86,97	
5.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.15.02.	FASILITASI FRAKSI DPRD	438.676.340,00	352.514.740,00	86.161.600,00	80,35	
5.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.15.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	438.676.340,00	352.514.740,00	86.161.600,00	80,35	
5.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.15.03.	FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD	3.492.688.564,00	3.335.526.829,00	157.161.715,00	95,50	
5.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.15.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.492.688.564,00	3.335.526.829,00	157.161.715,00	95,50	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	118.538.150.614,00	111.955.186.700,00	6.582.872.914,00	94,44	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.01.	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	2.813.656.584,00	1.762.339.939,00	254.716.645,00	87,54	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.01.01.	PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	138.353.448,00	42.211.448,00	96.142.000,00	30,50	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	138.353.448,00	42.211.448,00	96.142.000,00	30,50	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.01.02.	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	1.599.811.668,00	1.567.388.527,00	31.803.141,00	98,01	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.599.811.668,00	1.567.388.527,00	31.803.141,00	98,01	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.01.04.	FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGAN NASKAH AKADEMIK	210.841.504,00	109.120.000,00	100.721.504,00	52,04	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	210.841.504,00	109.120.000,00	100.721.504,00	52,04	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.01.05.	PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD	65.049.954,00	43.599.954,00	22.050.000,00	66,41	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	65.049.954,00	43.599.954,00	22.050.000,00	66,41	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.	PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	336.321.320,00	236.046.600,00	100.274.720,00	70,18	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.01.	PEMBAHASAN KUA DAN PPAS	76.009.904,00	75.803.800,00	206.104,00	99,72	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	76.009.904,00	75.803.800,00	206.104,00	99,72	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.02.	PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	59.545.904,00	59.337.800,00	208.104,00	99,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	59.545.904,00	59.337.800,00	208.104,00	99,65	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.03.	PEMBAHASAN APBD	96.765.704,00	17.354.600,00	79.411.104,00	17,93	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	96.765.704,00	17.354.600,00	79.411.104,00	17,93	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.04.	PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN	66.405.904,00	66.197.800,00	208.104,00	99,68	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	66.405.904,00	66.197.800,00	208.104,00	99,68	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.06.	PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD	37.593.904,00	17.354.600,00	20.239.304,00	46,15	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	37.593.904,00	17.354.600,00	20.239.304,00	46,15	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	6.029.480.892,00	6.013.529.092,00	15.951.800,00	99,73	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.01.	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	1.301.714.500,00	1.299.815.500,00	1.899.000,00	99,85	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.301.714.500,00	1.299.815.500,00	1.899.000,00	99,85	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.02.	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR	2.965.031.500,00	2.955.462.700,00	9.568.800,00	99,68	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.965.031.500,00	2.955.462.700,00	9.568.800,00	99,68	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.03.	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.502.244.200,00	1.500.345.200,00	1.899.000,00	99,87	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.502.244.200,00	1.500.345.200,00	1.899.000,00	99,87	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.04.	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREKONOMIAN	1.202.244.200,00	1.200.345.200,00	1.899.000,00	99,84	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.202.244.200,00	1.200.345.200,00	1.899.000,00	99,84	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.08.	PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH	18.240.492,00	17.560.492,00	680.000,00	96,24	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.240.492,00	17.560.492,00	680.000,00	96,24	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.04.	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	58.305.505.334,00	55.177.575.455,00	3.027.929.879,00	94,80	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.04.02.	PENDALAMAN TUGAS DPRD	1.585.036.000,00	1.448.707.437,00	137.228.563,00	91,34	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.04.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.585.036.000,00	1.448.707.437,00	137.228.563,00	91,34	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.04.03.	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DEWAN	44.681.261.226,00	42.131.314.778,00	2.549.946.442,00	94,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.04.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	44.681.261.220,00	42.131.314.778,00	2.549.946.442,00	94,29	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.04.04.	PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI	1.584.720.000,00	1.284.400.000,00	300.320.000,00	81,04	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.04.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.584.720.000,00	1.284.400.000,00	300.320.000,00	81,05	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.04.05.	PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI	330.720.000,00	319.200.000,00	11.520.000,00	96,51	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.04.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	330.720.000,00	319.200.000,00	11.520.000,00	96,51	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.04.06.	PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT	8.879.655.300,00	8.856.584.340,00	23.071.060,00	99,74	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.04.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.879.655.300,00	8.856.584.240,00	23.071.060,00	99,74	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.04.07.	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DPRD	1.243.212.804,00	1.237.369.000,00	5.843.804,00	99,53	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.04.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.243.212.804,00	1.237.369.000,00	5.843.804,00	99,53	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.05.	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	23.359.161.274,00	22.117.128.273,00	1.242.033.001,00	94,68	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.05.01.	KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH	369.741.296,00	67.061.296,00	302.680.000,00	32,27	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.05.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	369.741.296,00	67.061.296,00	302.680.000,00	32,27	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.05.02.	PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	53.139.000,00	53.139.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.05.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	53.139.000,00	53.139.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.05.03.	PELAKSANAAN RESES	23.036.280.978,00	21.976.927.977,00	1.059.353.001,00	95,40	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.05.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.036.280.978,00	21.976.927.977,00	1.059.353.001,00	95,40	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.06.	PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	27.999.696,00	8.712.200,00	19.287.496,00	31,11	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.06.02.	PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	27.999.696,00	8.712.200,00	19.287.496,00	31,11	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.999.696,00	8.712.200,00	19.287.496,00	31,11	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.07.	PEMBAHASAN KERJA SAMA DAERAH	5.051.381.974,00	4.154.644.000,00	897.737.974,00	82,23	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.07.02.	PENYUSUNAN BAHAN KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI	5.051.381.974,00	4.154.644.000,00	897.737.974,00	82,23	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.07.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.051.381.974,00	4.154.644.000,00	897.737.974,00	82,23	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.88.	FASILITASI TUGAS DPRD	23.414.252.550,00	22.385.311.141,00	1.028.941.409,00	95,60	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.88.01.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	11.319.336.120,00	10.663.957.813,00	656.378.307,00	94,20	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.88.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.319.336.120,00	10.663.957.813,00	656.378.307,00	94,20	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.88.02.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DPRD	49.553.654,00	27.440.000,00	22.113.654,00	55,37	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.88.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	49.553.654,00	27.440.000,00	22.113.654,00	55,37	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.88.03.	FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS BADAN MUSYAWARAH	66.570.296,00	56.252.000,00	10.318.296,00	84,50	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.88.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	66.570.296,00	56.252.000,00	10.318.296,00	84,50	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.88.04.	FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD	11.978.792.480,00	11.638.661.328,00	340.131.152,00	97,16	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.88.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.978.792.480,00	11.638.661.328,00	340.131.152,00	97,16	
	JUMLAH BELANJA	200.395.869.835,00	190.614.071.944,00	9.781.797.891,00	95,11	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(200.395.869.835,00)	(190.614.071.944,00)	(9.781.797.891,00)	95,11	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(200.395.869.835,00)	(190.614.071.944,00)	(9.781.797.891,00)	95,11	

Lampiran 1.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 Tahun 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : 5.01.0.00.0.90.01. - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5.01.0.05.01.0.00.0.00.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	13.212.169.950,00	10.566.739.175,00	2.645.430.775,00	79,97	
5.01.0.05.01.0.00.0.00.01.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	13.212.169.950,00	10.566.739.175,00	2.645.430.775,00	79,97	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.685.198.076,00	8.434.601.555,00	1.250.596.521,00	87,08	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	32.961.000,00	30.978.000,00	1.983.100,00	93,98	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	14.969.000,00	13.945.000,00	1.024.000,00	93,15	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.969.000,00	13.945.000,00	1.024.000,00	93,15	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	8.476.700,00	7.708.600,00	768.100,00	90,93	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.476.700,00	7.708.600,00	768.100,00	90,93	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	9.515.200,00	9.325.200,00	191.000,00	97,99	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.515.200,00	9.325.200,00	191.000,00	97,99	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.411.833.882,00	6.086.078.961,00	325.752.921,00	94,91	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.391.901.782,00	6.066.669.461,00	325.232.321,00	94,91	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	6.391.901.782,00	6.066.669.461,00	325.232.321,00	94,91	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	11.456.500,00	11.208.000,00	248.500,00	97,83	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.456.500,00	11.208.000,00	248.500,00	97,83	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	8.465.600,00	8.193.500,00	272.100,00	96,78	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.465.600,00	8.193.500,00	272.100,00	96,78	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	298.606.000,00	188.909.897,00	189.696.103,00	36,47	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.05.09.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	174.804.000,00	70.152.100,00	104.651.900,00	40,13	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.05.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	174.804.000,00	70.152.100,00	104.651.900,00	40,13	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	123.804.000,00	38.757.797,00	85.046.203,00	31,30	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	123.804.000,00	38.757.797,00	85.046.203,00	31,30	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.521.617.679,00	1.017.623.630,00	503.994.055,00	66,87	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	92.607.308,00	90.578.158,00	2.029.150,00	97,80	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	92.607.308,00	90.578.158,00	2.029.150,00	97,80	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	548.064.000,00	508.385.000,00	39.679.000,00	92,76	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.06.04.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	546.064.000,00	506.385.000,00	39.679.000,00	92,73	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	44.287.825,00	43.460.500,00	827.325,00	98,13	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	44.287.825,00	43.460.500,00	827.325,00	98,13	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	18.000.000,00	12.360.000,00	5.640.000,00	68,66	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	12.360.000,00	5.640.000,00	68,66	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	750.222.950,00	296.192.970,00	454.029.980,00	39,48	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	750.222.950,00	296.192.970,00	454.029.980,00	39,48	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.06.10.	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	68.435.600,00	66.647.000,00	1.788.600,00	97,38	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.06.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	68.435.600,00	66.647.000,00	1.788.600,00	97,38	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	906.998.419,00	786.313.861,00	120.284.558,00	86,74	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	7.600.000,00	3.600.000,00	4.000.000,00	47,36	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	3.600.000,00	4.000.000,00	47,36	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	900.998.419,00	784.713.861,00	116.284.558,00	87,09	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	900.998.419,00	784.713.861,00	116.284.558,00	87,09	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	511.588.200,00	402.784.416,00	108.803.784,00	78,73	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	394.742.200,00	285.994.416,00	108.747.784,00	72,45	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	394.742.200,00	285.994.416,00	108.747.784,00	72,45	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	116.846.000,00	116.710.000,00	136.000,00	99,88	
0.00.5.01.0.00.0.00.01.01.2.09.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	116.846.000,00	116.710.000,00	136.000,00	99,88	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.579.881.738,00	1.838.784.320,00	741.097.418,00	71,27	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.01.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	2.240.219.770,00	1.626.497.520,00	613.722.250,00	73,03	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.01.01.	PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK	294.768.544,00	107.593.900,00	187.174.644,00	36,50	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	294.768.544,00	107.593.900,00	187.174.644,00	36,50	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.01.04.	KOORDINASI PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH	272.076.260,00	124.450.800,00	147.625.460,00	45,74	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	272.076.260,00	124.450.800,00	147.625.460,00	45,74	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.01.05.	PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA	136.124.998,00	109.850.208,00	26.274.790,00	80,69	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	136.124.998,00	109.850.208,00	26.274.790,00	80,69	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.01.06.	PENYIAPAN BAHAN KOORDINASI MUSRENBANG KECAMATAN	64.999.732,00	-	64.999.732,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	64.999.732,00	-	64.999.732,00	-	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.01.07.	KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.500.250.236,00	1.314.602.620,00	185.647.616,00	87,62	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.250.236,00	1.314.602.620,00	185.647.616,00	87,62	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.02.	ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	221.898.468,00	123.943.500,00	97.955.968,00	55,86	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.02.01.	ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	107.283.300,00	106.765.700,00	517.600,00	99,51	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	107.283.300,00	106.765.700,00	517.600,00	99,51	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.02.02.	PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH	16.243.228,00	8.349.700,00	7.893.528,00	51,40	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.243.228,00	8.349.700,00	7.893.528,00	51,40	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.02.03.	PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	98.282.940,00	8.838.100,00	89.444.840,00	8,99	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	98.282.940,00	8.838.100,00	89.444.840,00	8,99	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.03.	PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	89.852.500,00	58.333.300,00	31.519.200,00	64,92	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.03.01.	KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA	11.602.800,00	3.064.700,00	8.538.100,00	26,41	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.602.800,00	3.064.700,00	8.538.100,00	26,41	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.03.03.	MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	78.249.700,00	55.268.600,00	22.981.100,00	70,63	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.03.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	78.249.700,00	55.268.600,00	22.981.100,00	70,63	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	947.090.136,00	293.353.300,00	653.736.836,00	30,97	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.01.	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	461.669.834,00	157.328.100,00	304.441.734,00	34,23	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.01.01.	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	43.229.698,00	17.164.098,00	26.065.600,00	39,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	43.229.698,00	17.164.800,00	26.065.598,00	39,70	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.01.02.	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	40.867.400,00	17.597.400,00	23.270.000,00	43,05	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	40.867.400,00	17.597.400,00	23.270.000,00	43,05	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.01.03.	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	64.735.309,00	13.987.900,00	50.747.400,00	21,60	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	64.735.300,00	13.987.900,00	50.747.400,00	21,60	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.01.05.	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	63.499.940,00	17.868.800,00	45.631.140,90	28,13	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	63.499.940,00	17.868.800,00	45.631.140,90	28,13	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.01.06.	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	71.499.940,00	26.624.400,00	44.875.540,90	37,23	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	71.499.940,00	26.624.400,00	44.875.540,00	37,23	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.01.07.	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	40.481.906,00	21.755.800,00	18.725.906,00	53,74	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	40.481.906,00	21.755.800,00	18.725.906,00	53,74	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.01.08.	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	137.355.744,00	52.220.600,00	85.136.144,00	38,02	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.01.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	137.355.744,00	52.220.600,00	85.136.144,00	38,02	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.02.	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	333.443.312,00	67.996.700,00	265.446.612,00	20,39	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.02.01.	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	67.995.672,00	29.027.700,00	38.967.972,00	42,69	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	67.995.672,00	29.027.700,00	38.967.972,00	42,69	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.02.02.	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	63.576.172,00	19.743.700,00	43.832.472,00	31,05	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	63.576.172,00	19.743.700,00	43.832.472,00	31,05	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.02.03.	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	30.449.868,00	5.000.000,00	25.449.868,00	16,42	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.449.868,00	5.000.000,00	25.449.868,00	16,42	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.02.05.	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	63.799.500,00	12.072.700,00	51.727.300,00	18,92	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	63.799.500,00	12.072.700,00	51.727.300,00	18,92	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.02.06.	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA	62.716.500,00	17.652.600,00	45.064.300,00	28,14	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.02.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	62.716.500,00	17.652.600,00	45.064.300,00	28,14	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.02.07.	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA	44.904.800,00	4.500.000,00	40.404.800,00	10,02	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	44.904.800,00	4.500.000,00	40.404.800,00	10,02	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.03.	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	151.977.000,00	38.128.500,00	113.848.500,00	25,09	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.03.01.	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	59.956.800,00	16.502.600,00	43.454.200,00	27,52	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	59.956.800,00	16.502.600,00	43.454.200,00	27,52	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.03.02.	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	57.793.300,00	16.625.900,00	41.167.400,00	28,76	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	57.793.300,00	16.625.900,00	41.167.400,00	28,76	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.03.03.	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	34.226.900,00	5.000.000,00	29.226.900,00	14,60	
5.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.03.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	34.226.900,00	5.000.000,00	29.226.900,00	14,60	
	JUMLAH BELANJA	13.212.169.950,00	10.566.739.175,00	2.645.430.775,00	79,97	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(13.212.169.950,00)	(10.566.739.175,00)	(2.645.430.775,00)	79,97	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(13.212.169.950,00)	(10.566.739.175,00)	(2.645.430.775,00)	79,97	

SIPKD

Lampiran 1.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.02. - Badan Pengelola Keuangan dan Aset

1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	1.947.498.115.156,00	1.884.317.132.816,67	(63.180.981.139,33)	96,75	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	67.648.824.936,00	21.459.144.285,67	(26.189.680.650,33)	45,83	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	2.258.586.290,00	1.772.298.990,00	(486.287.300,00)	78,46	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.943.817.264,00	5.943.817.264,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	39.446.421.382,00	13.743.028.031,67	(25.703.393.350,33)	34,83	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.899.849.290.220,00	1.862.857.987.731,00	(36.991.302.489,00)	98,05	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.510.329.218.600,00	1.519.391.551.743,00	9.062.333.143,00	100,60	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	389.520.071.620,00	343.466.436.988,00	(46.053.634.632,00)	88,17	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.947.498.115.156,00	1.884.317.132.816,67	(63.180.981.139,33)	96,75	
5.02.0.05.02.0.00.0.00.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	39.823.090.307,00	28.906.273.540,00	10.916.816.847,00	72,58	
5.02.0.05.02.0.00.0.00.02.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	29.493.672.431,00	26.375.064.183,00	3.118.608.348,00	89,42	
5.02.0.05.02.0.00.0.00.02.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	1.946.082.974,00	1.770.083.000,00	175.999.974,00	90,95	
5.02.0.05.02.0.00.0.00.02.00.00.5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.383.324.782,00	8.383.324.782,00	-	100,00	
0.06.5.02.0.00.0.00.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.329.807.163,00	30.109.161.632,00	2.016.441.581,00	90,92	

BPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	39.527.600,00	35.755.528,00	772.072,00	97,88	
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	19.102.100,00	18.718.783,00	383.317,00	97,99	
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.102.100,00	18.718.783,00	383.317,00	97,99	
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	17.425.500,00	17.036.745,00	388.755,00	97,76	
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.425.500,00	17.036.745,00	388.755,00	97,76	
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	10.450.598.558,00	10.014.938.858,00	435.669.700,00	95,83	
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	10.413.135.550,00	9.978.073.930,00	435.061.620,00	95,82	
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	10.413.135.550,00	9.978.073.930,00	435.061.620,00	95,82	
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	19.005.400,00	18.397.310,00	608.090,00	96,80	
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.005.400,00	18.397.310,00	608.090,00	96,80	
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	18.467.600,00	18.457.610,00	9.990,00	99,94	
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.467.600,00	18.457.610,00	9.990,00	99,94	
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	34.698.000,00	10.959.214,00	23.738.786,00	31,58	
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	34.698.000,00	10.959.214,00	23.738.786,00	31,58	
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	34.698.000,00	10.959.214,00	23.738.786,00	31,58	
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	6.736.829.760,00	5.975.836.419,00	762.993.349,00	88,67	
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	1.430.697.850,00	1.404.825.500,00	25.872.350,00	98,19	
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.430.697.850,00	1.404.825.500,00	25.872.350,00	98,19	
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	439.349.500,00	438.702.100,00	647.400,00	99,85	
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	439.349.500,00	438.702.100,00	647.400,00	99,85	
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	16.200.000,00	16.200.000,00	-	100,00	

SKPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	16.200.000,00	-	100,00	
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.06.08.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.314.227.518,00	835.159.269,00	479.068.249,00	63,54	
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.06.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.314.227.518,00	835.159.269,00	479.068.249,00	63,54	
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.06.11.	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	3.530.354.908,00	3.280.949.558,00	257.405.350,00	92,72	
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.06.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.530.354.908,00	3.280.949.558,00	257.405.350,00	92,72	
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.946.082.974,00	1.770.083.000,00	175.999.974,00	90,95	
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.750.082.974,00	1.672.403.000,00	77.679.974,00	95,56	
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.07.06.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.750.082.974,00	1.672.403.000,00	77.679.974,00	95,56	
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.07.08.	PENGADAAN ASET TAK BERWUJUD	196.000.000,00	97.680.000,00	98.320.000,00	49,83	
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.07.08.5.2.06.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	196.000.000,00	97.680.000,00	98.320.000,00	49,83	
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	882.620.487,00	785.505.473,00	97.115.014,00	88,99	
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	882.620.487,00	785.505.473,00	97.115.014,00	88,99	
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	882.620.487,00	785.505.473,00	97.115.014,00	88,99	
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.136.449.784,00	1.616.293.136,00	520.156.648,00	75,65	
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	419.278.836,00	271.074.806,00	148.204.030,00	64,65	
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	419.278.836,00	271.074.806,00	148.204.030,00	64,65	
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.227.576.448,00	860.054.132,00	367.522.316,00	70,06	
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.227.576.448,00	860.054.132,00	367.522.316,00	70,06	
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.09.11.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	489.594.500,00	485.164.200,00	4.430.300,00	99,09	
0.00.5.02.0.00.0.00.02.01.2.09.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	489.594.500,00	485.164.200,00	4.430.300,00	99,09	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	14.532.596.899,00	6.495.296.968,00	8.037.300.831,00	44,69	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.01.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	3.496.367.100,00	3.325.449.955,00	170.858.145,00	95,11	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.01.01.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	150.245.100,00	150.245.100,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	150.245.100,00	150.245.100,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	148.308.200,00	148.308.200,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	148.308.200,00	148.308.200,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.01.05.	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DPA-SKPD	250.793.400,00	221.353.750,00	29.439.650,00	88,26	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	250.793.400,00	221.353.750,00	29.439.650,00	88,26	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.01.06.	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN DPA-SKPD	198.561.900,00	198.426.050,00	135.850,00	99,93	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	198.561.900,00	198.426.050,00	135.850,00	99,93	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.01.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD	1.296.218.500,00	1.253.634.930,00	42.583.570,00	96,71	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.296.218.500,00	1.253.634.930,00	42.583.570,00	96,71	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.01.08.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	882.552.200,00	847.501.225,00	35.050.975,00	96,03	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.01.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	882.552.200,00	847.501.225,00	35.050.975,00	96,03	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.01.09.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN	469.627.800,00	405.979.700,00	63.648.100,00	86,44	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.01.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	469.627.800,00	405.979.700,00	63.648.100,00	86,44	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.02.	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	1.402.227.680,00	1.317.824.550,00	84.403.130,00	93,98	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.02.01.	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH	139.554.500,00	136.768.000,00	2.786.500,00	97,84	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	139.554.500,00	136.768.000,00	2.786.500,00	97,84	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.02.05.	KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA	92.689.750,00	92.689.750,00	-	100,00	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.00.0.00.0.00.02.02.2.02.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	92.685.750,00	92.685.750,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.00.0.00.0.00.02.02.2.02.09.	REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT	962.301.900,00	959.034.200,00	3.267.700,00	99,65	
5.02.5.02.0.00.0.00.0.00.02.02.2.02.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	962.301.900,00	959.034.200,00	3.267.700,00	99,65	
5.02.5.02.0.00.0.00.0.00.02.02.2.02.10.	PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI KEUANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUB KEGIATAN	118.933.400,00	118.470.500,00	462.900,00	99,61	
5.02.5.02.0.00.0.00.0.00.02.02.2.02.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	118.933.400,00	118.470.500,00	462.900,00	99,61	
5.02.5.02.0.00.0.00.0.00.02.02.2.02.11.	PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	98.702.130,00	20.896.100,00	77.806.030,00	21,17	
5.02.5.02.0.00.0.00.0.00.02.02.2.02.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	98.702.130,00	20.896.100,00	77.806.030,00	21,17	
5.02.5.02.0.00.0.00.0.00.02.02.2.03.	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	1.250.737.337,00	1.090.896.306,00	159.841.031,00	87,22	
5.02.5.02.0.00.0.00.0.00.02.02.2.03.03.	KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN	117.000.000,00	116.137.700,00	862.300,00	99,26	
5.02.5.02.0.00.0.00.0.00.02.02.2.03.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	117.000.000,00	116.137.700,00	862.300,00	99,26	
5.02.5.02.0.00.0.00.0.00.02.02.2.03.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA	738.430.400,00	728.265.650,00	10.164.750,00	97,54	
5.02.5.02.0.00.0.00.0.00.02.02.2.03.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	738.430.400,00	728.265.650,00	10.164.750,00	97,54	
5.02.5.02.0.00.0.00.0.00.02.02.2.03.09.	PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PANDUAN TEKNIS OPERASIONAL PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH	46.789.600,00	45.430.050,00	1.359.550,00	97,09	
5.02.5.02.0.00.0.00.0.00.02.02.2.03.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	46.789.600,00	45.430.050,00	1.359.550,00	97,09	
5.02.5.02.0.00.0.00.0.00.02.02.2.03.10.	PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	34.564.100,00	29.314.100,00	5.250.000,00	84,81	
5.02.5.02.0.00.0.00.0.00.02.02.2.03.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	34.564.100,00	29.314.100,00	5.250.000,00	84,81	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.03.11.	PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	313.953.237,00	179.748.806,00	134.204.431,00	57,25	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.03.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	313.953.237,00	179.748.806,00	134.204.431,00	57,25	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.04.	PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	8.383.334.782,00	761.126.257,00	7.622.208.525,00	9,07	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.04.09.	PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK	8.383.334.782,00	761.126.257,00	7.622.208.525,00	9,07	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.04.09.5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	8.383.334.782,00	761.126.257,00	7.622.208.525,00	9,07	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.03.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.084.676.325,00	2.201.615.850,00	883.060.475,00	71,83	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.03.2.01.	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.084.676.325,00	2.201.615.850,00	883.060.475,00	71,83	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.03.2.01.03.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH	477.186.700,00	468.913.300,00	8.273.400,00	98,26	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.03.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	477.186.700,00	468.913.300,00	8.273.400,00	98,26	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.03.2.01.06.	INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH	1.596.287.600,00	1.006.269.600,00	590.018.000,00	63,03	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.03.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.596.287.600,00	1.006.269.600,00	590.018.000,00	63,03	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.03.2.01.08.	PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH	308.428.750,00	178.369.100,00	130.059.650,00	57,83	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.03.2.01.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	308.428.750,00	178.369.100,00	130.059.650,00	57,83	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.03.2.01.09.	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	100.690.000,00	35.633.000,00	65.057.000,00	35,38	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.03.2.01.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.690.000,00	35.633.000,00	65.057.000,00	35,38	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.03.2.01.10.	OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH	103.304.000,00	99.734.200,00	3.569.800,00	96,54	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.03.2.01.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	103.304.000,00	99.734.200,00	3.569.800,00	96,54	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.03.2.01.11.	REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	178.692.600,00	122.877.750,00	55.814.850,00	68,24	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.03.2.01.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	178.692.600,00	122.877.750,00	55.814.850,00	68,24	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.03.2.01.12.	PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	192.000.000,00	190.742.400,00	1.257.600,00	99,34	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.03.2.01.12.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	192.000.000,00	190.742.400,00	1.257.600,00	99,34	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.00.0.00.0.00.02.03.2.01.13.	PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	107.886.675,00	99.876.500,00	8.010.175,00	92,57	
5.02.5.02.0.00.0.00.0.00.02.03.2.01.13.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	107.886.675,00	99.876.500,00	8.010.175,00	92,57	
	JUMLAH BELANJA	39.823.090.387,00	28.906.273.540,00	10.916.806.847,00	72,58	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	1.907.675.034.769,00	1.855.410.858.476,67	(74.097.789.886,33)	97,26	
5.02.5.02.0.00.0.00.0.00.02.00.00.6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	14.688.359.191,00	9.965.908.690,40	(4.722.350.500,60)	67,84	
5.02.5.02.0.00.0.00.0.00.02.00.00.6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.688.359.191,00	9.965.908.690,40	(4.722.350.500,60)	67,84	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	14.688.359.191,00	9.965.908.690,40	(4.722.350.500,60)	67,84	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(5.311.740.809,00)	(34.091.309,60)	5.277.649.499,40	0,64	
5.02.5.02.0.00.0.00.0.00.02.00.00.6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00	(10.000.000.000,00)	50,00	
5.02.5.02.0.00.0.00.0.00.02.00.00.6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00	(10.000.000.000,00)	50,00	
	JUMLAH PENGELUARAN DAERAH	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00	(10.000.000.000,00)	50,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	1.932.363.293.960,00	1.855.376.767.167,07	(68.820.140.486,93)	97,53	

Lampiran 1.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.03. - Badan Pendapatan Daerah

1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	846.721.740.651,00	790.408.904.835,00	(56.312.835.816,00)	93,34	
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	846.721.740.651,00	790.408.904.835,00	(56.312.835.816,00)	93,34	
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1.01.	Pajak Daerah	838.721.740.651,00	784.909.347.016,00	(53.812.393.635,00)	93,58	
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	8.000.000.000,00	5.499.557.819,00	(2.500.442.181,00)	68,74	
	JUMLAH PENDAPATAN	846.721.740.651,00	790.408.904.835,00	(56.312.835.816,00)	93,34	
5.02.0.05.02.0.00.0.00.03.00.00.5.	BELANJA DAERAH	86.207.909.811,00	80.664.343.941,00	5.543.642.870,00	93,56	
5.02.0.05.02.0.00.0.00.03.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	83.680.894.611,00	78.265.881.541,00	5.414.213.070,00	93,52	
5.02.0.05.02.0.00.0.00.03.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	2.527.894.380,00	2.398.466.480,00	129.428.806,00	94,87	
5.06.5.02.0.00.0.00.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	60.211.335.867,00	58.244.396.401,00	1.966.938.666,00	96,73	
5.06.5.02.0.00.0.00.03.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	14.368.000,00	12.700.000,00	1.668.000,00	88,01	
5.06.5.02.0.00.0.00.03.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4.692.000,00	4.675.000,00	17.000,00	99,63	
5.06.5.02.0.00.0.00.03.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.692.000,00	4.675.000,00	17.000,00	99,63	
5.06.5.02.0.00.0.00.03.01.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1.692.000,00	1.675.000,00	17.000,00	98,99	
5.06.5.02.0.00.0.00.03.01.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.692.000,00	1.675.000,00	17.000,00	98,99	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1.692.000,00	1.675.000,00	17.000,00	98,99	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.692.000,00	1.675.000,00	17.000,00	98,99	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.192.000,00	4.675.000,00	1.517.000,00	75,50	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.192.000,00	4.675.000,00	1.517.000,00	75,50	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	44.434.800.847,00	43.926.370.871,00	508.429.976,00	98,85	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	44.431.416.847,00	43.923.020.871,00	508.395.976,00	98,85	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	44.431.416.847,00	43.923.020.871,00	508.395.976,00	98,85	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.692.000,00	1.675.000,00	17.000,00	98,99	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.692.000,00	1.675.000,00	17.000,00	98,99	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	1.692.000,00	1.675.000,00	17.000,00	98,99	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.692.000,00	1.675.000,00	17.000,00	98,99	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	447.102.000,00	151.329.170,00	295.772.830,00	33,84	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	447.102.000,00	151.329.170,00	295.772.830,00	33,84	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	447.102.000,00	151.329.170,00	295.772.830,00	33,84	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	4.715.613.140,00	4.389.019.360,00	326.593.880,00	93,07	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	164.713.050,00	139.037.000,00	25.716.050,00	84,38	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	164.713.050,00	139.037.000,00	25.716.050,00	84,38	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	2.506.211.400,00	2.463.878.400,00	42.333.000,00	98,31	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.506.211.400,00	2.463.878.400,00	42.333.000,00	98,31	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.082.768.930,00	1.071.687.140,00	11.081.790,00	98,97	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.082.768.930,00	1.071.687.140,00	11.081.790,00	98,97	

SPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	27.000.000,00	21.600.000,00	5.400.000,00	80,00	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	21.600.000,00	5.400.000,00	80,00	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	944.919.760,00	692.846.720,00	252.073.040,00	73,32	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	944.919.760,00	692.846.720,00	252.073.040,00	73,32	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.211.294.200,00	2.082.308.486,00	128.985.808,00	94,16	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	932.657.300,00	931.652.100,00	1.005.200,00	99,89	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.07.05.5.2.12.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	932.657.300,00	931.652.100,00	1.005.200,00	99,89	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.278.636.900,00	1.150.656.300,00	127.980.600,00	89,99	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.07.06.5.2.12.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.278.636.900,00	1.150.656.300,00	127.980.600,00	89,99	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.647.900.880,00	2.347.082.690,00	300.818.190,00	85,63	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.08.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.269.864.530,00	1.028.450.752,00	241.413.748,00	80,98	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.269.864.530,00	1.028.450.752,00	241.413.748,00	80,98	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	525.652.790,00	520.257.500,00	5.395.290,00	98,97	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.08.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	525.652.790,00	520.257.500,00	5.395.290,00	98,97	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	841.883.680,00	707.874.438,00	134.009.242,00	84,08	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	841.883.680,00	707.874.438,00	134.009.242,00	84,08	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.730.346.000,00	5.415.586.010,00	314.759.990,00	94,50	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	357.144.000,00	313.284.000,00	43.860.000,00	87,71	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	357.144.000,00	313.284.000,00	43.860.000,00	87,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.058.652.000,00	905.377.000,00	153.275.000,00	85,52	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.058.652.000,00	905.377.000,00	153.275.000,00	85,52	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	1.430.000.000,00	1.368.579.500,00	61.420.500,00	95,70	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.09.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.430.000.000,00	1.368.579.500,00	61.420.500,00	95,70	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.09.11.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	2.604.559.000,00	2.528.345.510,00	56.204.490,00	96,05	
0.00.5.02.0.00.0.00.03.01.2.09.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.584.559.000,00	2.528.345.510,00	56.204.490,00	98,05	
5.02.5.02.0.00.0.00.03.34.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	25.996.653.744,00	22.419.949.540,00	3.576.704.204,00	86,24	
5.02.5.02.0.00.0.00.03.34.2.01.	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	25.996.653.744,00	22.419.949.540,00	3.576.704.204,00	86,24	
5.02.5.02.0.00.0.00.03.34.2.01.01.	PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	526.923.000,00	522.479.700,00	4.443.300,00	99,15	
5.02.5.02.0.00.0.00.03.34.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	526.923.000,00	522.479.700,00	4.443.300,00	99,15	
5.02.5.02.0.00.0.00.03.34.2.01.02.	ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	483.214.000,00	299.428.551,00	183.785.449,00	61,96	
5.02.5.02.0.00.0.00.03.34.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	483.214.000,00	299.428.551,00	183.785.449,00	61,96	
5.02.5.02.0.00.0.00.03.34.2.01.03.	PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	5.909.583.402,00	5.620.415.800,00	289.167.602,00	95,10	
5.02.5.02.0.00.0.00.03.34.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.909.583.402,00	5.620.415.800,00	289.167.602,00	95,10	
5.02.5.02.0.00.0.00.03.34.2.01.05.	PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH	3.433.521.268,00	2.835.911.604,00	597.609.664,00	82,59	
5.02.5.02.0.00.0.00.03.34.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.433.521.268,00	2.835.911.604,00	597.609.664,00	82,59	
5.02.5.02.0.00.0.00.03.34.2.01.06.	PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH	3.208.708.864,00	1.780.188.490,00	428.520.374,00	80,58	
5.02.5.02.0.00.0.00.03.34.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.892.108.864,00	1.464.032.490,00	428.076.374,00	77,37	
5.02.5.02.0.00.0.00.03.34.2.01.06.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.600.000,00	66.155.000,00	444.000,00	99,33	
5.02.5.02.0.00.0.00.03.34.2.01.06.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	250.000.000,00	250.000.000,00	-	100,00	

SKPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.00.0.00.03.04.2.01.07.	PEMBAJAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	1.388.411.714,00	1.136.925.582,00	251.486.132,00	81,88	
5.02.5.02.0.00.0.00.03.04.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.388.411.714,00	1.136.925.582,00	251.486.132,00	81,88	
5.02.5.02.0.00.0.00.03.04.2.01.08.	PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH	33.288.340,00	32.238.340,00	1.050.000,00	96,84	
5.02.5.02.0.00.0.00.03.04.2.01.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	33.288.340,00	32.238.340,00	1.050.000,00	96,84	
5.02.5.02.0.00.0.00.03.04.2.01.11.	PENAGIHAN PAJAK DAERAH	8.901.935.008,00	8.295.969.825,00	605.965.983,00	93,19	
5.02.5.02.0.00.0.00.03.04.2.01.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.901.935.008,00	8.295.969.825,00	605.965.983,00	93,19	
5.02.5.02.0.00.0.00.03.04.2.01.12.	PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH	431.504.760,00	336.922.410,00	94.582.350,00	78,08	
5.02.5.02.0.00.0.00.03.04.2.01.12.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	431.504.760,00	336.922.410,00	94.582.350,00	78,08	
5.02.5.02.0.00.0.00.03.04.2.01.13.	PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH	2.377.754.488,00	1.534.631.138,00	843.123.350,00	64,54	
5.02.5.02.0.00.0.00.03.04.2.01.13.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.377.754.488,00	1.534.631.138,00	843.123.350,00	64,54	
5.02.5.02.0.00.0.00.03.04.2.01.14.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	301.810.006,00	24.840.006,00	276.970.000,00	8,23	
5.02.5.02.0.00.0.00.03.04.2.01.14.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	301.810.006,00	24.840.006,00	276.970.000,00	8,23	
	JUMLAH BELANJA	86.207.988.811,00	80.664.345.941,00	5.543.642.870,00	93,56	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	760.513.751.840,00	709.744.558.894,00	(61.856.478.686,00)	93,32	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	760.513.751.840,00	709.744.558.894,00	(61.856.478.686,00)	93,32	

Lampiran 1.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : **5.03.5.04.0.00.02. - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5.03.5.05.03.5.04.0.00.02.06.06.5.	BELANJA DAERAH	16.329.491.664,00	14.414.214.495,00	1.915.277.169,00	88,27	
5.03.5.05.03.5.04.0.00.02.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	15.969.823.864,00	14.067.299.495,00	1.902.524.369,00	88,08	
5.03.5.05.03.5.04.0.00.02.06.06.5.2.	BELANJA MODAL	359.667.800,00	346.915.000,00	12.752.800,00	96,45	
5.03.5.03.5.04.0.00.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.695.579.327,00	10.891.232.951,00	804.346.376,00	93,12	
5.03.5.03.5.04.0.00.02.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	29.469.800,00	28.919.800,00	550.000,00	98,46	
5.03.5.03.5.04.0.00.02.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	15.985.800,00	15.985.800,00	-	100,00	
5.03.5.03.5.04.0.00.02.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.985.800,00	15.985.800,00	-	100,00	
5.03.5.03.5.04.0.00.02.01.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	8.615.100,00	8.165.100,00	450.000,00	94,77	
5.03.5.03.5.04.0.00.02.01.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.615.100,00	8.165.100,00	450.000,00	94,77	
5.03.5.03.5.04.0.00.02.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.868.900,00	4.868.900,00	-	100,00	
5.03.5.03.5.04.0.00.02.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.868.900,00	4.868.900,00	-	100,00	
5.03.5.03.5.04.0.00.02.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.925.389.560,00	7.505.223.344,00	420.162.217,00	94,69	
5.03.5.03.5.04.0.00.02.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.914.767.861,00	7.494.951.344,00	419.816.517,00	94,69	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.5.03.5.04.0.00.02.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	7.914.767.861,00	7.494.951.344,00	419.816.517,00	94,69	
0.00.5.03.5.04.0.00.02.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	5.480.698,00	5.304.000,00	176.698,00	96,77	
0.00.5.03.5.04.0.00.02.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.480.698,00	5.304.000,00	176.698,00	96,77	
0.00.5.03.5.04.0.00.02.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	5.137.198,00	4.968.000,00	169.198,00	96,70	
0.00.5.03.5.04.0.00.02.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.137.198,00	4.968.000,00	169.198,00	96,70	
0.00.5.03.5.04.0.00.02.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.440.255.736,00	2.201.217.415,00	239.038.311,00	90,20	
0.00.5.03.5.04.0.00.02.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	268.233.900,00	263.218.900,00	5.015.000,00	98,13	
0.00.5.03.5.04.0.00.02.01.2.06.04.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
0.00.5.03.5.04.0.00.02.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	266.233.900,00	261.218.900,00	5.015.000,00	98,11	
0.00.5.03.5.04.0.00.02.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.554.300.310,00	1.533.487.100,00	20.813.210,00	98,66	
0.00.5.03.5.04.0.00.02.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.554.300.310,00	1.533.487.100,00	20.813.210,00	98,66	
0.00.5.03.5.04.0.00.02.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	18.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	55,55	
0.00.5.03.5.04.0.00.02.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	55,55	
0.00.5.03.5.04.0.00.02.01.2.06.08.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	599.721.520,00	394.511.419,00	205.210.101,00	65,78	
0.00.5.03.5.04.0.00.02.01.2.06.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	599.721.520,00	394.511.419,00	205.210.101,00	65,78	
0.00.5.03.5.04.0.00.02.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	359.577.800,00	346.825.000,00	12.752.800,00	96,45	
0.00.5.03.5.04.0.00.02.01.2.07.05.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	111.577.800,00	102.425.000,00	9.152.800,00	91,79	
0.00.5.03.5.04.0.00.02.01.2.07.05.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	111.577.800,00	102.425.000,00	9.152.800,00	91,79	
0.00.5.03.5.04.0.00.02.01.2.07.08.	PENGADAAN ASET TAK BERWUJUD	248.000.000,00	244.400.000,00	3.600.000,00	98,54	
0.00.5.03.5.04.0.00.02.01.2.07.08.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	248.000.000,00	244.400.000,00	3.600.000,00	98,54	
0.00.5.03.5.04.0.00.02.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	530.884.000,00	501.984.988,00	28.859.012,00	94,56	

S.P.K.D

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.5.03.5.04.0.00.02.01.2.88.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	148.000.000,00	146.400.000,00	1.600.000,00	98,91	
0.00.5.03.5.04.0.00.02.01.2.88.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	148.000.000,00	146.400.000,00	1.600.000,00	98,91	
0.00.5.03.5.04.0.00.02.01.2.88.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	382.854.000,00	355.584.988,00	27.269.012,00	92,87	
0.00.5.03.5.04.0.00.02.01.2.88.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	382.854.000,00	355.584.988,00	27.269.012,00	92,87	
0.00.5.03.5.04.0.00.02.01.2.89.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	430.096.436,00	307.022.400,00	183.074.036,00	74,86	
0.00.5.03.5.04.0.00.02.01.2.89.01.	PEMYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	328.996.436,00	215.922.400,00	183.074.036,00	68,67	
0.00.5.03.5.04.0.00.02.01.2.89.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	328.996.436,00	215.922.400,00	183.074.036,00	68,67	
0.00.5.03.5.04.0.00.02.01.2.89.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	81.100.000,00	81.100.000,00	-	100,00	
0.00.5.03.5.04.0.00.02.01.2.89.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	81.100.000,00	81.100.000,00	-	100,00	
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.263.930.512,00	1.841.925.433,00	321.005.079,00	85,81	
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.01.	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	697.561.000,00	591.507.000,00	106.054.000,00	84,79	
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.01.02.	PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, JENIS DAN JUMLAH JABATAN UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN ASN	113.172.900,00	108.144.000,00	5.028.900,00	95,55	
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	113.172.900,00	108.144.000,00	5.028.900,00	95,55	
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.01.03.	KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK	285.324.400,00	214.809.000,00	70.515.400,00	75,28	
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	285.324.400,00	214.809.000,00	70.515.400,00	75,28	
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.01.08.	FASILITASI LEMBAGA PROFESI ASN	212.699.800,00	186.400.000,00	26.299.800,00	87,63	
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.01.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	212.699.800,00	186.400.000,00	26.299.800,00	87,63	
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.01.10.	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	86.363.900,00	82.154.000,00	4.209.900,00	95,12	
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.01.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	86.363.900,00	82.154.000,00	4.209.900,00	95,12	
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.02.	MUTASI DAN PROMOSI ASN	909.433.860,00	800.852.981,00	108.580.879,00	88,06	
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.02.01.	PENGELOLAAN MUTASI ASN	120.796.100,00	119.825.000,00	969.100,00	99,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	120.794.100,00	119.825.000,00	969.100,00	99,19	
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.02.02.	PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN	14.446.200,00	14.433.000,00	13.200,00	99,94	
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.446.200,00	14.433.000,00	13.200,00	99,94	
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.02.03.	PENGELOLAAN PROMOSI ASN	764.193.560,00	656.594.981,00	107.598.579,00	85,91	
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	764.193.560,00	656.594.981,00	107.598.579,00	85,91	
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.03.	PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	239.375.500,00	216.295.300,00	23.080.200,00	90,35	
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.03.01.	PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA ASN	127.523.800,00	115.616.800,00	11.907.000,00	90,66	
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	127.523.800,00	115.616.800,00	11.907.000,00	90,66	
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.03.02.	PENGELOLAAN ASSESSMENT CENTER	111.851.700,00	100.678.500,00	11.173.200,00	90,01	
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	111.851.700,00	100.678.500,00	11.173.200,00	90,01	
5.03.5.03.5.04.0.00.03.02.2.04.	PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	416.560.152,00	333.270.152,00	83.290.000,00	80,00	
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.04.06.	EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN TANDA JASA APARATUR	29.896.600,00	23.896.600,00	6.000.000,00	79,93	
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.04.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.896.600,00	23.896.600,00	6.000.000,00	79,93	
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.04.07.	PEMBINAAN DISIPLIN ASN	349.814.400,00	295.524.400,00	54.290.000,00	84,48	
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.04.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	349.814.400,00	295.524.400,00	54.290.000,00	84,48	
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.04.08.	PENGELOLAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN	32.393.352,00	9.393.352,00	23.000.000,00	28,99	
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.04.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.393.352,00	9.393.352,00	23.000.000,00	28,99	
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.04.09.	PELAYANAN PROSES IZIN PERCERAIAN PEGAWAI	4.455.800,00	4.455.800,00	-	100,00	
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.04.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.455.800,00	4.455.800,00	-	100,00	
5.04.5.03.5.04.0.00.02.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.370.891.825,00	1.580.966.111,00	789.925.714,00	66,68	
5.04.5.03.5.04.0.00.02.02.2.01.	PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS	721.367.806,00	523.727.762,00	198.590.044,00	72,58	

SIPAD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5.04.5.03.5.04.0.00.02.02.2.01.03.	PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	722.307.800,00	523.727.702,00	198.580.098,00	72,50	
5.04.5.03.5.04.0.00.02.02.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	722.307.800,00	523.727.702,00	198.580.098,00	72,50	
5.04.5.03.5.04.0.00.02.02.2.02.	SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	1.848.384.625,00	1.857.238.409,00	591.345.616,00	64,13	
5.04.5.03.5.04.0.00.02.02.2.02.03.	PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	399.817.100,00	172.384.000,00	227.433.200,00	43,11	
5.04.5.03.5.04.0.00.02.02.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	399.817.100,00	172.384.000,00	227.433.200,00	43,11	
5.04.5.03.5.04.0.00.02.02.2.02.07.	PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN	1.248.766.625,00	884.854.409,00	363.912.416,00	70,85	
5.04.5.03.5.04.0.00.02.02.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.248.766.625,00	884.854.409,00	363.912.416,00	70,85	
	JUMLAH BELANJA	16.329.401.664,00	14.414.124.495,00	1.915.277.169,00	88,27	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(16.329.401.664,00)	(14.414.124.495,00)	(1.915.277.169,00)	88,27	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(16.329.401.664,00)	(14.414.124.495,00)	(1.915.277.169,00)	88,27	

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : 5.05.0.00.0.00.02. - Badan Penelitian dan Pengembangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5.05.0.05.05.0.00.3.00.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	7.463.826.720,00	7.087.625.263,00	376.201.457,00	94,95	
5.05.0.05.05.0.00.3.00.02.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	7.456.326.720,00	7.080.025.263,00	376.301.457,00	94,95	
5.05.0.05.05.0.00.3.00.02.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.614.298.088,00	6.296.639.233,00	317.658.855,00	95,19	
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	14.500.000,00	13.895.100,00	604.900,00	95,82	
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5.000.000,00	4.729.500,00	270.500,00	94,59	
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.729.500,00	270.500,00	94,59	
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	4.500.000,00	4.261.000,00	239.000,00	94,68	
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.261.000,00	239.000,00	94,68	
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.000.000,00	4.904.600,00	95.400,00	98,09	
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.904.600,00	95.400,00	98,09	
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.690.724.022,00	4.454.284.031,00	236.439.991,00	94,17	
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.690.224.022,00	4.453.919.031,00	236.304.991,00	95,16	

SIPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.5.05.0.00.0.00.02.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.680.224.022,00	4.453.839.031,00	226.384.991,00	95,16	
0.00.5.05.0.00.0.00.02.01.2.02.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	5.500.000,00	5.463.500,00	36.500,00	99,33	
0.00.5.05.0.00.0.00.02.01.2.02.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.463.500,00	36.500,00	99,33	
0.00.5.05.0.00.0.00.02.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	5.000.000,00	4.501.500,00	98.500,00	98,03	
0.00.5.05.0.00.0.00.02.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.501.500,00	98.500,00	98,03	
0.00.5.05.0.00.0.00.02.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	32.768.000,00	24.650.880,00	8.117.120,00	75,22	
0.00.5.05.0.00.0.00.02.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	32.768.000,00	24.650.880,00	8.117.120,00	75,22	
0.00.5.05.0.00.0.00.02.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.768.000,00	24.650.880,00	8.117.120,00	75,22	
0.00.5.05.0.00.0.00.02.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.344.245.379,00	1.319.572.813,00	24.672.566,00	98,16	
0.00.5.05.0.00.0.00.02.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	14.999.300,00	14.807.000,00	192.300,00	98,71	
0.00.5.05.0.00.0.00.02.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.999.300,00	14.807.000,00	192.300,00	98,71	
0.00.5.05.0.00.0.00.02.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	378.694.800,00	376.194.300,00	2.500.500,00	99,34	
0.00.5.05.0.00.0.00.02.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	378.694.800,00	376.194.300,00	2.500.500,00	99,34	
0.00.5.05.0.00.0.00.02.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	339.856.638,00	331.379.750,00	8.476.888,00	97,50	
0.00.5.05.0.00.0.00.02.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	339.856.638,00	331.379.750,00	8.476.888,00	97,50	
0.00.5.05.0.00.0.00.02.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12.384.000,00	12.000.000,00	384.000,00	96,89	
0.00.5.05.0.00.0.00.02.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.384.000,00	12.000.000,00	384.000,00	96,89	
0.00.5.05.0.00.0.00.02.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	538.310.640,00	525.281.762,00	13.028.878,00	97,57	
0.00.5.05.0.00.0.00.02.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	538.310.640,00	525.281.762,00	13.028.878,00	97,57	
0.00.5.05.0.00.0.00.02.01.2.06.11.	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
0.00.5.05.0.00.0.00.02.01.2.06.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.5.05.0.00.0.00.02.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
0.00.5.05.0.00.0.00.02.01.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
0.00.5.05.0.00.0.00.02.01.2.07.06.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
0.00.5.05.0.00.0.00.02.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	310.599.886,00	300.030.240,00	10.576.646,00	96,59	
0.00.5.05.0.00.0.00.02.01.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	21.735.000,00	21.600.000,00	135.000,00	99,37	
0.00.5.05.0.00.0.00.02.01.2.08.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.735.000,00	21.600.000,00	135.000,00	99,37	
0.00.5.05.0.00.0.00.02.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	288.661.886,00	278.420.240,00	10.441.646,00	96,38	
0.00.5.05.0.00.0.00.02.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	288.661.886,00	278.420.240,00	10.441.646,00	96,38	
0.00.5.05.0.00.0.00.02.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	213.963.800,00	166.716.170,00	47.247.630,00	77,91	
0.00.5.05.0.00.0.00.02.01.2.09.01.	PEMELIHARAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	205.451.300,00	158.316.170,00	47.135.130,00	77,05	
0.00.5.05.0.00.0.00.02.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	205.451.300,00	158.316.170,00	47.135.130,00	77,05	
0.00.5.05.0.00.0.00.02.01.2.09.11.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	8.512.500,00	8.400.000,00	112.500,00	98,67	
0.00.5.05.0.00.0.00.02.01.2.09.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.512.500,00	8.400.000,00	112.500,00	98,67	
5.05.5.05.0.00.0.00.02.02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	849.528.632,00	790.886.630,00	58.642.602,00	93,09	
5.05.5.05.0.00.0.00.02.02.2.01.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	62.343.348,00	61.669.500,00	673.848,00	98,91	
5.05.5.05.0.00.0.00.02.02.2.01.12.	PENGELOLAAN DATA KELEMBAGAAN DAN PERATURAN	62.343.348,00	61.669.500,00	673.848,00	98,91	
5.05.5.05.0.00.0.00.02.02.2.01.12.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	62.343.348,00	61.669.500,00	673.848,00	98,91	
5.05.5.05.0.00.0.00.02.02.2.02.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN	194.267.298,00	189.475.288,00	4.792.010,00	97,53	
5.05.5.05.0.00.0.00.02.02.2.02.09.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA	147.559.654,00	142.767.644,00	4.792.010,00	96,75	
5.05.5.05.0.00.0.00.02.02.2.02.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	147.559.654,00	142.767.644,00	4.792.010,00	96,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5.05.5.05.0.00.0.00.02.82.2.82.10.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	46.707.644,00	46.707.644,00	-	100,00	
5.05.5.05.0.00.0.00.02.82.2.82.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	46.707.644,00	46.707.644,00	-	100,00	
5.05.5.05.0.00.0.00.02.82.2.83.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	175.906.796,00	172.174.276,00	3.732.520,00	97,87	
5.05.5.05.0.00.0.00.02.82.2.83.02.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	105.641.406,00	105.249.396,00	392.010,00	99,62	
5.05.5.05.0.00.0.00.02.82.2.83.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	105.641.406,00	105.249.396,00	392.010,00	99,62	
5.05.5.05.0.00.0.00.02.82.2.83.04.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PANGAN	70.265.390,00	66.925.380,00	3.340.010,00	95,24	
5.05.5.05.0.00.0.00.02.82.2.83.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	70.265.390,00	66.925.380,00	3.340.010,00	95,24	
5.05.5.05.0.00.0.00.02.82.2.84.	PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	417.011.195,00	367.366.466,00	49.644.732,00	88,10	
5.05.5.05.0.00.0.00.02.82.2.84.01.	PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEREKAYASAAN DI BIDANG TEKNOLOGI DAN INOVASI	82.454.135,00	79.044.650,00	3.609.486,00	95,83	
5.05.5.05.0.00.0.00.02.82.2.84.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	82.454.135,00	79.044.650,00	3.609.486,00	95,83	
5.05.5.05.0.00.0.00.02.82.2.84.02.	UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	120.550.185,00	107.885.066,00	12.665.119,00	89,49	
5.05.5.05.0.00.0.00.02.82.2.84.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	120.550.185,00	107.885.066,00	12.665.119,00	89,49	
5.05.5.05.0.00.0.00.02.82.2.84.03.	DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF	76.516.384,00	74.069.350,00	2.447.034,00	96,80	
5.05.5.05.0.00.0.00.02.82.2.84.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	76.516.384,00	74.069.350,00	2.447.034,00	96,80	
5.05.5.05.0.00.0.00.02.82.2.84.04.	SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN	123.354.496,00	92.444.400,00	30.910.096,00	74,94	
5.05.5.05.0.00.0.00.02.82.2.84.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	123.354.496,00	92.444.400,00	30.910.096,00	74,94	
5.05.5.05.0.00.0.00.02.82.2.84.05.	FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	14.135.997,00	13.323.000,00	812.997,00	94,24	
5.05.5.05.0.00.0.00.02.82.2.84.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.135.997,00	13.323.000,00	812.997,00	94,24	
	JUMLAH BELANJA	7.463.826.720,00	7.087.525.263,00	376.301.457,00	94,95	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(7.463.826.720,00)	(7.087.525.263,00)	(376.301.457,00)	94,95	

[redacted]

	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.463.826.729,00)	(7.687.525.263,00)	(376.301.457,00)	94,95	

Lampiran 1.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

NOMOR : 3 TAHUN 2024

TANGGAL : 23 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : 6.01.0.00.0.00.01. - Inspektorat

1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
6.01.0.00.0.00.0.00.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	17.976.380.058,00	16.177.468.661,00	2.798.919.599,00	84,43	
6.01.0.00.0.00.0.00.01.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	17.819.832.668,00	15.183.098.661,00	2.716.723.999,00	84,79	
6.01.0.00.0.00.0.00.01.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	156.565.400,00	74.370.000,00	82.195.400,00	47,50	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.443.613.691,00	13.475.110.713,00	1.968.502.979,00	87,25	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	17.000.000,00	-	17.000.000,00	-	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	13.063.346.400,00	12.368.904.931,00	694.441.469,00	94,68	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	13.055.346.400,00	12.368.904.931,00	686.441.469,00	94,74	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	13.055.346.400,00	12.368.904.931,00	686.441.469,00	94,74	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.02.06.	PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.02.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	14.000.000,00	-	14.000.000,00	-	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.03.01.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.03.02.	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.03.03.	KOORDINASI DAN PEMILAAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.03.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.03.04.	PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.03.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.03.05.	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.03.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.03.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.03.07.	PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.03.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	669.765.098,00	177.055.383,00	492.709.698,00	26,43	
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.05.02.	PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.05.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.05.09.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	464.791.000,00	142.316.426,00	322.474.574,00	30,61	
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.05.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	464.791.000,00	142.316.426,00	322.474.574,00	30,61	
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	199.974.000,00	34.738.966,00	165.235.034,00	17,37	
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	199.974.000,00	34.738.966,00	165.235.034,00	17,37	
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	943.616.404,00	502.473.675,00	441.137.429,00	53,25	
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	40,00	
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	40,00	
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	312.969.324,00	245.604.500,00	67.364.824,00	78,47	
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	312.969.324,00	245.604.500,00	67.364.824,00	78,47	
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	48.806.360,00	30.171.000,00	18.629.360,00	61,83	
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	48.806.360,00	30.171.000,00	18.629.360,00	61,90	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.0.01.0.00.0.00.0.00.01.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
0.00.0.01.0.00.0.00.0.00.01.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
0.00.0.01.0.00.0.00.0.00.01.01.2.06.08.	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	15.000.000,00	4.515.000,00	10.485.000,00	30,10	
0.00.0.01.0.00.0.00.0.00.01.01.2.06.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	4.515.000,00	10.485.000,00	30,10	
0.00.0.01.0.00.0.00.0.00.01.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	531.741.280,00	218.082.475,00	313.658.805,00	41,01	
0.00.0.01.0.00.0.00.0.00.01.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	531.741.280,00	218.082.475,00	313.658.805,00	41,01	
0.00.0.01.0.00.0.00.0.00.01.01.2.06.10.	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	0.999.500,00	-	0.999.500,00	-	
0.00.0.01.0.00.0.00.0.00.01.01.2.06.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0.999.500,00	-	0.999.500,00	-	
0.00.0.01.0.00.0.00.0.00.01.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	158.565.400,00	76.370.000,00	82.195.400,00	48,16	
0.00.0.01.0.00.0.00.0.00.01.01.2.07.08.	PENGADAAN ASET TAK BERWUJUD	75.000.000,00	74.370.000,00	630.000,00	99,16	
0.00.0.01.0.00.0.00.0.00.01.01.2.07.08.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	75.000.000,00	74.370.000,00	630.000,00	99,16	
0.00.0.01.0.00.0.00.0.00.01.01.2.07.10.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	83.565.400,00	2.000.000,00	81.565.400,00	2,39	
0.00.0.01.0.00.0.00.0.00.01.01.2.07.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
0.00.0.01.0.00.0.00.0.00.01.01.2.07.10.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.565.400,00	-	81.565.400,00	-	
0.00.0.01.0.30.0.00.0.00.01.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	190.055.488,00	58.359.336,00	143.696.152,00	29,31	
0.00.0.01.0.30.0.30.0.30.01.01.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
0.00.0.01.0.30.0.30.0.30.01.01.2.08.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
0.00.0.01.0.00.0.00.0.00.01.01.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	35.000.000,00	20.095.000,00	14.905.000,00	57,41	
0.00.0.01.0.00.0.00.0.00.01.01.2.08.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	20.095.000,00	14.905.000,00	57,41	
0.00.0.01.0.00.0.00.0.00.01.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	155.055.488,00	38.264.336,00	120.791.152,00	24,65	
0.00.0.01.0.00.0.00.0.00.01.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	155.055.488,00	38.264.336,00	120.791.152,00	24,65	
0.00.0.01.0.00.0.00.0.00.01.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	378.271.000,00	291.948.079,00	86.322.921,00	77,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
6.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	378.271.000,00	291.948.079,00	86.322.921,00	77,17	
6.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	378.271.000,00	291.948.079,00	86.322.921,00	77,17	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.764.476.212,00	1.213.645.948,00	551.630.264,00	68,73	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	1.208.040.140,00	789.095.948,00	418.944.192,00	65,32	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.01.	PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	299.999.648,00	219.325.500,00	80.674.148,00	73,10	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	299.999.648,00	219.325.500,00	80.674.148,00	73,10	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.02.	PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	299.272.000,00	203.930.000,00	95.342.000,00	68,14	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	299.272.000,00	203.930.000,00	95.342.000,00	68,14	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.03.	REVIU LAPORAN KINERJA	189.213.000,00	117.875.000,00	81.338.000,00	61,12	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	189.213.000,00	117.875.000,00	81.338.000,00	61,12	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.04.	REVIU LAPORAN KEUANGAN	99.616.800,00	67.150.000,00	32.466.800,00	67,40	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	99.616.800,00	67.150.000,00	32.466.800,00	67,40	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.07.	MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP	299.938.700,00	170.815.448,00	129.123.252,00	56,95	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	299.938.700,00	170.815.448,00	129.123.252,00	56,95	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.02.	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	506.436.072,00	423.750.000,00	132.686.072,00	76,15	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.02.01.	PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH	395.786.072,00	323.900.000,00	76.886.072,00	80,76	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	395.786.072,00	323.900.000,00	76.886.072,00	80,76	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.02.02.	PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	156.650.000,00	100.850.000,00	55.800.000,00	64,37	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	156.650.000,00	100.850.000,00	55.800.000,00	64,37	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	708.398.156,00	499.512.800,00	278.786.156,00	63,71	

SEPLO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.2.01.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	49.999.456,00	-	49.999.456,00	-	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.2.01.01.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.2.01.02.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG FASILITASI PENGAWASAN	24.999.456,00	-	24.999.456,00	-	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.999.456,00	-	24.999.456,00	-	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.2.02.	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	718.298.700,00	489.512.000,00	228.786.700,00	68,16	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.2.02.01.	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	174.797.000,00	76.075.000,00	98.722.000,00	43,52	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	174.797.000,00	76.075.000,00	98.722.000,00	43,52	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.2.02.02.	PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI	55.854.800,00	14.700.000,00	41.154.800,00	26,31	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	55.854.800,00	14.700.000,00	41.154.800,00	26,31	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.2.02.03.	KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	319.979.900,00	279.930.000,00	40.079.900,00	87,47	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	319.979.900,00	279.930.000,00	40.079.900,00	87,47	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.2.02.04.	PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS	167.667.000,00	118.837.000,00	48.830.000,00	70,87	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.2.02.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	167.667.000,00	118.837.000,00	48.830.000,00	70,87	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(17.976.388.060,00)	(15.177.468.661,00)	(2.798.919.399,00)	84,43	
	JUMLAH BELANJA	17.976.388.060,00	15.177.468.661,00	2.798.919.399,00	84,43	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(17.976.388.060,00)	(15.177.468.661,00)	(2.798.919.399,00)	84,43	

SIPKD

Lampiran 1.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 30 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.01. - Kecamatan Bukitraya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.07.01.0.00.0.00.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	14.623.798.969,00	14.178.393.633,00	445.405.336,00	96,95	
7.01.0.07.01.0.00.0.00.01.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	14.108.103.144,00	13.668.110.633,00	439.986.491,00	96,88	
7.01.0.07.01.1.00.0.00.01.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	1.124.931.731,00	2.067.003.206,00	57.208.505,00	97,38	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.266.282.350,00	9.892.395.975,00	373.886.375,00	96,35	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	13.887.004,00	13.887.004,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5.905.164,00	5.905.164,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.905.164,00	5.905.164,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	8.081.840,00	8.081.840,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.081.840,00	8.081.840,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.856.852.276,00	6.547.044.788,00	309.807.488,00	95,48	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.853.237.476,00	6.544.229.988,00	309.007.488,00	95,48	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	6.853.237.476,00	6.544.229.988,00	309.007.488,00	95,48	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	3.614.800,00	3.614.800,00	-	100,00	

SIPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.614.800,00	3.614.800,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	7.066.000,00	2.771.700,00	4.294.300,00	39,22	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.066.000,00	2.771.700,00	4.294.300,00	39,22	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.066.000,00	2.771.700,00	4.294.300,00	39,23	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	642.967.150,00	622.410.700,00	20.556.550,00	96,80	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	24.106.200,00	24.106.200,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.106.200,00	24.106.200,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	449.828.800,00	449.828.800,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	449.828.800,00	449.828.800,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	53.882.100,00	53.881.762,00	338,00	99,99	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	53.882.100,00	53.881.762,00	338,00	99,99	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	95.756.000,00	75.199.788,00	20.556.212,00	78,53	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	95.756.000,00	75.199.788,00	20.556.212,00	78,53	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.10.	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	6.794.050,00	6.794.050,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.794.050,00	6.794.050,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	114.510.200,00	114.210.000,00	300.200,00	99,73	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	114.510.200,00	114.210.000,00	300.200,00	99,73	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.07.05.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.07.05.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.510.200,00	112.210.000,00	300.200,00	99,73	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.323.254.345,00	1.298.517.703,00	24.736.642,00	98,13	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	751.048.120,00	741.886.478,00	9.161.642,00	98,78	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	751.048.120,00	741.886.478,00	9.161.642,00	98,78	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	175.250.053,00	175.250.053,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	175.250.053,00	175.250.053,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	396.956.172,00	381.381.172,00	15.575.000,00	96,07	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	396.956.172,00	381.381.172,00	15.575.000,00	96,07	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.307.645.375,00	1.292.654.080,00	14.991.195,00	98,85	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	102.655.400,00	101.535.800,00	1.119.600,00	98,90	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	102.655.400,00	101.535.800,00	1.119.600,00	98,90	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09.05.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	26.724.200,00	26.724.200,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	26.724.200,00	26.724.200,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09.11.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1.178.265.675,00	1.164.394.080,00	13.871.595,00	98,82	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	775.080.850,00	766.327.100,00	8.752.950,00	98,87	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09.11.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	403.184.825,00	398.066.980,00	5.118.645,00	98,73	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.637.560.785,00	2.628.671.484,00	8.889.101,00	99,66	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	41.730.385,00	41.730.385,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.01.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	41.730.385,00	41.730.385,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	41.730.385,00	41.730.385,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.03.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	2.595.830.400,00	2.586.941.299,00	8.889.101,00	99,65	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.03.01.	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN	2.595.830.400,00	2.586.941.299,00	8.889.101,00	99,65	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.595.830.409,00	2.586.941.299,00	8.889.101,00	99,65	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	110.839.946,00	99.999.746,00	10.840.200,00	90,21	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.04.2.01.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	110.839.946,00	99.999.746,00	10.840.200,00	90,21	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.04.2.01.01.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	110.839.946,00	99.999.746,00	10.840.200,00	90,21	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	110.839.946,00	99.999.746,00	10.840.200,00	90,21	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.609.115.885,00	1.557.326.226,00	51.789.660,00	96,78	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.05.2.01.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	1.609.115.885,00	1.557.326.226,00	51.789.660,00	96,78	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.05.2.01.03.	PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	115.114.246,00	90.538.026,00	24.576.220,00	78,65	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.05.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	115.114.246,00	90.538.026,00	24.576.220,00	78,65	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.05.2.01.07.	PELAKSANAAN SEMUA URUSAN PEMERINTAHAN YANG BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH DAN TIDAK DILAKSANAKAN OLEH INSTANSI VERTIKAL	1.393.328.225,00	1.393.128.225,00	200.000,00	99,98	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.05.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.393.328.225,00	1.393.128.225,00	200.000,00	99,98	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.05.2.01.08.	PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	200.673.415,00	173.659.975,00	27.013.440,00	86,53	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.05.2.01.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	200.673.415,00	173.659.975,00	27.013.440,00	86,53	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(14.623.798.969,00)	(14.178.393.633,00)	(445.405.336,00)	96,95	
	JUMLAH BELANJA	14.623.798.969,00	14.178.393.633,00	445.405.336,00	96,95	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(14.623.798.969,00)	(14.178.393.633,00)	(445.405.336,00)	96,95	

SIPKD

Lampiran L.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 2 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.02. - Kecamatan Tenayan Raya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.07.01.0.00.0.00.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	16.233.405.505,00	15.678.749.765,00	554.655.741,00	96,58	
7.01.0.07.01.0.00.0.00.02.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	16.233.405.505,00	15.678.749.765,00	554.655.741,00	96,58	
7.01.0.07.01.0.00.0.00.02.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	2.085.941.745,00	2.044.962.726,00	40.979.019,00	98,03	
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.885.183.021,00	10.387.496.799,00	497.686.222,00	95,43	
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.156.467.098,00	7.774.921.694,00	381.485.404,00	95,32	
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	8.156.467.098,00	7.774.921.694,00	381.485.404,00	95,32	
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	8.156.467.098,00	7.774.921.694,00	381.485.404,00	95,32	
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.158.138.205,00	1.126.142.100,00	31.996.105,00	97,23	
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	33.147.800,00	33.146.400,00	1.400,00	99,99	
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	33.147.800,00	33.146.400,00	1.400,00	99,99	
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	999.820.300,00	999.755.900,00	64.400,00	99,99	
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	999.820.300,00	999.755.900,00	64.400,00	99,99	
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	79.854.205,00	78.831.000,00	1.023.205,00	98,71	
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	79.854.205,00	78.831.000,00	1.023.205,00	98,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.01.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15.480.000,00	9.270.000,00	6.210.000,00	59,88	
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.480.000,00	9.270.000,00	6.210.000,00	59,88	
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.06.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	29.836.000,00	5.138.900,00	24.697.100,00	17,22	
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.836.000,00	5.138.900,00	24.697.100,00	17,22	
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	943.963.903,00	868.315.030,00	75.648.872,00	91,98	
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	189.454.816,00	147.519.840,00	41.934.976,00	77,86	
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	189.454.816,00	147.519.840,00	41.934.976,00	77,86	
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	199.979.594,00	199.915.900,00	63.694,00	99,96	
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	199.979.594,00	199.915.900,00	63.694,00	99,96	
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	554.529.492,00	520.879.290,00	33.650.202,00	93,93	
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	554.529.492,00	520.879.290,00	33.650.202,00	93,93	
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	626.592.016,00	618.117.975,00	8.474.041,00	98,64	
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	82.432.890,01	76.763.975,00	5.668.825,00	93,12	
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	82.432.890,00	76.763.975,00	5.668.825,00	93,12	
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.09.11.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	544.160.016,00	541.354.000,00	2.806.016,00	99,48	
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.09.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	544.160.016,00	541.354.000,00	2.806.016,00	99,48	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.147.048.100,00	3.146.463.600,00	585.500,00	99,98	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	54.708.100,00	54.707.000,00	1.100,00	99,99	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.02.01.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	54.708.100,00	54.707.000,00	1.100,00	99,99	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	54.708.100,00	54.707.000,00	1.100,00	99,99	

LPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.02.05.2.03.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	3.092.340.000,00	3.091.755.600,00	584.400,00	99,98	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.05.2.03.02.	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN	3.092.340.000,00	3.091.755.600,00	584.400,00	99,98	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.05.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.092.340.000,00	3.091.755.600,00	584.400,00	99,98	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	115.313.640,00	99.827.640,00	15.486.000,00	86,57	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.04.2.01.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	115.313.640,00	99.827.640,00	15.486.000,00	86,57	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.04.2.01.01.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	115.313.640,00	99.827.640,00	15.486.000,00	86,57	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	115.313.640,00	99.827.640,00	15.486.000,00	86,57	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.085.941.745,00	2.044.962.726,00	40.979.019,00	98,03	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.05.2.01.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	2.085.941.745,00	2.044.962.726,00	40.979.019,00	98,03	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.05.2.01.03.	PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	127.824.716,00	119.319.816,00	8.504.900,00	93,34	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.05.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	127.824.716,00	119.319.816,00	8.504.900,00	93,34	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.05.2.01.07.	PELAKSANAAN SEMUA URUSAN PEMERINTAHAN YANG BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH DAN TIDAK DILAKSANAKAN OLEH INSTANSI VERTIKAL	1.726.517.029,00	1.697.043.910,00	29.474.119,00	98,29	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.05.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.726.517.029,00	1.697.043.910,00	29.474.119,00	98,29	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.05.2.01.88.	PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	231.600.000,00	228.600.000,00	3.000.000,00	98,70	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.05.2.01.88.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	231.600.000,00	228.600.000,00	3.000.000,00	98,70	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(16.233.405.506,00)	(15.678.749.765,00)	(554.655.741,00)	96,58	
	JUMLAH BELANJA	16.233.405.506,00	15.678.749.765,00	554.655.741,00	96,58	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(16.233.405.506,00)	(15.678.749.765,00)	(554.655.741,00)	96,58	

SIPKD

Lampiran 1.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : **7.01.0.00.0.00.03. - Kecamatan Sail**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.07.01.0.00.0.00.03.00.00.5.	BELANJA DAERAH	8.096.923.906,00	7.625.220.753,00	471.703.233,00	94,17	
7.01.0.07.01.0.00.0.00.03.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	6.628.504.906,00	7.557.055.253,00	471.449.733,00	94,12	
7.01.0.07.01.0.00.0.00.03.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	961.578.906,00	948.124.997,00	13.453.912,00	98,70	
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.160.291.789,00	5.748.969.436,00	411.322.353,00	93,32	
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.044.400,00	7.044.400,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	1.586.700,00	1.586.700,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.586.700,00	1.586.700,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	5.457.700,00	5.457.700,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.457.700,00	5.457.700,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.654.431.788,00	4.437.604.769,00	216.827.019,00	95,34	
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.650.094.288,00	4.433.267.269,00	216.827.019,00	95,33	
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.650.094.288,00	4.433.267.269,00	216.827.019,00	95,33	
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	4.337.500,00	4.337.500,00	-	100,00	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.337.500,00	4.337.500,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	7.590.000,00	3.679.070,00	3.910.930,00	48,47	
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.590.000,00	3.679.070,00	3.910.930,00	48,47	
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.590.000,00	3.679.070,00	3.910.930,00	48,47	
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	560.508.926,00	539.840.418,00	20.668.508,00	96,31	
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	27.486.000,00	27.485.400,00	600,00	99,99	
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.486.000,00	27.485.400,00	600,00	99,99	
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	448.864.600,00	437.342.200,00	11.522.400,00	97,43	
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	448.864.600,00	437.342.200,00	11.522.400,00	97,43	
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	32.990.334,00	24.123.096,00	8.867.238,00	73,12	
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.990.334,00	24.123.096,00	8.867.238,00	73,12	
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	51.348.000,00	50.969.722,00	378.278,00	99,45	
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	51.348.000,00	50.969.722,00	378.278,00	99,45	
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	70.019.000,00	69.765.500,00	253.500,00	99,63	
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	49.037.400,00	48.895.500,00	141.900,00	99,71	
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.07.05.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.037.400,00	48.895.500,00	141.900,00	99,71	
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	30.981.600,00	30.870.000,00	111.600,00	99,64	
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.07.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.07.06.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.981.600,00	28.870.000,00	111.600,00	99,61	
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	580.779.677,00	431.242.051,00	149.537.626,00	74,25	
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	260.794.000,00	126.340.873,00	134.453.127,00	48,44	
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	260.794.000,00	126.340.873,00	134.453.127,00	48,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	319.985.677,00	304.901.178,00	15.084.499,00	95,28	
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	319.985.677,00	304.901.178,00	15.084.499,00	95,28	
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	279.969.000,00	258.893.222,00	21.824.778,00	92,48	
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	89.262.000,00	69.042.222,00	20.219.778,00	77,34	
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	89.262.000,00	69.042.222,00	20.219.778,00	77,34	
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09.05.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	10.656.000,00	10.656.000,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.656.000,00	10.656.000,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09.08.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	180.000.000,00	179.195.000,00	805.000,00	99,55	
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	179.195.000,00	805.000,00	99,55	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	935.661.253,00	899.664.236,00	35.997.017,00	96,15	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	22.538.040,00	22.538.040,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.02.01.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	22.538.040,00	22.538.040,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.538.040,00	22.538.040,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.03.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	913.123.213,00	877.126.196,00	35.997.017,00	96,05	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.03.02.	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN	913.123.213,00	877.126.196,00	35.997.017,00	96,05	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	913.123.213,00	877.126.196,00	35.997.017,00	96,05	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	107.411.035,00	96.127.590,00	11.283.445,00	89,49	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.04.2.01.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	107.411.035,00	96.127.590,00	11.283.445,00	89,49	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.04.2.01.01.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	107.411.035,00	96.127.590,00	11.283.445,00	89,49	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	107.411.035,00	96.127.590,00	11.283.445,00	89,49	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.0.00.03.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	893.559.909,00	881.359.497,00	12.200.412,00	98,63	
7.01.7.01.0.00.0.00.0.00.03.05.2.01.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	893.559.909,00	881.359.497,00	12.200.412,00	98,63	
7.01.7.01.0.00.0.00.0.00.03.05.2.01.07.	PELAKSANAAN SEMUA URUSAN PEMERINTAHAN YANG BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH DAN TIDAK DILAKSANAKAN OLEH INSTANSI VERTIKAL	779.559.909,00	772.609.497,00	6.950.412,00	99,10	
7.01.7.01.0.00.0.00.0.00.03.05.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	779.559.909,00	772.609.497,00	6.950.412,00	99,10	
7.01.7.01.0.00.0.00.0.00.03.05.2.01.08.	PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	114.000.000,00	108.750.000,00	5.250.000,00	95,39	
7.01.7.01.0.00.0.00.0.00.03.05.2.01.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	114.000.000,00	108.750.000,00	5.250.000,00	95,39	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(8.096.923.966,00)	(7.625.220.753,00)	(471.703.233,00)	94,17	
	JUMLAH BELANJA	8.096.923.966,00	7.625.220.753,00	471.703.233,00	94,17	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.096.923.966,00)	(7.625.220.753,00)	(471.703.233,00)	94,17	

LAMPIRAN

Lampiran 1.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 5 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.04. - Kecamatan Lima Puluh

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.07.01.0.00.0.00.04.00.00.5.	BELANJA DAERAH	9.746.237.615,00	9.083.462.128,00	662.775.487,00	93,19	
7.01.0.07.01.0.00.0.00.04.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	9.506.812.215,00	8.862.008.128,00	644.804.087,00	93,21	
7.01.0.07.01.0.00.0.00.04.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	1.542.581.629,00	1.460.592.976,00	82.278.653,00	94,66	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.865.078.455,00	6.297.849.002,00	567.221.453,00	91,73	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	11.999.712,00	11.905.900,00	93.812,00	99,21	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5.000.056,00	4.959.400,00	40.656,00	99,18	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.056,00	4.959.400,00	40.656,00	99,18	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.999.656,00	6.946.500,00	53.156,00	99,24	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.999.656,00	6.946.500,00	53.156,00	99,24	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.721.345.478,00	4.509.935.971,00	211.409.507,00	95,52	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.712.749.550,00	4.501.571.471,00	211.178.087,00	95,51	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.712.749.550,00	4.501.571.471,00	211.178.087,00	95,51	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	5.396.130,00	5.274.500,00	119.630,00	97,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.396.120,00	5.276.500,00	119.620,00	97,78	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	3.199.900,00	3.088.900,00	111.900,00	96,50	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.199.900,00	3.088.000,00	111.900,00	96,50	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	7.066.000,00	3.297.750,00	3.768.250,00	46,67	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.066.000,00	3.297.750,00	3.768.250,00	46,67	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.066.000,00	3.297.750,00	3.768.250,00	46,67	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	953.834.342,00	780.759.985,00	173.074.357,00	81,85	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	14.322.200,00	14.204.000,00	118.200,00	99,17	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.322.200,00	14.204.000,00	118.200,00	99,17	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	712.961.900,00	593.610.000,00	129.291.900,00	83,11	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	712.961.900,00	593.610.000,00	129.291.900,00	83,11	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	80.955.242,00	80.380.000,00	575.242,00	99,28	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	80.955.242,00	80.380.000,00	575.242,00	99,28	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	18.000.000,00	8.640.000,00	9.360.000,00	48,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	8.640.000,00	9.360.000,00	48,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	97.660.000,00	70.785.985,00	26.874.015,00	72,48	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	97.660.000,00	70.785.985,00	26.874.015,00	72,48	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.10.	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	19.995.000,00	13.140.000,00	6.855.000,00	65,71	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.995.000,00	13.140.000,00	6.855.000,00	65,71	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	344.858.000,00	226.782.000,00	18.176.000,00	92,57	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	53.508.500,00	49.505.000,00	4.003.500,00	93,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.07.05.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.508.500,00	49.505.000,00	4.003.500,00	92,51	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.07.05.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	191.449.500,00	177.277.000,00	14.172.500,00	92,59	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.07.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.632.600,00	5.328.000,00	204.600,00	96,30	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.07.06.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	185.916.900,00	171.949.000,00	13.967.900,00	92,48	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	571.053.523,00	470.033.896,00	101.019.627,00	82,30	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	143.861.130,00	106.015.567,00	37.845.563,00	73,69	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	143.861.130,00	106.015.567,00	37.845.563,00	73,69	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	64.104.984,00	25.876.000,00	38.228.984,00	40,36	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	64.104.984,00	25.876.000,00	38.228.984,00	40,36	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	363.087.409,00	338.142.329,00	24.945.080,00	93,12	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	363.087.409,00	338.142.329,00	24.945.080,00	93,12	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	354.813.400,00	295.133.500,00	59.679.900,00	83,17	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	130.089.400,00	79.142.500,00	52.746.900,00	57,81	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	130.089.400,00	79.142.500,00	52.746.900,00	57,81	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	10.554.000,00	9.000.000,00	1.554.000,00	85,27	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.09.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.554.000,00	9.000.000,00	1.554.000,00	85,27	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	207.370.000,00	206.991.000,00	379.000,00	99,81	
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.09.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	207.370.000,00	206.991.000,00	379.000,00	99,81	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.499.427.731,00	1.454.862.400,00	4.565.331,00	99,68	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	41.450.450,00	38.856.000,00	2.594.450,00	93,74	
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.02.01.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	41.450.450,00	38.856.000,00	2.594.450,00	93,74	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.0.00.04.03.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	41.450.456,00	38.856.000,00	2.594.456,00	93,74	
7.01.7.01.0.00.0.00.0.00.04.03.2.03.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	1.417.977.281,00	1.416.006.400,00	1.970.881,00	99,86	
7.01.7.01.0.00.0.00.0.00.04.03.2.03.02.	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN	1.417.977.281,00	1.416.006.400,00	1.970.881,00	99,86	
7.01.7.01.0.00.0.00.0.00.04.03.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.417.977.281,00	1.416.006.400,00	1.970.881,00	99,86	
7.01.7.01.0.00.0.00.0.00.04.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	118.583.200,00	91.901.750,00	26.681.450,00	77,49	
7.01.7.01.0.00.0.00.0.00.04.04.2.01.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	118.583.200,00	91.901.750,00	26.681.450,00	77,49	
7.01.7.01.0.00.0.00.0.00.04.04.2.01.01.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	118.583.200,00	91.901.750,00	26.681.450,00	77,49	
7.01.7.01.0.00.0.00.0.00.04.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	118.583.200,00	91.901.750,00	26.681.450,00	77,49	
7.01.7.01.0.00.0.00.0.00.04.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.303.156.220,00	1.238.848.978,00	64.307.253,00	95,06	
7.01.7.01.0.00.0.00.0.00.04.05.2.01.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	1.303.156.220,00	1.238.848.978,00	64.307.253,00	95,06	
7.01.7.01.0.00.0.00.0.00.04.05.2.01.03.	PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	72.980.510,00	61.211.000,00	11.769.510,00	83,87	
7.01.7.01.0.00.0.00.0.00.04.05.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	72.980.510,00	61.211.000,00	11.769.510,00	83,87	
7.01.7.01.0.00.0.00.0.00.04.05.2.01.07.	PELAKSANAAN SEMUA URUSAN PEMERINTAHAN YANG BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH DAN TIDAK DILAKSANAKAN OLEH INSTANSI VERTIKAL	1.074.619.445,00	1.036.037.976,00	38.581.469,00	96,40	
7.01.7.01.0.00.0.00.0.00.04.05.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.074.619.445,00	1.036.037.976,00	38.581.469,00	96,40	
7.01.7.01.0.00.0.00.0.00.04.05.2.01.08.	PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	155.556.274,00	141.600.000,00	13.956.274,00	91,03	
7.01.7.01.0.00.0.00.0.00.04.05.2.01.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	155.556.274,00	141.600.000,00	13.956.274,00	91,03	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(9.746.237.615,00)	(9.083.462.128,00)	(662.775.487,00)	93,19	
	JUMLAH BELANJA	9.746.237.615,00	9.083.462.128,00	662.775.487,00	93,19	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(9.746.237.615,00)	(9.083.462.128,00)	(662.775.487,00)	93,19	

Lampiran 1.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.05. - Kecamatan Pekanbaru Kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.07.01.0.00.0.00.05.00.00.5.	BELANJA DAERAH	11.064.472.892,00	10.553.910.161,00	510.552.731,00	95,38	
7.01.0.07.01.0.00.0.00.05.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	11.049.432.292,00	10.538.890.161,00	510.542.131,00	95,37	
7.01.0.07.01.0.00.0.00.05.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	1.638.930.095,00	1.613.226.474,00	15.693.621,00	99,03	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.657.472.828,00	7.238.483.767,00	419.069.041,00	94,52	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	9.723.800,00	9.723.800,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.81.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4.730.400,00	4.730.400,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.81.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.730.400,00	4.730.400,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	4.993.400,00	4.993.400,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.993.400,00	4.993.400,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.301.893.369,00	5.035.011.044,00	266.882.325,00	94,96	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02.81.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.298.488.694,00	5.031.607.344,00	266.881.350,00	94,96	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02.81.5.1.01.	Belanja Pegawai	5.298.488.694,00	5.031.607.344,00	266.881.350,00	94,96	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	3.404.675,00	3.403.700,00	975,00	99,97	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.404.675,00	3.403.700,00	975,00	99,97	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	55.854.066,00	38.500.366,00	17.353.632,00	68,93	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	55.854.066,00	38.500.366,00	17.353.632,00	68,93	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	55.854.066,00	38.500.366,00	17.353.632,00	68,93	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	809.514.125,00	791.510.208,00	18.003.917,00	97,77	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	71.023.600,00	71.021.000,00	2.600,00	99,99	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	71.023.600,00	71.021.000,00	2.600,00	99,99	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	543.784.500,00	543.368.500,00	416.000,00	99,92	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	543.784.500,00	543.368.500,00	416.000,00	99,92	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	98.478.025,00	98.197.300,00	280.725,00	99,71	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	98.478.025,00	98.197.300,00	280.725,00	99,71	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	66.754.000,00	49.463.108,00	17.290.892,00	74,09	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	66.754.000,00	49.463.108,00	17.290.892,00	74,09	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.10.	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	15.074.000,00	15.060.300,00	13.700,00	99,90	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.074.000,00	15.060.300,00	13.700,00	99,90	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	17.049.600,00	17.030.000,00	19.600,00	99,93	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	17.049.600,00	17.030.000,00	19.600,00	99,93	
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.07.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.07.05.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.049.600,00	15.030.000,00	19.600,00	99,87	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	816.383.728,00	748.361.467,00	68.022.261,00	91,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.03.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	204.089.462,00	156.457.501,00	47.551.961,00	76,69	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	204.089.462,00	156.457.501,00	47.551.961,00	76,69	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	140.482.300,00	140.112.000,00	370.300,00	99,73	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	140.482.300,00	140.112.000,00	370.300,00	99,73	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	471.891.966,00	451.791.966,00	20.100.000,00	95,74	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	471.891.966,00	451.791.966,00	20.100.000,00	95,74	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	647.063.306,00	598.266.900,00	48.796.306,00	92,45	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	117.388.665,00	87.629.400,00	29.759.206,00	74,64	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	117.388.606,00	87.629.400,00	29.759.206,00	74,64	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	15.414.600,00	15.385.000,00	29.600,00	99,80	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.09.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.414.600,00	15.385.000,00	29.600,00	99,80	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.09.08.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	514.260.000,00	495.252.500,00	19.007.500,00	96,30	
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.09.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	514.260.000,00	495.252.500,00	19.007.500,00	96,30	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.480.731.966,00	1.417.389.800,00	63.342.166,00	95,72	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	196.343.065,00	196.147.700,00	195.365,00	99,90	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.02.01.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	42.993.125,00	42.847.700,00	145.425,00	99,66	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	42.993.125,00	42.847.700,00	145.425,00	99,66	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.02.03.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	153.349.944,00	153.300.000,00	49.944,00	99,96	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	153.349.944,00	153.300.000,00	49.944,00	99,96	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.03.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	1.484.388.000,00	1.421.242.100,00	63.145.900,00	95,74	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.03.02.	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN	1.484.388.000,00	1.421.242.100,00	63.145.900,00	95,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.484.388.900,00	1.421.242.100,00	63.146.800,00	95,74	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	112.388.600,00	99.930.100,00	12.458.500,00	88,91	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.04.2.01.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	112.388.600,00	99.930.100,00	12.458.500,00	88,91	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.04.2.01.01.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	112.388.600,00	99.930.100,00	12.458.500,00	88,91	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	112.388.600,00	99.930.100,00	12.458.500,00	88,91	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.613.879.495,00	1.598.196.474,00	15.683.021,00	99,02	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.05.2.01.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	1.613.879.495,00	1.598.196.474,00	15.683.021,00	99,02	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.05.2.01.03.	PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	121.291.541,00	111.287.500,00	10.004.041,00	91,75	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.05.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	121.291.541,00	111.287.500,00	10.004.041,00	91,75	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.05.2.01.07.	PELAKSANAAN SEMUA URUSAN PEMERINTAHAN YANG BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH DAN TIDAK DILAKSANAKAN OLEH INSTANSI VERTIKAL	1.295.337.954,00	1.291.158.974,00	4.178.980,00	99,67	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.05.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.295.337.954,00	1.291.158.974,00	4.178.980,00	99,67	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.05.2.01.08.	PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	197.350.000,00	195.750.000,00	1.600.000,00	99,23	
7.01.7.01.0.00.0.00.05.05.2.01.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	197.350.000,00	195.750.000,00	1.600.000,00	99,23	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(11.064.472.892,00)	(10.553.920.161,00)	(510.552.731,00)	95,38	
	JUMLAH BELANJA	11.064.472.892,00	10.553.920.161,00	510.552.731,00	95,38	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(11.064.472.892,00)	(10.553.920.161,00)	(510.552.731,00)	95,38	

STRUKTUR

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.06. - Kecamatan Sukajadi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.07.01.0.00.0.00.06.00.00.5.	BELANJA DAERAH	13.556.072.813,00	12.852.308.967,00	603.763.845,00	95,54	
7.01.0.07.01.0.00.0.00.06.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	13.438.636.812,00	12.846.728.967,00	591.909.045,00	95,59	
7.01.0.07.01.0.00.0.00.06.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	2.126.376.559,00	1.950.851.864,00	176.525.695,00	91,70	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.666.639.753,00	9.244.819.863,00	421.819.850,00	95,63	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	14.978.800,00	14.978.800,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4.989.600,00	4.989.600,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.989.600,00	4.989.600,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	4.988.900,00	4.988.900,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.988.900,00	4.988.900,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.990.300,00	4.990.300,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.990.300,00	4.990.300,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.247.849.268,00	6.614.813.964,00	333.806.364,00	95,40	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.237.857.768,00	6.604.851.464,00	333.806.364,00	95,39	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	7.237.857.768,00	6.904.851.404,00	333.006.364,00	95,39	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	4.994.400,00	4.994.400,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.994.400,00	4.994.400,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	4.997.100,00	4.997.100,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.997.100,00	4.997.100,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	7.066.900,00	3.403.450,00	3.663.550,00	48,15	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.066.900,00	3.403.450,00	3.663.550,00	48,15	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.066.900,00	3.403.450,00	3.663.550,00	48,15	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	926.454.730,00	891.798.364,00	34.656.366,00	96,25	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	16.107.700,00	16.107.700,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.107.700,00	16.107.700,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	697.491.000,00	687.491.000,00	10.000.000,00	98,56	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	697.491.000,00	687.491.000,00	10.000.000,00	98,56	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	87.550.838,00	86.404.000,00	1.146.838,00	98,69	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	87.550.838,00	86.404.000,00	1.146.838,00	98,69	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	120.320.000,00	96.810.494,00	23.509.506,00	80,46	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	120.320.000,00	96.810.494,00	23.509.506,00	80,46	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.10.	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	4.985.200,00	4.985.200,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.985.200,00	4.985.200,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	117.434.800,00	105.580.000,00	11.854.800,00	89,90	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	25.087.000,00	21.640.000,00	3.447.000,00	86,25	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.07.05.5.2.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.387.800,00	31.640.000,00	3.447.800,00	89.25	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	92.347.800,00	83.940.000,00	8.407.800,00	90.89	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.07.06.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.347.800,00	83.940.000,00	8.407.800,00	90.89	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	727.126.627,00	703.908.341,00	23.218.286,00	96.80	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	210.904.200,00	178.557.112,00	32.347.088,00	84.66	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	210.904.200,00	178.557.112,00	32.347.088,00	84.66	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	19.365.698,00	19.365.500,00	198,00	99.99	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.365.698,00	19.365.500,00	198,00	99.99	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	506.856.729,00	505.985.729,00	871.000,00	99.83	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	506.856.729,00	505.985.729,00	871.000,00	99.83	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	615.729.520,00	609.509.814,00	6.220.506,00	98.98	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	157.631.800,00	153.000.814,00	4.630.986,00	97.06	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	157.631.800,00	153.000.814,00	4.630.986,00	97.06	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09.05.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	29.559.000,00	29.559.000,00	-	100.00	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.559.000,00	29.559.000,00	-	100.00	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	215.269.760,00	214.600.000,00	669.760,00	99.68	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09.09.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100.00	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	213.269.760,00	212.600.000,00	669.760,00	99.68	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09.10.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	213.269.760,00	212.350.000,00	919.760,00	99.56	
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	213.269.760,00	212.350.000,00	919.760,00	99.56	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.766.557.100,00	1.761.821.200,00	2.735.900,00	99.84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	39.998.908,00	39.989.400,00	9.500,00	99,97	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02.01.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	39.998.908,00	39.989.400,00	9.500,00	99,97	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	39.998.908,00	39.989.400,00	9.500,00	99,97	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.03.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	1.726.558.200,00	1.723.831.800,00	2.726.400,00	99,84	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.03.02.	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN	1.726.558.200,00	1.723.831.800,00	2.726.400,00	99,84	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.726.558.200,00	1.723.831.800,00	2.726.400,00	99,84	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	113.934.200,00	99.996.800,00	13.937.400,00	87,76	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.04.2.01.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	113.934.200,00	99.996.800,00	13.937.400,00	87,76	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.04.2.01.01.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	113.934.200,00	99.996.800,00	13.937.400,00	87,76	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	113.934.200,00	99.996.800,00	13.937.400,00	87,76	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.008.941.759,00	1.844.471.864,00	164.470.695,00	91,81	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.05.2.01.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	2.008.941.759,00	1.844.471.864,00	164.470.695,00	91,81	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.05.2.01.03.	PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	121.323.500,00	121.323.500,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.05.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	121.323.500,00	121.323.500,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.05.2.01.07.	PELAKSANAAN SEMUA URUSAN PEMERINTAHAN YANG BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH DAN TIDAK DILAKSANAKAN OLEH INSTANSI VERTIKAL	1.656.596.959,00	1.505.626.264,00	150.970.695,00	90,88	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.05.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.656.596.959,00	1.505.626.264,00	150.970.695,00	90,88	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.05.2.01.08.	PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	231.111.300,00	217.611.300,00	13.500.000,00	94,15	
7.01.7.01.0.00.0.00.06.05.2.01.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	231.111.300,00	217.611.300,00	13.500.000,00	94,15	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(13.556.072.812,00)	(12.952.308.967,00)	(603.763.845,00)	95,54	
	JUMLAH BELANJA	13.556.072.812,00	12.952.308.967,00	603.763.845,00	95,54	

STTD

	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(13.556.072.812,00)	(12.952.308.967,00)	(603.763.845,00)	95,54	

Lampiran 1.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.07. - Kecamatan Payung Sekaki

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.07.01.0.00.0.00.07.00.00.5.	BELANJA DAERAH	13.326.196.993,00	11.805.052.938,00	1.521.144.055,00	88,58	
7.01.0.07.01.3.00.0.00.07.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	13.048.737.391,00	11.703.632.936,00	1.344.864.455,00	89,70	
7.01.0.07.01.5.00.0.00.07.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	3.154.099.775,00	1.826.386.665,00	327.713.107,00	85,91	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.334.926.696,00	7.947.642.139,00	1.377.183.955,00	85,23	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	20.532.000,00	14.132.000,00	6.400.000,00	68,83	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	10.211.000,00	9.311.000,00	900.000,00	91,18	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.211.000,00	9.311.000,00	900.000,00	91,18	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	10.321.000,00	4.821.000,00	5.500.000,00	46,71	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.321.000,00	4.821.000,00	5.500.000,00	46,71	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.361.663.402,00	6.060.836.313,00	300.827.089,00	95,27	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.355.927.874,00	6.055.100.785,00	300.827.089,00	95,26	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	6.355.927.874,00	6.055.100.785,00	300.827.089,00	95,26	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN, TRIWULANAN, SEMESTERAN SKPD	5.735.528,00	5.735.528,00	-	100,00	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.735.520,00	5.735.520,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	7.066.000,00	3.326.429,00	3.739.571,00	47,07	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.066.000,00	3.326.429,00	3.739.571,00	47,07	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.066.000,00	3.326.429,00	3.739.571,00	47,07	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	868.955.044,00	544.580.906,00	324.374.144,00	62,67	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	48.184.606,00	48.179.006,00	5.600,00	99,98	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	48.184.606,00	48.179.006,00	5.600,00	99,98	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	624.417.100,00	432.023.000,00	192.397.100,00	69,19	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	624.417.100,00	432.023.000,00	192.397.100,00	69,19	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	30.256.496,00	2.170.000,00	28.126.496,00	7,17	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.256.496,00	2.170.000,00	28.126.496,00	7,17	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	24.000.000,00	140.000,00	23.860.000,00	0,58	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	140.000,00	23.860.000,00	0,58	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	87.126.000,00	16.195.000,00	70.931.000,00	18,58	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	87.126.000,00	16.195.000,00	70.931.000,00	18,58	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.11.	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	54.930.848,00	45.879.900,00	9.050.948,00	83,52	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	54.930.848,00	45.879.900,00	9.050.948,00	83,52	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	281.959.600,00	101.892.000,00	180.067.600,00	36,13	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.07.05.	PENGADAAN MESEL	176.459.600,00	-	176.459.600,00	-	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.07.05.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	176.459.600,00	-	176.459.600,00	-	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.07.10.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	105.500.000,00	101.892.000,00	3.608.000,00	96,58	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.07.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	2.492.000,00	3.008.000,00	45,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.07.10.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.400.000,00	600.000,00	99,40	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.037.373.956,00	686.186.097,00	343.187.859,00	66,59	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	253.640.000,00	186.321.812,00	67.318.188,00	73,46	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	253.640.000,00	186.321.812,00	67.318.188,00	73,46	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	300.842.000,00	50.798.000,00	250.044.000,00	16,88	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	300.842.000,00	50.798.000,00	250.044.000,00	16,88	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	472.891.966,00	447.066.285,00	25.825.681,00	94,53	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	472.891.966,00	447.066.285,00	25.825.681,00	94,53	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	757.275.281,00	538.685.600,00	218.590.682,00	71,13	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.09.01.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	122.704.412,00	76.418.600,00	46.285.812,00	62,27	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	122.704.412,00	76.418.600,00	46.285.812,00	62,27	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.09.05.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	329.658.800,00	316.638.000,00	13.020.800,00	96,05	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.09.05.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	50,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.09.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	325.658.800,00	314.638.000,00	11.020.800,00	96,61	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.09.10.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	304.912.070,00	145.628.000,00	159.284.070,00	47,76	
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.09.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	304.912.070,00	145.628.000,00	159.284.070,00	47,76	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.063.730.597,00	2.047.089.396,00	16.641.553,00	99,19	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	60.385.892,00	59.675.000,00	710.892,00	98,82	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.02.01.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	60.385.892,00	59.675.000,00	710.892,00	98,82	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	60.385.892,00	59.675.000,00	710.892,00	98,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.03.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	2.003.345.199,00	1.987.414.399,00	15.930.701,00	99,20	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.03.02.	PEMBINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN	2.003.345.199,00	1.987.414.399,00	15.930.701,00	99,20	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.003.345.199,00	1.987.414.399,00	15.930.701,00	99,20	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	99.999.732,00	93.334.732,00	6.665.000,00	93,33	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.04.2.01.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	99.999.732,00	93.334.732,00	6.665.000,00	93,33	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.04.2.01.01.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	99.999.732,00	93.334.732,00	6.665.000,00	93,33	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	99.999.732,00	93.334.732,00	6.665.000,00	93,33	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.837.640.175,00	1.716.986.668,00	120.653.507,00	93,43	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.05.2.01.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	1.837.640.175,00	1.716.986.668,00	120.653.507,00	93,43	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.05.2.01.01.	PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	52.427.900,00	41.991.000,00	10.436.900,00	80,09	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.05.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	52.427.900,00	41.991.000,00	10.436.900,00	80,09	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.05.2.01.07.	PELAKSANAAN SEMUA URUSAN PEMERINTAHAN YANG BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH DAN TIDAK DILAKSANAKAN OLEH INSTANSI VERTIKAL	1.531.892.275,00	1.441.175.668,00	90.716.607,00	94,07	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.05.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.531.892.275,00	1.441.175.668,00	90.716.607,00	94,07	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.05.2.01.08.	PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	253.320.000,00	233.820.000,00	19.500.000,00	92,30	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.05.2.01.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	253.320.000,00	233.820.000,00	19.500.000,00	92,30	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(13.326.196.993,00)	(11.805.052.938,00)	(1.521.144.055,00)	88,58	
	JUMLAH BELANJA	13.326.196.993,00	11.805.052.938,00	1.521.144.055,00	88,58	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(13.326.196.993,00)	(11.805.052.938,00)	(1.521.144.055,00)	88,58	

STAMP

Lampiran 1.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

NOMOR : 3 TAHUN 2024

TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.09. - Kecamatan Senapelan

1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.07.01.0.00.0.00.09.00.00.5.	BELANJA DAERAH	10.527.191.841,00	10.064.117.000,00	463.074.841,00	95,60	
7.01.0.07.01.0.00.0.00.09.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	10.527.191.841,00	10.064.117.000,00	463.074.841,00	95,60	
7.01.0.07.01.0.00.0.00.09.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	1.437.554.435,00	1.429.691.930,00	7.922.500,00	99,45	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.289.452.801,00	6.858.615.660,00	430.837.141,00	93,87	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	12.016.288,00	12.016.288,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4.407.112,00	4.407.112,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.407.112,00	4.407.112,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	7.649.176,00	7.649.176,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.649.176,00	7.649.176,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.499.068.640,00	5.245.609.011,00	253.459.629,00	95,39	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.485.861.480,00	5.234.681.035,00	251.180.445,00	95,42	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	5.485.861.480,00	5.234.681.035,00	251.180.445,00	95,42	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	6.048.968,00	3.769.784,00	2.279.184,00	62,32	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.048.968,00	3.768.784,00	2.279.184,00	62,32	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	7.158.192,00	7.158.192,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.158.192,00	7.158.192,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	7.066.000,00	3.815.300,00	3.250.700,00	53,99	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.066.000,00	3.815.300,00	3.250.700,00	53,99	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.066.000,00	3.815.300,00	3.250.700,00	53,99	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	728.001.690,00	646.124.595,00	82.967.095,00	88,62	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	15.269.600,00	15.269.600,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.269.600,00	15.269.600,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	580.786.900,00	508.251.900,00	72.535.000,00	87,51	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	580.786.900,00	508.251.900,00	72.535.000,00	87,51	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	64.866.807,00	64.866.807,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	64.866.807,00	64.866.807,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	19.250.000,00	14.000.000,00	5.250.000,00	72,72	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.250.000,00	14.000.000,00	5.250.000,00	72,72	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	28.788.000,00	23.605.905,00	5.182.095,00	81,99	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	28.788.000,00	23.605.905,00	5.182.095,00	81,99	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.06.10.	PEMATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	10.130.383,00	10.130.383,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.06.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.130.383,00	10.130.383,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	585.061.583,00	534.139.813,00	50.921.170,00	91,29	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	133.799.332,00	106.318.877,00	27.480.455,00	79,46	

SKPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	133.799.532,00	106.318.877,00	27.480.455,00	79,46	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.09.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	19.356.200,00	19.356.200,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.09.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.356.200,00	19.356.200,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.09.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	431.905.451,00	408.464.736,00	23.441.715,00	94,57	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.09.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	431.905.451,00	408.464.736,00	23.441.715,00	94,57	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	457.108.200,00	408.870.653,00	48.237.547,00	89,44	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	124.364.000,00	76.846.653,00	47.517.347,00	61,79	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	124.364.000,00	76.846.653,00	47.517.347,00	61,79	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.09.05.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	4.554.000,00	4.554.000,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.09.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.554.000,00	4.554.000,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	128.190.200,00	127.991.000,00	199.200,00	99,84	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.09.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	128.190.200,00	127.991.000,00	199.200,00	99,84	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.09.11.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	200.000.000,00	199.479.000,00	521.000,00	99,73	
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.09.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.479.000,00	521.000,00	99,73	
7.01.7.01.0.00.0.00.09.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.686.669.420,00	1.686.669.420,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.09.03.2.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	84.500.220,00	84.500.220,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.09.03.2.02.01.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	84.500.220,00	84.500.220,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.09.03.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	84.500.220,00	84.500.220,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.09.03.2.03.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	1.602.169.200,00	1.602.169.200,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.09.03.2.03.02.	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN	1.602.169.200,00	1.602.169.200,00	-	100,00	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.09.03.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.602.169.200,00	1.602.169.200,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.09.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	113.555.200,00	97.140.000,00	16.415.200,00	85,54	
7.01.7.01.0.00.0.00.09.04.2.01.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	113.555.200,00	97.140.000,00	16.415.200,00	85,54	
7.01.7.01.0.00.0.00.09.04.2.01.01.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	113.555.200,00	97.140.000,00	16.415.200,00	85,54	
7.01.7.01.0.00.0.00.09.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	113.555.200,00	97.140.000,00	16.415.200,00	85,54	
7.01.7.01.0.00.0.00.09.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.437.514.420,00	1.429.691.920,00	7.822.500,00	99,46	
7.01.7.01.0.00.0.00.09.05.2.01.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	1.437.514.420,00	1.429.691.920,00	7.822.500,00	99,46	
7.01.7.01.0.00.0.00.09.05.2.01.03.	PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	72.354.900,00	67.694.900,00	4.660.000,00	93,56	
7.01.7.01.0.00.0.00.09.05.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	72.354.900,00	67.694.900,00	4.660.000,00	93,56	
7.01.7.01.0.00.0.00.09.05.2.01.07.	PELAKSANAAN SEMUA URUSAN PEMERINTAHAN YANG BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH DAN TIDAK DILAKSANAKAN OLEH INSTANSI VERTIKAL	1.175.559.520,00	1.172.397.020,00	3.162.500,00	99,73	
7.01.7.01.0.00.0.00.09.05.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.175.559.520,00	1.172.397.020,00	3.162.500,00	99,73	
7.01.7.01.0.00.0.00.09.05.2.01.08.	PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	189.600.000,00	189.600.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.09.05.2.01.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	189.600.000,00	189.600.000,00	-	100,00	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(10.527.191.841,00)	(10.064.117.000,00)	(463.074.841,00)	95,60	
	JUMLAH BELANJA	10.527.191.841,00	10.064.117.000,00	463.074.841,00	95,60	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(10.527.191.841,00)	(10.064.117.000,00)	(463.074.841,00)	95,60	

SIPKD

Lampiran L.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : **7.01.0.00.0.00.12. - Kecamatan Marpoyan Damai**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.07.01.0.00.0.00.12.00.00.5.	BELANJA DAERAH	16.334.911.047,00	15.697.868.553,00	617.043.494,00	96,21	
7.01.0.07.01.0.00.0.00.12.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	14.052.891.797,00	13.439.720.253,00	613.171.544,00	96,18	
7.01.0.07.01.0.00.0.00.12.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	1.939.524.005,00	1.847.439.668,00	92.084.337,00	95,74	
8.00.7.01.0.00.0.00.12.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.059.741.471,00	10.539.816.885,00	519.924.587,00	95,29	
8.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	39.147.706,00	37.632.506,00	1.515.200,00	92,08	
8.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5.871.206,00	5.551.006,00	320.200,00	94,54	
8.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.871.206,00	5.551.006,00	320.200,00	94,54	
8.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	7.396.000,00	6.665.000,00	731.000,00	90,11	
8.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.396.000,00	6.665.000,00	731.000,00	90,11	
8.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.879.506,00	5.415.506,00	464.000,00	92,10	
8.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.879.506,00	5.415.506,00	464.000,00	92,10	
8.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.121.426.994,00	7.773.967.291,00	348.459.703,00	95,70	
8.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	8.097.288.310,00	7.731.488.891,00	365.800.419,00	95,72	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	8.097.269.310,00	7.751.468.891,00	345.800.419,00	95,72	
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	12.545.713,00	11.548.800,00	996.913,00	92,05	
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.545.713,00	11.548.800,00	996.913,00	92,05	
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	11.011.972,00	9.949.600,00	1.062.372,00	90,35	
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.011.972,00	9.949.600,00	1.062.372,00	90,35	
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	41.198.000,00	38.823.656,00	2.375.344,00	94,23	
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	41.198.000,00	38.823.656,00	2.375.344,00	94,23	
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	41.198.000,00	38.823.656,00	2.375.344,00	94,23	
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	843.975.816,00	770.779.179,00	72.196.637,00	91,45	
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	59.303.700,00	59.274.000,00	29.700,00	99,94	
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	59.303.700,00	59.274.000,00	29.700,00	99,94	
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	608.330.300,00	541.729.600,00	66.600.700,00	89,05	
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	608.330.300,00	541.729.600,00	66.600.700,00	89,05	
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	53.821.666,00	53.292.000,00	529.666,00	99,01	
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	53.821.666,00	53.292.000,00	529.666,00	99,01	
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12.600.000,00	9.450.000,00	3.150.000,00	75,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	9.450.000,00	3.150.000,00	75,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	93.952.000,00	92.169.575,00	1.782.421,00	98,10	
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	93.952.000,00	92.169.575,00	1.782.421,00	98,10	
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.06.10.	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	14.988.150,00	14.864.000,00	124.150,00	99,17	
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.06.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.988.150,00	14.864.000,00	124.150,00	99,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	264.070.250,00	259.348.300,00	4.671.950,00	98,23	
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	45.121.800,00	44.955.000,00	166.800,00	99,63	
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.07.05.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.121.800,00	44.955.000,00	166.800,00	99,63	
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	218.898.450,00	214.393.300,00	4.505.150,00	97,94	
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.07.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.07.06.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	216.898.450,00	212.393.300,00	4.505.150,00	97,92	
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	861.878.649,00	803.514.359,00	58.364.290,00	93,22	
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	238.771.584,00	223.689.287,00	15.082.297,00	93,68	
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	238.771.584,00	223.689.287,00	15.082.297,00	93,68	
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	73.683.791,00	65.700.000,00	7.983.791,00	89,16	
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.08.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	73.683.791,00	65.700.000,00	7.983.791,00	89,16	
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	549.423.274,00	514.125.072,00	35.298.202,00	93,57	
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	549.423.274,00	514.125.072,00	35.298.202,00	93,57	
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	900.094.063,00	870.752.600,00	31.341.463,00	96,66	
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.09.02.	PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	91.671.400,00	61.329.600,00	30.341.800,00	66,90	
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	91.671.400,00	61.329.600,00	30.341.800,00	66,90	
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.09.05.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	20.286.000,00	20.160.000,00	126.000,00	99,37	
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.09.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.286.000,00	20.160.000,00	126.000,00	99,37	
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	797.136.663,00	795.263.000,00	1.873.663,00	99,76	
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.09.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	797.136.663,00	795.263.000,00	1.873.663,00	99,76	
7.01.7.01.0.00.0.00.12.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	13.450.000,00	12.807.000,00	643.000,00	95,21	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.12.02.2.02.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	13.450.000,00	12.807.000,00	643.000,00	95,21	
7.01.7.01.0.00.0.00.12.02.2.02.01.	PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN	13.450.000,00	12.807.000,00	643.000,00	95,21	
7.01.7.01.0.00.0.00.12.02.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.450.000,00	12.807.000,00	643.000,00	95,21	
7.01.7.01.0.00.0.00.12.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.457.838.031,00	3.454.353.306,00	3.474.710,00	99,89	
7.01.7.01.0.00.0.00.12.03.2.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	51.221.530,00	50.579.500,00	642.030,00	98,74	
7.01.7.01.0.00.0.00.12.03.2.02.01.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	51.221.530,00	50.579.500,00	642.030,00	98,74	
7.01.7.01.0.00.0.00.12.03.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	51.221.530,00	50.579.500,00	642.030,00	98,74	
7.01.7.01.0.00.0.00.12.03.2.03.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	3.406.606.500,00	3.403.773.800,00	2.832.700,00	99,91	
7.01.7.01.0.00.0.00.12.03.2.03.02.	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN	3.406.606.500,00	3.403.773.800,00	2.832.700,00	99,91	
7.01.7.01.0.00.0.00.12.03.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.406.606.500,00	3.403.773.800,00	2.832.700,00	99,91	
7.01.7.01.0.00.0.00.12.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	116.388.800,00	100.000.000,00	16.388.800,00	85,91	
7.01.7.01.0.00.0.00.12.04.2.01.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	116.388.800,00	100.000.000,00	16.388.800,00	85,91	
7.01.7.01.0.00.0.00.12.04.2.01.01.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	116.388.800,00	100.000.000,00	16.388.800,00	85,91	
7.01.7.01.0.00.0.00.12.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	116.388.800,00	100.000.000,00	16.388.800,00	85,91	
7.01.7.01.0.00.0.00.12.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.667.583.755,00	1.590.091.368,00	77.412.387,00	95,35	
7.01.7.01.0.00.0.00.12.05.2.01.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	1.667.583.755,00	1.590.091.368,00	77.412.387,00	95,35	
7.01.7.01.0.00.0.00.12.05.2.01.03.	PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	122.972.840,00	68.190.000,00	54.782.840,00	55,45	
7.01.7.01.0.00.0.00.12.05.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	122.972.840,00	68.190.000,00	54.782.840,00	55,45	
7.01.7.01.0.00.0.00.12.05.2.01.07.	PELAKSANAAN SEMUA URUSAN PEMERINTAHAN YANG BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH DAN TIDAK DILAKSANAKAN OLEH INSTANSI VERTIKAL	1.383.530.915,00	1.362.991.368,00	19.629.547,00	98,58	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.12.05.2.01.87.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.382.530.915,00	1.362.911.368,00	19.620.547,00	98,58	
7.01.7.01.0.00.0.00.12.05.2.01.88.	PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	162.000.000,00	159.000.000,00	3.000.000,00	98,14	
7.01.7.01.0.00.0.00.12.05.2.01.88.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	162.000.000,00	159.000.000,00	3.000.000,00	98,14	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(16.314.912.047,00)	(15.697.068.551,00)	(617.843.494,00)	96,21	
	JUMLAH BELANJA	16.314.912.047,00	15.697.068.551,00	617.843.494,00	96,21	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(16.314.912.047,00)	(15.697.068.551,00)	(617.843.494,00)	96,21	

SIPKD

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.13. - Kecamatan Binawidya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.07.01.3.00.0.00.13.00.00.5.	BELANJA DAERAH	16.095.583.677,00	15.387.396.103,00	808.187.574,00	94,97	
7.01.0.07.01.3.00.0.00.13.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	14.722.741.277,00	13.915.175.103,00	797.566.174,00	94,58	
7.01.0.07.01.3.00.0.00.13.00.00.5.2	BELANJA MODAL	3.043.296.185,00	2.919.725.025,00	123.571.161,00	95,93	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.645.091.438,00	11.038.190.225,00	606.901.213,00	94,79	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	25.896.580,00	25.846.900,00	49.680,00	99,80	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	7.071.900,00	7.071.900,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.071.900,00	7.071.900,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	5.947.100,00	5.947.100,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.947.100,00	5.947.100,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1.615.880,00	1.567.200,00	49.680,00	96,93	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.615.880,00	1.567.200,00	49.680,00	96,93	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	4.168.200,00	4.168.200,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.168.200,00	4.168.200,00	-	100,00	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.093.500,00	7.093.500,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.093.500,00	7.093.500,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.246.289.712,00	6.931.311.197,00	314.978.515,00	95,65	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.231.765.984,00	6.916.787.469,00	314.978.515,00	95,64	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	7.231.765.984,00	6.916.787.469,00	314.978.515,00	95,64	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	4.999.794,00	4.999.794,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.999.794,00	4.999.794,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	9.564.024,00	9.564.024,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.564.024,00	9.564.024,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	4.474.700,00	4.474.700,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.03.01.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	2.077.600,00	2.077.600,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.077.600,00	2.077.600,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.03.05.	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	2.397.100,00	2.397.100,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.03.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.397.100,00	2.397.100,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	7.066.000,00	3.115.657,00	3.950.343,00	44,09	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.066.000,00	3.115.657,00	3.950.343,00	44,09	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.066.000,00	3.115.657,00	3.950.343,00	44,09	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.365.873.998,00	1.257.286.341,00	186.587.657,00	92,18	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.784.900,00	9.784.900,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.784.900,00	9.784.900,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	781.603.493,00	491.891.436,00	89.711.657,00	68,52	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	781.603.493,00	691.891.436,00	89.712.057,00	88,52	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	465.637.605,00	465.637.605,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	465.637.605,00	465.637.605,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	91.858.000,00	89.982.400,00	1.875.600,00	97,95	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	91.858.000,00	89.982.400,00	1.875.600,00	97,95	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	359.562.400,00	353.430.000,00	6.132.400,00	98,29	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	359.562.400,00	353.430.000,00	6.132.400,00	98,29	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.07.05.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	359.562.400,00	353.430.000,00	6.132.400,00	98,29	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	992.782.048,00	835.895.180,00	156.842.868,00	84,20	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	308.832.360,00	202.649.226,00	106.183.134,00	65,61	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	308.832.360,00	202.649.226,00	106.183.134,00	65,61	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	29.547.000,00	29.547.000,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.08.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.547.000,00	29.547.000,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	654.332.688,00	603.663.954,00	50.659.734,00	92,25	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	654.332.688,00	603.663.954,00	50.659.734,00	92,25	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.649.206.000,00	1.630.866.250,00	18.339.750,00	98,88	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	86.726.000,00	74.818.250,00	11.907.750,00	86,26	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	86.726.000,00	74.818.250,00	11.907.750,00	86,26	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.09.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.09.10.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	663.840.000,00	661.209.000,00	2.631.000,00	99,60	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.09.10.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	663.840.000,00	661.209.000,00	2.631.000,00	99,60	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.09.11.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	804.660.000,00	800.839.000,00	3.821.000,00	99,52	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.09.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	455.220.000,00	453.257.000,00	1.963.000,00	99,56	
0.00.7.01.0.00.0.00.13.01.2.09.11.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	349.440.000,00	347.582.000,00	1.858.000,00	99,46	
7.01.7.01.0.00.0.00.13.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.688.196.321,00	2.591.701.921,00	77.494.400,00	97,09	
7.01.7.01.0.00.0.00.13.03.2.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	543.409.121,00	528.126.121,00	15.283.000,00	97,19	
7.01.7.01.0.00.0.00.13.03.2.02.01.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	62.412.093,00	62.412.093,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.13.03.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	62.412.093,00	62.412.093,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.13.03.2.02.03.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	480.997.028,00	465.714.028,00	15.283.000,00	96,82	
7.01.7.01.0.00.0.00.13.03.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	480.997.028,00	465.714.028,00	15.283.000,00	96,82	
7.01.7.01.0.00.0.00.13.03.2.03.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	2.125.789.200,00	2.063.575.800,00	62.213.400,00	97,07	
7.01.7.01.0.00.0.00.13.03.2.03.01.	PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	2.125.789.200,00	2.063.575.800,00	62.213.400,00	97,07	
7.01.7.01.0.00.0.00.13.03.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.125.789.200,00	2.063.575.800,00	62.213.400,00	97,07	
7.01.7.01.0.00.0.00.13.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	110.848.132,00	99.999.932,00	10.848.200,00	90,21	
7.01.7.01.0.00.0.00.13.04.2.01.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	110.848.132,00	99.999.932,00	10.848.200,00	90,21	
7.01.7.01.0.00.0.00.13.04.2.01.01.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	110.848.132,00	99.999.932,00	10.848.200,00	90,21	
7.01.7.01.0.00.0.00.13.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	110.848.132,00	99.999.932,00	10.848.200,00	90,21	
7.01.7.01.0.00.0.00.13.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.678.453.786,00	1.557.504.025,00	113.949.761,00	83,23	

SIPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.13.05.2.01.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	1.670.453.786,00	1.557.504.025,00	112.949.761,00	93,23	
7.01.7.01.0.00.0.00.13.05.2.01.83.	PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	115.068.736,00	94.660.786,00	20.407.950,00	82,26	
7.01.7.01.0.00.0.00.13.05.2.01.83.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	115.068.736,00	94.660.786,00	20.407.950,00	82,26	
7.01.7.01.0.00.0.00.13.05.2.01.87.	PELAKSANAAN SEMUA URUSAN PEMERINTAHAN YANG BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH DAN TIDAK DILAKSANAKAN OLEH INSTANSI VERTIKAL	1.394.785.050,00	1.292.243.239,00	92.541.811,00	93,31	
7.01.7.01.0.00.0.00.13.05.2.01.87.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.394.785.050,00	1.292.243.239,00	92.541.811,00	93,31	
7.01.7.01.0.00.0.00.13.05.2.01.88.	PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	170.600.000,00	170.600.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.13.05.2.01.88.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	170.600.000,00	170.600.000,00	-	100,00	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(16.095.583.677,00)	(15.287.396.103,00)	(808.187.574,00)	94,97	
	JUMLAH BELANJA	16.095.583.677,00	15.287.396.103,00	808.187.574,00	94,97	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(16.095.583.677,00)	(15.287.396.103,00)	(808.187.574,00)	94,97	

SALIN

Lampiran 1.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

NOMOR : 3 TAHUN 2024

TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : **7.01.0.00.0.00.14. - Kecamatan Tuah Madani**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.07.01.0.00.0.00.14.00.00.5.	BELANJA DAERAH	14.954.324.378,00	13.907.944.639,00	1.046.379.739,00	93,00	
7.01.0.07.01.0.00.0.00.14.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	14.954.324.378,00	13.907.944.639,00	1.046.379.739,00	93,00	
7.01.0.07.01.0.00.0.00.14.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	1.688.615.569,00	1.455.971.096,00	232.644.473,00	86,22	
3.08.7.01.0.00.0.00.14.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.516.535.127,00	7.879.189.866,00	637.345.261,00	92,51	
3.08.7.01.0.00.0.00.14.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	38.150.852,00	38.150.852,00	-	100,00	
3.08.7.01.0.00.0.00.14.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	3.999.856,00	3.999.856,00	-	100,00	
3.08.7.01.0.00.0.00.14.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.999.856,00	3.999.856,00	-	100,00	
3.08.7.01.0.00.0.00.14.01.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	5.996.900,00	5.996.900,00	-	100,00	
3.08.7.01.0.00.0.00.14.01.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.996.900,00	5.996.900,00	-	100,00	
3.08.7.01.0.00.0.00.14.01.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	5.999.886,00	5.999.886,00	-	100,00	
3.08.7.01.0.00.0.00.14.01.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.999.886,00	5.999.886,00	-	100,00	
3.08.7.01.0.00.0.00.14.01.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	5.999.744,00	5.999.744,00	-	100,00	
3.08.7.01.0.00.0.00.14.01.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.999.744,00	5.999.744,00	-	100,00	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.7.01.0.00.0.00.14.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.154.464,00	7.154.464,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.14.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.154.464,00	7.154.464,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.14.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.480.632.730,00	6.184.324.270,00	296.308.460,00	95,42	
0.00.7.01.0.00.0.00.14.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.474.220.830,00	6.177.911.570,00	296.308.460,00	95,42	
0.00.7.01.0.00.0.00.14.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	6.474.220.830,00	6.177.911.570,00	296.308.460,00	95,42	
0.00.7.01.0.00.0.00.14.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	6.452.700,00	6.452.700,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.14.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.452.700,00	6.452.700,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.14.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	21.076.000,00	21.076.000,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.14.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	21.076.000,00	21.076.000,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.14.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.076.000,00	21.076.000,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.14.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.008.135.233,00	729.041.429,00	279.074.804,00	72,31	
0.00.7.01.0.00.0.00.14.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	19.304.600,00	19.221.000,00	83.600,00	99,56	
0.00.7.01.0.00.0.00.14.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.304.600,00	19.221.000,00	83.600,00	99,56	
0.00.7.01.0.00.0.00.14.01.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	129.339.468,00	96.099.762,00	33.239.706,00	74,29	
0.00.7.01.0.00.0.00.14.01.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	129.339.468,00	96.099.762,00	33.239.706,00	74,29	
0.00.7.01.0.00.0.00.14.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	695.218.875,00	502.857.275,00	192.361.600,00	72,33	
0.00.7.01.0.00.0.00.14.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	695.218.875,00	502.857.275,00	192.361.600,00	72,33	
0.00.7.01.0.00.0.00.14.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	89.975.290,00	39.735.392,00	50.239.898,00	44,16	
0.00.7.01.0.00.0.00.14.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	89.975.290,00	39.735.392,00	50.239.898,00	44,16	
0.00.7.01.0.00.0.00.14.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12.600.000,00	9.450.000,00	3.150.000,00	75,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.14.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	9.450.000,00	3.150.000,00	75,00	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.7.01.0.00.0.00.14.01.2.06.05.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	61.688.000,00	61.688.000,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.14.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	61.688.000,00	61.688.000,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.14.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	713.486.100,00	661.494.103,00	51.991.997,00	92,71	
0.00.7.01.0.00.0.00.14.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	196.960.000,00	179.953.003,00	17.006.997,00	91,36	
0.00.7.01.0.00.0.00.14.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	196.960.000,00	179.953.003,00	17.006.997,00	91,36	
0.00.7.01.0.00.0.00.14.01.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	32.785.600,00	30.385.600,00	2.400.000,00	89,46	
0.00.7.01.0.00.0.00.14.01.2.08.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.785.600,00	30.385.600,00	2.400.000,00	89,46	
0.00.7.01.0.00.0.00.14.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	493.740.500,00	461.155.500,00	32.585.000,00	93,40	
0.00.7.01.0.00.0.00.14.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	493.740.500,00	461.155.500,00	32.585.000,00	93,40	
0.00.7.01.0.00.0.00.14.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	265.033.212,00	255.063.212,00	9.970.000,00	96,23	
0.00.7.01.0.00.0.00.14.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	75.033.212,00	65.063.212,00	9.970.000,00	86,71	
0.00.7.01.0.00.0.00.14.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	75.033.212,00	65.063.212,00	9.970.000,00	86,71	
0.00.7.01.0.00.0.00.14.01.2.09.06.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	190.000.000,00	190.000.000,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.14.01.2.09.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000,00	190.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.14.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.606.039.218,00	4.472.785.481,00	133.253.737,00	97,10	
7.01.7.01.0.00.0.00.14.03.2.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	443.599.434,00	426.548.684,00	16.960.750,00	96,17	
7.01.7.01.0.00.0.00.14.03.2.02.01.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	85.121.184,00	80.368.684,00	4.752.500,00	94,41	
7.01.7.01.0.00.0.00.14.03.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	85.121.184,00	80.368.684,00	4.752.500,00	94,41	
7.01.7.01.0.00.0.00.14.03.2.02.03.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	358.388.250,00	346.180.000,00	12.208.250,00	96,59	
7.01.7.01.0.00.0.00.14.03.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	358.388.250,00	346.180.000,00	12.208.250,00	96,59	
7.01.7.01.0.00.0.00.14.03.2.03.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	4.162.529.784,00	4.046.236.797,00	116.292.987,00	97,20	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.14.03.2.03.02.	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN	4.162.529.784,00	4.046.236.797,00	116.292.987,00	97,20	
7.01.7.01.0.00.0.00.14.03.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.162.529.784,00	4.046.236.797,00	116.292.987,00	97,20	
7.01.7.01.0.00.0.00.14.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	143.134.464,00	99.998.196,00	43.136.268,00	69,86	
7.01.7.01.0.00.0.00.14.04.2.01.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	143.134.464,00	99.998.196,00	43.136.268,00	69,86	
7.01.7.01.0.00.0.00.14.04.2.01.01.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	143.134.464,00	99.998.196,00	43.136.268,00	69,86	
7.01.7.01.0.00.0.00.14.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	143.134.464,00	99.998.196,00	43.136.268,00	69,86	
7.01.7.01.0.00.0.00.14.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.688.615.569,00	1.455.971.096,00	232.644.473,00	86,22	
7.01.7.01.0.00.0.00.14.05.2.01.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	1.688.615.569,00	1.455.971.096,00	232.644.473,00	86,22	
7.01.7.01.0.00.0.00.14.05.2.01.01.	PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	162.756.051,00	48.350.900,00	114.405.151,00	29,70	
7.01.7.01.0.00.0.00.14.05.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	162.756.051,00	48.350.900,00	114.405.151,00	29,70	
7.01.7.01.0.00.0.00.14.05.2.01.07.	PELAKSANAAN SEMUA URUSAN PEMERINTAHAN YANG BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH DAN TIDAK DILAKSANAKAN OLEH INSTANSI VERTIKAL	1.362.602.598,00	1.254.963.295,00	107.639.303,00	92,10	
7.01.7.01.0.00.0.00.14.05.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.362.602.598,00	1.254.963.295,00	107.639.303,00	92,10	
7.01.7.01.0.00.0.00.14.05.2.01.08.	PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	163.256.920,00	152.656.900,00	10.600.020,00	93,50	
7.01.7.01.0.00.0.00.14.05.2.01.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	163.256.920,00	152.656.900,00	10.600.020,00	93,50	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(14.954.324.378,00)	(13.907.944.639,00)	(1.046.379.739,00)	93,00	
	JUMLAH BELANJA	14.954.324.378,00	13.907.944.639,00	1.046.379.739,00	93,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(14.954.324.378,00)	(13.907.944.639,00)	(1.046.379.739,00)	93,00	

Lampiran 1.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : **7.01.0.00.0.00.15. - Kecamatan Rumbai.**

1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.07.01.3.00.3.00.15.00.00.5.	BELANJA DAERAH	14.079.036.076,00	13.358.541.431,00	680.484.645,00	93,74	
7.01.0.07.01.3.00.3.00.15.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	12.644.724.276,00	12.796.858.131,00	847.866.145,00	93,78	
7.01.0.07.01.3.00.3.00.15.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	3.483.738.007,00	3.356.119.840,00	127.606.158,00	94,85	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.086.431.101,00	7.548.393.469,00	538.036.632,00	93,34	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.369.920,00	7.369.920,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	7.369.920,00	7.369.920,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.369.920,00	7.369.920,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.755.332.136,00	5.481.043.701,00	274.278.428,00	95,23	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.755.332.136,00	5.481.043.701,00	274.278.428,00	95,23	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	5.755.332.136,00	5.481.043.701,00	274.278.428,00	95,23	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	92.052.000,00	77.597.210,00	14.454.790,00	84,29	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	92.052.000,00	77.597.210,00	14.454.790,00	84,29	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	92.052.000,00	77.597.210,00	14.454.790,00	84,29	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	647.309.251,00	576.006.860,00	71.302.383,00	88,98	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	35.965.840,00	35.965.840,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	35.965.840,00	35.965.840,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	463.727.150,00	418.260.950,00	45.466.200,00	90,19	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	463.727.150,00	418.260.950,00	45.466.200,00	90,19	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	46.829.061,00	30.279.858,00	16.549.203,00	64,66	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	46.829.061,00	30.279.858,00	16.549.203,00	64,66	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	24.000.000,00	20.000.000,00	4.000.000,00	83,33	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	20.000.000,00	4.000.000,00	83,33	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	38.274.000,00	35.326.520,00	2.947.480,00	92,29	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	38.274.000,00	35.326.520,00	2.947.480,00	92,29	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.06.10.	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	38.513.200,00	36.173.700,00	2.339.500,00	93,92	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.06.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	38.513.200,00	36.173.700,00	2.339.500,00	93,92	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	434.301.800,00	401.683.300,00	32.618.500,00	92,48	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	116.919.900,00	105.965.000,00	10.954.900,00	90,63	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.07.05.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116.919.900,00	105.965.000,00	10.954.900,00	90,63	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	317.381.900,00	295.718.300,00	21.663.600,00	93,17	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.07.06.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	317.381.900,00	295.718.300,00	21.663.600,00	93,17	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	757.237.434,00	633.773.670,00	123.463.764,00	83,69	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	233.477.877,00	143.322.283,00	90.155.594,00	61,38	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	233.477.877,00	143.322.283,00	90.155.594,00	61,38	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	21.980.895,00	9.108.000,00	12.872.895,00	41,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.980.895,00	9.108.000,00	12.872.895,00	41,43	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.09.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	501.778.662,00	481.343.387,00	20.435.275,00	95,92	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.09.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	501.778.662,00	481.343.387,00	20.435.275,00	95,92	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	392.838.566,00	370.917.800,00	21.920.766,00	94,41	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	92.211.806,00	84.130.800,00	8.081.006,00	91,23	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	92.211.806,00	84.130.800,00	8.081.006,00	91,23	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	9.428.000,00	3.381.000,00	6.047.000,00	35,86	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.09.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.428.000,00	3.381.000,00	6.047.000,00	35,86	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.09.05.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	291.198.760,00	283.406.000,00	7.792.760,00	97,32	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.09.05.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.15.01.2.09.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	289.198.760,00	281.406.000,00	7.792.760,00	97,30	
7.01.7.01.0.00.0.00.15.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	85.993.565,00	37.900.700,00	48.092.866,00	44,07	
7.01.7.01.0.00.0.00.15.02.2.02.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	85.993.565,00	37.900.700,00	48.092.866,00	44,07	
7.01.7.01.0.00.0.00.15.02.2.02.02.	FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	39.999.872,00	4.596.300,00	35.403.572,00	11,49	
7.01.7.01.0.00.0.00.15.02.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	39.999.872,00	4.596.300,00	35.403.572,00	11,49	
7.01.7.01.0.00.0.00.15.02.2.02.01.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	45.993.694,00	33.304.400,00	12.689.294,00	72,41	
7.01.7.01.0.00.0.00.15.02.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.993.694,00	33.304.400,00	12.689.294,00	72,41	
7.01.7.01.0.00.0.00.15.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.744.796.726,00	3.557.892.037,00	186.904.689,00	95,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.15.03.2.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	97.878.038,00	97.878.038,00	-	100,00	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.15.03.2.02.01.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	97.678.038,00	97.678.038,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.15.03.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	97.678.038,00	97.678.038,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.15.03.2.03.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	3.647.108.688,00	3.460.203.999,00	186.904.689,00	94,87	
7.01.7.01.0.00.0.00.15.03.2.03.02.	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN	3.647.108.688,00	3.460.203.999,00	186.904.689,00	94,87	
7.01.7.01.0.00.0.00.15.03.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.647.108.688,00	3.460.203.999,00	186.904.689,00	94,87	
7.01.7.01.0.00.0.00.15.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	112.388.476,00	99.929.676,00	12.458.800,00	88,91	
7.01.7.01.0.00.0.00.15.04.2.01.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	112.388.476,00	99.929.676,00	12.458.800,00	88,91	
7.01.7.01.0.00.0.00.15.04.2.01.01.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	112.388.476,00	99.929.676,00	12.458.800,00	88,91	
7.01.7.01.0.00.0.00.15.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	112.388.476,00	99.929.676,00	12.458.800,00	88,91	
7.01.7.01.0.00.0.00.15.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.049.426.207,00	1.954.436.549,00	94.989.658,00	95,36	
7.01.7.01.0.00.0.00.15.05.2.01.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	2.049.426.207,00	1.954.436.549,00	94.989.658,00	95,36	
7.01.7.01.0.00.0.00.15.05.2.01.03.	PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	130.630.097,00	84.722.926,00	45.907.171,00	64,85	
7.01.7.01.0.00.0.00.15.05.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	130.630.097,00	84.722.926,00	45.907.171,00	64,85	
7.01.7.01.0.00.0.00.15.05.2.01.07.	PELAKSANAAN SEMUA URUSAN PEMERINTAHAN YANG BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH DAN TIDAK DILAKSANAKAN OLEH INSTANSI VERTIKAL	1.713.206.110,00	1.664.123.623,00	49.082.487,00	97,13	
7.01.7.01.0.00.0.00.15.05.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.713.206.110,00	1.664.123.623,00	49.082.487,00	97,13	
7.01.7.01.0.00.0.00.15.05.2.01.08.	PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	205.600.000,00	205.600.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.15.05.2.01.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	205.600.000,00	205.600.000,00	-	100,00	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(14.079.826.076,00)	(13.198.541.431,00)	(880.484.645,00)	93,74	
	JUMLAH BELANJA	14.079.826.076,00	13.198.541.431,00	880.484.645,00	93,74	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(14.079.826.076,00)	(13.198.541.431,00)	(880.484.645,00)	93,74	

SIPKD

Lampiran 1.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : **7.01.0.00.0.00.16. - Kecamatan Rumbai Timur**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.07.01.0.00.0.00.16.00.00.5.	BELANJA DAERAH	10.339.703.181,00	9.353.041.315,00	1.186.861.786,00	88,74	
7.01.0.07.01.0.00.0.00.16.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	10.316.321.491,00	9.130.458.315,00	1.185.863.086,00	88,50	
7.01.0.07.01.0.00.0.00.16.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	1.670.365.995,00	1.581.172.033,00	88.193.872,00	94,60	
3.00.7.01.0.00.0.00.16.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.403.268.691,00	6.362.099.292,00	1.041.169.399,00	85,93	
3.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	9.655.314,00	9.655.314,00	-	100,00	
3.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4.908.014,00	4.908.014,00	-	100,00	
3.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.908.014,00	4.908.014,00	-	100,00	
3.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	4.147.300,00	4.147.300,00	-	100,00	
3.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.147.300,00	4.147.300,00	-	100,00	
3.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.494.272.882,00	4.276.460.448,00	217.812.434,00	95,15	
3.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.489.084.842,00	4.271.872.408,00	217.812.434,00	95,14	
3.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.489.084.842,00	4.271.872.408,00	217.812.434,00	95,14	
3.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN TRIWULANAN SEMESTERAN SKPD	4.588.040,00	4.588.040,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.588.040,00	4.588.040,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	7.866.000,00	3.367.000,00	4.499.000,00	42,81	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.866.000,00	3.367.000,00	4.499.000,00	42,81	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.866.000,00	3.367.000,00	4.499.000,00	42,81	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.263.856.427,00	878.419.362,00	385.437.065,00	69,50	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	29.736.300,00	25.674.063,00	4.062.237,00	86,33	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.736.300,00	25.674.063,00	4.062.237,00	86,33	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	1.093.909.300,00	782.585.800,00	311.323.500,00	71,54	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.093.909.300,00	782.585.800,00	311.323.500,00	71,54	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	101.030.827,00	55.109.499,00	45.921.328,00	54,54	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	101.030.827,00	55.109.499,00	45.921.328,00	54,54	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	24.000.000,00	8.400.000,00	15.600.000,00	35,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	8.400.000,00	15.600.000,00	35,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	15.180.000,00	6.650.000,00	8.530.000,00	43,80	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.180.000,00	6.650.000,00	8.530.000,00	43,80	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	225.381.790,00	225.183.090,00	198.700,00	99,91	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	40.541.590,00	40.420.090,00	121.500,00	99,70	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.07.05.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.541.590,00	40.420.090,00	121.500,00	99,70	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	184.840.200,00	184.763.000,00	77.200,00	99,95	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.07.06.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.07.06.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	182.840.200,00	182.763.000,00	77.200,00	99,95	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	944.733.313,00	590.370.468,00	354.362.855,00	62,49	

SKPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	258.632.738,00	73.670.999,00	184.961.739,00	28,48	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	258.632.738,00	73.670.999,00	184.961.739,00	28,48	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	216.836.156,00	73.522.481,00	143.313.675,00	33,90	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.08.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	216.836.156,00	73.522.481,00	143.313.675,00	33,90	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	469.232.429,00	443.176.988,00	26.055.441,00	94,44	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	469.232.429,00	443.176.988,00	26.055.441,00	94,44	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	450.933.045,00	370.243.700,00	79.689.345,00	82,13	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	143.554.000,00	66.029.300,00	77.524.700,00	45,99	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	143.554.000,00	66.029.300,00	77.524.700,00	45,99	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	15.486.000,00	13.586.400,00	1.821.600,00	88,17	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.09.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.486.000,00	13.586.400,00	1.821.600,00	88,17	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.09.11.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	299.971.645,00	299.628.800,00	343.045,00	99,88	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.09.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	299.971.645,00	299.628.800,00	343.045,00	99,88	
7.01.7.01.0.00.0.00.16.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.578.907.550,00	1.548.484.950,00	30.422.600,00	97,55	
7.01.7.01.0.00.0.00.16.03.2.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	65.472.550,00	65.472.550,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.16.03.2.02.01.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	65.472.550,00	65.472.550,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.16.03.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	65.472.550,00	65.472.550,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.16.03.2.03.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	1.513.435.000,00	1.475.012.400,00	38.422.600,00	97,46	
7.01.7.01.0.00.0.00.16.03.2.03.02.	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN	1.513.435.000,00	1.475.012.400,00	38.422.600,00	97,46	
7.01.7.01.0.00.0.00.16.03.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.513.435.000,00	1.475.012.400,00	38.422.600,00	97,46	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.16.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	110.542.655,00	93.068.040,00	17.474.615,00	84,19	
7.01.7.01.0.00.0.00.16.04.2.01.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	110.542.655,00	93.068.040,00	17.474.615,00	84,19	
7.01.7.01.0.00.0.00.16.04.2.01.01.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	110.542.655,00	93.068.040,00	17.474.615,00	84,19	
7.01.7.01.0.00.0.00.16.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	110.542.655,00	93.068.040,00	17.474.615,00	84,19	
7.01.7.01.0.00.0.00.16.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.446.984.205,00	1.357.989.033,00	88.995.172,00	93,84	
7.01.7.01.0.00.0.00.16.05.2.01.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	1.446.984.205,00	1.357.989.033,00	88.995.172,00	93,84	
7.01.7.01.0.00.0.00.16.05.2.01.03.	PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	51.427.900,00	-	51.427.900,00	-	
7.01.7.01.0.00.0.00.16.05.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	51.427.900,00	-	51.427.900,00	-	
7.01.7.01.0.00.0.00.16.05.2.01.07.	PELAKSANAAN SEMUA URUSAN PEMERINTAHAN YANG BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH DAN TIDAK DILAKSANAKAN OLEH INSTANSI VERTIKAL	1.278.556.305,00	1.240.989.033,00	37.567.272,00	97,06	
7.01.7.01.0.00.0.00.16.05.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.278.556.305,00	1.240.989.033,00	37.567.272,00	97,06	
7.01.7.01.0.00.0.00.16.05.2.01.08.	PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	117.000.000,00	117.000.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.16.05.2.01.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	117.000.000,00	117.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(10.539.783.101,00)	(9.353.641.315,00)	(1.186.861.786,00)	88,74	
	JUMLAH BELANJA	10.539.783.101,00	9.353.641.315,00	1.186.861.786,00	88,74	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(10.539.783.101,00)	(9.353.641.315,00)	(1.186.861.786,00)	88,74	

SILPA 0

Lampiran 1.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : **7.01.0.00.0.00.17. - Kecamatan Rumbai Barat**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.07.01.0.00.0.00.17.06.00.5.	BELANJA DAERAH	11.036.735.684,00	10.646.692.581,00	390.043.103,00	96,46	
7.01.0.07.01.0.00.0.00.17.06.00.5.1	BELANJA OPERASI	11.027.249.884,00	10.637.313.581,00	389.936.303,00	96,46	
7.01.0.07.01.0.00.0.00.17.06.00.5.2.	BELANJA MODAL	1.660.042.034,00	1.658.270.224,00	1.771.860,00	99,53	
0.00.7.01.0.00.0.00.17.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.865.772.258,00	7.496.736.457,00	369.035.802,00	95,30	
0.00.7.01.0.00.0.00.17.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	9.632.300,00	9.632.300,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.17.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	3.255.100,00	3.255.100,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.17.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.255.100,00	3.255.100,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.17.01.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	3.188.600,00	3.188.600,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.17.01.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.188.600,00	3.188.600,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.17.01.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.188.600,00	3.188.600,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.17.01.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.188.600,00	3.188.600,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.17.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.200.572.146,00	4.954.183.985,00	252.386.151,00	95,15	
0.00.7.01.0.00.0.00.17.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.201.305.446,00	4.948.923.295,00	252.386.151,00	95,14	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.06.7.01.0.00.0.00.17.01.2.82.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	5.201.306.440,00	4.948.920.289,00	252.386.151,00	95,14	
0.06.7.01.0.00.0.00.17.01.2.82.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	5.263.700,00	5.263.700,00	-	100,00	
0.06.7.01.0.00.0.00.17.01.2.82.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.263.700,00	5.263.700,00	-	100,00	
0.06.7.01.0.00.0.00.17.01.2.85.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	72.396.000,00	65.587.995,00	6.808.005,00	90,59	
0.06.7.01.0.00.0.00.17.01.2.85.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	72.396.000,00	65.587.995,00	6.808.005,00	90,59	
0.06.7.01.0.00.0.00.17.01.2.85.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	72.396.000,00	65.587.995,00	6.808.005,00	90,59	
0.06.7.01.0.00.0.00.17.01.2.86.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	985.685.964,00	956.218.653,00	27.467.311,00	97,20	
0.06.7.01.0.00.0.00.17.01.2.86.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	79.688.900,00	79.671.800,00	17.100,00	99,97	
0.06.7.01.0.00.0.00.17.01.2.86.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	79.688.900,00	79.671.800,00	17.100,00	99,97	
0.06.7.01.0.00.0.00.17.01.2.86.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	671.751.250,00	670.559.542,00	1.191.708,00	99,82	
0.06.7.01.0.00.0.00.17.01.2.86.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	671.751.250,00	670.559.542,00	1.191.708,00	99,82	
0.06.7.01.0.00.0.00.17.01.2.86.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	103.319.814,00	102.897.064,00	422.750,00	99,59	
0.06.7.01.0.00.0.00.17.01.2.86.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	103.319.814,00	102.897.064,00	422.750,00	99,59	
0.06.7.01.0.00.0.00.17.01.2.86.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	24.000.000,00	16.000.000,00	8.000.000,00	66,66	
0.06.7.01.0.00.0.00.17.01.2.86.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	16.000.000,00	8.000.000,00	66,66	
0.06.7.01.0.00.0.00.17.01.2.86.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	104.926.000,00	87.090.247,00	17.835.753,00	83,00	
0.06.7.01.0.00.0.00.17.01.2.86.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	104.926.000,00	87.090.247,00	17.835.753,00	83,00	
0.06.7.01.0.00.0.00.17.01.2.87.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	9.490.800,00	9.379.000,00	111.800,00	98,82	
0.06.7.01.0.00.0.00.17.01.2.87.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	9.490.800,00	9.379.000,00	111.800,00	98,82	
0.06.7.01.0.00.0.00.17.01.2.87.06.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.490.800,00	9.379.000,00	111.800,00	98,82	
0.06.7.01.0.00.0.00.17.01.2.88.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	898.980.616,00	860.235.121,00	38.745.495,00	95,69	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.7.01.0.00.0.00.17.01.2.88.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	213.756.000,00	198.477.817,00	15.278.183,00	92,85	
0.00.7.01.0.00.0.00.17.01.2.88.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	213.756.000,00	198.477.817,00	15.278.183,00	92,85	
0.00.7.01.0.00.0.00.17.01.2.88.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	180.480.372,00	180.463.060,00	17.312,00	99,99	
0.00.7.01.0.00.0.00.17.01.2.88.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	180.480.372,00	180.463.060,00	17.312,00	99,99	
0.00.7.01.0.00.0.00.17.01.2.88.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	504.744.244,00	481.294.244,00	23.450.000,00	95,35	
0.00.7.01.0.00.0.00.17.01.2.88.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	504.744.244,00	481.294.244,00	23.450.000,00	95,35	
0.00.7.01.0.00.0.00.17.01.2.89.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	685.016.439,00	641.498.398,00	43.517.640,00	93,64	
0.00.7.01.0.00.0.00.17.01.2.89.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	44.034.106,00	34.931.706,00	9.102.400,00	79,32	
0.00.7.01.0.00.0.00.17.01.2.89.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	44.034.106,00	34.931.706,00	9.102.400,00	79,32	
0.00.7.01.0.00.0.00.17.01.2.89.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	75.678.703,00	68.788.703,00	6.890.000,00	90,89	
0.00.7.01.0.00.0.00.17.01.2.89.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	75.678.703,00	68.788.703,00	6.890.000,00	90,89	
0.00.7.01.0.00.0.00.17.01.2.89.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	45.084.606,00	38.708.990,00	6.375.616,00	85,85	
0.00.7.01.0.00.0.00.17.01.2.89.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.084.606,00	38.708.990,00	6.375.616,00	85,85	
0.00.7.01.0.00.0.00.17.01.2.89.05.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	400.227.036,00	397.678.000,00	2.549.036,00	99,36	
0.00.7.01.0.00.0.00.17.01.2.89.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	400.227.036,00	397.678.000,00	2.549.036,00	99,36	
0.00.7.01.0.00.0.00.17.01.2.89.11.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	120.000.000,00	101.400.000,00	18.600.000,00	84,50	
0.00.7.01.0.00.0.00.17.01.2.89.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	101.400.000,00	18.600.000,00	84,50	
7.01.7.01.0.00.0.00.17.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.401.523.401,00	1.401.064.900,00	458.501,00	99,96	
7.01.7.01.0.00.0.00.17.03.2.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	45.804.300,00	45.804.300,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.17.03.2.02.01.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	45.804.300,00	45.804.300,00	-	100,00	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.17.03.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.604.300,00	45.604.300,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.17.03.2.03.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	1.355.719.101,00	1.355.260.600,00	458.501,00	99,96	
7.01.7.01.0.00.0.00.17.03.2.03.02.	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN	1.355.719.101,00	1.355.260.600,00	458.501,00	99,96	
7.01.7.01.0.00.0.00.17.03.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.355.719.101,00	1.355.260.600,00	458.501,00	99,96	
7.01.7.01.0.00.0.00.17.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	112.888.800,00	100.000.000,00	12.888.800,00	88,58	
7.01.7.01.0.00.0.00.17.04.2.01.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	112.888.800,00	100.000.000,00	12.888.800,00	88,58	
7.01.7.01.0.00.0.00.17.04.2.01.01.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	112.888.800,00	100.000.000,00	12.888.800,00	88,58	
7.01.7.01.0.00.0.00.17.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	112.888.800,00	100.000.000,00	12.888.800,00	88,58	
7.01.7.01.0.00.0.00.17.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.656.551.224,00	1.648.891.224,00	7.660.000,00	99,53	
7.01.7.01.0.00.0.00.17.05.2.01.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	1.656.551.224,00	1.648.891.224,00	7.660.000,00	99,53	
7.01.7.01.0.00.0.00.17.05.2.01.03.	PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	52.427.900,00	49.567.900,00	2.860.000,00	94,54	
7.01.7.01.0.00.0.00.17.05.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	52.427.900,00	49.567.900,00	2.860.000,00	94,54	
7.01.7.01.0.00.0.00.17.05.2.01.07.	PELAKSANAAN SEMUA URUSAN PEMERINTAHAN YANG BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH DAN TIDAK DILAKSANAKAN OLEH INSTANSI VERTIKAL	1.398.023.324,00	1.398.023.324,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.17.05.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.398.023.324,00	1.398.023.324,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.17.05.2.01.08.	PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	206.100.000,00	201.300.000,00	4.800.000,00	97,67	
7.01.7.01.0.00.0.00.17.05.2.01.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	206.100.000,00	201.300.000,00	4.800.000,00	97,67	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(11.036.735.684,00)	(10.646.692.581,00)	(390.043.103,00)	96,46	
	JUMLAH BELANJA	11.036.735.684,00	10.646.692.581,00	390.043.103,00	96,46	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(11.036.735.684,00)	(10.646.692.581,00)	(390.043.103,00)	96,46	

SIPKD

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI : **7.01.0.00.0.00.18. - Kecamatan Kulim**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.07.01.0.00.3.00.18.00.00.5.	BELANJA DAERAH	11.416.070.067,00	10.948.813.135,00	467.256.932,00	95,90	
7.01.0.07.01.0.00.3.00.18.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	11.416.070.067,00	10.948.813.135,00	467.256.932,00	95,90	
7.01.0.07.01.0.00.3.00.18.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	1.448.396.287,00	1.447.497.769,00	898.518,00	99,93	
0.00.7.01.0.00.0.00.18.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.821.802.798,00	7.355.833.176,00	465.969.614,00	94,04	
0.00.7.01.0.00.0.00.18.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.515.500,00	3.515.500,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.18.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	3.515.500,00	3.515.500,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.18.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.515.500,00	3.515.500,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.18.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.961.743.360,00	5.667.127.606,00	294.615.754,00	95,05	
0.00.7.01.0.00.0.00.18.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.957.675.260,00	5.663.059.506,00	294.615.754,00	95,05	
0.00.7.01.0.00.0.00.18.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	5.957.675.260,00	5.663.059.506,00	294.615.754,00	95,05	
0.00.7.01.0.00.0.00.18.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	4.068.100,00	4.068.100,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.18.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.068.100,00	4.068.100,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.18.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	7.065.000,00	3.713.996,00	3.351.004,00	52,54	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.066.000,00	3.712.996,00	3.353.004,00	52,54	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.066.000,00	3.712.996,00	3.353.004,00	52,54	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	847.351.105,00	796.387.568,00	50.963.537,00	93,98	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	12.764.600,00	12.764.600,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.764.600,00	12.764.600,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	667.358.100,00	666.778.518,00	579.590,00	99,91	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	667.358.100,00	666.778.518,00	579.590,00	99,91	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	138.458.405,00	95.067.934,00	43.390.471,00	68,66	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	138.458.405,00	95.067.934,00	43.390.471,00	68,66	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.000.000,00	5.040.000,00	960.000,00	84,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.040.000,00	960.000,00	84,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	22.770.000,00	16.736.524,00	6.033.476,00	73,50	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.770.000,00	16.736.524,00	6.033.476,00	73,50	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.09.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	648.500.125,00	588.400.694,00	60.099.531,00	90,73	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	119.560.421,00	97.675.590,00	21.884.831,00	81,69	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	119.560.421,00	97.675.590,00	21.884.831,00	81,69	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.09.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	59.303.692,00	59.295.484,00	8.208,00	99,98	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.09.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	59.303.692,00	59.295.484,00	8.208,00	99,98	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.09.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	469.636.312,00	431.429.620,00	38.206.692,00	91,86	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.09.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	469.636.312,00	431.429.620,00	38.206.692,00	91,86	
0.00.7.01.0.00.0.00.16.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	353.636.650,00	296.688.813,00	56.937.788,00	83,89	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.7.01.0.00.0.00.18.01.2.99.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	9.728.000,00	7.733.612,00	1.994.388,00	79,47	
0.00.7.01.0.00.0.00.18.01.2.99.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.728.000,00	7.733.612,00	1.994.388,00	79,47	
0.00.7.01.0.00.0.00.18.01.2.99.05.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	28.957.200,00	28.957.200,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.18.01.2.99.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	28.957.200,00	28.957.200,00	-	100,00	
0.00.7.01.0.00.0.00.18.01.2.99.08.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	314.941.400,00	260.000.000,00	54.941.400,00	82,55	
0.00.7.01.0.00.0.00.18.01.2.99.08.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
0.00.7.01.0.00.0.00.18.01.2.99.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	312.941.400,00	260.000.000,00	52.941.400,00	83,08	
7.01.7.01.0.00.0.00.18.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	37.474.495,00	37.474.495,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.18.02.2.02.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	37.474.495,00	37.474.495,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.18.02.2.02.01.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	37.474.495,00	37.474.495,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.18.02.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	37.474.495,00	37.474.495,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.18.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.088.396.528,00	2.088.007.728,00	388.800,00	99,98	
7.01.7.01.0.00.0.00.18.03.2.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	49.995.528,00	49.995.528,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.18.03.2.02.01.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	49.995.528,00	49.995.528,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.18.03.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	49.995.528,00	49.995.528,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.18.03.2.03.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	1.938.400.000,00	1.938.011.200,00	388.800,00	99,98	
7.01.7.01.0.00.0.00.18.03.2.03.02.	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN	1.938.400.000,00	1.938.011.200,00	388.800,00	99,98	
7.01.7.01.0.00.0.00.18.03.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.938.400.000,00	1.938.011.200,00	388.800,00	99,98	
7.01.7.01.0.00.0.00.18.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	99.999.967,00	99.999.967,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.18.04.2.01.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	99.999.967,00	99.999.967,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.00.0.00.18.04.2.01.01.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	99.399.567,00	99.399.567,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.18.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	99.399.567,00	99.399.567,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.18.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.448.396.287,00	1.447.497.769,00	898.518,00	99,93	
7.01.7.01.0.00.0.00.18.05.2.01.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	1.448.396.287,00	1.447.497.769,00	898.518,00	99,93	
7.01.7.01.0.00.0.00.18.05.2.01.03.	PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	53.177.800,00	53.177.800,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.18.05.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	53.177.800,00	53.177.800,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.18.05.2.01.07.	PELAKSANAAN SEMUA URUSAN PEMERINTAHAN YANG BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH DAN TIDAK DILAKSANAKAN OLEH INSTANSI VERTIKAL	1.305.218.287,00	1.304.319.869,00	898.518,00	99,93	
7.01.7.01.0.00.0.00.18.05.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.305.218.287,00	1.304.319.869,00	898.518,00	99,93	
7.01.7.01.0.00.0.00.18.05.2.01.08.	PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	90.600.000,00	90.600.000,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.00.0.00.18.05.2.01.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	90.600.000,00	90.600.000,00	-	100,00	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(11.416.670.067,00)	(10.948.813.135,00)	(467.256.932,00)	95,90	
	JUMLAH BELANJA	11.416.670.067,00	10.948.813.135,00	467.256.932,00	95,90	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(11.416.670.067,00)	(10.948.813.135,00)	(467.256.932,00)	95,90	

SIPKD

Lampiran 1.3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PENERINTAHAN :

ORGANISASI : **8.01.0.00.0.00.01. - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
8.01.0.00.0.00.0.00.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	49.615.262.345,00	48.007.504.118,00	1.607.759.227,00	96,76	
8.01.0.00.0.00.0.00.01.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	49.353.748.645,00	47.750.914.118,00	1.602.834.527,00	96,75	
8.01.0.00.0.00.0.00.01.00.00.5.2.	BELANJA MODAL	1.656.749.368,00	833.466.794,00	253.342.474,00	76,62	
8.01.0.01.0.00.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.468.450.188,00	6.927.292.706,00	541.157.482,00	92,75	
8.01.0.01.0.00.0.00.01.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	19.510.400,00	19.510.400,00	-	100,00	
8.01.0.01.0.00.0.00.01.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	7.845.300,00	7.845.300,00	-	100,00	
8.01.0.01.0.00.0.00.01.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.845.300,00	7.845.300,00	-	100,00	
8.01.0.01.0.00.0.00.01.01.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	5.893.000,00	5.893.000,00	-	100,00	
8.01.0.01.0.00.0.00.01.01.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.893.000,00	5.893.000,00	-	100,00	
8.01.0.01.0.00.0.00.01.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.772.100,00	5.772.100,00	-	100,00	
8.01.0.01.0.00.0.00.01.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.772.100,00	5.772.100,00	-	100,00	
8.01.0.01.0.00.0.00.01.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.691.847.914,00	4.493.551.994,00	198.295.920,00	95,77	
8.01.0.01.0.00.0.00.01.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.677.017.314,00	4.478.721.394,00	198.295.920,00	95,76	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.677.017.314,00	4.478.721.384,00	198.295.930,00	95,76	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.02.65.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	8.249.800,00	8.249.800,00	-	100,00	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.02.65.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.249.800,00	8.249.800,00	-	100,00	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.02.67.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	6.380.800,00	6.380.800,00	-	100,00	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.02.67.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.380.800,00	6.380.800,00	-	100,00	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	6.997.860,00	6.997.860,00	-	100,00	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.03.01.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	3.498.900,00	3.498.900,00	-	100,00	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.498.900,00	3.498.900,00	-	100,00	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.03.05.	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	3.498.960,00	3.498.960,00	-	100,00	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.03.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.498.960,00	3.498.960,00	-	100,00	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	23.132.000,00	4.140.800,00	18.991.200,00	17,90	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	23.132.000,00	4.140.800,00	18.991.200,00	17,90	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.132.000,00	4.140.800,00	18.991.200,00	17,90	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.407.734.715,00	1.225.995.247,00	181.739.468,00	87,08	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	7.665.500,00	7.665.500,00	-	100,00	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.665.500,00	7.665.500,00	-	100,00	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	265.458.400,00	263.278.800,00	2.179.600,00	99,17	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	265.458.400,00	263.278.800,00	2.179.600,00	99,17	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	651.039.655,00	566.039.655,00	85.000.000,00	86,94	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	651.039.655,00	566.039.655,00	85.000.000,00	86,94	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	10.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	60,00	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	60,00	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	468.857.760,00	378.297.892,00	90.559.868,00	80,68	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	468.857.760,00	378.297.892,00	90.559.868,00	80,68	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.06.10.	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	4.733.400,00	4.733.400,00	-	100,00	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.06.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.733.400,00	4.733.400,00	-	100,00	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	183.514.706,00	178.790.000,00	4.724.706,00	97,42	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	183.514.706,00	178.790.000,00	4.724.706,00	97,43	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.07.06.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.07.06.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	181.514.706,00	176.790.000,00	4.724.706,00	97,39	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	764.850.200,00	719.615.905,00	45.234.295,00	94,08	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	208.880.000,00	203.110.705,00	5.769.295,00	97,23	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	208.880.000,00	203.110.705,00	5.769.295,00	97,23	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	16.576.200,00	16.576.200,00	-	100,00	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.08.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.576.200,00	16.576.200,00	-	100,00	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	539.394.000,00	499.828.000,00	39.465.000,00	92,68	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	539.394.000,00	499.828.000,00	39.465.000,00	92,68	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	371.062.400,00	278.890.500,00	92.171.900,00	75,16	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	371.062.400,00	278.890.500,00	92.171.900,00	75,16	
0.00.0.01.0.00.0.00.01.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	371.062.400,00	278.890.500,00	92.171.900,00	75,16	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.01.02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.578.312.116,00	2.340.136.364,00	238.175.752,00	90,76	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.01.02.2.01.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PENGATAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.578.312.116,00	2.340.136.364,00	238.175.752,00	90,76	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.01.0.01.0.00.0.00.01.02.2.01.03.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	2.062.894.160,00	1.990.268.560,00	72.625.600,00	96,47	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.02.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.062.894.160,00	1.990.268.560,00	72.625.600,00	96,47	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.02.2.01.04.	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	484.641.551,00	348.322.404,00	136.319.147,00	71,87	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.02.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	384.641.551,00	348.322.404,00	136.319.147,00	52,10	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.02.2.01.04.5.1.05.	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.02.2.01.05.	PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	30.776.405,00	1.545.400,00	29.231.005,00	5,02	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.02.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.776.405,00	1.545.400,00	29.231.005,00	5,02	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	35.713.329.536,00	35.485.366.956,00	227.962.580,00	99,36	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.03.2.01.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	35.713.329.536,00	35.485.366.956,00	227.962.580,00	99,36	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.03.2.01.03.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	34.592.869.100,00	34.584.819.100,00	8.050.000,00	99,97	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.03.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	44.892.000,00	36.842.000,00	8.050.000,00	82,06	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.03.2.01.03.5.1.05.	Belanja Hibah	34.547.977.100,00	34.547.977.100,00	-	100,00	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.01.0.01.0.00.0.00.01.03.2.01.04.	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	808.839.136,00	748.072.456,00	60.766.680,00	92,48	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.03.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	808.839.136,00	748.072.456,00	60.766.680,00	92,48	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.03.2.01.05.	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	311.621.300,00	152.475.400,00	159.145.900,00	48,92	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.03.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	311.621.300,00	152.475.400,00	159.145.900,00	48,92	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	474.386.838,00	201.492.100,00	272.894.738,00	42,47	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.04.2.01.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	474.386.838,00	201.492.100,00	272.894.738,00	42,47	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.04.2.01.01.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	219.501.692,00	99.600.000,00	119.901.692,00	45,37	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	169.502.692,00	49.800.000,00	119.702.692,00	29,38	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.04.2.01.01.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	49.800.000,00	200.000,00	99,60	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.04.2.01.04.	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	144.195.302,00	16.000.000,00	128.195.302,00	11,09	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.04.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	144.195.302,00	16.000.000,00	128.195.302,00	11,09	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.04.2.01.05.	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	110.698.844,00	85.892.100,00	24.796.744,00	77,59	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.04.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	80.698.844,00	55.892.100,00	24.796.744,00	69,26	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.01.0.01.0.00.0.00.01.04.2.01.05.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	795.234.568,00	546.816.794,00	248.417.774,00	68,76	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.05.2.01.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	795.234.568,00	546.816.794,00	248.417.774,00	68,76	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.05.2.01.03.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	461.210.916,00	400.000.000,00	61.210.916,00	86,72	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.05.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	61.210.916,00	-	61.210.916,00	-	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.05.2.01.03.5.1.05.	Belanja Hibah	400.000.000,00	400.000.000,00	-	100,00	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.05.2.01.04.	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	185.090.864,00	-	185.090.864,00	-	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.05.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	185.090.864,00	-	185.090.864,00	-	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.05.2.01.05.	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	168.933.588,00	146.816.794,00	22.116.794,00	86,90	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.05.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	168.933.588,00	146.816.794,00	22.116.794,00	86,90	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.585.550.098,00	2.586.399.198,00	79.150.900,00	96,93	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.06.2.01.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL, DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.585.550.098,00	2.586.399.198,00	79.150.900,00	96,93	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.06.2.01.03.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	454.527.600,00	433.642.600,00	20.885.000,00	95,40	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.06.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	454.527.600,00	433.642.600,00	20.885.000,00	95,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.01.0.01.0.00.0.00.01.05.2.01.04.	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	91.231.302,00	91.231.302,00	-	100,00	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.05.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	91.231.302,00	91.231.302,00	-	100,00	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.05.2.01.05.	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	98.195.500,00	97.560.000,00	635.500,00	99,35	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.05.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	98.195.500,00	97.560.000,00	635.500,00	99,35	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.05.2.01.06.	PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.941.595.696,00	1.883.965.296,00	57.630.400,00	97,03	
0.01.0.01.0.00.0.00.01.05.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.941.595.696,00	1.883.965.296,00	57.630.400,00	97,03	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(49.615.263.345,00)	(48.007.504.118,00)	(1.607.759.227,00)	96,75	
	JUMLAH BELANJA	49.615.263.345,00	48.007.504.118,00	1.607.759.227,00	96,75	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(49.615.263.345,00)	(48.007.504.118,00)	(1.607.759.227,00)	96,75	

Pj. WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

RISNANDAR MAHIWA

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

INDRA POMI NASUTION

S.I.P.K.D

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 NOMOR 3
No.REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU,
NOMOR URUT PERDA (1.36.A/2024)

LAMPIRAN I.4

Lampiran I.4 : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Nomor : 3 TAHUN 2024

Tanggal : 27 AGUSTUS 2024

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.651.008.980.612,00	2.525.739.863.882,00	577.225.506.898,00	557.923.414.517,76	-	-	-	-
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	618.068.940.820,00	593.158.306.744,42	85.116.921.828,00	83.744.348.226,34	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.	Dinas Pendidikan	618.068.940.820,00	593.158.306.744,42	85.116.921.828,00	83.744.348.226,34	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	416.515.500.537,00	406.815.460.366,00	303.536.150,00	301.268.000,00	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.01.2.01.	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat*	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.01.2.01.01.	*Daerah Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah*	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.01.2.01.06.	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar*	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.01.2.01.07.	*Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.01.2.02.	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	405.046.403.369,00	395.304.989.980,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.01.2.02.01.	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	405.027.763.049,00	395.286.269.340,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.01.2.02.05.	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun*	18.720.320,00	18.720.320,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.01.2.02.07.	*SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/*	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.01.2.08.	*Triwulanan/ Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	12.080.000,00	10.134.549,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.01.2.08.09.	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.01.2.05.10.	*Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.01.2.05.11.	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	12.080.000,00	10.134.549,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.01.2.06.	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	19.763.800,00	19.759.400,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.01.2.06.	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	566.133.120,00	470.564.335,80	86.052.200,00	79.254.000,00	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.01.1.01.0.00.0.00.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	16.783.600,00	19.759.400,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.01.2.06.02.	Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	80.052.200,00	79.254.000,00	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	284.749.600,00	231.009.700,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	86.665.760,00	51.834.900,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.000.000,00	10.500.900,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177.715.760,00	177.210.535,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	35.000.000,00	34.594.000,00	223.453.950,00	222.011.000,00	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.01.2.07.05.	Daerah Pengadaan Mebel	-	-	223.453.950,00	222.011.000,00	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.01.2.07.06.	Pengadaan Aset Tak Berwujud	35.000.000,00	34.594.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.350.543.922,00	10.850.944.350,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.499.998.760,00	1.156.192.284,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.795.000,00	77.152.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.707.250.162,00	9.657.400.016,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1.310.475.325,00	1.325.184.236,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.01.2.09.01.	Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	318.939.839,00	166.649.236,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.01.2.09.02.	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	574.783.499,00	439.086.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.01.2.09.09.	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	722.752.000,00	719.449.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	175.031.704.883,00	172.760.695.364,42	84.813.415.678,00	83.443.083.226,34	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	99.582.248.968,00	99.551.460.110,64	36.831.254.511,00	36.822.426.211,64	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.02.	Pembelian Ruang Kelas Baru	-	-	2.158.721.600,00	2.068.664.645,64	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.03.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-	201.021.850,00	200.080.000,00	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.04.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-	614.377.608,00	611.443.000,00	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.05.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	-	-	1.409.499.500,00	1.398.181.000,00	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.06.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	9.018.166.000,00	8.972.384.853,50	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.07.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga	-	-	449.120.000,00	466.464.000,00	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.08.	Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	5.541.826.640,00	5.499.731.922,64	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.09.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	164.945.550,00	152.230.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.12.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas	1.712.743.857,00	1.683.059.470,00	-	-	-	-	-	-
	Sekolah								

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.14.	Pengadaan Mebel Sekolah	-	-	265.425.000,00	258.575.000,00	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.17.	Pengadaan Perlengkapan Siswa	790.535.200,00	785.697.825,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.22.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	-	-	4.807.000.000,00	4.806.060.000,00	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.23.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	224.155.000,00	220.919.900,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.25.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	734.209.100,00	533.069.785,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.27.	Pengembangan Kasir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada	1.453.624.650,00	1.318.168.141,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.29.	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	88.745.164.466,00	85.137.107.867,00	13.847.045.978,00	14.059.667.678,00	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.30.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	215.006.000,00	211.386.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.31.	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	-	-	4.263.856.975,00	4.214.045.995,00	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	58.877.781.870,00	57.148.940.065,78	47.432.736.167,00	46.084.779.784,80	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.01.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	67.200.000,00	67.200.000,00	13.662.496.000,00	13.217.300.580,16	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.02.	Penambahan Ruang Kelas Baru	33.600.000,00	33.600.000,00	11.394.860.800,00	11.038.668.675,72	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.03.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-	539.788.800,00	526.882.000,00	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.04.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-	892.000.000,00	891.309.000,00	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.06.	Pembangunan Laboratorium	-	-	4.402.852.500,00	4.293.244.535,00	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.12.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	6.228.129.100,00	5.093.795.385,92	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.14.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.172.135.720,00	3.121.924.826,78	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.24.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas	171.022.500,00	170.160.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.25.	Sekolah Pengadaan Mebel Sekolah	-	-	1.676.466.680,00	1.653.738.060,00	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.28.	Pengadaan Perlengkapan Siswa	798.102.300,00	793.405.355,60	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.35.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	-	-	125.000.000,00	124.980.000,00	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.36.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	7.495.447.047,00	6.355.318.587,00	21.874.500,00	19.180.000,00	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.38.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	388.494.914,00	385.928.450,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.40.	Pengembangan Kasir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada	330.010.796,00	324.882.900,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.42.	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	44.329.693.189,00	43.795.481.167,00	8.565.295.357,99	8.234.743.466,00	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.02.43.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah	92.044.804,00	88.938.750,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.03.	Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9.481.135.875,00	15.451.865.450,00	559.445.000,99	555.677.230,00	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.03.02.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	-	-	559.445.000,99	555.677.230,00	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.03.03.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru	227.584.000,00	226.614.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.03.12.	PAUD Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	699.947.500,00	691.083.300,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.03.13.	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	105.423.400,00	98.663.400,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.01.1.01.0.00.3.00.01.02.2.03.16.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.03.17.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	119.269.225,00	-	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.03.18.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	6.157.800.000,00	14.217.712.800,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.03.19.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	221.012.750,00	217.992.750,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.3.00.0.00.01.02.2.04.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.090.967.170,00	610.339.736,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.3.00.0.00.01.02.2.04.11.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	449.892.800,00	432.074.550,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.3.00.3.00.01.02.2.04.15.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	118.368.838,00	118.928.838,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.3.00.0.00.01.02.2.04.16.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan Nonformal/Kesetaraan	70.412.350,00	-	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.3.00.0.00.01.02.2.04.17.	Pengelolaan Dana BOP Satuan Nonformal/Kesetaraan	6.240.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.3.00.0.00.01.02.2.04.18.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Satuan Nonformal/Kesetaraan	51.992.350,00	51.336.350,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.3.00.0.00.01.02.2.04.22.	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	142.993.832,00	-	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.3.00.0.00.01.04.	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**24.479.726.400,00**	**22.382.240.800,00**	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.3.00.0.00.01.04.2.01.	Penerbitan Kualitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	24.479.726.400,00	22.382.240.800,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.3.00.0.00.01.04.2.01.01.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.3.00.0.00.01.04.2.01.02.	Pemetaan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	24.458.726.400,00	22.361.240.800,00	-	-	-	-	-	-
1.02.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**306.452.959.454,00**	**270.697.530.310,62**	**26.585.702.857,00**	**25.954.298.172,00**	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.	**Dinas Kesehatan**	**306.452.959.454,00**	**270.697.530.310,62**	**26.585.702.857,00**	**25.954.298.172,00**	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**194.688.676.872,00**	**151.365.275.061,62**	**3.584.500.150,00**	**3.207.858.065,00**	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.630.000,00	15.680.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.280.000,00	2.280.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01.07.	Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.350.000,00	14.400.000,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	151.428.183.654,00	144.726.162.709,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	151.369.395.654,00	144.716.462.709,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	21.180.000,00	19.700.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02.07.	SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	37.608.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.05.	Tiwulanan/ Sekretariat SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.000.000,00	6.745.900,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.5.00.0.00.01.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8.000.000,00	6.745.900,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	192.008.600,00	188.180.900,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.239.823.336,00	3.195.330.952,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	192.008.600,00	188.180.900,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.02.	Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.992.251.750,00	1.950.530.453,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.039.042.636,00	1.032.468.280,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	208.528.000,00	203.331.829,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.322.192.938,00	4.242.229.770,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.719.893.960,00	1.297.381.810,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.464.000,00	43.365.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.499.834.978,00	2.911.472.960,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.03.0.00.0.00.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	840.514.200,00	339.735.768,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.09.01.	Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	580.074.700,00	234.296.188,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.09.11.	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	260.439.500,00	0.499.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.10.	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peningkatan Pelayanan BLUD	33.635.323.046,00	28.639.240.232,62	3.584.500.160,00	2.207.660.085,05	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.10.01.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	33.635.323.046,00	28.639.240.232,62	3.584.500.160,00	2.207.660.085,05	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN**	**99.207.382.070,00**	**91.372.891.449,00**	**23.881.202.707,00**	**22.746.648.107,00**	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.	**PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	15.185.851.040,00	14.353.172.833,00	22.541.322.207,00	22.238.403.937,00	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.05.	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Rumah Sakit	288.000.000,00	285.954.000,00	3.090.750.000,00	3.053.788.000,00	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.06.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	716.500.000,00	711.308.000,00	3.693.750.000,00	3.657.886.000,00	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.09.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	7.181.245.262,00	7.032.559.925,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas	-	-	16.757.823.807,00	15.126.719.937,00	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.15	Pelayanan Kesehatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	2.018.210.944,00	1.792.606.204,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	4.791.889.840,00	4.295.481.804,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang	190.000.000,00	185.125.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02	Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	83.427.433.350,00	78.581.510.972,00	526.680.500,00	496.244.170,00	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.01	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	231.950.000,00	199.775.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	210.184.000,00	122.060.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	187.114.000,00	160.232.700,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	30.864.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.740.006,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	40.734.000,00	35.200.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	15.196.006,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.091.103.246,00	1.005.380.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	76.087.680,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.11	Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.525.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko	529.999.792,00	466.657.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.13	Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi	18.034.000,00	4.845.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.15	Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	841.082.154,00	352.332.250,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.860.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	350.892.688,00	350.892.688,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	746.598.588,00	254.772.100,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.20	Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	89.794.075,00	78.625.400,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah	351.374.223,00	115.445.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.23	Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	1.695.047.748,00	1.137.925.000,00	24.000.000,00	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.24.	Pengelolaan Upaya Penurunan Risiko Krisis Kesehatan dan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.25.	Pasca Krisis Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	685.778.266,00	258.080.800,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	42.265.862.786,00	41.030.410.100,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.27.	Dekon/ Dinl Pengelolaguman NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	54.772.452,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.03.0.00.0.00.01.02.2.02.29.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB	10.424.000,00	4.435.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.29.	ke Laboratorium Rujukan/Nasional Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	265.425.100,00	258.305.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.32.	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	20.393.193.000,00	20.248.143.391,00	213.350.900,00	213.350.000,00	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.33.	Operasional Pelayanan Puskesmas	10.704.410.103,00	9.277.412.973,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.34.	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	316.578.700,00	283.571.170,00	285.535.900,00	284.864.170,00	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.35.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	26.680.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.36.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan	20.552.000,00	12.710.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.37.	Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal Pelaksanaan Kemoprofilaksi Diri dan Respon Wabah	36.580.000,00	26.950.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara	265.895.924,00	226.865.244,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.03.01.	Terintegrasi Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	53.880.000,00	54.880.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.03.02.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	35.162.324,00	20.769.354,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.03.03.	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan	195.853.600,00	151.115.890,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.04.	Jaringan Internet Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas	308.121.900,00	261.342.400,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.04.01.	Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.04.02.	Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.04.03.	Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	146.933.900,00	135.942.400,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.04.04.	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan	162.188.000,00	125.400.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.	Rujukan **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA**	**1.481.318.800,00**	**1.127.537.500,00**	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.01.	**MANUSIA KESEHATAN** Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah	27.212.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.01.01.	Kabupaten/Kota Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	27.212.000,00	-	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02.1.02.1.00.0.00.01.03.2.01.02.	Pendidikan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.2.00.0.00.01.03.2.02.	Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya	150.881.406,00	50.182.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.2.00.0.00.01.03.2.02.01.	Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya	17.920.406,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.2.00.0.00.01.03.2.02.02.	Manusia Kesehatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai	75.679.000,00	29.912.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.5.00.0.00.01.03.2.02.03.	Standar Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	57.282.000,00	20.270.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.5.00.0.00.01.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	1.303.245.406,00	1.077.355.900,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.5.00.5.00.01.03.2.03.01.	Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	1.303.245.406,00	1.077.355.900,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.	Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN**	**692.333.794,00**	**538.956.300,00**	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.07.	**MAKANAN MINUMAN** Pembelian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan	88.147.952,00	48.547.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.01.01.	Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	88.147.952,00	48.547.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.06.	Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market	606.185.752,00	490.408.800,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.06.01.	pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman	606.185.752,00	490.408.800,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.	Industri Rumah Tangga yang Berdar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG**	**4.383.320.000,00**	**4.282.870.000,00**	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.01.	**KESEHATAN** Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta	4.114.080.000,00	4.093.170.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.5.00.01.05.2.01.01.	Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4.114.080.000,00	4.093.170.000,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02.1.02.0.00.1.00.01.05.2.02	*Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat*	79.544.000,00	25.550.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.3.00.0.00.01.05.2.02.01.	*Daerah Kabupaten/Kota* *Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih*	79.544.000,00	25.550.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.3.00.0.00.01.05.2.03	*dan Sehat* *Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber*	165.704.000,00	164.150.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.3.00.3.00.01.05.2.03.01.	*Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* *Berdasarkan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan*	165.704.000,00	164.150.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03.	*Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat* *(UKBM)* **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM**	281.112.083.350,00	263.977.895.198,00	51.427.481.454,00	49.199.788.866,45	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.	**DAN PENATAAN RUANG** **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	281.112.083.350,00	263.977.895.198,00	51.427.481.454,00	49.199.788.866,45	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	17.143.971.941,00	15.415.838.591,00	8.434.838.990,00	8.472.057.606,00	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.3.00.01.01.2.01	**DAERAH KABUPATEN/KOTA** *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat*	150.435.375,00	90.212.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.3.00.01.01.2.01.01.	*Daerah* *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	44.378.700,00	22.409.300,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.3.00.01.01.2.01.02.	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	21.662.100,00	21.586.300,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.3.00.01.01.2.01.03.	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	15.594.400,00	-	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.3.00.01.01.2.01.04.	*Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD*	34.931.200,00	34.797.900,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.3.00.01.01.2.01.05.	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD*	16.349.075,00	-	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.3.00.01.01.2.01.06.	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar*	17.400.900,00	17.421.900,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.02.	*Realisasi Kinerja SKPD* *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	10.042.515.696,00	9.115.435.460,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.02.01.	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	9.997.920.946,00	9.073.106.960,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.02.05.	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun*	14.980.350,00	14.953.500,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.02.07.	*SKPD* *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/*	9.275.400,00	7.200.400,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.02.08.	*Triwulanan/ Semesteran SKPD* *Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi*	20.338.000,00	20.275.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.03.	*Anggaran* *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	15.258.100,00	15.258.100,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.03.01.	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	15.258.100,00	15.258.100,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.03.02.	*Koordinasi dan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD*	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.05.	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	525.305.880,00	455.431.289,00	5.750.000,00	5.750.000,00	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.05.01.	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	16.589.760,00	16.383.000,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.06.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	88.745.000,00	88.713.900,00	5.750.000,00	5.750.000,00	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.06.11.	Belanjan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	413.991.180,00	351.335.380,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.423.175,00	26.350.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.134.122.060,00	1.788.136.381,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.423.175,00	26.350.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	266.400.000,00	264.450.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	689.760.900,00	686.139.500,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	67.683.640,00	67.683.600,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.788.000,00	7.920.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.066.866.835,00	788.943.281,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.525.000,00	9.525.000,00	7.983.415.710,00	7.973.550.000,00	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.07.03.	Pengadaan Alat Besar	-	-	6.778.700.000,00	6.778.350.000,00	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.07.05.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.525.000,00	9.525.000,00	1.204.715.710,00	1.195.200.000,00	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.07.06.	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.271.444.203,00	3.262.248.444,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.260.491,00	15.115.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.551.047.445,00	2.447.475.203,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	179.494.800,00	177.142.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	825.651.504,00	752.516.241,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	668.942.450,00	518.491.207,00	505.472.280,00	492.757.000,00	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.09.01.	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	372.112.848,00	315.654.850,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.09.02.	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	268.066.442,00	173.646.357,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.09.11.	Perawan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.764.160,00	26.990.000,00	505.472.280,00	492.757.000,00	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.03.	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**21.354.336.855,00**	**16.412.675.920,00**	**837.152.450,00**	**834.719.400,00**	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.02.2.01.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.354.336.855,00	16.412.675.920,00	837.152.450,00	834.719.400,00	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.02.2.01.01.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	416.058.100,00	297.271.400,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.03.1.03.0.00.0.00.01.02.2.01.06.	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	105.917.200,00	-	5.950,00	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.02.2.01.09.	Pembangunan Tanggul Sungai	125.931.400,00	115.803.700,00	751.504.500,00	700.719.400,00	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.02.2.01.10.	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.02.2.01.24.	Rehabilitasi Tanggul Sungai	78.387.300,00	-	3.600,00	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.02.2.01.45.	Normalisasi/Revitalisasi Sungai	13.481.936.995,00	9.995.000.800,00	85.048.400,00	84.000.000,00	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.02.2.01.85.	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	7.146.106.360,00	6.003.912.020,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.03.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**17.168.805.900,00**	**17.114.099.900,00**	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.03.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	17.168.805.900,00	17.114.099.900,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.03.2.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1.157.121.700,00	1.140.353.700,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.03.2.01.07.	Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	15.011.684.200,00	15.973.746.200,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.05.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**1.682.867.174,00**	**1.275.000.879,00**	**5.015.414.400,00**	**3.266.197.415,00**	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.05.2.03.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.682.867.174,00	1.275.000.879,00	5.015.414.400,00	3.266.197.415,00	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.05.2.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem	502.125.500,00	497.225.900,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.05.2.01.02.	Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan/Perluasan	249.389.400,00	186.338.900,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.05.2.01.03.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	271.807.200,00	169.845.700,00	4.200.000.300,00	2.526.867.415,00	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.05.2.01.10.	Terpusat Skala Kota Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	659.566.074,00	441.590.779,00	190.414.400,00	54.280.000,00	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.05.2.01.13.	Domestik Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	-	-	625.000.000,00	625.000.000,00	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.06.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**956.192.700,00**	**956.344.850,00**	**3.923.500.000,00**	**3.919.863.100,00**	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.06.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	956.192.700,00	956.344.850,00	3.923.500.000,00	3.919.863.100,00	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.06.2.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem	642.456.300,00	638.914.550,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.06.2.01.05.	Drainase Perkotaan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	313.736.400,00	312.430.300,00	3.923.500.000,00	3.919.863.100,00	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.06.2.01.12.	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.09.	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**148.249.052.167,00**	**141.516.645.658,00**	**39.066.226.950,00**	**25.464.483.278,43**	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.03.1.03.1.00.3.00.01.08.2.01	*Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah*	148.240.082.107,00	141.510.645.458,00	26.055.226.950,00	25.684.483.278,43	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.3.00.01.08.2.01.01.	Kabupaten/Kota, *Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung* *Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)*	1.085.994.800,00	1.012.594.800,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.08.2.01.02.	*Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG* *Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan*	3.991.841.200,00	3.813.225.826,00	11.031.806.000,00	10.836.946.328,43	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.08.2.01.12.	*Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota* *Rehabilitasi, Renovasi dan Obehosai Bangunan Gedung untuk*	135.524.975.460,00	130.897.084.897,00	15.023.390.950,00	14.825.536.950,00	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.08.2.01.13.	*Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota* *Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah*	7.664.260.647,00	5.787.740.835,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.10.	*Kabupaten/Kota* **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**72.587.902.748,00**	**69.980.403.345,00**	**7.101.538.664,00**	**7.101.538.663,02**	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.10.2.01.	*Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota*	72.587.902.748,00	69.980.403.345,00	7.101.538.664,00	7.101.538.663,02	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.10.2.01.01.	*Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan*	1.499.858.100,00	1.280.447.700,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.10.2.01.04.	*Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan* *Survey Kondisi Jalan/Jembatan*	1.155.388.100,00	1.063.788.500,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.10.2.01.07.	*Pelebaran Jalan Menambah Lajur*	19.340.664.910,00	18.912.315.770,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.10.2.01.10.	*Pemeliharaan Berkala Jalan*	25.602.355.500,00	23.345.256.215,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.10.2.01.11.	*Pemeliharaan Rutin Jalan*	22.631.602.138,00	21.326.031.160,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.10.2.01.19.	*Pemeliharaan Rutin Jembatan*	2.148.024.000,00	2.052.484.000,00	7.101.538.664,00	7.101.538.663,02	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.11.	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**1.008.902.005,00**	**538.831.455,00**	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.11.2.01.	*Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi*	341.962.680,00	196.923.830,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.11.2.01.03.	*Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi*	84.944.850,00	81.585.200,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.11.2.01.04.	*Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi*	157.020.700,00	56.388.700,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.11.2.01.06.	*Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi*	99.997.130,00	60.949.930,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.11.2.02.	*Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan*	280.585.375,00	54.459.575,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.11.2.02.01.	*Daerah Kabupaten/Kota* *Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi*	99.980.225,00	25.980.225,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.11.2.02.02.	*Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa*	180.605.150,00	28.609.350,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.11.2.04.	*Konstruksi* *Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib*	437.102.950,00	285.238.050,30	-	-	-	-	-	-
	Pemanfaatan Jasa Konstruksi								

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.03.1.03.3.00.0.00.01.11.2.04.01.	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib	74.624.900,00	50.767.800,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.3.00.0.00.01.11.2.04.02.	Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi/ Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan,	282.280.150,00	226.355.150,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.3.00.0.00.01.11.2.04.03.	dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi/ Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan,	75.997.900,00	8.121.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.3.00.0.00.01.12.	dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi/ **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**968.991.920,00**	**788.854.300,00**	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.12.2.01.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana	749.995.125,00	677.254.300,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.12.2.01.01.	Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota/ Pelaksanaan Penetapan Substansi, Evaluasi, Konsultasi	330.991.806,00	323.730.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.12.2.01.02.	Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota/ Pelaksanaan Penetapan Substansi, Evaluasi, Konsultasi	418.103.326,00	353.524.300,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.12.2.02.	Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota/ Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.3.00.01.12.2.02.03.	Kabupaten/Kota/ Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.3.00.01.12.2.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	159.996.800,00	103.800.900,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.3.00.01.12.2.03.01.	Kabupaten/Kota/ Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi	159.996.800,00	103.800.900,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.12.2.03.02.	dan Pembangunan Daerah/ Sistem Informasi Penataan Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN**	**47.918.550.491,00**	**44.617.236.916,00**	**126.806.348.700,00**	**115.692.038.809,00**	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.	**KAWASAN PERMUKIMAN/ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**47.918.550.491,00**	**44.617.236.916,00**	**126.806.348.700,00**	**115.692.038.809,00**	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**9.268.937.635,00**	**8.477.038.339,00**	**439.917.400,00**	**239.765.000,00**	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.2.01.	**DAERAH KABUPATEN/KOTA/** Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	26.162.512,00	25.893.750,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.2.01.01.	Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.367.300,00	11.236.100,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	7.610.800,00	7.469.050,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.2.01.07.	Realisasi Kinerja SKPD/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.214.472,00	7.187.600,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.606.669.326,00	5.342.103.385,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.593.745.426,00	5.330.425.885,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun/ SKPD	5.619.700,00	5.570.500,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.304.350,00	6.137.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.892.000,00	13.038.786,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.2.05.11.	Sebidang Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38.892.000,00	13.038.786,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.882.173.782,00	1.651.280.623,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	569.206.800,00	564.318.606,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	95.202.198,00	94.568.450,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.500.000,00	14.500.006,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	566.134.000,00	330.946.023,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.2.06.10.	Perampungan Aset Dinamis pada SKPD	9.251.800,00	9.222.006,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.2.06.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	630.878.984,00	637.725.666,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	439.917.406,00	239.765.000,00	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	439.917.406,00	239.765.000,00	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.187.040.435,00	1.022.130.124,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	248.903.231,05	182.774.012,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.391.000,00	22.975.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	916.746.204,05	816.391.112,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	525.169.600,00	422.501.562,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	525.169.600,00	422.501.562,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.589.862.113,00	1.434.501.336,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.2.01.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	321.343.466,00	319.162.706,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.2.01.01.	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	110.191.744,00	109.186.350,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.2.01.02.	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	110.767.744,00	109.762.350,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.2.01.06.	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	100.384.000,00	100.214.006,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.2.02.	Sosialisasi dan Penataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	46.568.972,00	47.082.056,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.2.02.02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	34.759.696,00	33.637.900,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.2.02.03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	13.809.276,00	13.444.150,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.3.00.3.00.01.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana alau	8.393.008,00	8.289.750,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.3.00.3.00.01.02.2.03.01.	Relokasi Program Kabupaten/Kota Relokasi/ Rumah bag Korban Bencana	8.393.008,00	8.289.750,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.3.00.3.00.01.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	922.040.421,00	794.210.738,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.9.00.3.00.01.02.2.05.02	Pemasyarakatan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	922.040.421,00	794.210.738,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.2.06.	Penetapan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	289.156.224,00	285.676.100,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.2.06.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	289.156.224,00	285.676.100,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**2.085.883.812,00**	**2.016.461.488,00**	**5.081.512.000,00**	**5.032.882.000,00**	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	1.216.466.196,00	1.159.731.872,00	50.972.000,00	45.710.000,00	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.02.01.	Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman	114.623.796,00	110.893.972,00	17.200.000,00	17.193.000,00	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.02.02.	Kumuh Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas	116.401.200,00	112.059.200,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.02.03.	Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di	77.584.400,00	71.949.400,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.02.04.	Permukiman Kumuh Penyediaan Public Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya	22.700.400,00	22.700.400,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.02.05.	Permukiman Kumuh Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan	11.076.500,00	10.378.500,00	33.772.000,00	28.527.000,00	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.02.06.	Perlugaran/Penerapan Permukiman Kumuh Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	874.017.900,00	831.250.400,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	859.267.615,00	856.729.616,00	5.030.540.000,00	4.987.184.000,00	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.03.01.	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perencanaan/Perlugaran Permukiman Kumuh	624.586.500,00	613.630.500,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.03.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Perlugaran/Penerapan Permukiman Kumuh	123.769.904,00	123.769.904,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.03.06.	Pelaksanaan Pembangunan Perlugaran/ Penerapan Permukiman Kumuh	121.029.212,00	119.329.212,00	5.030.540.000,00	4.987.184.000,00	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.04.1.04.0.00.3.00.01.04.	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	3.852.603.176,00	3.775.389.176,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.2.01.	*Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh*	3.852.600.176,00	3.775.389.176,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.2.01.01.	*pada Daerah Kabupaten/Kota Pedoman Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap*	3.852.600.176,00	3.775.389.176,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.	*Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha* **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	31.120.686.762,00	28.893.785.675,00	115.284.919.300,00	110.419.381.800,00	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.2.01.	*Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*	31.120.686.762,00	28.893.785.675,00	115.284.919.300,00	110.419.381.800,00	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.2.01.01.	*Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan*	1.550.000.000,00	1.531.438.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.2.01.02.	*Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan*	28.554.686.212,00	26.668.994.175,00	115.174.756.000,00	110.209.354.800,00	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.2.01.03.	*untuk Menunjang Fungsi Hunian Koordinasi dan Sosialisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana,*	168.360.550,00	70.226.500,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.2.01.04.	*Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dan Pengembang*	837.680.000,00	603.127.000,00	110.163.300,00	110.037.000,00	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.2.01.05.	*Kegi Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman*	49.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI**	660.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.2.01.	**KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** *Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang*	990.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.2.01.01.	*Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi*	990.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.05.	*Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil* **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN**	61.089.199.487,00	58.446.476.746,00	4.584.719.930,00	4.372.223.289,00	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.	**KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** Satuan Polisi Pamong Praja	24.888.533.329,00	23.562.488.663,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	11.741.331.729,00	10.641.910.283,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.2.01.	**DAERAH KABUPATEN/KOTA** *Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat*	5.083.104,00	3.510.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.2.01.01.	*Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2.083.200,00	2.010.000,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IKPIsar	2.593.904,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.2.01.07	Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.764.142.060,00	9.324.648.304,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.755.926.890,00	9.316.467.304,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	4.099.872,00	3.567.400,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.2.02.07.	SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	2.517.808,00	2.493.600,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.2.05	Triwulanan/ Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84.073.300,00	83.720.100,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	84.073.300,00	83.720.100,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	542.227.445,00	401.014.529,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.997.568,00	71.789.800,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.998.425,00	32.847.500,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.2.06.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	27.600.000,00	24.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.621.526,00	271.877.329,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.590.600,00	22.590.900,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.590.600,00	22.590.900,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1.323.214.720,00	806.534.950,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.2.09.01	Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	179.599.835,00	126.572.900,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.2.09.02	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	1.143.614.884,00	679.962.350,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN	13.147.201.660,00	12.920.589.320,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.2.01	KETERTIBAN UMUM Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	717.348.000,00	579.267.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.2.01.02	dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pendidikan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	-	-
	bersumber Pada dan Perkara Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa								

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.2.01.05	*Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan*	21.198.000,00	9.921.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.2.01.06	*Satuan Pembinaan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Berkaitan Hak Asasi Manusia Kerja Sama antar Lembaga dan Kelatihan dalam Teknik*	686.100.000,00	553.848.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.2.01.08	*Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman*	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.2.02	*Masyarakat Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan*	12.429.853.600,00	12.341.302.320,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.2.02.02	*Bupati/Wali Kota Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan*	12.350.587.600,00	12.291.009.320,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.2.02.03	*Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan*	79.266.000,00	50.274.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.2.03	*Bupati/Wali Kota Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)*	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.2.03.01	*Kabupaten/Kota Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS*	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**14.105.224.289,00**	**13.389.476.952,00**	**618.384.000,00**	**599.583.280,00**	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**7.426.555.281,00**	**6.963.126.224,00**	**618.384.000,00**	**599.583.280,00**	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.2.01	**DAERAH KABUPATEN/KOTA** *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat*	1.134.000,00	1.100.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.2.01.05	*Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar*	1.134.000,00	1.100.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.2.02	*Realisasi Kinerja SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	4.472.871.446,00	4.263.054.434,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	4.470.411.446,00	4.262.589.434,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.2.02.05	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun*	1.326.000,00	1.275.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.2.02.07	*SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/*	1.134.000,00	1.100.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.2.03	*Triwulanan/ Semesteran SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	7.790.000,00	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.2.03.02	*Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	7.790.000,00	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	19.656.000,00	11.387.500,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.2.05.11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	19.656.000,00	11.387.500,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	35.973.600,00	32.815.300,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	1.237.895.630,00	1.154.238.497,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.670.600,00	32.815.200,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	498.037.706,00	476.888.800,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	380.747.650,00	368.124.800,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	8.560.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347.113.280,00	301.665.527,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	210.973.600,00	194.555.705,00	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	25.000.000,00	20.580.000,00	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	13.973.600,00	4.000.000,00	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	162.000.000,00	150.975.705,00	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.2.08.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	464.426.744,00	429.251.393,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.2.08.02.	Pemeliharaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	212.172.000,00	193.844.357,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.2.08.04.	Pemeliharaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	342.284.744,00	233.417.036,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.2.08.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.198.888.781,00	1.061.759.000,00	407.421.000,00	405.037.500,00	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.2.09.01.	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	232.162.056,00	171.891.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.2.09.02.	Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	330.212.125,00	264.429.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.2.09.05.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.197.800,00	53.323.800,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	431.309.800,00	428.936.000,00	257.421.000,00	255.697.800,00	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	145.000.000,00	143.179.200,00	150.000.000,00	149.329.600,00	-	-	-	-
1.05.1.05.0.06.0.00.04.03.	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**5.580.650.980,00**	**5.426.351.828,00**	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.2.01.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	301.532.500,00	296.890.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.2.01.01.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.2.01.02.	Sosialisasi, Konsultasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	301.532.500,00	296.890.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.2.02.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.877.279.228,00	2.731.679.191,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.2.02.02.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	338.715.000,00	338.675.000,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.05.1.05.0.00.3.00.04.03.2.02.03	*Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana*	2.320.140.726,00	2.179.240.081,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.3.00.04.03.2.02.04	*Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana*	1.905.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.3.00.04.03.2.02.06	*Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana*	41.498.500,00	40.128.500,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.3.00.3.00.04.03.2.02.10	*Kabupaten/Kota Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana*	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.3.00.3.00.04.03.2.02.12	*Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam*	174.020.000,00	173.525.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.3.00.3.00.04.03.2.03	*Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*	3.442.802.320,00	3.337.911.467,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.3.00.3.00.04.03.2.03.02	*Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota*	3.339.142.320,00	3.234.871.467,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.3.00.3.00.04.03.2.03.03	*Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana*	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.3.00.3.00.04.03.2.03.04	*Kabupaten/Kota Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban*	93.140.000,00	93.040.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.3.00.04.03.2.03.05	*Bencana Kabupaten/Kota Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit*	10.520.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.2.04	*Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana*	59.065.040,00	57.671.205,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.2.04.05	*Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan*	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.2.04.05	*Bencana Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota*	59.065.040,00	57.671.205,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.06.	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**	**22.891.441.869,00**	**21.494.510.091,00**	**3.966.324.930,00**	**3.772.649.066,00**	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.06.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**10.327.850.373,00**	**9.303.809.787,00**	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.3.00.06.01.2.01	**DAERAH KABUPATEN/KOTA** *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat*	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.3.00.06.01.2.01.06	*Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IKPDaer*	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.06.01.2.02	*Realisasi Kinerja SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	6.831.262.932,00	6.494.938.570,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.06.01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	6.831.262.932,00	6.494.938.570,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.06.01.2.02.05	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun*	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.06.01.2.02.07	*SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/*	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.06.01.2.05	*Triwulanan/ Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	7.065.000,00	3.218.700,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.06.01.2.05.11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	7.065.000,00	3.218.700,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.06.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	26.257.109,00	29.992.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.06.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	864.261.571,00	771.154.010,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.05.1.05.0.00.0.00.06.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.267.160,00	20.692.800,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.06.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	178.103.000,00	188.843.700,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.06.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	513.691.611,00	440.588.400,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.06.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.650.000,00	13.200.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.06.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.717.760,00	150.521.910,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.06.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	750.101.340,00	631.963.982,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.06.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Listrik	436.155.618,00	319.573.602,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.06.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	313.945.728,00	311.550.180,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.06.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.648.777.424,00	1.382.744.425,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.06.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	105.681.824,00	85.115.129,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.06.01.2.09.02.	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	1.076.038.200,00	1.258.579.296,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.06.01.2.09.11.	Pembelian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	72.057.400,00	27.950.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.06.04.	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,	12.383.583.496,00	12.190.798.304,00	3.966.324.000,00	3.772.640.000,00	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.06.04.2.01.	PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Penegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan	12.341.389.996,00	12.170.621.304,00	3.966.324.000,00	3.772.640.000,00	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.06.04.2.01.02.	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemadaman dan Penanganan Kebakaran dalam Daerah	9.961.843.576,00	9.842.256.909,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.06.04.2.01.03.	Kabupaten/Kota Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non	1.750.349.926,00	1.729.054.395,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.06.04.2.01.06.	Kebakaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan	629.200.000,00	597.510.000,00	3.966.324.000,00	3.772.640.000,00	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.06.04.2.04.	Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	22.196.500,00	20.079.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.06.04.2.04.01.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan	22.196.500,00	20.079.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.06.04.2.04.02.	Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	16.264.781.197,00	13.983.286.826,00	11.580.000,00	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.	Dinas Sosial	16.264.781.197,00	13.983.286.826,00	11.580.000,00	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.019.221.831,00	6.042.807.312,00	11.580.000,00	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.059.956,00	15.427.840,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.489.737,00	15.427.840,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	8.570.372,00	-	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.2.01.07.	Realisasi Kinerja SKPD	6.999.849,00	-	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.2.02.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.516.267.394,00	4.306.190.853,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.2.02.01.	Administasi Keuangan Perangkat Daerah	4.560.977.434,00	4.290.544.233,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.2.02.05.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.735.604,00	-	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.2.02.07.	Koordinasi dan Pelyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5.664.356,00	5.645.920,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.2.05.	SKPD Koordinasi dan Pelyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	28.198.000,00	16.891.107,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.2.05.11.	Triwulanan/ Semesteran SKPD Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.198.000,00	16.891.107,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	34.732.700,00	34.732.700,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.	Administasi Umum Perangkat Daerah	937.480.699,00	712.982.020,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.01.	Administasi Umum Perangkat Daerah	34.732.700,00	34.732.700,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.04.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	402.480.000,00	376.926.500,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	253.797.819,00	224.581.940,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.890.000,00	9.900.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230.550.880,00	107.173.580,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.10.	Pemeliharaan Arsip (Records pada SKPD	39.672.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	502.763.680,00	469.055.442,00	11.580.000,00	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	347.759.680,00	269.029.092,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.696.200,00	11.623.000,00	11.580.000,00	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	214.317.680,00	188.516.350,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	679.719.400,00	467.917.550,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.06.1.06.3.00.0.00.01.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	812.919.400,00	487.917.350,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.3.00.0.00.01.01.2.09.10.	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.830.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.3.00.0.00.01.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.3.00.0.00.01.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**713.939.549,00**	**618.400.222,00**	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.2.02.	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	35.591.567,00	5.885.340,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.2.02.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis	35.591.567,00	5.885.340,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.2.03.	Bantuan dan Pengumpulan Uang atau Barang	718.347.982,00	612.514.882,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.2.03.01.	Pengumpulan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	91.125.130,00	84.270.132,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.2.03.02.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	186.617.206,00	177.139.500,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.2.03.03.	Kewenangan Kabupaten/Kota	390.605.656,00	301.104.550,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.2.03.04.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	50.000.000,00	50.000.300,00	-	-	-	-	-	-
	Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-
	Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota								
	Pemberdayaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota								
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.01.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Tiba Dideportasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.01.01.	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Tiba Dideportasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**1.883.392.835,00**	**1.787.979.514,00**	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.01.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.578.830.145,00	1.477.945.514,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.01.01.	Penyediaan Pemakaman	88.477.000,00	47.334.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.01.02.	Penyediaan Sandang	177.360.000,00	177.273.800,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.01.03.	Penyediaan Alat Bantu	135.774.784,00	127.650.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.01.04.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	12.582.000,00	10.228.272,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.01.05.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	131.838.609,00	116.314.780,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.01.06.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang	157.975.630,00	154.520.630,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.01.07.	Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.01.08.	Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.01.09.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	684.934.722,00	635.812.852,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.01.10.	Pemberian Layanan Kedaruratan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.01.11.	Pemberian Pelayanan Pemakaman Keluarga	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.01.12.	Pemberian Layanan Rujukan	6.297.200,00	6.297.200,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.02.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	314.782.680,00	309.829.900,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.02.01.	(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.02.02.	Pemberian Layanan Kedaruratan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.02.07.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.02.14.	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	314.782.680,00	309.829.900,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**5.159.941.321,00**	**4.241.214.342,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.2.01.	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	32.552.000,00	30.213.200,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.2.01.01.	Pengangkatan Anak-Anak Terlantar	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.2.01.02.	Rujukan Anak-Anak Terlantar	12.552.000,00	10.213.200,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.2.01.03.	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.2.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.118.389.321,00	4.211.001.042,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.2.02.01.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	45.000.700,00	45.000.700,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.2.02.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	310.998.597,00	310.215.592,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.2.02.03.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	4.236.710.575,00	3.358.401.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.2.02.04.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	526.691.449,00	497.382.750,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**1.212.144.869,00**	**1.052.987.644,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.2.01.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	623.804.784,00	527.691.784,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.2.01.01.	Penyediaan Makanan	309.979.320,00	273.312.320,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.2.01.02.	Penyediaan Sandang	288.325.600,00	253.679.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.2.01.03.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	25.500.464,00	679.464,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.2.01.04.	Perangkatan Khusus bagi Kelompok Rentan	-	-	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.2.01.05.	Pelayanan Dukungan Psikososial	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.2.02.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap	589.340.085,00	525.225.860,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.2.02.01.	Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kemborg Siaga	78.940.687,00	37.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.2.02.02.	Bencana Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tanma Siaga Bencana	509.399.198,00	487.625.860,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**244.100.792,00**	**240.200.792,00**	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.2.01.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	244.100.792,00	240.200.792,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.2.01.01.	Kabupaten/Kota Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	244.100.792,00	240.200.792,00	-	-	-	-	-	-
2.	Nasional Kabupaten/Kota **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK**	**883.527.535.286,00**	**790.418.618.547,10**	**39.928.366.550,00**	**33.426.877.330,00**	-	-	-	-
2.07.	**BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**8.421.390.418,00**	**6.288.193.709,00**	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.	**Dinas Tenaga Kerja**	**8.421.390.418,00**	**6.288.193.709,00**	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**6.139.834.972,00**	**5.512.206.545,00**	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.3.00.01.01.2.01.	**DAERAH KABUPATEN/KOTA** Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	19.991.712,00	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.3.00.01.01.2.01.01.	Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.995.800,00	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.3.00.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	4.995.200,00	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.3.00.01.01.2.01.07.	Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.712,00	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.3.00.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.474.535.336,00	4.265.286.504,00	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.3.00.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.469.535.136,00	4.265.286.504,00	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.3.00.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.3.00.01.01.2.02.07.	SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	4.999.200,00	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.3.00.01.01.2.05.	Triwulanan/ Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.000.000,00	3.117.238,00	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.3.00.01.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.3.00.01.01.2.05.11.	Fungsi Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8.000.000,00	3.117.238,00	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.3.00.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.151.108,00	19.019.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.3.00.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	527.388.844,00	414.913.996,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.07.2.07.0.00.0.00.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.151.100,00	19.019.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	266.108.300,00	253.604.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.466.764,00	22.474.600,00	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.600,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	234.780.880,00	178.735.396,00	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	684.660.500,00	620.213.710,00	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.553.500,00	161.605.910,00	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.664.600,00	20.600.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	457.443.600,00	429.004.800,00	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398.109.478,00	169.759.097,00	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.01.2.09.01.	Penyelenggaraan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	377.065.618,00	158.353.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	121.044.460,00	31.400.097,00	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.03.	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**309.076.456,00**	**107.739.364,00**	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.03.2.01.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	150.003.608,00	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.03.2.01.01.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	150.003.608,00	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.03.2.01.02.	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.03.2.02.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.03.2.02.01.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.03.2.05.	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	159.073.450,00	157.739.364,00	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.03.2.05.01.	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	159.073.450,00	157.739.364,00	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.04.	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**1.076.113.540,00**	**608.635.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.04.2.01.	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	472.191.640,00	193.050.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.04.2.01.02.	Pelayanan antar Kerja	277.967.640,00	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.04.2.01.03.	Pencarian dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	95.995.000,00	94.950.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.04.2.01.04.	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.04.2.01.05.	Peluasan Kesempatan Kerja	98.228.100,00	98.100.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.04.2.03.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	597.922.900,00	415.585.000,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.07.2.07.0.00.0.00.01.04.2.03.01.	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.04.2.03.02	Online Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	379.000.000,00	227.809.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	219.922.500,00	157.985.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.04.2.04.	Pelatihan Pra Purna Penempatan di Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.04.2.04.02.	Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.04.2.05.	Pendataan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.04.2.05.01	Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.05.	Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	912.353.448,00	59.612.800,00	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.05.2.01.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.05.2.01.01.	Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.05.2.02.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	912.353.448,00	59.612.800,00	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.05.2.02.03.	Migrik Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada	91.297.048,00	7.600.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.0.00.0.00.01.05.2.02.05.	Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan	821.056.400,00	52.012.800,00	-	-	-	-	-	-
2.08.	Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN	9.312.422.425,00	7.540.966.931,00	126.682.700,00	125.888.980,00	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan	9.312.422.425,00	7.540.966.931,00	126.682.700,00	125.888.980,00	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.01.	Pemberdayaan Masyarakat PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.409.737.044,00	5.725.580.352,00	126.682.700,00	125.888.980,00	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.01.2.01.	DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	34.032.504,00	33.659.304,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.01.2.01.01.	Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.195.920,00	12.195.920,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	9.626.584,00	9.253.384,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.01.2.01.07.	Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.210.000,00	12.210.000,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.08.2.08.2.13.0.00.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.475.204.332,00	4.275.613.233,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.439.204.788,00	4.237.966.825,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	19.999.808,00	17.661.408,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.01.2.02.07.	SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	19.999.736,00	19.985.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.01.2.05.	Triwulanan/ Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.095.000,00	2.816.034,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.095.000,00	2.816.034,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.989.700,00	19.989.700,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	844.021.292,00	630.989.777,00	12.052.500,00	12.052.500,00	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	19.989.700,00	19.989.700,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.01.2.06.02.	Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	12.052.500,00	12.052.500,00	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	447.709.600,00	437.199.500,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	91.618.752,00	76.998.752,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	287.403.280,00	169.322.785,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.499.760,00	7.499.760,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	-	-	114.636.200,00	113.636.400,00	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.01.2.07.05.	Daerah Pengadaan Mobil	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	114.636.200,00	113.636.400,00	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	550.393.674,00	439.204.949,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118.756.040,00	64.708.312,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	431.637.634,00	374.496.637,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	475.019.442,00	323.319.355,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.01.2.09.01.	Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	441.505.442,00	300.279.555,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.01.2.09.06.	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.514.000,00	23.039.800,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.02.	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN**	**867.149.224,00**	**641.411.626,00**	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.02.2.01.	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga	233.878.624,00	138.599.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.02.2.01.01.	Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan	53.878.976,00	38.312.592,00	-	-	-	-	-	-
	PUG								

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.08.2.08.2.13.0.00.02.02.2.01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan	113.999.840,00	51.150.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.02.2.01.03.	Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG	59.999.408,00	47.133.408,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.02.2.02.	termasuk PPRG Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan	22.501.248,00	19.421.248,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.02.2.02.01.	Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.02.2.02.02.	Hukum, Sosial dan Ekonomi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi	22.501.248,00	19.421.248,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.02.2.03.	Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	616.770.052,00	485.338.378,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.02.2.03.01.	Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga	151.340.000,00	97.560.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.02.2.03.02.	Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia	465.430.052,00	387.838.378,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.02.2.03.03.	Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.03.	Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**333.226.242,00**	**62.583.610,00**	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.03.2.01.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah	78.227.446,00	-	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.03.2.01.11.	Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan	78.227.446,00	-	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.03.2.02.	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban	254.998.796,00	62.583.610,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.03.2.02.02.	Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan	254.998.796,00	62.583.610,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.03.2.03.	Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.08.2.08.2.13.0.00.02.05.2.03.01.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.04.	Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**153.109.212,00**	**144.132.690,00**	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.04.2.01.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan	33.586.080,00	33.586.080,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.04.2.01.01.	Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG	33.586.080,00	33.586.080,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.04.2.02.	dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Pengawasan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.04.2.02.01.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.04.2.03.	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan	110.523.132,00	110.546.610,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.04.2.03.01.	Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga	110.523.132,00	110.546.610,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.05.	dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**15.200.000,00**	**15.200.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.05.2.01.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan	15.200.000,00	15.200.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.05.2.01.01.	Kabupaten/Kota Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.05.2.01.02.	Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	15.200.000,00	15.200.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.06.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota **857.766.302,00**	**584.566.938,00**	-	-	-	-	-	-	
2.08.2.08.2.13.0.00.02.06.2.01.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	290.514.240,00	153.748.640,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.06.2.01.01.	pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	198.314.408,00	50.724.540,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.06.2.01.02.	Kewenangan Kabupaten/Kota	132.199.832,00	103.024.100,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.08.2.08.2.13.0.00.02.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	567.252.062,00	430.818.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.06.2.02.01	Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	53.752.876,00	11.109.800,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.06.2.02.02	Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan	34.369.704,00	501.800,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.06.2.02.03	Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Perlindun	42.499.709,00	15.484.265,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.06.2.02.04	Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan	446.599.713,00	403.572.833,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.07	Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	676.234.301,00	375.478.715,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Meliputi para	199.737.377,00	107.589.857,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.07.2.01.01	Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan	87.847.520,00	-	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.07.2.01.02	Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap	111.889.857,00	107.589.857,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.07.2.07	Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan	370.987.220,00	267.788.858,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.07.2.02.02	Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak	370.987.220,00	267.788.858,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.07.2.02.03	yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.07.2.03	Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi	106.529.704,00	-	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.13.0.00.02.07.2.03.02	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	106.529.704,00	-	-	-	-	-	-	-
2.08.	Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	7.288.579.349,00	6.972.347.751,00	548.140.000,00	546.590.880,00	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.09.2.09.0.00.3.00.01.	Dinas Ketahanan Pangan	7.295.579.249,00	6.972.347.791,00	548.143.000,00	548.508.000,00	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.3.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.356.909.456,00	5.144.074.011,00	190.000.000,00	188.953.000,00	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.2.01.	DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	29.158.400,00	29.158.400,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.3.00.0.00.01.01.2.01.01.	Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.499.800,00	7.499.800,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.3.00.0.00.01.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.671.000,00	5.671.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.3.00.0.00.01.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.671.000,00	5.671.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.3.00.0.00.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IKPLSar	5.757.300,00	5.757.300,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.3.00.3.00.01.01.2.01.07.	Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.559.300,00	4.559.300,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.206.829.160,00	3.045.588.444,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.2.02.01.	Pengelolaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.201.824.360,00	3.040.583.644,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.2.02.06.	SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.004.800,00	5.004.800,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.2.03.	Triwulanan/ Semesteran SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.346.403.272,00	1.342.219.965,00	190.000.000,00	188.953.000,00	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.2.06.02.	Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.986.400,00	3.986.400,00	190.000.000,00	188.953.000,00	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	202.217.500,00	201.687.100,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	838.477.612,00	836.840.712,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.000.000,00	19.250.900,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280.811.760,00	280.555.353,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.2.07.08.	Daerah Pengadaan Aset Tak Berwujud	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	269.288.624,00	248.436.735,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.510.352,00	89.796.363,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.2.09.03.	*Penyediaan Jasa Penelitian dan Pengembangan Kantor*	29.590.200,00	29.590.200,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.2.09.04.	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	138.088.072,00	126.950.175,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan*	474.240.000,00	450.470.883,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.2.09.01.	*Pemerintahan Daerah* *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak*	180.916.800,00	169.332.700,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.2.09.02.	*Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan*	63.323.200,00	61.244.463,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.2.09.09.	*Pengisian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan* *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	200.000.000,00	199.893.700,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.02.	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI**	**109.746.690,00**	**108.753.744,00**	**358.140.000,00**	**357.547.000,00**	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.02.2.01.	**UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN** *Penyediaan Infrastruktur dan Sarana Pendukung Ketersediaan*	109.746.690,00	108.753.744,00	358.140.000,00	357.547.000,00	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.02.2.01.03.	*Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota* *Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kementrian Pangan*	98.531.944,00	98.370.744,00	358.140.000,00	357.547.000,00	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.02.2.01.04.	*Lainnya* *Koordinasi dan Sinkronasi Penyediaan Infrastruktur Logistik*	11.214.755,00	10.383.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN**	**1.068.305.440,00**	**965.179.399,00**	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.2.01.	**KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** *Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya*	592.710.474,00	549.524.592,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.2.01.01.	*sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka* *Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan* *Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan*	49.990.952,00	45.919.634,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.2.01.02.	*Makanan* *Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	197.410.004,00	153.958.604,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.2.01.04.	*Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan*	142.420.678,00	139.233.994,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.2.01.05.	*Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan*	91.952.215,00	89.234.260,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.2.01.06.	*Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan*	916.000,00	916.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.2.01.07.	*Toko Tani Indonesia* *Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga*	99.987.425,00	99.342.300,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.2.02.	*Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan*	71.730.300,00	12.364.400,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.2.02.02.	*Kabupaten/Kota* *Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal*	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.2.02.03.	*Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	60.787.300,00	10.421.400,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.2.02.04.	*Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	1.943.000,00	1.943.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.2.03.	*Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang*	70.997.348,00	26.212.348,00	-	-	-	-	-	-
	Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi								

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.09.2.09.0.00.3.00.01.03.2.03.01.	*Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan*	29.997.348,00	26.212.348,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.3.00.01.03.2.04.	*Pokok Lokal* *Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan*	363.857.318,00	377.088.949,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.3.00.01.03.2.04.01.	*Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi* *Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita*	77.093.666,00	76.629.500,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.3.00.01.03.2.04.02.	*Per Tahun* *Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi*	277.397.516,00	271.902.449,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.3.00.01.03.2.04.03.	*Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal* *Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi*	29.378.206,00	28.265.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.3.00.01.04.	*per Kapita per Tahun* **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**614.753.954,00**	**683.383.687,00**	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.3.00.01.04.2.01.	*Penyusunan Peta Kerentanan dan Kelefaman Pangan*	242.940.544,00	242.687.207,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.3.00.01.04.2.01.01.	*Kecamatan* *Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Kelefaman dan*	242.940.544,00	242.687.207,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.3.00.01.04.2.02.	*Kerentanan Pangan* *Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota*	441.813.410,00	440.696.480,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.3.00.01.04.2.02.01.	*Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan*	18.692.800,00	18.681.900,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.3.00.01.04.2.02.02.	*Kabupaten/Kota* *Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran*	423.120.610,00	422.014.900,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.3.00.01.05.	*Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota* **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**76.763.706,00**	**70.956.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.2.01.	*Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah*	76.763.700,00	70.956.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.2.01.01.	*Kabupaten/Kota* *Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah*	18.794.400,00	14.155.500,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.2.01.02.	*Kabupaten/Kota* *Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah*	6.933.600,00	6.922.500,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.2.01.03.	*Kabupaten/Kota* *Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah*	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.2.01.05.	*Kabupaten/Kota* *Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan*	50.035.700,00	49.908.000,00	-	-	-	-	-	-
2.10.	*Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota* **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**7.179.671.843,00**	**6.067.486.190,00**	**2.513.706.824,00**	**886.486.275,00**	-	-	-	-
2.10.2.10.0.00.0.00.01.	**Dinas Pertanahan**	**7.179.671.843,00**	**6.067.486.190,00**	**2.513.706.824,00**	**886.486.275,00**	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.10.2.10.0.00.3.00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.855.848.710,00	4.321.818.929,00	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.3.00.0.00.01.01.2.01	DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	4.824.000,00	4.662.500,00	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.3.00.0.00.01.01.2.01.01.	Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.172.000,00	2.112.500,00	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.3.00.0.00.01.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.3.00.0.00.01.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.3.00.0.00.01.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.3.00.0.00.01.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.3.00.0.00.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	942.000,00	925.000,00	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.3.00.0.00.01.01.2.01.07.	Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.710.000,00	1.625.000,00	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.3.00.0.00.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.310.980.984,00	3.165.205.371,00	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.3.00.0.00.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.306.281.232,00	3.161.599.071,00	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.3.00.0.00.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2.382.300,00	2.315.000,00	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.3.00.0.00.01.01.2.02.07.	SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	2.336.452,00	2.192.300,00	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.3.00.0.00.01.01.2.03.	Triwulanan/ Semesteran SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.086.300,00	-	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.3.00.0.00.01.01.2.03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.038.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.3.00.0.00.01.01.2.03.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	1.057.200,00	-	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.3.00.0.00.01.01.2.06.	SKPD Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.580.000,00	4.580.000,00	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.3.00.0.00.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	709.855.216,00	471.438.018,00	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.3.00.0.00.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	4.580.000,00	4.580.000,00	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.3.00.0.00.01.01.2.06.03.	Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.535.400,00	24.432.500,00	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.3.00.0.00.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	235.675.100,00	225.833.000,00	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.3.00.0.00.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	92.361.796,00	82.175.000,00	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.3.00.0.00.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.300.000,00	10.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.3.00.0.00.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	368.783.920,00	148.197.518,00	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.3.00.0.00.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	412.862.190,00	391.226.140,00	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.3.00.0.00.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	412.862.190,00	391.226.140,00	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.3.00.0.00.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	412.468.120,00	283.725.800,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.10.2.10.0.00.0.00.01.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	265.474.800,00	203.792.800,00	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.0.00.0.00.01.01.2.09.02.	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	61.727.400,00	60.312.100,00	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.0.00.0.00.01.01.2.09.06.	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.865.920,00	19.620.000,00	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.0.00.0.00.01.04.	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**1.111.084.980,00**	**1.104.518.681,00**	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.0.00.0.00.01.04.2.01.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah	1.111.084.980,00	1.104.518.681,00	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.0.00.0.00.01.04.2.01.01.	Kabupaten/Kota Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1	1.111.084.980,00	1.104.518.681,00	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.0.00.0.00.01.16.	(satu) Daerah Kabupaten/Kota **PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**1.212.950.430,00**	**841.048.580,00**	**2.513.706.924,00**	**898.488.275,00**	-	-	-	-
2.10.2.10.0.00.0.00.01.16.2.01.	Penggunaan Tanah yang Kepemilikannya dalam satu Daerah	1.212.950.430,00	841.048.580,00	2.513.706.924,00	898.488.275,00	-	-	-	-
2.10.2.10.0.00.0.00.01.16.2.01.01.	Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	52.134.930,00	52.067.080,00	130.000.000,00	128.670.750,00	-	-	-	-
2.10.2.10.0.00.0.00.01.16.2.01.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah	1.160.824.500,00	588.981.500,00	2.383.706.924,00	769.817.525,00	-	-	-	-
2.11.	Kabupaten/Kota **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**121.696.881.445,00**	**115.279.793.914,00**	**2.598.274.570,00**	**2.429.738.000,00**	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	**121.696.881.445,00**	**115.279.793.914,00**	**2.598.274.570,00**	**2.429.738.000,00**	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**10.748.535.515,00**	**10.083.938.872,00**	**199.219.125,00**	**198.967.000,00**	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.2.01.	DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	33.911.256,00	28.149.170,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.2.01.01.	Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.238.790,00	15.149.370,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.901.650,00	4.654.900,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	6.651.906,00	6.767.900,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.2.01.07.	Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.918.750,00	7.578.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.397.958.588,00	7.055.624.547,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.388.103.288,00	7.044.057.647,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	6.007.450,00	5.947.900,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.2.02.07.	SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	5.757.850,00	5.619.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06.	Triwulanan/ Semesteran SKPD Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.529.200,00	16.483.700,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	602.245.022,00	455.179.097,00	199.219.125,00	198.967.000,00	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.520.300,00	16.483.706,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06.34.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	233.984.800,00	197.248.006,00	199.219.125,00	198.967.000,00	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06.35.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	249.424.422,00	213.191.984,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06.36.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.900,00	7.740.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06.39.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.636.990,00	27.807.551,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06.10.	Penatausahaan Aset Dinamis pada SKPD	20.200.990,00	20.200.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.182.614.631,00	2.087.698.746,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.276.551.807,00	1.210.019.485,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.635.000,00	44.226.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	859.927.224,00	823.454.264,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	513.277.416,00	429.802.760,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.5.00.01.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	162.781.216,00	115.828.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.5.00.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.496.200,00	323.970.760,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.6.00.01.02.	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**468.440.000,00**	**331.060.000,00**	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.6.00.01.02.2.01.	Konservasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	99.000.000,00	99.060.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.6.00.01.02.2.01.01.	(RPPLH) Kabupaten/Kota Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	99.000.000,00	99.060.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.6.00.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	301.440.000,00	232.060.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.02.2.02.01.	Kabupaten/Kota Penbuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	301.440.000,00	232.060.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.6.00.01.03.	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**282.320.313,00**	**244.938.811,00**	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.3.00.01.03.2.01.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	282.320.313,00	244.938.811,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.3.00.01.03.2.01.01.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dikaitkan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	212.889.313,00	207.438.811,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.3.00.01.03.2.01.02.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	69.440.000,00	37.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.03.2.03.	Penulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.11.2.11.0.00.0.00.01.03.2.03.02.	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberantasan Untuk Pascamar*	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.04.	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**15.639.001.992,00**	**15.078.656.934,00**	**875.000.000,00**	**785.750.000,00**	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.04.2.01.	*Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota*	15.639.001.992,00	15.078.656.934,00	875.000.000,00	785.750.000,00	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.04.2.01.04.	*Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)*	15.639.001.992,00	15.078.656.934,00	875.000.000,00	785.750.000,00	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.06.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**173.734.866,00**	**126.038.240,00**	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.06.2.01.	*Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	173.734.866,00	126.038.240,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.06.2.01.01.	*Fasilitasi Pemenuhan Kewajiban dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH*	171.884.166,00	126.038.240,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.06.2.01.03.	*Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	1.849.900,00	-	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.08.	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**313.967.800,00**	**288.527.900,00**	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.08.2.01.	*Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	313.967.800,00	288.527.900,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.08.2.01.01.	*Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan*	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.08.2.01.02.	*Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup*	313.967.800,00	288.527.900,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.09.	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**306.890.000,00**	**206.750.900,00**	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.09.2.01.	*Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	306.890.000,00	206.750.900,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.09.2.01.01.	*Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*	306.890.000,00	206.750.900,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.11.	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**93.843.962.765,00**	**86.918.883.155,55**	**1.524.055.445,00**	**1.445.013.000,00**	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.11.2.01.	*Pengelolaan Sampah*	93.843.962.765,00	86.918.883.155,55	1.524.055.445,00	1.445.013.000,00	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.11.2.01.01.	*Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota*	118.600.000,00	118.600.000,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.11.2.11.0.00.3.00.01.11.2.01.02.	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan	1.339.451.540,00	1.209.036.240,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.3.00.01.11.2.01.03.	Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali Pengelolaan Sampah dengan Melakukan Pemilahan,	91.252.693.465,00	86.584.290.035,33	1.524.055.445,00	1.445.013.000,00	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.11.2.01.04.	Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/TPA Kabupaten/Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan	1.123.217.760,00	1.006.948.880,00	-	-	-	-	-	-
2.12.	Penampahan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI	18.331.723.538,00	17.194.016.037,00	946.083.000,00	897.985.900,00	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.331.723.538,00	17.194.016.037,00	946.083.000,00	897.985.900,00	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	17.910.275.025,00	16.890.335.137,00	946.083.000,00	897.985.900,00	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.01.2.01.	DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	20.465.800,00	18.553.800,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.01.2.01.01.	Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.635.000,00	9.243.400,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	5.415.400,00	5.031.400,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.01.2.01.07.	Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.415.400,00	4.279.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.626.249.160,00	9.054.331.892,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.514.787.760,00	9.043.676.492,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	4.960.900,00	4.965.900,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.01.2.02.07.	SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.491.500,00	5.489.500,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.955.800,00	4.483.800,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.01.2.03.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.955.800,00	4.483.800,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.132.000,00	3.326.900,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24.132.000,00	3.326.900,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.435.000,00	8.435.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.987.881.018,00	4.949.045.270,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	8.425.000,00	8.425.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.01.2.06.04.	Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.599.707.000,00	2.572.572.125,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.293.197.536,00	1.199.358.910,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	198.888.000,00	193.399.965,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.12.2.12.0.00.0.00.03.01.2.06.10.	Pemeliharaan Arsip Dinamis pada SKPD	94.998.486,00	93.714.350,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	946.083.000,00	897.985.800,00	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	-	-	10.000.000,00	0.600.000,00	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	936.083.000,00	888.385.800,00	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.01.2.07.08.	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.381.357.847,00	3.166.647.971,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	9.791.900,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.000.847,00	307.948.185,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.969.358.000,00	2.848.918.786,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	888.801.300,00	285.720.504,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.01.2.09.02.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	370.928.100,00	185.906.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.01.2.09.06.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.873.200,00	99.814.504,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.02.	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**316.503.950,00**	**289.645.200,00**	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.02.2.01.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	350.996.800,00	154.893.200,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.02.2.01.01.	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	35.000.000,00	32.080.400,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.02.2.01.04.	Kependudukan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	116.123.600,00	116.123.600,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.02.2.01.07.	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Pencatatan	18.873.200,00	14.689.200,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.02.2.03.	Kependudukan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	146.507.150,00	124.752.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.02.2.03.01.	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	18.359.000,00	17.347.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.02.2.03.03.	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	14.510.000,00	14.510.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.02.2.03.06.	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	29.419.650,00	15.700.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.02.2.03.07.	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Perangkat Kependingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	84.218.500,00	77.195.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.03.	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**269.012.850,00**	**249.206.900,00**	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.03.2.01.	Pelayanan Pencatatan Sipil	144.561.000,00	144.561.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.03.2.01.02.	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	144.561.000,00	144.561.900,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.03.2.02.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	124.451.850,00	103.645.900,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.03.2.02.06.	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	11.645.800,00	11.645.800,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.12.2.12.0.00.0.00.03.03.2.02.03.	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan	34.962.450,00	15.700.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.03.2.02.10.	Tinggi Terkait Pencatatan Sipil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Penangku	77.923.600,00	76.300.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.04.	Kependingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI	81.678.750,00	19.477.900,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.04.2.01.	KEPENDUDUKAN Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemadatan dan	35.716.850,00	-	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.04.2.01.02.	Penyajian Database Kependudukan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	35.716.850,00	-	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.04.2.03.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.04.2.03.05.	Kependudukan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.04.2.04.	Kependudukan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi	45.961.900,00	19.477.900,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.04.2.04.01.	Kependudukan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi	45.961.900,00	19.477.900,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.04.2.04.03.	Administrasi Kependudukan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.05.	Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	54.249.954,00	46.361.600,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.05.2.01.	Penyusunan Profil Kependudukan	54.249.954,00	46.361.600,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.03.05.2.01.01.	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	54.249.954,00	46.361.600,00	-	-	-	-	-	-
2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN	5.283.168.182,00	4.563.506.021,00	-	-	-	-	-	-
2.13.2.08.2.13.0.00.02.	MASYARAKAT DAN DESA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan	5.283.168.182,00	4.563.506.021,00	-	-	-	-	-	-
2.13.2.08.2.13.0.00.02.04.	Pemberdayaan Masyarakat PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	182.215.815,00	174.954.200,00	-	-	-	-	-	-
2.13.2.08.2.13.0.00.02.04.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	182.215.815,00	174.954.200,00	-	-	-	-	-	-
2.13.2.08.2.13.0.00.02.04.2.01.05.	Pemerintahan Desa Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	57.216.108,00	54.077.060,00	-	-	-	-	-	-
2.13.2.08.2.13.0.00.02.04.2.01.11.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	124.999.707,00	120.877.140,00	-	-	-	-	-	-
2.13.2.08.2.13.0.00.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	5.100.952.368,00	4.378.552.421,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.13.2.08.2.13.0.00.02.05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di	5.100.952.346,00	4.378.552.421,00	-	-	-	-	-	-
2.13.2.08.2.13.0.00.02.05.2.01.02.	Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pelestarianan	3.671.880.016,00	3.240.825.899,00	-	-	-	-	-	-
2.13.2.08.2.13.0.00.02.05.2.01.04.	Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan	74.999.672,00	-	-	-	-	-	-	-
2.13.2.08.2.13.0.00.02.05.2.01.05.	Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan	1.454.072.656,00	1.137.726.522,00	-	-	-	-	-	-
2.13.2.08.2.13.0.00.02.05.2.01.06.	Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN	16.735.605.329,00	15.178.188.051,00	362.880.000,00	362.835.945,00	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	16.735.605.329,00	15.178.188.051,00	362.880.000,00	362.835.945,00	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.073.388.882,00	4.460.708.246,00	362.880.000,00	362.835.945,00	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.01.2.01.	DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	9.350.000,00	8.330.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.01.2.01.01.	Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.350.000,00	8.330.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.01.2.01.07.	Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.802.247.250,00	3.409.552.618,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.584.347.250,00	3.396.802.618,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.01.2.02.07.	SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	17.000.000,00	12.750.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.01.2.05.	Tinjauan/ Sensasiasi SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.14.2.14.0.00.0.00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.409.400,00	1.399.500,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	426.261.132,00	337.831.306,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.01.2.05.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.409.400,00	1.399.500,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.01.2.05.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	242.726.400,00	219.745.800,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.01.2.05.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	59.936.732,00	51.987.255,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.01.2.05.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.998.000,00	65.115.251,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.000.000,00	20.649.110,00	362.880.000,00	352.035.945,00	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.000.000,00	20.649.110,00	362.880.000,00	352.035.945,00	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	401.380.080,00	361.224.342,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.01.2.08.01	Pengadaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.373.600,00	18.322.225,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	357.006.480,00	227.902.117,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	617.740.200,00	368.791.370,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	602.940.200,00	355.402.670,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.800.000,00	13.378.600,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.02.	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**434.936.137,00**	**242.386.596,00**	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.02.2.01	Penataan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	15.662.000,00	14.620.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	15.662.000,00	14.620.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.02.2.02	Penetapan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	418.974.137,00	227.766.596,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	78.401.296,00	68.663.296,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000,00	24.480.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	132.971.570,00	103.200.800,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	125.401.296,00	31.423.300,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**9.313.627.347,00**	**7.669.584.679,00**	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	629.089.216,00	640.954.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.01.01	(KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	138.323.450,00	-	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	140.981.648,00	141.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui	221.826.000,00	221.826.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.01.07	Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	230.948.656,00	206.629.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	79.999.000,00	79.999.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.02	Pembinaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB	5.323.450.594,00	5.010.478.192,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.02.01	(PKB/PLKB) Pembinaan BMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh	4.493.465.692,00	4.421.809.684,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.02.03	PKB/PLKB Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan	410.557.452,00	269.794.508,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.02.04	dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	419.428.250,00	318.914.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat	1.966.067.537,00	1.815.052.287,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.03.01	Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan	122.190.324,00	100.665.324,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.03.03	Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka	1.766.660.624,00	1.437.260.374,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.03.07	Panjang (MKJP) Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan	43.500.900,00	43.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.03.09	Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.03.10	Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana	22.565.900,00	22.465.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.03.13	dan Kesehatan Reproduksi Peningkatan Kesertaan KB Pria	11.171.589,00	11.171.585,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.14.2.14.0.00.3.00.01.03.2.04	*Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi*	195.000.000,00	194.100.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.3.00.01.03.2.04.01	*Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Ketahanan Bkr-KB Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra*	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.04.02	*Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Ketahanan Bkr-KB Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB*	9.000.000,00	8.820.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.04.03	*Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB*	186.000.000,00	185.280.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.03.2.04.04	*Pembinaan Terpadu Kampung KB*	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**2.913.755.813,00**	**2.849.446.736,00**	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.04.2.01	*Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan*	2.823.763.813,00	2.759.648.736,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.3.00.01.04.2.01.02	*Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan*	352.500.000,00	352.490.300,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.3.00.01.04.2.01.03	*Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPK3, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan*	119.999.814,00	119.999.814,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.04.2.01.05	*Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPK3, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana*	2.170.444.938,00	2.152.942.900,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.04.2.01.06	*(Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPK3, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan*	73.467.444,00	50.252.444,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.04.2.01.07	*Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPK3, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan*	77.980.472,00	72.955.472,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.04.2.01.08	*Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPK3, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan*	20.341.155,00	818.290,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.14.0.00.0.00.01.04.2.02	*Kesejahteraan Keluarga (Manjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Keberjidvisian serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Pelaksanaan dan Pembinaan Peran Serta Organisasi*	30.000.000,00	90.000.000,00	-	-	-	-	-	-
	Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.14.2.14.0.00.0.00.01.04.2.02.04	*Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja*	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**140.489.643.867,00**	**132.538.716.769,00**	**3.697.701.700,00**	**3.749.311.810,00**	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.	*Dinas Perhubungan*	**140.489.643.867,00**	**132.538.716.769,00**	**3.697.701.700,00**	**3.749.311.810,00**	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**53.615.447.587,00**	**82.732.836.264,00**	**695.701.833,00**	**676.175.000,00**	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	10.167.910.226,00	9.560.572.152,00	-	-	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.2.02.01.	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	10.167.910.226,00	9.560.572.152,00	-	-	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.2.07.	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-	-	520.000.000,00	508.185.000,00	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.2.07.02.	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	-	-	520.000.000,00	508.185.000,00	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.2.08.	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	59.413.893.683,00	68.211.775.760,00	-	-	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.2.08.03.	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	57.872.106.959,00	67.672.339.945,00	-	-	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.2.08.04.	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	541.786.724,00	538.436.724,00	-	-	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.2.09.	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	121.350.000,00	98.025.854,00	-	-	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.2.09.02.	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	121.350.000,00	98.025.854,00	-	-	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.2.10.	*Peningkatan Pelayanan BLUD*	4.912.287.766,00	4.861.952.508,00	175.701.800,00	167.990.000,00	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.2.10.01.	*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	4.912.287.766,00	4.861.952.508,00	175.701.800,00	167.990.000,00	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**50.326.513.366,00**	**46.247.057.510,00**	**3.261.999.900,00**	**3.064.136.810,00**	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.02.	*Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota*	11.822.989.743,00	11.389.358.021,00	2.953.445.400,00	2.916.511.010,00	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.02.01.	*Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota*	281.096.226,00	278.542.025,00	2.772.000.000,00	2.750.379.010,00	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.02.02.	*Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota*	1.227.079.841,00	1.173.532.341,00	10.000.000,00	14.535.000,00	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.02.03.	*Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan*	9.621.721.686,00	9.170.299.823,00	166.445.400,00	151.597.000,00	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.02.04.	*Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan*	773.089.490,00	765.894.831,00	-	-	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.03.	*Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C*	1.861.958.704,00	1.447.473.241,00	5.434.500,00	5.434.500,00	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.03.05.	*Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C*	1.861.958.704,00	1.447.473.241,00	5.434.500,00	5.434.500,00	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.05.	*Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	158.231.000,00	150.636.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.05.	*Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	1.046.230.353,00	986.721.662,00	-	-	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.05.02.	*Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	1.046.230.353,00	986.721.662,00	-	-	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.05.07.	*Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	158.231.000,00	150.636.000,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk	7.744.348.941,00	7.177.122.804,00	43.120.000,00	43.101.300,00	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.06.04.	Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan	7.744.348.941,00	7.177.122.804,00	43.120.000,00	43.101.300,00	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.09	Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang	33.962.748.554,00	26.096.665.782,00	200.000.000,00	98.790.000,00	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.09.01	dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang	33.962.748.554,00	26.096.665.782,00	200.000.000,00	98.790.000,00	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.	dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**557.882.975,00**	**557.882.975,00**	-	-	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.2.13	Pembangunan dan Perawatan Isn Pembangunan dan	557.882.975,00	557.882.975,00	-	-	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.2.13.04.	Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	557.882.975,00	557.882.975,00	-	-	-	-	-	-
2.16.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**28.125.673.461,00**	**18.690.166.528,00**	**294.738.200,00**	**253.655.000,00**	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.	**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**	**28.125.673.461,00**	**18.690.166.528,00**	**294.738.200,00**	**253.655.000,00**	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.523.744.814,00**	**4.842.222.930,00**	**22.720.200,00**	**17.700.000,00**	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	29.700.780,00	21.783.930,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.01.2.01.01.	Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.213.608,00	7.906.400,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	7.922.668,00	6.976.880,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.01.2.01.07.	Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.614.504,00	6.900.650,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.131.123.809,00	3.668.970.030,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.113.305.944,00	3.651.154.710,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	8.958.752,00	8.907.400,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.01.2.02.07.	SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	8.909.104,00	8.908.720,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.01.2.05.	Triwulanan/ Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.330.000,00	32.606.024,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55.330.000,00	32.606.024,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	809.859.408,00	540.948.309,00	22.720.200,00	17.700.000,00	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.113.510,00	65.291.453,00	22.720.200,00	17.700.000,00	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	204.800.100,00	190.050.500,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.16.2.16.2.20.2.21.04.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.258.910,00	19.765.770,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	313.585.880,00	274.850.360,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.175.000,00	222.563.280,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	272.175.000,00	222.563.280,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	231.505.025,00	146.350.257,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.01.2.09.01.	Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	231.505.025,00	146.350.257,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.02.	Kecamatan Perangkat Dinas atau Kecamatan Desa Jabatan **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**8.064.529.275,00**	**7.743.912.276,00**	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.064.529.275,00	7.743.912.276,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.02.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	55.845.440,00	47.747.040,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.04.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1.530.692.360,00	1.502.608.246,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.05.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	6.243.057.850,00	6.096.707.910,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.06.	Pelayanan Informasi Publik	93.471.265,00	87.238.940,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.07.	Layanan Hubungan Media	34.368.600,00	-	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.08.	Kerjasama dengan Perangkat Kewilayahan	117.092.760,00	39.617.040,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.03.	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**5.537.387.172,00**	**5.104.051.722,00**	**272.010.000,00**	**235.955.000,00**	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.03.2.01.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	96.393.140,00	83.790.001,00	113.500.000,00	105.749.000,00	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.03.2.01.03.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	96.393.140,00	83.790.001,00	113.500.000,00	105.749.000,00	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.03.2.02.	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.441.094.032,00	5.020.261.721,00	158.510.000,00	130.206.000,00	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.03.2.02.01.	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	56.749.600,00	54.994.526,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.03.2.02.02.	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Indek dan Anggaran	141.536.920,00	127.354.760,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.03.2.02.03.	Pemerintahan Berbasis Elektronik Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	215.178.400,00	207.419.250,00	158.510.000,00	130.206.000,00	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.03.2.02.04.	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	4.982.396.346,00	4.255.586.226,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.03.2.02.06.	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	7.947.700,00	7.451.500,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.03.2.02.07.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	436.268.530,00	432.790.120,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.16.2.16.2.20.2.21.04.03.2.02.08.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	14.438.500,00	7.153.500,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.03.2.02.09.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota	740.677.248,00	723.089.387,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.04.09.2.02.10.	Cerdas dan Kota Cerdas Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi	246.987.600,00	196.013.148,00	-	-	-	-	-	-
2.17.	Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA	11.926.264.559,00	10.574.157.926,00	111.313.400,00	104.007.000,00	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.	KECIL, DAN MENENGAH Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.926.264.559,00	10.574.157.926,00	111.313.400,00	104.007.000,00	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.535.282.252,00	5.302.885.354,00	111.313.400,00	104.007.000,00	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.2.01.	DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Pengengaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	19.000.734,00	19.999.734,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.2.01.01.	Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.000.748,00	9.999.748,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	9.999.986,00	9.999.986,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.2.02.	Realisasi Kinerja SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.126.482.914,00	3.940.854.862,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.126.484.116,00	3.930.855.056,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.2.02.07.	SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	9.999.796,00	9.999.796,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.2.06.	Triwulanan/ Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.068.000,00	2.867.937,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.2.06.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.068.000,00	2.867.937,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.222.900,00	8.222.900,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	795.340.386,00	772.235.080,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	8.222.900,00	8.222.900,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.2.06.04.	Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor	225.954.400,00	225.114.105,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	78.572.688,00	75.022.384,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.800.000,00	15.200.800,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	461.013.280,00	457.298.586,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	-	-	111.313.400,00	104.007.000,00	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.2.07.06.	Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	111.313.400,00	104.007.000,00	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	311.861.636,00	295.571.636,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.000.000,00	3.985.000,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.2.06.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	307.881.636,00	292.786.636,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.2.06.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	263.307.700,00	261.003.300,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.2.06.01.	Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	175.007.900,00	174.312.900,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.2.06.02.	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	74.009.600,00	72.490.100,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.2.06.06.	Peralatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.200.300,00	14.200.300,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.02.	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**147.237.552,00**	**117.876.752,00**	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.02.2.01.	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan	37.242.080,00	37.242.080,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.02.2.01.01.	Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan	37.242.080,00	37.242.080,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.02.2.02.	Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu	109.995.472,00	80.634.672,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.02.2.02.01.	dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang,	109.995.472,00	80.634.672,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.	Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**724.303.702,00**	**686.758.556,00**	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.2.01.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan	724.303.702,00	686.758.556,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.2.01.01.	Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Kebangkitan,	636.786.516,00	620.036.516,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.2.01.02.	serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan	87.517.186,00	66.722.040,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.	Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**156.432.779,00**	**133.944.081,00**	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.2.01.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan	156.432.779,00	133.944.081,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.2.01.01.	Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	38.562.426,00	38.562.426,00	-	-	-	-	-	-
	Kewenangan Kabupaten/Kota								

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.17.2.17.0.00.3.00.01.04.2.01.02.	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan	117.670.353,00	95.381.655,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.3.00.01.05.	Kabupaten/Kota PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.420.736.876,00	1.400.871.032,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.2.01.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang	318.370.216,00	311.284.573,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.2.01.01.	Wilayah Kewenangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta	318.370.216,00	311.284.573,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.2.02.	Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah	148.112.220,00	146.312.220,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.2.02.01.	Kabupaten/Kota Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta	148.112.220,00	146.312.220,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.2.03.	Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu)	954.254.234,00	943.374.234,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.2.03.01.	Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta	954.254.234,00	943.374.234,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.	Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA	2.065.370.962,00	1.023.477.251,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.2.01.	KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan,	2.065.370.962,00	1.023.477.251,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.2.01.01.	Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	131.598.526,00	119.348.626,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.2.01.02.	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1.064.999.816,00	149.490.900,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.2.01.03.	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	-	-	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.2.01.04.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha	156.214.800,00	117.223.905,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.2.01.05.	Mikro Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan	152.605.576,00	150.455.576,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.2.01.06.	dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta	499.952.250,00	495.959.250,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.	Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.936.900.642,00	1.905.444.900,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.2.01.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan	1.936.900.642,00	1.905.444.900,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.2.01.01.	Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam	1.936.900.642,00	1.905.444.900,00	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi								

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	23.649.191.945,00	21.788.762.964,00	5.453.398.050,00	4.774.375.110,00	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpedu Satu Pintu	23.649.191.945,00	21.788.762.964,00	5.453.398.050,00	4.774.375.110,00	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	21.982.341.474,00	20.260.451.914,00	5.453.398.050,00	4.774.375.110,00	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.2.01.	DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	29.985.200,00	28.645.450,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.2.01.01.	Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.996.400,00	9.567.850,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	9.995.200,00	9.582.750,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.2.01.07.	Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.994.600,00	9.515.850,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.326.810.646,00	10.765.582.226,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.314.642.546,00	10.761.941.226,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	4.170.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.2.02.07.	SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	7.998.100,00	7.641.100,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.2.06.	Triwulanan/ Semesteran SKPD Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.471.900,00	64.705.400,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.634.621.846,00	1.484.380.910,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	77.471.900,00	64.705.400,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.2.06.04.	Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor	793.840.800,00	774.211.700,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	390.034.046,00	287.178.100,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.400.000,00	13.650.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	526.667.000,00	409.341.710,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	-	-	5.453.398.050,00	4.774.375.110,00	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.2.07.05.	Daerah Pengadaan Mebel	-	-	400.961.400,00	398.803.000,00	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	4.030.028.900,00	3.420.565.220,00	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	-	-	1.022.407.750,00	955.006.890,00	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.2.08.	Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.155.232.960,00	6.397.223.476,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.902.686.243,00	1.726.270.443,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.252.546.717,00	4.686.953.027,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1.658.087.920,00	1.545.912.050,00	-	-	-	-	-	-
	Pemerintahan Daerah								

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.2.09.91.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	111.720.400,00	97.592.400,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.2.09.92.	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	267.494.000,00	200.898.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.2.09.95.	Peralatan Kesalanan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	225.111.600,00	206.450.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.2.09.96.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	659.901.120,00	589.252.550,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	353.620.000,00	351.919.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**281.622.275,00**	**277.423.975,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.2.01.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman	281.622.275,00	277.423.975,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.2.01.01.	Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian	281.622.275,00	277.423.975,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.	Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**497.881.775,00**	**491.565.675,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.2.01.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi	497.881.775,00	491.565.675,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.2.01.01.	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.2.01.02.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	482.881.775,00	476.565.675,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.	Kabupaten/Kota **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**304.320.063,00**	**278.420.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.2.01.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu	304.320.063,00	278.420.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.2.01.01.	Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	3.144.100,00	3.120.100,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.2.01.02.	Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan	301.175.960,00	275.299.900,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.	Penanaman Modal **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN**	**883.026.361,00**	**391.961.500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.2.01.	**MODAL** Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi	883.026.361,00	391.961.500,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.2.01.02.	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman	566.394.675,00	337.615.500,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.2.01.03.	Modal Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan	125.631.686,00	54.226.000,00	-	-	-	-	-	-
	Penanaman Modal								

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.19.2.19.8.00.0.00.01.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI	-	-	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.05.2.01.	PENANAMAN MODAL *Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan*	-	-	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.06.2.01.01.	*yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* *Pengelolaan, Pelayanan dan Pemanfaatan Data dan Informasi*	-	-	-	-	-	-	-	-
2.19.	*Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik* URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN	22.775.009.915,00	22.261.773.565,00	1.759.367.836,00	1.717.666.000,00	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.	OLAHRAGA Dinas Kepemudaan dan Olahraga	22.775.009.915,00	22.261.773.565,00	1.759.367.836,00	1.717.666.000,00	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	9.966.377.385,00	9.569.236.906,00	44.696.000,00	44.696.000,00	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.2.01.	DAERAH KABUPATEN/KOTA *Perencanaan, Pengenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat*	61.328.000,00	61.340.400,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.2.01.01.	*Daerah* *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	28.627.500,00	28.627.200,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.2.01.06.	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar*	15.558.000,00	15.479.700,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.2.01.07.	*Realisasi Kinerja SKPD* *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	16.933.500,00	16.933.500,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.2.02.	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	4.341.180.392,00	4.144.475.815,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.2.02.01.	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	4.321.205.592,00	4.124.537.915,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.2.02.05.	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun*	-	-	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.2.02.07.	*SKPD* *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/*	19.976.800,00	19.937.900,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.2.05.	*Triwulanan/ Semesteran SKPD* *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	49.788.000,00	41.000.457,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.2.05.11.	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	49.788.000,00	41.000.457,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.2.06.	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	34.996.000,00	34.687.250,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.2.06.	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	3.523.476.517,00	3.496.586.650,00	44.696.000,00	44.696.000,00	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.2.06.01.	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan*	34.996.000,00	34.687.250,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.2.06.04.	*Kantor* *Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	553.909.500,00	659.511.700,00	44.696.000,00	44.696.000,00	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.2.06.05.	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	2.319.621.497,00	2.301.774.620,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.2.06.06.	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	20.000.000,00	15.750.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.2.06.08.	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	519.943.520,00	519.550.330,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.2.07.	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah*	-	-	-	-	-	-	-	-
	Daerah								

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.449.772.000,00	1.401.472.636,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.2.08.02.	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	357.570.000,00	345.960.636,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.2.08.04.	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.092.194.000,00	1.055.512.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	408.737.350,00	388.973.787,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.2.09.01.	Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	376.617.350,00	357.208.787,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.2.09.06.	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.120.000,00	31.765.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.02.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING**	**1.873.781.736,00**	**1.848.064.138,00**	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.02.2.01.	**KEPEMUDAAN** Penyelenggaraan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan	751.437.906,00	727.093.500,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.02.2.01.02.	Kepemudaan Terhadap Pemuda Paspor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan	644.857.506,00	624.325.200,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.02.2.01.06.	Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Penyelenggaraan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan	106.580.400,00	102.768.300,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.02.2.02.	Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	921.343.836,00	902.970.938,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.02.2.02.02.	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	921.343.836,00	902.970.938,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.	Kabupaten/Kota **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING**	**10.633.901.996,00**	**10.453.709.113,00**	**1.714.669.836,00**	**1.692.960.000,00**	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.01.	**KEOLAHRAGAAN** Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada	644.041.113,00	617.757.959,00	1.714.669.836,00	1.692.960.000,00	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.01.02.	Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan	222.977.858,00	220.957.806,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.01.03.	Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pasyandisn Sekolah	421.063.305,00	397.709.260,00	1.714.669.836,00	1.692.960.000,00	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.02.	dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.044.278.857,00	1.928.816.985,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.19.2.19.0.00.3.00.01.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single	1.304.225.180,00	1.262.731.600,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.3.00.01.03.2.02.02	Event Tingkat Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat	620.199.832,00	606.698.750,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.3.00.01.03.2.02.03	Kabupaten/Kota Partisipasi dan Kedudukannya dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	119.853.645,00	119.386.345,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.3.00.01.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat	3.413.404.828,00	2.385.568.550,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.3.00.01.03.2.03.02	Daerah Provinsi Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	503.412.328,00	501.591.850,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.3.00.01.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	2.905.992.500,00	2.883.977.800,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.3.00.01.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.626.541.500,00	2.620.481.500,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.3.00.01.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Kesetiagaan	2.615.543.000,00	2.615.543.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.3.00.01.03.2.04.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Kesetiagaan	10.998.500,00	10.938.500,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.3.00.01.03.2.05	Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1.900.680.900,00	1.895.135.400,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.3.00.01.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1.607.457.300,00	1.597.945.800,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.3.00.01.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan	6.580.600,00	5.590.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.3.00.01.03.2.05.05	Prasarana Olahraga Rekreasi Pemerlastan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	291.630.000,00	290.589.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.3.00.01.04.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**599.998.965,00**	**598.702.965,00**	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	599.998.965,00	598.702.965,00	-	-	-	-	-	-
2.19.2.19.0.00.0.00.01.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	599.998.965,00	598.702.965,00	-	-	-	-	-	-
2.20.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**420.632.233,00**	**388.531.390,00**	-	-	-	-	-	-
2.20.2.16.2.20.2.21.04.	**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**	**420.632.233,00**	**388.531.390,00**	-	-	-	-	-	-
2.20.2.16.2.20.2.21.04.02.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**420.632.233,00**	**388.531.390,00**	-	-	-	-	-	-
2.20.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	420.632.233,00	388.531.390,00	-	-	-	-	-	-
2.20.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.01	Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisa	231.982.556,00	222.577.770,00	-	-	-	-	-	-
2.20.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.02	dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam	76.223.340,00	64.345.760,00	-	-	-	-	-	-
2.20.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.04	Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	60.417.400,00	52.933.500,00	-	-	-	-	-	-
2.20.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otoritas Statistik Sektoral di Daerah	52.008.937,00	46.674.860,00	-	-	-	-	-	-
2.21.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**156.798.715,00**	**127.053.250,00**	-	-	-	-	-	-
2.21.2.16.2.20.2.21.04.	**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**	**156.798.715,00**	**127.053.250,00**	-	-	-	-	-	-
2.21.2.16.2.20.2.21.04.02.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**156.798.715,00**	**127.053.250,00**	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.21.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.	*Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi*	71.587.900,00	53.938.866,00	-	-	-	-	-	-
2.21.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.02.	*Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya*	20.507.900,00	18.027.800,00	-	-	-	-	-	-
2.21.2.16.2.20.2.21.04.02.2.01.03.	*Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah*	51.079.900,00	45.909.066,00	-	-	-	-	-	-
2.21.2.16.2.20.2.21.04.02.2.02.	*Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat*	85.211.215,00	53.110.400,00	-	-	-	-	-	-
2.21.2.16.2.20.2.21.04.02.2.02.31.	*Daerah Kabupaten/Kota Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah*	85.211.215,00	53.110.400,00	-	-	-	-	-	-
2.22.	*Kabupaten/Kota* **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**914.387.368,00**	**749.725.168,00**	-	-	-	-	-	-
2.22.1.26.2.22.0.00.01.	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**	**914.387.368,00**	**749.725.168,00**	-	-	-	-	-	-
2.22.1.26.2.22.0.00.01.02.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**667.084.248,00**	**602.422.048,00**	-	-	-	-	-	-
2.22.1.26.2.22.0.00.01.02.2.01.	*Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam*	334.399.568,00	332.964.888,00	-	-	-	-	-	-
2.22.1.26.2.22.0.00.01.02.2.01.01.	*Daerah Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan*	334.399.568,00	332.964.888,00	-	-	-	-	-	-
2.22.1.26.2.22.0.00.01.02.2.02.	*Kebudayaan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya*	332.604.060,00	269.457.160,00	-	-	-	-	-	-
2.22.1.26.2.22.0.00.01.02.2.02.01.	*dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan*	291.604.560,00	228.457.160,00	-	-	-	-	-	-
2.22.1.26.2.22.0.00.01.02.2.02.02.	*Tradisi Budaya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Prasarana*	41.000.000,00	41.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.22.1.26.2.22.0.00.01.03.	*Tradisional* **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	-	-	-	-	-	-	-	-
2.22.1.26.2.22.0.00.01.03.2.01.	*Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah*	-	-	-	-	-	-	-	-
2.22.1.26.2.22.0.00.01.03.2.01.31.	*Kabupaten/Kota Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia*	-	-	-	-	-	-	-	-
2.22.1.26.2.22.0.00.01.05.	*Kesenian Tradisional* **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	147.303.120,00	147.303.120,00	-	-	-	-	-	-
2.22.1.26.2.22.0.00.01.05.2.01.	*Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota*	-	-	-	-	-	-	-	-
2.22.1.26.2.22.0.00.01.05.2.01.02.	*Penetapan Cagar Budaya*	-	-	-	-	-	-	-	-
2.22.1.26.2.22.0.00.01.05.2.02.	*Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota*	147.303.120,00	147.303.120,00	-	-	-	-	-	-
2.22.1.26.2.22.0.00.01.05.2.02.01.	*Pelindungan Cagar Budaya*	147.303.120,00	147.303.120,00	-	-	-	-	-	-
2.23.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**11.527.420.888,00**	**11.091.585.969,00**	**651.765.000,00**	**642.796.825,00**	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	**11.527.420.888,00**	**11.091.585.969,00**	**651.765.000,00**	**642.796.825,00**	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	9.933.699.877,00	9.565.068.759,00	332.640.900,00	331.613.225,00	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.2.01	DAERAH KABUPATEN/KOTA *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat*	8.938.948,00	8.938.948,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.2.01.01.	*Daerah* *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4.439.400,00	4.439.400,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.2.01.06.	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar*	4.499.548,00	4.499.548,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.2.01.07.	*Realisasi Kinerja SKPD* *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.2.02.	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	7.224.965.626,00	5.897.953.090,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.2.02.01.	*Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN*	7.216.520.858,00	5.889.537.322,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.2.02.05.	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun*	4.495.168,00	4.495.168,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.2.02.07.	*SKPD* *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/*	3.949.600,00	3.949.600,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.2.05.	*Triwulanan/ Semesteran SKPD* *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	19.655.000,00	15.583.314,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.2.05.11.	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	19.655.000,00	15.583.314,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.2.06.	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	99.995.400,00	98.282.500,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.2.06.	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	762.254.455,00	745.995.605,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.2.06.01.	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan*	99.995.400,00	98.282.500,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.2.06.04.	*Kantor* *Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	354.557.600,00	351.478.200,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.2.06.05.	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	99.993.986,00	97.572.005,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.2.06.06.	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	25.953.000,00	21.375.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.2.06.09.	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	281.745.880,00	276.471.405,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.2.07.	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah*	-	-	332.640.000,00	331.613.225,00	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.2.07.10.	*Daerah* *Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan*	-	-	332.640.000,00	331.613.225,00	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.2.08.	*Lainnya* *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	1.230.492.177,00	1.171.190.702,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.2.08.02.	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	551.141.057,00	808.788.706,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.2.08.03.	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor*	179.550.000,00	176.650.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.2.08.04.	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	499.801.120,00	485.751.996,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.2.09.	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan*	597.294.460,00	566.113.600,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.2.09.01.	*Pemerintahan Daerah* *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak*	297.894.460,00	277.095.300,00	-	-	-	-	-	-
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.23.2.23.2.24.6.00.02.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	289.500.000,00	289.028.300,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.6.00.02.02.	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**1.179.288.153,00**	**1.111.337.768,00**	**505.375.000,00**	**497.435.000,00**	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.6.00.02.02.2.01.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.065.979.241,00	1.009.894.765,00	505.375.000,00	497.435.000,00	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.6.00.02.02.2.01.01.	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan	209.081.620,00	201.824.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.6.00.02.02.2.01.02.	Elektronik Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45.326.000,00	41.898.000,00	475.000.000,00	457.375.000,00	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.6.00.02.02.2.01.04.	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di	191.660.944,00	185.613.444,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.6.00.02.02.2.01.05.	Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.6.00.02.02.2.01.06.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan	57.382.000,00	55.401.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.6.00.02.02.2.01.07.	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat	434.815.065,00	400.506.931,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.6.00.02.02.2.01.09.	Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	128.013.611,00	123.601.393,00	20.375.000,00	20.060.000,00	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.6.00.02.02.2.02.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	123.300.912,00	101.440.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.6.00.02.02.2.02.01.	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	60.673.600,00	58.696.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.6.00.02.02.2.02.03.	Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	22.429.000,00	20.292.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.6.00.02.02.2.02.04.	Pengembangan Literasi berbasis Inklusi Sosial	20.999.312,00	12.455.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.6.00.02.02.2.02.05.	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.6.00.02.03.	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN**	**514.441.458,00**	**475.169.472,00**	**13.750.000,00**	**13.747.600,00**	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.6.00.02.03.2.01.	**NASKAH KUNO** Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	184.140.342,00	182.364.472,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.6.00.02.03.2.01.01.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan,	89.146.750,00	88.945.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.6.00.02.03.2.01.02.	Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno	94.993.592,00	93.609.472,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.6.00.02.03.2.02.	yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang	330.301.416,00	292.805.000,00	13.750.000,00	13.747.600,00	-	-	-	-
2.23.2.23.2.24.6.00.02.03.2.02.01.	Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	330.301.416,00	292.805.000,00	13.750.000,00	13.747.600,00	-	-	-	-
2.24.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**532.187.790,00**	**504.208.966,00**	-	-	-	-	-	-
2.24.2.23.2.24.6.00.02.	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	**532.187.790,00**	**504.208.966,00**	-	-	-	-	-	-
2.24.2.23.2.24.6.00.02.02.	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**525.937.790,00**	**501.956.966,00**	-	-	-	-	-	-
2.24.2.23.2.24.6.00.02.02.2.01.	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	177.982.500,00	171.103.100,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.24.2.23.2.24.0.00.02.02.2.01.02.	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	-	-	-	-	-	-	-	-
2.24.2.23.2.24.0.00.02.02.2.01.03.	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	177.992.500,00	171.103.100,00	-	-	-	-	-	-
2.24.2.23.2.24.0.00.02.02.2.07.	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	135.223.170,00	119.448.570,00	-	-	-	-	-	-
2.24.2.23.2.24.0.00.02.02.2.02.02.	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	135.223.170,00	119.448.570,00	-	-	-	-	-	-
2.24.2.23.2.24.0.00.02.02.2.03.	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	215.732.120,00	211.404.320,00	-	-	-	-	-	-
2.24.2.23.2.24.0.00.02.02.2.03.01.	Tingkat Kabupaten/Kota Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat	215.732.120,00	211.404.320,00	-	-	-	-	-	-
2.24.2.23.2.24.0.00.02.03.	Daerah Kabupaten/Kota Melalui JKN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24.2.23.2.24.0.00.02.03.2.01.	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24.2.23.2.24.0.00.02.03.2.01.01.	Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24.2.23.2.24.0.00.02.03.2.03.	Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang	-	-	-	-	-	-	-	-
2.24.2.23.2.24.0.00.02.03.2.03.01.	Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Perwakilan Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.24.2.23.2.24.0.00.02.03.3.03.02.	atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.24.2.23.2.24.0.00.02.03.3.04.	atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media	-	-	-	-	-	-	-	-
2.24.2.23.2.24.0.00.02.03.2.04.01.	Kabupaten/Kota Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Secara	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Penyerahan Pengelolaan Keabsahan Arsip URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	85.416.962.406,00	77.328.192.962,00	358.933.600,00	175.560.000,00	-	-	-	-
3.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN	1.234.860.201,00	1.032.148.554,00	-	-	-	-	-	-
3.25.3.27.3.25.0.00.01.	PERIKANAN Dinas Pertanian dan Perikanan	1.234.860.201,00	1.032.148.554,00	-	-	-	-	-	-
3.25.3.27.3.25.0.00.01.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	55.158.754,00	51.901.130,00	-	-	-	-	-	-
3.25.3.27.3.25.0.00.01.03.2.02.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	55.158.754,00	51.901.130,00	-	-	-	-	-	-
3.25.3.27.3.25.0.00.01.03.2.02.02.	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan	55.158.754,00	51.901.130,00	-	-	-	-	-	-
3.25.3.27.3.25.0.00.01.04.	Kelembagaan Nelayan Kecil PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.099.731.447,00	908.297.324,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
3.26.3.27.3.25.0.00.01.04.2.02	*Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil*	1.093.731.447,00	908.297.324,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.27.3.25.0.00.01.04.2.02.01.	*Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil*	1.093.731.447,00	908.297.324,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.27.3.25.0.00.01.06.	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL**	**80.000.000,00**	**71.950.200,00**	-	-	-	-	-	-
3.26.3.27.3.25.0.00.01.06.2.03.	**PERIKANAN** *Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan*	80.000.000,00	71.950.200,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.27.3.25.0.00.01.06.2.03.01.	*Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota* *Pengolahan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha*	80.000.000,00	71.950.200,00	-	-	-	-	-	-
3.26.	*Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**7.863.121.583,00**	**7.322.637.441,00**	**87.966.800,00**	**87.786.000,00**	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**	**7.863.121.583,00**	**7.322.637.441,00**	**87.966.800,00**	**87.786.000,00**	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**5.817.755.684,00**	**5.409.341.552,00**	**87.966.800,00**	**87.786.000,00**	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.01.2.01.	**DAERAH KABUPATEN/KOTA** *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat*	23.533.236,00	23.533.236,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.01.2.01.31.	*Daerah* *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	11.420.584,00	11.420.584,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.01.2.01.95.	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar*	12.112.652,00	12.112.652,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.01.2.02.	*Realisasi Kinerja SKPD* *Administasi Keuangan Perangkat Daerah*	4.877.845.181,00	4.081.014.952,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.01.2.02.01.	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	4.866.431.676,00	4.849.600.360,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.01.2.02.06.	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun*	11.414.505,00	11.414.505,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.01.2.02.07.	*SKPD* *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/*	-	-	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.01.2.03.	*Triwulanan/ Semesteran SKPD* *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	7.590.000,00	3.289.574,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.01.2.05.11.	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	7.590.000,00	3.289.574,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.01.2.06.	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	4.999.500,00	1.385.900,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.01.2.06.	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	386.428.620,00	332.742.073,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.01.2.06.11.	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan*	4.999.500,00	1.385.900,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.01.2.06.04.	*Kantor* *Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	119.623.800,00	118.081.600,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.01.2.06.05.	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	72.371.020,00	72.370.456,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.01.2.06.06.	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	4.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.01.2.06.08.	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	16.040.000,00	2.236.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.01.2.06.09.	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	165.122.000,00	132.732.123,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.01.2.06.10.	*Penatausahaan Aset Dinamis pada SKPD*	7.322.000,00	7.322.000,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
3.26.3.26.2.22.0.00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	87.366.600,00	87.780.000,00	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	87.366.600,00	87.780.000,00	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	334.521.947,00	302.298.947,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.000.000,00	2.730.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor	7.650.360,00	7.650.360,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	323.871.587,00	291.918.087,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.791.200,00	135.095.863,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	102.791.200,00	135.095.863,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.02	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	474.017.125,00	459.571.640,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.02.2.01	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	337.815.540,00	304.614.640,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.02.2.01.03	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	337.815.540,00	304.614.640,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.02.2.02	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	2.632.200,00	2.632.200,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.02.2.02.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.632.200,00	2.632.200,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.02.2.03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	23.585.900,00	23.585.900,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.02.2.03.04	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	23.585.900,00	23.585.900,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.02.2.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	108.783.466,00	128.938.700,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.02.2.04.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	108.783.466,00	128.938.700,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1.299.521.525,00	1.076.338.720,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.03.2.01	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.299.521.525,00	1.076.338.720,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.03.2.01.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.03.2.01.02	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	530.476.425,00	450.789.420,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.03.2.01.03	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	670.045.100,00	625.549.300,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata	670.045.100,00	625.549.300,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.05	Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	361.882.169,00	326.985.529,00	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
3.26.3.26.2.22.0.00.01.05.2.01.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	361.882.169,00	326.995.529,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.05.2.01.02.	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan	-	-	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.05.2.01.04.	Kerabatan Pariwisata Sertifikasi Kompetensi dagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	130.267.794,00	99.226.894,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.05.2.01.05.	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan	154.998.520,00	147.131.420,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.22.0.00.01.05.2.01.06.	Konservasi Ekonomi Kreatif Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	66.585.855,00	80.827.455,00	-	-	-	-	-	-
3.27.	Ekonomi Kreatif URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	15.974.603.725,00	14.193.942.179,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.	Dinas Pertanian dan Perikanan	15.974.603.725,00	14.193.942.179,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	12.965.680.873,00	12.020.841.600,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.01.2.01.	DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	13.101.536,00	13.101.536,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.01.2.01.01.	Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.156.136,00	9.156.136,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	3.945.400,00	3.945.400,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.01.2.02.	Realisasi Kinerja SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.410.291.886,00	9.876.511.347,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.399.225.312,00	9.867.444.771,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5.535.912,00	5.535.912,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.01.2.02.07.	SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	5.530.664,00	5.530.664,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.01.2.06.	Triwulanan/ Semesteran SKPD Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	765.851.800,00	570.983.230,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	30.000.000,00	30.000.900,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.01.2.06.04.	Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor	204.383.200,00	201.717.200,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.650.760,00	16.656.171,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.380.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	622.363.040,00	342.451.883,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.01.2.06.10.	Pelaksanaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.065.800,00	10.065.800,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	150.000.000,00	147.435.560,00	-	-	-	-	-	-
	Daerah								

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
3.27.3.27.3.25.0.00.01.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.01.2.07.08.	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00	147.435.500,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.01.2.08.	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.189.625.840,00	1.049.583.749,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	313.626.469,00	259.810.172,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.363.400,00	13.363.400,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	858.935.980,00	776.810.176,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	436.609.800,00	331.326.070,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, dan Pajak	436.609.800,00	331.326.070,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.01.2.09.11.	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**77.889.600,00**	**76.516.360,00**	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.02.2.02.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	77.889.600,00	76.516.360,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.02.2.02.02.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	77.889.600,00	76.516.360,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.02.2.02.03.	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.03.	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.03.2.02.	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.03.2.02.07.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.04.	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**1.147.679.973,00**	**793.608.620,00**	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.04.2.03.	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	851.372.091,00	511.283.428,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.04.2.03.02.	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	851.372.091,00	511.283.428,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.2.25.0.00.01.04.2.04.	Penerapan dan Pengawasan Penyamaan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	296.307.882,00	282.325.200,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.2.25.0.00.01.04.2.04.03.	Penetapan Persyaratan Teknis	296.307.882,00	282.325.200,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.07.	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**1.703.354.276,00**	**1.302.875.591,00**	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.3.25.0.00.01.07.2.01.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.703.354.276,00	1.302.875.591,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
3.27.3.27.2.20.0.00.01.07.2.01.01.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di	1.783.354.279,00	1.202.875.091,00	-	-	-	-	-	-
3.30.	Kecamatan dan Desa URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	14.987.985.811,00	13.871.633.346,00	91.500.000,00	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	14.987.985.811,00	13.871.633.346,00	91.500.000,00	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.13.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	9.800.469.233,00	9.034.978.446,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.01.2.01.	DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	69.077.680,00	44.727.680,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.01.2.01.01.	Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.543.165,00	19.543.165,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.013.810,00	15.013.810,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.013.810,00	3.513.810,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	9.750.532,00	4.250.532,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.01.2.01.07.	Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.756.563,00	2.406.563,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.845.534.020,00	6.561.941.702,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.816.838.804,00	6.533.140.486,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.01.2.02.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9.677.888,00	9.677.888,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	9.677.888,00	9.677.888,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.01.2.02.07.	SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	9.439.480,00	9.439.480,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.01.2.03.	Triwulanan/ Semesteran SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.318.488,00	14.518.488,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.01.2.03.31.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9.439.515,00	3.939.515,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.01.2.03.35.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	9.439.606,00	5.489.606,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.01.2.03.36.	SKPD Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.439.367,00	5.089.367,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.160.900,00	4.160.006,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	712.401.626,00	680.695.506,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	4.160.900,00	4.160.006,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.01.2.06.04.	Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor	212.991.446,00	202.017.203,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.384.466,00	28.302.122,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.000.000,00	15.500.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	449.625.760,00	433.765.184,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
3.30.3.30.3.31.0.00.12.01.2.08.	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	1.623.468.418,00	1.396.503.367,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.01.2.08.01.	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.01.2.08.02.	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	479.939.418,00	384.420.367,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.01.2.08.04.	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	1.134.430.000,00	1.002.156.900,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.01.2.09.	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	417.408.801,00	332.349.471,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.01.2.09.01.	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak*	200.303.984,00	163.456.954,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.01.2.09.02.	*Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan*	195.505.217,00	147.204.317,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.01.2.09.06.	*Peralatan Kantor Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	21.599.600,00	21.599.600,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.01.2.09.09.	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.01.2.09.10.	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.02.	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**44.184.312,00**	**44.184.312,00**	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.02.2.01.	*Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Jam Usaha Toko Swalayan*	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.02.2.01.01.	*Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.02.2.02.	*Penerbitan Tanda Daftar Gudang*	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.02.2.02.01.	*Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang*	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.02.2.06.	*Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota*	44.184.312,00	44.184.312,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.02.2.06.02.	*Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemerataan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2*	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.02.2.06.03.	*Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)*	44.184.312,00	44.184.312,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.03.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**3.215.124.360,00**	**3.122.164.438,00**	**91.500.000,00**	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.03.2.01.	*Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*	3.215.124.360,00	3.122.164.438,00	91.500.000,00	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.03.2.01.01.	*Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan*	3.215.124.360,00	3.122.164.438,00	91.500.000,00	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.03.2.01.02.	*Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*	-	-	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
3.30.2.30.3.31.0.00.12.03.2.02	*Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan*	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.2.30.3.31.0.00.12.03.2.02.01.	*Masyarakat di Wilayah Kerjanya Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi*	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.04.	*Perdagangan* **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN**	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.2.30.3.31.0.00.12.04.2.01.	**POKOK DAN BARANG PENTING** *Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang*	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.2.30.3.31.0.00.12.04.2.01.01.	*Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan*	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.2.30.3.31.0.00.12.04.2.01.02.	*Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang*	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.2.30.3.31.0.00.12.04.2.02.	*Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan*	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.2.30.3.31.0.00.12.04.2.02.01.	*Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan*	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.06.	*Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN**	511.776.857,00	469.675.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30.2.30.3.31.0.00.12.06.2.01.	**KONSUMEN** *Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan*	511.776.857,00	469.675.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30.2.30.3.31.0.00.12.06.2.01.31.	*Pengawasan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang*	511.776.857,00	469.675.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30.2.30.3.31.0.00.12.06.2.01.32.	*Pengawasan/Pengujian Metrologi Legal*	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.2.30.3.31.0.00.12.06.2.01.33.	*Penyidikan Metrologi Legal*	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.3.30.3.31.0.00.12.07.	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK**	1.416.430.941,00	1.200.633.150,00	-	-	-	-	-	-
3.30.2.30.3.31.0.00.12.07.2.01.	**DALAM NEGERI** *Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan*	1.416.430.941,00	1.200.633.150,00	-	-	-	-	-	-
3.30.2.30.3.31.0.00.12.07.2.01.31.	*Produk Dalam Negeri Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di*	436.629.346,00	324.814.156,00	-	-	-	-	-	-
3.30.2.30.3.31.0.00.12.07.2.01.32.	*Tingkat Kabupaten/Kota Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri*	979.801.595,00	875.818.994,00	-	-	-	-	-	-
3.31.	*di Tingkat Kabupaten/Kota* **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	2.847.849.963,00	2.244.034.711,00	-	-	-	-	-	-
3.31.1.30.3.31.0.00.12.	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	2.847.849.963,00	2.244.034.711,00	-	-	-	-	-	-
3.31.1.30.3.31.0.00.12.02.	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN**	2.847.849.963,00	2.244.034.711,00	-	-	-	-	-	-
	INDUSTRI								

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
3.31.3.30.3.31.0.00.12.02.2.01.	*Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri*	2.647.849.963,00	2.244.534.711,00	-	-	-	-	-	-
3.31.3.30.3.31.3.00.12.02.2.01.02.	*Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah*	300.000.000,00	278.549.120,00	-	-	-	-	-	-
3.31.3.30.3.31.3.00.12.02.2.01.03.	*Pengembangan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan*	2.019.332.963,00	1.638.095.811,00	-	-	-	-	-	-
3.31.3.30.3.31.3.00.12.02.2.01.04.	*Sumber Daya Industri Kebijakan, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri*	328.486.000,00	327.390.000,00	-	-	-	-	-	-
3.31.3.30.3.31.3.00.12.03.	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	-	-	-	-	-	-	-	-
3.31.3.30.3.31.3.00.12.03.2.01.	*Pemrosesan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha*	-	-	-	-	-	-	-	-
3.31.3.30.3.31.3.00.12.03.2.01.02.	*Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang*	-	-	-	-	-	-	-	-
3.31.3.30.3.31.3.00.12.04.	*Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota* **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI**	-	-	-	-	-	-	-	-
3.31.3.30.3.31.0.00.12.04.2.01.	**NASIONAL** *Penyediaan informasi industri untuk Informasi Industri untuk*	-	-	-	-	-	-	-	-
3.31.3.30.3.31.0.00.12.04.2.01.02.	*IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri*	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	*Kabupaten/Kota Melalui SIINas* **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	750.049.475.152,00	712.138.354.219,62	24.328.222.000,00	23.934.839.640,00	-	-	-	-
4.01.	**SEKRETARIAT DAERAH**	176.186.158.441,00	167.000.886.865,91	10.606.820.300,00	10.371.833.620,00	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.	**Sekretariat Daerah**	176.186.158.441,00	167.000.886.865,91	10.606.820.300,00	10.371.833.620,00	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	145.691.886.838,00	136.540.787.362,69	10.606.820.300,00	10.371.833.620,00	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.01.	**DAERAH KABUPATEN/KOTA** *Perencanaan, Pengenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat*	226.958.277,00	205.476.576,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.01.01.	*Daerah* Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.965.848,00	51.414.248,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18.882.432,00	15.552.432,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.955.748,00	12.955.748,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.220.770,00	9.220.770,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9.053.604,00	9.053.604,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	87.925.875,00	81.329.868,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.	*Realisasi Kinerja SKPD* Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	307.535.111,00	166.565.351,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.01.4.01.3.00.3.00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.989.501.377,00	20.690.060.610,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.3.00.3.00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.864.278.176,00	20.571.274.614,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.3.00.3.00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan/Verifikasi Keuangan	207.529.111,00	166.965.351,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.3.00.3.00.01.01.2.02.05	SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	60.049.188,00	57.084.248,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.3.00.3.00.01.01.2.02.07	SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	65.174.613,00	61.701.749,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.3.00.3.00.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	176.456.322,00	161.227.313,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.3.00.3.00.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	176.456.322,00	161.227.313,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.3.00.3.00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	500.522.080,00	463.615.560,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.3.00.3.00.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	341.446.500,00	339.675.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.3.00.3.00.01.01.2.05.03	Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16.673.580,00	74.100.560,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.3.00.3.00.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	62.400.000,00	49.840.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.3.00.3.00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.118.578.600,00	4.965.931.200,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.3.00.3.00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.564.889.918,00	29.175.958.252,00	2.847.327.600,00	2.839.195.770,00	-	-	-	-
4.01.4.01.3.00.3.00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	5.118.578.600,00	4.965.931.200,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.3.00.3.00.01.01.2.06.03	Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	2.847.327.600,00	2.839.195.770,00	-	-	-	-
4.01.4.01.3.00.3.00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.185.636.100,00	23.145.327.588,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.3.00.3.00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.678.771.048,00	3.637.804.239,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.3.00.3.00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	406.477.800,00	204.196.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.3.00.3.00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.059.559.040,00	2.059.915.526,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.3.00.3.00.01.01.2.06.10	Penatausahaan Aset Daerah pada SKPD	174.420.930,00	128.915.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.3.00.3.00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.069.739.680,00	2.071.844.100,00	7.634.492.700,00	7.439.366.556,00	-	-	-	-
4.01.4.01.3.00.3.00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	-	-	7.452.492.700,00	7.236.366.556,00	-	-	-	-
4.01.4.01.3.00.3.00.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.069.739.680,00	2.071.844.100,00	182.000.000,00	182.000.000,00	-	-	-	-
4.01.4.01.3.00.3.00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.229.184.407,00	28.991.220.650,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.3.00.3.00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.000.000,00	95.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.3.00.3.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.564.574.884,00	12.041.942.105,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.3.00.3.00.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan Kantor	9.407.853.500,00	9.404.836.045,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.3.00.3.00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.156.756.243,00	7.449.442.500,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.3.00.3.00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.708.351.009,00	35.156.122.678,65	126.000.000,00	124.571.300,00	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	2.653.856.500,00	2.775.997.174,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.02.	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	12.544.576.500,00	12.580.546.907,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.05.	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel	233.050.000,00	228.909.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.014.669.500,00	1.009.936.200,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.09.	PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.192.148.400,00	17.787.951.097,65	125.000.000,00	124.071.300,00	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.11.	PemeliharaanRehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	870.050.000,00	792.991.900,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.11.	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan	1.324.841.261,00	1.155.400.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.11.01.	Wakil Kepala Daerah Pengadaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala	159.070.861,00	-	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.11.02.	Daerah Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala	161.210.300,00	160.499.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.11.03.	Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala	5.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.11.04.	Daerah Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan	995.360.000,00	995.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.	Wakil Kepala Daerah Perangkat Organisasi	1.161.022.084,00	842.880.528,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.01.	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	412.334.256,00	394.525.248,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.02.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	131.360.300,00	93.332.014,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.03.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	122.781.510,00	78.928.690,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.04.	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	95.867.208,00	95.676.208,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	377.110.810,00	370.318.368,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.14.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12.563.057.112,00	13.496.564.160,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.14.01.	Fasilitasi Kaprotokolan	4.602.069.724,00	4.575.942.636,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.14.02.	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	6.472.588.370,00	8.446.094.780,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.14.03.	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2.488.399.018,00	2.474.526.744,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**28.794.285.281,00**	**27.196.173.478,26**	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.01.	Administrasi Tata Pemerintahan	3.334.741.282,00	3.047.744.774,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.01.01.	Perataan Administrasi Pemerintahan	1.016.445.934,00	803.275.963,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.01.02.	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1.037.145.026,00	1.026.297.030,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.01.03.	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.281.149.326,00	1.218.172.181,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.02	Peleksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	22.000.442.211,00	20.988.412.475,36	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.324.820.121,00	3.113.162.260,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.02.03.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait	8.990.097.318,00	8.311.984.302,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.02.03.	Kesejahteraan Sosial Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait	9.685.524.772,00	8.563.685.713,36	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.03.	Kesejahteraan Masyarakat Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	968.769.058,00	946.371.584,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.03.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.618.220.690,00	1.445.308.070,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.03.01.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	154.159.732,00	131.572.544,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.03.02.	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.464.071.148,00	1.313.734.026,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.03.03.	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi	968.769.058,00	946.371.584,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.04.	Hukum Fasilitasi Kerja Sama Daerah	872.081.890,00	779.306.575,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.04.01.	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	458.677.215,00	442.469.449,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.04.02.	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	239.765.335,00	176.901.716,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.04.03.	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	173.639.306,00	159.935.410,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**1.700.285.322,00**	**1.347.949.925,00**	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.01.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	432.892.306,00	399.736.095,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.01.01.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	185.679.566,00	140.213.219,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.01.02.	Pengelolaan BUMD dan BLUD Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	117.783.060,00	92.293.738,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.01.03.	Pelancaran dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	89.449.615,00	74.231.138,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.02.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	436.735.162,00	267.093.890,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.02.01.	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	114.204.124,00	48.288.300,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.02.02.	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	133.505.963,00	129.914.115,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.02.03.	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	159.026.475,00	107.991.475,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.03.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	835.170.414,00	814.615.062,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.03.01.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	110.484.896,00	104.906.620,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.03.02.	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	333.949.870,00	334.682.342,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.03.03.	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	176.735.648,00	175.025.920,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.04.	Pemanfaatan Kebijakan Sumber Daya Alam	254.457.440,00	139.498.958,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.04.01.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,	70.087.213,00	46.073.273,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.04.02.	Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan	93.743.015,00	31.854.980,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.04.03.	dan Lingkungan Hidup Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	133.637.210,00	62.570.705,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.02.	SEKRETARIAT DPRD	188.838.579.135,00	189.868.280.244,00	1.557.290.700,00	1.545.781.700,00	-	-	-	-
4.02.4.02.8.00.0.00.01.01.	Sekretariat DPRD	188.838.579.135,00	189.868.280.244,00	1.557.290.700,00	1.545.781.700,00	-	-	-	-
4.02.4.02.8.00.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	88.306.415.521,00	77.113.863.944,00	1.557.290.700,00	1.545.781.700,00	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.5.00.01.01.2.01.	DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	89.998.175,00	89.998.175,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.5.00.01.01.2.01.01.	Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59.999.300,00	59.999.300,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.5.00.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	17.999.760,00	17.999.760,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.5.00.01.01.2.01.07.	Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.999.115,00	11.999.115,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.5.00.01.01.2.02.	Administasi Keuangan Perangkat Daerah	7.926.229.394,00	7.578.258.656,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.5.00.01.01.2.02.01.	Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.872.229.882,00	7.522.258.144,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.5.00.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	29.999.700,00	29.999.700,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.5.00.01.01.2.02.07.	SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	25.999.812,00	25.999.812,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.5.00.01.01.2.03.	Triwulanan/ Semesteran SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.169.272,00	30.169.272,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.5.00.01.01.2.03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	14.999.972,00	14.999.972,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.5.00.01.01.2.03.06.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	15.169.300,00	15.169.300,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.5.00.01.01.2.05.	SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	963.235.200,00	901.697.950,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.5.00.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	411.257.200,00	407.482.450,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.5.00.01.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	551.978.000,00	394.215.500,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.5.00.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	623.969.275,00	623.760.400,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.5.00.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.304.764.252,00	12.917.733.531,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.5.00.01.01.2.06.01.	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	623.969.275,00	623.760.400,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.5.00.01.01.2.06.02.	Kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000,00	149.469.400,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.5.00.01.01.2.06.04.	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	5.553.342.900,00	5.239.322.900,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.5.00.01.01.2.06.05.	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.452.943.096,00	1.476.459.781,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.5.00.01.01.2.06.06.	Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	303.840.000,00	303.570.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.5.00.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.804.636.256,00	5.748.979.550,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.5.00.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	1.457.744.076,00	1.427.723.000,00	1.557.290.700,00	1.545.781.700,00	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.5.00.01.01.2.07.02.	Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.5.00.01.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	-	-	166.427.000,00	165.827.700,00	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.07.08.	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	650.000.000,00	648.461.000,00	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.427.744.978,00	1.427.723.006,00	740.853.700,00	731.493.000,00	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.587.830.626,00	5.230.473.446,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.690.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.284.628.154,00	2.260.862.109,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	802.710.200,00	586.450.200,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.691.812.544,00	2.383.161.140,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.548.552.218,00	9.430.486.360,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.09.01.	Penyelenggaraan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	1.748.952.600,00	1.401.889.200,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.09.02.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.449.329.120,00	814.450.450,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.09.05.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	269.100.000,00	269.100.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	753.986.600,00	745.775.500,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.327.917.698,00	5.199.271.110,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.15.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	36.127.829.273,00	35.680.929.833,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.15.01.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	34.988.477.578,00	34.668.909.006,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.15.02.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	867.624.995,00	866.295.125,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.15.03.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	271.726.700,00	145.725.700,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.16.	Layanan Administrasi DPRD	4.636.976.644,00	4.301.781.809,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.16.01.	Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD	705.611.160,00	613.743.240,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.16.02.	Fasilitasi Fraksi DPRD	438.676.340,00	352.511.740,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.16.03.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	3.492.689.544,00	3.335.526.829,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**118.538.159.814,00**	**111.955.286.700,00**	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.01.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	349.394.952,00	151.531.448,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.01.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.664.661.632,00	1.610.808.491,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.01.01.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	138.953.448,00	42.211.448,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.01.02.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.599.011.688,00	1.567.208.527,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.01.03.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.01.04.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	210.941.504,00	106.320.000,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.01.05.	Penyusunan Tata Tertib DPRD	65.643.964,00	43.596.964,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	336.321.329,00	236.046.600,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.01.	Pembahasan KUA dan PPAS	76.909.904,00	75.801.800,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.02.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	59.545.904,00	59.337.800,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.03.	Pembahasan APBD	96.765.704,00	17.364.600,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.04.	Pembahasan APBD Perubahan	66.435.904,00	66.197.800,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.05.	Pembahasan Laporan Semester	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.06.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	37.593.904,00	17.364.600,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	18.246.492,00	17.588.492,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	6.011.234.400,00	5.995.968.600,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.01.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.301.714.500,00	1.299.815.500,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.02.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	2.005.031.500,00	1.995.462.700,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.03.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.502.344.200,00	1.500.345.200,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.04.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.202.344.200,00	1.200.345.200,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.06.	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.07.	Pengawasan Penggunaan Anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.08.	Penelahaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	18.246.492,00	17.588.492,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.04.	Peningkatan Kapasitas DPRD	58.305.305.324,00	55.277.575.455,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.04.02.	Pendalaman Tugas DPRD	1.585.936.000,00	1.448.707.437,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.04.03.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	44.681.261.220,00	42.131.314.778,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.04.04.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.584.720.000,00	1.284.400.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.04.05.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	330.720.000,00	319.200.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.04.06.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	8.679.455.300,00	8.056.594.240,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.04.07.	Penyusunan Program Kerja DPRD	1.543.212.804,00	1.237.369.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.05.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	23.359.161.274,00	22.117.128.273,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.05.01.	Kunjungan Kerja dalam Daerah	269.141.296,00	97.061.296,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.05.02.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	53.139.000,00	53.139.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.05.03.	Pelaksanaan Reses	23.036.380.978,00	21.975.927.977,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.06.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	27.999.696,00	9.712.200,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.06.02.	Pengawasan Kode Etik DPRD	27.999.696,00	9.712.200,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.07.	Pembahasan Kerja Sama Daerah	5.052.381.974,00	4.154.644.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.07.02.	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	5.052.381.974,00	4.154.644.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.08.	Fasilitasi Tugas DPRD	23.414.252.550,00	22.385.311.141,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.08.01.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	11.319.339.120,00	10.662.957.811,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.08.02.	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	45.552.654,00	27.440.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.08.03.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	88.570.296,00	56.252.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.08.04.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	11.979.792.480,00	11.636.661.326,00	-	-	-	-	-	-
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	299.624.175.552,00	272.719.019.514,00	9.883.109.948,00	9.045.744.800,00	16.760.648.004,00	1.522.252.514,00	-	-
5.01.	PERENCANAAN	13.212.189.955,00	10.566.739.175,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13.212.189.955,00	10.566.739.175,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.685.198.676,00	8.434.801.565,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.951.600,00	30.978.800,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.969.000,00	13.945.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.476.700,00	7.706.600,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.505.900,00	9.325.200,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.411.823.682,00	6.086.079.961,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.391.901.182,00	6.066.669.461,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.456.500,00	11.206.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.465.600,00	8.193.500,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	298.608.000,00	158.909.897,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	174.804.000,00	70.152.100,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	123.804.000,00	38.737.797,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.607.300,00	90.578.150,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.429.010.375,00	927.045.470,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	92.607.300,00	90.578.150,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	548.064.000,00	508.381.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.287.825,00	43.460.500,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000,00	12.350.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750.222.950,00	208.102.970,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	68.435.600,00	66.647.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	905.556.419,00	786.311.861,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.600.000,00	3.600.000,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	900.968.419,00	794.713.861,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	511.588.200,00	402.704.416,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	394.742.200,00	286.894.416,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.846.000,00	115.710.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.579.991.738,00	1.838.784.320,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.01.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.268.319.370,00	1.686.497.520,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.01.03.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	294.768.544,00	107.693.900,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.01.04.	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	272.376.250,00	124.450.800,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.01.05.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	136.124.998,00	139.856.200,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.01.06.	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	64.999.732,00	-	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.01.07.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.800.250.246,00	1.314.902.620,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.02.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	331.809.468,00	173.983.500,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.02.01.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	107.383.300,00	106.785.700,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.02.02.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	16.243.228,00	8.349.700,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.02.03.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	98.282.940,00	8.836.100,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.03.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	89.652.000,00	58.333.300,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.03.01.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	11.602.800,00	3.064.700,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.03.03.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	78.249.780,00	55.268.600,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	947.090.136,00	293.353.300,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.01.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	461.869.824,00	187.228.100,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.01.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	43.229.600,00	17.164.000,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.01.5.01.5.00.0.00.01.03.2.01.32	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	40.867.400,00	17.597.400,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.5.00.0.00.01.03.2.01.33	Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	64.735.900,00	13.987.900,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.5.00.0.00.01.03.2.01.34	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	-	-	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.5.00.0.00.01.03.2.01.35	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	63.499.940,00	17.008.800,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.5.00.0.00.01.03.2.01.36	Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	71.488.940,00	26.624.400,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.5.00.0.00.01.03.2.01.37	Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	40.481.900,00	21.758.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.5.00.0.00.01.03.2.01.38	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	137.355.744,00	52.229.600,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.5.00.0.00.01.03.3.02	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	333.443.312,00	87.998.706,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.5.00.0.00.01.03.2.02.01	(Sumber Daya Alam) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	67.995.572,00	29.027.700,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.5.00.0.00.01.03.2.02.02	Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	62.576.172,00	19.743.700,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.5.00.0.00.01.03.2.02.03	Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	30.449.888,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.5.00.0.00.01.03.2.02.05	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	63.799.900,00	12.072.700,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.5.00.0.00.01.03.2.02.06	Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	62.716.900,00	17.652.600,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.5.00.0.00.01.03.2.02.07	Perangkat Daerah Bidang SDA Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	44.804.600,00	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.5.00.0.00.01.03.2.03	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	151.977.660,00	39.128.500,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.5.00.0.00.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	59.958.800,00	16.502.600,00	-	-	-	-	-	-
	Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.01.5.01.0.00.5.00.01.03.2.03.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	57.793.300,00	16.023.900,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.0.00.5.00.01.03.2.03.03.	Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	24.226.800,00	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur KEUANGAN	113.173.787.342,00	104.640.945.824,00	6.472.977.174,00	4.168.547.408,00	8.383.324.782,00	781.126.257,00	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	29.493.672.631,00	26.375.064.283,00	1.946.082.974,00	1.770.083.000,00	8.383.324.782,00	781.126.257,00	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	30.279.734.189,00	18.439.278.622,00	1.946.082.974,00	1.770.083.000,00	-	-	-	-
5.02.5.02.5.00.0.00.02.01.2.01.	DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.527.690,00	35.759.508,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.5.00.0.00.02.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.102.100,00	18.718.783,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.5.00.0.00.02.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IKPDaer	17.425.590,00	17.038.745,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.2.02.	Realisasi Kinerja SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.450.598.550,00	10.014.929.850,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.413.126.550,00	9.978.073.900,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	19.005.400,00	16.397.210,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.2.02.07.	SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	18.467.600,00	18.457.640,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.2.05.	Triwulanan/ Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34.698.000,00	10.859.214,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.2.05.10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	34.698.000,00	10.859.214,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.738.829.788,00	5.575.836.419,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.430.897.650,00	1.404.621.300,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	439.349.500,00	438.702.100,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.200.000,00	16.200.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.314.227.518,00	605.159.269,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.2.06.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.538.354.900,00	3.260.949.550,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.946.082.974,00	1.770.083.000,00	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	1.750.082.974,00	1.672.403.000,00	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.2.07.08.	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	196.000.000,00	97.680.000,00	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	882.820.467,00	788.505.473,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	882.820.467,00	788.505.473,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.136.449.784,00	1.616.293.155,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	419.278.836,00	271.074.806,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.2.09.02	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.227.575.448,00	860.054.152,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.2.09.11	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	489.594.500,00	485.164.200,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**6.149.272.117,00**	**5.734.168.811,00**	-	-	**8.383.324.782,00**	**791.126.257,00**	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.01	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.495.337.150,00	3.325.449.955,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	150.245.100,00	150.245.100,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	146.308.200,00	146.308.200,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	250.793.400,00	221.363.760,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	198.561.900,00	198.426.050,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.298.718.550,00	1.253.634.930,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	982.552.200,00	947.901.225,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	469.027.800,00	405.978.756,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.402.227.680,00	1.317.824.550,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.03.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	120.554.500,00	126.788.999,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.03.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	92.685.750,00	92.685.750,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.03.09	Rekonsiliasi Data Pencairan dan Pengelolaan Kas serta Penyusunan dan Pembahasan atas SPSD dengan Instansi Terkait	982.351.800,00	959.004.200,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang	118.933.400,00	110.470.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.02.11	Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Pembinaan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah	98.702.130,00	20.696.100,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.03	Kabupaten/Kota Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	313.053.237,00	179.748.806,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.03	Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	836.784.100,00	811.147.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.02.03	Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban	117.000.000,00	115.137.700,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.03.05	Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	738.430.400,00	720.265.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.03.09	tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Penyusunan Kebijakan dan Pandoan Teknis Operasional	46.785.600,00	45.430.050,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.03.10	Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan	34.584.106,00	29.314.100,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.03.11	Keuangan Pemerintah Daerah Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	313.053.237,00	179.748.806,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.04	Pemerintah Kabupaten/Kota Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-	-	-	-	8.383.334.782,00	781.126.257,00	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.03.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.004.676.325,00	2.201.615.650,00	-	-	8.383.334.782,00	781.126.257,00	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.03.2.01.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.004.676.325,00	2.201.615.650,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.03.2.01.02.	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.03.2.01.03.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	477.186.700,00	458.912.300,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.03.2.01.06.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	1.595.287.600,00	1.306.259.600,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.03.2.01.08.	Penilaian Barang Milik Daerah	308.428.750,00	178.369.100,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.03.2.01.09.	Pengamanan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	100.690.000,00	35.633.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.03.2.01.10.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan	103.304.000,00	99.734.200,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.03.2.01.11.	Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	179.892.660,00	122.077.750,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.02.5.02.0.00.0.00.02.03.2.01.12.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	922.000.000,00	190.742.400,50	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.02.03.2.01.13.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah	837.885.573,00	99.670.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.	Kabupaten/Kota Badan Pendapatan Daerah	93.990.094.911,00	79.395.881.541,00	2.927.694.200,00	2.168.464.400,00	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	56.000.940.887,00	56.162.088.001,00	2.211.294.200,00	2.082.388.400,00	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.268.000,00	12.700.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.592.000,00	4.675.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.592.000,00	1.675.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.592.000,00	1.675.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.192.000,00	4.675.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.434.860.847,00	42.926.370.871,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44.431.418.847,00	42.923.020.871,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.592.000,00	1.675.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.2.02.07.	SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.592.000,00	1.675.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	447.102.000,00	151.329.170,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	447.102.000,00	151.329.170,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	154.723.050,00	139.007.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.360.900.090,00	4.250.012.260,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	154.723.050,00	139.007.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.595.211.400,00	2.463.678.400,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.082.768.930,00	1.071.587.140,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.000.000,00	21.600.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	944.919.760,00	692.846.720,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.211.294.200,00	2.082.388.400,00	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	-	-	932.857.300,00	831.852.150,00	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	1.278.636.900,00	1.150.656.300,00	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.647.900.880,00	2.267.082.690,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.2.08.02.	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	1.289.884.506,00	1.028.450.752,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.2.08.03.	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	625.652.706,00	520.257.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.2.08.04.	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	841.883.686,00	707.874.438,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.2.09.	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan*	6.730.346.000,00	5.415.586.910,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.03.0.00.0.00.03.01.2.09.01.	*Pemerintahan Daerah* *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak*	357.144.000,00	313.284.900,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.2.09.02.	*Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan*	1.058.652.000,00	935.377.900,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.2.09.06.	*Pelaksanaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan* *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	1.490.000.000,00	1.358.579.900,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.2.09.11.	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	3.884.550.000,00	2.828.345.910,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.03.0.00.0.00.03.04.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**25.680.053.744,00**	**22.103.793.540,00**	**316.600.000,00**	**316.155.000,00**	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.04.2.01.	*Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah*	25.680.053.744,00	22.103.793.540,00	316.600.000,00	316.155.000,00	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.04.2.01.01.	*Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah*	526.920.000,00	522.476.700,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.04.2.01.02.	*Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah*	403.214.000,00	299.428.551,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.04.2.01.03.	*Pelayanan dan Pengolahan Data Pajak Daerah* *Penyuluhan dan Pelayanan Informasi Perpajakan Serta Pengelolaan Pengaduan*	5.906.560.402,00	5.620.415.800,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.04.2.01.05.	*Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah*	3.433.522.366,00	2.835.913.804,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.04.2.01.06.	*Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelayanan Basis Data Pajak Daerah*	1.892.608.864,00	1.464.032.496,00	316.600.000,00	316.155.000,00	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.04.2.01.07.	*Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan* *(PBB/P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)*	1.399.411.714,00	1.136.925.982,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.04.2.01.08.	*Penetapan Wajib Pajak Daerah*	33.280.240,00	32.238.240,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.04.2.01.11.	*Penagihan Pajak Daerah*	8.801.935.008,00	8.295.969.025,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.04.2.01.12.	*Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah*	431.554.760,00	336.922.410,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.04.2.01.13.	*Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah*	2.377.754.488,00	1.534.631.138,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.04.2.01.14.	*Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*	301.810.000,00	24.840.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03.	**KEPEGAWAIAN**	**13.506.932.039,00**	**12.486.333.384,00**	**359.577.800,00**	**348.825.000,00**	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**13.506.932.039,00**	**12.486.333.384,00**	**359.577.800,00**	**348.825.000,00**	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**11.336.801.527,00**	**10.544.467.951,00**	**359.577.800,00**	**348.825.000,00**	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.03.5.03.5.04.5.00.02.01.2.01.	Perencanaan, Pengenggorasi, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	29.409.800,00	29.999.800,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.01.2.01.01.	Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.985.800,00	15.985.800,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	8.615.100,00	8.165.100,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.01.2.01.07.	Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.808.900,00	4.808.900,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.925.385.581,00	7.505.223.344,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.01.2.02.01.	Pecyedlaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.914.767.881,00	7.494.951.344,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5.480.800,00	5.304.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.01.2.02.07.	SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	5.137.100,00	4.968.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.01.2.06.	Triwulanan/ Semesteran SKPD Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.440.285.720,00	2.291.217.419,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.01.2.06.04.	Pecyedlaan Bahan Logistik Kantor	268.233.800,00	263.218.800,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.01.2.06.05.	Pecyedlaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.554.300.316,00	1.533.497.100,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.01.2.06.06.	Pecyedlaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	599.721.526,00	394.511.419,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	-	-	352.577.800,00	246.825.000,00	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.01.2.07.06.	Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	116.577.800,00	102.425.000,00	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.01.2.07.08.	Pengadaan Alat Tak Berwujud	-	-	246.000.000,00	244.400.000,00	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.01.2.08.	Pecyedlaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	530.654.000,00	501.984.988,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.01.2.08.02.	Pecyedlaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	148.000.000,00	148.400.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.01.2.08.04.	Pecyedlaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	382.654.000,00	353.584.988,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	410.096.436,00	307.022.400,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.01.2.09.01.	Pemerintahan Daerah Pecyedlaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	328.996.436,00	225.922.400,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.01.2.09.06.	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.100.000,00	81.100.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**2.202.930.512,00**	**1.941.925.433,00**	-	-	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.01.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	597.551.000,00	597.507.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.01.02.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan	113.172.800,00	106.144.056,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.01.03.	untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	285.324.400,00	214.909.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.01.08.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	212.650.800,00	188.400.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.01.10.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	86.393.900,00	82.154.000,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.02	*Mutasi dan Promosi ASN*	926.432.860,00	800.852.881,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.02.01	*Pengelolaan Mutasi ASN*	120.794.100,00	119.925.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.02.02	*Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN*	24.446.500,00	24.433.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.02.03	*Pengelolaan Promosi ASN*	764.192.560,00	656.594.881,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.03	*Pengembangan Kompetensi ASN*	239.375.500,00	215.295.300,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.03.01	*Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN*	127.323.800,00	115.816.800,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.03.02	*Pengelolaan Assessment Center*	111.851.700,00	100.578.500,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.04	*Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*	416.580.152,00	333.270.152,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.04.06	*Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur*	29.695.600,00	23.695.600,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.04.07	*Pembinaan Disiplin ASN*	340.814.400,00	295.524.400,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.04.08	*Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN*	32.383.352,00	9.383.352,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.03.5.04.0.00.02.02.2.04.09	*Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai*	4.455.800,00	4.455.800,00	-	-	-	-	-	-
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**2.370.891.825,00**	**1.580.966.111,00**	-	-	-	-	-	-
5.04.5.03.5.04.0.00.02	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya**	**2.370.891.825,00**	**1.580.966.111,00**	-	-	-	-	-	-
5.04.5.03.5.04.0.00.02.02.	**Manusia PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**2.370.891.825,00**	**1.580.966.111,00**	-	-	-	-	-	-
5.04.5.03.5.04.0.00.02.02.2.01	*Pengembangan Kompetensi Teknis*	722.307.606,00	523.727.702,00	-	-	-	-	-	-
5.04.5.03.5.04.0.00.02.02.2.01.03	*Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum*	722.307.606,00	523.727.702,00	-	-	-	-	-	-
5.04.5.03.5.04.0.00.02.02.2.02	*Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi*	1.648.584.025,00	1.057.238.409,00	-	-	-	-	-	-
5.04.5.03.5.04.0.00.02.02.2.02.01	*Manajerial dan Fungsional Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi*	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.5.03.5.04.0.00.02.02.2.02.03	*Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah*	399.817.200,00	172.384.000,00	-	-	-	-	-	-
5.04.5.03.5.04.0.00.02.02.2.02.07	*Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional Kepemimpinan, dan Prajabatan*	1.248.766.825,00	884.854.409,00	-	-	-	-	-	-
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**7.456.326.720,00**	**7.080.025.263,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.	**Badan Penelitian dan Pengembangan**	**7.456.326.720,00**	**7.080.025.263,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6.636.758.668,00	6.289.135.233,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.2.01.	DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	14.500.000,00	13.895.100,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.2.01.01.	Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.729.300,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IKPKoor	4.500.000,00	4.261.900,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.2.01.07.	Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.904.900,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.690.724.022,00	4.464.284.931,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.690.224.022,00	4.463.919.931,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5.500.000,00	5.463.500,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.2.02.07.	SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	5.000.000,00	4.901.500,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.2.05.	Triwulanan/ Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.788.000,00	24.950.880,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.2.05.10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32.788.000,00	24.950.880,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.980.300,00	14.897.900,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.329.245.073,00	1.304.785.812,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	14.980.300,00	14.897.900,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.2.06.04.	Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor	378.694.808,00	378.194.300,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	330.695.608,00	321.379.750,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.394.009,00	12.099.900,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	858.310.648,00	826.291.762,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.2.06.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	60.000.008,00	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.2.07.	Elektronik pada SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	-	-	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.2.07.06.	Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.595.668,00	300.020.240,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.715.000,00	21.600.000,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	288.661.668,00	278.420.240,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	213.963.800,00	166.716.170,00	-	-	-	-	-	-
	Pemerintahan Daerah								

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	205.451.300,00	156.316.170,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.2.09.05	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Mobel	-	-	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	8.512.000,00	8.400.000,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.02	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	949.520.632,00	790.886.030,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan	62.343.340,00	61.669.500,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.02.2.01.12	Pemerintahan dan Penglolaan Peraturan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	62.343.340,00	61.669.500,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	194.217.298,00	189.475.208,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.02.2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	147.509.654,00	142.767.544,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	46.707.644,00	46.707.644,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	175.906.796,00	172.174.776,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	105.641.406,00	105.249.396,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	70.265.390,00	66.925.380,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	417.011.198,00	367.568.466,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan di Bidang Teknologi dan Inovasi	82.454.135,00	79.844.550,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Imenal di Bidang Difus Inovasi dan Penerapan Teknologi	120.550.185,00	107.885.066,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	76.516.384,00	74.069.350,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	123.394.495,00	92.444.460,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.05.0.00.0.00.02.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	14.135.857,00	13.323.000,00	-	-	-	-	-	-
6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	35.539.845.320,00	30.206.197.322,00	313.130.800,00	148.740.000,00	-	-	-	-
6.01.	INSPEKTORAT DAERAH	17.819.822.660,00	15.183.098.561,00	156.565.400,00	74.370.000,00	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.	Inspektorat	17.819.822.660,00	15.183.098.561,00	156.565.400,00	74.370.000,00	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.287.948.292,00	13.486.748.713,00	156.565.400,00	74.370.000,00	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
6.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.01.04.	*Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD*	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
6.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.01.05.	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD*	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.01.06.	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar*	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.01.07.	*Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	12.063.346.400,00	12.368.904.921,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.02.01.	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	12.055.346.400,00	12.368.904.921,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.02.05.	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun*	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.02.06.	*SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan*	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.02.07.	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/*	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
6.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.03.	*Triwulanan/ Semesteran SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	14.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
6.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.03.01.	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
6.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.03.02.	*Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
6.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.03.03.	*Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
6.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.03.04.	*Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah*	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.03.05.	*pada SKPD Rekapitulasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada*	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.03.06.	*SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD*	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.03.07.	*Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD*	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.05.	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	669.765.000,00	177.055.392,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.05.03.	*Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.05.09.	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan*	464.791.000,00	142.316.426,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.05.11.	*Fungsi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	199.974.000,00	34.738.966,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.06.	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	10.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.06.	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	923.810.404,00	498.472.975,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.06.01.	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan*	10.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.06.04.	*Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	312.999.324,00	243.604.500,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.06.05.	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	48.990.360,00	36.271.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.06.06.	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.06.08.	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	15.000.000,00	4.515.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.06.09.	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	531.741.280,00	218.082.476,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
6.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.999.500,00	-	-	-	-	-	-	-
6.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	156.565.400,00	74.370.000,00	-	-	-	-
6.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.07.08.	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	75.000.000,00	74.370.000,00	-	-	-	-
6.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	81.565.400,00	-	-	-	-	-
6.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.055.488,00	58.359.336,00	-	-	-	-	-	-
6.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
6.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	20.095.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	152.055.488,00	38.264.336,00	-	-	-	-	-	-
6.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	378.271.000,00	291.948.079,00	-	-	-	-	-	-
6.01.5.01.0.00.0.00.01.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	378.271.000,00	291.948.079,00	-	-	-	-	-	-
6.01.5.01.0.00.0.00.01.02.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**1.704.476.212,00**	**1.212.845.948,00**	-	-	-	-	-	-
6.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.01.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.208.041.140,00	789.995.948,00	-	-	-	-	-	-
6.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.01.01.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	290.999.640,00	219.525.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.01.02.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	290.272.000,00	293.930.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.01.03.	Reviu Laporan Kinerja	200.213.000,00	127.975.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.01.04.	Reviu Laporan Keuangan	99.515.800,00	57.150.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.01.07.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	299.930.700,00	170.815.448,00	-	-	-	-	-	-
6.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	330.785.072,00	322.900.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	156.650.000,00	100.850.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.02.01.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	330.785.072,00	322.900.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.5.01.0.00.0.00.01.02.2.02.02.	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	156.650.000,00	100.850.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.5.01.0.00.0.00.01.03.	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**768.288.156,00**	**489.512.000,00**	-	-	-	-	-	-
6.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	42.990.456,00	-	-	-	-	-	-	-
6.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.01.01.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	18.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
6.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.01.02.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	24.990.456,00	-	-	-	-	-	-	-
6.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.02.	Pendampingan dan Asistensi	718.298.700,00	489.512.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.02.01.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	174.797.000,00	76.575.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.5.01.0.00.0.00.01.03.2.02.02.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	55.854.800,00	14.700.000,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.01.5.01.3.00.3.00.01.03.2.02.03.	*Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan*	310.979.900,00	279.900.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.3.00.3.00.01.03.2.02.04.	*dan Pemberantasan Korupsi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas*	157.667.000,00	118.837.000,00	-	-	-	-	-	-
7.	**URUSAN KEWILAYAHAN**	**376.153.086.935,00**	**355.416.994.844,00**	**7.068.234.350,00**	**5.545.642.160,00**	-	-	-	-
7.01.	**KECAMATAN**	**188.076.543.469,00**	**177.708.982.022,00**	**3.234.112.175,00**	**3.273.321.088,00**	-	-	-	-
7.01.7.01.3.00.3.00.01.	**Kecamatan Bukitkoya**	**14.108.103.144,00**	**13.668.116.853,00**	**515.695.825,00**	**510.276.960,00**	-	-	-	-
7.01.7.01.3.00.3.00.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**9.750.586.525,00**	**9.382.119.995,00**	**515.695.825,00**	**510.276.960,00**	-	-	-	-
7.01.7.01.3.00.3.00.01.01.2.01.	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	13.987.004,00	13.987.004,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.3.00.3.00.01.01.2.01.01.	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	5.905.164,00	5.905.164,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.3.00.3.00.01.01.2.01.06.	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	8.081.840,00	8.081.840,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.3.00.3.00.01.01.2.01.07.	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.3.00.3.00.01.01.2.02.	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	6.836.852.276,00	5.547.844.788,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.3.00.3.00.01.01.2.02.01.	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	6.653.237.476,00	5.544.229.988,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.3.00.3.00.01.01.2.02.05.	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.3.00.3.00.01.01.2.02.07.	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	3.614.800,00	3.614.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.3.00.3.00.01.01.2.08.	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	7.065.000,00	2.771.700,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.3.00.3.00.01.01.2.08.11.	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	7.065.000,00	2.771.700,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.3.00.3.00.01.01.2.09.	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	24.105.200,00	24.105.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.3.00.3.00.01.01.2.09.	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	618.851.050,00	599.304.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.3.00.3.00.01.01.2.09.01.	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	24.105.200,00	24.105.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.3.00.3.00.01.01.2.09.04.	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	449.828.900,00	449.828.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.3.00.3.00.01.01.2.09.05.	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	53.882.100,00	53.881.782,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.3.00.3.00.01.01.2.09.06.	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	12.900.000,00	12.900.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.3.00.3.00.01.01.2.09.09.	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	85.755.000,00	75.199.788,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.3.00.3.00.01.01.2.09.10.	*Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	6.794.050,00	6.794.050,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.3.00.3.00.01.01.2.07.	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	2.000.000,00	2.000.000,00	512.510.300,00	512.293.006,00	-	-	-	-
7.01.7.01.3.00.3.00.01.01.2.07.05.	*Pengadaan Mebel*	2.000.000,00	2.000.000,00	512.510.300,00	512.293.006,00	-	-	-	-
7.01.7.01.3.00.3.00.01.01.2.08.	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	1.323.254.349,00	1.298.517.703,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.3.00.3.00.01.01.2.08.02.	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	751.048.120,00	741.886.478,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.03.	Penyediaan Jasa Penelitian dan Pengembangan Kantor	175.250.053,00	175.250.053,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	396.936.172,00	381.381.172,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	804.459.650,00	804.597.100,00	403.163.825,00	398.065.980,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.02.	Pemerintahan Daerah Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	707.535.400,00	707.535.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.06.	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.724.200,00	26.724.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	770.080.050,00	766.327.100,00	403.163.825,00	398.065.980,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.02.	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN**	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.02.2.02.	**PELAYANAN PUBLIK** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.02.2.07.03.	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.	Masyarakat di Wilayah Kecamatan **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN**	2.637.566.785,00	2.625.671.964,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.	**KELURAHAN** Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	41.730.385,00	41.730.385,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	41.730.385,00	41.730.385,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.03.	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.04.	Evaluasi Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.595.830.400,00	2.583.941.299,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	2.595.830.400,00	2.583.941.299,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.04.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN**	110.839.948,00	99.999.748,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.04.2.01.	**KETERTIBAN UMUM** Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan	110.839.948,00	99.999.748,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.04.2.01.01.	Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	110.839.948,00	99.999.748,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.05.	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN**	1.888.115.881,00	1.557.326.226,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.05.2.01.	**PEMERINTAHAN UMUM** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	1.609.115.881,00	1.557.326.226,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.05.2.01.03.	Pengawasan Kasab Daerah Pengawasan Peraturan dan Kesatuan Bangsa	115.114.245,00	90.538.026,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.01.05.2.01.07.	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan	1.293.128.225,00	1.293.128.225,00	-	-	-	-	-	-
	Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal								
7.01.7.01.0.00.0.00.01.05.2.01.08.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	200.673.415,00	173.659.975,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.	**Kecamatan Tanayan Raya**	**16.233.425.586,00**	**15.678.749.785,00**	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.865.102.021,00**	**10.387.486.790,00**	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.155.417.098,00	7.774.921.894,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.155.417.098,00	7.774.921.894,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.07.	SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.147.800,00	33.146.400,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.124.980.405,00	1.092.995.700,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.147.800,00	33.146.400,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	999.833.200,00	969.755.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	79.854.205,00	78.831.300,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.480.000,00	9.270.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.836.000,00	5.138.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	943.963.902,00	868.315.030,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	189.454.816,00	147.519.840,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.979.594,00	199.915.900,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	554.529.492,00	520.979.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	636.593.816,00	618.717.975,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.01.	Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	82.402.800,00	76.783.975,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.11.	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	344.160.016,00	541.354.300,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.02.	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.02.2.02.	PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.02.2.02.01.	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.02.2.02.03.	Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.	Masyarakat di Wilayah Kecamatan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	3.147.048.180,00	3.149.462.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.03.	KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	54.708.100,00	54.707.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.03.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	54.708.100,00	54.707.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.03.03.	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.03.04.	Evaluasi Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3.092.340.000,00	3.091.755.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	3.092.340.000,00	3.091.755.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	115.313.640,00	99.827.640,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.04.2.01.	KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan	115.313.640,00	99.827.640,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.04.2.01.01.	Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	115.313.640,00	99.827.640,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.05.	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	2.085.941.745,00	2.044.962.726,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.05.2.01.	PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	2.085.941.745,00	2.044.962.726,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.05.2.01.03.	Perangkat Kepala Daerah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	127.824.716,00	119.319.816,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.02.05.2.01.07.	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan	1.726.517.029,00	1.697.042.910,00	-	-	-	-	-	-
	Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh								
	Instansi Vertikal								
7.01.7.01.0.00.0.00.02.05.2.01.08.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	231.600.000,00	226.600.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.	Kecamatan Sail	8.028.964.985,00	7.557.455.253,00	68.019.000,00	67.765.500,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6.092.272.789,00	5.680.393.830,00	68.019.000,00	67.765.500,00	-	-	-	-
	DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	7.044.400,00	7.044.400,00	-	-	-	-	-	-
	Daerah								
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.586.700,00	1.586.700,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	5.457.700,00	5.457.700,00	-	-	-	-	-	-
	Realisasi Kinerja SKPD								
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.654.421.788,00	4.437.604.759,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.650.094.288,00	4.433.267.259,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-
	SKPD								
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	4.327.500,00	4.337.500,00	-	-	-	-	-	-
	Triwulanan/ Semesteran SKPD								
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.590.000,00	3.679.970,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.590.000,00	3.679.970,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.405.000,00	27.405.400,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	533.102.324,00	512.435.918,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	27.405.000,00	27.405.400,00	-	-	-	-	-	-
	Kantor								
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	449.884.600,00	437.342.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.860.324,00	24.123.596,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.248.000,00	50.969.722,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	2.000.000,00	2.000.300,00	68.019.000,00	67.765.500,00	-	-	-	-
	Daerah								
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	-	-	49.037.400,00	48.895.500,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00	2.000.300,00	18.981.600,00	18.870.000,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	560.779.677,00	431.242.351,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	260.794.000,00	126.340.673,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	319.985.677,00	304.901.178,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	279.918.000,00	268.893.722,00	-	-	-	-	-	-
	Pemerintahan Daerah								

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	89.262.000,00	69.042.222,50	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09.06	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.656.000,00	10.656.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	180.000.000,00	179.195.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.02.2.02.03.	Pengadaan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	835.461.251,00	800.664.736,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	22.538.040,00	22.538.040,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	22.538.040,00	22.538.040,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	813.123.213,00	677.126.196,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	813.123.213,00	677.126.196,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	107.411.035,00	96.127.590,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	107.411.035,00	96.127.590,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	107.411.035,00	96.127.590,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	893.559.909,00	881.359.497,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pelaksanaan Asas Dekonsentrasi	893.559.909,00	881.359.497,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.05.2.01.07	Pengawasan Kepala Daerah Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	778.559.909,00	772.609.497,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.03.06.2.01.06.	*Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	114.000.000,00	108.750.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.	**Kecamatan Lima Puluh**	**9.506.812.215,00**	**8.862.008.128,00**	**230.425.400,00**	**221.454.000,00**	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.625.645.850,00**	**6.076.386.962,00**	**230.425.400,00**	**221.454.000,00**	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.	*Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	11.999.712,00	11.905.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.01.	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	5.000.056,00	4.959.400,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01.06.	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar*	6.999.656,00	6.946.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02.	*Reviuasi Kinerja SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	4.721.345.478,00	1.609.935.971,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02.01.	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	4.712.749.558,00	4.601.671.471,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02.05.	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun*	5.396.120,00	5.276.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02.07.	*SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	3.199.800,00	3.088.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.03.	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	7.065.000,00	3.297.750,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.03.11.	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	7.065.000,00	3.297.750,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	14.322.200,00	14.204.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	930.512.140,00	788.555.965,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.01.	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	14.322.200,00	14.204.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.04.	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	722.901.900,00	593.610.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.05.	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	80.955.240,00	80.380.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.06.	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	16.000.000,00	8.640.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.09.	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	97.660.000,00	70.785.965,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.10.	*Pemeliharaan Alat Elektronik pada SKPD*	13.965.000,00	13.140.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.07.	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	5.532.600,00	5.328.000,00	239.425.400,00	221.454.000,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.07.05.	*Pengadaan Mebel*	-	-	53.508.500,00	49.505.000,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.07.06.	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	5.532.600,00	5.328.000,00	185.916.900,00	171.949.000,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.07.10.	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	571.093.523,00	479.033.896,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.02.	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	143.861.139,00	108.015.967,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.03.	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	84.104.984,00	25.676.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.04.	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	343.087.408,00	338.142.329,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	354.813.400,00	295.133.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.05.01.	Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	136.809.400,00	79.142.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.05.06.	Kordinasi Perorangan Dinas atau Kordinasi Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.554.000,00	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.05.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	207.370.000,00	206.991.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.02.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN**	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.02.2.02	**PELAYANAN PUBLIK** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.02.2.02.01.	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.02.2.02.03.	Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.	Masyarakat di Wilayah Kecamatan **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN**	**1.459.427.731,00**	**1.454.052.400,00**	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.02	**KELURAHAN** Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	41.450.450,00	38.656.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.02.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	41.450.450,00	38.656.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.02.03.	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.02.04.	Evaluasi Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.417.977.281,00	1.416.005.400,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.417.977.281,00	1.416.005.400,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.04.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN**	**118.583.200,00**	**91.901.750,00**	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.04.2.01	**KETERTIBAN UMUM** Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan	118.583.200,00	91.901.750,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.04.2.01.01.	Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	118.583.200,00	91.901.750,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.05.	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN**	**1.353.156.229,00**	**1.238.848.976,00**	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.05.2.01	**PEMERINTAHAN UMUM** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	1.353.156.229,00	1.238.848.976,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.05.2.01.02.	Perangkat Kepala Daerah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	72.980.510,00	61.211.800,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.04.05.2.01.07.	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan	1.074.619.445,00	1.026.037.976,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.05.2.01.96.	Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	155.668.274,00	141.800.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.	**Kecamatan Pekanbaru Kota**	**11.848.432.292,00**	**10.538.880.161,00**	**15.040.600,00**	**15.020.000,00**	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.642.432.225,00**	**7.223.373.787,00**	**15.040.600,00**	**15.020.000,00**	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.	*Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	9.723.800,00	9.723.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.720.400,00	4.720.400,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.06.	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar*	4.993.400,00	4.993.400,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.01.07.	*Realisasi Kinerja SKPD* *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02.	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	5.301.883.369,00	5.035.011.044,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02.01.	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	5.298.488.694,00	5.031.607.344,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02.05.	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun*	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02.07.	SKPD *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/*	3.464.675,00	3.403.700,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.05.	*Triwulanan/ Semesteran SKPD* *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	55.884.000,00	38.500.368,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.05.11.	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	55.884.000,00	38.500.368,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	71.023.600,00	71.021.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	738.490.525,00	720.489.208,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	71.023.600,00	71.021.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.04.	Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor	543.794.500,00	542.368.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	98.470.025,00	98.197.300,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.794.000,00	49.483.108,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.10.	Pemeliharaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.074.000,00	15.060.300,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.07.	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah*	2.000.000,00	2.000.000,00	15.040.600,00	15.020.000,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.07.05.	Daerah Pengadaan Mebel	2.000.000,00	2.000.000,00	15.040.600,00	15.020.000,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08.	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	916.363.726,00	748.361.467,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08.02.	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	204.009.460,00	156.457.501,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08.03.	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	140.492.300,00	140.172.000,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	471.891.966,00	451.791.966,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	647.063.206,00	598.256.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.09.02.	Pemerintahan Daerah Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	117.388.606,00	67.629.400,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.09.06.	Pengisian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.414.600,00	15.385.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	514.260.000,00	495.252.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.02.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN**	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.02.2.02.	**PELAYANAN PUBLIK** *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Telah*	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.02.2.02.03.	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan *Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada*	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.	Masyarakat di Wilayah Kecamatan **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN**	**1.680.731.906,00**	**1.617.389.900,00**	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.02.	**KELURAHAN** *Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	196.340.069,00	196.147.700,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.02.01.	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah*	42.893.125,00	42.847.700,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.02.03.	*Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* *Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	153.340.944,00	153.300.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.03.	*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	1.484.388.900,00	1.421.242.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.03.02.	*Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan*	1.484.388.900,00	1.421.242.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.04.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN**	**112.388.600,00**	**99.930.100,00**	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.04.2.01.	**KETERTIBAN UMUM** *Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan*	112.388.600,00	99.930.100,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.04.2.01.01.	*Ketertiban Umum* *Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara*	112.388.600,00	99.930.100,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.05.	*Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN**	**1.613.879.495,00**	**1.598.196.474,00**	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.05.2.01.	**PEMERINTAHAN UMUM** *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai*	1.613.879.495,00	1.598.196.474,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.05.2.01.03.	*Perangkat Kepala Daerah* *Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	121.291.541,00	111.297.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.05.2.01.07.	*Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan*	1.285.337.954,00	1.291.158.974,00	-	-	-	-	-	-
	Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh *Instansi Vertikal*								

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.05.05.2.01.08.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	597.250.000,00	195.750.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.	Kecamatan Sukajadi	13.438.630.012,00	12.846.725.967,00	117.434.800,00	135.580.000,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.548.294.953,00	9.135.439.803,00	117.434.800,00	135.580.000,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.978.800,00	14.978.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.989.600,00	4.989.600,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.998.900,00	4.998.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.990.300,00	4.990.300,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.247.843.268,00	6.914.842.904,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.237.857.768,00	6.904.861.404,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	4.994.400,00	4.994.400,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.07.	SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.997.100,00	4.997.100,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.085.000,00	3.492.450,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.085.000,00	3.492.450,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.107.700,00	16.107.700,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	910.347.038,00	875.690.694,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.107.700,00	16.107.700,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	597.491.000,00	597.491.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	87.593.838,00	86.404.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.323.000,00	96.810.494,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.10.	Penatausahaan Aset Tetap selain SKPD	4.985.200,00	4.985.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	117.434.800,00	135.580.000,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	-	-	25.087.000,00	21.640.000,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	92.347.800,00	83.940.000,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	717.125.627,00	703.908.341,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.904.200,00	178.557.112,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.265.896,00	10.265.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	595.856.729,00	595.995.729,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	615.729.520,00	609.509.014,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	157.531.300,00	153.000.014,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09.06.	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.559.000,00	29.559.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09.03.	Pemeliharaan/RehabilSas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	215.269.780,00	214.600.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09.10.	Pemeliharaan/RehabilSasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	212.269.780,00	212.350.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN**	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.02.2.02	**PELAYANAN PUBLIK** *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak*	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.02.2.02.33.	*Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di* *Kecamatan* *Peningkatan EfektiBitas Pelaksanaan Pelayanan kepada*	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03	*Masyarakat di Wilayah Kecamatan* **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN**	**1.766.557.100,00**	**1.763.821.200,00**	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02	**KELURAHAN** *Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	39.998.900,00	39.999.400,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02.01.	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah*	39.998.900,00	39.999.400,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02.03.	*Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* *Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.03	*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	1.726.558.200,00	1.723.821.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.03.02.	*Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan*	1.726.558.200,00	1.723.821.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN**	**113.934.200,00**	**99.999.800,00**	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.04.2.01	**KETERTIBAN UMUM** *Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan*	113.934.200,00	99.999.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.04.2.01.01.	*Ketertiban Umum* *Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara*	113.934.200,00	99.999.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.05	*Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN**	**2.008.941.759,00**	**1.944.471.064,00**	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.05.2.01	**PEMERINTAHAN UMUM** *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai*	2.008.941.759,00	1.944.471.064,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.05.2.01.03.	*Pengesahan Kepala Daerah* *Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	121.323.500,00	121.323.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.05.2.01.07.	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan	1.656.536.959,00	1.605.536.264,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.05.2.01.08.	*Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh* *Instansi Vertikal* Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	231.111.300,00	217.611.300,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.07.	Kecamatan Payung Sekaki	13.049.737.393,00	11.705.932.938,00	276.459.900,00	99.400.000,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.848.366.494,00	7.948.242.139,00	276.459.900,00	99.400.000,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.532.800,00	14.132.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.211.000,00	9.311.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.321.800,00	4.821.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.361.663.402,00	5.050.535.313,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.355.927.874,00	5.055.100.785,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.02.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.735.528,00	5.735.528,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.066.000,00	3.326.429,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.066.000,00	3.326.429,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.184.800,00	48.179.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	820.770.441,00	496.404.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.184.800,00	48.179.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	624.417.100,00	432.929.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.286.496,00	2.170.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000,00	140.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.126.000,00	16.195.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.10.	Pemeliharaan Arsip Dinamis pada SKPD	54.930.845,00	45.879.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.500.000,00	2.492.000,00	276.459.900,00	99.400.000,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	-	-	176.459.900,00	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.500.000,00	2.492.000,00	100.000.000,00	99.400.000,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.09.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.027.373.966,00	684.186.097,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253.640.000,00	186.321.812,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.09.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	399.842.000,00	50.798.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.09.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	472.891.966,00	447.066.285,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	757.275.282,00	538.684.600,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.37.01.2.05.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	122.704.412,00	76.618.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.37.01.2.05.09	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	329.656.800,00	316.538.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.37.01.2.05.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	364.912.070,00	145.528.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.37.01.2.05.11	atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.37.02.	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.37.02.2.02	PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.37.02.2.02.03	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.37.03.	Masyarakat di Wilayah Kecamatan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	2.063.736.992,00	2.047.089.399,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.37.03.2.02	KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	60.385.892,00	59.575.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.37.03.2.02.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	60.385.892,00	59.575.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.37.03.2.02.03	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.37.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.003.345.100,00	1.987.414.399,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.37.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	2.003.345.100,00	1.987.414.399,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.37.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	99.999.732,00	93.334.732,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.37.04.2.01.	KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban dan	99.999.732,00	93.334.732,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.37.04.2.01.01.	Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	99.999.732,00	93.334.732,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.37.05.	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	1.837.640.175,00	1.716.986.866,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.37.05.2.01.	PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	1.837.640.175,00	1.716.986.866,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.37.05.2.01.02.	Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Penataan dan Kesatuan Bangsa	52.427.866,00	41.991.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.37.05.2.01.07.	Pelaksanaan Sanksi Urusan Pemerintahan yang Bukan	1.531.862.375,00	1.441.175.866,00	-	-	-	-	-	-
	Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal								

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.07.05.2.01.08.	*Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	253.220.000,00	233.920.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.	**Kecamatan Seraselan**	**10.527.191.841,00**	**10.064.117.000,00**	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.289.452.001,00**	**6.850.615.060,00**	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.01.	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	12.095.288,00	12.095.288,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.01.01.	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4.407.112,00	4.407.112,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.01.06.	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	7.648.176,00	7.648.176,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.01.07.	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.02.	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	5.400.058.540,00	5.245.669.011,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.02.01.	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	5.481.661.480,00	5.234.661.035,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.02.05.	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun*	6.048.968,00	3.769.784,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.02.07.	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	7.158.192,00	7.158.192,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.05.	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	7.066.000,00	3.815.300,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.05.11.	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	7.066.000,00	3.815.300,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.06.	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	35.269.600,00	35.269.600,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.06.	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	701.822.590,00	620.854.995,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.06.01.	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	35.269.600,00	35.269.600,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.06.04.	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	586.786.900,00	506.201.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.06.05.	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	64.866.807,00	64.866.807,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.06.06.	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	15.250.000,00	14.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.06.09.	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	26.789.000,00	22.605.905,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.06.10.	*Penatausahaan Anjs Dinamis pada SKPD*	10.130.383,00	10.130.382,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.07.	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.07.05.	*Pengadaan Meja/*	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.08.	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	585.061.983,00	534.139.812,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.08.02.	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	133.799.332,00	106.318.977,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.08.03.	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	16.356.200,00	19.356.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.08.04.	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	431.906.451,00	408.464.730,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.09.	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	467.108.300,00	438.870.553,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	124.364.000,00	76.846.953,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.09.06.	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.554.000,00	4.554.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	128.190.200,00	127.991.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	200.000.000,00	199.479.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.02.	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.02.2.02.	PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.02.2.02.03.	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.8.00.09.03.	Masyarakat di Wilayah Kecamatan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	1.686.005.420,00	1.686.569.420,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.03.2.02.	KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	84.500.220,00	84.500.220,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.03.2.02.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	84.500.220,00	84.500.220,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.03.2.02.03.	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.602.169.200,00	1.602.169.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.602.169.200,00	1.602.169.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	113.555.200,00	97.140.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.04.2.01.	KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan	113.555.200,00	97.140.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.04.2.01.01.	Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	113.555.200,00	97.140.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.05.	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	1.437.514.420,00	1.429.691.920,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.05.2.01.	PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Secara	1.437.514.420,00	1.429.691.920,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.05.2.01.02.	Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	72.364.900,00	67.694.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.05.2.01.07.	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Belum	1.175.558.520,00	1.172.397.020,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.05.2.01.08.	Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	189.600.000,00	189.600.000,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.12.	Kecamatan Biaropaya Dansi	16.082.801.797,00	15.439.720.253,00	262.020.250,00	257.348.300,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.797.721.222,00	16.282.468.985,00	262.020.250,00	257.348.300,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.147.700,00	17.632.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.872.200,00	5.552.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.396.000,00	6.865.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.879.500,00	5.415.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.121.426.954,00	7.772.987.291,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.097.269.343,00	7.751.468.891,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	12.545.712,00	11.548.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ SKPD	11.611.972,00	9.949.600,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.2.05.	Fasilitasi/ Sumsidasi SKPD	41.198.000,00	38.822.556,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.2.05.11.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.198.000,00	38.822.556,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.2.06.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	59.303.700,00	59.274.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	783.672.116,00	711.555.178,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	59.303.700,00	59.274.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	608.310.300,00	541.729.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53.821.666,00	53.292.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.600.000,00	9.450.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.562.000,00	82.169.579,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	14.888.150,00	14.864.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.000.000,00	2.000.900,00	262.020.250,00	257.348.300,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	-	-	45.721.800,00	44.955.000,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00	2.000.900,00	216.888.450,00	212.393.300,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	861.870.648,00	803.514.359,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	338.771.584,00	323.889.287,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.683.791,00	65.700.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	549.423.274,00	514.125.072,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	909.054.063,00	876.752.900,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	31.677.400,00	61.329.600,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.2.08.06.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.265.000,00	20.160.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.2.08.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	797.126.663,00	795.263.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.02.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN**	**13.450.000,00**	**12.607.000,00**	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.02.2.02.	**PELAYANAN PUBLIK**	13.450.000,00	12.607.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.02.2.02.01.	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak*	13.450.000,00	12.607.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.02.2.02.03.	*Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di*	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.03.	*Kecamatan*	**3.457.828.920,00**	**3.454.353.300,00**	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.03.2.02.	*Perencanaan Kegatan Pelayanan kepada Masyarakat di*	51.221.520,00	50.579.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.03.2.02.01.	*Kecamatan*	51.221.520,00	50.579.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.03.2.02.03.	*Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada*	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.03.2.02.04.	*Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.03.2.03.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN**	3.406.606.500,00	3.403.773.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.03.2.03.01.	**KELURAHAN**	3.406.606.500,00	3.403.773.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.03.2.03.03.	*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	**116.388.800,00**	**100.000.000,00**	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.03.2.03.02.	*Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan*	116.388.800,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.04.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN**	**1.667.503.755,00**	**1.590.091.368,00**	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.04.2.01.	**KETERTIBAN UMUM**	1.667.503.755,00	1.590.091.368,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.04.2.01.01.	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan*	122.072.840,00	88.100.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.04.2.01.07.	*Ketertiban Umum*	1.382.530.915,00	1.362.901.368,00	-	-	-	-	-	-
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara								
	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
	Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh								
	Instansi Vertikal								

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.12.05.2.01.08.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	162.000.000,00	159.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.	Kecamatan Binawidya	14.733.741.277,00	13.925.175.103,00	1.372.842.400,00	1.362.221.006,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.272.249.035,00	9.975.969.225,00	1.372.842.400,00	1.362.221.006,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.01.	Perencanaan, Pengenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.896.580,00	25.846.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.071.900,00	7.071.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.947.100,00	5.947.100,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.616.580,00	1.567.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.160.200,00	4.160.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.092.500,00	7.092.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.246.269.712,00	6.931.311.197,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.02.01.	Pleyedaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.231.745.884,00	6.916.787.469,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	4.999.704,00	4.999.704,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.544.024,00	9.544.024,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.474.700,00	4.474.700,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.077.600,00	2.077.600,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.03.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.397.100,00	2.397.100,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.065.000,00	3.115.957,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.065.000,00	3.115.957,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.784.900,00	9.784.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.354.089.006,00	1.247.501.441,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.784.900,00	9.784.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	791.603.493,00	691.891.436,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	465.627.605,00	465.627.605,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.856.000,00	89.682.400,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	359.582.400,00	353.430.006,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.07.06.	Pengadaan Mebel	-	-	359.582.400,00	353.430.006,00	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.06.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	982.703.046,00	825.059.180,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.06.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	306.632.360,00	202.649.226,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.06.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.547.000,00	29.547.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.06.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	694.222.686,00	602.662.954,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.05.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	631.946.000,00	618.076.250,00	1.013.280.000,00	1.008.791.000,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.06.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	96.726.000,00	74.818.250,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.06.09.	Kordinasi Perangkat Dinas atau Kordinasi Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.000.000,00	80.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.06.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	-	-	663.840.000,00	661.309.000,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.06.11.	atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	455.220.686,00	453.257.000,00	349.440.000,00	347.582.000,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.03.	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.02.2.02.	PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.02.2.02.03.	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.03.	Masyarakat di Wilayah Kecamatan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	2.669.186.321,00	2.591.701.921,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.03.2.02.	KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	543.409.121,00	528.126.121,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.03.2.02.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	62.412.093,00	62.412.093,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.03.2.02.02.	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.03.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	480.997.028,00	465.714.028,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.125.789.200,00	2.063.575.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.03.2.03.01.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.125.789.200,00	2.063.575.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	110.940.132,00	99.999.932,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.04.2.01.	KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan	110.940.132,00	99.999.932,00	-	-	-	-	-	-
	Ketertiban Umum								

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.13.04.2.01.01.	Siswaliba dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	110.840.132,00	99.999.932,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.05.	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	1.570.453.786,00	1.557.504.025,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.05.2.01.	PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	1.570.453.786,00	1.557.504.025,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.05.2.01.03.	Pelayanan Kepala Daerah Pembinaan Perjalanan dan Kesatuan Bangsa	115.008.736,00	94.660.790,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.05.2.01.07.	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan	1.394.785.050,00	1.292.243.235,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.05.2.01.08.	Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	170.600.000,00	170.600.300,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.	Kecamatan Tuah Madani	14.954.324.376,00	13.997.944.136,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	8.518.535.127,00	7.870.189.866,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.01.	DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	28.150.852,00	28.150.852,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.01.01.	Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.999.856,00	2.999.856,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.996.900,00	5.996.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.999.688,00	5.999.688,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	5.999.744,00	5.999.744,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.01.07.	Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.154.464,00	7.154.464,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.490.672.730,00	6.184.384.270,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.474.220.630,00	6.177.911.370,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.02.07.	SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	6.452.700,00	6.452.700,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.05.	Triwulanan/ Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.076.000,00	21.076.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21.076.000,00	21.076.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.304.600,00	19.221.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	966.811.633,00	709.600.429,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	19.304.600,00	19.221.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.06.02.	Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.329.468,00	96.089.762,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	895.218.675,00	802.857.275,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.975.290,00	29.735.362,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.500.566,00	9.450.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.688.000,00	61.688.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	713.486.106,00	681.494.103,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	196.960.906,00	179.953.803,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.785.600,00	20.385.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	493.740.506,00	481.155.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	265.033.212,00	265.063.212,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.09.02.	Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	75.033.212,00	65.063.212,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.09.09.	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	190.000.000,00	190.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.02.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN**	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.02.2.02.	**PELAYANAN PUBLIK** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.02.2.02.03.	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.03.	Masyarakat di Wilayah Kecamatan **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN**	**4.896.839.218,00**	**4.472.785.481,00**	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.03.2.02.	**KELURAHAN** Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	443.505.434,00	428.548.584,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.03.2.02.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	85.121.184,00	80.355.584,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.03.2.02.02.	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.03.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	358.384.250,00	348.193.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.162.529.784,00	4.045.236.797,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	4.162.529.784,00	4.045.236.797,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.04.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN**	**143.134.484,00**	**99.999.196,00**	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.04.2.01.	**KETERTIBAN UMUM** Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan	143.134.484,00	99.999.196,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.04.2.01.01.	Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	143.134.484,00	99.999.196,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.05.	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN**	**1.988.615.569,00**	**1.455.971.096,00**	-	-	-	-	-	-
	PEMERINTAHAN UMUM								

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.14.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Lainnya	1.688.615.569,00	1.455.971.095,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.05.2.01.03.	Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	162.726.051,00	48.350.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.05.2.01.07.	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan	1.362.802.568,00	1.254.983.384,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.05.2.01.08	Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	163.256.920,00	152.656.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.	Kecamatan Rumbai.	13.844.726.276,00	12.756.658.131,00	434.301.800,00	401.683.366,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	7.852.129.381,00	7.146.709.169,00	434.301.800,00	401.683.366,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.01	DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	7.369.920,00	7.369.920,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.01.01.	Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	7.369.920,00	7.369.920,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.01.07.	Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.755.322.136,00	5.481.043.701,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.755.322.136,00	5.481.043.701,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.02.07.	SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	92.052.000,00	77.597.210,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	92.052.000,00	77.597.210,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.965.840,00	35.965.840,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	611.243.411,00	540.041.028,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.965.840,00	35.965.840,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	493.727.150,00	418.260.960,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	46.828.061,00	30.279.868,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000,00	20.000.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.274.000,00	36.326.520,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.06.10.	Pemeliharaan Arsip Dinamis pada SKPD	38.513.200,00	36.173.700,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.07.	Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	434.301.800,00	401.683.366,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.07.05.	Pengadaan Meubel	-	-	118.919.900,00	105.965.000,00	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.07.06.	Pengadaan Pakaian dan Meah Lainnya	-	-	317.381.900,00	295.718.300,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	757.237.434,00	633.773.670,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	233.477.877,00	143.322.282,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.980.995,00	9.108.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	501.778.662,00	481.342.387,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	392.836.566,00	372.917.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.09.02.	Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	92.211.906,00	94.130.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.09.06.	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.428.000,00	5.381.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	291.196.760,00	283.406.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.02.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN**	**85.993.566,00**	**37.900.700,00**	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.02.2.02.	**PELAYANAN PUBLIK** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	85.992.566,00	37.900.700,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.02.2.02.02.	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Fasilitasi Pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di	39.999.872,00	4.586.300,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.02.2.02.03.	Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	45.992.694,00	33.314.400,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.03.	Masyarakat di Wilayah Kecamatan **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN**	**3.744.786.725,00**	**3.557.602.937,00**	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.03.2.02.	**KELURAHAN** Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	97.678.038,00	97.678.038,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.03.2.02.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	97.678.038,00	97.678.038,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.03.2.02.03.	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3.647.108.686,00	3.460.263.999,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	3.647.108.686,00	3.460.263.999,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.04.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN**	**112.388.476,00**	**99.929.676,00**	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.04.2.01.	**KETERTIBAN UMUM** Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan	112.388.476,00	99.929.676,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.04.2.01.01.	Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	112.388.476,00	99.929.676,00	-	-	-	-	-	-
	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.15.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN**	2.049.426.297,00	1.954.436.549,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.05.2.01	**PEMERINTAHAN UMUM** *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai*	2.049.426.297,00	1.954.436.549,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.05.2.01.03	*Penugasan Kepala Daerah* *Pembinaan Perbatasan dan Kecatuan Rangka*	130.620.097,00	84.712.926,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.05.2.01.07	*Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan*	1.713.205.110,00	1.664.123.623,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.05.2.01.08	*Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal* *Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	205.600.990,00	205.600.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.	**Kecamatan Rumbai Timur**	10.316.321.491,00	9.139.456.315,00	223.391.700,00	223.183.000,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	7.179.886.991,00	6.139.916.292,00	223.391.700,00	223.183.000,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.01	**DAERAH KABUPATEN/KOTA** *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat*	9.055.314,00	9.055.314,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.01.01	*Daerah* *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4.908.014,00	4.908.014,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.01.06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar*	4.147.300,00	4.147.300,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.01.07	*Realisasi Kinerja SKPD* *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	4.494.777.682,00	4.376.460.446,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	4.489.584.942,00	4.371.672.406,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.02.05	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun*	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.02.07	*SKPD* *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/*	4.588.040,00	4.588.040,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.05	*Triwulanan/ Semesteran SKPD* *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	7.065.666,00	3.967.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.05.11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	7.065.666,00	3.967.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	29.738.306,00	25.674.063,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	1.234.120.127,00	652.745.299,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.06.01	*Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan*	29.738.306,00	25.674.063,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.06.04	*Kantor* *Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	1.093.909.356,00	782.588.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.06.05	*Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan*	101.800.827,00	55.109.496,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.06.06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	24.000.000,00	8.400.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	15.180.000,00	6.650.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah*	2.000.000,00	2.000.000,00	223.391.700,00	223.183.000,00	-	-	-	-
	Daerah								

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	-	-	40.541.500,00	40.420.000,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	182.840.200,00	182.763.000,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	944.703.321,00	590.370.468,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	258.632.736,00	73.870.998,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	216.638.156,00	73.522.481,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	469.232.429,00	443.176.989,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	458.933.045,00	379.243.700,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	143.564.000,00	66.029.300,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.09.05.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.408.000,00	13.586.400,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	299.971.045,00	299.628.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Telah Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.02.2.02.02.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.378.967.350,00	1.340.484.350,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	65.472.550,00	65.472.550,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.03.2.02.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	65.472.550,00	65.472.550,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.03.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.313.435.000,00	1.475.012.400,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.313.435.000,00	1.475.012.400,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	110.542.655,00	93.068.340,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	110.542.655,00	93.068.340,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.16.04.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	110.542.655,00	83.058.040,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.05.	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	1.446.964.205,00	1.357.989.033,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.05.2.01	PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Lainnya	1.446.964.205,00	1.357.989.033,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.05.2.01.03.	Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	51.427.900,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.05.2.01.07.	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan	1.279.536.305,00	1.240.589.033,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.05.2.01.08.	Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	117.000.000,00	117.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.	Kecamatan Rumbai Barat	11.027.244.884,00	10.637.313.581,00	9.490.000,00	9.379.000,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	7.858.281.458,00	7.487.357.457,00	9.490.000,00	9.379.000,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.01.2.01.	DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Pengengaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	9.632.300,00	9.632.300,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.01.2.01.01.	Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.255.100,00	3.255.100,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.188.600,00	3.188.600,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	3.188.600,00	3.188.600,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.01.2.01.07.	Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.306.570.140,00	4.954.193.869,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.301.308.440,00	4.948.920.269,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.01.2.02.07.	SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	5.263.700,00	5.263.700,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.01.2.05.	Triwulanan/ Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72.396.000,00	65.587.995,30	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	72.396.000,00	65.587.995,30	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.688.900,00	79.671.800,30	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	303.997.064,00	876.548.953,30	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	79.688.900,00	79.671.800,30	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.01.2.06.04.	Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor	671.751.250,00	670.559.542,30	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103.319.814,00	102.897.064,30	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.17.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000,00	16.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.01.2.06.08.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.926.000,00	87.080.347,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	9.490.800,00	9.379.000,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	9.490.800,00	9.379.000,00	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	899.980.616,00	860.235.121,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Listrik	212.755.000,00	198.477.817,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180.480.372,00	180.463.060,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	504.744.244,00	461.294.244,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	695.016.439,00	641.499.399,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.034.106,00	34.931.706,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.670.703,00	69.780.703,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.084.600,00	38.708.960,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.227.030,00	397.678.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan	120.000.006,00	101.400.030,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.02.	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.02.2.02.01.	Penyusunan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.03.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1.401.523.401,00	1.401.064.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	45.804.300,00	45.804.300,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.03.2.02.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanan Pembangunan di Kelurahan	45.804.300,00	45.804.300,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.03.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.355.719.101,00	1.355.260.600,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.17.03.2.01.02.	*Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan*	1.355.779.101,00	1.355.260.600,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.04.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN**	**112.888.800,00**	**100.000.000,00**	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.04.2.01	**KETERTIBAN UMUM** *Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan*	112.888.800,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.04.2.01.01.	*Ketertiban Umum* *Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara*	112.888.800,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.05.	*Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN**	**1.656.531.224,00**	**1.648.891.224,00**	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.05.2.01	**PEMERINTAHAN UMUM** *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai*	1.656.531.224,00	1.648.891.224,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.05.2.01.03.	*Perangkat Kepala Daerah* *Pelaksanaan Pelayanan dan Kesatuan Bangsa*	42.427.900,00	49.587.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.05.2.01.07.	*Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan*	1.398.023.324,00	1.398.023.324,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.17.05.2.01.08.	*Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal* *Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	206.100.000,00	201.300.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.	**Kecamatan Kulim**	**11.416.070.007,00**	**10.948.013.135,00**	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**7.821.802.790,00**	**7.355.833.176,00**	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.01.2.01.	**DAERAH KABUPATEN/KOTA** *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat*	3.515.500,00	3.515.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.01.2.01.01.	*Daerah* *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	3.515.500,00	3.515.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.01.2.01.06.	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar*	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.01.2.01.07.	*Realisasi Kinerja SKPD* *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.01.2.02.	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	5.861.743.360,00	5.887.127.636,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.01.2.02.01.	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	5.857.675.260,00	5.883.059.536,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.01.2.02.05.	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun*	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.01.2.02.07.	*SKPD* *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/*	4.068.100,00	4.068.100,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.01.2.05.	*Triwulanan/ Semesteran SKPD* *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	7.085.000,00	3.712.996,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.01.2.05.11.	*Bidangan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	7.085.000,00	3.712.996,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.01.2.06.	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	12.764.600,00	12.764.600,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.01.2.06.	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	834.585.500,00	783.622.969,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.18.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.764.600,00	12.764.600,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	667.358.100,00	660.778.510,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	138.458.405,00	85.057.894,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,00	5.049.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.770.600,00	16.738.524,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.01.2.06.10.	Pemakaian/sahan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	648.500.225,00	588.409.694,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.560.421,00	57.675.550,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.303.692,00	59.295.484,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	469.636.112,00	431.429.630,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	363.626.600,00	286.688.612,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.728.000,00	7.731.512,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.957.200,00	28.957.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	314.941.400,00	250.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.02.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**37.474.495,00**	**37.474.495,00**	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	37.474.495,00	37.474.495,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	37.474.495,00	37.474.495,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.03.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.008.396.528,00**	**2.008.007.728,00**	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	49.996.528,00	49.996.528,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.03.2.02.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	49.996.528,00	49.996.528,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.03.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.03.2.02.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.958.400.000,00	1.958.011.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.03.2.02.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.958.400.000,00	1.958.011.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.04.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**99.999.967,00**	**99.999.967,00**	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	99.999.967,00	99.999.967,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.18.04.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	99.999.967,00	99.999.967,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.05.	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	1.448.396.287,00	1.447.497.769,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.05.2.01.	PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Lainnya	1.448.396.287,00	1.447.497.769,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.05.2.01.03.	Pelayanan Kepala Daerah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	53.177.900,00	53.177.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.05.2.01.07.	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan	1.305.219.387,00	1.304.319.869,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.18.05.2.01.08.	Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	-	-	-	-
8.	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	88.707.497.290,00	88.581.838.256,00	523.029.400,00	513.100.000,00	-	-	-	-
8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	49.353.740.645,00	47.750.514.118,00	381.514.700,00	256.500.000,00	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	49.353.740.645,00	47.750.514.118,00	381.514.700,00	256.500.000,00	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	7.286.935.480,00	6.750.502.706,00	181.514.700,00	176.700.000,00	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.2.01.	DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	19.510.400,00	19.010.400,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.2.01.01.	Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.845.300,00	7.845.300,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	5.693.000,00	5.693.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.2.01.07.	Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.772.100,00	5.772.100,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.691.647.914,00	4.492.351.994,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.577.017.314,00	4.476.721.394,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	8.249.800,00	8.249.800,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.2.02.07.	SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.380.800,00	6.380.800,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.997.860,00	6.997.860,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.2.03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.498.900,00	3.498.900,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.2.03.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.498.960,00	3.498.960,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.132.996,00	4.140.800,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.2.05.10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23.132.000,00	4.140.800,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.665.505,00	7.665.505,00	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
0.01.8.01.0.00.0.00.01.01.2.06.	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	1.400.069.215,00	1.216.329.747,00	-	-	-	-	-	-
0.01.8.01.0.00.0.00.01.01.2.06.01.	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	7.665.500,00	7.665.500,00	-	-	-	-	-	-
0.01.8.01.0.00.0.00.01.01.2.06.04.	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	285.458.400,00	263.278.800,00	-	-	-	-	-	-
0.01.8.01.0.00.0.00.01.01.2.06.05.	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	651.019.655,00	566.019.553,00	-	-	-	-	-	-
0.01.8.01.0.00.0.00.01.01.2.06.06.	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	10.000.600,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-
0.01.8.01.0.00.0.00.01.01.2.06.09.	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	468.857.760,00	376.297.892,00	-	-	-	-	-	-
0.01.8.01.0.00.0.00.01.01.2.06.10.	*Pemeliharaan Arsip Dinamis pada SKPD*	4.733.400,00	4.733.400,00	-	-	-	-	-	-
0.01.8.01.0.00.0.00.01.01.2.07.	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	2.000.000,00	2.000.000,00	181.814.706,00	176.780.000,00	-	-	-	-
0.01.8.01.0.00.0.00.01.01.2.07.06.	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	2.000.000,00	2.000.000,00	181.814.706,00	176.780.000,00	-	-	-	-
0.01.8.01.0.00.0.00.01.01.2.08.	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	764.850.300,00	719.815.905,00	-	-	-	-	-	-
0.01.8.01.0.00.0.00.01.01.2.08.02.	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	208.880.000,00	203.110.705,00	-	-	-	-	-	-
0.01.8.01.0.00.0.00.01.01.2.08.03.	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	16.576.300,00	16.576.300,00	-	-	-	-	-	-
0.01.8.01.0.00.0.00.01.01.2.08.04.	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	539.394.000,00	499.929.000,00	-	-	-	-	-	-
0.01.8.01.0.00.0.00.01.01.2.09.	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	371.062.400,00	276.890.500,00	-	-	-	-	-	-
0.01.8.01.0.00.0.00.01.01.2.09.01.	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	371.062.400,00	276.890.500,00	-	-	-	-	-	-
0.01.8.01.0.00.0.00.01.02.	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**2.578.312.116,00**	**2.340.136.364,00**	-	-	-	-	-	-
0.01.8.01.0.00.0.00.01.02.2.01.	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan*	2.578.312.116,00	2.340.136.364,00	-	-	-	-	-	-
0.01.8.01.0.00.0.00.01.02.2.01.03.	*Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*	2.062.894.160,00	1.990.269.590,00	-	-	-	-	-	-
0.01.8.01.0.00.0.00.01.02.2.01.04.	*Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*	484.641.551,00	348.322.404,00	-	-	-	-	-	-
0.01.8.01.0.00.0.00.01.02.2.01.05.	*Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*	30.776.405,00	1.545.400,00	-	-	-	-	-	-
0.01.8.01.0.00.0.00.01.03.	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**35.713.329.536,00**	**35.485.368.968,00**	-	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.2.01.	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Perencanaan Pelaksanaan*	35.713.329.035,00	35.485.366.966,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.2.01.63.	*Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik* *Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika*	34.592.669.150,00	34.584.819.100,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.2.01.64.	*Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah* *Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika*	808.839.135,00	748.072.466,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.2.01.65.	*Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah* *Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang*	311.821.300,00	152.475.400,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.04.	***Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*** **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**394.386.838,00**	**121.692.100,00**	**80.000.000,00**	**73.800.000,00**	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.04.2.01.	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Perencanaan Pelaksanaan*	394.386.838,00	121.692.100,00	80.000.000,00	73.800.000,00	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.04.2.01.63.	*Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan* *Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,*	169.502.692,00	48.800.000,00	50.000.000,00	48.800.000,00	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.04.2.01.64.	*Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah* *Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas,*	144.198.302,00	16.000.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.04.2.01.65.	*Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah* *Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang*	80.686.844,00	55.892.100,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-
	Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
0.01.0.01.0.00.0.00.01.05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	795.234.558,00	545.816.794,00	-	-	-	-	-	-
0.01.0.01.0.00.0.90.01.05.2.01.	Penurunan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan	795.234.558,00	545.816.794,00	-	-	-	-	-	-
0.01.0.01.0.00.0.90.01.05.2.01.03.	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,	461.210.910,00	400.005.906,00	-	-	-	-	-	-
0.01.0.01.0.00.0.90.01.05.2.01.04.	Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,	165.090.064,00	-	-	-	-	-	-	-
0.01.0.01.0.00.0.90.01.05.2.01.05.	Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang	168.933.584,00	145.810.794,00	-	-	-	-	-	-
0.01.0.01.0.00.0.90.01.06.	Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL	2.585.550.098,00	2.504.399.198,00	-	-	-	-	-	-
0.01.0.01.0.00.0.90.01.06.2.01.	DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Penurunan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan	2.585.550.098,00	2.504.399.198,00	-	-	-	-	-	-
0.01.0.01.0.00.0.90.01.06.2.01.03.	Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama	454.127.660,00	423.642.500,00	-	-	-	-	-	-
0.01.0.01.0.00.0.90.01.06.2.01.04.	Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja	91.231.302,00	91.231.302,00	-	-	-	-	-	-
0.01.0.01.0.00.0.90.01.06.2.01.05.	Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang	98.195.580,00	97.560.000,00	-	-	-	-	-	-
	Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiat	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Fasilitasi Koordinasi Pinjaman Daerah Kabupaten/Kota	1.941.535.695,00	1.663.965.296,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah		2.375.083.845.270,00	2.432.229.839.353,88	320.213.621.778,00	315.897.484.723,88	6.393.324.792,00	761.126.257,00	-	-

Pj. WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

RISNANDAR MAHIWA

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

INDRA POMI NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 NOMOR 3

No.REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU,
NOMOR URUT PERDA (1.38.A/2024)

LAMPIRAN VII

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023 menyajikan informasi yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), di mana laporan tersebut merupakan konsolidasi dari seluruh Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 khususnya Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru disusun untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dari *stakeholders* yang relevan antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Laporan keuangan berisikan posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru selama Tahun Anggaran 2023 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan pada laporan keuangan antara lain mengenai Pendapatan-LRA, Pendapatan-LO, Belanja, Beban, Transfer, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas, dan Arus Kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memahami tentang:

a. Kemampuan penerimaan dari pendapatan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya terhadap anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan Pemerintah Kota Pekanbaru serta hasil yang telah dicapai;
d. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mendanai berbagai kegiatan yang telah dianggarkan;

e. Posisi keuangan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan berupa pajak daerah , retribusi daerah dan penerimaan lainnya serta kondisi Pemerintah Kota Pekanbaru akibat dari pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2023; dan

f. Informasi tentang perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilaksanakan selama periode pelaporan.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Keuangan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023 adalah:

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

n. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);

o. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

p. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

q. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

r. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

s. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

t. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;

w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;

y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem informasi Pemerintah Daerah;

z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1781);

bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 972);

cc. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tangggal 05 Oktober 2020 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

dd. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

ee. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

ff. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023;

gg. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2023);

hh. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023;

ii. Peraturan Walikota No 112 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Angguran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023;

jj. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan;

kk. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2022;

ll. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 382 Tahun 2023 tentang Standarisasi Harga Barang /Jasa Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

mm. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 112 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023;

nn. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023;

oo. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 105 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kota Pekanbaru;

pp. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru No 105 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru;

qq. Peraturan Walikota No 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023;

rr. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023;

1.3. SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru disajikan dengan urutan sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

2.2. Kebijakan Keuangan

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru

3.2. Pencapaian Kinerja Program

3.3. Mandatory Spending Tahun Anggaran 2023

3.4. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pencapaian Target Pendapatan Tahun Anggaran 2023

3.5. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pencapaian Kinerja Program Tahun Anggaran 2023

Bab IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

4.2. Basis Akuntansi

4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual

Bab V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Masing-Masing Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2. Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Saldo Anggaran Lebih

5.3. Penjelasan Masing-masing Pos Neraca

5.4. Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Operasional

5.5. Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Arus Kas

5.6. Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Keputusan Mahkamah Agung atas Banding Walikota Pekanbaru Terhadap Gugatan Koleman, dkk.

6.2. Status Tanah dan Bangunan berupa Konstruksi dalam Pengerjaan Pasar Cik Puan Jalan Tuanku Tambusai Kecamatan Sukajadi Pekanbaru

6.3. Informasi Penyertaan Modal

6.4. Gugatan Perdata Oleh PT. Multi Inti Guna

6.5. Dampak Pasca Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Pendapatan Yang Bersumber dari Kerjasama BGS Peremajaan Beberapa Pasar

6.6 Penjelasan Tentang Pengelolaan Tanah Dengan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Milik Pemerintah Kota Pekanbaru

Bab VII PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro merupakan cerminan kinerja perekonomian yang merupakan bagian dari proses pembangunan secara umum, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Kondisi ekonomi makro Kota Pekanbaru Tahun 2018 – 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:'

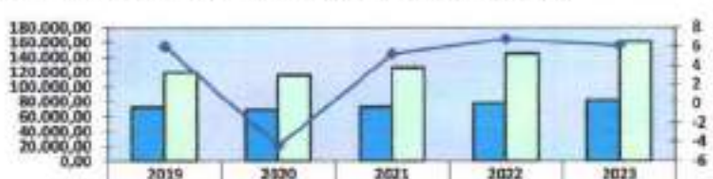
2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan ekonomi Kota Pekanbaru dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari tren kenaikan PDRB Kota Pekanbaru dari tahun-tahun sebelumnya. PDRB Kota Pekanbaru pada Tahun 2023 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai 159,96 miliar rupiah apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 144,58 miliar rupiah. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 82.235,28 Miliar Rupiah. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Pekanbaru seri 2010 pada tahun 2023 sebesaar 6,06%.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru mencatat pertumbuhan ekonomi 2023 mencapai 6,06%, lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang mengalami kontraksi 0,72%. Di Kota Pekanbaru, perekonomian wilayah ini utamanya ditopang oleh Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Industri Pengolahan. Dari seluruh sektor, sektor Konstruksi mengalami laju pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 16,66%, sedangkan pertumbuhan paling lambat terjadi pada sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar minus 5,59%.

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2019 – 2023 maupun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2019 - 2023 serta Perkembangan Perekonomian (2019 – 2023) tertuang pada grafik berikut:

Grafik 2.1. Pertumbuhan PDRB Kota Pekanbaru Tahun 2019 – 2023



	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB-ADHK (Rp. Milyar)	72.181,90	69.016,92	72.619,08	77.539,10	82.235,28
PDRB-ADHB (Rp. Milyar)	118.761,90	115.519,50	126.555,68	144.583,27	159.960,67
Pertumbuhan ekonomi %	5,99	-4,38	5,24	6,78	6,06

Sumber : BPS Kota Pekanbaru. 2024. Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2024.
Catatan : PDRB dalam miliar rupiah, pertumbuhan dalam %

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dapat tercermin dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebagai hasil dari bekerjanya seluruh sektor lapangan usaha akibat dari adanya intervensi program maupun kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah.

Meskipun sumbangan pengeluaran pemerintah dalam produk domestic bruto regional (PDRB) Kota Pekanbaru relative kecil yakni 6,79 persen pada Tahun 2023 namun diharapkan peran pemerintah dalam pelaksanaan program prioritas dan penetapan kebijakan dalam berbagai sektor mampu mendorong dan memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Pekanbaru.

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kota Pekanbaru dalam rencana kerjanya telah menetapkan target-target indikator makro sebagai berikut :

Tabel 2.1. Target Indikator Makro Kota Pekanbaru Tahun 2023

No	Indikator Makro	Target	Realisasi
1.	Pertumbuhan Ekonomi	4,73 – 5,51 %	6,06 %
2.	Tingkat Kemiskinan	2,33 – 2,63 %	3,16 %
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,17 – 8,20 %	6,20 %
4.	Indeks Pembangunan Manusia	82,24 – 82,40	82,38

Sumber : RKPD Kota Pekanbaru dan BPS Kota Pekanbaru Tahun 2023

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru pada Tahun 2023 mengalami perlambatan dibandingkan dengan Tahun 2022 yakni dari 6,78 persen menjadi 6,06 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif dimana trend positif ditunjukkan selama 2 tahun yakni tahun 2021 dan tahun 2022 pemulihan dari pandemi Covid-19 tahun 2020 seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru Tahun 2019 – 2023



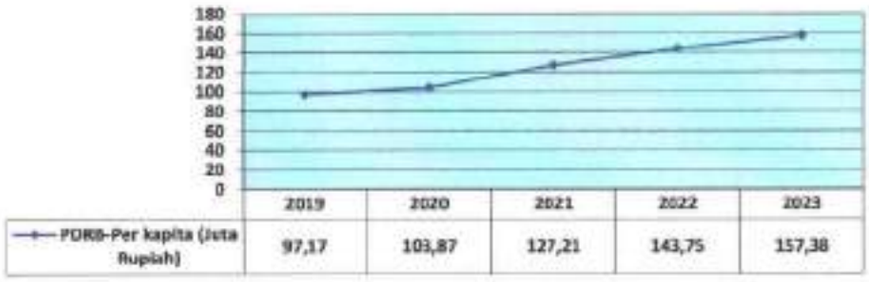
Sumber : BPS, Kota Pekanbaru Dalam Angka 2024

2.1.2. PDRB Per Kapita Kota Pekanbaru

PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka wilayah tersebut semakin makmur.

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita ADHB menunjukkan nilai PDRB per kepala atau satu orang penduduk. Pada Tahun 2023, PDRB per kapita Kota Pekanbaru sebesar 157,38 juta rupiah.

Grafik 2.2. PDRB per Kapita Kota Pekanbaru Tahun 2019 – 2023



Sumber: BPS Kota Pekanbaru. 2024. *Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2023.*

Tabel 2.2 Data Ekonomi Makro Tahun 2021 s.d. 2023

No	Jenis	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Angka Pengangguran	8,56%	8,29%	6,40%	6,20%
2	Gini Rasio	0,35%	0,39%	0,40%	0,39%
3	I P M	81,32%	81,58%	82,06%	82,38%
4	Angka Kemiskinan	2,62%	2,83%	3,06%	3,16%

Sumber : BPS Kota Pekanbaru. 2024. Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2023.

2.1.2.1 Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan penduduk yang berusaha mendapatkan pekerjaan, dimana ketersediaan lapangan pekerjaan lebih kecil dari pencari kerja sehingga tidak mampu menampung pencari kerja. TPT didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan, atau yang sedang mempersiapkan usaha, atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, atau mereka yang

baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekanbaru periode 2021 – 2023 mengalami penurunan setelah pada pada tahun 2020 mengalami peningkatan disebabkan terjadinya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi aktivitas perekonomian maupun kehidupan sosial masyarakat secara global tidak terkecuali di Kota Pekanbaru. Seiring dengan menurunnya trend pandemi Covid-19 yang memungkinkan denyut perekonomian dan aktivitas sosial masyarakat berangsur pulih maka memberikan dampak positif dalam penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pekanbaru seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pekanbaru Tahun 2019 – 2023

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Pekanbaru	7,74	8,56	8,29	6,4	6,2

Sumber : BPS Kota Pekanbaru Tahun 2023

Fenomena pengangguran berpendidikan merupakan masalah yang dihadapi Indonesia. Banyak penduduk yang sudah menamatkan pendidikan tingkat SMA/Sederajat mencari lowongan pekerjaan. Tingkat pendidikan sarjana turut berkontribusi dalam persaingan dunia kerja. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus menghasilkan profil pengangguran berdasarkan pendidikan yang ditamatkan. Tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023 menunjukkan bahwa urutan pertama didominasi oleh penduduk berpendidikan Diploma I/II/III. Kemudian urutan kedua dan ketiga adalah pendidikan SMA Umum dan Universitas.

Pada tahun 2023, angka TPT Diploma I/II/III di Kota Pekanbaru adalah sebesar 9,71 persen, kemudian diikuti oleh pendidikan SMA Umum sebesar 6,86 persen dan pendidikan Universitas sebesar 6,85 persen. Tingginya TPT penduduk dengan tamatan SMA, Diploma dan Sarjana ini menjadi catatan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk dapat meningkatkan serta membuka lapangan kerja bagi kelompok tersebut. Harapannya lapangan kerja baru bagi mereka di daerahnya sendiri dapat menurunkan angka urbanisasi dan turut serta dalam pembangunan di daerahnya.

2.1.2.2 GINI RASIO

Indeks Gini (*Gini Ratio*) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Dengan klasifikasi Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti kesetaraan sempurna, dengan deskripsi dimana setiap orang memiliki pendapatan yang sama persis, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketidaksetaraan sempurna atau ketimpangan benar-benar sempurna terjadi, dengan deskripsi dimana satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain memiliki nol pendapatan. Di

Tahun 2023 Gini Rasio Kota Pekanbaru berada diangka 0,392% lebih kecil dibandingkan dengan Gini Rasio tahun 2022 sebesar 0,397%, berarti pada tahun 2023 terjadi peningkatan kesetaraan pendapatan penduduk Kota Pekanbaru dibandingkan tahun 2022.

2.1.2.3 IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendidikan, kesehatan dan pendapatan. IPM dibentuk dari tiga dimensi yaitu (1) Pendidikan yang diukur dari Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah, (2) Kesehatan diukur dari Usia Harapan Hidup dan (3) Standar Hidup Layak diukur dari pengeluaran per kapita.

Nilai IPM Kota Pekanbaru tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022 yaitu semula 82,06 menjadi 82,38. Nilai IPM Kota Pekanbaru merupakan nilai IPM tertinggi dibandingkan nilai kabupaten/kota lain di Riau bahkan tingkat Provinsi Riau dan Nasional seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2019 – 2023

Wilayah	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Pekanbaru	81,35	81,32	81,58	82,06	82,38
Provinsi Riau	73,00	72,71	72,94	73,52	74,04
Nasional	71,92	71,94	72,29	73,77	74,39

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2023

Selama periode 2019 – 2023, trend nilai IPM Kota Pekanbaru menunjukkan hal positif setiap tahunnya kecuali tahun 2020 dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19. Peningkatan nilai IPM tersebut merupakan hasil dari peningkatan setiap komponen pembentuk nilai IPM yakni Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup dan Pengeluaran per kapita setiap tahunnya.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu komponen untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan. Rata – rata lama sekolah yang digunakan dalam penghitungan IPM diukur dari penduduk berusia 25 tahun ke atas, karena pada usia tersebut proses belajar pada pendidikan formal diasumsikan telah berakhir.

Secara umum, RLS penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2023 sebesar 11,94 tahun. Artinya, rata-rata penduduk Kota Pekanbaru berumur 25 tahun ke atas mampu

menempuh pendidikan sampai dengan kelas 3 SMA atau tidak tamat SMA. Jika dilihat perkembangan selama tahun 2019 – 2023, rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan. Meningkatnya rata-rata lama sekolah dari tahun ke tahun tak lepas dari upaya pemerintah maupun masyarakat yang menginginkan kualitas pendidikan semakin baik.

Gambar 2.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)



Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Pekanbaru, 2023

Penduduk Kota Pekanbaru (Tahun) Tahun 2019 – 2023

Indikator pendidikan lainnya adalah Angka HLS. Indikator ini mengukur peluang pendidikan yang dapat diperoleh untuk anak usia sekolah (7 tahun ke atas). Angka HLS Kota Pekanbaru pada tahun 2023 sebesar 15,58 tahun, artinya anak usia 7 tahun ke atas akan mempunyai peluang bersekolah sampai 16 tahun atau lulus S1 jika kondisinya minimal sama seperti sekarang.

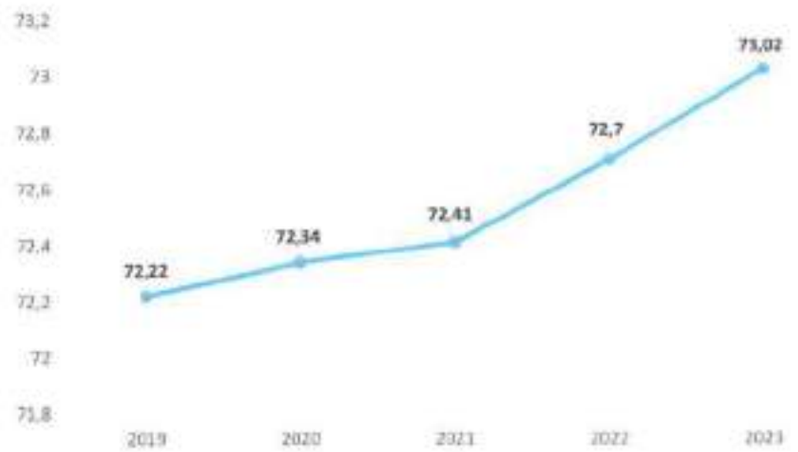
Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terutama untuk peningkatan akses sarana pendidikan dan Harapan Lama Sekolah, Pemerintah Kota Pekanbaru pada Tahun 2023 telah membangun 2 Unit Sekolah Baru (USB) setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yakni SMPN 50 dan SMPN 51 Kota Pekanbaru melalui dana APBD Tahun Anggaran 2023. Selain itu untuk meningkatkan daya tampung sekolah, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru di Tahun 2023 menambah Ruang Kelas Baru (RKB) untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 4 ruang di SDN 190 Kota Pekanbaru dan 5 ruang di lima SMPN yang ada di Kota Pekanbaru.

Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Umur Harapan Hidup merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, Umur Harapan Hidup masyarakat Kota Pekanbaru tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

Gambar 2.3 Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir di Kota Pekanbaru (Tahun) Tahun 2019 – 2023



Sumber : BPS, Indikator Pembangunan Manusia Kota Pekanbaru, 2023

Umur Harapan Hidup di Kota Pekanbaru selama periode 2019 – 2023 meningkat setiap tahun. Pada tahun 2023, UHH Kota Pekanbaru berada pada angka 73,02 tahun yang berarti bayi yang baru lahir diharapkan akan mampu hidup selama 73 – 74 tahun. Umur Harapan Hdup Kota Pekanbaru lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota Riau bahkan Provinsi Riau. Hal ini menunjukkan bahwa semakin membaiknya fasilitas kesehatan masyarakat di Kota Pekanbaru dan perlu lebih ditingkatkan kembali untuk masa yang akan datang.

Pengeluaran Per Kapita

Tingkat kesejahteraan penduduk dapat dilihat dari pola konsumsi dan pengeluaran per kapita. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain, penduduk cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang makanan pada umumnya tinggi.

Selama periode 2019 – 2023, secara umum rata-rata pengeluaran per kapita mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kota Pekanbaru sebesar Rp 1.665.622 per bulan. Pada tahun 2023, rata-rata pengeluaran penduduk menjadi Rp 2.063.759 per kapita per orang.

2.1.2.4 ANGKA KEMISKINAN

Pada Tahun 2023, Tingkat Kemiskinan Kota Pekanbaru mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2022 yakni sebesar 3,16 persen dari semula 3,06 persen dengan trend sebagai berikut :

Gambar 2.4. Trend Kemiskinan di Kota Pekanbaru Tahun 2019 – 2023



Sumber : BPS, Pekanbaru Dalam Angka, 2024

Sejalan dengan hal tersebut, Indeks Kedalaman Kemiskinan juga meningkat 0,05 poin dibandingkan tahun 2022 dan Indeks Keparahan Kemiskinan meningkat 0,02 poin dibandingkan tahun 2022. Fenomena peningkatan tingkat kemskinan diiringi dengan peningkatan Garis Kemiskinan dari semula Rp. 655.389,- pada Tahun 2022 menjadi Rp. 712.000,- pada Tahun 2023.

Sebagai ibakota Provinsi Riau, Kota Pekanbaru menjadi daya tarik bagi penduduk wilayah sekitarnya untuk melanjutkan pendidikan maupun mencari mata pencaharian sehingga tingkat urbanisasi di Kota Pekanbaru terbilang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, pada Tahun 2023 tercatat sebanyak 12.819 jiwa penduduk datang dari kabupaten/kota di Provinsi Riau dan sebanyak 18.787 jiwa dari luar Provinsi Riau yang pindah ke Kota Pekanbaru. Minimnya keahlian dan daya saing sumber daya manusia serta kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan makanan dan non makanan menyebabkan menurunnya daya beli masyakat sehingga tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan kondisi

tersebut maka jumlah penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapitanya dibawah garis kemiskinan atau dikategorikan miskin di Kota Pekanbaru juga meningkat.

Dalam upaya penurunan Tingkat Kemiskinan, Pemerintah Kota Pekanbaru pada Tahun 2023 telah melakukan verifali dan validasi penduduk miskin dimana penetapan status penduduk miskin ekstrem dilakukan melalui Musyawarah Kelurahan. Verifali dan validasi penduduk yang dilaksanakan dengan kerjasama antara Dinas Sosial, Kecamatan, Disdukcapil dan Bappeda Kota Pekanbaru tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data penduduk miskin di Kota Pekanbaru yang valid dan akurat.

Berdasarkan hasil verifali dan validasi penduduk miskin Tahun 2023, diperoleh data penduduk miskin sebanyak 3.926 orang dari 708 Kepala Keluarga yang selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 443 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemutakhiran Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem By Name By Address Kota Pekanbaru sebagai data sasaran penanganan penurunan kemiskinan sehingga diharapkan intervensi program penurunan kemiskinan dimasa yang akan datang akan tepat sasaran dan *efektif*.

Selain itu dalam rangka meringankan beban penduduk miskin, Pemerintah Kota Pekanbaru pada Tahun 2023 telah menjalankan salah satu Program Prioritas Santunan Kematian bagi masyarakat miskin dalam bentuk pemberian bantuan dana social kematian senilai Rp. 1 juta bagi penduduk yang terdata dalam Program Keluarga Harapan (PKH) atau tercatat sebagai penduduk miskin di Rukun Tetangga setempat.

2.1.3. Inflasi

Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dan dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga barang dan Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga barang dan jasa berupa inflasi/ deflasi di tingkat konsumen di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga di suatu daerah tertentu.

Inflasi yang disajikan pada publikasi ini meliputi inflasi bulanan, inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun (*Year on Year*). Inflasi bulanan merupakan gambaran perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan bersangkutan dengan bulan sebelumnya, sedangkan inflasi tahun kalender merupakan perubahan IHK bulan bersangkutan dibanding dengan IHK bulan Desember tahun sebelumnya atau dikenal juga inflasi kumulatif dari bulan Januari sampai dengan bulan berjalan, dan inflasi tahun ke tahun (*Year on Year*) merupakan perubahan inflasi bulan berjalan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Pekanbaru pada pasar tradisional dan pasar modern di Kota Pekanbaru, pada Desember 2023 terjadi inflasi yoy sebesar 2,50

persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) 114,03 pada Desember 2022 menjadi 116,88 pada Desember 2023. Tingkat inflasi mtm sebesar 0,21 persen dan tingkat inflasi ytd sebesar 2,50 persen.

Inflasi yoy Tahun 2023 yang terjadi di Kota Pekanbaru karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,32 persen; kelompok transportasi sebesar 2,53 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,59 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,36 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,15 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,03 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,99 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,47 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,34 persen; serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,19 persen. Di sisi lain ada satu kelompok yang mengalami deflasi yaitu kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,14 persen.

Tabel 2.5 Indeks Harga Konsumen Kota Pekanbaru dan Perubahannya per Desember 2023

	Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2023	Tingkat Inflasi Desember 2023	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2023	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun
			(%)	(%)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	UMUM	**116,88**	**0,21**	**2,50**	**2,50**
1	**MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU**	**124,89**	**0,30**	**5,32**	**5,32**
1.1	Makanan	124,55	0,26	5,59	5,59
1.2	Minuman Yang Tidak Beralkohol	133,46	0,13	0,04	0,04
1.4	Rokok Dan Tembakau	132,68	0,00	5,99	5,99
2	**PAKAIAN DAN ALAS KAKI**	**110,69**	**0,06**	**0,47**	**0,47**
2.1	Pakaian	112,16	0,06	0,50	0,50
2.2	Alas Kaki	104,20	0,00	0,34	0,34
3	**PERUMAHAN, AIR, LISTRIK DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA**	**106,38**	**-0,01**	**1,15**	**1,15**
3.1	Sewa Dan Kontrak Rumah	107,40	0,00	2,26	2,26
3.2	Pemeliharaan, Perbaikan, Dan Keamanan Tempat Tinggal/ Perumahan	110,87	0,00	-0,92	-0,92
3.3	Penyediaan Air Dan Layanan Perumahan Lainnya	100,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Listrik Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,38	-0,01	-0,13	-0,13
4	**PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA**	**114,67**	**0,02**	**-0,14**	**-0,14**
4.1	Furnitur, Perlengkapan Dan Karpet	102,54	0,00	0,49	0,49
4.2	Tekstil Rumah Tangga	100,48	1,20	1,20	1,20
4.3	Peralatan Rumah Tangga	107,19	0,03	-0,17	-0,17
4.4	Barang Pecah Belah Dan Peralatan Makan Minum	110,09	0,00	0,42	0,42
4.5	Peralatan Dan Perlengkapan Perumahan Dan Kebun	113,03	0,00	3,50	3,50
4.6	Barang Dan Layanan Untuk Pemeliharaan Rumah Tangga Rutin	121,02	-0,11	-0,81	-0,81
5	**KESEHATAN**	**116,92**	**0,04**	**1,03**	**1,03**
5.1	Obat-Obatan Dan Produk Kesehatan	126,65	0,13	1,76	1,79
5.2	Jasa Rawat Jalan	112,35	0,00	1,00	1,00
5.3	Jasa Rawat Inap	116,79	0,00	0,38	0,38
5.4	Jasa Kesehatan Lainnya	108,29	0,00	0,00	0,00

Sumber : Perkembangan Indeks Harga Konsumen Kota Pekanbaru, Desember 2023 BRS No.01/01/1471/Th.VIII, 2 Januari 2024

Pada Desember 2023, tingkat inflasi yoy sebesar 2,50 persen dan tingkat inflasi ytd sebesar 2,50 persen. Tingkat inflasi yoy untuk Desember 2022 dan Desember 2021 masing masing sebesar 7,04 persen dan 1,55 persen. Sedangkan tingkat inflasi ytd Desember 2022 dan Desember 2021 masing-masing sebesar 7,04 persen dan 1,55 persen

Tabel 2.6 Tingkat Inflasi *Month to Month* (MtM), *Year to Date* (YtD), dan *Year on Year* (YoY) Tahun 2021 s.d. 2023

Tingkat Inflasi	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Month to Month (mtm) Desember	0,07	0,92	0,21
Year to Date (ytd) Desember	1,55	7,04	2,50
Year on Year (yoy) Desember	1,55	7,04	2,50

2.1.3.1 Dampak Kenaikan BBM

Kenaikan harga BBM di Indonesia, tidak terkecuali Kota Pekanbaru akan membawa konsekuensi penyesuaian harga pada berbagai sektor. Dan tentu saja biaya hidup semakin meningkat. Tingkat harga BBM bisa dibilang krusial dalam perekonomian masyarakat, sehingga salah satunya menyebabkan daya beli masyarakat yang menurun. Selain itu juga menyebabkan terjadinya inflasi dimana harga barang dan jasa yang mengalami kenaikan terus menerus,sehingga nilai mata uang akan semakin berkurang dan daya beli masyarakat pun menjadi rendah

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ketahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Keuangan daerah merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan

dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD pada hakekatnya merapakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Ditinjau dari APBD, keuangan daerah yang dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan, dari tahun ke tahun diperkirakan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan perkembangan kebutuhan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik dalam bentuk peningkatan pelayanan. Kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena keuangan daerah merupakan instrument penting kebijakan fiscal daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal daerah mengandung tiga misi utama yaitu:

1. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Desentralisasi fiscal mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiskal dipusatkan pada pengeluaran/belanja publik. Desentralisasi fiskal yang diukur dengan pengeluaranpemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di daerah-daerah. Dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada, memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.2.1 Mandatory Spending dalam APBD 2023

2.2.1.1 Pendidikan (27,04%)

Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 3 ayat (4). Hal ini sudah terpenuhi karena untuk anggaran pendidikan pada tahun 2023 dalam APBD sebesar 27,04%

2.2.1.2 Kesehatan (16,72%)

Alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 10% diluar gaji dalam APBD sesuai ketentuan UU No. 36 Tahun 2009. Untuk anggaran kesehatan dalam APBD 2023 sebesar 16,72% dan hal ini juga telah melebihi dari ketentuan yang telah di tetapkan.

2.2.1.3. Infrastruktur (57,95%)

Alokasi dana untuk infrastruktur paling sedikit 40% yang langsung terkait dengan percepatan pembanguan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan menguangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah (UU APBN).Dalam struktur APBD tahun 2023

telah dianggarkan untuk infrastruktur sebesar 57,95%. Hal ini tentu saja telah melebih dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2.2.1.4. Pengawasan (0,61%)

Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan minimal 0,5% dari total Belanja Daerah. Dalam Struktur APBD Tahun Anggaran 2023 telah dianggarkan untuk kegiatan pengawasan sebesar 0,61%. Hal ini telah melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2.2.2. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tuntutan peningkatan pendapatan daerah semakin besar seiring dengan banyaknya kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada daerah serta tuntutan dari target-target capaian program pembangunan daerah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui program dan kegiatan pembangunan daerah.

Secara garis besar pendapatan daerah Kota Pekanbaru terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu ***Pertama,*** Pendapatan Asli Daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. ***Kedua,*** Pendapatan Transfer yang terdiri atas transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. ***Ketiga,*** Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam Tahun 2023, antara lain:

a. *Peningkatan Basis Data Perpajakan* dengan cara:
   - pendataan ulang *upgrading database* pajak;
   - Menghimpun data dan melakukan verifikasi dan validasi terhadap alamat Wajib dan Objek Pajak melalui turun lapangan pada saat penagihan pajak;
   - Menghimpun data potensi Individual pada PBB-P2;
   - Meningkatkan koordinasi antara Bapenda dengan bagian penerbitan izin;
   - Memberikan insentif berupa potongan pajak;
   - Pendekatan persuasif dengan upaya dengan pemanggilan terhadap objek pajak baru.

b. *Penilaian, Penagihan, dan Pemeriksaan Pajak,* dilakukan dengan cara:
   - Dalam melakukan Penilaian dan Penagihan dikerjasamakan dengan instansi berwenang lainnya sehingga Penilaian, Penagihan, dan Pemeriksaan dapat memperoleh hasil maksimal;
   - Dalam melakukan Pemeriksaan berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan, BPK & BPKP.

c. *Peningkatan SDM Pajak, dilakukan dengan cara:*

- Untuk meningkatkan kemampuan SDM dilakukan dengan Penambahan jumlah diklat untuk ahli penilaian, penagihan, pemeriksaan, dan praktik pemungutan perpajakan yang baik;
- Penambahan kualitas dan kuantitas SDM ditunjang oleh perbaikan sarana prasarana penyelenggaraan pajak;
- Membangun kerjasama yang saling menguntungkan antara Pemerintah, swasta dan Masyarakat;
- Penguatan Peran Penilai Pemerintah dalam Penilaian Individual PBB-P2;
- Penguatan Pemeriksa dalam Pengawasan Pajak Daerah yang bersifat *Self Assessment* (Melibatkan APIP untuk penguatannya);
- Optimalisasi Peran Juru Sita Pajak Daerah dalam Penagihan Pajak objek tertentu;
- Optimalisasi Peran Satgas Pajak Bapenda yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam penerbitan & penyampaian Ketetapan pajak kepada Wajib Pajak.

d. *Penyesuaian dasar pengenaan pajak*, melalui:
   - Penilaian ulang dasar pengenaan pajak sesuai kemampuan membayar pajak; Melakukan penyesuaian faktor perhitungan;
   - Melakukan Penyesuaian tarif dan harga dasar.

e. *Modernisasi*, dengan cara:
   - Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Integrated Database, pelayanan perpajakan;
   - Mewujudkan manajemen pelayanan pajak secara mudah dan cepat.

Pendapatan transfer merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, maka yang perlu diupayakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, antara lain:

a. Perbaikan pencatatan basis pajak;

b. Memperbaiki data dasar yang digunakan dalam perhitungan dan penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) seperti: Data Kebutuhan Fiskal, Data Kapasitas Fiskal, Jumlah Formasi, dan *Rezetting* Belanja Pegawai; dan

c. Rekonsiliasi terhadap data dana transfer tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun berjalan secara periodik.

2.2.3. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek *multiplier* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalampengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistimatis dan terpola. Belanja daerah pada Tahun 2023 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditargetkan dalam RPD Kota Pekanbaru 2023-2026. Sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian tujuan tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas,

efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 telah mengacu kepada ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang terdiri atas ***Pertama,*** Belanja Operasi yang memuat belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. ***Kedua,*** Belanja Modal yang memuat belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya. ***Ketiga,*** Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. ***Keempat,*** Belanja Transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah, dirinci atas belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan dan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial disamping juga untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

Tema pembangunan Kota Pekanbaru pada tahun 2023 telah diselaraskan dengan tema pembangunan Nasional tahun 2023 dan tema pembangunan Provinsi Riau tahun 2023. Tema pembangunan nasional tahun 2023 adalah Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, sedangkan tema pembangunan Provinsi Riau tahun 2023 adalah "Memantapkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah yang kompetitif". Merujuk dari kedua tema diatas maka Kota Pekanbaru merumuskan tema pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 2023 yaitu : "Peningkatan Pembangunan Manusia dan Kualitas Infrastruktur Untuk Transformasi Ekonomi dan Daya Saing Daerah."

Prioritas pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 2023 sesuai dengan arah kebijakan pembangunan tahun pertama RPD. Arah kebijakan pembangunan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 difokuskan pada peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah, , meningkatkan pemerataan ketersediaan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta meningkatkan keharmonisan hidup bermasyarakat di Kota Pekanbaru.

Dalam Implementasi arah kebijakan diatas Perencanaan Pembangunan 2023 adalah menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan di Kota Pekanbaru. Permasalahan- permasalahan yang akan diselesaikan adalah sebagai berikut :

A. Penanganan titik banjir/genangan
B. Pengelolaan Persampahan
C. Kualitas dan kuantitas prasarana jalan
D. Sarana dan Prasaran Pendidikan (Unit Sekolah Baru SMP)
E. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP
F. Konvergensi Stunting
G. Masih tingginya Angka Kematian Bayi
H. Masih tingginya Angka Kematian Ibu
I. Penyediaan Air Bersih Perpipaan
J. Prasarana Air Limbah Perpipaan
K. Pengurangan Kawasan Kumuh
L. Masih kecilnya luas RTH Publik
M. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) => dulu PMKS
N. Penurunan Angka Kemiskinan
O. Penurunan Angka Pengangguran Terbuka
P. Belum Optimalnya Pengembangan Infrastruktur Pariwisata
Q. Belum Optimalnya Promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
R. Rendahnya Kapasitas Wirausaha (Entrepreneur)
S. Rendahnya Persentase Koperasi Aktif
T. Masih Kurangnya Dukungan Infrastruktur Penunjang Kegiatan Industri (terutama KIT)
U. Keterjangkauan Trayek Angkutan Umum
V. Cakupan Pelayanan Penerangan Jalan Umum
W. Persiapan Pemilu 2024 X. Pendirian Politeknik Vokasi

Berikut adalah prioritas Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2023 yang telah diselaraskan dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas SDM.
2. Peningkatan Ketentraman Masyarakat Melalui Implementasi Nilai-Nilai Budaya Melayu.
3. Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.

2.2.4. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksud untuk menutup *defisit* dan atau memanfaatkan *surplus* anggaran.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana diatur juga dalam Bab II huruf E Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah dan/ atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.3.1 Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Kota Pekanbaru

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas mengenai kebijakan keuangan daerah, lebih lanjut dijabarkan dalam indikator pencapaian fiskal daerah, sehingga Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2022. Pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan melalui APBD Murni berdasarkan :

a. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023;
b. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 112 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023;
c. Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 112 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Angguran 2023.

Pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan :

a. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023;
b. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023; dan

c. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023.

Tabel 2.7 Ringkasan APBD Kota Pekanbaru 2023

(dalam rupiah)

URAIAN			APBD MURNI	PERUBAHAN APBD	KENAIKAN/PENURUNAN APBD	(%)
I.	Pendapatan Daerah		2.589.540.066.279,00	2.910.748.035.614,00	219.281.788.335,00	8,12
	I.1	Pendapatan Asli Daerah	981.638.042.727	1.218.123.042.427	90.484.999.700,00	3,87
	I.2	Pendapatan Transfer	1.737.910.023.552	1.480.625.750.187	162.715.788.635,00	9,90
	I.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	-	-	-	-
II.	Belanja		2.679.540.066.279,00	2.910.438.964.895,00	230.898.898.536,00	8,73
	II.1	Belanja Operasi	2.359.726.466.928	2.573.934.756.193	213.208.257.265,00	8,04
	II.2	Belanja Modal	298.671.567.351	332.820.810.838	32.148.448.479,00	10,72
	II.3	Belanja Tidak Terduga	19.950.000.000	8.383.324.722	(11.566.675.218,00)	(57,98)
	II.4	Belanja Transfer	-			
		Surplus/Defisit	30.000.000.000,00	5.311.740.809,00	(14.688.259.191,00)	100,00
III.	Pembiayaan		(30.000.000.000,00)	(5.311.740.809,00)	14.688.259.191,00	100,00
	III.1	Penerimaan	-	14.688.259.191,00	14.688.259.191,00	100,00
	III.2	Pengeluaran	30.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	-
		SILPA Tahun berjalan	-	-	-	

Sumber : APBD dan Perubahan APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023

2.3.2. Indikator Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kota Pekanbaru

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD. Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat impact yang diukur setiap tahunnya.

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan Tema Pembangunan tahunan yang telah diselaraskan dengan tema pembangunan Nasional Tahun 2023 maupun tema pembangunan Provinsi Riau Tahun 2023. Tema pembangunan Kota Pekanbaru tahun 2023 yakni "Peningkatan Pembangunan Manusia dan Kualitas Infrastruktur untuk Transformasi Ekonomi dan Daya Saing Daerah".

Dalam menjalankan tema pembangunan tersebut, terdapat lima prioritas pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 2023 yakni :

1. Peningkatan Kualitas SDM
2. Peningkatan Ketentraman Masyarakat melalui implementasi nilai-nilai Budaya Melayu
3. Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.

Dan untuk mewujudkan prioritas pembangunan tersebut telah ditetapkan 15 Sasaran dan 44 program prioritas, dengan pencapaian program strategis Kota Pekanbaru Tahun 2023 yang dapat dilihat pada lampiran 10.

Prioritas pembangunan Kota Pekanbaru pada Tahun 2023 terdiri dari 5 (lima) dengan didukung 17 (tujuh belas) strategi/sasaran dan 44 program prioritas. Rata-rata capaian prioritas yang digambarkan dari pencapaian target sasaran pembangunan di Kota Pekanbaru sebesar 86,72 % dengan peringkat kinerja "Tinggi". Adapun capaian masing-masing sasaran prioritas dapat dilihat pada Lampiran 11

Dari tujuh belas sasaran prioritas pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 2023 dengan 28 indikator kinerja sekaligus sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Pekanbaru, terdapat 9 indikator yang capaian kinerjanya Melebihi Target diantaranya Angka Harapan Hidup, Pengeluaran per Kapita, Keterjangkauan Layanan Angkutan, Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata), Nilai Investasi berskala Nasional, Indeks Kualitas Udara, Nilai IKM, Nilai SPBE dan Nilai AKIP. Sementara Indikator Kinerja Utama yang capaian kinerjanya Sangat Rendah yakni Cakupan Rumah Tangga Bersanitasi Layak, Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau serta Luasan RTH publik di wilayah perkotaan.

Berdasarkan Evaluasi Kinerja sampai dengan akhir tahun 2023 yang merupakan Hasil Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Pekanbaru Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,75	15,58	98,92	
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12,01	11,84	98,43	
3	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,5	73,01	101	Melebihi target
4	Pengeluaran per kapita	Rupiah	14.501.000	14.988.000	103	Melebihi target
5	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	100	100	100	
6	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	
7	Persentase Budaya Melayu yang direvitalisasi	%	15	13,55	90,33	
8	Jalan dalam kondisi mantap	%	72,11	71,4	99,01	
9	Keterjangkauan layanan angkutan	%	78	80%	103	Melebihi target
10	Cakupan Rumah Tangga pelayanan air bersih perpipaan	SR	16.850	13.928	70,09	
11	Cakupan Rumah Tangga bersanitasi layak	SR	1.000	310	25	
12	Luas areal Kawasan kumuh	Ha	217,35	220,91	94,72	
13	Rasio penumpang yang ditransmisi PDU	Rasio	12	12	100	
14	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	%	86,49	12,68	14,57	
15	Jumlah titik genangan yang ditangani	Jumlah titik	20	11	55	
16	Luasan RTH Publik di wilayah perkotaan	%	5,63	0,28	4,98	
17	Gini Rasio	Indeks	0,380	0,392	98,23	
18	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	%	21,31	20,14	94,51	
19	Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (Pariwisata)	Rupiah (Miliar)	2.019,35	2.571,23	100	Melebihi target
20	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	90,50	Belum Rilis		
21	Nilai investasi berskala nasional	PMDN (Rp.)	2,21 T	5,00 T	100	Melebihi target
		PMA (Rp.)	1,90 T	606 M	31,89	
22	Indeks Kualitas Air	Indeks	93,69	91,11	98,88	
23	Indeks Kualitas Udara	Indeks	85,71	89,03	100	Melebihi target
24	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	27,11	25,05	92,2	
25	Nilai IKM	Nilai	85,50	86,33	100	Melebihi target
26	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,7	3,63	100	Melebihi target
27	Nilai AKIP	Nilai	65	68,99	100	Melebihi target
28	Nilai LPPD	Nilai	3,0	Belum Rilis		
Rata-rata Capaian Kinerja						86,72

Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2023

Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Pekanbaru pada tahun 2023 adalah sebesar 86,72 persen dengan predikat kinerja Tinggi yang berarti pencapaian/realisasi kinerja sebagian besar telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Dari dua puluh delapan indikator kinerja utama terdapat 9 indikator (32,14 %) yang capaiannya melebihi target, 1 indikator memenuhi target (3,57 %), 15 indikator yang belum memenuhi target (53,57 %) dan 2 indikator (7,14 %) yang tidak dapat diperoleh datanya belum rilis dari instansi pemerintah pusat.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Anggaran Pendapatan Kota Pekanbaru pada Tahun 2023 sebesar Rp2.917.972.332.647,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.018.123.042.427,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.899.849.290.220,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp0,00. Sedangkan realisasi pendapatan Pemerintah Kota Pekanbaru pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.753.144.818.421,38 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp890.286.830.690,38, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.862.857.987.731,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp0,00.

Anggaran Belanja Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2023 sebesar Rp2.912.660.591.838,00 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp2.575.063.645.278,00, Belanja Modal sebesar Rp329.213.621.778,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp8.383.324.782,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Pemerintah Kota Pekanbaru sebesar Rp2.748.798.260.183,38 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp2.432.229.639.203,50, Belanja Modal sebesar Rp315.807.494.723,88, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp761.126.257,00, dan Belanja Transfer sebesar Rp0,00.

Penerimaan Pembiayaan yang diterima oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sebesar Rp14.688.259.191,00 dan pengeluaran sebesar Rp10.000.000.000,00,00 sehingga Pembiayaan neto sebesar Rp4.688.259.191,91. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp9.034.817.428,91. Secara rinci realisasi APBD Kota Pekanbaru Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	TARGET (ANGGARAN)	REALISASI	SELISIH	(%)
I. Pendapatan	2.917.972.332.647,00	2.753.144.818.421,38	164.827.514.225,62	94,35
1.1 Pendapatan Asli Daerah	1.018.123.042.427,00	890.286.830.690,38	127.836.211.736,62	87,44
1.2 Pendapatan Transfer	1.899.849.290.220,00	1.862.857.987.731,00	36.991.302.489,00	98,05
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah			-	—

	URAIAN	TARGET (ANGGARAN)	REALISASI	SELISIH	(%)
B.	Belanja	2.913.660.091.838,00	2.748.758.260.194,28	165.902.331.643,62	94,37
	B.1 Belanja Operasi	2.571.360.645.378,00	2.429.224.636.203,40	142.834.098.074,52	94,45
	B.2 Belanja Modal	335.213.421.778,00	315.807.494.723,68	19.405.727.054,12	94,21
	B.3 Belanja Tidak Terduga	5.380.324.782,00	151.129.257,00	7.022.786.525,00	0,09
	B.4 Belanja Transfer	-	-	-	-
	Surplus/Defisit	5.211.749.000,00	4.345.558.237,90	866.190.572,00	83,38
B.	Pembiayaan	(5.211.749.000,00)	4.889.259.191,31	(19.100.000.000,91)	(93,79)
	B.1 Penerimaan	14.889.259.191,00	14.889.259.191,31	(0,31)	100,00
	B.2 Pengeluaran	20.000.008.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	50,00
	SILPA Tahun berjalan	-	9.234.817.428,91	9.234.817.428,91	-

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2023

Secara umum pada Ikhtisar Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023 masih belum optimal,dari sisi pencapaian target Pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada sisi PAD, terdapat beberapa kondisi teknis yang menjadi penghambat diantaranya kurangnya pengawasan karena keterbatasan personil dalam pengawasan objek pajak, masih terdapat pembukuan ganda dari WP dalam pelaporan kewajiban pajak, tidak adanya sangsi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh , sangsi yang diberikan masih banya sebatas administratif, banyaknya tempat hiburan yang belum memiliki izin resmi.Masih terdapat wajib pajak yang belum mendaftarkan objek pajak yang dimiliki, masih kurangnya SDM pengawan untuk terjun ke lapangan memantau kecurangan kecurangan yang terjadi mengenai pajak reklame , sehingga potensi yang diperoleh Bapenda masih belum maksimal.Terjadi kenaikan target yang cukup signifikan pada tahun 2023. Kenaikan target ini dipicu oleh adanya potensi piutang PBB yang sebelumnya berstatus Fasilits Umum (Fasum)yang kemudian ditetapkan yang kemudian ditetapkan kembali sebagai piutang PBB di tahun berjalan. Tidak optimalnya penerimaa npiutang PBB-P2 sampai dengan 31 Desember 2023 karena masih banyak data Subjek dan Objek Pajak PBB-P2 yan belium dimutakhirkan sehingga mengahambat pendistribusian SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak. SDM pemeriksa pajak daerah ditambah dengan kemampauan dan kapasitas petugas pelayanan pajak baik dalam penguasaan teknologi informasi maupun teknik belum memadai, serta belum maksimalnya peran satgas pajak dalam penertiban pajak dan penyampaian ketetapan pajak kepada Wajib Pajak .

Untuk perbedaan pada Target dan realisasi Belanja pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023 ini artinya secara kinerja keuangan sudah mulai seimbang antara Belanja dan pendapatan hampir sama. Dan untuk tahun 2023 tidak ada tunda Bayar.Dan penyelesaian Tunda Bayar tahun tahun sebelumnya juga sudah banyak yang terselesaikan.

Ada beberapa hal yang masih menjadi hambatan dalam pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023, diantaranya adalah adanya kesalahan dalam penganggaran, belanja modal yang tidak terdapat di RKBMD, serta masih adanya tunda bayar karena kurangnya ketersediaan dana di akhir tahun. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kesalahan penganggaran untuk tahun

berikutnya secara teknis TAPD telah melakukan perbaikan terhadap kode rekening belanja sesuai dengan peruntukkannya. Selain itu TAPD juga memberikan sosialisasi tentang kodefikasi belanja sesuai dengan Permendagri serta pemahaman yang lebih terinci pada saat asistensi penyusunan RKA. Dan dalam implementasi kedepan terhadap SKPD yang masih melakukan kesalahan penganggaran akan ditunda proses pencairan belanja sampai diperbaiki kode rekening yang benar.

Dalam memenuhi ketersediaan dana di masa mendatang, Pemerintah Kota Pekanbaru akan berkomitmen menyelesaikan Tunda Bayar di 2024. Selanjutnya Pemerintah kota Pekanbaru akan terus mengupayakan peningkatan potensi dan pencapaian PAD, serta menginventarisasi kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas.

3.1.1. PENDAPATAN

Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dikelompokkan atas:

a. Pendapatan Asli Daerah

Tabel 3.2. Perkembangan PAD Tahun Anggaran 2014 s.d. 2023

(dalam rupiah)

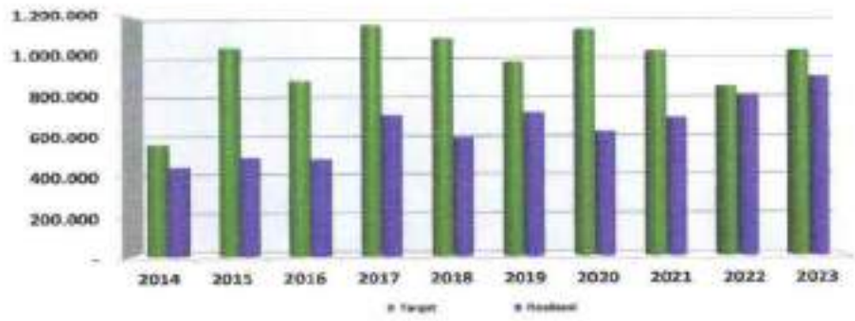
NO.	TAHUN ANGGARAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2014	556.863.614.574,00	440.550.158.026,39	79,40
2	2015	1.037.870.534.336,00	492.511.317.377,00	47,45
3	2016	870.406.974.034,00	482.031.164.869,27	55,38
4	2017	1.149.338.489.770,00	687.466.856.719,96	60,68
5	2018	1.085.555.818.568,00	592.707.161.811,78	54,60
6	2019	963.784.076.814,00	710.129.196.650,75	73,88
7	2020	1.126.476.692.701,00	618.090.322.805,90	54,87
8	2021	1.015.371.119.895,00	684.642.966.382,18	67,43
9	2022	840.108.083.019,00	799.021.514.425,65	95,11
10	2023	1.018.123.042.427,00	890.289.830.800,38	87,44

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Target dan realisasi PAD dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2023, digambarkan dengan tabel dan grafik untuk mempermudah dalam membaca dan memahaminya.

Grafik 3.1. Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2023

(dalam jutaan rupiah)



b. Pendapatan Dana Transfer

Target dan realisasi dana perimbangan dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2023, digambarkan dengan tabel, grafik, dan penjelasan secara rinci guna mempermudah membaca dan memahaminya.

Tabel 3.3. Perkembangan Dana Transfer Tahun Anggaran 2014 s.d. 2023

(dalam rupiah)

NO.	TAHUN ANGGARAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2014	1.023.360.384.012,00	1.016.842.118.749,27	105,36
2	2015	1.698.976.733.643,00	1.674.848.785.941,99	98,58
3	2016	1.563.982.095.860,00	1.545.059.420.332,31	98,79
4	2017	1.320.906.554.006,00	1.222.248.651.620,00	92,53
5	2018	1.306.724.585.006,00	1.277.237.744.503,00	97,74
6	2019	1.481.646.756.806,00	1.304.793.092.678,00	88,06
7	2020	1.229.773.057.000,00	1.307.245.078.093,00	106,30
8	2021	1.265.076.176.006,00	1.287.029.703.324,00	101,70
9	2022	1.651.901.304.829,00	1.680.235.855.820,00	101,71
10	2023	1.599.849.299.220,00	1.562.857.667.731,00	98,05

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pekanbaru

Grafik 3.2. Perkembangan Target dan Realisasi Dana Transfer Tahun Anggaran 2014 s.d 2023

(dalam jutaan rupiah)



c. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup beberapa ketentuan antara lain:

1) Pendapatan Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Pendapatan Dana darurat merupakan dana yang bersal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

Mulai Tahun Anggaran 2013, Laporan Pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I berupa Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota dimana Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari:

1) Pendapatan Hibah;

2) Pendapatan Dana Darurat; dan

3) Pendapatan Lainnya.

Dengan berubahnya format laporan pertanggungjawaban, yakni mengelompokkan sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, hal ini secara data berdampak pada pengurangan target dan realisasi dari lain-lain pendapatan yang sah. Untuk mempermudah membaca dan memahami perkembangan lain-lain pendapatan yang sah berikut disajikan dengan tabel, grafik dan penjelasan secara rinci.

Tabel 3.4. Perkembangan Lain-lain Pendapatan yang Sah
Tahun Anggaran 2014 s.d. 2023

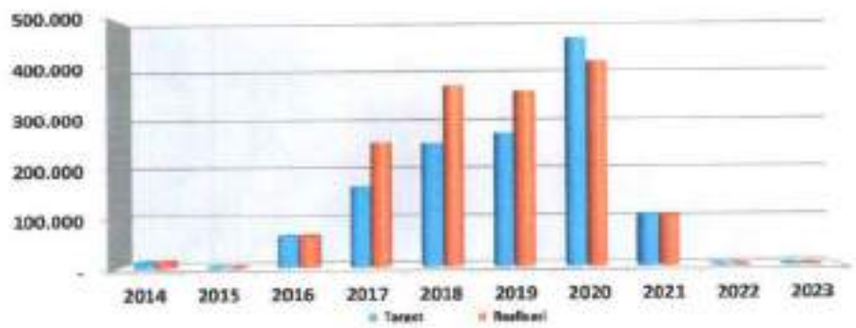
(dalam rupiah)

NO.	TAHUN ANGGARAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2014	10.266.000.000,00	10.266.000.000,00	100,00
2	2015	-	-	-
3	2016	62.763.749.000,00	62.763.747.396,00	100,00
4	2017	161.323.536.141,00	251.875.056.752,63	156,13
5	2018	250.780.517.285,00	365.073.598.424,48	145,58
6	2019	99.077.080.000,00	99.077.345.031,00	100,00
7	2020	127.229.587.186,00	120.244.219.401,00	94,51
8	2021	104.426.080.000,00	103.289.251.870,00	98,88
9	2022	-	-	-
10	2023	-	-	-

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Grafik 3.3. Perkembangan Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2023

(dalam jutaan rupiah)



Target dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah tahun sebelumnya merupakan dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau. Mulai Tahun Anggaran 2016, dana bantuan keuangan tersebut dicatat dan merupakan bagian dari pendapatan dana transfer sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

3.1.2. BELANJA

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan membagi jenis belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, dan berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian dituangkan lebih terperinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab II huruf D bahwa belanja diklasifikasikan menjadi: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Hal ini mulai berlaku pada tahun 2021, sementara untuk tahun 2020 kebawah klasifikasi belanja masih mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana belanja menurut kelompoknya terdiri dari: Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung. Perbedaan jenis belanja tersebut sangat signifikan, sehingga untuk menghasilkan laporan berupa laporan realisasi anggaran harus dilakukan konversi dari kode rekening ke kode akun.

Perkembangan belanja yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak terduga dari Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2023, dapat digambarkan dan dijelaskan melalui tabel dan grafik sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Tabel 3.5. Perkembangan Belanja Operasi Tahun Anggaran 2014 s.d. 2023

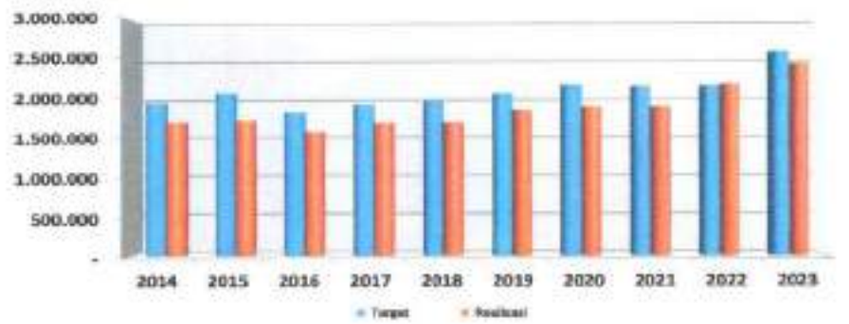
(dalam rupiah)

NO.	TAHUN ANGGARAN	TARGET	REALISASI	KENAIKAN/PENURUNAN	
				(Rp)	(%)
1	2014	1.844.820.487.397,00	1.685.621.105.219,00	1.685.621.105.219,00	122,43
2	2015	2.065.265.378.211,00	1.713.933.712.651,00	18.912.607.432,00	1,12
3	2016	1.817.170.368.316,00	1.573.935.577.763,00	(139.998.134.888,00)	(8,17)
4	2017	1.923.930.574.247,00	1.685.449.841.171,42	111.514.063.408,42	7,09
5	2018	1.983.856.893.130,00	1.689.047.575.602,52	3.597.834.431,10	0,21
6	2019	2.057.674.924.197,00	1.834.291.017.148,58	145.243.441.546,06	8,60
7	2020	2.157.097.953.444,00	1.883.129.143.268,01	48.838.126.111,43	2,66
8	2021	2.144.732.714.390,00	1.884.629.712.666,26	1.500.569.432,25	0,08
9	2022	2.140.449.929.245,00	2.163.368.664.652,36	278.738.951.854,10	14,79
10	2023	2.575.060.045.278,00	2.402.229.639.265,50	238.860.974.661,14	12,43

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru.

Grafik 3.4. Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2014 s.d. 2023

(dalam jutaan rupiah)



Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat perkembangan anggaran dan realisasi Belanja Operasi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023.

b. Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Perkembangan belanja modal digambarkan dengan tabel, grafik dan penjelasan terinci sebagai berikut:

Tabel 3.6. Perkembangan Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2014 s.d. 2023

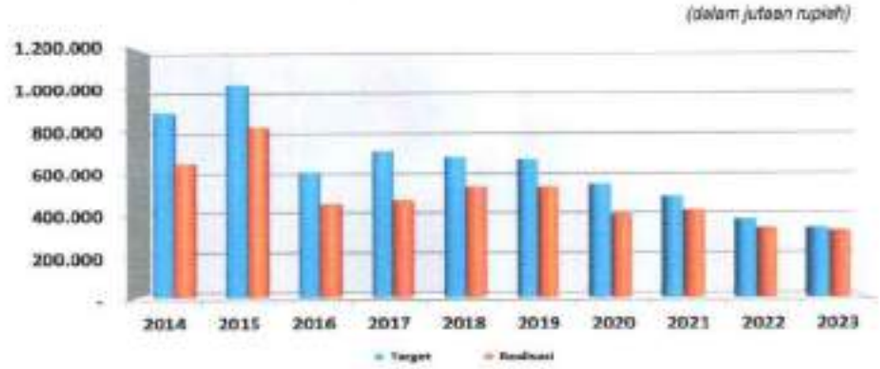
(dalam rupiah)

NO.	TAHUN ANGGARAN	TARGET	REALISASI	KENAIKAN/PENURUNAN REALISASI TAHUN SEBELUMNYA	
				Rp.	%
1	2014	898.033.176.523,00	647.098.439.363,00	176.114.011.439,00	37,39
2	2015	1.027.107.385.473,00	821.826.769.354,00	174.528.329.991,00	26,97
3	2016	606.426.881.383,00	450.341.770.647,10	(371.284.998.706,90)	(45,19)
4	2017	704.359.381.463,00	466.573.845.625,18	16.232.074.981,00	3,60
5	2018	575.054.013.524,00	531.148.865.115,09	64.575.019.548,91	13,84
6	2019	665.316.389.675,00	529.033.719.916,67	(1.815.145.256,42)	(0,34)
7	2020	544.390.463.906,00	396.156.063.968,73	(133.397.655.947,94)	(25,19)
8	2021	496.309.369.914,00	415.894.763.452,07	19.458.699.483,34	5,01
9	2022	370.867.384.025,00	328.535.865.976,99	(87.658.777.475,08)	(21,07)
10	2023	529.213.621.779,00	315.807.404.723,88	(12.728.461.253,11)	(3,92)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Grafik 3.5. Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2014 s.d. 2023

(dalam jutaan rupiah)



c. Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

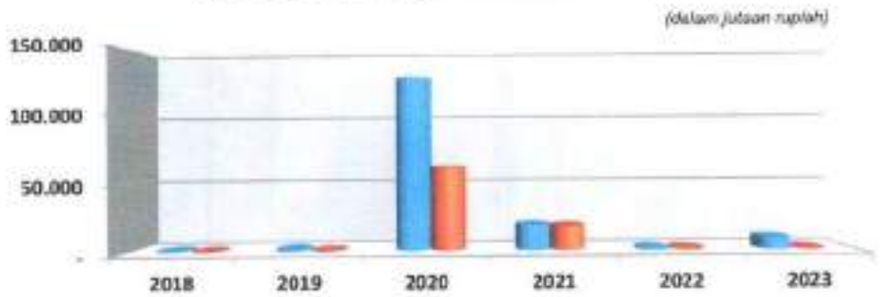
Tabel 3.7. Perkembangan Anggaran Dan Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2018 s.d. 2023

(dalam rupiah)

NO.	TAHUN ANGGARAN	TARGET	REALISASI	KENAIKAN/PENURUNAN REALISASI TAHUN SEBELUMNYA	
				Rp.	%
1	2018	600.000.000,00	163.863.442,00	13.826.264,00	9,28
2	2019	1.500.000.000,00	365.873.326,50	202.009.884,50	124,37
3	2020	127.978.717.243,00	61.915.373.606,00	61.550.100.288,50	18.922,79
4	2021	18.000.000.000,00	18.171.412.227,93	(43.744.561.377,07)	(70,65)
5	2022	1.000.000.000,00	984.331.717,00	(17.207.080.510,93)	(94,59)
6	2023	8.383.334.792,00	781.126.257,00	(203.205.460,00)	(21,07)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Grafik 3.6. Perkembangan Target dan Realisasi Belanja
Tak Terduga Tahun Anggaran 2018 s.d. 2023



Pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang cukup signifikan belanja tak terduga disebabkan oleh belanja penanganan *COVID 19*.

3.1.3. PEMBIAYAAN

Pembiayaan daerah merupakan salah satu pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus. Tahun Anggaran 2023, target penerimaan pembiayaan sebesar Rp14.688.259.191,00 direalisasikan sebesar Rp14.688.259.191,91 atau 100,00% yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022. Terkait alokasi pengeluaran pembiayaan tahun 2023 sebesar Rp20.000.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp10.000.000.000.00 atau 50,00%. Sehingga target Pembiayaan Netto Tahun 100,00%

Surplus/defisit Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp5.311.740.809,00. Pembiayaan netto dianggarkan sebesar minus Rp.5.311.740.809,00 dan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp4.688.259.191,91 Pembiayaan netto ditambah dengan surplus anggaran terdapat SiLPA sebesar Rp 9.034.817.428,91.

3.2. PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM

Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Representasi dari peran SKPD yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang didefinisikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Pada Tahun Anggaran 2023, alokasi Belanja Daerah yang terbesar adalah untuk menunjang pelaksanaan urusan Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp563.000.117.834,00 dari total belanja sebesar Rp2.520.117.233.340,00 atau 22,34%. Urusan Wajib digunakan untuk mendanai 146 Program dengan 646 Kegiatan. Tabel berikut menggambarkan alokasi belanja berdasarkan urusan.

Tabel 3.8. Alokasi Belanja Daerah per Urusan Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6
I	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**33**	**126**	**1.614.117.338.255,00**	**1.541.831.636.189,92**
1	Pendidikan	3	11	703.183.962.849,00	696.902.654.370,78
2	Kesehatan	5	19	327.118.662.321,00	304.641.825.492,71
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	19	332.539.164.884,00	313.175.894.049,43
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	17	168.724.396.198,00	160.539.274.816,00
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	4	16	66.273.916.087,00	62.816.669.949,00
6	Sosial	6	44	16.276.331.197,00	13.949.286.926,00
II	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**59**	**177**	**445.413.505.055,00**	**413.673.122.770,50**
1	Tenaga Kerja	4	11	8.431.390.418,00	8.288.193.709,00
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	22	14.722.273.287,00	12.225.302.452,00
3	Pangan	5	14	7.843.719.249,00	7.518.847.751,00
4	Pertanahan	3	8	9.680.377.864,00	6.965.974.465,00
5	Lingkungan Hidup	8	13	124.265.158.015,00	117.708.523.014,55
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	16	19.277.806.538,00	18.092.902.437,00
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	14	17.068.485.325,00	15.532.223.966,00
8	Perhubungan	3	11	144.397.945.567,00	136.279.326.578,00
9	Komunikasi dan Informatika	5	12	20.997.831.509,00	19.459.420.208,00
10	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	7	15	12.037.577.869,00	10.678.364.926,00
11	Penanaman Modal	6	12	29.102.569.969,00	26.484.137.774,00
12	Kepemudaan dan Olahraga	4	14	24.534.377.740,00	23.998.437.595,00
13	Perpustakaan	5	15	13.011.373.478,00	12.436.589.814,00
	JUMLAH URUSAN WAJIB	**92**	**303**	**2.059.530.743.310**	**1.955.504.731.960**
III	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**19**	**40**	**43.702.225.371,00**	**39.501.601.495,00**
1	Pariwisata	6	18	8.763.366.671,00	8.160.142.605,00
2	Pertanian dan Perkunan	7	13	17.209.493.026,00	15.226.790.833,00
3	Perdagangan dan Perindustrian	6	11	17.727.335.774,00	16.115.668.057,00
IV.	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**7**	**49**	**387.188.848.576,00**	**357.986.082.420,91**
1	Sekretariat Daerah	4	30	186.782.978.741,00	177.370.520.495,91
2	Sekretariat DPRD	3	20	200.395.869.835,00	180.614.071.544,00
V.	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**13**	**58**	**163.036.467.532,00**	**141.639.000.414,00**
1	Perencanaan	3	12	12.212.169.060,00	10.566.730.175,00
2	Keuangan	5	15	126.031.068.196,00	109.570.619.491,00
3	Kepegawaian	3	12	15.329.401.664,00	14.414.126.496,00
4	Penelitian dan Pengembangan	2	11	7.463.828.720,00	7.087.525.253,00

No.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
VI.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	12	12.976.388.960,00	15.177.468.681,00
1	Inspektorat Daerah	1	12	12.976.388.960,00	15.177.468.681,00
VII	UNSUR KEWILAYAHAN	6	15	191.610.615.644,00	180.991.222.152,00
1	Kecamatan	6	15	191.610.615.644,00	180.991.222.152,00
VIII.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6	13	49.615.263.345,00	48.007.504.110,00
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	13	49.615.263.345,00	48.007.504.110,00
Jumlah		158	473	2.912.560.591.836,00	2.744.796.268.184,38

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru.

3.3 MANDATORY SPENDING TAHUN ANGGARAN 2023

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 27,04% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);
b. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 16,72% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);
c. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN) itu sebesar 57,95%, dan
d. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Realisasi anggaran belanja Pemerintah Kota Pekanbaru TA 2023 dalam rangka pemenuhan *Mandatory spending* adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9. Alokasi Mandatory Spending Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan:	703.183.662.440,00	686.807.946.897,76	97,68%
	1) Belanja Operasi	518.080.646.622,00	503.191.559.271,42	97,58%
	a. belanja pegawai	496.027.303.043,00	396.266.258.340,00	97,58%
	b. belanja barang dan jasa	146.546.642.394,00	140.086.272.251,42	96,21%
	c. belanja hibah	86.480.338.387,00	86.218.027.580,00	100,48%
	d. belanja bantuan sosial	-	-	0,00%
	2) Belanja Modal	85.110.951.428,00	83.298.377.438,34	98,46%
	3) Belanja Transfer	-	-	0,00%
3.	Urusan Bidang Kebudayaan:	8.765.286.071,00	8.168.162.809,00	93,98%
	1) Belanja Operasi	8.671.438.571,00	8.072.362.809,00	93,09%
	a. belanja pegawai	4.868.431.376,00	4.849.680.249,00	99,54%
	b. belanja barang dan jasa	3.810.987.295,00	3.422.762.251,00	89,81%
	c. belanja hibah	-	-	0,00%
	d. belanja bantuan sosial	-	-	0,00%
	2) Belanja Modal	97.866.800,00	97.800.000,00	99,79%
	3) Belanja Transfer	-	-	0,00%
4.	Urusan Bidang Perpustakaan:	15.211.373.479,00	13.438.399.814,00	95,00%
	1) Belanja Operasi	13.150.804.479,00	11.505.802.990,00	96,36%
	a. belanja pegawai	7.276.520.858,00	6.891.597.322,00	95,47%
	b. belanja barang dan jasa	4.941.087.429,00	4.704.395.667,00	95,21%
	c. belanja hibah	-	-	0,00%
	d. belanja bantuan sosial	-	-	0,00%
	2) Belanja Modal	851.765.000,00	842.790.825,00	98,95%
	3) Belanja Transfer	-	-	0,00%
5.	Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:	39.534.377.746,00	23.999.432.580,00	97,02%
	1) Belanja Operasi	22.179.008.918,00	22.251.173.580,00	97,75%
	a. belanja pegawai	4.321.395.552,00	4.124.537.915,00	95,45%
	b. belanja barang dan jasa	15.452.904.318,00	15.137.235.670,00	97,95%
	c. belanja hibah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00%
	d. belanja bantuan sosial	-	-	0,00%
	2) Belanja Modal	1.758.367.836,00	1.727.084.000,00	98,22%

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	c. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kependudukan dan Olahraga yang ada hanjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:	37.540.940.354,00	36.393.709.152,00	96,95%
	1) Sub Kegiatan : Belanja gaji Tenaga Honorer Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.532.571.900,00	1.408.601.625,00	55,10%
	2) Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Administrasi pada Jasa Pendidikan Dasar pada SKPD Dinas Kesehatan	18.743.396,00	-	0,00%
	3) Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada SKPD BKPPSDA	174.804.000,00	70.152.100,00	40,13%
	4) Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada SKPD Inspektorat	464.794.000,00	142.216.426,00	30,60%
	5) Sub Kegiatan : Pemberian Insentif Lainnya Pendidikan dan Kesehatan Dasar pada SKPD Dinas Sosial	-		0,00%
	6) Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kelompok Usaha Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi pada SKPD Dinas Tenaga Kerja	150.000.000,00	-	0,00%
	7) Sub Kegiatan : Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal pada SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.862.000,00	14.928.000,00	92,11%
	8) Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		0,00%
	9) Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Polbit, Dikbi Budaya Polbit, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pemerintah dan Parpol Polbit, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Polbit Di Daerah pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	34.522.869.100,00	34.984.819.100,00	98,08%
2.	Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	757.464.969.827,00	707.888.525.857,76	97,31%
3.	Total Belanja Daerah	2.910.886.597.038,00	2.748.760.051.971,00	94,31%
4.	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah	27,04%	25,93%	

Tabel 3.10. Alokasi Mandatory Spending Bidang KesehatanTahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No		Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1.	a.	Belanja pada Dinas Kesehatan:	327.118.662.321,00	304.992.988.462,71	93,11%
		1) Belanja Operasi:	300.452.959.454,00	278.887.530.310,62	92,78%
		a. belanja pegawai;	151.598.072.854,00	144.933.959.959,00	95,60%
		b. belanja barang dan jasa;	148.003.886.600,00	133.253.570.481,62	90,03%
		c. belanja hibah;	850.000.000,00	500.000.000,00	58,82%
		d. belanja bantuan sosial;			0,00%
		2) Belanja Modal:	26.665.702.867,00	25.905.458.172,09	97,15%
		3) Belanja Transfer:			0,00%
	b.	Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	959.065.711,00	912.017.405,00	95,09%
		1) Belanja Transfer:			0,00%
		2) Sub Kegiatan : Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (Dinas Sosial)	-	-	0,00%
		3) Sub Kegiatan : Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	122.180.324,00	100.865.324,00	82,38%
		4) Sub Kegiatan : Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	43.500.000,00	43.500.000,00	100,00%
		5) Sub Kegiatan : Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	-	-	0,00%
		6) Sub Kegiatan : Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	22.565.000,00	22.485.000,00	99,65%
		7) Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Koperasi dan UKM)	-	-	0,00%
		8) Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Koperasi dan UKM)	36.562.426,00	36.562.426,00	100,00%
		9) Sub Kegiatan : Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota(Dinas Koperasi dan UKM)	117.870.263,00	95.381.655,00	80,92%

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	10) Sub Kegiatan : Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dinas Pertanian dan Perikanan)	-	-	0,00%
	11) Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Uks Kesehatan Sekolah (Dinas Pendidikan)	614.377.608,00	611.443.000,00	99,52%
2.	Alokasi Anggaran Kesehatan (a+b)	328.377.726.032,00	305.505.035.867,71	93,12%
3.	Total Belanja Daerah	2.912.960.591.638,00	2.746.783.551.911,38	94,30%
4.	Gaji ASN	950.745.441.134,00	917.756.173.827,00	96,53%
5.	Total Belanja Daerah diluar Gaji ASN (3-4)	1.961.315.150.704,00	1.831.027.378.074,38	93,35%
6.	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%	16,72%	16,68%	

Tabel 3.11. Alokasi Mandatory Spending Bidang Infrastruktur Pelayanan Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

A. PERHITUNGAN BELANJA BAGI HASIL DANA/ATAU TRANSFER KEPADA DAERAH/DESA				
No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Penerimaan			
	Dana Transfer Umum			
	a) DAU	867.954.823.000,00	867.953.880.162,00	100,00%
	b) DBH	270.586.736.000,00	292.039.521.136,00	107,93%
	Jumlah Penerimaan	1.138.551.559.000,00	1.159.993.401.298,00	101,88%
2	Pengurang			
	a) DBH CHT	-	931.052.176,00	0,00%
	b) DBH DR	-	-	0,00%
	c) ADD	-	-	0,00%
	Jumlah pengurang	-	931.052.176,00	0,00%
3	Jumlah dana transfer umum yang diperhitungkan	1.138.551.559.000,00	1.159.062.349.122,00	101,80%
B. PERHITUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH				
1.	a) Belanja Modal	329.213.621.778,00	315.859.523.923,88	95,94%
	1) Tanah;	2.383.706.824,00	769.811.525,00	32,29%
	2) Peralatan dan mesin;	79.397.383.653,00	75.899.388.195,00	95,54%
	3) Bangunan dan gedung;	95.922.286.444,00	94.009.938.248,86	98,00%
	4) Jalan, jaringan, dan irigasi;	134.454.097.534,00	126.207.813.662,02	93,87%
	5) Aset tetap lainnya;	18.907.852.323,00	16.867.589.273,00	89,21%
	6) Aset lainnya.	148.315.000,00	148.000.000,00	99,79%
	b) Belanja Pemeliharaan	136.411.388.034,00	100.604.786.800,07	94,54%
2.	a) Belanja hibah;	224.286.906.172,00	220.169.981.885,55	98,20%
	b) Belanja bantuan sosial;	-	-	0,00%
	c) Belanja bantuan keuangan.	-	-	0,00%
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	659.831.895.984,00	636.629.292.609,50	96,48%
4.	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaanya Bersifat Umum	57,95%	54,93%	

3.4. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Secara umum, faktor-faktor penunjang dalam pencapaian target Pendapatan Tahun 2023 antara lain:

a. Bertambahnya sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
b. Adanya peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan pembinaan, baik secara eksternal maupun internal atau peningkatan jenjang pendidikan;
c. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
d. Penyebarluasan informasi tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi semakin memadai;
e. Adanya sistem aplikasi yang membantu dalam percepatan dan kemudahan administrasi serta keamanan data;
f. Adanya rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala dengan memanggil seluruh SKPD yang langsung dipimpin oleh Walikota; dan
g. Semakin mudahnya Wajib Pajak mengurus pajak tanpa harus datang langsung ke kantor melalui Aplikasi Smart Tax dan pembayaran pajak bisa melalui E-Commerce dan ke Bank yang bekerja sama dengan Bapenda.

Secara umum, faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian target Pendapatan Tahun 2023 antara lain:

a. Pemberian stimulus pajak / insentif pajak dalam rangka pemulihan ekonomi nasional;
b. Piutang pajak air tanah dari Pemerintah Pusat belum dibayarkan atas nama wajib pajak PT. Caltex Pacific Indonesia (CPI);
c. Kapasitas yang tersedia tidak mengalami pertambahan sehingga potensi objek retribusi yang ada kurang dapat dimanfaatkan secara maksimal;
d. Sistem aplikasi pengelolaan pendapatan dan retribusi yang digunakan belum sepenuhnya menghasilkan laporan-laporan yang diinginkan;
e. Kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia terutama aparatur pengelola keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum memadai;
f. Penempatan ASN di Bapenda sebaiknya disesuaikan dengan kompetensi, kualifikasi dan motivasi terhadap pengelolaan pajak daerah; dan
g. *Refoccusing* anggaran terhadap pemberian insentif pajak daerah.

Secara khusus, faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian target Pendapatan Tahun 2023 antara lain:

a. Kurangnya pengawasan karena keterbatasan personil dalam pengawasan objek pajak,masih terdapat pembukuan ganda dari WP dalam pelaporan kewajiban pajak, tidak adanya sangsi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh, sangsi yang diberikan masihhanya sebatas sangsi adminstratif.
b. Banyaknya tempat hiburan yang belum memiliki izin resmi, sementara perkembangan usaha dibidang hiburan di kota Pekanbaru semakin tumbuh dan berkembang.

c. Dengan keadaan Kota Pekanbaru yang bertransformasi menjadi Kota Metropolitan, hal ini membuat tidak sesuainya pembudidayaan habitat burung walet di Kota Pekanbaru karena menimbulkan kebisingan sehingga tidak jarang mendapatkan complain dari masyarakat sekitar, menyebabkan banyak penguasa sarang burung walet memindahkan usahanya ke daerah lain yang habitatnya lebih baik;
d. Dalam pajak reklame masih banyak WP yg belum mendaftarkan Objek Pajak yang dimiliki ke Bapenda. Reklameyang sudah habis masa pajaknya masih tetap terpasang dan tidak diperpanjang kembali izinnya
e. Kota Pekanbaru bukan merupakan daerah penghasil mineral bukan logam dan batuan yang besar, sehingga potensi pajaknya tidaklah besar/signifikan. Masih banyak wajib pajak yang belum mendaftarkan objek pajak yang dimiliki .Realisasi penerimaan pajak Minerba di Kota Pekanbaru selama ini bergantung pada Kegiatan proyek-proyek pembangunan. Terlebih telah beralihnya perizinan pertambangan Minerba dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Pusat turut berimbas pada capaian penerimaan pajak Minerba Kota Pekanbaru;
f. Masih kurangnya kesaduran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu;
g. Belum maksimal dalam pelaksanaan verifikasi atau validasi data Objek Pajak terhadap piutang hasil dari pelimpahan KPP Pratama;
h. Masih Terdapat beberapa objek yang berpotensi besar belum dilakukan penilaian secara individual; dan
i. Kurangnya pendataan secara aktif di lapangan terhadap potensi objek baru.
j. WP sering tidak menerima SPT
k. Keberatan WP terhadap NJOP.

3.5. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2023

Faktor pendukung yang membantu terlaksananya pencapaian target guna menuju hasil yang maksimal, antara lain:

a. Adanya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah memuat Sasaran yang lebih berorientasi hasil dengan pencapaian sasaran diturunkan ke Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya sehingga pencapaian target kinerja dilakukan secara terpadu
b. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam hal pembiayaan program dan kegiatan baik bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun bantuan keuangan Provinsi sehingga efek keterbatasan anggaran dari Pemerintah dalam pembangunan daerah dapat ditekan.
c. Komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru dan Perangkat Daerahnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai target kinerja.

d. Peningkatan koordinasi, sinergitas, kerjasama dan pelibatan secara langsung baik dengan perguruan tinggi, Lembaga/stakeholder terkait maupun masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga outcome program dapat tercapai.

e. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan untuk menjangkau masyarakat lebih luas dan tanpa Batasan waktu dan tempat sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian target kinerja.

Di samping itu, faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja keuangan antara lain:

a. Terbatas dan masih rendahnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Perangkat Daerah dalam menjalankan program dan kegiatan sehingga perlu ditingkatkan mengingat SDM yang handal dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan.

b. Terbatasnya sarana dan prasarana di Perangkat Daerah untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam menjalankan tugas dan fungsi sehingga menghambat pencapaian target kinerja.

c. Belum optimalnya dokumen perencanaan dari sisi Belanja sehingga pencapaian Tujuan dan Sasaran dari program-program yang ada tidak maksimal

d. Belum optimalnya dokumen perencanaan dari sisi pendapatan sehingga proyeksi pendapatan dalam penganggaran tidak sesuai dengan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah

e. Pemahaman yang masih rendah dalam menyusun Belanja pada program dan kegiatan sehingga belanja tersebut benar-benar menggambarkan pencapaian program dan kegiatan

Dengan tercapainya target dan realisasi kinerja program sebagaimana yang telah ditetapkan, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap terlaksananya pembangunan sebagaimana mestinya dan terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang memuaskan dan lebih baik sehingga tujuan dari pembangunan akan tercapai yaitu menuju masyarakat yang maju dan sejahtera,sesuai dengan komitmen semboyan Kota Pekanbaru"Bergerak, Bertumbuh dan Bermarwah, Pekanbaru Kota Bertuah.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pemerintah Kota Pekanbaru merupakan entitas pelaporan yang melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagaimana peraturan yang berlaku.

Laporan keuangan Tahun Anggaran 2023 disusun dengan mengkonsolidasi laporan keuangan setiap entitas akuntansi, dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). LKPD Kota Pekanbaru sebelum disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terlebih dahulu direviu oleh pengawas internal yakni Inspektorat Kota Pekanbaru.

Jumlah entitas akuntansi yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru pada Tahun Anggaran 2023 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) SKPD ditambah 1 (Satu) SKPKD, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1. Entitas Akuntansi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

No.	SKPD	Alamat Kantor
1	Dinas Pendidikan	JL. H. SYAMSUL BAHRI NO.8 KELURAHAN SUNGAIBIBAN KECAMATAN BINA WIDYA
2	Dinas Kesehatan	JL. ABDUL RAHMAN HAMID GEDUNG B2 LT. 1 SMA 9
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	JALAN. ABDUL RAHMAN HAMID KOMPLEK PERKANTORAN TENAYAN RAYA GEDUNG B.9 LT.4-5
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOM. PERKANTORAN TANAYAN RAYA GEDUNG B.3 LANTAI 3 KEC. TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU - RIAU
5	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Jl. Abdul Hamid Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru Tenayan Raya Gedung B6 Lt.2
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jl. Mustafa Sari No.1 Pekanbaru
7	Dinas Perpustakaan Kearsipan dan Perpustakaan	Jln. Cempaka No. 31 Kelurahan Pulau Karomah Kecamatan Bukajadi Pekanbaru, Riau 28156
8	Dinas Sosial	Jl. Datuk Setia Maharaja No.8
9	Dinas Tenaga Kerja	Jl. Samudera No. 29 Pekanbaru
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	KOMPLEK PERKANTORAN JL ABDUL RAHMAN HAMID KEL TUAH NEGERI KEC. TENAYAN RAYA GEDUNG B2 LT.4
11	Dinas Kesehatan Pangan	JL ABDUL RAHMAN HAMID GEDUNG B6 KOMPLEK PERKANTORAN TENAYAN RAYA
12	Dinas Pertanahan	Jl. Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru Gedung B5 Lt.4 Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru 28285
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	JL. DATUK SETIA MAHARAJA NO. 4
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jl. Jendral Sudirman No. 464 Kompleks MPP Pekanbaru
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KOMPLEK PERKANTORAN WALIKOTA PEKANBARU GEDUNG B2 LL III JL. ABDUL RAHMAN HAMID KEL. TUAH NEGERI KEC. TENAYAN RAYA

No	SKPD	Alamat Kantor
16	Dinas Perhubungan	JL. ABDUL RAHMAN HAMID KEL. TUAH NEGERI, KEC. TENAYAN RAYA, KOTA PEKANBARU
17	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian	Jl. Komplek Perkantoran Walikota Tenayan Raya Gedung Utama Lt.3 JlAbdul Rahman Hamid Tenayan Raya
18	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jalan Abdul Hamid Kelurahan Tuan Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jl. Jendral Sudirman No.464 Pekanbaru
20	Dinas Kependudukan dan Olah Raga	Jln. Abdul Rahman Hamid Gedung B5 Komplek Perkantoran Tenayan Raya
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Jln. Abdul rahman Hamid, Gedung B6, lantai 4 Kel tuah Negeri kec. Tenayan Raya
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jl. Dr. Sutomo No.1
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	Jl. Ibrahim Sattah No.20 Kel. Cinta Raja Kec. Sail
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	JL. ABDUL RAHMAN HAMID GEDUNG B5 LANTAI 3 KEC. TENAYAN RAYA
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Komplek Perkantoran Walikota Tenayan Raya Gedung Utama Lt.2 JlAbdul Rahman Hamid Tenayan Raya
26	Badan Pendapatan Daerah	Jl. Teratai No.81
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Kompek Perkantoran Walikota Pekanbaru, JL. Abdul Rahman Hamid, Gedung B3, Kec. Tenayan Raya, PEKANBARU-28285
28	Badan Kesatuan bangsa dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jl. Komplek Perkantoran Walikota Tenayan Raya Gedung Utama Lt.1 JlAbdul Rahman Hamid Tenayan Raya
29	Badan Penelitian dan Pengembangan	Jl. Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru Gedung B3 Lt. 4 & 5 Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru 28285
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jl. Arifin Ahmad No.39 Kec. Marpoyan Damai
31	Sekretariat Daerah	Komplek Perkantoran Walikota Tenayan Raya Gedung Utama JlAbdul Rahman Hamid Tenayan Raya
32	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Jl. Sudirman No.454
33	Kecamatan Bukit Raya	Jl. Kaharuddin Nasution No.37
34	Kecamatan Marpoyan Damai	Jl. Arifin Ahmad
35	Kecamatan Payung Sekaki	Jl. Payung Sekaki
36	Kecamatan Rumbai	Jl. Sentolang Ujung No.2 Kel. Meranti Pandak, Kec. Rumbai
37	Kecamatan Rumbai Barat	Jl. Tengku Kasim Perkasa, Kel. Meranti, Kec Rumbai Barat
38	Kecamatan Rumbai Timur	Jl. Pramuka Ujung, Kec. Rumbai Timur
39	Kecamatan Tuah Madani	Jl. HR. Soebrantas KM 14.5
40	Kecamatan Binawidya	Jl. HR. Soebrantas No.52
41	Kecamatan Tenayan Raya	Jl. Badi Luhur No. 1 Kel. Sialang Sakti
42	Kecamatan Kulim	Jl. Lintas Timur KM 13 Kel. Mentangor
43	Kecamatan Limapuluh	Jl. Sultan Syarif Kasim No.103
44	Kecamatan Pekanbaru Kota	Jl. Teuku Umar No.20 Kel. Kota Tinggi
45	Kecamatan Senapelan	Jl. Panglima Undan No.47
46	Kecamatan Sukajadi	Jl. Jendral Ahmad yani No.148 Kel. Pulau Karmmah
47	Kecamatan Sail	Jl.Mulyoreja No.06 Kelurahan Cintaraja
48	Inspektorat	Jl. Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru Gedung B3 Lt.3 Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru 28285

Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Setiap entitas akuntansi menyusun laporan keuangan pada SKPD masing-masing, kemudian disampaikan kepada Walikota Pekanbaru (entitas pelaporan) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru selaku SKPKD.

4.2. BASIS AKUNTANSI

Pemerintah Kota Pekanbaru menggunakan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kota Pekanbaru sejak tahun 2015. Basis akrual digunakan untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan menggunakan basis kas.

4.3. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Kebijakan akuntansi tersebut disusun oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.

1) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
2) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP atas:
   a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP
   b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Lampiran I mengatur pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan di seluruh Indonesia. Kota Pekanbaru dalam menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 mengacu pada peraturan tersebut. Dan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa perkada yang mengatur mengenai

kebijakan akuntansi pemerintah daerah ditetapkan paling lama tahun 2022. Sebagai implementasi dari peraturan tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru dengan membuat Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 105 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru Tanggal 30 Desember 2022 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 105 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru.

Peraturan Wali Kota ini menjadi dasar Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mulai Bulan Januari Tahun 2023.

Tanggung jawab penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru berada pada entitas pelaporan yakni Walikota Pekanbaru, dalam hal ini dilakukan oleh BPKAD dengan mengonsolidasikan laporan keuangan semua entitas akuntansi atau SKPD termasuk laporan keuangan PPKD.

Komponen laporan keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru terdiri dari:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

c) Neraca

d) Laporan Operasional (LO)

e) Laporan Arus Kas (LAK)

f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

a. Nama SKPD/PPKD/Pemerintah Kota Pekanbaru;

b. Cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau gabungan dari beberapa entitas akuntansi;

c. Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;

d. Mata uang pelaporan adalah rupiah; dan

e. Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

4.3.1. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 01 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan adalah:

a) Laporan Realisasi Anggaran;
b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c) Neraca;
d) Laporan Operasional (LO);
e) Laporan Arus Kas;
f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasian.

4.3.2. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 02 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS DAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding di tingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah Kota Pekanbaru. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran dari entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran ini diterapkan dalam penyajian LRA yang disusun oleh SKPD, PPKD, dan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya disajikan oleh entitas Pemerintah Kota Pekanbaru.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi mengenai perubahan gunggungan saldo SiLPA atau SiKPA pada tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

Entitas akuntansi/entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan-LRA menurut kelompok dan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

PPKD selaku Bendahara Umum Daerah dan Pemerintah Kota Pekanbaru selaku entitas pelaporan menyajikan laporan keuangan konsolidasian.

4.3.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 03 TENTANG NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang serta ekuitas dalam neraca.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset non keuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan non lancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

4.3.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 04 TENTANG LAPORAN ARUS KAS

Tujuan penyusunan Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, non anggaran dan transitoris selama satu periode akuntansi.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Pemerintah Kota Pekanbaru menyusun dan menyajikan laporan arus kas sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas Pemerintah Kota Pekanbaru yang disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Aktivitas operasi adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kota Pekanbaru selama satu periode akuntansi.

Aktivitas investasi aset nonkeuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset nonkeuangan lainnya.

Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Pencatatan investasi pada Pemerintah Kota Pekanbaru dan kemitraan dapat dilakukan

dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya. Investasi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, di mana keuntungan yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi jumlah investasi yang dimiliki pemerintah daerah. Entitas pelaporan melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas pendanaan. Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi.

Aktivitas nonanggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Pemerintah Kota Pekanbaru. Dan aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

4.3.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 05 TENTANG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/entitas pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.

Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:

a. Penggantian struktur organisasi dan fungsi selama tahun berjalan;
b. Kesalahan struktur organisasi dan fungsi terdahulu yang telah dikoreksi oleh yang baru;
c. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada neraca;
d. Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan

e. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah daerah.

4.3.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 06 TENTANG LAPORAN OPERASIONAL DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Tujuan laporan perubahan ekuitas menggambarkan pergerakan ekuitas pemerintah daerah. Laporan perubahan ekuitas disusun dengan menggunakan data ekuitas awal dan data perubahan ekuitas periode yang salah satunya diperoleh dari laporan operasional. Laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan daerah. Sedangkan, laporan perubahan ekuitas menggambarkan pergerakan ekuitas pemerintah daerah.

Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:

a. Ekuitas awal;

b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:

   1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;

   2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan

d. Ekuitas akhir.

4.3.7. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 07 TENTANG LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan keuangan untuk tujuan umum dari Pemerintah Kota Pekanbaru yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut Kebijakan Akuntansi ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.

Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

a. Definisi

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal accounts). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Selaku penerima anggaran belanja (APBD) BLUD adalah entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya.

Selaku satuan kerja pelayanan berupa badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan Negara yang dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan.

b. Prosedur Konsolidasi

Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD, dengan mengeliminasi akun timbal balik.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

c. Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing.

4.3.8. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 08 TENTANG AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

a. Definisi

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kota Pekanbaru.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Kota Pekanbaru yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Kota Pekanbaru pada bank yang ditetapkan.

Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

a. Kas di Kas Daerah.
b. Kas di Bendahara Penerimaan
c. Kas di Bendahara Pengeluaran
d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah
e. Kas Dana BOS
f. Kas Dana Kapitasi pada FKTP
g. Kas Lainnya
h. Setara Kas

b. Pengakuan

Pengakuan transaksi kas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas. Transaksi penerimaan kas adalah transaksi yang menambah saldo uang daerah. Transaksi pengeluaran kas adalah transaksi yang mengurangi saldo uang daerah.

Pengakuan kas dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Kas dari transaksi pendapatan
2. Kas dari transaksi belanja
3. Penerimaan kas akibat penerimaan pembiayaan
4. Pengeluaran kas akibat pengeluaran pembiayaan
5. Kas berasal dari penerimaan transfer

6. Kas berasal dari pengeluaran transfer
7. Kas pada penerimaan lainnya/Non Anggaran
8. Kas pada pengeluaran lainnya/Non Anggaran

b. Pengukuran

Penerimaan dan pengukuran kas dicatat sebesar nilai nominal kas yaitu sebesar nilai rupiah yang diterima atau dikeluarkan dan disahkan pada Rekening Kas Umum Daerah.

c. Penyajian

Seluruh uang yang dikuasai pemerintah dilaporkan dalam Neraca, dan disajikan dalam kelompok aset lancar

d. Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas mengungkapkan hasil sebagai berikut: rincian kas dan setara kas dan Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.3.9. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 09 TENTANG INVESTASI

a. Definisi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau/atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi diklasifikasikan menjadi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

b. Pengakuan

Pengakuan Investasi

Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi dan/atau konversi aset untuk memperoleh investasi, dan penerimaan hibah dalam bentuk investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal (*reliable*).

Pengakuan Hasil Investasi

- Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito dan bunga obligasi, yang telah menjadi hak pemerintah daerah diakui sebagai piutang hasil investasi pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Penerimaan hasil investasi akan diakui sebagai pengurang piutang hasil investasi pada saat kas diterima. Hasil investasi yang diterima tunai akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.
- Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek atau investasi jangka

panjang nonpermanen berupa pendapatan dividen tunai (*cash dividend*) diakui sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional pada saat dividen diumumkan dalam RUPS. Pendapatan dividen tunai (*cash dividend*) tersebut diakui sebagai pengurang piutang dividen pada neraca pada saat kas diterima. Penerimaan dividen tunai (*cash dividend*) tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.

- Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Hasil investasi berupa dividen tunai akan diakui sebagai pengurang piutang dividen pada saat kas diterima. Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.
- Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan penambah nilai investasi pemerintah pada neraca. Dividen tunai diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS. Dividen tunai yang telah diterima pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan. Dividen dalam bentuk saham yang diterima akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.

c. Pengukuran dan Penilaian

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Pengukuran investasi jangka pendek

(1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

- Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan biaya perolehan investasi yang meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut;
- Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan apabila tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

(2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk depostio jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

b) Pengukuran investasi jangka panjang:

(1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

(2) Investasi jangka panjang non permanen:

- Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehan investasi tersebut;
- Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- Investasi nonpermanen dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, jika dan hanya jika investasi tersebut dalam rangka kebijakan nasional yang akan dilepas/dijual atau berupa investasi dalam bentuk tagihan. Dalam hal investasi dalam rangka kebijakan nasional yang akan dilepas/dijual, nilai investasi dicatat sebesar nilai pelepasan/penjualan dikurangi dengan biaya pelepasan. Dalam hal investasi berupa tagihan, nilai investasi dicatat sebesar nilai investasi dikurangi penyisihan tak tertagih.

Metode Akuntansi Investasi

Akuntansi investasi permanen Pemerintah Daerah dilakukan dengan dua metode, yaitu :

a) Metode biaya

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b) Metode ekuitas

Pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan menambah nilai investasi pemerintah.

Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah. Dividen tunai yang telah diterima oleh

pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan akibat perubahan ekuitas badan usaha penerima investasi (*investee*), misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Dampak penyesuaian tersebut akan diakui sebagai penambah atau pengurang ekuitas Pemerintah Daerah.

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- Kepemilikan 20% sampai dengan 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

d. Pengungkapan

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi pemerintah daerah, antara lain:

- Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
- Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang memiliki harga pasar;
- Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- Rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode ekuitas;
- Investasi yang disajikan dengan nilai nihil dan bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi;
- Kewajiban yang timbul dari bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi dalam hal pemerintah memiliki tanggung jawab hukum;
- Perubahan klasifikasi pos investasi;
- Perubahan prosi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akuntansi.

4.3.10. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 10 TENTANG PIUTANG

a. Definisi

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dan/atau hak Pemerintah Kota Pekanbaru yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Kualitas piutang merupakan lampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan umur piutang dan/atau upaya tagih Pemerintah Kota Pekanbaru kepada debitur.

b. Pengakuan

Piutang diakui pada saat timbulnya hak tagih yang berasal dari pungutan pendapatan daerah, perikatan, transfer antar pemerintahan, maupun dari tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti kerugian daerah.

- **Piutang pendapatan daerah**

  Piutang pendapatan pajak daerah akan diakui seiring dengan pengakuan pendapatan pajak daerah pada saat penerbitan SKP daerah dan piutang pendapatan retribusi daerah didahului dengan penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), dan diakui pada akhir tahun bila terdapat selisih kurang bayar antara jumlah yang seharusnya diterima berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dengan jumlah yang diterima Pemerintah Kota Pekanbaru.

- **Piutang berdasarkan perikatan**

  Piutang berdasarkan perikatan diakui sebagai piutang apabila memenuhi kriteria: harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; jumlah piutang dapat diukur; telah diterbitkan Surat Penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

- **Piutang pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat**

  Piutang pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat, seperti Dana Perimbangan (DAU, DBH, DAK) dan transfer lainnya, piutang akan diakui bila terdapat dokumen yang mengakui adanya kurang salur dari entitas penyalur.

- **Piutang yang berasal dari pemberian pinjaman**

  Piutang yang berasal dari pemberian pinjaman kepada Pemerintah Daerah/Institusi Lain diakui pada saat dikeluarkannya Kas dari rekening Kas Umum Daerah kepada institusi yang mendapat pinjaman.

- **Piutang lainnya**

  Piutang lainnya digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang tidak dapat dicatat tersendiri dalam akun piutang di atas.

- **Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi**

Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi dapat diakui apabila telah memenuhi kriteria, yaitu: telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); dan telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian daerah.

a. Pengukuran dan Penilaian

Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Piutang pajak/retribusi daerah dicatat sebesar jumlah pajak/retribusi daerah yang sudah ditetapkan di dalam Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah yang sampai akhir tahun anggaran belum dibayar oleh wajib pajak/retribusi.

Bila terdapat sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak/retribusi daerah oleh wajib pajak/retribusi, jumlah sanksi administrasi tersebut dapat ditambahkan ke akun Piutang Pajak/Retribusi Daerah.

Apabila SKPD/PPKD menetapkan Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak/Retribusi Daerah kepada wajib pajak/retribusi, maka Surat Ketetapan ini dapat menjadi bukti untuk pencatatan piutang pajak/retribusi.

Piutang Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat seperti Dana Perimbangan (DAU, DBH, DAK) dan Transfer Lainnya, dicatat sebesar nilai nominal yang dinyatakan dalam dokumen kurang salur yang diterbitkan oleh entitas penyalur.

Penyajian Nilai Piutang di Neraca disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), yaitu nilai nominal piutang dikurangi penyisihan piutang tak tertagih.

Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

b. Penyajian dan Pengungkapan

Piutang disajikan dalam Neraca dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya:

- Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, pengukuran, dan penilaian serta penyajian piutang;
- Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- Penjelasan atas penyelesaian piutang;
- Penyisihan piutang tidak tertagih; dan
- Jaminan atau sita jaminan jika ada.

c. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penggolongan kualitas piutang dapat diklasifikasikan menjadi kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet. Penyisihan besaran piutang diklasifikasikan sebagai berikut:

- Kualitas lancar sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- Kualitas kurang lancar sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- Kualitas diragukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- Kualitas macet 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Ketentuan lebih rinci mengenai kualitas piutang pajak dan kualitas piutang retribusi diatur dalam kebijakan akuntansi No. 10 tentang Piutang.

4.3.11. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 11 TENTANG DANA TRANSFER

a. Definisi

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entintas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Pengakuan

- Transfer masuk diakui pada saat diterimanya Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk.
- Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat

penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Transfer keluar diakuin pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.
- Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
- Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

c. Pengukuran dan Penilaian

- Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.
- Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas ynag keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.
- Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
- Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Penyajian dan pengungkapan

- Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :
  1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;

2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya;

3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional; dan

4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

- Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;

2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antaru anggaran transfer keluar dengan realisasinya;

3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional; dan

4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.12. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 12 TENTANG PERSEDIAAN

a. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Pekanbaru, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diklasifikasikan sebagai berikut:

- Barang Pakai Habis
- Barang Tak Habis Pakai
- Barang Bekas Dipakai

b. Pengakuan

Pengakuan persediaan diakui pada saat:

- Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Kota Pekanbaru dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah
- Pada setiap semester dan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname) persediaan.

c. Pengukuran dan Penilaian

Persediaan disajikan sebesar:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
- Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Nilai Persediaan semesteran dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

1) Untuk Persediaan yang variasinya banyak namun nilai pembelian per unitnya tidak material, contoh persediaan ATK, nilai persediaan akhir dihitung berdasarkan jumlah unit persediaan yang tersisa pada akhir tahun dikalikan dengan nilai pembelian yang terakhir;
2) Untuk pembelian persediaan yang memiliki nilai nominal, seperti Buku KIR, nilai persediaan akhir dihitung berdasarkan harga pencetakan yang terakhir; dan
3) Untuk persediaan yang menggunakan Kartu Kendali Persediaan dengan pencatatan dilakukan secara kontiniu, setiap kali terdapat pembelian dan penggunaan, seperti persediaan obat-obatan, nilai persediaan akhirnya mengacu kepada Kartu Kendali Persediaan tersebut. Jika dari hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) terdapat persediaan obat-obatan yang kadaluarsa, rusak atau hilang, maka nilai persediaan akhir dihitung berdasarkan jumlah barang persediaan yang ada dengan kondisi baik hasil *stock opname* dikalikan nilai pembelian akhir yang terdapat dalam kartu kendali persedian.

Metode Pencatatan Persediaan

Pencatatan jurnal atas transaksi pembelian/perolehan Persediaan dicatat dengan sistem periodik dengan menggunakan pendekatan beban, yaitu dengan mencatat akun Beban Persediaan setiap kali terjadi transaksi pembelian/perolehan Persediaan dan pada tiap akhir semester dilakukan jurnal penyesuaian untuk mengakui persediaan pada tiap akhir semester dan beban persediaan selama semester yang berkenaan.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Persediaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

- Penjelasaan lebih lanjut, persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

- Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.3.13. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 13 TENTANG ASET TETAP

a. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas sebagai berikut:

a. Tanah;
b. Peralatan dan Mesin;
c. Gedung dan Bangunan;
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
e. Aset Tetap Lainnya; dan
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan.

b. Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

- berwujud;
- mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Kecuali untuk aset tetap berupa tanah, jalan, irigasi dan jaringan, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah, jalan, irigasi dan jaringan.
- Batasan minimal nilai rupiah kapitalisasi aset tetap Pemerintah Kota Pekanbaru dapat dilihat dalam lampiran Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru.

c. Pengukuran dan Penilaian

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan

nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti IMB, notaris dan pajak.

d. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable *assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*). Penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan periode bulanan dan mulai dihitung sejak bulan perolehan tanpa memperhitungkan tanggal perolehan.

e. Penyajian dan Pengungkapan

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  1) Penambahan;
  2) Pelepasan;
  3) Akumulasi Penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
  4) Mutasi aset tetap lainnya.
- Informasi penyusutan, meliputi:
  1) Nilai penyusutan;
  2) Metode penyusutan yang digunakan,
  3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
  4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

4.3.14. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 14 TENTANG KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

a. Definisi

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Kontrak Konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

b. Pengakuan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

c. Pengukuran dan Penilaian

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai Konstruksi yang dikerjakan secara swakelola:

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya.

d. Penyajian dan pengungkapan

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan di Neraca. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :

- Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
- Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan masih harus dibayar;
- Uang muka kerja yang diberikan;
- Retensi.

4.3.15. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 15 TENTANG DANA CADANGAN

a. Definisi

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

b. Pengakuan

Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

c. Pengukuran dan Penilaian

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

d. Penyajian dan pengungkapan

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Nonlancar. Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah. Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan;
- Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
- Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
- Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
- Sumber Dana Cadangan; dan
- Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.

Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan LO. Pencairan Dana Cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan Dana Cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan. Pencairan Dana Cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi. Pembentukan Dana Cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.

4.3.16. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 16 TENTANG ASET LAINNYA

a. Definisi

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam aset lainnya adalah tagihan jangka panjang; kemitraan dengan pihak ketiga; aset tidak berwujud; dan aset lain-lain. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Kota Pekanbaru. Kemitraan dengan pihak ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Aset tidak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

b. Pengakuan

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:

- Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- Diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya – Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya – Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Bangun Guna Serah (BGS) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya – Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Bangun Serah Guna (BSG) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Pengukuran dan Penilaian

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.. Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan, dan Bangun Guna Serah (BGS), dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor. Aset yang berada dalam Sewa, Kerjasama Pemanfaatan dan BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap. Bangun Guna Serah (BSG) dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut. Aset Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.

Penyerahan/pengembalian aset BGS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut:

- Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
- Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

d. Penyajian dan pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Rincian aset lainnya;
- Kebijakan Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BGS dan BSG); dan
- Informasi lainnya yang penting.

4.3.17. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 17 TENTANG KEWAJIBAN

a. Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Pekanbaru.

b. Pengakuan

- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh Pemerintah Kota Pekanbaru atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- Utang perhitungan fihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
- Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
- Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.
- Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila barang yang dibeli sudah diterima, atau jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan. Contoh Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan.
- Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
- Beban yang Masih Harus Dibayar, diakui pada saat beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar; terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah; dan barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.

c. Pengukuran dan Penilaian

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Pada saat Pemerintah Kota Pekanbaru menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

d. Penyajian dan pengungkapan

Penyajian Kewajiban dalam neraca kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang Pemerintah Kota Pekanbaru disajikan di sisi pasiva. Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Kota Pekanbaru dan jatuh temponya;
- Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
  (1) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
    - Pengurangan pinjaman;
    - Modifikasi persyaratan utang;
    - Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
    - Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
    - Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
    - Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
  (2) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
  (3) Biaya pinjaman:
    - Perlakuan biaya pinjaman;
    - Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
    - Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan

4.3.18. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 18 TENTANG PENDAPATAN-LRA

a. Definisi

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
- Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke BUD, dengan syarat setelah mendapat pengesahan dari PPKD selaku BUD.
- Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD.

c. Pengukuran dan Penilaian

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia

d. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah :

- Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.19. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 19 TENTANG BELANJA

a. Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari:

- Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial;

- Belanja Modal; dan
- Belanja Tak Terduga.
- Belanja Transfer

b. Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

c. Pengukuran dan Penilaian

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, yaitu: belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.20. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 20 TENTANG AKUNTANSI PEMBIAYAAN

a. Definisi

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kota Pekanbaru terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari:

1) penerimaan pinjaman;
2) penjualan obligasi Pemerintah Kota Pekanbaru;
3) hasil privatisasi perusahaan daerah;
4) penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain;
5) penjualan investasi permanen lainnya; dan
6) pencairan dana cadangan.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain:

1) pemberian pinjaman kepada entitas lain, seperti dana bergulir;
2) penyertaan modal Pemerintah Kota Pekanbaru;
3) pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu; dan
4) pembentukan dana cadangan.

b. Pengakuan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kecuali untuk SiLPA, dan untuk pengeluaran/pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

c. Pengukuran Pembiayaan

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

d. Akuntansi Pembiayaan Neto

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

e. Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir

Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Kota Pekanbaru apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.

Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.

Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.

Mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

f. Pengungkapan Pembiayaan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian penjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Kota Pekanbaru.
- Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.21. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 21 TENTANG PENDAPATAN-LO

a. Definisi

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kota Pekanbaru yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); dan/atau
- Pendapatan direalisasi yaitu saat adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan-LO pada saat timbulnya hak atas pendapatan dilakukan untuk

- Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
- Pengakuan Pendapatan LO diakui pada saat adanya aliran masuk sumber daya

ekonomi untuk jenis pendapatan yang tidak harus didahului dengan penetapan.

- Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan self assessment system diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau Rekening Kas Daerah tanpa terlebih dahulu menerbitkan ketetapan.
- Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan official assessment system diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan pajak. Timbulnya hak menagih tersebut adalah pada saat diterbitkan ketetapan.
- Pengakuan Pendapatan Transfer-LO yaitu pada saat kas diterima dan pada saat terdapat pengakuan kewajiban kurang salur oleh pihak yang melakukan transfer kepada entitas penerima.

c. Pengukuran dan Penilaian

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah :

- Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.22. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 22 TENTANG BEBAN

a. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

b. Pengakuan

Beban diakui pada:

- Saat timbulnya kewajiban.

  Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum

daerah.

- Saat terjadinya konsumsi aset.

  Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Pekanbaru.

- Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

  Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran atau pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

c. Pengukuran dan Penilaian

Beban diukur sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan sesuai dengan:

- Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- Beban Operasi-LO, yang terdiri dari: Beban Pegawai-LO, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Lain-lain;
- Beban Transfer;
- Defisit Non Operasional; dan
- Beban Luar Biasa.

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- Pengeluaran beban tahun berkenaan.
- Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
- Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.23. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 23 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, KESALAHAN, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN OPERASI YANG DIHENTIKAN

a. Definisi

1. **Estimasi akuntansi** adalah perkiraan elemen laporan keuangan, item atau akun karena tidak adanya pengukuran yang tepat dan mempunyai dampak terhadap laporan keuangan.
2. **Kebijakan akuntansi** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
3. **Kesalahan** adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
4. **Koreksi** adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
5. **Kesalahan periode sebelumnya** adalah pencatatan atau penyajian yang tidak sesuai dengan seharusnya dan dikoreksi dalam laporan keuangan tahun berjalan yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi andal yang:
   a) Tersedianya pada saat laporan keuangan periode tersebut diotorisasi untuk terbit; dan
   b) Secara rasional dapat diperoleh dan digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.

   Kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta serta kecurangan.
6. **Operasi yang dihentikan** adalah penghentian sebagian atau seluruh tugas dan fungsi suatu entitas tertentuyang dapat mengakibatkan beralihnya aset, dan kewajiban, serta berhentinya operasi.
7. **Perubahan estimasi akuntansi** adalah revisi estimasi karena terdapat informasi baru, tambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
8. **Penyajian kembali (restatement)** adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal

periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.

9. **Perubahan Kebijakan Akuntansi** adalah perubahan pilihan dari berbagai kebijakan akuntansi yang tersedia dalam SAP umumnya dan PSAP khususnya menjadi sebuah kebijakan akuntansi yang lain dibanding kebijakan akuntansi periode lalu bagi entitas.
10. **Prospektif** adalah penerapan kebijakan akuntansi baru yang hanya berdampak pada periode berjalan dan periode selanjutnya.
11. **Retrospektif**

Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Kebijakan Akuntansi

Ketika suatu PSAP secara spesifik mengatur suatu transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu, maka kebijakan yang diterapkan menggunakan PASP dimaksud.

Dalam hal tidak ada PSAP yeng secara spesifik mengatur transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu, entitas menggunakan pertimbangan dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi, dengan mengacu pada sumber-sumber berikut ini, dengan hierarki :

a) Ketentuan PSAP yang mengatur hal serupa dan berhubungan dengan kondisi, situasi atau transaksi terkait;
b) Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran untuk aset, kewajiban, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, arus kas dan perubahan ekuitas yang dijelaskan dalam Kerangka Konseptual.

Entitas memilih dan menetapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa lain, dan kondisi yang sejenis, kecuali suatu PSAP secara spesifik mengizinkan pengelompokan tersebut, maka suatu kebijakan akuntansi yang tepat harus dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok tersebut.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Suatu entitas mengubah kebijakan akuntansi hanya apabila:

a) Disyaratkan oleh suatu PSAP, atau
b) Perubahan kebijakan akuntansi tersebut akan menghasilkan informasi yang lebih andal dan relevan terkait dengan pengaruh transaksi, peristiwa serta kondisi lain dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi yang berpengaruh pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada Neraca, dan/atau Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan dalam Catatan Laporan Keuangan.

Bila entitas melakukan perubahan kebijakan akuntansi, entitas mengungkapkan :

a) Sifat perubahan kebijakan akuntansi;

b) Alasan penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang lebih andal dan relevan;

c) Nilai penyesuaian untuk setiap item laporan keuangan yang terdampak perubahan kebijakan akuntansi untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya yang disajikan, sepanjang memungkinkan;

d) Laporan keuangan berikutnya tidak perlu mengulangi pengungkapan yang sama;

e) Dalam hal perubahan kebijakan akuntansi disebabkan adanya penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang baru, maka pengungkapan ditambahkan dengan judul standar yang baru dan tanggal efektif penerapan standar tersebut.

Kesalahan

Kesalahan yang ditemukan pada periode tahun berjalan dan kesalahan yang ditemukan setelah tanggal neraca, sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, dilakukan penyesuaian dalam laopran keuangan tahun berjalan.

Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

Kesalahan atas pencatatan aset yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LRA dan belanja yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.

Kesalahaan atas pencatatan pendapatan-LO dan beban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun neraca dan akun ekuitas terkait.

Kesalahan atas pencatatan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah otorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun Neraca (kas) dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo Ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang terjadi setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Perubahan Kelebihan Penerimaan Pendapatan

Pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya diakui sebagai pengurang realisasi pendapatan pada tahun berjalan.

Pengembalian penerimaan pendapatan setelah laporan keungan diotorisasi bukan merupakan kesalahan periode sebelumnya, sehingga pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan tersebut tidak diperlukan sebagai koreksi kesalahan namun sebagai pengurang realisasi pendapatan LRA maupun pendapatan LO tahun berjalan.

Perubahan Estimasi Akuntansi

Perubahan dasar pengukuran merupakan perubahan kebijakan akuntansi dan bukan merupakan perubahan estimasi akuntansi. Ketika perubahan kebijakan akuntansi dengan perubahan estimasi akuntansi tidak dapat dibedakan secara andal, perubahan diperlakukan sebagai perubahan estimasi.

Operasi yang tidak dilanjutkan

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus disajikan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

4.3.24. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 24 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Secara umum, Standar Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah mengacu pada seluruh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), kecuali diatur tersendiri dalam PSAP ini.

BLUD merupakan instansi di lingkungan pemerintah daerah yang mengelola kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan sebagai instansi pemerintah, BLUD menerapkan pernyataan standar ini dalam menyusun laporan keuangan.

a. Definisi

Badan Layanan Umum Daerah adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan BLUD adalah:

a) Laporan Realisasi Anggaran;
b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c) Neraca;
d) Laporan Operasional (LO);
e) Laporan Arus Kas;
f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Struktur dan Isi

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

a) Pendapatan-LRA;
b) Belanja;
c) Surplus/deficit;
d) Penerimaan pembiayaan;
e) Pengeluaran pembiayaan;
f) Pembiayaan neto;
g) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA); dan

h) Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetorkan ke kas Daerah merupakan pendapatan daerah.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

a) Saldo Anggaran Lebih awal;

b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;

c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;

d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;

e) Lain-lain; dan

f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

BLUD juga menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca BLUD Pemerintah Kota Pekanbaru menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

a) Kas dan setara kas;

b) Investasi jangka pendek;

c) Piutang dari kegiatan BLUD;

d) Persediaan;

e) Investasi jangka panjang;

f) Aset tetap;

g) Aset lainnya;

h) Kewajiban Jangka Pendek;

i) Kewajiban Jangka Panjang; dan

j) Ekuitas.

Kas pada BLUD yang sudah dipertanggungjawabkan kepada SKPKD merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih.

Walaupun kepemilikan investasi pada BLUD ada pada SKPKD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLUD. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLUD sebagai entitas pelaporan, di mana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD. SKPKD selaku BUD sebagai pemilik investasi melaporkan juga investasi yang dicatat oleh BLUD pada Laporan Keuangan BUD

Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:

a) Pendapatan-LO;
b) Beban;
c) Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional;
d) Kegiatan Non Operasional;
e) Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa;
f) Pos Luar Biasa; dan
g) Surplus/Defisit-LO.

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:

a) Ekuitas awal;
b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
    1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-6 periode sebelumnya; dan

2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

d) Ekuitas akhir.

Penggabungan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ke Dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya. Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum atau SKPKD. Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahinya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (reciprocal accounts) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan

Penghentian Satuan Kerja Badan Layanan Umum Menjadi Satuan Kerja Biasa

Dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka satuan kerja tersebut menyusun laporan keuangan selayaknya entitas akuntansi pemerintah lainnya, dan satuan kerja tersebut harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD.

4.3.25. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 25 TENTANG AKUNTANSI PERJANJIAN KONSESI JASA – PEMBERI KONSESI

Tujuan dari pernyataan kebijakan ini adalah mengatur akuntansi perjanjian konsesi jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah selaku pemberi konsesi.

a. Definisi

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemerintah daerah sebagai pemberi konsesi dan mitra.

Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa.

b. Pengakuan Aset Konsesi Jasa

Pemerintah daerah mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:

- pemerintah daerah mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
- pemerintah daerah mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.
- Kebijakan akuntansi ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan terpenuhi.

Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok asset

c. Pengukuran Aset Konsesi Jasa
- Pemerintah daerah melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa sebesar nilai wajar, kecuali atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi.
- Reklasifikasi aset menjadi aset konsesi jasa diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.
- Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

d. Pengakuan Kewajiban atas Aset Konsesi Jasa
- Pemerintah daerah mengakui kewajiban pada saat pemerintah daerah mengakui aset konsesi jasa. diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa yaitu sebesar nilai wajar, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemerintah daerah kepada mitra, atau sebaliknya.
- Pemerintah daerah tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra.

e. Pengukuran Kewajiban atas Aset Konsesi Jasa

Pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:

a. pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*financial liability model*);
b. pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator model*)

Pemerintah daerah mengakui kewajiban sebagai kewajiban keuangan dalam hal pemerintah daerah memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa.

Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui berpedoman pada standar akuntansi mengenai instrumen keuangan. Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan dan ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban. Pemerintah daerah mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban.

Pemerintah daerah memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai belanja pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan beban pada Laporan Operasional (LO).

4.3.26. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 26 TENTANG AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

Tujuan dari pernyataan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dan pengungkapan yang terkait.

a. Definisi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau:
- dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Apabila pemerintah daerah mengelola aset properti untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau memperoleh kenaikan nilai, maka aset tersebut termasuk dalam definisi properti investasi.

b. Properti Investasi

Pemerintah daerah dapat memiliki properti investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai dengan keadaan sebagai berikut:

a. Pemerintah daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial; atau

b. Pemerintah daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya.

Dalam hal pemerintah daerah memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, penentuan klasifikasi asetnya sebagai berikut:

a. apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, pemerintah daerah mempertanggungjawabkannya secara terpisah;
b. apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

Untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah, transaksi properti investasi terjadi antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi tidak memenuhi definisi properti investasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Pesewa menyajikan aset tersebut sebagai properti investasi jika pola penyewaan dilakukan secara komersial, namun demikian untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasian aset tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi aset.

Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

c. Pengakuan

Properti investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:

- besar kemungkinan terdapat manfaat ekoooni yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

d. Pengukuran saat pengakuan awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

e. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap yang berlaku. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi.

f. Penyajian Properti Investasi

Properti investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

g. Alih Guna

Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan. Alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri, dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Alih guna aset properti investasi menggunakan nilai tercatat pada saat dilakukannya alih guna.

h. Pelepasan

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat:

- pelepasan; atau
- ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; atau
- tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan.

Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Pekanbaru disajikan sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 112 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 35 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

5.1.1. PENDAPATAN

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
2.753.144.818.421,38	2.479.247.340.045,65

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1 Rincian Pendapatan Daerah

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2022
Pendapatan Asli Daerah	1.019.723.963.427,00	892.286.050.690,38	(127.436.912.736,62)	87,44	799.621.488.028,00
Pendapatan Transfer	1.898.949.369.220,00	1.862.857.767.731,00	(36.091.601.489,00)	98,10	1.680.225.852.028,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-	-
Jumlah	2.917.972.332.647,00	2.753.144.818.421,38	(164.827.514.225,62)	94,35	2.479.247.340.045,65

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Tabel 5.1.1 diatas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.753.144.818.421,38 atau 94,35% dari anggaran sebesar Rp2.917.972.332.647,00 dan mengalami kenaikan realisasi sebesar Rp273.897.478.375,73 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp2.479.247.340.045,65

Berdasarkan rincian Pendapatan Daerah di atas, dapat dilihat pada Tahun Anggaran 2023, realisasi Pendapatan Tansfer memberikan kontribusi paling besar pada Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2023 yakni sebesar 67,66% dari total Pendapatan Daerah.

Hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Pekanbaru masih memiliki ketergantungan yang relatif tinggi terhadap pendanaan dari Pemerintah Pusat untuk menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya.

5.1.1.1.Pendapatan Asli Daerah

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
890.286.830.690,38	799.021.484.425,65

Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Tahun Anggaran 2023 yang telah diterima oleh Kas Daerah terdiri dari:

Tabel 5.1.2 Rincian Pendapatan Asli Daerah

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2022
Pendapatan Pajak Daerah	838.721.740.651,00	784.892.588.210,00	(53.829.152.441,00)	93,58	719.418.810.805,60
Pendapatan Retribusi Daerah	62.161.000.082,00	26.824.967.951,00	(35.336.032.131,00)	43,15	16.500.027.968,00
Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.943.817.264,00	5.943.817.264,00	-	100,00	3.443.946.492,00
Lain-lain PAD yang Sah	111.296.484.430,00	72.825.457.265,38	(38.471.027.164,62)	65,25	59.658.199.101,05
Jumlah	1.018.123.042.427,00	890.286.830.690,38	(127.836.211.736,62)	87,44	799.021.484.425,65

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Tabel 5.1.2 diatas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp890.286.830.690,38 atau 87,44% dari anggaran sebesar Rp1.018.123.042.427,00 dan mengalami kenaikan realisasi sebesar Rp91.265.346.264,73 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp799.021.484.425,65

Berdasarkan rincian PAD di atas, Pendapatan Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari target yang telah ditetapkan tidak memenuhi target Pendapatan Pajak Daerah.

Anggaran dan Realisasi Uraian Pendapatan Asli Daerah per SKPD Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.1.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Per Jenis Pendapatan Daerah per SKPD Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

SKPD	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	%
I. Pendapatan Pajak Daerah	**838.721.740.651,00**	**784.892.588.210,00**	**(53.829.152.441,00)**	**93,58**
Badan Pendapatan Daerah	838.721.740.651,00	784.892.588.210,00	(53.829.152.441,00)	93,58
II. Pendapatan Retribusi Daerah	**62.161.000.082,00**	**26.824.967.951,00**	**(35.336.032.131,00)**	**43,15**
Dinas Kesehatan	358.198.000,00	246.276.000,00	(111.922.000,00)	68,75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.800.000.000,00	12.344.457.200,00	(3.455.542.800,00)	78,13
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	313.800.000,00	346.600.000,00	32.800.000,00	110,45
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.000.000.000,00	914.859.340,00	(85.140.660,00)	91,49

SKPD	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	%
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	32.746.985.792,00	4.386.567.790,00	(28.360.418.002,00)	13,40
Dinas Perhubungan	5.468.530.000,00	3.542.558.506,00	(1.925.961.494,00)	64,78
Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian	2.100.000.000,00	1.562.900.625,00	(537.099.375,00)	74,42
Dinas Pertanian dan Perikanan	650.000.000,00	574.546.300,00	(75.453.700,00)	88,39
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.464.910.000,00	1.133.902.200,00	(331.006.800,00)	77,40
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.268.596.290,00	1.772.298.990,00	(496.297.300,00)	0,00
III. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**5.943.817.264,00**	**5.943.817.264,00**	**-**	**100,00**
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.943.817.264,00	5.943.817.264,00	-	100,00
IV. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah	**111.296.484.430,00**	**72.625.457.265,38**	**(38.671.027.164,62)**	**65,25**
Dinas Kesehatan	39.523.493.818,00	32.261.055.207,71	**(4.262.438.610,29)**	89,33
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.000.000.000,00	41.200.000,00	**(1.958.800.000,00)**	2,06
Dinas Perhubungan	25.301.655.053,00	20.995.280.334,00	**(4.306.384.719,00)**	82,98
Dinas Kominfo	24.914.177,00	68.597.067,00	**43.682.890,00**	275,33
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	39.446.421.382,00	13.743.028.031,67	**(25.703.393.350,33)**	34,84
Badan Pendapatan Daerah	8.000.000.000,00	5.516.316.625,30	(2.483.683.375,00)	68,95
Jumlah	**1.018.123.842.427,00**	**890.286.830.990,38**	**(127.836.211.736,62)**	**87,44**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

5.1.1.1.Pendapatan Pajak Daerah

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
784.909.347.016,90	**719.418.610.925,80**

Pendapatan Pajak Daerah merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Pajak Daerah adalah pendapatan yang sifatnya memaksa dan tarifnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru. Pemungutan dan pengelolaan pendapatan pajak daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dan realisasi Tahun Anggaran 2023 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. Rincian Pendapatan Pajak Daerah

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/ Kurang	%	Realisasi 2022
Pajak Hotel	43.000.000.000,00	47.268.200.298,00	4.268.200.298,00	109,90	40.075.868.444,30
Pajak Restoran	133.999.999.999,00	140.213.444.897,00	6.213.444.898,00	104,65	132.480.347.680,97
Pajak Hiburan	15.000.000.001,00	15.154.112.772,00	154.112.771,00	100,86	15.818.587.793,30
Pajak Reklame	30.000.000.000,00	34.810.038.403,00	4.810.038.403,00	116,40	28.661.362.274,30
Pajak Penerangan Jalan	151.000.000.000,00	156.361.389.268,00	5.361.389.268,00	103,94	147.071.137.104,30
Pajak Parkir	20.000.000.000,00	20.935.220.806,00	935.220.806,00	104,68	16.486.099.921,30

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/ Kurang	%	Realisasi 2022
Pajak Air Bawah Tanah	11.300.000.000,00	12.128.843.473,00	828.843.473,00	105,47	12.199.485.871,00
Pajak Sarang Burung Walet	75.000.000,00	89.254.500,00	14.254.500,00	119,01	104.323.500,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.000.000,00	12.915.095,00	2.915.095,00	129,15	9.152.040,00
Pajak Bumi dan bangunan sektor perkotaan	340.330.554.435,00	151.017.225.127,00	(89.312.828.308,00)	62,84	149.222.073.126,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	190.000.000.215,00	220.808.701.196,00	13.002.014.978,00	106,81	186.640.117.914,00
Jumlah	**838.721.740.651,00**	**784.909.347.016,00**	**(53.812.393.635,00)**	**93,58**	**719.418.610.925,80**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

(65.490.736.090,20)

Tabel 5.1.4 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp784.909.347.016,00 atau 93,58% dari anggaran sebesar Rp838.721.740.651,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp65.490.736.090,20 dibandingkan realisasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp719.418.610.925,80.

Pengelolaan pajak daerah menggunakan dua metode yaitu :

1. *Self-assesment*.

   Self-assesment memberikan tanggung jawab dan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk berinisiatif mendaftarkan diri guna mendapatkan NPWPD, menghitung,membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Jenis pajak yang menggunakan *self-assesment*adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan BPHTB.

2. *Official-assesment*.

   *Official-assesment*merupakan sistem pengelolaan pajak yang memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besaran pajak terutang, di mana Wajib Pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Jenis Pajak yang digolongkan kedalam *official-assesment* adalah Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah, serta Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan rincian penerimaan Pajak Daerah di atas, terdapat 10 (sepuluh) jenis pajak daerah melampaui target pendapatan yang ditetapkan, sedangkan 1 (satu) jenis pajak masih dibawah target. Realisasi Pendapatan Daerah yang paling besar adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp12.915.095,00 dan berkontribusi sebesar 129,15 % total realisasi pajak daerah.

Beberapa jenis pajak yang belum mencapai target disebabkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan, dengan pencapaian 62,84% disebabkan Terjadi Kenaikan target yang cukup signifikan pada tahun 2024 sebesar 37,34% dari target tahun 2022. Kenaikan target ini dipicu oleh adanya potensi Piutang PBB yang

sebelumnya berstatus Fasilitas Umum (Fasum) yang kemudian ditetapkan kembali sebagai Piutang PBB pada tahun berjalan.

b. Tidak Optimalnya penerimaan Piutang PBB-P2 s.d 31 Desember 2023 karena masih banyak Data Subjek dan Objek Pajak PBB-P2 yang belum dimutakhirkan sehingga menghambat pendistribusian SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak

5.1.1.1.2.Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
26.824.967.951,00	16.500.827.908,00

Pendapatan Retribusi Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Untuk pengelolaan dan pemungutan Pendapatan Retribusi Daerah dilingkunganPemerintah Kota Pekanbaru dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unit penghasil.

Retribusi Daerah merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa retribusi daerah dibagi menjadi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Realisasi Retribusi Daerah yang telah dipungut selama Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

Tabel 5.1.5. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/ Kurang	%	Realisasi 2022
Retribusi Jasa Umum	42.260.393.782,00	11.118.125.951,00	(31.141.967.831,00)	26,31	11.358.338.726,00
Retribusi Jasa Usaha	4.297.386.390,00	3.558.864.706,00	(738.521.684,00)	81,98	1.550.568.182,00
Retribusi Perizinan Tertentu	15.603.520.000,00	12.347.957.294,00	(3.455.562.880,00)	79,13	3.591.921.000,00
Jumlah	62.161.000.082,00	26.824.967.951,00	(35.336.032.131,00)	43,15	16.500.827.908,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Tabel 5.1.5 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp26.824.967.951,00 atau 43,15% dari anggaran sebesar Rp62.161.000.082,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp10.324.140.043,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp16.500.827.908,00. Tidak ada jenis retribusi daerah yang melampaui target penerimaan.

Tabel 5.1.6. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per SKPD

(dalam rupiah)

NO	SKPD	JENIS RETRIBUSI	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	LEBIH/ KURANG
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	32.748.885.792,00	4.368.967.790,00	(28.379.918.002,00)
2	Dinas Perumahan dan Permukiman	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	120.000.000,00	180.150.000,00	60.150.000,00
	Dinas Perumahan dan Permukiman	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	193.800.000,00	166.450.000,00	(27.350.000,00)
3	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Retribusi Pelayanan Pasar	1.034.870.000,00	607.244.000,00	(427.626.000,00)

NO	SKPD	JENIS RETRIBUSI	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	LEBIH/ KURANG
4	Dinas Perhubungan	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	4.500.000.000,00	2.953.745.000,00	(1.546.255.000,00)
	Dinas Perhubungan	Retribusi Terminal	15.000.000,00	15.860.000,00	860.000,00
		Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	950.000.000,00	569.653.506,00	
	Dinas Perhubungan	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.520.000,00	3.500.000,00	(20.000,00)
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.000.000.000,00	914.859.340,00	(85.140.660,00)
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	480.000.000,00	492.619.200,00	12.619.200,00
6	Dinas Komunikasi Informatika,statistik	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.	2.190.000.000,00	1.652.909.625,00	(537.090.375,00)
7	Dinas Kesehatan	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	246.270.000,00	246.270.000,00
		Retribusi Pelayanan Kesehatan	366.798.000,00	-	
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	30.000.000,00	14.000.000,00	(16.000.000,00)
9	Dinas Pertanian dan Perikanan	Retribusi Rumah Potong Hewan	650.000.000,00	574.546.300,00	(75.453.700,00)
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	15.800.000.000,00	12.344.457.200,00	(3.455.542.800,00)
11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.258.580.290,00	1.772.296.990,00	(486.287.300,00)
	Jumlah		62.161.000.982,00	26.824.967.951,00	(35.336.032.131,00)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Tabel 5.1.7. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Per Jenis Pendapatan Retribusi Daerah per SKPD Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

SKPD	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	%
I. RETRIBUSI DAERAH	**62.161.000.982,00**	**26.824.967.951,00**	**(35.336.032.131,00)**	**43,15**
A. Retribusi Jasa Umum	**42.260.093.792,00**	**11.118.125.955,00**	**(31.141.967.837,00)**	**26,31**
1.Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	**32.746.985.792,00**	**4.386.567.790,00**	**(28.360.418.002,00)**	**13,40**
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	32.746.985.792,00	4.386.567.790,00	(28.360.418.002,00)	13,40
2.Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	**120.000.000,00**	**180.150.000,00**	**60.150.000,00**	**150,13**
Dinas Perumahan dan Pemukiman	120.000.000,00	180.150.000,00	60.150.000,00	150,13
3.Retribusi Pelayanan Pasar	**1.034.910.000,00**	**627.284.000,00**	**(407.626.000,00)**	**60,61**
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.034.910.000,00	627.284.000,00	(407.626.000,00)	60,61
4.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	**4.500.000.000,00**	**2.953.745.000,00**	**(1.546.255.000,00)**	**65,64**
Dinas Perhubungan	4.500.000.000,00	2.953.745.000,00	(1.546.255.000,00)	65,64
5.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	**1.000.000.000,00**	**914.859.340,00**	**(85.140.660,00)**	**91,49**
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.000.000.000,00	914.859.340,00	(85.140.660,00)	91,49

SKPD	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	%
5.Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	**400.000.000,00**	**492.819.200,00**	**92.819.200,00**	**123,15**
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	400.000.000,00	492.819.200,00	92.819.200,00	123,15
7.Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	**2.100.000.000,00**	**1.562.900.625,00**	**(537.099.375,00)**	**74,42**
Dinas Komunikasi Informatika Statistik	2.100.000.000,00	1.562.900.625,00	(537.099.375,00)	74,42
Retribusi Pelayanan Kesehatan	**358.198.000,00**	**-**	**(358.198.000,00)**	**0,00**
Dinas Kesehatan	358.198.000,00	-	(358.198.000,00)	0,00
B. Retribusi Jasa Usaha	**4.097.386.290,00**	**3.356.884.790,00**	**(740.501.494,00)**	**81,92**
1.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**2.402.386.290,00**	**2.199.024.990,00**	**(203.361.300,00)**	**88,99**
Dinas Kesehatan	-	246.276.000,00	246.276.000,00	0,00
Dinas Perumahan dan Permukiman	193.890.000,00	166.450.000,00	(27.440.000,00)	85,85
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	30.000.000,00	14.000.000,00	(16.000.000,00)	46,67
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.258.586.290,00	1.772.298.990,00	(16.000.000,00)	78,47
2.Retribusi Terminal	**15.000.000,00**	**15.060.000,00**	**960.000,00**	**104,40**
Dinas Perhubungan	15.000.000,00	15.660.000,00	960.000,00	104,40
3.Retribusi Rumah Potong Hewan	**850.000.000,00**	**574.546.300,00**	**(75.453.700,00)**	**88,39**
Dinas Pertanian dan Perikanan	850.000.000,00	574.546.300,00	(75.453.700,00)	88,39
4.Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	**930.000.000,00**	**569.653.500,00**	**(360.346.494,00)**	**93,96**
Dinas Perhubungan	930.000.000,00	569.653.500,00	(360.346.494,00)	93,96
C. Retribusi Perizinan Tertentu	**15.803.520.000,00**	**12.347.957.200,00**	**(3.455.562.800,00)**	**78,13**
1.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	**15.800.000.000,00**	**12.344.457.200,00**	**(3.455.542.800,00)**	**78,13**
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.800.000.000,00	12.344.457.200,00	(3.455.542.800,00)	78,13
2.Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	**3.520.000,00**	**3.500.000,00**	**(20.000,00)**	**99,43**
Dinas Perhubungan	3.520.000,00	3.500.000,00	(20.000,00)	99,43

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, konversi untuk Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
   - Retribusi Pelayanan Kesehatan.
   - Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.
   - Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
   - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
   - Retribusi Pelayanan Pasar.
   - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
   - Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
   - Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
   - Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :
   - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
   - Retribusi Terminal.
   - Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila.
   - Retribusi Rumah Potong Hewan.
   - Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :
   - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
   - Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan PAD yang berhubungan langsung dengan Pelayanan Umum Pemerintahan dan dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.1.8. Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/ Kurang	%	Realisasi 2022
Retribusi Pelayanan Kesehatan	358.198.800,00	-	-	0,00	-
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	32.746.895.792,00	4.386.901.790,00	(28.360.418.002,00)	13,40	4.327.945.790,00
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	120.000.000,00	180.150.000,00	60.150.000,00	150,13	169.360.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	1.004.910.000,00	527.284.000,00	(477.626.000,00)	52,48	662.331.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	4.500.000.000,00	2.953.740.000,00	(1.546.260.000,00)	65,64	2.794.086.772,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	400.000.000,00	492.915.200,00	92.915.200,00	123,15	428.548.000,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.000.000.000,00	914.860.340,00	(85.140.000,00)	91,49	897.542.180,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.150.000.000,00	1.502.468.625,00	(647.531.375,00)	74,42	2.167.522.500,00
Jumlah	**42.260.093.792,00**	**11.118.125.955,00**	**(30.783.786.837,00)**	**26,31**	**11.358.338.726,00**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.1.8 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp11.118.125.955,00 atau 26,31% dari anggaran sebesar Rp42.260.093.792,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp240.212.771,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp11.358.338.726,00.

Retribusi Jasa Umum dapat dirinci sebagai berikut:

a) Retribusi Pelayanan Persampahan/KebersihanTahun 2023 hanya dikelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan target Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp32.746.985.792,00 dengan realisasi sebesar Rp4.386.567.790,00 atau sebesar 13,40%.

b) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat merupakan target Retribusi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan retribusi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat target pada Tahun 2023 sebesar Rp120.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp180.150.000,00.

c) Retribusi Pelayanan Pasar berada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan dengan target penerimaan Tahun 2023 sebesar Rp1.034.910.000,00 yang terbagi pada 3 (tiga) jenis retribusi yaitu retribusi pelataran, retribusi los dan retribusi kios dengan realisasi sebesar Rp627.284.000,00 atau sebesar 60,61%.

d) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berada pada Dinas Perhubungan dengan target Tahun 2023 sebesar Rp4.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.953.745.000,00 atau 65,64%.

e) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan target retribusi yang berada pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu RetribusiPelayanan Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Untuk Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp400.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.492.619.200,00 atau 123,15%.

f) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran target Tahun 2023 berada pada Dinas Pemadam Kebakaran ditargetkan sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp914.859.340,00 yang terdapat pada Dinas Pemadam Kebakaran atau 91,49% .

g) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp2.100.000.000,00 dengan realisasi Rp1.562.900.625,00 atau 74,42%.

b. Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha merupakan sumber pendapatan PAD yang berhubungan dengan pemakaian Aset Daerah. Retribusi Jasa Usaha dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.9. Rincian Retribusi Jasa Usaha

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2022
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.482.386.290,00	2.199.024.990,00	(283.361.300,00)	88,59	365.629.000,00
Retribusi Terminal	15.000.000,00	15.660.000,00	660.000,00	104,40	15.060.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	650.000.000,00	574.546.300,00	(75.453.700,00)	88,39	599.290.500,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	950.000.000,00	569.653.506,00	(380.346.494,00)	59,96	580.698.682,00
Jumlah	**4.097.386.290,00**	**3.358.884.796,00**	**(738.501.494,00)**	**81,98**	**1.560.068.182,00**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.1.9 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp3.358.884.796,00 atau 81,98% dari anggaran sebesar Rp4.097.386.290,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.798.316.614,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.560.568.182,00.

Retribusi Jasa Usaha dapatdirinci sebagai berikut:

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dikelola oleh 4 (empat) SKPD, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.10. Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per SKPDTahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

SKPD	Anggaran (2023)	Realisasi (2023)	Lebih/ Kurang	%
Dinas Kesehatan	-	246.276.000,00	246.276.000,00	—
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	193.800.000,00	166.440.000,00	(27.360.000,00)	85,88
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	30.000.000,00	14.000.000,00	(16.000.000,00)	46,67
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.258.586.290,00	1.772.298.990,00	(486.287.300,00)	78,47
Jumlah	**2.482.386.290,00**	**2.199.024.990,00**	**(283.361.300,00)**	**88,59**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

b) Retribusi Terminal berada pada Dinas Perhubungan dengan target Tahun 2023 sebesar Rp15.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp15.660.000,00 atau 104,40%.

c) Retribusi Rumah Potong Hewan berada pada Dinas Pertanian dan Perikanan dengan target Tahun 2023 sebesar Rp650.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp574.546.300,00 atau 88,39%.

d) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan berada pada Dinas Perhubungan dengan target Tahun 2023 sebesar Rp950.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp569.653.506,00 atau 59,96%.

e) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari tiga jenis perizinan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.11. Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran (2023)	Realisasi (2023)	Lebih / Kurang	%	Realisasi (2022)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	15.800.000.000,00	12.344.457.280,00	(3.455.542.880,00)	78,13	3.578.295.600,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.520.000,00	1.500.000,00	(20.000,00)	99,43	3.025.400,00
Jumlah	**15.803.520.000,00**	**12.347.957.280,00**	**(3.455.562.880,00)**	**78,13**	**3.581.321.000,00**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.1.11 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp12.347.957.200,00 atau 78,13% dari anggaran sebesar Rp15.803.520.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp5.562.265.300,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp3.581.921.000,00.

Retribusi Perizinan Tertentu dapat dirinci sebagai berikut:

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan target Tahun 2023 sebesar Rp15.800.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp12.344.457.200,00 atau 78,13%.

b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum berada pada Dinas Perhubungan dengan target Tahun 2023 sebesar Rp3.520.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.500.000,00 atau 99,43%.

5.1.1.1.3.Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
5.943.817.264,00	3.443.846.490,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dividen/bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan bersumber dari Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD).

Untuk Tahun Anggaran 2023, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari:

Tabel 5.1.12. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/ Kurang	%	Realisasi 2022
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.081.656.530,00	3.081.656.530,00	-	100,00	3.112.868.838,00
Bank Riau kepri	3.081.656.530,00	3.081.656.530,00	-	100,00	3.112.868.838,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Lainnya)	2.862.160.734,00	2.862.160.734,00	-	100,00	330.946.652,00
PT. Bumi Siak Pusako	2.862.160.734,00	2.862.160.734,00	-	100,00	330.946.652,00
Jumlah	**5.943.817.264,00**	**5.943.817.264,00**	**-**	**100,00**	**3.443.846.490,00**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.1.12 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp5.943.817.2640,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp5.943.817.2640,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp2.499.970.774,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp3.443.846.490,00. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 hanya berasal dari penerimaan dividen dari PT. Bank Riau Kepri sebesar Rp3.061.656.530,00 dan dividen dari PT. Bumi Siak Pusako sebesar Rp2.882.160.734,00, sementara penyertaan modal Pemerintah Kota Pekanbaru pada PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru, PT. BPR Pekanbaru dan PDAM Kota Pekanbaru pada Tahun 2023 tidak menghasilkan dividen.

5.1.1.1.4.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
72.608.698.459,38	59.658.199.101,85

Akun Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.1.13. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / Kurang	%	Realisasi 2022
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.535.476.500,00	2.164.164.600,00	(792.311.900,00)	70,86	370.627.500,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	7.086.736.726,00	2.948.757.186,00	(5.530.979.356,00)	27,01	1.161.027.340,01
3	Jasa Giro	4.832.211.462,00	1.842.261.680,00	(2.989.949.767,00)	38,13	1.479.960.215,00
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	7.075.956,00	9.021.955,00	1.946.000,00	115,12	5.595.024,00
5	Pendapatan Bunga	-	-	-	—	106.906.116,00
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.781.485.857,20	426.660.370,46	(2.354.833.490,54	15,34	37.900.000,00
7	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	183.093.586,00	112.909.680,00	(70.183.906,00)	61,67	82.680.363,00
8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	26.315.399,00	111.502.697,38	85.187.298,38	423,79	104.403.868,00
9	Pendapatan Denda Pajak Daerah	7.691.693.000,00	5.348.693.982,00	(2.343.349.018,00)	69,53	478.184.420,00
10	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	2.015.894.377,00	1.693.064.867,00	(322.829.510,00)	83,98	1.817.298.328,00
11	Pendapatan dari Pengembalian	20.784.010.157,00	7.110.159.190,61	(13.673.851.967,39)	34,21	10.764.000.138,44
12	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pajak	2.060.280.000,00	41.600.000,00	(1.958.680.000,00)	2,02	1.211.944.946,00
13	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	-	-	-	—	-
14	Pendapatan BLUD	60.336.206.471,00	51.844.847.641,71	(8.489.358.829,29)	85,93	41.908.291.513,50
15	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	-	-	—	-
	Jumlah	111.296.484.430,00	72.608.698.459,38	(38.687.785.970,62)	65,24	59.658.199.101,85

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.1.13 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp72.608.698.459,38 atau 65,24% dari anggaran sebesar Rp111.296.484.430,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp12.950.499.357,53 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp59.658.199.101,85.

Pendapatan dari hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan berasal dari proses penghapusan BMD yang terdiri dari penjualan alat angkutan, alat kantor dan rumah tangga serta aset lainnya. Pada tahun 2023 terjadi kenaikan nilai dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp370.927.500,00 menjadi Rp2.194.164.500,00. Kota pekanbaru saat ini menjalin kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) dengan beberapa perusahaan, yaitu:

- CV. Putra Bertuah / PT. Riau Kerta Raharja (Pasar Sail)
- PT. Dalena PI (Pasar Bawah)
- PT. Peputra Mahajaya (Pasar Senapelan)
- PT. Makmur Papan Permata (Pasar Sukaramai)
- PT. Agung Rafa Bonai, KSO (Pasar Induk)

Pendapatan jasa giro berasal dari seluruh rekening bank Pemerintah Kota Pekanbaru, baik rekening kas daerah maupun rekening kas bendahara. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan nilai dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1.478.990.215,00 menjadi Rp1.842.361.695,00.

Pendapatan dari hasil pengelolaan dana bergulir berasal dari pengembalian dana dari Program Ekonomi Kerakyatan (PEK) dan Pengentasan Kemiskinan (Taskin). Pada tahun 2023 terjadi penurunan nilai dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp5.095.924,00 menjadi Rp9.021.956,00.

Pendapatan bunga berasal dari bunga deposito. Pada tahun 2023 terjadi penurunan nilai dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp108.904.110,00 menjadi Rp0,00.

Pendapatan penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah berasal dari TPTGR non Bendahara. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan nilai dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp37.800.000,00 menjadi Rp426.662.376,46.

Pendapatan penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain pada tahun 2023 terjadi peningkatan nilai dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp92.680.393,00 menjadi Rp152.906.983,00.

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2023 terjadi peningkatan nilai dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp104.403.865,00 menjadi Rp111.502.001,20.

Pendapatan denda pajak daerah tahun 2023 terjadi peningkatan nilai dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp476.184.420,00 menjadi Rp5.346.650.982,00.

Pendapatan denda retribusi daerah tahun 2023 terjadi pennurunan nilai dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1.917.258.328,00 menjadi Rp1.680.064.967,00.

Pendapatan dari pengembalian berasal dari pengembalian gaji, perjalanan dinas, dan dana hibah. Pada tahun 2023 terjadi penurunan nilai dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp10.764.000.138,44,00 menjadi Rp7.110.158.189,01.

Pendapatan BLUD merupakan pendapatan yang diterima oleh Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Rumah Sakit Madani dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang berasal dari JKN dan Retribusi Pelayanan

Kesehatan dan BLUD parkir serta BLUD Trans Metro pada Dinas Perhubungan dengan realisasi sebesar Rp51.644.847.641,71. Rincian Pendapatan BLUD sebagai berikut:

Tabel 5.1.14. Rincian Penerimaan BLUD Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No.	Nama Puskesmas	Jenis Penerimaan				Total
		Jasa Layanan Umum	Dana Kapitasi	Dana Non Kapitasi	Pendapatan Lain yang Sah	
1	SIMPANG TIGA	146.840.000,00	1.988.817.082,00	-	-	2.135.657.082,00
2	SIDOMULYO BI	51.797.000,00	943.494.073,00	-	-	995.291.070,00
3	TENAYAN RAYA	77.930.100,00	1.445.239.839,00	-	-	1.523.169.939,00
4	KARYA WANITA	15.900.000,00	1.690.324.562,00	-	-	1.106.224.562,00
5	MUARA FAJAR	12.177.000,00	513.313.894,00	-	-	525.490.894,00
6	LANGSAT	17.951.000,00	571.869.658,00	-	-	589.820.658,00
7	MELUR	51.407.000,00	920.168.511,00	-	-	971.575.510,00
8	SENAPELAN	44.694.000,00	1.124.306.333,00	-	-	1.169.000.333,00
9	RUMBAI	80.774.000,00	1.082.835.050,00	-	-	1.163.609.050,00
10	UMBAN SARI	14.934.880,00	1.336.971.710,00	-	-	1.351.906.590,00
11	RUMBAI BUKIT	20.832.000,00	517.046.707,00	-	-	537.878.707,00
12	PAYUNG SEKAKI	33.004.000,00	1.725.667.005,00	-	-	1.758.711.005,00
13	SIMPANG BARU	52.825.000,00	584.213.369,00	-	-	637.038.369,00
14	SIDOMULYO BI	69.918.000,00	1.740.958.180,00	-	-	1.809.876.180,00
15	GARUDA	44.098.520,00	1.381.519.700,00	-	-	1.425.618.208,00
16	HARAPAN RAYA	39.242.000,00	1.173.294.364,00	-	-	1.212.536.364,00
17	SAIL	51.769.000,00	897.787.447,00	-	-	949.556.447,00
18	REJOSARI	51.021.000,00	2.544.281.572,00	-	-	2.595.282.572,00
19	LIMA PULUH	40.456.000,00	1.074.953.608,00	-	-	1.115.409.608,00
20	PEKANBARU KOTA	63.985.000,00	932.589.433,00	-	-	996.574.433,00
21	SAPTA TARUNA	44.791.000,00	554.001.035,00	-	-	598.792.035,00
22	RS MADANI	7.092.025.591,71	-	-	-	7.092.025.591,71
23	BLUD PARKIR	14.143.417.311,00	-			14.143.417.311,00
24	BLUD Transmetro	5.240.375.123,00	-	-		5.240.375.123,00
Jumlah		27.501.164.555,71	24.143.683.136,00	-	-	51.644.847.641,71

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Belanja BLUD Tahun Anggaran 2023

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
1.862.857.987.731,00	1.680.225.855.620,00

Pendapatan Transfer merupakan akun untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan, transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan transfer Pemerintah Daerah Lainnya, serta Bantuan Keuangan. Untuk Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Transfer yang telah diterima oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Kas Daerah terdiri dari:

Tabel 5.1.15. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/ Kurang	%	Realisasi 2022
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.510.329.218.000,00	1.519.391.551.743,00	9.062.333.743,00	100,60	1.375.146.123.683,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	-	-	-		-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	389.520.072.220,00	343.466.435.988,00	(46.053.636.232,00)	88,18	305.079.731.937,00
Bantuan Keuangan	-	-	-		-
Jumlah	**1.899.849.290.220,00**	**1.862.857.987.731,00**	**(36.991.302.489,00)**	**98,05**	**1.680.225.855.620,00**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.1.15 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.862.857.987.731,00 atau 98,05% dari anggaran sebesar Rp1.899.849.290.220,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp182.632.132.111,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.680.225.855.620,00.

5.1.1.2.1.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
1.519.391.551.743,00	1.375.146.123.683,00

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan, dan Dana Insentif Daerah untuk Tahun Anggaran 2023 yang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Beberapa regulasi yang menjadi pedoman dalam perhitungan Transfer Pemerintah Pusat, yaitu:

a) Peraturan Presiden RI Nomor 104 tahun 2021 tanggal 29 November 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2022;

b) Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2022.

Dimana realisasi penerimaan akun ini terdiri dari:

Tabel 5.1.16. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / Kurang	%	Realisasi 2022
1	Dana Perimbangan	1.491.150.617.000,00	1.500.212.950.743,00	(9.062.333.743,00)	100,61	1.375.146.123.683,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	19.178.601.000,00	19.178.601.000,00	-	100,00	-
Jumlah		1.510.329.218.000,00	1.519.391.551.743,00	(9.062.333.743,00)	100,60	1.375.146.123.683,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.1.16 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.519.391.551.743,00 atau 100,60% dari anggaran sebesar Rp1.510.329.218.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp144.245.428.060,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.375.146.123.683,00.

Realisasi pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2023 adalah sebesar Rp19.178.601.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp19.178.601.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp19.178.601.000,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

Rincian Penerimaan Bagi Dana PerimbanganTahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.17. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/ Kurang	%	Realisasi 2022
1	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil (DBH)	275.686.796.000,00	292.039.521.136,00	21.442.765.136,00	107,92	248.485.534.861,00
2	Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum (DAU)	867.864.033.000,00	867.953.880.162,00	(542.858,00)	100,00	786.296.259.000,00
3	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	57.597.748.000,00	52.745.712.676,00	(880.634.221,00)	84,20	50.892.140.911,00
4	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	310.271.710.000,00	307.452.936.796,00	(11.719.974.234,00)	99,21	289.472.186.911,00
Jumlah		1.491.150.617.000,00	1.500.212.950.743,00	9.062.333.743,00	100,61	1.375.146.123.683,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.1.17 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.500.212.950.743,00 atau 100,61% dari anggaran sebesar Rp1.491.150.617.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp125.066.827.060,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.375.146.123.683,00. Nominal transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan yang paling besar diterima dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp867,953.880.162,00, sedangkan penerimaan yang melebihi target adalah Dana Bagi Hasil sebesar Rp292.039.521.136,00 atau 107,92%.

Realisasi pendapatan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH) dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.18. Rincian dan Realisasi Pendapatan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH)

(dalam rupiah)

No	PMK Tahun 2021	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi Hak TA 2023 di TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 s.d 31 Des 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6=(4/3)*100	7
1	DBH Pajak Sumber Daerah	42.875.417.000,00	42.875.417.000,00	2.529.623.741,00	105,92	45.418.340.741,00
2	DBH PPh Pasal 21	99.199.703.000,00	99.199.703.000,00	10.284.597.896,00	110,47	109.580.299.896,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WP OPDN	7.447.864.000,00	7.447.864.000,00	483.272.388,00	112,13	8.361.631.388,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (DHT)	-	830.570.282,00	472.894,00	0,00	831.032.370,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	90.402.464.000,00	90.402.464.000,00	1.800.554.097,00	110,94	92.253.858.097,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	7.490.469.000,00	7.490.469.000,00	593.812.442,00	107,93	8.084.281.442,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara Landrent	2.894.890.000,00	2.894.890.000,00	312.758.966,00	110,81	3.208.849.966,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	13.974.750.000,00	14.235.807.229,00	759.805.071,00	79,88	14.995.612.300,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.294.941.000,00	1.340.167.786,00	291.793.211,00	100,00	1.293.941.000,00
Jumlah		270.599.730.000,00	266.571.880.380,00	25.465.860.836,00	101,92	292.039.521.136,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Realisasi pendapatan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil Tahun 2023 sebesar Rp292.039.521.136,00 yang terdiri dari penerimaan piutang Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil tahun 2021 sebesar Rp25.465.860.836,00 dan penerimaan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil TA. 2022 sebesar Rp246.485.534.861,00.

5.1.1.2.2.Transfer Antar Daerah

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
343.466.435.988,00	305.879.731.937,00

Pendapatan transfer antar daerah yang terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan kepada Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023 yang diterima dari Pemerintah Provinsi Riau.

Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.1.19. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2022
Pendapatan Bag Hasil Pajak	366.520.697.426,00	320.607.751.188,00	(46.012.806.232,00)	87,45	290.950.417.394,00
Bantuan Keuangan	22.999.464.800,00	22.858.684.800,00	(140.880.000,00)	99,82	14.229.314.543,00
Jumlah	389.520.072.220,00	343.466.435.988,00	(46.053.636.232,00)	88,18	305.079.731.937,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.1.19 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp343.466.435.988,00 atau 88,18% dari anggaran sebesar Rp389.520.072.220,00 dan

mengalami kenaikan sebesar Rp38.386.704.051,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp305.079.731.937,00, terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi penerimaan Tahun 2023 melampaui target yang terdapat pada jenis penerimaan berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dengan realisasi sebesar Rp290.850.417.394,04 atau 124,00%.

5.1.1.3.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
0,00	0,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 sebesar Rp0,00 yang terdiri dari pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.2.BELANJA

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
2.748.798.260.184,38	2.492.666.952.346,35

Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerahberdasarkan jenis terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Rincian mengenai alokasi belanja daerah dan realisasi pengeluaran yang telah dilakukan baik melalui Kas Daerah maupun Bendahara Pengeluaran SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.20. Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2022
Belanja Operasi	2.575.053.645.275,00	2.432.225.039.283,50	(142.834.006.074,50)	94,45	2.160.366.604.652,38
Belanja Modal	329.213.621.778,00	315.807.494.723,88	(13.406.127.054,12)	95,93	328.335.985.970,98
Belanja Tidak Terduga	8.393.324.782,00	761.126.257,00	(7.632.198.525,00)	9,08	964.321.717,00
Belanja Transfer	-	-	-		-
Jumlah	2.912.660.591.838,00	2.748.798.260.184,38	(163.862.331.653,62)	94,37	2.492.666.952.346,35

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.1.20 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.748.798.260.184,38 atau 94,37% dari anggaran sebesar Rp2.912.660.591.838,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp256.131.307.838,03 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp2.492.666.952.346,35 terlihat bahwa realisasi seluruh jenis belanja berada di bawah alokasi anggaran yang disediakan dengan realisasi terendah pada akun Belanja Tidak Terduga yaitu sebesar 9,08%.

5.1.2.1. Belanja Operasi

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
2.432.229.639.203,38	2.163.366.634.652,36

Belanja Operasi merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hariPemerintah Kota Pekanbaru yang memberi manfaat jangka pendek. Pos Belanja Operasi terdiri dari:

Tabel 5.1.21. Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja Operasi

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2022
Belanja Pegawai	950.745.441.134,00	917.756.173.837,00	(32.989.267.297,00)	96,53	908.095.040.997,56
Belanja Barang dan Jasa	1.509.932.297.830,00	1.401.017.172.438,38	(108.838.125.380,00)	92,79	1.174.055.344.026,80
Belanja Bunga	-	-	-	0,00	-
Belanja Subsidi	1.000.344.147,00	1.110.804.147,00	(110.460.000,00)	111,05	7.263.227.312,00
Belanja Hibah	112.398.092.167,00	112.346.486.780,00	(51.605.387,00)	99,95	73.992.422.669,00
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	—	-
Jumlah	2.575.063.645.278,00	2.432.229.639.203,38	(142.834.006.074,50)	94,45	2.163.366.634.652,36

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.1.21 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.432.229.639.203,50 atau 94,45% dari anggaran sebesar Rp2.575.063.645.278,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp268.863.004.551,14 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp2.163.366.634.652,36. Penjelasan atas realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp917.756.173.837,00 atau 96,53%, dapat dirinci berdasarkan jenis sebagai berikut:

Tabel 5.1.22. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

No.	Jenis Belanja Pegawai	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/ Kurang	%	Realisasi 2022
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	484.491.573.587,00	481.667.950.510,00	(2.823.623.077,00)	99,48	497.307.649.586,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	234.262.994.978,00	213.714.374.501,00	(20.548.620.477,00)	91,23	250.403.638.816,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	181.134.041.121,00	181.798.943.327,00	(8.335.897.794,00)	98,12	122.468.869.832,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	34.595.357.576,00	34.275.799.306,00	(319.558.270,00)	99,08	33.101.944.443,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	830.546.102,00	671.475.141,00	(159.070.961,00)	80,85	403.366.225,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.382.480.000,00	1.369.120.000,00	(3.360.000,00)	99,76	1.011.040.000,00
7	Insentif Pemungutan Pajak	-	-	-	—	-
8	Insentif Pemungutan Retribusi	-	-	-	—	-
9	Belanja Pegawai BLUD	4.037.847.750,00	4.008.621.150,00	(29.226.618,00)	-	3.348.652.295,56
10	Belanja Pegawai BOS	-	-	-	—	-
JUMLAH		950.745.441.134,00	917.756.173.837,00	(32.989.267.297,00)	96,53	908.095.040.997,56

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.1.22 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp917.756.173.837,00 atau 96,53% dari anggaran sebesar Rp950.745.441.134,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp9..661.132,839.44 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp908.095.040.997,56.

Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per SKPD Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.1.23. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%	Realisasi 2022
1	Dinas Pendidikan	405.037.783.349,00	395.296.339.349,00	9.741.660.709,00	97,59	384.920.743.732,00
2	Dinas Kesehatan	151.595.577.359,00	144.933.959.905,00	6.661.617.245,00	95,61	140.896.237.492,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.661.320.343,00	9.872.136.965,00	204.814.388,00	102,12	9.274.617.439,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.585.745.425,00	5.338.425.895,00	263.319.541,00	95,28	5.140.731.617,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	9.756.929.880,00	9.318.457.304,00	438.481.576,00	95,51	9.486.334.345,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.472.411.446,00	4.254.699.434,00	217.722.012,00	95,13	4.570.532.394,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.011.280.032,00	5.494.936.871,00	516.344.352,00	91,41	5.316.452.444,00
8	Dinas Sosial	4.302.577.434,00	4.302.584.220,00	269.333.231,00	93,55	4.162.202.270,00
9	Dinas Tenaga Kerja	4.469.536.139,00	4.255.286.599,00	214.249.614,00	95,43	3.987.282.214,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.436.264.766,00	4.237.966.825,00	201.237.963,00	95,47	4.503.444.936,00
11	Dinas Kebudayaan Pangan	3.291.624.369,00	3.040.682.549,00	161.148.756,00	94,07	3.192.807.841,00
12	Dinas Perpustakaan	3.996.361.222,00	3.161.289.077,00	144.982.191,00	95,63	3.306.263.167,00
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	7.366.163.288,00	7.040.987.647,00	342.125.641,00	95,57	7.097.332.026,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.014.787.768,00	8.643.595.480,00	429.911.358,00	95,05	9.226.171.223,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.996.347.258,00	3.399.502.518,00	157.544.652,00	94,77	3.993.626.264,00
16	Dinas Perhubungan	14.226.582.994,00	13.565.193.300,00	606.377.691,00	95,52	12.946.475.747,00
17	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	4.115.339.944,00	3.992.584.710,00	202.139.234,00	93,03	4.268.417.288,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	4.128.484.118,00	3.930.995.066,00	191.609.052,00	95,21	4.295.438.527,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.314.642.548,00	10.781.341.220,00	522.701.315,00	95,13	10.915.108.480,00
20	Dinas Kependudukan dan Olahraga	4.321.226.552,00	4.124.237.315,00	196.867.877,00	95,45	4.368.355.938,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.219.529.698,00	6.891.911.720,00	328.985.536,00	95,43	6.254.684.447,00
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.666.431.579,00	4.645.682.349,00	216.833.225,00	99,54	4.483.441.633,00
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	10.339.226.312,00	9.987.444.771,00	531.780.541,00	94,88	9.845.478.355,00
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6.016.338.634,00	5.533.146.486,00	283.692.219,00	94,45	7.677.574.208,00
25	Sekretariat Daerah	23.156.709.115,00	21.711.274.614,00	1.445.434.223,00	93,72	21.119.488.194,00
26	Sekretariat DPRD	42.862.737.465,00	42.193.168.152,00	669.526.399,00	98,44	41.126.208.143,00
27	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	6.528.907.735,00	6.068.699.461,00	335.222.221,00	94,91	6.763.756.889,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.473.125.535,00	9.979.873.639,00	439.051.620,00	95,92	13.457.484.035,00
29	Badan Pendapatan Daerah	44.431.415.647,00	43.923.839.471,00	508.386.376,00	98,86	38.228.237.554,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.996.392.991,00	7.496.801.344,00	419.816.517,00	94,03	7.771.886.473,00
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	4.696.224.222,00	4.453.919.021,00	220.304.991,00	95,11	4.628.502.451,00
32	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	13.093.340.462,00	12.558.934.917,00	685.441.469,00	94,14	13.432.145.388,00
33	Kecamatan Bukit Raya	6.866.237.176,00	6.546.239.969,00	369.057.468,00	95,49	6.905.786.179,00
34	Kecamatan Tenayan Raya	8.166.467.298,00	7.774.867.864,00	391.485.494,00	95,22	7.941.214.895,00
35	Kecamatan Sail	4.850.094.388,00	4.453.257.259,00	216.827.019,00	95,34	4.668.024.997,00

No	SKPD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan	%	Realisasi 2022
36	Kecamatan Lima Puluh	4.712.349.558,00	4.501.571.471,00	211.778.087,00	95,52	4.712.349.558,00
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	5.296.868.664,00	5.031.637.344,00	265.231.320,00	94,99	5.681.252.226,00
38	Kecamatan Sukajadi	7.200.957.788,00	6.908.951.484,00	292.006.304,00	95,94	7.577.841.788,00
39	Kecamatan Payung Sekaki	8.395.957.974,00	8.027.168.785,00	368.827.089,00	95,61	8.497.289.935,00
40	Kecamatan Senapelan	5.460.861.480,00	5.224.401.035,00	236.460.445,00	95,67	5.535.914.127,00
41	Kecamatan Marpoyan Damai	8.997.269.370,00	7.751.468.891,00	345.800.479,00	96,71	8.271.073.119,00
42	Kecamatan Binawidya	7.251.745.894,00	6.916.767.469,00	314.978.425,00	95,64	7.216.775.756,00
43	Kecamatan Tuah Madani	6.174.220.000,00	5.877.911.573,00	296.308.427,00	95,42	6.433.988.454,00
44	Kecamatan Rumbai	5.757.321.150,00	5.483.842.791,00	274.278.429,00	95,24	5.711.194.617,00
45	Kecamatan Rumbai Timur	4.481.284.940,00	4.271.972.468,00	213.312.474,00	95,33	4.174.488.288,00
46	Kecamatan Rumbai Barat	5.201.304.440,00	4.948.100.269,00	252.386.171,00	95,15	5.067.971.480,00
47	Kecamatan Kulim	5.856.075.250,00	5.601.659.596,00	286.613.754,00	95,62	5.918.000.152,00
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.870.217.354,00	4.686.721.396,00	183.295.622,00	96,19	4.852.981.352,00
	Jumlah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	94,53	[illegible]

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

b. Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.401.017.172.439,50.

Tabel 5.1.24. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa per jenis

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/ Kurang	%	Realisasi 2022
1	Belanja Barang	455.054.340.720,00	414.870.838.927,00	(40.115.902.216,00)	91,19	283.864.117.676,00
2	Belanja Jasa	644.967.791.000,00	633.767.954.593,26	(42.199.836.406,74)	93,47	500.365.329.462,00
4	Belanja Pemeliharaan	109.411.360.804,00	130.034.766.800,07	[illegible]	94,59	74.268.225.356,68
3	Belanja Perjalanan Dinas	67.985.077.196,00	58.030.384.287,00	[illegible]	85,81	57.425.699.804,00
4	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	111.898.314.000,00	137.326.493.156,56	[illegible]	80,43	158.109.467.486,00
5	Belanja Barang dan Jasa BOS	80.000.472.268,00	80.334.273.574,00	(595.149.694,00)	-	84.175.267.210,92
6	Belanja Barang dan Jasa BLUD	42.564.994.467,00	34.919.342.072,62	(7.764.852.624,38)	82,07	45.849.457.032,64
	JUMLAH	[illegible]	[illegible]	[illegible]	92,79	[illegible]

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.1.24 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.401.017.172.439,50 atau 92,79% dari anggaran sebesar Rp1.509.953.297.830,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp226.921.228.412,70 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.174.095.944.026,80.

c. Pos Belanja Subsidi menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.115.804.147,00 atau 56,75% dari anggaran sebesar Rp1.966.314.147,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp6.167.423.425,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp7.283.227.572,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembayaran LS pada Dinas Perhubungan Atas Belanja Hutang Subsidi 2021 (Tunda Bayar) pada Sub. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota DISHUB T.A 2023 sebesar Rp966.314.147,00 pada tanggal 29 Desember 2023.

2. Pembayaran LS pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Belanja Subsisdi kepada BUMD (Subsidi Bunga kepada PT. BPR Pekanbaru Madani untuk Pelaku Usaha Mikro) pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru TA. 2023 sebesar Rp149.490.000,00.

d. Pos Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp112.398.592.167,00. Rincian realisasi pos belanja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.25. Rincian Belanja Hibah

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2022
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	4.017.008.606,00	3.990.044.103,00	(27.895.580,00)	99,31	4.443.098.100,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	52.162.087.108,00	51.678.008.103,00	(484.098.300,00)	99,07	19.982.435.300,00
Belanja Hibah Dana BOS	52.144.435.387,00	52.598.315.580,00	453.880.193,00	100,87	48.363.341.330,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	4.074.123.066,00	4.074.120.000,00	-	100,00	1.203.597.026,00
Jumlah	**112.398.592.167,00**	**112.340.488.786,00**	**(58.103.387,00)**	**99,95**	**73.892.422.056,00**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.1.25 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp112.340.488.780,00 atau 99,95% dari anggaran sebesar Rp112.398.592.167,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp38.448.066.724,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp73.892.422.056,00

Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah per SKPD Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.1.26. Belanja Hibah per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

(dalam rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	66.492.335.387,00	66.816.827.580,00	(323.892.193,00)	(0,49)
2	Dinas Kesehatan	850.000.000,00	580.000.000,00	350.000.000,00	70,00
3	Dinas Sosial	126.100.000,00	122.200.000,00	3.900.000,00	3,10
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.010.200.000,00	1.010.200.000,00	-	0,00
5	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	0,00
6	Sekretariat Daerah	5.793.070.680,00	5.766.084.100,00	27.866.580,00	0,48
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35.147.977.100,00	35.147.977.100,00	-	0,00
	Jumlah	**112.398.592.167,00**	**112.340.488.780,00**	**58.103.387,00**	**0,05**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.1.27. Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai PolitikTahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Penerima Bantuan Keuangan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/Kurang	%
1	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	158.700.000,00	158.700.000,00	-	100,00
2	Partai Gerindra	682.300.000,00	682.300.000,00	-	100,00
3	Partai Amanat Nasional (PAN)	529.690.000,00	529.690.000,00	-	100,00
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	482.430.000,00	482.430.000,00	-	100,00
5	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	183.990.000,00	183.990.000,00	-	100,00
6	Partai Golongan Karya	482.540.000,00	482.540.000,00	-	100,00
7	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	348.160.000,00	348.160.000,00	-	100,00
8	Partai Demokrat	581.860.000,00	581.860.000,00	-	100,00
9	Partai Nasdem	-	-	-	—
10	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	664.430.000,00	664.430.000,00	-	100,00
Jumlah		**4.694.120.000,00**	**4.694.120.000,00**	**-**	**100,00**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

c. Pos Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp0,00 dan realisasi Rp0,00 atau 0,00%, dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00.

5.1.2.2.Belanja Modal

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
315.807.494.723,88	**328.335.985.976,99**

Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran dan realisasi belanja modal Pemerintah Kota Pekanbaru pada Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.28. Rincian Belanja Modal

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2022
Belanja Tanah	2.382.706.924,00	769.811.525,00	1.612.895.299,00	32,29	8.509.186.113,00
Belanja Peralatan dan Mesin	79.397.383.553,00	75.886.515.195,00	3.506.867.488,00	95,58	108.335.049.831,00
Belanja Gedung dan Bangunan	95.822.200.444,00	94.006.936.248,86	1.815.326.195,14	98,00	77.949.680.104,00
Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	134.454.097.534,00	128.207.813.682,02	6.246.283.851,98	95,35	121.219.807.527,99
Belanja Aset Tetap Lainnya	16.907.852.323,00	16.796.410.073,00	121.442.250,00	99,28	12.215.030.401,00
Belanja Aset Lainnya	146.310.000,00	146.006.000,00	310.000,00	99,79	108.209.000,00
Jumlah	**329.213.621.778,00**	**315.807.494.723,88**	**13.496.127.054,12**	**95,93**	**328.335.985.976,99**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.1.28 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp315.807.494.723,88 atau 95,93% dari anggaran sebesar Rp329.213.621.778,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp12.528.491.253,11 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp328.335.985.976,99. Realisasi Belanja Modal ini dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD selama Tahun Anggaran 2023.

Terdapat perbedaan antara jumlah realisasi Belanja Modal sebesar Rp315.807.494.723,88 dengan yang dicatat sebagai aset tetap sebesar Rp249.325.685.882,00 hasil dari pengadaan Tahun Anggaran 2023. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Realisasi Belanja modal tidak seluruhnya akan menjadi aset tetap dan aset lainnya, walaupun secara penganggaran telah dianggarkan pada kode rekening belanja modal. Setelah dilakukan penghitungan dengan membuat kertas kerja penghitungan belanja modal per kegiatan dan per jenis aset, seringkali terdapat belanja modal yang ternyata berupa barang persediaan. Apabila ditemukan hal demikian, maka nilai yang ditemukan tersebut akan dipisahkan menjadi belanja modal bukan aset tetap;
b. Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota yang mengatur mengenai aset tetap, terhadap belanja modal yang tidak memenuhi batas kapitalisasi akan direklasifikasi menjadi barang yang bukan aset tetap, ditetapkan dan akan dicatat dalam catatan *extracomptable* dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan; dan
c. Terdapat komponen Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa yang menjadi bagian nilai perolehan/atribusi aset tetap dan aset lainnya.

Belanja modal Pemerintah Kota Pekanbaru pada Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Belanja Modal Tanah.

Tahun Anggaran 2023 belanja modal untuk pembelian tanah sebagai berikut:

Tabel 5.1.29. Belanja Modal Tanah

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2022
Belanja Modal Tanah Pensil	-	-	-	—	1.125.016.000,00
Belanja Modal Lapangan	2.383.706.824,00	769.811.525,00	(1.613.895.299,00)	32,29	7.384.150.113,00
Jumlah	**2.383.706.824,00**	**769.811.525,00**	**(1.613.895.299,00)**	**32,29**	**8.509.166.113,00**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.1.29 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp769.811.525,00 atau 32,29% dari anggaran sebesar Rp2.383.706.824,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp7.739.354.588,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp8.509.166.113,00. Pengadaan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 berada di Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru.

Tabel 5.1.30. Belanja Modal Tanah per OPD

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2022
1. Belanja Modal Tanah Pemkl					
Dinas Pertanahan	-	-	-	—	1.126.916.000,00
2. Belanja Modal Lapangan					
Dinas Pertanahan	2.383.706.824,00	769.811.525,00	(1.613.895.299,00)	32,29	7.584.190.113,00
Jumlah	2.383.706.824,00	769.811.525,00	(1.613.895.299,00)	32,29	8.598.166.113,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Untuk belanja modal pengadaan peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2023 secara jenis dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 5.1.31. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Alat Besar	8.510.381.580,00	8.172.329.300,00	(338.052.580,00)	96,03	471.280.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	5.194.843.480,00	5.042.855.000,00	(151.988.480,00)	97,07	22.457.039.000,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	87.873.680,00	74.750.000,00	(13.123.680,00)	85,07	1.172.909.240,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	-	-	-	—	-
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	22.815.300.264,00	21.713.280.910,00	(1.101.999.354,00)	95,17	38.454.396.112,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.794.913.025,00	1.641.939.900,00	(152.960.225,00)	91,48	13.996.990.300,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	11.268.014.843,00	11.061.071.837,00	(206.942.906,00)	98,17	6.257.329.576,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	5.863.063.680,00	5.826.680.170,00	(36.311.330,00)	99,38	411.539.631,00
9	Belanja Modal Komputer	9.590.902.864,00	8.806.986.720,00	(874.216.264,00)	90,97	12.247.781.700,00
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi	-	-	-	—	85.000.000,00
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	5.750.000,00	5.750.000,00	-	100,00	83.270.000,00
12	Belanja Modal Pemeliharaan Proses Produksi	186.436.125,00	185.813.000,00	(611.125,00)	99,64	-
13	Belanja Modal Rambu Rambu	2.772.000.900,00	2.752.378.010,00	(21.600.890,00)	99,22	384.588.001,00
14	Belanja Modal Pemeliharaan Olahraga	-	-	-	—	49.000.000,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.917.088.822,00	7.552.853.451,00	(364.105.371,00)	95,39	8.961.992.375,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.238.047.560,00	2.833.366.197,00	(304.681.363,00)	90,59	3.833.979.392,00
Jumlah		79.397.383.653,00	75.888.516.195,00	3.508.867.458,00	95,58	108.335.049.831,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.1.31 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp75.888.516.195,00 atau 95,58% dari anggaran sebesar Rp79.397.383.653,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp32.446.533.636,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp108.335.049.831.

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.1.32. Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	14.896.381.152,00	14.512.551.401,00	(383.829.751,00)	(2,44)
2	Dinas Kesehatan	19.286.000.207,00	18.820.730.334,00	(465.669.963,00)	(2,46)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.806.228.540,00	8.742.690.000,00	(147.538.910,00)	(1,66)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.851.280.150,00	1.650.953.000,00	(498.327.750,00)	(34,25)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	368.973.600,00	343.866.300,00	(17.088.300,00)	(4,97)
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.572.039.000,00	3.372.040.000,00	(199.399.000,00)	(5,65)
7	Dinas Sosial	11.560.000,00	-	(11.560.000,00)	#DIV/0!
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	126.692.700,00	125.868.900,00	(783.800,00)	(0,63)
9	Dinas Ketahanan Pangan	190.000.000,00	188.953.000,00	(1.047.000,00)	(0,55)
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.830.100.750,00	1.736.434.000,00	(99.666.750,00)	(5,76)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	946.083.000,00	897.985.800,00	(48.097.200,00)	(5,36)
12	Dinas Perhubungan	3.622.934.900,00	3.472.956.890,00	(149.978.090,00)	(4,31)
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	294.730.200,00	253.660.000,00	(41.070.200,00)	(16,19)
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	111.313.400,00	104.007.000,00	(7.306.400,00)	(7,02)
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.606.348.050,00	3.985.892.110,00	(677.485.940,00)	(17,61)
16	Dinas Kependudukan dan Olahraga	114.448.000,00	114.038.000,00	(409.000,00)	(0,36)
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	475.006.000,00	467.376.000,00	(7.634.000,00)	(1,63)
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	87.966.800,00	87.780.000,00	(186.800,00)	(0,21)
19	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	91.500.000,00	-	(91.500.000,00)	#DIV/0!
20	Sekretariat Daerah	10.481.828.300,00	10.247.562.328,00	(234.257.980,00)	(2,39)
21	Sekretariat DPRD	907.296.700,00	897.326.700,00	(9.970.000,00)	(1,11)
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.756.082.974,00	1.672.400.000,00	(71.579.974,00)	(4,64)
23	Badan Perencanaan Daerah	2.277.894.200,00	2.148.464.400,00	(129.429.800,00)	(6,02)
24	Badan Kesbangpol dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	111.577.800,00	102.425.800,00	(9.152.000,00)	(8,94)
25	Badan Penelitian dan Pengembangan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00
26	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	81.565.400,00	-	(81.565.400,00)	#DIV/0!
27	Kecamatan Bukit Raya	112.510.200,00	112.210.000,00	(300.200,00)	(0,27)
28	Kecamatan Sail	68.019.000,00	67.768.500,00	(250.500,00)	(0,37)
29	Kecamatan Limo Puluh	239.429.400,00	221.494.000,00	(17.971.400,00)	(8,12)
30	Kecamatan Pekanbaru Kota	15.040.500,00	15.030.000,00	(10.500,00)	(0,07)
31	Kecamatan Sukajadi	117.434.800,00	135.580.000,00	(15.854.800,00)	(11,23)
32	Kecamatan Payung Sekaki	176.459.800,00	-	(176.459.800,00)	#DIV/0!
33	Kecamatan Marpoyan Damai	256.020.250,00	251.348.300,00	(4.671.950,00)	(1,82)
34	Kecamatan Binawidya	356.962.400,00	351.830.000,00	(5.132.400,00)	(1,74)
35	Kecamatan Rumbai	434.301.800,00	401.883.300,00	(32.418.500,00)	(8,12)
36	Kecamatan Rumbai Timur	223.361.700,00	223.163.000,00	(198.700,00)	(0,09)
37	Kecamatan Rumbai Barat	9.490.800,00	9.379.000,00	(111.800,00)	(1,19)
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	181.514.700,00	176.780.000,00	(4.734.700,00)	(2,67)
Jumlah		79.397.383.653,00	75.893.516.910,00	(3.503.867.453,00)	(4,53)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Belanja modal gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.33. Belanja Modal Bangunan dan Gedung

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	95.375.813.844,00	93.633.894.380,77	(1.741.919.463,23)	98,17	73.974.813.854,00
2	Belanja Modal Monumen	-	-	-	—	-
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-	-	—	663.546.000,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	546.452.600,00	373.043.868,08	(173.408.731,91)	68,27	3.311.333.250,00
Jumlah		**95.922.266.444,00**	**94.006.938.248,86**	**(1.915.328.195,14)**	**98,00**	**77.949.693.104,00**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.1.33 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp94.006.938.248,86 atau 98,00% dari anggaran sebesar Rp95.922.266.444,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp16.057.245.144,86 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp77.949.693.104,00

Anggaran dan RealisasiBelanja Modal Bangunan dan Gedung per SKPD Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.1.34. Belanja Modal Bangunan dan Gedung per SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	55.705.267.153,00	54.488.338.052,34	(1.216.949.100,66)	(2,23)
2	Dinas Kesehatan	7.129.952.500,00	6.886.574.668,09	(243.377.831,91)	(3,53)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26.960.700.230,00	26.157.249.278,43	(803.450.951,57)	(1,54)
4	Dinas Perumahan Pakpol dan Kawasan Permukiman	1.215.410.000,00	1.205.883.000,00	(9.527.000,00)	(0,78)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	127.421.000,00	126.448.900,00	(980.100,00)	(0,78)
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	152.100.000,00	149.300.000,00	(2.800.000,00)	(1,86)
7	Dinas Ketahanan Pangan	191.441.000,00	191.149.000,00	(291.000,00)	(0,15)
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	200.000.000,00	196.966.000,00	(3.034.000,00)	(1,54)
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	382.880.000,00	382.035.645,00	(844.355,00)	(0,23)
10	Dinas Perdagangan Meteal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	799.951.000,00	791.513.000,00	(1.537.000,00)	(0,19)

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
11	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.644.919.036,00	1.623.525.300,00	(21.394.606,00)	(1,31)
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	332.648.000,00	331.610.225,00	(1.026.775,00)	(0,31)
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-	0,00
14	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-	-	-	#DIV/0!
15	Kecamatan Bukit Raya	403.186.625,00	398.066.980,00	(5.119.645,00)	0,00
16	Kecamatan Payung Sekaki	100.000.000,00	99.400.000,00	(600.000,00)	(0,60)
17	Kecamatan Rumbai Pesisir	1.013.260.000,00	1.008.797.000,00	(4.486.000,00)	(0,44)
18	Kecamatan Binawidya	-	-	-	#DIV/0!
Jumlah		96.922.266.444,00	94.006.938.240,85	(1.915.328.195,94)	(2,04)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

c. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Tahun Anggaran 2023, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.35. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	91.411.648.964,00	89.364.516.363,02	(2.047.272.200,98)	97,76	77.414.113.563,52
2	Belanja Modal Bangunan Air	35.074.075.150,00	35.615.948.900,00	(2.458.126.250,00)	93,54	27.319.669.964,47
3	Belanja Modal Instalasi	4.968.173.820,00	3.227.298.419,00	(1.740.883.401,00)	64,96	347.705.000,00
4	Belanja Modal Jaringan	-	-	-	—	15.172.191.000,00
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	-	-	-	—	965.128.000,00
Jumlah		134.454.097.534,00	128.207.813.682,02	(6.246.283.851,98)	95,35	121.218.807.527,99

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.1.35 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp128.207.813.682,02 atau 95,35% dari anggaran sebesar Rp134.454.097.534,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp6.989.006.154,03 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp121.218.807.527,99.

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.1.36. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dinas Kesehatan	300.000.000,00	196.153.000,00	(1.847.000,00)	(0,93)
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.675.512.714,00	14.298.888.582,00	(1.677.684.131,98)	(11,73)
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	117.155.896.000,00	112.896.692.800,00	(4.486.103.200,00)	(3,89)
4	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	251.705.000,00	251.300.000,00	(485.000,00)	0,00
5	Dinas Ketahanan Pangan	171.700.000,00	170.398.000,00	(302.000,00)	(0,17)
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	968.173.020,00	822.330.000,00	(85.843.020,00)	(13,11)
7	Sekretariat Daerah	125.809.000,00	124.071.300,00	(926.700,00)	(0,73)
Jumlah		134.454.897.734,00	129.207.813.682,02	(6.248.283.051,98)	(4,87)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Modal aset tetap lainnya pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.37.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Taman Perpustakaan	44.125.000,00	43.807.000,00	(317.000,00)	99,28	886.263.200,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	33.772.000,00	28.527.000,00	(5.245.000,00)	84,47	83.783.900,00
3	Belanja Modal Tanaman	-	-	-	—	99.200.000,00
4	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	-	-	-	—	-
5	Belanja Modal Hewan	-	-	-	—	-
6	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	130.000.000,00	129.257.000,00	(743.000,00)	99,43	1.255.905.000,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Berwujud	1.979.000.000,00	1.673.370.760,00	(305.629.240,00)	84,56	809.359.140,00
8	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	14.545.253.323,00	14.743.457.723,00	198.204.200,00	101,36	8.717.509.161,00
9	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	175.701.000,00	167.990.000,00	(7.711.000,00)	95,61	523.600.000,00
Jumlah		16.907.852.323,00	16.786.410.073,00	(121.442.258,00)	99,28	12.215.030.401,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.1.37 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp16.786.410.073,00 atau 99,28% dari anggaran sebesar Rp16.907.852.323,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp4.571.379.672,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp12.215.030.401,00.

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.1.38. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	9.645.350.625,00	9.743.457.722,00	198.359.200,00	1,34
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	383.772.000,00	170.510.000,00	(205.262.000,00)	(114,59)
4	Badan Perenggalangan Rencana Daerah	130.000.000,00	129.257.800,00	(742.000,00)	(0,57)
5	Dinas Perumahan	130.000.000,00	128.676.750,00	(1.322.250,00)	0,00
6	Dinas Perhubungan	175.791.500,00	167.580.000,00	(7.711.500,00)	(4,59)
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	44.135.000,00	43.817.600,00	(317.400,00)	(0,72)
8	Sekretariat DPRD	651.000.000,00	649.467.000,00	(1.533.000,00)	(0,24)
9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	196.000.000,00	97.680.000,00	(98.320.000,00)	(100,66)
	Badan Pendapatan Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	-	0,00
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sertan daya Manusia	248.000.000,00	244.480.000,00	(3.600.000,00)	(1,47)
13	Inspektorat Daerah	75.000.000,00	74.370.000,00	(630.000,00)	(0,85)
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	80.000.000,00	79.800.000,00	(200.000,00)	(0,25)
Jumlah		11.987.052.125,00	10.796.401.072,00	(121.442.250,00)	(0,72)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

e. Belanja Modal Aset Lainnya.

Belanja Modal aset lainnya pada Tahun Anggaran 2023 adalah merupakan Belanja Modal Aset lainnya dengan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp148.005.000,00 atau 99,79% dari anggaran sebesar Rp148.315.000,00 yang berada pada Dinas Kesehatan sebesar Rp48.840.000,00 dan Dinas Perhubungan sebesar Rp99.165.000.00, dan mengalami kenaikan sebesar Rp39.766.000,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp108.239.000,00.

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
701.126.257,00	964.331.717,00

Belanja tidak terduga dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah.Belanja tidak terduga juga dapat digunakan untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada Tahun-Tahun sebelumnya.Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dipergunakan untuk:

Tabel 5.1.39. Rencana dan Realisasi Belanja Tidak Terduga

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi BTT 2023
1	2	3
1	Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau TA. 2022 yang Dialokasikan Pada Tahun Anggaran 2023 sesuai SK Walikota Nomor 22 Tahun 2023 Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana	26.126.257,00
2	SPJ TU BTT Santunan Kematian Tahap I	500.000.000,00
3	Pembayaran Belanja Tak Terduga Untuk Pengembalian Pajak Daerah Lebih Bayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan An. Arif Budi Prasetia Tahun Anggaran 2022 yang Dialokasikan Pada TA. 2023	1.000.000,00
4	SPJ TU BTT Santunan Kematian Tahap II Ke Dinas Sosial	350.000.000,00
5	SPJ TU BTT Santunan Kematian Tahap III	30.000.000,00
Jumlah		701.126.257,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.1.39 di atas menunjukkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp761.126.257,00 atau 9,08% dari anggaran sebesar Rp8.383.324.782,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp203.205.460,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp964.331.717,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga sesuai dengan Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Tahun 2023, penanganan Bencana Alam-Banjir, dan pengembalian terhadap lebih setor pendapatan. Sedangkan pada tahun 2023, realisasi Belanja Tidak Terduga merupakan tindaklanjut arahan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan dan jajarannya, Pemerintah Provinsi melalui Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah, serta pengembalian terhadap lebih setor pendapatan.

5.1.3. SURPLUS/DEFISIT

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
4.346.556.237,00	(13.419.612.300,70)

Surplus terjadi apabila realisasi pendapatan daerah lebih besar dari realisasi belanja daerah dan sebaliknya terjadi defisit. Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023 menganggarkan surplus/defisit sebesar Rp5.311.740.809,00 namun dalam realisasinya surflus sebesar Rp4.346.568.237,00. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 terjadi kenaikan realisasi surflus sebesar Rp17.766.170.538,70 dari realisasi Tahun lalu sebesar defisit sebesar minus Rp13.419.795.900,70.

5.1.4. PEMBIAYAAN

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
4.688.259.191,91	28.107.871.492,61

Pembiayaan Netto menunjukkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp4.688.259.191,91 dari anggaran sebesar minus Rp5.311.740.809,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp23.419.612.300,70 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp28.107.965.492,00. Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama ditujukan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
14.688.259.191,91	30.957.871.492,61

Penerimaan pembiayaan menunjukkan realisasi Tahun 2023 realisasi sebesar Rp14.688.259.191,91 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp14.688.259.191,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp16.269.612.300,70 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp30.957.965.492,00.

5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
10.000.000.000,00	2.850.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru menunjukkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp20.000.000.000,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.850.000.000,00.

5.1.5. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
9.034.817.428,91	14.688.259.191,91

Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiKPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Pekanbaru pada Tahun Anggaran 2023 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp9.034.817.428,91 dengan penurunan realisasi sebesar Rp5.653.441.763,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 dengan realisasi SiLPA sebesar Rp14.688.259.191,91. Komponen SiLPA Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

Tabel 5.1.40. Komponen SiLPA

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
1.	Saldo Kas di BUD	3.266.103.751,40	8.542.039.915,40
2.	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	620,794.242,00	1.044.471.384,00
3.	Saldo Kas BOK	1.206.997.346,00	
4.	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	29,174,754,00	379.382.391,00
5.	Saldo Kas di Bendahara BOS	31,763.016,00	105.835.536,00
6.	Pendapatan Jasa giro belum diterima namun dipotong Bank	15.000,00	15.000,00
7.	Saldo Kas Blud Dinas Kesehatan & Kas Blud Dinas Perhubungan	3.877.969.319,51	4.616.514.965,51
Jumlah		**9.034.817.428,91**	**14.688.259.191,91**

Sumber:Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

5.2 PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
14.688.259.191,91	30.957.965.492,61

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya dan Tahun Anggaran berkenaan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp14.688.259.191,91 dan SAL Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp30.957.965.492,61.

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

Tabel 5.2.1 Komponen Saldo Lebih Awal Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	01 Januari 2023	01 Januari 2022
1	Saldo Kas di BUD	8.542.039.915,40	275.417.815,90
2	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	1.044.471.384,00	77.538.000,00
3	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Lainnya (Pajak	-	212.282.445,00
4	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	576.382.361,00	12.988.080,00
5	Saldo Kas di Bendahara BLUD/JKN	-	-
6	Pendapatan Jasa giro belum diterima namun dipotong Bank	15.000,00	-
7	Saldo Kas BLUD Puskesmas, RS Medani, Blud Parkir & Transmetro	4.616.514.965,51	29.646.952.412,21
8	Saldo Kas di Bendahara BOS	105.835.539,00	732.786.739,50
Jumlah		14.688.259.191,91	30.957.965.492,61

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
14.688.259.191,91	30.957.871.492,61

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun Berjalan merupakan saldo anggaran lebih yang telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan Tahun berjalan. Tahun Anggaran 2023 penggunaan SAL merupakan penerimaan pembiayaan Tahun berjalan sebesar Rp14.688.259.191,91 dan mengalami penurunan sebesar Rp16.269.706.300,70 atau 52,55% dibandingkan dengan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp30.957.871.492,61.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
9.034.817.428,91	14.688.259.191,91

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) merupakan selisih lebih/kurang realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. SiLPA Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.034.817.428,91 dan mengalami penurunan sebesar Rp5.653.441.763,00 atau 38,49% dibandingkan dengan SiLPA Tahun 2022 sebesar Rp14.688.259.191,91.

Perhitungan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan (SiLPA/SiKPA) dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.2. PerhitunganSiLPA

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
1	Pendapatan Asli Daerah	890.286.800.690,38	799.021.514.425,65
2	Pendapatan Transfer	1.862.857.987.731,00	1.680.225.655.620,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-
4	Jumlah Pendapatan (1 s.d. 3)	2.753.144.818.421,38	2.479.247.370.045,65
5	Belanja Operasi	2.432.229.609.263,50	2.163.366.664.652,36
6	Belanja Modal	316.807.494.723,88	328.336.986.976,99
7	Belanja Tak Terduga	761.126.257,00	964.331.717,00
8	Transfer	-	-
9	Jumlah Belanja (5 s.d. 8)	2.748.798.260.184,38	2.492.668.982.346,35
10	Penerimaan Pembiayaan	14.688.259.191,91	30.957.871.492,61
11	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	2.890.000.000,00
12	Pembiayaan Neto (10 - 11)	4.688.259.191,91	28.107.871.492,61
SILPA/SIKPA (4 - 9 + 12)		**9.034.817.428,91**	**14.688.259.191,91**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
0,00	94.000,00

Koreksi Kesalahan Pembukuan Silpa tahun Sebelumnya Akhir Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp94.000,00

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
9.034.817.428,91	14.688.259.191,91

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2023 sebesar Rp9.034.817.428,91 dibandingkan dengan SiLPA Tahun 2022 sebesar Rp14.688.259.191,91 dan mengalami penurunan Rp5.653.441.763,00 atau 38,49% dibandingkan dengan SiLPA Tahun 2022 sebesar Rp14.688.259.191,91.

5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset mencakup seluruh sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang memiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Kewajiban merupakan utang yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang. Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban.

5.3.1 ASET

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
8.305.159.239.962,61	8.147.874.843.515,61

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Tahun 2023 jumlah aset Pemerintah Kota Pekanbaru sebesar Rp8.305.159.239.962,61 dan mengalami kenaikan sebesar Rp157.284.396.447,00 atau 1,93% dibandingkan dengan Tahun 2022 jumlah aset sebesar Rp8.147.874.843.515,61. Aset Pemerintah Kota Pekanbaru terbagi dalam rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1. Rincian Aset

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	Persentase (%)
1	Aset Lancar	548.454.030.485,53	375.540.322.345,74	172.913.708.139,79	46,04
2	Investasi Jangka Panjang	184.356.466.061,90	192.690.755.929,80	(8.334.289.867,90)	(4,33)
3	Aset tetap	7.520.987.926.817,43	7.079.094.831.794,61	(57.126.794.977,18)	(0,81)
4	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	-
5	Aset Lainnya	551.380.816.567,75	501.549.129.445,46	49.831.687.152,29	9,94
Jumlah		8.305.159.239.962,61	8.147.874.843.515,61	157.284.396.447,00	1,93

Sumber : Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru

5.3.1.1. Aset Lancar

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
548.454.030.485,53	375.540.322.345,74

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Tahun 2023 total aset lancar Pemerintah Kota Pekanbaru sebesar, Rp548.454.030.485,53 dan mengalami kenaikan sebesar Rp172.913.708.139,79

atau 46,04% dibandingkan dengan Tahun 2022 total aset lancar sebesar Rp375.540.322.345,74. Aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru pada tanggal 31 Desember 2023 terdiri dari:

Tabel 5.3.2. Rincian Aset Lancar

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Kas dan Setara Kas	9.357.550.537,21	15.305.859.685,91	(5.948.309.148,70)	(38,86)
2	Piutang Pajak Daerah	724.527.383.240,00	607.996.247.690,00	116.531.135.550,00	19,17
3	Piutang Retribusi Daerah	6.475.259.242,00	6.631.584.012,00	(843.675.230,00)	14,98
4	Piutang Laba/an PAD yang Sah	9.788.103.013,70	9.726.158.280,70	61.944.813,00	0,64
5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
6	Piutang Transfer Antar Daerah	35.412.084.524,00	24.037.615.280,00	11.374.469.244,00	47,32
7	Piutang Lainnya	1.857.721.949,25	787.196.524,00	1.070.555.425,25	136,00
8	Penyisihan Piutang	(404.743.212.196,20)	(423.632.712.883,00)	18.889.500.686,80	(4,46)
9	Beban dibayar dimuka	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00
10	Persediaan	165.674.080.105,57	135.980.403.786,13	29.693.646.320,44	22,19
Jumlah		548.454.030.495,53	375.540.322.345,74	172.913.708.150,79	46,04

Sumber : Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru

5.3.1.1.1. Kas dan Setara Kas

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
9.357.550.537,21	15.305.859.685,91

Kas dan Setara Kas merupakan pos neraca yang paling likuid. Pos ini menunjukkan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOS dan Kas Lainnya serta Jasa Bongkar Tiang Reklame yang dititipkan di Kas Lainnya Pemko yang belum jatuh tempo.

Saldo kas yang tertera pada neraca sebagian menunjukkan hak Pemerintah Kota Pekanbaru yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan sebagian merupakan uang titipan sebagai Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) berupa pajak yang belum disetorkan serta pendapatan yang belum disetorkan pada 31 Desember 2023. Adapun realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp9.357.550.537,21 dan mengalami penurunan 5.948.309.148,70 atau 38,86% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp15.305.859.685,91 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.3. Rincian Kas dan Setara Kas

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Kas di Kas Daerah	3.266.103.781,40	8.542.039.915,40	(5.275.936.134,00)	(61,76)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	29.174.754,00	379.362.391,00	(350.207.637,00)	(92,31)
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	520.794.242,00	1.044.471.384,00	(423.677.142,00)	(40,56)
4	Kas di BLUD	3.677.969.319,81	4.616.514.065,61	(738.943.646,00)	(16,00)
5	Kas di Bendahara BOS	51.763.016,00	166.835.536,00	(74.072.520,00)	(68,99)
7	Kas Lainnya	322.748.109,30	617.615.494,00	(294.867.385,70)	(47,74)
8	Kas Dana BOK Puskesmas	1.208.997.340,00	0,00	1.208.997.340,00	0,00
Jumlah		9.357.550.537,21	15.305.859.685,91	(5.948.309.148,70)	(38,86)

Sumber : Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
3.266.103.751,40	8.542.039.915,40

Kas di Kas Daerah menunjukkan keberadaan saldo Kas Daerah Kota Pekanbaru per 31 Desember 2023. Kas pada Kas Daerah yang disimpan pada rekening giro Nomor 107.02.01730 PT.Bank Riau Kepri, dengan saldo kas Tahun 2023 sebesarRp2.688.055.265,40 dan pada PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp578.048.486,00 sehingga total Kas Daerah sebesar Rp3.266.103.751,40. Nilai Kas Daerah mengalami penurunan sebesar Rp5.275.936.164,00 atau 61,76%. dibanding dengan Tahun 2022 sebesar Rp8.542.039.915,40.

Tabel 5.3.4. Mutasi Kas di Kas Daerah/BUD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Tambah	Kurang	Saldo Akhir
1	Kas di Kas Daerah/BUD	8.542.039.915,40	2.540.833.948.174,02	2.546.109.884.338,02	3.266.103.751,40
Jumlah		8.542.039.915,40	2.540.833.948.174,02	2.546.109.884.338,02	3.266.103.751,40

Sumber : Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 terdapat ketidaksamaan pencatatan pada Buku Kas Umum Daerah dengan Rekening Koran Kas Umum Daerah dimana saldo menurut rekening koran PT. Bank Riau Kepri tercatat sebesar Rp2.703.823.087,40 sedangkan saldo menurut Buku Kas Umum Daerah adalah sebesar Rp2.688.055.265,40 sehingga terdapat selisih sebesar Rp15.767.822,00 untuk itu dilakukan penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi Bank atas selisih tersebut dengan rincian dapat dilihat di daftar Lampiran 4.

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
29.174.754,00	379.382.391,00

Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo kas yang masih berada di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 belum disetor ke Bendahara Umum Daerah sebesar Rp29.174.754,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp350.207.637,00 atau 92.31,00% dari saldo kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp379.382.391,00.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan posisi per 31 Desember 2023 terdiri atas antara lain saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah yang merupakan Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak PBB, sebesar Rp27.915.139,00 dan pada Dinas Perhubungan yang merupakan Jasa Giro di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan UPT Pelayanan Kepelabuhan sebesar Rp2.017,00 dan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang merupakan Retribusi Pelayanan Persampahan sebesar Rp74.878,00 seta pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang merupakan Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp.1.182.720,00 yang sudah diterima pada rekening Bendahara Penerimaan, namun sampai dengan 31 Desember 2023 belum disetorkan ke Kas Daerah.

Mutasi Kas di Bendahara Penerimaan selama Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.3.5. Mutasi Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Perhubungan	3.453.525,00	2.017,00	3.453.525,00	2.017,00
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	945.201,00	74.676,00	945.201,00	74.676,00
3	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	1.182.720,00		1.182.720,00
4	Badan Pendapatan Daerah	375.083.665,00	27.916.130,00	375.083.665,00	27.916.130,00
Jumlah		379.382.391,00	29.174.794,00	379.382.391,00	29.174.794,00

Sumber : Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
620.794.242,00	1.044.471.384,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD Kota Pekanbaru Tahun 2023 yang belum disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah Kota adalah sebesar Rp620.794.242,00 dan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp1.044.471.384,00, terdapat penurunan sebesar Rp423.677.142,00 atau 40,56%.

Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran berupa Uang Yang Harus Disetor (UYHD) selama Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.3.6. Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai	Penyetoran ke Kas Daerah	
			No. STS	Tanggal
UYHD Per Tanggal 31 Desember 2022				
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.039.969.680,00	00005/2.11.0.00.0.00.01/STS/2023 dan 00009/2.11.0.00.0.00.01/STS/2023	10 Januari 2023 dan 11 Januari 2023
2	Dinas Perbanahan	3.576.190,00	00001/2.10.0.00.0.00.01/STS/2023	06 Januari 2023
3	Kecamatan Binawidya	923.300,00	00001/7.01.0.00.0.00.11/STS/2023	30 Januari 2023
Jumlah		1.044.471.384,00		
UYHD Per Tanggal 31 Desember 2023				
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	620.794.216,00	00003/2.11.0.00.0.00.01/STS/2024, 00005/2.11.0.00.0.00.01/STS/2024, 00028/2.11.0.00.0.00.01/STS/2024, 00038/2.11.0.00.0.00.01/STS/2024 dan 00053/2.11.0.00.0.00.01/STS/2024	01 Januari 2024, 26, 27, 29 Februari 2024 dan 8 Maret 2024
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26,00	00001/1.26.2.22.0.00.01/STS/2024	12 Januari 2024
Jumlah		620.794.242,00		

Sumber : Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru

5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
3.877.969.315,51	4.616.514.965,51

Kas di Bendahara BLUD Tahun 2023 sebesar Rp3.877.969.319,51 mengalami penurunan sebesar Rp738.545.646,00 atau 16,00% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp4.616.514.965,51.

Saldo Kas di Bendahara BLUD merupakan sisa kas Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas yang terdiri atas 21 Puskesmas di bawah koordinasi Dinas Kesehatan, BLUD RSD Madani dan sisa Kas BLUD Dinas Perhubungan. Rincian Sisa Kas BLUD sebagai berikut:

Tabel 5.3.7. Rincian Sisa Kas BLUD Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	OPD	Keterangan	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	BLUD Puskesmas dan RSUD Madani	2.559.819.047,07
2	Dinas Perhubungan	BLUD Parkir dan BLUD Transmetro	1.318.150.272,44
Jumlah			3.877.969.319,51

Sumber : Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru

Rincian penerimaan dan pengeluaran pada BLUD Kota Pekanbaru dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.3.8. Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada BLUD Kota Pekanbaru Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Puskesmas	Saldo Awal	Penerimaan Dana Jasa Pelayanan Umum	Pengeluaran Dana Jasa Pelayanan Umum	Sisa Kas
1	SIMPANG TIGA	34.629.144,58	2.135.657.082,00	1.865.690.245,00	304.795.981,58
2	RISDOMULYO	113.692.561,00	986.291.070,00	1.095.805.781,00	13.177.849,00
3	TENAYAN RAYA	23.009.539,50	1.823.160.939,00	1.409.633.544,00	47.548.934,00
4	KARYA WANITA	167.483.808,00	1.106.224.542,00	1.178.747.543,00	94.960.527,00
5	REMBIA FAJAR	24.884.113,00	523.460.894,00	469.416.375,00	80.968.929,00
6	LANGSAT	157.488.013,70	589.820.838,00	561.596.708,00	185.676.942,70
7	MELUR	83.159.373,36	971.575.510,00	1.000.728.841,71	54.006.041,65
8	SENAPELAN	156.347.944,00	1.199.020.313,00	1.138.420.488,00	186.947.769,00
9	RUMBAI	10.775.785,52	1.163.800.050,00	1.127.440.297,00	46.944.548,52
10	UMBAN SARI	109.742.256,00	1.351.906.998,00	1.288.388.126,00	173.260.728,00
11	RUMBAI BUKIT	43.213.741,32	337.878.707,00	374.628.024,00	6.298.424,32
12	PAYUNG SEKAKI	234.825.526,42	1.758.791.005,00	1.756.926.167,00	236.690.364,42
13	SIMPANG BARU	46.515.317,50	637.038.369,00	535.286.094,00	48.267.592,50
14	SIDOMULYO TU	118.067.666,00	1.899.876.160,00	1.586.448.792,00	231.495.053,00
15	GARUDA	204.991.221,00	1.435.618.200,00	1.450.090.208,00	190.509.213,00
16	HARAPAN RAYA	208.343.390,38	1.212.536.364,00	1.295.369.434,00	125.510.320,38
17	SAIL	34.451.267,00	949.556.447,00	977.534.834,00	6.472.880,00
18	PEKISARI	7.097.663,00	2.595.282.572,00	2.442.762.950,00	159.617.585,00
19	LIMA PULUH	54.543.506,00	1.116.429.808,00	1.093.347.349,00	77.505.965,00
20	PSKMBARU KOTA	97.708.391,00	986.574.433,00	1.082.483.416,00	11.832.408,00
21	SAPTA TARUNA	191.816.078,00	886.792.035,00	936.543.290,00	155.064.823,00
22	RSD MADANI	22.409.615,50	7.092.025.581,71	6.982.034.691,00	132.399.516,21
23	BLUD PARKIR	2.172.644.786,64	14.143.417.311,00	8.029.852.508,00	1.286.209.589,44
24	BLUD TRANSMETRO	266.219.042,00	6.240.375.123,00	5.506.930.462,00	31.940.693,00
Jumlah		4.616.514.965,51	51.644.847.641,71	42.383.393.287,71	3.877.969.319,51

Sumber : Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru TA.2023

Kas tersebut terdapat pada rekening bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran BLUD Puskesmas, BLUD Parkir dan BLUD Transmetro. Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas memiliki 3 (tiga) rekening masing-masing untuk menampung dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dana dari APBD Kota Pekanbaru, dan rekening untuk menampung penerimaan Retribusi Kesehatan, sedangkan Bendahara Pengeluaran BLUD memiliki satu rekening.

5.3.1.1.1.5 Kas di Bendahara BOS

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
31.763.016,00	105.835.536,00

Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 merupakan dana yang masih berada di tangan Bendahara Dana BOS sebesar Rp31.763.016,00 dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp105,835.536,00 atau terdapat penurunan sebesar Rp74.072.520,00atau 69,99%.

Rincian realisasi Penerimaan dan Belanja Dana BOS,dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.3.9. Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana BOS Tahun 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	PENERIMAAN TA 2023	PENERIMAAN HIBAH	PENERIMAAN JASA GIRO BANK TAHUN 2023	TOTAL PENERIMAAN TA 2023	PENGELUARAN JASA GIRO BANK TAHUN 2022 S/D TAHUN 2022	PENGELUARAN HIBAH	EXPERT JASA GIRO BANK YANG DI TARIK OTOMATIS OLEH KASDA TAHUN 2023	BELANJA TA 2023	TOTAL PENGELUARAN TA 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
1	SD Negeri	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	SMP Negeri	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Jumlah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sumber : Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru

Kas di tangan Bendahara Dana BOS sebesar Rp.31.763.016,00 termasuk pengembalian temuan inspektorat yang belum di setor ke Kasda pada SD Negeri 180 Pekanbaru sebesar Rp. 4.800.000,00 dan Jasa Giro Bank Dana BOS Tahun 2023 yang belum di setor ke Kasda pada tahun 2023 sebesar Rp. 109.559,00.

Tabel 5.3.10. Jasa Giro Bank Dana BOS Tahun 2023 belum di setor ke Kas Daerah

(dalam rupiah)

NO	SEKOLAH	PENERIMAAN JASA GIRO BANK TAHUN 2023	EXPERT JASA GIRO BANK YANG DI TARIK OTOMATIS OLEH KASDA TAHUN 2023	Jasa Giro Tahun 2023 belum di setor ke Kasda
1	SD Negeri	33.981.005,00	33.969.592,00	11.413,00
2	SMP Negeri	17.430.253,00	17.332.107,00	98.146,00
Jumlah		51.411.258,00	13.939.270,00	109.559,00

Sumber : Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru

Rincian jumlah Jasa giro Dana Bos Tahun Anggaran 2023 yang belum di setor ke kasda, dirinci sebagai berikut;

1. SD Negeri 196 Pekanbaru sebesar Rp.11.413,00
2. SMP Negeri 46 Pekanbaru sebesar Rp.93.142,00
3. SMP Negeri sebesar Rp.8,00
4. SMP Negeri sebesar Rp.4.996,00

Rincian jumlah Penerimaan Dana Bos Tahun Anggaran 2023, dirinci sebagai berikut;

Tabel 5.3.11. Rincian Realisasi Penerimaan Dana BOS Tahun 2023

(dalam rupiah)

NO	SEKOLAH	SALDO PER 31 DESEMBER 2022 (Rp)	PENDAPATAN TA 2023 (Rp)	PENERIMAAN NON BOS	PENERIMAAN JASA GIRO BANK TAHUN 2023	TOTAL PENERIMAAN TA 2023 (Rp)
1	SD Negeri	30.036.161,00	66.953.106.828,00	8.007.497,00	33.981.005,00	67.026.133.291,00
2	SMP Negeri	75.797.375,00	35.623.394.066,00	33.542.000,00	17.430.253,00	35.750.163.694,00
Jumlah		105.835.536,00	102.576.500.894,00	42.549.497,00	51.411.258,00	102.776.296.985,00

Sumber : Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru

Rincian jumlah Pengeluaran Dana Bos Tahun Anggaran 2023, dirinci sebagai berikut;

Tabel 5.3.12. Rincian Realisasi Belanja Dana BOS Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	B. BARANG & JASA	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	Total Belanja Dana Bos
1	SD Negeri	52.913.932.780,00	4.533.618.155,00	9.525.989.523,00	66.973.540.458,00
2	SMP Negeri	27.420.340.794,00	3.017.275.296,00	5.217.468.200,00	35.655.084.290,00
Jumlah		80.334.273.574,00	7.550.893.451,00	14.743.457.723,00	102.628.624.748,00

Sumber : Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru

Penjelasan lebih lanjut mengenai penerimaan dan belanja BOS diuraikan dalam Laporan Operasional pada bagian penerimaan dan belanja.

5.3.1.1.1.6 Kas Lainnya

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
322.748.106,50	617.615.404,00

Saldo Kas Lainnya sampai dengan 31 Desember 2023 merupakan utang pajak yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2023 yaitu pajak BLUD, pajak dana BOS dan Jasa Bongkar Tiang Reklame yang belum jatuh tempo dititipkan di Kas Lainnya Pemko sebesar Rp.115.351.927,50 yang ada di BAPPENDA .

Pajak yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.3.13. Pajak yang belum disetor per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	SKPD	PPN	PPh Ps 21	PPh Ps 22	PPh Ps 23	PPh Ps 4	Pajak Restoran	Jumlah
1	Dinas Pendidikan (BOS)	608.961,38	330.000,00	-	513.480,00	-	5.027.500,00	6.481.961,38
2	Dinas Perhubungan	1.247.400,00	-	170.100,00	-	-	-	1.417.500,00
3	Dinas Kesehatan (BPJS Mutiara)	134.446.575,00	40.695.326,00	13.172.319,14	1.829.850,00	7.083.044,00	2.172.000,00	199.496.719,80
Jumlah		136.294.936,38	41.032.926,00	13.342.419,14	2.443.330,00	7.083.044,00	7.199.500	207.396.180,00

Sumber : Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru

Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran Lainnya selama Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.3.14. Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran Lainnya Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan	183.685.345,00	6.481.961,00	183.685.345,00	6.481.961,00
2	Dinas Kesehatan	44.106.403,00	199.496.719,80	44.106.403,00	199.496.719,80
3	Dinas Tenaga Kerja	2.175.000,00	-	2.175.000,00	-
4	Sekretariat DPRD	387.648.746,00	-	387.648.746,00	-
5	Dinas Perhubungan	-	1.417.500,00	-	1.417.500,00
Jumlah		617.615.494,00	207.396.180,80	617.615.494,00	207.396.180,80

Sumber : Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru

Pada 31 Desember 2023, masih adanya Kas di Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan tercatat Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebesar Rp3.343.825.000,00. Atas belanja ini, sudah selesai ditransfer dan direalisasikan pada 2 Januari 2024. Selain itu, pada Rekening Koran pada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan, tercatat Belanja Jasa Bimbingan Teknis sebesar Rp2.600.00, Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara dan Panitia sebesar Rp3.135.000,00 dan Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp875.000,00 atas belanja ini juga sudah ditransfer atau direalisasikan pada 10 Januari 2024.

5.3.1.1.1.7 Kas Dana BOK Puskesmas

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
1.208.967.346,00	0,00

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas sampai dengan 31 Desember 2023 merupakan Sisa Kas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru. Rincian penerimaan dan pengeluaran pada Kas Bantuan Operasional Kesehatan pada BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.3.15. Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada BLUD Puskesmas Kota Pekanbaru Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Puskesmas	Saldo Awal	Penerimaan Dana BOK	Pengeluaran Dana BOK	Sisa Kas
1	SIMPANG TIGA	-	393.179.000,00	333.006.856,00	60.172.144,00
2	RISDOMULYO	-	406.493.000,00	359.938.352,00	46.554.648,00
3	TENAYAN RAYA	-	400.815.000,00	355.683.847,00	45.131.153,00
4	KARYA WANITA	-	381.931.000,00	356.085.536,00	25.845.464,00
5	REMBIA FAJAR	-	390.988.000,00	350.306.209,00	40.681.791,00
6	LANGSAT	-	407.346.000,00	269.883.000,00	137.463.000,00
7	MELUR	-	370.340.000,00	307.048.356,00	63.291.644,00
8	SENAPELAN	-	353.583.000,00	259.170.519,00	94.412.481,00
9	RUMBAI	-	413.992.000,00	358.668.182,00	55.323.818,00
10	UMBAN SARI	-	363.193.000,00	279.205.987,00	83.987.013,00
11	RUMBAI BUKIT	-	288.880.500,00	176.893.615,00	91.986.885,00
12	PAYUNG SEKAKI	-	354.117.000,00	257.880.145,00	96.236.855,00
13	SIMPANG BARU	-	436.974.000,00	360.817.659,00	76.156.341,00
14	SIDOMULYO RJ	-	359.446.000,00	340.637.572,00	18.808.428,00
15	GARUDA	-	383.921.000,00	376.580.086,00	7.340.914,00
16	HARAPAN RAYA	-	414.840.000,00	374.134.390,00	40.705.610,00
17	SAIL	-	363.321.000,00	314.220.684,00	49.100.316,00
18	REJOSARI	-	383.338.000,00	336.204.602,00	47.133.398,00
19	LIMA PULUH	-	373.500.000,00	326.583.901,00	46.916.099,00
20	PEKANBARU KOTA	-	363.046.000,00	287.917.453,00	75.128.547,00
21	SAPTA TARUNA	-	420.849.000,00	376.628.203,00	44.220.797,00
Jumlah		-	**6.065.892.500,00**	**6.796.895.154,00**	**1.268.997.346,00**

Sumber : Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru TA.2023

Investasi Jangka Pendek

Piutang

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
373.317.429.841,75	**224.546.058.873,70**

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Saldo Piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp373.317.429.841,75. Nilai tersebut merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) dari nilai bruto sebesar Rp778.060.642.037,95 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp404.743.212.196,20.

Adapun rincian Piutang Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2023 terdiri atas:

Tabel 5.3.16. Rincian Piutang

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL		TAMBAH/KURANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR	% KENAIKAN/ PENURUNAN
		TAMBAH	KURANG	PENAMBAHAN	PEMBAYARAN		
1	2	3	4	5	6	7=2+3-4+5-6	8
Piutang Pajak Daerah	607.996.247.690,00	2.053.041.000,00	60.282.877.144,00	196.846.721.385,00	25.736.810.432,00	724.527.353.249,00	19,17
Piutang Retribusi Daerah	5.631.084.012,00	1.117.682.900,00	-	948.948.138,00	1.273.196.736,00	6.475.268.342,00	14,99
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	8.730.158.280,79	9.222.227,00	-	1.184.825.988,00	1.191.900.132,00	8.732.183.613,79	0,04
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	123.000,00		123.000,00	-
Piutang Transfer Antar Daerah	34.237.315.282,00	-	-	33.413.284.321,00	25.837.815.280,00	35.812.784.321,00	47,32
Piutang Lainnya	781.984.034,00	1.902.980.429,26	-	-	252.000.000,00	1.951.771.949,29	138,09
Penyisihan Piutang	- 425.833.712.883,00	902.953.217,00	- 41.117.312.623,45	- 22.558.087.227,67	- 1.212.238.516,00	- 404.745.202.156,22	6,40
JUMLAH	235.346.968.513,79	4.979.949.946,26	19.275.564.520,55	214.958.845.644,33	51.119.287.064,00	373.317.409.841,79	58,29

Sumber: Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru

5.3.1.1.2. Piutang Pajak Daerah

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
724.527.353.249,00	607.996.247.690,00

Saldo Piutang Pajak Daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2023 sebesar Rp724.527.353.249,00 mengalami peningkatan sebesar Rp116.531.105.559,00 atau 19,17% dibandingkan dengan piutang tahun 2022 sebesar Rp607.996.247.690,00. Akun piutang pajak merupakan selisih antara nilai pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.17. Rincian Per Objek Piutang Pajak Daerah

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL		TAMBAH/KURANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR	% KENAIKAN/ PENURUNAN
		TAMBAH	KURANG	PENAMBAHAN	PEMBAYARAN		
1	2	3	4	5	6	7=2+3-4+5-6	8
Piutang Pajak Hotel	680.382.114,00	1.000,00	230.168.859,00	344.132.106,00	372.871.071,00	373.156.290,00	54,85
Piutang Pajak Restoran	3.080.784.370,00	-	731.904.859,00	3.694.672.904,00	727.331.697,00	5.866.661.620,00	90,40
Piutang Pajak Hiburan	181.357.912,00	-	194.679.859,00	13.307.059,00	18.599.912,00	13.307.059,00	- 92,61
Piutang Pajak Reklame	7.380.638.071,00	-	-	1.189.696.736,00	487.136.021,00	8.677.326.964,00	9,53
Piutang Pajak Penerangan Jalan	12.394.392,00	-	-	433.119,00	-	16.827.999,00	2,81
Piutang Pajak Air Tanah	539.148.524,00	-	-	80.421.192,00	17.209.224,00	602.360.492,00	12,79
Piutang Pajak Bunga dan Denda Penetapan dan Perhitungan (PBPT)	589.492.853.859,00	2.053.040.892,00	50.811.632.492,00	194.440.857.517,00	34.356.947.674,00	700.186.272.053,00	15,89
Piutang Dan Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.430.508.853,00	-	2.855.942.324,00	-	-	2.585.025.389,00	- 46,24
JUMLAH	607.996.247.690,00	2.053.041.892,00	60.282.877.144,00	196.846.721.385,00	35.719.916.485,00	734.027.353.249,00	19,17

Sumber :Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru

Definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak daerah tertuang dalam UU Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Aturan ini menggantikan UU Nomor. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor. 34 Tahun 2000.

Metode penghitungan nilai pajak untuk Pajak Daerah ada dua yaitu Metode *official-assesment dan* Metode *self-assesment.* Metode *official-assesment* antara lain Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2). Metode *official-assesment* Pendapatan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak Daerah diterbitkan. Metode *self-assesment* untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(BPHTB). Metode *self-assesment* Pendapatan diakui pada saat wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Saldo akhir piutang pajak per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp Rp724.527.353.249,00. Rincian penambahan dan pengurangan piutang pajak daerah selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.18. Penambahan dan Pengurangan Piutang Pajak Daerah

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL		TAMBAH/KURANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR	% KENAIKAN PENURUNAN
		TAMBAH	KURANG	PENAMBAHAN	PENGURANGAN		
1	2	3	4	5	6	7=2+3+4+5-6	8
Piutang Pajak Hotel	606.610.214,00	1.001,00	206.168.000,00	338.836.411,00	371.339.410,00	268.101.211,00	-55,81
Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	1.472.560,00	-	-	4.480.775,00	1.947.509,00	4.005.776,00	272,01
Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.897.405.031,00	-	731.304.000,00	3.425.259.912,00	660.507.599,00	4.930.753.343,00	70,15
Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	350.043.323,00	-	-	53.651.946,00	11.200.039,00	392.995.230,00	11,44
Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	472.953.027,00	-	-	210.053.091,00	90.501.997,00	592.504.121,00	30,44
Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya	-	-	-	241.000,00	-	241.000,00	-
Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	-	-	-	4.812.787,00	-	4.812.787,00	-
Piutang Pajak Tontonan Film	435.583,00	-	-	284.000,00	438.808,00	281.000,00	-55,71
Piutang Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	5.045.000,00	-	5.045.000,00	-	-	-	-100,00
Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	13.281.214,00	-	9.000.000,00	5.220.000,00	4.201.214,00	5.220.000,00	-68,70
Piutang Pajak Permainan Bilar dan Bowling	19.050.000,00	-	19.250.000,00	200.000,00	-	200.000,00	-98,95
Piutang Pajak Pertunjukan Kesenian Bernilai, dan Pertunjukan Kebangsaan	103.911.150,00	-	101.200.000,00	3.732.000,00	1.911.150,00	3.732.000,00	-96,39
Piutang Pajak Parkir Spa, Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	10.215.914,00	-	-	3.200.000,00	10.015.914,00	3.200.000,00	-67,67
Piutang Pajak Penyelenggara Diskotik	475.000,00	-	-	580.000,00	470.000,00	585.000,00	17,39
Piutang Pajak Hiburan Hiburan/Hiburan (Pi Hiburan) Megaline	7.766.565.396,00	-	-	1.147.553.013,00	467.136.523,00	8.420.985.886,00	8,43
Piutang Pajak Reklame Kain	224.236.353,00	-	-	37.936.153,00	-	257.275.540,00	11,09
Piutang Pajak Reklame Berjalan	4.553.522,00	-	-	247.581,00	-	5.000.803,00	3,11
Piutang Pajak Penerangan Jalan Dibutikan Sendiri	15.504.280,00	-	-	433.119,00	-	15.937.999,00	2,01
Piutang Pajak Air Tanah	632.946.525,00	-	-	85.421.183,00	17.939.224,00	607.428.483,00	-13,70
Piutang PBB	559.462.353.559,00	2.953.868.852,00	58.831.832.450,00	134.442.857.317,00	24.699.047.874,00	706.195.272.003,00	10,85
Piutang BPHTB-Pembetulan Hak	1.345.640.647,00	-	1.104.750.126,00	-	-	436.675.521,00	-31,06
Piutang BPHTB-Pembatalan Hak Baru	3.955.329.230,00	-	1.547.873.000,00	-	-	2.407.356.466,00	-39,11
JUMLAH	607.999.347.359,00	2.953.991.853,00	58.332.971.146,00	140.446.191.385,00	25.778.919.405,00	724.527.353.249,00	19,17

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang

Penjelasan atas koreksi penambah dan pengurang saldo piutang pajak daerah Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pada Piutang Pajak Hotel, di tahun 2022 terdapat saldo piutang sebesar Rp606.610.214,00. Adanya koreksi atas piutang sebesar Rp. 1.001.- dan penghapusan piutang sebesar Rp206.168.000,00. Sehingga saldo awal piutang 2023 menjadi Rp400.443.215,00.
2. Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya, pada tahun 2022 terdapat saldo piutang sebesar Rp2.897.405.031,00. Adanya koreksi atas piutang sebesar Rp1.950.000.00

dan penghapusan piutang sebesar Rp737.364.000,00. Sehingga saldo awal piutang 2023 menjadi Rp2.160.041.031,00.

3. Piutang Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan sejenisnya, terdapat koreksi pada saldo piutang awal berupa koreksi kurang sebesar Rp5.040.000,00 sehingga saldo piutang pajak pajak restoran dan sejenisnya menjadi Rp0,00.
4. Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan sejenisnya, terdapat koreksi pada saldo piutang awal berupa koreksi kurang sebesar Rp9.000.000,00 sehingga saldo piutang pajak pajak restoran dan sejenisnya menjadi Rp5.220.000,00.
5. Piutang Pajak Permainan Biliar dan Bowling, terdapat koreksi pada saldo piutang awal berupa koreksi kurang sebesar Rp49.250.000,00 sehingga saldo piutang pajak pajak restoran dan sejenisnya menjadi Rp350.000,00.
6. Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan, terdapat koreksi pada saldo piutang awal berupa koreksi kurang sebesar Rp101.380.000,00 sehingga saldo piutang pajak pajak restoran dan sejenisnya menjadi Rp3.732.600,00.
7. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Pada tahun 2022 terdapat saldo piutang sebesar Rp589.492.353.858,00. Adanya koreksi atas piutang sebesar Rp2.983.277.275,00 untuk pembayaran di luar piutang, koreksi karena faktor penambah ketetapan Rp10.563.527,00, koreksi karena faktor pengurang ketetapan Rp539.010.504,00 dan penghapusan piutang sebesar Rp56.092.821.946,00. Sehingga saldo awal piutang 2023 menjadi Rp535.854.362.210,00.
8. Piutang Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-Pemindahan Hak, terdapat koreksi kurang pada saldo piutang awal sebesar Rp1.104.769.126,00 sehingga saldo piutang pajak hotel menjadi Rp438.670.521,00.
9. Piutang Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-Pemberian Hak Baru, di tahun 2022 terdapat saldo piutang sebesar Rp3.955.229.036,00. Adanya penghapusan piutang sebesar Rp1.547.873.568,00. Sehingga saldo awal piutang 2023 menjadi Rp.2.407.355.468,00.

Bahwa memang benar Pemerintah Kota Pekanbaru pada Tahun 2022 belum memiliki regulasi terkait dengan penghapusan piutang pajak daerah, namun pada dasarnya Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Badan Pendapatan Daerah telah melakukan kajian dan menyusun draft Peraturan Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah dimulai dari tahun 2018, namun karena masih terdapat kekurangan terhadap draft dimaksud maka diperlukan referensi dari beberapa daerah yang telah menetapkan dan melaksanakan peraturan tentang penghapusan piutang pajak daerah, disamping itu juga perlu melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti inspektorat selaku APIP, BPKP, BPKAD untuk meminta pandangan dan masukan terutama terhadap kriteria penghapusan utang pajak daerah dan mekanisme penghapusan piutang pajak daerah, dimulai dari penghapusbukuan sampai dengan penghapustagihan piutang pajak, daerah, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam merumuskan Perwako tersebut.

Bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini telah memiliki Peraturan Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah yakni Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 20 Februari 2023, dan kemudian telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 251 tahun 2023 tentang Pembentukan Tim

Inventarisasi dan Penelitian Piutang Pajak Daerah, dengan telah dibentuknya tim tersebut maka Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan verifikasi kembali secara administrasi dan peninjauan lapangan dalam rangka memastikan apakah piutang tersebut layak untuk dihapus bukuan sebagaimana mestinya.

Penghapusan Piutang Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru didukung dengan Hasil Laporan Reviu Penghapusbukuan Piutang Pajak Daerah Nomor B.PW01.02/ REVIU/ INSPEKTORAT/ 163/2023 tanggal 20 November 2023.

5.3.1.1.3. Piutang Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
6.475.259.242,00	5.631.584.012,00

Saldo Piutang Piutang Retribusi Daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2023 sebesar Rp6.475.259.242,00 mengalami kenaikan sebesar Rp843.675.230,00 atau 14,98% dibandingkan dengan piutang tahun 2022 sebesar Rp5.631.584.012,00. Akun piutang retribusi daerah merupakan selisih antara nilai retribusi yang ditetapkan dengan nilai yang dibayar oleh wajib retribusi termasuk tunggakan tahun sebelumnya. Retribusi yang menimbulkan piutang adalah yang melalui mekanisme penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan berdasarkan perjanjian. Piutang retribusi daerah yang dikelola oleh SKPD disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.3.19. Rincian Per Objek Piutang Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL		TAMBAH KURANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR	% KENAIKAN/ PENURUNAN
		TAMBAH	KURANG	PENAMBAHAN	PENGURANGAN		
1	2	3	4	5	6	7=2+3-4+5-6	8
Piutang Retribusi Jasa Umum	310.017.459,00	-	-	110.137.375,00	30.715.125,00	389.439.709,00	337,37
Piutang Retribusi Jasa Usaha	3.600.958.153,00	1.117.882.800,00	-	238.611.360,00	1.194.441.980,00	3.812.210.173,00	6,73
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	1.772.607.380,00	-	-	-	-	1.772.607.380,00	-
JUMLAH	5.631.584.012,00	1.117.882.800,00	-	348.748.735,00	1.225.156.105,00	6.475.259.242,00	14,98

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang

Rincian Piutang Retribusi Daerah Per Sub Rincian Objek dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.20. Rincian Piutang Retribusi Daerah Per OPD

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL		TAMBAH KURANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR	% KENAIKAN/ PENURUNAN
		TAMBAH	KURANG	PENAMBAHAN	PENGURANGAN		
1	2	3	4	5	6	7=2+3-4+5-6	8
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	110.160.300,00	-	-	46.336.250,00	18.674.250,00	137.822.300,00	6,79
Piutang Retribusi Pemanfaatan Alat Pemadam Kebakaran	21.495.607,00	-	-	-	-	21.495.607,00	-
Piutang Retribusi Penggantian dan Pengendalian Limbah Beracun	20.264.230,00	-	-	873.786.125,00	19.000.875,00	875.049.480,00	2.214,85
Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan	1.772.607.380,00	1.117.882.800,00	-	268.611.360,00	1.194.441.980,00	1.964.659.560,00	10,83
Piutang Retribusi Terminal	72.031.203,00	-	-	-	-	72.031.203,00	-
Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan	1.650.000.000,00	-	-	-	-	1.650.000.000,00	-
Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.772.607.380,00	-	-	-	-	1.772.607.380,00	-
JUMLAH	5.631.584.012,00	1.117.882.800,00	-	348.748.735,00	1.225.156.105,00	6.475.259.242,00	14,98

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang

5.3.1.1.4. Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
9.788.103.073,70	9.726.158.260,70

Saldo Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kota Pekanbaru pada tahun 2023 sebesar Rp9.788.103.073,70 mengalami kenaikan sebesar Rp61.944.813,00 atau 0,64% dibandingkan dengan piutang tahun 2022 sebesar Rp9.726.158.260,70.

Pos Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri atas Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Piutang Jasa Giro, Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Piutang Pendapatan dari Pengembalian, dan Piutang Pendapatan BLUD sampai dengan Tanggal 31 Desember 2023.

Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.3.21. Rincian Per Objek Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL		TAMBAH/KURANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR	% KENAIKAN/PENURUNAN
		TAMBAH	KURANG	PENAMBAHAN	PEMBAYARAN		
1	2	3	4	5	6	7=2+3+4+5-6	8
Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	7.194.304.362,58	-	-	471.040.157,00	378.949.000,00	7.076.391.499,58	(1,59)
Piutang Jasa Giro	6.101.243,79	-	-	696.302.179,66	-	694.948.424,79	11149,12
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	9.021.995,00	-	-	9.021.995,00	-	0,00
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.211.920.033,00	81,00	-	80.422.072,00	20.801.326,00	1.248.541.380,00	2,66
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	808.756.000,00	-	-	-	-	808.756.000,00	0,00
Piutang Pendapatan BLUD	513.866.500,00	-	-	-	40.000.000,00	19.866.500,00	(96,13)
JUMLAH	**9.726.158.260,70**	**9.022.077,00**	**-**	**1.194.020.908,66**	**1.111.861.152,00**	**9.788.103.073,70**	**0,64**

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang

Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat dirinci pada sub rincian objek sebagai berikut:

Tabel 5.3.22. Rincian Per Objek Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL		TAMBAH/KURANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR	% KENAIKAN/PENURUNAN
		TAMBAH	KURANG	PENAMBAHAN	PEMBAYARAN		
1	2	3	4	5	6	7=2+3+4+5-6	8
Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah	7.194.304.362,58	-	-	471.040.157,00	378.949.000,00	7.076.391.499,58	(1,59)
Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00	-
Piutang Pemindahbukuan Dana Transfer Treasury Deposit Facility (DF)	6.101.243,79	-	-	626.861.179,66	-	694.933.424,79	10.771,77
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	9.021.995,00	-	-	9.021.995,00	-	-
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	1.211.920.312,00	81,00	-	80.422.072,00	20.801.326,00	1.248.541.380,00	2,93
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	808.756.000,00	-	-	-	-	808.756.000,00	-
Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	513.866.500,00	-	-	-	493.000.000,00	19.866.500,00	(96,13)
JUMLAH	**9.726.158.260,70**	**9.022.077,00**	**-**	**1.194.020.908,66**	**1.111.861.152,00**	**9.788.103.073,70**	**0,64**

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang

Perhitungan kontribusi terhadap hasil dari bangun guna serah pasar di Kota Pekanbaru berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan mitra pihak ketiga, hal tersebut dijelaskan lebih detail pada Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan pada Laporan Keuangan ini.

Dikarenakan belum adanya dokumen tagihan dari dinas teknis, maka nilai penyisihan piutang di nol kan agar sesuai dengan kebijakan akuntansi Kota Pekanbaru. Selain koreksi terhadap nilai penyisihan piutang, juga dilakukan koreksi terhadap nilai piutang. Koreksi tersebut dilakukan berdasarkan perhitungan pada surat perjanjian dan konfirmasi kepada pihak ketiga. Berikut ini rincian Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai berikut:

Tabel 5.3.21. Rincian Piutang Hasil Dari Bangun Guna Serah Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2022				2023				
	PIUTANG DAN PENYISIHAN			KENAIKAN	PENDAPATAN L.O.	PENDAPATAN LRA	PIUTANG DAN PENYISIHAN		
	PIUTANG	%	PENYISIHAN				PIUTANG	%	PENYISIHAN
Hasil dari Bangun Guna Serah	7.164.984.380,00		-	6.330.406,00	1.353.220.487,00	1.401.013.300,00	7.070.201.460,00		-
Hasil dari Bangun Guna Serah	7.164.984.380,00		-	6.330.406,00	1.353.220.487,00	1.401.013.300,00	7.070.201.460,00		-
Cv. Putra Berbasi ; PT. Riau Grita Rotasi (Pasar Sail)	263.444.031,00		-	-		-	263.444.031,00		-
PT. Pasaka Mahagaya (Pasar Simpang Am)	4.746.054.525,00		-	-	52.044.762,00	338.613.300,00	4.068.379.050,00		-
PT. Mitmor Pasar Pemato (Pasar Sekoranal)	157.104.850,00		-	3.330.000,00	411.330.762,00	675.013.300,00	466.091.150,00		-
PT. Agung Nida Sena, KSO (Pasar Arau)	1.427.349.273,00		-	-	309.845.162,00	-	1.147.396.950,00		-
PT. Ali Akbar, KSO (Pasar Sekret)	-		-	-	577.556.300,00	577.556.300,00	-		-

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang

5.3.1.1.5.Piutang Transfer Pemerintah Pusat

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
120.000,00	0,00

Saldo Transfer Pemerintah Pusat Kota Pekanbaru pada tahun 2023 sebesar Rp120.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp120.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan piutang tahun 2022 sebesar Rp0,00. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Pekanbaru tidak mencatat piutang transfer pemerintah pusat, hal ini sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang berlaku di Pemerintah Kota Pekanbaru yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru menyebutkan bahwa "Untuk pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat, seperti Dana Perimbangan (DAU, DBH, DAK) dan transfer lainnya, piutang akan diakui bila terdapat dokumen yang mengakui adanya kurang salur dari entitas penyalur". Pada saat tanggal pelaporan dokumen sumber sebagai dasar belum diperoleh.

Pada 31 Desember 2023, Pemerintah Kota Pekanbaru mencatat Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp120.000,00 yang merupakan Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau.

Rincian per sub rincian objek Piutang Transfer Pemerintah Pusat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.3.24.Rincian Per Jenis Piutang Piutang Transfer Pemerintah Pusat

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL		TAMBAH KURANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR	% KENAIKAN PENURUNAN
		TAMBAH	KURANG	PENAMBAHAN	PENGURANGAN		
1	2	3	4	5	6	7=2+3-4+5-6	8
Piutang Dana Perimbangan	-	-	-	120.000,00		120.000,00	0,00
JUMLAH	-	-	-	120.000,00	-	120.000,00	0,00

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang

5.3.1.1.6. Piutang Transfer Antar Daerah

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
35.412.084.524,00	24.037.615.280,00

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2023 sebesar Rp35.412.084.524,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.374.469.244,00 atau 47,32% dibandingkan dengan piutang tahun 2022 sebesar Rp24.037.615.280,00. Rincian per objek Piutang Transfer Pemerintah Pusat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.3.25. Rincian Per Jenis Piutang Transfer Antar Daerah

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL		TAMBAH KURANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR	% KENAIKAN PENURUNAN
		TAMBAH	KURANG	PENAMBAHAN	PENGURANGAN		
1	2	3	4	5	6	7=2+3-4+5-6	8
Piutang Pendapatan Bagi Hasil	24.037.615.280,00	-	-	35.412.084.524,00	24.037.615.280,00	35.412.084.524,00	47,32
JUMLAH	24.037.615.280,00	-	-	35.412.084.524,00	24.037.615.280,00	35.412.084.524,00	47,32

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah tahun 2023 antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau nomor:973/BA/Bapenda/II.3/07 terdapat kurang salur Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp9.601.731.557,00. Selain itu, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau nomor:359/IV/2024 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Desember 2023) untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau tahun anggaran 2024 terdapat kurang salur Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp10.629.285.592,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp6.157.987.363,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp8.921.627.688,00 dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp101.452.324,00.

Berikut ini adalah rincian Piutang Transfer Antar Daerah Kota Pekanbaru tahun anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.26. Rincian Sub Rincian Piutang Transfer Antar Daerah

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL		TAMBAH/KURANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR	% KEMAMPUAN PENERIMAAN
		TAMBAH	KURANG	PENAMBAHAN	PENGURANGAN		
1	2	3	4	5	6	7=2+3-4+5-6	8
Piutang Bag Hasil Pajk Kendaraan Bermotor	5,287,660,467.00	-	-	20,231,951,149.00	8,287,660,467.00	25,231,951,149.00	110.22
Piutang Bag Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5,761,662,725.00	-	-	5,152,997,263.00	5,761,662,725.00	4,157,997,263.00	0.87
Piutang Bag Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3,960,506,525.00	-	-	9,597,627,888.00	8,960,606,525.00	9,921,821,888.00	(3.43)
Piutang Bag Hasil Pajak Air Permukaan	107,575,363.00	-	-	131,452,324.00	107,575,363.00	131,452,324.00	(3.89)
JUMLAH	34,207,813,280.00	-	-	35,412,994,524.00	24,807,813,280.00	35,412,994,524.00	40.02

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang

5.3.1.1.7. Piutang Lainnya

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
1.857.721.949,25	787.166.524,00

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Saldo Piutang Pajak Daerah Kota Pekanbaru pada Tahun 2023 sebesar Rp1.857.721.949,25 mengalami peningkatan sebesar Rp1.070.555.425,25 atau 136,00% dibandingkan dengan piutang tahun 2022 sebesar Rp787.166.524,00. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri dari Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.27. Rincian Per Objek Piutang Transfer Antar Daerah

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL		TAMBAH/KURANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR	% KEMAMPUAN PENERIMAAN
		TAMBAH	KURANG	PENAMBAHAN	PENGURANGAN		
1	2	3	4	5	6	7=2+3-4+5-6	8
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	787,166,524.00	1,302,055,425.25	-	-	232,000,000.00	1,857,721,949.25	136.00
JUMLAH	787,166,524.00	1,302,055,425.25	-	-	232,000,000.00	1,857,721,949.25	136.00

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain merupakan reklas dari Aset Lainnya, yaitu Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp651.277.716,00, dari total keseluruhan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp2.475.110.855,00 yang ditetapkan dengan SKTJM No.01/SKTJM-TPKD/2022 tanggal 27 Mei 2022. Pada Tahun 2022, terdapat mutasi kurang yang dikarenakan pembayaran atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara tahun 2021 sebesar Rp232.000.000,00.

Tabel 5.3.28. Rincian Bagian Lancar TGR-PNS bukan Bendahara

(dalam rupiah)

OPD	INISIAL	NIP/JM	TANGGAL	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PEMBAYARAN	SALDO AKHIR
BPKAD	DS			474.636,00			474.636,00
BPKAD	HHSUY			194.453,00			194.453,00
BPKAD	HHSUY			2.891.559,00			2.891.559,00
BPKAD	SUM			213.637,00			213.637,00
BPKAD	DS			259.430,00			259.430,00
BPKAD	HSH			35.155.000,00			35.155.000,00
BPKAD	IDK			1.730.000,00			1.730.000,00
BPKAD	AL	09/TUM/MPTP-TGR/08/2014	23/12/2014	82.324.400,00			82.324.400,00
BPKAD	SU	01/SK/UMMP-TP TGR/2015	17/11/2015	7.745.823,00			7.745.823,00
BPKAD	YS	01/SK/UMMP-TP TGR/2015	13/11/2015	11.800.000,00			11.800.000,00
BPKAD	DS	01/SK/UMMP-TP TGR/2015	13/11/2015	7.000.000,00			7.000.000,00
BPKAD	DM	01/SK/UMMP-TP TGR/2015	13/11/2015	5.100.000,00			5.100.000,00
BPKAD	SFR	04/SK/UMMP-TP TGR/2015	13/11/2015	5.000.000,00		2.000.000,00	5.000.000,00
BPKAD	SF	06/SK/UMMP-TP TGR/2015	17/11/2015	3.800.000,00			3.800.000,00
BPKAD	LD	11/SK/UMMP-TP TGR/2015	17/11/2015	8.200.000,00			8.200.000,00
BPKAD	ET	01/SK/TTP-TGR/2016	20/06/2016	10.000.000,00			10.000.000,00
BPKAD	RZ	04/SK/TTP-TGR/2016	20/06/2016	6.800.000,00			6.800.000,00
BPKAD	MR	04/SK/TTP-TGR/2016	20/06/2016	4.800.000,00			4.800.000,00
Sekretariat DPRD	SR	01/SK/UM-TPTGR/2022	17/05/2022	910.277.790,00	1.302.595.426,25	230.000.000,00	1.984.033.141,25
				787.595.524,00	1.302.595.426,25	232.000.000,00	1.857.721.848,25

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang

5.3.1.1.8. Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
(404.743.212.196,20)	(423.632.712.893,00)

Saldo penyisihan piutang Kota Pekanbaru pada tahun 2023 sebesar Rp404.743.212.196,20 mengalami penurunan sebesar Rp18.889.500.696,80 atau 4,46% dibandingkan dengan piutang tahun 2022 sebesar Rp423.632.712.893,00. Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Kota Pekanbaru piutang akan disisihkan nilainya berdasarkan tanggal jatuh temponya. Berikut ini adalah daftar rincian penyisihan piutang:

Tabel 5.3.29. Rincian Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL		TAMBAH/KURANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR	% KENAIKAN/PENURUNAN
		TAMBAH	KURANG	BEBAN PENYISIHAN	PENDAPATAN LO		
1	2	3	4	5	6	7=2+3-4-5-6	8
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	415.808.487.502,00	1.001,00	41.317.310.823,48	21.934.107.214,48	142.866.144,00	396.052.500.860,00	-4,72
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	5.969.961.806,00	900.262.218,00	-	31.748.967,00	945.629.830,00	5.556.052.569,63	-6,89
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.211.260.029,00	-	-	2.508.287,14	2.544.418,00	2.211.202.738,14	0,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Transfer Antar Daerah	120.186.275,00	-	-	-	120.186.275,00	-	-100,00
Penyisihan Piutang Lainnya	252.510.590,00	-	-	609.403.356,43	2.000.000,00	1.920.146.809,43	661,75
JUMLAH	423.632.712.800,00	900.263.217,00	41.317.310.823,48	22.538.967.207,07	1.213.225.318,00	406.740.202.196,19	-4,46

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang

Pada tahun 2023, saldo akhir penyisihan piutang, dihasilkan dari koreksi saldo awal penyisihan piutang dan perhitungan ulang persentase penyisihan sesuai dengan klasifikasi jatuh tempo piutangnya. Hal ini berlaku untuk seluruh sub rincian akun penyisihan piutang, dan dapat dilihat pada tabel-tabel rincian penyisihan berikutnya.

Penyisihan Piutang Pajak Daerah

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
(396.052.506.950,00)	(415.698.487.502,00)

Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2023 sebesar Rp396.052.506.950,00 mengalami penurunan sebesar Rp19.645.980.552,00 atau 4,73% dari tahun 2022 sebesar Rp415.698.487.502,00. Perbandingan Penyisihan Piutang Pajak tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.3.30. Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL		TAMBAH KURANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR	% KENAIKAN/ PENURUNAN
		TAMBAH	KURANG	BEBAN PENYISIHAN	PENDAPATAN LO		
1	2	3	4	5	6	7=2+3-4+5-6	8
Penyisihan Piutang Pajak Hotel	367.115.721,00	1.001,00	205.168.000,00	27.000,00	142.828.157,00	59.116.561,00	-83,89
Penyisihan Piutang Pajak Restoran	1.374.795.267,00	-	737.364.000,00	110.786.475,00	-	728.217.742,00	-46,95
Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	154.752.945,00	-	164.177.000,00	26.048,00	36.277,00	55.382,00	-99,96
Penyisihan Piutang Pajak Reklame	4.327.914.062,00	-	-	676.671.317,00	-	4.904.499.170,00	13,32
Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	76.075,00	-	-	1.464.699,00	-	1.541.661,00	1927,51
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	417.953.487,00	-	-	11.251.561,00	-	449.305.366,00	2,57
Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBBP2)	400.539.218.047,00	-	37.556.467.829,48	31.031.972.943,48	-	387.095.723.661,00	-4,07
Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.496.998.980,00	-	2.852.942.804,00	-	-	2.949.923.980,00	-46,34
JUMLAH	415.698.487.502,00	1.001,00	45.117.312.633,48	31.614.197.214,48	142.865.144,00	396.052.506.950,00	-4,73

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang TA 2023

Adapun daftar perhitungan dari penyisihan piutang pajak daerah tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran 12.

Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
(5.558.632.569,63)	(5.569.561.806,00)

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2023 sebesar Rp5.558.632.569,63 mengalami penurunan sebesar Rp10.929.236,38 atau 0,20% dibandingkan dengan piutang tahun 2022 sebesar Rp5.569.561.806,00 Perkembangan Penyisihan Piutang tahun 2023 dan 2022 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.3.31. Perkembangan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL		TAMBAH KURANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR	% KENAIKAN/ PENURUNAN
		TAMBAH	KURANG	BEBAN PENYISIHAN	PENDAPATAN LO		
1	2	3	4	5	6	7=2+3-4+5-6	8
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	155.906.353,00	-	-	31.740.967,00	-	187.647.320,00	20,36
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	3.409.909.193,00	902.902.276,00	-	-	965.029.828,00	3.347.281.589,00	-1,17
Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	1.773.667.388,00	-	-	-	-	1.773.667.380,00	0,00
JUMLAH	5.569.561.806,00	902.902.276,00	-	31.740.967,00	965.029.828,00	5.558.632.569,63	-0,20

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang

Berikut ini adalah daftar perhitungan dari penyisihan piutang retribusi pajak daerah tahun 2023:

Tabel 5.3.32. Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

REKENING		PIUTANG DAN PENYISIHAN		
KODE	URAIAN	PIUTANG	%	PENYISIHAN
4.1.02.01.01.	**Retribusi Pelayanan Pasar**	**188.811.380,00**		**130.053.846,00**
4.1.02.01.01.0201.	Retribusi Kios	188.811.380,00		130.053.846,00
	Tunggakan 2021	77.161.600,00	100,00	77.161.600,00
	Tunggakan 2018	9.600.000,00	100,00	9.600.000,00
	Tunggakan 2019	11.484.000,00	100,00	11.484.000,00
	Tunggakan 2020	12.107.250,00	100,00	12.107.250,00
	Tunggakan 2021	18.136.780,00	100,00	18.136.780,00
	Tunggakan 2022	24.623.750,00	100,00	24.623.750,00
	Tunggakan 2023	35.215.250,00	5,00	101.996,00
4.1.02.01.07.	**Retribusi Penyediaan dan Penjualan Rekaman**	**27.466.650,00**		**27.466.650,00**
4.1.02.01.07.0201.	Retribusi Pelayanan Pemotretan/Jasa Penggunaan Alat Pemotretan Kebakaran	27.466.650,00		27.466.650,00
	Retribusi Izin Tanggung/Kerusakan Disebabkan Izinkan/Retribusi Penataan Ruangan	27.466.650,00	100,00	27.466.650,00
4.1.02.01.13.	**Retribusi Pengendalian dan Pengendalian Menara Telekomunikasi**	**1.331.484,00**		**1.331.484,00**
4.1.02.01.13.0201.	Retribusi Pelayanan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.331.484,00		1.331.484,00
	Pidana	1.331.484,00	100,00	1.331.484,00
4.1.02.01.13.	Retribusi Pengendalian dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	19.839.978,00		99.199,00
4.1.02.01.13.0201.	Retribusi Pengendalian dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	19.839.978,00		99.199,00
	Pidana 2022 s.d Lainnya	19.839.978,00	0,50	99.199,00
4.1.02.02.01.	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**	**1.164.230.160,00**		**648.416.272,00**
4.1.02.02.01.0901.	Retribusi Hasil Sewa dan Sewa Beli Bangunan	781.680.960,00		488.460.272,00
	Pidana 2021	323.807.440,00	100,00	323.807.440,00
	Pidana 2020	236.811.760,00	100,00	236.811.760,00
	Pidana 2022	220.861.760,00	10,00	22.086.176,00
4.1.02.02.01.	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**	**1.167.393.960,00**		**1.167.393.960,00**
4.1.02.02.01.0901.	Retribusi Pemakaian Ruangan	**1.167.393.960,00**		**1.167.393.960,00**
	Retribusi Izin Tanggung/Kerusakan Disebabkan Izinkan/Retribusi Penataan Ruangan 2018	1.167.393.960,00	100,00	1.167.393.960,00
4.1.02.02.04.	**Retribusi Terminal**	**73.245.253,00**		**73.245.253,00**
4.1.02.02.04.0903.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	73.245.253,00		73.245.253,00
	Pidana	73.245.253,00	100,00	73.245.253,00
4.1.02.02.08.	**Retribusi Pelayanan Kependidikan**	**1.850.000.000,00**		**1.850.000.000,00**
4.1.02.02.08.0901.	Retribusi Pelayanan Pendidikan	1.850.000.000,00		1.850.000.000,00
	Pidana	1.850.000.000,00	100,00	1.850.000.000,00
4.1.02.03.01.	**Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**	**1.771.607.360,00**		**1.771.607.360,00**
4.1.02.03.01.0901.	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	**1.771.607.360,00**		**1.771.607.360,00**
	IMB	1.771.607.360,00	100,00	1.771.607.360,00
4.1.04.03.03.	**Hasil dari Bangun Guna Serah**	**7.575.321.600,00**		-
4.1.04.03.03.0901.	**Hasil dari Bangun Guna Serah**	**7.575.321.600,00**		-
4.1.04.03.03.0901.a.	CV. Putra Berkasih / PT. Riau Kreta Perkasa (Pasar Sail)	343.444.051,00		-
	BGS	343.444.051,00		-
4.1.04.03.03.0901.c	**PT. Pegadaian Syariah (Pasar Bawah Ex)**	**4.980.370.000,00**		-
	BGS 2022	110.000.000,00		-
	BGS 2023	110.000.000,00		-
	Lain Lain 2021	181.200.419,00		-
	Adendum 2016	37.370.000,00		-
	Adendum 2017	30.000.000,00		-
	Adendum 2018	35.000.000,00		-
	Adendum 2022	42.000.000,00		-
	Adendum 2023	42.000.000,00		-
	Sisa Hasil Penjualan 2021	4.310.402.615,00		-
4.1.04.03.03.0901.d	**PT. Makmur Papan Permata (Pasar Bawah Ex)**	**600.951.149,00**		-
	BGS 2020	90.000.000,00		-
	BGS 2021	91.000.000,00		-
	Adendum 2020	394.451.149,00		-
4.1.04.03.03.0901.e	**PT. Agung Reh Berat, MBC/Pasar Ikan/A**	**1.127.396.888,00**		-
	BGS 2019	344.000.000,00		-
	BGS 2018	250.011.016,00		-
	BGS 2020	273.291.275,00		-
	BGS 2021	262.046.334,00		-
	BGS 2022	300.048.302,00		-
	BGS 2023	169.846.702,00		-
	Denda Keterlambatan 2021	10.199.549,00		-

KODE	URAIAN	PIUTANG	%	PENYISIHAN
4.1.04.05.01.	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.400,00		1.400,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.400,00		1.400,00
	Kekurangan SPD PL bersama dipotong Bank Riau Kepri ke rekening kas daerah, jumlah potongan pada tahun 2023	1.400,00	0,00	1.400,00
4.1.04.09.02.	Transfer Dana Perimbangan Daerah lainnya dari Pemerintah Pusat	170.889.808,00		170.889.808,00
4.1.04.09.02.0001	Transfer Dana Perimbangan Daerah lainnya dari Pemerintah Pusat	170.889.808,00		170.889.808,00
	Piutang 2020	170.889.808,00	100,00	170.889.808,00
	Transfer Dana Perimbangan Daerah lainnya dari Pemerintah Pusat	1.868.030.141,25		951.261.136,43
4.1.04.09.02.0001	Transfer Dana Perimbangan Daerah lainnya dari Pemerintah Pusat	1.868.030.141,25		951.261.136,43
	Belum tercair SPDAK BG 2020	1.868.030.141,25		951.261.136,43
4.1.06.13.01.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	1.199.249.874,00		1.199.249.874,00
4.1.06.13.01.0008	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.199.249.874,00		1.199.249.874,00
	Piutang	1.199.249.874,00	100,00	1.199.249.874,00
4.1.06.13.01.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	32.775.199,00		402.753,00
4.1.06.13.01.0013	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	32.775.199,00		402.753,00
	Piutang 2022 - Lancar	29.739.621,00	0,00	198.045,00
	Piutang 2023 - Kurang Lancar	3.035.578,00	10,00	304.062,20
	Piutang 2023 - Kurang Lancar	100,00	10,00	10,00
4.1.06.15.02.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	808.750.000,00		808.750.000,00
4.1.06.15.02.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	808.750.000,00		808.750.000,00
	Tersedia belanjaan anggaran OPRD 2020	808.750.000,00	100,00	808.750.000,00
4.1.24.15.01.	Pendapatan BLUD	19.000.000,00		19.000.000,00
4.1.24.15.01.0001	Pendapatan BLUD	19.000.000,00		19.000.000,00
	Piutang Umum 2021	19.000.000,00	100,00	19.000.000,00
	Piutang BPJS 2022	5.600,00	100,00	5.600,00
	Piutang Umum 2021	19.000.000,00	100,00	19.000.000,00
	Piutang BPJS 2023	2.800,00	100,00	2.800,00
	Piutang BPJS 2023	2.800,00	100,00	2.800,00

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
(2.011.922.738,14)	(2.011.958.929,00)

Saldo Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada tahun 2023 sebesar Rp2.011.922.738,14 mengalami penurunan sebesar Rp36.190,86 atau 0,00% dibandingkan dengan piutang tahun 2022 sebesar Rp2.011.958.929,00. Berikut ini adalah rincian dari penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah:

Tabel 5.3.33. Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL		TAMBAH/KURANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR	% KENAIKAN/PENURUNAN
		TAMBAH	KURANG	BEBAN PENYISIHAN	PENGAPUSAN/HLO		
1	2	3	4	5	6	7=2+3-4-5-6	8
Penyisihan Piutang Jasa Giro	75,00	-	-	-	-	75,00	0,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.660.702.578,00	-	-	2.508.287,14	-	1.163.210.862,14	0,21
Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian	808.750.000,00	-	-	-	-	808.750.000,00	0,00
Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	22.583.276,00	-	-	-	2.344.478,00	19.855.800,00	-11,31
JUMLAH	2.011.958.929,00	-	-	2.508.287,14	2.344.478,00	2.011.922.738,14	0,00

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang

Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
(0,00)	(120.188.076,00)

Saldo Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2023 sebesar Rp0,00 berkurang sebesar Rp120.188.076,00 atau 100,00% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp120.188.076,00.

Tabel 5.3.34. Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL		TAMBAH/KURANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR	% KENAIKAN/ PENURUNAN
		TAMBAH	KURANG	BEBAN PENYISIHAN	PENDAPATAN LO		
1	2	3	4	5	6	7=2+3-4-5-6	8
Penyisihan Piutang Bagi Hasil	120.188.076,00	-	-	-	120.188.076,00	-	(100,00)
JUMLAH	120.188.076,00	-	-	-	120.188.076,00	-	(100,00)

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang

Penyisihan Piutang Lainnya

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
(1.120.149.938,43)	(232.516.580,00)

Saldo Penyisihan Piutang Lainnya Kota Pekanbaru pada tahun 2023 sebesar Rp1.120.149.938,43 bertambah sebesar Rp887.633.358,43 atau sebesar 381,75% dibandingkan tahun lalu sebesar Rp232.516.580,00. Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Keragian Daerah dilakukan terhadap Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.3.35. Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL		TAMBAH/KURANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR	% KENAIKAN/ PENURUNAN
		TAMBAH	KURANG	BEBAN PENYISIHAN	PENDAPATAN LO		
1	2	3	4	5	6	7=2+3-4-5-6	8
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	232.516.580,00	-	-	887.633.358,43	2.000.000,00	1.120.149.938,43	381,75
JUMLAH	232.516.580,00	-	-	887.633.358,43	2.000.000,00	1.120.149.938,43	381,75

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang

Penyisihan piutang lainnya berasal dari penyisihan piutang bagian lancar tuntutan ganti kerugian (TGR) daerah. Ada dua SKPD yang memiliki piutang bagian lancar TGR daerah yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru sebesar Rp168.888.808,00 dan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru sebesar Rp1.688.833.141,25.

Piutang bagian lancar TGR Daerah pada BPKAD Kota Pekanbaru disisihkan 100% senilai Rp168.888.808,00 dan pada tahun 2023 ada pembayaran sebesar Rp2.000.000,00. Sedangkan, penambahan penyisihan piutang Sekretariat DPRD disisihkan

sebesar 56% sebesar Rp951.261.130,43 dan pada tahun 2023 ada pembayaran sebesar Rp230.000.000,00 dengan rincian nilai sebagain berikut:

Tabel 5.3.36. Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah BPKAD dan Sekretariat DPRD Tahun 2023

(dalam rupiah)

OPD	INISIAL	SKTJM	TANGGAL	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PEMBAYARAN	SALDO AKHIR	PENYISIHAN
BPKAD	DS			474.636,00			474.636,00	474.636,00
BPKAD	HHUY			194.453,00			194.453,00	194.453,00
BPKAD	HHUY			2.981.059,00			2.981.059,00	2.981.059,00
BPKAD	SUM			313.637,00			313.637,00	313.637,00
BPKAD	DS			259.400,00			259.400,00	259.400,00
BPKAD	HER			35.169.000,00			35.169.000,00	35.169.000,00
BPKAD	RR			1.730.000,00			1.730.000,00	1.730.000,00
BPKAD	AL	06/TJM/PP-TGR/08/2014	23/12/2014	62.324.400,00			62.324.400,00	62.324.400,00
BPKAD	SU	05/SET.JMPP-TPTGR/2015	13/11/2015	7.745.623,00			7.745.623,00	7.745.623,00
BPKAD	YB	01/SET.JMPP-TPTGR/2015	13/11/2015	11.500.000,00			11.500.000,00	11.500.000,00
BPKAD	DS	02/SET.JMPP-TPTGR/2015	13/11/2015	7.000.000,00			7.000.000,00	7.000.000,00
BPKAD	DM	03/SET.JMPP-TPTGR/2015	13/11/2015	3.100.000,00			3.100.000,00	3.100.000,00
BPKAD	SHY	04/SET.JMPP-TPTGR/2015	13/11/2015	5.000.000,00		2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
BPKAD	RR	06/SET.JMPP-TPTGR/2015	17/11/2015	3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00
BPKAD	LD	11/SET.JMPP-TPTGR/2015	17/11/2015	5.200.000,00			5.200.000,00	5.200.000,00
BPKAD	ST	01/SET/TP-TGR/2016	20/06/2016	10.000.000,00			10.000.000,00	10.000.000,00
BPKAD	RS	03/SET/TP-TGR/2016	20/06/2016	5.500.000,00			5.500.000,00	5.500.000,00
BPKAD	SH	04/SET/TP-TGR/2016	20/06/2016	4.500.000,00			4.500.000,00	4.500.000,00
Sekretariat DPRD	SB	01/SET.JM-TPKD/2022	17/06/2022	616.277.716,00	1.302.555.425,25	230.000.000,00	1.688.833.141,25	851.261.130,43
				787.166.524,00	1.302.555.425,25	232.000.000,00	1.857.721.949,25	1.120.148.938,43

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang

5.3.1.1.9. Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka tahun 2023 sebesar Rp105.000.000,00 dan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.37. Rincian Beban Dibayar Di Muka Tahun 2023

(dalam rupiah)

NO.	NAMA SKPD	JENIS BELANJA	JUMLAH
1	Sekretariat Daerah	Sewa Bangunan	105.000.000,00
	Jumlah		105.000.000,00

Sumber : Kertas Kerja Pendapatan dan Piutang TA.2023

5.3.1.1.10. Persediaan

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
165.674.950.196,57	135.583.483.786,13

Persediaan mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan *(supplies)* yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Pekanbaru, barang yang dipergunakan dan/atau dijual kembali dan/atau diserahkan kepada masyarakat.

Untuk Tahun Anggaran 2023, penambahan dan pengurangan Persediaan terdiri dari:

Tabel 5.3.38 Penambahan dan Pengurangan Persediaan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	1 Januari 2023	Mutasi		31 Desember 2023
			Tambah	Kurang	
A	Persediaan Bahan Pakai Habis	135.583.803.786,13	410.573.948.667,78	388.469.502.347,34	165.674.850.106,57
	Bahan	5.877.550.970,85	136.979.838.145,34	137.350.647.733,19	7.506.742.383,00
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	521.488.170,85	60.138.243.198,00	60.070.437.618,85	589.273.750,00
2	Bahan Kimia	95.979.450,00	1.076.502.510,00	1.109.021.220,00	63.457.740,00
3	Bahan Bakar dan Pelumas	1.020.227.100,00	35.727.484.688,00	36.128.584.308,00	419.117.480,00
	Bahan Baku		607.242.000,00	607.242.000,00	-
	Barang Dalam Proses		129.806.000,00	129.806.000,00	-
4	Bahan/Bibit Tanaman	3.435.897.550,00	1.839.427.420,00	3.185.400.870,00	2.079.924.100,00
	Ki Tabung Pemadam Kebakaran		34.400.000,00	34.400.000,00	-
	Ki Tabung Gas		27.820.000,00	27.820.000,00	-
	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan		597.366.200,00	597.366.200,00	-
5	Bahan Lainnya	5.981.700,00	37.830.553.126,34	33.452.565.516,34	4.383.969.310,00
	Suku Cadang	**162.815.400,00**	**5.963.063.880,00**	**5.974.641.380,00**	**151.237.900,00**
	Suku Cadang Alat Angkutan		2.894.992.170,00	2.894.992.170,00	
	Suku Cadang Alat Besar		2.919.539.490,00	2.919.539.490,00	
	Suku Cadang Alat Laboratorium		49.560.700,00	49.560.700,00	
	Suku Cadang Alat Bengkel		14.251.000,00	14.251.000,00	
1	Suku Cadang Lainnya	162.815.400,00	284.700.520,00	296.278.020,00	151.237.900,00
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	**23.214.093.516,28**	**83.067.882.659,00**	**80.517.709.938,00**	**25.764.866.237,28**
1	Alat Tulis Kantor	788.866.375,90	9.899.938.633,00	10.156.473.588,00	532.331.420,00
2	Kertas dan Cover	72.349.234,30	6.538.772.216,30	6.574.589.750,00	36.531.700,00
3	Bahan Cetak	601.956.081,30	27.320.926.954,00	27.348.000.044,30	528.886.991,00
4	Benda Pos	15.730.000,00	1.011.670.000,00	1.012.760.000,00	14.640.000,00
	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender		127.610.000,00	127.610.000,00	
5	Bahan Komputer	409.340.830,00	6.887.017.520,00	6.152.414.887,00	1.143.962.563,00
6	Perabot Kantor	178.756.071,00	3.482.307.287,00	3.461.968.114,00	199.134.244,00
7	Alat Listrik	2.674.770.113,00	13.890.909.673,00	12.222.012.234,00	4.343.667.552,00
	Perlengkapan Dinas		3.164.999.180,00	3.164.999.180,00	
	Perlengkapan Pendukung Olahraga		651.831.300,00	651.831.300,00	
8	Suvenir/Cendera Mata	8.150.000,00	8.210.885.400,00	8.208.860.400,00	8.175.000,00
9	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	18.466.724.812,28	3.016.016.396,00	3.435.210.441,00	18.947.530.767,28
	Obat obatan	**22.961.621.120,00**	**32.059.902.079,44**	**36.277.548.119,15**	**18.883.975.080,29**
1	Obat	11.823.976.243,00	25.005.204.707,44	29.342.134.956,15	8.387.048.992,29
2	Obat obatan Lainnya	11.277.641.886,00	7.054.697.163,00	7.035.413.161,00	10.306.926.888,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	**83.406.933.770,00**	**166.606.260.113,00**	**126.348.955.177,00**	**113.568.237.706,00**
1	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	82.113.762.970,00	156.500.260.113,00	126.348.955.177,00	112.265.067.906,00
2	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	1.293.159.800,00	-	-	1.293.159.800,00
D	**Persediaan Barang Tak Habis Pakai**	**19.800.000,00**	**61.297.651,00**	**81.097.651,00**	-
	Komponen	19.800.000,00	61.297.651,00	81.097.651,00	-
	Komponen Rambu-Rambu	19.800.000,00	61.297.651,00	81.097.651,00	-
	Total	**135.583.483.786,13**	**410.641.246.318,78**	**388.550.599.998,34**	**165.674.850.106,57**

Sumber : Kertas Kerja Persediaan TA.2023

Dari Tabel 5.3.38. di atas menunjukkan persediaan Tahun 2023 adalah sebesar Rp165.685.594.650,28 dan mengalami kenaikan sebesar Rp30.102.190.864,15 atau 81,82% dibandingkan persediaan Tahun 2022 sebesar Rp135.563.603.786,13.

Terdapat penambahan beban atau belanja Persediaan tahun 2023 yang rincian keseluruhan penambah Persediaan dapat dilihat di lampiran 14. Rincian keseluruhan Pengurangan Persediaan selama Tahun 2023 dapat dilihat di daftar lampiran 15. Rincian persediaan per SKPD Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.3.39. Rincian Persediaan per-SKPD

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	34.894.960,00	49.133.397,00	(14.238.437,00)	(28,97)
2	Dinas Kesehatan	19.460.626.910,29	23.716.229.343,00	(4.255.602.432,71)	(17,95)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	157.376.792.511,28	104.184.017.805,13	52.184.764.706,14	31,86
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7.927.840,00	3.146.960,00	4.780.870,00	151,27
5	Satpol PP	470.800,00	788.800,00	(318.000,00)	(40,18)
6	BPBD	1.526.200,00	2.364.736,00	(838.536,00)	(34,53)
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.282.900,00	1.286.900,00	2.096.000,00	110,49
8	Dinas Sosial	26.683.270,00	12.305.600,00	6.377.670,00	33,31
9	Dinkes	3.736.960,00	8.725.040,00	(4.989.040,00)	(57,18)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat	7.580.976,00	21.158.226,58	(13.754.156,58)	(65,58)
11	Dinas Kebakaran Pangan	6.612.000,00	4.051.190,00	2.561.360,00	63,23
12	Dinas Perpustakaan	497.100,00	559.650,00	(62.550,00)	(11,18)
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.079.924.100,00	3.433.697.585,00	(1.353.973.485,00)	(39,43)
14	Disdukcapil	1.353.968.675,00	381.033.585,00	972.935.090,00	255,34
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	1.341.900,00	15.445.055,00	(13.803.155,00)	(89,58)
16	Dinas Perhubungan	4.998.684.158,00	3.151.203.084,00	1.847.481.917,00	58,62
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	6.840.350,00	10.489.450,00	(3.624.150,000)	(34,55)
18	Dinas Koperasi UKM	11.851.650,00	41.943.700,00	(30.092.700,00)	(71,75)
19	DPMPTSP	5.896.250,00	211.321.650,00	(205.315.400,00)	(97,46)
20	Disporik	1.031.150,00	484.350,00	536.800,00	110,87
21	Badan Perpustakaan dan Kearsipan	6.796.300,00	1.689.384,00	5.706.916,00	341,68
22	Kesbangpol	13.851.800,00	2.512.300,00	11.301.000,00	481,66
23	Dinas Perkoran dan Perikanan	86.486.500,00	34.721.650,00	53.742.620,00	163,58
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	497.850,00	9.350.600,00	(8.852.770,00)	(94,68)
25	Sekretariat Daerah	15.703.435,00	28.470.020,00	(12.766.585,00)	(44,84)
26	Sekretariat DPRD	3.935.400,00	22.164.360,00	(18.228.960,00)	(82,24)
27	Bappeda	7.334.200,00	7.350.318,00	(160.882,00)	(0,22)
28	BPKAD	16.130.800,00	24.258.300,00	(8.127.500,00)	(33,50)
29	Bapenda	23.154.954,00	76.011.680,00	(52.856.726,00)	(69,54)
30	BKPSDM	10.798.700,00	9.371.500,00	1.427.200,00	15,23
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	6.890.100,00	6.341.200,00	(348.100,00)	(5,48)
32	Inspektorat Kota	14.817.900,00	21.972.900,00	(7.155.000,00)	(32,57)
33	Kec. SUKE Raya	2.965.891,00	3.390.000,00	(696.319,00)	(20,92)
34	Kec. Tenayan Raya	4.941.900,00	1.458.000,00	3.083.900,00	203,81
35	Kec. Rumbai	446.700,00	1.484.000,00	(1.039.300,00)	(70,03)
36	Kec. Limapuluh	8.253.500,00	7.566.600,00	1.686.900,00	22,13
37	Kec. Pekanbaru Kota	10.870.800,00	11.661.300,00	(881.500,00)	(8,21)
38	Kec. Sukajadi	4.893.250,00	4.160.400,00	162.890,00	3,83
39	Kec. Payung Sekaki	876.500,00	937.100,00	(58.600,00)	(6,25)
40	Kec. Senapelan	427.900,00	1.004.000,00	(577.000,00)	(57,47)
41	Kec. Marpoyan Damai	8.586.300,00	10.959.450,00	(1.373.150,00)	(12,53)
42	Kec. Bina Widya	9.602.911,00	9.999.999,00	2.340,00	0,02
43	Kec. Tuah Madani	1.469.090,00	3.261.841	(1.792.751,00)	(54,96)
44	Kec. Rumbai	680.900,00	2.324.734	(2.074.784,00)	(81,21)
45	Kec. Rumbai Pesisir	700.900,00	5.260.600	(4.540.500,00)	(86,67)
46	Kec. Rumbai Barat	15.236.780,00	8.715.820	4.021.360,00	51,86
47	Kec. Kulim	6.097.860,00	9.775.800	(3.716.956,00)	(38,04)
48	Badan Kesbangpol	374.300,00	490.060	(85.760,00)	(16,64)
Jumlah		**165.874.690.166,57**	**135.563.403.786,13**	**30.095.646.320,43**	**22,19**

Sumber : Kertas Kerja Persediaan TA.2023

Rincian persediaan per Jenis tiap SKPD Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.3.40. Rincian Persediaan Per Jenis Tiap SKPD Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Persediaan Barang	Persediaan Suku Cadang	Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	Persediaan Obat obatan	Persediaan untuk Tanah Yang Akan Dikembalikan	Persediaan Konstruksi
1	Dinas Pendidikan	-	-	34.854.000,00	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	63.457.745,00	-	758.157.373,00	16.596.963.600,20	-	-
3	Dinas Perairan Umum dan Perairan Rawang	5.317.736.042,00	-	90.482.790.762,29	-	115.556.237.795,97	-
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	1.907.240,00	-	-	-
5	Satpol PP	-	-	415.000,00	-	-	-
6	DPRD	-	-	1.520.200,00	-	-	-
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	3.262.005,00	-	-	-
8	Dinas Sosial	-	-	25.983.275,00	-	-	-
9	Disnaker	-	-	3.738.000,00	-	-	-
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	7.265.175,00	-	-	-
11	Dinas Kesehatan Pangan	-	-	5.813.600,00	-	-	-
12	Dinas Perkarahan	-	-	452.730,00	-	-	-
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.078.024.100,00	-	-	-	-	-
14	Dukcapil	-	-	1.360.656.675,00	-	-	-
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	-	-	7.341.500,00	-	-	-
16	Dinas Perhubungan	-	151.202.900,00	4.847.429.391,00	-	-	-
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	6.955.230,00	-	-	-
18	Dinas Kependudukan	-	-	11.051.049,00	-	-	-
19	DNPTSP	-	-	5.006.250,00	-	-	-
20	Disporis	-	-	1.021.150,00	-	-	-
21	Bagian Perpostakaan dan Kearsipan	-	-	8.768.300,00	-	-	-
22	Setda Apar	-	-	13.821.860,00	-	-	-
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	2.452.500,00	-	-	86.012.000,00	-	-
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-	-	497.806,00	-	-	-
25	Sekretariat Daerah	-	-	15.703.400,00	-	-	-
26	Inspektorat DPRD	-	-	3.326.436,00	-	-	-
27	Bappeda	-	-	7.934.300,00	-	-	-
28	BPKAD	-	-	16.136.890,00	-	-	-
29	Bagianda	-	-	23.434.900,00	-	-	-
30	BKPSDM	-	-	16.796.750,00	-	-	-
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	5.095.700,00	-	-	-
32	Inspektorat Kota	-	-	14.817.550,00	-	-	-
33	Kec. Bukit Raya	-	-	2.050.461,00	-	-	-
34	Kec. Tenayan Raya	-	-	4.581.000,00	-	-	-
35	Kec. Sail	-	-	444.700,00	-	-	-
36	Kec. Limapuluh	1.176.000,00	-	8.080.000,00	-	-	-
37	Kec. Pekanbaru Kota	-	-	10.070.000,00	-	-	-
38	Kec. Sukajadi	-	-	4.665.350,00	-	-	-
39	Kec. Payung Sekaki	-	-	576.500,00	-	-	-
40	Kec. Senapelan	-	-	427.000,00	-	-	-
41	Kec. Marpoyan Damai	-	-	9.598.350,00	-	-	-
42	Kec. Binr Widya	-	-	5.027.647,00	-	-	-
43	Kec. Tuah Madani	-	-	1.469.081,00	-	-	-
44	Kec. Rumbai	-	-	600.000,00	-	-	-
45	Kec. Rumbai Timur	-	-	750.603,00	-	-	-
46	Kec. Rumbai Barat	-	-	13.246.767,00	-	-	-
47	Kec. Bukit	-	-	5.027.000,00	-	-	-
48	Badan Kesbangpol	-	-	374.500,00	-	-	-
	Jumlah	7.665.743.383,00	151.237.900,00	25.764.646.237,29	12.683.975.663,20	111.556.237.795,97	-

Sumber : Kertas Kerja Persediaan TA.2023

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp113.558.227.706,00, rincian dapat dilihat di daftar Lampiran 13.

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
184.356.466.061,90	192.690.759.929,80

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi dengan tujuan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan guna mendapatkan manfaat secara ekonomis sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Panjang Kota Pekanbaru Tahun 2023 sebesar Rp184.356.466.061,90 dan mengalami penurunan sebesar Rp8.334.293.867,90 atau 4,33% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp192.690.759.929,80. Investasi jangka panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan uraian sebagai berikut:

5.3.1.2.1.Investasi Permanen

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
184.356.466.061,90	192.690.759.929,80

Penyertaan modal Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2023 sebesar Rp184.356.466.061,90 dan mengalami penurunan sebesar Rp8.334.293.867,90 atau 4,33% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp192.690.759.929,80, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.41. Investasi Permanen Tahun 2022 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Nama	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	PT Bank Riau Kepri	15.647.400.000,00	15.647.400.000,00	-	-
2	PDAM Kota Pekanbaru	22.239.547.765,00	30.231.756.797,00	(8.001.209.032,00)	(26,47)
3	PT Riau Airlines	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	-	-
4	PT Sarana Pembangunan Pekanbaru	131.868.039.785,88	133.428.787.902,00	(1.560.748.116,12)	(1,17)
5	PT Bank Pembiayaan Rakyat	8.910.478.511,02	7.682.818.230,80	1.227.660.280,22	15,98
6	PT Bumi Siak Pusako	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	-
Jumlah		184.356.466.061,90	192.690.759.929,80	(8.334.293.867,90)	(4,33)

Sumber : Laporan Keuangan BUMD Audited

Mutasi tambah kurang Investasi Permanen Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.3.42. Mutasi Tambah Kurang Investasi Permanen Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Nama	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	PT Bank Riau Kepri	15.647.400.000,00	-	-	15.647.400.000,00
2	PDAM Kota Pekanbaru	30.231.755.797,00	-	8.001.208.032,00	22.230.547.765,00
3	PT Riau Airlines	2.760.000.000,00	-	-	2.760.000.000,00
4	PT Sarana Pembangunan Pekanbaru	133.428.797.992,00	-	1.580.746.116,12	131.848.033.785,88
5	PT Bank Pembiayaan Rakyat	7.982.810.230,80	1.227.662.280,22	-	9.210.472.511,02
6	PT Bumi Siak Pusako	3.000.000.000,00	-	-	3.000.000.000,00
Jumlah		193.050.764.020,80	1.227.662.280,22	9.581.954.148,12	184.696.454.061,90

Sumber : Laporan Keuangan BUMD Audited

a. PT BANK RIAU KEPRI

Saldo penyertaan modal Pemerintah Kota Pekanbaru pada PT Bank Riau Kepri sampai dengan 31 Desember 2023 Rp15.647.400.000,00 atau 156.474 lembar saham atau 1,42% dari total modal PT Bank Riau Kepri. Penilaian saldo penyertaan modal pada PT Bank Riau Kepri tersebut menggunakan metode biaya.

b. PDAM TIRTA SIAK KOTA PEKANBARU

Saldo penyertaan modal pada PDAM Kota Pekanbaru per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp22.230.547.765,00 dan Rp30.231.755.797,00 dengan persentase kepemilikan sebesar 100%. Dikarenakan atas kepemilikan 100 % dimiliki oleh Pemerintah daerah kota Pekanbaru, maka PDAM tidak pernah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan hanya menyampaikan Data Pemutakhiran Profil BUMD setiap tahunnya, sesuai dengan nomor surat : 060/Perumdam/II/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang ditujukan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya.

Pada tahun 2023, sebagaimana yang tertera pada Pasal 5 yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya yang bersumber dari APBD, yaitu penambahan Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Siak dengan SP2D Nomor: 10862/SP2D/VIII/2023 tanggal 02 Agustus 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00. Saldo penyertaan modal pada PDAM Kota Pekanbaru sebesar Rp22.230.547.765,00 tersebut dinilai menggunakan metode ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Tahun 2023 (Unaudited), yang sampai saat sekarang

Pemerintah Pekanbaru belum menerima laporan Keuangan Audited PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.43. Penyertaan Modal pada PDAM Kota Pekanbaru per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Nama	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Penyertaan Modal	168.581.276.100,00	158.581.276.100,00	10.000.000.000,00	6,31
Modal Hibah	316.715.948,00	316.715.948,00	-	-
Laba Ditahan (akumulasi kerugian)	(128.666.236.351,00)	(91.874.392.320,00)	(36.791.844.231,00)	40,05
Laba (rugi) Periode Berjalan	(18.001.208.032,00)	(36.791.844.231,00)	18.790.636.199,00	(51,07)
Jumlah	**22.230.547.765,00**	**30.231.755.797,00**	**(8.001.208.032,00)**	**(26,47)**

Sumber : Laporan Keuangan BUMD Audited

e. PT RIAU *AIRLINES*

Saldo penyertaan modal pada PT Riau Airlines per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp2.700.000.000,00 atau 2.700 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp1.000.000,00 dan persentase kepemilikan saham sebesar 2,03%. Penilaian saldo penyertaan modal pada PT RAL tersebut menggunakan metode biaya. Tidak terdapat perubahan penyertaan modal Pemerintah Kota Pekanbaru pada PT RAL.

d. PT SARANA PEMBANGUNAN PEKANBARU

Saldo penyertaan modal pada PT Sarana Pembangunan Pekanbaru per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp131.868.039.785,88 dan Rp133.428.787.902,00.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0027209.AH.01.01.TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Sarana Pembangunan Pekanbaru, pemegang saham PT Sarana Pembangunan Pekanbaru adalah Pemerintah Kota Pekanbaru atas 99.91 % atau sebanyak 21.200 lembar saham dengan nominal Rp21.200.000.000,00 dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Sejahtera (KP-RI Sejahtera) Kota Pekanbaru atas 0.09% atau sebanyak 20 lembar dengan nominal Rp20.000.000,00. (dapat dilihat pada Risalah Rapat Umum Pemegang Saham pada rabu tanggal 30 maret 2022 di hotel Santika Slipi Jakarta Selatan). Berdasarkan Akta Notaris Fatma Yulia, S.H,.M.Kn, Nomor 01 Tanggal 05 Juli 2023 struktur kepengurusan adalah sebagai berikut:

Dari tanggal 04 Juli 2023 s/d 01 Desemberi 2023

1. Pelaksana Tugas Direksi : Ahmad Ismail, ST., MT
2. Komisaris Utama : Muhammad Jamil, M.Ag, Ivlsi
3. Komisaris Anggola : Ahmad Ismail, ST., MT.

Saldo penyertaan modal pada PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru sebesar Rp131.868.039.785,88 tersebut dinilai menggunakan metode ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan (Audited) PT Sarana Pembangunan Pekanbaru Tahun 2023 yang telah diaudit

oleh Kantor Akuntan Publik Boy Febrian dengan Opini Wajar dengan Pengecualian, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.44. Penyertaan Modal pada PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Modal Saham	145.586.000.000,00	145.586.000.000,00
Modal Ditempatkan	9.966.977,00	9.966.977,00
Modal Tambahan	2.050.500.000,00	2.050.500.000,00
Saldo Laba (rugi)	(10.009.820.491,00)	(14.124.823.038,00)
Kepentingan Non Pengendali	4.803.111,00	33.020.778,00
Jumlah	**131.992.443.597,00**	**133.554.664.117,00**

Sumber : Laporan Keuangan BUMD Audited

Sesuai dengan komposisi kepemilikan saham maka kepemilikan Pemerintah Kota Pekanbaru atas PT Sarana Pembangunan Pekanbaru sebesar:

$$\frac{21.200 \text{ lbr saham Pemko}}{21.220 \text{ lbr total saham}} \times \text{Rp } 131.992.443.597{,}00 = \text{Rp } 131.868.039.786{,}00$$

e. PT BANK PERKREDITAN RAKYAT

Saldo penyertaan modal pada PT Bank Perkreditan Rakyat per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp8.910.478.511,02 dan Rp7.682.816.23,80.

Penyertaan modal Pemerintah Kota Pekanbaru pada PT Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Madani sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 107 tanggal 28 Januari 2021 berupa penyertaan modal saham Pemerintah Kota Pekanbaru sebesar Rp8.000.000.000,00 atau 80.000 lembar saham dan PD. Pembangunan Kota Pekanabaru sebesar Rp100.000,00 atau 1 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp100.000,00. Kepemilikan Pemerintah Kota Pekanbaru pada PT BPR Pekanbaru sebesar 99,99%.

Berdasarkan surat Pernyataan Direksi tentang Tanggungjawab atas laporan Keuangan PT. BPR Pekanbaru Madani (PERSERODA) nomor : 571/DIR-UM/III/2024 sebagai Direktur Utama Akhmad Fauzi Lindung Lubis dan sebagai Direktur Al Badri.

Berdasarkan Laporan Keuangan (Audited) PT. BPR Pekanbaru Madani (PERSERODA) Tahun 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Sandra Pracipta, CPA dengan Opini Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar.

Pada Tahun 2023 laba ditahan sebesar Rp1.227.677.625,00 sehingga saldo penyertaan modal pada PT. Bank Perkreditan Rakyat sebesar Rp8.910.478.511,02 yang dinilai menggunakan metode ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan (Audited) PT. Bank Perkreditan Rakyat Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.45. Nilai Ekuitas pada PT. Bank Perkreditan Rakyat per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Modal dasar	20.000.100.000,00	20.000.100.000,00
Modal belum disetorkan	(12.000.000.000,00)	(12.000.000.000,00)
Jumlah modal disetor	8.000.100.000,00	8.000.100.000,00
Saldo laba belum ditentukan tujuannya	(317.187.733,00)	(2.495.035.884,00)
Laba tahun berjalan	1.227.677.625,00	2.177.848.150,00
Saldo laba (rugi)	910.489.892,00	(317.187.734,00)
Jumlah	**8.910.589.892,00**	**7.682.912.266,00**

Sumber : Laporan Keuangan BUMD Audited

$$\frac{\text{Rp } 8.000.000.000 \text{ total saham Pemko}}{\text{Rp } 8.000.100.000 \text{ total saham perseroan}} \times \text{Rp } 8.910.589.892{,}00 = \text{Rp } 8.910.478.511{,}00$$

f. PT BUMI SIAK PUSAKO

Saldo penyertaan modal Pemerintah Kota Pekanbaru pada PT Bumi Siak Pusako per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp3.000.000.000,00 dari total modal sebesar Rp300.000.000.000,00 atau 1,00%. Tidak terdapat perubahan penyertaan modal pada PT Bumi Siak Pusako selama tahun 2022. Penilaian saldo penyertaan modal pada PT Bumi Siak Pusako tersebut menggunakan metode biaya.

5.3.1. Aset Tetap

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
7.020.967.926.817,43	7.078.094.631.794,61

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap menunjukan jumlah dan nilai perolehan Aset Tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Per 31 Desember 2023 dan 2022. Perolehan Aset Tetap berasal dari Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai Aset Tetap tahun anggaran berkenaan serta perolehan aset dari perolehan lainnya yang sah. Saldo Aset Tetap Pemerintah Kota Pekanbaru per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.020.967.926.817,43 mengalami penurunan sebesar Rp57.126.704.977,18 atau 0,81% dari Tahun 2022 sebesar Rp7.078.094.631.794,61 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.46. Aset Tetap Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Rincian Aset	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	Tanah	3.310.154.336.823,00	3.269.570.505.323,00	40.583.831.500,00	1,24
2	Peralatan dan Mesin	1.259.764.848.904,00	1.181.022.857.786,77	78.742.019.117,23	6,67
3	Gedung dan Bangunan	2.702.249.445.482,40	2.397.927.472.461,13	24.321.973.021,30	1,06
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.784.731.177.228,80	4.649.133.348.810,19	135.597.828.418,61	2,92
5	Aset Tetap Lainnya	57.110.242.964,80	56.630.535.923,00	479.437.061,00	0,85
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	330.024.874.062,80	328.998.019.153,52	1.026.854.909,48	0,32
7	Akumulasi Penyusutan	(5.033.998.996.967,00)	(4.656.149.377.663,00)	(377.849.619.004,00)	7,20
	Jumlah	**7.020.967.926.817,43**	**7.078.094.631.794,61**	**(57.126.704.977,18)**	**(0,81)**

Sumber: Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA 2023

Jumlah Aset Tetap sebesar Rp7.020.967.926.817,43 merupakan nilai Aset Tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sampai dengan 31 Desember 2023, dengan rincian Aset Tetap per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.47. Aset Tetap per SKPD Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	862.841.809.083,00	890.590.091.015,00	72.042.878.068,00	8,18
2	Dinas Kesehatan	345.740.702.443,00	341.796.371.838,68	3.037.330.612,32	0,89
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.570.247.176.177,43	3.888.582.647.725,80	(196.255.469.548,37)	(5,15)
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	640.154.259.428,80	596.014.597.365,00	44.139.662.064,00	7,41
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.378.291.199,30	709.759.281,00	668.531.918,00	122,37
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.350.725.863,00	4.302.850.443,00	(209.124.580,00)	(4,86)
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	17.426.780.421,30	15.496.138.369,00	1.930.650.052,00	12,46
8	Dinas Sosial	2.140.215.586,30	2.285.993.227,00	(143.776.641,00)	(6,29)
9	Dinas Tenaga Kerja	1.798.032.752,30	1.903.148.173,00	(105.115.423,00)	(5,55)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	2.559.223.034,00	1.843.344.148,00	715.878.709,00	38,84
11	Dinas Ketahanan Pangan	9.748.881.300,20	9.047.595.625,00	701.285.175,00	7,75
12	Dinas Pertanahan	83.485.793.406,00	82.700.176.980,00	786.983.426,00	1,36
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	149.841.662.196,80	154.000.894.320,00	(5.866.962.126,00)	(3,27)
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.865.219.681,80	1.524.672.962,00	336.537.719,80	22,20
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.816.257.700,00	8.258.990.407,00	557.867.293,00	6,91

No	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
16	Dinas Perhubungan	130.442.540.878,00	122.690.452.970,00	7.752.088.908,00	6,32
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.769.338.706,00	2.259.642.963,00	(490.303.829,00)	(21,57)
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	1.005.971.117,00	276.044.254,00	729.926.863,00	264,42
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Sat. Pint.	80.891.359.819,00	936.599.299.809,00	(36.567.940.342,00)	(33,69)
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	41.736.460.942,00	38.646.397.265,00	3.141.972.677,00	8,13
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.291.397.302,00	15.470.710.765,13	(119.613.401,13)	(0,73)
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	17.034.207.716,00	15.819.144.435,00	1.215.063.281,00	7,62
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	67.234.291.564,00	67.556.679.142,00	(322.388.368,00)	(0,48)
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	154.434.397.204,00	175.760.195.596,00	(21.325.798.392,00)	(12,13)
25	Sekretariat Daerah	384.871.465.578,00	391.323.700.909,00	(4.452.007.891,00)	(1,53)
26	Sekretariat DPRD	67.135.611.330,00	66.452.598.968,00	683.214.962,00	1,03
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	772.168.865,00	983.410.807,00	(211.241.942,00)	(21,48)
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	250.841.364.152,00	362.026.364.729,00	(22.084.446.577,00)	(8,71)
29	Badan Pendapatan Daerah	19.615.212.867,00	14.771.143.935,00	4.844.068.732,00	32,79
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.435.383.896,00	1.842.076.264,00	(738.692.368,00)	(14,41)
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	1.064.108.108,00	447.497.896,00	616.160.364,00	137,84
32	Inspektorat	786.913.967,00	468.097.317,00	341.912.870,00	42,66
33	Kecamatan Bukit Raya	11.202.750.114,00	10.362.671.629,00	888.883.485,00	8,59
34	Kecamatan Tenayan Raya	9.827.691.581,00	9.269.131.847,00	(377.436.368,00)	(4,06)
35	Kecamatan Sail	9.227.319.805,00	9.378.108.140,00	(151.388.195,00)	(1,61)
36	Kecamatan Limo Puluh	20.009.233.478,00	19.945.533.624,00	63.699.854,00	0,32
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	12.171.243.411,00	13.431.741.968,00	(1.260.402.357,00)	(11,19)
38	Kecamatan Sukajadi	12.820.361.379,00	12.748.487.319,00	(119.525.940,00)	(0,94)
39	Kecamatan Payung Sekaki	9.497.447.969,00	9.808.736.340,00	(389.288.371,00)	(3,51)
40	Kecamatan Senapelan	13.597.166.646,00	13.731.061.707,00	(133.361.261,00)	(1,24)
41	Kecamatan Marpoyan Damai	13.917.946.153,00	13.967.732.968,00	(49.786.415,00)	(0,36)
42	Kecamatan Binawidya	13.410.629.861,00	7.132.578.344,00	6.277.048.717,00	87,99
43	Kecamatan Tuah Madani	3.216.715.434,00	3.553.830.460,00	(335.115.558,00)	(9,28)
44	Kecamatan Rumbai	8.111.422.902,00	8.063.387.967,00	58.434.135,00	0,73
45	Kecamatan Rumbai Timur	1.710.845.033,00	1.839.718.962,00	(86.873.329,00)	(4,69)
46	Kecamatan Rumbai Barat	9.041.241.124,00	7.992.968.708,00	48.040.416,00	0,60
47	Kecamatan Kulim	2.503.213.317,00	2.903.193.970,00	(400.306.953,00)	(13,79)
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.294.450.219,00	462.058.767,00	512.588.452,00	166,93
Jumlah		7.020.947.025.817,43	7.078.844.031.794,61	(57.896.794.977,18)	(0,81)

Sumber: Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA 2023

Pada Tahun 2023 terdapat mutasi Aset Tetap baik itu mutasi tambah maupun mutasi kurang yang mempengaruhi saldo akhir Aset Tetap. Mutasi masuk dan mutasi keluar tersebut dipengaruhi oleh:

a. Koreksi saldo awal aset tetap;
b. Harga perolehan aset tetap, yang terdiri dari kapitalisasi dan atribusi;
c. Pencatatan atas beberapa aset yang belum tercatat pada Neraca SKPD;
d. Perpindahan aset antar SKPD;
e. Penghapusan aset tetap karena adanya penjualan aset, hibah, pemusnahan dan perkembangan kebijakan dan peraturan-perundangan terkait aset tetap di beberapa SKPD; dan
f. Pengurangan aset tetap ekstrakomptabel.

Rincian mutasi Aset Tetap Tahun 2023 tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.3.48. Rincian Mutasi Aset Tetap

(dalam rupiah)

Keterangan	Tanah	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Jalan, Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap	3.269.570.505.323,00	1.191.333.827.788,77	2.287.027.672.867,10	4.648.151.340.910,00	56.638.830.833,00	339.858.978.153,33	11.771.243.889.457,00
	-	-	-	-	-	-	-
Penambah dan Pengurang Tahun Berjalan							
A Mutasi Tambah	80.584.678.157,00	153.088.548.341,00	122.716.952.956,43	139.395.481.311,00	14.871.027.210,00	32.774.134.788,43	533.980.127.814,81
1 Hasil Pengadaan Aset Tetap	-	95.889.867.594,00	89.411.529.999,43	112.791.025.011,00	976.312.163,00	20.774.134.288,00	299.899.564.333,43
2 Penambahan	21.948.324.700,00	13.338.361.325,00	9.282.441.106,00	15.233.918.671,00	13.948.589.750,00		73.241.880.951,00
3 Mutasi	1.676.631.156,00	22.825.140.466,00	1.960.951.516,00				26.462.723.138,00
4 Hasil Aset Tetap		20.429.245.250,00	23.200.328.100,00	4.366.053.728,00	7.025.460,00		47.996.652.538,00
5 Koreksi	43.707.715.000,00					0,43	43.707.715.000,43
B Mutasi Kurang	35.784.238.697,00	74.838.021.222,77	86.360.379.035,13	797.574.854,00	14.360.229.255,00	27.707.276.300,00	242.816.213.768,89
1 Penghapusan	21.835.380.000,00	35.591.001.964,00	37.222.520.091,00	797.574.854,00	809.214.000,00	-	102.214.703.917,00
2 Aset Tetap Reklasifikasi		768.727.696,00	580.947.979,00		70.221.000,00		1.349.896.675,00
3 Penambahan/Bibitan		1.863.857.696,00	58.897.200,00		13.571.092.255,00		15.293.427.856,00
4 Mutasi	1.676.631.156,00	22.825.140.466,00	1.960.951.516,00				26.462.723.138,00
5 Hasil Aset Tetap		-	39.205.960.279,00		-	27.707.276.300,00	66.913.236.579,00
6 Koreksi	12.272.427.541,00	0,77	15.200.999.200,13	0,13		-	27.473.426.742,03
JUMLAH	3.316.154.336.823,00	1.269.784.448.906,00	2.312.248.465.682,43	4.784.731.177.229,00	57.149.628.788,00	339.925.836.641,76	12.994.824.493.494,49

Sumber: Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

5.3.1.3.1. Tanah

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
3.310.154.236.823,00	3.269.570.505.323,00

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.310.154.336.823,00 mengalami kenaikan sebesar Rp40.583.831.500,00 dari Tahun 2022 sebesar Rp3.269.570.505.323,00 dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.3.49. Rincian Aset Tanah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	Tanah Perkampungan	-	-	-	0,00
2	Tanah Hutan	5.313.946.030,00	5.313.946.030,00	-	0,00
3	Tanah Danau/Rawa	-	-	-	0,00
4	Tanah Alang-alang dan Padang Rumput	-	-	-	0,00
5	Tanah Penggunaan Lain	-	-	-	0,00
6	Tanah Untuk Bangunan Gedung	-	-	-	0,00
7	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	-	-	-	0,00
8	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	30.535.776.769,00	30.535.776.769,00	-	0,00
9	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	286.941.574.367,00	278.602.726.867,00	8.338.847.500,00	2,99
10	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	685.371.548.243,00	652.961.708.243,00	32.409.840.000,00	4,96

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
11	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	3.045.358.744,00	3.045.358.744,00	-	0,00
12	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	1.148.130.000,00	-	1.148.130.000,00	0,00
13	Tanah Persil Lainnya	1.847.808.000,00	1.847.808.000,00	-	0,00
14	Tanah Basah	18.751.364.234,00	18.751.364.234,00	-	0,00
15	Tanah Kering	22.047.896.578,00	20.711.562.578,00	1.336.334.000,00	6,45
16	Tanah Perkebunan	14.084.514.662,00	14.084.514.662,00	-	0,00
17	Tanah Padang Alang-Alang/Rumput	32.520.665.712,00	32.520.665.712,00	-	0,00
18	Tanah Pertanian	3.014.040.400,00	3.014.040.400,00	-	0,00
19	Tanah Non Persil Lainnya	4.667.305.913,00	4.667.305.913,00	-	0,00
20	Tanah Lapangan Olahraga	15.636.095.164,00	15.636.095.164,00	-	0,00
21	Tanah Lapangan Pemimburan	4.717.245.720,00	4.717.245.720,00	-	0,00
22	Tanah untuk Jalan	2.089.221.818.203,00	2.070.065.558.283,00	19.156.260.000,00	0,93
23	Tanah untuk Bangunan Air	15.505.365.781,00	15.505.365.781,00	-	0,00
24	Tanah untuk Bangunan Instalasi	23.092.911.268,00	23.092.911.268,00	-	0,00
25	Tanah untuk Bangunan Jaringan	3.363.320.113,00	3.363.320.113,00	-	0,00
26	Tanah untuk Bangunan Bersejarah	560.460.000,00	560.460.000,00	-	0,00
27	Tanah untuk Makam	23.262.386.761,00	23.262.386.761,00	-	0,00
28	Tanah untuk Taman	21.666.895.160,00	43.472.275.160,00	(21.805.380.000,00)	(50,16)
29	Tanah untuk Lahan	-	-	-	0,00
30	Tanah Kampung	3.282.176.000,00	3.282.176.000,00	-	0,00
31	Lapangan Lainnya	535.935.000,00	535.935.000,00	-	0,00
	JUMLAH	**3.310.154.336.823,00**	**3.269.570.505.323,00**	**40.583.831.500,00**	**1,24**

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA 2023

Rincian aset tetap tanah per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.50. Aset Tetap Tanah per SKPD

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	362.873.871.708,00	330.215.869.511,00	32.662.671.197,00	9,89
2	Dinas Kesehatan	52.980.741.665,00	52.980.741.665,00	-	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.059.223.237.854,00	2.059.223.237.854,00	-	0,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	39.379.458.233,00	17.738.934.233,00	21.640.524.000,00	121,99
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	696.250.000,00	696.250.000,00	-	0,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.801.045.026,00	1.801.045.026,00	-	0,00
7	Dinas Sosial	775.425.000,00	775.425.000,00	-	0,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	486.000.000,00	486.000.000,00	-	0,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	0,00
10	Dinas Perumahan	47.735.056.405,00	47.735.056.405,00	-	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	39.653.348.300,00	39.653.348.300,00	-	0,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.074.000.000,00	1.074.000.000,00	-	0,00
13	Dinas Perhubungan	38.264.152.000,00	26.966.277.000,00	11.297.875.000,00	41,90

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	35.175.000.000,00	35.175.000.000,00	-	0,00
15	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.719.032.094,00	4.719.032.094,00	-	0,00
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.015.736.141,00	6.015.736.141,00	-	0,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	98.479.320.000,00	98.479.320.000,00	-	0,00
18	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	91.410.323.652,00	94.369.351.152,00	(2.959.027.500,00)	(3,14)
19	Sekretariat Daerah	158.094.494.434,00	160.307.325.631,00	(252.831.197,00)	(0,16)
20	Sekretariat DPRD	20.564.039.200,00	20.564.039.200,00	-	0,00
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	222.209.349.069,00	243.814.729.069,00	(21.805.380.000,00)	(8,94)
22	Badan Pendapatan Daerah	2.838.000.000,00	2.075.000.000,00	763.000.000,00	36,77
23	Kecamatan Bukit Raya	4.036.328.554,00	4.036.328.554,00	-	0,00
24	Kecamatan Tenayan Raya	1.880.358.000,00	1.880.358.000,00	-	0,00
25	Kecamatan Sail	5.282.350.000,00	5.282.350.000,00	-	0,00
26	Kecamatan Limapuluh	10.059.239.142,00	10.059.239.142,00	-	0,00
27	Kecamatan Pekanbaru Kota	4.502.804.000,00	5.265.804.000,00	(763.000.000,00)	(14,49)
28	Kecamatan Sukajadi	8.291.102.013,00	8.291.102.013,00	-	0,00
29	Kecamatan Payung Sekaki	5.398.437.354,00	5.398.437.354,00	-	0,00
30	Kecamatan Senapelan	6.596.645.000,00	6.596.645.000,00	-	0,00
31	Kecamatan Marpoyan Damai	7.215.045.000,00	7.215.045.000,00	-	0,00
32	Kecamatan Binawidya	2.350.000.000,00	2.350.000.000,00	-	0,00
33	Kecamatan Tuah Madani	907.348.000,00	907.348.000,00	-	0,00
34	Kecamatan Rumbai	2.113.185.000,00	2.113.185.000,00	-	0,00
35	Kecamatan Rumbai Timur	78.800.000,00	78.800.000,00	-	0,00
36	Kecamatan Rumbai Barat	1.912.924.000,00	1.912.924.000,00	-	0,00
37	Kecamatan Kulim	552.000.000,00	552.000.000,00	-	0,00
	JUMLAH	**3.310.154.136.823,00**	**3.269.570.505.323,00**	**40.583.631.500,00**	**1,24**

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Tabel 5.3.51. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah SKPD Tahun 2023

(dalam rupiah)

NO	Nama SKPD	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Pendidikan	330.215.086.511,00	32.963.671.107,00	-	363.178.670.758,00
2	Dinas Kesehatan	52.960.741.665,00	-	-	52.960.741.665,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.059.223.237.864,00	-	-	2.059.223.237.864,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17.736.264.235,00	21.943.024.000,00	-	39.679.488.235,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	696.250.000,00	-	-	696.250.000,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.691.345.035,00	-	-	1.691.345.035,00
7	Dinas Sosial	770.425.000,00	-	-	770.425.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	486.800.000,00	-	-	486.800.000,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	4.000.000.000,00	-	-	4.000.000.000,00
10	Dinas Perhubungan	47.775.056.405,00	-	-	47.775.056.405,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	39.693.349.300,00	-	-	39.693.349.300,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.074.800.000,00	-	-	1.074.800.000,00
13	Dinas Perhutanan	26.986.277.000,00	11.267.875.000,00	-	38.254.152.000,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	35.175.000.000,00	-	-	35.175.000.000,00

NO	Nama SKPD	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2023
			Penambahan	Pengurangan	
15	Dinas Kependudukan dan Olahraga	4.719.032.064,00	-	-	4.719.032.064,00
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.015.736.141,00	-	-	6.015.736.141,00
17	Dinas Perdesaan dan Perdesaan	66.479.205.000,00	-	-	66.479.205.000,00
18	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	94.369.351.152,00	-	2.959.027.500,00	91.410.323.652,00
19	Sekretariat Daerah	195.307.925.611,00	-	252.831.187,00	195.054.494.424,00
20	Sekretariat DPRD	20.569.039.359,00	-	-	20.569.039.359,00
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	243.814.729.089,00	-	21.205.380.000,00	222.609.349.089,00
22	Badan Pendapatan Daerah	2.073.200.000,00	753.000.000,00	-	2.826.200.000,00
23	Kecamatan Bukit Raya	4.038.328.354,00	-	-	4.038.328.354,00
24	Kecamatan Tenayan Raya	1.880.358.000,00	-	-	1.880.358.000,00
25	Kecamatan Sail	5.292.390.000,00	-	-	5.292.390.000,00
26	Kecamatan Limapuluh	16.099.239.142,00	-	-	16.099.239.142,00
27	Kecamatan Pekanbaru Kota	5.255.864.000,00	-	732.000.000,00	4.523.864.000,00
28	Kecamatan Sukajadi	8.351.102.013,00	-	-	8.351.102.013,00
29	Kecamatan Payung Sekaki	5.398.407.354,00	-	-	5.398.407.354,00
30	Kecamatan Senapelan	6.596.945.000,00	-	-	6.596.945.000,00
31	Kecamatan Marpoyan Damai	7.215.345.000,00	-	-	7.215.345.000,00
32	Kecamatan Rumbai	2.350.380.000,00	-	-	2.350.380.000,00
33	Kecamatan Tuah Madani	907.340.000,00	-	-	907.340.000,00
34	Kecamatan Rumbai	2.715.185.000,00	-	-	2.715.185.000,00
35	Kecamatan Rumbai Timur	70.600.000,00	-	-	70.600.000,00
36	Kecamatan Rumbai Barat	1.912.524.000,00	-	-	1.912.524.000,00
37	Kecamatan Rutan	952.000.000,00	-	-	952.000.000,00
	JUMLAH	3.269.570.505.323,00	66.364.070.197,00	25.709.238.687,00	3.310.154.336.823,00

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Tanah Tahun 2023 adalah:

1	**Saldo Awal Aset Tetap Tanah Tahun 2023** ⟹		**3.269.570.505.323,00**
	Koreksi Saldo Awal		-
2	**Penambah dan pengurang tahun berjalan**		
A	**Mutasi Tambah**	66.364.070.197,00	
	- Harga Perolehan Aset Tetap		
	- Inventarisasi	21.640.534.000,00	
	- Pindah SKPD	1.015.031.197,00	
	- Koreksi	43.707.715.000,00	
	- Reklas Aset	-	
B	**Mutasi Kurang**	25.709.238.687,00	
	- Penghapusan	21.805.380.000,00	
	- Aset elektro		
	- Pindah SKPD	1.015.031.197,00	
	- Reklas	2.909.027.500,00	
	- Koreksi Saldo Awal		
3	**Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023** ⟹		**3.310.154.336.823,00**

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa :

1. Penambahan Aset Tanah sebesar Rp21.640.524.000,00 merupakan hibah dari FASUM FASOS PSU Perumahan 2023 Tahap 1.
2. Penambahan Aset Tanah sebesar Rp1.015.831.197,00 adalah karena adanya perpindahan aset antar SKPD yaitu di Dinas Pendidikan sebesar Rp252.831.197,00, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp763.000.000,00.
3. Penambahan Aset Tanah sebesar Rp43.707.715.000,00 merupakan koreksi karena adanya Penetapan Nila Objek Tanah (NJOP) yang terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp32.409.840.000,00 dengan Nomor : KD.00.01/Bapenda-PDI/LXXVII/2023 dan Dinas Perhubungan sebesar Rp11.297.875.000,00 dengan Nomor : S.KD.01.00/Bapenda/578/2023.
4. Pengurangan Aset Tanah sebesar Rp21.805.380.000,00 karena adanya penghapusan aset yang di hibahkan ke Provinsi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan SK Nomor 841 tahun 2021.
5. Pengurangan Aset Tanah sebesar Rp2.959.027.500,00 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian karena adanya reklas aset ke Kerja Sama Pemanfaatan.
6. Pengurangan Aset Tanah sebesar Rp1.015.831.197,00 adalah karena perpindahan aset antar SKPD yaitu dari Sekretariat Daerah sebesar Rp252.831.197,00 dan Kecamatan Pekanbaru Kota sebesar Rp763.000.000,00.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
1.259.764.846.904,00	1.181.022.827.786,77

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.259.764.846.904,00 mengalami kenaikan sebesar Rp78.742.019.117,23 atau 6,67% dari Tahun 2022 sebesar Rp1.181.022.827.786,77 dengan rincian Aset Tetap peralatan dan mesin sebagai berikut:

Tabel 5.3.52. Peralatan dan Mesin per SKPD

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	182.263.920.800,00	169.511.921.791,00	12.745.981.109,00	7,52
2	Dinas Kesehatan	210.006.329.304,00	189.438.952.086,77	20.558.965.217,23	11,34
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	107.017.773.489,00	77.545.185.765,00	29.361.535.724,00	34,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.006.661.300,00	7.516.025.276,00	3.490.636.024,00	46,39
5	Satuan Polis Pamong Praja	5.821.064.791,00	7.433.230.101,00	1.612.165.310,00	19,84
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.028.945.100,00	7.627.864.825,00	1.598.919.725,00	5,12
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	35.482.105.291,00	31.441.427.476,00	4.040.677.815,00	12,71
8	Dinas Sosial	5.252.367.892,00	5.322.367.892,00	(70.000.000,00)	(1,32)
9	Dinas Tenaga Kerja	4.912.786.240,00	4.425.956.240,00	(486.830.000,00)	(9,12)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.441.372.337,00	3.740.287.889,00	1.771.282.448,00	45,65
11	Dinas Kebakaran Negara	5.785.471.266,00	5.041.857.141,00	743.614.124,00	15,02
12	Dinas Perpustakaan	5.275.737.882,00	4.680.896.041,00	694.841.825,00	14,89
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	91.261.000.672,00	74.779.646.872,00	1.437.364.800,00	1,92
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.492.786.491,00	3.572.730.601,00	897.995.800,00	13,68
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.292.364.792,00	5.716.676.240,00	1.339.688.542,00	22,23

No	Nama OPD	Tahun 2022	Tahun 2023	Selisih	
				Penurunan	%
16	Dinas Perhubungan	116.251.776.259,00	116.250.511.203,00	(1.265.754.182,00)	(2,22)
17	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	19.357.972.819,00	19.372.912.795,00	14.939.297,00	0,13
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.735.588.538,00	3.387.740.238,00	(1.347.848.300,00)	(28,54
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	35.239.554.482,00	37.319.687.291,00	(17.295.432.788,00)	(46,45)
20	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5.438.223.453,00	4.771.205.805,00	1.468.031.084,00	34,36
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.881.857.834,00	13.133.969.681,00	736.901.662,00	7,15
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.152.168.598,00	3.498.722.175,00	1.753.435.185,00	40,28
23	Dinas Perumahan dan Permukiman	6.399.998.985,00	6.399.998.985,00	-	0,00
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	13.661.126.861,00	12.160.694.725,00	1.455.255.167,00	14,34
25	Sekretariat Daerah	210.398.212.965,00	208.776.691.941,00	3.021.192.696,00	1,77
26	Sekretariat DPRD	10.668.278.962,00	11.354.649.703,00	(686.437.741,00)	(1,56)
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.598.250.455,00	5.479.634.965,00	121.215.590,00	2,21
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	22.766.554.825,00	19.127.522.035,00	3.639.511.987,00	15,0
29	Badan Pendapatan Daerah	35.881.154.958,00	33.968.439.118,00	3.333.714.385,00	15,03
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.787.438.567,00	8.281.704.772,00	515.733.694,00	6,21
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	4.221.490.258,00	2.523.457.770,00	1.697.992.488,00	67,28
32	Inspektorat	6.665.096.843,00	5.212.568.800,00	1.352.417.673,00	36,22
33	Kecamatan Rumbai	4.266.855.936,00	4.151.675.251,00	134.376.892,00	3,34
34	Kecamatan Tenayan Raya	4.614.696.854,00	4.908.835.734,00	(276.896.760,00)	(5,62)
35	Kecamatan Sail	2.463.379.868,00	2.413.805.468,00	57.705.592,00	3,61
36	Kecamatan Limo Pekan	2.254.364.517,00	1.980.212.517,00	236.782.000,00	11,46
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	2.476.803.243,00	2.461.992.243,00	10.836.000,00	0,61
38	Kecamatan Sukajadi	2.816.140.245,00	2.510.655.245,00	105.585.000,00	4,26
39	Kecamatan Payung Sekaki	4.191.659.232,00	4.148.534.960,00	43.134.232,00	1,04
40	Kecamatan Senapelan	2.153.955.839,00	2.324.101.809,00	(170.146.090,00)	(5,45)
41	Kecamatan Marpoyan Damai	3.078.213.837,00	2.866.162.737,00	212.836.340,00	7,42
42	Kecamatan Rumbai Pesisir	4.868.576.440,00	4.960.694.307,00	(91.891.533,00)	(1,85
43	Kecamatan Lima Puluh	2.574.885.152,00	2.574.885.152,00	-	0,00
44	Kecamatan Pekanbaru Kota	3.862.950.439,00	3.572.636.405,00	290.314.306,00	13,34
45	Kecamatan Pekanbaru Timur	2.261.022.836,00	2.212.986.020,00	280.632.160,00	12,35
46	Kecamatan Pekanbaru Barat	4.276.944.738,00	4.370.980.156,00	(97.270.468,00)	(2,23)
47	Kecamatan Kulim	2.799.164.600,00	2.799.164.600,00	-	0,00
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.958.751.511,00	3.672.669.502,00	657.694.389,00	28,24
	Jumlah	1.260.764.966.994,00	1.091.822.837.736,77	78.192.818.117,23	6,67

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA 2023

Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3.53. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD Tahun 2023

(dalam rupiah)

Nama SKPD	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2023
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Pendidikan	999.311.321.701,00	14.345.869.479,00	1.803.908.290,00	182.253.582.890,00
Dinas Kesehatan	998.426.962.986,77	23.550.398.905,00	1.340.948.587,77	217.036.023.304,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	77.548.155.765,00	52.574.862.114,00	27.387.109.389,00	103.012.723.490,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.570.825.219,00	3.912.913.837,00	474.372.100,00	11.009.061.956,00
Satuan Polisi Pamong Praja	7.438.252.191,00	1.730.124.000,00	344.308.000,00	8.823.064.791,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.837.464.825,00	900.000.176,00	2.187.519,00	8.335.649.180,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	31.461.427.413,00	4.284.979.597,00	386.391.000,00	35.460.135.001,00
Dinas Sosial	8.327.367.592,00	-	75.308.000,00	8.252.367.592,00
Dinas Tenaga Kerja	4.422.396.345,00	-	5.308.000,00	4.417.788.345,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	3.740.367.888,00	1.701.282.448,00	-	5.441.370.337,00
Dinas Ketahanan Pangan	6.941.997.141,00	1.647.033.594,00	692.108.330,00	7.796.471.265,00
Dinas Pertanahan	4.999.890.577,00	931.985.335,00	342.237.500,00	5.579.737.902,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	74.770.448.872,00	1.457.384.000,00	-	76.227.832.872,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.570.720.691,00	997.885.936,00	-	9.568.706.491,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga	6.514.375.385,00	1.391.668.147,00	45.308.000,00	7.350.764.792,00
Dinas Perhubungan	118.953.571.038,00	4.672.018.036,00	7.328.713.508,00	116.297.775.256,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan	18.313.312.762,00	374.257.459,00	349.998.208,00	18.337.612.013,00

Nama SKPD	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2023
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.397.740.230,00	1.342.946.309,00	-	4.730.686.539,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	37.816.967.261,00	3.923.431.809,00	21.201.984.619,00	20.538.564.451,00
Dinas Kependudukan dan Olahraga	4.771.265.808,00	1.668.031.594,00	-	6.439.323.402,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.133.960.976,00	1.132.860.896,00	425.069.338,00	10.841.952.634,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.448.723.119,00	1.703.430.169,00	-	5.152.156.296,00
Dinas Pertanian dan Perkanan	6.088.909.565,00	-	-	6.088.909.565,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10.146.094.726,00	1.455.050.167,00	-	11.601.165.887,00
Sekretariat Daerah	269.735.081.961,00	10.265.869.960,00	6.712.717.856,00	270.288.212.065,00
Sekretariat DPRD	41.354.646.706,00	991.538.293,00	1.557.966.047,00	40.588.218.952,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.478.934.965,00	1.010.597.305,00	892.341.836,00	5.589.250.460,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset	19.107.520.038,00	5.902.229.867,00	1.648.713.900,00	23.786.034.005,00
Badan Pendapatan Daerah	23.368.420.118,00	2.354.786.269,00	1.072.000,00	25.032.134.387,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber	6.261.704.703,00	799.562.277,00	103.026.383,00	6.757.438.597,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	2.522.467.779,00	1.987.862.817,00	289.810.329,00	4.221.460.256,00
Inspektorat	3.212.598.808,00	1.282.431.823,00	-	4.495.030.640,00
Kecamatan Bukitraya	4.151.678.213,00	164.522.862,00	33.146.380,00	4.296.055.695,00
Kecamatan Tenayan Raya	4.906.855.754,00	80.500.500,00	356.449.280,00	4.630.896.034,00
Kecamatan Sail	2.415.809.498,00	67.760.500,00	-	2.483.570.998,00
Kecamatan Limo Puluh	1.978.210.317,00	226.764.800,00	-	2.204.994.517,00
Kecamatan Pekanbaru Kota	2.461.963.343,00	15.030.900,00	-	2.476.993.243,00
Kecamatan Sukajadi	2.013.569.245,00	165.580.000,00	-	2.179.149.245,00
Kecamatan Payung Sekaki	4.148.524.909,00	43.134.322,00	-	4.191.659.232,00
Kecamatan Senapelan	2.324.151.809,00	-	169.146.320,00	2.155.005.489,00
Kecamatan Marpoyan Damai	2.858.182.737,00	257.348.300,00	46.316.380,00	3.079.214.657,00
Kecamatan Binawidya	4.668.084.927,00	353.430.000,00	254.439.467,00	4.968.075.460,00
Kecamatan Tuah Madani	2.379.866.792,00	-	-	2.379.866.792,00
Kecamatan Rumbai	3.073.809.805,00	491.560.300,00	25.469.180,00	3.450.080.805,00
Kecamatan Rumbai Timur	2.012.360.826,00	248.662.100,00	-	2.261.022.926,00
Kecamatan Rumbai Barat	4.270.915.196,00	76.815.532,00	175.389.380,00	4.279.644.720,00
Kecamatan Kulim	2.799.165.680,00	-	-	2.799.165.680,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.673.869.002,00	1.685.375.081,00	758.290.592,00	4.600.753.391,00
JUMLAH	**1.991.022.827.796,77**	**153.888.540.341,00**	**74.938.521.223,77**	**1.259.764.846.964,00**

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Penambahan dan pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

1 Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Th 2023 ==========			1.991.022.827.796,77
2 Penambah dan pengurang tahun berjalan			
A Mutasi Tambah		153.888.540.341,00	111.674.303.811,00
- Harga Perolehan Aset Tetap	65.808.057.344,00		42.006.236.030,00
- Rentis	31.426.345.280,00		
- Inventarisasi	15.238.307.020,00		
- Mutasi	32.925.140.497,00		
B Mutasi Kurang		74.938.521.223,77	
- Penghapusan	38.561.001.864,00		
- Aset rusak	766.713.696,00		
- Inventarisasi Ekstra	1.685.657.066,00		
- Pindah objek	32.925.140.497,00		
- Rentis			
- Koreksi Saldo Awal	0,77		
3 Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023==========			1.259.764.846.964,00

Harga Perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari pembelian pengadaan Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.3.54. Harga Perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	6.836.658.000,00
2	Dinas Kesehatan	16.174.921.209,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.154.307.994,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.650.953.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	-
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	393.069.178,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.292.640.000,00
8	Dinas Sosial	-
9	Dinas Tenaga Kerja	-
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	113.836.400,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	188.953.000,00
12	Dinas Pertanahan	-
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.261.385.000,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	897.985.800,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
16	Dinas Perhubungan	2.601.949.650,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	188.730.460,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	104.007.000,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.923.431.820,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	178.694.000,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	467.376.000,00
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	67.760.000,00
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	-
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-
25	Sekretariat Daerah	9.659.045.450,00
26	Sekretariat DPRD	901.538.293,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	1.672.403.000,00
29	Badan Pendapatan Daerah	2.179.686.200,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	102.425.000,00
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	7.500.000,00
32	Inspektorat	-
33	Kecamatan Bukitraya	112.210.000,00
34	Kecamatan Tenayan Raya	-
35	Kecamatan Sail	67.785.500,00
36	Kecamatan Lima Puluh	226.782.000,00
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	15.030.000,00
38	Kecamatan Sukajadi	105.580.000,00
39	Kecamatan Payung Sekaki	-
40	Kecamatan Senapelan	-
41	Kecamatan Marpoyan Damai	257.348.300,00
42	Kecamatan Binawidya	353.430.000,00
43	Kecamatan Tuah Madani	-
44	Kecamatan Rumbai	401.683.300,00
45	Kecamatan Rumbai Timur	223.183.000,00
46	Kecamatan Rumbai Barat	9.379.000,00
47	Kecamatan Kulim	-
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	176.790.000,00
Jumlah		**65.988.667.544,00**

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari reklas aset lain sebesar Rp39.428.345.280,00 yang terdapat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp99.462.000,00 dan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp39.328.883.280,00 dari aset tetap Bangunan dan Gedung ke aset tetap Peralatan dan Mesin. Penambahan aset karena inventarisasi sebesar Rp15.338.3870,00, dan penambahan yang berasal dari mutasi sebesar Rp32.925.140.497,00.

Terdapat mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp32.925.140.497,00 yang berasal dari mutasi di beberapa SKPD. Untuk pengurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dikarenakan penghapusan sebesar Rp39.581.001.964,00, adapun rincian Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.55. Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	1.253.075.511,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja	344.300.000,00
3	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	265.381.000,00
4	Dinas Sosial	70.000.000,00
5	Dinas Tenaga Kerja	5.500.000,00
6	Dinas Ketahanan Pangan	359.877.736,00
7	Dinas Pertanahan	191.070.000,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	45.000.000,00
9	Dinas Perhubungan	6.789.100.000,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	349.966.200,00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21.201.864.819,00
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	409.969.338,00
13	Sekretariat Daerah	4.880.968.842,00
14	Sekretariat DPRD	1.557.966.047,00
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	188.913.341,00
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	77.000.000,00
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	193.828.383,00
18	Kecamatan Bukit Raya	30.146.000,00
19	Kecamatan Tenayan Raya	306.449.200,00
20	Kecamatan Senapelan	130.146.000,00
21	Kecamatan Marpoyan Damai	45.316.000,00
22	Kecamatan Sinawalaya	254.436.467,00
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	636.741.276,00
	JUMLAH	**39.581.001.964,00**

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dikarenakan Aset Tetap ekstra komptabel sebesar Rp768.721.696,00 merupakan belanja yang menjadi kapitalisasi ekstra yang berada pada beberapa SKPD.

Tabel 5.3.56. Aset Tetap Ektrakomtabel Peralatan dan Mesin per SKPD Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah Aset Ekstrakomptabel
1	Dinas Pendidikan	6.320.000,00
2	Dinas Kesehatan	10.804.300,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.187.810,00
4	Dinas Perhubungan	539.613.586,00
5	Sekretariat Daerah	198.024.000,00
8	Badan Pendapatan Daerah	1.272.000,00
	JUMLAH	**768.721.696,00**

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dikarenakan inventarisasi ektra sebesar Rp1.663.657.066,00, rincian inventarisasi ektra Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.57. Inventarisasi Ektra Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah Aset Ekstrakomptabel
1	Dinas Pendidikan	1.595.588.290,00
2	Dinas Kesehatan	68.068.776,00
JUMLAH		1.663.657.066,00

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Pengurangan Aset Aset Tetap Peralatan dan Mesin karna mutasi sebesar Rp32.925.140.497,00 dapat dilihat rinciannya per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.58. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah Mutasi Aset
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27.307.129.385,00
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	474.877.100,00
3	Dinas Ketahanan Pangan	530.281.192,00
4	Dinas Pertanahan	51.167.500,00
5	Sekretariat Daerah	1.633.725.114,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	743.428.484,00
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.571.713.900,00
8	Badan Penelitian dan Pengembangan	289.810.326,00
9	Kecamatan Rumbai	25.469.100,00
10	Kecamatan Rumbai Barat	175.969.000,00
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	121.549.414,00
12	Dinas Pertanahan	
JUMLAH		32.925.140.497,00

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
2.312.249.445.482,43	2.287.927.472.461,13

Saldo aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.312.249.445.482,43 mengalami kenaikan sebesar Rp24.321.973.021,30 atau 1,06% dari Tahun 2022 sebesar Rp2.287.927.472.461,13 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.3.59. Rincian Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Gedung dan Bangunan	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	-	0,00
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	-	-	0,00
3	Bangunan bersejarah	-	-	-	0,00
4	Tugu Peringatan	-	-	-	0,00
5	Monumen Bangunan Bersejarah	-	-	-	0,00
6	Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-	-	0,00
7	Bangunan Menara	-	-	-	0,00
8	Bangunan Gedung Kantor	1.139.730.782.187,43	1.187.896.633.297,00	(39.176.761.999,57)	(3,35)
9	Bangunan Gudang	4.741.310.965,00	4.100.263.401,00	585.047.542,00	13,28
10	Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	3.028.321.307,00	2.028.321.307,00	-	0,00
11	Bangunan Gedung Instalasi	6.705.624.470,00	4.299.427.515,00	2.406.196.955,00	97,68
12	Bangunan Gedung Laboratorium	12.963.336.720,00	12.963.336.720,00	-	0,00
13	Bangunan Konstruksi	170.167.217.213,00	163.756.646.396,00	6.410.570.817,00	3,91
14	Bangunan Gedung/Laboratorium/Observatorium	50.963.436,00	50.963.436,00	-	0,00
15	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	10.628.013.377,00	8.819.447.228,13	1.706.566.118,87	19,16
16	Bangunan Gedung Tempat Perkantoran	25.689.239.816,00	25.539.236.816,00	-	0,00
17	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	525.082.561.209,00	473.694.197.837,00	51.388.363.372,00	10,85
18	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	22.583.589.190,00	22.583.589.190,00	-	0,00
19	Bangunan Gedung Perdagangan/Kepentingan/Pasar	44.922.037.752,00	64.054.921.932,00	(19.132.884.286,00)	(29,87)
20	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	8.688.376.629,00	8.541.376.629,00	147.300.000,00	1,72
21	Bangunan Gedung Garasi/Pool	1.700.196.981,00	1.700.196.981,00	-	0,00
22	Bangunan Gedung Perpotong Hewan	1.750.817.725,00	1.750.817.725,00	-	0,00
23	Bangunan Gedung Perpustakaan	7.988.043.352,00	7.810.375.007,00	175.668.225,00	2,25
24	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	11.273.496.200,00	11.273.496.200,00	-	0,00
25	Bangunan Terhuka	1.143.375.079,00	1.143.375.079,00	-	0,00
26	Bangunan Industri	1.255.031.300,00	1.255.031.300,00	-	0,00
27	Bangunan Peternakan/Perikanan	836.989.700,00	836.989.700,00	-	0,00
28	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	86.103.107.077,00	83.265.191.085,00	2.837.915.992,00	3,41
29	Bangunan Fasilitas Umum	46.499.749.472,00	41.279.091.937,00	5.220.657.535,00	12,65
30	Bangunan Pantai	2.805.317.696,00	2.456.810.000,00	348.768.536,00	14,20
31	Bangunan Stasiun Bus	5.367.811.203,00	5.367.811.203,00	-	0,00
32	Taman	8.094.730.049,00	7.736.788.811,00	388.848.138,00	4,78
33	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.211.184.127,00	3.105.796.296,00	105.380.831,00	3,39
34	Rumah Negara Golongan I	42.512.432.676,00	37.210.326.343,00	5.302.106.235,00	14,25
35	Rumah Tidak Bersusun	625.091.000,00	225.040.000,00	400.051.000,00	177,77
36	Rumah Negara Golongan II	18.397.928.081,00	18.273.844.081,00	124.084.000,00	0,70
37	Rumah Negara Golongan III	3.042.276.362,00	2.837.702.362,00	204.574.000,00	8,38
38	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Pendidikan	1.232.104.089,00	991.212.941,00	300.891.148,00	30,62
39	Asrama	19.869.872.102,00	19.869.872.102,00	-	0,00
40	Pos/Rumah Susun	83.690.978.625,00	83.690.978.625,00	-	0,00
41	Tugu	8.727.910.416,50	8.537.851.626,00	190.058.790,00	2,23
42	Bangunan Peninggalan	4.739.967.171,50	4.739.967.171,00	-	0,00
43	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	1.016.313.182,00	1.209.371.782,00	(193.058.990,00)	(15,77)
44	Bangunan Menara Telekomunikasi	668.664.000,00	668.664.000,00	-	0,00
45	Tugu/Tanda Batas Administrasi	307.032.000,00	-	307.032.000,00	0,00
46	Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	131.241.332,00	131.241.332,00	-	0,00
47	Pagar	11.102.457.642,50	7.161.507.628,00	3.940.950.014,00	55,03
	Jumlah	2.312.348.448.482,43	2.287.627.473.481,13	24.721.975.001,30	1,08

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.3.60. Aset Gedung dan Bangunan per SKPD

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	722.861.239.429,00	669.393.152.051,00	53.468.087.378,00	7,99
2	Dinas Kesehatan	247.994.805.910,00	239.268.524.704,00	8.726.281.206,00	3,65
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	729.585.722.986,43	748.999.504.995,00	(19.413.782.408,57)	(2,59)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	70.980.300.467,00	69.774.317.467,00	1.205.983.000,00	1,73
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.256.650.422,00	1.049.536.400,00	206.514.022,00	100,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10.086.761.805,00	9.939.461.805,00	147.300.000,00	1,48
7	Dinas Sosial	1.379.706.000,00	1.379.706.000,00	-	0,00
8	Dinas Tenaga Kerja	661.846.600,00	661.846.600,00	-	100,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	656.471.496,00	656.471.496,00	-	0,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	3.699.244.150,00	3.299.234.550,00	391.010.700,00	11,85
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	86.552.311.982,00	85.670.166.982,00	882.716.000,00	1,15
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	402.036.000,00	402.036.000,00	-	0,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.713.883.827,00	4.332.978.572,00	380.685.055,00	8,79
14	Dinas Perhubungan	24.785.540.285,00	24.785.540.285,00	-	0,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pi	31.051.288.282,00	67.164.965.683,00	(36.113.677.401,00)	(53,78)
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	25.469.015.646,00	22.735.424.470,00	2.733.591.176,00	12,02
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18.176.698.383,00	18.006.815.158,13	170.883.224,87	0,95
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12.372.105.126,00	11.815.073.126,00	557.032.000,00	4,71
19	Dinas Perbanan dan Perkoran	11.928.856.945,00	11.781.421.285,00	147.435.660,00	1,25
20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	75.715.345.430,00	93.194.250.082,00	(17.479.204.652,00)	(18,76)
21	Sekretariat Daerah	77.898.514.969,00	64.540.606.146,00	13.357.909.823,00	20,70
22	Sekretariat DPRD	55.624.483.120,00	53.297.111.313,00	2.327.371.807,00	4,37
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.982.894.477,00	5.193.022.653,00	(1.531.528.176,00)	(29,49)
24	Badan Pendapatan Daerah	14.283.977.609,00	10.560.834.059,00	3.723.143.550,00	35,25
25	Kecamatan Bukit Raya	7.089.950.707,00	5.861.352.327,00	1.228.598.380,00	20,96
26	Kecamatan Tenayan Raya	7.302.899.653,00	7.302.899.653,00	-	0,00
27	Kecamatan Sail	4.788.147.629,00	4.788.147.629,00	-	0,00
28	Kecamatan Limapuluh	3.960.411.340,00	3.960.411.340,00	-	0,00
29	Kecamatan Pekanbaru Kota	6.571.827.342,00	7.031.152.342,00	(459.325.000,00)	(6,53)
30	Kecamatan Sukajadi	5.272.571.491,00	5.272.571.491,00	-	0,00
31	Kecamatan Payung Sekaki	3.512.677.140,00	3.512.677.140,00	-	0,00
32	Kecamatan Senapelan	4.519.746.783,00	4.519.746.783,00	-	0,00
33	Kecamatan Marpoyan Damai	7.608.365.879,00	7.608.365.879,00	-	0,00
34	Kecamatan Binawidya	15.234.094.157,00	5.967.051.480,00	9.267.042.677,00	155,30
35	Kecamatan Tuah Madani	1.117.866.800,00	1.117.866.800,00	-	0,00
36	Kecamatan Rumbai	6.047.471.572,00	6.047.471.572,00	-	0,00
37	Kecamatan Rumbai Timur	879.876.247,00	879.876.247,00	-	0,00
38	Kecamatan Rumbai Barat	5.895.594.386,00	5.577.309.386,00	318.285.000,00	5,71
39	Kecamatan Kulim	757.773.000,00	757.773.000,00	-	0,00
	Jumlah	**3.312.249.445.482,43**	**2.287.927.472.491,13**	**34.321.973.021,30**	**1,06**

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.61. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD

(dalam rupiah)

Nama SKPD	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2023
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Pendidikan	669.363.152.061,00	63.511.397.379,00	43.313.000,00	722.861.236.439,00
Dinas Kesehatan	230.898.534.704,00	9.025.899.433,00	300.617.221,00	247.264.905.916,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	749.899.594.995,00	19.913.100.870,43	39.326.883.286,00	729.385.722.585,43
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	69.774.317.467,00	1.235.883.000,00	-	70.990.200.467,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.249.536.400,00	286.514.622,00	-	1.256.050.422,00
Dinas Penataan Kebakaran dan Penyelamatan	9.539.481.805,00	147.300.000,00	-	10.386.781.805,00
Dinas Sosial	1.376.786.088,00	-	-	1.376.786.088,00
Dinas Tenaga Kerja	581.848.800,00	-	-	581.848.800,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	656.471.496,00	-	-	656.471.496,00
Dinas Ketahanan Pangan	3.299.294.058,00	381.010.750,00	-	3.680.244.758,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	85.570.195.982,00	982.711.000,00	-	86.552.911.982,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	422.036.000,00	-	-	422.036.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.332.978.572,00	380.665.055,00	-	4.713.643.627,00
Dinas Perhubungan	24.785.540.265,00	-	-	24.785.540.265,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	67.184.985.691,00	1.066.742.650,00	37.222.620.081,00	31.061.598.260,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	22.735.424.471,00	2.770.305.176,00	36.614.000,00	25.469.115.648,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18.005.315.158,13	170.860.225,00	0,13	18.176.698.383,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	11.816.073.128,00	567.032.000,00	-	12.372.105.128,00
Dinas Pertanian dan Perikanan	11.781.421.286,00	147.435.659,00	-	11.928.856.945,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	93.194.250.082,00	1.876.150.000,00	19.355.399.681,00	75.715.045.431,00
Sekretariat Daerah	64.540.825.146,00	13.357.909.823,00	-	77.898.514.969,00
Sekretariat DPRD	53.297.111.313,00	2.327.371.807,00	-	55.624.483.120,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.193.622.033,00	-	1.031.028.176,00	3.662.594.477,00
Badan Pendapatan Daerah	10.560.034.059,00	3.722.140.550,00	-	14.282.617.609,00
Kecamatan Bukit Raya	5.861.252.327,00	1.226.508.380,00	-	7.089.660.707,00
Kecamatan Tenayan Raya	7.302.899.993,00	-	-	7.302.899.993,00
Kecamatan Sail	4.789.147.029,00	-	-	4.789.147.029,00
Kecamatan Limapuluh	3.980.411.340,00	-	-	3.980.411.340,00
Kecamatan Pekanbaru Kota	7.031.152.342,00	-	459.325.000,00	6.571.827.342,00
Kecamatan Sukajadi	5.273.571.491,00	-	-	5.273.571.491,00
Kecamatan Payung Sekaki	3.512.677.140,00	80.400.000,00	80.400.000,00	3.512.677.140,00
Kecamatan Senapelan	4.699.166.783,00	-	-	4.519.766.783,00
Kecamatan Marpoyan Damai	7.609.365.679,00	-	-	7.824.588.679,00
Kecamatan Binawidya	5.967.651.480,00	9.262.724.627,00	15.681.350,00	15.234.694.157,00
Kecamatan Tuah Madani	1.117.956.800,00	-	-	1.117.956.800,00
Kecamatan Rumbai	6.047.471.572,00	-	-	6.047.471.572,00
Kecamatan Rumbai Timur	879.879.247,00	-	-	879.879.247,00
Kecamatan Rumbai Barat	5.577.369.386,00	318.295.000,00	-	5.895.564.386,00
Kecamatan Kulim	757.773.000,00	-	-	757.773.000,00
Jumlah	**2.287.907.473.401,13**	**123.715.382.986,43**	**98.393.376.335,13**	**2.312.249.445.483,43**

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023 adalah :

1	Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023 ==========		2.287.027.472.461,13
	Koreksi Saldo Awal		-
2	Penambah dan pengurang tahun berjalan		
A	**Mutasi Tambah**	122.715.352.399,43	
	- Harga Perolehan Aset Tetap	88.411.529.889,43	
	- Inventarisasi	9.082.441.108,00	
	- Pindah SKPD	1.990.853.175,00	
	- Reklas	23.230.528.193,00	
	Kapitalisasi		
B	**Mutasi Kurang**	98.303.376.335,13	
	- Penghapusan	37.222.620.851,00	
	- Aset eksmo	506.041.679,00	
	- Inventarisasi ekstra	58.991.950,00	
	- Pindah sopd	1.990.853.175,00	
	- Koreksi Saldo Awal	19.283.980.200,13	
	- Reklas	39.323.888.279,00	
3	**Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 ==========**		**2.312.249.445.462,43**

Harga Perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari pembelian pengadaan tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.3.62. Harga Perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	30.947.228.886,00
2	Dinas Kesehatan	8.657.580.152,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.915.100.870,43
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.205.883.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	206.514.022,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	147.300.000,00
7	Dinas Ketahanan Pangan	391.010.700,00
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	982.716.000,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	380.685.055,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	989.381.000,00
11	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	999.807.000,00
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	170.883.225,00
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	557.032.000,00
14	Dinas Pertanian dan Perikanan	147.435.660,00
15	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.876.195.000,00
16	Sekretariat Daerah	13.218.180.300,00
17	Sekretariat DPRD	2.327.371.807,00
18	Badan Pendapatan Daerah	3.116.195.050,00
19	Kecamatan Bukit Raya	800.805.280,00
20	Kecamatan Payung Sekaki	99.400.000,00
21	Kecamatan Binawidya	986.810.883,00
22	Kecamatan Rumbai Barat	318.205.000,00
JUMLAH		**88.411.529.889,43**

Sumber : Aplikasi SIMADAN dan SIPKD TA.2023

Rincian Inventarisasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.63. Rincian Aset Gedung dan Bangunan Inventarisasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	88.955.000,00
2	Dinas Kesehatan	239.788.264,00
3	Kecamatan Sukit Raya	427.793.100,00
4	Kecamatan Binaw idya	8.325.904.744,00
JUMLAH		**9.082.441.108,00**

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Rincian Pindah SKPD tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD sebesar Rp1.990.853.176,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.64. Rincian Aset Gedung dan Bangunan Pindah SKPD Tahun 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Bangunan Gedung	**1.990.853.176,00**
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.531.528.176,00
Badan Pendapatan Daerah	459.325.000,00
JUMLAH	**1.990.853.176,00**

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Rincian Reklas tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD sebesar Rp23.230.528.183,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.65. Rincian Aset Gedung dan Bangunan Reklas Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	22.475.213.493,00
2	Dinas Kesehatan	129.530.017,00
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelay anan Terpadu Satu Pintu	99.361.650,00
4	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	239.070.000,00
5	Sekretariat Daerah	139.729.523,00
6	Badan Pendapatan Daerah	147.623.500,00
JUMLAH		**23.230.528.183,00**

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Mutasi kurang dikarenakan Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp37.222.620.051,00 berdasarkan SK Walikota Pekanbaru Nomor 651 Tahun 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) Karena Kebakaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, rincian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.3.66. Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Bangunan Gedung Kantor	36.397.719.905,00
2	Bangunan Gudang	98.678.513,00
3	Bangunan Kesehatan	197.123.000,00
4	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	350.189.833,00
5	Bangunan Fasilitas Umum	178.908.800,00
JUMLAH		37.222.620.051,00

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Pengurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan Aset Ekstra sebesar Rp508.041.679,00,00 ada pada Dinas Kesehatan sebesar Rp300.617.227,00, Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp36.614.000,00, Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp71.410.452,00, dan Kecamatan Payung Sekaki sebesar Rp99.400.000,00. Pengurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dikarenakan inventarisasi ekstra sebesar Rp58.991.950,00 ada pada Dinas Pendidikan sebesar Rp43.310.000,00 dan Kecamatan Binawidya sebesar Rp15.681.950,00.

Pengurangan karena reklas aset ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp39.328.883.279,57 reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Pengurangan aset karena koreksi ada pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp19.283.989.200,00 berdasarkan No. PKS P.511.2/DPP-4.1/376/2023 yang merupakan Aset Lainnya (Kemitraan dengan Pihak Ketiga).. Pengurang aset karena koreksi saldo awal sebesar Rp0,13 ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pengurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan pindah SKPD sebesar Rp1.990.853.176,00 dapat dirinci dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.3.67. Pengurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan Karena Pindah SKPD Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.531.528.176,00
2	Kecamatan Pekanbaru Kota	459.325.000,00
JUMLAH		1.990.853.176,00

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
4.784.731.177.229,00	4.649.133.348.810,19

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.784.731.177.229,00 mengalami kenaikan sebesar Rp135.597.828.418,81 atau 2,92 % dari Tahun 2022 sebesar Rp4.649.133.348.810,19 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.3.68. Rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	Jalan	3.837.751.611.002,00	3.742.231.264.885,85	95.520.346.116,15	2,55
2	Jembatan	294.032.512.291,00	294.032.512.290,88	0,12	0,00
3	Bangunan Air Irigasi	102.086.256.480,00	101.898.905.890,33	187.350.589,67	0,18
4	Bangunan Pengaliran Peruang Surut	617.382.602,00	617.382.602,00	-	0,00
5	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	78.686.992,00	78.686.992,00	-	0,00
6	Bangunan Pengamin Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	448.775.013.728,00	444.288.841.828,42	4.486.171.899,58	1,01
7	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	16.975.744.208,00	16.915.346.432,00	60.397.776,00	0,36
8	Bangunan Air Bersih/Air Baku	17.824.298.827,00	17.498.597.827,00	325.611.000,00	1,86
9	Bangunan Air Kotor	50.643.547.950,00	16.172.899.426,00	22.470.648.524,00	176,68
10	Instalasi Air Bersih / Air Baku	17.250.383.905,00	16.491.651.273,00	758.732.632,00	4,60
11	Instalasi Air Kotor	3.298.120.898,00	3.248.739.543,91	49.381.354,09	1,52
12	Instalasi Pengolahan Sampah	662.393.792,00	498.669.146,00	162.690.646,00	32,66
13	Instalasi Pembangkit Listrik	2.092.525.487,00	2.234.296.081,00	(141.722.594,00)	-6,34
14	Instalasi Gardu Listrik	3.365.478.498,00	3.365.478.498,00	-	0,00
15	Instalasi Pengairan	457.200.308,00	800.614.546,00	(343.264.246,00)	-42,88
16	Instalasi Lain	68.606.925,00	68.606.925,00	-	100,00
17	Jaringan Air Minum	665.967.668,00	665.967.668,00	-	0,00
18	Jaringan Listrik	74.127.265.538,00	72.019.376.773,00	2.108.888.765,00	2,93
19	Jaringan Telepon	330.877.600,00	378.231.654,00	(47.354.054,00)	-12,52
20	Jaringan Gas	3.627.124.735,00	3.627.124.735,00	-	0,00
	Jumlah	**4.784.791.177.226,00**	**4.649.133.348.810,19**	**135.657.828.418,81**	**2,92**

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.3.69. Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	21.390.681.120,00	20.911.952.620,00	478.728.500,00	2,29
2	Dinas Kesehatan	5.711.989.308,00	4.925.248.235,91	786.681.032,09	15,97
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.891.237.530.433,00	2.886.567.007.933,28	4.670.522.499,72	0,16
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.662.375.518.747,00	1.534.853.143.139,00	127.522.375.608,00	8,31
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	113.403.800,00	113.403.800,00		0,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.483.832.040,00	1.232.532.040,00	251.300.000,00	20,39
7	Dinas Sosial	24.500.000,00	24.500.000,00	-	0,00
8	Dinas Ketahanan Pangan	809.415.800,00	423.065.800,00	186.350.000,00	44,05
9	Dinas Perpustakaan	25.400.000,00	25.400.000,00	-	0,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	7.559.964.888,00	7.559.964.888,00	-	0,00
11	Dispendukcapil	193.047.200,00	193.047.200,00	-	0,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	616.785.000,00	616.785.000,00	-	0,00
13	Dinas Perhubungan	86.855.589.676,00	84.481.406.911,00	2.374.182.765,00	2,81
14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	296.103.376,00	296.103.376,00	-	0,00
15	Dinas Pertanian dan Perikanan	2.165.104.704,00	2.165.104.704,00	-	0,00
16	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	492.592.302,00	492.592.302,00	-	0,00
17	Badan Pendapatan Daerah	352.951.800,00	352.951.800,00	-	0,00
18	Sekretariat Daerah	1.996.799.508,00	2.568.951.464,00	(572.151.956,00)	(28,19)
19	Sekretariat DPRD	411.307.649,00	411.307.649,00	-	0,00
20	Kecamatan Payung Sekaki	649.867.620,00	649.867.620,00	-	0,00
21	Kecamatan Binawidya	176.065.500,00	176.065.500,00	-	0,00
22	Kecamatan Tenayan Raya	44.578.328,00	44.578.328,00	-	0,00
23	Kecamatan Pekanbaru Kota	13.035.000,00	13.035.000,00	-	0,00
24	Kecamatan Sail	4.260.000,00	4.259.800,00	-	0,00
Jumlah		4.784.731.177.229,00	4.649.133.348.810,19	135.597.828.418,81	2,92

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.70. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per SKPD

(dalam rupiah)

Nama SKPD	Saldo Awal 2023	Koreksi Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir 2023
			Penambahan	Pengurangan	
Dinas Pendidikan	20.911.952.020,00	-	478.798.520,00	-	21.390.661.120,00
Dinas Kesehatan	4.925.248.275,91	-	786.661.032,09	-	5.711.909.308,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.899.567.907.913,28	-	4.670.922.500,53	0,81	2.891.237.530.433,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.534.853.143.128,00	-	127.522.375.606,00	-	1.662.375.518.747,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	113.403.800,00	-	-	-	113.403.800,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.232.532.240,00	-	251.300.000,00	-	1.483.832.040,00
Dinas Sosial	24.500.000,00	-	-	-	24.500.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	425.965.800,00	-	186.350.000,00		639.415.800,00
Dinas Perpustakaan	26.400.000,00	-	-	-	26.400.000,00
Dinas Lingkungan Hidup dan	7.559.964.888,00	-	-		7.559.964.888,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	193.347.200,00	-	-	-	193.047.200,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	816.786.000,00	-	-	-	816.786.000,00
Dinas Perhubungan	84.481.406.911,00	-	2.374.102.765,00	-	86.855.509.676,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	236.103.376,00	-	-	-	236.103.376,00
Dinas Pertanian dan Perikanan	2.165.104.704,00	-	-	-	2.165.104.704,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	482.992.302,00	-	-	-	482.992.302,00
Sekretariat Daerah	2.868.991.444,00	-	125.382.988,00	797.574.894,00	1.996.799.538,00
Sekretariat DPRD	411.307.649,00	-	-	-	411.307.649,00
Badan Pendapatan Daerah	352.951.800,00	-	-	-	352.951.800,00
Kecamatan Tenayan Raya	44.578.328,00	-	-	-	44.578.328,00
Kecamatan Sail	4.293.000,00	-	-	-	4.293.000,00
Kecamatan Pekanbaru Kota	13.035.000,00	-	-	-	13.035.000,00
Kecamatan Payung Sekaki	949.867.620,00	-	-	-	949.867.620,00
Kecamatan Bukit Raya	176.065.500,00	-	-	-	176.065.500,00
JUMLAH	**4.640.133.348.816,19**	-	**136.395.483.310,62**	**797.574.894,81**	**4.784.131.177.229,00**

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA 2023

Pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp797.574.894,81 merupakan mutasi kurang karena penghapusan dengan SK Walikota Nomor 651 Tahun 2023 pada Sekretariat Daerah.

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

1	Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 ⟹			4.649.132.348.810,19
	Koreksi Saldo Awal			-
2	Penambah dan pengurang tahun berjalan			
A	**Mutasi Tambah**		126.386.400.313,02	
	- Harga Perolehan Aset Tetap	112.791.920.512,00		
	- Inventarisasi	19.233.819.073,00		
	- Pecah SKPD			
	- Reklas	4.360.660.728,30		
	- Koreksi Saldo Awal	0,02		
B	**Mutasi Kurang**		787.574.894,51	
	- Penghapusan	787.574.894,20		
	- Aset ekstra			
	- Inventarisasi ekstra			
	- Pecah skpd			
	- Koreksi Saldo Awal	0,01		
	- Reklas			
3	**Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023** ⟹			4.784.731.177.228,68

Harga Perolehan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari pembelian pengadaan tahun 2023 sebesar Rp112.791.920.512,00 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.3.71. Harga Perolehan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	418.195.000,00
2	Dinas Kesehatan	786.661.032,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4,670.522.500,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	106.354.620.680,00
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	251.300.000,00
6	Dinas Ketahanan Pangan	186.350.000,00
7	Sekretariat Daerah	124.071.300,00
	JUMLAH	**112.791.920.512,00**

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp66.642.887,00 terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp56.690.887,00 dan Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp9.952.000,00.

Penambahan Aset Tetap Jalan,Irigasi dan Jaringan dikarenakan Inventarisasi sebesar Rp19.233.819.073,00 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.3.72. Aset Tetap Inventarisasi per SKPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah Aset Inventarisasi
1	Dinas Pendidikan	24.627.500,00
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16.835.088.808,00
3	Dinas Perhubungan	2.374.102.765,00
JUMLAH		**19.233.819.073,00**

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA 2023

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp4.369.663.728,00 karena reklas dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 5.3.73. Aset Tetap Reklas per SKPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah Aset Reklas
1	Dinas Pendidikan	35.886.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.332.466.120,00
3	Sekretariat Daerah	1.311.608,00
JUMLAH		**4.369.663.728,00**

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA 2023

Pada aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan terdapat penambahan karena koreksi saldo awal sebesar Rp0,62 dengan rincian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp0,53 dan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp0,09.

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp797.574.894,00 karena penghapusan pada Sekretariat Daerah berdasarkan SK Walikota Nomor 651 Tahun 2023. Dan terdapat pengurangan aset karena adanya koreksi saldo awal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp0,81.

Tabel 5.3.74. Mutasi Kurang Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Per SKPD Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah	
		Penghapusan	Koreksi Saldo Awal
1	Sekretariat Daerah	797.574.894	-
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	0,81
	JUMLAH	**797.574.894**	**0,81**

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA 2023

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
57.110.242.984,00	56.630.835.923,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp57.110.242.984,00 mengalami kenaikan sebesar Rp479.407.061,00 atau 0,85% dari Tahun 2022 sebesar Rp56.630.835.923,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.3.75. Rincian Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap Lainnya	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan	%
1	Buku Umum	13.977.184.705,00	13.776.782.779,00	201.481.926,00	1,87
2	Buku Agama	226.804.200,00	226.014.200,00	790.000,00	0,35
3	Buku Ilmu Sosial	237.929.536,00	122.652.435,00	115.177.100,00	93,91
4	Buku Ilmu Bahasa	33.586.000,00	23.380.000,00	10.206.000,00	43,65
5	Alam	37.439.500,00	37.439.500,00	-	0,00
6	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	55.995.993,00	55.995.993,00	-	0,00
7	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	269.658.736,00	417.174.763,00	(147.516.028,00)	(35,36)
8	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	196.082.000,00	196.082.000,00	-	0,00
9	Serial	4.597.500,00	4.500.000,00	97.500,00	2,17
10	Buku Laporan	21.015.000,00	21.015.000,00	-	0,00
11	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya			-	0,00
12	Audio Visual	5.900.000,00	5.900.000,00	-	0,00
13	Bahan Kartografi	20.392.455,00	196.694.427,00	(176.301.972,00)	(89,63)
	Lukisan Dan Ukiran	701.452.032,00	701.452.032,00	-	0,00
14	Karya Musik	319.066.648,00	319.066.648,00	-	0,00
15	Karya Grafika (Graphic Material)	87.754.738,00	87.754.738,00	-	0,00
16	Karya Grafika (Graphic Material) Lainnya	5.180.966,00	5.180.966,00	-	0,00
17	Three Dimensional Artifacts and Realita	-	9.541.000,00	(9.541.000,00)	(100,00)
18	Alat Musik	1.792.462.505,00	1.677.219.005,00	115.243.500,00	6,87
19	Lukisan	442.336.681,00	442.336.681,00	-	0,00
20	Alat Peraga Kesenian			-	0,00
21	Barang Bercorak Kesenian Lainnya	56.695.100,00	56.695.100,00	-	0,00
22	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	132.023.000,00	103.496.000,00	28.527.000,00	27,56
23	Barang Kerajinan	42.535.000,00	42.535.000,00	-	0,00
24	Hewan Pelihan Lainnya	30.745.000,00	30.745.000,00	-	0,00
25	Ikan Budidaya	66.173.000,00	66.173.000,00	-	0,00
26	Tanaman	8.930.481.261,00	8.403.420.195,00	472.945.534,00	5,03
27	Aset Tetap Renovasi	32.438.851.630,00	31.614.962.461,00	824.188.969,00	2,61
	Jumlah	57.110.242.984,00	56.630.835.923,00	479.407.061,00	0,85

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA 2023

Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.76. Aset Tetap Lainnya per SKPD

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	17.206.447.561,00	16.771.539.861,00	434.907.700,00	2,59
2	Dinas Kesehatan	484.522.586,00	484.522.586,00	-	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.038.331.847,00	1.038.331.847,00	-	0,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	249.243.000,00	220.715.000,00	28.527.000,00	12,92
5	Satuan Polisi Pamong Praja	160.725.727,00	160.725.727,00	-	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	657.063.211,00	657.063.211,00	-	0,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	122.606.806,00	122.606.806,00	-	0,00
8	Dinas Tenaga Kerja	1.560.686.996,00	1.560.686.996,00	-	0,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	207.606.806,00	207.606.806,00	-	0,00
10	Dinas Pertanahan	406.825.048,00	406.825.048,00	-	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	9.010.785.463,00	9.010.785.463,00	-	0,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	459.956,00	459.956,00	-	0,00
13	Dinas Perhubungan	788.011.816,00	788.011.816,00	-	0,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	793.676.306,00	793.676.806,00	-	0,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	2.726.826,00	2.726.826,00	-	0,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	487.630.808,00	(487.630.808,00)	(100,00)
17	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.062.276.211,00	1.967.087.271,00	95.182.300,00	4,84
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	304.066.856,00	304.066.856,00	-	0,00
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	37.000.806,00	37.000.006,00	-	0,00
20	Dinas Perairan dan Perikanan	375.000,00	375.000,00	-	0,00
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	441.862.584,00	441.862.584,00	-	0,00
22	Sekretariat Daerah	8.104.330.791,00	7.716.338.822,00	387.991.969,00	5,16
23	Sekretariat DPRD	451.502.384,00	451.502.384,00	-	0,00
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	383.116.806,00	383.116.806,00	-	0,00
25	Badan Pendapatan Daerah	194.480.080	194.480.080	-	0,00
26	Badan Penelitian dan Pengembangan	164.856.306,00	164.856.306,00	-	0,00
27	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	18.913.641,00	18.913.641,00	-	0,00
28	Kecamatan Sukit Raya	1.135.694.866,00	1.135.694.866,00	-	0,00
29	Kecamatan Tenayan Raya	1.146.752.944,00	1.146.752.944,00	-	0,00
30	Kecamatan Rumbai	455.756.836,00	455.756.836,00	-	0,00
31	Kecamatan Lima Puluh	803.479.006,00	803.479.006,00	-	0,00
32	Kecamatan Pekanbaru Kota	838.177.343,00	838.177.343,00	-	0,00
33	Kecamatan Sukajadi	833.299.806,00	833.299.806,00	-	0,00
34	Kecamatan Payung Sekaki	3.699.006,00	3.699.006,00	-	0,00
35	Kecamatan Senapelan	921.946.576,00	921.946.576,00	-	0,00
36	Kecamatan Marpoyan Damai	1.394.794.486,00	1.394.794.486,00	-	0,00
37	Kecamatan Bukit Raya	913.676.006,00	913.676.006,00	-	0,00
38	Kecamatan Tuah Madani	1.009.256.806,00	1.009.256.806,00	-	0,00
39	Kecamatan Rumbai	1.074.597.276,00	1.074.597.276,00	-	0,00
40	Kecamatan Rumbai Timur	599.273.557,00	599.273.557,00	-	0,00
41	Kecamatan Rumbai Barat	1.521.875.641,00	1.521.875.641,00	-	0,00
42	Kecamatan Kulim	625.866.525,00	625.866.525,00	-	0,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	9.541.000,00	(9.541.000,00)	(100,00)
Jumlah		57.113.242.884,00	56.633.805.922,00	479.467.661,00	0,85

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya per SKPD dapat dirinci pada tabel berikut :

Tabel 5.3.77. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya per SKPD

(dalam rupiah)

Nama SKPD	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2023
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Pendidikan	16.771.539.081,00	13.346.669.750,00	13.511.762.550,00	17.206.447.581,00
Dinas Kesehatan	484.521.988,00	-	-	484.521.988,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.238.331.847,00	-	-	1.238.331.847,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	225.716.000,00	26.527.000,00	-	249.243.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	160.725.727,00	-	-	160.725.727,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	557.893.211,00	-	-	557.893.211,00
Dinas Pemuda Kebudayaan dan Pariwisata	102.600.000,00	-	-	102.600.000,00
Dinas Tenaga Kerja	1.760.880.896,00	-	-	1.760.880.896,00
Dinas Ketahanan Pangan	207.600.000,00	-	-	207.600.000,00
Dinas Pertanahan	400.825.048,00	-	-	400.825.048,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	9.010.768.462,00	-	-	9.010.768.462,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	459.360,00	-	-	459.360,00
Dinas Perhubungan	768.011.816,00	-	-	768.011.816,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	760.670.006,00	-	-	760.670.006,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.726.026,00	-	-	2.726.026,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	467.830.606,00	-	467.830.606,00	-
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.887.897.211,00	134.095.000,00	29.414.000,00	2.082.378.211,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	304.066.858,00	43.007.800,00	43.067.800,00	304.006.858,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	37.000.000,00	-	-	37.000.000,00
Dinas Pertanian dan Perikanan	370.000,00	-	-	370.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	441.862.584,00	-	-	441.862.584,00
Sekretariat Daerah	7.716.558.822,00	729.005.969,00	331.843.000,00	8.114.300.791,00
Sekretariat DPRD	451.582.384,00	-	-	451.582.384,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	360.116.008,00	-	-	360.116.008,00
Badan Pendapatan Daerah	194.460.008,00	-	-	194.460.008,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	194.856.308,00	-	-	194.856.308,00
Inspektorat Daerah	18.913.681,00	-	-	18.913.681,00
Kecamatan Bukit Raya	1.135.894.888,00	-	-	1.135.894.888,00
Kecamatan Tenayan Raya	1.148.763.944,00	-	-	1.148.763.944,00
Kecamatan Sail	495.756.838,00	-	-	495.756.838,00
Kecamatan Limapuluh	863.479.008,00	-	-	863.479.008,00
Kecamatan Pekanbaru Kota	538.177.343,00	-	-	538.177.343,00
Kecamatan Sukajadi	833.285.936,00	-	-	833.285.936,00
Kecamatan Payung Sekaki	3.869.008,00	-	-	3.869.008,00
Kecamatan Senapelan	691.946.576,00	-	-	691.946.576,00
Kecamatan Marpoyan Damai	1.394.794.499,00	-	-	1.394.794.499,00
Kecamatan Binawidya	513.676.008,00	-	-	513.676.008,00
Kecamatan Tuah Madani	1.029.258.456,00	-	-	1.029.258.456,00
Kecamatan Rumbai	1.074.500.279,00	-	-	1.074.500.279,00
Kecamatan Rumbai Timur	589.273.927,00	-	-	589.273.927,00
Kecamatan Rumbai Barat	1.031.675.843,00	-	-	1.031.675.843,00
Kecamatan Kulim	625.866.525,00	-	-	625.866.525,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.541.000,00	-	9.541.000,00	-
Jumlah	56.696.835.952,00	14.672.527.519,00	14.393.328.356,00	57.116.243.864,00

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA 2023

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

1	Saldo Awal Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 ==========		56.630.836.923,00
	Koreksi Saldo Awal		
2	Penambah dan pengurang tahun berjalan		
A	**Mutasi Tambah :**		14.872.627.319,00
	- Harga Perolehan Aset Tetap	918.312.100,00	
	- Inventarisasi	13.946.689.750,00	
	- Pindah SKPD		
	- Reklas	7.625.469,00	
B	**Mutasi Kurang**		14.393.229.258,00
	- Penghapusan	806.215.008,00	
	- Aset mutra	73.221.000,00	
	- Pindah skpd		
	- Inventarisasi Mutra	13.511.792.050,00	
	- Reklas	-	
3	**Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 ======**		57.110.242.984,00

Harga Perolehan Aset Tetap Lainnya dari pembelian pengadaan Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.3.78. Harga Perolehan Aset Tetap Lainnya per SKPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	26.527.000,00
2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	124.596.000,00
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	43.807.600,00
4	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	721.381.500,00
	Jumlah	**918.312.100,00**

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Penambahan Aset Tetap Lainnya dikarenakan Inventarisasi sebesar Rp13.946.689.750,00 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.3.79. Aset Tetap Inventarisasi per SKPD Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah Aset Tetap Lainnya
1	Dinas Pendidikan	13.946.689.750,00
	Jumlah	**13.946.689.750,00**

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp7.625.469,00 karena reklas berada pada Sekretariat Daerah.

Pengurungan Aset Tetap Lainnya karena penghapusan berdasarkan SK Walikota Nomor 651 Tahun 2023 tentang Penghapusan BMD Karena Kebakaran (DPMPTSP, Sekretariat Daerah, dan Diskominfo) Pada Sekretariat Daerah sebesar Rp331.045.000,00 dan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp467.630.608,00.

Pengurangan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp13.511.782.050,00 merupakan inventarisasi ekstra pada Dinas Pendidikan. Pengurangan Aset Tetap Lainnya dikarenakan Aset Tetap ekstra komptabel sebesar Rp73.221.600,00 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.3.80. Aset Tetap Ektrakomtable Aset Tetap Lainnya per SKPD Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah Aset Ekstrakomptable
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	43.807.600,00
2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	29.414.000,00
Jumlah		73.221.600,00

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
330.024.874.062,00	328.958.019.153,52

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp330.024.874.062,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.066.854.908,48 atau 0,32% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp328.958.019.153,52 dapat dirinci per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.81. Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan Per SKPD

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dinas Kesehatan	510.962.972,00	640.082.989,00	(129.120.017,00)	(20,24)
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	260.125.476.253,00	260.125.476.252,52	0,48	0,00
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.828.225.000,00	3.666.412.000,00	261.813.000,00	7,14
4	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11.949.300,00	11.949.300,00	-	0,00
5	Dinas Ketahanan Pangan	244.804.000,00	244.804.000,00	-	0,00
6	Dinas Pertanahan	14.554.433.664,00	13.794.622.139,00	759.811.525,00	5,50
7	Dinas Perhubungan	1.173.880.500,00	1.173.880.500,00	-	0,00
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.926.795.658,00	1.926.795.658,00	-	0,00
9	Dinas Perpustakaan dan Arsip	-	-	-	0,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian	84.216.000,00	84.216.000,00	-	0,00
11	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	12.053.929.463,00	11.781.374.463,00	272.546.000,00	2,31
12	Dinas Pertanian dan Perikanan	94.216.920,00	94.216.920,00	-	0,00
13	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.954.111.621,00	1.954.111.621,00	-	0,00
14	Badan Pendapatan Daerah	139.956.900,00	246.742.500,00	(107.785.600,00)	(43,68)
15	Sekretariat DPRD	124.679.921,00	124.679.921,00	-	0,00
16	Kecamatan Rumbai Barat	98.035.000,00	98.035.000,00	-	0,00
Jumlah		330.024.874.062,00	328.958.019.153,52	1.066.854.908,48	0,32

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.82. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Konstrukai Dalam Pekerjaan per SKPD

(dalam rupiah)

Nama SKPD	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2023
		Penambahan	Pengurangan	
Dinas Pendidikan	-	22.511.099.463,00	22.511.099.463,00	-
Dinas Kesehatan	940.082.989,00	-	129.630.017,00	810.952.972,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	250.125.476.252,52	0,48	-	250.125.476.253,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.699.413.800,00	4.594.275.120,00	4.332.466.120,00	3.928.220.800,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11.940.300,00			11.940.300,00
Dinas Kebudayaan Pangan	244.804.000,00			244.804.000,00
Dinas Pertanahan	13.784.622.139,00	769.811.525,00		14.554.433.664,00
Dinas Perhubungan	1.173.690.500,00			1.173.690.500,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.926.756.858,00			1.926.756.858,00
Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian	84.210.000,00			84.210.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	99.361.650,00	99.361.650,00	-
Dinas Kependudukan dan Olahraga	11.791.374.453,00	611.078.000,00	339.532.000,00	12.063.920.453,00
Dinas Pertanian dan Perikanan	94.216.820,00			94.216.820,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.064.111.621,00			1.064.111.621,00
Badan Pendapatan Daerah	248.742.500,00	39.837.900,00	147.623.500,00	130.956.900,00
Sekretariat DPRD	124.679.921,00	148.886.600,00	148.886.600,00	124.679.921,00
Kecamatan Rumbai	98.835.000,00		-	98.835.000,00
JUMLAH	**330.963.819.153,52**	**29.774.134.306,48**	**27.767.279.300,00**	**330.014.874.062,00**

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Terhadap Rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Tahun 2023 sebesar Rp330.024.874.062,00 yang menyajikan informasi secara lengkap per jenis KDP per SKPD disertai dengan dokumen pendukung dapat dilihat pada Lampiran 16.

Penambahan dan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

1	Saldo Awal Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 ———			330.958.319.151,53
	Koreksi Saldo Awal			
2	Penambah dan pengurang lihan berjalan			
A	Mutasi Tambah		28.774.134.288,40	
	- Harga Perolehan Aset Tetap	28.774.134.288,00		
	- Aset yg belum tercatat			
	- Pindah SKPD			
	- Koreksi Saldo Awal	0,40		
B	Mutasi Kurang		27.707.279.380,00	
	- Penghapusan			
	- Asset rusak	-		
	- Pindah objek			
	- Hilan	-		
	- Reklas	27.707.279.380,00		
3	Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 ———			330.024.974.059,93

Harga Perolehan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari pembelian pengadaan tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.3.83. Harga Perolehan Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	22.511.099.493,00
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.594.279.120,00
3	Dinas Perhubungan	769.811.525,00
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	99.361.650,00
5	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	811.078.000,00
6	Sekretariat Daerah	148.666.600,00
7	Badan Pendapatan Daerah	39.837.900,00
	Jumlah	**28.774.134.288,00**

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

Mutasi kurang dikarenakan reklas Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp27.707.279.380,00 rincian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.3.84. Reklas Kurang Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	22.511.099.493,00
2	Dinas Kesehatan	129.530.017,00
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.332.466.120,00
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	99.361.650,00
5	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	336.532.000,00
6	Sekretariat Daerah	148.666.600,00
7	Badan Pendapatan Daerah	147.623.500,00
	Jumlah	**27.707.279.380,00**

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
(5.033.066.996.667,00)	(4.695.148.377.663,00)

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.033.066.996.667,00 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp337.918.619.004,00 atau 7,20% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp4.695.148.377.663,00.

Nilai Akumulasi Penyusutan merupakan akumulasi penyusutan untuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan. Berikut rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023:

Tabel 5.3.85. Rincian Akumulasi Penyusutan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(964.355.603.833,00)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(399.167.835.792,00)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(3.669.543.557.042,00)
Jumlah		**(5.033.066.996.667,00)**

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA 2023

Nilai Buku Aset Tetap merupakan selisih antara Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.86. Nilai Buku Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Uraian	Aset Tetap per 31 Des 2023	Akumulasi Penyusutan per 31 Des 2023	Nilai Buku Aset Tetap per 31 Des 2023
1	Tanah	3.298.856.461.823,00	-	3.298.856.461.823,00
2	Peralatan dan Mesin	1.257.087.493.653,43	(964.355.503.633,00)	292.731.889.820,43
3	Gedung dan Bangunan	2.312.249.445.483,00	(399.167.835.792,00)	1.913.081.609.691,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.784.731.177.229,00	(3.669.543.557.042,00)	1.115.187.620.187,00
5	Aset Tetap Lainnya	57.110.242.984,00	-	57.110.242.984,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	330.024.874.062,00	-	330.024.874.062,00
Jumlah		**12.040.059.695.234,43**	**(5.033.066.996.667,00)**	**7.006.992.698.567,43**

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA 2023

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.030.389.643.417,00 dapat dirinci per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.87. Akumulasi Penyusutan Per SKPD

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	(353.948.732.635,00)	(326.205.114.739,00)	(27.743.551.896,00)	8,50
2	Dinas Kesehatan	(180.554.863.282,00)	(151.998.821.356,00)	(28.556.041.926,00)	18,79
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(2.887.675.844.285,00)	(2.479.998.101.916,00)	(127.870.742.369,00)	5,16
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(1.147.765.278.008,00)	(1.037.809.780.713,00)	(109.955.497.295,00)	10,59
5	Satuan Polisi Pamong Praja	(7.403.489.289,00)	(6.886.196.547,00)	(517.292.742,00)	7,51
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(6.857.807.763,00)	(5.951.387.793,00)	(806.519.970,00)	13,75
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	(31.318.535.751,00)	(28.832.877.212,00)	(2.486.648.539,00)	8,62
8	Dinas Sosial	(5.284.782.106,00)	(5.211.005.465,00)	(73.776.641,00)	1,42
9	Dinas Tenaga Kerja	(4.784.493.091,00)	(4.684.877.668,00)	(99.615.423,00)	2,13
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(4.034.518.377,00)	(3.049.314.637,00)	(985.303.740,00)	32,31
11	Dinas Ketahanan Pangan	(4.812.575.815,00)	(4.169.105.966,00)	(643.569.849,00)	15,23
12	Dinas Perhubungan	(4.610.892.513,00)	(3.941.816.689,00)	(669.075.824,00)	16,97
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	(71.368.545.967,00)	(63.590.643.843,00)	(7.475.902.124,00)	11,75
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(8.200.579.010,00)	(7.941.130.929,00)	(559.448.081,00)	7,32
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(6.939.366.968,00)	(5.779.559.360,00)	(1.159.806.309,00)	20,07
16	Dinas Perhubungan	(137.702.101.538,00)	(134.448.047.521,00)	(3.254.054.017,00)	2,42
17	Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian	(17.426.159.275,00)	(16.911.556.197,00)	(514.603.078,00)	3,04
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(3.727.343.449,00)	(3.114.423.004,00)	(612.921.445,00)	19,68
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu	(16.583.257.155,00)	(34.955.257.722,00)	18.372.000.568,00	(52,56)
20	Dinas Kependudukan dan Olahraga	(8.955.098.925,00)	(7.327.706.852,00)	(1.627.392.093,00)	22,21
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(12.991.630.283,00)	(11.972.251.999,00)	(1.019.398.284,00)	8,51
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	(6.788.566.226,00)	(5.733.491.328,00)	(1.055.103.898,00)	18,40
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	(9.522.591.395,00)	(9.052.867.647,00)	(469.723.748,00)	5,19
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	(27.170.648.272,00)	(24.828.026.865,00)	(2.342.621.407,00)	9,44
25	Sekretariat Daerah	(166.480.657.879,00)	(145.644.670.985,00)	(20.836.037.394,00)	14,31
26	Sekretariat DPRD	(50.738.710.905,00)	(49.750.981.814,00)	(987.729.091,00)	1,99
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(4.827.081.503,00)	(4.464.424.158,00)	(362.657.345,00)	7,48
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(17.999.229.398,00)	(15.583.135.031,00)	(2.416.094.368,00)	15,53
29	Badan Pendapatan Daerah	(23.795.287.993,00)	(21.927.264.577,00)	(1.868.023.416,00)	8,52
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	(2.382.055.511,00)	(4.639.629.415,00)	(752.426.302,00)	16,22
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	(3.322.199.360,00)	(2.240.996.135,00)	(1.081.282.225,00)	48,25
32	Inspektorat	(3.724.031.197,00)	(2.823.595.444,00)	(900.535.753,00)	31,89
33	Kecamatan Bukitraya	(5.295.473.992,00)	(4.822.382.125,00)	(473.091.777,00)	9,81
34	Kecamatan Tenayan Raya	(6.177.824.388,00)	(6.081.333.822,00)	(96.490.566,00)	1,59
35	Kecamatan Sail	(3.767.296.480,00)	(3.548.644.795,00)	(218.153.685,00)	6,18
36	Kecamatan Limo Puluh	(3.819.890.521,00)	(2.855.888.375,00)	(163.002.146,00)	5,71
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	(3.931.827.517,00)	(3.858.439.980,00)	(73.197.537,00)	1,90
38	Kecamatan Sukajadi	(4.398.147.306,00)	(4.173.041.286,00)	(225.105.940,00)	5,40

No	Nama SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
39	Kecamatan Payung Sekaki	(5.285.092.577,00)	(4.912.868.674,00)	(362.423.903,00)	7,17
40	Kecamatan Senapelan	(3.324.550.614,00)	(3.321.378.372,00)	(3.215.241,00)	0,10
41	Kecamatan Marpoyan Damai	(5.370.472.232,00)	(5.108.655.517,00)	(261.816.715,00)	5,12
42	Kecamatan Binawidya	(9.631.287.486,00)	(6.742.301.983,00)	(3.088.985.493,00)	45,81
43	Kecamatan Tuah Madani	(2.425.736.748,00)	(2.097.621.190,00)	(328.115.558,00)	15,64
44	Kecamatan Rumbai	(4.573.482.564,00)	(4.255.692.489,00)	(317.790.075,00)	7,47
45	Kecamatan Rumbai Timur	(2.075.137.697,00)	(1.740.612.568,00)	(334.525.129,00)	19,22
46	Kecamatan Rumbai Barat	(5.677.763.633,00)	(5.504.974.517,00)	(172.789.116,00)	3,14
47	Kecamatan Kulim	(2.231.491.808,00)	(1.831.101.155,00)	(400.390.653,00)	21,87
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(3.306.294.172,00)	(3.201.150.235,00)	(105.143.937,00)	3,28
Jumlah		(5.033.998.996.667,00)	(4.695.148.377.963,00)	(337.911.819.804,00)	7,20

Sumber : Aplikasi SIMADANI dan SIPKD TA.2023

PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH MILIK PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

Guna memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Sehubungan hal dimaksud, Pemerintah Kota Pekanbaru melaksanakan inventarisasi aset barang milik daerah milik Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2023.

Pada tahap awal Pemerintah Kota Pekanbaru membentuk Tim Pelaksana Inventarisasi/Sensus BMD tahun 2023 dengan ditetapkannya SK Walikota Nomor 434 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Inventarisasi/Sensus BMD Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2023. Selanjutnya Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan Objek Inventarisasi/Sensus BMD yang terdiri dari aset tanah, peralatan dan mesin, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, persediaan.

Walikota Pekanbaru memberi instruksi tentang pelaksanaan Inventarisasi/sensus BMD kepada Perangkat Daerah selaku pengguna barang, isi instruksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Inventarisasi/Sensus BMD berdasarkan ketentuan PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/BMD
2. Berkoordinasi dengan BPKAD dan Inspektorat dalam pelaksanaan
3. Membentuk tim Inventarisasi tingkat SKPD
4. Mengkoordinir dan memimpin pelaksanaan Inventarisasi hingga unit terkecil seperti Bagian, Kelurahan, Sekolah, UPT, BLUD dan Puskesmas

Untuk memperkuat pemahaman bagi para Pengelola BMD, Pemerintah Kota Pekanbaru melaksanakan Launching dan sosialiasi terkait Inventarisasi / Sensus BMD. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam upaya peningkatan sinergitas dengan aparat penegak hukum terkait pengamanan Barang Milik Daerah, Pemerintah Kota Pekanbaru melibatkan Kepala Kejaksaan Negeri bersama Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru sebagai narasumber dengan agenda Sosialisasi dan Pemahaman terkait hak dan kewajiban atas Pemanfaatan BMD sebagai fasilitas kantor serta Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan permasalahan hukum perdata terkait pengelolaan BMD.

Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan surat tentang Tindak Lanjut Hasil Launching dan Sosialisasi Pelaksanaan Inventarisasi BMD bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dan pengelola BMD, agar Kepala Perangkat Daerah menginventarisir dan melaporkan permasalahan aset yang ada serta melaporkan kepada Walikota melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.

Pemerintah Kota Pekanbaru melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) terkait pelaksanaan Inventarisasi/Sensus BMD dengan mengundang seluruh Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru pada tanggal 20-21 September 2023.

Untuk memudahkan koordinasi dengan Perangkat Daerah maka pelaksanaan inventarisasi/sensus BMD dibagi menjadi tiga pokja (Kelompok Kerja) terdiri dari Pokja A, Pokja B dan Pokja C. Menindaklanjuti Hasil Inventarisasi/Sensus BMD per tanggal 31 Desember 2023 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan surat tentang Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2023 kepada seluruh Perangkat Daerah dengan kondisi sebagai berikut:

1. Sebanyak 24 Perangkat Daerah yang telah selesai melaksanakan inventarisasi/sensus dapat mencetak LKI sebagai bagian dari proses pelaporan.
    a. **Pokja A: 8 Perangkat Daerah**
    Kecamatan Pekanbaru Kota; Kecamatan Senapelan; Kecamatan Rumbai Barat; Kecamatan Tuah Madani; Kecamatan Tenayan Raya; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Koperasi & UMKM; Dinas Pertanian dan Perikanan
    b. **Pokja B: 10 Perangkat Daerah**
    Kecamatan Sail; Kecamatan Limapuluh; Kecamatan Marpoyan Damai; Inspektorat; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas Tenaga

Kerja; Dinas Kepemudaan dan Olahraga; Dinas Pertanahan; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

c. **Pokja C: 6 Perangkat Daerah**

Kecamatan Bukit Raya; Kecamatan Binawidya; Kecamatan Payung Sekaki; Kecamatan Kulim; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2. Sebanyak 24 Perangkat Daerah yang belum selesai, agar menggesa penyelesaian inventarisasi/sensus sesuai dengan komitmen dan jadwal yang telah ditetapkan.

a. **Pokja A: 8 Perangkat Daerah**

Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pendapatan Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pendidikan

b. **Pokja B: 6 Perangkat Daerah**

Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

c. **Pokja C: 10 Perangkat Daerah**

Kecamatan Rumbai Timur, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dalam pelaksanaan Inventarisasi/sensus BMD tahun 2023, Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Surat pengecualian Inventarisasi/Sensus BMD bagi Perangkat Daerah tertentu untuk dilanjutkan pada tahun 2024 dikarenakan banyaknya jumlah BMD dan keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia pada Perangkat Daerah tersebut.

Hingga tanggal 15 Mei 2024 progres inventarisasi/sensus BMD terus meningkat, Hasil tindak lanjut Inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 18.

Dari total 16 Perangkat Daerah pada Pokja A terdapat 13 Perangkat Daerah yang memiliki progres inventarisasi/sensus BMD diatas 50% dan 3 Perangkat Daerah dibawah 50% dengan total aset sebanyak 678.622. Progres inventarisasi/sensus BMD yang berjalan pada Pokja A sebesar 2.87%. Jumlah persentase progres inventarisasi/sensus BMD masih tergolong kecil dikarenakan jumlah aset yang terdapat pada Pokja A sangat banyak.

Pada Pokja B, dari total 16 Perangkat terdapat 15 Perangkat Daerah yang memiliki progres inventarisasi/sensus BMD diatas 50% dan 1 Perangkat Daerah dibawah 50% dengan total aset sebanyak 69.487. Progres inventarisasi/sensus BMD yang berjalan pada Pokja B sebesar 76.62%.

Pada Pokja C, dari total 16 Perangkat Daerah terdapat 15 Perangkat Daerah yang memiliki progres inventarisasi/sensus BMD diatas 50% dan 1 Perangkat Daerah dibawah 50% dengan total aset sebanyak 36.720. Progres inventarisasi/sensus BMD yang berjalan pada Pokja C sebesar 81.54%.

Terkait progres sensus hingga saat ini, pada umumnya SKPD telah selesai pada tahapan pelaksanaan, namun masih terkendala dalam tahapan validasi oleh tim dan juga pada tahapan pelaporan. Rendahnya pemahaman, kompetensi serta kuantitas SDM menjadi kendala bagi SKPD untuk memperbaiki hasil pelaksanaan yang dianggap belum valid oleh tim. Sebagian SKPD juga mengalami kendala dalam hal pelaporan yakni Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) yang akan menjadi bukti resmi selesainya pelaksanaan sensus BMD, tidak kunjung disampaikan kepada Tim Validasi. Hal ini berakibat, progress pelaksanaan sensus BMD Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi stagnan.

Terkait instruksi Walikota Pekanbaru nomor 08 tahun 2024 tentang lanjutan pelaksanaan inventarisasi/sensus barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, bahwasanya terdapat pengecualian Inventarisasi/Sensus BMD bagi Delapan Perangkat Daerah untuk dilanjutkan pada tahun 2024 dikarenakan banyaknya jumlah BMD dan keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia pada Perangkat Daerah tersebut, antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Dinas Pendidikan adalah salah satu Perangkat Daerah yang termasuk dalam pengecualian dan melanjutkan proses inventarisasi/sensus BMD pada tahun 2024. Dalam upaya meningkatkan pemahaman Pengelola Barang Milik Daerah Dinas Pendidikan mengadakan Sosialisasi Aset Satuan Pendidikan Kota Pekanbaru. Dengan melibatkan Tim

Inventarisasi/sensus BMD. Sosialisasi diadakan selama 4 (empat) hari dengan menghadirkan seluruh pengelola BMD tingkat Sekolah Dasar di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru pada tanggal 5 s.d. 8 Maret 2024. Adapun rekapitulasi mengenai Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Milik Pemerintah Kota Pekanbaru dapat dilihat pada Lampiran 18.

5.3.1.4. Aset Lainnya

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
551.380.816.597,75	501.549.129.445,46

Aset Lainnya untuk mencatat aset milik Pemerintah Kota Pekanbaru yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan,dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.88. Rincian Aset Lainnya

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Tagihan Jangka Panjang	581.102.113,75	2.088.904.282,46	(1.507.802.168,71)	(72,18)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	176.902.661.732,00	154.659.645.032,00	22.243.016.700,00	14,38
Aset Tak Berwujud	25.875.701.713,00	24.205.867.963,00	1.669.833.750,00	6,90
Aset Lain-lain	312.919.209.791,00	314.627.622.115,00	(1.711.413.324,00)	(0,54)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(21.907.801.752,00)	(19.498.771.783,00)	(2.409.029.969,00)	12,35
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	-	-
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	57.012.943.000,00	25.465.860.836,00	31.547.082.164,00	123,88
Jumlah	**551.380.816.597,75**	**501.549.129.445,46**	**49.831.687.152,29**	**9,94**

Sumber : Neraca Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.3.88. diatas menunjukkan Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp551.380.816.597,75 dan mengalami kenaikan sebesar Rp49.831.687.152,29 atau 9,94% dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp501.549.129.445,46.

Aset Lainnya per SKPD Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.3.89. Aset Lainnya per SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	Tahun 2023
1	Dinas Pendidikan	152.674.194.842,00
2	Dinas Kesehatan	12.157.056.362,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.073.964.312,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	16.380.212.465,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	750.344.581,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.746.759.545,00
8	Dinas Sosial	426.042.322,00
9	Dinas Tenaga Kerja	-
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-

No	SKPD	Tahun 2023
11	Dinas Ketahanan Pangan	91.199.000,00
12	Dinas Pertanahan	-
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	24.853.398.657,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.946.314.590,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.296.672.374,00
16	Dinas Perhubungan	2.082.673.233,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	540.124.543,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	39.514.384,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	45.106.640,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	350.417.095,00
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	760.776.589,00
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	232.020.275,00
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10.873.111.342,00
25	Sekretariat Daerah	63.320.912.505,00
26	Sekretariat DPRD	1.569.653.777,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.458.231.561,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	5.236.103.571,00
29	Badan Pendapatan Daerah	5.006.636.344,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	166.522.011,00
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	-
32	Inspektorat	303.046.519,00
33	Kecamatan Bukitraya	166.470.584,00
34	Kecamatan Tenayan Raya	420.869.743,00
35	Kecamatan Sail	590.702.378,00
36	Kecamatan Lima Puluh	375.345.200,00
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	613.670.814,00
38	Kecamatan Sukajadi	594.460.694,00
39	Kecamatan Payung Sekaki	802.104.075,00
40	Kecamatan Senapelan	262.091.460,00
41	Kecamatan Marpoyan Damai	8.618.000,00
42	Kecamatan Binawidya	273.698.640,00
43	Kecamatan Tuah Madani	-
44	Kecamatan Rumbai	399.691.668,00
45	Kecamatan Rumbai Timur	-
46	Kecamatan Rumbai Barat	232.536.000,00
47	Kecamatan Kulim	
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	760.744.106,00
JUMLAH		312.916.209.791,00

Sumber : Neraca Kota Pekanbaru

5.3.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Tuntutan Ganti Rugi

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
581.102.113,75	2.088.904.282,46

Tagihan Jangka Panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah sedangkan Tagihan Tuntutan Kerugian daerah adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tabel 5.3.90. Rincian Tuntutan Ganti Rugi

(dalam rupiah)

No	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Dinas Pendidikan	0,00	181.996.513,40
2	Sekretariat DPRD	521.277.713,75	1.923.833.139,00
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	59.824.460,00	83.074.630,00
Jumlah		581.102.113,75	2.088.904.282,46

Sumber : Neraca Kota Pekanbaru

Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp581.102.113,75 dan mengalami penurunan sebesar Rp1.507.802.168,71 atau 72,18% dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp2.088.904.282,46 yang terdiri dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp581.102.113,75.

5.3.1.4.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
176.902.661.732,00	154.659.645.032,00

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki. Pada tahun 2023 Kemitraan dengan Pihak Ketiga tercatat sebesar Rp176.902.661.732,00 dan tidak terdapat perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru terdiri dari Kerja Sama Pemanfaatan dan Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna (BGS/BSG). Untuk Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna (BGS/BSG) yaitu Pasar Sukaramai (PT Makmur Papan Permata) dengan perjanjian Nomor 270-WK/1996 dan 018/MPP/XI/1996 tanggal 30 November 1996., Pasar Bawah (PT Dalena Pratama) dengan perjanjian No 644.1/151-WK/2000 dan Nomor 060/DPI-PK/XI/2000 tanggal 17 November 2000, Pasar Sail (PT Riau Kerta Raharja) dengan perjanjian No 17/WK/1999 dan 051/PB/I/99 tanggal 22 Februari 1999 dan Pasar Senapelan (PT Peputra Mahajaya) dengan perjanjian Nomor 131 Tahun 2002 dan Nomor 497/PMJ/VII/2002 tanggal 03 Agustus 2002 dan Pasar Induk (PT Agung Rafa Bonai, KSO) dengan perjanjian Nomor 100/PKS/X/2016/12 dan Nomor 07/ARB-KSO/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016.

Untuk Kerja Sama Pemanfaatan sebesar Rp22.243.016.700,00 merupakan kerja sama antar Pemerintah Kota Pekanbaru dengan PT. Ali Akbar Sejahtera, perjanjian Nomor P.511.2?DPP-4.1/376/2023 dan 001/PKS-AAS/IV/2023 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Pasar Wisata Pasar Bawah Kota Pekanbaru.

Kemitraan dengan pihak ketiga di Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.91. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

(dalam rupiah)

No	Nama Mitra	Tahun 2023	Tahun 2022
	Kerja Sama Pemanfaatan		
1	KSP - Pasar Bawah (nilai Tanah)	22.243.916.700,00	-
	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		
1	BGT - Pasar Sukaramai (nilai tanah)	83.938.644.000,00	83.938.644.000,00
2	BGT - Pasar Bawah (nilai tanah)	9.262.000.000,00	9.262.000.000,00
3	BGT - Pasar Sail (nilai tanah)	831.000.000,00	831.000.000,00
4	BGT - Pasar Senapelan (nilai tanah)	41.360.000.000,00	41.360.000.000,00
5	BGT - Pasar Induk (nilai tanah)	19.268.001.032,00	19.268.001.032,00
Jumlah		**176.902.661.732,00**	**154.659.645.032,00**

Sumber : Neraca Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.3.91. diatas menunjukkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp176.902.661.732,00.

a) CV. Putra Bertuah/PT.Riau Kerta Raharja sebagai Mitra Kerjasama Peremajaan Pasar Sail.

Mengacu kepada perjanjian Pemerintah Kota Pekanbaru dengan CV.Putra Bertuah/PT.Riau Kerta Raharja nomor 17/WK/1999 dan nomor 051/PB/I/99 tanggal 22 Februari 1999 beserta Adendum pertama dan kedua terkait Pembangunan Peremajaan Pasar Sail, menyepakati beberapa hal antara lain:

1. Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan kerja sama BGS dengan CV.Bertuah/PT.Riau Kerta Raharja dalam jangka waktu 20 tahun ditambah masa pembangunan 2 tahun dimulai dari tanggal penandatangan perjanjian kerjasama.
2. Dalam kerjasama itu pemerintah kota pekanbaru berhak atas kompensasi sebesar Rp530.118.662,00 dan aset berupa 2 pos jaga, 1 kantor UPTD serta fasilitas umum lainnya.

b) PT. Dalena PI sebagai Mitra Kerjasama Peremajaan Pasar Bawah

Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan kerjasama BGS dengan PT.Dalena PI dalam peremajaan Pasar Bawah sesuai dengan perjanjian Nomor 644.1/151-WK/2000 Tanggal 17 November 2000 menyepakati beberapa hal, antara lain:

1. Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan kerja sama BGS dalam jangka waktu 20 tahun ditambah masa pembangunan 1,5 tahun dimulai dari tanggal penandatangan perjanjian kerjasama.
2. Pada saat melakukan kerjasama BGS dengan PT.Dalena, terdapat bangunan diatas tanah yang dikerjasamakan yang kemudian dikompensasi senilai Rp.421.000.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2022 kompensasi tersebut telah diselesaikan oleh PT.Dalena kepada Pemerintah Kota Pekanbaru.

c) PT. Peputra maha Jaya sebagai Mitra Kerjasama Peremajaan Pasar Senapelan

Mengacu kepada perjanjian antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan pihak PT.Peputra Maha Jaya (PT.PMJ) nomor 131 Tahun 2002 dan nomor

497/OMJ/VII/2002 tanggal 3 Agustus 2002 yang menyepakati beberapa hal yang menjadi hak Pemerintah Kota Pekanbaru , antara lain sebagai berikut:

1. Pihak Pengelola Pasar Senapelan wajib memberikan kompensasi atas tanah dan bangunan senilai Rp2.500.000.000,00;
2. Pihak Pemerintah Kota Pekanbaru berhak menerima royalti atas penggunaan tanah sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen) dari total penerimaan biaya pelayanan jasa, setelah dipotong biaya pemeliharaan (maintenance fee) terhitung mulai pasar beroperasi sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama, sesuai laporan keuangan yang yang telah diaudit oleh akuntan publik atau minimal sebesar Rp110.000.000,00;
3. Pihak Pemerintah Kota Pekanbaru berhak menerima bagian laba bersih sebesar 30% dari laba/keuntungan bersih pengelolaan taman parkir setelah dipotong pajak sesuai dengan laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik.

Selanjutnya pada tanggal 23 September 2020 dilakukan adendum perjanjian kerjasama peremajaan Pasar Senapelan antaru Pemerintah Kota Pekanbaru dengan pihak PT. PMJ didepan notaris Rina Hamzah, SH, MM, M.Kn dengan nomor 21 disebabkan adanya pengalihan fungsi sebagian bangunan kios pasar menjadi hotel. Adendum akibat pengalihan fungsi ini menyebabkan Pemerintah Kota Pekanbaru berhak menerima penambahan kontribusi tetap yang naik progresif setiap tahunnya semenjak tahun 2016 terhitung saat hotel mulai beroperasi.

Pada 20 Juli 2020, 14 Oktober 2020, 30 November 2020 dan 23 Desember 2020, PT. PMJ mengajukan permohoran pembebasan royalti tahun 2020 yang disebabkan wabah COVID-19 yang berdampak atas penurunan jumlah pengunjung. Atas surat dimaksud telah diberikan jawaban pada tanggal 22 Maret 2021 bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru tidak dapat memberikan penghapusan/pembebasan royalti dan meminta PT. PMJ mengirimkan laporan keuangan audited tahun 2020 dan dokumen pendukung lainnya sebagai dasar Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menetapkan kebijakan terkait penundaan jadwal pembayaran royalti dan/atau penghapusan denda keterlambatan.

Hingga rapat koordinasi satker terkait bersama PT. PMJ terakhir pada tanggal 21 Desember 2021, PT. PMJmasih mengalami kendala dalam pembayaran kontribusi tetap pasar dan hotel akibat adanya bencana global pandemik COVID-19, sehingga piutang jatuh tempo tercatat s.d. tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi tetap atas pasar 2020 dan 2021 senilai Rp220.000.000,00
2. Kontribusi tetap atas penambahan fungsi hotel 2016-2018, 2020-2021 senilai Rp194.396.300,00
3. Bagi hasil laba parkir senilai Rp161.506.410,00 (temuan LHP BPK atas LKPD Pemko Pekanbaru TA. 2020)
4. Disamping itu terdapat LHP BPK atas LKPD Pemko Pekanbaru TA. 2020 tentang kekurangan pembayaran royalti/kontribusi tetap oleh PT. PMJ sebesar Rp4.019.492.615,00 disebabkan penafsiran dari kalimat perjanjian bahwa "Pihak Pemerintah Kota Pekanbaru berhak menerima royalti atas penggunaan tanah

sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen) dari total penerimaan biaya pelayanan jasa, setelah dipotong biaya pemeliharaan (maintenance fee) terhitung mulai pasar beroperasi sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama, sesuai laporan keuangan yang yang telah diaudit oleh akuntan publik atau minimal sebesar Rp110.000.000,00".

Atas temuan ini, pihak Pemerintah Kota Pekanbaru telah melayangkan beberapa kali surat teguran kepada pihak PT. PMJ antara lain dan mendapatkan balasan surat terakhir dengan nomor 206/M-087/PMJ-LGL/XI/2021 tanggal 26 November 2021, yang intinyabersedia melakukan klarifikasi dan telah diselenggarakan pertemuan pada tanggal 21 Desember 2021. Dari hasil rapat, terkait point temuan a) danb) diatas, PT. PMJ berharap adanya keringanan pola pembayaran dan bersedia menyerahkan laporan keuangan audited dan dokumen pendukung lainnya sebagai bukti tertulis. Namun hingga saat ini, dokumen tersebut belum disampaikan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru. Terkait temuan point c) dan d), PT. PMJ telah mengajukan keberatan melalui surat resmi nomor 025/M-013/PMJ-LGL/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal "Keberatan atas pembayaran royalti dan kontribusi pemanfaatan BOT/BGS Pasar Senapelan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" beserta lampiran kajian hukum oleh Tim Ahli.

Dalam tahun 2022, PT. PMJ telah mengirimkan Laporan Keuangan Audited untuk Tahun 2019 dan 2020, namun belum untuk Tahun 2021 serta belum disertai dokumen pendukung lainnya dalam rangka pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru terkait penundaan jadwal pembayaran royalti dan/atau penghapusan denda keterlambatan. Dalam tahun berjalan (tahun 2023), PT. PMJ telah mulai mengangsur tunggakan dengan rincian antara lain :

1. Kontribusi tetap atas pasar 2020 dan 2021 senilai Rp2.200.000.000,00;
2. Kontribusi tetap atas penambahan fungsi hotel 2020 dan 2021 senilai Rp38.866.000,00 ditambah Rp40.809.300,00.

Disamping itu, selama tahun 2022 dan 2023, tunggakan atas kontribusi tetap pasar dan hotel telah bertambah sebanyak Rp220.000.000,00 dan Rp40.809.300,00 ditambah Rp42.849.765,00 (belum termasuk perhitungan denda keterlambatan). Pemerintah Kota Pekanbaru melalui BPKAD Kota Pekanbaru telah menyurati pihak PT. PMJ terkait pelaporan audited PT. PMJ , Tindak Lanjut LHP BPK serta penyelesaian kewajiban lainnya melalui surat nomor 14.04.00/BPKAD-ASET/II/97 tanggal 20 Februari 2023.

d) PT. Makmur Papan Permata sebagai Mitra Kerjasama Peremajaan Pasar Sukaramai/Sukaramai Trade Center

Pada perjanjian kerjasama kemitraan pengelolaan Pasar Sukaramai dengan mitra yakni PT. Makmur Papan Permata (PT.MPP), berdasarkan perjanjian nomor 270-WK/1996 dan 018/MPP/XI/1996 tanggal 30 November 1996 dan Adendum Perjanjian Kerjasama pasca musibah kebakaran Pasar Sukaramai pada tanggal 8 Desember 2015 dengan nomor 100/PKS/X/2016/15 dan 06/MPP/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016. Selanjutnya kembali diadendum pada tanggal 8 Januari 2018 dengan perjanjian nomor 100/KERJ/I/07/2018 dan nomor 01/MPP/I/2018 yang menyepakati mengenai

pemanfaatan sebagian tanah jalan Imam Bonjol yang beralih fungsi menjadi pintu masuk, akses jalan lingkungan dalam Kawasan serta lahan parkir.

Sehubungan dengan perjanjian kerjasama berserta adendum diatas, Pemerintah Kota Pekanbaru berhak atas royalti dan pembagian keuntungan antara lain sebagai berikut:

1. PT.MPP berkewajiban membayar royalti/kontribusi ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru sebesar Rp100.000.000,00 per tahun atau 25% dari hasil labo bersih pengelolaan bangunan (telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekanbaru bahwa yang disetorkan adalah sebesar Rp100.000.000,00 untuk menghindari kerancuan);
2. Atas addendum pertama pada tahun 2016, PT. MPP berkewajiban membayar royalti/kontribusi tambahan s.d 16 Oktober 2046 dengan total sebesar Rp10.689.950.858,56;
3. Pemerintah Kota Pekanbaru berhak menerima bagian laba bersih dari pengelolaan taman parkir sebesar 30% setelah dipotong pajak sesuai dengan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Pada 21 Desember 2020 dan 12 Maret 2021, PT. MPP mengajukan permohonan penundaan jadwal pembayaran royalti/kontribusi tahunan tahun 2020 yang disebabkan oleh dampak dari wabah COVID-19 yang membuat penjualan atas toko tidak maksimal. Atas surat tersebut, pada tanggal 22 Maret 2021 Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan jawaban dengan meminta PT.MPP mengirimkan Laporan Keuangan Auditedtahun 2020 dan dokumen pendukung lainnya sebagai dasar Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menetapkan kebijakan terkait penundaan jadwal pembayaran royalti dan/atau penghapusan denda keterlambatan. PT.MPP telah menyampaikan hasil Laporan Keuangan Audited dari tahun 2016 s.d 2020, dan berdasarkan laporan dimaksud menyajikan bahwa PT.MPP mengalami kerugian meskipun angka rasio lancarperusahaan masih lebih dari 1.

Pada saat rapat koordinasi perangkat kerja terkait bersama PT. MPP terakhir pada tanggal 16 Februari 2022, PT. MPP masih mengalami kendala dalam pembayaran royalti/kontribusi tetap akibat pemulihan pasca bencana kebakaran dan ditambah dengan adanya bencana global pandemi COVID-19, sehingga piutang jatuh tempo tercatat s.d. tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi tetap atas perjanjian awal 2020 dan 2021 senilai Rp200.000.000,00;
2. Kontribusi tetap tambahan atas adendum perjanjian tahun 2019-2020 senilai Rp594.930.000,00;
3. Denda keterlambatan atas kontribusi tetap akibat perjanjian awaldan addendum perjanjian (temuan LHP BPK atas LKPD Pemko Pekanbaru TA. 2020) senilai Rp125.000.000,00 dan Rp70.825.000,00 atau total sebesar Rp195.825.000,00.

Tindak lanjut dari hasil pertemuan tersebut, PT. MPP telah menyurati Pemerintah Kota Pekanbaru dengan nomor 001.23/MPP-CAB/PKU/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 Perihal : Permohonan Tata Cara Pembayaran Kewajiban Royalti/Kontribusi, Denda dan PBB yang antara lain berisi bahwa :

1. PT.MPP telah pernah mengangsur denda keterlambatan pembayaran kontribusi tahun 2016 sebesar Rp45.000.000,00 , sehingga total denda keterlambatan yang diakui PT. MPP hanya sebesar Rp150.825.000,00
2. PT.MPP selanjutnya bermohon terkait pembayaran kewajiban royalti/kontribusi tetap sekaligus pembayaran denda hasil temuan LHP BPK RI serta PBB, akan dibayarkan secara proporsional setiap bulannya dimulai dari 16 Mei 2022 dan berakhir pada 16 April 2025 (36 bulan).

Terkait hal dimaksud, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Tim Percepatan Tindak Lanjut Temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2020 terkait Kontribusi dan Sanksi Administratif Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada PT. PMJ dan PT. MPP berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 1032 Tahun 2021, saat ini sedang menyiapkan administrasi penetapan persetujuan pemberian keringanan dalam hal pola pembayaran kontribusi tetap dan denda administratifkepada PT. PMJ dan PT. MPP selama masa pandemiCOVID-19.Hal ini dimuat dalam SK Walikota Pekanbaru Nomor 374 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Keterlambatan Pembayaran Royalti/Kontribusi Tahun 2020-2021 dan Pola Pembayaran Angsuran Atas Royalti/Kontribusi Tahun 2020-2021 sebagai Dampak Penyebaran Wabah Corona Virus Disease 2019 kepada PT. Makmur Papan Permata.

Menindaklanjuti penetapan dimaksud, PT MPP selama kurun waktu Tahun 2022 telah melakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menyelesaikan denda keterlambatan atas kontribusi tetap akibat perjanjian awal dan addendum perjanjian (temuan LHP BPK atas LKPD Pemko Pekanbaru TA. 2020) senilai Rp80.000.000,00 dan Rp70.825.000,00 atau total sebesar Rp150.825.000,00;
2. Menyelesaikan pembayaran kontribusi tetap atas perjanjian awal untuk 2020 dan 2021 senilai Rp200.000.000,00;
3. Mengangsur keterlambatan kontribusi tetap tambahan atas adendum perjanjian untuk tahun 2019-2020 yang jatuh tempo pada 16 Oktober 2020 dan 16 Oktober 2021 senilai Rp594.930.000,00 terus diangsur per bulan pada tahun berjalan oleh PT. MPP dan ditargetkan selesai pada April 2024.

e) PT. Agung Rafa Bonai (ARB) sebagai Mitra Kerjasama BGS Pasar Induk

Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Pekanbaru menandatangani perjanjian kerjasama pembanguran dan pengelolaan Pasar Induk Kota Pekanbaru dengan PT.ARB melalui perjanjian kerjasama nomor 100/PKS/X/2016/20 dan nomor 07/ARB-KSO/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016. Selanjutnya perjanjian tersebut diadendum dengan perjanjian nomor 100/KERJASAMA/38/X/2018 dan nomor 08/ARB-KSO/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang berisi penambahan jangka waktu pembangunan Pasar Induk, dari semula 24 (dua puluh empat) bulan semenjak perjanjian ditandatangani, mundur menjadi tanggal 19 Oktober 2019.

Dalam perjanjian kerjasama tersebut diatas, Pemerintah Kota Pekanbaru berhak memperoleh kontribusi tahunan dengan total Rp 17.552.226.275,00, memperoleh paling sedikit 10% dari keseluruhan hasil BGS untuk digunakan langsung dalam

pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah serta menerima 25% bagian laba bersih dari laba parkir, iklan dan bongkar muat.

Hingga rapat koordinasi terakhir pada tanggal 11 Maret 2022, PT. ARB baru menyelesaikan 60% dari keseluruhan target pembangunan BGS, serta baru membayarkan 2 (dua) tahun kontribusi tahunan yakni untuk pembayaran tahun 2016 dan 2017, sehingga total piutang jatuh tempo tercatat s.d. tahun 2021 adalah sebesar Rp779.455.901,00 (kontribusi tahun 2018, 2019 dan 2020). Nilai ini diluar hasil temuan BPK RI terkait denda keterlambatan sebesar Rp56.198.348,04 (untuk keterlambatan pembayaran tahun 2017 dan 2018).Hasil konfirmasi Pihak PT. ARB kepada BPK RI mengenai sebab keterlambatan pembangunan dan pembayaran kontribusi tetap ini antara lain adalah :

a. Adanya keterlambatan keluarnya Izin Pembangunan Pasar Induk pada tanggal 31 Juli 2017 dan baru diterima PT. ARB pada tanggal 26 Oktober 2017, sehingga pembangunan tidak dimulai sesuai dengan perjanjian awal. Atas kondisi tersebut, telah dilakukan adendum masa pembangunan selama setahun hingga Oktober 2019.

b. Adanya kendala dari pendanaan dikarenakan awalnya ada 3 perusahaan untuk pendanaan (KSO), namun dalam perjalanan hanya satu perusahaan saja yakni PT. ARB yang mendanai pembangunan pasar.

c. Dari hasil wawancara dengan Direktur PT. ARB diketahui bahwa progress fisik dari Februari 2020 s.d. saat ini, belum mengalami peningkatan yakni masih pada angka 60%. Hal ini disebabkan adanya wabah pandemik COVID-19 dan keterbatasan keuangan perusahaan.

d. Masalah lain yang menjadi permasalahan adalah adanya miskomunikasi antara Pemerintah Kota Pekanbaru pada saat itu melalui Dinas Pasar Kota Pekanbaru yang bersepakat dengan PT. ARB mengenai proses balik nama alas hak kepemilikan Pasar Induk menjadi sertifikat HPL akan diurus dan ditanggung biayanya oleh pihak PT. ARB. Sehingga alas hak kepemilikan Pasar Induk tersebut langsung diserahkan kepada PT. ARB pada tahun 2016. Namun akibat Dinas Pasar melebur ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan karena terbitnya Peraturan Daerah mengenai SOTK Pemerintah Kota Pekanbaru terbaru ditahun 2017, proses sertifikasi ini ternyata tidak berlanjut. Hingga akhirnya, pada bulan Juli tahun 2020 dokumen alas hak kepemilikan tersebut diserahkan kembali kepada Pemerintah Kota Pekanbaru melalui BPKAD Kota Pekanbaru. Selanjutnya atas dokumen alas hak dimaksud telah diserahkan oleh BPKAD kepada Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru pada tanggal 3 Juli 2020 untuk pengurusan sertifikat HPL. Kondisi hingga saat ini, Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru dalam proses penerbitan SK HPL di Kementerian ATR RI. Kendala ini menjadi salah satu justifikasi bagi PT. ARB sehingga tidak dapat menerbitkan sertifikat HGB diatas tanah HPL yang dapat menjadi alternatif solusi pendanaan tambahan dalam hal pembiayaan dari perbankan.

Menurut penyampaian dari pihak PT. ARB, telah disampaikan sebanyak 2 (dua) kali permohonan adendum dan penangguhan royalti kepada Pemerintah Kota

Pekanbaru. Surat pertama dengan nomor 20/ARB-IDK-PKU/XI/2020 pada tahun 2021 ditujukan kepada Walikota Pekanbaru, dan surat terakhir dengan nomor 07/ARB-IDK-PKU/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 perihal Permohonan Adendum Ke-3. Dalam pengajuan PT. ARB, menuat beberapa poin mengenai hal-hal yang akan diadendum, antara lain:

1. Adendum pelaksanaan jangka waktu BGS Pasar Induk diubah dari semula terhitung mulai perjanjian ditandatangani berubah menjadi terhitung dari terbitnya HGB;
2. Pemko Pekanbaru berkomitmen untuk tidak menerbitkan izin terhadap pasar-pasar sejenis dalam radius 5 kilometer;
3. Pemko Pekanbaru bersedia memberikan pembebasan atas kontribusi tetap PT. ARB yang tertunggak dan dimulai pembayaran terhitung sejak Pasar Induk mulai beroperasi;
4. Pihak PT. ARB boleh mengalihkan fungsi sebagian luasan lahan dalam rangka optimalisasi pendapatan.
5. Pemko Pekanbaru berkewajiban untuk memindahkan pedagang kedalam areal Pasar Induk sebagaimana komitmen Perjanjian Awal.

Disisi lain, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyampaikan Surat Teguran Pertama dan Kedua kepada pihak PT. ARB sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Terkait surat permohonan yang disampaikan oleh PT. ARB, telah dijawab resmi oleh OPD terkait disertai permintaan dokumen pendukung, penunjukan konsultan pengawas serta Laporan Keuangan Audited oleh PT. ARB selama kurun waktu tertagih guna merumuskan kebijakan lebih lanjut. Namun hingga saat ini, belum mendapat respon dari PT. ARB.Sebagai informasi tambahan, pada tanggal 30 Agustus 2022, telah terbit Sertifikat HPL atas aset tanah Pasar Induk dengan Nomor 00016 oleh Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia. *Update* untuk kondisi total piutang jatuh tempo tercatat s.d. tahun 2023 adalah sebesar Rp1.381.351.627,00 (untuk kontribusi tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022) diluar perhitungan denda tahun berjalan.

5.3.1.4.3. Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
25.875.701.713,00	24.295.867.963,00

Aset tak berwujud terdiri dari aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.3.92. Rincian Aset Tak Berwujud per SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Dinas Pendidikan	291.807.000,00	291.807.000,00
2	Dinas Kesehatan	888.296.007,00	837.456.007,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.312.164.387,00	11.312.164.387,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.260.378.425,00	1.100.386.425,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	177.650.000,00	177.650.000,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	88.640.000,00	88.640.000,00
8	Dinas Sosial	10.027.453,00	10.027.453,00
9	Dinas Tenaga Kerja	162.802.500,00	162.802.500,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-
11	Dinas Ketahanan Pangan	106.987.000,00	79.967.000,00
12	Dinas Pertanahan	617.530.800,00	488.863.750,00
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	582.508.217,00	582.508.217,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50.254.500,00	50.254.500,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	48.400.000,00	48.400.000,00
16	Dinas Perhubungan	1.193.619.660,00	1.094.607.600,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.320.184.010,00	1.320.184.010,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	98.077.000,00	98.077.000,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	186.229.000,00	436.192.000,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	253.322.482,00	163.744.482,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	39.160.000,00	39.160.000,00
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	286.200.000,00	286.200.000,00
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	867.253.567,00	867.253.567,00
25	Sekretariat Daerah	79.469.000,00	79.469.000,00
26	Sekretariat DPRD	1.686.286.000,00	1.047.806.000,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.239.072.689,00	1.239.072.689,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	501.373.700,00	403.693.700,00
29	Badan Pendapatan Daerah	856.693.500,00	806.693.500,00
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	928.064.248,00	663.664.248,00
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	29.260.000,00	29.260.000,00
32	Inspektorat	259.278.276,00	194.908.276,00
33	Kecamatan Bukitraya	74.526.800,00	74.526.800,00
34	Kecamatan Tenayan Raya	143.321.216,00	143.321.216,00
35	Kecamatan Sail	-	-
36	Kecamatan Limo Puluh	21.096.792,00	21.096.792,00
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	-	-
38	Kecamatan Sukajadi	-	-
39	Kecamatan Payung Sekaki	12.000.000,00	12.000.000,00
40	Kecamatan Senapelan	143.680.024,00	143.680.024,00
41	Kecamatan Marpoyan Damai	47.817.200,00	47.817.200,00
42	Kecamatan Binawidya	96.792.756,00	96.792.756,00
43	Kecamatan Tuah Madani	-	-
44	Kecamatan Rumbai	-	-
45	Kecamatan Rumbai Timur	-	-
46	Kecamatan Rumbai Barat	33.721.614,00	33.721.614,00
47	Kecamatan Kulim	-	-
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	79.800.000,00	30.000.000,00
JUMLAH		25.875.701.713,00	24.205.867.963,00

Sumber : Neraca Kota Pekanbaru

Dari Tabel 5.3.92. di atas menunjukkan Aset Tak Berwujud Tahun 2023 adalah sebesar Rp25.875.701.713,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.669.833.750,00 atau 6,90% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp24.205.867.963,00. Adapun rincian Aset Tak Berwujud Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 15.

5.3.1.4.4. Aset Lain-lain

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
312.916.209.791,00	314.627.623.115,00

Aset Lain-lain 31 Desember 2023 sebesar Rp312.916.209.791,00 dimana mengalami penurunan sebesar Rp1.711.413.324,00 atau 0,54% dari Tahun 2022 sebesar 314.627.623.115,00. Dimana untuk Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sesuai dengan Kepmendagri 50-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tidak disajikan lagi untuk aset lain-lain. Adapun rincian akun Aset lain-lain terdiri atas Aset Rusak Berat/Usang senilai Rp307.678.106.220,00 dan Dana Bergulir-Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PEK) yang direklas dari semula dicatat pada Investasi Jangka Panjang - Investasi Non Permanen Dana Bergulir ke Aset lain-lain karena sudah dalam proses penghapusan di KPKNL sejak Tahun 2019 dengan nilai per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.247.125.527,00 dan pada tahun 2023 ada pelunasan Dana Bergulir-Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PEK) sebesar Rp9.021.956,00 sehingga nilai per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.238.103.571,00.

Pada Tahun 2023 Aset Rusak Berat/Usang senilai Rp307.678.106.220,00 mengalami penurunan karna adanya penghapusan sebesar Rp1.702.392.354,00 atau 0,55% dari tahun 2022 sebesar Rp309.380.498.574,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.93. Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	2023
1	Aset Rusak Berat/Usang	309.380.498.574,00	0,00	1.702.392.354,00	307.678.106.220,00
JUMLAH		309.380.498.574,00	-	1.702.392.354,00	307.678.106.220,00

Sumber : Neraca Kota Pekanbaru

Adapun penjelasan rincian Aset Lain-lain pada SKPD dengan nilai setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.94. Aset Lain-Lain per SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Dinas Pendidikan	152.674.194.842,00	152.674.194.832,00
2	Dinas Kesehatan	12.157.056.392,00	12.157.056.328,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.073.964.312,00	2.073.964.311,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	16.380.212.465,00	16.380.212.465,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	750.344.581,00	750.344.581,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	0,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.746.759.545,00	1.746.759.540,00
8	Dinas Sosial	426.042.322,00	426.042.322,00
9	Dinas Tenaga Kerja		
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		

No	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022
11	Dinas Ketahanan Pangan	91.199.000,00	91.199.000,00
12	Dinas Perkanahan		
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	24.853.398.657,00	24.853.398.657,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.946.314.609,00	2.946.314.609,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.296.672.374,00	1.296.672.374,00
16	Dinas Perhubungan	2.082.673.233,00	2.082.673.245,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	540.124.543,00	540.124.543,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	39.514.384,00	39.514.384,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	45.105.642,00	45.105.642,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	360.417.095,00	360.417.095,00
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	760.776.589,00	760.776.589,00
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	232.020.275,00	232.020.275,00
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10.873.111.342,00	10.873.111.343,00
25	Sekretariat Daerah	63.320.912.505,00	65.012.831.692,00
26	Sekretariat DPRD	1.569.653.777,00	1.569.653.780,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.458.231.561,00	1.462.709.728,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	5.238.103.571,00	5.247.125.527,00
29	Badan Pendapatan Daerah	5.008.636.344,00	5.008.636.600,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	166.522.011,00	166.521.981,00
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	
32	Inspektorat	303.046.519,00	303.046.519,00
33	Kecamatan Bukitraya	166.470.584,00	166.470.584,00
34	Kecamatan Tenayan Raya	420.869.743,00	420.869.743,00
35	Kecamatan Sail	590.702.378,00	590.702.378,00
36	Kecamatan Lima Puluh	375.345.200,00	375.345.200,00
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	613.670.814,00	613.670.814,00
38	Kecamatan Sukajadi	594.460.694,00	594.460.694,00
39	Kecamatan Payung Sekaki	802.104.075,00	802.104.075,00
40	Kecamatan Senapelan	292.091.450,00	292.091.450,00
41	Kecamatan Marpoyan Damai	8.618.000,00	8.618.000,00
42	Kecamatan Binawidya	279.996.640,00	279.701.640,00
43	Kecamatan Tuah Madani		
44	Kecamatan Rumbai	399.891.668,00	399.891.668,00
45	Kecamatan Rumbai Timur		
46	Kecamatan Rumbai Barat	232.536.000,00	232.536.000,00
47	Kecamatan Kulim		
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	760.744.106,00	760.744.106,00
JUMLAH		312.916.209.791,00	314.627.623.115,00

Sumber : Neraca Kota Pekanbaru

Selanjutnya untuk Aset Lain-Lain dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (Aset Rusak Berat/Usang) dapat dilihat pada Lampiran 16.

5.3.1.4.5. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
(21.907.801.752,00)	(19.498.771.783,00)

Nilai Akumulasi Amortisasi merupakan akumulasi amortisasi untuk Aset Tak Berwujud. Nilai akumulasi amortisasi Tahun 2023 sebesar Rp21.907.801.752,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp2.409.029.969,00 atau 12,35% dari Tahun 2022 sebesar Rp19.498.771.783,00 Nilai Akumulasi Amortisasi dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.3.95. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

No	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Dinas Pendidikan	(208.788.000,00)	(159.717.500,00)
2	Dinas Kesehatan	(698.959.690,00)	(543.617.590,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(10.376.162.926,00)	(9.350.976.421,00)
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	(1.094.656.779,00)	(829.870.265,00)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(136.638.542,00)	(92.526.042,00)
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	(70.826.875,00)	(61.110.625,00)
8	Dinas Sosial	(10.027.453,00)	(10.027.453,00)
9	Dinas Tenaga Kerja	(162.802.500,00)	(162.802.500,00)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-
11	Dinas Ketahanan Pangan	(55.838.723,00)	(34.468.759,00)
12	Dinas Pertanahan	(516.941.375,00)	(488.853.750,00)
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	(413.207.148,00)	(296.579.660,00)
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(50.254.500,00)	(50.254.500,00)
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(48.400.300,00)	(48.400.000,00)
16	Dinas Perhubungan	(955.685.304,00)	(777.150.760,00)
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	(1.320.184.010,00)	(1.320.184.010,00)
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(98.077.000,00)	(98.077.000,00)
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(166.778.300,00)	(340.854.084,00)
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	(152.143.232,00)	(122.312.651,00)
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	(39.160.000,00)	(39.160.000,00)
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	(288.200.000,00)	(288.200.000,00)
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	(667.253.567,00)	(667.253.567,00)
25	Sekretariat Daerah	(91.429.188,00)	(53.964.438,00)
26	Sekretariat DPRD	(775.299.576,00)	(428.319.146,00)
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(1.239.072.689,00)	(1.204.967.792,00)
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	(314.366.201,00)	(245.395.884,00)
29	Badan Pendapatan Daerah	(620.268.333,00)	(595.473.500,00)
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(577.160.279,00)	(452.793.176,00)
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	(29.260.000,00)	(29.260.000,00)
32	Inspektorat	(189.596.401,00)	(179.015.986,00)
33	Kecamatan Bukitraya	(74.526.800,00)	(74.526.800,00)
34	Kecamatan Tenayan Raya	(143.321.216,00)	(143.321.216,00)
35	Kecamatan Sail	-	-
36	Kecamatan Lima Puluh	(21.096.792,00)	(21.096.792,00)
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	-	-
38	Kecamatan Sukajadi	-	-
39	Kecamatan Payung Sekaki	(12.000.000,00)	(12.000.000,00)
40	Kecamatan Senapelan	(123.751.486,00)	(99.861.680,00)
41	Kecamatan Marpoyan Damai	(47.817.200,00)	(47.817.200,00)
42	Kecamatan Binawidya	(96.792.756,00)	(96.792.756,00)
43	Kecamatan Tuah Madani	-	-
44	Kecamatan Rumbai	-	-
45	Kecamatan Rumbai Timur	-	-
46	Kecamatan Rumbai Barat	(33.721.614,00)	(31.568.260,00)
47	Kecamatan Kulim	-	-
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(18.087.500,00)	1.250.000
JUMLAH		(21.907.851.752,00)	(19.498.771.783,00)

Sumber : Neraca Kota Pekanbaru

5.3.1.4.6. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
57.012.943.000,00	25.465.860.836,00

Treasury Deposit Facility (TDF) merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI). Pola penyimpanan uang ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility.

Nilai Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) merupakan saldo DBH dan/atau DAU Pemerintah Kota Pekanbaru yang disimpan pada Bank Indonesia yang menggunakan pola penyimpanan *Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2023. Nilai Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) Tahun 2023 sebesar Rp57.012.943.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp31.547.082.164,00 atau 123,88% dari Tahun 2022 sebesar Rp25.465.860.836,00. Nilai Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.3.96. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	DBH PBB	6.867.093.000,00	2.539.923.741,00
2	DBH PPh Pasal 21	19.441.843.000,00	10.384.587.996,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	209.479.000,00	903.070.389,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		473.894,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bur	25.969.446.000,00	9.800.654.097,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	320.672.000,00	593.812.442,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	4.304.420.000,00	312.759.965,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		716.825.071,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan		211.753.211,00
JUMLAH		**57.012.943.000,00**	**25.465.860.836,00**

Sumber : Neraca Kota Pekanbaru

5.3.2. KEWAJIBAN

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
163.791.180.472,93	185.967.862.723,65

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Pekanbaru.

Kewajiban Pemerintah Kota Pekanbaru berupa kewajiban jangka pendek dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.97. Rincian Kewajiban

(dalam rupiah)

No.	Kewajiban	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	Kewajiban Jangka Pendek	163.791.180.472,93	185.967.862.723,65	(22.176.682.250,72)	(11,93)
2	Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Jumlah		163.791.180.472,93	185.967.862.723,65	(22.176.682.250,72)	(11,93)

Sumber: Neraca Kota Pekanbaru

Kewajiban tahun 2023 sebesar Rp163.791.180.472,93 dan mengalami penurunan sebesar Rp22.176.682.250,72 atau 11.93%, dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp185.967.862.723,65.

5.3.2.1.Kewajiban Jangka Pendek

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
163.763.852.674,13	185.967.862.723,65

Kewajiban jangka pendek merupakan pos untuk menampung kewajiban Pemerintah Kota Pekanbaru yang diharapkan dibayar dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian kewajiban jangka pendek adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.98. Rincian Kewajiban Jangka Pendek

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	200.196.680,80	587.209.984,00	(387.013.303,20)	(65,91)
2	Pendapatan Diterima Dimuka	115.351.927,50	8.350.080,00	107.001.927,50	1.281,46
3	Utang Belanja	163.468.632.364,83	185.341.897.229,65	(21.873.464.865,02)	(11,80)
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.199.500,00	30.405.510,00	(23.206.010,00)	(76,32)
Jumlah		163.791.180.472,93	185.967.862.723,65	(22.176.682.250,72)	(11,93)

Sumber: Neraca Kota Pekanbaru

Kewajiban jangka pendek tahun 2023 sebesar Rp163.791.180.472,93 dan mengalami penurunan sebesar Rp22.176.682.250,72 atau 11.93%, dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp185.967.862.723,65.

5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
200.196.680,80	587.209.984,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) merupakan pajak yang dipungut Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Umum Negara sampai dengan 31

Desember 2023. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) tahun 2023 sebesar Rp200.196.680,80 dan mengalami penurunan sebesar Rp387.013.303,20 atau 65,91%, dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp587.209.984,00. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) tahun 2023 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.99. Rincian Utang PFK

(dalam rupiah)

No	SKPD	PPh Pa 21	PPh Pa 22	PPh Pa 23	PPN	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	396.000,00	0,00	511.480,00	606.981,00	1.464.461,00
2	RSD Madani	40.696.926,00	13.172.319,14	9.014.899,00	134.440.575,66	197.324.719,80
3	Dinas Perhubungan	0,00	170.100,00	0,00	1.247.400,00	1.417.500,00
Jumlah		41.092.926,00	13.342.419,14	9.526.379,00	136.294.956,66	200.196.680,80

Sumber: Neraca Kota Pekanbaru

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) tahun 2022 telah disetorkan seluruhnya kepada Kas Umum Negara pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya sehingga Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) tahun 2023 adalah pajak yang dipungut Bendahara Pengeluaran namun belum disetorkan ke Kas Umum Negara sampai dengan 31 Desember 2023.

5.3.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
115.351.927,50	8.350.000,00

Pendapatan diterima dimuka disajikan dalam Neraca sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan diterima dimuka tahun 2023 sebesar Rp115.351.927,50 dan mengalami kenaikan Rp107.001.927,50 atau 1.281,46%, dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp8.350.000,00. Adapun Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp Rp115.351.927,50 merupakan setoran kelebihan pembayaran dari pihak III yang berasal dari jaminan bongkar Reklame pada pada Badan Pendapatan Daerah.

5.3.2.1.3. Utang Belanja

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
163.468.432.364,63	185.341.897.229,55

Akun utang belanja digunakan untuk mencatat utang belanja pemerintah daerah kepada pihak ketiga/masyarakat yang disebabkan terjadinya transaksi belanja yang belum dibayarkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Utang belanja terdiri atas utang belanja pegawai, utang belanja barang dan jasa, utang belanja subsidi, dan utang belanja modal.

Utang belanja Tahun 2023 Rp163.468.432.364,63 dan mengalami penurunan Rp21.873.464.865,02 atau 11,80%, dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp185.341.897.229,65 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.100. Rincian Utang Belanja per SKPD

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Utang Belanja Pegawai	Utang Belanja Barang dan Jasa	Utang Belanja Subsidi	Utang Belanja Modal	Total
1	Dinas Pendidikan	1.994.388.349,00	3.812.763.700,00	-	-	5.807.344.049,00
2	Dinas Kesehatan	8.557.003.488,00	4.270.646.008,00	-	3.957.307.008,00	16.784.976.484,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	211.848.079,00	2.303.980.720,00	-	2.602.885.821,92	5.148.714.771,92
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	139.678.943,00	6.322.260.725,00	-	10.283.466.894,00	16.745.846.562,00
5	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	221.242.920,00	-	-	-	221.242.920,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	102.955.256,00	421.463.125,00	-	-	524.418.381,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	172.115.512,00	163.176.100,00	-	124.200.000,00	459.491.612,00
8	Dinas Sosial	89.960.206,00	638.440.860,00	-	-	728.401.066,00
9	Dinas Tenaga Kerja	77.215.328,00	-	-	-	77.215.328,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	115.839.819,00	114.500.300,00	-	-	230.340.019,00
11	Dinas Kebudayaan Pangan	86.328.413,00	-	-	-	86.328.413,00
12	Dinas Perpustakaan	71.098.184,00	137.850.200,00	-	1.164.085.000,00	1.373.081.384,00
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	186.504.355,00	8.797.699.731,00	-	163.980.865,00	9.048.284.946,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	230.254.311,00	-	-	-	230.254.311,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	91.817.640,00	400.226.600,00	-	82.000.000,00	582.044.240,00
16	Dinas Perhubungan	782.046.114,00	69.860.161.300,00	3.451.435.065,00	13.289.177.577,00	82.797.819.256,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	88.987.900,00	-	-	-	88.987.900,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	90.401.147,00	70.896.500,00	-	-	161.297.647,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	241.954.210,00	554.438.944,00	-	-	796.393.758,00
20	Dinas Kependudukan dan Olahraga	91.432.733,00	943.676.913,00	-	49.284.000,00	784.393.051,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	131.722.505,00	217.880.193,71	-	-	349.615.698,71
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	86.283.300,00	107.213.021,00	-	-	223.496.321,00
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	154.270.485,00	20.000.000,00	-	-	174.270.485,00
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	160.532.961,00	417.849.256,00	-	-	598.482.249,00
25	Sekretariat Daerah	518.109.036,00	442.617.253,00	-	-	960.717.879,00
26	Sekretariat DPRD	170.113.776,00	1.267.692.850,00	-	111.246.000,00	1.549.052.626,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	172.375.880,00	-	-	-	172.375.880,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	191.713.302,00	-	-	-	191.713.302,00
29	Badan Pendapatan Daerah	177.952.788,00	327.134.400,00	-	-	505.087.188,00
30	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	175.770.029,00	-	-	-	175.770.029,00
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	99.524.486,00	-	-	-	99.524.486,00
32	Inspektorat	347.021.961,00	-	-	-	347.021.961,00
33	Kecamatan Bukit Raya	127.137.088,00	977.501.800,00	-	-	1.104.638.888,00
34	Kecamatan Tenayan Raya	174.429.055,00	1.467.127.700,00	-	-	1.591.556.255,00
35	Kecamatan Sail	86.248.410,00	359.296.600,00	-	-	445.545.010,00
36	Kecamatan Limo Puluh	98.536.110,00	524.362.800,00	-	-	622.897.910,00
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	124.871.455,00	604.374.800,00	-	-	729.246.255,00
38	Kecamatan Sukajadi	166.346.485,00	716.484.500,00	-	-	673.831.985,00
39	Kecamatan Payung Sekaki	150.416.701,00	870.671.300,00	-	-	1.021.088.001,00
40	Kecamatan Senapelan	190.766.786,00	865.316.400,00	-	14.251.400,00	628.348.586,00
41	Kecamatan Marpoyan Damai	157.293.104,00	1.321.112.800,00	-	-	1.478.395.904,00
42	Kecamatan Binawidya	160.008.214,00	1.192.486.800,00	-	69.436.000,00	1.401.894.814,00
43	Kecamatan Tuah Madani	131.591.233,00	1.595.349.760,00	-	-	1.726.940.993,00
44	Kecamatan Rumbai	113.301.618,00	1.311.281.800,00	-	-	1.424.583.670,00
45	Kecamatan Rumbai Timur	92.171.529,00	666.669.800,00	-	-	758.842.329,00
46	Kecamatan Rumbai Barat	111.905.390,00	583.486.800,00	-	-	695.392.190,00
47	Kecamatan Kulim	128.685.583,00	801.136.800,00	-	-	929.822.383,00
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	151.515.561,00	99.203.200,00	-	82.000.000,00	282.718.761,00
JUMLAH		**17.401.502.949,00**	**111.012.372.382,71**	**3.451.435.065,00**	**31.881.349.357,92**	**163.468.452.384,63**

Sumber: Neraca Kota Pekanbaru

Penjelasan/Rincian atas utang belanja adalah sebagai berikut:

a. Utang Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
17.401.565.949,00	17.401.565.949,00

Akun ini dipakai untuk digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan ASN, utang belanja tambahan penghasilan ASN dan utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN,

Utang belanja pegawai Tahun 2023 Rp17.401.565.949,00, sama nilainya jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp17.401.565.949,00

Rincian utang belanja pegawai dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5.3.101. Rincian Utang Belanja Pegawai per SKPD

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	286.561.758,00	1.697.718.558,00	-	1.984.280.349,00
2	Dinas Kesehatan	152.509.791,00	2.792.113.695,00	5.643.280.000,00	8.587.903.486,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.691.765,00	203.963.285,00	-	211.845.071,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.466.092,00	120.413.751,00	-	128.879.843,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	7.448.861,00	193.892.059,00	-	201.242.920,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.968.702,00	98.386.554,00	-	102.965.256,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.005.764,00	134.499.718,00	32.610.000,00	172.115.512,00
8	Dinas Sosial	4.973.059,00	75.990.147,00	-	80.963.206,00
9	Dinas Tenaga Kerja	4.617.467,00	72.597.859,00	-	77.215.326,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	8.969.736,00	106.850.082,00	-	115.820.818,00
11	Dinas Kebakaran Ringan	3.132.535,00	83.195.878,00	-	86.328.413,00
12	Dinas Perbanahan	2.499.103,00	68.577.061,00	-	71.076.164,00
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.149.110,00	126.384.245,00	-	128.584.355,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.859.528,00	215.583.783,00	-	230.254.311,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.325.585,00	88.089.075,00	-	91.612.640,00
16	Dinas Perhubungan	7.394.858,00	184.949.856,00	-	192.044.714,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	3.371.042,00	85.616.858,00	-	88.987.900,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.092.647,00	89.368.500,00	-	90.461.147,00

NO	SKPD	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Jumlah
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu	3.215.793,00	232.739.017,00	-	241.954.810,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	987.507,00	30.464.626,00	-	31.452.133,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.824.627,00	136.850.678,00	-	131.725.605,00
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.459.870,00	30.932.421,00	-	96.260.300,00
23	Dinas Perkanan dan Pertanian	5.707.895,00	148.439.610,00	-	134.216.455,00
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5.015.586,00	157.273.363,00	17.540.000,00	160.552.991,00
25	Sekretariat Daerah	15.810.304,00	527.290.062,00	-	518.100.626,00
26	Sekretariat DPRD	11.091.811,00	159.062.987,00	-	165.113.776,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.913.756,00	166.462.122,00	-	172.375.880,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	3.422.807,00	188.290.495,00	-	191.713.302,00
29	Badan Pendapatan Daerah	5.794.156,00	171.199.932,00	-	177.993.788,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.267.002,00	169.463.627,00	-	175.775.629,00
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	3.868.340,00	91.714.139,00	-	95.521.499,00
32	Inspektorat	12.368.496,00	334.853.465,00	-	347.822.961,00
33	Kecamatan Bukitraya	4.871.537,00	122.256.382,00	-	127.137.899,00
34	Kecamatan Tenayan Raya	6.867.662,00	167.560.903,00	-	174.428.565,00
35	Kecamatan Sail	3.235.982,00	92.812.448,00	-	96.048.412,00
36	Kecamatan Lima Puluh	3.877.022,00	92.856.089,00	-	96.533.112,00
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	4.543.567,00	120.321.888,00	-	124.871.455,00
38	Kecamatan Sukajadi	5.925.380,00	146.421.185,00	-	152.346.466,00
39	Kecamatan Payung Sekaki	14.599.562,00	135.821.178,00	-	150.416.701,00
40	Kecamatan Senapelan	4.962.300,00	125.798.486,00	-	130.760.786,00
41	Kecamatan Marpoyan Damai	5.968.597,00	151.313.507,00	-	157.281.104,00
42	Kecamatan Rumbai Pesisir	5.925.619,00	133.882.580,00	-	140.008.214,00
43	Kecamatan Tuah Madani	5.631.700,00	125.625.533,00	-	131.561.233,00
44	Kecamatan Rumbai	4.324.273,00	109.977.606,00	-	115.301.879,00
45	Kecamatan Rumbai Timur	3.448.982,00	88.836.547,00	-	92.171.529,00
46	Kecamatan Rumbai Barat	4.088.197,00	107.817.193,00	-	111.905.390,00
47	Kecamatan Kulim	8.793.773,00	120.531.815,00	-	129.685.563,00
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.081.438,00	97.434.143,00	-	101.515.581,00
	Jumlah Utang Belanja Pegawai	734.780.307,00	30.980.351.642,00	5.553.434.000,00	17.401.505.949,00

Sumber: Neraca Kota Pekanbaru

Pada Dinas Kesehatan masih terdapat utang belanja gaji dan tunjangan ASN berupa utang belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN-belanja jasa pelayanan kesehatan tahun 2018 yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp12.180.000,00. Selain itu, utang belanja pegawai yang masih belum dibayar berasal dari utang belanja gaji dan tunjangan ASN, utang belanja tambahan penghasilan ASN dan utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN tahun 2021 yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2023.

b. Utang Belanja Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
111.032.072.392,71	123.801.254.647,71

Utang belanja Tahun 2023 Rp111.032.072.392,71 dan mengalami penurunan Rp12.769.182.255,00 atau 10,31%, dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp123.801.254.647,71

Utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2023 merupakan utang belanja barang dan jasa atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 dan sisa utang belanja barang dan jasa tahun anggaran 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 yang belum dilunasi. Rincian utang belanja barang dan jasa dapat dilihat pada Lampiran 1.

Utang belanja barang dan jasa per SKPD yang belum dibayarkan sampai tahun 2023 yang berasal dari tahun anggaran 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 dapat dilihat pada Lampiran 2.

Adapun penambahan dan pengurangan utang belanja barang dan jasa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.102. Penambahan dan Pengurangan Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Pendidikan	4.139.609.677,00	-	317.917.173,00	3.812.193.700,00
2	Dinas Kesehatan	4.885.708.731,00	-	606.662.723,00	4.279.045.008,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.029.894.599,00	-	725.716.039,00	3.303.983.725,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.173.239.476,00	-	50.008.751,00	6.223.359.725,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	83.628.300,00	-	83.628.300,00	-
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.289.884.260,00	-	788.421.135,00	421.463.125,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	163.176.100,00	-	-	163.176.100,00
8	Dinas Sosial	710.625.891,00	-	80.985.331,00	629.640.560,00
9	Dinas Tenaga Kerja	188.671.760,00	-	188.671.760,00	-
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	231.441.565,00	-	116.941.565,00	114.500.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	4.539.546,00	-	4.539.546,00	-
12	Dinas Perhubungan	137.865.200,00	-	-	137.865.200,00
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	10.545.609.810,00	-	1.775.417.084,00	8.767.609.726,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	415.591.867,00	-	7.365.307,00	408.226.600,00
15	Dinas Perhubungan	71.547.347.746,00	-	3.082.166.446,00	83.865.181.300,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	189.894.750,00	-	189.894.750,00	-
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	78.896.500,00	-	-	78.896.500,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	699.699.527,00	-	145.250.679,00	554.458.848,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	775.004.840,00	-	132.367.322,00	642.615.518,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	252.602.752,71	-	34.108.568,00	217.893.182,71
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	107.213.025,00	-	-	107.213.025,00
22	Dinas Pertanian dan Perikanan	97.603.647,00	-	78.568.647,00	29.035.000,00
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	445.854.691,00	-	28.205.403,00	417.649.288,00
24	Sekretariat Daerah	1.881.698.348,00	-	1.419.668.765,00	462.017.253,00
25	Sekretariat DPRD	1.335.199.037,00	-	67.466.377,00	1.267.662.660,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	27.178.700,00	-	27.178.700,00	-
27	Badan Pengelolah Keuangan dan Aset	94.672.500,00	-	94.672.500,00	-
28	Badan Pendapatan Daerah	383.704.845,00	-	56.626.545,00	327.104.400,00
29	Badan Pemilihan dan Pengembangan	48.435.200,00	-	48.435.200,00	-
30	Kecamatan Bukitraya	987.338.365,00	-	9.837.365,00	977.501.000,00
31	Kecamatan Tenayan Raya	1.418.624.742,00	-	11.507.342,00	1.407.117.700,00
32	Kecamatan Sail	568.657.252,00	-	9.360.052,00	559.296.600,00
33	Kecamatan Limo Puluh	532.251.404,00	-	8.898.804,00	524.352.600,00
34	Kecamatan Pekanbaru Kota	612.227.595,00	-	7.852.795,00	604.374.800,00
35	Kecamatan Sukajadi	733.475.849,00	-	14.990.349,00	718.485.500,00
36	Kecamatan Payung Sekaki	884.678.116,00	-	14.206.816,00	870.671.300,00
37	Kecamatan Senapelan	692.172.206,00	-	8.853.606,00	683.318.600,00
38	Kecamatan Marpoyan Damai	1.206.758.645,00	-	15.645.865,00	1.191.112.800,00
39	Kecamatan Binawidya	1.102.466.800,00	-	-	1.102.466.800,00
40	Kecamatan Tuah Madani	1.289.678.109,00	-	1.929.344,00	1.587.748.765,00
41	Kecamatan Rumbai	1.207.577.288,00	-	16.290.688,00	1.317.287.600,00
42	Kecamatan Rumbai Timur	671.387.654,00	-	4.729.654,00	666.658.000,00
43	Kecamatan Rumbai Barat	580.534.300,00	-	7.047.300,00	583.486.800,00
44	Kecamatan Kulim	808.353.139,00	-	7.715.139,00	801.138.000,00
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	159.220.094,00	-	61.026.794,00	98.203.299,00
	JUMLAH	123.591.254.647,71	-	13.719.183.255,00	111.872.272.240,71

Sumber: Aplikasi Kewajiban Kota Pekanbaru TA.2023

Terdapat koreksi utang belanja barang dan jasa yang didukung melalui Surat Pernyataan Pengguna Anggaran pada beberapa Satker sebagai berikut:

Tabel 5.3.103. Tabel Koreksi Utang Belanja Barang dan Jasa per SKPD yang dibayarkan Tahun 2023

(dalam rupiah)

NO.	SKPD	No. Surat Pernyataan dan tanggal	Periode Utang Belanja	Akun Utang Belanja Barang dan Jasa yang dikoreksi	Jumlah Koreksi
1	Dinas Kesehatan	Surat Pernyataan Kepala Puskesmas Rumbai Barat No. 445/PKM-PB/SKD/2023 Tanggal 11 Januari 2023	Th. 2022	Utang Belanja Barang Pakai Habis Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	340.400,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	No. Surat Pernyataan : 903.1/1.8/TU/BPBD-KEU/P/48/2023 Tanggal 30 Juni 2023	Th. 2021	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,00
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Surat Pernyataan 0.1.1/KWT/LH/P-KEU/1.02/2023 Tanggal 04 Mei 2023	Th. 2021	Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak LainMasyarakat Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp259.425,00
4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Surat Pernyataan 400/Dalduk-Sekr/I/2023 Tanggal 9 Januari 2023	Th. 2022	Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Telepon	69.500,00
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu	Surat Pernyataan No. 0.01/1.0.2/DPMPTSP-0056/2024 Tanggal 15 Februari 2024	Th. 2022	Utang Belanja Jasa Kantor Jasa ataPerkomunikasiInternet/Tv Berlangganan	31.291.300,00
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Surat Pernyataan No.B/160/DISIP/SIPRD2-a/2024 Tanggal 30 Januari 2024	Th. 2022	Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Listrik	592.750,00
7	Sekretariat DPRD	Surat Pernyataan No. 0.2/001.2.1/Sekwan-V/1442/2024 Tanggal 07 Februari 2024	Th. 2022	Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Listrik	113.000,00
8	Kecamatan Payung Sekaki	Surat Pernyataan Camat Payung Sekaki No.340/Kec.PY/X-Sekret/KEU/2023 Tanggal 06 November 2023	Th. 2022	Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Listrik	2.500,00
			Th. 2022	Utang Belanja Jasa Kantor Jasa ataPerkomunikasiInternet/Tv Berlangganan	380.300,00
9	Kecamatan Tuah Madani	Surat Pernyataan No. 900/76.a/KTM/2023 Tanggal 11 Februari 2023	Th. 2022	Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Listrik	1.554.250,00
			Th. 2022	Utang Belanja Jasa Kantor Jasa ataPerkomunikasiInternet/Tv Berlangganan	1.170.000,00

Sumber: Aplikasi Kewajiban Kota Pekanbaru TA.2023

Pada 31 Desember 2023, di rekening koran Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan tercatat belanja jasa tenaga pendidikan sebesar Rp3.343.825.000,00. Atas belanja ini, sudah selesai ditransfer dan direalisasikan pada 2 Januari 2024. Selain itu, pada tanggal 31 Desember 2023, di rekening koran pada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan, tercatat belanja jasa bimbingan teknis sebesar Rp2.600.000,00, belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia sebesar Rp3.135.000,00 dan belanja jasa tenaga kesehatan sebesar Rp875.000,00. Atas belanja ini, juga sudah selesai ditransfer dan direalisasikan pada 10 Januari 2024.

c. Utang Belanja Subsidi

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
3.451.435.665,00	4.417.749.812,00

Utang belanja subsidi per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.451.435.665,00 dan mengalami penurunan Rp966.314.147,00 atau 21,87% dari nilai utang semula Rp4.417.749.812,00 sesuai dengan hasil Laporan Hasil Reviu kegiatan tahun anggaran 2022 yang belum dibayar pada perangkat daerah di Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 700/Reviu/Inspektorat/03/2022 tanggal 25 Maret 2022. Terdapat pembayaran utang subsidi pada Tahun 2023 senilai Rp 966.314.147,00 melalui SP2D Nomor 20132/SP2D/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 melalui Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdasarkan DPA Dinas Perhubungan Nomor 2.15.02.2.09.01 Sub Kegiatan

Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, di mana utang subsidi yang semula dicatat pada Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD, yang selanjutnya dimutasikan pada tahun 2022 Dinas Perhubungan yang ditunjuk sebagai pengelola Trans Metro Pekanbaru sesuai dengan SK Walikota Pekanbaru Nomor 135 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Trans Metro Pekanbaru Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Adapun penambahan dan pengurangan utang belanja subsidi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.104. Penambahan dan Pengurangan Utang Belanja Subsidi Tahun 2023

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Perhubungan	4.417.749.052,00	-	966.214.147,00	3.451.435.905,00
JUMLAH		4.417.749.052,00	-	966.214.147,00	3.451.435.905,00

Sumber: Neraca Kota Pekanbaru

d. Utang Belanja Modal

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
31.583.358.357,92	39.721.326.820,94

Utang belanja modal per 31 Desember 2023 adalah Rp31.583.358.357,92 dan mengalami penurunan sebesar Rp8.137.968.463,02 atau 20,49% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp39.721.326.820,94, utang belanja modal per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Penambahan dan pengurangan utang belanja modal selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.105. Penambahan dan Pengurangan Utang Belanja Modal Tahun 2023

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	Utang Belanja Modal Tanah	1.164.080.000,00	-	-	1.164.080.000,00
2	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.286.784.965,00	-	802.179.900,00	1.483.895.165,00
3	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.046.579.154,00	-	-	1.046.579.154,00
4	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.190.982.701,94	-	7.305.088.980,02	27.885.814.038,92
5	Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-
JUMLAH		39.721.326.820,94	-	8.137.968.463,02	31.583.358.357,92

Sumber: Neraca Kota Pekanbaru

Rincian utang belanja modal per SKPD selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.106. Utang Belanja Modal per SKPD

(dalam rupiah)

No.	Nama SKPD	Utang Belanja Modal					Jumlah
		Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Aset Tidak Berwujud	
1	Dinas Kesehatan	-	851.777.000,00	-	2.705.550.000,00	-	3.557.327.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	5.000.000,00	906.095.154,00	1.821.790.767,93	-	2.732.885.921,93
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	915.235.000,00	10.611.396.684,00	-	11.526.631.684,00
4	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	124.000.000,00	-	-	-	124.000.000,00
5	Dinas Pertanahan	1.164.000.000,00	-	-	-	-	1.164.000.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-	142.980.860,00	-	-	-	142.980.860,00
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	82.000.000,00	-	-	-	82.000.000,00
8	Dinas Perhubungan	-	-	-	13.288.177.577,00	-	13.288.177.577,00
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	49.354.000,00	-	-	49.354.000,00
10	Sekretariat DPRD	-	111.245.000,00	-	-	-	111.245.000,00
11	Kecamatan Senapelan	-	14.251.400,00	-	-	-	14.251.400,00
12	Kecamatan Rumbai Pesisir	-	69.430.000,00	-	-	-	69.430.000,00
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	82.000.000,00	-	-	-	82.000.000,00
JUMLAH		1.164.000.000,00	1.483.885.145,00	1.044.579.154,00	27.888.834.028,93	-	31.581.298.327,93

Sumber: Neraca Kota Pekanbaru

Utang belanja modal per 31 Desember 2023 per kegiatan untuk masing-masing SKPD dapat dilihat pada Lampiran 3.

Utang belanja modal per SKPD yang belum dibayarkan sampai tahun 2023 yang berasal dari tahun anggaran 2019, 2020, 2021 dan 2022 dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5.3.107. Rincian Utang Belanja Modal per SKPD yang belum dibayarkan hingga Tahun 2023

(dalam rupiah)

NO.	SKPD	Jumlah
	Tahun 2019	**48.116.000,00**
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	48.116.000,00
	Tahun 2020	**8.000.000,00**
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.000.000,00
	Tahun 2021	**6.421.216.000,00**
1	Dinas Kesehatan	55.356.000,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.072.695.000,00
3	Dinas Pertanahan	1.164.000.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	98.517.000,00
	Tahun 2022	**26.113.023.897,93**
1	Dinas Kesehatan	3.471.971.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.827.885.921,93
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.148.314.894,00
4	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	124.000.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	44.963.860,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	82.000.000,00
7	Dinas Perhubungan	13.288.177.577,00
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	49.354.000,00
9	Sekretariat DPRD	111.245.000,00
10	Kecamatan Senapelan	14.251.400,00
11	Kecamatan Rumbai Pesisir	69.430.000,00
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	82.000.000,00
	TOTAL	**31.581.358.287,93**

Sumber: Aplikasi Kewajiban Kota Pekanbaru TA.2023

Adapun penambahan dan pengurangan utang belanja modal tanah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.108. Penambahan dan Pengurangan Utang Belanja Modal Tanah Tahun 2023

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Pertanahan	1.164.080.000,00	-	-	1.164.080.000,00
JUMLAH		1.164.080.000,00	-	-	1.164.080.000,00

Sumber: Aplikasi Kewajiban Kota Pekanbaru TA 2023

Terdapat saldo Utang Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.164.080.000,00 merupakan utang atas pengadaan 2 (dua) persil tanah tahun 2022. Dinas Pertanahan belum memproses pembayaran utang tersebut karena :

a. Terhadap persil tanah a.n. A seluas 1.147 m^2 sebesar Rp268.006.000,00 atas SKGR dengan Register Nomor 1454/590/TR/2020 tanggal 3 Nopember 2020, terdapat surat pengaduan yang disampaikan oleh Sdri. SCT kepada Dinas Pertanahan pada tanggal 27 Juli 2022 yang menyatakan tanah seluas 1.147 m2 tersebut telah dijual kepadanya dihadapan Notaris pada tanggal 16 Agustus 2021; dan

b. Terhadap persil tanah a.n. A seluas 4.213 m^2 sebesar Rp896.074.000,00 atas SKGR dengan Register No 1036/590/TR/2021 tanggal 20 September 2021, terdapat pengaduan dari masyarakat a.n. Warga Badak pada tanggal 26 Mei 2022 dan 30 Mei 2022 yang menentang ganti rugi tanah a.n. A dikarenakan tanah tersebut adalah milik Sdr S. Selanjutnya terdapat permohonan dari pengacara Sdr S yaitu Bintang Sianipar, SH & Rekan kepada Dinas Pertanahan melalui surat Nomor 012/BS-AD/Pdt/III/2023 tanggal 07 Maret 2023 agar ganti rugi tanah tersebut tidak dilakukan pembayaran disebabkan putusan dalam perkara belum *ingkraht* karena penggugat telah mengajukan memori banding atas perkara Nomor 55/G/2022/PTUN.PBR kepada Ketua PTUN Medan sesuai memori banding dari Bintang Sianipar, SH & Rekan kepada Ketua PTUN Medan tanggal 07 Maret 2023. Belum ada keputusan PTUN Medan atas pengajuan banding tersebut.

Adapun penambahan dan pengurangan utang belanja modal peralatan dan mesin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.109. Penambahan dan Pengurangan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Kesehatan	861.777.000,00	-	10.000.000,00	851.777.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
3	Dinas Perhubungan Kebakaran dan Penyelamatan	124.200.000,00	-	-	124.200.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	143.980.865,00	-	-	143.980.865,00
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	82.000.000,00	-	-	82.000.000,00
6	Sekretariat DPRD	111.245.900,00	-	-	111.245.900,00
7	Kecamatan Senapelan	14.251.400,00	-	-	14.251.400,00
8	Kecamatan Binawidya	69.436.000,00	-	-	69.436.000,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	82.000.000,00	-	-	82.000.000,00
JUMLAH		1.493.885.165,00	-	10.000.000,00	1.483.885.165,00

Sumber: Aplikasi Kewajiban Kota Pekanbaru TA 2023

Untuk penambahan dan pengurangan utang belanja modal gedung dan bangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.110. Penambahan dan Pengurangan Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	806.095.154,00	-	-	806.095.154,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	191.200.000,00	-	-	191.200.000,00
3	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	48.284.000,00	-	-	48.284.000,00
	JUMLAH	1.045.579.154,00	-	-	1.045.579.154,00

Sumber: Aplikasi Kewajiban Kota Pekanbaru TA 2023

Penambahan dan pengurangan utang belanja modal jalan, jaringan dan irigasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.111. Penambahan dan Pengurangan Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Kesehatan	2.709.560.000,00	-	-	2.709.560.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.923.329.430,84	-	7.101.586.660,02	1.821.742.770,82
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	13.275.845.604,80	-	303.160.000,00	12.972.285.604,80
4	Dinas Perhubungan	13.289.177.577,80	-	-	13.289.177.577,80
	JUMLAH	38.197.912.791,84	-	7.404.746.660,02	30.793.166.131,82

Sumber: Aplikasi Kewajiban Kota Pekanbaru TA 2023

Penambahan dan pengurangan utang belanja modal aset tetap lainnya-aset tidak berwujud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.112. Penambahan dan Pengurangan Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya- Aset Tidak Berwujud Tahun 2023

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-
	JUMLAH	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-

Sumber: Aplikasi Kewajiban Kota Pekanbaru TA 2023

e. Utang Belanja Karena Gugatan Oleh PT Multi Inti Guna

PT Multi Inti Guna secara Hukum telah memenangkan gugatan atas Pemerintah Kota Pekanbaru sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1365 K/Pdt/2018 tanggal 19 Juli 2018, yang isi Putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

-Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI

-Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*);
3. Menyatakan Pemutusan Surat Perjanjian Jasa Angkutan Persampahan Nomor 25/KONTR-DKP/PERSAMPAHAN/XI/2015 tanggal 03 November 2015 juncto Addendum Pertama Nomor 25.a/ADD.I/KONTR-DKP/PERSAMPAHAN/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 antara Tergugat I dengan Penggugat sebagaimana dimaksud di dalam surat Tergugat II Nomor 232/DKP/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 perihal Pemutusan Kontrak Kerjasama Pengangkutan Sampah, adalah tidak sah dan dibatalkan;
4. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat secara seketika dan sekaligus akibat kerugian materil yang diderita oleh Penggugat, sejumlah uang Rp12.771.343.138,00 (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp563.980,00 (lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; dan
7. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Atas Keputusan Mahkamah Agung tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru secara Hukum mempunyai kewajiban terhadap PT Multi Inti Guna sebesar Rp12.771.343.138,00.

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di tahun 2023 telah melakukan pembayaran atas kerugian tersebut sebesar Rp2.500.000.000,00 melalui SP2D Nomor 00274/SP2D/II/2023 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
7.199.500,00	30.405.510,00

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Utang jangka pendek lainnya antara lain terdiri atas utang kelebihan pembayaran PAD, utang kelebihan pembayaran transfer, dan utang kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.199.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.206.010,00 atau 76,328% dibandingkan pada tahun 2022 sebesar Rp30.405.510,00.

Penjelasan/Rincian atas utang jangka pendek lainnya adalah sebagai berikut:

Utang Kelebihan Pembayaran PAD

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
7.199.500,00	30.405.510,00

Akun ini dipakai untuk untuk mencatat utang kelebihan pembayaran pajak, utang kelebihan pembayaran retribusi, utang kelebihan pembayaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan utang kelebihan pembayaran lain-lain PAD yang sah.

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.199.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.206.010,00 atau 76,32% dibandingkan pada tahun 2022 sebesar Rp30.405.510,00.

Utang Kelebihan Pembayaran PAD tahun 2023 merupakan utang kelebihan pembayaran pajak restoran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Madani sebesar Rp2.172.000,00 dan Dinas Pendidikan sebesar Rp5.027.500,00 per 31 Desember 2023 di mana masih berada pada Kas Lainnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

5.4. PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1. PENDAPATAN-LO

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
3.029.957.898.901,93	2.542.852.914.475,81

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD. Pendapatan-LO Tahun 2023 sebesar Rp3.029.957.898.901,93 mengalami kenaikan sebesar Rp487.104.984.426,12 atau 19,16% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp2.542.852.914.475,81. Pendapatan-LO tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 5.4.1. Rincian Pendapatan - LO

(dalam rupiah)

	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN PENURUNAN	%
1.	Pendapatan Asli Daerah - LO	1.064.682.880.724,92	844.775.717.510,81	219.907.163.214,11	26,03
2.	Pendapatan Transfer - LO	1.905.899.847.215,00	1.675.936.427.838,00	230.261.419.385,00	13,74
3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO	59.375.170.962,01	22.436.768.135,00	36.938.401.827,01	164,61
	Jumlah	3.029.957.898.901,93	2.542.852.914.475,81	487.104.984.426,12	19,16

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

Masing-masing akun Pendapatan LO dapat diuraikan sebagai berikut:

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
1.064.682.880.724,92	844.775.717.510,81

Akun PAD ini merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode Tahun Anggaran 2023. PAD pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.064.682.880.724,92 mengalami kenaikan sebesar Rp219.907.163.214,11 atau 26,03% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp844.775.717.510,81. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 5.4.2. Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO Tahun 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN PENURUNAN	%
1	Pajak Daerah - LO	958.982.154.060,00	769.167.946.843,80	189.814.207.216,20	24,68
2	Retribusi Daerah - LO	27.486.390.201,00	16.582.756.783,00	10.913.633.418,01	65,81
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -	5.943.617.254,00	3.443.646.480,00	2.499.970.774,00	72,59
4	Lain lain PAD yang Sah - LO	72.269.519.198,92	55.581.365.394,07	16.679.353.805,91	30,01
Jumlah		1.064.682.880.724,92	844.775.717.510,81	219.907.163.214,11	26,03

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

Masing-masing realisasi jenis PAD Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
958.982.154.060,00	769.167.946.843,80

Pendapatan Pajak Daerah - LO pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp958.982.154.060,00 mengalami kenaikan sebesar Rp189.815.331.653,20 atau 24,68% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp769.167.946.843,80. Pendapatan Pajak Daerah – LO terdiri dari:

Tabel 5.4.3. Rincian Pendapatan Pajak Daerah - LO

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	%
1	Pajak Hotel - LO	47.272.374.337,00	40.896.505.625,00	6.675.868.712,00	16,27
2	Pajak Restoran - LO	143.200.796.144,00	123.626.731.851,80	19.574.064.292,20	15,83
3	Pajak Hiburan - LO	18.150.968.887,00	15.835.145.765,00	2.315.812.182,00	14,62
4	Pajak Reklame - LO	35.301.635.206,00	29.462.908.456,00	5.838.736.750,00	19,82
5	Pajak Penerangan Jalan - LO	156.951.822.384,00	147.086.532.144,00	9.865.290.240,00	6,71
6	Pajak Parkir - LO	20.635.230.898,00	16.411.760.277,00	4.223.470.622,00	25,73
7	Pajak Air Tanah - LO	12.197.325.442,00	12.174.609.016,00	22.716.426,00	0,19
8	Pajak Sarang Burung Walet - LO	89.254.500,00	104.323.500,00	(15.069.000,00)	(14,44)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	12.915.055,00	9.152.040,00	3.763.055,00	41,12
10	PBB Perdesaan dan Perkotaan - LO	321.361.135.970,00	196.960.166.266,00	124.400.969.715,00	63,16
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO	203.808.701.196,00	186.846.111.074,00	16.962.589.222,00	9,08
Jumlah		958.982.154.060,00	769.167.946.843,80	189.814.207.216,20	24,68

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional dibandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.4. Perbandingan Pajak Daerah - LO dan Pajak Daerah - LRA

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
1	Pajak Hotel	47.272.374.337,00	47.258.290.299,00	14.084.038,00
2	Pajak Restoran	143.200.796.144,00	140.233.444.897,00	2.967.351.247,00
3	Pajak Hiburan	18.150.968.887,00	18.154.112.772,00	(3.152.885,00)
4	Pajak Reklame	35.301.635.206,00	34.619.938.493,00	681.700.713,00
5	Pajak Penerangan Jalan	156.951.822.384,00	156.951.389.265,00	433.119,00
6	Pajak Parkir	20.635.230.898,00	20.635.230.898,00	-
7	Pajak Air Tanah	12.197.325.442,00	12.128.843.473,00	68.481.969,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	89.254.500,00	89.254.500,00	-
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.915.055,00	12.915.055,00	-
10	PBB Perdesaan dan Perkotaan	321.361.135.970,00	151.017.226.127,00	170.343.909.843,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	203.808.701.196,00	203.808.701.196,00	-
Jumlah		958.982.154.060,00	784.909.347.016,00	174.072.807.044,00

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Atas perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pajak Hotel terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar Rp 14.084.038,00 yang merupakan pembentukan piutang tahun berjalan sebesar Rp244.132.186,00 dan pembayaran piutang yang telah disisihkan sebesar Rp147.869.767,00 dikurangi pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp377.917.915,00;
2. Pajak Restoran terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar Rp2.967.351.247,00 yang merupakan pembentukan piutang tahun berjalan sebesar Rp3.694.672.904,00 dikurangi pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp727.321.657,00;
3. Pajak Hiburan terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar minus Rp3.153.885,00 yang merupakan pembentukan piutang tahun berjalan sebesar Rp 13.397.650,00 dikurangi pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp16.587.912,00 dan pembayaran piutang yang telah disisihkan sebesar Rp36.377,00;
4. Pajak Reklame terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar Rp 681.700.713,00 yang merupakan pembentukan piutang tahun berjalan sebesar Rp1.168.836.736,00 dikurangi pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp487.136.023,00;
5. Pajak Penerangan Jalan terdapat perbedaan antara LO dan LRA sebesar Rp433.119,00 yang merupakan selisih pembentukan piutang tahun berjalan sebesar Rp433.119,00 ;
6. Pajak Air Tanah terdapat perbedaan antara LO dan LRA sebesar Rp68.481.969,00 yang merupakan selisih pembentukan piutang tahun berjalan sebesar Rp86.421.193,00 dikurangi pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp17.939.224,00; dan
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) terdapat perbedaan antara LO dan LRA sebesar Rp170.343.909.843,00 yang merupakan selisih pembentukan piutang tahun berjalan sebesar Rp194.440.857.517,00 dikurangi pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp24.096.947.674,00.

5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
27.496.390.201,00	16.582.758.783,00

Pendapatan Retribusi Daerah - LO pada Tahun 2023 sebesar Rp27.496.390.201,00 mengalami penurunan sebesar Rp 10.913.631.418,00 atau 65,81% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp16.582.758.783,00.

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pendapatan Laporan Operasional Tahun 2022 dan menurut jenisnya ada 3 (tiga) retribusi yaitu Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan tertentu. Pendapatan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.4.5. Rincian Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
A	**Retribusi Jasa Umum - LO**				
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	-	-	-	—
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	4.386.567.790,00	4.207.945.765,00	178.622.025,00	4,24
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO	180.150.000,00	169.350.000,00	10.800.000,00	6,38
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	-	-	-	—
5	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	643.945.000,00	670.963.000,00	(33.018.000,00)	(4,88)
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	2.953.745.000,00	2.764.099.775,00	189.646.225,00	6,86
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	914.850.340,00	857.542.188,00	(42.692.848,00)	(4,46)
8	Retribusi Tera/ Tera Ulang - LO	492.619.200,00	429.548.000,00	63.071.200,00	14,68
9	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	2.217.861.675,00	2.234.821.875,00	(17.160.000,00)	(0,77)
B	**Retribusi Jasa Usaha - LO**				
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	2.198.024.990,00	365.529.000,00	1.833.495.990,00	501,60
11	Retribusi Terminal - LO	15.660.000,00	15.050.000,00	610.000,00	4,05
12	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	574.546.300,00	599.290.500,00	(24.744.200,00)	(4,13)
13	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LO	509.653.500,00	360.099.682,00	(11.345.170,00)	(1,99)
C	**Retribusi Perizinan Tertentu - LO**				
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	12.344.457.200,00	3.570.295.600,00	8.766.161.600,00	244,58
15	Retribusi Izin Trayek - LO	3.500.000,00	3.625.400,00	(125.400,00)	(3,46)
16	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	-	-	-	—
17	Retribusi Sewa - LO	-	-	-	—
	Jumlah	**27.406.390.201,00**	**16.682.758.783,00**	**10.913.631.418,00**	**65,41**

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Retribusi Daerah pada Laporan Operasional dibandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.6. Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah - LO dan Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
A	**Retribusi Jasa Umum**			
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-	-
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.386.567.790,00	4.386.567.790,00	-
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	180.150.000,00	180.150.000,00	-
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	-	-
5	Retribusi Pelayanan Pasar	643.945.000,00	627.284.000,00	16.661.000,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.953.745.000,00	2.953.745.000,00	-
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	914.850.340,00	914.850.340,00	-
8	Retribusi Tera/ Tera Ulang	492.619.200,00	492.619.200,00	-
9	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.217.861.675,00	1.582.900.625,00	634.761.250,00

NO	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
B	Retribusi Jasa Usaha			
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.199.024.990,00	2.199.024.990,00	-
11	Retribusi Terminal	15.660.000,00	15.660.000,00	-
12	Retribusi Rumah Potong Hewan	574.546.300,00	574.546.300,00	-
13	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	569.633.596,00	569.633.596,00	-
C	Retribusi Perizinan Tertentu			
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	12.344.457.200,00	12.344.457.200,00	-
15	Retribusi Izin Trayek	3.500.000,00	3.500.000,00	-
16	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA	-	-	-
17	Retribusi Sewa	-	-	-
Jumlah		27.496.390.281,00	26.824.967.951,00	671.422.350,00

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Atas perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Pasar terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar Rp16.661.000,00 yang merupakan selisih pembentukan piutang tahun berjalan sebesar Rp36.339.250,00 dikurangi pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp19.678.250,00; dan
2. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar Rp654.761.250,00 yang merupakan selisih pembentukan piutang tahun berjalan sebesar Rp673.798.125,00 dikurangi pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp19.036.875,00.

5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LO

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
5.943.817.264,00	3.443.846.490,00

Pendapatan ini adalah PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan ini diterima dan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 sebesar Rp5.943.817.264,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.7. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Bank Riaukepri	3.061.656.530,00	3.112.899.838,00	(51.243.308,00)	(1,65)
2	PT. Bumi Siak Pusako	2.882.160.734,00	330.946.652,00	2.551.214.082,00	770,88
3	PDAM	-	-	-	-
4	PT. BPR	-	-	-	-
	Jumlah	5.943.817.264,00	3.443.846.490,00	2.499.970.774,00	72,59

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp3.443.846.490,00, terdapat peningkatan sebesar Rp 2.499.970.774,00 atau 72,59% yaitu penambahan dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT. Bank Riau Kepri terdapat penurunan Rp51.243.308,00 dan kenaikan pendapatan PT. Bumi Siak Pusako sebesar Rp 2.551.214.082,00, sementara penyertaan modal Pemerintah Kota Pekanbaru pada PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru, PT. BPR Pekanbaru dan PDAM Kota Pekanbaru pada Tahun 2023 tidak menghasilkan dividen.

5.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
72.260.519.199,92	55.581.165.394,01

Pendapatan ini merupakan pendapatan di luar pendapatan Pajak - LO, Retribusi – LO dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2023 sebesar Rp72.260.519.199,92 dan mengalami penurunan sebesar Rp16.679.353.805,91 atau 30,01% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp55.581.165.394,01. Lain-lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO terdiri dari:

Tabel 5.4.8. Rincian Lain-Lain PAD yang Sah – LO

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	2.194.164.500,00	370.827.500,00	1.823.337.000,00	491,84
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	1.849.184.270,00	1.062.269.290,91	886.834.984,09	83,48
3	Jasa Giro - LO	2.470.716.874,00	1.484.794.415,70	985.964.458,30	66,40
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO		5.095.824,00	(5.095.824,00)	(100,00)
5	Pendapatan Bunga - LO		168.904.110,00	(168.904.110,00)	(100,00)
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO	14.885.863,00	305.966.818,42	(290.884.955,42)	(95,20)
7	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO	152.996.960,00	92.880.393,00	60.226.590,00	64,86
8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	111.502.061,20	104.403.925,00	7.098.136,20	6,80
9	Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO	5.346.690.962,00	476.194.420,00	4.870.496.562,00	1.022,81
10	Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO	1.715.596.213,00	1.950.038.487,00	(234.442.274,00)	(12,02)
11	Pendapatan dari Pengembalian - LO	7.110.198.199,01	10.643.246.133,48	(3.533.067.944,47)	(33,20)
12	Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	-	-	-	—
13	Pendapatan dari BLUD - LO	51.153.461.318,71	37.766.336.500,80	13.386.935.939,31	35,45
14	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO	41.600.000,00	1.211.844.046,00	(1.170.244.046,00)	(96,57)
15	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	-	-	-	—
Jumlah		**72.260.519.199,92**	**55.581.165.394,01**	**16.679.353.805,91**	**30,01**

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

Terdapat perbedaan antara Lain-Lain PAD yang Sah pada Laporan Operasional dibandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.9. Perbandingan Lain-Lain PAD yang Sah - LO dan Lain-Lain PAD yang Sah - LRA

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.194.164.500,00	2.194.164.500,00	-
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.948.164.278,00	2.048.787.188,00	(99.652.893,00)
3	Jasa Giro	2.470.718.874,00	1.842.361.695,00	628.357.179,00
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	9.021.956,00	(9.021.956,00)
5	Pendapatan Bunga	-	-	-
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	14.665.863,00	426.662.376,46	(411.996.513,46)
7	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	152.906.943,00	152.906.943,00	-
8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	111.502.001,20	111.502.001,20	-
9	Pendapatan Denda Pajak Daerah	5.346.860.982,00	5.346.860.982,00	-
10	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.715.585.213,00	1.680.064.967,00	35.521.246,00
11	Pendapatan dari Pengembalian	7.110.158.169,01	7.110.158.169,01	-
12	Pendapatan dari BLUD	51.193.961.319,71	51.644.847.641,71	(491.386.322,00)
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	41.800.000,00	41.800.000,00	-
Jumlah		**72.260.519.199,92**	**72.686.696.458,38**	**(348.179.259,46)**

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Atas perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar minus Rp99.652.893,00 karena selisih pembentukan piutang tahun berjalan sebesar Rp1.081.174.250,00 dikurangi pembayaran piutang tahun berjalan dan tahun sebelumnyaRp1.651.873.300,00;

b. Jasa Giro terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar Rp628.357.179,00 karena Pendapatan atas Remunerasi (Bunga) terhadap Rekening *Treasury Deposit Facility* Transfer Ke Daerah (TDF-TKD) per 31 Desember 2023 sebesar Rp628.357.179,00 pada Rekening Laporan Operasional Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)-LO.

c. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar minus Rp9.021.956,00 karena pembayaran piutang PEK tahun sebelumnya sebesar Rp9.021.956,00.

d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar minus Rp411.996.513,46 karena pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp411.996.513,46;

e. Pendapatan Denda Retribusi Daerah terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar Rp35.521.246,00 karena selisih pembentukan piutang tahun berjalan sebesar

Rp65.422.572,00 dikurangi pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp29.901.326,00;

f. Pendapatan dari BLUD terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar minus Rp491.386.322,00 karena selisih pembayaran piutang yang telah disisihkan sebesar Rp2.544.478,00 dikurangi pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp493.930.800,00.

5.4.1.2. PENDAPATAN TRANSFER – LO

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
1.905.899.847.215,00	1.675.638.427.830,00

Pendapatan ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Adapun Pendapatan Transfer - LO untuk Tahun 2023 sebesar Rp1.905.899.847.215,00 mengalami kenaikan sebesar Rp230.261.419.385,00 atau 13,74% dibanding Tahun 2022 sebesar Rp1.675.638.427.830,00. Pendapatan Transfer – LO tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 5.4.10. Pendapatan Transfer – LO

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO	1.531.760.152.907,00	1.367.618.233.411,00	164.141.919.496,00	12,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	18.178.601.000,00	-	18.178.601.000,00	---
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	354.961.093.308,00	308.020.194.419,00	46.940.898.889,00	15,24
Jumlah		**1.905.899.847.215,00**	**1.675.638.427.830,00**	**230.261.419.385,00**	**13,74**

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
1.531.760.152.907,00	1.367.618.233.411,00

Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO Tahun 2023 sebesar Rp1.531.760.152.907,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 164.141.919.496,00 atau 12,00% dibanding Tahun 2022 sebesar Rp1.367.618.233.411,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 5.4.11. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak - LO	176.974.177.240,00	118.795.385.451,00	58.178.791.831,00	48,99
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO	146.812.546.218,00	120.172.259.138,00	26.640.286.680,00	22,00
3	Dana Alokasi Umum - LO	867.853.880.162,00	790.264.258.030,00	77.589.621.132,00	9,83
4	Dana Alokasi Khusus - LO	340.219.549.441,00	338.376.328.792,00	1.843.219.853,00	0,54
Jumlah		**1.531.760.152.907,00**	**1.367.618.233.411,00**	**164.141.919.496,00**	**12,00**

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

Pemerintah Kota Pekanbaru mengakui DBH yang tersimpan pada *Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2023 sebesar Rp57.012.943.000,00 pada Neraca Rekening Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF).

5.4.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak - LO

Dana Bagi Hasil Pajak – LO terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) dan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (DBH Pajak Penghasilan), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Terdapat perbedaan antara Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak – LO pada Laporan Operasional dibandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran, sebagai berikut:

Tabel 5.4.12. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak – LO dan Dana Bagi Hasil – LRA

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
1	DBH PBB-LO	49.745.500.000,00	45.418.340.741,00	4.327.159.259,00
2	DBH PPh Pasal 21-LO	118.640.546.000,00	109.583.290.996,00	9.057.255.004,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	7.857.433.000,00	8.351.024.389,00	(693.591.389,00)
4	DBH CHT-LO	930.698.282,00	931.052.176,00	(353.894,00)
Jumlah		176.974.177.282,00	164.283.708.302,00	12.690.468.980,00

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Atas perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. DBH PBB-LO terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar Rp4.327.159.259,00 karena selisih pembentukan piutang tahun berjalan sebagai DBH TDF-TKD sebesar Rp2.539.923.741,00 dikurangi pembayaran piutang DBH TDF-TKD tahun sebelumnya sebesar Rp1.471.669.552,00;

b. DBH PPh Pasal 21-LO terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar minus Rp9.057.255.004,00 karena selisih pembentukan piutang tahun berjalan sebagai DBH TDF-TKD sebesar Rp10.384.587.996,00 dikurangi pembayaran piutang DBH TDF-TKD tahun sebelumnya sebesar Rp19.441.843.000,00;

c. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar minus Rp693.591.389,00 karena selisih pembentukan piutang tahun berjalan sebagai DBH TDF-TKD sebesar Rp209.479.000,00 dikurangi pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp903.070.389,00;

d. DBH CHT-LO terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar minus Rp353.894,00 berupa pembentukan piutang tahun berjalan sebagai DBH TDF-TKD sebesar Rp120.000,00 dikurangi pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp473.894,00 dan;

5.4.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO terdiri atas Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Minyak Bumi – LO, DBH SDA Gas Bumi – LO, DBH SDA Mineral dan Batubara – LO, DBH SDA Kehutanan-PSDH – LO, DBH SDA Perikanan -

LO. Terdapat perbedaan antara Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam pada Laporan Operasional dibandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran, sebagai berikut:

Tabel 5.4.13. Perbandingan Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO dan Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LRA

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
1	DBH SDA Minyak Bumi-LO	116.321.850.000,00	100.253.058.097,00	16.068.791.903,00
2	DBH SDA Gas Bumi-LO	7.811.161.000,00	8.084.301.442,00	(273.140.442,00)
3	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	7.196.510.000,00	3.206.849.995,00	3.991.660.005,00
4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	-	-	-
5	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	14.232.837.229,00	14.951.662.300,00	(718.825.071,00)
6	DBH SDA Perikanan-LO	1.048.187.789,00	1.259.941.000,00	(211.753.211,00)
Jumlah		**148.812.546.018,00**	**127.755.812.834,00**	**19.056.733.184,00**

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Atas perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. DBH SDA Minyak Bumi-LO terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar Rp16.068.791.903,00 karena selisih pembentukan piutang tahun berjalan sebagai DBH TDF-TKD sebesar Rp25.869.446.000,00 dikurangi pembayaran piutang DBH TDF-TKD tahun sebelumnya sebesar Rp9.800.654.097,00;

b. DBH SDA Gas Bumi-LO terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar Rp minus 273.140.442,00 karena selisih pembentukan piutang tahun berjalan sebagai DBH TDF-TKD sebesar Rp320.672.000,00 dikurangi pembayaran piutang DBH TDF-TKD tahun sebelumnya sebesar Rp593.812.442,00;

c. DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar Rp3.991.660.005.00 karena selisih pembentukan piutang tahun berjalan sebagai DBH TDF-TKD sebesar Rp4.304.420.000,00 dikurangi pembayaran piutang DBH TDF-TKD tahun sebelumnya sebesar Rp312.759.995,00;

d. DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar minus Rp718.825.071,00 sebagai pembayaran piutang DBH TDF-TKD tahun sebelumnya;

e. DBH SDA Perikanan-LO terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar minus Rp211.753.211,00 sebagai pembayaran piutang DBH TDF-TKD tahun sebelumnya;

5.4.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum - LO

Dana Alokasi Umum (DAU) - LO bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Untuk Dana Alokasi Umum (DAU), ditransfer setiap bulannya melalui Rekening Kas Umum Daerah Kota Pekanbaru, rekening Nomor 107.02.01730. Tahun Anggaran 2023 realisasi Dana Alokasi Umum – LO sebesar Rp 867.953.880.162,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp 790.284.259.030,00, tidak terdapat perbedaan penerimaan Dana Alokasi

Umum (DAU) pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023.

Tabel 5.4.14. Perbandingan Dana Alokasi Umum - LO dan Dana Alokasi Umum – LRA

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
1	Dana Alokasi Umum - LO	867.953.880.162,00	867.953.880.162,00	-
	Jumlah	**867.953.880.162,00**	**867.953.880.162,00**	-

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

5.4.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO

Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023 sebesar Rp340.219.549.445,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.843.219.653 atau 0,54% dibanding Tahun 2022 Rp338.376.329.792,00. Tidak terdapat perbedaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional.

Tabel 5.4.15. Perbandingan Dana Alokasi Fisik (DAK) Fisik - LO dan Dana Alokasi Fisik (DAK) Fisik - LRA

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO	32.786.713.679,00	32.786.713.679,00	-
2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO	307.432.835.766,00	307.432.835.766,00	-
	Jumlah	**340.219.549.445,00**	**340.219.549.445,00**	-

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
19.178.601.000,00	0,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO Tahun 2023 sebesar Rp19.178.601.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp19.178.601.000,00, atau 100,00%. dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO merupakan penerimaan Dana Insentif Daerah. Tidak terdapat perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran.

Tabel 5.4.16. Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
1	Dana Insentif Daerah - LO	19.178.601.000,00	19.178.601.000,00	-
	Jumlah	**19.178.601.000,00**	**19.178.601.000,00**	-

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

5.4.1.2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
354.961.093.308,00	308.020.194.419,00

Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO Tahun 2023 sebesar Rp354.961.093.308,00 mengalami kenaikan sebesar Rp46.940.898.889,00 atau 15,24% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp308.020.194.419,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO tahun 2022 terdiri dari:

Tabel 5.4.17. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	332.102.408.508,00	293.790.879.676,00	38.311.528.832,00	13,04
2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	22.858.684.800,00	14.229.314.543,00	8.629.370.257,00	60,65
Jumlah		**354.961.093.308,00**	**308.020.194.419,00**	**46.940.898.889,00**	**15,24**

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

Rincian realisasi pendapatan transfer pemerintah provinsi – LO sebagai berikut:

Tabel 5.4.18. Rincian Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	KENAIKAN / PENURUNAN	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LO	111.897.855.296,00	92.066.796.930,00	19.831.058.366,00	21,54
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	70.470.884.876,00	68.623.894.438,00	1.846.990.438,00	2,69
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	105.107.879.017,00	91.322.671.655,00	13.785.307.362,00	15,10
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan - LO	1.234.427.445,00	1.114.967.105,00	119.460.340,00	9,82
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LO	43.401.461.875,00	40.662.749.730,00	2.738.712.136,00	6,74
Jumlah		**332.102.408.508,00**	**293.790.879.676,00**	**38.311.528.832,00**	**13,04**

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya – LO adalah merupakan bantuan keuangan umum dari Provinsi Riau sebesar Rp22.858.684.800,00.

Terdapat perbedaan realisasi pendapatan transfer antar daerah di Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran.

Tabel 5.4.19. Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO dan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LRA

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	332.102.408.508,00	320.897.751.188,00	11.494.657.320,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	22.858.684.800,00	22.858.684.800,00	-
	Jumlah	**354.961.093.308,00**	**343.466.435.988,00**	**11.494.657.320,00**

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar minus Rp11.494.657.320,00 karena selisih pembentukan piutang tahun berjalan sebesar Rp35.412.084.524,00 dan pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak yang telah disisihkan sebesar Rp120.188.076,00 dikurangi pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 Rp24.037.615.280,00.

5.4.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
59.375.179.962,01	22.438.769.135,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO ini pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp59.375.170.962,01 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.20. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Tahun 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN PENURUNAN	%
1	Pendapatan Hibah	59.375.170.962,01	22.438.769.135,00	36.936.401.827,01	164,61
2	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah	59.375.170.962,01	22.438.769.135,00	36.936.401.827,01	164,61

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO terdiri dari:

1. Pendapatan Hibah:
   - Dinas Kesehatan berupa:
     - Obat-obatan dari Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp20.899.558.154,01 berdasarkan BAST yang tertera pada lampiran 17.
   - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST Nomor:
     - BAST/032/PUPR/56/2022 berupa:
       - Penataan Pembangunan Infrastruktur Kuwasan Kumuh dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR - Republik Indonesia sebesar Rp8.675.069.000,00; dan
       - Prasarana Sarana Utilitas di Perumahan Pondok Dahlia Indah dan Perumahan Green Fazar Asri dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementrian PUPR - Republik Indonesia sebesar Rp576.030.000,00.
     - BAST/Perkim/232/2023 berupa:
       - FASUM FASOS PSU Perumahan 2023 Tahap 1 dari Pengembang Perumahan sebesar Rp29.224.513.808,00.

Tabel 5.4.21. Perbandingan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
1	Pendapatan Hibah	59.375.170.962,01	-	59.375.170.962,01
2	Pendapatan Lainnya	-	-	-
	Jumlah	59.375.170.962,01	-	59.375.170.962,01

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Perbedaan antara Pendapatan Hibah-LO dan Pendapatan Hibah-LRA disebabkan keseluruhan Pendapatan Hibah pada Tahun 2023 berupa barang sebesar Rp59.375.170.962,01.

5.4.2. BEBAN

5.4.2.1. Beban Operasi

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
2.809.977.046.774,09	2.551.860.944.394,06

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, konsumsi aset, maupun terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban operasi yaitu beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, kemudian beban penyusutan aset dan amortisasi, beban transfer, beban tak terduga. Beban Tahun 2023 sebesar Rp2.809.977.046.774,09 dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp2.551.860.944.394,06 terdapat kenaikan sebesar Rp258.116.102.380,03 atau 10,11% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.22. Rincian Beban

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN PENURUNAN	%
1	Beban Pegawai	917.538.676.637,00	907.308.230.997,56	10.230.445.639,44	1,13
2	Beban Persediaan	421.917.436.896,91	306.208.022.390,70	114.809.414.106,21	37,49
3	Beban Jasa	591.998.237.414,26	483.085.836.806,00	108.912.398.518,26	22,54
4	Beban Pemeliharaan	78.045.580.864,07	55.618.448.867,66	22.427.132.196,41	40,33
5	Beban Perjalanan Dinas	58.584.594.067,00	56.772.414.722,00	1.812.379.345,00	3,19
6	Beban Subsidi	148.490.000,00	6.094.846.306,00	(5.946.356.306,00)	(97,56)
7	Beban Hibah	224.513.082.826,53	197.556.186.440,00	26.957.486.386,53	13,65
8	Beban Bantuan Sosial	-	-	-	—
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	376.987.597.751,00	376.094.801.613,00	292.896.138,00	0,08
10	Beban Penyisihan Piutang	22.538.087.227,69	38.029.804.863,00	(15.491.717.635,32)	(40,74)
11	Beban Tak Terduga	761.126.257,00	964.331.717,00	(203.205.460,00)	(21,07)
12	Beban Lain-lain	118.742.337.152,62	120.726.097.731,14	(4.985.670.578,52)	(4,53)
Jumlah		2.809.977.046.774,09	2.551.860.944.394,06	258.116.102.380,03	10,11

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

5.4.2.1.1. Beban Pegawai

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
917.538.676.637,00	907.308.230.997,56

Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp917.538.676.637,00 mengalami kenaikan sebesar Rp10.230.445.639,44 atau 1,13% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp907.308.230.997,56.

Rincian Beban Pegawai per OPD dapat dilihat pada tabel 5.4.23. sebagai berikut:

Tabel 5.4.23. Rincian Beban Pegawai Per SKPD

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	%
1	Dinas Pendidikan	386.286.269.340,00	364.020.743.732,00	10.305.525.608,00	2,99
2	Dinas Kesehatan	144.716.462.720,00	140.095.257.402,00	4.621.225.307,00	3,30
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.073.106.560,00	9.274.614.384,00	(201.507.824,00)	(2,17)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.330.425.680,00	5.140.318.179,00	190.107.706,00	3,70
5	Satuan Polisi Pamong Praja	9.316.467.304,00	9.496.334.345,00	(179.867.041,00)	(1,89)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.244.689.434,00	4.376.533.894,00	(131.845.460,00)	(3,01)
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.494.908.576,00	6.406.082.244,00	88.826.426,00	1,34
8	Dinas Sosial	4.302.544.233,00	4.162.832.876,00	139.711.356,00	3,36
9	Dinas Tenaga Kerja	4.266.286.504,00	3.907.092.314,00	359.194.190,00	9,17
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.237.998.825,00	4.553.444.509,00	(315.477.684,00)	(6,93)
11	Dinas Ketahanan Pangan	3.040.683.644,00	3.782.803.841,00	(742.120.197,00)	(19,62)
12	Dinas Perpustakaan	3.151.699.671,00	3.308.263.137,00	(146.564.036,00)	(4,43)
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	7.046.087.841,00	7.097.932.020,00	(51.884.373,00)	(0,73)
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.043.576.460,00	9.226.171.521,00	(182.295.031,00)	(1,98)
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.306.802.818,00	3.906.820.294,00	(501.817.646,00)	(12,87)
16	Dinas Perhubungan	13.889.193.303,00	12.946.475.747,00	922.717.556,44	7,20
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	3.853.194.710,00	4.290.417.280,00	(437.282.570,00)	(10,19)
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah	3.930.665.066,00	4.285.430.527,00	(354.575.461,00)	(8,27)
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.761.841.228,50	10.915.186.468,00	(53.157.262,00)	(0,48)
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.124.537.915,00	4.368.265.908,00	(243.727.991,00)	(5,58)
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.891.537.322,00	4.702.441.030,00	2.189.096.692,00	46,83
22	Badan Perpustakaan dan Kearsipan	4.849.603.349,00	6.254.684.047,00	(1.405.080.698,00)	(25,68)
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	9.867.448.771,00	9.643.439.363,00	224.035.408,00	3,32
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6.533.146.465,00	7.677.574.308,00	(1.144.427.822,00)	(14,91)
25	Sekretariat Daerah	21.711.274.614,00	21.119.469.194,00	591.805.436,00	2,80
26	Sekretariat DPRD	42.013.148.152,00	40.394.878.510,00	1.618.269.642,00	4,68
27	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	6.088.969.481,00	6.783.788.689,00	(715.067.208,00)	(10,54)
28	Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.876.079.800,00	13.873.484.936,00	(3.885.410.706,00)	(27,83)
29	Badan Pendapatan Daerah	45.923.020.071,00	30.228.237.854,00	9.694.783.217,00	14,98
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.496.961.344,00	7.773.998.472,00	(277.047.128,00)	(3,56)
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	4.453.919.031,00	4.626.522.451,00	(172.583.420,00)	(3,73)
32	Sekretariat Kota	12.368.984.953,00	13.433.349.888,00	(1.064.240.957,000)	(7,91)
33	Kecamatan Rokan Raya	5.746.229.955,00	6.065.789.776,00	(359.559.788,000)	(5,21)
34	Kecamatan Tenayan Raya	7.774.921.894,00	7.941.314.701,00	(166.393.031,000)	(2,10)
35	Kecamatan Sail	4.433.267.269,00	4.683.024.907,00	(249.757.638,000)	(5,33)
36	Kecamatan Limapuluh	4.501.371.471,00	4.713.690.643,00	(213.319.172,000)	(4,53)
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	3.031.467.344,00	3.481.212.229,00	(449.644.885,000)	(11,43)
38	Kecamatan Sukajadi	6.906.951.404,00	7.577.841.705,00	(670.890.301,000)	(8,85)
39	Kecamatan Payung Sekaki	6.037.189.263,00	6.437.249.308,00	(400.169.724,000)	(6,21)

No	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	%
40	Kecamatan Senapelan	5.214.681.055,00	5.925.914.125,00	(691.233.092,00)	(11,66)
41	Kecamatan Marpoyan Damai	7.211.444.891,00	6.071.871.161,00	(319.604.378,00)	(5,59)
42	Kecamatan Rumbai Pesisir	6.916.767.460,00	7.016.775.759,00	(180.008.299,00)	(1,43)
43	Kecamatan Tenayan Raya	6.113.811.170,00	6.455.388.494,00	(216.076.824,00)	(3,08)
44	Kecamatan Rumbai	5.403.041.701,00	5.731.184.017,00	(228.140.316,00)	(3,99)
45	Kecamatan Rumbai Timur	4.273.872.408,00	4.174.499.288,00	99.373.120,00	2,38
46	Kecamatan Rumbai Barat	4.368.928.289,00	5.067.871.493,00	(119.051.204,00)	(2,35)
47	Kecamatan Kulim	5.615.038.336,00	5.418.680.132,00	(158.940.926,00)	(2,66)
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.440.725.394,00	4.612.961.383,00	(172.230.958,00)	(3,70)
Jumlah		**917.538.676.637,00**	**987.308.230.997,44**	**10.230.445.639,44**	**1,13**

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

Beban Pegawai-LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada Tahun 2023 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi Tahun 2023.

Terdapat perbedaan antara Beban Pegawai pada Laporan Operasional dan Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran, sebagai berikut:

Tabel 5.4.24. Perbandingan Beban Pegawai - LO dan Beban Pegawai - LRA

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
1	Beban Gaji dan Tunjangan	481.897.950.510,00	481.897.950.510,00	-
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	213.714.374.501,00	213.714.374.501,00	-
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	181.581.346.327,00	181.798.843.527,00	(217.497.200,00)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	34.275.789.008,00	34.275.789.008,00	-
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	671.475.141,00	671.475.141,00	-
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.389.120.000,00	1.389.120.000,00	-
7	Beban Pegawai BLUD	4.008.621.150,00	4.008.621.150,00	-
Jumlah		**917.538.676.637,00**	**917.756.173.837,00**	**(217.497.200,00)**

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Perbedaan tersebut dapat jelaskan sebagai berikut:

1. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar Rp217.497.200,00 sebagai berikut:

Tabel 5.4.25. Perbandingan Belanja Tambahan Penghasilan PNS - LO dan Belanja Tambahan Penghasilan PNS – LRA

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
1	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	28.693.267.820,00	28.693.267.820,00	-
2	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	157.174.525,00	157.174.525,00	-
3	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	131.113.730.967,00	131.113.730.967,00	-
4	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	15.803.994.032,00	15.803.994.032,00	-
5	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	-	217.497.200,00	(217.497.200,00)
6	Beban Honorarium	2.732.100.000,00	2.732.100.000,00	-
7	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	1.214.850.000,00	1.214.850.000,00	-
8	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	1.886.256.880,00	1.886.256.880,00	-
Jumlah		101.591.344.333,00	101.799.841.527,00	(217.497.200,00)

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Perbedaan jumlah realisasi pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut:

Tabel 5.4.26. Rincian Perbandingan Belanja Tambahan Penghasilan PNS - LO dan Belanja Tambahan Penghasilan PNS - LRA

(dalam rupiah)

Uraian			Jumlah
Belanja Tahun 2023 (LRA)			217.497.200,00
Penambahan:			-
Pengurangan:			217.497.200,00
Dinas Kesehatan	Pelunasan Utang Tahun 2022	217.497.200,00	
Beban Tahun 2023 (LO)			-

Sumber: Laporan Kewajiban Kota Pekanbaru

5.4.2.1.2. Beban Persediaan

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
421.017.436.556,91	306.208.022.390,70

Beban Persediaan meliputi beban bahan pakai habis, beban p ersediaan bahan/material, dan beban cetak dan penggandaan. Beban persediaan disajikan dengan basis akrual, yaitu beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan harga pembelian terakhir.

Tabel 5.4.27. Rincian Beban Persediaan

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN PENURUNAN	%
1	Bahan Pakai Habis	420.936.338.905,91	306.086.115.890,70	114.850.223.015,21	37,52
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	81.097.651,00	121.906.500,00	(40.808.849,00)	-33,48
Jumlah		421.017.436.556,91	306.208.022.390,70	114.809.414.166,21	37,49

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

Beban Persediaan Tahun 2023 sebesar Rp421.017.436.556,91. Rincian keseluruhan Beban Persediaan dapat dilihat pada tabel 5.4.28 di bawah ini:

Tabel 5.4.28. Rincian Beban Persediaan

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN PENURUNAN	%
1	Dinas Pendidikan	30.543.170.177,34	17.869.310.714,00	7.673.859.463,34	42,94
2	Dinas Kesehatan	39.923.148.634,72	47.629.513.051,00	(6.306.364.416,28)	-17,02
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	121.238.370.157,85	37.066.014.872,70	84.172.361.285,15	227,09
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	29.067.583.302,00	21.136.336.785,00	8.881.246.517,00	42,46
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.016.629.450,00	2.443.456.220,00	(1.424.826.770,00)	-58,31
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.352.282.448,00	2.279.821.018,00	672.461.430,00	29,29
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.636.618.925,00	3.600.540.037,00	36.078.888,00	1,00
8	Dinas Sosial	3.184.258.014,00	1.968.281.972,00	1.215.976.042,00	61,78
9	Dinas Tenaga Kerja	559.580.040,00	1.089.383.776,00	(1.049.003.068,00)	-48,08
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.183.702.747,00	2.135.076.267,00	1.048.686.480,00	49,12
11	Dinas Ketahanan Pangan	1.426.140.280,00	2.861.017.864,00	(1.432.068.284,00)	-50,05
12	Dinas Pertanahan	1.457.815.630,00	1.852.858.230,00	(395.143.480,00)	-21,34
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	12.557.084.865,00	29.675.465.028,00	(17.118.380.163,00)	-57,69
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.269.845.990,00	2.034.510.572,00	235.335.451,00	10,36
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.636.032.166,00	2.561.650.860,00	74.381.306,00	2,89
16	Dinas Perhubungan	20.334.183.389,00	16.123.079.140,00	4.211.104.249,00	26,12
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.250.727.915,00	975.568.937,00	274.978.978,00	28,19
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah	2.598.365.476,00	924.863.124,00	1.673.502.352,00	180,95
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.815.454.690,00	5.449.051.172,00	(2.633.596.482,00)	-48,33
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.560.757.026,00	4.902.485.158,00	(1.341.728.133,00)	-27,37
21	Badan Perpustakaan dan Kearsipan	1.494.391.490,00	1.069.936.968,00	424.454.500,00	39,34
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	873.037.187,00	634.114.435,00	198.922.752,00	29,51
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	2.854.695.697,00	748.279.774,00	1.304.415.923,00	173,86
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.918.800.701,00	949.631.517,00	969.169.184,00	102,06
25	Sekretariat Daerah	46.226.043.393,00	33.233.007.842,00	12.993.035.551,00	39,09
26	Sekretariat DPRD	45.642.003.868,00	31.188.476.940,00	14.453.526.928,00	46,35
27	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	2.823.152.621,00	1.402.965.879,00	620.186.741,00	44,21
28	Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.967.079.073,00	6.023.344.775,00	643.734.298,00	10,69
29	Badan Pendapatan Daerah	7.175.978.156,00	7.139.254.245,00	(63.390.089,00)	-0,39
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.500.663.202,00	1.304.114.163,00	196.549.039,00	15,07
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	997.171.768,00	743.879.018,00	394.981.754,00	34,20
32	Inspektorat Kota	654.055.537,00	416.271.412,00	237.784.505,00	37,12
33	Kecamatan Bukit Raya	1.172.799.331,00	1.018.162.459,00	162.635.872,00	16,19
34	Kecamatan Tenayan Raya	1.618.139.606,00	1.163.384.821,00	54.724.185,00	3,21
35	Kecamatan Sail	1.809.815.230,00	438.342.702,00	339.472.566,00	50,64
36	Kecamatan Limapuluh	1.895.533.630,00	668.351.750,00	688.961.980,00	88,30
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	2.873.758.030,00	976.609.740,00	1.203.668.049,00	128,24
38	Kecamatan Sukajadi	1.517.346.918,00	919.008.252,00	398.538.662,00	65,13
39	Kecamatan Payung Sekaki	1.372.662.868,00	1.009.919.408,00	362.692.180,00	35,90
40	Kecamatan Senapelan	1.121.868.879,00	1.047.073.561,00	74.795.318,00	7,15
41	Kecamatan Marpoyan Damai	1.353.162.680,00	1.168.413.515,00	184.749.065,00	15,81
42	Kecamatan Binawidya	1.545.539.130,00	1.325.193.602,00	220.326.566,00	16,63
43	Kecamatan Tuah Madani	1.386.226.920,00	992.172.466,00	394.054.057,00	39,72

No	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
13	Kecamatan Tuah Madani	1.386.226.523,00	992.172.466,00	394.054.057,00	39,72
14	Kecamatan Rumbai	1.565.612.470,00	1.295.160.558,00	270.451.912,00	20,88
15	Kecamatan Rumbai Timur	1.267.472.961,00	1.207.955.194,00	59.517.767,00	4,93
16	Kecamatan Rumbai Barat	1.502.945.978,00	1.873.907.791,00	(370.961.852,00)	-19,80
17	Kecamatan Kulim	1.252.365.991,00	1.147.226.935,00	105.139.066,00	9,20
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.869.108.893,00	867.108.166,00	1.002.008.727,00	115,69
Jumlah		421.017.434.556,91	304.288.833.398,70	116.889.414.166,21	37,49

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

Terdapat perbedaan antara Belanja Persediaan pada LRA dan Beban Persediaan pada LO sebagai berikut:

Tabel 5.4.29. Perbandingan Beban Persediaan dan Belanja Persediaan

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
1	Bahan Pakai Habis	420.936.336.905,91	414.912.312.856,00	6.024.025.049,91
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	81.097.651,00	66.625.651,00	14.472.000,00
Jumlah		**421.017.436.556,91**	**414.978.938.507,00**	**6.038.498.049,91**

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Hubungan antara Belanja Persediaan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Beban Persediaan pada Laporan Operasional dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.4.30. Rincian Perbandingan Beban Persediaan dan Belanja Persediaan

(dalam rupiah)

Uraian		Persediaan Bahan Pakai Habis	Persediaan Bahan Tak Habis Pakai	Jumlah
Realisasi Tahun 2023 (LRA)		414.912.312.856,00	66.625.651,00	414.978.938.507,00
Pembelian (BLUD)	+	8.737.169.240,43	-	8.737.169.240,43
Belanja Modal menjadi Persediaan	+	28.571.546.014,34	-	28.571.546.014,34
Barang Hibah yang belum/ada BAST	+	20.899.559.154,01	-	20.899.559.154,01
Reklasi/ Koreksi	+	38.688.348.736,00	-	38.688.348.736,00
Ulang Belanja Persediaan Tahun 2023	+	-	-	-
Saldo Awal Persediaan Tahun 2023	+	135.560.603.766,13	19.030.000,00	135.560.403.766,13
		647.388.535.766,91	85.655.651,00	647.456.961.427,91
Ulang Belanja Persediaan Tahun 2022	-	1.858.781.744,00	-	1.858.781.744,00
Barang Jasa menjadi Aset	-	852.329.590,00	-	852.329.590,00
Hibah/ Koreksi	-	46.606.396.431,00	5.000.000,00	46.606.754.431,00
Persediaan yg diserahkan ke masyarakat	-	-	-	-
Beban Persediaan LO - BLUD	=	11.848.736.289,43	-	11.848.736.289,43
Saldo Akhir Persediaan 2023	-	186.874.660.196,57	-	186.874.660.196,57
Beban Persediaan - LO		420.936.336.905,91	81.097.651,00	421.017.436.556,91

Sumber: Kertas Kerja Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional Kota Pekanbaru

5.4.2.1.3. Beban Jasa

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
591.898.237.414,26	483.085.838.896,00

Beban jasa meliputi beban jasa kantor, beban iuran jaminan/ asuransi, beban sewa tanah, beban sewa peralatan dan mesin, beban sewa gedung dan bangunan, beban sewa jalan, jaringan dan irigasi, beban sewa aset tetap lainnya, beban jasa konsultansi konstruksi, beban jasa konsultansi non konstruksi, beban jasa ketersediaan layanan (*Availability*

Payment), beban beasiswa Pendidikan PNS, beban kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan, beban jasa insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan beban jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi. Rincian beban jasa Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.4.31 Rincian Beban Jasa

(dalam rupiah)

No	Uraian	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Jasa Kantor	607.323.156.774,26	434.444.037.332,00	72.878.519.442,26	17,58
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	46.279.916.387,00	26.899.896.701,00	19.380.019.686,00	70,67
3	Beban Sewa Tanah	69.439.060,00	331.430.200,00	(262.921.200,00)	(79,06)
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	20.848.887.962,00	13.746.237.845,00	7.106.350.017,00	51,71
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	10.842.395.473,00	6.782.192.184,00	3.660.203.289,00	56,02
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	298.181.400,00	267.320.000,00	30.861.400,00	11,54
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	10.264.614.349,00	7.128.580.863,00	3.136.020.486,00	43,99
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.771.427.640,00	7.246.018.405,00	(1.474.590.765,00)	(20,35)
9	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.941.090.768,00	5.315.029.648,00	826.161.220,00	16,86
10	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	5.862.455.741,00	2.829.379.710,00	3.032.076.023,00	107,16
Jumlah		591.898.237.414,26	483.083.836.894,00	108.812.398.519,26	22,36

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

Rincian keseluruhan Beban Jasa dapat dilihat pada tabel 5.4.32.

Tabel 5.4.32. Rincian Beban Jasa Per SKPD

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TAHUN 2023
1	Dinas Pendidikan	37.441.966.777,00
2	Dinas Kesehatan	75.920.863.523,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32.503.305.194,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.730.686.711,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	12.770.479.720,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.515.368.389,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10.834.815.286,00
8	Dinas Sosial	6.036.842.339,00
9	Dinas Tenaga Kerja	1.123.778.329,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.213.969.749,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	1.856.377.128,00
12	Dinas Pertanahan	1.218.796.771,00
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	39.057.457.480,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.548.417.971,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.997.326.941,00
16	Dinas Perhubungan	82.736.772.223,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	13.440.766.639,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.178.126.586,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu	7.445.017.447,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	7.625.793.635,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.447.683.313,00
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.771.729.957,00

No	URAIAN	TAHUN 2023
23	Dinas Perbenihan dan Perikanan	2.302.508.779,00
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5.038.647.434,00
25	Sekretariat Daerah	53.424.467.922,26
26	Sekretariat DPRD	60.661.348.112,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.894.196.780,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	7.941.753.559,00
29	Badan Pendapatan Daerah	21.468.747.804,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.410.605.886,00
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	995.887.556,00
32	Inspektorat	1.697.174.784,00
33	Kecamatan Bukitraya	5.001.314.500,00
34	Kecamatan Tenayan Raya	8.732.021.723,00
35	Kecamatan Sail	1.978.941.570,00
36	Kecamatan Lima Puluh	2.670.264.149,00
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	3.224.834.835,00
38	Kecamatan Sukajadi	3.711.886.506,00
39	Kecamatan Payung Sekaki	3.862.538.840,00
40	Kecamatan Senapelan	3.360.128.075,00
41	Kecamatan Marpoyan Damai	5.318.150.762,00
42	Kecamatan Binawidya	4.646.854.482,00
43	Kecamatan Tuah Madani	6.148.611.751,00
44	Kecamatan Rumbai	5.329.608.625,00
45	Kecamatan Rumbai Timur	3.256.292.892,00
46	Kecamatan Rumbai Barat	3.476.136.252,00
47	Kecamatan Kulim	3.862.234.579,00
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.295.047.405,00
Jumlah		**591.098.237.414,26**

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

Terdapat perbedaan antara beban jasa pada Laporan Operasional dan belanja jasa pada Laporan Realisasi Anggaran, sebagai berikut:

Tabel 5.4.33. Perbandingan Beban Jasa dan Belanja Jasa

(dalam rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	SELISIH
1	Beban Jasa Kantor	497.323.196.774,26	486.117.116.951,26	(7.793.999.777,00)
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	46.079.918.307,00	46.079.918.307,00	-
3	Beban Sewa Tanah	68.400.000,00	68.400.000,00	-
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	20.845.587.962,00	20.917.507.712,00	(71.919.750,00)
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	10.642.395.473,00	10.701.595.473,00	(59.200.000,00)
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	298.181.400,00	298.181.400,00	-
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	10.264.014.349,00	14.500.061.501,00	(4.536.047.152,00)
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.771.427.640,00	5.970.017.640,00	(198.590.000,00)
9	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.041.000.768,00	3.041.000.768,00	-
10	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	5.862.455.741,00	5.862.455.741,00	-
Jumlah		**591.098.237.414,26**	**605.757.954.093,26**	**(12.659.716.679,00)**

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Perbedaan tersebut dapat jelaskan sebagai berikut:

1. Beban Jasa Kantor terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar Rp8.091.140.896,00 karena:
   Pengurangan:
   - Pembayaran utang Tahun 2022 di 2023 sebesar Rp7.911.692.019,00; dan
   - Kapitalisasi Aset Tahun 2023 sebesar Rp30.000.000,00.

2. Beban Sewa Peralatan dan Mesin terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar Rp71.919.750,00 karena:
   Pengurangan:
   - Pembayaran utang Tahun 2021 dan 2022 di 2023 sebesar Rp71.919.750,00.
3. Beban Sewa Gedung dan Bangunan terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar Rp59.200.000,00 karena:
   Pengurangan:
   - Pembayaran utang Tahun 2021 di 2023 sebesar Rp59.200.000,00.
4. Beban Jasa Konsultansi Konstruksi terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar Rp4.536.047.152,00 karena:
   Pengurangan:
   - Kapitalisasi Aset Tahun 2022 sebesar Rp3.003.617.652,00;
   - Pembayaran utang Tahun 2021 dan 2022 di 2023 sebesar Rp1.532.429.500,00.
5. Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar Rp198.590.000,00 karena:
   Pengurangan:
   - Kapitalisasi Aset Tahun 2023 sebesar Rp198.590.000,00.

5.4.2.1.4. Beban Pemeliharaan

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
78.045.580.864,07	55.418.448.867,66

Beban Pemeliharaan meliputi beban pemeliharaan tanah, beban pemeliharaan peralatan dan mesin, beban pemeliharaan gedung dan bangunan, beban pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi, beban pemeliharaan aset tetap lainnya. Rincian beban pemeliharaan Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.4.34. Rincian Beban Pemeliharaan per Jenis

(dalam rupiah)

No	Uraian	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	29.261.000,00	14.652.000,00	14.609.000,00	99,71
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.493.430.116,00	19.029.444.783,00	3.463.985.333,00	18,20
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.597.283.678,07	36.270.609.884,66	(6.673.326.006,59)	(18,40)
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.925.605.870,00	103.742.000,00	25.821.863.870,00	24890,46
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	—
Jumlah		78.045.580.864,07	55.418.448.867,66	22.627.132.196,41	40,83

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

Rincian keseluruhan Beban Pemeliharaan dapat dilihat pada tabel 5.4.35.

Tabel 5.4.35. Rincian Beban Pemeliharaan Per SKPD

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TAHUN 2023
1	Dinas Pendidikan	13.794.948.627,42
2	Dinas Kesehatan	3.037.135.589,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28.316.025.467,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	453.578.979,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	80.900.600,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	498.597.000,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	453.742.000,00
8	Dinas Sosial	129.773.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja	77.130.097,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	42.073.912,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	94.867.200,00
12	Dinas Pertanahan	84.979.500,00
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.227.867.730,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	124.024.504,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	56.588.500,00
16	Dinas Perhubungan	2.163.718.890,00
17	Dinas Kominfotik, Informatika, Statistik dan Persandian	52.821.193,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	50.100.200,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu	882.975.750,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	109.776.000,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	379.414.500,00
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	41.363.360,00
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	35.963.400,00
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	211.282.471,00
25	Sekretariat Daerah	14.207.951.248,65
26	Sekretariat DPRD	4.526.169.210,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	134.811.965,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	856.844.138,00
29	Badan Pendapatan Daerah	1.697.279.400,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	125.403.000,00
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	53.345.170,00
32	Inspektorat	101.282.662,00
33	Kecamatan Bukit Raya	366.313.800,00
34	Kecamatan Tenayan Raya	419.994.400,00
35	Kecamatan Sail	25.661.900,00
36	Kecamatan Lima Puluh	13.500.800,00
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	22.815.900,00
38	Kecamatan Sukajadi	462.189.900,00
39	Kecamatan Payung Sekaki	440.037.900,00
40	Kecamatan Senapelan	110.039.900,00
41	Kecamatan Marpoyan Damai	795.773.000,00
42	Kecamatan Binawidya	482.204.000,00
43	Kecamatan Tuah Madani	35.395.212,00
44	Kecamatan Rumbai	201.802.800,00
45	Kecamatan Rumbai Timur	217.964.400,00
46	Kecamatan Rumbai Barat	136.408.399,00
47	Kecamatan Kulim	28.957.200,00
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	45.176.200,00
Jumlah		**78.845.580.864,87**

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

Terdapat perbedaan antara Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional dan pada Laporan Realisasi Anggaran, sebagai berikut:

Tabel 5.4.36. Perbandingan Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	SELISIH
1	Beban Pemeliharaan Tanah	29.261.000,00	29.261.000,00	-
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.493.430.156,00	22.493.430.156,00	-
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.597.283.878,07	52.156.489.814,07	(22.559.205.936,00)
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.925.605.870,00	25.925.605.870,00	-
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah		78.045.580.904,07	100.604.786.890,07	(22.559.205.936,00)

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Perbedaan tersebut dapat jelaskan sebagai berikut:

1. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar minus Rp22.559.205.936,00 karena:
   Pengurangan:
   - Kapitalisasi Aset Tahun 2023 sebesar Rp22.143.421.036,00;
   - Pembayaran utang Tahun 2021 dan 2022 di 2023 sebesar Rp415.784.900,00.

5.4.2.1.5. Beban Perjalanan Dinas

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
58.584.694.087,00	56.772.414.722,00

Beban Perjalanan Dinas meliputi beban perjalanan dinas dalam daerah dan beban perjalanan dinas luar negeri. Rincian keseluruhan Beban Perjalanan Dinas dapat dilihat pada tabel 5.4.37.

Tabel 5.4.37. Rincian Beban Perjalanan Dinas Per SKPD

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TAHUN 2023
1	Dinas Pendidikan	223.525.362,00
2	Dinas Kesehatan	5.204.755.019,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	941.778.570,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	336.234.818,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	281.498.528,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	272.862.997,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	153.738.610,00
8	Dinas Sosial	140.726.339,00
9	Dinas Tenaga Kerja	178.735.395,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.030.225.404,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	280.555.353,00
12	Dinas Pertanahan	148.197.518,00
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	27.807.553,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	196.726.885,00

No	URAIAN	TAHUN 2023
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	86.115.251,00
16	Dinas Perhubungan	244.117.815,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	377.548.761,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	672.513.286,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu	409.341.710,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	541.475.787,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	289.854.719,00
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	144.278.557,00
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	421.751.659,00
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	589.463.784,00
25	Sekretariat Daerah	6.557.762.861,00
26	Sekretariat DPRD	33.638.298.549,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	318.550.767,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	844.768.483,00
29	Badan Pendapatan Daerah	780.639.541,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	532.228.860,00
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	531.932.642,00
32	Inspektorat	288.835.867,00
33	Kecamatan Bukitraya	77.971.488,00
34	Kecamatan Tenayan Raya	5.138.900,00
35	Kecamatan Sail	54.648.792,00
36	Kecamatan Lima Puluh	74.083.735,00
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	67.963.476,00
38	Kecamatan Sukajadi	100.212.944,00
39	Kecamatan Payung Sekaki	19.521.429,00
40	Kecamatan Senapelan	27.421.205,00
41	Kecamatan Marpoyan Damai	110.992.235,00
42	Kecamatan Binawidya	93.098.057,00
43	Kecamatan Tuah Madani	84.264.000,00
44	Kecamatan Rumbai	77.913.730,00
45	Kecamatan Rumbai Timur	10.017.000,00
46	Kecamatan Rumbai Barat	122.678.242,00
47	Kecamatan Kulim	20.449.520,00
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	851.462.092,00
Jumlah		**58.584.694.087,00**

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

Terdapat perbedaan antara Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran, sebagai berikut:

Tabel 5.4.38. Perbandingan Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
1	Beban/ Belanja Perjalanan Dinas	58.584.694.087,00	58.620.384.287,00	(35.690.200,00)
	Jumlah	**58.584.694.087,00**	**58.620.384.287,00**	**(35.690.200,00)**

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Beban perjalanan dinas terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar Rp35.690.200,00 karena:

Pengurangan:

- Pembayaran utang Tahun 2021 di 2023 sebesar Rp35.690.200,00.

5.4.2.1.6. Beban Subsidi

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
149.490.000,00	6.094.846.356,00

Realisasi Beban Subsidi pada tahun 2023 adalah Rp149.490.000,00, diberikan kepada BUMD PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru. dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp6.094.846.356,00 terdapat penurunan sebesar Rp5.945.356.356,00 atau minus 97,55%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.39. Rincian Beban/Belanja Subsidi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Subsidi kepada BUMN...	-	-	-	-
2	Beban Subsidi kepada BUMD...	149.490.000,00	6.094.846.356,00	(5.945.356.356,00)	-97,55
3	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta...	-	-	-	-
4	Beban Subsidi kepada Koperasi...	-	-	-	-
Jumlah		149.490.000,00	6.094.846.356,00	(5.945.356.356,00)	-97,55

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

Terdapat perbedaan antara Beban Subsidi pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran, sebagai berikut:

Tabel 5.4.40. Perbandingan Beban Subsidi dan Belanja Subsidi

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
1	Belanja/Beban Subsidi	149.490.000,00	1.115.804.147,00	(966.314.147,00)
Jumlah		149.490.000,00	1.115.804.147,00	(966.314.147,00)

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Perbedaan antara Beban Subsidi pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran yang telah dijabarkan pada tabel di atas, disebabkan adanya pembayaran Utang Belanja Subsidi Tahun 2021 ke Perusahaan Daerah/BUMD (PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru) oleh Dinas Perhubungan sebesar Rp966.314.147,00.

5.4.2.1.7. Beban Hibah

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
224.513.682.826,55	197.556.196.440,00

Beban Hibah adalah beban yang terjadi pada Tahun 2023 dengan terealisasi sebesar Rp224.513.682.826,55 mengalami kenaikan sebesar Rp 26.957.486.386,55 atau 13,65% dibandingkan dengan Tahun 2022 Rp197.556.196.440,00. Beban Hibah tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 5.4.41. Rincian Beban/Belanja Hibah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	112.173.194.046,55	123.663.774.384,00	(11.490.580.337,45)	-9,29
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.990.044.100,00	4.443.058.100,00	(453.014.000,00)	-10,20
3	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	—
4	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	51.678.009.100,00	19.982.435.000,00	31.695.574.100,00	158,62
5	Beban Hibah Dana BOS	52.598.315.580,00	48.263.341.330,00	4.334.974.250,00	8,98
6	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	4.074.120.000,00	1.203.587.626,00	2.870.532.374,00	238,50
7	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan			-	—
Jumlah		224.513.682.826,55	197.556.196.440,00	26.957.486.386,55	13,65

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

Tabel 5.4.42. Perbandingan Beban Hibah dan Belanja Hibah

(dalam rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	112.173.194.046,55	-	112.173.194.046,55
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.990.044.100,00	3.990.044.100,00	-
3	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
4	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	51.678.009.100,00	51.678.009.100,00	-
5	Beban Hibah Dana BOS	52.598.315.580,00	52.598.315.580,00	-
6	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	4.074.120.000,00	4.074.120.000,00	-
	Jumlah	224.513.682.826,55	112.340.488.780,00	112.173.194.046,55

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Terdapat perbedaan antara Beban Hibah pada Laporan Operasional dibandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban Uang dan/ atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain masyarakat terdapat perbedaan LO dan LRA sebesar Rp112.173.194.046,55 karena beda pengelompokan nomenklatur pada LRA dan LO, pada LRA dikelompokkan pada Belanja Barang dan Jasa berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sedangkan pada LO dikelompokkan pada beban hibah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Rincian Beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.4.43. Rincian Beban Uang Dan/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Per SKPD

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TAHUN 2023
1	Dinas Pendidikan	36.550.000,00
2	Dinas Kesehatan	6.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	44.341.376.524,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.528.000.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	303.350.000,00
6	Dinas Ketahanan Pangan	15.000.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	55.142.952.522,55
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	25.900.000,00
9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.912.900.000,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	56.050.000,00
11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	24.000.000,00
12	Dinas Pertanian dan Perikanan	314.250.000,00
13	Sekretariat Daerah	3.880.500.000,00
14	Badan Pendapatan Daerah	93.015.000,00
15	Kecamatan Bukit raya	91.800.000,00
16	Kecamatan Tenayan Raya	114.900.000,00
17	Kecamatan Sail	46.800.000,00
18	Kecamatan Lima Puluh	90.900.000,00
19	Kecamatan Pekanbaru Kota	111.100.000,00
20	Kecamatan Sukajadi	132.900.000,00
21	Kecamatan Payung Sekaki	98.550.000,00
22	Kecamatan Senapelan	99.700.000,00
23	Kecamatan Marpoyan Damai	97.900.000,00
24	Kecamatan Binawidya	92.100.000,00
25	Kecamatan Tuah Madani	75.800.000,00
26	Kecamatan Rumbai	131.450.000,00
27	Kecamatan Rumbai Timur	104.650.000,00
28	Kecamatan Rumbai Barat	120.250.000,00
29	Kecamatan Kulim	67.350.000,00
Jumlah		112.173.194.046,55

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

5.4.2.1.8. Beban Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
0,00	0,00

Realisasi Beban Bantuan Sosial pada Tahun 2023 sebesar Rp0,00 sementara pada Tahun 2022 sebesar Rp0,00, tidak ada peningkatan untuk belanja bantuan sosial tahun 2023.

5.4.2.1.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
376.987.697.751,00	376.694.801.613,00

Beban ini merupakan beban penyusutan yang berasal dari penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud Tahun 2023. Dasar perhitungan penyusutan dan

amortisasi dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen dan dilakukan perhitungan penyusutan secara bulanan. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 sebesar Rp376.987.697.751,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 292.896.138,00 atau 0,08% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp376.694.801.613,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.44. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	137.260.924.857,00	132.731.385.940,00	4.557.348.914,00	3,43
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	35.700.818.512,00	41.072.557.031,00	(5.371.738.519,00)	-13,08
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	201.395.313.579,00	199.974.210.748,00	1.411.102.831,00	0,71
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2.612.029.803,00	2.916.447.091,00	(303.017.288,00)	-10,42
Jumlah		**376.987.697.751,00**	**376.694.801.613,00**	**292.896.138,00**	**0,08**

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

Tabel 5.4.45. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per SKPD

(dalam rupiah)

No	URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	27.792.928.356,00	25.977.712.356,00	(2.185.083.662,00)	(7,29)
2	Dinas Kesehatan	25.577.963.040,00	30.041.416.461,00	(463.433.412,00)	(1,54)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	136.163.576.999,00	115.254.638.349,00	16.056.837.318,00	16,17
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	109.807.297.097,00	104.283.094.721,00	5.323.992.998,00	5,10
5	Satuan Polisi Pamong Praja	213.719.049,00	121.484.399,00	182.598.980,00	187,81
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	890.932.470,00	922.319.950,00	(71.387.380,00)	(7,74)
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.447.789.910,00	2.458.803.684,00	(11.083.774,00)	(0,45)
8	Dinas Sosial	543.776.041,00	348.343.745,00	(68.567.704,00)	(42,34)
9	Dinas Tenaga Kerja	105.115.423,00	132.398.786,00	(27.283.363,00)	(20,61)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	482.813.559,00	247.247.746,00	235.564.763,00	95,19
11	Dinas Ketahanan Pangan	717.839.467,00	468.421.845,00	249.417.622,00	53,25
12	Dinas Pertanahan	473.163.375,00	694.955.037,00	(221.991.649,00)	(31,95)
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	7.401.661.610,00	7.786.044.687,00	(316.483.077,00)	(4,04)
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	599.469.081,00	470.013.237,00	89.434.844,00	19,03
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	767.271.619,00	602.464.454,00	164.807.165,00	27,36
16	Dinas Perhubungan	9.519.624.005,00	15.404.358.881,00	(5.884.734.876,00)	(38,58)
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	847.051.807,00	1.829.373.686,00	(1.182.321.701,00)	(64,69)
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	241.289.083,00	110.956.024,00	130.333.059,00	117,49
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu	6.920.535.707,00	7.338.132.475,00	(1.417.596.768,00)	(19,32)
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	930.496.135,00	729.929.960,00	206.566.575,00	28,30
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	761.142.219,00	726.501.370,00	34.640.849,00	4,77
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	543.478.772,00	498.716.307,00	44.762.465,00	8,98
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	469.723.746,00	547.286.669,00	(77.562.923,00)	(14,17)
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.506.104.886,00	3.134.480.964,00	(250.375.078,00)	(10,70)
25	Sekretariat Daerah	26.640.256.428,00	35.891.100.004,00	(10.250.843.576,00)	(28,56)
26	Sekretariat DPRD	2.892.675.567,00	3.540.762.607,00	(648.087.040,00)	(18,30)
27	Badan Penanggulangan Pembangunan Daerah	564.544.032,00	686.691.883,00	(101.947.151,00)	(20,96)
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	1.902.757.140,00	1.789.830.453,00	113.326.587,00	6,37

No	URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
29	Badan Pendapatan Daerah	1.592.443.634,00	1.921.719.442,00	(329.275.808,00)	(17,13)
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	888.480.484,00	778.174.626,00	110.305.858,00	14,17
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	376.477.500,00	255.434.435,00	121.043.065,00	47,39
32	Inspektorat	398.847.277,00	197.398.833,00	82.448.444,00	44,00
33	Kecamatan Bukitraya	313.837.798,00	305.930.091,00	7.899.707,00	2,58
34	Kecamatan Tenayan Raya	373.135.288,00	428.361.537,00	(55.226.271,00)	(12,89)
35	Kecamatan Sail	219.153.885,00	237.582.809,00	(18.428.924,00)	(7,75)
36	Kecamatan Limo Puluh	183.082.146,00	105.004.988,00	58.077.160,00	55,31
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	218.850.474,00	234.014.282,00	(15.363.808,00)	(6,57)
38	Kecamatan Sukajadi	225.106.940,00	217.429.859,00	7.676.081,00	3,53
39	Kecamatan Payung Sekaki	326.387.671,00	358.853.142,00	(32.465.471,00)	(10,35)
40	Kecamatan Senapelan	157.251.247,00	171.264.294,00	(14.013.047,00)	(8,19)
41	Kecamatan Marpoyan Damai	307.134.715,00	266.147.412,00	40.987.303,00	15,40
42	Kecamatan Binawidya	671.323.257,00	646.389.106,00	24.934.149,00	3,86
43	Kecamatan Tuah Madani	326.115.558,00	360.471.211,00	(32.355.453,00)	(8,98)
44	Kecamatan Rumbai	343.259.175,00	312.185.293,00	31.073.882,00	9,95
45	Kecamatan Rumbai Timur	309.050.929,00	213.726.894,00	95.329.035,00	44,60
46	Kecamatan Rumbai Barat	293.169.918,00	395.643.834,00	(92.473.916,00)	(23,38)
47	Kecamatan Kulim	400.390.653,00	377.730.364,00	22.660.289,00	6,00
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	236.658.231,00	221.780.786,00	17.877.445,00	7,75
Jumlah		376.887.697.791,00	376.694.601.613,00	292.896.136,00	0,08

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

5.4.2.1.10. Beban Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
22.538.087.227,68	38.029.804.863,00

Beban Penyisihan Piutang adalah beban penyisihan piutang periode Tahun 2023 sebesar Rp22.538.087.227,68 mengalami penurunan sebesar Rp15.491.717.635,32 atau 40,74%. dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp38.029.804.863,00.

Tabel 5.4.46. Rincian Beban Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	21.614.197.214,48
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	31.748.367,63
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	2.506.287,14
4	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-
5	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	-
6	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	869.633.358,43
Jumlah		22.538.087.227,68

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

Rincian Beban penyisihan piutang per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.4.47. Rincian Beban penyisihan piutang Per SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Kesehatan	-	-	-	—
2	Komunikasi, Informatika,Statistik Dan Persandian	10.672.080,77	547.800,00	10.124.807,77	1.847,96
3	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	23.583.961,00	80.644.139,00	(57.060.178,00)	-70,76
4	Sekretariat DPRD	880.633.368,43	61.627.772,00	818.005.596,43	1.343,56
5	BPKD		-	-	—
6	Badan Perencanaan Daerah	21.814.197.314,48	31.672.282.755,00	(10.258.085.340,52)	-42,00
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		14.702.311,00	(14.702.311,00)	-100,00
Jumlah		**22.539.087.227,68**	**31.829.804.863,00**	**(15.491.717.635,32)**	**-48,74**

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

5.4.2.1.11. Beban Tidak Terduga

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
761.126.257,00	964.331.717,00

Beban Tidak Terduga pada LO digunakan untuk pembayaran kegiatan tertentu . Penggunaan BTT tersebut untuk Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) oleh Perangkat Daerah, belanja tersebut mempengaruhi Laporan Operasional dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.48. Perincian Belanja Dana Beban Tidak Terduga

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Pembayaran	Pengembalian	Saldo
1	Belanja Tidak Terduga Untuk 20.126.257,00 - 20.126.257,00 Pengembalian Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau TA 2022 yang Dialokasikan Pada Tahun Anggaran 2023 sesuai SK Walikota Nomor 22 Tahun 2023 Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak TA 2023	20.126.257,00	-	20.126.257,00
2	Santunan Kematian Tahap 1 Tahun 2023	500.000.000,00	-	500.000.000,00
3	Pembayaran Belanja Tidak 2.000.000,00 - 522.126.257,00 Terduga Untuk Pengembalian Pajak Daerah Lebih Bayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan An. Arif Budi Pratama Tahun Anggaran 2022 yang Dialokasikan Pada TA. 2023	2.000.000,00	-	2.000.000,00
4	Pembayaran Belanja Tidak 2.000.000,00 - 522.126.257,00 Terduga Untuk Pengembalian Pajak Daerah Lebih Bayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan An. Arif Budi Pratama Tahun Anggaran 2022 yang Dialokasikan Pada TA. 2023	200.000.000,00	-	200.000.000,00
5	Pembayaran Belanja Tidak 2.000.000,00 - 522.126.257,00 Terduga Untuk Pengembalian Pajak Daerah Lebih Bayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan An. Arif Budi Pratama Tahun Anggaran 2022 yang Dialokasikan Pada TA. 2023	39.000.000,00	-	39.000.000,00
Jumlah		**761.126.257,00**	-	**761.126.257,00**

Sumber: Laporan Belanja Tidak Terduga Kota Pekanbaru

Tabel 5.4.49. Perbandingan Antara LRA dan LO Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
1	Beban/ Belanja Tidak Terduga	781.126.257,00	781.126.257,00	-
Jumlah		781.126.257,00	781.126.257,00	-

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Tidak terdapat perbedaan nilai Beban Tidak Terduga antara LO dengan LRA pada Tahun 2022.

5.4.2.1.12. Beban Lain-lain

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
118.742.337.152,62	123.728.007.731,14

Beban Lain-lain merupakan beban barang dan jasa BOS pada Dinas Pendidikan sebesar Rp80.334.273.574,00 diberikan kepada 195 SD Negeri dan 45 SMP Negeri dan beban barang dan jasa BLUD pada Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan pada sebesar Rp38.408.063.578,62.

Terdapat perbedaan antara Beban lain-lain pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran, sebagai berikut:

Tabel 5.4.50. Perbandingan Beban Lain-lain

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
1	Beban Lain - lain	118.742.337.152,62	-	118.742.337.152,62
Jumlah		118.742.337.152,62	-	118.742.337.152,62

Sumber: Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Selisih perbandingan beban lain-lain antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp118.742.337.152,62 karena terdapat perbedaan pengelompokan nomenklatur pada LRA dan LO, pada LRA dikelompokkan pada Belanja Barang dan Jasa berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sedangkan pada LO dikelompokkan pada beban lain-lain berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

5.4.2.2. Beban Transfer

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
0,00	0,00

Beban Transfer adalah beban transfer dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. beban transfer Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan Tahun 2022 Rp0,00, tidak terdapat beban Transfer Tahun 2022.

5.4.3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

5.4.3.1. Surplus Non Operasional

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
1.227.662.280,22	629.038.723,05

Surplus Non Operasional Tahun 2023 sebesar Rp1.227.662.280,22 mengalami peningkatan sebesar Rp598.623.557,17 atau 95,16% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp629.038.723,05. Surplus Non Operasional terdiri dari Surplus penjualan aset non lancar dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

a. Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Surplus penjualan aset non lancar Tahun 2023 sebesar Rp0.00 tidak berbeda dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp0,00.

b. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun 2023 sebesar Rp1.227.662.280,22 mengalami peningkatan sebesar Rp598.623.557,17 atau 95,16% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp629.038.723,05 merupakan penyesuaian Investasi Permanen atau laba dari BUMD yaitu PT. Bank Perkreditan Riau sebesar Rp1.227.662.280,22.

5.4.3.2. Defisit Non Operasional

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
19.561.956.148,12	40.715.907.426,00

Defisit Non Operasional Tahun 2023 sebesar Rp19.561.956.148,12 mengalami penurunan sebesar Rp21.153.951.277,88 atau 51,95% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp40.715.907.426,00. Defisit Non Operasional terdiri dari Defisit penjualan aset non lancar dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

a. Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Defisit Penjualan Aset Non Lancar sebesar Rp0,00 tidak berbeda dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp0,00.

b. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp19.561.956.148,12 yang merupakan kerugian dari BUMD terdiri dari Penyesuaian Investasi Permanen PDAM sebesar Rp18.001.208.032,00 dan Penyesuaian Investasi Permanen PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru sebesar Rp1.560.748.116,12.

5.4.3.3. Beban Luar Biasa

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
0,00	0,00

Belanja Luar Biasa merupakan beban yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada

di luar kendali atau pengaruh suatu entitas. Beban Luar Biasa Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah Rp0,00. Tidak terdapat perbedaan antara Beban Luar Biasa pada Laporan Operasional dengan Belanja Tidak Terduga pada Laporan Realisasi Anggaran.

5.4.4 .SURPLUS DEFISIT-LO

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
201.646.558.259,94	(49.094.898.621,20)

Surplus/Defisit dari operasi adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi, non operasional, dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO Tahun 2023 sebesar Rp201.646.558.259,94 mengalami peningkatan sebesar Rp250.741.456.881,14 atau 510,73% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp49.094.898.621,20.

Tabel 5.4.51. Rincian Surplus Defisit-LO

(dalam rupiah)

No	Surplus/Defisit LO	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	Pendapatan	3.029.957.888.907,93	2.542.852.914.475,81	487.104.974.426,12	19,16
2	Beban	2.809.977.046.774,09	2.551.950.944.394,09	258.116.102.380,00	10,11
3	Surplus/Defisit Non Operasional	(18.334.283.867,90)	(40.086.868.702,95)	21.752.574.835,05	-54,26
Jumlah		201.646.558.259,94	(49.094.898.621,20)	250.741.456.881,14	-510,73

Sumber: Laporan Operasional Kota Pekanbaru

5.5. PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Pekanbaru disusun berdasarkan pendapatan yang benar-benar telah diterima oleh Kas Daerah dan belanja yang telah terealisasi/yang telah dipertanggungjawabkan. Laporan Arus Kas meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan dan Aktivitas Non-Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

5.5.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
317.959.888.460,88	314.545.446.176,29

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kota Pekanbaru selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintan Kota Pekanbaru dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasinya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar, dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.5.1. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI		
2	Arus Masuk Kas :		
3	Penerimaan Pajak Daerah	784.908.341.816,00	719.418.612.925,80
4	Penerimaan Retribusi Daerah	20.824.967.951,00	16.200.827.808,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.043.017.284,00	3.463.845.468,00
6	Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	76.414.533.959,38	59.387.271.601,65
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	164.283.708.302,00	122.234.070.989,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	127.755.012.834,00	124.251.410.872,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	867.860.880.192,00	760.284.250.030,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	346.219.548.445,00	338.376.329.750,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah	18.175.881.000,00	-
12	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	338.807.751.168,00	290.860.417.394,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan	22.856.684.500,00	14.229.314.543,00
14	Penerimaan dari Pemerintah Lainnya	-	-
15	Jumlah Arus Masuk Kas	2.759.950.653.321,38	2.478.879.412.545,85
16	ARUS KELUAR KAS		
17	Pembayaran Pegawai	917.756.173.037,00	909.095.049.997,56
18	pembayaran Barang dan Jasa	1.467.017.172.439,50	1.174.045.344.026,80
19	Pembayaran Subsidi	1.110.894.147,00	7.283.227.072,00
20	Pembayaran Belanja Hibah	112.348.466.390,00	73.602.420.054,00
21	Pembayaran Tak Terduga	761.126.257,00	664.331.717,90
22	Jumlah Arus Keluar Kas	2.432.998.765.460,50	2.164.330.969.368,26
23	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	317.959.888.460,88	314.545.446.176,29

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan selisih antara arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas operasional Pemerintah Kota Pekanbaru selama Tahun 2023 sebesar Rp317.959.888.460,88 dan mengalami kenaikan sebesar Rp3.414.442.284,59 atau 1,09% dibandingkan dengan Tahun 2022 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp314.545.446.176,29.

5.5.1.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
2.750.950.653.921,38	2.478.876.412.545,65

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi pada Tahun 2023 merupakan total dari seluruh arus masuk kas dari aktivitas operasional Pemerintah Kota Pekanbaru selama Tahun 2023 sebesar Rp2.750.950.653.921,38 dan mengalami kenaikan sebesar Rp272.074.241.375,73 atau 10,98% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp2.478.876.412.545,65.

5.5.1.1.1. Arus Masuk Kas Dari Penerimaan Pajak Daerah

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
784.909.347.016,00	719.418.610.925,80

Jumlah Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023 sebesar Rp784.909.347.016,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp65.490.736.090,20 atau 9,10% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp719.418.610.925,80. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Pajak Daerah merupakan penerimaan yang bersal dari pajak daerah dan telah disetorkan ke kas daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.5.2. Rincian Pendapatan Pajak Daerah

(dalam rupiah)

NO.	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	JUMLAH
1.	Pajak Hotel	47.259.290.256,00
2.	Pajak Restoran	140.233.444.897,00
3.	Pajak Hiburan	18.154.112.772,00
4.	Pajak Reklame	34.619.606.450,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	156.581.366.265,00
6.	Pajak Parkir	22.600.230.899,00
7.	Pajak Air Tanah	12.125.643.473,00
8.	Pajak Sarang Burung Walet	80.254.500,00
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.015.095,00
10.	PBB dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	151.017.228.127,00
11.	BPHTB	303.608.751.196,00
	Jumlah Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023	**784.909.347.016,00**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

5.5.1.1.2. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
26.824.967.951,00	16.500.827.908,00

Arus masuk dari Penerimaan Retribusi Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Retribusi Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan.

Arus Kas Masuk dari Retribusi Daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp26.824.967.951,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp10.324.140.043,00 atau 62,57% dibanding dengan Tahun 2022 sebesar Rp16.500.827.908,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.3. Rincian Arus Masuk Kas Retribusi Daerah 2023

(dalam rupiah)

No	RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
1	Retribusi Jasa Umum	11.118.122.659,00
2	Retribusi Jasa Usaha	3.359.694.796,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	12.347.957.200,00
Jumlah Realisasi Retribusi DaerahTahun 2023		**26.824.967.951,00**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

5.5.1.1.3. Arus Masuk Kas Hasil Penerimaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
5.943.817.264,00	3.443.846.490,00

Arus masuk kas dari Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan sebesar Rp5.943.817.264,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp2.499.970.774,00 atau 72,59% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp3.443.846.490,00 merupakan penerimaan berasal dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.

5.5.1.1.4. Arus Masuk Kas Hasil Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
70.414.533.959,38	59.287.271.601,85

Arus masuk kas dari Hasil Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama Tahun 2023 sebesar Rp70.414.533.959,38 dan mengalami kenaikan sebesar Rp11.127.262.357,53 atau 18,77% dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp59.287.271.601,85.

Lain-lain PAD yang Sah pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp72.608.698.459,38 sehingga terdapat selisih sebesar Rp2.194.164.500,00 dengan Laporan Arus Kas (LAK). Perbedaan ini disebabkan dari penjualan aset peralatan dan mesin sebesar Rp1.824.579.500,00 serta penjualan aset lainnya sebesar Rp369.585.000,00.

5.5.1.1.5. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
164.283.708.302,00	122.234.078.989,00

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun 2023 sebesar Rp164.283.708.302,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp42.049.629.313,00 atau 34,40% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp122.234.078.989,00.

5.5.1.1.6. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
127.755.812.834,00	124.251.455.872,00

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun 2023 sebesar Rp127.755.812.834,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp3.504.356.962,00 atau 2,82% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp124.251.455.872,00.

5.5.1.1.7. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
867.953.880.162,00	790.284.259.030,00

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama Tahun 2023 sebesar Rp867.953.880.162,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp77.669.621.132,00 atau 9,83% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp790.284.259.030,00.

5.5.1.1.8. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
340.219.549.445,00	338.376.329.792,00

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama Tahun 2023 sebesar Rp340.219.549.445,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.843.219.653,00 atau 0,54% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp338.376.329.792,00.

5.5.1.1.8.a Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
32.786.713.679,00	55.839.140.812,00

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama Tahun 2023 sebesar Rp32.786.713.679,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp23.052.427.133,00 atau 41,28% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp55.839.140.812,00.

5.5.1.1.8.b Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
307.432.835.766,00	282.537.188.980,00

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus yang telah diterima Kas Daerah selama tahun 2023 sebesar Rp307.432.835.766,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp24.895.646.786,00 atau 8,81% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp282.537.188.980,00.

5.5.1.1.9. Arus Masuk Kas dari Insentif Daerah

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
19.178.601.000,00	0,00

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Penyesuaian merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Insentif Daerah yang telah diterima Kas Daerah selama tahun 2023 sebesar Rp19.178.601.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp19.178.601.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

5.5.1.1.10. Arus Masuk Kas dari Bagi Hasil dari Provinsi

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
320.607.751.188,00	290.850.417.394,00

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi merupakan penerimaan bagi hasil Pajak yang telah disetorkan Kas Daerah selama tahun 2023 sebesar Rp320.607.751.188,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp29.757.333.794,00 atau 10,23% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp290.850.417.394,00.

5.5.1.1.11. Arus Masuk Kas dari Bantuan Keuangan

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
22.858.684.800,00	14.229.314.543,00

Arus masuk kas dari Bantuan Keuangan merupakan penerimaan yang telah disetorkan Kas Daerah selama tahun 2023 sebesar Rp22.858.648.800,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp8.629.370.257,00 atau 60,65%, dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp14.229.314.543,00. Penerimaan tersebut merupakan Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah daerah Provinsi.

5.5.1.1.12. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pendapatan Lainnya

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
0,00	0,00

Arus masuk kas dari Penerimaan Pendapatan lainnya merupakan penerimaan yang telah diterima Kas Daerah selama tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp0,00. Pendapatan lainnya merupakan Penerimaan Hibah Dana BOS SMP dan Hibah Dana BOS SD.

5.5.1.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
2.432.990.765.460,50	2.164.330.965.369,36

Arus kas keluar dari aktivitas operasi sebesar Rp2.432.990.765.460,50 dengan rincian sebagai berikut:

5.5.1.2.1. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
917.756.173.837,80	908.095.040.997,56

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Belanja Pegawai yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2023 sebesar Rp917.756.173.837,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp9.661.132.839,44 atau 1,06 % dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp908.095.040.997,56.

5.5.1.2.2. Arus Keluar Kas dari Pembayaran Belanja Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
1.401.017.172.439,50	1.174.095.944.026,80

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Belanja Barang dan Jasa yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2023 sebesar Rp1.401.017.172.439,50 dan mengalami kenaikan sebesar Rp226.921.228.412,70 atau 19,33% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp1.174.095.944.026,80 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.4. Rincian Belanja Barang Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Jenis Belanja Barang dan Jasa	Realisasi Tahun 2023
1	Belanja Barang	414.976.938.507,00
2	Belanja Jasa	603.757.954.090,26
3	Belanja Pemeliharaan	100.564.799.800,07
4	Belanja Perjalanan Dinas	58.620.384.287,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	107.820.493.105,55
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	80.334.273.574,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	34.960.342.072,62
JUMLAH		**1.401.017.172.439,50**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

5.5.1.2.3. Arus Keluar Kas dari Pembayaran Belanja Subsidi

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
1.115.804.147,00	7.283.227.572,00

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Belanja Subsidi yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2023 sebesar Rp1.115.804.147,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp6.167.423.425,00 atau 84,68% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp7.283.227.572,00 berupa subsidi kepada PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru.

5.5.1.2.4. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Hibah

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
112.340.488.780,00	73.892.422.056,00

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Hibah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2023 sebesar Rp112.340.488.780,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp38.448.066.724,00 atau 52,03% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp73.892.422.056,00.

5.5.1.2.5. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
0,00	0,00

Arus keluar kas Bantuan Sosial merupakan pengeluaran yang berasal dari Pos Pembayaran Bantuan Sosial yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2023 sebesar Rp0,00. Dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

5.5.1.2.6. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten / Kota

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
0,00	0,00

Arus keluar kas dari Bantuan Keuangan merupakan pengeluaran yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00.

5.5.1.2.7. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Belanja Tak Terduga

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
761.126.257,00	964.331.717,00

Arus keluar kas dari Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2023 sebesar Rp761.126.257,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp203.205.460,00 atau 21,07% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp964.331.713,00.

5.5.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
(323.613.330.223,88)	(330.816.058.476,99)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta Investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.5. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

NO	ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	**Arus Masuk Kas**		
2	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	1.824.579.500,00	361.927.500,00
3	Penjualan Aset Lainnya	369.585.000,00	9.000.000,00
4	**Jumlah Arus Masuk Kas**	**2.194.164.500,00**	**370.927.500,00**
5	**ARUS KELUAR KAS**		
6	Perolehan Tanah	789.811.525,00	8.508.186.113,00
7	Perolehan Peralatan dan Mesin	75.888.516.195,00	103.335.048.831,00
8	Perolehan Gedung dan Bangunan	94.006.933.248,86	77.949.693.104,00
9	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	128.357.813.682,02	121.218.867.527,99
10	Perolehan Aset Tetap Lainnya	10.786.410.073,00	12.215.036.401,00
11	Perolehan Aset Lainnya	140.005.000,00	108.236.000,00
12	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	2.850.000.000,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	**325.807.464.723,88**	**331.185.985.976,99**
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	**(323.613.330.223,88)**	**(330.815.058.476,99)**

Sumber: Kertas Kerja Laporan Arus Kas Kota Pekanbaru TA.2023

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi aset non keuangan tahun 2023 sebesar minus Rp323.613.330.223,88 dan mengalami penurunan sebesar Rp7.201.728.253,11 atau 2,18% dibanding dengan Tahun 2022 sebesar minus Rp330.815.058.476,99.

5.5.2.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Adapun rincian arus masuk kas dari aktivitas investasi adalah sebagai berikut:

5.5.2.1.1 Arus Masuk Kas dari Penjualan Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
1.824.579.500,00	361.927.500,00

Arus masuk kas dari Penjualan Peralatan dan Mesin pada Tahun 2023 sebesar Rp1.824.579.500,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.462.652.000,00 atau 404,13% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp361.927.500,00.

5.5.2.1.2 Arus Masuk Kas dari Penjualan Aset Lainnya

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
369.585.000,00	9.000.000,00

Arus masuk kas dari Penjualan Aset Lainnya tahun 2023 sebesar Rp369.585.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp360.585.000,00 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp9.000.000,00.

5.5.2.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Adapun rincian arus keluar kas dari aktivitas investasi adalah sebagai berikut:

5.5.2.2.1. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Tanah

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
769.811.525,00	8.509.166.113,00

Arus keluar kas untuk Perolehan Tanah merupakan pengeluaran yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2023 sebesar Rp769.811.525,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp7.739.354.588.,00 atau 90,95% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp8.509.166.113,00.

5.5.2.2.2. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
75.888.516.195,00	108.335.049.831,00

Arus keluar kas untuk Perolehan Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaranyang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2023 sebesar Rp75.888.516.195,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp32.446.533.636,00 atau 29,95% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp108.335.049.831,00.

5.5.2.2.3. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
94.006.938.248,86	77.949.693.104,00

Arus keluar kas untuk Perolehan Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2023 sebesar Rp94.006.938.248,86 dan mengalami kenaikan sebesar Rp16.057.245.144,86 atau 20,60% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp77.949.693.104,00.

5.5.2.2.4. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
128.207.813.682,02	121.218.807.527,99

Arus keluar kas untuk Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2023 sebesar Rp128.207.813.682,02. Dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp121.218.807.527,99 terdapat kenaikan sebesar Rp6.989.006.154,03 atau 5,77%.

5.5.2.2.5. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
16.786.410.073,00	12.215.030.401,00

Arus keluar kas untuk Perolehan Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2023 sebesar Rp16.786.410.073,00. Dan mengalami kenaikan sebesar Rp4.571.379.672,00 atau 37,42% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp12.215.030.401,00.

5.5.2.2.6. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Aset Lainnya

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
148.005.000,00	108.239.000,00

Arus keluar kas untuk Perolehan Aset Lainnya merupakan pengeluaran yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2023 sebesar Rp148.005.000,00. Dan mengalami kenaikan sebesar Rp39.766.000,00 dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp108.239.000,00.

5.5.2.2.7. Arus Keluar Kas untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
10.000.000.000,00	2.850.000.000,00

Arus keluar kas untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Aset merupakan pengeluaran yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp2.850.000.000,00.

5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
0,00	0,00

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian Piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.6. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

(dalam rupiah)

NO	ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	ARUS MASUK KAS	-	-
2	Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
3	ARUS KELUAR KAS	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	-	-
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	-	-

Sumber: Kertas Kerja LAK TA.2023

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang. Arus kas bersih dari Aktivitas PembiayaanTahun 2023 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

5.5.4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
(294.867.385,70)	116.081.745,00

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah.

Arus Kas dari aktivitas non anggaran merupakan aktivitas keluar masuk transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi APBD Kota Pekanbaru. Arus Kas ini merupakan aktivitas kas yang tidak mempengaruhi anggaran, namun mempengaruhi nilai kas. Penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) merupakan aktivitas transitoris karena telah diperhitungkan dalam nilai belanja yang telah dikeluarkan. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar minus Rp294.867.385,70 merupakan selisih antara arus masuk kas sebesar Rp372.063.674.859,75 dan arus keluar kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp372.358.542.245,45 dan mengalami penurunan sebesar Rp410.949.130,70 dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp116.081.745,00.

5.5.4.1. Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Transitoris

Adapun rincian arus masuk kas dari aktivitas transitoris adalah sebagai berikut:

5.5.4.1.1. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Fihak Ketiga (PFK)

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
361.948.322.932,25	177.518.242.745,00

Arus Masuk kas dari Penerimaan Fihak Ketiga merupakan penerimaan potongan pajak pusat yang dipungut oleh Bendahara Umum Daerah selama Tahun 2023 sebesar Rp361.948.322.932,25 dan mengalami kenaikan sebesar Rp184.430.080.187,27 atau 103,89% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp177.518.242.745,00.
Rincian Penerimaan Fihak Ketiga selama Tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.5.7. Komponen Arus Masuk Kas dari Penerimaan Antar Rekening Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pemungutan
1	Penerimaan IMP 8%	34.919.970.246,00
2	Penerimaan IMP 1 %	7.013.979.699,00
3	Penerimaan IMP 3,25%	707.036.639,00
4	Iuran BPJS	27.533.411.783,00
5	Zakat	7.492.749.285,00
6	Penyetoran Atas Pengembalian	1.471.265.912,45
7	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	735.069.027,00
8	Jaminan Kematian (JKM)	2.205.069.953,00
9	PPN	90.578.980.329,66
10	Phr	134.920.687.233,00
11	PPh Pasal 21	46.120.338.868,00
12	PPh Pasal 22	2.587.985.662,14
13	PPh Pasal 23	6.850.191.843,00
14	PPh pasal 4	8.514.633.482,00
15	Hutang Kelebihan	296.956.971,00
Total		**361.948.322.932,25**

Sumber : Kertas Kerja Konsolidasi Pajak TA.2023

5.5.4.1.2. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Antar Rekening

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
10.115.351.927,50	9.000.050.000,00

Arus Masuk kas dari Penerimaan Antar Rekening sebesar Rp10.115.351.927,50 dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp9.000.050.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp1.115.301.927,50 atau 12,39%. Arus Masuk kas dari Penerimaan Antar Rekening sebesar Rp10.115.351.927,50 adalah penerimaan Kas dari Kas BLUD Perparkiran sebesar Rp10.000.000.000,00 dan Jasa Bongkar Tiang Reklame yang belum jatuh tempo dititipkan di Kas Lainnya Pemko sebesar Rp.115.351.927.50 yang ada di Bapenda.

5.5.4.2. Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Transitoris

Adapun rincian arus keluar kas dari aktivitas transitoris adalah sebagai berikut:

5.5.4.2.1. Arus Keluar Kas untuk Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
362.358.542.245,45	177.402.052.000,00

Arus keluar kas untuk Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga merupakan pengeluaran pembayaran pungutan PPN, PPh, Askek dan pungutan lainnya oleh Bendahara Umum Daerah yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, nilai arus kas keluar Fihak Ketiga sebesar Rp362.358.542.245,45 dan mengalami kenaikan sebesar Rp184.956.490.245,45 atau 99,76% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp177.402.052.000,00.

5.5.4.2.2. Arus Keluar Kas untuk Pengeluaran Antar Rekening

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
10.000.000.000,00	9.000.159.000,00

Arus keluar kas untuk Pengeluaran Antar Rekening merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2023 atau UYHD yang harus disetorkan ke Kas Umum Daerah sebesar Rp10.000.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp999.841.000,00 dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp9.000.159.000,00. Arus keluar kas untuk Pengeluaran Antar Rekening sebesar Rp10.000.000.000,00 merupakan Saldo kas BLUD Perparkiran yang disetorkan ke Kas Umum Daerah diakhir tahun 2023.

5.5.5. Kenaikan/Penurunan Kas

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
(5.948.309.148,76)	(16.153.530.555,70)

Pada Tahun 2023 terdapat kenaikan kas sebesar Rp10.205.221.407,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.5.8. Kenaikan/Penurunan Kas Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2023
1.	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi	317.069.888.460,68
2.	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi	(323.813.390.223,88)
4.	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Aktifitas Transitoris	(394.867.386,70)
	Jumlah	**(5.948.309.148,70)**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

5.5.6. Saldo Akhir Kas

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
9.357.550.537,21	15.305.859.685,91

Saldo Akhir Kas Tahun 2023 sebesar Rp9.357.550.537,21 dan mengalami penurunan sebesar Rp5.948.309.148,70 atau 38,86% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp15.305.859.685,91 terdapat. Saldo akhir kas Tahun 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.5.9. Rincian Saldo Akhir Kas

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
1.	Saldo Akhir Kas di BUD	9.356.103.751,40	6.542.039.015,40
2	Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD Puskesmas, BLUD RS Madani, BLUD Parkir dan BLUD Transmetro	3.277.960.319,51	4.618.514.985,51
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	670.794.242,00	1.044.471.364,00
4	Saldo Akhir Kas Lainnya	322.746.186,30	917.615.464,00
5	Saldo Akhir Kas BOK	1.208.967.346,00	0,00
6	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	29.174.754,00	379.362.391,00
7	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	31.783.016,00	105.630.536,00
Jumlah		9.357.550.537,21	15.305.859.685,91

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekanbaru

5.6. EKUITAS

(dalam rupiah)

Tahun 2023	Tahun 2022
8.141.368.059.489,68	7.961.906.980.791,96

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kota Pekanbaru pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Pekanbaru. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.141.368.059.489,68 dan Tahun 2022 sebesar Rp7.961.906.980.791,96 mengalami kenaikan sebesar Rp179.461.078.697,72 atau 2,25%.

Tabel 5.6.1 Perbandingan EkuitasTahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	KENAIKAN / PENURUNAN	PERSENTASE %
- Ekuitas	8.141.368.059.489,68	7.961.906.980.791,96	179.461.078.697,72	2,25

Sumber :Laporan Perubahan Ekuitas Kota Pekanbaru TA.2023

5.6.1 PENJELASAN MASING - MASING POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri dari atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, perubahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak kumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pada tahun 2023 terdapat saldo awal ekuitas sebesar Rp7.961.906.980.791,96 yang merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2022;

b. Surplus/defisit-LO tahun 2023 Kota Pekanbaru sebesar Rp201.646.558.259,94 merupakan surplus kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca;

c. Pada LPE terdapat selisih sebesar Rp22.185.479.562,22 Hal ini sebagai dampak kumulatif koreksi yang disebabkan adanya perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar yang terjadi pada tahun sebelumnya dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.6.2. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

(dalam rupiah)

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	2023	2022
Koreksi Pencatatan Aset Lancar	-14.072.952.551,00	16.545.830.903,50
Koreksi Pencatatan Penyisihan Aset Lancar	-1.993.640.502,52	115.992.770.553,50
Koreksi Pencatatan Investasi		0,00
Koreksi Pencatatan Penyisihan Investasi		0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap	-4.341.406.686,70	52.814.972.876,42
Koreksi Nilai Aset Lainnya	-1.793.300.764,00	199.673.611.055,04
Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2,00	29.946.818.710,00
Koreksi Pencatatan Amortisasi Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Pencatatan Kewajiban	15.820.920,00	24.286.061.584,00
Koreksi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO		22.554.004,96
JUMLAH	-22.185.479.552,22	438.982.617.387,42

Sumber :Laporan Perubahan Ekuitas Kota Pekanbaru TA.2023

1) Koreksi Pencatatan Aset lancar

Koreksi pencatatan aset lancar bersumber dari pengurangan ekuitas sebesar Rp14.072.952.562,00 merupakan pengurang ekuitas karena koreksi pencatatan nilai piutang pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp14.072.952.632,00 serta terdapat penambah ekuitas yang bersumber dari koreksi nilai piutang retribusi daerah sebesar Rp81,00 pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 5.6.3. Koreksi Nilai Piutang

(dalam rupiah)

Koreksi Nilai Piutang	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Total Koreksi	Keterangan
Koreksi Nilai Piutang Pajak Daerah			-14.072.952.632,00	
Badan Pendapatan Daerah	3.720.789.309,00	0,00	3.720.789.309,00	Koreksi Piutang PBB
Badan Pendapatan Daerah	0,00	17.793.721.941,00	-17.793.721.941,00	Koreksi Piutang PBB Tahun Sebelumnya
Koreksi Nilai Piutang Retribusi Daerah			81,00	
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	81,00	0,00	81,00	Koreksi piutang denda retribusi
JUMLAH	3.720.789.390,00	17.793.721.941,00	-14.072.952.551,00	

Sumber :Laporan Perubahan Ekuitas Kota Pekanbaru TA.2023

2) Koreksi Pencatatan Penyisihan Aset Lancar

Koreksi pencatatan penyisihan aset lancar sebesar Rp1.993.640.502,52 bersumber dari koreksi penyisihan piutang pendapatan yang tercatat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp214.930.584,00 sebagai pengurang

ekuitas atas koreksi piutang PT Pelindo dan pada Badan Pendapatan Daerah Sebesar Rp2.208.571.086,52 sebagai penambah ekuitas atas koreksi piutang PBB.

3) Koreksi Pencatatan Aset Tetap

Koreksi pencatatan aset tetap sebesar Rp4.341.406.666,70 bersumber dari koreksi atas pencatatan aset tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan dengan rincian sebagai berikut;

a. Koreksi nilai aset tetap tanah sebesar Rp21.902.335.000,00 yang tercatat pada OPD sebagai berikut;

Tabel 5.6.4. Koreksi Nilai AsetTetap Tanah terhadap Ekuitas

(dalam rupiah)

No	OPD	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Total Koreksi	Keterangan	SK
1	Dinas Pendidikan	22.409.640.000,00	0,00	22.409.640.000,00	Koreksi saldo awal	-
2	Dinas Perhubungan	11.267.675.000,00	0,00	11.267.675.000,00	Koreksi saldo awal	-
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	21.809.980.000,00	21.809.980.000,00	Penghapusan Aset	No. 841/2021
JUMLAH		43.767.715.000,00	21.809.980.000,00	21.902.335.000,00		

Sumber :Laporan Perubahan Ekuitas Kota Pekanbaru TA.2023

b. Koreksi nilai aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp2.459.507.565,00 merupakan koreksi hasil inventarisasi terhadap aset peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 5.6.5. Koreksi Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin terhadap Ekuitas

(dalam rupiah)

Koreksi Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Total Koreksi
Koreksi Nilai Alat Besar	0,00	1.228.268,00	(1.228.268,00)
Koreksi Nilai Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	6.250.000,00	(6.250.000,00)
Koreksi Nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	3.311.278.647,00	(3.311.278.647,00)
Koreksi Nilai Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	287.012.154,00	(287.012.154,00)
Koreksi Nilai Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.497.250.000,00	18.070.960,00	1.479.179.040,00
Koreksi Nilai Komputer	19.277.083,00	235.515.431,00	(216.238.348,00)
Koreksi Nilai Alat Keselamatan Kerja	0,00	53.516.173,00	(53.516.173,00)
Koreksi Nilai Rambu-rambu	0,00	63.163.015,00	(63.163.015,00)
JUMLAH	1.516.527.083,00	3.976.034.648,00	(2.459.507.565,00)

Sumber : Laporan Perubahan Ekuitas Kota Pekanbaru TA.2023

Koreksi kurang ekuitas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp1.228.268,00 adalah Koreksi atas penghapusan aset dan koreksi nilai alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp6.250.000,00 tercatat

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Koreksi atas penghapusan aset sedangkan koreksi nilai alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp3.311.278.647,00 tercatat pada 5 OPD dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 5.6.6 Koreksi Nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga

(dalam rupiah)

Koreksi Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Total Koreksi	Keterangan
Koreksi Nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga				
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	0,00	2.523.400,00	-2.523.400,00	Penghapusan karena kebakaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	2.488.212.033,00	-2.488.212.033,00	Penghapusan Peralatan dan Mesin SK no 651
Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00	867.333,00	-867.333,00	Penghapusan SK Walikota Pekanbaru No. 551 Tahun 2023
Sekretariat Daerah	0,00	819.364.540,00	-819.364.540,00	Penghapusan Aset SK no.651 TA 2023 (force majeure)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	511.341,00	-511.341,00	Penghapusan barang rusak berat yang tidak digunakan
JUMLAH	**0,00**	**3.311.278.647,00**	**-3.311.278.647,00**	

Sumber : Laporan Perubahan Ekuitas Kota Pekanbaru TA.2023

Koreksi nilai alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp287.012.154,00 merupakan koreksi kurang ekuitas yang tercatat pada OPD sebagi berikut;

Tabel 5.6.7 Koreksi Nilai Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

(dalam rupiah)

Koreksi Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Total Koreksi	Keterangan
Koreksi Nilai Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar				
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	0,00	4.183.672,00	-4.183.672,00	Penghapusan BMD karena kebakaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	144.418.718,00	-144.418.718,00	Penghapusan Peralatan dan Mesin SK no 651
Sekretariat Daerah	0,00	138.409.764,00	-138.409.764,00	Penghapusan Aset SK no.651 TA 2023 (force majeure)
JUMLAH	**0,00**	**287.012.154,00**	**-287.012.154,00**	

Sumber : Laporan Perubahan Ekuitas Kota Pekanbaru TA.2023

Koreksi nilai alat kedokteran dan kesehatan sebesar sebesar Rp1.479.179.040,00 merupakan koreksi ekuitas yang tercatat pada 3 OPD dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 5.6.8 Koreksi Nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga

(dalam rupiah)

Koreksi Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Total Koreksi	Keterangan
Koreksi Nilai Alat Kedokteran dan Kesehatan				
Dinas Kesehatan	1.497.250.000,00	0,00	1.497.250.000,00	Hibah Alat kedokteran dari Kemenkes
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	7.902.439,00	-7.902.439,00	Penghapusan Peralatan dan Mesin SK No 651
Sekretariat Daerah	0,00	10.068.521,00	-10.068.521,00	Penghapusan Aset SK no.651 TA 2023 (force majeure)
JUMLAH	1.497.250.000,00	18.070.960,00	1.479.179.040,00	

Sumber : Laporan Perubahan Ekuitas Kota Pekanbaru TA.2023

Koreksi Nilai Komputer sebesar Rp216.238.348,00 merupakan koreksi penambah ekuitas sebesar Rp19.277.083,00 dan pengurang ekuitas sebesar Rp235.515.431,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.9 Koreksi Nilai Komputer

(dalam rupiah)

Koreksi Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Total Koreksi	Keterangan
Koreksi Nilai Komputer				
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.277.083,00	0,00	19.277.083,00	42/BA-330.KU.04.03/BJ/2023 Hibah DJTR ATR/BPN
Dinas Komunitasi Statistik dan Persandian	0,00	25.275.309,00	-25.275.309,00	Penghapusan BMD karena kebakaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	114.295.794,00	-114.295.794,00	Penghapusan Peralatan dan Mesin SK no 651
Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00	437.760,00	-437.760,00	SK Walikota Pekanbaru No. 301 Tahun 2023 Penghapusan
Sekretariat Daerah	0,00	95.506.578,00	-95.506.578,00	Penghapusan Aset SK no.651 TA 2023 (force majeure)
JUMLAH	19.277.083,00	235.515.431,00	-216.238.348,00	

Sumber : Laporan Perubahan Ekuitas Kota Pekanbaru TA.2023

Koreksi Nilai Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp53.516.173,00 merupakan koreksi pengurang ekuitas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disebabkan karena Penghapusan Peralatan dan Mesin dengan SK Nomor 651 dan Koreksi Nilai Rambu-rambu sebesar Rp63.163.015,00 merupakan koreksi pengurang ekuitas yang dicatat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disebabkan kebakaran sesuai dengan penerbitan SK Nomor 621.

c. Koreksi nilai aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp.25.052.674.073,90 merupakan koreksi penambah ekuitas sebesar Rp6.414.999.897,23 dan koreksi pengurang ekuitas sebesar Rp31.467.673.971,13 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.10. Koreksi Nilai AsetTetap Gedung dan Bangunan terhadap Ekuitas

(dalam rupiah)

Koreksi Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Total Koreksi	Keterangan
Koreksi Nilai Bangunan Gedung				
Dinas Kesehatan	467.002.227,23	0,00	467.002.227,23	
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	186.087.796,00	-186.087.796,00	Reklas Aset Tetap Lift dan AC
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	31.281.586.205,00	-31.281.586.205,00	Penghapusan Gedung dan Bangunan SK no 651
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,13	-0,13	Koreksi Saldo Awal
Kecamatan Bukit Raya	289.875.579,00	0,00	289.875.579,00	Penghapusan
Kecamatan Bina Widya	5.638.122.091,00	0,00	5.638.122.091,00	BA Inventarisasi No 976 Tgl 28 Des 2023 (Alm Susut
JUMLAH	**6.414.999.897,23**	**31.467.673.971,13**	**-25.052.674.073,90**	

Sumber : Laporan Perubahan Ekuitas Kota Pekanbaru TA.2023

d. Koreksi nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp2.027.607.189,72 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.6.11. Koreksi Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan terhadap Ekuitas

(dalam rupiah)

Koreksi Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Total Koreksi	Keterangan
Koreksi Nilai Jalan dan Jembatan				
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,28	(0,28)	Koreksi Saldo Awal
Koreksi Nilai Instalasi				
Sekretariat Daerah	0,00	166.578.831,00	(166.578.831,00)	Penghapusan Aset SK no.651 TA 2023 (force majeure)
Koreksi Nilai Jaringan				
Dinas Perhubungan	2.374.102.765,00	0,00	2.374.102.765,00	SK Walikota Pekanbaru No 214 Tahun 2023 tg PJU-TS
Sekretariat Daerah	0,00	177.916.744,00	(177.916.744,00)	Penghapusan Aset SK no.651 TA 2023 (force majeure)
JUMLAH	**2.374.102.765,00**	**346.495.575,28**	**2.027.607.189,72**	

Sumber : Laporan Perubahan Ekuitas Kota Pekanbaru TA.2023

e. Koreksi nilai aset tetap lainnya sebesar Rp808.216.608,00 dapat dirinci sebagai berikut;

Tabel 5.6.12. Koreksi Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan terhadap Ekuitas

(dalam rupiah)

Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Total Koreksi	Keterangan
Koreksi Nilai Bahan Perpustakaan				
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	160.399.674,00	-160.399.674,00	Penghapusan Aset Tetap Lainnya SK no. 651
Sekretariat Daerah		145.420.000,00	-145.420.000,00	Penghapusan Aset SK no.651 TA 2023 (force majeure)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	9.541.000,00	-9.541.000,00	Penghapusan barang rusak berat yang tidak digunakan
Koreksi Nilai Tanaman				
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	287.320.934,00	-287.320.934,00	Penghapusan Aset Tetap Lainnya SK no. 651
Sekretariat Daerah		165.625.000,00	-165.625.000,00	Penghapusan Aset SK no.651 TA 2023 (force majeure)
JUMLAH	**0,00**	**808.216.608,00**	**-808.216.608,00**	

Sumber : Laporan Perubahan Ekuitas Kota Pekanbaru TA 2023

f. Koreksi nilai aset tetap konstruksi dalam pengerjaan tercatat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp49.049.390,48 berupa kenaikan ekuitas karena kesalahan pencatatan mutasi aset antar unit dinas kesehatan

4) Koreksi Pencatatan Aset Lainnya

Koreksi pencatatan aset lainnya tercatat sebesar Rp1.793.300.764,00 sebagai pengurang ekuitas dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 5.6.13. Koreksi Nilai Aset Lainnya

(dalam rupiah)

Koreksi Pencatatan Aset Lainnya	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Total Koreksi
Koreksi Nilai Aset Lainnya Tagihan Jangka Panjang	0,00	23.250.230,00	-23.250.230,00
Koreksi Nilai Aset Lainnya Aset Tidak Berwujud	0,00	67.659.166,00	-67.659.166,00
Koreksi Nilai Aset Lainnya Aset Lain-lain	1.004,00	1.702.392.372,00	-1.702.391.368,00
JUMLAH	**1.004,00**	**1.793.301.768,00**	**-1.793.300.764,00**

Sumber : Laporan Perubahan Ekuitas Kota Pekanbaru TA 2023

Koreksi pencatatan nilai aset lainnya tagihan jangka panjang bersumber dari koreksi atas nilai tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp23.250.230,00 yang tercatat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sedangkan koreksi pencatatan atas aset tak berwujud tercatat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp67.659.166,00 serta untuk koreksi atas aset

rusak tercatat sebesar Rp1.702.391.368,00 pada beberapa OPD dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 5.6.14. Koreksi Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan terhadap Ekuitas

(dalam rupiah)

Koreksi Pencatatan Aset Lainnya	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Total Koreksi	Keterangan
Koreksi Nilai Aset Lainnya Aset Lain-lain				
Dinas Pendidikan	10,00	0,00	10,00	Koreksi saldo awal
Dinas Kesehatan	33,00	0,00	33,00	Koreksi saldo awal
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,00	0,00	1,00	Koreksi saldo awal
Dinas Pemadam Kebakaran	5,00	0,00	5,00	Koreksi saldo awal
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81,00	0,00	81,00	Koreksi saldo awal
Dinas Perhubungan	0,00	12,00	-12,00	Koreksi saldo awal
Dinas Pemuda dan Olah Raga	0,00	2,00	-2,00	Koreksi saldo awal
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	1,00	-1,00	Koreksi saldo awal
Sekretariat daerah	0,00	1.681.969.167,00	-1.681.969.167,00	Penghapusan
Sekretariat DPRD	0,00	3,00	-3,00	Koreksi saldo awal
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	4.478.167,00	-4.478.167,00	Penghapusan
Badan Pendapatan Daerah	844,00	0,00	844,00	Koreksi saldo awal
Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	30,00	0,00	30,00	Koreksi saldo awal
Kecamatan Sina Widya	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Penghapusan
JUMLAH	**1.004,00**	**1.702.382.372,00**	**-1.702.391.368,00**	

Sumber : Laporan Perubahan Ekuitas Kota Pekanbaru TA.2023

5) Koreksi Pencatatan Penyusutan Aset Tetap

Penambahan ekuitas sebesar Rp.2,00 merupakan penambahan ekuitas karena koreksi pencatatan penyusutan aset tetap peralatan dan mesin yang tercatat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai koreksi saldo awal.

6) Koreksi Pencatatan Kewajiban

Koreksi pencatatan kewajiban terjadi sebagai akibat koreksi saldo awal kewajiban jangka pendek Tahun 2023 sebesar Rp15.820.920,00 dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 5.6.15. Rincian Koreksi Pencatatan Kewajiban Jangka Pendek terhadap Ekuitas

(dalam rupiah)

No	OPD	Nilai Koreksi Tambah	Nilai Koreksi Kurang	Total Koreksi
1	Dinas Kesehatan	348.460,00	0,00	348.460,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,00	0,00	3,00
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	15.259.405,00	0,00	15.259.405,00
4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	89.582,00	0,00	89.582,00
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	502.790,00	-502.790,00
6	Sekretariat DPRD	0,00	10.000,00	-10.000,00
7	Kecamatan Payung Sekaki	0,00	363.800,00	-363.800,00
JUMLAH		**15.697.470,00**	**876.590,00**	**15.820.920,00**

Sumber : Laporan Perubahan Ekuitas Kota Pekanbaru TA.2023

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS BANDING WALIKOTA PEKANBARU TERHADAP GUGATAN KOLEMAN DKK

Sehubungan dengan penetapan eksekusi Nomor 18/PDT/EKS-PTS/2009/PN.PBR antara KOLEMAN dahulu Kho Bun Huat dkk, sebagai Para Pemohon Eksekusi antara Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri & Otonomi Daerah Cq. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Cq. Walikota Pekanbaru Kepala Daerah Kota Pekanbaru dkk, sebagai para Termohon Eksekusi.

I. Bahwa mengingat penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:18/Pdt/EK-PTS/2009/PN.PBR, yang isinya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi;
- Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru, untuk memanggil Termohon Eksekusi I, Termohon Eksekusi II, Termohon Eksekusi III, Termohon Eksekusi IV dan Termohon Eksekusi V, agar menghadap Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2009 Pukul 09.00 WIB pagi, guna diberi teguran *(Aanmaning)* agar dalam tempo tenggang waktu 8 (delapan) hari memenuhi Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 109/PDT/2002/PTR, tanggal 8 Januari 2003, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap *(Inkracht van gewijsde)*.

II. Pada sidang *Aanmaning* tanggal 22 Juli 2009 tersebut, telah disampaikan secara lisan bahwa Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru menghormati Putusan Pengadilan dalam perkara *a quo*, namun saat ini Pemerintah Kota Pekanbaru hanya dapat memenuhi sebagian Putusan Pengadilan dimaksud.

III. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami sampaikan sebagai berikut:

a. Bahwa Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, menghormati keputusan pengadilan terhadap perkara *a quo*;

b. Bahwa untuk saat ini Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru hanya dapat memenuhi Penetapan Pengadilan untuk ganti rugi bangunan dengan total nominal Rp460.800.000,00 *(empat ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah)*;

c. Bahwa untuk penggantian lainnya, berupa penggantian tanah, hak untuk berdagang/tapak berusaha, dan penghasilan/keuntungan yang diharapkan, untuk saat ini tidak dapat direalisasikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru; dan

d. Bahwa penggantian seperti yang dimaksud pada huruf c di atas, harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pihak legislatif serta Instansi terkait lainnya, sesuai dengan mekanisme yang ada dan mengikuti prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Bahwa menunjuk Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 42/PDT/G/2001/PN.PBR tanggal 14 Maret 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor:109/PDT/2002/PTR, tanggal 18 Januari 2003 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:2544.K/PDT/2003 jo tanggal 21 April 2005 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191.PK/PDT/2008 tanggal 28 November 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde)*:

1. Perkara *a quo* merupakan perkara perdata yang amar putusannya berupa tanggung jawab untuk memenuhi putusan berupa:
   a. Ganti rugi kepada Penggugat sesuai dengan putusan pengadilan senilai Rp14.861.150.000,00 (berdasarkan perhitungan nominal ganti rugi kepada Penggugat senilai Rp14.853.400.000,00); dan
   b. Nilai ganti rugi tersebut berupa:
      - Tanah sebanyak 26 persil senilai Rp3.490.100.000,00;
      - Bangunan sebanyak 18 buah senilai Rp460.800.000,00;
      - Hak untuk Berdagang senilai Rp7.800.000.000,00;
      - Penghasilan yang diharapkan senilai Rp3.102.500.000,00
2. Terhadap isi putusan tersebut harus dipenuhi secara tanggung renteng *(hoofdelijke aansprekelijke)* oleh Para Tergugat:
   a. Walikota Pekanbaru (Tergugat I) senilai ¼ x Rp14.853.400.000,00 = Rp3.713.350.000,00;
   b. Dinas Tata Kota (Dinas Tata Ruang dan Bangunan) selaku Tergugat II senilai ¼ x Rp14.853.400.000,00 = Rp3.713.350.000,00;
   c. PT Makmur Papan Permata selaku Tergugat III senilai ¼ x Rp14.853.400.000,00 = Rp3.713.350.000,00; dan
   d. CV Tieka Jaya selaku Tergugat IV senilai ¼ x Rp14.853.400.000,00 = Rp3.713.350.000,00.
3. Bahwa terhadap putusan perdata, Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) dapat melakukan musyawarah untuk memenuhi putusan pengadilan yang dapat saja berbeda dengan isi putusan pengadilan. Terhadap hal tersebut, Tergugat telah melakukan beberapa kali komunikasi dan musyawarah dengan kuasa Penggugat dan Tergugat telah menyiapkan 3 opsi untuk dimusyawarahkan. Namun, terhadap opsi tersebut kuasa Penggugat belum dapat mengambil keputusan karena harus dibicarakan dengan klien (Penggugat); dan
4. Bahwa dalam perjalanannya kuasa Penggugat terjadi beberapa kali perubahan yang menyebabkan terhadap opsi tersebut belum dapat terjawab.

6.2. STATUS TANAH DAN BANGUNAN BERUPA KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PASAR CIK PUAN JL. TUANKU TAMBUSAI KECAMATAN SUKAJADI PEKANBARU

1. Penguasaan, Pengaturan dan Penyelenggaraan Usaha Terminal Bus dan Oplet serta Tempat-Tempat Parkir Umum oleh Pemerintah Kotamadya Dati II Pekanbaru adalah sejak Tahun 1970 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 153/ VII/ 1970 tanggal 7 Juli 1970;
2. Surat Keputusan Gubernur No. Kpts. 155/ XII/ 1973 tanggal 22 Desember 1973 tentang Penyerahan Kembali Penguasaan, Pengaturan dan Penyelenggaraan Usaha Terminal dan Tempat-Tempat Parkir Umum dalam Daerah Kotamadya Pekanbaru, sekaligus mencabut Surat Keputusan Nomor 153/VII/1970 tanggal 7 Juli 1970;
3. Berdasarkan Buku Inventarisasi Barang (Tanah) Pemerintah Kotamadya Dati II Pekanbaru tanggal 23 September 1992 tercatat bahwa:
   a) Tanah Terminal Bus Jalan Nangka Sukajadi, asal Ganti Rugi kepada masyarakat Tahun 1968.
   b) Tanah Pasar dan Kios Pasar Cik Puan Jalan Nangka Sukajadi, luas 7.965 m^2 asal ganti rugi kepada masyarakat. Dan sampai saat ini, aset tanah Cik Puan masih tercatat pada KIB A (Tanah) Pemerintah Kota Pekanbaru pada SKPD Dinas Pasar seluas 7.965 m^2 dengan nilai perolehan Rp23.895.000.000,00
4. Dalam Notulen Rapat yang dihadiri oleh Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah pada Tanggal 10 Oktober 2003 di Ruang Sekretaris Daerah Propinsi Riau dengan tanggapan dan penjelasan Sekretaris Daerah Propinsi Riau mengenai status tanah Terminal Mayang Terurai dan Pasar Pagi Cik Puan dengan Luas 35 Ha, menurut sejarah dibeli oleh Pemerintah Propinsi Riau. Pada Notulen Rapat tersebut diusulkan sebagai berikut:
   a) Sebaiknya Tanah Terminal Mayang Terurai Luas 15.875 m^2 sertifikatnya diurus oleh Pemerintah Provinsi Riau;
   b) Sedangkan Tanah Pasar Pagi Seluas 7.965 m^2 diurus oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
5. Berdasarkan Surat Pernyataan Pemerintah Kota Pekanbaru yang ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan tanggal 16 Mei 2005 menyatakan dengan sesungguhnya Pemerintah Kota Pekanbaru menguasai/memiliki sebidang tanah terletak di Jalan Tuanku Tambusasi/Nangka Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Luas 7.965 m^2 dipergunakan untuk Pasar Cik Puan. Pernyataan tersebut diketahui oleh Lurah dan Camat sebagai Penjabat Pelegalitas dan selanjutnya disampaikan ke BPN Kota Pekanbaru;
6. Pada Tahun 2007, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Surat Walikota Pekanbaru Tanggal 21 September 2007 menyampaikan kepada Gubernur untuk Rencana Pembangunan Pasar di Jalan Nangka di areal Seluas 22.941 m^2 yang terdiri dari Ex. Pasar Cik Puan Seluas 7.965 m^2 dan Lokasi Terminal Mayang Terurai seluas 14.976 m^2;
7. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor Kpts.1923/XI/2008 Tanggal 11 November 2008 tentang Pengesahan Hak Pengelolaan/Pemakaian Tanah Milik

Pemerintah Propinsi Riau untuk Pembangunan Pasar Terminal Cik Puan dan Terminal Angkutan Kota kepada Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, dan pada diktum KEDUA Surat Keputusan tersebut menyebutkan luas tanah 22.941 m^2 tercatat dalam daftar kekayaan Milik Pemerintah Propinsi Riau;

8. Surat Walikota kepada Gubernur Riau Nomor 109/PP/XI/2008 tanggal 17 November 2008 perihal Rencana Pembangunan Pasar Tradisional Cik Puan, meminta kepastian hukum dan perlu adanya kajian terhadap lahan dimaksud pada angka 6;
9. Pada Tahun 2008 Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru melalui Surat Nomor 98/PP/X/2008 tanggal 7 Oktober 2008 mengajukan Permohonan Pengukuran Tanah Pasar Cik Puan dan Terminal Mayang Terurai Ke Kantor BPN Kota Pekanbaru;
10. Berdasarkan Surat Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor 500/680/IV/2009 tanggal 20 April 2009 perihal tanah Ex. Terminal Mayang Terurai dan Pasar Cik Puan menyatakan tanah dimaksud adalah Milik Pemerintah Provinsi Riau, disarankan agar Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau melakukan musyawarah tentang Kepemilikan;
11. Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Propinsi Riau Nomor 501/PP/2010 tanggal 23 Agustus 2010 perihal Penghentian Sementara Aktivitas Pembangunan di atas lahan tersebut, maka pembangunan di atas tanah ex Pasar Cik Puan pun dihentikan;
12. Dengan adanya monitoring dan evaluasi dari Tim KORSUPGAH KPK dari tahun 2019 terhadap Manajemen Aset, terbit Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 031/BPKAD/-PBMD/698.2 dan Nomor 032/BPKAD-Peng.Aset/511/2019 pada tanggal 14 Agustus 2019 guna menyikapi Penyelesaian Permasalahan Aset Daerah Lintas Pemerintah Daerah dan salah satunya adalah aset tanah Cik Puan. Atas Berita Acara dimaksud, telah ditindaklanjuti dengan Permohonan Surat Keputusan Hibah oleh Walikota Pekanbaru kepada Gubernur Riau Nomor 032/BPKAD-ASET/2891/2019 Tanggal 20 November 2019.
13. Sejalan proses koordinasi serta penyelesaian administrasi sesuai regulasi antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan bantuan mediasi oleh tim KPK RI, akhirnya pada tanggal 26 April resmi ditandatangani Berita Acara Hibah Barang Milik Daerah antara kedua belah pihak dengan Nomor 96/BA/2021 dan Nomor 032/BPKAD-ASET/19/2021 dimana Pemerintah Provinsi Riau menghibahkan beberapa persil tanah dan termasuk salah satu diantaranya adalah tanah pasar Cik Puan beserta eks Terminal Mayang Terurai seluas 22,941 m^2.
14. Hingga saat ini, bangunan pasar modern di tanah Pasar Cik Puan masih tercatat sebagai Konstruksi Dalam Pembangunan (KDP) pada Dinas Cipta Karya yang sekarang menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sejak Tahun 2009 dengan nilai pekerjaan Rp14.573.750.520,00. Untuk kedepannya, sedang dipersiapkan audit kelayakan struktur bangunan dan persiapan langkah-langkah pemanfaatan aset.

15. Pada tanggal 19 Februari 2023, kembali terjadi musibah kebakaran pada los kios yang dibangun diatas tanah Pasar Cik Puan. Bangunan dimaksud tidak tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Pekanbaru disebabkan bersumber dari swadaya masyarakat. Dari total los kios yang kurang lebih berjumlah 500 unit, 400 unit diantaranya hangus terbakar. Saat ini Pemerintah Kota Pekanbaru sedang mempersiapkan pembangunan TPS (Tempat Penampungan Sementara) bagi para pedagang yang terdampak bencana kebakaran, yang bersumber dari Belanja Tidak terduga (BTT) APBD Pemerintah Kota Pekanbaru TA. 2023.

6.3. INFORMASI PENYERTAAN MODAL

Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya. Peraturan Daerah tersebut pada pokoknya bertujuan untuk penyertaan modal berupa aset tanah seluas lebih kurang 2.659.687 m^2 senilai Rp124.366.017.460,00. Oleh karena Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2019 belum secara eksplisit menyebutkan pihak mana yang akan disertakan modal berupa aset tanah Kawasan Industri Tenayan (KIT) senilai Rp124.366.017.460,00 tersebut, maka pada tanggal 21 Februari 2020 diterbitkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya. Atas dasar Perda dimaksud, dilaksanakan Berita Acara Serah Terima Penyerahan Barang Milik Daerah atas Penyertaan Modal Kawasan Industri Tenayan (KIT) Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Pekanbaru kepada PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru Nomor : 032/BPKAD-PENG.ASET/760/2020 dan Nomor : 56/ BA/SPP/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020. Sehubungan BAST dimaksud, telah dilakukan penghapusan aset tetap atas tanah Kawasan Industri Tenayan (KIT) dengan Nilai Perolehan Rp6.273.000.000,00 dengan SK Walikota Nomor 614 Tahun 2020 tanggal 12 November 2020.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2015 dan Perda Nomor 5 Tahun 2022 atas Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya yaitu kepada PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru telah merealisasikan penambahan Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Siak dengan SP2D Nomor: 10862/SP2D/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00

Sampai dengan akhir tahun 2023, total penyertaan modal Pemerintah Kota Pekanbaru kepada BUMD sebesar sebagai berikut:

a. PD. Pembangunan (PT. SPP) Kota Pekanbaru sebesar Rp147.616.517.460,00 (seratus empat puluh tujuh miliar enam ratus enam belas juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh rupiah) setelah ditambah aset tanah Kawasan Industri Tenayan (KIT) senilai Rp124.366.017.460,00;

b. PDAM Tirta Siak Pekanbaru sebesar Rp168.581.276.100,00 (seratus enam puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah);

c. PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

d. PT. Bank Riau Kepri sebesar Rp15.647.400.000,00 (lima belas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

e. PT. Riau Airlines sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah); dan

f. PT. Bumi Siak Pusako sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

6.4. GUGATAN PERDATA OLEH PT. MULTI INTI GUNA

Pada Tahun 2015, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru melakukan kerjasama pengangkutan sampah dengan PT. Multi Inti Guna (MIG) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 25/KONTR-DKP/PERSAMPAHAN/XII/2015 tanggal 3 Nopember 2015. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan tersebut telah dilakukan dengan addendum Nomor 25.a/ADD.I/KONTR-DKP/PERSAMPAHAN/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015.

Dalam addendum kontrak tersebut dinyatakan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengelolaan pengangkutan sampah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
2. Sampah yang diangkut adalah:
   a. Sampah rumah tangga;
   b. Sampah sejenis sampah rumah tangga;
3. Penanganan sampah di sepanjang jalan protokol, dan jalan-jalan yang ada di 8 (delapan) kecamatan yang akan dikelola oleh penyedia, selanjutnya sampah diangkut dan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Muara Fajar;
4. Pengumpulan sampah dari pemukiman masyarakat (*door to door*) menuju TPS;
5. Pengumpulan sampah dari TPS (Tempat Pembuangan Sementara) baik yang dibangun oleh masyarakat dan swasta lainnya ke TPA Muara Fajar;
6. Melaksanakan penanganan pengangkutan sampah pada **prioritas primer** yaitu (a) Perdagangan Regional; (b) Pemerintahan; (c) Pelabuhan Penumpang dan Barang; (d) Terminal AKAP; (e) Pelabuhan Udara; (f) Industri; (g) Pergudangan; (h) Pendidikan Tinggi; (i) Rumah Sakit; dan (j) *Sport Center* dan penanganan pada **prioritas sekunder** adalah (a) Perdagangan Kota; (b) Niaga/Komersial; (c) Pusat Kecamatan dan Wilayah Pengembangan; (d) Terminal Kota; dan (e) Permukiman ke TPA Muara Fajar;

7. Penyapuan dan pembersihan sisa sampah yang berada di sekitar lokasi TPS, setelah sampah diangkat ke dalam mobil angkutan;
8. Penyedia didampingi pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru untuk berkoordinasi dengan pihak Kecamatan, Kelurahan, RT/RW tentang pola pengangkutan sampah di lingkungan perumahan/pemukiman secara terpadu, teratur dan terus menerus serta bekerja sama dengan organisasi masyarakat (LPM/Pribadi/dll);
9. Pengadaan armada pengangkutan sampah sesuai yang dibutuhkan, peralatan dan suku cadang serta bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan;
10. Penyediaan tenaga kerja sesuai dengan jumlah dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan dengan mengutamakan/memberdayakan Tenaga Harian Lepas (THL) yang telah bekerja sebelumnya di bawah naungan Kecamatan dan Dinas terkait.
11. Penyediaan alat-alat pendukung untuk melaksanakan pekerjaan;
12. Target tonase sampah yang diangkut adalah sebanyak 610 ton per hari.

Dari evaluasi pelaksanaan kontrak oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan sering kali ditemukan PT. MIG tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan evaluasi tersebut, Dinas Kebersihan dan Pertamanan telah memberikan Surat Peringatan kepada PT. MIG sebanyak 35 kali. Selain itu, Dinas Kebersihan dan Pertamanan juga telah mengeluarkan surat teguran sebanyak 3 kali.

Selanjutnya, dengan pertimbangan PT. MIG tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian meski telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja, maka melalui Surat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 232/DKP/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 perihal Pemutusan Kontrak Kerjasama Pengangkutan Sampah, terhitung tanggal 15 Juni 2016 (tanggal dikeluarkannya surat) PA/PPK menyatakan **pemutusan kontrak sepihak dengan PT. Multi Inti Guna selaku Penyedia.**

Atas pemutusan kontrak tersebut, PT. MIG telah mendaftarkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor 252/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 25 Oktober 2016.

Pada tanggal 29 Mei 2017 Majelis Hakim membacakan putusannya di mana amar putusannya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*);
3. Menyatakan Pemutusan Surat Perjanjian Jasa Angkutan Persampahan Nomor 25/KONTR-DKP/PERSAMPAHAN/XI/2015 tanggal 03 November 2015 jo. Addendum Pertama Nomor 25.a/ADD.I/KONTR-DKP/PERSAMPAHAN/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 antara Tergugat I dengan Penggugat sebagaimana dimaksud didalam surat Tergugat II Nomor 232/DKP/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 perihal Pemutusan Kontrak Kerjasama Pengangkutan Sampah, adalah tidak sah dan dibatalkan;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memperbaharui dan/atau melakukan addendum terkait klausula pencapaian target volume sampah secara bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat I dan memperpanjang masa berlaku Surat Perjanjian Jasa Angkutan Persampahan Nomor 25/KONTR-DKP/PERSAMPAHAN/XI/2015 tanggal 03 November 2015 jo. Addendum Pertama Nomor 25.a/ADD.I/KONTR-DKP/PERSAMPAHAN/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 antara Tergugat I dengan Penggugat, sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama instansi terkait, untuk melakukan opname hasil kerja yang telah dicapai oleh Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar hasil pekerjaan yang telah dicapai oleh Penggugat sesuai hasil opname tersebut secara seketika dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat secara seketika dan sekaligus akibat kerugian materil yang diderita oleh Penggugat, sejumlah uang Rp 12.771.343.138,00 (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 563.980,00 (lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan putusan Hakim tersebut Walikota Pekanbaru tidak menerima hasil putusan tersebut, dan memerintahkan untuk melakukan upaya hukum banding. Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan banding pada tanggal 08 Juni dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 252/Pdt-G/2016/PN/Pbr, dan memasukkan Memori Banding pada tanggal 12 Juli 2017.

Pada tanggal 07 Desember 2017 Pengadilan Negeri Pekanbaru menyampaikan Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 192/PDT/2017/PT.PBR jo Nomor 252/Pdt-G/2016/PN/Pbr yang isi putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan dari Pembanding I, II semula Tergugat I, II;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 252/Pdt-G/2016/PN/Pbr tanggal 29 Mei 2017 yang dimohonkan Banding tersebut;

3. Membebankan biaya perkara Pembanding I, II semula Tergugat I, II dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Terkait dengan putusan Banding tersebut Walikota Pekanbaru kembali memerintahkan untuk melakukan upaya hukum Kasasi. Oleh karena itu Tergugat I, II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kasasi pada tanggal 20 Desember 2017 dengan Akta Penyataan Permohonan Kasasi Nomor 252/Pdt-G/2016/PN.Pbr *juncto* Nomor 192/PDT/2017/PT.PBR. kemudian kuasa Tergugat I, II telah menyerahkan Memori Kasasi pada tanggal 03 Januari 2018.

Atas kasasi tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan keputusan Nomor 1365 K/Pdt/2018, yang isi putasannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*);
3. Menyatakan Pemutusan Surat Perjanjian Jasa Angkutan Persampahan Nomor 25/KONTR-DKP/PERSAMPAHAN/XI/2015 tanggal 03 November 2015 *juncto* Addendum Pertama Nomor 25.a/ADD.I/KONTR-DKP/PERSAMPAHAN/ XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 antara Tergugat I dengan Penggugat sebagaimana dimaksud di dalam surat Tergugat II Nomor 232/DKP/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 perihal Pemutusan Kontrak Kerjasama Pengangkutan Sampah, adalah tidak sah dan dibatalkan;
4. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat secara seketika dan sekaligus akibat kerugian materil yang diderita oleh Penggugat, sejumlah uang Rp12.771.343.138,00 (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp563.980,00 (lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; dan
7. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

TINDAK LANJUT HASIL GUGATAN

Berdasarkan akibat kerugian materil yang di derita oleh Penggugat, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Tahun Anggaran 2022 telah melakukan pembayaran atas kerugian tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.1. Utang Belanja Karena Gugatan oleh PT Multi Inti Guna (MIG)

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Kerugian Materil	12.771.343.136,00	12.771.343.138,00
2	Rincian Pembayaran (SP2D)		
	No. 00776/SP2D/II/2022 tanggal 25/02/2022	2.500.000.000,00	10.000.000.000,00
	No. 06338/SP2D/V/2022 tanggal 31/05/2022	2.500.000.000,00	
	No.10842/SP2D/IX/2022 tanggal 02/09/2022	2.500.000.000,00	
	No. 00274/SP2D/II/2023 tanggal 07/02/2023	2.500.000.000,00	
3	**Sisa Pembayaran**		**2.771.343.138,00**

6.5. DAMPAK PASCA *CORONA VIRUSE DISEASE 2019 (COVID-19)* PADA PENDAPATAN YANG BERSUMBER DARI KERJASAMA BGS PEREMAJAAN BEBERAPA PASAR

Sehubungan adanya ancaman global akibat menyebarnya *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di dunia pada tahun 2019, dan di Indonesia pada Maret 2020, berdampak membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Dalam hal ini yang turut merasakan dampaknya adalah beberapa kerjasama Pemerintah Kota Pekanbaru dengan mitra dalam hal BGS Peremajaan beberapa pasar. Berikut ini beberapa perjanjian kerjasama BGS yang turut terdampak sehingga mengalami kendala dalam hal pembayaran royalti/kontribusi tetap, antara lain sebagai berikut :

1. PT. Makmur Papan Permata sebagai Mitra Kerjasama Peremajaan Pasar Sukaramai/Sukaramai Trade Center

Pada perjanjian kerjasama kemitraan pengelolaan Pasar Sukaramai dengan mitra yakni PT. Makmur Papan Permata (PT.MPP), berdasarkan perjanjian nomor 270-WK/1996 dan 018/MPP/XI/1996 tanggal 30 November 1996 dan Adendum Perjanjian Kerjasama pasca musibah kebakaran Pasar Sukaramai pada tanggal 8 Desember 2015 dengan nomor 100/PKS/X/2016/15 dan 06/MPP/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016. Selanjutnya kembali diadendum pada tanggal 8 Januari 2018 dengan perjanjian nomor 100/KERJ/I/07/2018 dan nomor 01/MPP/I/2018 yang menyepakati mengenai pemanfaatan sebagian tanah jalan Imam Bonjol yang beralih fungsi menjadi pintu masuk, akses jalan lingkungan dalam Kawasan serta lahan parkir.

Sehubungan dengan perjanjian kerjasama berserta adendum diatas, Pemerintah Kota Pekanbaru berhak atas royalti dan pembagian keuntungan antara lain sebagai berikut :

a) PT. MPP berkewajiban membayar royalti/kontribusi ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru sebesar Rp100.000.000,00 per tahun atau 25% dari hasil laba bersih pengelolaan bangunan (telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekanbaru bahwa yang disetorkan adalah sebesar Rp100.000.000,00 untuk menghindari kerancuan);
b) Atas addendum pertama pada tahun 2016, PT. MPP berkewajiban membayar royalti/kontribusi tambahan s.d 16 Oktober 2046 dengan total sebesar Rp10.689.950.858,56;
c) Pemerintah Kota Pekanbaru berhak menerima bagian laba bersih dari pengelolaan taman parkir sebesar 30% setelah dipotong pajak sesuai dengan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Pada 21 Desember 2020 dan 12 Maret 2021, PT. MPP mengajukan permohonan penundaan jadwal pembayaran royalti/kontribusi tahunan tahun 2020 yang disebabkan oleh dampak dari wabah *COVID-19* yang membuat penjualan atas toko tidak maksimal. Atas surat tersebut, pada tanggal 22 Maret 2021 Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan jawaban dengan meminta PT. MPP mengirimkan Laporan Keuangan *Audited* tahun 2020 dan dokumen pendukung lainnya sebagai dasar Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menetapkan kebijakan terkait penundaan jadwal pembayaran royalti dan/atau penghapusan denda keterlambatan. PT. MPP telah menyampaikan hasil Laporan Keuangan *Audited* dari tahun 2016 s.d 2020, dan berdasarkan laporan dimaksud menyajikan bahwa PT.MPP mengalami kerugian meskipun angka rasio lancar perusahaan masih lebih dari 1.

Pada saat rapat koordinasi perangkat kerja terkait bersama PT. MPP terakhir pada tanggal 16 Februari 2022, PT. MPP masih mengalami kendala dalam pembayaran royalti/kontribusi tetap akibat pemulihan pasca bencana kebakaran dan ditambah dengan adanya bencana global pandemi *COVID-19*, sehingga piutang jatuh tempo tercatat s.d. tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a) Kontribusi tetap atas perjanjian awal 2020 dan 2021 senilai **Rp200.000.000,00;**
b) Kontribusi tetap tambahan atas adendum perjanjian tahun 2019-2020 senilai **Rp594.930.000,00;**
c) Denda keterlambatan atas kontribusi tetap akibat perjanjian awal dan addendum perjanjian (temuan LHP BPK atas LKPD Pemko Pekanbaru TA. 2020) senilai Rp125.000.000,00 dan Rp70.825.000,00 atau total sebesar **Rp195.825.000,00.**

Tindak lanjut dari hasil pertemuan tersebut, PT. MPP telah menyurati Pemerintah Kota Pekanbaru dengan nomor 001.23/MPP-CAB/PKU/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 Perihal : Permohonan Tata Cara Pembayaran Kewajiban Royalti/Kontribusi, Denda dan PBB yang antara lain berisi bahwa :

a) PT. MPP telah pernah mengangsur denda keterlambatan pembayaran kontribusi tahun 2016 sebesar Rp45.000.000,00 , sehingga total denda keterlambatan yang diakui PT. MPP hanya sebesar **Rp150.825.000,00**
b) PT. MPP selanjutnya bermohon terkait pembayaran kewajiban royalti/kontribusi tetap sekaligus pembayaran denda hasil temuan LHP BPK

RI serta PBB, akan dibayarkan secara proporsional setiap bulannya dimulai dari 16 Mei 2022 dan berakhir pada 16 April 2025 (36 bulan).

Terkait hal dimaksud, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Tim Percepatan Tindak Lanjut Temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2020 terkait Kontribusi dan Sanksi Administratif Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada PT. PMJ dan PT. MPP berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 1032 Tahun 2021, saat ini sedang menyiapkan administrasi penetapan persetujuan pemberian keringanan dalam hal pola pembayaran kontribusi tetap dan denda administratif kepada PT. PMJ dan PT. MPP selama masa pandemi *COVID-19*. Hal ini dimuat dalam SK Walikota Pekanbaru Nomor 374 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Keterlambatan Pembayaran Royalti/Kontribusi Tahun 2020-2021 dan Pola Pembayaran Angsuran Atas Royalti/Kontribusi Tahun 2020-2021 sebagai Dampak Penyebaran Wabah *Corona Virus Disease* 2019 kepada PT. Makmur Papan Permata.

Menindaklanjuti penetapan dimaksud, PT MPP sampai kurun waktu Tahun 2023 telah melakukan beberapa hal sebagai berikut :

a) Menyelesaikan denda keterlambatan atas kontribusi tetap akibat perjanjian awal dan addendum perjanjian (temuan LHP BPK atas LKPD Pemko Pekanbaru TA. 2020) senilai Rp80.000.000,00 dan Rp70.825.000,00 atau total sebesar **Rp150.825.000,00;**
b) Menyelesaikan pembayaran kontribusi tetap atas perjanjian awal untuk 2020 s.d 2021 senilai **Rp200.000.000,00;**
c) Mengangsur keterlambatan kontribusi tetap tambahan atas adendum perjanjian untuk tahun 2019-2020 yang jatuh tempo pada 16 Oktober 2020 dan 16 Oktober 2021 senilai **Rp594.930.000,00** yang rutin diangsur per bulan pada tahun berjalan oleh PT. MPP dan ditargetkan selesai pada April 2024.

2. PT. Peputra maha Jaya sebagai Mitra Kerjasama Peremajaan Pasar Senapelan

Mengacu kepada perjanjian antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan pihak PT. Peputra Maha Jaya (PT. PMJ) nomor 131 Tahun 2002 dan nomor 497/OMJ/VII/2002 tanggal 3 Agustus 2002 yang menyepakati beberapa hal yang menjadi hak Pemerintah Kota Pekanbaru , antara lain sebagai berikut :

a) Pihak Pengelola Pasar Senapelan wajib memberikan kompensasi atas tanah dan bangunan senilai Rp2.500.000.000,00;
b) Pihak Pemerintah Kota Pekanbaru berhak menerima royalti atas penggunaan tanah sebesar **37% (tiga puluh tujuh persen) dari total penerimaan biaya pelayanan jasa, setelah dipotong biaya pemeliharaan (*maintenance fee*)** terhitung mulai pasar beroperasi sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama, sesuai laporan keuangan yang yang telah diaudit oleh akuntan publik **atau minimal sebesar Rp110.000.000,00**;
c) Pihak Pemerintah Kota Pekanbaru berhak menerima bagian laba bersih sebesar 30% dari laba/keuntungan bersih pengelolaan taman parkir setelah dipotong pajak sesuai dengan laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik.

Selanjutnya pada tanggal 23 September 2020 dilakukan adendum perjanjian kerjasama peremajaan Pasar Senapelan antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan pihak PT. PMJ didepan notaris Rina Hamzah, SH, MM, M.Kn dengan nomor 21 disebabkan adanya pengalihan fungsi sebagian bangunan kios pasar menjadi hotel. Adendum akibat pengalihan fungsi ini menyebabkan Pemerintah Kota Pekanbaru berhak menerima **penambahan kontribusi tetap** yang naik progresif setiap tahunnya semenjak tahun 2016 terhitung saat hotel mulai beroperasi.

Pada 20 Juli 2020, 14 Oktober 2020, 30 November 2020 dan 23 Desember 2020, PT. PMJ mengajukan permohonan pembebasan royalti tahun 2020 yang disebabkan wabah *COVID-19* yang berdampak atas penurunan jumlah pengunjung. Atas surat dimaksud telah diberikan jawaban pada tanggal 22 Maret 2021 bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru tidak dapat memberikan penghapusan/pembebasan royalti dan meminta PT. PMJ mengirimkan laporan keuangan audited tahun 2020 dan dokumen pendukung lainnya sebagai dasar Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menetapkan kebijakan terkait penundaan jadwal pembayaran *royalti* dan/atau penghapusan denda keterlambatan.

Hingga rapat koordinasi satker terkait bersama PT. PMJ terakhir pada tanggal 21 Desember 2021, PT. PMJ masih mengalami kendala dalam pembayaran kontribusi tetap pasar dan hotel akibat adanya bencana global pandemik *COVID-19*, sehingga piutang jatuh tempo tercatat s.d. tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a) Kontribusi tetap atas pasar 2020 dan 2021 senilai **Rp220.000.000,00**
b) Kontribusi tetap atas penambahan fungsi hotel 2016-2018, 2020-2021 senilai **Rp194.396.300,00**
c) Bagi hasil laba parkir senilai **Rp161.506.410,00** (temuan *LHP* BPK atas LKPD Pemko Pekanbaru TA. 2020)
d) Disamping itu terdapat LHP BPK atas LKPD Pemko Pekanbaru TA. 2020 tentang kekurangan pembayaran royalti/kontribusi tetap oleh PT. PMJ sebesar **Rp4.019.492.615,00** disebabkan penafsiran dari kalimat perjanjian bahwa "Pihak Pemerintah Kota Pekanbaru berhak menerima royalti atas penggunaan tanah sebesar **37% (tiga puluh tujuh persen) dari total penerimaan biaya pelayanan jasa, setelah dipotong biaya pemeliharaan (*maintenance fee*)** terhitung mulai pasar beroperasi sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama, sesuai laporan keuangan yang yang telah diaudit oleh akuntan publik **atau minimal sebesar Rp110.000.000,00**".

Atas temuan ini, pihak Pemerintah Kota Pekanbaru telah melayangkan beberapa kali surat teguran kepada pihak PT. PMJ antara lain dan mendapatkan balasan surat terakhir dengan nomor 206/M-087/PMJ-LGL/XI/2021 tanggal 26 November 2021, yang intinya bersedia melakukan klarifikasi dan telah diselenggarakan pertemuan pada tanggal 21 Desember 2021. Dari hasil rapat, terkait point temuan a) dan b) diatas, PT. PMJ berharap adanya keringanan pola pembayaran dan bersedia menyerahkan laporan keuangan *audited* dan dokumen pendukung lainnya sebagai bukti tertulis. **Namun hingga saat ini, dokumen tersebut belum disampaikan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru**. Terkait temuan point c) dan d), PT. PMJ telah mengajukan keberatan melalui surat resmi nomor 025/M-013/PMJ-LGL/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal "**Keberatan atas pembayaran royalti dan**

kontribusi pemanfaatan BOT/BGS Pasar Senapelan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" beserta lampiran kajian hukum oleh Tim Ahli.

Dalam tahun 2022, PT. PMJ telah mengirimkan Laporan Keuangan Audited untuk Tahun 2019 dan 2020, namun belum untuk Tahun 2021 serta belum disertai dokumen pendukung lainnya dalam rangka pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru terkait penundaan jadwal pembayaran *royalti* dan/atau penghapusan denda keterlambatan. Dalam tahun berjalan (tahun 2023), PT. PMJ telah mulai mengangsur tunggakan dengan rincian antara lain :

a) Kontribusi tetap atas pasar 2020 dan 2021 senilai **Rp220.000.000,00;**
b) Kontribusi tetap atas penambahan fungsi hotel 2020 dan 2021 senilai **Rp38.866.000,00** ditambah **Rp40.809.300.**

Disamping itu, selama tahun 2022 dan 2023, tunggakan atas kontribusi tetap pasar dan hotel telah bertambah sebanyak **Rp220.000.000,00** dan **Rp40.809.300** ditambah **Rp42.849.765** (belum termasuk perhitungan denda keterlambatan). Pemerintah Kota Pekanbaru melalui BPKAD Kota Pekanbaru telah menyurati pihak PT. PMJ terkait pelaporan audited PT. PMJ , Tindak Lanjut LHP BPK serta penyelesaian kewajiban lainnya melalui surat nomor 14.04.00/BPKAD-ASET/II/97 tanggal 20 Februari 2023.

3. PT. Agung Rafa Bonai sebagai Mitra Kerjasama BGS Pasar Induk

Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Pekanbaru menandatangani perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan Pasar Induk Kota Pekanbaru dengan PT. ARB melalui perjanjian kerjasama nomor 100/PKS/X/2016/20 dan nomor 07/ARB-KSO/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016. Selanjutnya perjanjian tersebut diadendum dengan perjanjian nomor 100/KERJASAMA/38/X/2018 dan nomor 08/ARB-KSO/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang berisi penambahan jangka waktu pembangunan Pasar Induk, dari semula 24 (dua puluh empat) bulan semenjak perjanjian ditandatanguni, mundur menjadi tanggal 19 Oktober 2019.

Dalam perjanjian kerjasama tersebut diatas, Pemerintah Kota Pekanbaru berhak memperoleh kontribusi tahunan dengan total Rp 17.552.226.275,00, memperoleh paling sedikit 10% dari keseluruhan hasil BGS untuk digunakan langsung dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah serta menerima 25% bagian laba bersih dari laba parkir, iklan dan bongkar muat.

Hingga rapat koordinasi terakhir pada tanggal 11 Maret 2022, PT. ARB baru menyelesaikan **60% dari keseluruhan target pembangunan BGS**, serta baru membayarkan 2 (dua) tahun kontribusi tahunan yakni untuk pembayaran tahun 2016 dan 2017, sehingga total piutang jatuh tempo tercatat s.d. tahun 2021 adalah sebesar **Rp779.455.901,00** (kontribusi tahun 2018, 2019 dan 2020). Nilai ini diluar hasil temuan BPK RI terkait denda keterlambatan sebesar **Rp56.198.348,04** (untuk keterlambatan pembayaran tahun 2017 dan 2018). Hasil konfirmasi Pihak PT. ARB kepada BPK RI mengenai sebab keterlambatan pembangunan dan pembayaran kontribusi tetap ini antara lain adalah :

a) Adanya keterlambatan keluarnya Izin Pembangunan Pasar Induk pada tanggal 31 Juli 2017 dan baru diterima PT. ARB pada tanggal 26 Oktober 2017,

sehingga pembangunan tidak dimulai sesuai dengan perjanjian awal. Atas kondisi tersebut, telah dilakukan adendum masa pembangunan selama setahun hingga Oktober 2019.

b) Adanya kendala dari pendanaan dikarenakan awalnya ada 3 perusahaan untuk pendanaan (KSO), namun dalam perjalanan hanya satu perasahaan saja yakni PT. ARB yang mendanai pembangunan pasar.
c) Dari hasil wawancara dengan Direktur PT. ARB diketahui bahwa progress fisik dari Februari 2020 s.d. saat ini, belum mengalami peningkatan yakni masih pada angka 60%. Hal ini disebabkan adanya wabah pandemik COVID-19 dan keterbatasan keuangan perusahaan.
d) Masalah lain yang menjadi permasalahan adalah adanya miskomunikasi antara Pemerintah Kota Pekanbaru pada saat itu melalui Dinas Pasar Kota Pekanbaru yang bersepakat dengan PT. ARB mengenai proses balik nama alas hak kepemilikan Pasar Induk menjadi sertifikat HPL akan diurus dan ditanggung biayanya oleh pihak PT. ARB. Sehingga alas hak kepemilikan Pasar Induk tersebut langsung diserahkan kepada PT. ARB pada tahun 2016. Namun akibat Dinas Pasar melebur ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan karena terbitnya Peraturan Daerah mengenai SOTK Pemerintah Kota Pekanbaru terbaru ditahun 2017, proses sertifikasi ini ternyata tidak berlanjut. Hingga akhirnya, pada bulan Juli tahun 2020 dokumen alas hak kepemilikan tersebut diserahkan kembali kepada Pemerintah Kota Pekanbaru melalui BPKAD Kota Pekanbaru. Selanjutnya atas dokumen alas hak dimaksud telah diserahkan oleh BPKAD kepada Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru pada tanggal 3 Juli 2020 untuk pengurusan sertifikat HPL. Kondisi hingga saat ini, Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru dalam proses penerbitan SK HPL di Kementerian ATR RI. Kendala ini menjadi salah satu justifikasi bagi PT. ARB sehingga tidak dapat menerbitkan sertifikat HGB diatas tanah HPL yang dapat menjadi alternatif solusi pendanaan tambahan dalam hal pembiayaan dari perbankan.

Menurut penyampaian dari pihak PT. ARB, telah disampaikan sebanyak 2 (dua) kali permohonan adendum dan penangguhan royalti kepada Pemerintah Kota Pekanbaru. Surat pertama dengan nomor 20/ARB-IDK-PKU/XI/2020 pada tahun 2021 ditujukan kepada Walikota Pekanbaru, dan surat terakhir dengan nomor 07/ARB-IDK-PKU/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 perihal Permohonan Adendum Ke-3. Dalam pengajuan PT. ARB, memuat beberapa poin mengenai hal-hal yang akan diadendum, antara lain:

a) Adendum pelaksanaan jangka waktu BGS Pasar Induk diubah dari semula terhitung mulai perjanjian ditandatangani berubah menjadi terhitung dari terbitnya HGB;
b) Pemko Pekanbaru berkomitmen untuk tidak menerbitkan izin terhadap pasar-pasar sejenis dalam radius 5 kilometer;
c) Pemko Pekanbaru bersedia memberikan pembebasan atas kontribusi tetap PT. ARB yang tertunggak dan dimulai pembayaran terhitung sejak Pasar Induk mulai beroperasi;
d) Pihak PT. ARB boleh mengalihkan fungsi sebagian luasan lahan dalam rangka optimalisasi perdapatan.

c) Pemko Pekanbaru berkewajiban untuk memindahkan pedagang kedalam areal Pasar Induk sebagaimana komitmen Perjanjian Awal.

Disisi lain, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyampaikan Surat Teguran Pertama dan Kedua kepada pihak PT. ARB sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Terkait surat permohonan yang disampaikan oleh PT. ARB, telah dijawab resmi oleh OPD terkait disertai permintaan dokumen pendukung, penunjukan konsultan pengawas serta Laporan Keuangan *Audited* oleh PT. ARB selama kurun waktu tertagih guna merumuskan kebijakan lebih lanjut. Namun hingga saat ini, belum mendapat respon dari PT. ARB. Sebagai informasi tambahan, pada tanggal 30 Agustus 2022, telah terbit Sertifikat HPL atas aset tanah Pasar Induk dengan Nomor 00016 oleh Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia. *Update* untuk kondisi total piutang jatuh tempo tercatat s.d. tahun 2023 adalah sebesar **Rp1.381.351.627** (untuk kontribusi tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022) diluar perhitungan denda tahun berjalan.

6.6. PENJELASAN TENTANG PENGELOLAAN TANAH DENGAN SERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN LAHAN (HPL) MILIK PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

Kronologis Pengelolaan tanah HPL Pemerintah Kota Pekanbaru , antara lain sebagai berikut :

I. Pada LHP BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2014, terdapat tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang belum tercatat pada Neraca Kota Pekanbaru minimal sebesar Rp. 197.232.146.000,-. Adapun lokasi HPL dimaksud yaitu :

Tabel 6.2 Lokasi Tanah HPL Pemerintah Kota Pekanbaru

NO	ALAMAT TANAH	LUAS/NYANG BELUM TERCATAT (m²)	KOREKSI LUAS (m²) mengacu	PENGUNAAN	ALAS HAK	NILAI YANG BELUM TERCATAT (Rp)	SELISIH NILAI (Rp)	KET
1.	Jl. Juanda - Jl.Kartil	4.500	4.640	Perkantoran Aktan Kartil	HPL	6.839.680.000	6.539.680.000	berdasarkan Audit BPK Tahun 2015 (dinilai berdasarkan NJOP 2014)
2.	Jl. Ahmad Yani	19.119*	9.526	Pasar Cendrawasih Pasar Kodim	HPL	33.101.701.000*	26.470.754.000	Sebuah asset HPL yang belum tercatat berdasarkan Audit BPK Tahun 2015 (dinilai berdasarkan NJOP 2014)
3.	Jl. Sudirman	26.06**	24.992	Pasar Sukaramai	HPL	135.462.765.000 **	127.239.240.000	Sebuah asset HPL yang belum tercatat berdasarkan Audit BPK Tahun 2015 (dinilai berdasarkan NJOP 2014)
4.	Jl.Jend. Sudirman,U.R.H. Wahid Hasyim Senapelang	400	425	Perbokan	HPL	***	2.471.075.360	Dinilai mengacu pada NJOP Jl. Sudirman seperti pasar sebelumnya
JUMLAH		50.021	39.583			197.232.146.000	164.971.750.000	

- Luasan pada Pasar Kodim/Senapelan setelah dilakukan penelusuran, telah termasuk luas SD Negeri 01, 010, 019 dan 156 Senapelan yang tercatat pada KIB dan Neraca **Dinas Pendidikan** seluas **9.593 m²**. Hal ini mengacu kepada denah sertifikat HPL dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru dan dimuat didalamnya luasan SDN 01, 010, 019 dan 156 sehingga luas dan nilai Pasar Kodim/Senapelan dikoreksi sebesar luasan dimaksud dan yang menjadi kurang catat adalah seluas **9.526 m²** dengan nilai **Rp.26.472.754.000,-** (NJOP per meter persegi pada tahun 2014 sebesar Rp. 2.779.000,-). Adapun Denah Terlampir.
- Luasan pada Pasar Sukaramai setelah dilakukan penelusuran, telah termasuk Pasar Agussalim yang tercatat pada KIB dan Neraca **Dinas Pasar** seluas **1.595 m²**. Hal ini mengacu kepada denah serifikat HPL dari BPN Kota Pekanbaru dan Pasar Agussalim terdaftar sebagai luasan Bangunan M sehingga luas dan nilai Pasar Sukaramai dikoreksi sebesar luasan dimaksud sehingga yang menjadi kurang catat adalah seluas **24.992 m²** dengan nilai **Rp.127.334.240.000,-** (NJOP per meter persegi pada tahun 2014 sebesar Rp. 5.095.000,-). Adapun Denah Terlampir.
- Luasan yang belum tercatat pada Jl. Jend. Sudirman/Jl.KH. Wahid Hasyim Sumahilang sebesar 485 m² belum dilakukan penilaian saat audit BPK Tahun 2014, oleh karena itu dilakukan penilaian dengan menggunakan NJOP seperti Pasar Sukaramai Jalan Sudirman sebesar Rp. 5.095.000,-/m², sehingga didapatkan nilai sebesar **Rp. 2.471.075.000,-**.
- Sehingga Total nilai yang harus dicatatkan berubah dari Rp. **197.232.146.000,-** menjadi **Rp. 164.917.749.000,-**.

Berdasarkan rekomendasi BPK RI, pemerintah Kota Pekanbaru harus mencatat tanah HPL dimaksud kedalam Neraca. Terhadap hal ini, pada Tahun 2015 BPKAD selaku pembantu pengelola BMD menyikapi untuk mencatat aset tanah HPL tersebut kedalam Neraca BPKAD Kota Pekanbaru pada akun Unit Pengguna Barang Pengelola BMD di SKPD Pengguna BPKAD (dalam aplikasi SIMDA BMD).

II. Pada Tahun 2015 Pemerintah Kota Pekanbaru juga telah membentuk Tim Inventarisasi Tanah HPL Milik Pemerintah Kota Pekanbaru yang dikoordinir oleh Bagian Hukum bersama SKPD terkait. Kegiatan ini diakomodir pada APBD Perubahan 2015 dan telah menginventarisir ke bangunan-bangunan yang berdiri diatas tanah HPL Pemerintah Kota Pekanbaru. Dari sisa luasan yang belum dicatat sebesar 39.643 m², tim telah menelusuri aset tanah dimaksud seluas 16.113,5 m² berdasarkan 254 dokumen perjanjian pihak ketiga dengan Pemerintah Kota Pekanbaru. Luasan ini merupakan hasil inventarisasi pada lokasi HPL di Pasar Sukaramai (Jalan Imam Bonjol, Jend. Sudirman, Hasyim Ashari, Gambir, HOS.Cokroaminoto, WS Mongonsidi, Kopi, Cengkeh, Agussalim, Alamuddinsyah), Jalan Karet/Juanda serta Jalan Teratai dan A.Yani (berdasarkan hasil laporan Kegiatan Inventarisasi dan Penataan Hak Pengelolaan (HPL) Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2015). Kegiatan ini juga telah melakukan penagihan terhadap tunggakan retribusi HPL sebesar Rp.555.178.771,- di Tahun 2015.

III. Pada Tahun 2016, Pemerintah Kota Pekanbaru kembali membentuk Tim untuk melakukan inventarisasi guna dapat memetakan seluruh luasan Tanah HPL Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. Setelah dilakukan inventarisasi selama ± 3 (tiga) bulan (Bulan Oktober sampai dengan Desember 2016), dihasilkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Telah dapat dipetakan luasan seluruh lokasi Tanah HPL Milik Pemerintah Kota Pekanbaru secara rinci, baik yang dimanfaatkan secara BGS, dimanfaatkan oleh perorangan dengan penerbitan HGB diatas HPL serta Penggunaan tanah HPL untuk menunjang Tupoksi Pemerintah Kota Pekanbaru sendiri. Data inventarisasi yang dapat menggambarkan luasan tanah HPL Milik Pemerintah Kota Pekanbaru ini berupa :

   a. Data Primer yang diperoleh dari hasil turun lapangan ke tiap lokasi, pengukuran langsung oleh tim serta data dari hasil wawancara dengan Perorangan Pemilik HGB diatas HPL.

   b. Data sekunder yang berasal dari Perjanjian dengan Perorangan Pemilik HGB diatas HPL, Sertifikat HPL Milik Pemerintah Kota Pekanbaru, Peta Lokasi HPL dari BPN Kota Pekanbaru, Perjanjian BGS Pemko Pekanbaru dengan Mitra, serta Sertifikat HGB diatas HPL Milik Perorangan dan Mitra BGS.

Rekapitulasi luasan tanah HPL Milik Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan hasil inventarisasi pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel.6.3 Rekapitulasi luasan tanah HPL Milik Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan hasil inventarisasi pada Tahun 2016

No	No. Sertifikat	Lokasi	Luas	Luas HGB		Luas Non BGS			
				Data	Ukur	Selisih	Data	HGB Ukur	Selisih
1	SK.1/HPL/DA/1972	Jl. Sudirman Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota	65.807	30.945	35.864	932	29.561	30.486	1.135
2	SK.48/HPL/DA/1981	Jl. A. Yani Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan	57.919	18.500	18.500	-	19.419	37.933	1.134
3	25/HPL/BPN/2000	Jl. Hang Tuah Kel. Sukamulia Kec. Sail	5.540	5.540	5.540	-	-	-	-
4	22/HPL/BPN/85	Pasar Bawah Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan	4.210	4.210	4.210	-	-	-	-
5	35/HPL/BPN/97	Jl. Sudirman Kel. Sungaiteleng Kec. Pekanbaru Kota	485	-	-	-	485	485	-
6	SK.4/HPL/DA/1974	Jl. Kamil Kel. Sago Kec. Senapelan	4.940	-	-	-	4.940	4.903	(477)
		Jumlah	118.801	64.696	64.114	932	53.805	55.807	1.792

Adapun selisih hasil dimaksud dapat dijelaskan adalah luasan jalan antar blok pada Pasar Sukaramai yang tidak termasuk dalam hasil pengukuran Tim Inventarisasi HPL Tahun 2016. Dokumen pendukung yang dapat menjelaskan adalah Sertifikat HGB Induk Pasar Sukaramai seluas a.n. PT. Makmur Papan Permata Nomor 490 tahun 2001 seluas 35.864 m^2.

2. Secara rinci, Hasil Inventarisasi telah dituangkan per lokasi dan per pemegang HGB / Perjanjian yang saat ini memanfaatkan tanah HPL Milik Pemerintah Kota Pekanbaru serta diberi label inventarisasi masing-masing untuk identifikasi sehingga mudah dalam mengenali pada peta serta foto/dokumentasi bangunan

diatas tanah HPL, sebagaimana tertuang didalam Laporan Hasil Inventarisasi Tanah HPL Milik Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2016. Namun disamping itu, inventarisasi Tanah HPL masih menemukan beberapa hambatan yang perlu menjadi perhatian untuk dapat disempurnakan pada periode kedepannya. Beberapa hal yang menjadi hambatan antara lain adalah sebagai berikut :

a. Tidak seluruh pemegang HGB memberikan data yang diminta secara keseluruhan;

b. Ketika tim turun ke lapangan rata-rata yang ditemui oleh tim adalah penyewa terhadap bangunan diatas tanah HPL, dan pemegang HGB pun tidak meninggalkan dokumen yang diminta pada penyewa;

c. Tidak semua pemegang HGB yang datang ke kantor BPKAD memenuhi surat panggilan untuk melakukan wawancara ketika pemegang hak yang tidak dapat ditemui dan tim pun tidak mendapatkan dokumen yang diminta saat turun lapangan;

d. Terdapat beberapa orang pemegang HGB atau penghuni bangunan yang kurang responsif terhadap kehadiran tim untuk melakukan pendataan;

e. Kesulitan dalam hal mencari kesesuaian antara dokumen perjanjian HPL yang ada dengan sertifikat HGB diatas HPL yang terbit karena adanya pengalihan kepemilikan tanpa sepengetahuan Pemerintah Kota Pekanbaru serta detail/rincian dalam perjanjian tidak lagi sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

f. Dan hal–hal lain yang memungkinkan adanya kesalahfahaman terhadap pengakuan pemegang hak terhadap bangunan yang mereka miliki.

IV. Pada Tahun 2017, guna menindaklanjuti hasil laporan Tim Inventarisasi Tanah HPL Milik Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2016, telah dilakukan beberapa hal antara lain sebagai berikut :

a. Hasil inventarisasi Tanah HPL Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2016 telah ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru dengan SK Walikota Pekanbaru Nomor 778 Tahun 2017 Tanggal 25 Oktober 2017 tentang Hasil Inventarisasi Tanah Hak Pengelolaan Lahan Milik Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2016.

b. BPKAD Kota Pekanbaru telah menyusun sebuah kajian internal yang disampaikan melalui Telaahan Staf Nomor 032/BPKAD-Peng.Aset/644 Tanggal 30 November 2017 Perihal Penetapan Pengembangan dan Penataan Lokasi HGB diatas tanah HPL milik Pemerintah Kota Pekanbaru yang memuat pertimbangan tentang langkah-langkah atau alternatif pilihan yang dapat diambil oleh Walikota Pekanbaru sebagai Pemegang Kuasa atas BMD sekaligus pengambil kebijakan atas pengelolaan BMD. Telaahan Staf dimaksud dikirim kepada Walikota Pekanbaru melalui Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, dan Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru selaku Pengelola

Barang mendisposisi kembali kajian dimaksud dengan meminta agar dilakukan kajian yang lebih komprehensif oleh tim khusus/pihak independen yang lebih kompeten sebelum dilaporkan kepada Walikota.

c. Terkait point 4.b diatas, BPKAD Kota Pekanbaru telah melaksanakan Kajian Pengelolaan BMD oleh Pihak Independen dengan judul kajian Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2018 dengan objek aset Tanah HPL milik Pemerintah Kota Pekanbaru. Maksud dari adanya kajian dimaksud adalah untuk "mewujudkan perencanaan dan pengelolaan aset yang lebih produktif, efektif, dan efisien serta dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk meningkatkan PAD Kota Pekanbaru".

V. Guna menindaklanjuti rekomendasi BPK tentang penyusunan dasar hukum pemanfaatan tanah HPL yang ditetapkan oleh Walikota, BPKAD pada TA. 2019 juga telah melaksanakan kajian terhadap hal dimaksud, hingga menghasilkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Kota Pekanbaru. Namun seiring dengan adanya beberapa perubahan kebijakan oleh Kepala Daerah pada waktu itu dalam hal indeks tarif sewa serta jangka waktu sewa, maka dilakukan penyesuaian terkait hal dimaksud dengan terbitnya Perwako Nomor 35 Tahun 2022 tentang Revisi atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Kota Pekanbaru. Guna mendukung regulasi terbaru dimaksud, maka BPKAD Kota Pekanbaru telah mempersiapkan surat edaran sekaligus pemberitahuan yang ditandangani oleh Bapak Pj Walikota Pekanbaru guna memberitahukan adanya perubahan regulasi terkait pemanfaatan Tanah HPL Pemerintah Kota Pekanbaru kedepannya.

VI. Dengan tujuan mensosialisasikan Perwako Nomor 35 Tahun 2022 dimaksud, maka pada Tanggal 9 Mei 2023 dilakukan rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru selaku Pengelola Barang yang dihadiri oleh Satker terkait termasuk Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru beserta jajaran. Dalam rapat pendahuluan dimaksud disepakati beberapa hal sebagai berikut :

a. Percepatan Sertifikasi HPL Pemerintah Kota Pekanbaru yang tidak ditemukan asli alas hak kepemilikannya;

b. Melakukan survey ke lokasi aset tanah HPL Pemko Pekanbaru guna *update* data sekaligus menagih tunggakan retribusi tanah HPL sekaligus menindaklanjuti LHP BPK RI;

c. Menyurati Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru untuk permohonan pemblokiran atas perpanjangan, pemasangan hak tanggungan serta peralihan hak terhadap HGB diatas HPL Pemerintah Kota Pekanbaru;

d. Melaksanakan rekonsiliasi data dengan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru terkait data HGB diatas HPL Pemerintah Kota Pekanbaru;

e. Mengkaji kembali terkait implementasi Perwako Nomor 35 Tahun 2022 dan melakukan penyesuaian ataupun perbaikan terhadap regulasi terkait;

f. Kedepannya mempersiapkan secara matang mengenai rencana sosialisasi kepada para Pemegang HGB diatas HPL Pemko Pekanbaru, serta mempertimbangkan keterlibatan aparat hukum guna penertiban pemanfaatan tanah HPL.

VII. Pada Tahun 2023, Pemerintah Kota Pekanbaru telah membentuk tim terpadu dan melaksanakan Inventarisasi Data HGB diatas HPL guna *update* data dan menagih tunggakan retribusi tanah HPL guna menindaklanjuti LHP BPK RI sekaligus melaksanakan tanya jawab dengan para pemegang HPL mengenai kemungkinan penerapan Perwako Nomor 35 Tahun 2022. Akibat adanya penyesuaian tarif dari pola retribusi menjadi sewa, para pemegang HGB akan membayar kenaikan sebanyak hampir 1000 (seribu) persen dari tarif semula. Hal ini mengakibatkan adanya penolakan dari para pemegang HGB yang ditemui saat pelaksanaan survey lapangan. Oleh karena itu, pimpinan mereview kebijakan kembali dan menginstruksikan untuk melakukan penyempurnaan atas Perwako Nomor 35 Tahun 2022. Guna menyikapi hal dimaksud, BPKAD bersama Bagian Hukum Setda Kota Pekanbaru telah melakukan penyempurnaan regulasi / kebijakan tersebut. Draft Perwako tentang Pemanfaatan Tanah HPL Pemerintah Kota Pekanbaru telah dikaji bersama dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri pada tanggal 17 Januari 2024 di Jakarta dengan hasil rapat antara lain :

a. Pemerintah Kota Pekanbaru agar berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan permasalahan terkait HPL atas pemanfaatan BMD di Kota Pekanbaru yang sudah teridentifikasi dan terinventarisir.
b. Disarankan agar dalam menyusun regulasi mengenai HPL atas Pemanfaatan BMD perlu menunggu Peraturan Menteri ATR/BPN sebagai amanah dari Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang menyatakan rumusan tarif dan uang wajib tahunan yang dikenakan oleh Pemegang Hak Pengelolaan ditetapkan oleh Menteri, Menteri adalah Menteri ATR/BPN.
c. Dalam peningkatan penerimaan Daerah Pemko Pekanbaru dapat menggunakan mekanisme Sewa BMD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Terkait hasil rapat diatas, masih perlu didiskusikan lebih lanjut didalam internal Pemerintah Kota Pekanbaru dengan melibatkan seluruh Instansi terkait guna menyepakati kebijakan yang akan diambil kedepannya.

BAB VII
PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pergelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, bahwa Gubernur/Walikota/Bupati bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah. Kemudian, khusus untuk pengelolaan keuangan daerah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan selanjutnya secara teknis Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah berupaya untuk mewujudkan amanah sebagaimana aturan perundang-undangan tersebut.

Untuk laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, Pemerintah Kota Pekanbaru menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan mengonsolidasikan laporan keuangan seluruh Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam satu set laporan keuangan, yang terdiri dari 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Neraca, 3) Laporan Arus Kas, 4) Laporan Operasional, 5) Laporan Perubahan Ekuitas, 6) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam penyajian laporan keuangan tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru berusaha memberikan informasi yang andal, transparan dan akuntabel.

Untuk memenuhi amanat peraturan tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 (*Unaudited*) yang disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penyusunan laporan keuangan melalui proses konversi, mengingat adanya perbedaan struktur APBD menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Pekanbaru bertekad untuk selalu meningkatkan kualitas dari sistem aplikasi pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pengelolaan persediaan dan pengelolaan pendapatan. Di samping itu, Pemerintah Kota Pekanbaru harus mensinergikan regulasi peraturan perundang-undangan, dan yang paling penting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset.

Prioritas pertama yang harus terus dibenahi Pemerintah Kota Pekanbaru adalah sumber daya manusia yang melaksanakan tugas fungsi pemerintahan terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah. Di samping pembenahan sumber daya manusia, tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sistim pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah dan penyempurnaan aturan-aturan yang disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih memadai dan berkualitas.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa berbagai aspek perlu dilakukan penyempurnaan dan perbaikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan piutang di OPD perlu lebih ditingkatkan dan dilakukan validasi terhadap data-data piutang pada OPD yang memiliki piutang. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi perhatian utama dengan melakukan pendataan, validasi data dan meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

Koordinasi secara berkesinambungan harus terus ditingkatkan, terutama koordinasi antara pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset demi mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel guna mendukung dan mewujudkan Pekanbaru kota *bertuah*.

Lampiran 1

Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per SKPD Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Kegiatan	Jumlah
I	**Dinas Pendidikan**	**3.812.763.700,00**
1	Pesatuan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.346.900.000,00
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	37.300.000,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	133.650.000,00
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	304.813.700,00
II	**Dinas Kesehatan**	**4.279.646.008,00**
1	Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Rumbai	22.115.000,00
2	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	288.216.191,00
3	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11.167.500,00
4	Pengadaan Bahan Habis Pakai	816.654.319,00
5	Pengadaan Obat, Vaksin	39.474.180,00
6	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	284.800.000,00
7	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	134.325.000,00
8	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.142.097.000,00
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	535.517.000,00
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	145.215.675,00
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	157.300.000,00
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.000.000,00
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.741.000,00
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.861.143,00
15	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	109.853.000,00
16	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	371.309.000,00
III	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**2.303.983.720,00**
1	Pembangunan / Pembukaan Jalan Baru	10.819.000,00
2	Normalisasi/Restorasi Sungai	34.908.000,00
3	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	3.444.000,00
4	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	115.000.000,00
5	Pembangunan Jalan	88.165.000,00
6	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	4.896.000,00
7	Pemeliharaan Rutin Jalan	36.766.000,00
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.754.000,00
9	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	70.000.000,00
10	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1.947.243.720,00

No	Kegiatan	Jumlah
IV	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**6.323.269.725,00**
1	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Skala Lingkungan Wilayah II	98.274.000,00
2	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	49.808.000,00
3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	240.000.000,00
4	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	4.252.127.000,00
5	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	148.680.000,00
6	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1.534.380.725,00
V	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**421.463.125,00**
1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	94.600.000,00
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.387.625,00
3	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	228.475.500,00
VI	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**	**163.176.100,00**
1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	37.042.500,00
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.552.000,00
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.362.500,00
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.343.750,00
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.659.100,00
7	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	65.216.250,00
VII	**Dinas Sosial**	**639.440.660,00**
1	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	18.975.000,00
2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	36.570.000,00
3	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	31.680.000,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.458.460,00
5	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	8.400.000,00
6	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	468.120.000,00
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.676.800,00
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.452.900,00
9	Penyediaan Permakanan	3.759.000,00
10	Penyediaan Sandang	47.498.500,00
11	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	4.860.000,00
VIII	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**114.500.000,00**
1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	114.500.000,00
IX	**Dinas Pertanahan**	**137.855.200,00**
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	137.855.200,00

No	Kegiatan	Jumlah
X	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	**8.767.699.726,00**
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	224.637.000,00
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	50.400.000,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.698.000,00
4	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6.135.804.631,00
5	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	243.496.250,00
6	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	326.738.750,00
7	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	248.348.970,00
8	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	912.096.250,00
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	188.252.000,00
10	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	273.324.000,00
11	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	11.813.875,00
XI	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**409.226.600,00**
1	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	21.150.000,00
2	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	34.944.767,00
3	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	14.236.000,00
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.400.000,00
5	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Faskes Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2.450.000,00
6	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	16.295.000,00
7	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Penciptaan Program KKBPK	144.600.000,00
8	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5.742.500,00
9	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Raproduksi	20.940.000,00
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.170.000,00
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.516.000,00
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.312.500,00
13	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5.200.000,00
14	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	17.100.000,00
15	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	41.395.000,00
16	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	51.774.813,00
XII	**Dinas Perhubungan**	**65.865.161.300,00**
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	65.865.161.300,00
XIII	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**70.896.500,00**

No	Kegiatan	Jumlah
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.000.000,00
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.896.500,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00
XIV	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu**	**554.438.948,00**
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	27.800.000,00
2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	123.182.250,00
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.771.000,00
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.092.500,00
7	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.180.000,00
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.238.308,00
9	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	6.840.000,00
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.354.890,00
XV	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	**643.616.818,00**
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	128.038.118,00
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	48.100.000,00
3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	115.296.300,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	198.685.000,00
5	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	37.500.000,00
6	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	14.297.500,00
7	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	100.800.000,00
XVI	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	**217.893.183,71**
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	163.234.183,71
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.864.000,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.445.000,00
4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.350.000,00
XVII	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**	**107.213.023,80**
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	9.450.000,00
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.084.000,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.438.194,00
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.240.829,00
XVIII	**Dinas Pertanian dan Perikanan**	**20.005.000,00**
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.375.000,00

No	Kegiatan	Jumlah
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.630.000,00
XIX	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	**417.649.288,00**
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	101.288.000,00
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	106.650.000,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.161.288,00
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.300.000,00
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.250.000,00
XX	**Sekretariat Daerah**	**442.617.253,00**
1	Fasilitasi Bantuan Hukum	6.047.699,00
2	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	17.018.000,00
3	Penataan Administrasi Pemerintahan	14.000.000,00
4	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	74.374.626,00
5	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	49.812.300,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	281.364.628,00
XXI	**Sekretariat DPRD**	**1.267.692.950,00**
1	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	18.522.000,00
2	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	242.146.000,00
3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	309.960.000,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.733.000,00
5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	86.918.000,00
6	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	88.084.000,00
7	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	45.486.000,00
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	182.875.450,00
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	226.254.500,00
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000,00
11	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	26.714.000,00
XXII	**Badan Pendapatan Daerah**	**327.104.400,00**
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97.889.000,00
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.521.400,00
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	170.694.000,00
XXIII	**Kecamatan Bukitraya**	**977.501.000,00**
1	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	127.296.000,00
2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	850.205.000,00
XXIV	**Kecamatan Tenayan Raya**	**1.407.127.700,00**
1	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	274.870.000,00

No	Kegiatan	Jumlah
2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.060.704.600,00
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.553.100,00
4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.000.000,00
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.000.000,00
6	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	36.000.000,00
XXV	**Kecamatan Sail**	**359.296.600,00**
1	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	91.835.000,00
2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	267.461.600,00
XXVI	**Kecamatan Lima Puluh**	**524.382.800,00**
1	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	111.980.000,00
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.469.000,00
3	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	409.913.800,00
XXVII	**Kecamatan Pekanbaru Kota**	**604.374.500,00**
1	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	138.968.000,00
2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	465.406.500,00
XXVIII	**Kecamatan Sukajadi**	**718.485.500,00**
1	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	171.856.000,00
2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	533.123.600,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.705.900,00
XXIX	**Kecamatan Payung Sekaki**	**870.671.300,00**
1	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	181.672.000,00
2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	615.382.000,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.630.500,00
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.986.800,00
XXX	**Kecamatan Senapelan**	**683.316.400,00**
1	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	158.040.000,00
2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	525.276.400,00
XXXI	**Kecamatan Marpoyan Damai**	**1.321.112.800,00**
1	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	152.040.000,00
2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.103.632.800,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.950.000,00
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.490.000,00

No	Kegiatan	Jumlah
XXXII	**Kecamatan Binawidya**	**1.192.466.600,00**
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.625.000,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11.677.500,00
4	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	164.680.000,00
5	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	49.969.900,00
6	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	713.790.200,00
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	181.000.000,00
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.697.000,00
9	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.047.000,00
XXXIII	**Kecamatan Tuah Madani**	**1.598.349.765,00**
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.712.472,00
2	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	163.124.000,00
3	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.388.250.000,00
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.059.600,00
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.203.693,00
XXXIV	**Kecamatan Rumbai.**	**1.317.287.600,00**
1	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	152.190.400,00
2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.129.096.600,00
3	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	36.000.000,00
XXXV	**Kecamatan Rumbai Timur**	**666.668.800,00**
1	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	151.688.000,00
2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	514.980.800,00
XXXVI	**Kecamatan Rumbai Barat**	**583.486.800,00**
1	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	151.856.000,00
2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	409.832.800,00
3	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	21.798.000,00
XXXVII	**Kecamatan Kulim**	**801.138.000,00**
1	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	131.688.000,00
2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	669.450.000,00
XXXVIII	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**99.293.200,00**
1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	5.985.000,00
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.293.600,00

No	Kegiatan	Jumlah
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.173.400,00
4	Penyediaan Jasa Perslatan dan Perlengkapan Kantor	12.751.200,00
JUMLAH		**111.032.072.392,71**

Lampiran 2

Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per SKPD yang belum dibayarkan hingga Tahun 2023

No.	SKPD	Jumlah
	Tahun 2017	**103.274.000,00**
1	Dinas Kesehatan	5.000.000,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	98.274.000,00
	Tahun 2018	**10.819.000,00**
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.819.000,00
	Tahun 2019	**600.000,00**
1	Dinas Kesehatan	600.000,00
	Tahun 2020	**65.881.676.300,00**
1	Dinas Kesehatan	16.515.600,00
2	Dinas Perhubungan	65.865.161.300,00
	Tahun 2021	**27.078.756.498,71**
1	Dinas Pendidikan	3.968.683.600,00
2	Dinas Kesehatan	3.821.826.487,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	437.462.720,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.141.675.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	259.263.400,00
6	Dinas Sosial	612.833.500,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	114.500.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.658.383.790,00
9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	409.588.118,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	217.893.183,71
11	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	318.188.000,00
12	Badan Pendapatan Daerah	327.104.400,00
13	Kecamatan Bukitraya	977.501.000,00
14	Kecamatan Tenayan Raya	1.361.574.600,00
15	Kecamatan Sail	359.296.600,00
16	Kecamatan Lima Puluh	521.893.800,00
17	Kecamatan Pekanbaru Kota	604.374.600,00
18	Kecamatan Sukajadi	716.485.500,00
19	Kecamatan Payung Sekaki	797.054.000,00
20	Kecamatan Senapelan	683.316.400,00
21	Kecamatan Marpoyan Damai	1.281.622.600,00
22	Kecamatan Binawidya	866.100.200,00
23	Kecamatan Tuah Madani	1.551.374.000,00
24	Kecamatan Rumbai	1.317.287.000,00
25	Kecamatan Rumbai Timur	666.668.600,00
26	Kecamatan Rumbai Barat	583.486.800,00
27	Kecamatan Kulim	801.138.000,00
	Tahun 2022	**17.956.946.594,00**
1	Dinas Pendidikan	144.080.100,00
2	Dinas Kesehatan	435.704.521,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.855.702.000,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.083.120.725,00

5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	162.199.725,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	163.176.100,00
7	Dinas Sosial	36.607.160,00
8	Dinas Pertanahan	137.655.200,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	6.109.245.936,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	409.226.600,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	70.896.500,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu	554.438.948,00
13	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	234.028.800,00
14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	107.213.023,00
15	Dinas Pertanian dan Perikanan	20.005.000,00
16	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	99.461.288,00
17	Sekretariat Daerah	442.617.253,00
18	Sekretariat DPRD	1.267.692.950,00
19	Kecamatan Tenayan Raya	45.553.100,00
20	Kecamatan Lima Puluh	2.469.000,00
21	Kecamatan Payung Sekaki	73.617.300,00
22	Kecamatan Marpoyan Damai	39.490.000,00
23	Kecamatan Binawidya	326.366.400,00
24	Kecamatan Tuah Madani	48.975.755,00
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	99.203.200,00
JUMLAH		**111.032.072.392,71**

Lampiran 3

Rincian Utang Belanja Modal per SKPD Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Kegiatan	Jumlah
I	**Dinas Kesehatan**	**3.557.327.000,00**
1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.767.025.000,00
2	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	766.421.000,00
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.000.000,00
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.881.000,00
II	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**2.632.885.921,92**
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5.000.000,00
2	Pembangunan Jalan	1.707.260.967,92
3	Pembangunan Jembatan	114.529.800,00
4	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	806.095.154,00
III	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**16.263.495.694,00**
1	Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) Berbasis Masyarakat Wilayah II	45.116.000,00
2	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Pemukiman Kumuh	25.882.000,00
3	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	10.192.497.694,00
IV	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**	**124.200.000,00**
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	124.200.000,00
V	**Dinas Pertanahan**	**1.164.080.000,00**
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.164.080.000,00
VI	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	**143.980.865,00**
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	45.063.365,00
2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	98.917.500,00
VII	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**82.000.000,00**
1	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	82.000.000,00
VIII	**Dinas Perhubungan**	**13.289.177.577,00**
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	13.289.177.577,00
IX	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	**49.284.000,00**
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	49.284.000,00
X	**Sekretariat DPRD**	**111.245.900,00**

1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.561.500,00
2	Pengadaan Mebel	61.684.400,00
XI	**Kecamatan Senapelan**	**14.251.400,00**
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.251.400,00
XII	**Kecamatan Binawidya**	**69.430.000,00**
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.430.000,00
XIII	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**62.000.000,00**
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.000.000,00
JUMLAH		**31.583.358.357,92**

Lampiran 4

Hasil Rekonsiliasi Bank

No	SP2D	Uraian	SKO BKD	KESEMBILAN KORAN	SELISIH	KET
1	SP2D No. 0011/B/SP2D/PK/2023 tanggal 04 Juli 2023 Dinas Pendidikan	Lebih posting JKN sehatnya sebesar Rp 2.833.780,- (sesuai dg bukti setor) tsd dposting oleh teller sehesar Rp 5.833.780,-	2.833.780,00	5.833.780,00	(3.000.000,00)	PPK Syariah akan melakukan pengembalian ke RKUD Kota Pekanbaru
2	SP2D No. 1416/SP2D/K/2023 tanggal 09 Oktober 2023 Kec. Sukajadi	Lebih posting BPJS sehatnya Rp 9.117.904,- tapi diposting Rp 9.177.904,-	9.117.904,00	9.177.904,00	(59.000,00)	Kec. Sukajadi akan melakukan penyetoran ke RKUD Kota Pekanbaru
3	SP2D No. 0833/SP2D/PR/2023 tanggal 13 Oktober 2023 Dinas Perhubungan	Lebih Posting PPN seharusnya Rp 1.474.932,- tapi diposting Rp 1.474.932,-	1.474.932,00	1.474.932,00	(90,00)	Dinas Perhubungan akan melakukan penyetoran ke RKUD Kota Pekanbaru
4	SP2D No. 1341/SP2D/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 Dinas Lingkungan Hidup	Lebih posting PPh-23 seharusnya Rp 604.265,- tapi diposting Rp 604.809,-	594.304,00	604.856,00	(1.380,00)	Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan penyetoran ke RKUD Kota Pekanbaru
5	SP2D No. 1388/SP2D/DIK/2023 tanggal 27 Oktober 2023 Dinas Pariwisata	Lebih Posting PPh-22 seharusnya Rp 2.636.243,- tapi diposting sebesar Rp 2.656.243,-	2.636.243,00	2.656.243,00	(20.000,00)	Dinas Pariwisata akan melakukan penyetoran ke RKUD Kota Pekanbaru
6	SP2D No. 1388/SP2D/PA/2023 tanggal 27 Oktober 2023 Dinas Perkim	Lebih Posting PPh-22 seharusnya Rp 3.053.305,- tapi diposting Rp 3.053.305,-	3.053.305,00	3.033.305,00	(20,00)	Dinas Perkim akan melakukan penyetoran ke RKUD Kota Pekanbaru
7	SP2D No. 1744/SP2D/DIS/2023 tanggal 27 Desember 2023 BLUD Puskesmas Pekanbaru Kota	SP2D No. 1744/ diposting seluruhnya. Hal tsb telah di tgl 20 Nov 2023 dan 27 Dec 2023.	-	17.852.430,00	(17.852.430,00)	Terdapat Kondisi Multi Kesebelan Pimer selaku Pihak Ketiga sudah melakukan penyetoran atas bendi SP2D sebesar Rp 18.033.200,- dan dikenai pajak sebesar Rp 2.850.200,- akan disetor oleh BLUD Puskesmas Pekanbaru Kota
8	SP2D No. 1346/UP/DIK/DES/2023 tanggal 29 Desember 2023 SPMT/SP	Lebih posting atas sesuai SP2D seharusnya Rp 7.860.032,- tp diposting Rp 7.860.032,-	7.860.032,00	7.860.032,00	(20.000,00)	Cv. SARINAH selaku Pihak Ketiga akan melakukan penyetoran ke RKUD Kota Pekanbaru
9	SP2D No. 2114/SP2D/BPAD/2023 tanggal 27 Desember 2023 BPKAD	PPH pada SP2D No. 2114/ 2x posting yaitu di tgl 27 & 28 Dec 2023	-	1.297.901,00	(1.297.901,00)	BPKAD akan melakukan kompensasi pajak
10	SP2D No. 2114/SP2D/BPAD/2023 tanggal 27 Desember 2023 BPKAD	PPh-22 pd SP2D No. 2114/ 2x posting yaitu di tgl 27 & 28 Dec 2023	-	330.982,00	(330.982,00)	BPKAD akan melakukan kompensasi pajak
11	SP2D No. 1751/SP2D/RSD/2023 tanggal 28 Desember 2023 BLUD RSD Madani	Lebih posting PPN pasal 4 seharusnya Rp 376.928,- tp diposting Rp 376.982,-	376.928,00	376.982,00	(54,00)	BLUD RSD Madani akan melakukan penyetoran ke RKUD Kota Pekanbaru
12	SP2D No. 18745/SP2D/RSD/2023 tanggal 29 Desember 2023 BLUD RSD Madani	Kelebihan posting karena kekeliruan PUPR melampirkan e-billing SP2D No. 18745 seharusnya Rp 389.797,- tapi yg dilampirkan e-billing senilai Rp 1.847.787,-	389.797,00	1.847.287,00	(1.180.540,00)	PUPR akan melakukan kompensasi pajak
13	SP2D No. 18746/SP2D/RSD/2023 tanggal 29 Desember 2023 BLUD RSD Madani	Kelebihan posting karena kekeliruan PUPR melampirkan e-billing SP2D No. 18745 seharusnya Rp 2.727.182,- tapi yg dilampirkan e-billing senilai Rp 11.940.847,-	2.727.182,00	11.940.847,00	(9.213.665,00)	PUPR akan melakukan kompensasi pajak
14	SP2D No. 1801/SP2D/UMUM/20 tanggal 01 Desember 2023 Sekretariat Daerah	PPN-21 belum diposting	52.398,20	-	52.398,20	Tindaklanjut oleh SKO Syariah
15	SP2D No. 1803/SP2D/KRS/23 tanggal 22 Desember 2023 Dinas Perkim	Kurang posting PPh-23 seharusnya Rp 938.736,- yg diposting Rp 938.736,-	938.736,00	938.736,00	(0,00)	Tindaklanjut oleh SKO Syariah
16	SP2D No. 1810/B/SP2D/OKS/2023 tanggal 22 Desember 2023 Sekretariat DPRD	PPN-23 belum diposting	1.920.000,00	-	1.920.000,00	Tindaklanjut oleh SKO Syariah
17	SP2D No. 1770/B/SP2D/KRS/2023 tanggal 27 Desember 2023 Dinas Perhubungan	PPN 22 belum diposting	170.150,00	-	170.150,00	Tindaklanjut oleh SKO Syariah
18	SP2D No. 1769/B/SP2D/KRS/2023 tanggal 27 Desember 2023 Dinas Perhubungan	PPN belum diposting	1.247.400,00	-	1.247.400,00	Tindaklanjut oleh SKO Syariah
19	SP2D No. 2041/B/SP2D/KRS/2023 tanggal 21 Desember 2023 BLUD Puskesmas Senapelan	PPN 23 belum diposting	318.800,00	-	318.800,00	Tindaklanjut oleh SKO Syariah
20	SP2D No. 1933/SP2D/KRS/2023 tanggal 21 Desember 2023 BLUD Puskesmas Simpangtiga	Kurang posting PPh-23 seharusnya Rp 215.800,- tapi diposting Rp 318.400,-	318.800,00	318.400,00	400,00	Tindaklanjut oleh SKO Syariah
21	SP2D No. 2081/SP2D/BSI/2023 tanggal 27 Desember 2023 Sekretariat Daerah	Kurang posting atas bendi seharusnya Rp 54.530.000,- tsd diposting Rp 54.527.100,-	54.530.000,00	54.527.100,00	2.900,00	Tindaklanjut oleh SKO Syariah
22	SP2D No. 1908/SP2D/BSI/2023 tanggal 28 Desember 2023 Dinas Kebakaran Pangan	PPh-23 belum diposting	97.215,00	-	97.215,00	Tindaklanjut oleh SKO Syariah
23	SP2D No. 1908/SP2D/KRS/2023 tanggal 28 Desember 2023 Dinas Kebakaran Pangan	PPN belum diposting	585.690,00	-	585.690,00	Tindaklanjut oleh SKO Syariah
24	SP2D No. 2116/SP2D/KRS/2023 tanggal 28 Desember 2023 BPKAD	PPh pasal 4 belum diposting	1.380.000,00	-	1.380.000,00	Tindaklanjut oleh SKO Syariah
25	SP2D No. 2116/B/SP2D/KRS/2023 tanggal 28 Desember 2023 BPKAD	PPN belum diposting	1.518.000,00	-	1.518.000,00	Tindaklanjut oleh SKO Syariah
26	SP2D No. 2119/B/SP2D/KRS/2023 tanggal 28 Desember 2023 BLUD RSD Madani	PPh-22 belum diposting	238.775,00	-	238.775,00	Tindaklanjut oleh SKO Syariah
27	SP2D No. 2119/B/SP2D/KRS/2023 tanggal 28 Desember 2023 BLUD RSD Madani	PPN belum diposting	1.015.500,00	-	1.015.500,00	Tindaklanjut oleh SKO Syariah
28	SP2D No. 1413/SP2D/KRS/2023 tanggal 28 Desember 2023 Dinas Tenaga Kerja	Pajak Hotelnon jal SP2D No. 1413/ Dinas Tenaga Kerja belum diposting	1.736.200,00	-	1.736.200,00	Tindaklanjut oleh SKO Syariah

No	SP2D	Uraian	BKU (Rp)	REKENING KORAN	SELISIH	KET
29	SP2D No. 177[illegible]/SP2D/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 Dinas Perkim	PPh pasal 4 belum dicairkan	3.074.955,00	-	3.074.955,00	Tindaklanjut oleh BPK Syarah
30	SP2D No. 171[illegible]/SP2D/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 Dinas Perkim	PPh belum dicairkan	19.229.280,00	-	19.229.280,00	Tindaklanjut oleh BPK Syarah
31	SP2D No. 1598/[illegible]/SP2D/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 DPKAPM	Kurang posting PPh 21 seharusnya Rp 115.436,- sap dicairkan Rp 113.980,-	113.300,00	115.080,00	580,00	Tindaklanjut oleh BPK Syarah
32	SP2D No. 2149/[illegible]/SP2D/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 Sekretariat DPRD	Kurang posting PPh 21 seharusnya Rp 496.084,- sap dicairkan Rp 495.864,-	496.864,00	498.084,00	1.080,00	Tindaklanjut oleh BPK Syarah
33	SP2D No. 2120/[illegible]/SP2D/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 DPUAPM	PPh 22 pd SP2D No. 2119/[illegible] belum dicairkan	225.000,00	-	225.000,00	Tindaklanjut oleh BPK Syarah
34	SP2D No. 2103/[illegible]/SP2D/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 BKAD RSD Mawar	PPh 22 belum dicairkan	1.436.886,00	-	1.436.886,00	Tindaklanjut oleh BPK Syarah
35	SP2D No. 2203/[illegible]/SP2D/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 BKAD RSD Mawar	PPh belum dicairkan	8.576.240,00	-	8.576.240,00	Tindaklanjut oleh BPK Syarah
36	SP2D No. 1197/[illegible]/SP2D/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 Bagian Kesmaspor	PPh 21 belum dicairkan	1.667.800,00	-	1.667.800,00	Tindaklanjut oleh BPK Syarah
37	SP2D No. 211[illegible]/SP2D/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 Dinas PUPR	Pajak Restoran belum dicairkan	3.320.260,00	-	3.320.260,00	Tindaklanjut oleh BPK Syarah
38	SP2D No. 1943/[illegible]/SP2D/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 Dinas Perkim	Kurang posting PPh seharusnya Rp 14.087.371,- dicairkan Rp 14.087.722,-	14.087.371,00	14.087.722,00	280,00	Tindaklanjut oleh BPK Syarah
TOTAL			140.490.340,00	113.037.151,00	15.781.337,00	

Lampiran 6

Rekapan Penerimaan dan Belanja Dana BOS Tahun 2023

NO.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	PENDAPATAN TA.2023	PENERIMAAN NON BOS	PENERIMAAN JASA GIRO BANK TAHUN 2023	TOTAL PENERIMAAN TA 2023	PENGEMBALIAN JASA GIRO BANK TAHUN 2022 DI TAHUN 2023	PENGELUARAN NON BOS	EXPERT BUNGA BANK YANG DI TARIK OTOMATIS OLEH KASDA TAHUN 2023	BELANJA TA 2023	TOTAL PENGELUARAN TA 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)	8	9	10	11	12 = (9+10 +11)	13=(7-11-12)
1	SMP NEGERI 1 PEKANBARU	0,00	783.108.000,00	2.870.000,00	601.717,00	786.571.717,00	0,00	2.870.000,00	601.717,00	783.100.000,00	786.571.717,00	0,00
2	SMP NEGERI 2 PEKANBARU	630.300,00	489.665.706,00	0,00	147.080,00	500.847.080,00	0,00	0,00	147.080,00	500.000.000,00	500.647.080,00	0,00
3	SMP NEGERI 3 PEKANBARU	1.217.313,00	481.305.000,00	0,00	340.831,00	642.958.744,00	0,00	0,00	340.831,00	641.305.000,00	641.640.831,00	1.217.913,00
4	SMP NEGERI 4 PEKANBARU	1.387.631,00	1.300.812.368,00	0,00	615.110,00	1.302.815.115,00	0,00	0,00	615.110,00	1.296.636.258,00	1.297.464.583,00	5.350.762,00
5	SMP NEGERI 5 PEKANBARU	240.102,00	975.280.000,00	20.000,00	420.290,00	975.960.401,00	0,00	20.000,00	420.290,00	975.400.200,00	975.840.290,00	120.102,00
6	SMP NEGERI 6 PEKANBARU	721.399,00	1.429.860.350,00	0,00	713.786,00	1.431.295.51 1,00	0,00	0,00	713.786,00	1.429.522.585,00	1.430.236.400,00	1.080.081,00
7	SMP NEGERI 7 PEKANBARU	550.799,00	462.000.000,00	0,00	279.717,00	462.830.516,00	0,00	0,00	279.717,00	462.000.000,00	462.279.717,00	550.799,00
8	SMP NEGERI 8 PEKANBARU	0,00	1.232.800.000,00	0,00	394.029,00	1.233.194.029,00	0,00	0,00	394.029,00	1.233.800.000,00	1.233.194.029,00	0,00
9	SMP NEGERI 9 PEKANBARU	1.962.951,00	1.310.100.000,00	0,00	996.229,00	1.312.949.171,00	0,00	1.800.000,00	996.229,00	1.311.100.000,00	1.312.896.229,00	52.951,00
10	SMP NEGERI 10 PEKANBARU	146.631,00	826.200.000,00	0,00	616.163,00	826.962.794,00	0,00	0,00	616.163,00	826.200.000,00	826.816.163,00	146.631,00
11	SMP NEGERI 11 PEKANBARU	358.547,00	857.999.774,00	0,00	383.154,00	858.741.475,00	0,00	0,00	383.154,00	858.000.000,00	858.383.154,00	358.321,00
12	SMP NEGERI 12 PEKANBARU	15.051,00	877.700.500,00	0,00	431.386,00	878.246.331,00	0,00	0,00	431.386,00	877.794.900,00	878.226.286,00	19.951,00
13	SMP NEGERI 13 PEKANBARU	88.792,00	1.329.599.672,00	0,00	585.086,00	1.330.193.543,00	0,00	0,00	585.086,00	1.329.600.308,00	1.330.185.086,00	88.457,00
14	SMP NEGERI 14 PEKANBARU	0,00	900.700.000,00	0,00	492.348,00	901.192.348,00	0,00	0,00	492.348,00	900.700.308,00	901.192.348,00	0,00
15	SMP NEGERI 15 PEKANBARU	402.306,80	879.500.000,00	30.200.000,00	439.170,00	930.392.539,00	0,00	30.000.000,00	439.170,00	918.036.808,00	948.475.978,00	1.125.660,80
16	SMP NEGERI 16 PEKANBARU	600.305,80	657.900.867,08	0,00	185.252,00	658.686.252,00	0,00	0,00	185.252,00	657.586.826,00	657.793.952,00	305.400,80
17	SMP NEGERI 17 PEKANBARU	153.900,00	686.436.391,00	0,00	230.625,00	686.830.625,00	0,00	0,00	230.625,00	686.450.000,00	686.680.625,00	150.000,00
18	SMP NEGERI 18 PEKANBARU	586.241,00	772.208.206,00	152.000,00	433.755,00	773.371.996,50	0,00	152.280,00	433.755,00	772.200.000,00	772.785.755,00	586.241,00
19	SMP NEGERI 19 PEKANBARU	1.229.862,00	411.276.236,00	0,00	144.962,00	412.644.862,00	0,00	0,00	144.962,00	412.500.000,00	412.644.862,00	0,00
20	SMP NEGERI 20 PEKANBARU	0,00	1.342.186.000,00	0,00	832.036,00	1.343.032.036,00	0,00	0,00	832.036,00	1.342.100.000,00	1.343.032.036,00	0,00
21	SMP NEGERI 21 PEKANBARU	24.625.277,00	1.200.200.000,00	0,00	878.208,00	1.225.654.485,00	0,00	24.281.250,00	878.208,00	1.198.550.000,00	1.224.810.458,00	1.994.027,00
22	SMP NEGERI 22 PEKANBARU	596,00	987.589.404,20	0,00	470.795,00	988.170.795,00	0,00	0,00	470.795,00	987.700.000,00	988.170.795,00	0,00
23	SMP NEGERI 23 PEKANBARU	0,00	1.147.400.000,00	0,00	590.324,00	1.147.990.324,00	0,00	0,00	590.324,00	1.147.400.000,00	1.147.990.324,00	0,00
24	SMP NEGERI 24 PEKANBARU	52.185,00	619.209.968,00	0,00	257.853,00	619.519.120,00	0,00	0,00	257.853,00	619.036.400,00	619.293.480,00	225.873,00
25	SMP NEGERI 25 PEKANBARU	181.719,00	881.000.000,00	0,00	502.944,00	881.684.263,00	181.719,00	0,00	502.944,00	881.000.000,00	881.864.363,00	0,00
26	SMP NEGERI 26 PEKANBARU	131.482,00	1.171.400.000,00	0,00	630.111,00	1.172.161.593,00	0,00	0,00	630.111,00	1.171.400.000,00	1.172.230.111,00	131.582,00
27	SMP NEGERI 27 PEKANBARU	205.063,00	641.354.153,00	0,00	326.866,00	641.887.084,00	0,00	0,00	326.866,00	641.400.000,00	641.726.866,00	160.186,00
28	SMP NEGERI 28 PEKANBARU	92.443,00	103.400.000,00	0,00	67.639,00	103.560.282,00	0,00	0,00	67.639,00	103.400.000,00	103.467.639,00	92.443,00
29	SMP NEGERI 29 PEKANBARU	44.082,00	616.900.000,00	0,00	397.986,00	616.813.468,00	0,00	0,00	397.986,00	555.075.000,00	555.462.986,00	393.682,00
30	SMP NEGERI 30 PEKANBARU	0,00	677.900.000,00	0,00	305.438,00	677.905.438,00	0,00	0,00	305.438,00	677.600.000,00	677.905.438,00	0,00
31	SMP NEGERI 31 PEKANBARU	0,00	312.200.000,00	0,00	105.529,00	312.305.529,00	0,00	0,00	105.529,00	312.200.000,00	312.305.529,00	0,00
32	SMP NEGERI 32 PEKANBARU	5.018,00	759.100.000,00	0,00	368.185,00	758.412.447,00	0,00	0,00	368.185,00	758.375.539,00	758.294.721,00	127.726,00
33	SMP NEGERI 33 PEKANBARU	75.000,00	454.025.500,00	0,00	188.550,00	454.289.550,00	0,00	0,00	188.550,00	454.100.000,00	454.288.550,00	0,00
34	SMP NEGERI 34 PEKANBARU	227,00	1.005.100.500,00	0,00	332.128,00	1.005.432.755,00	0,00	0,00	332.128,00	1.005.100.000,00	1.005.432.628,00	227,00
35	SMP NEGERI 35 PEKANBARU	12.977.762,80	660.660.874,00	0,00	327.339,00	674.194.396,20	0,00	0,00	327.339,00	680.700.000,00	681.027.339,00	167.057,20

NO.	LEMBAGA	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	PENGAFATAN TA 2023	PENERIMAAN NON BOS	PENERIMAAN JASA GIRO BANK TAHUN 2023	TOTAL PENERIMAAN TA 2023	PENGEMBALIAN JASA GIRO BANK TAHUN 2022 DI TAHUN 2023	PENGELUARAN NON BOS	EXPERT BUNGA BANK YANG DI TARIK OTOMATIS OLEH KASDA TAHUN 2023	BELANJA TA 2023	TOTAL PENGELUARAN TA 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
1	2	3	4	5	6	7= (3+4+5+6)	8	9	10	11	12= (8+9+10+11)	13 =(3+5-12)
36	SMP NEGERI 36 PEKANBARU	47.651,00	334.486.000,00	0,00	86.567,00	334.834.419,00	0,00	0,00	86.567,00	334.400.000,00	334.486.567,00	47.851,00
37	SMP NEGERI 37 PEKANBARU	0,00	840.438.000,00	0,00	424.929,00	840.824.829,00	0,00	0,00	424.929,00	840.400.000,00	840.824.929,00	0,00
38	SMP NEGERI 38 PEKANBARU	30.071,00	344.138.000,00	0,00	212.977,00	344.333.248,00	0,00	0,00	212.977,00	344.120.071,00	344.333.248,00	0,00
39	SMP NEGERI 39 PEKANBARU	71.452,00	820.198.858,00	0,00	356.914,00	820.625.914,00	0,00	0,00	356.914,00	820.268.000,00	820.624.914,00	72.000,00
40	SMP NEGERI 40 PEKANBARU	469.127,00	649.770.800,00	0,00	193.569,00	650.434.196,00	0,00	0,00	193.569,00	648.440.300,00	648.643.569,00	1.790.627,00
41	SMP NEGERI MADANI	0,00	153.900.800,00	0,00	63.342,00	153.963.342,00	0,00	0,00	63.342,00	153.900.000,00	153.963.342,00	0,00
42	SMP NEGERI 42 PEKANBARU	14.739,00	1.112.220.800,00	0,00	816.317,00	1.112.831.025,00	0,00	0,00	816.317,00	1.111.000.484,00	1.111.816.801,00	370.224,00
43	SMP NEGERI 43 PEKANBARU	123.510,00	365.031.490,00	0,00	115.476,00	365.270.476,00	0,00	0,00	115.476,00	365.200.000,00	365.315.476,00	0,00
44	SMP NEGERI 44 PEKANBARU	26.746.504,00	843.085.896,00	0,00	181.568,00	868.981.568,00	0,00	0,00	181.568,00	666.647.000,00	666.809.068,00	182.980,00
45	SMP NEGERI 45 PEKANBARU	466.300,00	602.140.000,00	0,00	199.979,00	602.788.079,00	0,00	0,00	199.979,00	602.600.000,00	602.799.979,00	0,00
46	SMP NEGERI 46 PEKANBARU	0,00	215.600.000,00	50.000,00	85.142,00	215.743.142,00	0,00	50.000,00	0,00	215.600.000,00	215.650.000,00	93.142,00
47	SMP NEGERI 47 PEKANBARU	0,00	346.400.000,00	50.000,00	78.377,00	346.528.377,00	0,00	50.000,00	78.368,00	346.400.000,00	346.528.368,00	9,00
48	SMP NEGERI 48 PEKANBARU	0,00	86.100.000,00	100.000,00	88.341,00	86.288.341,00	0,00	100.000,00	88.341,00	86.627.400,00	86.793.941,00	472.800,00
49	SMP NEGERI 49 PEKANBARU	0,00	6.600.000,00	100.000,00	4.086,00	6.704.086,00	0,00	100.000,00	0,00	6.229.300,00	6.329.300,00	376.986,00
TOTAL SMP		75.337.370,00	25.621.354.488,00	33.962.000,00	17.438.253,00	25.780.163.894,00	181.118,00	33.823.250,00	17.332.197,00	25.055.084.296,00	25.702.201.566,00	13.962.328,00

Lampiran 6

Rincian Realisasi Penerimaan Dana BOS Tahun 2023

NO.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	PENDAPATAN TA.2023	PENERIMAAN NON BOS	PENERIMAAN JASA GIRO BANK TAHUN 2023	TOTAL PENERIMAAN TA 2023
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4+5+6)
1	SD Negeri 1 Pekanbaru	39.943,00	363.600.000,00	0,00	237.763,00	363.877.526,00
2	SD Negeri 2 Pekanbaru	103.569,00	324.000.000,00	0,00	130.025,00	324.233.594,00
3	SD Negeri 3 Pekanbaru	135.465,00	415.768.167,00	2.900,00	195.477,00	416.102.029,00
4	SD Negeri 5 Pekanbaru	38.892,00	286.200.000,00	0,00	178.093,00	286.416.985,00
5	SD Negeri 6 Pekanbaru	12.345,00	452.700.000,00	0,00	277.430,00	452.989.775,00
6	SD Negeri 7 Pekanbaru	460.000,00	222.969.566,00	0,00	97.123,00	223.537.139,00
7	SD Negeri 8 Pekanbaru	0,00	388.800.000,00	0,00	187.263,00	388.987.263,00
8	SD Negeri 9 Pekanbaru	27.086,00	190.800.000,00	0,00	110.003,00	190.937.089,00
9	SD Negeri 11 Pekanbaru	766.880,00	244.033.120,00	0,00	126.422,00	244.926.422,00
10	SD Negeri 13 Pekanbaru	27.820,00	141.279.193,00	0,00	83.192,00	141.390.205,00
11	SD Negeri 14 Pekanbaru	0,00	197.100.000,00	0,00	128.270,00	197.228.270,00
12	SD Negeri 15 Pekanbaru	983.635,00	920.888.920,00	0,00	238.590,00	921.873.145,00
13	SD Negeri 16 Pekanbaru	0,00	259.200.000,00	0,00	149.698,00	259.349.698,00
14	SD Negeri 17 Pekanbaru	873,00	634.500.000,00	0,00	384.468,00	634.885.341,00
15	SD Negeri 18 Pekanbaru	199.166,00	540.900.000,00	0,00	77.145,00	541.176.311,00
16	SD Negeri 20 Pekanbaru	0,00	560.700.000,00	0,00	233.261,00	560.933.261,00
17	SD Negeri 21 Pekanbaru	322.379,00	518.329.000,00	0,00	209.068,00	518.851.447,00
18	SD Negeri 22 Pekanbaru	419.548,00	250.725.175,00	0,00	132.102,00	251.277.025,00
19	SD Negeri 23 Pekanbaru	29.202,00	314.099.200,00	0,00	143.597,00	314.271.999,00
20	SD Negeri 25 Pekanbaru	79.496,00	330.296.432,00	0,00	125.712,00	330.501.640,00
21	SD Negeri 26 Pekanbaru	0,00	550.800.000,00	0,00	369.491,00	551.169.491,00
22	SD Negeri 27 Pekanbaru	0,00	243.900.000,00	0,00	97.446,00	243.997.446,00
23	SD Negeri 28 Pekanbaru	4.821,00	143.098.549,00	0,00	54.610,00	143.157.980,00
24	SD Negeri 29 Pekanbaru	50.721,00	285.250.000,00	0,00	154.169,00	285.454.890,00
25	SD Negeri 30 Pekanbaru	0,00	224.100.000,00	0,00	134.169,00	224.234.169,00
26	SD Negeri 31 Pekanbaru	22.770,00	196.200.000,00	0,00	124.703,00	196.347.473,00
27	SD Negeri 32 Pekanbaru	4.999.966,00	251.036.803,00	0,00	134.972,00	256.231.843,00
28	SD Negeri 34 Pekanbaru	590,00	150.299.989,00	0,00	72.462,00	150.373.041,00
29	SD Negeri 35 Pekanbaru	76.521,00	415.797.301,00	0,00	153.309,00	416.027.131,00
30	SD Negeri 36 Pekanbaru	0,00	742.500.000,00	0,00	462.688,00	742.962.688,00
31	SD Negeri 37 Pekanbaru	1.000,00	782.099.000,00	0,00	310.791,00	782.410.791,00
32	SD Negeri 39 Pekanbaru	92.219,00	344.700.000,00	0,00	152.795,00	344.945.014,00
33	SD Negeri 40 Pekanbaru	246.643,00	232.200.000,00	0,00	145.299,00	232.591.942,00
34	SD Negeri 41 Pekanbaru	246.008,00	617.360.353,00	0,00	241.264,00	617.847.625,00
35	SD Negeri 42 Pekanbaru	73.177,00	659.700.000,00	0,00	353.099,00	660.126.276,00
36	SD Negeri 43 Pekanbaru	1.344.468,00	356.007.706,00	0,00	155.160,00	357.507.332,00
37	SD Negeri 44 Pekanbaru	154.938,00	448.200.000,00	0,00	302.020,00	448.656.958,00
38	SD Negeri 45 Pekanbaru	19,00	360.000.000,00	0,00	230.305,00	360.230.324,00
39	SD Negeri 46 Pekanbaru	203.255,00	612.000.000,00	0,00	346.454,00	612.549.709,00
40	SD Negeri 47 Pekanbaru	196.012,00	451.700.000,00	0,00	229.925,00	452.125.937,00
41	SD Negeri 48 Pekanbaru	239.600,00	387.580.250,00	0,00	196.900,00	388.025.750,00
42	SD Negeri 49 Pekanbaru	46.844,00	503.100.000,00	0,00	109.163,00	503.256.007,00
43	SD Negeri 50 Pekanbaru	79.190,00	82.800.000,00	0,00	46.537,00	82.925.727,00

NO.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	PENDAPATAN TA.2023	PENERIMAAN NON BOS	PENERIMAAN JASA GIRO BANK TAHUN 2023	TOTAL PENERIMAAN TA 2023
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4+5+6)
44	SD Negeri 51 Pekanbaru	13.020,00	476.987.886,00	0,00	248.730,00	477.249.649,00
45	SD Negeri 55 Pekanbaru	982.215,00	350.488.190,00	0,00	157.994,00	351.228.399,00
46	SD Negeri 56 Pekanbaru	8.045,00	110.691.955,00	0,00	33.344,00	110.733.344,00
47	SD Negeri 57 Pekanbaru	71.347,00	45.900.000,00	0,00	27.014,00	45.966.361,00
48	SD Negeri 58 Pekanbaru	130.300,00	173.696.100,00	0,00	57.227,00	173.883.327,00
49	SD Negeri 59 Pekanbaru	37.827,00	459.900.000,00	0,00	310.715,00	460.248.542,00
50	SD Negeri 60 Pekanbaru	0,00	161.100.000,00	0,00	75.307,00	161.175.307,00
51	SD Negeri 61 Pekanbaru	23.803,00	385.200.000,00	0,00	218.000,00	385.441.803,00
52	SD Negeri 62 Pekanbaru	953.738,00	535.458.028,00	0,00	281.518,00	536.693.284,00
53	SD Negeri 64 Pekanbaru	20.979,00	112.482.250,00	0,00	39.768,00	112.543.002,00
54	SD Negeri 63 Pekanbaru	155.273,00	215.100.000,00	0,00	143.597,00	215.398.870,00
55	SD Negeri 66 Pekanbaru	136,00	273.599.862,00	0,00	150.426,00	273.750.426,00
56	SD Negeri 67 Pekanbaru	2.536.900,00	302.563.400,00	0,00	133.212,00	305.233.212,00
57	SD Negeri 68 Pekanbaru	869,00	484.100.000,00	0,00	270.344,00	484.371.213,00
58	SD Negeri 69 Pekanbaru	0,00	153.000.000,00	0,00	54.134,00	153.054.134,00
59	SD Negeri 70 Pekanbaru	85.410,00	375.300.000,00	0,00	103.102,00	375.488.512,00
60	SD Negeri 71 Pekanbaru	905,00	130.500.000,00	0,00	52.853,00	130.553.458,00
61	SD Negeri 72 Pekanbaru	405,00	193.500.000,00	0,00	77.816,00	193.578.221,00
62	SD Negeri 73 Pekanbaru	22,00	172.800.000,00	0,00	73.832,00	172.873.854,00
63	SD Negeri 74 Pekanbaru	0.747,00	262.800.000,00	0,00	151.775,00	262.958.522,00
64	SD Negeri 76 Pekanbaru	67.489,00	476.023.450,00	0,00	238.133,00	476.349.072,00
65	SD Negeri 77 Pekanbaru	100.146,00	246.499.804,00	0,00	197.130,00	246.797.135,00
66	SD Negeri 79 Pekanbaru	153.633,00	328.500.000,00	0,00	228.057,00	328.881.690,00
67	SD Negeri 80 Pekanbaru	85.504,00	620.015.419,00	0,00	306.498,00	620.407.421,00
68	SD Negeri 81 Pekanbaru	947,00	410.399.753,00	0,00	249.628,00	410.649.828,00
69	SD Negeri 82 Pekanbaru	37.781,00	173.690.453,00	0,00	90.894,00	173.819.128,00
70	SD Negeri 83 Pekanbaru	47.190,00	463.500.000,00	0,00	298.550,00	463.845.740,00
71	SD Negeri 84 Pekanbaru	3.475,00	512.096.525,00	0,00	285.445,00	512.385.445,00
72	SD Negeri 85 Pekanbaru	89.412,00	353.675.436,00	0,00	181.039,00	353.946.861,00
73	SD Negeri 86 Pekanbaru	245.100,00	213.270.906,00	0,00	42.013,00	213.558.013,00
74	SD Negeri 87 Pekanbaru	278.179,00	67.486.068,00	0,00	28.461,00	67.861.656,00
75	SD Negeri 88 Pekanbaru	902.924,00	181.800.000,00	0,00	107.942,00	182.210.866,00
76	SD Negeri 89 Pekanbaru	32.936,00	232.175.870,00	0,00	93.001,00	232.304.807,00
77	SD Negeri 90 Pekanbaru	250.000,00	681.300.000,00	4.000.000,00	449.596,00	685.999.596,00
78	SD Negeri 91 Pekanbaru	581.607,00	328.885.327,00	0,00	153.595,00	329.620.529,00
79	SD Negeri 92 Pekanbaru	30.093,00	348.300.000,00	0,00	214.146,00	348.544.239,00
80	SD Negeri 93 Pekanbaru	374.000,00	300.330.000,00	0,00	84.788,00	300.788.788,00
81	SD Negeri 94 Pekanbaru	0,00	436.500.000,00	0,00	276.425,00	436.776.425,00
82	SD Negeri 95 Pekanbaru	0,00	576.600.000,00	0,00	364.577,00	576.964.577,00
83	SD Negeri 96 Pekanbaru	0,00	211.500.000,00	0,00	83.549,00	211.583.549,00
84	SD Negeri 97 Pekanbaru	253.920,00	325.797.510,00	0,00	106.125,00	326.157.555,00
85	SD Negeri 98 Pekanbaru	147.019,00	523.787.101,00	0,00	337.883,00	524.272.003,00
86	SD Negeri 99 Pekanbaru	586,00	186.000.000,00	0,00	133.419,00	186.134.065,00
87	SD Negeri 100 Pekanbaru	341.144,00	110.383.212,00	0,00	27.757,00	110.762.113,00
88	SD Negeri 102 Pekanbaru	101.921,00	294.298.237,00	0,00	129.056,00	294.527.216,00
89	SD Negeri 103 Pekanbaru	0,00	123.300.000,00	0,00	34.972,00	123.334.972,00
90	SD Negeri 104 Pekanbaru	97.231,00	233.975.765,00	0,00	86.108,00	234.159.104,00
91	SD Negeri 105 Pekanbaru	128.086,00	660.300.000,00	0,00	425.496,00	660.853.582,00

NO.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	PENDAPATAN TA.2023	PENERIMAAN NON BOS	PENERIMAAN JASA GIRO BANK TAHUN 2023	TOTAL PENERIMAAN TA 2023
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)
92	SD Negeri 106 Pekanbaru	58.558,00	429.300.000,00	0,00	260.103,00	429.618.661,00
93	SD Negeri 107 Pekanbaru	0,00	528.300.000,00	0,00	343.613,00	528.643.613,00
94	SD Negeri 108 Pekanbaru	69.952,00	337.500.000,00	0,00	207.693,00	337.777.645,00
95	SD Negeri 109 Pekanbaru	37.528,00	401.400.000,00	0,00	286.906,00	401.724.434,00
96	SD Negeri 110 Pekanbaru	82.973,00	553.429.063,00	0,00	281.595,00	553.792.731,00
97	SD Negeri 111 Pekanbaru	171.867,00	851.400.000,00	0,00	597.821,00	852.169.688,00
98	SD Negeri 112 Pekanbaru	95.764,00	549.900.000,00	0,00	362.619,00	550.358.383,00
99	SD Negeri 113 Pekanbaru	140.542,00	366.271.582,00	0,00	147.998,00	366.560.122,00
100	SD Negeri 114 Pekanbaru	5.849,00	513.894.331,00	0,00	277.375,00	514.177.555,00
101	SD Negeri 115 Pekanbaru	0,00	744.300.000,00	0,00	446.158,00	744.746.158,00
102	SD Negeri 116 Pekanbaru	0,00	544.500.000,00	0,00	313.799,00	544.813.799,00
103	SD Negeri 117 Pekanbaru	172.867,00	271.780.000,00	0,00	148.752,00	272.099.419,00
104	SD Negeri 118 Pekanbaru	500.385,00	541.700.000,00	0,00	326.729,00	542.527.114,00
105	SD Negeri 119 Pekanbaru	20.000,00	269.700.000,00	0,00	128.854,00	269.848.854,00
106	SD Negeri 120 Pekanbaru	23.000,00	128.700.000,00	0,00	48.948,00	128.771.948,00
107	SD Negeri 122 Pekanbaru	439,00	335.700.000,00	0,00	126.012,00	335.826.451,00
108	SD Negeri 123 Pekanbaru	32.226,00	380.700.000,00	0,00	139.833,00	380.872.059,00
109	SD Negeri 124 Pekanbaru	353.314,00	174.600.000,00	0,00	89.797,00	175.043.111,00
110	SD Negeri 125 Pekanbaru	21.369,00	211.500.000,00	0,00	138.601,00	211.659.970,00
111	SD Negeri 126 Pekanbaru	292.023,00	116.997.934,00	0,00	64.507,00	117.354.464,00
112	SD Negeri 127 Pekanbaru	20.860,00	133.199.856,00	0,00	49.296,00	133.270.008,00
113	SD Negeri 128 Pekanbaru	122.793,00	644.398.816,00	0,00	323.501,00	644.845.104,00
114	SD Negeri 130 Pekanbaru	50.000,00	462.350.000,00	0,00	237.615,00	462.637.615,00
115	SD Negeri 131 Pekanbaru	9.074,00	287.991.486,00	0,00	90.660,00	288.091.224,00
116	SD Negeri 132 Pekanbaru	168.418,00	342.881.864,00	0,00	188.210,00	343.238.292,00
117	SD Negeri 133 Pekanbaru	81.758,00	552.600.000,00	0,00	343.479,00	553.025.237,00
118	SD Negeri 134 Pekanbaru	658.785,00	188.461.725,00	0,00	102.423,00	189.222.933,00
119	SD Negeri 135 Pekanbaru	157.948,00	83.698.804,00	0,00	42.730,00	83.899.582,00
120	SD Negeri 136 Pekanbaru	0,00	524.700.000,00	0,00	258.537,00	524.958.537,00
121	SD Negeri 137 Pekanbaru	81.977,00	100.777.500,00	0,00	46.198,00	100.905.675,00
122	SD Negeri 138 Pekanbaru	0,00	598.500.000,00	0,00	360.967,00	598.860.967,00
123	SD Negeri 139 Pekanbaru	500,00	163.600.000,00	204.570,00	68.964,00	164.073.734,00
124	SD Negeri 140 Pekanbaru	81.443,00	154.800.000,00	0,00	95.125,00	154.976.568,00
125	SD Negeri 141 Pekanbaru	18.145,00	365.400.000,00	0,00	191.352,00	365.609.497,00
126	SD Negeri 142 Pekanbaru	108.389,00	370.800.000,00	0,00	230.163,00	371.138.552,00
127	SD Negeri 143 Pekanbaru	10.744,00	308.589.256,00	0,00	180.740,00	308.780.740,00
128	SD Negeri 144 Pekanbaru	0,00	270.800.000,00	0,00	142.959,00	270.942.959,00
129	SD Negeri 145 Pekanbaru	331.167,30	390.216.909,00	0,00	219.838,00	390.767.914,00
130	SD Negeri 146 Pekanbaru	290.767,00	400.500.000,00	0,00	190.445,00	400.981.212,00
131	SD Negeri 147 Pekanbaru	201.153,00	776.600.603,00	0,00	438.142,00	777.278.898,00
132	SD Negeri 148 Pekanbaru	210.313,00	718.900.000,00	0,00	182.506,00	719.292.819,00
133	SD Negeri 149 Pekanbaru	8.364,00	469.796.710,00	0,00	244.432,00	470.049.506,00
134	SD Negeri 150 Pekanbaru	367.853,00	415.776.604,00	0,00	218.704,00	416.363.161,00
135	SD Negeri 151 Pekanbaru	133.515,00	595.466.727,00	0,00	306.291,00	595.906.533,00
136	SD Negeri 152 Pekanbaru	5.388,00	125.100.000,00	0,00	62.424,00	125.167.812,00
137	SD Negeri 153 Pekanbaru	485.126,00	400.274.999,00	0,00	61.447,00	400.821.572,00
138	SD Negeri 157 Pekanbaru	0,00	295.200.000,00	0,00	66.296,00	295.266.296,00
139	SD Negeri 158 Pekanbaru	94.073,00	390.600.000,00	0,00	237.293,00	390.931.366,00

NO.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	PENDAPATAN TA.2023	PENERIMAAN NON BOS	PENERIMAAN JASA GIRO BANK TAHUN 2023	TOTAL PENERIMAAN TA 2023
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4+5+6)
140	SD Negeri 159 Pekanbaru	49.054,00	363.600.000,00	0,00	240.854,00	363.889.908,00
141	SD Negeri 160 Pekanbaru	334.574,00	372.600.000,00	0,00	215.275,00	373.149.849,00
142	SD Negeri 161 Pekanbaru	130.574,00	323.100.000,00	0,00	178.537,00	323.409.111,00
143	SD Negeri 162 Pekanbaru	117.998,00	379.722.400,00	0,00	151.689,00	379.992.087,00
144	SD Negeri 163 Pekanbaru	212.700,00	543.600.000,00	0,00	169.047,00	544.001.747,00
145	SD Negeri 164 Pekanbaru	7.485,00	619.200.000,00	0,00	409.835,00	619.617.320,00
146	SD Negeri 165 Pekanbaru	560.746,00	387.900.000,00	0,00	259.666,00	388.730.352,00
147	SD Negeri 166 Pekanbaru	0,00	353.700.000,00	0,00	195.516,00	353.896.516,00
148	SD Negeri 167 Pekanbaru	4.400,00	731.695.600,00	0,00	175.843,00	731.875.843,00
149	SD Negeri 168 Pekanbaru	17,00	333.899.983,00	0,00	159.131,00	334.059.131,00
150	SD Negeri 169 Pekanbaru	100,00	801.900.000,00	0,00	468.200,00	802.368.300,00
151	SD Negeri 170 Pekanbaru	0,00	415.800.000,00	0,00	200.135,00	416.000.135,00
152	SD Negeri 171 Pekanbaru	357.479,00	586.850.529,00	0,00	254.123,00	587.315.131,00
153	SD Negeri 172 Pekanbaru	27.738,00	322.200.000,00	0,00	112.971,00	322.340.709,00
154	SD Negeri 173 Pekanbaru	8.666,00	227.897.791,00	0,00	156.713,00	227.983.170,00
155	SD Negeri 174 Pekanbaru	246.523,00	417.343.566,00	0,00	218.296,00	417.808.405,00
156	SD Negeri 175 Pekanbaru	0,00	251.100.000,00	0,00	131.491,00	251.231.491,00
157	SD Negeri 176 Pekanbaru	7.829,00	543.600.000,00	0,00	300.748,00	543.908.577,00
158	SD Negeri 177 Pekanbaru	161.318,00	364.500.000,00	0,00	210.542,00	364.871.860,00
159	SD Negeri 178 Pekanbaru	42.046,00	134.092.000,00	0,00	62.614,00	134.196.660,00
160	SD Negeri 179 Pekanbaru	410,00	612.900.000,00	0,00	332.543,00	613.232.953,00
161	SD Negeri 180 Pekanbaru	287.579,00	409.740.900,00	4.800.000,00	98.319,00	410.926.486,00
162	SD Negeri 181 Pekanbaru	0,00	743.400.000,00	0,00	104.706,00	743.504.706,00
163	SD Negeri 182 Pekanbaru	167.120,00	636.300.000,00	0,00	362.492,00	636.829.612,00
164	SD Negeri 183 Pekanbaru	126.246,00	640.800.000,00	0,00	414.020,00	641.342.266,00
165	SD Negeri 184 Pekanbaru	0,00	611.100.000,00	0,00	282.905,00	611.382.905,00
166	SD Negeri 185 Pekanbaru	162.771,00	126.900.000,00	0,00	74.813,00	127.137.584,00
167	SD Negeri 186 Pekanbaru	211.521,00	515.488.973,00	0,00	268.311,00	515.968.805,00
168	SD Negeri 187 Pekanbaru	0,00	593.100.000,00	0,00	270.969,00	593.370.969,00
169	SD Negeri 188 Pekanbaru	14.847,00	410.400.000,00	27,00	254.035,00	410.668.909,00
170	SD Negeri 189 Pekanbaru	60.000,00	548.240.000,00	0,00	70.196,00	548.370.188,00
171	SD Negeri 190 Pekanbaru	236.564,00	349.200.000,00	0,00	238.277,00	349.674.841,00
172	SD Negeri 191 Pekanbaru	54.134,00	445.460.000,00	0,00	244.674,00	445.758.808,00
173	SD Negeri 192 Pekanbaru	0,00	405.000.000,00	0,00	249.270,00	465.249.279,00
174	SD Negeri 193 Pekanbaru	78.710,00	359.100.000,00	0,00	223.315,00	359.402.025,00
175	SD Negeri 194 Pekanbaru	25.726,00	683.081.811,00	0,00	366.338,00	683.473.875,00
176	SD Negeri 195 Pekanbaru	842,00	186.300.000,00	0,00	100.174,00	186.401.016,00
177	SD Negeri 196 Pekanbaru	432.828,00	238.120.000,00	0,00	130.188,00	238.680.826,00
TOTAL 60		39.033.161,00	66.953.106.926,00	9.907.497,00	33.081.005,00	67.026.133.291,00

Lampiran 7

Rincian Realisasi Penerimaan Dana BOS Tahun 2023

NO.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	PENDAPATAN TA.2023	PENERIMAAN NON BOS	PENERIMAAN JASA GIRO BANK TAHUN 2023	TOTAL PENERIMAAN TA 2023
1	2	3	4	5	6	7= (3+4+5+6)
1	SMP NEGERI 1 PEKANBARU	0,00	763.100.000,00	2.670.800,00	801.717,00	766.571.717,00
2	SMP NEGERI 2 PEKANBARU	850.300,00	499.999.700,00	0,00	147.066,00	500.647.066,00
3	SMP NEGERI 3 PEKANBARU	1.217.913,00	641.300.000,00	0,00	340.831,00	642.858.744,00
4	SMP NEGERI 4 PEKANBARU	1.267.831,00	1.300.812.389,00	0,00	615.115,00	1.302.815.115,00
5	SMP NEGERI 5 PEKANBARU	240.132,00	975.280.080,00	20.000,00	420.289,00	975.960.401,00
6	SMP NEGERI 6 PEKANBARU	731.388,00	1.429.890.350,00	0,00	713.768,00	1.431.335.511,00
7	SMP NEGERI 7 PEKANBARU	850.799,00	462.000.000,00	0,00	279.717,00	462.830.516,00
8	SMP NEGERI 8 PEKANBARU	0,00	1.232.800.080,00	0,00	394.029,00	1.233.194.029,00
9	SMP NEGERI 9 PEKANBARU	1.662.951,00	1.310.100.080,00	0,00	686.220,00	1.312.649.171,00
10	SMP NEGERI 10 PEKANBARU	146.631,00	926.200.080,00	0,00	618.161,00	926.964.794,00
11	SMP NEGERI 11 PEKANBARU	358.547,00	957.999.774,00	0,00	383.154,00	958.741.475,00
12	SMP NEGERI 12 PEKANBARU	15.051,00	877.793.080,00	0,00	421.380,00	878.240.331,00
13	SMP NEGERI 13 PEKANBARU	88.780,00	1.329.596.672,00	0,00	505.088,00	1.330.190.540,00
14	SMP NEGERI 14 PEKANBARU	0,00	900.700.000,00	0,00	492.349,00	901.192.349,00
15	SMP NEGERI 15 PEKANBARU	462.369,00	819.500.000,00	30.200.000,00	430.170,00	850.592.539,00
16	SMP NEGERI 16 PEKANBARU	600.303,00	857.303.697,00	0,00	185.252,00	858.089.252,00
17	SMP NEGERI 17 PEKANBARU	153.009,00	888.436.061,00	0,00	230.825,00	888.820.825,00
18	SMP NEGERI 18 PEKANBARU	586.241,00	772.200.000,00	152.000,00	433.755,00	773.371.996,00
19	SMP NEGERI 19 PEKANBARU	1.229.950,00	411.270.050,00	0,00	144.882,00	412.644.882,00
20	SMP NEGERI 20 PEKANBARU	0,00	1.342.100.000,00	0,00	902.036,00	1.343.332.036,00
21	SMP NEGERI 21 PEKANBARU	24.825.277,00	1.200.200.000,00	0,00	979.208,00	1.225.904.485,00
22	SMP NEGERI 22 PEKANBARU	596,00	997.699.434,00	0,00	470.766,00	998.170.796,00
23	SMP NEGERI 23 PEKANBARU	0,00	1.147.400.000,00	0,00	580.324,00	1.147.980.324,00
24	SMP NEGERI 24 PEKANBARU	52.135,00	619.299.568,00	0,00	267.053,00	619.619.126,00
25	SMP NEGERI 25 PEKANBARU	161.719,00	891.300.000,00	0,00	582.544,00	891.964.263,00
26	SMP NEGERI 26 PEKANBARU	121.592,00	1.171.800.080,00	0,00	630.111,00	1.172.351.783,00
27	SMP NEGERI 27 PEKANBARU	205.893,00	641.254.183,00	0,00	326.998,00	641.787.084,00
28	SMP NEGERI 28 PEKANBARU	92.443,00	103.400.080,00	0,00	67.939,00	103.560.282,00
29	SMP NEGERI 29 PEKANBARU	44.582,00	655.800.080,00	0,00	367.986,00	656.212.668,00
30	SMP NEGERI 30 PEKANBARU	0,00	677.600.000,00	0,00	305.436,00	677.905.436,00
31	SMP NEGERI 31 PEKANBARU	0,00	312.200.000,00	0,00	105.529,00	312.305.529,00
32	SMP NEGERI 32 PEKANBARU	3.252,00	759.100.000,00	0,00	309.195,00	759.412.447,00
33	SMP NEGERI 33 PEKANBARU	75.000,00	454.025.000,00	0,00	188.650,00	454.288.650,00
34	SMP NEGERI 34 PEKANBARU	207,00	1.005.100.000,00	0,00	332.528,00	1.005.432.755,00
35	SMP NEGERI 35 PEKANBARU	12.977.783,00	656.889.874,00	0,00	327.339,00	670.194.996,00
36	SMP NEGERI 36 PEKANBARU	47.851,00	334.400.000,00	0,00	86.567,00	334.534.418,00
37	SMP NEGERI 37 PEKANBARU	0,00	840.400.000,00	0,00	424.929,00	840.824.929,00
38	SMP NEGERI 38 PEKANBARU	20.671,00	344.100.000,00	0,00	212.677,00	344.333.348,00
39	SMP NEGERI 39 PEKANBARU	71.462,00	620.168.538,00	0,00	365.914,00	620.625.914,00
40	SMP NEGERI 40 PEKANBARU	480.627,00	649.730.000,00	0,00	193.569,00	650.404.196,00
41	SMP NEGERI MADANI	0,00	163.900.000,00	0,00	63.342,00	163.963.342,00
42	SMP NEGERI 42 PEKANBARU	14.108,00	1.112.200.000,00	0,00	616.317,00	1.112.831.025,00
43	SMP NEGERI 43 PEKANBARU	122.510,00	365.077.480,00	0,00	115.476,00	365.315.476,00
44	SMP NEGERI 44 PEKANBARU	25.746.004,00	543.263.006,00	0,00	161.568,00	568.961.508,00
45	SMP NEGERI 45 PEKANBARU	460.000,00	602.140.000,00	0,00	198.976,00	602.798.976,00
46	SMP NEGERI 46 PEKANBARU	0,00	215.600.000,00	50.000,00	93.142,00	215.743.142,00
47	SMP NEGERI 47 PEKANBARU	0,00	248.400.000,00	50.000,00	79.377,00	248.529.377,00

NO.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	PENDAPATAN TA.2023	PENERIMAAN NON BOS	PENERIMAAN JASA GIRO BANK TAHUN 2023	TOTAL PENERIMAAN TA 2023
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4+5+6)
48	SMP NEGERI 48 PEKANBARU	0,00	89.100.000,00	100.000,00	66.541,00	89.266.541,00
49	SMP NEGERI 49 PEKANBARU	0,00	6.600.000,00	100.000,00	4.996,00	6.704.996,00
TOTAL SMP		75.797.375,00	33.623.394.096,00	33.542.000,00	17.439.253,00	33.730.183.094,00

Lampiran 8

Rincian Realisasi Belanja Dana BOS Tahun 2023

NO.	URAIAN	B. BARANG & JASA	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	Total Belanja Dana Bos
1	2	33	34	35	36=(33+34+35)
1	SD Negeri 1 Pekanbaru	324.151.000,00	28.160.000,00	11.289.000,00	363.600.000,00
2	SD Negeri 2 Pekanbaru	289.983.000,00	560.000,00	32.457.000,00	324.000.000,00
3	SD Negeri 3 Pekanbaru	340.746.269,00	0,00	75.155.800,00	415.902.069,00
4	SD Negeri 5 Pekanbaru	227.736.132,00	11.958.000,00	46.544.800,00	286.238.932,00
5	SD Negeri 6 Pekanbaru	365.313.745,00	27.806.800,00	59.779.500,00	452.700.045,00
6	SD Negeri 7 Pekanbaru	188.298.200,00	5.000.000,00	30.151.800,00	223.450.000,00
7	SD Negeri 8 Pekanbaru	302.984.300,00	38.800.500,00	47.215.200,00	388.800.000,00
8	SD Negeri 9 Pekanbaru	157.332.000,00	7.900.000,00	25.568.000,00	190.800.000,00
9	SD Negeri 11 Pekanbaru	202.841.000,00	23.054.000,00	18.905.000,00	244.800.000,00
10	SD Negeri 13 Pekanbaru	122.588.313,00	1.650.000,00	17.068.700,00	141.307.013,00
11	SD Negeri 14 Pekanbaru	123.576.700,00	38.212.000,00	35.308.300,00	197.100.000,00
12	SD Negeri 15 Pekanbaru	366.747.800,00	62.480.000,00	72.282.200,00	501.480.000,00
13	SD Negeri 16 Pekanbaru	202.253.400,00	9.395.400,00	47.551.200,00	259.200.000,00
14	SD Negeri 17 Pekanbaru	518.156.073,00	23.560.000,00	92.785.800,00	634.500.873,00
15	SD Negeri 18 Pekanbaru	433.274.000,00	53.090.000,00	54.536.000,00	540.900.000,00
16	SD Negeri 20 Pekanbaru	429.210.000,00	23.852.000,00	107.638.000,00	560.700.000,00
17	SD Negeri 21 Pekanbaru	402.742.379,00	47.740.000,00	68.160.000,00	518.642.379,00
18	SD Negeri 22 Pekanbaru	223.537.557,00	11.310.000,00	16.278.100,00	251.125.657,00
19	SD Negeri 23 Pekanbaru	277.920.271,00	7.209.500,00	28.970.400,00	314.100.171,00
20	SD Negeri 25 Pekanbaru	234.708.568,00	20.050.000,00	75.540.000,00	330.298.568,00
21	SD Negeri 26 Pekanbaru	456.813.100,00	0,00	93.986.900,00	550.800.000,00
22	SD Negeri 27 Pekanbaru	219.201.100,00	5.354.500,00	19.344.400,00	243.900.000,00
23	SD Negeri 28 Pekanbaru	112.826.470,00	4.330.000,00	25.946.900,00	143.103.370,00
24	SD Negeri 29 Pekanbaru	244.807.200,00	19.635.000,00	20.657.800,00	285.300.000,00
25	SD Negeri 30 Pekanbaru	163.025.500,00	17.539.000,00	43.535.500,00	224.100.000,00
26	SD Negeri 31 Pekanbaru	175.683.770,00	0,00	20.538.000,00	196.222.770,00
27	SD Negeri 32 Pekanbaru	193.139.400,00	8.700.000,00	53.660.600,00	255.500.000,00
28	SD Negeri 34 Pekanbaru	136.771.870,00	2.100.000,00	12.428.700,00	150.300.570,00
29	SD Negeri 35 Pekanbaru	316.678.022,00	64.600.000,00	34.595.800,00	415.873.822,00
30	SD Negeri 36 Pekanbaru	533.111.100,00	25.799.300,00	83.589.600,00	742.500.000,00
31	SD Negeri 37 Pekanbaru	698.655.000,00	45.140.000,00	38.105.000,00	782.900.000,00
32	SD Negeri 39 Pekanbaru	326.581.200,00	14.600.000,00	3.518.800,00	344.700.000,00
33	SD Negeri 40 Pekanbaru	184.521.243,00	19.063.000,00	28.862.400,00	232.446.643,00
34	SD Negeri 41 Pekanbaru	482.747.200,00	30.210.000,00	104.643.300,00	617.600.500,00
35	SD Negeri 42 Pekanbaru	467.932.177,00	7.300.000,00	164.541.000,00	639.773.177,00
36	SD Negeri 43 Pekanbaru	270.243.994,00	20.070.000,00	67.031.300,00	357.342.294,00
37	SD Negeri 44 Pekanbaru	348.854.136,00	20.300.000,00	79.200.800,00	448.354.936,00
38	SD Negeri 45 Pekanbaru	266.666.019,00	50.838.200,00	42.495.800,00	360.000.019,00
39	SD Negeri 46 Pekanbaru	422.994.465,00	31.086.890,00	158.112.900,00	612.203.255,90
40	SD Negeri 47 Pekanbaru	326.274.012,00	58.329.000,00	67.293.000,00	451.896.012,00
41	SD Negeri 48 Pekanbaru	312.577.850,00	2.500.000,00	72.752.000,00	387.829.850,00
42	SD Negeri 49 Pekanbaru	317.822.336,00	14.585.100,00	170.737.000,00	503.144.436,00
43	SD Negeri 50 Pekanbaru	75.418.700,00	1.100.000,00	5.281.300,00	82.800.000,00
44	SD Negeri 51 Pekanbaru	419.464.299,00	40.719.925,00	16.816.695,00	477.000.919,00

NO.	URAIAN	B. BARANG & JASA	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	Total Belanja Dana Bos
1	2	33	34	35	35=(33+34+35)
45	SD Negeri 55 Pekanbaru	280.285.000,00	28.205.000,00	62.510.000,00	351.000.000,00
46	SD Negeri 56 Pekanbaru	93.359.400,00	8.963.000,00	8.377.600,00	110.700.000,00
47	SD Negeri 57 Pekanbaru	44.099.200,00	0,00	1.800.800,00	45.900.000,00
48	SD Negeri 58 Pekanbaru	135.412.100,00	2.750.000,00	35.534.000,00	173.696.100,00
49	SD Negeri 59 Pekanbaru	414.622.900,00	12.180.000,00	33.097.100,00	459.900.000,00
50	SD Negeri 60 Pekanbaru	132.522.000,00	4.662.000,00	23.916.000,00	161.100.000,00
51	SD Negeri 61 Pekanbaru	303.102.200,00	19.493.300,00	62.604.500,00	385.200.000,00
52	SD Negeri 62 Pekanbaru	421.919.066,00	41.010.100,00	73.482.600,00	536.411.766,00
53	SD Negeri 64 Pekanbaru	112.223.234,00	0,00	280.000,00	112.503.234,00
54	SD Negeri 63 Pekanbaru	170.918.000,00	11.692.000,00	32.490.000,00	215.100.000,00
55	SD Negeri 65 Pekanbaru	212.681.800,00	6.045.000,00	54.733.200,00	273.460.000,00
56	SD Negeri 67 Pekanbaru	268.962.900,00	1.150.000,00	34.987.100,00	305.100.000,00
57	SD Negeri 68 Pekanbaru	379.962.500,00	32.426.100,00	81.711.400,00	494.100.000,00
58	SD Negeri 69 Pekanbaru	126.504.400,00	12.025.000,00	14.470.600,00	153.000.000,00
59	SD Negeri 70 Pekanbaru	271.503.446,00	6.000.000,00	97.797.400,00	375.300.846,00
60	SD Negeri 71 Pekanbaru	122.168.600,00	536.000,00	7.796.400,00	130.500.000,00
61	SD Negeri 72 Pekanbaru	175.780.885,00	0,00	17.718.800,00	193.499.685,00
62	SD Negeri 73 Pekanbaru	150.730.400,00	7.250.000,00	14.819.600,00	172.800.000,00
63	SD Negeri 74 Pekanbaru	233.201.900,00	0,00	29.598.100,00	262.800.000,00
64	SD Negeri 76 Pekanbaru	369.714.080,00	36.206.920,00	70.179.000,00	476.100.000,00
65	SD Negeri 77 Pekanbaru	226.402.200,00	2.500.000,00	17.697.800,00	246.600.000,00
66	SD Negeri 79 Pekanbaru	256.890.000,00	21.940.000,00	49.970.000,00	328.500.000,00
67	SD Negeri 80 Pekanbaru	431.182.123,00	44.511.000,00	144.407.800,00	620.100.923,00
68	SD Negeri 81 Pekanbaru	353.527.000,00	9.302.900,00	47.570.100,00	410.400.000,00
69	SD Negeri 82 Pekanbaru	146.675.203,00	10.955.000,00	15.069.300,00	172.699.503,00
70	SD Negeri 83 Pekanbaru	369.807.800,00	58.192.800,00	35.499.400,00	463.500.000,00
71	SD Negeri 84 Pekanbaru	322.496.300,00	107.826.600,00	81.777.100,00	512.100.000,00
72	SD Negeri 85 Pekanbaru	276.681.782,00	21.987.000,00	56.001.000,00	353.749.782,00
73	SD Negeri 86 Pekanbaru	196.724.400,00	886.000,00	13.903.600,00	211.516.000,00
74	SD Negeri 87 Pekanbaru	54.868.234,00	6.000.000,00	6.905.000,00	67.773.234,00
75	SD Negeri 88 Pekanbaru	171.585.000,00	2.475.000,00	7.740.000,00	181.800.000,00
76	SD Negeri 89 Pekanbaru	169.936.186,00	20.663.000,00	21.566.500,00	232.168.686,00
77	SD Negeri 90 Pekanbaru	465.407.068,00	35.150.000,00	158.721.800,00	681.278.868,00
78	SD Negeri 91 Pekanbaru	308.730.634,00	7.911.500,00	12.824.800,00	329.466.934,00
79	SD Negeri 92 Pekanbaru	260.000.700,00	26.900.000,00	41.399.300,00	348.300.000,00
80	SD Negeri 93 Pekanbaru	253.485.000,00	3.285.000,00	43.832.000,00	300.800.000,00
81	SD Negeri 94 Pekanbaru	368.015.300,00	19.849.000,00	46.634.700,00	436.500.000,00
82	SD Negeri 95 Pekanbaru	364.162.100,00	17.900.000,00	196.537.900,00	578.600.000,00
83	SD Negeri 96 Pekanbaru	188.857.400,00	3.600.000,00	19.042.600,00	211.500.000,00
84	SD Negeri 97 Pekanbaru	277.290.000,00	8.760.000,00	39.722.000,00	325.800.000,00
85	SD Negeri 98 Pekanbaru	419.748.570,00	22.345.700,00	81.796.300,00	523.890.570,00
86	SD Negeri 99 Pekanbaru	169.168.900,00	7.200.000,00	21.631.100,00	198.000.000,00
87	SD Negeri 100 Pekanbaru	103.002.500,00	4.137.500,00	3.560.000,00	110.700.000,00
88	SD Negeri 102 Pekanbaru	233.107.000,00	22.414.000,00	38.719.000,00	294.240.000,00
89	SD Negeri 103 Pekanbaru	114.999.829,00	2.080.000,00	6.220.700,00	123.299.529,00
90	SD Negeri 104 Pekanbaru	148.508.600,00	19.165.400,00	66.326.000,00	234.000.000,00
91	SD Negeri 105 Pekanbaru	555.497.686,00	46.640.500,00	86.089.900,00	690.428.086,00
92	SD Negeri 106 Pekanbaru	328.475.359,00	31.025.000,00	68.334.006,00	428.834.360,00

NO.	URAIAN	B. BARANG & JASA	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	Total Belanja Dana Bos
1	2	33	34	35	36=(33+34+35)
93	SD Negeri 107 Pekanbaru	412.398.000,00	32.750.000,00	83.152.800,00	528.300.000,00
94	SD Negeri 108 Pekanbaru	239.557.400,00	41.537.000,00	56.405.600,00	337.500.000,00
95	SD Negeri 109 Pekanbaru	306.079.600,00	9.175.000,00	86.166.500,00	401.421.100,00
96	SD Negeri 110 Pekanbaru	485.071.200,00	3.885.000,00	64.543.800,00	553.360.000,00
97	SD Negeri 111 Pekanbaru	628.584.867,00	53.414.000,00	171.573.000,00	851.571.867,00
98	SD Negeri 112 Pekanbaru	468.996.650,00	28.508.350,00	60.393.000,00	549.900.000,00
99	SD Negeri 113 Pekanbaru	306.652.124,00	500.000,00	65.260.000,00	388.412.124,00
100	SD Negeri 114 Pekanbaru	416.297.380,00	48.174.300,00	55.428.500,00	513.900.180,00
101	SD Negeri 115 Pekanbaru	622.858.000,00	89.636.000,00	51.835.000,00	744.300.000,00
102	SD Negeri 116 Pekanbaru	387.343.950,00	68.914.650,00	88.241.400,00	544.500.000,00
103	SD Negeri 117 Pekanbaru	242.468.880,00	15.171.000,00	14.219.600,00	271.859.480,00
104	SD Negeri 118 Pekanbaru	360.180.285,00	90.182.500,00	91.837.600,00	542.200.385,00
105	SD Negeri 119 Pekanbaru	158.947.100,00	24.313.900,00	26.439.000,00	209.700.000,00
106	SD Negeri 120 Pekanbaru	84.711.100,00	16.798.000,00	15.190.900,00	128.700.000,00
107	SD Negeri 122 Pekanbaru	290.320.039,00	14.923.100,00	30.457.300,00	335.700.439,00
108	SD Negeri 123 Pekanbaru	284.107.400,00	18.730.000,00	67.862.600,00	380.700.000,00
109	SD Negeri 124 Pekanbaru	161.800.000,00	3.800.000,00	9.200.000,00	174.800.000,00
110	SD Negeri 125 Pekanbaru	181.467.700,00	6.050.000,00	23.982.300,00	211.500.000,00
111	SD Negeri 126 Pekanbaru	93.414.950,00	11.225.150,00	12.359.900,00	117.000.000,00
112	SD Negeri 127 Pekanbaru	114.453.100,00	6.875.000,00	11.871.900,00	133.200.000,00
113	SD Negeri 128 Pekanbaru	487.238.500,00	91.867.500,00	65.494.000,00	644.600.000,00
114	SD Negeri 130 Pekanbaru	407.853.700,00	34.900.000,00	39.596.300,00	482.350.000,00
115	SD Negeri 131 Pekanbaru	229.022.264,00	4.440.000,00	54.538.300,00	288.000.564,00
116	SD Negeri 132 Pekanbaru	313.834.300,00	13.750.000,00	15.215.700,00	342.800.000,00
117	SD Negeri 133 Pekanbaru	358.235.000,00	98.895.000,00	87.570.000,00	552.600.000,00
118	SD Negeri 134 Pekanbaru	151.186.404,00	18.600.000,00	19.298.000,00	189.078.404,00
119	SD Negeri 135 Pekanbaru	72.736.900,00	2.500.000,00	8.463.100,00	83.700.000,00
120	SD Negeri 136 Pekanbaru	445.917.450,00	41.097.150,00	37.685.400,00	524.700.000,00
121	SD Negeri 137 Pekanbaru	100.854.383,00	0,00	0,00	100.854.383,00
122	SD Negeri 138 Pekanbaru	445.749.800,00	61.210.000,00	91.540.200,00	598.500.000,00
123	SD Negeri 139 Pekanbaru	138.414.800,00	2.775.000,00	22.610.200,00	163.800.000,00
124	SD Negeri 140 Pekanbaru	138.407.243,00	4.350.100,00	12.124.100,00	154.881.443,00
125	SD Negeri 141 Pekanbaru	304.221.300,00	7.450.000,00	53.748.700,00	365.400.000,00
126	SD Negeri 142 Pekanbaru	261.159.300,00	66.576.300,00	42.664.400,00	370.800.000,00
127	SD Negeri 143 Pekanbaru	237.347.700,00	17.006.500,00	54.245.800,00	308.600.000,00
128	SD Negeri 144 Pekanbaru	177.653.800,00	50.857.300,00	42.288.900,00	270.800.000,00
129	SD Negeri 145 Pekanbaru	304.420.936,00	4.800.000,00	81.475.000,00	390.695.936,00
130	SD Negeri 146 Pekanbaru	314.275.267,00	19.181.000,00	67.334.500,00	400.790.767,00
131	SD Negeri 147 Pekanbaru	560.680.667,00	115.921.500,00	79.151.500,00	776.756.667,00
132	SD Negeri 148 Pekanbaru	470.560.500,00	103.525.000,00	144.894.500,00	719.100.000,00
133	SD Negeri 149 Pekanbaru	309.904.037,00	54.360.000,00	105.567.000,00	469.801.037,00
134	SD Negeri 150 Pekanbaru	342.435.000,00	20.315.000,00	53.050.000,00	415.800.000,00
135	SD Negeri 151 Pekanbaru	443.799.437,00	40.366.600,00	110.336.000,00	594.502.037,00
136	SD Negeri 152 Pekanbaru	111.945.200,00	0,00	13.154.800,00	125.100.000,00
137	SD Negeri 153 Pekanbaru	323.937.339,00	10.031.250,00	66.777.500,00	400.746.089,00
138	SD Negeri 157 Pekanbaru	226.070.000,00	8.728.000,00	60.402.000,00	295.200.000,00
139	SD Negeri 158 Pekanbaru	313.086.000,00	2.000.000,00	75.514.000,00	390.600.000,00
140	SD Negeri 159 Pekanbaru	298.760.827,00	44.990.400,00	19.873.300,00	363.644.527,00

NO.	URAIAN	B. BARANG & JASA	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	Total Belanja Dana Bos
1	2	33	34	35	36=(33+34+35)
141	SD Negeri 160 Pekanbaru	336.018.274,00	5.396.000,00	31.530.300,00	372.934.574,00
142	SD Negeri 161 Pekanbaru	274.148.574,00	17.100.000,00	31.982.000,00	323.230.574,00
143	SD Negeri 162 Pekanbaru	254.436.998,00	57.675.000,00	67.694.400,00	379.800.398,00
144	SD Negeri 163 Pekanbaru	444.216.900,00	31.750.000,00	67.845.800,00	543.812.700,00
145	SD Negeri 164 Pekanbaru	533.455.185,00	38.236.000,00	47.516.300,00	619.207.485,00
146	SD Negeri 165 Pekanbaru	287.086.400,00	53.500.000,00	47.313.600,00	387.900.000,00
147	SD Negeri 166 Pekanbaru	312.536.000,00	20.979.000,00	20.185.000,00	353.700.000,00
148	SD Negeri 167 Pekanbaru	473.114.160,00	102.503.440,00	156.082.400,00	731.700.000,00
149	SD Negeri 168 Pekanbaru	280.329.100,00	28.250.000,00	26.320.900,00	333.900.000,00
150	SD Negeri 169 Pekanbaru	551.669.000,00	59.380.000,00	90.831.000,00	801.900.000,00
151	SD Negeri 170 Pekanbaru	283.779.000,00	35.607.000,00	96.414.000,00	415.800.000,00
152	SD Negeri 171 Pekanbaru	479.067.808,00	37.468.000,00	70.368.200,00	586.904.008,00
153	SD Negeri 172 Pekanbaru	256.325.400,00	9.164.500,00	46.710.100,00	322.200.000,00
154	SD Negeri 173 Pekanbaru	182.883.957,00	10.200.000,00	34.622.500,00	227.706.457,00
155	SD Negeri 174 Pekanbaru	314.292.109,00	0,00	103.296.000,00	417.588.109,00
156	SD Negeri 175 Pekanbaru	206.203.200,00	17.520.000,00	26.376.800,00	251.100.000,00
157	SD Negeri 176 Pekanbaru	481.433.800,00	20.550.000,00	41.624.020,00	543.607.800,00
158	SD Negeri 177 Pekanbaru	261.004.318,00	47.505.000,00	76.152.000,00	384.661.318,00
159	SD Negeri 178 Pekanbaru	114.054.200,00	3.500.000,00	16.545.800,00	134.100.000,00
160	SD Negeri 179 Pekanbaru	496.524.300,00	44.095.000,00	72.280.700,00	612.900.000,00
161	SD Negeri 180 Pekanbaru	307.571.800,00	16.317.000,00	82.111.200,00	406.000.000,00
162	SD Negeri 181 Pekanbaru	523.135.100,00	38.650.000,00	181.534.900,00	743.320.000,00
163	SD Negeri 182 Pekanbaru	460.515.800,00	68.289.900,00	104.494.300,00	638.300.000,00
164	SD Negeri 183 Pekanbaru	588.718.100,00	9.900.000,00	42.181.900,00	640.800.000,00
165	SD Negeri 184 Pekanbaru	495.374.840,00	39.289.760,00	76.456.400,00	611.100.000,00
166	SD Negeri 185 Pekanbaru	98.369.400,00	11.636.500,00	16.897.000,00	126.902.900,00
167	SD Negeri 186 Pekanbaru	395.160.072,00	0,00	120.539.928,00	515.700.000,00
168	SD Negeri 187 Pekanbaru	426.806.000,00	55.570.000,00	110.724.000,00	593.100.000,00
169	SD Negeri 188 Pekanbaru	311.517.747,00	70.000.000,00	28.897.100,00	410.414.847,00
170	SD Negeri 189 Pekanbaru	481.427.400,00	17.721.400,00	47.151.200,00	546.300.000,00
171	SD Negeri 190 Pekanbaru	294.982.400,00	18.120.000,00	36.517.600,00	349.350.000,00
172	SD Negeri 191 Pekanbaru	351.235.084,00	64.992.850,00	39.286.400,00	445.514.134,00
173	SD Negeri 192 Pekanbaru	312.702.300,00	45.965.000,00	48.732.700,00	405.000.000,00
174	SD Negeri 193 Pekanbaru	283.423.410,00	38.490.000,00	37.265.300,00	359.178.710,00
175	SD Negeri 194 Pekanbaru	506.049.280,00	62.055.120,00	114.995.600,00	683.100.000,00
176	SD Negeri 195 Pekanbaru	135.761.242,00	26.209.000,00	24.330.800,00	186.300.642,00
177	SD Negeri 196 Pekanbaru	143.416.585,00	50.230.900,00	44.672.300,00	238.519.785,00
	TOTAL SD	32.913.932.780,00	4.533.615.155,00	9.526.989.523,00	66.973.540.458,00

Lampiran 9

Rincian Realisasi Belanja Dana BOS Tahun 2023

NO.	URAIAN	B. BARANG & JASA	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	Total Belanja Dana Bos
1	2	33	34	35	36=(33+34+35)
1	SMP NEGERI 1 PEKANBARU	579.449.000,00	112.351.000,00	71.300.000,00	763.100.000,00
2	SMP NEGERI 2 PEKANBARU	453.830.500,00	0,00	46.670.000,00	500.500.000,00
3	SMP NEGERI 3 PEKANBARU	566.744.000,00	22.500.000,00	50.056.000,00	641.300.000,00
4	SMP NEGERI 4 PEKANBARU	818.064.141,00	383.131.797,00	95.643.300,00	1.296.839.238,00
5	SMP NEGERI 5 PEKANBARU	730.173.000,00	156.533.400,00	88.693.600,00	975.400.000,00
6	SMP NEGERI 6 PEKANBARU	1.024.587.665,00	155.779.000,00	249.156.000,00	1.429.522.665,00
7	SMP NEGERI 7 PEKANBARU	364.195.000,00	7.085.000,00	90.720.000,00	462.000.000,00
8	SMP NEGERI 8 PEKANBARU	1.039.751.800,00	48.880.200,00	144.188.000,00	1.232.800.000,00
9	SMP NEGERI 9 PEKANBARU	1.127.293.000,00	91.770.000,00	91.070.000,00	1.310.100.000,00
10	SMP NEGERI 10 PEKANBARU	720.891.050,00	60.583.750,00	144.725.200,00	926.200.000,00
11	SMP NEGERI 11 PEKANBARU	690.304.000,00	52.300.000,00	115.396.000,00	858.000.000,00
12	SMP NEGERI 12 PEKANBARU	754.775.000,00	35.694.000,00	87.325.000,00	877.794.000,00
13	SMP NEGERI 13 PEKANBARU	933.488.000,00	152.558.000,00	243.554.000,00	1.329.600.000,00
14	SMP NEGERI 14 PEKANBARU	772.580.000,00	96.700.000,00	91.420.000,00	960.700.000,00
15	SMP NEGERI 15 PEKANBARU	636.938.706,00	63.400.000,00	118.498.100,00	818.836.806,00
16	SMP NEGERI 16 PEKANBARU	531.423.606,00	27.650.000,00	98.525.000,00	657.598.600,00
17	SMP NEGERI 17 PEKANBARU	533.752.506,00	85.927.500,00	68.760.000,00	688.450.000,00
18	SMP NEGERI 18 PEKANBARU	615.213.706,00	36.450.000,00	120.536.300,00	772.200.000,00
19	SMP NEGERI 19 PEKANBARU	349.608.106,00	13.050.000,00	49.841.900,00	412.500.000,00
20	SMP NEGERI 20 PEKANBARU	1.002.032.506,00	107.470.000,00	232.597.500,00	1.342.100.000,00
21	SMP NEGERI 21 PEKANBARU	1.034.063.550,00	52.861.250,00	111.825.200,00	1.198.550.000,00
22	SMP NEGERI 22 PEKANBARU	776.011.806,00	80.780.900,00	140.907.300,00	997.700.000,00
23	SMP NEGERI 23 PEKANBARU	811.184.750,00	85.472.250,00	250.743.000,00	1.147.400.000,00
24	SMP NEGERI 24 PEKANBARU	413.453.400,00	81.450.000,00	124.133.000,00	619.036.400,00
25	SMP NEGERI 25 PEKANBARU	570.134.200,00	64.100.000,00	256.765.800,00	891.000.000,00
26	SMP NEGERI 26 PEKANBARU	764.386.001,00	176.439.999,00	230.764.000,00	1.171.590.000,00
27	SMP NEGERI 27 PEKANBARU	465.769.100,00	36.360.700,00	139.270.200,00	641.400.000,00
28	SMP NEGERI 28 PEKANBARU	89.726.500,00	7.100.000,00	6.573.500,00	103.400.000,00
29	SMP NEGERI 29 PEKANBARU	501.949.000,00	68.370.000,00	84.756.000,00	655.075.000,00
30	SMP NEGERI 30 PEKANBARU	352.895.500,00	22.632.500,00	282.672.000,00	677.600.000,00
31	SMP NEGERI 31 PEKANBARU	236.885.000,00	37.935.000,00	37.380.000,00	312.200.000,00
32	SMP NEGERI 32 PEKANBARU	554.035.526,00	98.500.000,00	106.440.000,00	758.975.526,00
33	SMP NEGERI 33 PEKANBARU	400.888.700,00	3.900.000,00	49.311.300,00	454.100.000,00
34	SMP NEGERI 34 PEKANBARU	738.970.000,00	31.100.000,00	236.030.000,00	1.006.100.000,00
35	SMP NEGERI 35 PEKANBARU	519.079.800,00	86.372.200,00	64.348.200,00	669.700.000,00
36	SMP NEGERI 36 PEKANBARU	319.073.000,00	3.250.000,00	12.077.000,00	334.400.000,00
37	SMP NEGERI 37 PEKANBARU	671.519.500,00	82.896.500,00	85.985.000,00	840.400.000,00
38	SMP NEGERI 38 PEKANBARU	307.797.371,00	16.425.000,00	19.898.300,00	344.120.671,00
39	SMP NEGERI 39 PEKANBARU	539.418.600,00	32.328.400,00	48.453.000,00	620.200.000,00
40	SMP NEGERI 40 PEKANBARU	586.203.600,00	23.303.400,00	115.946.000,00	646.450.000,00
41	SMP NEGERI MADANI	149.745.000,00	4.900.000,00	19.155.000,00	163.800.000,00
42	SMP NEGERI 42 PEKANBARU	909.060.484,00	100.945.000,00	102.230.000,00	1.111.935.484,00
43	SMP NEGERI 43 PEKANBARU	307.345.750,00	21.649.250,00	36.205.000,00	365.200.000,00

NO.	URAIAN	B. BARANG & JASA	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	Total Belanja Dana Bos
1	2	33	34	35	36=(33+34+35)
44	SMP NEGERI 44 PEKANBARU	436.089.500,00	42.755.860,00	90.953.000,00	568.847.500,00
45	SMP NEGERI 45 PEKANBARU	409.028.000,00	39.515.000,00	154.057.000,00	602.600.000,00
46	SMP NEGERI 46 PEKANBARU	128.509.000,00	30.781.000,00	56.330.000,00	215.600.000,00
47	SMP NEGERI 47 PEKANBARU	145.748.000,00	42.251.000,00	58.401.000,00	246.400.000,00
48	SMP NEGERI 48 PEKANBARU	67.145.600,00	14.099.200,00	7.382.500,00	88.627.400,00
49	SMP NEGERI 49 PEKANBARU	5.147.000,00	1.078.000,00	0,00	6.225.000,00
	TOTAL SMP	27.420.348.794,00	3.017.275.296,00	5.217.488.200,00	35.655.884.290,00

Lampiran 10

Capaian Program Strategis Kota Pekanbaru pendukung Prioritas Pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 2023

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Presentase Layanan Pendidikan Yang Sesuai Standar	84,00 %	65,76 %	> 100 %
2	Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Presentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Memenuhi Standar Kompetensi	88,44 %	75,33 %	85,18%
3	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan di kota pekanbaru yang telah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	29,91%	24,64%	82,38%
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase cakupan layanan kesehatan terhadap masyarakat sesuai Standar pelayanan minimal	80%	90%	> 100 %
5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sumber daya Kesehatan yang sesuai dengan standar	60%	80%	> 100 %
6	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai dengan standar kompetensi	100%	100%	100%
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rumah tangga yang melaksanakan PHBS	60%	68%	> 100 %
8	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	87%	87%	100%
9	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100%	100%	100%
10	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif	83%	83%	100%
11	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja terdaftar yang ditempatkan	46%	47,97%	> 100 %
12	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman dan Pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan terhadap masyarakat	100%	66,66%	66,66%
13	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	30%	30%	100%
14	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	48%	30%	> 100 %
15	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Pekanbaru	100%	100%	100%
16	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Peningkatan Objek Budaya yang Terkelola dengan Baik	63%	63%	100%
17	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang Dilindungi	65%	43%	66,15%
18	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Tertata Dengan Baik	36%	23%	63,88%
19	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan jalan	100%	100%	100%

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
20	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase kinerja lalu lintas angkutan	80%	78%	97,50%
21	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Sambungan Rumah (SR) terlayani air bersih	100%	100%	100%
22	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah yang Terlayani Pengelolaan Sistem Air Limbah	100%	93,25%	93,25%
23	Program Kawasan Permukiman	Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh	25%	24%	96%
24	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah layak huni pada kawasan kumuh yang ditangani	25%	30%	> 100 %
25	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase sebuah perumahan yang sudah dilengkapi PSU	12%	12%	100%
26	Program Penataan Bangunan dan Gedung	Persentase infrastruktur di kawasan strategis dan cepat tumbuh	100%	100%	100%
27	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Saluran Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%
28	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Saluran Primer dan Sekunder dalam kondisi baik	100%	93,37%	93,37%
29	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola	100%	96,07%	96,07%
30	Program Pengembangan UMKM	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	2,10%	3,10%	> 100 %
31	Program Pemberdayaan UMKM	Persentase UMKM yang Bermitra dengan Lembaga Pemodalan yang difasilitasi Dinas Koperasi, UKM Kota Pekanbaru	4,10%	4,03%	98,29%
32	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM Berdaya Saing	45%	45%	100%
33	Program pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Terselenggaranya Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	65%	65%	100%
34	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Tingkat Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88%	64%	72,72%
35	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase pengelolaan Perikanan Budidaya	20%	20%	100%
36	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Penanaman Modal yang dilaksanakan	100%	100%	100%
37	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi, Kerjasama Investasi dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%
38	Program Pengendalian Pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase ketersediaan data dan informasi tentang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	80%	86,76%	> 100 %
39	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang dikelola	84%	94,76%	> 100 %
40	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan Internal yang Sesuai dengan Ketentuan (PKPT) dan Tepat Waktu	80%	80%	100%

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
41	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan	100%	100%	100%
42	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Terkoordinir dan Tersinkronisasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%
43	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terkoordinir dan Terfasilitasi	100%	100%	100%
44	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Peningkatan Aplikasi Informatika Dalam Rangka Mewujudkan Kota Cerdas	40%	41%	> 100 %
Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas					98,72%

Capaian Sasaran Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 2023

No	Prioritas	Strategi/Sasaran	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Tingkat Capaian (%)
1.	Peningkatan Kualitas SDM	1. Meningkatnya kualitas Pendidikan	1.1. Harapan Lama Sekolah	15,75 thn	15,56 thn	98,82%
			1.2. Rata-rata Lama Sekolah	12,01 thn	11,94 thn	99,42%
		2. Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,0 thn	73,02 thn	> 100 %
		3. Meningkatnya Standar Hidup Layak	Pengeluaran per Kapita	Rp. 14.360.000	Rp. 14.983.000	> 100 %
2.	Peningkatan Ketentraman Masyarakat Melalui Implementasi Nilai-Nilai Budaya Melayu	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	4.1. Persentase penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%
			4.2. persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%
		Meningkatnya ketahanan budaya	Persentase budaya melayu yang direvitalisasi	15%	13,65%	90,39%
3.	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembanguran Ekonomi	1. Meningkatnya Konektivitas Pelayanan Jaringan Jalan	6.1. Jalan Dalam Kondisi Mantap	72,11%	71,40%	99,01%
			6.2 Keterjangkauan layanan angkutan	78%	80%	> 100 %
		2. Meningkatnya Akses Air Bersih	Cakupan Rumah tangga pelayanan air bersih perpipaan	16.850 SR	13.328 SR	79,09%
		3. Meningkatnya sanitasi yang layak	Cakupan rumah tangga bersanitasi layak	1.000 SR	250 SR	25%
		4. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Luas areal kawasan kumuh	217,76 Ha	229,91 Ha	94,72%
			Persentase Rumah Tangga yang Memiliki akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	86,49%	12,68%	14,67%
			Rasio Perumahan yang difasilitasi PSU	12%	12%	100%
		5. Menurunnya Titik Genangan	Jumlah titik genangan yang tertangani	20 titik	13 titik	65%
		6. Meningkatnya Ketersediaan RTH Publik	Luasan RTH publik di wilayah perkotaan	5,62%	0,28%	4,98%
		7. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang inklusi	Gini Rasio	0,385	0,392	98,21%
			Kontribusi sektor industri pengolahan	21,35%	20,14%	94,33%
			Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (pariwisata)	Rp. 2.000 M	Rp. 2.521,23	> 100 %
		8. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	90,56	NA	Belum rilis

No	Prioritas	Strategi/Sasaran	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Tingkat Capaian (%)
		6. Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi berskala nasional	2.602,2 T (PMDN/PMA)	6,5 T	> 100 %
4	Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	51,69	51,11	98,88%
			Indeks Kualitas Udara	85,73	86,03	> 100 %
			Indeks Tutupan Lahan	27,17	25,05	92,20%
5	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Nilai IKM	85,58	86,21	> 100 %
			Nilai SPBE	2,7	3,42	> 100 %
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai AKIP	65	65,99	> 100 %
			Nilai LPPD	3,5	2,6177	Belum Rilis
Rata-rata Capaian						**86,72%**

Lampiran 12

Rincian Penyisihan Pajak Piutang Daerah

REKENING		PIUTANG DAN PENYISIHAN		
KODE	URAIAN	PIUTANG	%	PENYISIHAN
4.1.01.05.	Pajak Hotel	273.149.968,00		10.146.091,00
4.1.01.05.01.	Pajak Hotel	282.551.211,00		10.111.592,00
4.1.01.05.01.0001.	Pajak Hotel	266.551.211,00		10.111.592,00
	Tahun 2008	3.040.000,00	100,00	3.040.000,00
	Tahun 2019	23.715.300,00	50,00	11.857.650,00
	Tahun 2021	187.500,00	10,00	15.750,00
	SPTPD Tahun 2023	239.438.411,00	0,50	1.198.192,00
4.1.01.05.02.	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	4.018.773,00		34.000,00
4.1.01.05.02.0001.	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	4.018.773,00		34.000,00
	SPTPD Tahun 2022	125.000,00	10,00	12.500,00
	SPTPD Tahun 2023	4.493.775,00	0,50	22.469,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.886.801.436,00		700.319.342,00
4.1.01.07.01.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.035.713.393,00		667.088.862,00
4.1.01.07.01.0001.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.035.713.393,00		667.088.862,00
	SKPD 2008	479.379.993,00	100,00	479.379.993,00
	SKPD 2019	11.800.094,00	50,00	5.949.047,00
	SKPDKB Tahun 2018	132.039.987,00	50,00	85.019.994,00
	SKPDKB Tahun 2020	49.805.425,00	50,00	20.482.713,00
	SKPDKB Tahun 2021	439.380.409,00	10,00	43.038.041,00
	SPTPD Tahun 2021	301.356.677,00	10,00	20.135.868,00
	SKPDKB Tahun 2022	44.800.000,00	10,00	9.480.000,00
	SPTPD Tahun 2022	173.969.893,00	10,00	17.209.893,00
	SKPDKB Tahun 2023	2.317.222.788,00	0,50	11.586.814,00
	SPTPD Tahun 2023	1.047.551.139,00	0,50	5.237.695,00
4.1.01.07.02.	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	337.995.249,00		28.503.599,00
4.1.01.07.02.0001.	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	337.995.249,00		28.503.599,00
	SKPDKB Tahun 2022	209.420.099,00	10,00	20.942.009,00
	SPTPD Tahun 2022	77.723.300,00	10,00	7.772.330,00
	SPTPD Tahun 2023	53.851.849,00	0,50	269.260,00
4.1.01.07.03.	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	516.829.631,00		41.884.754,00
4.1.01.07.03.0001.	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	516.829.631,00		41.884.754,00
	SKPDKB Tahun 2022	402.736.099,00	10,00	40.273.609,00
	SPTPD Tahun 2022	3.665.000,00	10,00	366.500,00
	SKPDKB Tahun 2023	142.481.102,00	0,50	712.406,00
	SPTPD Tahun 2023	87.028.731,00	0,50	340.184,00
4.1.01.07.05.	Pajak Warung dan Sejenisnya	341.008,00		1.285,00
4.1.01.07.05.0001.	Pajak Warung dan Sejenisnya	341.008,00		1.285,00
	SPTPD Tahun 2023	241.000,00	0,50	1.205,00
4.1.01.07.07.	Pajak Jasa Boga/ Katering dan Sejenisnya	4.812.101,00		24.091,00
4.1.01.07.07.0001.	Pajak Jasa Boga/ Katering dan Sejenisnya	4.812.101,00		24.091,00
	SPTPD Tahun 2023	4.812.101,00	0,50	24.091,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	13.567.600,00		80.989,00
4.1.01.08.01.	Pajak Tontonan Film	201.500,00		1.008,00
4.1.01.08.01.0001.	Pajak Tontonan Film	201.500,00		1.008,00
	Tahun 2023	201.500,00	0,50	1.008,00
4.1.01.08.05.	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	5.220.000,00		26.100,00
4.1.01.08.05.0001.	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	5.220.000,00		26.100,00
	Tahun 2022	5.220.000,00	0,50	26.100,00
4.1.01.08.07.	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	350.000,00		1.756,00
4.1.01.08.07.0001.	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	350.000,00		1.756,00
	Tahun 2023	350.000,00	0,50	1.756,00
4.1.01.08.08.	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	3.732.600,00		18.653,00
4.1.01.08.08.0001.	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	3.732.600,00		18.653,00
	Tahun 2023	3.732.600,00	0,50	18.653,00
4.1.01.08.09.	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	3.333.500,00		16.665,00
4.1.01.08.09.0001.	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	3.333.500,00		16.665,00
	Tahun 2023	3.333.500,00	0,50	16.665,00
4.1.01.08.10.	Pajak Pertandingan Olahraga	560.000,00		2.980,00
4.1.01.08.10.0001.	Pajak Pertandingan Olahraga	560.000,00		2.980,00
	Tahun 2023	560.000,00	0,50	2.980,00

REKENING		PIUTANG DAN PENERIMAN		
KODE	URAIAN	PIUTANG	%	PENERIMAN
4.1.01.09	Pajak Reklame	8.077.338.384,00		4.594.405.175,00
4.1.01.09.01.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	8.420.962.696,00		4.230.301.896,00
4.1.01.09.01.0001.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	8.420.962.696,00		4.230.301.896,00
	SKPD 2010	90.626.740,00	100,00	90.626.740,00
	SKPD 2011	189.380.030,00	100,00	189.380.030,00
	SKPD 2012	378.773.046,00	100,00	378.773.046,00
	SKPD 2013	156.883.196,00	100,00	156.883.196,00
	SKPD 2014	93.883.614,00	100,00	93.883.614,00
	SKPD 2015	166.252.513,00	100,00	166.252.513,00
	SKPD 2016	1.850.791.706,00	100,00	1.850.791.706,00
	SKPD 2017	812.486.913,00	100,00	812.486.913,00
	SKPD 2018	1.086.843,00	50,00	794.927,00
	SKPD 2019	1.774.505.960,00	33,00	887.252.760,00
	SKPD 2020	437.333.187,00	50,00	218.666.564,00
	SKPD 2021	873.124.998,00	10,00	87.512.499,00
	SKPD 2022	634.756.349,00	10,00	62.475.524,00
	SKPD 2023	1.141.863.113,00	0,50	5.707.766,00
4.1.01.09.02.	Pajak Reklame Kain	291.275.345,00		72.822.356,00
4.1.01.09.02.0001.	Pajak Reklame Kain	291.275.345,00		72.822.356,00
	SKPD 2019	66.898.163,00	50,00	33.449.380,00
	SKPD 2020	56.750.540,00	50,00	28.375.870,00
	SKPD 2022	100.681.298,00	10,00	10.068.130,00
	SKPD 2023	27.026.192,00	0,50	135.181,00
4.1.01.09.05.	Pajak Reklame Berjalan	5.085.913,00		2.152.821,00
4.1.01.09.05.0001.	Pajak Reklame Berjalan	5.085.913,00		2.152.821,00
	SKPD 2019	950.356,00	50,00	475.469,00
	SKPD 2020	3.244.340,00	50,00	1.622.370,00
	SKPD 2021	478.525,00	10,00	47.853,00
	SKPD 2022	139.813,00	10,00	13.981,00
	SKPD 2023	247.031,00	0,50	1.235,00
4.1.01.10.01.	Pajak Penerangan Jalan Dilaksanakan Sendiri	15.826.869,00		1.541.881,00
4.1.01.10.01.0001.	Pajak Penerangan Jalan Dilaksanakan Sendiri	15.826.869,00		1.541.881,00
	SPTPD 2022	15.394.060,00	10,00	1.539.440,00
	SPTPD 2022	433.119,00	0,50	2.165,00
4.1.01.12.01.	Pajak Air Tanah	667.625.493,00		448.395.365,00
4.1.01.12.01.0001.	Pajak Air Tanah	667.625.493,00		448.395.365,00
	Pelimpahan Pasmat 2009	27.761.354,00	100,00	27.761.354,00
	SKPD 2012	30.906.947,00	100,00	30.906.947,00
	SKPD 2013	93.079.340,00	100,00	93.079.340,00
	SKPD 2014	124.861.992,00	100,00	124.861.992,00
	SKPD 2015	137.419.192,00	100,00	137.419.192,00
	SKPD 2016	14.315.045,00	100,00	14.315.045,00
	SKPD 2017	3.827.920,00	100,00	3.827.920,00
	SKPD 2018	2.648.151,00	50,00	1.324.076,00
	SKPD 2019	17.018.950,00	50,00	8.509.475,00
	SKPD 2020	42.164.331,00	10,00	4.216.433,00
	SKPD 2021	25.502.876,00	10,00	2.550.288,00
	SKPD 2022	86.421.193,00	0,50	432.106,00
4.1.01.15.01.	PBBP2	705.198.272.853,00		397.095.133.801,00
4.1.01.15.01.0001.	PBBP2	705.198.272.853,00		397.095.133.801,00
	SPPT s.d Tahun 2011	149.141.245.022,00	100,00	149.141.245.022,00
	SPPT Tahun 2012	27.946.530.348,00	100,00	27.946.530.348,00
	SPPT Tahun 2013	25.461.111.336,00	100,00	25.461.111.336,00
	SPPT Tahun 2014	29.793.794.906,00	100,00	29.793.794.906,00
	SPPT Tahun 2015	58.236.956.675,00	100,00	58.236.956.675,00
	SPPT Tahun 2016	49.581.805.109,00	100,00	49.581.805.109,00
	SPPT Tahun 2017	12.778.583.283,00	100,00	12.778.583.283,00
	SPPT Tahun 2018	15.150.093.747,00	50,00	7.575.031.874,00
	SPPT Tahun 2019	32.055.396.373,00	50,00	16.027.965.187,00
	SPPT Tahun 2020	33.713.669.669,00	50,00	16.856.834.835,00
	SPPT Tahun 2021	38.867.589.188,00	10,00	3.886.765.820,00
	SPPT Tahun 2022	56.770.266.774,00	10,00	5.677.026.677,00
	SPPT Tahun 2023	194.940.952.617,00	0,50	970.204.268,00

KODE	URAIAN	PIUTANG DAN PENYISIHAN		
		PIUTANG	%	PENYISIHAN
4.1.01.15	BPHTB	3.844.025.369,00		2.840.025.969,00
4.1.01.15.01.	BPHTB-Pembelian Hak	438.670.321,00		438.670.321,00
4.1.01.15.01.0001.	BPHTB-Pembelian Hak	438.670.321,00		438.670.321,00
	BPHTB-Pembelian Hak 2013	438.670.321,00	100,00	438.670.321,00
4.1.01.15.02.	BPHTB-Pembelian Hak Baru	3.407.355.468,00		2.407.355.468,00
4.1.01.15.02.0001.	BPHTB-Pembelian Hak Baru	3.407.355.468,00		2.407.355.468,00
	BPHTB-Pembelian Hak Baru 2013	3.407.355.468,00	100,00	2.407.355.468,00
JUMLAH		716.527.353.249,00		394.052.896.859,00

Lampiran II

DAFTAR PERSETUJUAN
DINAS PENDIDIKAN MENGAH DAN PENDIDIKAN ISLAM KOTA PEKANBARU
PER 31 DESEMBER 2023

NO.	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA (RP)	KETERANGAN
II.	Belanja Modal Aset Tetap (Tahun 2023)					
1.	Kegiatan Pembangunan Jalan Kendaraan Roda Empat					
	Unsur Mesin					
	Instalasi SHS	1	Kegiatan			Harga Pembelian (Nilai Kontrak + Addendum) + Aset Lain
2.	Kegiatan Pembangunan Jalan Kendaraan Manusia Dalam					
	Pengawasan Mesin					
	Pengawasan Mesin Air Kecil Kapal Kita	1	Kegiatan			Harga Pembelian (Nilai Kontrak + Addendum) + Aset Lain
	Unsur Mesin					
	Jl. Kendali (1000 M) Aset	1	Kegiatan			Harga Pembelian (Nilai Kontrak + Addendum) + Aset Lain
	Jumlah Belanja Modal Bukan Aset Diserahkan Ke Pihak Ketiga					
C.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga					
	Tahun 2023					
	Rumah Rumah RN (Pulau Millan) Jl. Ahmad Yani	1	Pekerjaan			
	Gedung Pelatih Kota sementara Pekanbaru Kota	1	Pekerjaan			
	Gedung Pelatih Sekolah Kecamatan Senapelan	1	Pekerjaan			
	Pelatih/Perumah Kabel (Pelatih / Mushalah Lainnya	1	Pekerjaan			
	Gedung Gedung Veteran (Lanjutan) di Kecamatan Senapelan	1	Pekerjaan			
	Rehabilitasi Ruang dan Lapangan Tembak Sekolah RO	1	Pekerjaan			
	Jumlah					
1.	Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur (SHS)					
	Pembelian MTTA Gedung Aljihad Jl. Melur Pekanbaru	1	Kegiatan			
	Pembelian / Pembelian MEJA Gedung Aljihad Jl. Melur Pekanbaru	1	Kegiatan			
	Pekerjaan Interior Gedung Sekolah Pekanbaru	1	Kegiatan			
	Pembangunan Interior Gedung Sekolah Pekanbaru	1	Kegiatan			
	Pembangunan Pagar Gedung Sekolah Pekanbaru	1	Kegiatan			Harga Pembelian (Nilai Kontrak + Pembangunan 2.775.000 + Pengawasan 3.751.735)
	Jumlah					
	Tahun 2019					
	Rumah Tinggi Kantor PKLB Lanjutan	1	Pekerjaan			
	Pekerjaan Interior Gedung Sekolah Pekanbaru (Lanjutan)	1	Pekerjaan			
	Pengelolaan Pekerjaan Interior Gedung Sekolah Pekanbaru (Lanjutan)	1	Pekerjaan			
	Pekerjaan Interior dan Mushola Rumah Dinas Kepala Sekolah	1	Pekerjaan			
	Pembangunan Pekerjaan Interior dan Mushola Rumah Dinas Kepala Sekolah Pekanbaru	1	Pekerjaan			
	Pengawasan Pekerjaan Interior dan Mushola Rumah Dinas Kepala Sekolah Pekanbaru	1	Pekerjaan			
	Pembangunan Kantor Pelatih Payung Sekolah	1	Pekerjaan			
	Pengawasan Pembangunan Kantor Pelatih Payung Sekolah	1	Pekerjaan			Invoice 8th Agustus s/d Nov Tahun 2019 (Sisa 10,00%)
	Pekerjaan Interior dan Mushola Kantor LAB	1	Pekerjaan			
	Pembangunan Interior dan Mushola Kantor LAB	1	Pekerjaan			
	Pengawasan Pekerjaan Interior dan Mushola Kantor LAB	1	Pekerjaan			
	Pembangunan Kantor Pelatih Rumah Pelatih	1	Pekerjaan			
	DED Pembangunan Kantor Pelatih Rumah Pelatih	1	Pekerjaan			
	Pengawasan Pembangunan Kantor Pelatih Rumah Pelatih	1	Pekerjaan			
	Jumlah					
	Tahun 2020					
	Pembangunan Gedung Rumah Dinas Kepala Kota/Wakil Kota	1	Pekerjaan			Akibat Pengawasan Rp.
	Pembuatan Kabel Kabel Pipa	1	Pekerjaan			Akibat Pengawasan Rp. + Akibat Pengawasan Rp.
	Rumah TK Adiyaksa Kabel Pipa (Lanjutan)	1	Pekerjaan			Akibat Pengawasan Rp. + Akibat Pengawasan Rp.
	Kendali Pelatih Kab PKMB (TOLDA BIRU)	1	Pekerjaan			Akibat Pengawasan Rp. + Akibat Pengawasan Rp.
	Pekerjaan Rumah Pipa Pelatih Pekanbaru	1	Pekerjaan			Akibat Pengawasan Rp. + Akibat Pengawasan Rp.
	Pekerjaan Rumah Interior Kabel	1	Pekerjaan			Akibat Pengawasan Rp. + Akibat Pengawasan Rp.
	Pekerjaan Rumah Dinas Kolam Air	1	Pekerjaan			Akibat Pengawasan Rp. + Akibat Pengawasan Rp.
	Pekerjaan Pembuatan Mesjid Kolam Kompleks KJPI Provinsi Riau	1	Pekerjaan			Akibat Pengawasan Rp. + Akibat Pengawasan Rp.
	Pembangunan Fasilitas Pendukung Kantor KJPI (UNUSAN)	1	Pekerjaan			Akibat Pengawasan Rp. + Akibat Pengawasan Rp.
	Pekerjaan Rehab Pos Jaga MTQM Simpang Air	1	Pekerjaan			Akibat Pengawasan Rp. + Akibat Pengawasan Rp.
	Rehab Kolam Halaman (MCK Halaman Pekanbaru)	1	Pekerjaan			Akibat Pengawasan Rp. + Akibat Pengawasan Rp.
	Pembangunan Gapura Pekanbaru (Lanjutan)	1	Pekerjaan			Akibat Pengawasan Rp. + Akibat Pengawasan Rp.
	Rehab (TUGU KABUPATEN)	1	Pekerjaan			Akibat Pengawasan Rp. + Akibat Pengawasan Rp.

NO.	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA (Rp)	KETERANGAN
	Pembangunan Gedung Kantor Majelis Provinsi (Box 2 lantai)	1	Paket/pkt	197.342.000,00	200.619.620,00	Akibat Perencanaan Rp. 2.067.891,20 + Akibat Pengawasan Rp. 2.106.729,00
	Rehab Ruh Jaga UPBK Dengan (IC) Lengkap	1	Paket/pkt	198.016.000,00	200.089.621,00	Akibat Perencanaan Rp. 2.059.412,00 + Akibat Pengawasan Rp. 2.064.208,00
	Pembangunan Gedung Ibu Pengurus Pos Kesehatan Masjid Raya (Kelurahan Cot Gelumpang) Tempat Parkir	1	Tempat	192.334.000,00	195.284.678,00	Akibat Perencanaan Rp. 1.462.438,00 + Akibat Pengawasan Rp. 1.953.440,00
	Pembuatan Pagar Pintu Pekarangan	1	Unit/pkt	197.270.000,00	201.440.200,00	Akibat Perencanaan Rp. 2.097.139,00 + Akibat Pengawasan Rp. 2.100.061,00
	Pembuatan Cor Hangat Kuku Tekstur Pintu Halaman Kuat	1	Paket/pkt	68.888.000,00	69.975.000,00	Akibat Perencanaan Rp. 1.026.000,00 + Akibat Pengawasan Rp. 1.050.000,00
	Pembangunan Rehabilitasi Kantor Bidang Pendidikan	1	Tempat	73.270.000,00	73.270.000,00	
	Pembangunan Lapangan Pendukung dan Masjid di Pulau Kel. Lembah Sel Kec. Sumber Pantai	1	Pekerjaan	89.657.000,00	90.657.000,00	
	Pembangunan Perumahan Warnet Dinas Kesejahteraan Kota Pekanbaru	1	Pekerjaan	59.980.000,00	60.980.000,00	
	Pembangunan Rehabilitasi Rumah Dinas Kantor DPRD Kota	1	Pekerjaan	43.870.000,00	43.870.000,00	
	Jumlah			5.214.264.000,00	5.243.236.476,00	
	Tahun 2021					
	Pagar Masjid Al Hijrah (Lt. Pertama) RT. 04 RW.09 Kel. Mekarsaluyu/Barat Kec.Tuah Madani	1	Pekerjaan	196.249.000,00	197.328.122,00	Akibat Perencanaan Rp. 634.000,00 + Akibat Pengawasan Rp. 642.818,00
	Pelebaran Mesjid Rawagelo RW01 dan Lubby Kelurahan Pekarangan	1	Pekerjaan	193.999.000,00	197.000.000,00	
	Pelebaran Mushalla Purnama RW07 dan Lubby Kelurahan Pekarangan	1	Pekerjaan	195.214.000,00	197.214.000,00	
	Pek. Kuasa dan Pabbe Masjid Al Ikhlas Gg. Hubb RT.05 RW.07 Kel. Air Dingin	1	Pekerjaan	195.975.000,00	197.301.200,00	Akibat Perencanaan Rp. 650.700,00 + Akibat Pengawasan Rp. 660.515,00
	Pek. Pagar Masjid Ibnu Batuta Jln. Puri Jr., Kahyl Inapps Indah RT.03 RW.06 Kel.Bidang Mutiggo Kec. Tampan	1	Pekerjaan	96.113.000,00	96.634.000,00	Akibat Perencanaan Rp. 218.373,00 + Akibat Pengawasan Rp. 305.170,00
	Pek. Hauing Mat Jln. Nanum, Unga Gut in Anggka - Rusthalla ar Nuhim RT.04/RW.10 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan	1	Pekerjaan	196.150.000,00	196.466.000,00	Akibat Perencanaan Rp. 651.150,00 + Akibat Pengawasan Rp. 659.804,00
	Pek. Pasing Bus Rumah Ibadah Mesjid Jln. Pasar Indah III Jln. RW.02/03 Bandar Raya Kec. Payung Sekaki	1	Unit/pkt	197.335.000,00	199.934.281,00	Akibat Perencanaan Rp. 636.284,00 + Akibat Pengawasan Rp. 647.977,00
	Pek. Pembangunan Gedung Serba Guna Jln.Indra RT.21 RW.10 Kel. Kulim/Kec.Tenayan Raya	1	Pekerjaan	327.997.000,00	329.950.000,00	Akibat Perencanaan Rp. 649.000,00 + Akibat Pengawasan Rp. 303.000,00
	Pek. Pembangunan MESJID AL-FATAH LIMBUNGAN	1	Pekerjaan	464.312.000,00	464.312.000,00	
	Pengawasan Pembangunan MESJID AL-FATAH LIMBUNGAN	1	Pekerjaan	44.697.000,00	44.697.000,00	
	Pek. Pembangunan Masjid Indo Jln. Masjid Bud G Perum. Kahlana Kopi RT.03/RW.03 Kel. Pemerintah Menyasar Kec. Wanayan Barat	1	Pekerjaan	749.000.000,00	749.000.000,00	
	Pembangunan Pembangunan Masjid Indo Jln. Masjid Bud G Perum. Kahlana Raya RT.03/RW.03 Kel. Pemerintah Masyarat Kec. Wanayan Gabrid	1	Pekerjaan	97.500.000,00	97.500.000,00	
	Pengawasan Pembangunan Masjid Indo Jln. Masjid Bud G Perum. Kahlana Raya RT.03/RW.03 Kel. Pemerintah Masyarat Kec. Wanayan Gabrid	1	Pekerjaan	49.875.000,00	49.875.000,00	
	Pek. Pembangunan MESJID NURUL IMAN Jln. Pulau RW.04 Kel.Binawidya/Marpoyan Tr.Kulim	1	Pekerjaan	197.992.000,00	198.946.600,00	Akibat Perencanaan Rp. 610.266,00 + Akibat Pengawasan Rp. 666.241,00
	Pek. Pembangunan MESJID BAITUL KHAFIS JAMAH Jln. Nelimun Perumahan Sahab Sidabjat Ismp. 8 T.8.03/RW.06 Kel.Binawidya Kecamatan Tampan	1	Pekerjaan	197.775.000,00	199.953.244,00	Akibat Perencanaan Rp. 636.666,00 + Akibat Pengawasan Rp. 649.592,00
	Pek. Pembangunan Musholla Al Abdad Jln. Kapingan Grt 9 Kl 10 Kel. Ukirsa Barang Sakti Kec. Tampan Pekan	1	Pekerjaan	112.800.000,00	190.144.199,00	Akibat Perencanaan Rp. 636.661,00 + Akibat Pengawasan Rp. 648.844,00
	Rap. Rehab. MDA Mutiarin Jln. Beri Mas 11 22 RW.06 Kel.Tangkerang Barat/Kec.Marpoyan Damai	1	Paket/pkt	196.821.000,00	197.140.111,00	Akibat Perencanaan Rp. 635.439,00 + Akibat Pengawasan Rp. 644.271,00
	Pek. Rehab. Pembangunan Mesjid Nurul Muhajirin Jln.Beri Mas 11 /RW.06 Kel.Tangkerang Barat,Kec. Marpoyan Damai	1	Pemajian	197.145.000,00	198.146.397,00	Akibat Perencanaan Rp. 637.710,00 + Akibat Pengawasan Rp. 646.390,00
	Pek. Rehabilitasi Kolam Rumah Dinas Kepolisian Pekanbaru	1	Pekerjaan	197.656.000,00	198.946.212,00	Akibat Perencanaan Rp. 638.313,00 + Akibat Pengawasan Rp. 648.200,00
	Pek. Pembuatan Pagar Gudang Senjata Unit Kapik Pekanbaru	1	Pekerjaan	113.653.000,00	114.200.000,00	
	Pek. Pembuatan Pagar Halaman Jln. Bambu Kuning RT.02/RW.01 Kel. Bukit Raya Kec. Tampan Pekan	1	Pekerjaan	96.114.000,00	96.748.997,00	Akibat Perencanaan Rp. 310.309,00 + Akibat Pengawasan Rp. 321.314,00
	Pek. Rehab Musholla Jln.Perumahan Baru Blok M Lokasi RW.04 Kel.Rumbai Kapanlik Kec. Tenayan Raya	1	Pekerjaan	197.995.000,00	198.995.736,00	Akibat Perencanaan Rp. 639.403,00 + Akibat Pengawasan Rp. 648.912,00
	Pek. Rehab Kuning Sukaramai Blk.RT.04 Kel.Pekanbaru	1	Pekerjaan	197.297.000,00	198.575.713,00	Akibat Perencanaan Rp. 638.133,00 + Akibat Pengawasan Rp. 648.888,00

NO.	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA (RP)	KETERANGAN
	Pek. Pekak Ruang Pemimpin (1) SMP/SMI Pekerjaan	1	Paket/pek	180,075,000.00	180,151,445.00	Aditif Perencanaan Rp. 180,075.00 + Aditif Pengawasan Rp. 980,891.00
	Pek. Hidup Masjid Al-SUBAYDAH Jln. Masjid Al-SUBAYDAH RT 03 RW 08 Kel Pasar Kec Lengkiat	1	Paket/pek	140,000,000.00	140,000,442.00	Aditif Perencanaan Rp. 175,004.00 + Aditif Pengawasan Rp. 462,370.00
	Pek. Hidup MDT A AL-HUDA Jln. Perdamai Gang RT.00 RW.01 Kel. Air Dingin	1	Paket/pek	190,000,000.00	190,170,000.00	Aditif Perencanaan Rp. 190,000.00 + Aditif Pengawasan Rp. 980,441.00
	Pek. / Hidup masjid Al Ahsad Tempat Wudhu,Jln. Taman,RT. 02 RW. 08 Kel/Lengerang Bindi	1	Paket/pek	122,230,250.00	188,820,150.00	Aditif Perencanaan Rp. 830,040.00 + Aditif Pengawasan Rp. 946,845.00
	Pek. / Hidup masjidalit Jln. Bumha Kuning RT.22 RW.07 Kel. Bumbi, Kuching Kec.Tempun Rawa	1	Paket/pek	181,171,000.00	140,330,441.00	Aditif Perencanaan Rp. 170,010.00 + Aditif Pengawasan Rp. 462,991.00
	Pek. / Hidup Vempa Wudhu, Masjid RT.02/RW.04 Jln. Ka Zakiyah RT.02 RW.04 Kel/Lembulugan Batu Kec. Rambah Pekan	1	Paket/pek	122,180,000.00	180,268,908.00	Aditif Perencanaan Rp. 922,021.00 + Aditif Pengawasan Rp. 946,995.00
	Pek. / Hidup masjid Nurul Iqbal Kel Kayu Manis Kec Rambah	1	Paket/pek	132,870,000.00	188,840,882.00	Aditif Perencanaan Rp. 830,000.00 + Aditif Pengawasan Rp. 947,264.00
	Pek. / Hidup masjid Nurul Ikhlas Jln. Bumha Kuning RT.22 RW.07 Kel. Bumbi, Kuching Kec.Tempun Rawa	1	Paket/pek	137,617,000.00	180,948,941.00	Aditif Perencanaan Rp. 976,770.00 + Aditif Pengawasan Rp. 948,664.00
	Pek. / Hidup masjid Nurul Iqbal Kel Kayu Manis Kec Rambah	1	Paket/pek	137,844,000.00	180,180,233.00	Aditif Perencanaan Rp. 850,800.00 + Aditif Pengawasan Rp. 948,714.00
	Pek. / Hidup masjid Nurul Iqbal Kel Kayu Manis Kec Rambah	1	Paket/pek	140,940,000.00	180,845,050.00	Aditif Perencanaan Rp. 1e76,507.00 + Aditif Pengawasan Rp. 950,104.00
	Pembangunan rumah ibadah Masjid Al - Ikhlas Jl. Dusun Bhayang Lakum Hilliya Kel. Simpanan Kec. Rambah	1	Paket/pek	147,960,000.00	180,151,033.00	Aditif Perencanaan Rp. 948,997.00 + Aditif Pengawasan Rp. 948,998.00
	Pembangunan rumah ibadah Masjid Al-Ikhlash Jl.Pendidikan Kel.Kabun Kec. Rambah Hilir	1	Paket/pek	197,101,000.00	198,332,098.00	Aditif Perencanaan Rp. 617,836.00 + Aditif Pengawasan Rp. 948,998.00
	Pembangunan rumah ibadah Masjid Al Muhammadi Jl. Sukarnadi RW. 13 Kel. Lubuk Bar Kec. Rambar Timur	1	Paket/pek	97,000,000.00	97,000,000.00	Aditif Perencanaan Rp. 214,000.00 + Aditif Pengawasan Rp. 915,000.00
	Pembangunan rumah ibadah Masjid Baiturrahim Jl. Gerinal RT.02 RW.08 Kel. Pasir Putih / Rambah	1	Paket/pek	187,000,000.00	188,000,000.00	Aditif Perencanaan Rp. 428,000.00 + Aditif Pengawasan Rp. 946,000.00
	Pembangunan rumah ibadah Masjid Al Hidayah Jl.Kesejahteraan Kel. Muara Agat Jaya Kec. Rambah Hulu	1	Paket/pek	197,000,000.00	198,001,000.00	Aditif Perencanaan Rp. 614,000.00 + Aditif Pengawasan Rp. 948,000.00
	Pembangunan rumah ibadah Masjid Al Hidayah Jl. Lintas Timur RW.03 RT. 02 RW. 12 Kel.Merangkai Kec. Kuko	1	Paket/pek	197,000,000.00	198,740,000.00	Aditif Perencanaan Rp. 604,000.00 + Aditif Pengawasan Rp. 947,000.00
	Pembangunan rumah ibadah Masjid Nurul Amal Jl. Lintas Timur RW.03 RT. 02 RW. 12 Kel.Merangkai Kec. Kuko	1	Paket/pek	197,000,000.00	198,002,007.00	Aditif Perencanaan Rp. 437,002.00 + Aditif Pengawasan Rp. 946,380.00
	Pembangunan rumah ibadah Masjid Nurul Amal Jl. Lintas Timur RW.03 RT. 02 RW. 12 Kel.Merangkai Kec. Kuko	1	Paket/pek	197,000,000.00	198,000,000.00	Aditif Perencanaan Rp. 478,112.00 + Aditif Pengawasan Rp.948,030.00
	Pembangunan rumah ibadah Masjid Nurul Amal Jl. Lintas Timur RW.03 RT. 02 RW. 12 Kel.Merangkai Kec. Kuko	1	Paket/pek	197,000,000.00	198,740,000.00	Aditif Perencanaan Rp. 806,000.00 + Aditif Pengawasan Rp.947,000.00
	Pembangunan rumah ibadah Masjid Baiturrahim Jl. Sungai Pinang RT. 03 RW. 02 Kel. Rambah Pasar Kec. Rambah Barat	1	Paket/pek	197,000,000.00	198,740,000.00	Aditif Perencanaan Rp. 828,000.00 + Aditif Pengawasan Rp.947,000.00
	Pembangunan rumah ibadah Masjid Baiturrahim Jl. Sungai Pinang RT. 03 RW. 02 Kel. Rambah Pasar Kec. Rambah Barat	1	Paket/pek	197,000,000.00	198,740,000.00	Aditif Perencanaan Rp. 810,140.00 + Aditif Pengawasan Rp. 960,000.00
	Pembangunan rumah ibadah Masjid Ulaalbid Jl. Asrama Kel.VI Lt.II RW.08 Kel. Kb Mawar Kec. Rambah	1	Paket/pek	197,000,000.00	198,000,000.00	Aditif Perencanaan Rp. 197,000.00 + Aditif Pengawasan Rp. 921,000.00
	Pembangunan rumah ibadah Musholla Ainul Jl. Cess F RT.04 RW.08 Kel. Lindai Sei Kec. Pantai	1	Paket/pek	80,000,000.00	80,215,021.00	Aditif Perencanaan Rp. 197,000.00 + Aditif Pengawasan Rp. 921,000.00
	Pembangunan rumah ibadah Musholla Baitul Hakmah RT.05 RW.07 Jl. Tanggamitang Jaya Kel. Lembangan Kec. Rambah Timur	1	Paket/pek	80,000,000.00	80,215,021.00	Aditif Perencanaan Rp. 197,000.00 + Aditif Pengawasan Rp. 921,000.00
	Pembangunan Kantor Polisi Pejung Sektor (Lanjutan)	1	Paket/pek	2,810,000,000.00	2,810,001,000.00	
	Pengawasan Pembangunan Kantor Polisi Pejung Sektor (Lanjutan)	1	Paket/pek	82,737,000.00	82,737,000.00	
	Pembangunan Masjid Mujahidin RT. 002 RW. 01 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya	1	Paket/pek	180,000,000.00	180,671,000.00	Aditif Perencanaan Rp. 504,001.00 + Aditif Pengawasan Rp. 643,410.00
	Pembangunan Masjid Nurul Ikhlas Jl. Hajr Dangkat 3 RT. - / RW. - Kel. Desa Wadya Kec. Binai Pekan	1	Paket/pek	199,000,000.00	201,000,000.00	Aditif Perencanaan Rp. 000,000.00 + Aditif Pengawasan Rp. 643,223.00
	Pembangunan Pembangunan Asrama Siswa Kabupaten	1	Paket/pek	90,000,000.00	90,000,000.00	
	Pembangunan Pembangunan Masjid Al Ikhlas masjid pengurus Kabupaten RT.02 RW. 07 Kel. Lubuk Bar Kec. Rambar Pekan	1	Paket/pek	97,000,000.00	97,010,000.00	

NO.	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA (RP)	KETERANGAN
	Pengadaan / Pembangun Masjid Al Ikhlas masjid pengurus Kabupaten HT, JI RW, 07 Kel. Lontoan Sel Kec. Kumbe Pasuni	1	Paket/pkt	00.000.000,00	00.000.000,00	
	Pembuatan 1 Tempat wudhuh, kudmolly Al Ikhlas Jln. Kelapa Gading Sakti Kel. Kec. Tanjungsang Lakesi	1	Paket/pkt	197.213.000,00	196.467.000,00	Aktivasi Pembuatan Rp. 197.471,00 + Aktivasi Pengawasan Rp. 686.730,00
	Pembuatan Kolam Baru MESA AL Ukuran JI. Mutiarara RT. 05 RW. 06 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tuah Makarti	1	Paket/pkt	197.000.000,00	196.000.000,00	Aktivasi Pembuatan Rp. 636.174,00 + Aktivasi Pengawasan Rp. 648.821,00
	Pembuatan Warnet Del Nomat Di Area Kandimata	1	Paket/pkt	196.708.000,00	196.708.000,00	
	Pembuatan Tulang Kolam Baru (1000) Tapakuli Udan Kolagah Hadist Fungsi Kepalmen Kristal Lemak JJ Hikamiyah	1	Paket/pkt	197.474.000,00	196.000.007,00	Aktivasi Pembuatan Rp. 636.000,00 + Aktivasi Pengawasan Rp. 648.000,00
	Pengadaan CCTV INFRARI Kelambaan	1	Paket/pkt	96.725.000,00	96.725.000,00	
	Pengadaan Mesinder Rumah Kran Karakteristik Pelambaran	1	Paket/pkt	197.325.000,00	197.000.000,00	
	Pengadaan Mesinder Kantor Pelambaran/Pelambaran	1	Paket/pkt	197.361.000,00	197.300.000,00	
	Pengadaan Rumah Dinas Kepalaran Kelambaran	1	Paket/pkt	797.000.000,00	196.975.621,00	Aktivasi Pembuatan Rp. 637.678,00 + Aktivasi Pengawasan Rp. 696.343,00
	Pembangunan Infrastruktur Masjid Al Amna Kab. Bagusal Hari, Tempian Raya	1	Paket/pkt	197.351.000,00	196.770.356,00	Aktivasi Pembuatan Rp. 036.000,00 + Aktivasi Pengawasan Rp. 647.173,00
	Pembangunan Infrastruktur Masjid Al Taufiq Kec Sidomulyo Timur Kec. Malaysian Dama	1	Paket/pkt	197.351.000,00	196.974.613,00	Aktivasi Pembuatan Rp. 637.678,00 + Aktivasi Pengawasan Rp. 646.330,00
	Pembangunan Gedung dan Prasarana Masjid Ar-Rahman Kab. RT. 005 / 11 Kel. Bandar Kuning Kec. Tanjung Pinang	1	Paket/pkt	197.000.000,00	196.646.286,00	Aktivasi Pembuatan Rp. 679.323,00 + Aktivasi Pengawasan Rp. 684.673,00
	Pembangunan Gedung dan Prasarana Masjid Ambasamedan RT. 03 RW. 11 Kel. Bandar Kuning Kec. Tanjung Pinang	1	Paket/pkt	192.997.000,00	193.631.267,00	Aktivasi Pembuatan Rp. 633.645,00 + Aktivasi Pengawasan Rp. 637.300,00
	Pembangunan Gedung dan Prasarana Masjid Al Muqimmah Jl. Raya 11 RT 02 RW. 06 Kel. Kampung Dalam Kec. Senayakan	1	Paket/pkt	98.352.000,00	99.081.629,00	Aktivasi Pembuatan Rp. 236.126,00 + Aktivasi Pengawasan Rp. 322.551,00
	Pembangunan Gedung dan Prasarana Masjid Al Ikhlas Jl. Sejahtera Kec. Tanjung Raya	1	Paket/pkt	196.850.000,00	196.000.000,00	Aktivasi Pembuatan Rp. 636.641,00 + Aktivasi Pengawasan Rp. 866.351,00
	Pembangunan Gedung dan Prasarana Masjid Baitul Makmur Jl. Lintang Al Pancamas Kamsel Ind. Limongan Baru Kec. Kumbe	1	Paket/pkt	197.413.000,00	196.010.949,00	Aktivasi Pembuatan Rp. 636.634,00 + Aktivasi Pengawasan Rp. 647.351,00
	Pembangunan Gedung dan Prasarana Masjid Nasi Beh Jl. Indoor Gumela Kabil RT 02/RW 03 Kel. Ds Kuh Ins., Tuah Madani	1	Paket/pkt	197.202.000,00	196.766.460,00	Aktivasi Pembuatan Rp. 636.606,00 + Aktivasi Pengawasan Rp. 647.651,00
	Pembangunan Gedung dan Prasarana Masjid Nurul Huda Jl. Bhakti RT. 03 RW. 05 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marangan Dumai	1	Paket/pkt	197.146.000,00	196.631.478,00	Aktivasi Pembuatan Rp. 636.301,00 + Aktivasi Pengawasan Rp. 647.170,00
	Pembangunan Gedung dan Prasarana Masjid Nurul Iman Jl. Kabel Sati Pekan, Bumi Lancang Kuning RT 002 RW. 004 Kel. Pematang Pasir Kec. Rupat	1	Paket/pkt	197.388.000,00	196.676.345,00	Aktivasi Pembuatan Rp. 636.731,00 + Aktivasi Pengawasan Rp. 648.351,00
	Pembangunan Gedung dan Prasarana Masjid Ukuwah RT. 07 RW. 02 Kel. Bandar Kuning Kec. Tanjung Pinang	1	Paket/pkt	197.700.000,00	196.730.631,00	Aktivasi Pembuatan Rp. 677.943,00 + Aktivasi Pengawasan Rp. 684.000,00
	Pembangunan Gedung dan Prasarana Mushalla Al Hidayah Jl. Dr. Sutiyo II RT 09 RW 03 Kel. Tj. Ara Kec. Bukit Kec. Tj. Pinang Barat	1	Paket/pkt	196.913.000,00	196.396.155,00	Aktivasi Pembuatan Rp. 516.000,00 + Aktivasi Pengawasan Rp. 520.850,00
	Pembangunan Gedung dan Prasarana Mushalla Al Ikhlas Orang Kumbe Semasa Jl. +34 Yos RT 03 RW 04 Kel. Limongan Kec. Kumbe Timur	1	Paket/pkt	98.000.000,00	96.007.296,00	Aktivasi Pembuatan Rp. 510.951,00 + Aktivasi Pengawasan Rp. 520.360,00
	Pembangunan Gedung dan Prasarana Mushalla Al Muhajirin Jl. Duwet Indah 1 RT. 05/02 Kel. Bandaharo Kec. Payung Sekaki	1	Paket/pkt	98.634.000,00	96.375.447,00	Aktivasi Pembuatan ML 510.031,00 + Aktivasi Pengawasan Rp. 523.459,00
	Pembangunan Gedung dan Prasarana Mushalla Ahlul Ikhlas Kopleh Pasuni Bekas Kantor Pemerintah Jl. Kemerdekaan Kab. Pelalawan - Meranti	1	Paket/pkt	197.000.000,00	197.000.000,00	
	Pembangunan Gedung Pesantren Ashabulkahfi IT	1	Paket/pkt	196.647.000,00	196.000.000,00	Aktivasi Pembuatan Rp. 637.172,00 + Aktivasi Pengawasan Rp. 646.000,00
	Rehab Gedung MHP Kavling 17 Jl. Bakti Ujung Kec. Tempian Raya	1	Paket/pkt	197.000.000,00	196.000.000,00	Aktivasi Pembuatan Rp. 637.000,00 + Aktivasi Pengawasan Rp. 645.250,00
	Rehab Gedung MHP Kavling 03 Jl. Lubuk Muka Ujung RT. 1 RW. 3 Kel. Sungai Lakung Kec. Tempian Raya	1	Paket/pkt	196.000.000,00	196.000.000,00	Aktivasi Pembuatan Rp. 636.000,00 + Aktivasi Pengawasan Rp. 645.780,00
	Rehab Masjid Nur Salam Jl. Anggrek Ind. Kampung Tiga Kec. Bukit Raya	1	Paket/pkt	196.749.000,00	196.627.648,00	Aktivasi Pembuatan Rp. 636.000,00 + Aktivasi Pengawasan Rp. 646.240,00
	Rehab Masjid Al Hidayah Jl. Hr. Soekarno Ind. Timur Gedung Kec. Bina Widia	1	Paket/pkt	199.000.000,00	198.634.000,00	Aktivasi Pembuatan Rp. 639.315,00 + Aktivasi Pengawasan Rp. 648.410,00

NO.	NAMA PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA (RP)	KETERANGAN
	Rehab Masjid Ulil Albab Jl. Jl. Ade Kerja RW. 04 Kel. Tual Kerja Kec. Tanjan	1	Paket/jam	367.451.000,00	330.725.181,00	Aditive Penerimaan Rp. 659.841,00 = Aditive Pengeluaran Rp. 647.329,00
	Rehab Masjid Al Mahar Jl. Kapten Pierre Tendean Gang Kel. 09 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai	1	Paket/jam	347.324.000,00	346.666.195,00	Aditive Penerimaan Rp. 658.152,00 = Aditive Pengeluaran Rp. 647.324,00
	Rehab Masjid Sabil Abbar RW. 11 Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai	1	Paket/jam	340.847.000,00	338.710.264,00	Aditive Penerimaan Rp. 658.652,00 = Aditive Pengeluaran Rp. 647.315,00
	Rehab Masjid Darussalam RT. 02 RW. 06 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya	1	Paket/jam	347.767.000,00	338.856.437,00	Aditive Penerimaan Rp. 658.772,00 = Aditive Pengeluaran Rp. 646.203,00
	Rehab Masjid Tawakkal Khalid Perum KSU Perdana Kel. Sungai Sibam Kec. Bina Widya	1	Paket/jam	341.999.000,00	338.633.587,00	Aditive Penerimaan Rp. 215.240,00 = Aditive Pengeluaran Rp. 325.847,00
	Rehab Masjid Jamiah Al Muttaqin Jl. Utusgabuta Gabli Km. 3 Rt.04 Dusun Tualatitia RT. 000 RW. 000 Kel. Air Putih Kec. Tuah Madani	1	Paket/jam	760.210.000,00	758.365.297,00	Aditive Penerimaan Rp. 658.154,00 = Aditive Pengeluaran Rp. 641.053,00
	Rehab Masjid Ar-Ridho Jl. Arsad Jl. Kenalaban No. 01 Kel. Marhaban Utara Kec. Rekonsi Utama	1	Paket/jam	130.351.000,00	128.642.648,00	Aditive Penerimaan Rp. 658.157,00 = Aditive Pengeluaran Rp. 647.231,00
	Rehab Masjid Fatqul Is Sabaandari Jl. Sri Pinas No. 100 Kel. Agro Widata Kec. Nadilad	1	Paket/jam	797.900.000,00	795.649.648,00	Aditive Penerimaan Rp. 658.232,00 = Aditive Pengeluaran Rp. 660.208,00
	Rehab Mushola Al-Ikhlash Jl. Sukajadi Gg. Kel. Sungai Sibam Kec. Bina Widya	1	Paket/jam	197.180.000,00	195.486.648,00	Aditive Penerimaan Rp. 658.878,00 = Aditive Pengeluaran Rp. 649.661,00
	Rehab Mushola Al-Jubair Jl. Kasar Gor RT. 05 RW. 06 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya	1	Paket/jam	150.850.000,00	148.647.522,00	Aditive Penerimaan Rp. 658.317,00 = Aditive Pengeluaran Rp. 658.220,00
	Rehab Ruang Bhayangkari Polsekta Pekanbaru	1	Paket/jam	198.845.000,00	196.229.677,00	Aditive Penerimaan Rp. 677.610,00 = Aditive Pengeluaran Rp. 649.807,00
	Rehab Ruang Bidang Hukum Polda Pekanbaru	1	Paket/jam	167.400.000,00	167.865.000,00	
	Rehab Ruang Kasa Kepolisian Pekanbaru (Lt.II)	1	Paket/jam	347.247.000,00	337.247.000,00	
	Rehab Ruang Tetap Kepolisian Pekanbaru	1	Paket/jam	198.008.000,00	197.900.512,00	Aditive Penerimaan Rp. 659.955.00 = Aditive Pengeluaran Rp. 644.027,00
	Rehab Rumah Dinas Ex Rehab DPRD Kota Pekanbaru	1	Paket/jam	1.411.478.000,00	1.413.870.000,00	
	Pengawasan Rehab Rumah Dinas Ex Rehab DPRD Kota Pekanbaru	1	Paket/jam	73.870.000,00	73.870.000,00	
	Rehab Rumah Dinas Kepolisian Pekanbaru	1	Paket/jam	180.130.000,00	180.044.888,00	Aditive Penerimaan Rp. 658.662,00 = Aditive Pengeluaran Rp. 660.667,00
	Rehab Gedung Mushalla Darussalam Jl. Darussalam No. 10 Kel. Tangkerang Utara/Kel. Bukit Raya Kec. Marpoyan Damai (Kel. Bangunan)	1	Paket/jam	198.000.000,00	197.200.888,00	Aditive Penerimaan Rp. 634.395,00 = Aditive Pengeluaran Rp. 662.888,00
	Rehab Mushalla Al-Ittifaq Jl. Mawar Kel. Padang Terubuk Kec. Rengat	1	Paket/jam	150.200.000,00	148.820.780,00	Aditive Penerimaan Rp. 653.940,00 = Aditive Pengeluaran Rp. 646.810,00
	Rehab Ruang Kepala Dinas Kesehatan (Lt.II)	1	Paket/jam	197.213.000,00	197.214.000,00	
	Rehab Ruang Sekretariat Dinas Kesehatan	1	Paket/jam	147.780.000,00	146.234.627,00	Aditive Penerimaan Rp. 671.647,00 = Aditive Pengeluaran Rp. 664.896,00
	Rehab Ruang Kepala Dinas Kesehatan	1	Paket/jam	148.120.000,00	146.273.788,00	Aditive Penerimaan Rp. 676.065,00 = Aditive Pengeluaran Rp. 665.718,00
	Rehab Ruang Kepala Bidang Kesehatan	1	Paket/jam	148.678.000,00	146.784.471,00	Aditive Penerimaan Rp. 678.465,00 = Aditive Pengeluaran Rp. 666.365,00
	Rehab Ruang Sekretariat Dinas Kesehatan	1	Paket/jam	147.777.000,00	146.780.000,00	Aditive Penerimaan Rp. 677.934,00 = Aditive Pengeluaran Rp. 666.510,00
	Pengadaan AC Ruang Kepala Dinas Kesehatan	1	Paket/jam	167.036.000,00	167.036.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid Baiturrahim Ikatan Keluarga Besar Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru	1	Paket/jam	193.000.000,00	197.000.000,00	
	Pengadaan Peralatan Elektronik Rumah Dinas Kesehatan	1	Paket/jam	196.344.000,00	196.344.000,00	
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Rumah Dinas Kesehatan	1	Paket/jam	197.286.000,00	197.286.000,00	
	Pembangunan Gedung Masjid Ar-Rahmat Jl. Jawa Kel. Sidang Gabli Kec. Tembilahan Hulu	1	Paket/jam	197.973.000,00	197.973.000,00	

NO.	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA (RP)	KETERANGAN
	Pembangunan Fasilitas Kejaksaan Tinggi Riau	1	Paket/pekerjaan	186.174.600.00	186.170.600,00	
	Pembuatan Kolam Ikan Kejaksaan Tinggi Riau	1	Paket/pekerjaan	164.853.000,00	164.853.000,00	
	Gedung Mesjid Al Amar Kejaksaan Tinggi Riau	1	Paket/pekerjaan	130.000.000,00	797.838.000,00	
	Rehabilitasi Gedung TV Kejaksaan Kejaksaan Tinggi Riau	1	Paket/pekerjaan	190.000.000,00	190.000.000,00	
	Rehabilitasi Laboratorium Kantor Kejaksaan Tinggi Riau	1	Paket/pekerjaan	142.000.000,00	197.000.000,00	
	Jumlah			24.774.674.000,00	25.677.511.157,00	
	Belanja Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					
	Tahun 2020					
	Pengadaan Kendaraan Dinas untuk Kantor Kejaksaan	1	Paket/pekerjaan	164.700.000,00	164.773.000,00	
	Pembuatan Tanda Membaca/Kolam Dinas Kejaksaan Kota Pekanbaru	1	Paket/pekerjaan	141.000.000,00	141.000.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana dengan Lingkup Kerja Kejaksaan	1	Paket/pekerjaan	197.000.000,00	197.000.000,00	
	Sarana Dan Prasarana Kantor Kejaksa Pekanbaru	1	Paket/pekerjaan	147.000.000,00	147.873.000,00	
	Pembuatan dan Pemasar Kantor Mesjid Kantor Kejaksaan Pekanbaru	1	Paket/pekerjaan	197.000.000,00	197.242.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Mesjid Muslimin Jl. Dall Bolker RT. 4 RW. 11 Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya	1	Paket/pekerjaan	197.000.000,00	197.000.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Mesjid Hal Al-Mukmin Jl. Nanas Indah RT. 1 RW. 11 Kel Perumbang Kabupaten Kota	1	Paket/pekerjaan	197.000.000,00	197.000.000,00	
	Paving Blook Mushalla MUSHOLLA RT. 05 RW. 02 Kec. Sail Perkantoran Marpoyan	1	Paket/pekerjaan	197.000.000,00	197.000.000,00	
	Rehab Rumah Dinas Gedung 2021 Pekanbaru	1	Paket/pekerjaan	197.000.000,00	197.000.000,00	
	Rehab Kantor Kejaksa Pekanbaru	1	Paket/pekerjaan	197.000.000,00	197.000.000,00	
	Rehab Kantor Kejaksa Pekanbaru (Kota)	1	Paket/pekerjaan	197.000.000,00	197.000.000,00	
	Paving Block Mushalla Al Ihsan RT. 03 RW. 01 Kec. Sidomulyo Timur	1	Paket/pekerjaan	197.000.000,00	197.000.000,00	
	Paving Masjid Al-Ikhlas RT. 06 RW. 03 Kec. Sidomulyo Timur	1	Paket/pekerjaan	197.000.000,00	197.000.000,00	
	Paving block Mushalla Ahmad Hasan Kel. Air Hitam Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru	1	Paket/pekerjaan	197.000.000,00	197.000.000,00	
	Gedung Mesjid Al-Huda Jl. Sidang Gunjuk Kel. Sidang Garo, Kec. Tenayan Raya RT / RW 10	1	Paket/pekerjaan	98.000.000,00	98.000.000,00	
	Gedung Musholla Al-Ikhlas Kel. Sidomulyo Timur Kec. Tuah Madani	1	Paket/pekerjaan	197.000.000,00	197.000.000,00	
	Gedung Musholla An-Nur Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani	1	Paket/pekerjaan	197.000.000,00	197.000.000,00	
	Gedung SEKOLAH DASAR Jl. Sidang Gunjuk Kel. Sidang Garo, Kec. Tenayan Raya RT / RW 10	1	Paket/pekerjaan	197.000.000,00	197.000.000,00	
	Gedung Mesjid Al-Huda Jl. Sidang Gunjuk Kel. Sidang Garo, Kec. Tenayan Raya RT / RW 10	1	Paket/pekerjaan	197.000.000,00	197.000.000,00	
	Gedung Musholla An-Nur Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani	1	Paket/pekerjaan	197.000.000,00	197.000.000,00	
	Gedung SEKOLAH DASAR

NO.	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA (RP)	KETERANGAN
	Mushalla Al Hidayah RW. 12 (Perumahan YPP) Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Timur	1	Paket/pkt			
	Musholla Raudhatul Jannah Jl. Sialang Sakti, Kelurahan Rt. 07 Rw. 04 Kel. Sialang Munggu	1	Paket/pkt			
	Pagar Musholla RT. 02 RW. 08 Kel. Simpang Baru/Senapelan Kec. Tuah Madani	1	Paket/pkt			
	PEMBANGUNAN GEDUNG BANGUNAN MUSHOLLA, AULA, DAN SARANA MCK TAMPAN	1	Paket/pkt			
	PEMBANGUNAN GEDUNG MUSHOLLA, AULA, ASRAMA, DAN FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA	1	Paket/pkt			
	Pak. Pembelanjaan Kamar dan Tempat Mandi DENGAN Pelayanan	1	Paket/pkt			
	Pak. Nyuci MOTA Masjid dan MANAGER	1	Paket/pkt			
	Pembangunan Gedung Serbaguna Gedung Serba Guna Kelurahan Sulak Muka Kec. Kabupaten Kec. Dall	1	Paket/pkt			
	Pembangunan Gedung Sekretariat Jl. Lapangan RT. 001 RW. 007 Kec Bandar Kuning Kec. Tanjung Raja	1	Paket/pkt			
	Pembangunan Pabrik Minyakan Dalat	1	Paket/pkt			
	Pembangunan Perkantoran Pabrik Minyakan Dalat	1	Paket/pkt			
	Pengadaan Pabrik Minyakan Dalat	1	Paket/pkt			
	Pembangunan Rumah Dinas Jl. Arwi Kota RT 05 RW 03 Kel. Jembatan Kec. Bukit Raya	1	Paket/pkt			
	Pembangunan Rumah Dinas Jl. Perum Dinas Pekanbaru RT 005 RW 011 Kec. Sidomulyo Kec. Tuah Madani	1	Paket/pkt			
	Pembuatan Kantor Kepala Desa Jl. Jati RW. 01 Kec. Pemerintah Mitra Jaya	1	Paket/pkt			
	Pembuatan Kantor Kepala Desa	1	Paket/pkt			
	Pembuatan Pagar gedung kantor rumah Kepala Desa Jl. Perum Dinas Pekanbaru RT 005 RW 011 Kec. Sidomulyo Kec. Tuah Madani	1	Paket/pkt			
	Pembuatan Pagar Masjid Mushalla Jl. Pendidikan RW. 09 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Timur	1	Paket/pkt			
	Pengadaan Kulkas dan Dapur Rumah DESA/PEMERINTAH	1	Paket/pkt			
	Pengadaan Kursi, Kursi Rapat, Kursi Hadap, Sofa, dan Meja Staff 1 Set DESA/PEMERINTAH	1	Paket/pkt			
	Pengadaan Mushaf Tempat Ruko	1	Paket/pkt			
	Pengadaan alat pemadam kimia di gedung/kantor Jl. Tengku Bey RT 06 RW 04 Kel. Jembatan Kec. Bukit Raya	1	Paket/pkt			
	Pengadaan Gedung Gili / Pembelian Gedung Serbaguna Kantor Perusahaan RW. 07 , 02 RW. 05 Kel. Sialang Munggu	1	Paket/pkt			
	Peningkatan sarana dan Prasana Masjid Rahmatallah Jl. Tengkong Kel. Senapelan Kec. Tuah Madani	1	Paket/pkt			
	Peningkatan sarana dan Prasana Mushalla Qolbun Jl. RT. 04 RW. 05 Kel. Rumah Layang Kec. Tenayan Raya	1	Paket/pkt			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Ngaruf Kantor RT 01 RW 03 Kel. Pematang Meranti	1	Paket/pkt			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Kantor RT. 02 RW 08 Kel. Pematang Meranti	1	Paket/pkt			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan RT. 05 RW 03 Kel. Pematang Meranti	1	Paket/pkt			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Jl. Utama Gg Mesjid RT 01 RW 02 Kel. Pematang Meranti	1	Paket/pkt			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Ibnu Al Mubarak Jl. Sri Indrapuri No.39 B, 5 / No.15 Kel. Agrowisata Kec. Kumbai Barat	1	Paket/pkt			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Ng.ung Al Ghuraba Panam Jalanan Gak Gardan Jl. Pipa Kelok 30, Tel. No. 31 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya	1	Paket/pkt			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Al Qamzah Jl. Sidomulyo 05 B 1 No 02 Kel. Bulogh Indrapng Kec. Kumbai	1	Paket/pkt			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Al Jauhar Jl. Lha Pekan Mukmin Garuda Sakti	1	Paket/pkt			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Al Kautsar Jl. Pembina Ii Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Timur	1	Paket/pkt			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Al Mawar Jl. Swadaya Kel Sukaraj Sakti Kec. Tenayan Raya	1	Paket/pkt			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Al Ma'ruf Jl. Gotong Royong Kec. Tuah Karya Km. Tuah Madani	1	Paket/pkt			
	Pengadaan sarana dan Prasarana Masjid Baitul Mukarom Jl. Dsa Ujung Kec Air Pasir Kec. Tuah Madani	1	Paket/pkt			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Baitussholeh Jl. Desa Ujung Baru Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki	1	Paket/pkt			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Darun Na'im Jl. Kuali Bersari Hjg, Kuali Ngan Kec. Pematang Kabau Kec.Rohil	1	Paket/pkt			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Lubul Haj Ozamat Jl. Hasa Nasabi Rt. 02 Kec. 05 Kel Sendangsari Kec. Payung Sekaki	1	Paket/pkt			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Miftahul Hidayah Jl. Handayani Kel Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai	1	Paket/pkt			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Muawanah Jl. Tribrata Rt. 02 Kec. 10 Hjg. Sri Meranti	1	Paket/pkt			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Raudhatul Jannah Jl. Inpres 83 (Dr.RW. 08 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai	1	Paket/pkt			

NO.	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA (RP)	KETERANGAN

NO.	NAMA BARANG	KUANTITAS	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA (RP)	KETERANGAN
	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Gereja Kristen Indonesia (GKI) Di Jl. Gerunggi Kec. Pangkah RT. 12 Kel. Dukuh, Gunung Sitoli Kab. Nias	1	Paket/Jasa	149.000.000,00	149.000.000,00	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Masjid Al-Muhajin Jl.Cipancuran No. 12, Rw. 01 Kelurahan Dangdeur Ke Kecamatan Purbaratu Tasik	1	Paket/Jasa	197.813.000,00	197.813.000,00	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Masjid Nur Thoyibah Jl. Cikadut No. 64 Rw. 03 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibi	1	Paket/Jasa	197.812.000,00	197.812.000,00	
	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Masjid Al Fatwa Pasirmukti Bukit Mutiara Pratama RT6 , 14 Kec. Gleiang Sabtli Kec. Tanjung Raya	1	Paket/Jasa	197.466.000,00	197.466.000,00	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Masjid Nurul Jannah Jl.Utama RT.02 RW. 17 Kec.Cibi Mekarsi, Kec. Rumbai	1	Paket/Jasa	197.822.000,00	197.822.000,00	
	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Masjid Sunduk Jannah Jl.Pramuka Kec.Kintap Tnh Bumi Sari, Pagung Sakatik	1	Paket/Jasa	197.465.000,00	197.465.000,00	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Masjid Al Mutaqien Jl.Dampen Pasar Kp. Kebalen Rt. 03 Rw. 10 Kelurahan Langkasenga/Sekotai Kabupaten Dumai Riau	1	Paket/Jasa	197.800.000,00	197.800.000,00	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Masjid Al-Ihsan Jalan Al-Amin Dg. Nanas Kelurahan Tanjungkarang Tengah Kec. Mandonga Kendari	1	Paket/Jasa	196.000.000,00	196.000.000,00	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Masjid Al- Hidayah Jl. Ki - Kebaron II RT. 04 RW. 12 Kel. Air Dingin Kec. Bukit Peram	1	Paket/Jasa	197.695.000,00	197.695.000,00	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Masjid Assyiyah Jl. Cipti Hanyar Kel. Gisting Mungpo Kec. Tulah Makmur	1	Paket/Jasa	196.465.000,00	196.465.000,00	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana MUSHOLLAH Fitri Dalle Kel. Sidomulyo Barat	1	Paket/Jasa	197.500.000,00	197.500.000,00	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Musholla Amul Hajrin Jl. Lembamandi RK. 01 Rw. 06 Kelurahan Lembamandi Kecamatan Rumbai	1	Paket/Jasa	197.811.000,00	197.811.000,00	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Musholla Kebulkin Jl. Taman Rw. 03 Kelurahan Pebo Kecamatan Rumbai	1	Paket/Jasa	197.970.000,00	197.970.000,00	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Musholla Darul Jannah RT. 0005 / 11 Kel.Jati Kecamatan Pancoran Kab.Sidang Meranjat	1	Paket/Jasa	197.465.000,00	197.465.000,00	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Musholla Nurul Hidayah Jl. Anglimut RT. 1 RW. 1 Kel Tulak Makmur Kec. Tulak Makmur	1	Paket/Jasa	197.816.000,00	197.816.000,00	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Musholla Istiqlal Hidayatullah Jl. Agatis Talenta RT.02 RW. 12 Kel. Tangerang I Hilir Kec. Bukit Raya	1	Paket/Jasa	197.976.000,00	197.976.000,00	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Mushalla Al Ikhlas Kel. Sidomulyo Barat	1	Paket/Jasa	197.000.000,00	197.000.000,00	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Musholla Al Mukmin Jl. Belagen Bukit Rt. 01 Rw. 04 Kel. Kampung Baru Kec. Sidomulyo	1	Paket/Jasa	197.000.000,00	197.000.000,00	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Mushalla Nurul Ashiqah Jl. Cipta Karya Ujung Kec. Tulak Makmur	1	Paket/Jasa	197.796.000,00	197.796.000,00	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pesantren Jl. Kuala Bekti Ujung RT. 03 RW. 03 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki	1	Paket/Jasa	197.282.000,00	197.282.000,00	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang Rawatinap Lantai Kedelapan Rsgadi Palembang	1	Paket/Jasa	197.370.500,00	197.370.500,00	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang Rawatinap Lantai Delapan Rsdadi Palembang	1	Paket/Jasa	197.234.000,00	197.234.000,00	
	Peningkatan Sarana Prasarana Masjid Al Ikhlas Jl. Al-Ikhlas RT. 03 RW. 04 Kel. Pematang Kapau Kec. Kuala	1	Paket/Jasa	197.813.000,00	197.813.000,00	
	Peningkatan Sarana Prasarana Masjid Baitul Makmur Jl. Raya Makmur - Sorikmas Indah RT. 02 RW. 10 Kec. Makmur Raya Kec. Tulak Makmur	1	Paket/Jasa	196.762.000,00	196.762.000,00	
	Peningkatan Sarana Prasarana Masjid Hasanul Yaqin Kelurahan Jambur Pasarsingamangaraja Kecamatan Tulak Makmur Kec. Tulak Makmur	1	Paket/Jasa	197.490.000,00	197.490.000,00	
	Peningkatan Sarana Prasarana Masjid Jamaatul Ataunie Jl.Gili Rumbia RT.01 RW.05 Kel. Agrowisata Kec. Rumbai Barat	1	Paket/Jasa	197.485.000,00	197.485.000,00	
	Peningkatan Sarana Prasarana Masjid Jamik Al Ikram Abu Darat Jl.Kampung Baru Ii Ii Ismail Kec. Sibiting Sabtli Kec. Tanjung Raya	1	Paket/Jasa	197.485.000,00	197.485.000,00	
	Peningkatan Sarana Prasarana Masjid Nurul Hijrah Jl. Ki Mesah Ujung RT.02 RW.01 Kel.Ex Mesah Kec.Rumbai	1	Paket/Jasa	197.000.000,00	197.000.000,00	
	Peningkatan Sarana Prasarana masjid Nurul Jadid Jl. Sentul Kyng. Dalima Pus RW.05 Kel. Tobek gading Kec. Bukit Kapur	1	Paket/Jasa	197.954.000,00	197.954.000,00	
	Peningkatan Sarana Prasarana Masjid Rakatkasi Nil I Jl. Ki. Kantos, RT. 03 RW. 10 Kel. Tanjung Tiga Kec. Kuala Kuba	1	Paket/Jasa	197.400.000,00	197.400.000,00	
	Peningkatan Sarana Prasarana Musholla Al Ishlah Perum Asal Kalna RT.02 RW.08 Kel.Tlulk Makmur Kec.Tulak Makmur	1	Paket/Jasa	197.153.000,00	197.153.000,00	
	Peningkatan Sarana Prasarana Musholla Elshin Kel. Jl. Tlulk Kelua Gang Perum Villa Bambu RT.03 RW.05 Kel.Tlulk Makmur Kec.Tulak Makmur	1	Paket/Jasa	198.000.000,00	198.000.000,00	
	Peningkatan Sarana Prasarana Musholla Sabrandara Jl.Pattimburg Perum mekarsa asabs RT. 01 Rw.08 Kel.Sekayu Kecamatan Kec.Tanjung Raya	1	Paket/Jasa	197.513.000,00	197.513.000,00	
	Peningkatan Sarana Prasarana Mushalla / Asar Sbi Hidayat Jl. Pattai Ica I Kl.Kab.Bakenaan Baroi Kec. Tulak Makmur	1	Paket/Jasa	197.810.000,00	197.810.000,00	
	Rehabilitasi Turnah Dinas Pariwisata Pekanbaru	1	Paket/Jasa	197.394.000,00	197.394.000,00	
	Rehabilitasi Ruang Workpointer	1	Paket/Jasa	197.640.000,00	197.640.000,00	
	Rehab. masjid al mutaqien rt 1 rw 11 dalamnan tanglirang Mesjid Kec. Bukitraya	1	Paket/Jasa	197.800.000,00	197.800.000,00	
	Rehab. MCK, perbaikan gapura Rajawali pasmal Rt. 3 Rw 9 kelurahan Tobek gading kecamatan bukitkapur Kota Prabumulih	1	Paket/Jasa	197.989.000,00	197.989.000,00	
	Rehab. Masjid Al Muhammadi Sungai Ibu, Tumpuan Raya	1	Paket/Jasa	197.570.000,00	197.570.000,00	
	Rehab. Taman Baca Bhayangkari	1	Paket/Jasa	197.000.000,00	197.000.000,00	
	Rehab dan Pengadaan Musholla AL - Ikhlash Jl. Mahakam Ujung RT. 02 VII, VIII Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tenayan Raya	1	Paket/Jasa	197.000.000,00	197.000.000,00	
	Furniture Untuk Posbindu PUPR	1	Paket/Jasa	197.500.000,00	197.500.000,00	
	Pembuatan mushollah kantor pribadi pekanbaru	1	Paket/Jasa	192.240.000,00	192.240.000,00	

NO.	NAMA SATUAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA (RP)	KETERANGAN
	Pembuatan Gerbang Dan Prasasti Masjid Al Ummawah Jl. Ir.Soekarno Hatta Kel. Gebang Kec. Stone Mountain	1	Paket/pkt	99,387,000.00	99,387,000.00	
	Jumlah			33,363,450,000.00	33,363,450,000.00	
	Belanja Jasa yang Dibayarkan Secara Triwulan/Catur Wulan/Tahunan					
	Tahun 2023					
	Pembangunan Tower Kamuzan Central Amerika	1	Paket/pkt	1,999,001,504.00	1,999,001,504.00	
	Pembangunan Gedung dan Prasarana Untuk PKSP Muara Pulau Jl. Pulau Pandurian Kec. Pulau Kec. Rumbai	1	Paket/pkt	780,019,000.00	780,019,000.00	
	MDA Jauhatan Mukarrobah Al-Ustadiyah (Ar-Istiqlal) Jl. Jalan Lintas Timur Km. 12,5 Kelurahan Sidang Kemuyun Kecamatan Kubu	1	Paket/pkt	197,200,000.00	197,200,000.00	
	Pembangunan Gedung dan Prasarana Masjid Al-Muhsinat Jl. Yang Tua Perum. Mutiara Sentosa Kaya Kel. Menanga Kec. Kubu	1	Paket/pkt	197,470,000.00	197,470,000.00	
	Pembangunan Gedung Prasarana Masjid Ibnu Al Mukarrom Jl. Sri Kandilah Km 20 Kl 11 Ilha 10 Kel. Agrowisata Kec. Rumbai BKW	1	Paket/pkt	197,940,000.00	197,940,000.00	
	Pembangunan Gedung Prasarana Masjid Ar-Rahmah Jl. Transmigrasi Kel.Labuh Baru Timur Kec.Payung Sekaki	1	Paket/pkt	197,470,000.00	197,470,000.00	
	Pembangunan Gedung Prasarana Pondok Pesantren Pancasiddin Al Mahdi Jl.Perjuangan RT.02 RW.02 Rejo Kec.Rumbai	1	Paket/pkt	197,549,850.00	197,549,850.00	
	Pembangunan Gedung Prasarana Masjid Baiturrahim Jl. M. Yusuf Kl. Jln. Kel. Jln. Kec.Sukajadi Kec.Tampan Pekan	1	Paket/pkt	197,977,000.00	197,977,000.00	
	Pembangunan Gedung Prasarana Masjid Ash Shalihin Jl. Ahmad Kel. Kl. Kec.Sukajadi Kec.Tampan Pekan	1	Paket/pkt	197,396,000.00	197,396,000.00	
	MDTA Ayatullah Jl. Makam Gg. Semaja RT. 1 RW. 2 Kel. Tanjung Hilir Bac. Lintas Timur	1	Paket/pkt	197,110,000.00	197,110,000.00	
	Pembangunan Masjid Al Akbar Jln. Sei Jumbas RT.02 RW.10 Kel. Air Hitam Kec. Rumbai	1	Paket/pkt	197,396,000.00	197,396,000.00	
	Pembangunan Gedung dan Prasarana Masjid Pekanbaru Al - Hikmah Jl.Pahlawan Kerja, RT.02 RW.03 Kel. Simpang Kec. Kabupaten Daerah	1	Paket/pkt	197,222,000.00	197,222,000.00	
	Pembangunan Masjid Nurul Hidayah Jl. Soekarno Kel. Tanjungsenang Selatan Kec. Bukit Raya	1	Paket/pkt	196,802,000.00	196,802,000.00	
	Pembangunan Gedung dan Prasarana MDA Darul Istiqomah Jl. Masjid Perum Tunggal Perkasa Permai RT.02 RW.12 Kel. Menanggor Kec. Kubu	1	Paket/pkt	197,551,000.00	197,551,000.00	
	Jumlah			4,386,447,354.00	4,386,447,354.00	
	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat					
	Tahun 2023					
	Masjid Rabithul Jannah Jl. Pertanak No.20 Kel. Dimo Kec. Pekanbaru Kec. Rumbai	1	Paket/pkt	197,500,000.00	197,500,000.00	
	MDTA Ayatullah Jl. Makam Gg. Semaja RT. 1 RW. 2 Kel. Tanjung Hilir Bac. Lintas Timur	1	Paket/pkt	197,500,000.00	197,500,000.00	
	Mushalla Ar-Rahmah Jl. Sungai Pakan Mangga Raya RT. 03 RW. 12 Kel. Pekanbaru Kec. Kubu	1	Paket/pkt	197,500,000.00	197,500,000.00	
	Pembangunan Gedung dan Prasarana Masjid Al Yaqin Jl. Hidayah Kel. Lembahsari Timur Kec. Tampan Riau	1	Paket/pkt	197,450,000.00	197,450,000.00	
	Pembangunan Gedung Prasarana Masjid Baiturrahman Jl. Sultan Taj. Sembahanan No. 2 Kelurahan Lubuk Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki	1	Paket/pkt	197,500,000.00	197,500,000.00	
	Pembangunan Gedung Prasarana Masjid Nurul Hidayah Jl. Sultan Taj. Sembahanan No. 2 Kelurahan Lubuk Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki	1	Paket/pkt	197,526,000.00	197,526,000.00	
	Pembangunan Gedung Prasarana Masjid Ar-Rahmah Jl. Sri Kandilah Kel.Agrowisata Kec.Rumbai Barat	1	Paket/pkt	197,952,000.00	197,952,000.00	
	Pembangunan Gedung Prasarana Masjid Al Hidayah Jl. Sultan Kec. 12 Kelurahan Pekanbaru Kecamatan Kubu	1	Paket/pkt	197,500,000.00	197,500,000.00	
	Pembangunan Gedung Prasarana Masjid Al Ikhlas Jl. Sultan Kec. 12 Kelurahan Pekanbaru Kecamatan Kubu	1	Paket/pkt	197,500,000.00	197,500,000.00	
	Pembangunan Gedung Prasarana Masjid Nurul Hidayah

NO.	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA (RP)	KETERANGAN
	Pak. Rehab Mushalla Abdurrahman Bin Auf, Jln.Lintasan Jalur SMP N 14 Pekan Baru, Kel. Limbungan Kec. Rumbai	1	Paket/pkt	167.386.800,00	167.386.800,00	
	Pembangunan Jaringan Listrik Masjid Cik Di Lubuk Jln. Kopi Sari RT.01 RW.06 Tuo Timur Pekan Kel.Simpang Baru	1	Paket/pkt	197.231.800,00	197.231.800,00	
	Pembangunan Sarana Prasarana Masjid Nurul Iman Jl. Cipta Karya Ujg. Masjid Pkr.09 Kel.Sidangoreng Kec.Tubi Hilalan	1	Paket/pkt	197.832.300,00	197.832.300,00	
	Pembangunan Sarana Prasarana Masjid Nurul Huda Jl. Manyawardi Kel.Lubuk Gaharu Kec.Pinggir Bengkalis	1	Paket/pkt	197.875.000,00	197.875.000,00	
	Pembangunan Sarana Prasarana MESJA Al. Kabil Jl. Sukakarya Perum IDG. RL.III No. 30 Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani	1	Paket/pkt	197.411.000,00	197.411.000,00	
	Pembangunan Fasilitas Umum Gerbang Perum Pur Ira Griya Mas ITB III, Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tuah Madani	1	Paket/pkt	196.130.000,00	196.130.000,00	
	Rehab Asrama Al Ganadiah Jl. Sidomulyo Ujg. Mushalla RT. 09 RW. 06 Kel. Sidorej Dalat	1	Paket/pkt	197.900.000,00	197.900.000,00	
	Pembangunan sarana dan prasarana MESJA Ainaddi Kasil Mi'raaji Kel. Pandaling Kepau Kec. Tenayan Raya	1	Paket/pkt	197.122.000,00	197.122.000,00	
	Rumah Ibadah Bethany Jl. Tanjung Pulau Kab. Tanjung Pku. Kec. Lima Puluh	1	Paket/pkt	171.788.000,00	171.788.000,00	
	Rehab Tempat Kampung Kuini (Masjid Pembangun)	1	Paket/pkt	197.324.000,00	197.324.000,00	
	Pembuka / Pembentuk Masjid Nurul Fajar Jl. Ade Kadang RW. 05 Muara Fajar Timur Pkr.Ina Darat	1	Paket/pkt	197.536.000,00	197.536.000,00	
	Pembangunan Masjid Al Hasdhar RT.05 RW.01 Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tuah Madani	1	Paket/pkt	197.000.000,00	197.000.000,00	
	Pembangunan Ruang Serbaguna RT.03 RW.01 Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tuah Madani	1	Paket/pkt	197.971.000,00	197.971.000,00	
	Pembangunan Masjid Al Hidayah RT.04 RW.08 Kel. Sidorejo Barat Kec. Tuah Madani	1	Paket/pkt	197.115.000,00	197.115.000,00	
	Pembuatan Sarana Prasarana Masjid Darussalam Jl. Kesatuan Ujg. Masjid Sekundan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki	1	Paket/pkt	197.270.000,00	197.270.000,00	
	Pembangunan Masjid Pertolong Al- Kareem Jl. Hasan Jl. RT.04 RW.11 Kel. Tanjakang Tengah Kec. Mesjoyo Darat	1	Paket/pkt	197.274.000,00	197.274.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid Baitul Makmur Jl. Sukakarya RW. 06 Kel. Sidorej (Kuala) Kec. Tenayan Raya	1	Paket/pkt	197.000.000,00	197.000.000,00	
	Masjid Nurul Falah Jl. Hasi Jaj Mukhd Fakir RT. 05 RW. 07 Kel. Tanjakang Barat Kec. Marpoyan Damai	1	Paket/pkt	197.144.000,00	197.144.000,00	
	Pembangunan Sarana Prasarana MESA Al Mukhlishin Jl. Jamsostek No.112 Kel.Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki	1	Paket/pkt	197.000.000,00	197.000.000,00	
	Pembangunan Sarana Prasarana MESA Hidayatul Fajar Jl. Fajar No.30 Kel.Labuh Baru Barat Kec.Payung Sekaki	1	Paket/pkt	197.000.000,00	197.000.000,00	
	Rumah Tafiz Quran Masjid Al Hidayah Jl.Melati No.65 RT.21 RW.05 Kel. Labuh Baru Timur Kec.Payung Sekaki	1	Paket/pkt	197.000.000,00	197.000.000,00	
	Pembangunan Mushalla Mahyatul Jannah Pengajaran Lantai Keramik dan Alt Bot Jl.Mesi I Sungai Dg.Kimas Bencawana RT.06 RW.02 Kec.Ku Hilalan Kec.Payung Sekaki	1	Paket/pkt	196.997.000,00	196.997.000,00	
	Pembangunan Sarana Prasarana MESA Al Mubarak Perum Pharma Jak Asih II / 25 RW.08 Kel.Simpang Tiga Kec.Rumbai Pesisir	1	Paket/pkt	197.295.000,00	197.295.000,00	
	Pembangunan Tempat Mushalla Jalanmas Jl. Anggrek Ujg. Sei.Duku RW.11, Kec.Tenayan Raya Kec. Tenayan Raya	1	Paket/pkt	196.000.000,00	196.000.000,00	
	Pembangunan Tempat Mushalla Kampung Jl. Kemuning Baroto Kota Jumlah RT.02 RW.02 Kec. Bukit Raya Kec. Kab.	1	Paket/pkt	196.114.000,00	196.114.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Nurul Huda Al Ikhlash Kel.Sidomulyo Barat Kec.Marpoyan Damai	1	Paket/pkt	197.957.000,00	197.957.000,00	
	Masjid Al Hidayah Jl. Cipta Karya Ujg. Pasir Pandan Hilalan(Ibu)	1	Paket/pkt	197.251.000,00	197.251.000,00	
	Pembuka Mushalla Al Ashar Jl. Tanjung Lesar Tanjung Jati RT.02 RW.04 Kel.Pulau Kec. Lima Puluh	1	Paket/pkt	197.000.000,00	197.000.000,00	
	Pembangunan Sarana Prasarana Masjid Ulil Albab Kec. Ujung Nyiur Kel.Tanjakang Kec.Kec.Merpoyan Damai	1	Paket/pkt	197.000.000,00	197.000.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Mushalla Al Ikhlas Jl. Bukit Lebar RT. 03 RW. 03 Kel. Sidorej Dalat	1	Paket/pkt	197.000.000,00	197.000.000,00	

NO.	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA (RP)	KETERANGAN
	[illegible]	1	Paket/pek	[illegible]	[illegible]	

NO.	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA (RP)	KETERANGAN
	[illegible]	1	Paket/unit	[illegible]	[illegible]	

NO.	KAKA BANGUNAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA (RP)	KETERANGAN

NO.	NAMA BAHAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA (Rp)	KETERANGAN

Lampiran IV

RINCIAN PENAMBAHAN PERSEDIAAN TA. 2023

No	Uraian Kode Barang	SALDO AWAL	PEMBELIAN LRA	Persediaan BLUD 2023 (sumber belanja barang dan jasa BLUD)	BM MENJADI PERSEDIAAN	BLUD DISHUB	HIBAH	REKLAS	UTANG BELANJA PERSEDIAAN (TUNDA BAYAR 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	**Persediaan**	138.083.403.786,13	414.975.938.937,00	5.857.953.218,43	28.571.546.014,34	80.505.995,00	19.562.903.786,43	38.505.345.736,00	-
	Barang Pakai Habis	138.083.603.786,13	414.912.312.856,00	5.857.953.218,43	28.571.546.014,34	80.505.995,00	19.562.903.786,43	38.505.345.736,00	-
	Bahan	5.077.590.873,85	109.949.695.376,00	27.983.945,00	28.571.546.014,34	-	-	430.713.810,00	-
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	321.468.173,85	66.138.263.188	-	-	-	-	-	-
2	Bahan Kimia	95.976.460,00	1.378.552.510	-	-	-	-	-	-
3	Bahan Bakar dan Pelumas	1.833.237.100,00	38.727.484.688	-	-	-	-	-	-
4	Bahan Roku	-	907.242.000	-	-	-	-	-	-
5	Bahan Kimia Nuklir	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Barang Dalam Proses	-	129.900.000	-	-	-	-	-	-
7	Bahan/Bibit Tanaman	3.433.897.500,00	1.839.427.420	-	-	-	-	-	-
8	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	34.400.000	-	-	-	-	-	-
9	Isi Tabung Gas	-	27.820.000	-	-	-	-	-	-
10	Bahan/Bibit Ternak/Ikan/Ikan	-	597.366.200	-	-	-	-	-	-
11	Bahan Lainnya	5.991.708,00	9.770.409.360	27.983.945	28.571.546.014	-	-	430.713.810	-
	Buku Cadang	162.815.400,00	5.963.983.680,00	-	-	-	-	-	-
1	Suku Cadang Alat Angkutan	-	2.694.992.170	-	-	-	-	-	-
2	Suku Cadang Alat Berat	-	2.819.539.490	-	-	-	-	-	-
3	Suku Cadang Alat Kedokteran	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Suku Cadang Alat Laboratorium	-	49.560.700	-	-	-	-	-	-
5	Suku Cadang Alat Pemancar	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Suku Cadang Alat Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Suku Cadang Alat Bengkel	-	14.251.000	-	-	-	-	-	-
9	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Uraian Kode Baru	SALDO AWAL	PEMBELIAN LRA	Persediaan BLUD 2023 (sumber belanja barang dan jasa BLUD)	BM MENJADI PERSEDIAAN	BLUD DIGUNA	HIBAH	REKLAS	UTANG BELANJA PERSEDIAAN (TUNDA BAYAR 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b)	Suku Cadang Lainnya	152.015.400,00	284.730.528	-	-	-	-	-	-
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	**23.214.853.516,26**	**82.880.817.850,00**	**19.049.687,00**	-	**86.681.895,00**	-	-	-
1	Alat Tulis Kantor	788.868.375,00	5.982.029.908	-	-	7.278.300	-	-	-
2	Kertas dan Cover	72.349.234,00	6.338.772.216	-	-	-	-	-	-
3	Bahan Cetak	601.918.081,00	27.264.621.859	-	-	61.307.295	-	-	-
4	Benda Pos	15.710.000,00	1.311.480.000	270.000	-	-	-	-	-
5	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	177.810.000	-	-	-	-	-	-
6	Bahan Komputer	459.349.830,00	5.887.017.820	-	-	-	-	-	-
7	Perabot Kantor	178.795.071,00	3.463.528.600	16.779.687	-	-	-	-	-
8	Alat Listrik	2.074.770.113,00	13.450.905.972	-	-	-	-	-	-
9	Perlengkapan Dinas	-	3.154.899.150	-	-	-	-	-	-
10	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Perlengkapan Pendukung Olahraga	-	851.851.300	-	-	-	-	-	-
12	Suvenir/Cendera Mata	8.150.000,00	8.210.885.400	-	-	-	-	-	-
13	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	18.468.724.812,26	3.915.016.399	-	-	-	-	-	-
	Obat-obatan	**22.901.621.129,00**	**2.508.324.136,00**	**8.611.820.586,43**	-	-	**19.562.960.755,43**	-	-
1	Obat	11.623.979.243,00	2.237.750.880	7.648.758.271	-	-	16.053.268.758	-	-
2	Obat-obatan Lainnya	11.277.641.886,00	321.884.250	962.231.315	-	-	3.509.834.950	-	-
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	**83.406.822.771,00**	**118.245.628.187,00**	-	-	-		**36.254.831.926,00**	-
1	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	82.113.762.971,00	118.245.628.187	-	-	-	-	36.254.831.926	-
2	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	1.293.159.800,00	-	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga jaga/Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga jaga	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ternak dan Pakan	-	**90.893.101.593,00**	-	-	-	-	-	-
1	Belanja Ternak dan pakan pakan	-	264.053.000	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	23.086.075.534	-	-	-	-	-	-

No	Uraian Kode Baru	SALDO AWAL	PEMBELIAN LRA	Penerimaan BLUD 2023 (sumber belanja barang dan jasa BLUD)	BM MENJADI PERSEDIAAN	BLUD DISHUB	HIBAH	REKLAS	UTANG BELANJA PERSEDIAAN (TUNDA BAYAR 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	-	52.891.664.328	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Makanan dan Minuman Penumbuh Daya Tahan Tubuh	-	54.160.000	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Makanan dan Minuman Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	-	4.265.310.560	-	-	-	-	-	-
6	Belanja Makanan dan Minuman Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	-	744.526.053	-	-	-	-	-	-
7	Belanja Makanan dan Minuman Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	-	85.810.000	-	-	-	-	-	-
8	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	20.338.962.163	-	-	-	-	-	-
	Pakaian Dinas	-	4.373.881.740,00	-	-	-	-	-	-
1	Pakaian Sipil Harian (PSH)	-	265.230.000	-	-	-	-	-	-
2	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	357.321.800	-	-	-	-	-	-
4	Pakaian Dinas KDH dan WKDH	-	17.300.000	-	-	-	-	-	-
	Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	-	100.800.000				-	-	
5	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	-	1.077.270.160	-	-	-	-	-	-
6	Pakaian Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pakaian Sipil Harian (PSH)	-	202.950.000	-	-	-	-	-	-
8	Pakaian Dinas Upacara (PDU)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pakaian Penyelamatan	-	158.600.000	-	-	-	-	-	-
10	Pakaian Sloga	-	81.263.000	-	-	-	-	-	-
11	Pakaian Pelatihan Kerja	-	66.700.000	-	-	-	-	-	-
12	Pakaian KORPRI	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pakaian Adat Daerah	-	1.057.602.250	-	-	-	-	-	-
14	Pakaian Batik Tradisional	-	167.543.250	-	-	-	-	-	-
15	Pakaian Olahraga	-	553.949.000	-	-	-	-	-	-
16	Pakaian Paskibraka	-	160.622.300	-	-	-	-	-	-
17	Pakaian Jas/Safari	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Pakaian Teknis	-	76.230.000	-	-	-	-	-	-

No	Uraian Kode Barang	SALDO AWAL	PEMBELIAN LRA	Penadahan BLUD 2023 (sumber belanja barang dan jasa BLUD)	BM MENJADI PERSEDIAAN	BLUD DISHUB	HIBAH	REKLAS	UTANG BELANJA PERSEDIAAN (TUNDA BAYAR 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Barang Tak Habis Pakai	19.810.000,00	65.025.851,00	-	-	-	-	-	-
	Komponen	19.810.000,00	65.025.851,00	-	-	-	-	-	-
1	Komponen Jembatan Baja	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Komponen Jembatan Prafikan	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Komponen Penakiran	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Komponen Rambu Rambu	19.810.000,00	61.297.651	-	-	-	-	-	-
5	Attachment	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Komponen Lainnya	-	5.328.000	-	-	-	-	-	-
	Pipa	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Pipa Air Besi Tuang (DCI)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pipa Asbes Semen (ACP)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pipa Baja	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pipa Beton Prateken	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pipa Fiber Glass	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pipa Plastik PVC (UPVC)	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pipa Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		**135.593.483.795,13**	**414.979.938.887,00**	**8.657.953.218,43**	**28.371.546.914,34**	**93.685.986,00**	**19.562.903.789,43**	**38.685.945.736,00**	-

Lampiran 15

RINCIAN PEMAKAIAN PERSEDIAAN TA. 2023

No	Uraian Kode Baru	PEMAKAIAN						
		BEBAN LO	Persediaan BLUD 2022 (sumber belanja barang dan jasa BLUD)	PERSEDIAAN YG DIBERIKAN KE MASYARAKAT	UTANG BELANJA PERSEDIAAN (TUNDA BAYAR 2022)	HIBAH (BLUD)	BARANG JASA MENJADI ASET	REKLAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	**Persediaan**	**420.243.491.696,62**	**638.185.321,00**	**-**	**1.859.781.744,00**	**19.421.809.472,43**	**852.229.330,00**	**46.895.724.431,06**
	Barang Pakai Habis	**420.162.354.045,62**	**638.185.321,00**	**-**	**1.859.781.744,00**	**19.421.809.472,43**	**852.229.330,00**	**46.800.396.431,06**
	Bahan	**134.084.044.831,19**	**367.505.315,00**	**-**	**334.731.008,00**	**-**	**370.625.130,00**	**2.193.738.457,06**
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	57.352.458.501,85	-	-	189.482.000	-	334.758.660	2.193.738.457
2	Bahan Kimia	1.109.021.220,00	-	-	-	-	-	-
3	Bahan Bakar dan Pelumas	38.023.193.308,00	-	-	105.404.000	-	-	-
4	Bahan Baku	607.242.000,00	-	-	-	-	-	-
5	Bahan Kimia Nuklir	-	-	-	-	-	-	-
6	Barang Dalam Proses	117.775.000,00	-	-	12.025.000	-	-	-
7	Bahan/Bibit Tanaman	3.193.400.870,00	-	-	-	-	-	-
8	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	34.400.000,00	-	-	-	-	-	-
9	Isi Tabung Gas	-	-	-	27.820.000	-	-	-
10	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	597.366.200,00	-	-	-	-	-	-
11	Bahan Lainnya	33.049.190.731,34	367.505.315	-	-	-	35.869.470	-
	Suku Cadang	**5.974.641.380,00**	-	-	-	-	-	-
1	Suku Cadang Alat Angkutan	2.684.992.170,00	-	-	-	-	-	-
2	Suku Cadang Alat Besar	2.915.539.460,00	-	-	-	-	-	-
3	Suku Cadang Alat Kedokteran	-	-	-	-	-	-	-
4	Suku Cadang Alat Laboratorium	89.580.700,00	-	-	-	-	-	-

No	Uraian Kode Baru	PEMAKAIAN						
		BEBAN LO	Persediaan BLUD 2022 (sumber belanja barang dan jasa BLUD)	PERSEDIAAN YG DISERAHKAN KE MASYARAKAT	UTANG BELANJA PERSEDIAAN (TUNDA BAYAR 2022)	HIBAH (BLUD)	BARANG JASA MENJADI ASET	REKLAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Suku Cadang Alat Pemancar	-	-	-	-	-	-	-
6	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-
7	Suku Cadang Alat Pertanian	-	-	-	-	-	-	-
8	Suku Cadang Alat Bengkel	14.251.000,00	-	-	-	-	-	-
9	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-
10	Suku Cadang Lainnya	286.278.020,00	-	-	-	-	-	-
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	**79.005.808.811,00**	**270.080.006,00**	-	**883.838.044,00**	-	**481.601.200,00**	**65.281.450,00**
1	Alat Tulis Kantor	10.002.052.247,00	136.175.214	-	7.715.700	-	-	-
2	Kertas dan Cover	8.572.146.950,00	-	-	2.422.800	-	-	-
3	Bahan Cetak	26.822.752.524,00	83.490.376	-	442.777.144	-	-	-
4	Benda Pos	1.012.760.000,00	-	-	-	-	-	-
5	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	127.610.000,00	-	-	-	-	-	-
6	Bahan Komputer	6.087.133.437,00	-	-	-	-	-	65.281.450
7	Perabot Kantor	3.512.567.714,00	-	-	-	-	149.400.400	-
8	Alat Listrik	11.668.844.378,00	20.967.056	-	-	-	332.200.800	-
9	Perlengkapan Dinas	3.164.989.180,00	-	-	-	-	-	-
10	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	-	-	-	-	-	-	-
11	Perlengkapan Pemidang Olahraga	643.723.900,00	-	-	8.107.400	-	-	-
12	Suvenir/Cenderamata	6.144.475.400,00	-	-	64.385.300	-	-	-
13	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.246.763.081,00	30.047.360	-	158.400.000	-	-	-
	Obat obatan	**24.459.917.237,43**	-	-	**45.622.509,00**	**19.421.936.472,43**	-	-
1	Obat	16.522.723.460,43	-	-	-	8.642.460.197	-	-

No	Uraian Kode Baru	PEMAKAIAN						
		BEBAN LO	Persediaan BLUD 2022 (sumber belanja barang dan jasa BLUD)	PERSEDIAAN YG DISERAHKAN KE MASYARAKAT	UTANG BELANJA PERSEDIAAN (TUNDA BAYAR 2022)	HIBAH (BLUD)	BARANG JASA MENJADI ASET	REKLAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Obat obatan Lainnya	5.937.193.778,00	-	-	45.622.500	1.781.349.275	-	-
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	**91.918.026.653,00**	-	-	**89.540.000,00**	-	-	**44.341.376.524,00**
1	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	91.918.026.653,00	-	-	89.540.000	-	-	44.341.376.524
2	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga jaga Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga jaga	-	-	-	-	-	-	-
	Natura dan Pakan	**60.599.351.393,00**	-	-	**253.756.200,00**	-	-	-
1	Belanja Natura dan pakan pakan	284.983.000,00	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.951.015.334,00	-	-	137.060.200	-	-	-
3	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	32.991.604.323,00	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	54.160.000,00	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Makanan dan Minuman Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	4.210.660.500,00	-	-	54.320.300	-	-	-
6	Belanja Makanan dan Minuman Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	744.526.053,00	-	-	-	-	-	-
7	Belanja Makanan dan Minuman Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	85.810.000,00	-	-	-	-	-	-
8	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	29.276.592.183,00	-	-	62.370.300	-	-	-
	Pakaian Dinas	**4.120.551.740,00**	-	-	**252.330.000,00**	-	-	-
1	Pakaian Sipil Harian (PSH)	295.230.000,00	-	-	-	-	-	-
2	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	-	-	-	-	-	-	-
3	Pakaian Dinas Harian (PDH)	357.321.800,00	-	-	-	-	-	-
4	Pakaian Dinas KDH dan WKDH	-	-	-	17.300.000	-	-	-
	Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	100.000.000,00				-	-	

No	Uraian Kode Baru	PEMAKAIAN						
		BEBAN LO	Persediaan BLUD 2022 (sumber belanja barang dan jasa BLUD)	PERSEDIAAN YG DISERAHKAN KE MASYARAKAT	UTANG BELANJA PERSEDIAAN (TUNDA BAYAR 2022)	HIBAH (BLUD)	BARANG JASA MENJADI ASET	REKLAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.072.310.160,00	-	-	-	-	-	-
6	Pakaian Kerja	-	-	-	-	-	-	-
7	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	202.960.000,00	-	-	-	-	-	-
8	Pakaian Dinas Upacara (PDU)	-	-	-	-	-	-	-
9	Pakaian Penyelamatan	-	-	-	138.600.000	-	-	-
10	Pakaian Khas	91.263.000,00	-	-	-	-	-	-
11	Pakaian Pelatihan Kerja	95.700.000,00	-	-	-	-	-	-
12	Pakaian KORPRI	-	-	-	-	-	-	-
13	Pakaian Adat Daerah	1.067.602.280,00	-	-	-	-	-	-
14	Pakaian Batik Tradisional	157.543.200,00	-	-	-	-	-	-
15	Pakaian Olahraga	533.749.000,00	-	-	20.200.000	-	-	-
16	Pakaian Paskibraka	150.822.300,00	-	-	-	-	-	-
17	Pakaian Jas/Safari	-	-		-	-	-	-
18	Pakaian Teknik	-	-		76.230.000	-	-	-
	Barang Tak Habis Pakai	**91.097.651,00**	-	-	-	-	-	**5.328.000,00**
	Komponen	**91.097.651,00**	-	-	-	-	-	**5.328.000,00**
1	Komponen Jembatan Baja	-	-	-	-	-	-	-
2	Komponen Jembatan Pelatikan	-	-	-	-	-	-	-
3	Komponen Peralatan	-	-	-	-	-	-	-
4	Komponen Rambu Rambu	91.097.651,00	-	-	-	-	-	-
5	Attachment	-	-	-	-	-	-	-
6	Komponen Lainnya	-	-	-	-	-	-	5.328.000

No	Uraian Kode Baru	PEMAKAIAN						
		BEBAN LO	Persediaan BLUD 2022 (sumber belanja barang dan jasa BLUD)	PERSEDIAAN YG DISERAHKAN KE MASYARAKAT	UTANG BELANJA PERSEDIAAN (TUNDA BAYAR 2022)	HIBAH (BLUD)	BARANG JASA MENJADI ASET	REKLAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pipa	-	-	-	-		-	-
1	Pipa Air Besi Tuang (DCI)	-	-	-	-	-	-	-
2	Pipa Asbes Semen (ACP)	-	-	-	-	-	-	-
3	Pipa Baja	-	-	-	-	-	-	-
4	Pipa Beton Pratekan	-	-	-	-	-	-	-
5	Pipa Fiber Glass	-	-	-	-	-	-	-
6	Pipa Plastik PVC (UPVC)	-	-	-	-	-	-	-
7	Pipa Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		420.263.451.896,62	636.165.321,00	-	1.659.751.744,00	10.423.809.472,43	852.229.338,00	46.885.724.431,00

Lampiran IV

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Tahun 2013

No	Unit	Klasifikasi Barang	Register	Tanggal Perolehan	KDP	Nomor Dokumen - Tanggal Dokumen	Alamat	Nilai Perolehan (Rp)
1	Dinas Pemukiman Rakyat dan Kawasan Permukiman	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	84	31/12/2015	DED Mushola Pemantauan 5 SKPD Bukit Raya	No : -, Tanggal 01-11-2015	Mushalla Parkir Lama (Dinas Sosial Saat Ini)	370.700.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	31/12/2009	Pembangunan Pasar Ok Puan 1407315/2017.15 (REKONSILIASI DARI CIPTA KARYA KE PUPR)	No : -, Tanggal 31-12-2009	Jl. T. Tambusai Kota Pekanbaru	14.575.750.317,00
3	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2	31/12/2012	Asset KDP KIB A, Asset Rekon. (Dari Dinas Pasar Jangan 30 Juni 2017)	No : -, Tanggal	Jl. Kuhe Hor, Tirtayan Raya	66.333.801,00
4	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	3	31/12/2012	Pembuatan DED Pasar Agus Salim, Asset Rekon (KDP KIB C) Dari Cipta Karya tanggal 30 Juni 2017	No : -, Tanggal 31-12-2012	Jl. Agus Salim	266.800.000,00
5	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	4	31/12/2013	Pembuatan DED Pasar Indah, Asset Rekon (KDP KIB C) Dari Cipta Karya tanggal 30 Juni 2017	No : -, Tanggal 31-12-2013	Kota Pekanbaru	336.910.800,00
6	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	5	31/12/2013	Pembuatan Masterplan dan FS Kawasan Inclusi Tasiyan (KIT), Asset Rekon (KDP KIB C) Dari Cipta Karya tanggal 30 Juni2017	No : -, Tanggal 31-12-2013	Kota Pekanbaru	796.812.800,00
7	Sekretariat DPRD	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	16	31/12/2014	DED Jembatan IT Gedung Rantor	No : -, Tanggal	Jl. Jendral Sudirman No. 464	49.500.000,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	17	31/12/2014	Perencanaan peninggian jalan area perkantoran 5 SKPD (REKONSILIASI DARI CIPTA KARYA KE PUPR)	No : , Tanggal 31-12-2014	Kec. Bukit Raya	29.400.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	18	31/12/2014	Perencanaan Rehab Kantor Camat Tampan Lama (REKONSILIASI DARI CIPTA KARYA KE PUPR)	No : , Tanggal 31-12-2014	Kota Pekanbaru	49.500.000,00
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	19	31/12/2014	Pembuatan Bangunan Sedang (MKP) Kota Pekanbaru (REKONSILIASI DARI CIPTA KARYA KE PUPR)	No : , Tanggal 31-12-2014	Kota Pekanbaru	43.060.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	20	31/12/2014	Perencanaan RTH Lahan Ex. kantor Lurah Sukahalang (REKONSILIASI DARI CIPTA KARYA KE PUPR)	No : , Tanggal 31-12-2014	Kota Pekanbaru	50.082.200,00
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	21	31/12/2014	Perencanaan RTH Kawasan Bisnis Jl. Soekarno Hatta (REKONSILIASI DARI CIPTA KARYA KE PUPR)	No : , Tanggal 31-12-2014	Kota Pekanbaru	55.092.200,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	9	02/10/2014	PERENCANAAN PEMB. LEGGING ANAK SUNGAI SAIL II (SARI JEMBATAN JL. HANG JEBAT MENUJU SUNGAI SAIL INDUK)	No : , Tanggal 02-10-2014	ANAK SUNGAI SAIL II (SARI JEMBATAN JL. HANG JEBAT	66.972.100,00
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	7	14/07/2014	DED JEMBATAN MENUJU KAWASAN PERKANTORAN	No : , Tanggal 14-07-2014	JEMBATAN KAWASAN PERKANTORAN	188.984.000,00
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	10	02/10/2014	PEMBANGUNAN LOOKING ANAK SUNGAI AIR HITAM (LANJUTAN)	No : , Tanggal 02-10-2014	ANAK SUNGAI AIR HITAM	221.259.600,00
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	11	16/10/2014	DED PENATAAN KAWASAN SUNGAI LINAU DAN MEWEW DED SUNGAI SAGO	No : , Tanggal 16-10-2014	SUNGAI LINAU DAN SUNGAI SAGO	224.774.000,00
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	22	31/12/2014	Perencanaan Revitalisasi Taman Kota di jalan di Perwagen (REKONSILIASI DARI DKP KE PUPR)	No : -, Tanggal	jalan di Perwagen	281.150.000,00
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	23	31/12/2014	Perencanaan Kolam retensi (REKONSILIASI DARI CIPTA KARYA KE PUPR)	No : , Tanggal 31-12-2014	Kota Pekanbaru	180.916.000,00
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	24	31/12/2014	DED Rumah Jabatan DPRD (Rumah Dinas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD) (REKONSILIASI DARI CIPTA KARYA KE PUPR)	No : , Tanggal 31-12-2014	Kota Pekanbaru	287.600.000,00
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	25	31/12/2014	DED Jaringan Air Bersih Perkantoran Pemerintahan Kota Pekanbaru (REKONSILIASI DARI CIPTA KARYA KE PUPR)	No : , Tanggal 31-12-2014	Kota Pekanbaru	225.165.300,00
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	12	19/10/2014	DED WASLIK KAWASAN PERKANTORAN	No : , Tanggal 19-10-2014	KAWASAN PERKANTORAN	287.350.200,00
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	26	31/12/2014	DED Gedung DPRD Kota Pekanbaru (REKONSIL DARI CIPTA KARYA KE PUPR)	No : , Tanggal 31-12-2014	Kota Pekanbaru	400.869.200,00
23	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	27	31/12/2014	Perencanaan Penataan dan Peningkatan Pasir Taman Dikusi Jalan Pridatul (REKONSILIASI DARI DKP KE PUPR)	No : , Tanggal	Jl. Sudirman	480.645.000,00
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	13	24/10/2014	AMDAL JALAN LINGKAR LUAR KOTA PEKANBARU	No : , Tanggal 24-10-2014	JALAN LINGKAR LUAR KOTA PEKANBARU	499.800.000,00

No	Unit	Klasifikasi Barang	Register	Tanggal Perolehan	KDP	Nomor Dokumen - Tanggal Dokumen	Alamat	Nilai Perolehan (Rp)
35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	29	31/12/2014	AMDAL Kawasan Perkantoran Pemerintahan Kota Pekanbaru (REKONSILIASI DARI CIPTA KARYA KE PUPR)	No : , Tanggal 31-12-2014	Kota Pekanbaru	599.291.536,00
36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	29	31/12/2014	DED Rumah Dinas (Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan 4 Kabiro) (REKONSILIASI DARI CIPTA KARYA KE PUPR)	No : , Tanggal 31-12-2014	Kota Pekanbaru	894.723.599,00
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	30	31/12/2014	DED Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru (Gedung perkantoran dan masjid) (REKONSILIASI DARI CIPTA KARYA KE PUPR)	No : , Tanggal 31-12-2014	Kota Pekanbaru	1.437.980.772,00
38	Dinas Kependudukan dan Olahraga	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	14	10/11/2014	Gedung Futsal exito Sport Center	No : , Tanggal	Jln. Palembang Kec. Tenayan Raya	1.831.339.337,00
39	Dinas Kependudukan dan Olahraga	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	16	10/11/2014	Gedung Basket dan Volley Ball pada Sport Center	No : , Tanggal	Jln. Palembang Kec. Tenayan Raya	1.790.580.663,20
30	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	33	31/12/2014	gambar rehab puskesmas upt puskesmas mekar	No: 010/dpe/perawatan/rtb/xii/2014, Tanggal 28-09-2014	jl.sekar no 103	4.962.222,00
31	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	34	31/12/2014	GAMBAR REHAB PUSKESMAS	No: 012/YANSARKES/DKK/XII/2014, Tanggal 08-09-2014	JL.UTI KAMPUNG BARU KEC.SENAPELAN	4.283.000,00
32	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	35	31/12/2014		No: 012/YANSARKES/DKK/XII/2014, Tanggal 08-09-2014	JL. TAMTAMA NO 123 PEKANBARU	4.283.000,00
33	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	36	31/12/2014	REHAB UPTD PUSKESMAS BAG.	No: 010/SPK/YANSARKES/DKK/XII/2014, Tanggal 13-09-2014	JLHAMID JUSAT Dg.PUSKESMAS KEC.BAG.	4.962.222,00
34	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	38	31/12/2014	upt puskesmas pasung lama	No: , Tanggal 31-12-2014	jl. lapi no 21, kec. tampan	4.962.222,00
35	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	39	31/12/2014	Gambar rehab puskesmas UPTD	No: , Tanggal	JL. Garuda Kel. Delima Kec. Tampan	4.962.222,00
36	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	40	31/12/2014	DED Lampu Penerangan Puskesmas	No: , Tanggal 08-09-2014	JL. garuda	5.266.333,00
37	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	48	31/12/2014	Gambar Rehab Puskesmas UPTD 5 buah UPTD Puskesmas Rumbai Pesisir UPTD Puskesmas Rumbai Pesisir UPTD Puskesmas Rumbai Pesisir	No. 010/SPK/YANSARKES/DKK/XII/2014, Tanggal 31-12-2014	JL.Sekolah No.32 Kel.Limbungan Kec.Rumbai	4.962.222,00
38	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	49	31/12/2014	DED Lampu Penerangan Puskesmas	No: 007/SKP/YANSARKES/DKK/XII/2014, Tanggal 03-12-2014	JLSekolah No.32 KELimbungan Kec.Rumbai	49.666.000,00
39	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	50	31/12/2014	gambar rehab puskesmas sering	No: , Tanggal	jl.angsa kompi perum mdak sari	5.000.000,00
40	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	51	31/12/2014	konsultasi perencanaan gambar rehab puskesmas pembantu	No: , Tanggal	jl.melalang	44.666.000,00
41	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	52	31/12/2014	Gambar rehab Puskesmas tanggah	No: 012/yansarkes/DKK/2014, Tanggal 31-12-2014	jl. Langsat No. 1 Sukajadi	4.005.000,00
42	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	58	31/12/2014	Pusu Muraglim	No: , Tanggal	Jl. Muraglim	14.859.000,00
43	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	59	31/12/2014	- DED Pembangunan Puskesmas Baru	No: 010/KOD-SPK/DED_PKMBAR/YANSARP, Tanggal 31-12-2014	Jl. Taman karya ke, Tuah karya kec. Tampan	68.386.666,00
44	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	63	31/12/2014	DED Pembuatan Pagar Pusu Baringin	No: 009/SPK/YANSARKES/DKK/XII/2014, Tanggal 31-12-2014	Jl. Baringin	14.859.000,00
45	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	64	31/12/2014	- DED Labor Pemantau Kualitas Air Labor PKK	No: 008/SPK/DED LAB-YANSARPKM/DKK, Tanggal 31-12-2014	Jl. Perdu Simpang Tiga	100.229.000,00
46	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	66	10/07/2015	Penyelesaian DED Taman Segitiga Jalan Arifin Ahmad (depan MTQ) (REKONSILIASI DARI CIP KE PUPR)	No : , Tanggal	Jalan Arifin Ahmad (Depan MTQ)	28.755.000,00
47	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	67	30/12/2015	Penyelesaian DED Master Plan Taman CSR RI Lokasi (REKONSILIASI DARI DKP KE PUPR)	No : , Tanggal	Pekanbaru	47.638.000,00
48	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	86	31/12/2015	KDP	No : , Tanggal 31-12-2015	DED SIMPANG PASAR PAGI ARENGKA	48.875.000,00
49	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	88	31/12/2015	KDP	No : , Tanggal 31-12-2015	DED SIMPANG JALAN PANGLIMA SAN JL. YOS SUDARSO	48.467.000,00
50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	74	27/08/2015	Perencanaan Penataan Kawasan Kantor Camat Tampan (1) (REKONSILIASI DARI DINAS CIPTA KARYA KE PUPR)	No: 05/KONS-PUPP-PPDK/IX/2015, Tanggal	Perencanaan Penataan Kawasan Kantor Camat Tampan I	49.499.000,00
51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	71	30/07/2015	Revisi RBPAM Kota Pekanbaru (1) (REKONSILIASI DARI CIPTA KARYA KE PUPR)	No: 01/ADKS-P/ASMPP-PPDK/VII/2015, Tanggal 30-07-2015	Revisi RBPAM Kota Pekanbaru (1)	49.841.000,00
52	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	72	27/08/2015	Perencanaan Gedung Koperasi/Pertin Kantor Kemenag Kota Pekanbaru (1) (REKONSILIASI DARI CIPTA KARYA KE PUPR)	No: 01/ADKS-PUPP-PPDK/IX/2015, Tanggal 01-09-2015	Perencanaan Gedung Koperasi/Pertin Kantor Kemenag	49.665.000,00
53	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	76	27/08/2015	Perencanaan Ruang Arsip Dinas (1) (REKONSILIASI DARI CIPTA KARYA KE PUPR)	No: 03/ADKS-PUPP-PPDK/IX/2015, Tanggal 01-09-2015	Perencanaan Ruang Arsip Dinas (1)	49.973.000,00
54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	90	31/12/2015	KDP	No : , Tanggal 31-12-2015	DED JEMBATAN	49.805.270,00

No	Unit	Klasifikasi Barang	Register	Tanggal Perolehan	KDP	Nomor Dokumen - Tanggal Dokumen	Alamat	Nilai Perolehan (Rp)
56	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	51	31/12/2015	KDP	No : , Tanggal 31-12-2015	DED PEMBANGUNAN JALAN WILAYAH TIMUR	149.760.000,00
57	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	52	31/12/2015	KDP	No : , Tanggal 31-12-2015	DED PEMBANGUNAN JALAN WILAYAH BARAT	149.760.000,00
58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	53	31/12/2015	KDP	No : , Tanggal 31-12-2015	PERENCANAAN PEMBANGUNAN TI PUPTA (JEMBATAN)	174.240.000,00
59	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	70	30/07/2015	DED Perpipaan Air Bersih di Kecamatan Tanjan (1) (REKOMBILIASI DARI CIPTA KARYA KE PUPR)	No : 604/TIS/APBD/PJAB-AM/PEREN-PKSW, Tanggal 30-07-2015	DED Perpipaan Air Bersih di Kecamatan Tanjan (1)	149.760.000,00
60	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	73	30/07/2015	DED Perpipaan Air Bersih di Kecamatan Rumbai (1) (REKOMBILIASI DARI CIPTA KARYA KE PUPR)	No : 604/TIS/APBD/PJAB-AM/PEREN-PKSW, Tanggal 30-07-2015	DED Perpipaan Air Bersih di Kecamatan Rumbai (1)	199.368.000,00
61	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	77	07/08/2015	Konsesan Perkantoran (REKONSILIASI DARI CIPTA KARYA KE PUPR)	No : 134/TIS/APBD/PENGAWAS-PKSW/2015, Tanggal 07-08-2015	DED Konsesi Perkantoran Kota Pekanbaru	340.005.000,00
62	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	79	07/08/2015	DED SPAL (1) (REKONSILIASI DARI CIPTA KARYA KE PUPR)	No : 604/TIS/APBD/PPPERSEN-PKSW/2015 , Tanggal 07-08-2015	DED SPAL (1)	402.305.000,00
63	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	94	31/12/2015	KDP	No : , Tanggal 31-12-2015	AMDAL WADUK KAHAIDAR PERMATA RAW	947.267.000,00
64	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	95	31/12/2015	KDP	No : , Tanggal 31-12-2015	SURVEY PENDATAAN AWAL KONSOLIDASI TANAH	947.736.000,00
65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	96	31/12/2015	KDP	No : , Tanggal 31-12-2015	DED PEMBANGUNAN JALAN TAHAP II	670.219.000,00
66	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	97	31/12/2015	KDP Koreksi BPK 3737429534(masuk 2015 (5634629816) angka sebelum disilah 1434637100 koreksi 7177716AB thn 2017	No : 620/KONTRAK/BM-WWB/2016, Tanggal 31-12-2015	PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR LUAR PAKET A , JL.SADAK	13.886.839.842,00
67	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	98	31/12/2015	KDP (Koreksi BPK 3574498884(masuk 2015 (6521886971) angka sebelum disilah 23658809160 koreksi 1027766882J)	No : , Tanggal 31-12-2015	PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR LUAR PAKET B , JL.SADAK-	20.984.760.886,00
68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	130	31/12/2015	KDP (3417533116) angka sebelum disilah 3041891008 koreksi 2035BA464	No : , Tanggal 31-12-2015	PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR LUAR PAKET C , JEMBATAN	17.360.330.840,00
69	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	131	31/12/2015	KDP (Koreksi BPK 19194005881 masuk 2015 (4453492232) angka sebelumnya 9619447533 (koreksi 8551523111 saldo pembukaan lahir baya 2016)	No : , Tanggal 31-12-2015	PEMBANGUNAN JALAN DAN PERTAMAN JAYAN KAWASAN PERK	99.825.821.280,00
70	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	92	19/10/2015	Jasa Konsultasi Tanah Pasar Bac. Tenayan Raya. Asset Rekon, (Dari Dinas Pasar , tanggal 30 Juni 2017)	No : -, Tanggal	Jl. Kubu	49.597.500,00
71	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	93	19/10/2015	Jasa Konsultasi Tanah Pasar Bac. Payung Sekaki, Asset Rekon, (Dari Dinas Pasar , tanggal 30 Juni 2017)	No : -, Tanggal	Jl.Air Hitam	49.597.500,00
72	Badan Perencanaan Daerah	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	95	19/11/2015	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Renovasi Gedung (Eksperis)	No : 027/SPK/BPKAD/DPD/XI/2015, Tanggal 19-11-2015	Jalan Teratai 91	49.400.000,00
73	Badan Pendapatan Daerah	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	96	19/11/2015	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan DED Gedung Kantor UPTB (Prototipe)	No : 27/SPK/DPPK-KLD/PD2.03/11/2015, Tanggal 11-11-2015	Jalan Teratai No 91	49.650.000,00
74	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	97	21/09/2015		No : , Tanggal 21-09-2015		9.974.500,00
75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	137	15/11/2015	Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (4977.50/K) pindah ke BR (REKONSIL PU/HKM /CK KE PUPR). Catatan apabila pekerjaan Pembangunan Jaringan Tapping Pipa PDAM Lokasi 8(Kec. Rumbai)	No : 04/BERS-PJAB/PPAPP/2015, Tanggal 16-11-2015	Perencanaan Penyediaan Air Bersih Dana Alokasi Khu	32.200.700,00
76	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	138	21/10/2015	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembuatan Reservoir	No : , Tanggal	Kantor Camat Pekanbaru Kota	3.993.150,00
77	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	139	21/10/2015	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembuatan Reservoir	No : , Tanggal	Kantor camat Lukajadi	3.993.150,00
78	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	140	21/10/2015	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembuatan Reservoir	No : , Tanggal	Kantor Kelurahan Sail	3.993.150,00
79	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	143	21/09/2015	DED Revitalisasi Pasar Rumbai (KDP Kb C), Aset Rekon Dari Dinas Pasar tanggal 30 Juni 2017	No : -, Tanggal	Jl. Kharyangan Kumbai Pesisir	41.125.000,00
80	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	146	09/10/2015	FSSD Pasar Pekaya (KDP Kb D), Aset Rekon Dari Dinas Pasar tanggal 30 Juni 2017	No : -, Tanggal	Jl. Duclan , Kec. Payung Sekaki	52.800.000,00
81	Dinas Pertanian dan Perikanan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	147	14/09/2015	DED (Jasa konsultasi perencanaan teknis/rinci UPTD RPH)	No : , Tanggal	Jl. Cipta Karya (RPH)	35.173.500,00
82	Dinas Pertanian dan Perikanan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	123	16/11/2015	Jasa Konsultasi Perencanaan/DED Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Drainase RPH Kumnasaka	No : , Tanggal	Jl. Cipta Karya (RPH	45.675.300,00

No	Unit	Klasifikasi Barang	Register	Tanggal Perolehan	KDP	Nomor Dokumen - Tanggal Dokumen	Alamat	Nilai Perolehan (Rp)
82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	132	15/12/2017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan - 0603/SPK/DPA.1.03.1.03.01.15.14.5.2/2017 Keg. Pembangunan Jalan Rec. Bukit Raya - Bidang SM.	No: 14.02/SPK/APBD/KONS-PRO/DPUPR- Tanggal	Kec. Bukit Raya	49.247.000,00
83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	126	14/12/2017	Review Desain Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Luar Paket A Jalan Ekstek - Lintas Timur - 0606/SPK/DPA.1.03.1.03.01.15.16.5.2/2017 Keg. Pembangunan Jalan Rec. Tenayan Raya	No : 23.02/SPK/APBD/KONS-PRO/DPUPR/ Tanggal 25-10-2017	Jl. Ekstek - Lintas Timur Kec. Tenayan Raya	49.275.000,00
84	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	127	14/12/2017	Review Desain Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Luar Paket A Jalan Teluk Lembu Umo - Kawasan IDT (Lingkar Luar) - 0606/SPK/DPA.1.03.1.03.01.15.16.5.2/2017 Keg. Pembangunan Jalan Rec. Tenayan Ray	No : 24.02/SPK/APBD/KONS-PRO/DPUPR/ Tanggal 26-10-2017		49.275.000,00
85	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	130	15/12/2017	Review Desain Perencanaan Jalan Lingkar Paket D Jembatan Sail V - Kawa Tol Pekanbaru - Dumai - 0607/SPK/DPA.1.03.1.03.01.15.12.5.2/2017 Keg. Pembangunan Jalan Rec. Rumbai Bd SM	No: 22.02/SPK/APBD/KONS-PRO/DPUPR/ Tanggal 25-10-2017	Tol Pekanbaru - Dumai	48.362.000,00
86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	129	14/12/2017	Review Desain Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Luar Paket B Jalan Lintas Timur - Batas Kampar Bd SM	No: 21.02/SPK/APBD/KONS-PRO/DPUPR/ Tanggal 25-10-2017	Lingkar Luar Paket B Jalan Lintas Timur - Batas Ka	49.362.000,00
87	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	134	18/12/2017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 0603/SPK/DPA.1.03.1.03.01.15.03.5.2/2017 Keg. Pembangunan Jembatan	No: 05.02/SPK/APBD/KONS-PRO/DPUPR/ - Tanggal 20-10-2017		49.430.000,00
88	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	135	19/12/2017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan - 0606/SPK/DPA.1.03.1.03.01.15.12.5.2/2017 Keg. Pembangunan Jalan Kecamatan Tell. Lima Puluh, Pekanbaru Kota. Senapelan dan Sukajadi - Bidang SM	No: 11.02/SPK/APBD/KONS-PRO/DPUPR/ - Tanggal 23-10-2017	Kecamatan Tell. Lima Puluh, Pekanbaru Kota. Senap	49.911.000,00
89	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	137	19/12/2017	Perencanaan Pembangunan Kegiatan Infrastruktur di APBD Perubahan - Bidang CK	No: 06.04/SPK/APBDP/PRON-PLP/DPR-C Tanggal 01-11-2017		51.699.000,00
90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	142	21/12/2017	Perencanaan Air Bersih DAK Tahun 2018 Kec. Rumbai dan Rumbai Pesisir Keg. Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	No : 02.04/SPK/APBDP/PRON-PLP/DPR-C Tanggal 01-11-2017	Kec. Rumbai dan Rumbai Pesisir	52.482.000,00
91	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	138	19/12/2017	Perencanaan Air Bersih DAK Tahun 2018 Kec. Payung Sekaki - Bidang CK	No : 03.04/SPK/APBDP/PRN-C-PLP/DPR-C Tanggal 01-11-2017	Kec. Payung Sekaki	52.867.675,00
92	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	115	25/04/2017	Pemasukan Lahan Pemerintah Daerah - Bidang CK	No: , Tanggal	Pantaibaron Tenayan Raya	121.271.000,00
93	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	140	29/12/2017	Pembangunan jaringan perpipaan PDAM Ikhad II (Kecamatan Lima puluh / Keg. Pembangunan Air Bersih/ Air Minum Wilayah III (Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru Kota, Bati, Lima Puluh, Senapelan Dan Suk	No : 06.A/SPK-STRUCK-PURW/II/2017, Tanggal 19-07-2017	Pembangunan jaringan perpipaan PDAM Ikhad 2 (kec.	882.273.774,00
94	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	141	29/12/2017	Pembangunan Jaringan Tapping Pipa PDAM Lokasi II (Kec. Rumbai) Keg. Pembangunan Air Bersih/ Air Minum Wilayah I (Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir, Payung Sekaki dan Tampan) Tahun 2017 - KDP yang i	No : 04.A/SPK-STRUCK-PURW/II/2017, Tanggal 03-07-2017	Pembangunan Jaringan Tapping Pipa PDAM Lokasi II	711.062.717,00
95	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	124	20/11/2017	DED PASAR AGUS SALIM, APBD 2017	No: -, Tanggal 20-11-2017	Jl. Agus Salim, Kota Pekanbaru	49.490.909,00
96	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	125	20/11/2017	DED PASAR TANJUNG JATI, KECAMATAN LIMA PULUH	No: -, Tanggal 20-11-2017	Jl. Tanjung Jati, Kec Lima Puluh Kota Pekanbaru	49.091.909,00
97	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	116	10/05/2017	REVIEW DED PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL TENGKU KASIM KEC. KUMUN - APBD 2017	No: -, Tanggal 09-05-2017	Kecamatan Rumbai (Pasar Tengku Kasim)	49.874.000,00
98	Kecamatan Rumbai Barat	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	128	14/12/2017	DED (Kantor Lurah Rantau Panjang)	No: , Tanggal 14-12-2017		49.226.000,00
99	Kecamatan Rumbai Barat	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	139	14/12/2017	DED (Kantor Lurah Meranti)	No: , Tanggal 14-12-2017		49.816.280,00
100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	119	30/08/2017	DED Perataan Kawasan TPU (konsultasi Perencanaan)	No: 03/KTK/APBD/PDPPSU-DPRW/VIII/17, Tanggal 23-08-2017		149.980.000,00

No	Unit	Klasifikasi Barang	Register	Tanggal Perolehan	KDP	Nomor Dokumen - Tanggal Dokumen	Alamat	Nilai Perolehan (Rp)
101	Sekretariat DPRD	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	151	08/11/2018	RINCIAN BIDDA, PERENCANAAN PEMBUATAN MUSHOLLA KANTOR DPRD	No: , Tanggal 08-11-2018	Jl. JENDD SUDIRMAN NO 464	952.274.921,00
102	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	181	28/12/2018	DED Kantor Kodim 0301 Pekanbaru (Perencanaan pembangunan kantor kodim 0301/pekanbaru) Keg. Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur	No : 02.04/SPKA/PED/PRINC-PLPUPR-C, Tanggal 23-05-2018	Kantor Kodim 0301/Pekanbaru	60.008.978,00
103	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	147	18/10/2018	Perencanaan air bersih / air minum wilayah I (Perencanaan) Keg. Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	No : 18.04/SPKA/PED/PRINC-PLPUPR-CK, Tanggal 21-05-2018	Jl. Candana, Jl. Nazar Jl. Musjahwarah, Jl. Pojan	38.443.084,00
104	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	148	18/10/2018	Perencanaan air bersih / air minum wilayah II (Perencanaan) Keg. Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	No : 20.04/SPKA/PED/PRINC-PLPUPR-CK, Tanggal 21-05-2018	Jl. Nanasindam, Gg. Hamrad, Jl. Rapat Bakti Bak.	36.274.242,00
105	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	149	09/10/2018	Perencanaan air bersih / air minum wilayah III (Perencanaan) Keg. Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	No : 21.04/SPKA/PED/PRINC-PLPUPR-CK, Tanggal 21-05-2018	Jl. Pembina 4 dan Jl. Lingkar Dalam Blok Kab. Lir	39.431.134,00
106	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	152	29/11/2018	DED Penataan Landscape fasilitas perkantoran Tenayan Raya (Perencanaan) Keg. Pengembangan Taman Rekreasi	No: 01/KONTRAK/APBD/KONSULTAN/PUPR, Tanggal 03-04-2018	Jl. Yo Kal. Bali Kec. Tenayan Raya Bata Pekanbaru	989.844.808,00
107	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	150	14/10/2018	DED Taman Kantor Walikota Jl. Sudirman (Perencanaan) Keg. Pengembangan Taman Rekreasi	No: 15/SPK/ARSD-PAKONSLT-PLPUPR-, Tanggal 31-10-2018	Kota Pekanbaru	71.540.733,00
108	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	167	20/12/2018	PERENCANAAN JALAN JINGKAS DAN SIMPANG JL. JINGKA/KAHARUDDIN NASUTION	No. 04.02/SPKA/PED/PKONS-PLPUPR-S, Tanggal 02-11-2018	Jl. Datuk Setia Maharaja No. 2	73.955.705,00
109	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	168	20/12/2018	PERENCANAAN SIMPANG JL. SISAK – HANGTUAH	No. 03.02/SPKA/PED/PKONS-PLPUPR-S, Tanggal 02-11-2018	Jl. Datuk Setia Maharaja No. 2	48.445.517,00
110	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	169	20/12/2018	PERENCANAAN DRAINASE JL. AHMAD YANI	No. 00.02/SPKA/PED/PKONS-PLPUPR-S, Tanggal 02-11-2018	Jl. Datuk Setia Maharaja No. 2	48.445.517,00
111	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	170	20/12/2018	PERENCANAAN DRAINASE JL. DR.SUWA Keg. Perencanaan Pembangunan Jalan	No. 05.02/SPKA/PED/PKONS-PLPUPR-S, Tanggal 02-11-2018	Jl. Datuk Setia Maharaja No. 2	48.445.517,00
112	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	177	21/12/2018	Perencanaan Pembangunan Jalan Kec. Rumbai Pesisir	No : 12.02/SPKA/PED/KONS-PLPUPR-BK, Tanggal 09-11-2018	Jl. Datuk Setia Maharaja No. 2	48.360.384,00
113	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	171	20/12/2018	PERENCANAAN DRAINASE JL. SRIKANDI	No. 06.02/SPKA/PED/PKONS-PLPUPR-S, Tanggal 02-11-2018	Jl. Datuk Setia Maharaja No. 2	48.445.518,00
114	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	172	20/12/2018	PERENCANAAN SIMPANG JL. HANG TUAH-SIAK	No : 07.02/SPKA/PED/PKONS-PLPUPR-S, Tanggal 02-11-2018	Jl. Datuk Setia Maharaja No. 2	48.362.316,00
115	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	180	21/12/2018	Perencanaan Pembangunan Jalan Kec. Bencoyan Dumai	No : 13.02/SPKA/PEDADKONS-PLPUPR-BK, Tanggal 09-11-2018	Jl. Datuk Setia Maharaja No. 2	48.240.024,00
116	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	144	27/07/2018	LANJUTAN JL. OUTERING ROAD UTARA JEMBATAN SIAK V – MOSQUE TOL PEKANBARU – DUMAI (MULTIYEARS)	No: 601/KONT-MYSM-DPUPR/VII/2018, Tanggal 26-07-2018	Jl. Datuk Setia Maharaja No. 2	10.700.948.016,00
117	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	173	20/12/2018	PERENCANAAN SIMPANG JL. ADISUCIPTO -RAMBUTAN-IMPRES, DAN SIMPANG JL. SAKTI-ARIFIN AHMAD	No : 01.02/SPKA/PED/PKONS-PLPUPR-S, Tanggal 02-11-2018	Jl. Datuk Setia Maharaja No. 2	73.668.795,00
118	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	184	21/12/2018	Perencanaan Pembangunan Jembatan	No : 10.02/SPKA/PED/PKONS-PLPUPR-S, Tanggal 02-11-2018	Jl. Datuk Setia Maharaja No. 2	87.608.340,00
119	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	159	05/12/2018	Belanja Jasa Konsultansi DED TPA Muara Fajar 1	No : 1486/KAST-TP-KTM/05/PSJP-DLH, Tanggal 04-12-2018	Jl. IKAN KAYA RT. 04 KAMPUNG PAJAR KEC. RUMBAI	70.486.000,00
120	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	154	30/11/2018	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gedung/Bangunan Penunjang Pasum (DED Pasar Ingrim Kecamatan Pekanbaru Kota) Asal KDP	Nq : 473.a/DPP-3.2/SPK-JKK/PBDR/K3, Tanggal 30-11-2018	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gedung/Bangunan	49.662.000,00
121	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	155	30/11/2018	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gedung/Bangunan Penunjang Pasum (DED Pasar Simpang Baru Kecamatan Tampan) Asal KDP	No : 472.a/DPP-3.2/SPK-JKK/PBDR/K3, Tanggal 30-11-2018	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gedung/Bangunan	49.662.000,00
122	Dinas Pertanahan	Tanah Dalam Pengerjaan	1	04/04/2018	Biaya Kegiatan Konsolidasi tanah Perkotaan Tipe I	No. 380/Bidum-HKPT/2018/06.1, Tanggal 19-02-2018	Kelurahan Sialang, Sebi Kecamatan Tampan Kota Kota	8.902.765.840,00
123	Dinas Pertanahan	Tanah Dalam Pengerjaan	2	18/04/2018	Biaya-Biaya Konsolidasi Tanah Perkotaan Tipe IV	No : 01/BA-KHIT-TTGR/2018, Tanggal 06-04-2018	Kecamatan Rumbai Kel. Muara Fajar Timur	2.215.555.130,00

No	Unit	Klasifikasi Barang	Register	Tanggal Perolehan	KDP	Nomor Dokumen - Tanggal Dokumen	Alamat	Nilai Perolehan (Rp)
134	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	27	19/12/2019	Perencanaan Pembangunan Jalan Kec. Tenayan Raya	No. 08.02/BAST/PERENC-PUPUPR-BM/2019, Tanggal 19-12-2019	Kec. Tenayan Raya	91.684.514,00
135	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	12	03/12/2019	Perencanaan Pembangunan Jalan Kec. Rumbai	No. 19.02/BAST/PERENC-PUPUPR-BM/2019, Tanggal 03-12-2019	Kec. Rumbai	74.326.384,00
136	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	13	03/12/2019	Perencanaan Pembangunan Jalan Kec. Rumbai Pesisir	No. 11.02/BAST/PERENC-PUPUPR-BM/2019, Tanggal 03-12-2019	Kec. Rumbai Pesisir	74.254.070,00
137	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	14	03/12/2019	Perencanaan Pembangunan Jalan Kec. Sukil Riau	No. 12.02/BAST/PERENC-PUPUPR-BM/2019, Tanggal 03-12-2019	Kec. Bukit Raya	74.104.925,00
138	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	15	03/12/2019	Perencanaan Pembangunan Jalan Kec. Tampan	No. 13/BAST/PERENC-PUPUPR-BM/2019, Tanggal 03-12-2019	Kec. Tampan	74.308.044,00
139	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	16	03/12/2019	Perencanaan Pembangunan Jalan Kec. Payung Sekaki	No. 14.02/BAST/PERENC-PUPUPR-BM/2019, Tanggal 03-12-2019	Kec. Payung Sekaki	73.728.012,00
140	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	17	03/12/2019	Perencanaan Pembangunan Jalan Kec. Marpoyan Damai	No. 15.02/BAST/PERENC-PUPUPR-BM/2019, Tanggal 03-12-2019	Kec. Marpoyan Damai	73.726.012,00
141	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	26	27/12/2019	Perencanaan Pembangunan Jalan SAR	No. 063.02/BAST-PERENC/PUPUPR-BM/XII/2019, Tanggal 27-12-2019	Kota Pekanbaru	140.480.665,00
142	Dinas Perdagangan dan Perbekalan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	264	03/05/2019	Perencanaan	No. 15.A/PBG/PPK/DISTRANSMAR/2019, Tanggal 08-04-2019	Jl. Ibrahim Sultan	9.984.020,00
143	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	24	12/12/2019	Perencanaan Pembangunan Jembatan	No. 062.02/BAST-PERENC/PUPUPR-BM/2019, Tanggal 13-12-2019	Kota Pekanbaru	262.845.000,00
144	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	4	20/08/2019	Pekerjaan Lanjutan Jl. Outering Road Utara Arteri Jalan Bak V - Jalan Tol Pekanbaru - Bunsai (Multiyears)	No. 051.02/TB/BM/PDP/PUPR-BM/2019, Tanggal 20-08-2019	Jl. Outering Road Utara	27.419.845.239,00
145	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	7	21/10/2019	LANJUTAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR LUAR TRASE II JALAN BAGAN - UNTAS TSUNTI (MULTIYEARS)	No. 052.02/TB/BM/PDP/PUPR-BM/2019, Tanggal 31-10-2019	Jalan Lingkar Luar Trase I	14.223.195.174,00
146	Sekretariat DPRD	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	266	27/05/2019	Perencanaan Peralatan Basement Parkir	No. , Tanggal	Jalan Sudirman No. 464	34.800.000,00
147	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	210	10/12/2019	Pembangunan Angsuran I (Pertama) Pekanbaru Marine Command Center Tenayan Raya	No. 09.04/PMMC/PUPR-CK/2019, Tanggal 10-12-2019	Jl. Tuljuh Pulub	1.122.462.470,00
148	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	266	29/11/2019	pembuatan DED lahan sagitpa	No. 129.5/BAS19/PUPR/XII/2019, Tanggal 05-11-2019	Jl. Sudirman	69.570.119,00
149	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	211	13/12/2019	DED Jaringan Distribusi SPAM Kota Pekanbaru	No. 01.04/BAST/PADAMDP/UPR-CK/2019, Tanggal 12-12-2019	Kota Pekanbaru	1.013.192.631,00
150	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	3	29/07/2019	Review Penetapan Awal Konsolidasi Tanah Trase V Kec. Rumbai	No. 01.02/BAST/PERENC-PUPUPR-BM/VII/2019, Tanggal 29-07-2019	Trase V Kec. Rumbai	98.960.183,00
151	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	6	17/09/2019	Review Penetapan Awal Konsolidasi Tanah Jl. Dalan Satu Maharaja - Sport Center	No. 02.02/BAST/PERENC-PUPUPR-BM/IX/2019, Tanggal 11-09-2019	Jl. Dalan Satu Maharaja - Sport Center	99.395.851,00
152	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	10	30/11/2019	Konsultasi Pengelolaan Lingkungan Pembangunan Drainase Kampung Bandar	No. 08/KTA-APBD/KONS-PPK/1907-DPRKPVMB/2019, Tanggal 02-02-2019	Konsultasi Pengelolaan Lingkungan Pembangunan Drainase kampung Bandar	49.997.000,00
153	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	1	26/03/2019	DED Drainase Pendestrian Jl. Perdagangan dan Jl. Kota Baru (Kawasan Kumuh Kota Lama)	No. 01/KTA-APBD/KONS-PPK/PKMP-DPRKP/II/2019, Tanggal 02-02-2019	DED Drainase Pendestrian Jl. Perdagangan dan Jl. Kota Baru (Kawasan Kumuh Kota Lama)	97.990.000,00
154	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	27	18/12/2019	Perencanaan Kawasan Permukiman Cendering Kumuh	No. 07/KTA-APBD/KONS-PPK/PKMP-DPRKP/X/2019, Tanggal 01-11-2019	Dinas PRKim	99.111.000,00
155	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	2	27/05/2019	Perencanaan lansat area Cluster A, Jl. Perdagangan (Water Front City Zone 1 Area Landscape 1.)	No. 0, Tanggal 02-12-2019	Dinas PRKim	97.760.800,00
156	Dinas Perkimahar	Tanah Dalam Pengerjaan	10	02/12/2019	Konsolidasi Tanah 2019 TRASE V	No. No. 02/Kerjasama-BIDAZR-DPKP/XII/2019 Tanggal 1 November 2019, Tanggal 01-09-2019	Trase V Kecamatan Rumbai	999.320.159,00
157	Dinas Perkimahar	Tanah Dalam Pengerjaan	8	26/08/2019	Pembayaran Penyerahan Bidang Kelapran dan Ahuanan kegiatan Konsolidasi Tanah untuk Pengadaan Tanah Jalan dan Jembatan (Sosialisasi Konsolidasi Tanah (KT) Trase III di Kelurahan Industri Tenayan Raya dan Kelurahan Bambu Kuning Kecamatan Tenayan Raya pada tanggal 24 September 2019) Kegiatan Konsolidasi Tanah Perkotaan Tahun Anggaran 2019	No. 4/KK1/DISTAN-KEC.1/BAST/PPK/XI/2019, Tanggal 25-09-2019	Kelurahan Industri Tenayan Raya dan Kelurahan Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya	19.092.862,00
158	Dinas Perkimahar	Tanah Dalam Pengerjaan	9	11/03/2019	Pembayaran Penyedian makanan Ahuanan dan Snack Rapat Sosialisasi Konsolidasi Tanah	No. 12/KK1/DISTAN-KEC.2/BAST/PPK/IX/2019, Tanggal 11-09-2019	Jalan Balilak Kec. Tenayan Raya	952.584.606,50

No	Unit	Klasifikasi Barang	Register	Tanggal Perolehan	KDP	Nomor Dokumen - Tanggal Dokumen	Alamat	Nilai Perolehan (Rp)
148	Dinas Perkimahar	Tanah Dalam Pengerjaan	3	11/02/2019	Dalaya Moral Pengadaan Tanah Seluas Umum Sudah	No : 4/BAST/HVPT/PTSBTAH-KEI/I/2019, Tanggal 11-02-2019	Masjid Al-Rahman	2.849.880,00
149	Dinas Perkimahar	Tanah Dalam Pengerjaan	7	28/03/2019	Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Biaya Sertifikasi Kantor Lurah Penetaran pada Kec. Pengelamanan Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru TA. 2019	No : 03/BAST/HPP/PTA/2019-BID.III/2019, Tanggal 28-03-2019	Kantor Lurah Penetaran	535.117.320,00
150	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	203	26/04/2019	KDP Cut Island	No : , Tanggal	Tenayan Raya	19.600.000,00
151	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	211	25/11/2019	KDP	No : , Tanggal	Tenayan Raya	322.607.713,00
152	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	1	21/01/2019	KDP	No. 01, Tanggal 21-01-2019	Gedung Kantor Eks Disnormik Jl. Pepaya No. 72a	84.216.000,00
153	Dinas Perkimahar	Tanah Dalam Pengerjaan	11	04/02/2020	Tanah Pemakaman Umum	No : 11/BAST/UPT.DISTAH-KEI/II/PPK/B/2020, Tanggal 04-02-2020	Pemakaman Umum	2.786.208,00
154	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	33	10/02/2020	Pembangunan Prasarana Pelebaran Pengerasan Lanjutan Jl. Gubeng Road Utara Jembatan Siak V - Akses Tol Pekanbaru - Dumai (Multiyears) Invoice Bulan November 2019 s/d Maret 2020 Lokasi Kecamatan Rumbai	No. 027/KONS-WSBM-DPUPR/XI/2019, Tanggal 27-12-2019	Kota Pekanbaru Semesteran 2020	111.484.006,00
155	Dinas Kebakaran Pangan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	210	23/10/2020	perencanaan landscaping kawasan si cantik (tanah)	No. 508.1/PPK-SPK-PL/2020, Tanggal 24-09-2020	KELURAHAN AGRO KEBATA KECAMATAN RUMBAI	98.339.000,00
157	Dinas Kebakaran Pangan	Tanah Dalam Pengerjaan	13	14/09/2020	KDP MASTER PLAN KAWASAN SIKANTIK	No. 440/PPK-SPK-PL-/2020, Tanggal 13-08-2020	KELURAHAN AGRO KEBATA KECAMATAN RUMBAI	98.715.000,00
158	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	48	14/12/2020	Fit Tersangkan Penyelesangan Lintas (Underpass) Jl. Sudirman (depan Mall MPP)	No. 004/KONS/PPK-BM/SPJ/PPK/2020, Tanggal 14-12-2020	Jl. Sudirman (Depan Mall MPP)	223.262.500,00
159	Dinas Perkimahar	Tanah Dalam Pengerjaan	14	02/11/2020	Trase Sembilang Tebing Tinggi Okura	No. 80.4/KT/DISTAH-KEI/BAST/PPK/II/2020, Tanggal 11-02-2020	Kl. Trase Sembilang Okura	283.440.992,00
160	Dinas Perkimahar	Tanah Dalam Pengerjaan	12	13/08/2020	Pembelian dan Penerimaan Tilk Nol di Trase Sella Maha Raja Sport Center	No. 01/AKT/DISTAH-KEI/BAST/PPK/VIII/2020, Tanggal 11-08-2020	Kel. Sialang Kec. Tenayan Raya	210.161.600,00
161	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	45	27/11/2020	Pembayaran Angsuran I (Pertama) Pekerjaan Jl. Pemuda Kel. Tampan (Overlay Hotmix) Lokasi Kecamatan Payung Sekaki	No. 001/KONTRK-BM/VI/2020, Tanggal 09-07-2020	Jl. Pemuda Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki	1.366.510.671,20
162	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	211	21/09/2020	Rehab Pelataran Kolam Air Mancur Perlandcon Tenayan Raya	No. 06/SPK/PPBAK/DNSLT-PL/PUPR-RTH/IV/2020, Tanggal 30-04-2020	Perkantoran Tenayan Raya	99.230.800,00
163	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	211	14/12/2020	DED Roof Garden Kantor Tenaya Raya	No. 1411/PANPRD-PR.ONS/LT-PUPR/PK-KTR/2020, Tanggal 05-11-2020	Perkantoran Tenayan Raya	97.625.000,00
164	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	35	24/09/2020	Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur I (Jalan Hutan - Minas timur) (Multiyears)	No. 002/KONT-4R/TBM-DPUPR/XII/2019, Tanggal 17-12-2019	Jalan lingkar luar Timur	11.878.415.620,00
165	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	227	21/12/2020	Perencanaan Interior Islamic Center	No. 66.04/APBD/PSPK/PPK/PUPR-CK/XI/2020, Tanggal 02-11-2020	Perkantoran Tenayan Raya	97.625.000,00
166	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	228	21/12/2020	Perencanaan Perpustakaan (Gedung 7-Lkg)	No. 66.04/APBD/PSPK/PPK/PUPR-CK/XI/2020, Tanggal 02-11-2020	-	97.625.000,00
167	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	225	21/12/2020	Perencanaan Cyber Park dan Leader Corner	No. 52.04/APBD/PSPK/PPK/PUPR-CK/XI/2020, Tanggal 02-11-2020	-	66.446.000,00
168	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	224	21/12/2020	Perencanaan Toga Bonsengat	No. 56.04/APBD/PSPK/PPK/PUPR-CK/XI/2020, Tanggal 02-11-2020	-	97.756.000,00
169	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	231	21/12/2020	Perencanaan Sarana dan Prasarana Olah Raga di Perkantoran Pemko Pekanbaru	No. 56.04/APBD/PSPK/PPK/PUPR-CK/XI/2020, Tanggal 02-11-2020	Perkantoran Tenayan Raya	97.176.000,00
170	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	232	21/12/2020	Review Design Gedung 04 Perkantoran Pemko Pekanbaru Tenayan Raya	No. 66.04/APBD/PSPK/PPK/PUPR-CK/XI/2020, Tanggal 02-11-2020	Perkantoran Tenayan Raya	97.136.000,00
171	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	223	15/12/2020	Feasibility Study Gedung Pasar MPP	No. 25.04/APBD/SPK-PPK/PUPR-CK/VIII/2020, Tanggal 18-08-2020	Kantor MPP	47.686.000,00
172	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	224	15/12/2020	Perencanaan Pembangunan Gedung Pasar MPP	No. 30.04/APBD/SPK-PPK/PUPR-CK/IX/2020, Tanggal 15-09-2020	Kantor MPP	96.600.000,00
173	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	232	23/12/2020	Perencanaan Pembangunan Kolektata MPP	No. 31.04/APBD/SPK-PPK/PUPR-CK/IX/2020, Tanggal 15-09-2020	Kantor MPP	72.276.000,00
174	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	33	15/05/2020	Perencanaan Kawasan Permukiman Cendarung Kunuk Kelurahan Labuh Baru Timur RW.06	No. 04/PPK/SPK/JK-PPK/PKKP-DPR/KTB/2020, Tanggal 15-09-2020	Perencanaan Kawasan Permukiman Cendarung Kunuk Kelurahan Labuh Baru Timur RW.06	96.324.000,00
175	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	34	15/05/2020	Perencanaan Kawasan Permukiman Cendarung Kunuk Kelurahan Padang Bakar RW.01	No. 04/PPK/SPK/JK-PPK/PKKP-DPR/KTB/2020, Tanggal 15-09-2020	Perencanaan Kawasan Permukiman Cendarung Kunuk Kelurahan Padang Bakar RW.01	96.595.000,00
176	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	41	24/11/2020	Perencanaan Kawasan Permukiman Cendarung Kunuk Kelurahan Rumbai Bukit RW.02	No. 04/PPK/SPK/JK-PPK/PKKP-DPR/KTB/2020, Tanggal 15-09-2020	Perencanaan Kawasan Permukiman Cendarung Kunuk Kelurahan Rumbai Bukit RW.02	96.375.000,00

No	Unit	Klasifikasi Barang	Register	Tanggal Pembelian	KIP	Nomor Dokumen - Tanggal Dokumen	Alamat	Nilai Perolehan (Rp)
177	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	210	14/12/2002	Pekerjaan Konsultan Perencanaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Puskesmas Mallur	No: -, Tanggal	PUSKESMAS MELUR	24.215.722,60
178	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	221	14/12/2002	Pekerjaan Konsultan Perencanaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Gedung PX	No: -, Tanggal	PX	24.414.338,60
179	Dinas Perhubungan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	99	13/08/2021	DED Pembangunan JPO Wilayah Pengembangan III Kota Pekanbaru dan Kecamatan Rumbai Pesisir	No: 03/SPNKT/SP-TSP/JVI/2021, Tanggal 30-06-2021	Kota Pekanbaru dan Kecamatan Rumbai Pesisir	72.985.000,00
180	Dinas Perhubungan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	97	16/10/2021	DED Pembangunan JPO Wilayah Pengembangan II Kota Pekanbaru dan Kecamatan Rumbai	No: 02/SPNKT/SP-TSP/JVI/2021, Tanggal 23-06-2021	Kota Pekanbaru dan Kecamatan Rumbai	77.899.000,00
181	Dinas Perhubungan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	94	03/08/2021	DED Pembangunan JPO di Jalan Tuanku Tambusai dan KR. Soekarnoe	No: 01/SPNKT/SP-TSP/JVI/2021, tanggal 21-06-2021	Jalan Tuanku Tambusai dan KR. Soekarnoe	67.899.000,00
182	Dinas Kependudukan dan Olahraga	Tanah Dalam Pengerjaan	17	23/08/2021	pembangunan lapangan sepakbola	No: 590/600/Adp-sp/sk/dukcapil-ar-pw/pek/2021, Tanggal 03-06-2021	3 pekanbaru	2.747.942.117,00
183	Dinas Pertanahan	Tanah Dalam Pengerjaan	16	12/08/2021	Pengadaan Tanah untuk Waduk (An. Suardi Beti)	No: 10/BAP/PKB/PWB/KSTTP/PDK/IUP/105BSTAN-IND.1/SAR-I/PPRK/2021, Tanggal 10-08-2021	Jln. Abdul Rahman Hamid RT.01/RW.03 Kelurahan Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru	2.151.680,00
184	Dinas Pertanahan	Tanah Dalam Pengerjaan	15	29/07/2021	Pengadaan Tanah untuk Waduk (An. Wisman Tinjung)	No: 01/BAP/PKB/PWB/KSTTP/PDK/IUP/105BSTAN-IND.1/SAR-I/PPRK/2021, Tanggal 29-07-2021	Jln. Abdul Rahman Hamid RT.01/RW.03 Kelurahan Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru	2.662.000,00
185	Dinas Ketahanan Pangan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	85	11/08/2021	jalan kawasan p.contig	No: 536.1.1/DKPP/STO/2021, Tanggal 29-06-2021	rumbai barat kelurahan agrowisata	45.753.000,00
186	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	266	16/12/2021	Perencanaan Pembangunan Sedang Sarang Wik Daerah Lahan Potensiono	No: , Tanggal	-	86.240.000,00
187	Dinas Perhubungan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	251	28/08/2021	DED Pekalongan Tenayan	No: 070/SPSPZDW/VIII/2021 (26766-BG2), Tanggal 21-08-2021	Tenayan Raya	988.445.000,00
188	Dinas Perhubungan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	263	13/10/2021	DED Terminal Tipe C SKPB	No: 123/SPSPZDW/2021, Tanggal 25-11-2021	Payung Sekaki	86.820.000,00
189	Dinas Perhubungan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	257	16/08/2021	DED Gedung Workshop	No: 126/SPSPZDW/2021 (26766-BG2), Tanggal 17-11-2021	Payung Sekaki	81.875.000,00
190	Dinas Perhubungan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	247	27/04/2021	DED Dermaga Ajung Sungai Siak Kiantang	No: 032/TSPSPZDW/2021 (06366-BG2), Tanggal 19-05-2021	Sungai Siak - Kiantang	99.145.000,00
191	Dinas Perhubungan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	260	13/12/2021	DED Pembangunan 1 Line Jalur Gedung Uji	No: 162/SPSPZDW/XII/2021 (31578-BG2), Tanggal 15-12-2021	Tenayan	63.335.000,00
192	Dinas Perhubungan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	264	08/12/2021	DED Halte TMP	No: 161/SPSPZDW/XII/2021, Tanggal 13-12-2021	Kota Pekanbaru	49.725.000,00
193	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	160	10/12/2021	Perencanaan IPAL Kawasana Rajawali	No: 020/PK-JKP/RC-IPAL/PSU-DPRKPP/X/2021, Tanggal 09-11-2021	Kota Pekanbaru	49.997.000,00
194	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	114	19/04/2022	Perencanaan Penerapan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kelurahan Tuanan Dalam RW 06	No: 35/SPK-JKP/KKPK-KPD/PRK/IV/PBD/2022, Tanggal 04-04-2022	DED - Perencanaan Penerapan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kelurahan Tuanan RW 06	99.000.000,00
195	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	115	20/04/2022	Perencanaan Penerapan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kelurahan Tanah Datar RW 07	No: 36/SPK-JKP/KKPK-KPD/PRK/IV/PBD/2022, Tanggal 01-03-2022	DED-Perencanaan Penerapan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kelurahan Tanah Datar RW 07	99.710.000,00
196	Dinas Kependudukan dan Olahraga	Tanah Dalam Pengerjaan	18	24/09/2022	Pembangunan Lapangan Sepak Bola Sport Center (Lanjutan)	No: 001/SPK/DISPORA/SARPRAS/APBD/VI/2022, Tanggal 16-05-2022	Area0 Sport Center Perumbari Jl. Palembang Kel. Sialang Rampai Kec. Rumbai	1.279.247.929,00
197	Dinas Kependudukan dan Olahraga	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	281	26/08/2022	PEMBANGUNAN LAPANGAN MENEMBAK SPORT CENTER (LANJUTAN	No: 002/SPK/DISPORA/SARPRAS/APBD/VI/2022, Tanggal 20-05-2022	Area Sport Center Jl. Palembang, Kelurahan Sialang Rampai	583.099.749,00
198	Dinas Kependudukan dan Olahraga	Tanah Dalam Pengerjaan	19	16/08/2022	PEMBANGUNAN LAPANGAN SEPAK BOLA SPORT CENTER (LANJUTAN)	No: 001/SPK/DISPORA/SARPRAS/APBD/VI/2022, Tanggal 19-05-2022	Area Sport Center Jl. Palembang, Kelurahan Sialang Rampai	1.336.322.809,00
199	Dinas Kependudukan dan Olahraga	Tanah Dalam Pengerjaan	20	19/08/2022	PENGAWASAN PEMBANGUNAN LAPANGAN SEPAK BOLA SPORT CENTER (LANJUTAN)	No: 003/PUD/DISPORA/SARPRAS/APBD/VI/2022, Tanggal 16-05-2022	Area Sport Center Jl. Palembang, Kelurahan Sialang Rampai	50.280.809,00
200	Dinas Kependudukan dan Olahraga	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	283	16/09/2022	PENGAWASAN PEMBANGUNAN LANJUTAN LAPANGAN MENEMBAK SPORT CENTER	No: 003/PUD/DISPORA/SARPRAS/APBD/VI/2022, Tanggal 20-05-2022	Area Sport Center Jl. Palembang, Kelurahan Sialang Rampai	45.089.209,00
201	Dinas Kependudukan dan Olahraga	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	306	26/08/2022	PEMBANGUNAN LAPANGAN MENEMBAK SPORT CENTER (LANJUTAN	No: 002/SPK/DISPORA/SARPRAS/APBD/VI/2022, Tanggal 20-05-2022	Area Sport Center Jl. Palembang, Kelurahan Sialang Rampai	594.160.809,00
202	Dinas Kependudukan dan Olahraga	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	310	16/11/2022	PEMBANGUNAN LAPANGAN SEPAK BOLA SPORT CENTER (LANJUTAN	No: 002/SPK/DISPORA/SARPRAS/APBD/VI/2022, Tanggal 20-05-2022	Jl. Palembang Kel. Sialang Rampai	119.072.809,00
203	Dinas Kependudukan dan Olahraga	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	311	16/11/2022	PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN LANJUTAN LAPANGAN MENEMBAK SPORT CENTER TENAYAN RAYA TA. 2022	No: 003/PUD/DISPORA/SARPRAS/APBD/VI/2022, Tanggal 20-05-2022	Area Sport Center Jl. Palembang, Kelurahan Sialang Rampai	29.392.809,00

No	Unit	Kualifikasi Barang	Register	Tanggal Perolehan	KDP	Nomor Dokumen - Tanggal Dokumen	Alamat	Nilai Perolehan (Rp)
204	Dinas Kependudukan dan Olahraga	Tanah Dalam Pengerjaan	21	05/12/2022	Pengawasan Pembangunan Lapangan Sepak Bola Sport Center (Lanjutan)	No. 3(1)/SPK/DISPORA-SARPRAS/X/BDI/V/2022, Tanggal 19-05-2022	Kawasan Sport Center Jl. Palembang, Kelurahan Sialang Rampah Kec. Tenayan Raya	18,284,000.00
205	Dinas Kependudukan dan Olahraga	Tanah Dalam Pengerjaan	22	05/12/2022	Pembangunan Lapangan Sepak Bola Sport Center (Lanjutan)	No. 001/SPK/DISPORA/SARPRAS/BAPBDI/2022, Tanggal 16-05-2022	Kawasan Sport Center Jl. Palembang, Kelurahan Sialang Rampah Kec. Tenayan Raya	1,644,250,000.00
206	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	108	22/09/2022	Parkir Gedung 66 Komplek Perkantoran Walikota Tenayan Raya	No. : , Tanggal	Parkir Gedung 66 Komplek Perkantoran Walikota Tenayan Raya	1,043,180,434.00
207	Dinas Perhubungan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	291	23/05/2022	Review DED Terminal Type C SPPB	No. : 36/BA-ST/UPT-PTP/DED-SUBV/2022, Tanggal 23-05-2022	Jl. Tuanku Tambusai Ind. Lubuh Baru Baru Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru	95,230,000.00
208	Dinas Perhubungan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	308	02/11/2022	DED Terminal Type C	No. :08/BA-ST/SPKT-DED/BH/XI/2022, Tanggal 02-11-2022	Jl. Lintas Timur KM 13 Rec. KUIN Kota Pekanbaru	95,085,760.00
209	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	319	14/12/2022	KDP - Perencanaan Taman Pemakaman Kota Pekanbaru Lokasi Kota Pekanbaru	No. :02/BAP/TAP-PKU/2022, Tanggal 01-09-2022	Kota Pekanbaru	80,449,000.00
210	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	313	23/11/2022	KDP - KONSULTAN PERENCANAAN RTnH PEMBANGUNAN PEMAKABAN	No. : 06/SPK/KONS-PUPERKIM/IX/2022, Tanggal 01-09-2022	Kota Pekanbaru	80,844,000.00
211	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	177	30/11/2022	Perencanaan Peningkatan Kualitas PSU Perumahan Yang Sudah Diserah Terimakan Wilayah I Lokasi Kota Pekanbaru	No : 006/SPK/KONS-PUPERKIM/IX/2022, Tanggal 01-09-2022	Kota Pekanbaru	82,791,250.00
212	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	170	30/11/2022	Perencanaan Peningkatan Kualitas PSU Perumahan Yang Sudah Diserah Terimakan Wilayah I Lokasi Kota Pekanbaru	No : 003/SPK/KONS-PUPERKIM/IX/2022, Tanggal 01-09-2022	Kota Pekanbaru	93,816,750.00
213	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	314	06/12/2022	JL PERENCANAAN PRATAMA KAWASAN TPU UNBAN SARI Lokasi Kota Pekanbaru	No. 002/SPK/KONS-PUPERKIM/IX/2022, Tanggal 01-09-2022	TPU Unban Sari	98,791,250.00
214	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	311	06/12/2022	PERENCANAAN PENATAAN KAWASAN TPU UKA Lokasi Kota Pekanbaru	No. 001/SPK/KONS-PUPERKIM/IX/2022, Tanggal 01-09-2022	TPU Uka	95,422,100.00
215	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	180	13/12/2022	Perencanaan Air Bersih Kota Pekanbaru	No. 01/SPK/JAB-PSU/2022, Tanggal 01-09-2022	Kota Pekanbaru	85,800,000.00
216	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	171	02/11/2022	Jasa Muka Utk Pekerjaan Swakelola PSU lingkungan perumahan Lokasi Kota Pekanbaru	No. SPK.01/DB-PSU/APBD/2022, Tanggal 10-10-2022	Kota Pekanbaru	185,180,025.00
217	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	168	14/12/2022	Perencanaan Detailase Lingkungan Perumahan	No. SPK.01/DB-PSU/APBD/2022, Tanggal 10-10-2022	Kota Pekanbaru	238,711,725.00
218	Dinas Kependudukan dan Olahraga	Tanah Dalam Pengerjaan	23	12/09/2023	PEMASANGAN METERAN BARU LAPANGAN SEPAK BOLA SPORT CENTER TENAYAN RAYA 16,500 KWH	No. 27/SPK/DISPORA-SARPRAS/APBD/IV/2023, Tanggal 17-04-2023	Area Sport Center Jl. Palembang	14,184,900.00
219	Dinas Kependudukan dan Olahraga	Tanah Dalam Pengerjaan	24	25/09/2023	BENCH PEMAIN LAPANGAN SEPAK BOLA	No. 56/SPK/DISPORA-SARPRAS/APBD/IX/2023, Tanggal 25-09-2023	Area Sport Center Jl. Palembang	118,471,000.00
220	Dinas Kependudukan dan Olahraga	Tanah Dalam Pengerjaan	25	25/09/2023	PENGAWASAN BENCH PEMAIN DI LAPANGAN SEPAK BOLA ATAS SUB KEGIATAN	No. 1.2/SPK/DISPORA-SARPRAS/APBD/IX/2023, Tanggal 26-09-2023	Kawasan Sport Center Jalan Palembang	2,899,000.00
221	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	342	14/12/2023	Perencanaan DED Kawasan dengan Infrastruktu Terintegrasi Wilayah Kawasan Kumuh 1	No. 01/SPK-JASDET-KIP/DPKP/APBD/2023, Tanggal	Perencanaan DED Kawasan dengan Infrastruktur Terintegrasi Wilayah Kawasan Kumuh 1	99,209,000.00
222	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	344	14/12/2023	Perencanaan DED Kawasan dengan Infrastruktu Terintegrasi Wilayah Kawasan Kumuh 4	No. 04/SPK-JASDET-KIP/DPKP/APBD/2023, Tanggal	Perencanaan DED Kawasan dengan Infrastruktur Terintegrasi Wilayah Kawasan Kumuh 4	99,099,000.00
223	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	345	14/12/2023	Perencanaan DED Kawasan dengan Infrastruktu Terintegrasi Wilayah Kawasan Kumuh 3	No. 03/SPK-JASDET-KIP/DPKP/APBD/2023, Tanggal	Perencanaan DED Kawasan dengan Infrastruktu Terintegrasi Wilayah Kawasan Kumuh 3	99,123,000.00
224	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	346	14/12/2023	Perencanaan DED Kawasan dengan Infrastruktu Terintegrasi Wilayah Kawasan Kumuh 2	No. 02/SPK-JASDET-KIP/DPKP/APBD/2023, Tanggal	Perencanaan DED Kawasan dengan Infrastruktur Terintegrasi Wilayah Kawasan Kumuh 2	99,099,000.00
225	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	347	19/12/2023	Perencanaan DED Kawasan dengan Infrastruktu Terintegrasi Wilayah Kawasan Kumuh 6	No. 06/SPK-JASDET-KIP/DPKP/APBD/2023, Tanggal 19-12-2023	Infrastruktur Terintegrasi Wilayah Kawasan Kumuh 6	98,274,000.00
226	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	348	19/12/2023	Perencanaan DED Kawasan dengan Infrastruktu Terintegrasi Wilayah Kawasan Kumuh 5	No. 05/SPK-JASDET-KIP/DPKP/APBD/2023, Tanggal 19-12-2023	Infrastruktur Terintegrasi Wilayah Kawasan Kumuh 5	98,251,000.00
227	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	249	25/12/2023	Perencanaan Jalan Lingkungan Wilayah Kecamatan Rumbai, Rumbai Timur Dan Rumbai Barat	No : 01/SK/DINSRDI-DRAIN-PSU/PERKIM/2023, Tanggal 06-09-2023	Perencanaan Jalan Lingkungan Wilayah Kecamatan Rumbai, Rumbai Timur Dan Rumbai Barat	74,580,000.00
228	Badan Pendapatan Daerah	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	287	23/11/2023	Konsultasi Perencanaan Rehab Kantor UPT Bapenda Kota Pekanbaru (DED)	No : 025/PK-BPD/BPKD.38.89/X/2023 tanggal 2023-10-30, Tanggal 30-10-2023	Jl. Rugas No. 10, Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru	99,831,800.00
229	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	242	09/11/2023	KDP Perencanaan Saluran Lingkungan Wilayah Kec. Bukit Raya Lokasi Kota Pekanbaru	No : 023/KONSPKN-DRAIN-PSU/PERKIM/2023, Tanggal 09-11-2023	Kec. Marpoyan Damai	74,520,000.00
230	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	241	09/11/2023	KDP Perencanaan Saluran Lingkungan Wilayah Kec. Bukit Raya Lokasi Kota Pekanbaru	No : 021/KONSPKN-DRAIN-PSU/PERKIM/2023, Tanggal 09-11-2023	Kec. Bukit Raya	74,250,000.00

No	Unit	Klasifikasi Barang	Register	Tanggal Perolehan	KDP	Nomor Dokumen - Tanggal Dokumen	Alamat	Nilai Perolehan (Rp)
231	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	232	08/11/2023	KDP Perencanaan Saluran Lingkungan Wilayah Kec. Tenayan Raya Dan Kulim Lokasi Kota Pekanbaru	No: 69/KONSPER-JL-PSUPER69M/2023, Tanggal 08-11-2023	Kec. Tenayan Raya Dan Kulim	74.580.000,00
232	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	233	08/11/2023	KDP Perencanaan Saluran Lingkungan Wilayah Kec. Payung Sekaki Senapelan, Pekanbaru Kota, Sail, Lima Puluh Dan Sukajadi Lokasi Kota Pekanbaru	No: 69/KONSPER-JL-PSUPER69M/2023, Tanggal 08-11-2023	Kec. Payung Sekaki Senapelan, Pekanbaru Kota, Sail, Lima Puluh Dan Sukajadi	74.580.000,00
233	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	234	08/11/2023	KDP Perencanaan Saluran Lingkungan Kec. Tuah Madani Dan Bina Widya Lokasi Kota Pekanbaru	No: 69/KONSPER-JL-PSUPER69M/2023, Tanggal 08-11-2023	Kec. Tuah Madani Dan Bina Widya	74.552.000,00
234	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	235	08/11/2023	KDP Perencanaan Jalan Lingkungan Wilayah Kec. Tenayan Raya Dan Kulim Lokasi Kota Pekanbaru	No: 69/KONSPER-JL-PSUPER69M/2023, Tanggal 28-10-2023	Kec. Tenayan Raya Dan Kulim	74.406.000,00
235	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	236	08/11/2023	KDP Perencanaan Jalan Lingkungan Wilayah Kec. Payung Sekaki Senapelan, Pekanbaru Kota, Sail, Lima Puluh Dan Sukajadi Lokasi Kota Pekanbaru	No: 69/KONSPER-JL-PSUPER69M/2023, Tanggal 08-11-2023	Kec. Payung Sekaki Senapelan, Pekanbaru Kota, Sail, Lima Puluh Dan Sukajadi	74.014.000,00
236	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	237	08/11/2023	KDP Perencanaan Jalan Lingkungan Wilayah Kec. Bukit Raya Lokasi Kota Pekanbaru	No: 69/KONSPER-JL-PSUPER69M/2023, Tanggal 08-11-2023	Kec. Bukit Raya	74.013.000,00
237	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	238	08/11/2023	KDP Perencanaan Jalan Lingkungan Wilayah Kecamatan Marpoyan Damai Lokasi Kota Pekanbaru	No: 69/KONSPER-JL-PSUPER69M/2023, Tanggal 08-11-2023	Kecamatan Marpoyan Damai	74.347.000,00
238	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	239	08/11/2023	KDP Perencanaan Jalan Lingkungan Kecamatan Tuah Madani Dan Bina Widya Lokasi Kota Pekanbaru	No: 69/KONSPER-JL-PSUPER69M/2023, Tanggal 08-11-2023	Kecamatan Tuah Madani Dan Bina Widya	74.348.000,00
Jumlah								539.026.874.060,00

Lampiran 17

Daftar Berita Acara Serah Terima Barang berupa Obat-Obatan dari Pemerintah Provinsi Riau

Sumber Anggaran	Nomor BA	Tanggal Beiua	Jenis Obat	Jumlah	Harga Satuan	Harga	TOTAL BA PDF	TOTAL REKAP BA HIBAH DINKES
JANUARI								
APBN	442/DINKES.7.2/SM	6	Dexiagaliine 100 Mg	2256	34.500,00	77.580.808,00	82.705.040,00	82.705.040,00
			Fibunbutol tablet 400 Mg	6720	507,00	3.407.946,00		
			Vitamin B6 25 Mg	7680	222,00	1.687.206,00		
			Pyrazinamide 500 Mg	8001	290,00	231.986,00		
Global Fund		6	Clofazimine 100 Mg	3180	7.639,00	23.680.900,00	52.665.700,00	52.365.700,00
			Cycloserine 250 Mg	100	4.083,00	408.300,00		
			Cycloserine 250 Mg	4980	5.985,00	19.526.500,00		
			Levofloxacin 250 Mg	7080	472,00	3.304.000,00		
			Linezolid 600 Mg	1080	5.444,00	5.444.000,00		
APBN	442/DINKES.7.2/14806	6	Rapid 2 (Standar Q)	2180	10.500,00	22.890.000,00	98.627.600,00	98.627.600,00
			Rapid 3	2280	11.448,00	25.168.000,00		
			Treponemik Syphilis	6150	8.096,00	51.409.600,00		
APBN	442/DINKES.7.3/16802	9	KIT SYPILIS	3100	2.422,00	7.508.200,00	7.508.200,00	7.508.200,00
APBN	442/DINKES.7.3/16811	9	Fuorkon Q (HbsAg	20625	5.880,00	121.275.000,00	121.275.000,00	121.275.000,00
APBN	442/DINKES.7.2/SG	9	Vaksin Anti Rabies	200	153.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00
APBN	442/DINKES.7.3/16825	10	Masker N95 RNL	1750	240.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00
APBN	442/DINKES.7.3/0005	11	ads 0,3 ml	2500	1.255,00	3.137.500,00	3.796.825,00	3.796.825,00
			ads 0,5 ml	200	569,00	113.800,00		
			alkohol swab	2700	79,00	213.300,00		
			safety box 5 liter	25	13.289,00	332.225,00		
APBN	442/DINKES.7.3/16828	12	Test Anti HCV	580	8.920,00	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00
Covid-19	442/DINKES.7.3/16831	12	Masker Bedah	440	-	-	967.500,00	967.500,00
Covid-19			Sepatu	18	-	-		
APBD 2021			Kacamata Google	14	93.000,00	800.500,00		
APBD 2021			Nomi Cup	5	33.500,00	167.500,00		
Bantuan BNPB			Cooler Box 3,5 L	5	-	-		
Bantuan BNPB			Oximeter Polos	10	-	-		
APBN	442/DINKES.7.2/SB	11	Dot Anak	70	250.971,00	17.567.970,00	17.567.970,00	17.567.970,00
APBN	442/DINKES.7.3/0007	16	ads 0,3 ml	2500	1.255,00	3.137.500,00	3.796.825,00	3.796.825,00
			ads 0,5 ml	200	569,00	113.800,00		
			alkohol swab	2700	79,00	213.300,00		
			safety box 5 liter	25	13.289,00	332.225,00		
APBN	442/DINKES.7.2/41	16	Kotrimoksazol Forte Kombinasi 400 Mg/160 Mg	10	32.500,00	325.000,00	83.146.330,00	83.146.330,00
			TDF (300)/3TC(300)/DTG(50)	789	104.970,00	82.821.330,00		
APBN	442/DINKES.7.2/	16	Oxytocin 5 Cairos Injeksi 10 Iu/ml	25	112.600,00	3.152.800,00	4.304.000,00	4.304.000,00
			Oxytocin 5 Cairos Injeksi 10 Iu/ml	12	112.600,00	1.351.200,00		

Sumber Anggaran	Nomor BA	Tanggal Bulan	Jenis Obat	Jumlah	Harga Satuan	Harga	TOTAL BA PDF	TOTAL REKAP BA RIBAH DINKES
APBN	442/DINKES.7.2/0012	30	ads 0,3 ml	2580	1.251,00	3.227.580,00	3.464.680,00	3.464.680,00
			ads 0,5 ml	200	569,00	113.800,00		
			alkohol swab	2700	79,00	213.300,00		
TOTAL							935.283.590,00	935.283.590,00
FEBRUARI								
APBN	442/DINKES.7.2/10K	1	Pelarut Ikc g (Sodium Chloride Injection B.p)	50	-	-	318.044.358,00	318.044.358,00
			Pentabio Vaksin Dtp-hb-hib Injeksi 0,5 ml	1060	85.102,00	85.102.000,00		
			Vaksin Ipv	600	158.500,23	95.100.138,00		
			Vaksin Pneumococcal Conjugate VaccinePVC	600	190.657,00	114.394.200,00		
			Polarut Oral Polio Vaccine	440	-	-		
			Dropper for oral polio vaccine	550	-	-		
			Dropper for oral polio vaccine	210	-	-		
			Vaksin Polio Oral Trivalen Drops/Bop V	1200	19.540,00	23.448.000,00		
APBN	442/DINKES.7.2/2C	2	Albendazole Tablet Kunyah 400 Mg	1000	41.000,00	41.000.000,00	118.367.000,00	118.367.000,00
			Albendazole Tablet Kunyah 400 Mg	100	41.000,00	4.100.000,00		
			Albendazole Tablet Kunyah 400 Mg	1287	41.000,00	52.767.000,00		
			Albendazole Tablet Kunyah 400 Mg	300	41.000,00	12.300.000,00		
			Albendazole Tablet Kunyah 400 Mg	200	41.000,00	8.200.000,00		
Global Fund	442/DINKES.7.2/12M	9	Isoniazid 300 Mg	2019	307,00	618.912,00	2.744.662,00	2.744.662,00
			Vitamin B6 100 Mg	2750	775,00	2.125.750,00		
APBN	442/DINKES.7.2/18K	13	Vaksin Ikc g Kering Serbuk Injeksi 6,375 mg/ml	500	97.780,10	48.890.050,00	74.729.050,00	74.729.050,00
			Vaksin Hepatitis B10 Mcg/ml	1140	23.466,00	25.839.000,00		
APBN	442/DINKES.7.2/13J	13	Efavirenz 600 Mg	490	211.500,00	103.635.000,00	926.065.800,00	926.065.800,00
			Efavirenz 600 Mg	450	211.500,00	95.175.000,00		
			TDF (300)/3TC(300)/DTG(50)	1359	204.900,00	278.085.000,00		
			Lopinavir/r 200/50 Mg	474	618.000,00	292.932.000,00		
			Tenofovir 300 Mg + Emtricitabine 200 Mg	252	140.900,00	35.456.400,00		
			Tenofovir 300 Mg + Emtricitabine 200 Mg	452	140.700,00	63.782.400,00		
APBN	442/DINKES.7.2/4A	14	Bisoprolol 5 mg	900	138,00	132.480,00		
			Furosemid tablet 40 mg	250	20.786,97	5.196.742,50		
			Methylprednisolone 4 mg tablet	15400	102,00	1.570.800,00		
			Diclofenac sodium 50 mg	21200	109,00	2.310.800,00		
			Diclofenac sodium 50 mg	21600	109,00	2.354.400,00		

Sumber Anggaran	Nomor BA	Tanggal Bulan	Jenis Obat	Jumlah	Harga Satuan	Harga	TOTAL BA PDF	TOTAL REKAP BA RIBAH DINKES
			Paracetamol 500 tablet	7380	327,45	2.390.380,00	44.937.722,50	44.937.722,50
			Paracetamol 500 tablet	10100	327,45	3.307.240,00		
			Paracetamol 500 tablet	12200	327,45	3.994.890,00		
			Paracetamol 500 tablet	400	327,45	130.980,00		
			Paracetamol 500 tablet	10000	327,45	3.274.500,00		
			Paracetamol 500 tablet	10000	327,45	3.274.500,00		
			Ciprofloksasin 500 Mg	69000	250,00	17.000.000,00		
APBN	442/DINKES.7.3/0013	14	ads 0,3 ml	2500	1.255,00	3.137.500,00	3.464.600,00	3.464.600,00
			ads 0,3 ml	200	569,00	113.800,00		
			alkohol swab	2700	79,00	213.300,00		
APBN	442/DINKES.7.3/0015	21	ads 0,3 ml	2500	1.255,00	3.137.500,00	3.464.600,00	3.464.600,00
			ads 0,3 ml	200	569,00	113.800,00		
			alkohol swab	2700	79,00	213.300,00		
APBN	442/DINKES.7.2/21K	22	Vaksin Polio Oral Trivalen Drops/Bop V	2000	19.540,00	39.080.000,00	831.381.150,00	831.381.150,00
			Vaksin Ipv	5000	158.500,23	792.501.150,00		
			Dropper for oral polio vaccine	1440	-	-		
			Dropper for oral polio vaccine	560	-	-		
APBN	442/DINKES.7.3/00110	Tilak ada tanggal	safety box 2,5 liter	750	12.500,00	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00
APBN	442/DINKES.7.3/00111	Tilak ada tanggal	safety box 2,5 liter	875	12.500,00	10.937.500,00	10.937.500,00	10.937.500,00
APBN	442/DINKES.7.2/23M	25	Pemetoxanide 500 Mg	5000	230,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
APBN	442/DINKES.7.2/191	24	Efavirenz 600 Mg	375	211.500,00	79.312.500,00	551.097.090,00	551.097.090,00
			Efavirenz 600 Mg	95	211.500,00	20.092.500,00		
			Lopinavir/r 200/50 Mg	158	616.000,00	97.644.000,00		
			TDF (300)/3TC(300)/DTG(50)	132	204.000,00	26.928.000,00		
			TDF (300)/3TC(300)/DTG(50)	2343	97.800,00	229.145.400,00		
			TDF (300)/3TC(300)/DTG(50)	798	104.970,00	83.766.060,00		
			Dolutegravir 50 Mg	28	145.850,00	4.083.800,00		
			Tenofovir 300 Mg + Emtricitabine 200 Mg	72	140.700,00	10.130.400,00		
LAINNYA		24	Dolutegravir 50 Mg	3	28.317,00	84.951,00	1.088.082,00	1.088.082,00
			ABC (120)/3TC (60)	3	48.548,00	145.644,00		
			LPV/r(40/10)	3	285.829,00	857.487,00		
TOTAL							2.897.846.564,50	2.897.046.564,50
MARET								
APBN	442/DINKES.7.2/33K	3	Vaksin Polio Oral Trivalen Drops/BOpV	2000	19.540,00	39.080.000,00	39.080.000,00	39.080.000,00
			Dropper for oral Polio Vaccine	2000	-	-		
APBN	442/DINKES.7.3/0019	3	ads 0,3 ml	2500	1.255,00	3.137.500,00	3.464.600,00	3.464.600,00
			ads 0,3 ml	200	569,00	113.800,00		
			alkohol swab	2700	79,00	213.300,00		
APBN	442/DINKES.7.3/41	3	Cartridge Xpert MTB/RIF	5900	252.400,00	1.489.160.000,00	1.489.160.000,00	1.489.160.000,00
APBN	442/DINKES.7.3/10	16	Rapid 1 (Vitrocheck HIV 1/2)	1575	8.391,00	13.215.825,00	24.183.825,00	24.183.825,00
			Rapid 2 (standart Q HIV)	500	10.500,00	5.250.000,00		
			Rapid 3 HIV Rapidus	500	11.440,00	5.720.000,00		

Sumber Anggaran	Nomor BA	Tanggal Bulan	Jenis Obat	Jumlah	Harga Satuan	Harga	TOTAL BA PDF	TOTAL REKAP BA HIBAH DINKES
Global Fund	442/DINKES/7.2/3561	9	Kit Dosis Harian - Lupin	211	495.247,00	104.497.117,00	291.205.256,00	291.205.256,00
			Kit Dosis Harian - Lupin	252	495.247,00	124.802.244,00		
			Kit Dosis Harian - Lupin	9	495.247,00	4.457.223,00		
			Kit Dosis Harian - Lupin	8	495.247,00	3.961.976,00		
			Kit Dosis Harian - Lupin	84	495.247,00	41.600.748,00		
			Kit Dosis Harian - Lupin	24	495.247,00	11.885.928,00		
APBN	442/DINKES/7.2/59K	15	Vaksin B.c.g Kering Serbuk Injeksi 0,375 mg/ml	500	97.780,10	48.890.050,00	238.167.262,80	238.167.262,80
			Pelarut B.c.g (sodium chloride injection B.p)	500	-	-		
			Pentabio Vaksin Dtp-Hb-Irb Injeksi 2,5 ml	1460	77.568,35	114.502.212,80		
			Dragee Sir anti Polio Vaccine	1000	-	-		
			Vaksin Polio Oral Trivalen Drops/IOpV	1000	19.540,00	19.540.000,00		
			Vaksin Hepatitis B 10 Mcg/ml	1500	23.490,00	35.235.000,00		
APBN	442/DINKES/7.2/1201	28	Mkt Kusta Mb Dewasa	60	11.550,00	2.074.320,00	2.074.320,00	2.074.320,00
TOTAL							2.067.337.243,80	2.067.337.243,80
APRIL								
APBN	442/DINKES/7.2/8L	10	Vaksin Meningitis + alat suntik & alkohol swab	680	122.000,00	82.960.000,00	109.800.000,00	109.800.000,00
			Vaksin Meningitis + alat suntik & alkohol swab	220	122.000,00	26.840.000,00		
APBN	442/DINKES/7.3/6020	11	ads 0,3 ml	1300	1.255,00	1.631.500,00	1.799.000,00	1.799.000,00
			ads 0,5 ml	100	569,00	56.900,00		
			alkohol swab	1400	70,00	110.600,00		
APBN	442/DINKES/7.3/18	11	Inder HIV 1/2 dan Syphilis Combo	6675	17.499,00	116.799.150,00	123.717.150,00	123.717.150,00
			RPR Sypilis	600	2.422,00	1.453.200,00		
			RDT Sypilis	675	8.096,00	5.464.800,00		
APBN	442/DINKES/7.3/84	11	Kacamata google	14	-	-	686.400,00	686.400,00
			IV Canula 20 G	100	6.864,00	686.400,00		
APBN	442/DINKES/7.3/85	11	Undfix 10cm x 4,5 m	6	24.800,00	148.800,00	1.736.800,00	1.736.800,00
			Haclumidrox 5L	4	397.000,00	1.588.000,00		
GF 2021	442/DINKES/7.3/21	11	Slide Box	3	66.065,00	198.195,00	1.083.711,00	1.083.711,00
GF 2021			Blood Slide	2	41.065,00	82.130,00		
APBN 2021			Giemsa Malaria (100 ml)	1	338.500,00	338.500,00		
APBN 2021			Immersion Oil Malaria (500 ml)	2	203.500,00	407.000,00		
GF 2022			Surgical Face Mask	2	18.943,00	37.886,00		
Global Fund	442/DINKES/7.2/44M	11	Berbaquinne 100 Mg	2444	23.125,00	56.517.500,00	150.082.764,00	150.082.764,00
			Clobazonine 100 Mg	4000	7.638,00	30.552.000,00		
			Cycloserine 250 Mg	5000	4.040,00	20.200.000,00		
			Ethambutol tablet 400 mg	6720	525,00	3.528.000,00		
			Levofloxacin 250 Mg	12000	486,00	5.832.000,00		
			Linezolid 600 Mg	2000	14.992,00	29.984.000,00		

Sumber Anggaran	Nomor BA	Tanggal Bulan	Jenis Obat	Jumlah	Harga Satuan	Harga	TOTAL BA PDF	TOTAL REKAP BA BIDAH DINKES
			Vitamin B6 100 Mg	2000	773,00	1.546.000,00		
			Pyrantel tablet 500 Mg	6048	318,00	1.923.264,00		
APBD	442/DINKES.7.2/12A	14	Vitamin B Kompleks Tablet	544	5.899,65	3.209.469,60	3.209.469,60	3.209.469,60
APBN		14	Paracetamol tablet 500 Mg	500	13.900,00	6.950.000,00	7.906.800,00	7.906.800,00
			Tiamin Hcl / Mononitrat (vit b1) tablet 50 Mg	106	9.200,00	956.800,00		
APBD	442/DINKES.7.2/200	17	Chlorpromazine Hcl 100 Mg	2	28.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
APBN		17	Diazepam Cairan Injeksi 5 Mg/ml	28	15.450,00	401.700,00	1.427.200,00	1.427.200,00
			Haperidone 2 Mg	25	12.300,00	307.500,00		
			Trifluoperin 5 Mg	4	22.000,00	88.000,00		
			Trihexiphenidil Hidroklorida Tablet 2 Mg	100	6.300,00	630.000,00		
APBN	442/DINKES.7.2/441	18	Zdv(300)+ 3tc(150)	760	241.800,00	188.604.000,00	714.328.060,00	714.328.060,00
			Zdv(300)+ 3tc(150)	528	241.800,00	127.670.400,00		
			Zdv(300)+3tc(150)	150	241.800,00	36.270.000,00		
			Tenofovir 300 Mg	300	67.200,00	20.160.000,00		
			TenoFovir 300 Mg	150	67.200,00	10.080.000,00		
			Benzatine Penisilin 2,4 Juta Iu	10	14.500,00	145.000,00		
			3TC (300)/2TC(300)/DTG(50)	1188	104.970,00	124.708.360,00		
			Nvp(200)	160	144.900,00	23.184.000,00		
			Nvp(200)	150	144.900,00	21.735.000,00		
			Nvp(200)	377	144.900,00	54.627.300,00		
			Lamivudine 150 Mg	885	95.600,00	75.160.800,00		
			Tenofovir 300 Mg	476	67.200,00	31.987.200,00		
APBN	442/DINKES.7.2/431	18	Efavirenz 600 Mg	450	211.500,00	95.175.000,00	186.966.000,00	186.966.000,00
			Efavirenz 600 Mg	434	211.500,00	91.791.000,00		
TOTAL							1.302.800.294,60	1.302.800.294,60
MEI								
APBN	442/DINKES.7.3/5	4	Abate 1 Gft Botol Larvasida	50	71.500,00	3.575.000,00	3.575.000,00	3.575.000,00
APBN	442/DINKES.7.3/91	5	Pre Dalak	13800	2.200,00	30.360.000,00	30.360.000,00	30.360.000,00
Program TB	442/DINKES.7.3/92	6	Surgical Mask Earloop 3ply + konektor	5160	16.428,00	50.926.800,00	50.926.800,00	50.926.800,00
			Obat Gizi	50	-	-		
APBN	442/DINKES.7.2/73R	8	Pelarut 8 c.g (Sodium Chloride Injection 8 gr)	300	-	-	329.947.161,00	329.947.161,00
			Vaksin B c.g Kering Sebuk Injeksi 0,375 mg/ml	300	97.783,10	29.334.930,00		
			Pentabio Vaksin Dtp-hb-hib Injeksi 2,5 ml	600	77.366,36	46.419.816,00		
			Vaksin hepatitis B 10 Mcg/ml	800	23.400,00	18.792.180,00		
			Vaksin Ipv	500	158.500,23	79.250.115,00		
			Vaksin Jerap Td	200	18.128,00	3.625.600,00		
			Vaksin Pneumococcal Conjugate VaccinePCV	580	190.627,00	110.581.000,00		

Sumber Anggaran	Nomor BA	Tanggal Bulan	Jenis Obat	Jumlah	Harga Satuan	Harga	TOTAL BA PDF	TOTAL REKAP BA HIBAH DINKES
			Vaksin Pneumococcal Conjugate Vaccine/PCV	228	190.657,00	43.944.540,00		
APBN	442/DINKES.7.2/47M	11	Dexamet,i 50 Mg	240	40.100,00	9.624.000,00	9.624.000,00	9.624.000,00
	442/DINKES.7.2/661	15	TDF (300)/3TC(300)/DTG(50)	514	97.800,00	50.269.200,00	155.893.200,00	155.893.200,00
			TDF (300)/3TC(300)/DTG(50)	1080	97.800,00	105.624.000,00		
APBN	442/DINKES.7.2/581	15	Lopinavir/r 200/50 Mg	120	616.000,00	74.160.000,00	148.320.000,00	148.320.000,00
			Lopinavir/r 200/50 Mg	120	616.000,00	74.160.000,00		
LAINNYA	442/DINKES.7.2/641	22	TDF (300)/3TC(300)/DTG(50)	300	78.283,00	23.484.900,00	23.484.900,00	23.484.900,00
APBN	442/DINKES.7.2/17B	22	Oat Anak	230	327.587,00	75.345.010,00	75.345.010,00	75.345.010,00
LAINNYA	442/DINKES.7.2/25A	24	Paheesol Tablet	39500	690,00	35.352.500,00	63.868.400,00	63.868.400,00
			Hemaflot	367	77.200,00	28.332.400,00		
APBD	442/DINKES.7.2/20A	24	Acetyl Cysteine 200 Mg	220	18.587,40	4.089.228,00	36.924.927,20	36.924.927,20
			Fluimucil (Asetyl Cysteine 200 Mg)	3600	3.230,00	11.628.000,00		
			Herbakof Syrup 100 ml	192	16.561,00	3.180.096,00		
			Stevens Fluimucil	96	22.839,00	2.192.544,00		
			Apecur 100 ml vitamin anak	40	44.955,00	1.798.200,00		
			chlorpheniramine maleat 4 mg	9600	175,38	1.683.648,00		
			Ambroxol 30 Mg tablet	8900	219,78	1.956.042,00		
			Ibuprofen tablet 400 mg	400	18.700,00	7.480.000,00		
			Vitamin B Kompleks Tablet	88	5.899,65	519.169,20		
			Gentamicin 80 Mg	12000	166,50	1.998.000,00		
APBN		24	Allopurinol tablet 300 mg	75	8.700,00	652.500,00	19.031.500,00	19.031.500,00
			Amoxycillin tablet 500 mg	40	20.100,00	804.000,00		
			Griseofulvin 125 Mg	100	21.000,00	2.100.000,00		
			Vitamin C	5000	225,00	1.575.000,00		
			Paracetamol tablet 500 Mg	400	13.900,00	5.560.000,00		
			Paracetamol tablet 500 Mg	300	13.900,00	4.170.000,00		
			Paracetamol tablet 500 Mg	100	13.900,00	1.390.000,00		
			Paracetamol tablet 500 Mg	200	13.900,00	2.780.000,00		
		29	Catridge Xpert MTB/Rif	3500	166.500,00	582.750.000,00	582.750.000,00	582.750.000,00
TOTAL							**1.026.050.898,20**	**1.330.050.898,20**
JUNI								
APBN	442/DINKES.7.2/81	5	Dacluatasvir Tablet 60 Mg	168	12.220,00	2.058.000,00	2.058.000,00	2.058.000,00
APBN	442/DINKES.7.2/98L	8	Vaksin B.c.g Kering Steftik Injeksi 0,375 mg/ml	500	97.780,10	48.890.050,00	257.561.410,00	257.561.410,00
			Pelarut B.c.g (Sodium Chloride Injection B.p)	500	-	-		
			Pentabio Vaksin Dip-hb-hib Injeksi 1,5 ml	468	77.366,36	36.052.725,76		
			Pentabio Vaksin Dip-hb-hib Injeksi 2,5 ml	1034	77.366,36	79.998.816,24		
			Vaksin hepatitis B 10 Mcg/ml	1500	23.490,00	35.235.000,00		
			Vaksin Pneumococcal Conjugate Vaccine/PCV	260	190.657,00	49.570.820,00		

Sumber Anggaran	Nomor BA	Tanggal Bulan	Jenis Obat	Jumlah	Harga Satuan	Harga	TOTAL BA PDF	TOTAL REKAP BA RIBAH DINKES
			Vaksin Polio Oral Trivalen Drops/Isp/ V	400	19.540,00	7.816.000,00		
APBN	442/DINKES..7.2/881	21	Benzatine Penisilin 2,4 Juta/Is	10	14.900,00	839.000,00	29.310.000,00	29.310.000,00
			Paracetamole	150	187.200,00	28.080.000,00		
			Kotrimoksazol Forte Kombinasi 800 Mg/160 Mg	15	24.000,00	360.000,00		
APBN	442/DINKES.7.2/791	21	TDF (300)/3TC(300)/DTG(50)	1	104.970,00	104.970,00	24.854.970,00	24.854.970,00
			TDF (300)/3TC(300)/DTG(50)	275	90.000,00	24.750.000,00		
LAINNYA		21	TDF (300)/3TC(300)/DTG(50)	24	78.283,00	1.878.792,00	1.878.792,00	1.878.792,00
APBN	442/DINKES.7.2/871	21	Lamivudine 150 Mg	1098	93.600,00	102.772.800,00	706.103.820,00	706.103.820,00
			Lamivudine 150 Mg	329	99.000,00	32.571.000,00		
			Tenofovir 300 Mg	38	252.720,00	7.593.600,00		
			Tenofovir 300 Mg	6	252.720,00	1.516.320,00		
			Tenofovir 300 Mg	77	67.200,00	5.174.400,00		
			Tenofovir 300 Mg	167	67.200,00	11.222.400,00		
			Tenofovir 300 Mg	75	67.200,00	5.040.000,00		
			Tenofovir 300 Mg	1119	67.200,00	75.196.800,00		
			TDF (300)/3TC(300)/DTG(50)	4740	97.800,00	463.572.000,00		
			Dolutegravir 50 Mg	10	145.620,00	1.456.500,00		
APBN	442/DINKES.7.2/34G	23	Vaksin Anti Rabies	500	153.000,00	45.900.000,00	45.900.000,00	45.900.000,00
APBN	442/DINKES.7.3/22	Tidak ada tanggal	RPR Syphilis	200	2.422,00	484.400,00	51.436.400,00	51.436.400,00
			Rapid 1	5000	8.391,00	41.955.000,00		
			Rapid 2	500	11.130,00	5.565.000,00		
			Rapid 3 HIV	300	11.440,00	3.432.000,00		
APBN	442/DINKES.7.2/191	27	Mkr Kusta Mb Dewasa	5	51.858,00	259.290,00	259.290,00	259.290,00
TOTAL							**1.119.362.682,00**	**1.119.362.682,00**
JULI								
gunde tulisanny	442/DINKES.7.3/100	5 Juli	Madika Povidone 10% 300 ML	100	23.132,00	2.313.200,00	2.313.200,00	2.313.200,00
gunde tulisanny	442/DINKES.7.3/0028	5 Juli	ADS 0,05 ML	11.200	1.665,00	18.648.000,00	18.648.000,00	18.648.000,00
gunde tulisanny	442/DINKES.7.3/102	10 Juli	I-Chromic Catgut 3-0 C44	48	65.601,00	3.148.848,00	10.390.964,00	10.390.964,00
			Disposible Syringe 1 Ml	36	57.750,00	2.079.000,00		
			Kasa Steril 16x16 cm	56	7.980,00	441.336,00		
			Media Alkohol 70% 1 L	70	27.134,00	1.899.380,00		
			Plesteris m3 PE/ 5 cm x 2 m	150	18.816,00	2.822.400,00		
APBD	443/DINKES.7.2/30A	10 Juli	Amlodipine Besilate 10 Mg	25.000	72,65	1.816.250,00	20.899.326,25	20.899.326,25
			Bacitracin Polymyxin 8 Sk	125	3.506,61	438.326,25		
			Amoxycilin Tablet 500 Mg	100	59.000,00	5.900.000,00		
			Curcuma Plus Instan 60 Ml	125	11.999,00	1.499.500,00		
			Paracetamol Tablet 500 Mg	315	18.000,00	5.670.000,00		
			Ibuprofen Tablet 400 Mg	80	19.700,00	1.576.000,00		
APBN			Ciprofloksasin	16.000	250,00	4.000.000,00		
APBN	442/DINKES.7.2/48M	11 Juli	Betahistine 100 Mg	186	34.611,00	6.596.868,00	76.138.068,00	76.138.068,00
			Delaranid 50 Mg	1.500	40.100,00	60.150.000,00		
			Isoniazid 300 Mg/ml	1.000	150,00	150.000,00		
			Levofloxacin 250 Mg	23.040	405,00	9.331.200,00		

Sumber Anggaran	Nomor BA	Tanggal Bulan	Jenis Obat	Jumlah	Harga Satuan	Harga	TOTAL BA PDF	TOTAL REKAP BA HIBAH DINKES
Global Fund			Bedaquiline 100 Mg	564	23.125,00	13.042.500,00		
			Clofazimine 100 Mg	801	7.639,00	6.121.239,00		
			Cycloserine 250 Mg	700	7.697,00	5.387.900,00		
			Ethambutol Tablet 400 Mg	5.000	4.028,00	20.140.000,00		
			Ethambutol Tablet 400 Mg	4.012	525,00	2.106.300,00		
			Ethionamide 250 Mg	6.048	525,00	3.175.200,00		
			Ethionamide 250 Mg	2.400	1.502,00	3.604.800,00	65.256.564,00	65.256.564,00
			Ethionamide 250 Mg	200	1.493,00	298.600,00		
			Levofloxacin 250 Mg	2.000	486,00	972.000,00		
			Vitamin B6 100 mg	500	773,00	386.500,00		
			Vitamin B6 100 mg	5.500	736,00	4.048.000,00		
			Pyrazinamide 500 Mg	6.048	318,00	1.923.264,00		
			Linezolid 600 Mg	100	14.992,00	1.499.200,00		
			Linezolid 600 Mg	900	2.834,00	2.550.600,00		
APBN	442/DINKES.7.2/9C	12 Juli	Albendazole Tablet Kunyah 400 Mg	100	41.000,00	4.100.000,00		
			Albendazole Tablet Kunyah 400 Mg	305	41.000,00	12.505.000,00		
			Albendazole Tablet Kunyah 400 Mg	100	41.000,00	4.100.000,00		
			Albendazole Tablet Kunyah 400 Mg	100	41.000,00	4.100.000,00		
			Albendazole Tablet Kunyah 400 Mg	100	41.000,00	4.100.000,00	34.153.000,00	34.153.000,00
			Albendazole Tablet Kunyah 400 Mg	24	41.000,00	984.000,00		
			Albendazole Tablet Kunyah 400 Mg	75	41.000,00	3.075.000,00		
			Albendazole Tablet Kunyah 400 Mg	33	41.000,00	1.353.000,00		
			Albendazole Tablet Kunyah 400 Mg	1	41.000,00	41.000,00		
ganda tulisannya	442/DINKES.7.3/122	12 Juli	Catridge Xpert MTB/RIF	7.000	163.100,00	1.141.700.000,00	1.141.700.000,00	1.141.700.000,00
APBN	442/DINKES.7.2/90K	28 Juli	Polarut B.c.g (sodium Chloride Injec	500	-	-		
			Vaksin B.c.g Kertas Serbuk Injeksi 0	500	97.780,10	48.890.050,00		
			Vaksin Hepatitis B 10 Mg/Ml	1.200	28.694,63	34.433.555,00	285.180.672,00	285.180.672,00
			Vaksin Pneumococcal Conjugate Vac	150	190.657,00	28.598.550,00		
			Dropper for oral Polio Vaccine	1.000	-	-		
			Vaksin Polio Oral Trivalen Dosis/BC	1.000	24.209,00	24.209.000,00		
			Pentabio Vaksin Difili-hib (cjuhai 2.	1.500	77.366,36	116.049.540,00		
APBN	442/DINKES.7.2/107I	28 Juli	Lamivudine 150 Mg	918	99.000,00	90.882.000,00		
			NVP (200)	546	146.900,00	79.715.400,00		
			TdF300+3tc(300)+efv(600)	150	97.800,00	14.670.000,00		
			Tenofovir 300 Mg	762	67.200,00	51.206.400,00	721.316.558,00	721.316.558,00
			Zdv(300)+3tc(150)	1.404	241.800,00	339.487.200,00		
			Lopinavir 200/50 Mg	57	618.000,00	32.754.000,00		
			Lopinavir 200/50 Mg	181	623.618,00	112.874.858,00		
			Zidovudine 300 Mg	3	108.900,00	326.700,00		
Lainnya			ABC(120)/TTC(60)	6	48.548,00	291.288,00	1.128.210,00	1.128.210,00
			Efavirenz 200 Mg	6	139.487,00	836.922,00		
ganda tulisannya	442/DINKES.7.3/27	27 Juli	Rapid 1 HIV (Virochek) 1/2)	2.000	8.356,00	16.712.000,00	21.881.800,00	21.881.800,00
			RPR Syphilis (Trepacheck)	600	8.098,00	4.857.600,00		
			RPR Fokus	100	2.422,00	242.200,00		
APBN	442/DINKES.7.2/131	31 Juli	Mdr Kusta Mb Dewasa	14	50.401,00	705.614,00	705.614,00	705.614,00

Sumber Anggaran	Nomor BA	Tanggal Buka	Jenis Obat	Jumlah	Harga Satuan	Harga	TOTAL BA PDF	TOTAL REKAP BA HIBAH DINKES
TOTAL							2.366.711.976,25	2.366.711.976,25
AGUSTUS								
APBD	442/DINKES/T.2/33A	3 Agustus	Gentamisin Sulfat Salep Mata 0,3%	336	6.127,00	2.058.672,00	2.058.672,00	2.058.672,00
APBN	442/DINKES/T.2/32A	4 Agustus	Acetyl Cysteine 200 Mg	14.040	301,00	4.226.640,00		
			Acetyl Cysteine 200 Mg	39.780	337,00	13.405.860,00		
			Amox Methranat Tabel Salut Selaput	96.000	111,00	10.656.000,00	42.187.900,00	42.187.900,00
			Paracetamol Tablet 500 Mg	30.000	139,00	4.170.000,00		
			Paracetamol Tablet 500 Mg	60.000	150,00	8.940.000,00		
			Paracetamol Tablet 500 Mg	10.000	139,00	1.390.000,00		
APBN	442/DINKES/T.2/107K	4 Agustus	Vaksin Measles Rubella	1.000	152.600,00	152.600.000,00		
			Measles and Rubella (sterile amp for i	1.000	-	-		
			Vaksin HPV	4.400	161.036,04	708.558.576,00	1.348.171.076,00	1.348.171.076,00
			Vaksin Rotavirus	1.950	249.750,00	487.012.500,00		
			Dropper Vaksin Rotavirus	1.950	-	-		
Lainnya			Vaksin Jerap Di	500	34.400,00	17.200.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00
ganda Sahoenya	442/DINKES/T.3/108	4 Agustus	T-Chromic Catgut 3-0 C16	192	65.901,00	12.595.392,00		
			Kasa Steril 16x16 cm	100	7.981,00	798.100,00	14.324.292,00	14.324.292,00
			Plesteris roll PE 5 cm x 2 m	50	18.816,00	940.800,00		
ganda Sahoenya	442/DINKES/T.3/109	4 Agustus	Masker Anak	10.000	1.500,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
ganda Sahoenya	442/DINKES/T.3/0035	4 Agustus	ADS 0,5 Ml	27.200	1.165,00	31.688.000,00	41.138.000,00	41.138.000,00
			ADS 5 Ml	6.000	1.575,00	9.450.000,00		
APBN	442/DINKES/T.2/51O	7 Agustus	Vaksin Anti Rabies (Rabivet-s Vaksi	100	154.680,00	15.468.000,00	32.021.990,00	32.021.990,00
			SAR Serum Anti Rabies	10	1.653.399,00	16.533.990,00		
APBD	442/DINKES/T.2/27O	7 Agustus	Haloperidol Tablet 0,5 Mg	5	6.900,00	34.500,00	81.500,00	81.500,00
			Chlorpromazine Hcl 100 Mg	2	23.500,00	47.000,00		
APBN			Diazepam Tabel 5 Mg	41	10.800,00	442.800,00		
			Amitriptyline Tablet Salut 25 Mg	110	15.800,00	1.738.000,00		
			Haloperidol Tablet 0,5 Mg	600	5.400,00	3.240.000,00	10.756.300,00	10.756.300,00
			Risperidone 2 Mg	187	12.300,00	2.300.100,00		
			Risperidone 2 Mg	88	12.300,00	1.082.400,00		
			Trihexiphenidyl Hidroklorida Tabel 2	510	6.300,00	1.953.600,00		
APBN	442/DINKES/T.2/116K	16 Agustus	Vaksin B.c.g Kering Serbuk Injeksi 0	500	103.785,00	51.892.500,00		
			Pelarut B.c.g (sodium Chloride Injec	500	-	-		
			Pentabio Vaksin Dpthb-hib Injeksi 1	500	77.366,36	38.683.180,00		
			Vaksin Measles Rubella	800	152.600,00	122.080.000,00		
			Measles and Rubella (sterile amp for	800	-	-		
			Dropper for oral Polio Vaccine	1.200	-	-	1.186.222.198,64	1.186.222.198,64
			Vaksin Polio Oral Trivalen Drops/BC	1.200	24.209,00	29.050.800,00		
			Vaksin Jerap Di	31	16.128,00	924.128,00		
			Vaksin Jerap Di	349	18.128,00	6.326.672,00		
			Vaksin Pneumococcal Conjugate Vac	1.000	190.657,00	190.657.000,00		
			Vaksin IPV	300	158.500,25	47.550.000,00		
			Vaksin HPV	4.341	161.336,04	699.927.449,64		
APBN	442/DINKES/T.2/34D	16 Agustus	Mft Kasa Mb Dewasa	24	50.401,80	1.209.624,00	1.209.624,00	1.209.624,00
Global Fund	442/DINKES/T.2/47M	16 Agustus	Ivermectin 350 Mg /tab	1.344	400,00	537.600,00	537.600,00	537.600,00

Sumber Anggaran	Nomor BA	Tanggal Bulan	Jenis Obat	Jumlah	Harga Satuan	Harga	TOTAL BA PDF	TOTAL REKAP BA HIBAH DINKES
APBN	442/DINKES.7.2/38F	21 Agustus	Tablet Fe (Tambah Darah)	20.000	238,00	4.760.000,00	48.147.400,00	48.147.400,00
			Tablet Fe (Tambah Darah)	60.000	238,00	14.280.000,00		
			Tablet Fe (Tambah Darah)	35.000	238,00	8.330.000,00		
			Tablet Fe (Tambah Darah)	7.200	238,00	1.737.600,00		
			Tablet Fe (Tambah Darah)	80.000	238,00	19.040.000,00		
Lainnya	442/DINKES.7.2/1311	23 Agustus	TDF(300)+3tc(300)+DTG(50)	556	85.800,00	47.704.800,00	47.704.800,00	47.704.800,00
APBN	442/DINKES.7.2/24J	28 Agustus	Daclatasvir Tablet 30 Mg	196	5.500,00	1.078.000,00	22.812.720,00	22.812.720,00
			Daclatasvir Tablet 30 Mg	1.120	7.901,00	8.849.120,00		
			Daclatasvir Tablet 30 Mg	1.120	11.505,00	12.885.600,00		
TOTAL							**2.829.574.072,64**	**2.829.574.072,64**
SEPTEMBER								
APBN	442/DINKES.7.2/1451	4 September	Simetine Pentelin 2,4 Juta Iu	10	14.430,00	144.300,00	5.233.300,00	5.233.300,00
			Ketoconazol Forte Kombinasi 800 M	42	24.000,00	1.008.000,00		
			Fluconazole	10	188.900,00	1.889.000,00		
			Ketoconazol Forte Kombinasi 800 M	8	24.000,00	192.000,00		
APBN	442/DINKES.7.2/1461		Efavirenz 200 Mg	1.148	211.500,00	242.802.000,00	1.037.158.124,00	1.037.158.124,00
			Efavirenz 200 Mg	634	211.500,00	134.091.000,00		
			NVP (200)	844	144.900,00	122.295.600,00		
			NVP (200)	89	144.900,00	12.896.100,00		
			TdF300)+3tc(300)+efv(600)	1.481	97.800,00	144.841.800,00		
			Lopinavir 200/50 Mg	234	623.618,00	133.454.252,00		
			Lopinavir 200/50 Mg	54	623.618,00	33.675.372,00		
			Dolutegravir 50 Mg	23	133.200,00	3.063.600,00		
			TDF(300)+3tc(300)+DTG(50)	684	85.800,00	58.687.200,00		
			TDF(300)+3tc(300)+DTG(30)	1.764	85.800,00	151.351.200,00		
APBN	442/DINKES.7.2/64M	4 September	Ethambutol Tablet 400 Mg	3.108	507,00	1.575.756,00	2.815.056,00	2.815.056,00
			Levofloxacin 250 Mg	3.080	405,00	1.239.300,00		
Lainnya			Isoniazid 300 Mg/tab	2.000	1.527,00	3.054.000,00	18.571.184,00	18.571.184,00
			Isoniazid 300 Mg/tab	1.456	400,00	592.480,00		
			Levofloxacin 250 Mg	1.000	2.408,00	2.408.000,00		
			Rifampicin 75 Mg / Isoniazid 50 Mg	5.712	1.026,00	5.860.512,00		
			Rifampicin 300 Mg / Isoniazid 100 M	972	6.776,00	6.586.272,00		
APBN	442/DINKES.7.2/	4 September	Tuberkulin PPD RT 23 SSI	61	609.240,00	38.321.640,00	38.321.640,00	38.321.640,00
APBD	442/DINKES.7.2/7N	5 September	Oxytocin 5 Cairan Injeksi 10 Iu/Ml	8	112.600,00	900.800,00	1.641.190,00	1.645.190,00
			Metronidazole Generik 500 Ml / 100	10	3.939,00	39.390,00		
			Diazepam Tabel 5 Mg	30	1.559,00	46.770,00		
			Oxytetracycline 1% Salep Mata	25	6.082,00	152.050,00		
			Ampisilin Serbuk Injeksi 1000 Mg	30	9.434,00	283.020,00		
			Gentamicin 40 Mg/Ml Injeksi	60	3.386,00	203.160,00		
APBN			Tenofovirdisol Inj 50 Mg	15	1.700,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
APBD	442/DINKES.7.2/50F	5 September	Minimal Mix	30	120.520,00	3.609.600,00	3.609.600,00	3.609.600,00
APBN	442/DINKES.7.2/21J	5 September	Vaksin HBIG 0,5 Ml	70	1.375.000,00	96.250.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00
			Vaksin HBIG 0,5 Ml	50	1.375.000,00	68.750.000,00		
APBN	442/DINKES.7.2/130K	11 September	Vaksin B.c.g Kering Serbuk Injeksi 0	400	103.785,00	41.514.000,00		

Sumber Anggaran	Nomor BA	Tanggal Bulan	Jenis Obat	Jumlah	Harga Satuan	Harga	TOTAL BA PBF	TOTAL REKAP BA HIBAH DINKES
			Pelarut Bcg (sodium Chloride Injec	400	-	-	599.193.710,00	599.193.710,00
			Prenabio Vaksin Dipht-tet (suksi 2.	1.700	86.300,00	146.200.600,00		
			Vaksin Pneumococcal Conjugate Va	1.000	190.657,00	190.657.000,00		
			Dropper for orel Polio Vaccine	970	-	-		
			Vaksin Polio Oral Trivalen Drops/BC	970	24.209,00	23.482.730,00		
			Vaksin Hepatitis B 10 Mg/Ml	2.000	28.694,99	57.389.980,00		
			Vaksin Rotavirus	200	249.750,00	49.950.000,00		
			Dropper Vaksin Rotavirus	200	-	-		
[illegible]	442/DINKES.7.3/0055	13 September	Safety Box 5 L	1.250	18.261,00	22.826.250,00	22.826.250,00	22.826.250,00
[illegible]	442/DINKES.7.3/31	(gunis tanggalnya)	Indec HIV dan Syphilis Combo	7	437.475,00	3.062.325,00	143.076.050,00	143.076.050,00
				46	437.475,00	20.123.550,00		
				51	437.475,00	22.311.225,00		
				100	437.475,00	43.747.500,00		
				96	437.475,00	41.997.600,00		
			Rapid HIV : RAPIDAN Tester Anti I	2	572.000,00	1.144.000,00		
			Rapid HIV : Stardar Q HIV 1/2 All T	10	278.250,00	2.782.500,00		
			Rapid HIV : Vinscheck 1/2 (25)	30	209.775,00	6.293.250,00		
			Rapid Sifilis : Treponemik 25 Test	2	202.400,00	404.800,00		
			RPR Syphilis (Fiksasi	5	241.800,00	1.209.000,00		
APBN	442/DINKES.7.2/004	26 September	Milk Scents Mb Bawang	30	50.401,00	1.512.030,00	1.512.030,00	1.512.030,00
Lainnya	442/DINKES.7.2/008	26 September	Dot Anak	30	259.936,00	7.771.080,00	7.771.080,00	7.771.080,00
APBN	442/DINKES.7.2/05Q	26 September	Vaksin Anti Rabies (Rabivaxiv Vakd	200	154.880,00	30.976.000,00	30.976.000,00	30.976.000,00
APBN	442/DINKES.7.2/16E	27 September	Zinc Tablet Dispersible 20 Mg	1.300	25.300,00	32.890.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00
			Zinc Tablet Dispersible 20 Mg	501	25.300,00	12.675.300,00		
			Zinc Tablet Dispersible 20 Mg	548	25.300,00	13.864.400,00		
			Zinc Tablet Dispersible 20 Mg	51	25.300,00	1.290.300,00		
			Garam Oralit	800	280,00	224.000,00		
			Garam Oralit	200	280,00	56.000,00		
TOTAL							2.046.734.714,00	2.046.734.714,00
OKTOBER								
APBN	442/DINKES.7.2/40M	3 Oktober	Isoniazid 300 Mg /tab	200	336,00	67.200,00	4.804.000,00	4.804.000,00
			Levofloxacin 250 Mg	10.360	405,00	4.276.800,00		
			Pyrazinamide 500 Mg	2.000	230,00	460.000,00		
Global Fund			Bedaquiline 100 Mg	2.820	22.870,00	64.493.400,00	129.495.836,00	129.495.836,00
			Clofazimine 100 Mg	3.300	7.977,00	26.324.100,00		
			Cycloserine 500 Mg	6.000	4.256,00	25.536.000,00		
			Delamanid 50 Mg	592	58.733,00	7.436.736,00		
			Ethionamide 250 Mg	500	1.566,00	783.000,00		
			Isoniazid 300 Mg /tab	1.344	400,00	537.600,00		
			Linezolid 600 Mg	1.000	2.933,00	2.933.000,00		
			Vitamin B6 100 mg	2.000	726,00	1.452.000,00		
APBD	442/DINKES.7.2/49A	3 Oktober	Dulcolax (bisacodyl 10 mg)	1.800	4.325,00	7.785.000,00	16.078.640,00	16.078.640,00
			Deksametason Tablet 0,5 Mg	720	6.900,00	4.968.000,00		
			Kalsium Laktat 500	168	6.895,00	1.017.240,00		

Sumber Anggaran	Nomor BA	Tanggal Buka	Jenis Obat	Jumlah	Harga Satuan	Harga	TOTAL BA PDF	TOTAL REKAP BA HIBAH DINKES
			Chlorpheniramine Maleat 4 Mg	19.900	50,00	995.000,00		
			Diclofenac Sodium 50 Mg	17.900	109,00	1.958.400,00		
APBN			Asam Mefenamat Tabel Salut Selaput	48.900	111,00	5.328.000,00	14.224.800,00	14.224.800,00
			Acetyl Cysteine 200 Mg	26.400	337,00	8.896.800,00		
APBD	442/DINKES.7.2/50A	3 Oktober	Amlodipine Besilate 10 Mg	27.300	135,00	3.645.000,00		
			Amlodipine Besilate 10 Mg	27.300	135,00	3.645.000,00		
			Bufexamac Krim 0,1%	120	11.250,00	6.150.000,00		
			Metformin Tablet 500 Mg	16.800	211,00	3.370.000,00		
			Metformin Tablet 500 Mg	22.400	211,00	4.726.400,00		
			Alpara Kombinasi	3.960	746,00	2.987.460,00	58.748.160,00	58.748.160,00
			Cetirizine Hydrochloride 10 Mg	38.880	197,00	7.659.360,00		
			Gentamicin Sulfate Salep Mata 0,3%	600	6.127,00	3.676.200,00		
			Cavumin Plus Sirup 60 Ml	300	11.986,00	3.596.460,00		
			Simvastatin 10 Mg	1.320	3.360,00	4.435.200,00		
			Pelasvat Tablet	10.800	994,00	10.735.200,00		
			Nicotam Diklofenak 25 Mg Tablet	28.000	147,00	4.116.000,00		
APBN	442/DINKES.7.2/169	13 Oktober	TDF(300)+3tc(300)+DTG(50)	840	85.800,00	72.072.000,00		
			Tdf(300)+3tc(300)+efv(600)	480	97.900,00	46.944.000,00	302.414.040,00	302.414.040,00
			1d(300)+3tc(300)+efv(600)	735	97.900,00	71.893.040,00		
			Zdv(300)+3tc(150)	480	230.880,00	111.515.040,00		
Lainnya			Dolutegravir 50 Mg	10	69.474,00	694.740,00	849.894,00	849.894,00
			Lamivudine (3tc) / Zidovudine (zdv)	6	25.844,00	155.064,00		
APBN	442/DINKES.7.2/147K	13 Oktober	Vaksin B.c.g Kering Serbuk Injeksi 2	480	103.785,00	41.514.000,00		
			Vaksin Hepatitis B 10 Mg/Ml	1.100	28.694,99	31.564.489,00		
			Pelarut B.c.g (aseptan) (Thorde Inject	480	-	-		
			Vaksin IPV	350	172.000,00	60.200.000,00		
			Vaksin Measles Rubella	300	166.260,00	49.879.500,00		
			Measles and Rubella (measles and for i	300	-	-	364.880.775,00	364.880.775,00
			Vaksin Pneumococcal Conjugate Vac	480	190.657,00	76.262.880,00		
			Vaksin Polio Oral Trivalen Drops(bl	1.000	24.209,99	24.209.990,00		
			Dropper for oral Polio Vaccine	1.000	-	-		
			Vaksin Sirup Dt	2.500	32.500,00	81.250.000,00		
Lainnya			Vaksin Sirup Dt	500	34.400,00	17.200.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00
APBD	442/DINKES.7.2/52A	18 Oktober	Lidocain Injeksi 2%	100	890,00	89.100,00	261.780,00	261.780,00
			Lidocain Inj 2% + Epinefrin 60.000 2	120	1.439,00	172.680,00		
			Lidocain Injeksi 2%	200	854,00	170.800,00	170.800,00	170.800,00
APBN	442/DINKES.7.2/175I	18 Oktober	Kortikosteroid Forte Kombinasi 800	15	24.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
ganda tulisannya	442/DINKES.7.2/43	18 Oktober	RDT (Combo) Malaria / First Respon	8	395.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00
ganda tulisannya	442/DINKES.7.1/68	20 Oktober	Insto: HIV dan Sypilis Combo	56	427.475,00	21.873.790,00		
				50	437.475,00	21.873.750,00		
			Rapid HIV : Standar Q HIC 1/2 All S	5	278.250,00	1.391.250,00		
				5	262.500,00	1.312.500,00		
			Rapid HIV : Vivacheck HIV 1/2 (25)	56	289.775,00	-	67.107.975,00	67.107.975,00
				65	289.775,00	13.635.375,00		
			Rapid Sifilis : Vivacheck 25 Test	48	199.843,00	5.262.864,00		

Sumber Anggaran	Nomor BA	Tanggal Bukti	Jenis Obat	Jumlah	Harga Satuan	Harga	TOTAL BA PDF	TOTAL REKAP BA HIBAH DINKES
			[illegible]	2	109.643,00	219.286,00		
			RPR Sypilis (Coktan)	4	241.800,00	967.200,00		
			Rapid HIV : RAPIDAN Tester Anti-I	1	572.000,00	572.000,00		
APBN	442/DINKES.7.2/9TM	23 Oktober	Rifaimbutol Tablet 400 Mg	6.720	507,00	3.407.040,00	3.637.040,00	3.637.040,00
			Pyrazinamide 500 Mg	1.000	230,00	230.000,00		
Global Fund			Moxifloxacin 400 Mg	200	3.401,00	680.200,00	680.200,00	680.200,00
gnadi tuhiseryy	442/DINKES.7.3/169	25 Oktober	Catridge Xpert MTB/RIF XDR	60	238.800,00	14.280.000,00	14.280.000,00	14.280.000,00
gnadi tuhiseryy	442/DINKES.7.3/165	25 Oktober	Fast Clear HBsAg	4.800	5.880,00	28.224.000,00	28.224.000,00	28.224.000,00
gnadi tuhiseryy	442/DINKES.7.3/164	25 Oktober	Fast Clear HBsAg	975	5.880,00	5.733.000,00	5.733.000,00	5.733.000,00
gnadi tuhiseryy	442/DINKES.7.3/166	25 Oktober	Rapid Test Anti HCV	2.900	6.332,00	18.362.800,00	18.362.800,00	18.362.800,00
APBN	442/DINKES.7.2/10E	24 Oktober	Curam Ondit	1.800	475,00	855.000,00		
			Curam Ondit	1.800	475,00	855.000,00		
			Curam Ondit	1.800	475,00	855.000,00		
			Curam Ondit	3.600	475,00	1.710.000,00		
			Curam Ondit	1.800	475,00	855.000,00	9.975.000,00	9.975.000,00
			Curam Ondit	3.600	475,00	1.710.000,00		
			Curam Ondit	1.800	475,00	855.000,00		
			Curam Ondit	1.800	475,00	855.000,00		
			Curam Ondit	1.800	475,00	855.000,00		
			Curam Ondit	1.200	475,00	570.000,00		
TOTAL							1.061.248.654,00	1.061.248.654,00
NOVEMBER								
APBN	442/DINKES.7.2/94B	7 November	Dot Kategori	208	550.905,00	114.401.040,00		
			Dot Kategori	16	550.905,00	8.800.080,00		
			Dot Kategori	304	550.905,00	167.201.520,00		
			Dot Kategori	160	550.905,00	88.000.800,00		
			Dot Kategori	176	550.905,00	96.800.880,00	955.456.752,00	955.456.752,00
			Dot Kategori	416	550.905,00	228.992.696,00		
			Dot Kategori	240	550.905,00	132.001.200,00		
			Dot Kategori	144	550.905,00	79.200.720,00		
			Dot Kategori	16	550.905,00	8.800.080,00		
			Dot Anak	96	327.567,00	31.448.352,00		
gnadi tuhiseryy	442/DINKES.7.3/174	8 November	Tes Dahak	400	2.200,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
gnadi tuhiseryy	442/DINKES.7.3/187	9 November	Rapid Test Anti HBS	24	39.859,00	956.616,00	956.616,00	956.616,00
gnadi tuhiseryy	442/DINKES.7.3/175	9 November	Catridge Xpert MTB/RIF Ultra 10	3.000	167.000,00	501.000.000,00	501.000.000,00	501.000.000,00
gnadi tuhiseryy	442/DINKES.7.3/190	13 November	Rapid Test Anti HBS	60	3.875,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00
gnadi tuhiseryy	442/DINKES.7.3/53	13 November	Rapid Duo Sypilis (Index HIV 12 dar	40	373.884,25	14.955.370,00	46.535.289,00	46.535.289,00
			Rapid 2 Adtan Mesical One Step Ant	4	181.333,25	725.333,00		
			Rapid HIV Vitrocheck 1/2 (25)	188	164.109,50	30.852.586,00		
APBN	442/DINKES.7.2/94K	16 November	Pelarut 8 c.g (sodium Chloride Injec	200	-	-		
			Vaksin B c.g Kering Serbuk Injeksi 0	200	103.793,00	20.757.600,00		
			Vaksin Hepatitis B 10 Mg/Ml	1.998	28.694,99	57.332.790,02		
			Vaksin Hepatitis B 10 Mg/Ml	2	28.694,99	57.389,98		
			Vaksin IPV	400	172.000,00	68.800.000,00		

Sumber Anggaran	Nomor BA	Tanggal Bulan	Jenis Obat	Jumlah	Harga Satuan	Harga	TOTAL BA PDF	TOTAL REKAP BA HIBAH DINKES
			Vaksin Pneumococcal Conjugate Vac	1.250	190.657,00	238.321.250,00	819.028.220,00	819.028.220,00
			Dropper for oral Polio Vaccine	1.000	-	-		
			Vaksin Polio Oral Trivalen Drops/0C	1.000	24.209,99	24.209.990,00		
			Vaksin Inj. Dt	300	32.500,00	9.750.000,00		
			Vaksin Rotavirus	800	249.750,00	199.800.000,00		
			Dropper Vaksin Rotavirus	800	-	-		
APBN	440/DINKES.7.2/188K	27 November	Pentabio Vaksin Diphtheria-tetanus-hepatitis-b 2,	100	86.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00
APBN	440/DINKES.7.2/79O	28 November	Vaksin Anti Rabies (Rabivet-s Vaksi	150	154.880,00	23.232.000,00	23.232.000,00	23.232.000,00
APBN	440/DINKES.7.2/45O	28 November	Diazepam Tabel 5 Mg	35	10.800,00	378.000,00	1.069.550,00	1.069.550,00
			Amitriptyline Tablet Salut 25 Mg	1	15.800,00	15.800,00		
			Triheksifenidil Hidroklorida Tabel 2	95	6.300,00	598.500,00		
			Diazepam Tabel 5 Mg	5	15.450,00	77.250,00		
gunda tahunnya	440/DINKES.7.2/201	29 November	Pot Specum	50.000	2.200,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
APBN	440/DINKES.7.2/56B	30 November	Ost Anak	64	327.587,00	20.965.568,00	32.758.700,00	32.758.700,00
			Ost Anak	36	327.587,00	11.793.132,00		
TOTAL							2.299.749.637,00	2.299.749.627,00
DESEMBER								
APBN	440/DINKES.7.2/181I	4 Desember	TDF(300)+3tc(300)+efv(600)	100	97.800,00	14.670.000,00	149.934.432,00	149.934.432,00
			Lopinavir 200/50 Mg	24	823.618,00	14.990.832,00		
			TDF(300)+3tc(300)+DTG(50)	1.077	85.800,00	92.406.600,00		
			Lamivudina 150 Mg	50	93.600,00	4.680.000,00		
			Tenofovir 300 Mg	50	252.720,00	12.636.000,00		
			Efavirenz 600 Mg	50	211.500,00	10.575.000,00		
APBN	440/DINKES.7.2/470	8 Desember	Tuberkulin PPD RT 23 SSI	30	688.280,00	20.414.000,00	30.414.000,00	30.414.000,00
Global Fund	440/DINKES.7.2/85	8 Desember	Rifapentin 300 Mg / Isoniazid 300 M	1.800	6.987,00	12.576.600,00	12.576.600,00	12.576.600,00
APBN	440/DINKES.7.2/52H	8 Desember	Mdt Kotrs Mb Dewasa	50	50.401,00	2.520.050,00	2.668.850,00	2.668.850,00
			Mdt Kasia Mb Dewasa	6	24.800,00	148.800,00		
APBN	440/DINKES.7.2/183K	8 Desember	Vaksin Hepatitis B Dewasa	2.698	36.909,99	103.785.973,02	133.785.973,02	133.785.973,02
gunda tahunnya	440/DINKES.7.3/82	11 Desember	Rapid 2 (Standard 1 HIV)	1	278.250,00	834.750,00	70.341.926,00	70.341.926,00
			Rapid 3 Deteksi 1 HIV 1.2 Antibody	10	186.361,00	2.983.776,00		
			Deteksi HIV & Sypilis Combo Antib	200	374.000,00	74.800.000,00		
			RPR (Fokus)	3	241.800,00	725.400,00		
APBN	440/DINKES.7.2/189J	12 Desember	Kotrimoksazol Forte Kombinasi 800	1	24.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
APBN	440/DINKES.7.2/188J	12 Desember	ABC(120)/3TC(60)	20	48.548,00	970.960,00	3.634.960,00	3.634.960,00
			Dolutegravir 50 Mg	20	133.200,00	2.664.000,00		
Lanjutnya			DOlutegravir 10 Mg	20	69.474,00	1.389.480,00	1.586.736,00	1.586.736,00
			Zidovudina 30 Mg / 5 Ml	6	32.876,00	197.256,00		
APBD	440/DINKES.7.2/72A	19 Desember	Gentamicin Sulfate Salep Mata 0,3%	240	6.127,00	1.470.480,00	4.256.280,00	4.256.280,00
			Metformin Tablet 500 Mg	5.400	211,00	1.139.400,00		
			Nevirapin Diklofenak 25 Mg Tablet	11.250	147,00	1.646.400,00		
APBN			Acetyl Cysteine 200 Mg	15.840	337,00	5.338.080,00	5.338.080,00	5.338.080,00
TOTAL							443.657.837,02	443.657.837,02
TOTAL SEMESTER I + II							10.899.558.154,01	10.899.558.154,01

Lampiran 18

Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Milik Pemerintah Kota Pekanbaru

POKJA A								
No.	SKPD	Jumlah BMD	Belum	Dijalankan	Pending	Valid	Progress Sensus (%)	Progress Validasi (%)
1	DINAS PENDIDIKAN	644.934	642.888	1.881	165	79	0,32	0,01
2	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	14.693	14.390	231	95	27	2,45	0,19
3	DINAS SOSIAL	620	58	-	-	410	90,77	66,77
4	DINAS KETAHANAN PANGAN	699	28	3	2	665	95,99	95,99
5	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, ETCTL DAN PERINDAG.SP	502	00	-	-	502	100	100
6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.420	1	1.384	35	1.645	231,13	115,5
7	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	643	-	101	9	591	100	85,84
8	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	607	-	65	73	610	88,7	95,31
9	SEKRETARIAT DPRD	4.657	31	3.178	424	1.260	99,33	76,39
10	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.592	1.998	2.269	101	95	98,02	4,81
11	BADAN PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN	609	-	3	10	634	100	99,8
12	KECAMATAN PEKANBARU KOTA	1.721	1	-	-	1.721	100,07	100,07
13	KECAMATAN SENAPELAN	1.041	-	-	1	1.040	100	99,9
14	KECAMATAN RUMBAI BARAT	1.163	-	2	1	1.541	100,07	99,87
15	KECAMATAN TENAYAN RAYA	1.067	-	119	317	451	100	61,89
16	KECAMATAN TUAH MADANI	658	-	91	132	457	100	71,71
TOTAL		678.122	689.131	8.424	1.391	11.562	1,83	137,23
JUMLAH PROGRES SENSUS DIATAS 50%							13	
JUMLAH PROGRES SENSUS DIBAWAH 50%							3	
POKJA B								
No.	SKPD	Jumlah BMD	Belum	Dijalankan	Pending	Valid	Progress Sensus (%)	Progress Validasi (%)
1	DINAS KESEHATAN	24.181	3.132	18.559	1.050	1.027	87,11	4,25
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.621	-	824	2	795	100	49,04
3	DINAS TENAGA KERJA	666	-	-	-	667	100,21	100,21
4	DINAS PERTANAHAN	90	13	-	13	669	191,66	99,85
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	7.119	435	6.781	-	1	93,97	0,01
6	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	999	1	12	735	300	103,6	30,03
7	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	955	9	-	-	966	100,1	100,1
8	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2.027	179	1.371	78	392	91,15	19,34
9	SEKRETARIAT DAERAH	24.691	12.434	3.691	286	8.875	35,07	38,24
10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	779	-	-	-	58	192,35	848,35
11	INSPEKTORAT DAERAH	868	-	-	-	868	100	100
12	KECAMATAN SUKAJADI	1.441	58	-	-	1.383	92,08	95,98
13	KECAMATAN DAIL	388	-	-	-	388	100	100
14	KECAMATAN LIMAPULUH	533	12	-	-	521	97,75	97,75
15	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI	708	-	15	29	743	102,13	94,34
16	KECAMATAN RUMBAI	1.703	-	1	1	1.701	100,17	100,06
TOTAL		69.487	16.244	33.643	2.493	19.051	76,63	89,27
JUMLAH PROGRES SENSUS DIATAS 50%							15	
JUMLAH PROGRES SENSUS DIBAWAH 50%							1	
POKJA C								

No.	SKPD	Jumlah BMD	Belum	Diajukan	Pending	Valid	Progress Sensus (%)	Progress Validasi (%)
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.822	4.771	5.458	81	510	47,12	5,68
2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.475	123	550	315	241	92,54	14,63
3	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	3.995	128	3.801	-	64	99,79	1,6
4	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	653	2	362	87	402	99,69	61,56
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.843	18	1.700	67	1.076	99,37	37,87
6	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.449	-	101	29	1.319	100,00	91,03
7	DINAS PERHUBUNGAN	5.537	1.504	3.567	9	547	74,73	9,91
8	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.347	1	955	3	2.631	103,07	77,74
9	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.205	-	-	-	1.205	100	100
10	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.053	20	-	-	1.041	98,12	98,12
11	KECAMATAN BUKIT RAYA	1.419	8	17	9	1.390	99,44	97,96
12	KECAMATAN BINAWIDYA	1.476	-	709	10	716	100,07	48,72
13	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI	1.134	-	479	16	639	100	56,35
14	KECAMATAN KULIM	855	2	26	66	761	99,77	89,59
15	KECAMATAN RUMBAI TIMUR	483	-	3	-	480	100	99,38
16	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	394	1	34	18	676	125,59	114,14
TOTAL		36.710	6.779	15.870	720	13.712	81,54	86,04
JUMLAH PROGRES SENSUS DIATAS 50%							15	
JUMLAH PROGRES SENSUS DIBAWAH 50%							1	

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,

ttd.

RISNANDAR MAHIWA

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

INDRA POMI NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 NOMOR 3
No.REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU.
NOMOR URUT PERDA (1.38.A/2024)

LAMPIRAN VIII

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SKPD	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Piutang Pajak Hotel	608.082.714,00	-	334.912.728,00	273.169.986,00
		Piutang Pajak Restoran	3.665.704.378,00	2.229.987.247,00	-	5.895.691.625,00
		Piutang Pajak Hiburan	181.257.912,00	-	167.860.262,00	13.397.650,00
		Piutang Pajak Reklame	7.995.638.671,00	681.700.713,00	-	8.677.339.384,00
		Piutang Pajak Penerangan Jalan	15.394.950,00	433.119,00	-	15.828.069,00
		Piutang Pajak Air Tanah	539.146.524,00	68.481.969,00	-	607.628.493,00
		Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	589.492.353.858,00	116.705.918.195,00	-	706.198.272.053,00
		Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.498.668.683,00	(2.652.642.694,00)	-	2.846.025.989,00
		Piutang Pajak Daerah	**607.996.247.690,00**	**117.033.878.549,00**	**502.772.990,00**	**724.527.353.249,00**
		Piutang Retribusi Jasa Umum				
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Piutang Retribusi Kios	170.150.500,00	16.661.000,00	-	186.811.500,00
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	27.498.620,00	-	-	27.498.620,00
	DINAS PERHUBUNGAN	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Me	1.331.464,00	-	-	1.331.464,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Me	19.036.875,00	654.761.250,00	-	673.798.125,00
		Piutang Retribusi Jasa Usaha				
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	-	172.252.980,00	-	172.252.980,00
	DINAS PERHUBUNGAN	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Pa	73.245.253,00	-		73.245.253,00
	DINAS PERHUBUNGAN	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.850.000.000,00	-	-	1.850.000.000,00
	PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan	1.187.385.960,00	-	-	1.187.385.960,00

NO	SKPD	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	529.327.980,00	-	-	529.327.980,00
		Piutang Retribusi Perizinan Tertentu				
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.773.607.360,00	-	-	1.773.607.360,00
		Piutang Retribusi Daerah	**5.631.584.012,00**	**843.675.230,00**	-	**6.475.259.242,00**
		Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan				
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah	7.184.304.382,00	-	108.002.893,00	7.076.301.489,00
		Piutang Jasa Giro				
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara	15.000,00	-	-	15.000,00
		Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir				
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	6.176.245,70	628.357.179,00	-	634.533.424,70
		Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah				
	DINAS PERHUBUNGAN	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.180.249.874,00	-	-	1.180.249.874,00
	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	32.770.159,00	35.521.327,00	-	68.291.486,00
		Piutang Pendapatan dari Pengembalian				
	SEKRETARIAT DPRD	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	808.756.000,00	-	-	808.756.000,00
		Piutang Pendapatan BLUD				
	DINAS KESEHATAN	Piutang Pendapatan BLUD	513.886.600,00	-	493.930.800,00	19.955.800,00
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	**9.726.158.260,70**	**663.878.506,00**	**601.933.693,00**	**9.788.103.073,70**
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Piutang Dana Perimbangan	-	120.000,00	-	120.000,00
		Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	**120.000,00**	-	**120.000,00**
		Piutang Bagi Hasil				

NO	SKPD	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	9.207.480.467,00	11.023.536.682,00	-	20.231.017.149,00
		Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Ber	5.761.952.725,00	396.034.638,00	-	6.157.987.363,00
		Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan BakarKendaraan Be	8.960.605.825,00	-	38.978.137,00	8.921.627.688,00
		Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	107.576.263,00	-	6.123.939,00	101.452.324,00
		Piutang Transfer Antar Daerah	**24.037.615.280,00**	**11.419.571.320,00**	**45.102.076,00**	**35.412.084.524,00**
		Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah				
	SEKRETARIAT DPRD	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	616.277.716,00	1.072.555.425,25	-	1.688.833.141,25
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	170.888.808,00	-	2.000.000,00	168.888.808,00
		Piutang Lainnya	**787.166.524,00**	**1.072.555.425,25**	**2.000.000,00**	**1.857.721.949,25**
		TOTAL PIUTANG DAERAH	**648.178.771.766,70**	**131.033.679.030,25**	**1.151.808.759,00**	**778.060.642.037,95**

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,

ttd.

RISNANDAR MAHIWA

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

INDRA POMI NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 NOMOR 3

No.REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU,
NOMOR URUT PERDA (1.38.A/2024)

LAMPIRAN IX

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor : 3 Tahun 2024
Tanggal : 27 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH	KET
1	Piutang Pajak Daerah	724.527.353.249,00	(396.052.506.950,00)	1.120.579.860.199,00	
2	Piutang Retribusi Daerah	6.475.259.242,00	(5.558.632.569,63)	12.033.891.811,63	
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	9.788.103.073,70	(2.011.922.738,14)	11.800.025.811,84	
4	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	120.000,00	-	120.000,00	
5	Piutang Transfer Antar Daerah	35.412.084.524,00	-	35.412.084.524,00	
6	Pitang Lainnya	1.857.721.949,25	(232.516.580,00)	2.090.238.529,25	
7	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	
8	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	
9	Bagian Lancar Tagihan Kemitraan	-	-	-	
10	Piutang Lain-lain	-	-	-	
	TOTAL PIUTANG DAERAH	**778.060.642.037,95**	**(403.855.578.837,77)**	**1.181.916.220.875,72**	

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,

ttd.

RISNANDAR MAHIWA

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

INDRA POMI NASUTION
LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 NOMOR 3

No.REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU,
NOMOR URUT PERDA (1.38.A/2024)

LAMPIRAN X

Lampiran X : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor : 3 Tahun 2024
Tanggal : 27 Agustus 2024

KOTA PEKANBARU
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR
DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
	N I H I L			

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,

ttd.

RISNANDAR MAHIWA

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

INDRA POMI NASUTION
LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 NOMOR 3

No.REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU,
NOMOR URUT PERDA (1.38.A/2024)

LAMPIRAN XI

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor : 3 Tahun 2024
Tanggal : 27 Agustus 2024

KOTA PEKANBARU
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama/Badan/Lembaga/Pihak/ Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal Yang Telah Disetakan Sampai Dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Disetakan Sampai Dengan Akhir Tahun Ini	Sisa Modal Yang Belum Disetakan	Hasil Penyertaan Modal Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Diterima Kembali Tahun ini	Jumlah Sisa Modal Yang Disetakan Sampai Dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2022	PDAM Tirta Siak	Perda No 5 Tahun 2022	Uang dan Non Kas	168.581.276.100	168.581.276.100	10.000.000.000	168.581.276.100	-	-	-	-

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,

ttd.

RISNANDAR MAHIWA

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

INDRA POMI NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 NOMOR 3

No.REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU,
NOMOR URUT PERDA (1.38.A/2024)

LAMPIRAN XII

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor : 3 Tahun 2024
Tanggal : 27 Agustus 2024

KOTA PEKANBARU
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Dinas Pendidikan	1.033.926.496.138,46	71.545.716.753,54	-	1.105.472.212.892,00
2	Dinas Kesehatan	380.534.641.781,75	-	47.704.513,59	380.506.937.268,16
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.794.721.817.805,93	-	84.085.911.343,22	3.710.635.906.462,71
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	612.668.481.980,00	44.029.620.120,00	-	656.698.102.100,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.460.890.662,00	868.215.918,00	-	2.329.106.580,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.390.339.139,00	-	254.372.618,00	4.135.966.521,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	17.271.633.584,00	1.924.173.127,00	-	19.195.806.711,00
8	Dinas Sosial	2.731.241.149,00	-	137.398.971,00	2.593.842.178,00
9	Dinas Tenaga Kerja	1.872.048.213,00	-	112.279.463,00	1.759.768.750,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.864.383.973,00	702.224.558,00	-	2.566.608.531,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	9.188.364.766,00	712.457.111,00	-	9.900.821.877,00
12	Dinas Pertanahan	62.704.294.776,00	886.511.855,00	-	63.590.806.631,00
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	184.515.934.170,00	-	6.950.449.052,00	177.565.485.118,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.852.020.851,00	1.311.463.095,00	-	6.163.483.946,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.569.306.181,00	544.965.193,00	-	8.114.271.374,00
16	Dinas Perhubungan	130.706.158.582,44	8.375.232.155,00	-	139.081.390.737,44
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.341.391.111,00	185.681.905,23	-	2.527.073.016,23
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	858.112.497,00	699.834.163,00	-	1.557.946.660,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu	105.737.509.809,00	-	35.792.147.056,00	69.945.362.753,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	38.723.528.988,00	3.212.257.994,00	-	41.935.786.982,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16.823.117.252,13	-	112.816.465,13	16.710.300.787,00
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	16.582.431.314,00	1.216.684.817,00	-	17.799.116.131,00
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	67.823.321.097,00	-	258.545.268,00	67.564.775.829,00
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	348.529.667.468,00	793.429.683,00	-	349.323.097.151,00
25	Sekretariat Daerah	356.495.499.343,00	-	6.164.178.013,00	350.331.321.330,00
26	Sekretariat DPRD	71.427.821.191,00	-	539.415.535,43	70.888.405.655,57
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.487.588.710,00	-	249.654.024,00	2.237.934.726,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	509.070.950.037,90	8.168.686.635,10	-	517.239.636.693,00
29	Badan Pendapatan Daerah	212.540.654.968,00	140.900.889.029,50	-	353.501.543.997,50
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.048.839.837,00	-	115.232.071,00	1.933.607.766,00
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	453.749.135,00	616.354.164,00	-	1.070.103.299,00
32	Inspektorat	738.918.326,00	438.586.155,00	-	1.177.504.481,00
33	Kecamatan Bukitraya	10.532.622.213,00	889.197.166,00	-	11.421.819.379,00
34	Kecamatan Tenayan Raya	9.622.489.590,00	-	369.377.266,00	9.253.112.324,00
35	Kecamatan Sail	9.970.894.518,00	-	152.427.485,00	9.818.467.033,00
36	Kecamatan Lima Puluh	20.328.273.324,00	65.558.354,00	-	20.393.831.678,00
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	12.077.364.082,00	-	1.281.473.857,00	10.795.890.225,00
38	Kecamatan Sukajadi	13.339.398.413,00	-	119.373.090,00	13.220.025.323,00
39	Kecamatan Payung Sekaki	9.603.777.515,00	-	309.347.271,00	9.294.430.244,00
40	Kecamatan Senapelan	11.057.955.591,00	-	157.828.247,00	10.900.127.344,00
41	Kecamatan Marpoyan Damai	13.987.309.998,00	-	51.159.515,00	13.936.150.483,00
42	Kecamatan Binawidya	7.423.801.286,00	6.270.122.456,00	-	13.693.923.742,00
43	Kecamatan Tuah Madani	3.537.092.833,00	-	329.908.319,00	3.207.184.514,00
44	Kecamatan Rumbai	8.455.844.429,00	56.349.331,00	-	8.512.193.760,00
45	Kecamatan Rumbai Timur	1.835.017.662,00	-	90.413.029,00	1.744.604.633,00
46	Kecamatan Rumbai Barat	8.236.353.462,00	50.430.442,00	-	8.286.783.904,00
47	Kecamatan Kulim	2.913.479.770,00	-	404.109.453,00	2.509.370.317,00
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.272.013.933,00	845.276.192,00	-	2.117.290.125,00
	TOTAL	8.147.874.843.515,61	295.369.918.372,37	138.085.521.925,37	8.305.159.239.962,61

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,

ttd.

RISNANDAR MAHIWA

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

INDRA POMI NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 NOMOR 3

No.REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU,
NOMOR URUT PERDA (1.38.A/2024)

LAMPIRAN XIII

Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor : 3 Tahun 2024
Tanggal : 27 Agustus 2024

KOTA PEKANBARU
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	3.269.570.505.323,00	40.583.831.500,00	-	3.310.154.336.823,00
2	Peralatan dan Mesin	1.181.022.827.786,77	78.742.019.117,23	-	1.259.764.846.904,00
3	Gedung dan Bangunan	2.289.220.632.261,13	23.028.813.221,30	-	2.312.249.445.482,43
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.649.133.348.810,19	135.597.828.418,81	-	4.784.731.177.229,00
5	Aset Tetap Lainnya	56.630.835.923,00	479.407.061,00	-	57.110.242.984,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	328.958.019.153,52	1.066.854.908,48	-	330.024.874.062,00
7	Akumulasi Penyusutan	- 4.695.334.465.429,00	-	337.732.531.238,00	- 5.033.066.996.667,00
Total		**7.079.201.703.828,61**	**279.498.754.226,82**	**337.732.531.238,00**	**7.020.967.926.817,43**

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,

ttd.

RISNANDAR MAHIWA

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

INDRA POMI NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 NOMOR 3

No.REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU,
NOMOR URUT PERDA (1.38.A/2024)

LAMPIRAN XIV

Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor : 5 Tahun 2024
Tanggal : 27 Agustus 2024

KOTA PEKANBARU
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI										REKLASIFIKASI/ PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
			BERTAMBAH					BERKURANG						
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	TANAH	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	TANAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	22.511.099.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.511.099.493,00	0,00	0,00	0,00	22.511.099.493,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	640.092.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.530.017,00	0,00	0,00	0,00	129.530.017,00	510.562.972,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	293.125.476.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.125.476.253,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.696.412.000,00	0,00	0,00	4.594.279.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332.466.120,00	0,00	0,00	4.332.466.120,00	3.958.225.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11.949.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.949.300,00
8	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	244.884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.884.000,00
12	Dinas Pertanahan	13.784.622.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.811.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.554.433.664,00
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.926.795.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926.795.658,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Perhubungan	1.173.690.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.690.500,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	84.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.216.000,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	99.361.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.361.650,00	0,00	0,00	0,00	99.361.650,00	0,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	11.781.374.453,00	0,00	338.532.000,00	0,00	0,00	272.546.000,00	0,00	338.532.000,00	0,00	0,00	0,00	338.532.000,00	12.053.920.453,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	84.216.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.216.820,00
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.954.111.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954.111.621,00
25	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	148.666.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.666.600,00	0,00	0,00	0,00	148.666.600,00	0,00
26	Sekretariat DPRD	124.679.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.679.921,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Badan Pendapatan Daerah	246.142.500,00	0,00	39.837.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.673.500,00	0,00	0,00	0,00	147.673.500,00	138.306.900,00

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI										REKLASIFIKASI/ PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
			SERTAMBAH					BERKURANG						
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	TANAH	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	TANAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Bukit Raya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Tenayan Raya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Sail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Limapuluh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Sukajadi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Payung Sekaki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Kecamatan Senapelan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kecamatan Marpoyan Damai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Kecamatan Binawidya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Kecamatan Tuah Madani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Kecamatan Rumbai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Kecamatan Rumbai Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Kecamatan Rumbai Barat	98.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.835.000,00
47	Kecamatan Kulim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	328.858.019.154,00	0,00	23.137.497.643,00	4.594.279.120,00	0,00	1.042.357.525,00	0,00	23.374.813.260,00	4.332.466.120,00	0,00	0,00	27.707.379.380,00	330.024.874.062,00

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,

ttd.

RISNANDAR MAHIWA

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

INDRA POMI NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 NOMOR 3
No.REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU,
NOMOR URUT PERDA (1.38.A/2024)

LAMPIRAN XV

Lampiran XV : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor : 3 Tahun 2024
Tanggal : 27 Agustus 2024

KOTA PEKANBARU
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2023

No	SKPD	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	**Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain**				
	Dinas Pendidikan	181.996.513,46	-	181.996.513,46	-
	Sekretariat DPRD	1.823.833.129,00	-	1.302.555.425,25	521.277.713,75
	BPKAD	83.074.630,00	-	23.250.230,00	59.824.400,30
2	**Kerja Sama Pemanfaatan**				
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	22.243.016.700,00	-	22.243.016.700,00
3	**Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)**				
	Dinas Perindustrian Perdagangan	154.659.645.032,00	-	-	154.659.645.032,00
4	**Aset Tidak Berwujud**				
	Dinas Pendidikan	291.807.000,00	-	-	291.807.000,00
	Dinas Kesehatan	837.456.007,00	48.840.000,00	-	886.296.007,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.312.164.387,00	-	-	11.312.164.387,00
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.100.395.425,00	299.966.000,00	149.983.000,00	1.250.378.425,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	177.650.000,00	-	-	177.650.000,00
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	88.640.000,00	-	-	88.640.000,00
	Dinas Sosial	10.027.453,00	-	-	10.027.453,00
	Dinas Tenaga Kerja	162.802.500,00	-	-	162.802.500,00
	Dinas Ketahanan Pangan	79.987.000,00	30.000.000,00	-	109.987.000,00
	Dinas Perhubungan	488.353.750,00	128.676.750,00	-	617.530.500,00
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	582.508.217,00	-	-	582.508.217,00
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50.254.500,00	-	-	50.254.500,00
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	48.400.000,00	-	-	48.400.000,00
	Dinas Perhubungan	1.094.507.150,00	99.032.000,00	-	1.193.619.850,00
	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.320.184.010,00	-	-	1.320.184.010,00
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	98.077.000,00	-	-	98.077.000,00
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu	436.192.000,00	20.292.000,00	271.259.000,00	185.225.000,00
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	153.744.182,00	99.578.000,00	-	253.322.482,00
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	39.160.000,00	-	-	39.160.000,00
	Dinas Perkoran dan Perikanan	288.200.000,00	-	-	288.200.000,00
	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	667.253.567,00	397.939.660,00	397.939.660,00	667.253.567,00
	Sekretariat Daerah	79.469.000,00	-	-	79.469.000,00
	Sekretariat DPRD	1.047.805.000,00	648.461.000,00	-	1.696.266.000,00
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.239.072.689,00	-	-	1.239.072.689,00
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	403.693.700,00	97.680.000,00	-	501.373.700,00
	Badan Pendapatan Daerah	606.693.500,00	250.000.000,00	-	856.693.500,00
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	681.664.248,00	586.600.000,00	342.200.000,00	928.064.248,00
	Badan Penelitian dan Pengembangan	29.260.000,00	-	-	29.260.000,00
	Inspektorat	184.908.276,00	148.740.000,00	74.370.000,00	259.278.276,00
	Kecamatan Bukitraya	74.526.800,00	-	-	74.526.800,00
	Kecamatan Tenayan Raya	143.321.216,00	-	-	143.321.216,00
	Kecamatan Lima Puluh	21.096.792,00	-	-	21.096.792,00
	Kecamatan Payung Sekaki	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
	Kecamatan Senapelan	143.660.024,00	-	-	143.660.024,00
	Kecamatan Marpoyan Damai	47.817.200,00	-	-	47.817.200,00
	Kecamatan Binawidya	96.792.756,00	-	-	96.792.756,00
	Kecamatan Rumbai Barat	33.721.614,00	-	-	33.721.614,00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30.000.000,00	99.600.000,00	49.800.000,00	79.800.000,00
5	**Aset Lain-lain**				
	Dinas Pendidikan	152.674.194.832,00	10,00	-	152.674.194.842,00
	Dinas Kesehatan	12.157.056.329,00	438.212.267,00	438.212.174,00	12.157.056.362,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.073.964.311,00	1,00	-	2.073.964.312,00
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	16.380.212.465,00	-	-	16.380.212.465,00
	Satuan Polisi Pamong Praja	755.344.581,00	-	-	755.344.581,00
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.746.759.540,00	5,00	-	1.746.759.545,00
	Dinas Sosial	426.042.322,00	-	-	426.042.322,00
	Dinas Ketahanan Pangan	91.199.000,00	-	-	91.199.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	24.853.398.657,00	-	-	24.853.398.657,00
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.946.314.509,00	81,00	-	2.946.314.590,00
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.296.672.374,00	-	-	1.296.672.374,00
	Dinas Perhubungan	2.082.675.245,00	-	12,00	2.082.675.233,00
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	540.124.542,00	-	-	540.124.542,00
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu	39.514.384,00	-	-	39.514.384,00
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	45.105.642,00	-	2,00	45.105.640,00
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	350.417.095,00	-	-	350.417.095,00
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	760.776.589,00	-	-	760.776.589,00
	Dinas Perkoran dan Perikanan	232.020.275,00	-	-	232.020.275,00
	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10.873.111.343,00	-	1,00	10.873.111.342,00
	Sekretariat Daerah	65.012.821.692,00	-	1.691.909.187,00	63.320.912.505,00
	Sekretariat DPRD	1.569.653.780,00	-	3,00	1.569.653.777,00
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.462.709.728,00	-	4.478.167,00	1.458.231.561,00
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.247.125.527,00	-	9.021.956,00	5.238.103.571,00
	Badan Pendapatan Daerah	5.008.635.500,00	844,00	-	5.008.636.344,00
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	166.521.981,00	30,00	-	166.522.011,00
	Inspektorat	303.046.519,00	-	-	303.046.519,00
	Kecamatan Bukitraya	166.470.584,00	-	-	166.470.584,00
	Kecamatan Tenayan Raya	420.869.743,00	-	-	420.869.743,00
	Kecamatan Sail	590.702.378,00	-	-	590.702.378,00
	Kecamatan Lima Puluh	375.345.200,00	-	-	375.345.200,00
	Kecamatan Pekanbaru Kota	613.670.814,00	-	-	613.670.814,00
	Kecamatan Sukajadi	594.460.694,00	-	-	594.460.694,00
	Kecamatan Payung Sekaki	802.104.075,00	-	-	802.104.075,00
	Kecamatan Senapelan	292.091.450,00	-	-	292.091.450,00
	Kecamatan Marpoyan Damai	8.618.000,00	-	-	8.618.000,00
	Kecamatan Binawidya	279.701.640,00	-	6.005.000,00	273.696.640,00
	Kecamatan Rumbai	399.891.668,00	-	-	399.891.668,00
	Kecamatan Rumbai Barat	232.536.000,00	-	-	232.536.000,00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	760.744.106,00	-	-	760.744.106,00
6	**Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**				
	Dinas Pendidikan	- 159.717.500,00	-	49.070.500,00	- 208.788.000,00

No	SKPD	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
	Dinas Kesehatan	543.617.590,00	-	155.342.900,00	698.959.590,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.350.976.421,00	-	1.025.186.504,00	10.376.162.925,00
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	829.870.265,00	-	264.785.514,00	1.094.655.779,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	92.526.042,00	-	44.412.500,00	136.938.542,00
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	61.110.625,00	-	9.716.250,00	70.826.875,00
	Dinas Sosial	10.027.453,00	-	-	10.027.453,00
	Dinas Tenaga Kerja	162.802.500,00	-	-	162.802.500,00
	Dinas Ketahanan Pangan	34.468.759,00	-	21.369.964,00	55.838.723,00
	Dinas Pertanahan	488.853.750,00	-	28.087.625,00	516.941.375,00
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	295.579.660,00	-	117.627.486,00	413.207.146,00
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50.256.500,00	-	-	50.256.500,00
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	48.400.000,00	-	-	48.400.000,00
	Dinas Perhubungan	777.150.760,00	1,00	178.534.545,00	955.685.304,00
	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.320.184.010,00	-	-	1.320.184.010,00
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	98.077.000,00	-	-	98.077.000,00
	Perpustakaan	340.854.084,00	203.599.834,00	28.524.250,00	165.778.500,00
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	122.312.651,00	-	29.830.181,00	152.142.832,00
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	39.160.000,00	-	-	39.160.000,00
	Dinas Pertanian dan Perikanan	288.200.000,00	-	-	288.200.000,00
	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	667.253.567,00	-	-	667.253.567,00
	Sekretariat Daerah	53.964.438,00	-	7.464.750,00	61.429.188,00
	Sekretariat DPRD	428.319.146,00	-	346.980.430,00	775.299.576,00
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.204.957.792,00	-	34.114.897,00	1.239.072.689,00
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	245.335.884,00	-	69.020.317,00	314.356.201,00
	Badan Pendapatan Daerah	595.473.500,00	-	24.793.333,00	620.266.833,00
	Kepegawaian	452.793.176,00	-	124.367.103,00	577.160.279,00
	Badan Penelitian dan Pengembangan	29.260.000,00	-	-	29.260.000,00
	Inspektorat	179.015.986,00	-	10.540.415,00	189.556.401,00
	Kecamatan Bukitraya	74.526.800,00	-	-	74.526.800,00
	Kecamatan Tenayan Raya	143.321.216,00	-	-	143.321.216,00
	Kecamatan Lima Puluh	21.096.792,00	-	-	21.096.792,00
	Kecamatan Payung Sekaki	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
	Kecamatan Senapelan	99.861.680,00	-	23.890.006,00	123.751.686,00
	Kecamatan Marpoyan Damai	47.817.200,00	-	-	47.817.200,00
	Kecamatan Binawidya	96.792.756,00	-	-	96.792.756,00
	Kecamatan Rumbai Barat	31.588.280,00	-	2.133.334,00	33.721.614,00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.250.000,00	-	16.837.500,00	18.087.500,00
7	**Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)**				
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	25.465.860.836,00	57.012.943.000,00	25.465.260.836,00	57.012.943.000,00
	Total	**501.549.129.445,46**	**82.853.158.123,00**	**33.021.470.970,71**	**551.388.816.597,75**

PJ. WALI KOTA PEKANBARU,

ttd.

RISNANDAR MAHIWA

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

INDRA POMI NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 NOMOR 3

No.REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU,
NOMOR URUT PERDA (1.38.A/2024)

LAMPIRAN XVI

Lampiran XVI : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor : 3 Tahun 2024
Tanggal : 27 Agustus 2024

KOTA PEKANBARU
DAFTAR DANA CADANGAN
PER 31 DESEMBER 2023

No	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembuatan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer Dari Kas Daerah	Transfer ke Kas Daerah	Saldo Akhir	Sisa Dana yang Belum Dicadangkan
			N	I H	I L			

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,

ttd.

RISNANDAR MAHIWA

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

INDRA POMI NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 NOMOR 3

No.REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU,
NOMOR URUT PERDA (1.38.A/2024)

LAMPIRAN XVII

Lampiran XVII : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor : 3 Tahun 2024
Tanggal : 27 Agustus 2024

KOTA PEKANBARU
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2023

No	URAIAN	SALDO AWAL	TAMBAH	KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6
1	**Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**	**587.209.984,00**	-	**387.013.303,20**	**200.196.680,80**
	Utang PPh Pusat	78.012.992,00	-	14.111.267,86	63.901.724,14
	Utang PPN Pusat	509.196.992,00	-	372.902.035,34	136.294.956,66
2	**Pendapatan Diterima Dimuka**	**8.350.000,00**	**107.001.927,50**	-	**115.351.927,50**
	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	8.350.000,00	107.001.927,50	-	115.351.927,50
3	**Utang Belanja**	**185.341.897.229,65**	-	**21.843.464.865,02**	**163.468.432.364,63**
	Utang Belanja Pegawai	17.401.565.949,00	-	-	17.401.565.949,00
	Utang Belanja Barang dan Jasa	123.801.254.647,71	-	12.769.182.255,00	111.032.072.392,71
	Utang Belanja Subsidi	4.417.749.812,00	-	966.314.147,00	3.451.435.665,00
	Utang Belanja Modal Tanah	1.164.080.000,00	-	-	1.164.080.000,00
	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.286.764.965,00	-	802.879.800,00	1.483.885.165,00
	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.046.579.154,00	-	-	1.046.579.154,00
	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.193.902.701,94	-	7.305.088.663,02	27.888.814.038,92
	Utang Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	30.000.000,00	-	-	-
4	**Utang Jangka Pendek Lainnya**	**30.405.510,00**	-	**23.206.010,00**	**7.199.500,00**
	Utang Kelebihan Pembayaran PAD	30.405.510,00	-	23.206.010,00	7.199.500,00
	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	-	-	-	-
Total		**185.967.862.723,65**	**107.001.927,50**	**22.253.684.178,22**	**163.791.180.472,93**

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,

ttd.

RISNANDAR MAHIWA

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

INDRA POMI NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 NOMOR 3
No.REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU,
NOMOR URUT PERDA (1.38.A/2024)

LAMPIRAN XVIII

Lampiran XVIII : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor : 3 Tahun 2024
Tanggal : 27 Agustus 2024

KOTA PEKANBARU
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2023

No	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
		N I H I L			
Total		-	-	-	-

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,

ttd.

RISNANDAR MAHIWA

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

INDRA POMI NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 NOMOR 3

No.REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU,
NOMOR URUT PERDA (1.38.A/2024)

LAMPIRAN XIX

Lampiran XIX : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor : 3 Tahun 2024
Tanggal : 27 Agustus 2024

KOTA PEKANBARU

DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

No	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	MUTASI			%	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	0
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
	1.01.03.1.01.03.01.34.03	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Luar Trase 1 (Jalan Badak - Lintas Timur) (Multiyears)	28.410.701.551,83	25.408.803.992,99	3.001.897.558,84	10,57	27.083.097.010,19	002/KONT-MY/BM-DPUPR/XII/2018
	1.01.03.1.01.03.01.15.12.	Lanjutan JL. OUTERING ROAD UTARA JEMBATAN SIAK V - AKSES TOL PEKANBARU - DUMAI (MULTIYEARS)	51.938.714.342,19	42.443.708.405,19	9.495.005.937,00	18,28	57.170.589.605,23	001/KONT-MY/BM-DPUPR/VII/2018
Total			80.349.415.894,02	67.852.512.398,18	12.496.903.495,84			

PJ. WALI KOTA PEKANBARU,

ttd.

RISNANDAR MAHIWA

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

INDRA POMI NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 NOMOR 3

No.REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU,
NOMOR URUT PERDA (1.38.A/2024)

LAMPIRAN XX

LAMPIRAN XX.1

Lampiran XX.1 : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor : 3 Tahun 2024
Tanggal : 27 Agustus 2024

KOTA PEKANBARU

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No.	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Gambar (c)	Status (d)	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5+6+7	9	10	11 = 9+10	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17x18
1	Bidang Perbankan																	
	1. PT. Bank Riau Kepri																	
	2. PT. BPR Pekanbaru			21.181.245.503,00	21.237.592.072,00	1.161.721.471,00	144.180.807.195,00	106.229.621,00	114.802.977.796,00	115.286.217.217,00	8.000.000.000	-	910.489.852,00	-		8.910.590.852,00	99,99%	8.909.690.870,00
	Sub Total (1)																	
2	Bidang Transportasi																	
	1. PT. Riau Air Lines																	
	2. PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru			6.807.105.190,00	24.745.053.053,00	-	337.647.144.561,00	1.647.590.567,00	-	1.647.590.567,00	145.595.966.877,00	2.000.000.000,00	6.878.826.851,00	4.805.113,00	-	131.552.443.537,00	99,97%	131.512.430.397,39
	Sub Total (2)																	
3	Bidang Air Bersih																	
	1. PDAM Tirta Siak			34.280.440.471,00	33.809.371.762,00	-	40.090.402.233,00	42.767.953.149	-	42.767.953.149,00	148.662.775.324,00	10.718.436.841,00	141.984.214.912,00	10.715.968,00	0	22.312.727.085,00	100%	22.312.727.085,00
	Sub Total (3)																	
4	Bidang Perdagangan																	
	1. PT. Bumi Siak Pusako																	
	Sub Total (4)																	
	Total Seluruh Bidang Industri			**64.678.613.159,00**	**276.908.708.930,00**	**1.161.721.471,00**	**342.920.453.735,00**	**44.703.975.337,00**	**114.802.977.796,00**	**159.784.953.133,00**	**302.458.846.236,00**	**21.700.996.841,00**	**151.223.601.261,00**	**221.515.059,00**	-	**163.135.760.975,00**		**163.096.876.316,77**

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,

ttd.

RISNANDAR MAHIWA

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

INDRA POMI NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 NOMOR 3
No.REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU,
NOMOR URUT PERDA (1.38.A/2024)

LAMPIRAN XX.2

Lampiran XXI.2 : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor : 3 Tahun 2024
Tanggal : 27 Agustus 2024

KOTA PEKANBARU

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

NO	BUMD/Perusahaan Daerah: Tahun		Nomor a)	Paraf b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di luar usaha	Beban di luar usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bidang Perbankan									
	1. PT. Bank Riau Kepri									
	2. PT. BPR Pekanbaru				17.997.430.590,00	16.073.727.840,00	1.923.722.669,00	2.168.000	298.123.999	1.627.759.669,00
	Sub Total (1)	Sub Total (1)								
2	Bidang Transportasi									
	1. PT. Riau Air Lines									
	2. PT. Sarana Pembangunan				2.043.758.462,00	8.501.978.981,00	1.542.220.519,00	-	-	1.542.220.519,00
	Sub Total (2)	Sub Total (2)								
3	Bidang Air Bersih									
	1. PDAM Tirta Siak				24.955.681.728,00	42.896.184.367,00	18.080.502.639,00	118.109,00	1.022.502,00	18.081.208.652,00
	Sub Total (3)									
4	Bidang Pertanyakan									
	1. PT. Bumi Siak Pusako									
	Sub Total (4)	Sub Total (3)								
				Total Seluruh	45.837.869.696,00	63.471.891.188,00	17.518.801.492,00	2.270.109,00	299.146.493,00	17.935.649.992,00

PJ. WALI KOTA PEKANBARU,

ttd.

RISNANDAR MAHIWA

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

INDRA POMI NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 NOMOR 3
No.REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU,
NOMOR URUT PERDA (1.38.A/2024)